

**BUMN**  
*Hadir untuk negeri*



**PLN**



# Inspiring Journey of **TRANSFORMATION**

Laporan Tahunan **2017** Annual Report



[www.pln.co.id](http://www.pln.co.id)



@pln\_123



PLN 123



@plnkita



PT PLN (Persero)



Inspiring Journey  
of **TRANSFORMATION**

**PADA TAHUN 2017, PLN MEMASUKI PERJALANAN TRANSFORMASI BISNIS PERUSAHAAN DI TENGAH TERPAAN BADAI TANTANGAN BISNIS YANG DAPAT MEMPERLAMBAT LAJU BISNIS. MESKIPUN BEGITU, PLN TETAP KOKOH MELEWATI ITU SEMUA DENGAN MEMBERIKAN SUMBANGSIH TERBAIK BAGI INDONESIA. OLEH KARENA ITULAH, TEMA LAPORAN TAHUNAN PLN 2017 ADALAH *INSPIRING JOURNEY OF TRANSFORMATION*. TEMA INI MEMPERLIHATKAN BAGAIMANA PLN MENEROBOS BEGITU BERATNYA TANTANGAN BISNIS DI TAHUN 2017 DAN BERHASIL MENCETAK TONGGAK SEJARAH-SEJARAH BARU PERJALANAN BAHTERA BISNIS PERUSAHAAN UNTUK MENJADI ACUAN DI MASA YANG AKAN DATANG.**

In 2017, PLN embarks the journey of business transformation amidst the dynamics business challenges that led to business' slowdown. However, PLN firmly strives in sailing through by providing excellent efforts for Indonesia. Subsequently, we created the PLN 2017 Annual Report's Theme of Inspiring Journey of Transformation, which illustrates PLN's ability to breakthrough the dynamics business challenges in 2017 and successfully records history for the new company business journey, as key resources for years to come.



1.



**Tiada Lagi Defisit Daya pada Sistem Kelistrikan PLN**

No Power Deficit on PLN Electrical System

2.



**Efisiensi Berbuah Manis dengan Semakin Sehatnya Kinerja Keuangan Perusahaan**

Beneficial Efficiency with Increasingly Sound Corporate Financial Performance

3.



**Berhasil Mengurangi Beban Pemerintah Lewat Penurunan Angka Subsidi**

Successfully Reducing Government Expenses through the Decrease of Subsidy Rate

7.



**Melakukan Upaya Terbaik untuk Kemajuan Usaha dan Industri Lokal**

Doing the Best Effort for Encouragement of Local Business and Industry

2017

9.



**Menjadi Salah Satu Produsen Listrik dengan Tarif Kompetitif di Kawasan ASEAN**

Being One of the Electrical Producers with Competitive Rates in the ASEAN

10.



**Pertama Kali dalam Sejarah Mencapai PROPER Emas**

First Time in History to Achieve Gold PROPER

11.



**Pencapaian Elektrifikasi yang Melampaui Target Pemerintah**

Achieving Electrification that Surpassed the Government's Targets

4.



**Sukses Melakukan Transformasi & Inovasi Keuangan untuk Memperkuat Performa Perusahaan**

Successfully Conducting Financial Transformation & Innovation to Strengthen the Company's Performance

5.



**Peningkatan Indeks pada Survei Kepuasan Pelanggan PLN secara Konsisten Lewat Performa Layanan**

Increasing PLN Customer Satisfaction Survey Index Consistently by Service Performance

6.



**Mampu Mempertahankan Profitabilitas Perusahaan di Tengah Beratnya Tantangan Usaha**

Maintaining the Company's Profitability in the Midst of Dynamics Business Challenges

# INSPIRING JOURNEY OF TRANSFORMATION

8.



**Menjadi Lokomotif Peningkatan *Ease of Doing Business* Indonesia**

Becoming the Locomotive in Improving Ease of Doing Business in Indonesia

12.



**Menyinari Indonesia Tanpa Henti dan Semakin Menjangkau Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)**

Non-Stop Enlightening Indonesia and Reaching 3T (Outerfront, Outermost, and Underdeveloped)

13.



**Inovasi: Peningkatan Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU) secara Nasional**

Innovation: Increasing Electric Charging Stations (SPLU) Provision Nationally

14.



**Semakin Sempurnanya Layanan dengan *Limitless Services* Aplikasi PLN Mobile**

Perfecting the Limitless Services through PLN Mobile Application



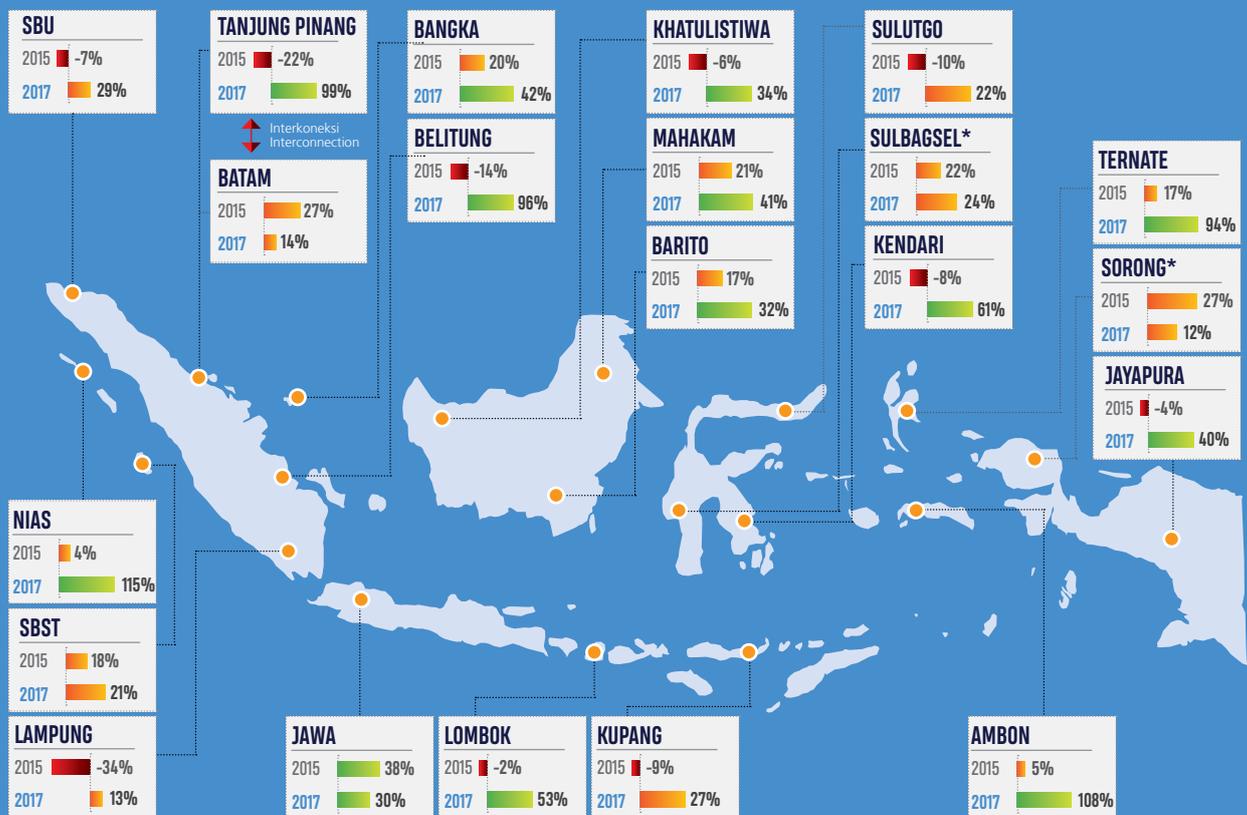
# 1.

## Tiada Lagi Defisit Daya pada Sistem Kelistrikan PLN

### No Power Deficit on PLN Electrical System

Salah satu pencapaian terbaik Perusahaan pada tahun 2017 adalah tiada lagi sistem kelistrikan di Indonesia yang mengalami defisit. Ini berarti masalah pemadaman karena kurangnya pasokan daya listrik sudah terselesaikan. Kini, Perusahaan telah mampu memenuhi permintaan listrik seiring dengan cadangan daya yang cukup. Hal ini ditunjang dari penambahan kapasitas pembangkit beserta infrastruktur penunjang kelistrikan yang berhasil di bangun pada tahun 2017.

One of the Company's best achievements in 2017 is the no more deficit in Indonesia's electricity system. This means the blackout problem due to lack of power supply has been resolved. To date, the Company is able to fulfill the electricity demand by having adequate power supply. This is supported by the addition of generating capacity with the supporting power infrastructure that was built in 2017.





## 2.

### Efisiensi Berbuah Manis dengan Semakin Sehatnya Kinerja Keuangan Perusahaan

#### Beneficial Efficiency with Increasingly Sound Corporate Financial Performance

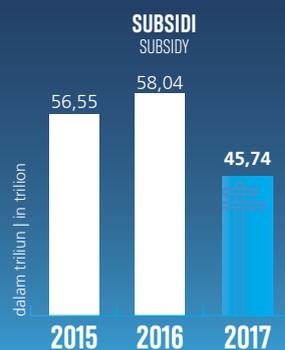
Kami berhasil melakukan efisiensi biaya usaha dengan penurunan biaya bahan bakar minyak sebesar 3,1% dari Rp24,06 triliun di tahun 2016 menjadi Rp23,32 triliun di tahun 2017 dan penurunan biaya pemeliharaan sebesar 9,1% dari 21,23 triliun di tahun 2016 menjadi 19,52 triliun di tahun 2017. Efisiensi ini adalah buah manis perjuangan kami dalam menerapkan “Program Penurunan Biaya Pokok Penyediaan”. Pada tahun 2017, upaya efisiensi kami lakukan dengan menurunkan harga input bahan bakar minyak termasuk biaya transportasi sampai dengan ke pembangkit. Selain itu, kami juga menerapkan sejumlah terobosan dalam mengefisienkan biaya pemeliharaan seperti memperluas cakupan material dalam bentuk kontrak payung (Kontrak Harga Satuan), *join inventory* untuk aset sejenis antar unit, implementasi kontrak pemeliharaan aset bergaransi, *reverse engineering* dengan mengoptimalkan peran jasa penunjang dan BUMN lainnya, dan menurunkan harga satuan pembelian barang dan jasa.

We succeeded in reducing operating cost by reducing fuel costs by 3.1%, from Rp24.06 trillion in 2016 to Rp23.32 trillion in 2017, and decreasing maintenance costs by 9.1%, from Rp21.23 trillion in 2016 to Rp19.52 trillion in 2017. This efficiency is the result of our efforts in applying the “Electricity Cost of Supply Reduction Program”. In 2017, our efficiency efforts are carried out by lowering the fuel price, including costs for transportation, and plants. In addition, we also implemented several breakthroughs in the efficiency of maintenance costs, such as expanding material coverage with umbrella contracts (Unit Price Contracts), joining inventory of similar assets between units, implementing guarantee asset maintenance contracts, *reverse engineering* by optimizing the role of supporting services and other SOEs, and lowering the unit price of purchasing goods and services.

# 3.

## Berhasil Mengurangi Beban Pemerintah Lewat Penurunan Angka Subsidi

Successfully Reducing  
Government Expenses  
through the Decrease of  
Subsidy Rate



Kami juga telah membantu Pemerintah Republik Indonesia melakukan penghematan anggaran dengan menurunkan subsidi tenaga listrik. Sebagai perbandingan pada tahun 2016, PLN menerima subsidi tenaga listrik sebesar Rp58,04 triliun, dan di tahun 2017 PLN hanya menerima subsidi sebesar Rp45,7 Triliun atau turun sebesar 21,19%. Hal ini disebabkan implementasi secara bertahap dari kebijakan Pemerintah untuk subsidi tepat sasaran 900 VA sehingga penerima subsidi listrik benar-benar mereka yang masuk kategori miskin dan rentan miskin berdasarkan Survei Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Penerapan tarif secara bertahap menuju keekonomian ini semakin memperlihatkan kemampuan Perusahaan dalam menjalankan roda bisnis yang sehat.

We also assisted the Government of the Republic of Indonesia to save the budget by lowering electricity subsidies. As a comparison, in 2016, PLN received electricity subsidy of Rp58.04 trillion, and in 2017, PLN only received electricity subsidy of Rp45.7 trillion, or decreased by 21.19%. This is due to the gradual implementation of the Government's policy of 900 VA targeted subsidies, thus the recipients of the electricity subsidy are targeted into those who are categorized as poor and vulnerable under the Survey of National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K). The gradual adoption of tariffs towards this economy further demonstrates the Company's ability to manage sound business activities.



# 4.

## Sukses Melakukan Transformasi & Inovasi Keuangan untuk Memperkuat Performa Perusahaan

Successfully Conducting Financial Transformation & Innovation to Strengthen the Company's Performance

Keberhasilan PLN dalam melakukan transformasi untuk meningkatkan performa Perusahaan berbuah sukses dengan perolehan Penghargaan Transformasi dan Inovasi Keuangan Badan Usaha Milik 2017 yang diberikan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara, Ibu Rini Soemarno.

Penghargaan dalam bidang transformasi ini diperoleh PLN setelah melakukan sejumlah perbaikan, antara lain dari sisi *Financial Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Business Process* dan *Learning and Growth*. Sementara itu, penghargaan untuk apresiasi inovasi keuangan diperoleh PLN setelah PLN mampu melakukan peningkatan kapasitas pendanaan, kemampuan pengelolaan resiko keuangan dan peningkatan kontribusi pada pemerintah.

PLN's transformation to improve the Company's performance is successful with the acquisition of Financial Transformation and Innovation SOEs Award, presented directly by the Minister of State-Owned Enterprises, Rini Soemarno.

The transformation award was received by PLN following several improvements, including Financial Perspective, Customer Perspective, Internal Business Process, and Learning and Growth. Meanwhile, PLN received the awards for the appreciation of financial innovation after the Company was able to increase funding capacity, financial risk management capabilities, and contribution to the government.



# 5.

## Peningkatan Indeks pada Survei Kepuasan Pelanggan PLN secara Konsisten Lewat Performa Layanan

### Increasing PLN Customer Satisfaction Survey Index Consistently by Service Performance

Kami berkomitmen untuk tiada hentinya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini tercermin dari semakin meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, IKP PLN adalah sebesar 88,52%, mengalami peningkatan sebesar 0,10% dari 88,42% di tahun sebelumnya. Peningkatan kepuasan pelanggan terjadi pada segmen Sosial, Bisnis, Industri, dan Curah. Selain itu, peningkatan indeks lain dari Survei Kepuasan Pelanggan seperti Indeks Loyalitas Pelanggan, Indeks Keterikatan Pelanggan, Indeks Kepedulian Pelanggan dan Indeks Efektifitas Pintu Layanan (*Contact Center*) memperlihatkan bahwa fungsi pelayanan pelanggan Perusahaan yang semakin membaik.

We are committed to ceaselessly providing the best service to the community. This is reflected in the increasing value of the Customer Satisfaction Index (IKP) from year to year. In 2017, PLN IKP is 88.52%, increased by 0.10% from 88.42% in the previous year. Increased customer satisfaction occurs in the Social, Business, Industry, and Bulk segments. In addition, other index increases from the Customer Satisfaction Survey, such as the Customer Loyalty Index, Customer Engagement Index, Customer Care Index and the Contact Center Effectiveness Index indicated that the Company's customer service function is improving.



#### Indeks Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2017

Customer Satisfaction Survey Index in 2017

**INDEKS KEPUASAN PELANGGAN**  
Customer Satisfaction Index

2016  
**88,42%**

2017   
**88,52%**

**INDEKS LOYALITAS PELANGGAN**  
Customer Loyalty Index

2016  
**86,80%**

2017   
**95,17%**

**INDEKS KETERIKATAN PELANGGAN**  
Customer Engagement Index

2016  
**80,37%**

2017   
**92,57%**

**INDEKS KEPEDULIAN PELANGGAN**  
Customer Care Index

2016  
**84,57%**

2017   
**96,06%**

**INDEKS EFEKTIFITAS PINTU LAYANAN (CONTACT CENTER)**  
Contact Center Effectiveness Index

2016  
**71,27%**

2017   
**86,59%**



## SEMARANG - JAWA TENGAH

KAP 14 201



## 6.

## Mampu Mempertahankan Profitabilitas Perusahaan di Tengah Beratnya Tantangan Usaha

Maintaining the Company's Profitability Amidst the Dynamics Business Challenges



Seluruh angka keuangan tahun 2016 & 2017 tidak menerapkan ISAK 8 Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.04/2017. | All financial figures for 2016 & 2017 does not applied ISFAS 8 In accordance with the Rules of the Financial Services Authority No. 6 / POJK.04 / 2017.

Pada tahun 2017, PLN diterpa berbagai tekanan eksternal seperti meningkatnya harga energi primer, pelemahan daya beli masyarakat, hingga pelemahan nilai tukar rupiah. Meskipun begitu, kami tetap berhasil mempertahankan kinerja keuangan yang baik. *Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization* (EBITDA) PLN di tahun 2017 menunjukkan hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Secara profitabilitas, serangkaian aksi korporasi dan pilihan kebijakan yang kami ambil telah berhasil menciptakan kinerja keuangan yang lebih positif. Pada tahun 2017, EBITDA PLN adalah Rp56,59 triliun, lebih besar 1,8% dari 55,59 di tahun 2016. Peningkatan nilai EBITDA ini disebabkan oleh Peningkatan Pendapatan Usaha sebesar 14,6% dari 222,82 triliun di tahun 2016 menjadi 255,30 triliun di tahun 2017 serta keberhasilan upaya kami menekan laju pertumbuhan biaya usaha.

In 2017, PLN is pressured externally by the increasing primary energy prices, weakening public purchasing power, and weakening of rupiah exchange rate. Nevertheless, we succeeded in maintaining positive financial performance. In 2017, PLN's Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization (EBITDA) indicated better results compared to the previous year. On profitability, we have performed a series of corporate actions and policy selection to create a more positive financial performance. In 2017, PLN's EBITDA is Rp56.59 trillion, increased by 1.8% from Rp55.59 trillion in 2016. The increase in EBITDA is due to a 14.6% increase in business revenue from Rp222.82 trillion in 2016, to Rp255.30 trillion in 2017, and the success to curb growth in the operating costs.

# 7. Melakukan Upaya Terbaik untuk Kemajuan Usaha dan Industri Lokal

Doing the Best Effort for Encouragement of Local Business and Industry

# 8. Menjadi Lokomotif Peningkatan *Ease of Doing Business Indonesia*

Becoming the Locomotive in Improving Ease of Doing Business in Indonesia

PLN juga memberi kontribusi kepada negara melalui kenaikan peringkat Ease of Doing Business (EoDB) oleh World Bank yang menunjukkan semakin baiknya iklim investasi di Indonesia. Di tahun 2017, peringkat Kemudahan Mendapatkan Listrik (Getting Electricity) mengalami perbaikan posisi menjadi peringkat 38 di tahun 2018. Kontribusi tersebut membuat peringkat Indonesia dalam survey EoDB turut meningkat dari peringkat 91 di tahun 2017 menjadi posisi 72 dari 190 negara di tahun 2018. Sumbangsih PLN terhadap Indeks Getting Electricity EoDB dapat dilihat dari proses penyambungan seperti Sertifikasi Layak Operasi (SLO), waktu pengajuan aplikasi penyambungan listrik, waktu pekerjaan instalasi, dan perolehan sambungan akhir dari PLN yang semakin membaik setiap tahunnya.

## Peringkat Kemudahan Mendapatkan Listrik terus Membaik

The Ease of Gaining Electricity Keeps Getting Better

Survei Ease of Doing Business - EoDB oleh WorldBank | Survey Ease of Doing Business - EoDB oleh WorldBank





Pada tahun 2017, kami berupaya maksimal agar tetap berkontribusi pada perekonomian Indonesia lewat dukungan penuh pada kegiatan bisnis dan industri lokal. Beberapa kondisi makro yang mempengaruhi tarif tenaga listrik sesuai PERMEN ESDM No 18 Tahun 2017 yaitu Kurs Dollar Amerika, Indonesia Crude Price (ICP) dan/atau Inflasi lebih besar dari acuan APBN. Dengan kondisi seperti tersebut Perseroan seharusnya berhak untuk menaikkan tarif tenaga listrik melalui mekanisme *Tariff Adjustment*, untuk pelanggan Non-Subsidi. Namun untuk menjaga agar sektor Bisnis dan Industri tetap kompetitif, Perseroan memutuskan untuk tidak menaikkan tarif tenaga listrik pada golongan pelanggan tersebut. Hal ini tercermin pada tahun 2017, terjadi peningkatan penjualan listrik sebesar 4,04% pada sektor bisnis dan 6,01% pada sektor industri.

In 2017, we strive to maximize our contribution to the Indonesian economy by fully supporting local business and industries. The macro conditions that affect electricity tariffs, in accordance with Minister of EMR Regulation No. 18 of 2017 are the US Dollar currency exchange, Indonesia Crude Price (ICP), and/or increase of Inflation, compared to the State Budget reference. Under such conditions, the Company has the right to increase electricity tariff through Tariff Adjustment mechanism for Non-Subsidized customers. However, to maintain the competitiveness of Business and Industry sectors, the Company decided not to increase the electricity tariffs on those customer groups. This is reflected in the increase of electricity sales by 4.04% in the business sector and 6.01% in the industrial sector in 2017.



PLN other contribution to the country was carried out through the increased rank of the World Bank's Ease of Doing Business (EoDB), which illustrates improved investment climate in Indonesia. In 2017, the Getting Electricity rank increased to rank 38 in 2018. The contribution also encouraged Indonesia's EoDB ranking to increase, from 91st in 2017 to 72th out of 190 countries in 2018. PLN's contribution to EoDB and Getting Electricity Indexes can be seen from the connection process such as Certification of Feasibility of Operation (SLO), application time of electrical connection, installation working time, and acquisition of end connection from PLN, which is improving every year.



# 9. Menjadi Salah Satu Produsen Listrik dengan Tarif Kompetitif di Kawasan ASEAN

Being One of the Electrical Producers with  
Competitive Rates in the ASEAN

Merupakan komitmen kami untuk menciptakan tarif listrik yang kompetitif agar dapat mendorong perekonomian nasional. Bila melihat perbandingan tarif listrik dengan beberapa negara ASEAN, Tarif Bisnis Besar & Industri Menengah masih relatif lebih murah. Pilihan kebijakan untuk tidak meningkatkan tarif diambil agar tidak terjadi pelemahan daya beli masyarakat dan tingkat competitiveness industri dalam negeri.

We are committed to creating competitive electricity tariff to encourage the national economy. Compared to the electricity tariffs of some ASEAN countries, the Big & Medium Industry Tariff remains relatively cheaper. PLN decided to not increase the tariff to strengthen the public purchasing power and the level of industrial competitiveness in the country.

Jenis Pengguna User Type	Indonesia (Rp/kWh)	Malaysia (Rp/kWh)	Thailand (Rp/kWh)	Singapura (Rp/kWh)	Filipina (Rp/kWh)	Vietnam (Rp/kWh)
Rumah Tangga   Household	1.467	1.374	1.351	1.878	2.109	1.279
Bisnis Menengah - TR   Average Business - Low Voltage	1.467	1.867	1.135	1.321	1.262	1.596
Bisnis Besar - TM   Major Business - Medium Voltage	1.115	1.320	1.114	1.293	1.229	1.468
Industri Menengah - TM   Average Industry - Medium Voltage	1.115	1.140	1.270	1.205	1.196	948
Industri Besar - TT   Major Industry - High Voltage	997	1.060	1.270	1.175	1.188	901

# 10.

## Pertama Kali dalam Sejarah Mencapai PROPER Emas

First Time in History to Achieve Gold PROPER

Adalah pertama kalinya dalam sejarah dimana Pembangkit PLN, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Uap Paiton Unit 1 & 2 di Probolinggo, Jawa Timur (dikelola oleh PT Pembangkitan Jawa Bali) meraih PROPER Emas. Ini merupakan pencapaian nilai PROPER terbaik yang selama ini kami raih. Hal ini membuktikan bahwa kami terus berkomitmen dan *beyond compliance* dalam hal pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Selain mendapatkan PROPER Emas, kami juga memperoleh 15 PROPER Hijau, 81 PROPER Biru, dan 0 untuk PROPER Merah dan PROPER Hitam.

For the first time in history, PLN's plant, i.e. Steam Power Plant Paiton Unit 1 & 2 in Probolinggo, East Java (managed by PT Pembangkitan Jawa Bali) achieved Gold PROPER. This is the best PROPER achievement we have received. This proves that we continue to commit and beyond compliance in terms of pollution control and/or environmental damage, and the management of hazardous and toxic materials. In addition to the Gold PROPER, we also received 15 Green PROPER, 81 Blue PROPER, and 0 Red or Black PROPER.

## Sebaran Hasil Proper 2017 Unit PLN & Anak Perusahaan Per Regional

Distribution of Proper Results of 2017 PLN & Subsidiaries Units by Region

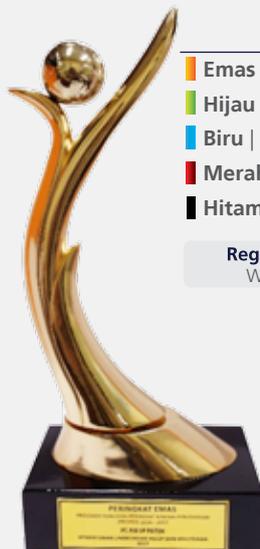
	2016	2017		2016	2017		2016	2017		2016	2017
Emas   Gold	: 0	▶ 0	Emas   Gold	: 0	▶ 0	Emas   Gold	: 0	▶ 0	Emas   Gold	: 0	▶ 0
Hijau   Green	: 0	▶ 1	Hijau   Green	: 0	▶ 1	Hijau   Green	: 0	▶ 0	Hijau   Green	: 0	▶ 0
Biru   Blue	: 18	▶ 20	Biru   Blue	: 15	▶ 15	Biru   Blue	: 18	▶ 19	Biru   Blue	: 6	▶ 7
Merah   Red	: 4	▶ 0	Merah   Red	: 1	▶ 0	Merah   Red	: 0	▶ 0	Merah   Red	: 1	▶ 0
Hitam   Black	: 0	▶ 0	Hitam   Black	: 0	▶ 0	Hitam   Black	: 0	▶ 0	Hitam   Black	: 0	▶ 0

Regional Sumatera  
Sumatra Region

Regional Kalimantan  
Kalimantan Region

Regional Sulawesi  
Sulawesi Region

Regional Maluku & Papua  
Maluku & Papua Region



	2016	2017		2016	2017		2016	2017
Emas   Gold	: 0	▶ 0	Emas   Gold	: 0	▶ 0	Emas   Gold	: 0	▶ 1
Hijau   Green	: 5	▶ 6	Hijau   Green	: 4	▶ 4	Hijau   Green	: 5	▶ 3
Biru   Blue	: 2	▶ 1	Biru   Blue	: 5	▶ 5	Biru   Blue	: 12	▶ 14
Merah   Red	: 0	▶ 0	Merah   Red	: 0	▶ 0	Merah   Red	: 0	▶ 0
Hitam   Black	: 0	▶ 0	Hitam   Black	: 0	▶ 0	Hitam   Black	: 0	▶ 0

Regional Jawa Barat  
West Java Region

Regional Jawa Tengah  
Central Java Region

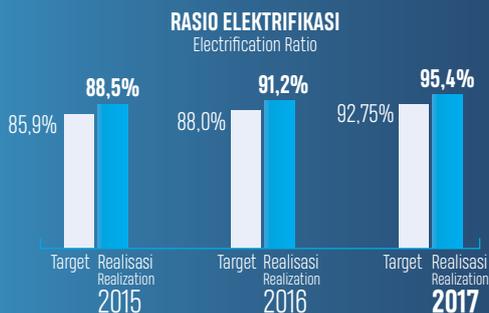
Regional Jawa Timur, Bali & Nusa Tenggara  
East Java, Bali & Nusa Tenggara Region

	2016	2017
Emas   Gold	: 0	▶ 1
Hijau   Green	: 14	▶ 15
Biru   Blue	: 76	▶ 81
Merah   Red	: 6	▶ 0
Hitam   Black	: 0	▶ 0
Total Peserta   Total Participants	: 96	▶ 97



# 11. Pencapaian Elektrifikasi yang Melampaui Target Pemerintah

Achieving Electrification that  
Surpassed the Government's Targets



Upaya Perusahaan dalam meningkatkan rasio elektrifikasi menunjukkan hasil menggembirakan yang mencapai 93,03% (pelanggan PLN) atau 95,4% (termasuk pelanggan non PLN) di tahun 2017. Rasio Elektrifikasi nasional 95,4% ini lebih baik dari 91,2% di tahun 2016. Hasil ini diperoleh dari kesuksesan PLN menyelesaikan proyek-proyek pembangkit, serta infrastruktur penunjang seperti gardu induk, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi ke wilayah-wilayah yang sebelumnya belum terjangkau listrik. Kami melakukan berbagai hal untuk mencapai sejumlah hal di atas, mulai dari memperkuat manajemen proyek dan supervisi konstruksi, meningkatkan akurasi Feasibility Study, melakukan kolaborasi antara Unit Induk Pembangunan dengan Unit Operasi untuk pengurusan izin dan pengadaan lahan, hingga melakukan *rerouting* jalur transmisi dengan menggunakan analisis yang akurat.

The Company's effort in increasing the electrification ratio shows an encouraging result which reached 93.03% (PLN customers) or 95.4% (including non PLN customers) in 2017. This 95.4% national electrification ratio was improved from 91.2% in 2016. PLN obtained the result through the completion of power plant projects and infrastructure support, such as substations, transmission networks, and distribution networks to areas, which were previously unreachable by electricity. We performed various measures to achieve this achievement, starting from strengthening project management and construction supervision, improving the accuracy of the Feasibility Study, collaborating between the Construction Unit with the Operations Unit for land clearance and land acquisition, up to rerouting transmission networks using accurate analysis.

# 12.

## Menyinari Indonesia Tanpa Henti dan Semakin Menjangkau Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)

Non-Stop Enlightening Indonesia and Reaching 3T Regions (Outerfront, Outermost, and Underdeveloped)

Perusahaan juga berhasil meningkatkan jumlah desa berlistrik dari 72.141 Desa di tahun 2016 menjadi sebesar 75.682 Desa di tahun 2017 yang menjangkau daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Seiring dengan upaya meningkatkan rasio elektrifikasi, Perusahaan terus membangun infrastruktur kelistrikan desa berlistrik (Lisa) dengan memberikan akses listrik lebih luas dari yang telah ada kepada masyarakat desa dan akses listrik kepada desa-desa yang belum mempunyai akses listrik sama sekali. Untuk mempercepat peningkatan desa berlistrik, Perusahaan juga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan menerapkan pola Kerja Sama Operasi (KSO). Langkah ini merupakan bukti nyata dukungan PLN terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil.

The company succeeded in increasing electricity access for villages, from 72,141 Villages in 2016 to 75,682 Villages in 2017, which have reached 3T (Outerfront, Outermost, Underdeveloped) regions. In line with the effort to increase the electrification ratio, the Company continues to develop electrical infrastructure of electrified villages (Lisa) by providing wider electricity access to existing villages and providing electricity access to villages that have no access to electricity at all. The Company coordinates with the Local Government and applies Joint Operation (KSO) to accelerate the improvement of electricity access for villages. This is PLN's support in improving the community welfare in remote areas.

**JUMLAH DESA BERLISTRIK**  
Total of Electrified Villages





# 13.

## Inovasi: Peningkatan Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU) secara Nasional

Innovation: Increasing Electric Charging Stations (SPLU) Provision Nationally

Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU) merupakan salah satu terobosan kami dalam menyambut era kendaraan listrik yang akan menjadi tren di masa yang akan datang dan lebih berwawasan lingkungan seperti sepeda listrik, skuter listrik, motor listrik, serta mobil listrik. Selain itu, SPLU juga berfungsi melayani kebutuhan listrik masyarakat secara mudah dan aman di tempat umum, seperti untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau pedagang kaki lima (PKL).

Penggunaan SPLU cukup sederhana. Pertama, pengguna dapat mencatat nomor meter pada SPLU. Kemudian pengguna membeli token listrik sesuai dari *payment points*, *mobile banking*, atau internet banking. Setelah mendapatkan kode *voucher*, masukkan angka *voucher* tersebut ke dalam meter listrik, tekan "Enter" dan SPLU siap digunakan.

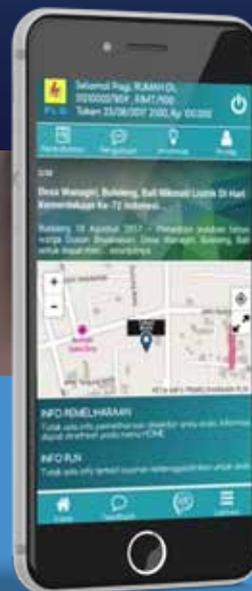
Electric Charging Station (SPLU) is one of our breakthroughs in welcoming the electric vehicles era that will be the trend in the future and more environmentally friendly vehicles, such as electric bicycles, electric scooters, electric motors, and electric cars. In addition, SPLU functions to serve the electricity needs of the community easily and safely in public places, such as for the actors of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) or street vendors (PKL).

SPLU usage is simple. First, the user records the meter number on the SPLU. Then the user buys the appropriate electrical token from payment points, mobile banking, or internet banking. After obtaining the voucher code, the voucher number is entered into the electricity meter, the user presses "Enter", and the SPLU is ready to use.

# 14.

## Semakin Sempurnanya Layanan dengan *Limitless Services* Aplikasi PLN Mobile

Perfecting the Limitless Services through PLN Mobile Application



Fitur Tracking  
Petugas Layanan  
Teknik | Technical  
Officer Tracking  
Feature

Pada tahun 2017, kami menyempurnakan layanan dengan *limitless service* melalui aplikasi PLN Mobile. Aplikasi ini adalah suatu aplikasi Mobile Customer Self Service yang terintegrasi dengan Aplikasi Pengaduan dan Keluhan Terpadu (APKT) dan Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T). Secara keseluruhan melalui aplikasi PLN Mobile, pelanggan dapat mengetahui berbagai info mulai dari tagihan rekening listrik, transaksi token, riwayat pemakaian kWh listrik, lokasi pembayaran melalui banking terdekat serta info status/ progres permohonan dan pengaduan. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan informasi kepada pelanggan terkait status-status pekerjaan PLN.

Dengan fitur baru Tracking Regu Pelayanan Teknik dan Fitur Rating atau Feedback Layanan Teknik, diharapkan pelayanan gangguan dapat diatasi dengan cepat dan berkualitas. Untuk menyediakan layanan tracking, PLN telah mempersenjatai petugas pelayanan teknik dengan aplikasi mobile APKT (Aplikasi Pengaduan dan Keluhan Terpadu) untuk operasional. Aplikasi ini akan memberikan informasi ke Command Center Pelayanan Teknik dan Pelanggan berdasarkan kegiatan di lapangan dan lokasi koordinat petugas, sehingga status tracking regu pelayanan teknik dapat dilihat secara realtime.

In 2017, we perfected our service by limitless service through PLN Mobile application. This application is a Mobile Customer Self Service integrated with the Integrated Complaint Application (APKT) and Centralized Customer Service Application (AP2T). Overall, by using PLN Mobile application, customers can find various information, ranging from electricity bills, token transactions, electricity usage history, payment locations via the nearest banking, and status/progress of application and complaints. In addition, this application also provides information to customers related to the status of PLN's works.

There are new features, which include Tracking of Technical Services Team and Rating or Feedback of Technical Services. These features are expected to provide solution to service interruption faster and with quality. PLN is equipped with Mobile APKT (Integrated Complaint Application) for operational tracking services. This application will provide information to Command Center Technical Services and Customers based on activities in the field and location coordinates of the officers. Thus, the tracking status of technical service team can be seen in real-time.

## KEBERLANJUTAN TEMA

### Themes Continuity



# 2013

### PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA DAN INOVASI OPERASIONAL

Improving the Quality of Governance and Operational Innovation

Komitmen tinggi jajaran Manajemen untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersih, menjunjung tinggi etika bisnis, etika moral serta etika bekerja dengan meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik, membuahkan berbagai pengakuan dan peningkatan kepercayaan pihak eksternal serta menimbulkan keyakinan seluruh jajaran internal akan manfaat berbagai program perbaikan kualitas penerapan GCG bagi perkembangan perusahaan dalam jangka panjang.

A highly committed board of management is intent in running clean business operations and upholding business ethics, moral ethics and work ethics by implementing good corporate governance, all of this leading to a wide ranging recognition and trust building from external parties that benefit the Company into the long term.



# 2014

### MENUJU LEVEL KINERJA BARU

Towards a New Performance Level

Dilandasi komitmen kuat dari jajaran manajemen puncak dan keyakinan akan kemampuan seluruh insan perusahaan dalam mewujudkan misi perusahaan, dalam beberapa tahun terakhir PLN berupaya memperbaiki kinerja dengan menerapkan beragam inovasi operasional di berbagai lini kegiatan.

Based on the top management's strong commitment and belief in the ability of all of its employees in pursuing the Company's mission, PLN is seeking to improve its performance by implementing operational innovations across a diverse range of activities.



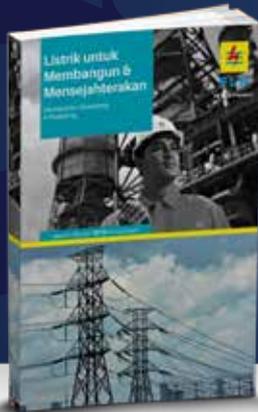
# 2015

### 35.000 MW UNTUK INDONESIA

A 35,000 MW Power Plant Program for Indonesia

Ketersediaan tenaga listrik yang memadai menjadi salah satu infrastruktur utama mendasar yang memiliki andil besar dalam mendukung pertumbuhan perekonomian suatu negara, oleh karenanya, kini dan seterusnya PLN bertekad memastikan seluruh kawasan di tanah air mendapatkan pasokan listrik yang memadai.

Adequate availability of electricity is one of the major fundamental needs with a significant role in the economic growth of a country. Hence, from now onwards, PLN is determined to supply ample electricity to every region of the country.

Keberlanjutan Tema  
Themes Continuity

2016

## LISTRIK UNTUK MEMBANGUN DAN MENSEJAHTERAKAN

Electricity for Developing & Prospering

Bagi PT PLN (Persero), semangat mendorong ketersediaan listrik sebagai pendukung pembangunan dan sarana bagi terciptanya kesejahteraan sejalan dengan motto yang sudah ditetapkan: "Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik".

The driving spirit to strive for electricity availability, as a basic necessity for the development and prosperity creation, is in line with motto of PT PLN (Persero): "Electricity for a Better Life".

2017  
INSPIRING JOURNEY  
OF TRANSFORMATION

Berbagai tantangan kami hadapi dalam perjalanan transformasi menuju ekselen, namun PLN tetap kokoh melewatinya demi memberi sumbangsih terbaik bagi Indonesia.

We encountered challenges during our transformation journey to excellent. Despite this, PLN remain solid in sailing through the journey to deliver the best efforts for Indonesia.

# Daftar Isi

Table of Contents



**01 INSPIRING JOURNEY OF TRANSFORMATION**

**26 IKHTISAR UTAMA**  
Performance Highlights

**28 Kinerja Keuangan 2017**  
Financial Performance Highlights 2017

**30 Ikhtisar Keuangan**  
Financial Highlights

**32 Ikhtisar Saham & Obligasi**  
Bonds & Shares Highlights

**36 LAPORAN MANAJEMEN**  
Management Reports

**38 Laporan Dewan Komisaris**  
Board of Commissioners Report

**54 Dewan Komisaris**  
Board of Commissioners

**56 Laporan Direksi**  
Report from the Board of Directors

**84 Direksi**  
Board of Directors Report

**86 PROFIL PERUSAHAAN**  
Company Profile

**88 Informasi Umum**  
General Information

**92 Riwayat Singkat Perusahaan**  
Company at a Glance

**94 Kegiatan dan Bidang Usaha**  
Activities and Business Lines

**98 Struktur Organisasi**  
Organizational Structure

**100 Visi, Misi, Moto & Budaya Perusahaan**  
Vision, Mission, Motto and Culture of the Company

Untuk informasi lebih lanjut dan terkini silahkan untuk mengunjungi situs [www.pln.co.id](http://www.pln.co.id).

**SANGKALAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB:**

Laporan ini berisi pernyataan-pernyataan yang dapat dianggap sebagai pandangan masa depan (*forward looking statements*) sehingga hasil-hasil nyata yang didapatkan Perusahaan, pelaksanaan atau pencapaian-pencapaiannya dapat berbeda dari hasil yang diperoleh melalui pandangan masa depan (*forward looking statements*) yang antara lain merupakan perubahan ekonomi nasional, regional, dan internasional, perubahan nilai tukar valuta asing, perubahan harga, perubahan kompetisi Perusahaan, perubahan Peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip akuntansi, kebijakan serta pedoman serta perubahan asumsi yang digunakan dalam membuat pandangan masa depan (*forward looking statements*).

For further and update information, please visit our website [www.pln.co.id](http://www.pln.co.id).

**DISCLAIMER AND LIABILITY LIMITATIONS:**

This report contains statements that may be considered forward looking statements thereby the Company's concrete results, its implementation and achievements may be differed from the forward looking statements that among others include the changes of national, regional and international economics, changes in foreign exchange rates, changes in prices, changes in the Company's competition, changes in Regulatory, accounting principles, policies as well as guidelines and changes in assumption used in providing the forward looking statements.



- 106 Road Map Budaya Perusahaan 2017-2021**  
Corporate Culture Road Map 2017-2021
- 108 Profil Dewan Komisaris**  
Board of Commissioners Profiles
- 117 Profil Direksi**  
Board of Directors Profiles
- 129 Pejabat Senior – Satu Tingkat Dibawah Direksi**  
Senior Executives – One Level Below the Board of Directors
- 138 Prinsip Kesetaraan Gender**  
Gender Equality Principle
- 142 Program Pengembangan Kompetensi**  
Competence Development Program
- 144 Program Kepemimpinan PLN**  
PLN Leadership Program
- 145 Knowledge Management**
- 147 Sistem Manajemen Kinerja Pegawai (SIMKP)**  
Employee Performance Management System (SIMKP)
- 150 Remunerasi**  
Remuneration
- 152 Sinergi Hubungan Industrial**  
Industrial Relations Synergy
- 156 Informasi Pemegang Saham dan Obligasi**  
Shareholders and Bonds Information
- 177 Entitas Anak**  
Subsidiaries

- 180 Daftar Alamat Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Ventura Bersama**  
Address of Subsidiaries, Associates, Joint Ventures
- 182 Struktur Usaha Group PLN**  
PLN Business Group Structure
- 184 Wilayah Operasi**  
Operational Area
- 186 Jejak Langkah Perusahaan**  
Company Milestones
- 188 Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan di Pasar Modal**  
Capital Market Supporting Institutions and Professions
- 194 Penghargaan dan Pengakuan Eksternal**  
Awards and External Recognitions
- 199 Sertifikasi**  
Certification
- 202 Alamat Unit Bisnis dan Kantor Perwakilan**  
Address of Business Units and Representative Offices
- 205 Akses Informasi dan Situs Perseroan**  
Information Access and Corporat Website
- 208 Peristiwa Penting 2017**  
Event Highlights 2017



- 216 ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN**  
Management Discussion and Analysis
- 224 Kinerja Segmen Operasi**  
Operation Segment Performance
- 234 Uraian Kinerja Operasional Perusahaan**  
Company's Operational Performance
- 253 Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan**  
Company's Financial Performance

Daftar Isi  
Table of Contents

## 318 TATA KELOLA PERUSAHAAN

### Corporate Governance

- 331 Implementasi Prinsip Dasar dan Praktek GCG yang Baik**  
Implementation of Basic Principles and Good Corporate Governance
- 350 Rapat Umum Pemegang Saham**  
General Meeting of Shareholders
- 363 Tata Laksana Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi**  
Working Procedures of the Board of Commissioners and Directors
- 365 Dewan Komisaris**  
Board of Commissioners
- 407 Organ Pendukung Dewan Komisaris**  
Board of Commissioners' Supporting Organs
- 410 Komite Audit**  
Audit Committee
- 418 Komite Manajemen Risiko**  
Risk Management Committee
- 428 Komite Nominasi dan Remunerasi**  
Nomination and Remuneration Committee

- 433 Direksi**  
Board of Directors
- 462 Komite-Komite di Bawah Direksi**  
Committees Reporting Directly to the Board of Directors
- 465 Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris & Direksi**  
Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors Composition
- 469 Sekretaris Perusahaan**  
Corporate Secretary
- 474 Audit Internal**  
Internal Audit
- 485 Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal**  
Internal Control and Monitoring System
- 488 Akuntan Perusahaan**  
Company's Accounting Firm
- 490 Manajemen Risiko**  
Risk Management
- 509 Tata Kelola Teknologi Informasi**  
Information Technology Governance
- 523 Akses Informasi dan Data Perusahaan**  
Access to the Company's Information and Data

- 525 Pengadaan Barang & Jasa**  
Procurement of Goods and Services
- 529 Permasalahan Hukum yang Melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi**  
Legal Issues Facing the Board of Commissioners and Board of Directors
- 530 Sanksi Administratif oleh Regulator**  
Administrative Sanctions Imposed by Regulator
- 532 Standar Etika Perusahaan**  
Company's Code of Conduct
- 536 Whistle Blowing System**

Daftar Isi  
Table of Contents

## 544 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social  
Responsibility

- 550 Program Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan  
Social Responsibility Program to the Environment
- 562 Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja  
Employment, Occupational Health and Safety
- 573 Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan  
Social and Community Development
- 585 Tanggung Jawab Terhadap Konsumen/Pelanggan  
Responsibility to Customers

## 600 LAPORAN KEUANGAN 2017

Financial Report 2017

- 808 Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2017 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)  
Board of Commissioners and Board of Directors Statement of Accountability for 2017 Annual Report of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- 810 Checklist Isi Laporan Tahunan Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 30 Tahun 2016 ("SEOJK 30/2016")  
Checklist of the Annual Report Contents Pursuant to the Circular Letter of OJK No. 30/2016 ("SEOJK 30/2016")
- 833 Kriteria Annual Report Award 2016  
Annual Report 2016 Criteria



# IKHTISAR UTAMA

Performance Highlights



- 28 Kinerja Keuangan 2017**  
Financial Performance  
Highlights 2017
- 30 Ikhtisar Keuangan**  
Financial Highlights
- 32 Ikhtisar Saham & Obligasi**  
Bonds & Shares Highlights



## Kinerja Keuangan 2017

### Financial Performance Highlights 2017

**Pendapatan usaha sebesar**  
Rp **255,30** triliun

tumbuh 14,6% YoY dibanding periode sama tahun 2016 sebesar Rp222,82 triliun.

Revenue of Rp255.30 trillion grew 14.6% YoY over the same period of 2016 Rp222.82 trillion.

**Peningkatan pendapatan berasal dari penjualan tenaga listrik sebesar**  
Rp **246,59** triliun

Revenue growth came from electricity sales amounting to Rp246, 59 trillion

**Aset sebesar**  
Rp **1.334,96** triliun  
naik dari akhir tahun 2016 Rp1.272,18 triliun.

Assets of Rp1,334.96 trillion rose from the end of the year 2016 Rp1,272.18 trillion.

**Ekuitas sebesar**  
Rp **869,42** triliun

turun dari akhir tahun 2016 Rp878,4 triliun.

Equity of Rp869.42 trillion decreased from the end of 2016 Rp878.4 trillion.



Kinerja Keuangan 2017  
Financial Performance Highlights 2017Efisiensi Biaya Operasi  
Pemeliharaan SebesarRp**1,71** TriliunCost Efficiency of Maintenance Cost  
Rp1,71 trillion

## Efisiensi Sebesar

Rp**741** Miliar

untuk Biaya Usaha BBM di Tahun 2017

Efficiency of Rp741 Billion for  
Oil Efficiency Cost in the 2017

## Peningkatan EBITDA PLN menjadi

Rp**56,59** Triliun

di Tahun 2017

PLN EBITDA Improvement to be  
Rp56,59 trillion in 2017

# IKHTISAR KEUANGAN

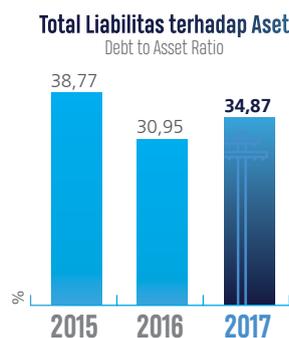
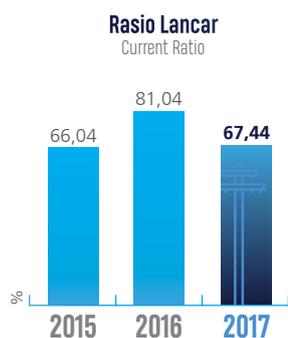
## Financial Highlights

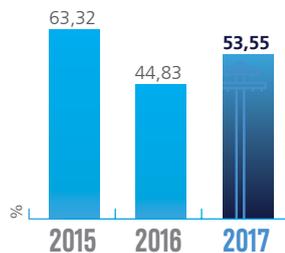
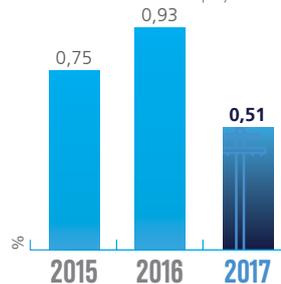
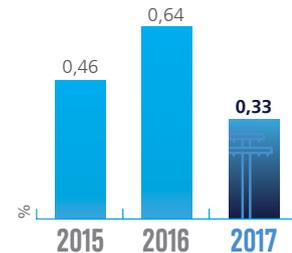
Seluruh angka keuangan tahun 2016 & 2017 tidak menerapkan ISAK 8 Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.04/2017. | All financial figures for 2016 & 2017 does not applied ISFAS 8 In accordance with the Rules of the Financial Services Authority no. 6 / POJK.04 / 2017.

Rp miliar | Rp billion)

IKHTISAR POSISI KEUANGAN	2015*	2016*	2017	SUMMARY OF FINANCIAL POSITION
Jumlah Aset tidak lancar	1.235.026	1.173.609	1.241.160	Non-Current Assets
Jumlah Aset Lancar	79.345	98.569	93.797	Current Assets
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.314.371</b>	<b>1.272.178</b>	<b>1.334.957</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	389.441	272.155	326.466	Long Term Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	120.139	121.623	139.074	Short Term Liabilities
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>509.580</b>	<b>393.778</b>	<b>465.540</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>804.791</b>	<b>878.400</b>	<b>869.417</b>	<b>TOTAL EQUITY</b>
IKHTISAR LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASI	OVERVIEW OF INCOME STATEMENT & COMPREHENSIVE INCOME			
PENDAPATAN USAHA	217.347	222.822	255.295	REVENUES
Penjualan Tenaga Listrik	209.845	214.140	246.587	Sales of Electricity
Penyambungan Pelanggan	6.141	7.052	7.113	Customer Connection Fees
Lain-lain	1.361	1.630	1.595	Others
BEBAN USAHA	225.574	254.450	275.474	OPERATING EXPENSES
Bahan bakar dan pelumas	138.408	109.492	116.948	Fuel and Lubricants
Pembelian tenaga listrik	4.421	59.729	72.427	Purchased Electricity
Sewa	8.066	6.545	6.592	Lease
Pemeliharaan	21.861	21.227	19.516	Maintenance
Kepegawaian	20.321	22.660	23.125	Personnel
Penyusutan	25.407	27.512	29.161	Depreciation
Lain-lain	7.090	7.284	7.707	Others
LABA (RUGI) USAHA SEBELUM SUBSIDI	(8.227)	(31.628)	(20.179)	OPERATING INCOME AFTER SUBSIDY
Subsidi Listrik Pemerintah	56.553	58.043	45.738	Government Electricity Subsidy
LABA (RUGI) USAHA SETELAH SUBSIDI	48.325	26.415	25.559	OPERATING INCOME AFTER SUBSIDY
LABA SEBELUM PAJAK	(15.913)	13.578	8.544	INCOME (LOSS) BEFORE TAX
Manfaat (Beban) Pajak	21.940	(5.428)	(4.116)	Tax Benefit (Expenses)
LABA TAHUN BERJALAN	6.027	8.150	4.428	INCOME FOR THE YEAR
Laba (rugi) tahun berjalan diatribusikan kepada :				Income for the Year Attributable to:
Pemilik entitas induk	6.011	8.113	4.410	Owners of the Parent
Kepentingan Non Pengendali	16	37	18	Non-Controlling Interest
LABA PER SAHAM DASAR (dalam rupiah penuh)	130.106	150.009	50.541	BASIC EARNINGS PER SHARE (in full Rupiah)

\* Penyajian kembali (restated) Laporan Keuangan PT PLN (Persero) pada tanggal 8 Januari 2018 | Restated Financial Report PT PLN (Persero) on 8 January 2018



Ikhtisar Keuangan  
Financial Highlights**Total Liabilitas terhadap Ekuitas**  
Debt to Equity Ratio**Rasio Laba terhadap Ekuitas**  
Net Return on Equity**Rasio Laba terhadap Aset**  
Net Return on Investment

KETERANGAN	2015*	2016*	2017	DESCRIPTION
<b>RASIO-RASIO</b>				<b>RATIOS</b>
<b>Rasio Solvabilitas</b>				<b>Solvability Ratio</b>
Total Liabilitas terhadap Aset	38,77%	30,95%	34,87%	Debt to Asset Ratio
Total Liabilitas terhadap Ekuitas	63,32%	44,83%	53,55%	Debt to Equity Ratio
<b>Rasio Likuiditas</b>				<b>Liquidity Ratio</b>
Rasio Lancar	66,04%	81,04%	67,44%	Current Ratio
Rasio Kas	19,74%	34,77%	30,62%	Cash Ratio
<b>Rasio Rentabilitas</b>				<b>Rentability Ratio</b>
Rasio Laba terhadap Ekuitas	0,75%	0,93%	0,51%	Net Return on Equity
Rasio Laba terhadap Aset	0,46%	0,64%	0,33%	Net Return on Investment
<b>Rasio Profitabilitas</b>				<b>Profitability Ratio</b>
Margin Laba Kotor	23,03%	12,34%	10,37%	Gross Profit Margin
Margin Laba Bersih	2,87%	3,81%	1,80%	Net Profit Margin
<b>Rasio Operasional</b>				<b>Operational Ratio</b>
Perputaran Piutang Usaha (Hari)	10,67	10,31	11,16	Receivable Turnover (Days)
Collection Period (Hari)	9,37	9,70	8,96	Collection Period (Days)
Perputaran Aset Tetap (Kali)	0,24	0,14	0,20	Fixed Asset Turn Over (Times)

\* Penyajian kembali (restated) Laporan Keuangan PT PLN (Persero) pada tanggal 8 Januari 2018 | Restated Financial Report PT PLN (Persero) on 8 January 2018

# IKHTISAR SAHAM & OBLIGASI

## Bonds & Shares Highlights

### IKHTISAR SAHAM | SHARES HIGHLIGHTS



Nama Pemegang Saham Shareholders Name	Jumlah Saham (Lembar)* Total Shares (Share)*	Persentase Percentage
Pemerintah Republik Indonesia	109.826.526	100%

\* Satu Lembar Saham senilai Rp1.000.000,- | One Share as Rp1.000.000,-

### OBLIGASI DOMESTIK | DOMESTIC BONDS

#### Data Outstanding Obligasi Lokal PLN | PLN Local Bonds Outstanding Data

Obligasi Lokal   Local Bond	Plafon   Plafond	Penerbitan Issued	Tenor (tahun) (year)	Kupon Coupon	Kode Obligasi Bond Code	Jatuh Tempo Notional Payment Due	Pefindo	
							2016	2017
Obligasi PLN VIII Seri B   Bonds PLN VIII Series B	IDR 865.000.000.000	21 Juni 2006 21 June 2006	15	13,75%	PPLN08B	21 Juni 2021 21 June 2021	AAA	AAA
Obligasi PLN IX Seri B   Bonds PLN IX Series B	IDR 1.200.000.000.000	10 Juli 2007 10 July 2007	15	10,90%	PPLN09B	10 Juli 2022 10 July 2022	AAA	AAA
Obligasi PLN XI Seri B   Bonds PLN IX Series B	IDR 1.783.000.000.000	12 Januari 2010 12 January 2010	10	12,55%	PPLN11B	12 Januari 2020 12 January 2020	AAA	AAA
Sukuk Ijarah PLN IV Seri B   Sukuk Ijarah PLN IV Series B	IDR 167.000.000.000	12 Januari 2010 12 January 2010	10	12,55%	SIKPLN03B	12 Januari 2020 12 January 2020	AAA	AAA
Obligasi PLN XII Seri B   Bonds PLN XII Series B	IDR 1.855.000.000.000	8 Juli 2010 8 July 2010	12	10,40%	PPLN12B	8 Juli 2022 8 July 2022	AAA	AAA
Sukuk Ijarah PLN V Seri B   Sukuk Ijarah PLN V Series B	IDR 340.000.000.000	8 Juli 2010 8 July 2010	12	10,40%	SIKPLN04B	8 Juli 2022 8 July 2022	AAA	AAA

Ikhtisar Saham & Obligasi  
Bonds & Shares Highlights

Obligasi Lokal   Local Bond	Plafon   Plafond		Penerbitan Issued	Tenor (tahun) (year)	Kupon Coupon	Kode Obligasi Bond Code	Jatuh Tempo Notional Payment Due	Pefindo	
								2016	2017
Berkelanjutan I PLN Tahap I Seri A   Bonds Shelf I PLN Tranche I Series A	IDR	182.000.000.000	5 Juli 2013 5 July 2013	7	8,00%	PPLN01ACN1	5 Juli 2020 5 July 2020	AAA	AAA
Berkelanjutan I PLN Tahap I Seri B   PLN Tranche I Series B	IDR	697.000.000.000	5 Juli 2013 5 July 2013	10	8,25%	PPLN01BCN1	5 Juli 2023 5 July 2023	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I   Sukuk Ijarah Shelf I Tranche I PLN	IDR	121.000.000.000	5 Juli 2013 5 July 2013	7	8,00%	SIPPLN01CN1	5 Juli 2020 5 July 2020	AAA	AAA
Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri A Shelf I PLN Tranche II Series A	IDR	593.000.000.000	10 Desember 2013 10 December 2013	5	9,00%	PPLN01ACN2	10 Desember 2018 10 December 2018	AAA	AAA
Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri B   Shelf I PLN Tranche II Series B	IDR	651.000.000.000	10 Desember 2013 10 December 2013	10	9,60%	PPLN01BCN2	10 Desember 2023 10 December 2023	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri A   Sukuk Ijarah Shelf I PLN Tranche II Series A	IDR	321.000.000.000	10 Desember 2013 10 December 2013	5	9,00%	SIPPLN01ACN2	10 Desember 2018 10 December 2018	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri B   Sukuk Ijarah Shelf I PLN Tranche II Series B	IDR	108.000.000.000	10 Desember 2013 10 December 2013	10	9,60%	SIPPLN01BCN2	10 Desember 2023 10 December 2023	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri A   Bonds Shelf II PLN Tranche I Series A	IDR	214.000.000.000	11 Juli 2017 11 July 2017	5	7,70%	PPLN02ACN1	11 Juli 2022 11 July 2022	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri B   Bonds Shelf II PLN Tranche I Series B	IDR	169.000.000.000	11 Juli 2017 11 July 2017	7	8,10%	PPLN02BCN1	11 Juli 2024 11 July 2024	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri C   Bonds Shelf II PLN Tranche I Series C	IDR	1.217.000.000.000	11 Juli 2017 11 July 2017	10	8,50%	PPLN02CCN1	11 Juli 2027 11 July 2027	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri A   Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche I Series A	IDR	186.000.000.000	11 Juli 2017 11 July 2017	5	7,70%	SIPPLN02ACN1	11 Juli 2022 11 July 2022	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri B   Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche I Series B	IDR	214.000.000.000	11 Juli 2017 11 July 2017	10	8,50%	SIPPLN02BCN1	11 Juli 2027 11 July 2027	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri A   Bonds Shelf II PLN Tranche II Series A	IDR	451.500.000.000	3 November 2017 3 November 2017	5	7,20%	PPLN02ACN2	3 November 2022 3 November 2022	AAA	AAA

## Ikhtisar Saham &amp; Obligasi

## Bonds &amp; Shares Highlights

Obligasi Lokal   Local Bond	Plafon   Plafond	Penerbitan Issued	Tenor (tahun) (year)	Kupon Coupon	Kode Obligasi Bond Code	Jatuh Tempo Notional Payment Due	Pefindo	
							2016	2017
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri B   Bonds Shelf II PLN Tranche II Series B	IDR 201.000.000.000	3 November 2017 3 November 2017	7	7,50%	PPLN02BCN2	3 November 2024 3 November 2024	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri C   Bonds Shelf II PLN Tranche II Series C	IDR 800.000.000.000	3 November 2017 3 November 2017	10	8,20%	PPLN02CCN2	3 November 2027 3 November 2027	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri D   Bonds Shelf II PLN Tranche II Series D	IDR 1.093.000.000.000	3 November 2017 3 November 2017	15	8,70%	PPLN02DCN2	3 November 2032 3 November 2032	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri A   Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche II Series A	IDR 83.500.000.000	3 November 2017 3 November 2017	5	7,20%	SIPPLN02ACN2	3 November 2022 3 November 2022	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri B   Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche II Series B	IDR 121.000.000.000	3 November 2017 3 November 2017	10	8,20%	SIPPLN02BCN2	3 November 2027 3 November 2027	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri C   Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche II Series C	IDR 490.000.000.000	3 November 2017 3 November 2017	15	8,70%	SIPPLN02CCN2	3 November 2032 3 November 2032	AAA	AAA

Ikhtisar Saham & Obligasi  
Bonds & Shares Highlights

## OBLIGASI INTERNASIONAL | INTERNATIONAL BONDS

## Data Outstanding Obligasi Internasional PLN | PLN International Bonds Outstanding Data

Obligasi Global Global Bond	Plafon Plafond	Penerbitan Issued	Tenor (Tahun   year)	Kupon Coupon	Kode Obligasi Bond Code	Jatuh Tempo Notional Payment Due	S & P		Moody		Fitch		
							2016	2017	2016	2017	2016	2017	
II B	USD	500.000.000	28 Juni 2007 28 June 2007	30	7,875%	56068TAD9 N54360AD9	29 Juni 2037 29 June 2037	BB BB	BB BB	Baa3 Baa3	Baa3 Baa3	BBB- BBB-	BBB BBB
III	USD	750.000.000	7 Agustus 2009 7 August 2009	10	8,00%	N54360AE7 56068TAE7	7 Agustus 2019 7 August 2019	BB BB	BB BB	Baa3 Baa3	Baa3 Baa3	BBB- BBB-	BBB BBB
IV	USD	1.250.000.000	6 November 2009 6 November 2009	10	7,75%	N54360AF4 56068TAF4	20 Januari 2020 20 January 2020	BB BB	BB BB	Baa3 Baa3	Baa3 Baa3	BBB- BBB-	BBB BBB
GMTN 2011	USD	1.000.000.000	22 November 2011 22 November 2011	10	5,50%	71568PAA7 71568QAA5	22 November 2021 22 November 2021	BB BB	BB BB	Baa3 Baa3	Baa3 Baa3	BBB- BBB-	BBB BBB
GMTN 2012	USD	1.000.000.000	24 Oktober 2012 24 October 2012	30	5,25%	71568PAB5 71568QAB3	24 Oktober 2042 24 October 2042	BB BB	BB BB	Baa3 Baa3	Baa3 Baa3	BBB- BBB-	BBB BBB
GMTN 2017 - 10Y	USD	1.500.000.000	15 Mei 2017 15 May 2017	10	4,125%	71568PAC3 71568QAC1	15 Mei 2027 15 May 2027	BB BB	BB BB	Baa3 Baa3	Baa3 Baa3	BBB- BBB-	BBB BBB
GMTN 2017 - 30Y	USD	500.000.000	15 Mei 2017 15 May 2017	30	5,25%	71568PAD1 71568QAD9	15 Mei 2047 15 May 2047	BB BB	BB BB	Baa3 Baa3	Baa3 Baa3	BBB- BBB-	BBB BBB



# LAPORAN MANAJEMEN

## Management Reports

Pembangunan Infrastruktur Dasar termasuk tenaga listrik merupakan prasyarat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta memiliki *multiplier effect* bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

The basic infrastructure development is the prerequisite to achieve quality economic growth and has multiplier effect on progress and welfare of society.

- 38 **Laporan Dewan Komisaris**  
Board of Commissioners  
Report
- 54 **Dewan Komisaris**  
Board of Commissioners
- 56 **Laporan Direksi**  
Board of Directors Report
- 84 **Direksi**  
Board of Directors





**Hasan Bisri**

**Plt. Komisaris Utama**  
Acting President Commissioner

## LAPORAN DEWAN KOMISARIS

### Board of Commissioners Report

**“Dalam perspektif Dewan Komisaris, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi oleh Perseroan di sepanjang tahun 2017, Direksi beserta jajaran manajemen telah berhasil mengambil kebijakan yang tepat dan mengimplementasikan sejumlah inisiatif yang sangat baik, responsif dan memberi dampak positif terhadap kinerja Perseroan”**

**“From the perspective of Board of Commissioners in the midst of challenging condition faced by the Company in 2017, The Board of Directors and Management had decided successful policies and executed various exceptional and responsive initiatives which brought positive outcomes on the Company’s performance.”**

#### **Para pemangku kepentingan yang terhormat,**

Pada kesempatan ini, perkenankan kami mewakili jajaran Dewan Komisaris menyampaikan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa serta salam sejahtera untuk kita semua karena atas karuniaNya PT PLN (Persero) berhasil melalui tahun 2017 yang penuh tantangan. Manajemen telah berhasil mengembangkan kegiatan usaha, sehingga semakin memperkuat posisi PT PLN (Persero) sebagai bagian penting dari perjalanan pembangunan bangsa. Sejalan dengan tugas dan tanggung jawab yang melekat kepada Dewan Komisaris, seperti tertuang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Tujuan pelaksanaan tugas pada Dewan Komisaris adalah untuk mendukung kinerja Perseroan, agar mampu memenuhi visi, misi dan target-target yang telah ditetapkan, dalam koridor tata kelola perusahaan yang baik.

#### **Dear Honorable Stakeholders,**

On this occasion, please allow us to represent the Board of Commissioners and render our utmost gratitude to Almighty God for all the blessings He bestowed upon us and all the best wishes to all of us. It is because of God’s blessing that PT PLN (Persero) has managed through a very challenging and demanding 2017. The management has developed its business operations, so its strengthened its position as an important part of the nation-building journey. In line with the duties and responsibilities placed upon the Board of Commissioners, as stipulated in Law No. 40 of 2007 and Act No. 19 of 2003 on SOEs, the tasks of the Board of Commissioners are to supervise the actions and policies made by the management, to monitor the administration of the business in general, both in regards to the Company itself and the Company’s business, and to provide advice to the Board of Directors. The objectives of the tasks upon the Board of Commissioners are to assist the Company in accomplishing targets as well as its vision and mission, all within the boundaries of good corporate governance.

## Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

**KONDISI USAHA**

Dewan Komisaris menyadari bahwa tahun 2017 masih penuh dengan tantangan yang harus dihadapi Direksi dalam menjalankan usaha, baik yang berasal dari kondisi eksternal maupun internal. Kondisi eksternal Perseroan berupa pergerakan harga energi primer dan fluktuasi mata uang asing, sangat berpengaruh pada biaya operasi dan biaya investasi, karena sebagian besar biaya tersebut digunakan untuk pembelian energi primer, pembelian listrik swasta (*Independent Power Producer/IPP*) dan pembayaran hutang luar negeri, yang sebagian besar dalam mata uang asing, terutama USD.

Kebijakan Pemerintah juga sangat mempengaruhi Perseroan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan tarif dasar listrik (TDL) dan kebijakan dalam energi primer. Tantangan internal Perseroan, yang dihadapi antara lain adalah implementasi program pembangunan infrastruktur kelistrikan 35.000 MW termasuk proyek transmisi dan distribusinya. Program besar tersebut berpengaruh besar terhadap kebijakan PLN di bidang pendanaan untuk investasi, penyediaan energi primer, kesiapan SDM serta organisasi.

Salah satu resiko yang menghadang adalah penyelesaian pembangunan proyek yang tidak tepat waktu, sebagai akibat adanya kendala sinkronisasi penyelesaian proyek pembangkit, jaringan transmisi dan distribusinya. Resiko tersebut timbul akibat kelemahan perencanaan, pemilihan lokasi proyek, pemilihan kontraktor, klausul kontrak, pelaksanaan, dan pengendaliannya. Berbagai tantangan tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan rencana pengembangan sistem kelistrikan jangka panjang, dalam mewujudkan investasi dan operasi usaha kelistrikan yang efisien.

**BUSINESS CONDITIONS**

The Board of Commissioners is completely and fully aware that 2017 was a year full of challenges faced by the Board of Directors in conducting business, originating either externally or internally. The Company faces external conditions in the form of primary energy price movements and foreign currency fluctuations, which have a major impact on operating costs and investment costs, as most of the costs are used for procurement of primary energy, private power purchase (IPP) and foreign debt repayments, which are mostly in foreign currency, especially USD.

Government's policies also greatly affect the Company, especially those related to the basic electricity tariff policy (TDL) and the policy in primary energy. The internal challenges faced include the construction of a 35,000 MW electricity infrastructure program implementation including its transmission and distribution projects. This large program has a major impact on PLN's policy on funding for investment, primary energy supply, human resources, and organizational readiness.

One of the major risks faced is project completion delays, because of power plants project synchronization constraints, transmission network and its distribution. Moreover, the risks arise from planning weaknesses, selection of project sites, and selection of contractors, inappropriate contract clauses, implementation, and control. These challenges do affect the implementation of the long-term power system development plan, in realizing investment and efficient operation of electricity business.

## PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

Dasar penilaian kinerja Direksi tahun 2017, terutama terkait dengan target kinerja yang telah disepakati, yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2017, Dewan Komisaris juga memperhatikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) yang telah dilakukan oleh Direksi.

Penilaian kinerja Direksi tidak dapat dipisahkan dari rencana besar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain mendorong pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Dalam konteks tersebut, Pemerintah telah menetapkan program pembangunan strategis nasional yaitu Program 35.000 MW. Pemerintah juga telah menerbitkan berbagai peraturan teknis pelaksanaan, baik di tingkat Departemen Teknis maupun kebijakan strategis yang mendukung program tersebut.

PLN mendapat tugas untuk merealisasikan program pembangunan tersebut, lengkap dengan infrastruktur transmisi dan distribusi, selain untuk menyelesaikan pembangunan pembangkit yang tengah dalam masa konstruksi dengan kapasitas total 7.000 MW.

Sebagai wujud pelaksanaan program 35.000 MW, maka pada tahun 2017 PLN telah menandatangani PPA dengan IPP sebesar 10.251 MW atau 80,65% dari target sebesar 12.710 MW. Jumlah PPA yang ditandatangani tahun 2017 tidak tercapai karena penundaan proses pengadaan pembangkit IPP untuk menyesuaikan dengan proyeksi kebutuhan pembangkit sesuai dengan RUPTL.

## BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT

The basis for the Board of Directors performance assessment in 2017 is mainly related to the agreed performance targets set forth in the Company's Work and Budget Plan (RKAP) in 2017, the Board of Commissioners also takes into account the implementation of good corporate governance (GCG) by the Board of Directors.

The performance appraisal of the Board of Directors can not be separated from the big plans that have been set by the government, among others, to encourage the development of electricity infrastructure. In that context, the Government has established a national strategic development program that is the 35,000 MW Program. The government has also issued various technical implementation regulations, both at the Technical Department level as well as the strategic policies that support the program.

PLN is tasked with the responsibilities for completion of the development program, complete with transmission and distribution infrastructure, in addition to the task of completing the construction of a power plant under construction with a total capacity of 7,000 MW.

As an effort to accomplish the 35,000 MW program, PLN has signed PPAs for 10,251 MW or 80,65% of the 12,710 MW target in 2017. The amount of PPAs signed in 2017 were not achieved due to delays in the procurement process of IPP plants to conform with projected plant requirements in accordance with RUPTL.

## Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

Realisasi penambahan kapasitas pembangkit pada tahun 2017 adalah 2.104 MW. Beberapa pembangkit yang belum bisa beroperasi pada tahun 2017 dikarenakan: i) Untuk beberapa pembangkit PLTD tersebar kendala pada proses pengiriman mesin pada lokasi-lokasi terpencil dan penyelesaian proses perijinan lingkungan; dan ii) Permasalahan internal kontraktor diantaranya kesulitan menghadapi eskalasi harga akibat perubahan nilai kurs.

Rasio elektrifikasi merupakan indikator untuk mengukur apakah seluruh penduduk RI telah menikmati listrik yang disediakan oleh negara dalam hal ini adalah PLN. Indikator yang diukur adalah jumlah rumah tangga yang sudah terlistriki, dibandingkan dengan total rumah tangga Indonesia. Rasio elektrifikasi pada tahun 2017 mencapai 93,03%, sedangkan jika memperhitungkan dengan pelanggan rumah tangga non PLN, maka rasio elektrifikasi ini mencapai 95,40%.

Dewan Komisaris memberikan beberapa catatan atas Kinerja Perusahaan selama tahun 2017, adalah sebagai berikut:

### Kinerja Keuangan

- Biaya usaha sebesar Rp275,47 triliun atau mencapai 98,11% dari anggaran Rp280,79 triliun. Efisiensi biaya usaha terutama berasal dari biaya pemakaian bahan bakar minyak dan pelumas, biaya pemeliharaan, dan biaya pegawai.
- Perusahaan memperoleh laba usaha sebesar Rp25,56 triliun atau 82,01% dari sasaran Rp31,17 triliun. Target laba usaha tidak tercapai seiring dengan tidak tercapainya target penjualan tenaga listrik dan realisasi pendapatan subsidi.
- Pada tahun 2017, Biaya Pokok Penyediaan (BPP) berhasil ditekan menjadi sebesar Rp1.318/kWh, di bawah anggaran Rp1.350/kWh atau mencapai 97,62% dari sasaran. BPP berhasil ditekan karena adanya efisiensi biaya-biaya, yaitu biaya energi primer (batubara dan air) dan biaya pemeliharaan.

The realization of additional power generation capacity in 2017 is 2,104 MW. Some of the plants that have not been able to operate in 2017 are due to: i) For some power plants, there are difficulties in shipping machines at remote locations and completion of the environmental permitting process; and ii) The internal problems of contractors are difficult to face price escalation due to exchange rate changes.

Electrification ratio is an indicator to measure the level of Indonesians that enjoy the electricity provided by the state in this case PLN. The measured indicator is the number of households that are connected to the electricity grid, compared to the total number of households in Indonesia. The electrification ratio in 2017 reached 93.03%, whereas if taking into account with non-PLN customers, then this electrification ratio reached 95.40%.

The Board of Commissioners provides several notes on the Company's Performance during 2017, as follows:

### Financial performance

- Operating cost of Rp275.47 trillion or 98.11% of the Rp280.79 trillion budget. The cost efficiency of the business comes primarily from the fuel oil and lubricant costs, maintenance costs, and personnel costs.
- The Company obtained operating profit of Rp25.56 trillion or 82.01% of the target of Rp31.17 trillion. The operating profit target is not achieved in line with the sales target and subsidy income.
- In 2017, the Cost of Goods Provision (Cost of Supply) was successfully reduced to Rp1,318 / kWh, below the budget of Rp1.350 / kWh or 97.62% of the target. The cost of supply was successfully suppressed due to cost efficiency, such as fuel cost (coal and hydro) and maintenance cost.

Laporan Dewan Komisaris  
Board of Commissioners Report

- Laba bersih Perseroan tahun 2017 adalah sebesar Rp4,43 triliun atau 73,37% dari target Rp6,04 triliun.

**Kinerja Operasional**

- Penambahan pelanggan mencapai 3.785.790 pelanggan atau 116,67% dari sasaran sebesar 3.244.995 pelanggan. Penambahan pelanggan tersebut meningkatkan rasio elektrifikasi PLN dari 89,10% menjadi 93,03% (tanpa pelanggan non-PLN).
- Realisasi penjualan tenaga listrik mencapai 223,134 GWh atau mencaapai 99,26% dari target sebesar 224.787 GWh. Di bandingkan dengan penjualan tenaga listrik tahun 2016 yang mencapai 216.004 GWh maka penjualan tenaga listrik tumbuh 3,30%. Tidak tercapainya sasaran penjualan disebabkan antara lain menurunnya daya beli masyarakat, penggunaan peralatan rumah tangga hemat energi, penggunaan fotovoltaiik untuk pelanggan mampu.
- Total produksi tenaga listrik sampai dengan akhir tahun 2017 adalah 254.660 GWh atau 98,91% dari sasaran sebesar 257.460 GWh, yang terdiri dari produksi sendiri sebesar 167.978 GWh, sewa pembangkit sebesar 13.447 GWh dan IPP dan Proyek sebesar 73.235 GWh. Dibandingkan dengan produksi tenaga listrik tahun 2016 yang mencaapai 248.611 GWh, maka pada tahun 2017 terdapat peningkatan produksi tenaga listrik sebesar 2,43%.
- Produksi tenaga listrik dari pembangkit sewa mencapai 13.447 GWh atau 90,22% dari sasaran sebesar 14.905 GWh, yang terdiri dari produksi pembangkit BBM sebesar 8.358 GWh dan pembangkit non BBM sebesar 5.088 GWh. Dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencaapai 17.352 GWh, maka pada tahun 2017 produksi tenaga listrik dari pembangkit sewa berkurang 22,50%.

- The net profit of the Company in 2017 amounted to Rp4.43 trillion or 73.37% of the targeted Rp6.04 trillion.

**Operational Performance**

- Added subscribers reached 3,785,790 subscribers or 116.67% of the targeted 3,244,995 subscribers. The additional subscribers increased PLN's electrification ratio from 89.10% to 93.03% (without non-PLN subscribers).
- Realized sales of electricity reached 223,134 GWh or reached 99.26% of the target of 224,787 GWh. In comparison with sales of electricity in 2016 which reached 216,004 GWh, electricity sales grew by 3.30%. Not achieving of the sales target due to, among others, the declining purchasing power of the people, the use of energy-saving household appliances, and the use of photovoltaics for capable customers.
- Total production of electricity up to the end of 2017 is 254,660 GWh or 98.91% of target as 257,460 GWh,, consisting of 167,978 GWh of own production, 13,447 GWh of power plants and IPP and 73,235 GWh. Compared to the production of electricity in 2016 that reached 248,611 GWh, then in 2017 there is an increase in electricity production by 2.43%.
- Production of electricity from leased generators reaches 13,447 GWh or 90.22% of the target of 14,905 GWh, which consists of fuel oil production of 8,358 GWh and non-BBM generators of 5.088 GWh. Compared to the year 2016 which reached 17,352 GWh, then in 2017 the production of electricity from the rental generator reduced 22.50%.

## Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

- Realisasi susut jaringan tahun 2017 sebesar 8,75% atau lebih baik dari batas maksimal yang ditetapkan sebesar 9,12%. Pencapaian susut tahun 2017 lebih baik dibandingkan pencapaian tahun 2016 sebesar 9,48%. Pada tahun 2017, manajemen telah berhasil menjalankan upaya untuk menurunkan susut jaringan melalui investasi dan perbaikan jaringan transmisi dan distribusi.
- Pada tahun 2017, telah berhasil ditandatangani 10.521 MW kontrak IPP Program 35.000 MW atau 80,65% dari target yang ditetapkan sebesar 12.710 MW.
- Pada tahun 2017, PLN berhasil meraih 3 penghargaan dari Kementerian TenagaKerja Republik Indonesia yakni: (a) Kecelakaan Nihil (PLN Distribusi Jawa Barat Area Bandung dan PLN Pembangkitan Tanjung Jati B); (b) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Kategori Tingkat Lanjutan sebanyak 44 sertifikat emas dan bendera emas serta 1 sertifikat perak dan bendera perak; (c) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Kategori Tingkat Awal sebanyak 28 sertifikat emas dan 3 sertifikat perak, namun demikian jumlah kecelakaan kerja pada tahun 2017 sebanyak 47 kasus atau meningkat dari 32 kasus pada tahun 2016.
- Realization of network losses in 2017 of 8.75% or better than the set maximum limit of 9.12%. The achievement of shrinking in 2017 is better than the achievement in 2016 of 9.48%. By 2017, management has successfully undertaken efforts to reduce network losses through investment and repair of transmission and distribution networks.
- By 2017, it has successfully signed 10,521 MW of IPP Program contracts of 35,000 MW or 80.65% of the set target of 12,710 MW.
- In 2017, PLN has successfully achieved 3 awards from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia, namely: (a) Nil Accident (PLN Distribution West Java Area Bandung and PLN Pembangkit Tanjung Jati B); (b) Advanced Level Category of Occupational Safety and Health Management System (SMK3) achieved 44 gold certificates and golden flags; (c) Basic Level Category of Occupational Safety and Health Management System (SMK3) achieved as much as 28 gold certificates and 3 silver certificates, unfortunately the number of work accidents in 2017 as many as 47 cases or increasing from 32 cases in 2016.

Dewan Komisaris mengapresiasi pencapaian kinerja dan upaya maksimal Direksi untuk menjadi bagian dari pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah meskipun terjadi pelemahan nilai tukar rupiah dan peningkatan signifikan terhadap harga energi primer di tahun 2017.

Kami juga mengapresiasi kesuksesan Direksi dalam melakukan efisiensi operasi dan keandalan, dimana manajemen telah melakukan penerapan program berkelanjutan *Operasional Performance Improvement* (OPI) untuk meningkatkan performa pada level terbaik pada bidang pembangkitan, transmisi, distribusi dan sumber daya manusia.

The Board of Commissioners appreciated the achievement and maximum effort of the Board of Directors' maximum efforts to be part of the government-proclaimed development despite the weakening of the rupiah and a significant increase in the price of primary energy in 2017.

We also appreciate the Directors' success in efficient operation and reliability, whereby management has implemented a sustainable *Operational Performance Improvement* (OPI) program to improve performance at the best levels in the areas of generation, transmission, distribution and human resources.

Laporan Dewan Komisaris  
Board of Commissioners Report**TINGKAT KESEHATAN**

Kinerja Direksi tersebut telah menghasilkan tercapainya KPI Manajemen PT PLN (Persero) tahun 2017 dengan Skor 96,61 (masuk pada golongan perusahaan BUMN yang SEHAT, kategori AAA. Dewan Komisaris memandang bahwa kinerja manajemen tersebut sudah baik dan harus dipertahankan atau sedapat mungkin ditingkatkan. Atas pencapaian tersebut Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada manajemen.

**PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS**

Dewan Komisaris senantiasa berupaya menjadi bagian dalam perjalanan usaha Perseroan bersama manajemen, sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Komisaris berdasarkan Undang-Undang Perseroan dan Undang-Undang tentang BUMN. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris berkomunikasi dengan Direksi. Metode penyampaian saran antara lain dilakukan melalui rapat konsultasi dengan Direksi ataupun melalui surat.

Masukan dan saran serta informasi hasil pengawasan yang disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi, antara lain berasal dari masukan komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut melakukan telaahan, kemudian hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dibahas, dan selanjutnya dikomunikasikan dengan Direksi.

Sepanjang tahun 2017, dalam rapat konsultasi dengan Direksi, Dewan Komisaris menyampaikan hasil pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi, yang antara lain menekankan agar Direksi terus memperkuat landasan dan menggali potensi dari seluruh sumber daya PLN yang dimiliki, termasuk kompetensi SDM yang tersedia, agar dapat secara optimal mendukung pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Perseroan.

**COMPANY'S HEALTH LEVEL**

In general, management performance is reflected on the Health Level / KPIs achievement with a score of 96.61 which placed the Company into the healthy State Owned Enterprise category with classification of "AAA". The Board of Commissioners view that the achievement is admirable and that it must be continuously maintained or improved as much as possible. For this achievement, the Board of Commissioners expresses its appreciation to and congratulates the management.

**DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS**

The Board of Commissioners strives to become part of the Company's business journey, corresponding with the inherent role and duties. In carrying out its duties in oversight and advice, the Board constantly communicates with the Board of Directors through coordination meetings and or by memo.

Feedback and suggestions made by Board of Commissioners as well as oversight outcomes are submitted to the Board of Directors, some of which originated from committees responsible to the Board of Commissioners. These committees perform analysis, and the findings are submitted to the Board of Commissioners and subsequently to the Board of Directors.

Throughout 2017, the Board of Commissioners convened meetings with the Board of Directors. On those occasions, oversight outcomes and advice were presented to management, including mandates, opinions, suggestions and advice on human resource competence and strategies to strengthen the Company's business foundation and explore other potentials.

## Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

Dewan Komisaris secara konsisten telah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan berbagai tugas operasional yang dijalankan Direksi melalui pertemuan berkala, kunjungan langsung ke wilayah, anak perusahaan serta lokasi pembangunan proyek ketenagalistrikan.

### LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Selain berhasil mempersembahkan kinerja yang baik serta menjaga kondisi Perseroan yang tetap sehat, manajemen juga masih berpegang teguh pada penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/ GCG*). Dewan Komisaris berpandangan seperti itu, di antaranya dengan memperhatikan komitmen manajemen menindaklanjuti temuan auditor, baik internal maupun eksternal.

Berdasarkan pemantauan kinerja PLN, Dewan Komisaris berpendapat bahwa sepanjang tahun 2017, hampir seluruh temuan auditor internal dan auditor eksternal telah ditindaklanjuti sedangkan sisanya sedang dalam proses. Atas temuan-temuan tersebut, Dewan Komisaris beserta Komite Audit secara berkala melakukan pembahasan dengan Satuan Pengawasan Intern. Dewan Komisaris berpendapat bahwa manajemen telah menindaklanjuti seluruh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal itu membuktikan bahwa manajemen memiliki komitmen yang kuat dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Selama tahun 2017, Direksi telah merealisasikan berbagai program penyempurnaan tata laksana serta melakukan sosialisasi kebijakan internal baru kepada seluruh jajaran perangkat Perseroan. Seluruh program tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada perkembangan *best practises* GCG terkini dan aturan terakhir menyangkut pelaksanaan GCG di Perusahaan BUMN.

The Board of Commissioners consistently supervises and provides advise on the progress of the Work and Budget Plan (RKAP) and on a variety of operational tasks undertaken by the Board of Directors through regular meetings and power plant site visits, and visits to subsidiaries and electricity project construction sites.

### CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION REPORT

In addition to have successfully presented a commendable performance for continuing good performance, the management also upheld good corporate governance (GCG). The Board of Commissioners has the opinion that management must remain committed in following up on finding of auditors, both internal and external.

Based on PLN's performance monitoring, the Board of Commissioners concluded that almost all of the findings of internal auditors and external auditors have been followed-up throughout 2017, while the rest are still in process. Based on the findings, the Board of Commissioners and the Audit Committee periodically discussed with the Internal Audit Unit. The Board of Commissioners finds that management has followed up on all decisions made in the General Meeting of Shareholders (AGM), demonstrating that the management has a strong commitment for good corporate governance.

During 2017, the Board of Directors has successfully improved various governance program and dissemination of new internal policies. The entire program was implemented with best practices and to the latest GCG proceedings for State-Owned Enterprises.

Laporan Dewan Komisaris  
Board of Commissioners Report

Kinerja penerapan GCG di PT PLN (Persero) ditunjukkan melalui skor GCG. Pelaksanaan penilaian implementasi GCG tahun 2017 di PT PLN (Persero) dilakukan dengan metode *self assessment* yang dilakukan berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: 16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara.

Secara keseluruhan, hasil *assessment* terhadap penerapan GCG di PT PLN (Persero) untuk periode tahun 2017 mencapai total skor sebesar 87,40. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di PT PLN (Persero) untuk periode tahun 2017 mencapai kualifikasi Sangat Baik.

Sebagai bagian dari *assessment* terhadap penerapan GCG di PT PLN (Persero), maka hasil *assessment* atas penerapan GCG di Dewan Komisaris PT PLN (Persero) mencapai 93,77% dengan kualifikasi Sangat Baik.

Dewan Komisaris juga mengapresiasi pencapaian manajemen pada penilaian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). Meskipun baru pertama kali mengikuti penilaian ini, Perusahaan berhasil mendapatkan skor 84,35 dengan predikat sebagai perusahaan "Terpercaya" atau "Trusted Company".

## PANDANGAN ATAS PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Terkait pengelolaan *Whistle Blowing System* (WBS), Dewan Komisaris berpandangan kebijakan manajemen harus menempatkan WBS sebagai bagian penting dalam manajemen risiko dan pengendalian internal Perusahaan, sebab merupakan bagian dari upaya tindakan preventif dan proaktif manajemen dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

The performance of GCG implementation in PT PLN (Persero) is made known through a GCG score. The GCG implementation assessment in 2017 in PT PLN (Persero) was performed with *self assessment* method. The assessments based on the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises Decision No. 16 / S.MBU / 2012 on the Indicators / Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

Results of the assessment for PT PLN's GCG for the period of 2016 reached a total score of 87.40. This indicates that the application of GCG in PT PLN (Persero) for the period 2017 falls under the excellent classification.

As part of the assessment of GCG at PT PLN (Persero), the assessment result of GCG implementation in PT PLN (Persero) Board of Commissioners reached 93.77% with an excellent qualification.

The Board of Commissioners also appreciated the management's achievement on the assessment of *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) organized by the Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). Although the first time to follow this assessment, the Company managed to get a score of 84.35 with a predicate as a "Trusted Company".

## VIEWS TO THE ADOPTION OF WHISTLE BLOWING SYSTEM

For the management of the *Whistle Blowing System* (WBS), the Board of Commissioners is of the opinion that management policies must position WBS as an important part of the Company's risk management and internal control system, as it is part of preventive and proactive management action in implementing good corporate governance.

## Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

Penerapan WBS terintegrasi dengan upaya menjaga kesinambungan usaha Perusahaan. Karena itulah, Dewan Komisaris mendukung dan ikut melakukan pengawasan terhadap implementasi WBS di Perseroan. Dewan Komisaris berharap komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik, khususnya implementasi WBS terus ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan.

### KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah membentuk organ pendukung, yaitu Komite Audit, Komite Manajemen Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Sepanjang tahun 2017, ketiga komite ini telah menjalankan fungsinya dengan baik, efisien dan efektif, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang berbobot kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya diteruskan kepada Direksi.

#### Komite Audit (KA)

Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite Audit yang dibentuk bersifat independen, sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar kepada pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsinya di bidang pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Seluruh temuan, catatan dan rekomendasi dari hasil pelaksanaan kegiatan, penelaahan dan analisa Komite Audit selama tahun 2017 telah dikomunikasikan dan didiskusikan dengan Manajemen Perseroan, Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan Auditor Eksternal, serta telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan tindak lanjut dari Manajemen Perusahaan.

Pada tahun 2017, Komite Audit telah melakukan telaahan serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris untuk, pendapat dan saran atas laporan manajemen, hasil temuan SPI dan auditor eksternal, usulan Direksi yang memerlukan persetujuan maupun rekomendasi Dekom terkait penghapusan Piutang Ragu-Ragu (PRR) dan Aktiva Tetap Tidak Beroperasi (ATTB), Aktiva Lainnya dan Piutang Macet. Keseluruhan proses yang berkaitan dengan tugas-tugas tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, secara ekonomis dan secara yuridis.

The WBS application must be integrated with efforts in maintaining Company's business continuity. Thus, the Board of Commissioners espouses and supervises the Company's implementation of WBS. The Board of Commissioners expects strong commitment to good corporate governance; in particular the implementation of WBS to be continuously enhanced and implemented on an on-going basis.

### PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners has established support units, namely the Audit Committee, Risk Management Committee and the Nomination and Remuneration Committee. Throughout 2017, all Committees have performed its functions well, efficiently, and effectively so as to provide substantial recommendations to the Board of Commissioners which were subsequently forwarded to the Board of Directors.

#### Audit Committee (KI)

The Board of Commissioners ensured that the Audit Committee was formed independently, thus providing substantial benefits to the Board of Commissioners in carrying out its functions in oversight and advice to the Board of Directors. All findings, remarks, recommendations, reviews and analysis made by the Audit Committee during the year 2017 were communicated and discussed with the management, Internal Audit and the external auditor, and reported to the Board of Commissioners for improvement to be made and followed-up by management.

In 2017, the Audit Committee has reviewed, opinion and analysis, also gave advice to the Board of Commissioners on management reports, SPI findings and external auditors, Board of Directors' suggestions requiring approval or recommendation of Dekom related to the elimination of Doubtful Receivables (Non Performing Loans) and Non-Operating Permanent Assets (ATTB) Other Assets and Receivables Loss. The entire process associated with these tasks can be accounted for technically, economically and jurisdictionally.

Laporan Dewan Komisaris  
Board of Commissioners Report**Komite Manajemen Risiko (KMR)**

Dewan Komisaris juga telah memberikan pertimbangan dan saran atas berbagai keputusan strategis yang akan dilakukan oleh Direksi berdasarkan analisis Komite Manajemen Risiko. Masukan-masukan yang telah diterima dari Komite Manajemen Risiko sangat bermanfaat bagi Dewan Komisaris dalam merumuskan pertimbangan kepada Direksi dalam pengambilan keputusan strategis.

Komite ini memiliki peran yang sangat strategis, terutama dalam memberikan pertimbangan. Salah satu tugasnya adalah menjalankan fungsi sebagai penilai independen dalam melakukan penelaahan terhadap kebijakan strategis perusahaan, yang dimintakan pertimbangan dan/atau persetujuan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, dan telah dilengkapi dengan hasil kajian manajemen risiko untuk kegiatan perusahaan yang memiliki potensi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.

Pada tahun 2017, Komite Manajemen Risiko telah melakukan telaahan pendapat dan saran atas rencana Direksi terkait pembahasan usulan penambahan organisasi UIP, penyertaan modal negara, penambahan modal anak perusahaan, pembahasan usulan pendanaan, permasalahan aktual perusahaan, persetujuan leasing, pembahasan laporan manajemen, RKAP, RJP, dan rencana akuisisi.

**Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR)**

Berdasarkan ketentuan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) sesuai surat Menteri BUMN Nomor: S-371/MBU/06/2015 tanggal 26 Juni 2015, maka dalam KNR terdapat anggota komite yang berasal dari pihak manajemen yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi manajemen sumber daya manusia, sehingga segala rekomendasi yang disampaikan oleh Komite kepada Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Hasil analisisnya telah dimanfaatkan dengan baik oleh Dewan Komisaris dalam memberikan pertimbangan kepada Direksi. Komite ini juga sangat penting dalam ikut menjaga kesinambungan organisasi Perseroan. Sebab salah satu tugasnya adalah menelaah dan memantau untuk memastikan bahwa Direksi telah menetapkan sistem Nominasi dan Remunerasi PT PLN (Persero) dengan baik.

**Risk Management Committee**

The Board of Commissioners has submitted advice and suggestions to the Board of Directors based on considerations and findings made by the Risk Management Committee. Recommendations and opinions presented by the Risk Management Committee were very beneficial to the Board of Commissioners in formulating advice to the Board of Directors in its strategic decision-making.

This Committee plays a strategic role, especially in delivering judgments. For one of its tasks as an independent appraiser is to conduct reviews on the strategic policies of the Company, to be delivered for consideration or approval by the Board of Directors to the Board of Commissioners, and with assessment in managing risk of corporate activities that could contain potential risks harming the Company's performance.

In 2017, the Risk Management Committee conducted analysis, provided opinions and suggestions on discussion of proposed addition of Construction Unit organization, state equity injection, subsidiary capital addition, discussion of funding proposal, actual company issue, lease approval, management report discussion, Work and Budget Plan, Long Term Plan, and acquisition plan.

**The Nomination and Remuneration Committee (KNR)**

Under the provision of the Nomination and Remuneration Committee membership (KNR) in accordance with Minister of SOE Letter No. S-371 / MBU / 06/2015 dated June 26, 2015, KNR committee members must consist of members from the Company who hold a managerial position under the Board of Directors Human resource management, so that any recommendation submitted by the Committee to the Board of Commissioners can be properly accounted for. The results of analysis have been beneficial for the Board of Commissioners in providing recommendations and opinions to the Board of Directors. This Committee is also very important in helping to maintain the continuity of the Company's organization. For one of its tasks is to examine and monitor to ensure that the Board of Directors has established the Nomination and Remuneration Committee of PT PLN (Persero) appropriately and impartially.

## Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

Pada tahun 2017, Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan telaahan pendapat dan saran atas usulan Direksi yang memerlukan persetujuan dan/atau rekomendasi Dewan Komisaris terkait pengisian personil Dewan Komisaris dan Direksi anak perusahaan serta besaran remunerasi Direksi PT PLN (Persero).

### PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA

Dewan Komisaris memandang bahwa pertimbangan yang dijadikan alasan dalam menyusun target tersebut sangat rasional. Pijakan terhadap proyeksi yang dibuat oleh pemerintah adalah keputusan yang sangat baik, mengingat kegiatan usaha Perseroan merupakan bagian penting dari rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pergerakan ekonomi Indonesia pada tahun 2017, seperti ditargetkan oleh pemerintah cenderung bergerak positif. Kondisi itu akan berdampak positif terhadap kegiatan dunia usaha serta pendapatan masyarakat. Karena itulah, kinerja Perseroan berpotensi ikut bergerak secara positif seiring dengan perkembangan faktor eksternal yang membaik.

Berbekal kinerja yang telah dicapai oleh Direksi dalam beberapa tahun terakhir, Dewan Komisaris memandang bahwa prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi sangat realistis. Apalagi ditunjang dengan kemampuan Direksi mengambil inisiatif strategis di tengah lingkungan usaha yang penuh dengan tantangan, tentu sejumlah target yang telah ditetapkan sangat memungkinkan untuk diraih.

Kendati demikian, Dewan Komisaris berpandangan adanya sejumlah hal spesifik yang perlu diperhatikan Direksi untuk tahun 2017, yaitu:

- Harga batubara yang merupakan komponen energi primer terbesar naik signifikan selama tahun 2017 sehingga menggerus laba Perusahaan meskipun Direksi telah melakukan efisiensi secara masif di berbagai aktivitas operasional.
- Konsumsi listrik per pelanggan menurun, terindikasi dari pertumbuhan jumlah pelanggan sebesar 5,89% dari tahun sebelumnya namun tidak diimbangi dengan pertumbuhan penjualan tenaga listrik yang hanya naik 3,3% dari tahun 2016.

In 2017, the Nomination and Remuneration Committee conducted analysis, provided opinions and suggestions following a proposal by Board of Directors that required the approval or recommendation of the Boards of Commissioners and Directors relating to boards of commissioners and directors of subsidiaries, and their remuneration.

### VIEWS ON BUSINESS PROSPECTS

The Board of Commissioners has the point of view that the foundation of judgment in preparing the business target is viable and rational. The basis of the forecast prepared by the government is sound, considering the fact that the Company's business operation is an important part of the government's plan. Indonesia's economic trend for 2017, as forecasted by the government, tends to be on the positive side. Should it be true, it will definitely give a positive impact to the Company business. For this reason, the Company's performance may likely further accelerate along with the external economic improvement factors.

Armed with the admirable Company performance presented by the Board of Directors in the past few years, The Board of Commissioners has the opinion that the business forecast prepared by the Board of Directors is realistic. Furthermore, with the Board of Directors ability to take strategic initiatives in midst of business environment full of challenges, the Board of Commissioners has the confidence that the business targets are achievable.

Nevertheless, the Board of Commissioners deemed that a number of specific matters need to be considered the by the Board of Directors for 2017, namely:

- The price of coal, which is the largest component of primary energy, increased significantly during 2017, eroding the Company's profit even though the Board of Directors has made massive efficiencies in various operational activities.
- Consumption of electricity per subscriber declined, indicated by a 5.89% growth in subscribers from the previous year but not offset by electricity sales growth of 3.3% only from 2016.

Laporan Dewan Komisaris  
Board of Commissioners Report

Anomali persentase pertumbuhan jumlah pelanggan yang biasanya di dominasi oleh Pelanggan Rumah Tangga, namun di tahun 2017 jauh di bawah persentase pertumbuhan Pelanggan Bisnis dan Pelanggan Industri.

Anomaly growth in the number of subscribers normally dominated by Household Customers, but in 2017 well below the growth percentage of Business Customers and Industrial Customers.

**PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS**

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) No. SK-41/MBU/02/2017 tanggal 28 Februari 2017, No. SK-128/MBU/07/2017 tanggal 12 Juli 2017, dan No. SK- 145/MBU/07/2017 tanggal 28 Juli 2017 telah terjadi pergantian susunan personalia komisaris, yakni pemberhentian dengan hormat Saudara Andin Hadianto dan Saudara Jarman sebagai Komisaris serta bergabungnya Saudara Rionald Silaban, Saudara Andy Noorsaman Sommeng dan Saudari Ilya Avianti sebagai Komisaris.

Komposisi Dewan Komisaris PT PLN (Persero) pada akhir tahun 2017 adalah sebagai berikut:

**CHANGES TO BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION**

In accordance with the Decree of the Minister of SOEs as the AGMS of PT PLN (Persero) no. SK-41 / MBU / 02/2017 dated February 28, 2017, No. SK-128 / MBU / 07/2017 dated July 12, 2017, and no. SK-145 / MBU / 07/2017 dated July 28, 2017 there has been a change of the commissioner's personnel structure, namely the honorable dismissal of Mr. Andin Hadianto and Mr. Jarman as Commissioners and the joining of Mr. Rionald Silaban, Mr. Andy Noorsaman Sommeng and Mrs. Ilya Avianti as Commissioners.

The composition of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) at the end of 2017 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Akhir Masa Jabatan End of Office Term
Hasan Bisri	Plt. Komisaris Utama   Acting President Commissioner	24 Mei 2016   24 May 2016	-
	Komisaris   Commissioner	23 Desember 2014   23 December 2014	23 Desember 2019   23 December 2019
Oegroseno	Komisaris Independen   Independent Commissioner	16 Oktober 2014   16 October 2014	16 Oktober 2019   16 October 2019
Darmono	Komisaris Independen   Independent Commissioner	16 Oktober 2014   16 October 2014	16 Oktober 2019   16 October 2019
Budiman	Komisaris   Commissioner	23 Desember 2014   23 December 2014	23 Desember 2019   23 December 2019
Harry Susetyo Nugroho	Komisaris   Commissioner	2 April 2013   2 April 2013	2 April 2018   2 April 2018
Aloysius K. Ro	Komisaris   Commissioner	25 September 2015   25 September 2015	25 September 2020   25 September 2020
Rionald Silaban	Komisaris   Commissioner	28 Februari 2017   28 February 2017	28 Februari 2022   28 February 2022
Andy Noorsaman Sommeng	Komisaris   Commissioner	12 Juli 2017   12 July 2017	12 Juli 2022   12 July 2022
Ilya Avianti	Komisaris   Commissioner	28 Juli 2017   28 July 2017	28 Juli 2022   28 July 2022

## Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

Kepada anggota Dewan Komisaris yang telah menyelesaikan tugasnya di PLN, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan selama bertugas. Sedangkan kepada jajaran anggota Dewan Komisaris yang baru, Dewan Komisaris menyampaikan selamat bergabung semoga mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi negara melalui PT PLN (Persero).

### **PENUTUP**

Kepada Direksi dan jajaran di bawahnya, Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas pencapaian kinerja usaha tahun 2017 yang baik, walaupun banyak tantangan yang dihadapi. Dengan kinerja positif yang dilakukan manajemen, kondisi perlambatan ekonomi serta sejumlah indikator makro yang berpotensi memberikan pengaruh negatif terhadap dunia usaha dapat diatasi dengan baik di tahun 2017.

Dewan Komisaris berharap agar Direksi dan jajarannya tetap melakukan inovasi-inovasi dan inisiatif strategi yang baik serta relevan, sehingga kinerja Perusahaan tetap tumbuh.

Dewan Komisaris juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh pemegang saham untuk menjadi bagian penting dari perjalanan usaha Perseroan. Begitu pun dengan arahan dan bimbingan yang telah disampaikan oleh pemegang saham.

To the Board of Commissioners who have completed their duties at PLN, the Board of Commissioners expressed gratitude for the contribution that has been given during the duty. As for the new Board of Commissioners, the Board of Commissioners wishes to be able to contribute the best for the state through PT PLN (Persero).

### **CLOSING STATEMENT**

To the Board of Directors and its subordinates, the Board of Commissioners appreciates the achievement of good business performance in 2017, despite many challenges. With the positive performance performed by the management, the economic slowdown and a number of macro indicators that have the potential to negatively affect the business world can be overcome well in 2017.

The Board of Commissioners trust that the Board of Directors and management will continue to innovate and formulate relevant strategic initiatives to further enhance the Company's performance.

The Board of Commissioners also expressed gratitude for the trust given by the shareholders to be a part of the Company's business journey, even more so with the direction and guidance given by the shareholder.

## Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

Kepada para pemangku kepentingan baik di internal maupun eksternal Perseroan, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang sudah berjalan selama ini. Dengan dukungan para pemangku kepentingan pula, manajemen mampu menyajikan kinerja usaha yang baik untuk Tahun Buku 2017.

To stakeholders both external and internal of the Company, the Board of Commissioners expresses its deepest appreciation for the cooperation already at hand. With the unrelenting support of the stakeholder, the management has able to present an admirable business performance for fiscal year 2017.

Jakarta, April 2018



**Hasan Bisri**

**Pt. Komisaris Utama**  
Acting President Commissioner

# Dewan Komisaris

## Board of Commissioners



1

2

3

4

1.  
**Budiman**  
Komisaris  
Commissioner

3.  
**Hasan Bisri**  
Komisaris merangkap sebagai Plt. Komisaris Utama  
Commissioner and Acting President Commissioner

2.  
**Rionald Silaban**  
Komisaris  
Commissioner

4.  
**Ilya Avianti**  
Komisaris  
Commissioner

Dewan Komisaris  
Board of Commissioners



5

6

7

8

9

5.  
**Aloysius K. Ro**  
Komisaris  
Commissioner

6.  
**Darmono**  
Komisaris Independen  
Independent Commissioner

7.  
**Andy Noorsaman Sommeng**  
Komisaris  
Commissioner

8.  
**Harry Susetyo Nugroho**  
Komisaris  
Commissioner

9.  
**Oegroseno**  
Komisaris Independen  
Independent Commissioner



**Sofyan Basir**  
Direktur Utama  
President Director

## LAPORAN DIREKSI

### Board of Directors Reports

“Tahun 2017 merupakan tahun yang semakin menegaskan terjadinya transformasi PLN menuju ekselen. Melalui implementasi sejumlah kebijakan strategis yang dijalankan dengan konsisten terukur dan terarah, PLN terus menjelma menjadi korporasi yang semakin sehat, *agile* dan mampu merespon dinamika usaha dengan semakin baik. Kami berkomitmen untuk terus menjalankan tugas utama sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi melalui kinerja ekselen di bidang ketenagalistrikan dan merealisasikan program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang telah dicanangkan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa.”

“In 2017, we affirmed our commitment to transformation process towards excellence. Through the implementation of consistent, measurable and focused strategic policies, PLN continues to transform into a more sound, agile corporation that can better respond to the business dynamics. We are committed to continue the main task of spearheading economic growth through outstanding performance in the power sector and executing the electricity infrastructure development programs to enhance the nation’s welfare.”

#### Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Tahun 2017 telah kita lalui bersama dan akan kita kenang sebagai tahun yang penuh tantangan, namun hasil-hasil pencapaian di akhir tahun telah menunjukkan bahwa kita dapat melaluinya dengan baik. Kami tetap berkomitmen untuk berdiri paling depan dalam membangun infrastruktur ketenagalistrikan yang menjangkau seluruh pelosok negeri dengan pasokan listrik yang handal dan menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2017 disisi lain, menjadi tahun yang amat berkesan bagi seluruh jajaran insan PLN, termasuk kami, mengingat pada tahun ketiga kami bertugas, Perseroan telah semakin menunjukkan wajah transformasinya, untuk menjelma menjadi *world class company* dengan kinerja yang unggul di bidang ketenagalistrikan. Keberhasilan tersebut tak lepas dari komitmen seluruh jajaran dalam mengimplementasikan strategi pengembangan usaha dan strategi operasional yang dijalankan secara konsisten dan berfokus pada satu tujuan bersama, yakni terpenuhinya kebutuhan pelanggan akan pasokan tenaga listrik yang semakin handal dan terjangkau berkat pengelolaan yang semakin efisien.

#### Dear Distinguished Shareholders,

We have journeyed through 2017 and let us recall it as a challenging year. Despite this, our achievements at the end of the year show our best efforts to sail it through. We stay committed to be at the forefront of electricity infrastructure development that reaches all corners of the country with reliable power supply, supporting economic growth to enhance people’s welfare.

Moreover, 2017 was a very special year for all of us at PLN, and for ourselves especially, as we entered our third year in office and the Company has continued to render its transformation in becoming a world class company with excellent performance in the electricity sector. This accomplishment is inseparable from all of the Company’s commitment in implementing consistent business development strategy and operational strategy, and focusing on one common goal, which is the fulfillment of customer demand for a more reliable and affordable electricity supply made possible by efficient management.

## Laporan Direksi

Board of Directors Reports

Pada kesempatan ini, izinkan kami atas nama manajemen menyampaikan Laporan Tahunan PT PLN (Persero) untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 dengan menguraikan ringkasan strategis yang kami jalankan untuk mengatasi berbagai tantangan yang kami hadapi dan menjelaskan berbagai raihan kinerja operasional, serta finansial sebagai wujud tanggung jawab kami dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

## ANALISIS TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN

### Kendala, Sasaran Strategis dan Prioritas Strategis

Kinerja tahun 2017 menjadi bukti bahwa kami telah menetapkan sasaran strategis dan menjalankan inisiatif strategis dengan baik. Kami menghadirkan peningkatan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan melalui penambahan kapasitas dan distribusi listrik yang semakin merata, pembukaan lapangan kerja, penurunan beban subsidi, pendorong peningkatan indeks *Ease of Doing Business* Indonesia, perbaikan kualitas pengelolaan sistem ketenagalistrikan, serta peningkatan kualitas tanggung jawab sosial Perusahaan.

Dengan tugas utama menyediakan tenaga listrik yang memadai, handal, terjangkau dan mencakup seluruh wilayah Indonesia yang luas dan terdiri dari ribuan pulau, menghadirkan beragam tantangan/kendala bagi Perseroan, dan membutuhkan penyusunan program *multiyear* yang harus dilaksanakan dengan konsisten dan berkesinambungan. Untuk memastikan kecukupan pasokan tenaga listrik diseluruh Indonesia, PLN telah berkomitmen untuk menuntaskan tambahan pembangunan pembangkit listrik sebesar 35.000 Megawatt (MW) plus 7.000 MW, selain saluran transmisi sepanjang 46.000 kms dan gardu induk sebesar 108 MVA dalam beberapa tahun ke depan dengan tetap memperhatikan kondisi pertumbuhan kebutuhan listrik dan kebutuhan cadangan daya mampu.

### Kendala dan Langkah-langkah Penyelesaian

Kami telah mengidentifikasi seluruh kendala yang dihadapi, menetapkan sasaran strategis dan merumuskan inisiatif strategi dalam mewujudkan sasaran tersebut di tahun 2017, dengan penjelasan ringkas sebagai berikut. Tantangan dan kendala yang kami hadapi dalam

In this occasion, allow us on behalf of the management to submit the Annual Report of PT PLN (Persero) for the Fiscal Year ended on 31 December 2017 by outlining our strategic summary in addressing the challenges and to elaborate the operational and financial performances, as well as our responsibility in conducting business activities.

## ANALYSIS OF THE COMPANY PERFORMANCE

### Challenges, Strategic Objectives and Strategic Priorities

The 2017 performance is testament to our set strategic goals and well execution of strategic initiatives. We have brought added value to all stakeholders by increasing capacity and distribution of electricity, job opening, reduced subsidies, improvement of the Ease of Doing Business Indonesia index, improvement of electricity management system quality, and the quality of corporate social responsibility.

With the main task of providing sufficient, reliable, affordable and well-distributed power to cover the vast and diverse Indonesian territory which encompasses thousands of islands, various challenges and constraints were encountered by the Company. The preparation of multiyear programs is required, and shall be consistently and continuously implemented. To ensure adequate supply of power across Indonesia, PLN has committed to finalize the construction of an additional 35,000 Megawatt (MW) plus 7,000 MW power plant, in addition to 46,000 kms of transmission lines and 108 GVA substations in the next few years while paying close attention to the growth of electricity power demand and the need for power reserves.

### Challenges and Measures to Resolution

We have identified all challenges, set strategic goals and formulated strategic initiatives in realizing 2017 targets with the following elaboration. The challenges and obstacles in building capacity and fair distribution of electricity include the Financial Capability, Land

membangun kecukupan kapasitas ketenagalistrikan dan mendistribusikan tenaga listrik secara merata, mencakup: Kemampuan keuangan, Pembebasan lahan dalam pembangunan kapasitas sarana ketenagalistrikan, Pengamanan pasokan energi, Efisiensi operasi, Regulasi dan *Stakeholder Management*, Kepercayaan Pelanggan dan Kesiapan SDM dengan Struktur Organisasi Baru PLN.

### Sasaran Strategis

Kami kemudian menetapkan Sasaran Strategis untuk memastikan tercapainya tugas pokok dalam memenuhi seluruh kebutuhan listrik yang handal dan terjangkau, yakni PLN bertekad: Membangun Kapasitas (*Developing Capacity*), Menyempurnakan Pengelolaan Energi Primer (*Improving Primary Energy Management*), Meningkatkan Kinerja Operasional (*Improving Operational Performance*), Mewujudkan Pelayanan Pelanggan yang Prima (*Building Customer Service Excellence*), Mengembangkan Usaha dan Portofolio (*Developing Business and Portfolio*), Meningkatkan Kemampuan Keuangan (*Improving Financial Capability*), Meningkatkan Keunggulan Pengelolaan Organisasi dan SDM (*Improving Organization and HCM Excellence*), serta Menyempurnakan Manajemen Stakeholder dan Regulasi (*Improving Stakeholder and Regulatory Management*).

### Program Prioritas Strategis

Untuk mencapai seluruh sasaran strategis tersebut, kami telah menetapkan Program-program Prioritas Strategis, mencakup:

1. Menyelesaikan program 35.000 MW serta penyelesaian FTP I dan FTP II.  
Realisasi program prioritas ini ditujukan untuk menjamin kehandalan pasokan listrik, kecukupan pasokan dan meningkatkan rasio elektrifikasi Indonesia yang masih tertinggal dari beberapa negara kawasan ASEAN. Di tahun 2017 Perusahaan merealisasikan *Commerical Operation Date* (COD) pembangunan pembangkit dengan total tambahan kapasitas sebesar 2.104 MW. Selain itu, Perusahaan juga merealisasikan *energize* 4.616 kms jaringan transmisi dan 16.210 MVA kapasitas gardu induk dengan pencapaian rasio elektrifikasi yang kini telah mencapai 93,03% (pelanggan PLN) atau 95,4% (termasuk pelanggan non PLN), diatas target 92,75%.

Acquisition in the Development of Electricity Capacity Building, Energy Supply Safety, Operational Efficiency, Regulation and Stakeholder Management, Customer Trust and Human Resources that is prepared for PLN's New Organizational Structure.

### Strategic Objectives

We then set the Strategic Objectives to ensure the achievement of fundamental tasks in providing reliable and affordable electricity, and PLN is determined to: Developing Capacity, Improving Primary Energy Management, Improving Operational Performance, Building Customer Service Excellence, Developing Business and Portfolio, Improving Financial Capability, Improving Organization and HCM Excellence, and Improving Stakeholder and Regulatory Management.

### Strategic Priority Program

To achieve these strategic objectives, we have established Strategic Priority Programs, including:

1. Completion of the 35,000 MW program as well as FTP I and FTP II.  
The realization of this priority program is aimed at ensuring the reliability and adequacy of electricity supply as well as to increase Indonesia's electrification ratio which still lags behind some other ASEAN countries. In 2017, PLN realization the *Commercial Operation Date* (COD) of power plant development programs with a total capacity of 2,104 MW. In addition, the Company also energized 4,616 kms of transmission lines and 16,210 MVA of substation capacity with electrification ratio reaching 93,03% (PLN customers) or 95,4% (including non PLN customers), higher than the targeted 92.75%.

## Laporan Direksi

## Board of Directors Reports

2. Mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan konservasi energi termasuk melalui partisipasi pelanggan.  
Seiring dengan memenuhi kebutuhan listrik di wilayah *off grid* dan menciptakan energi ramah lingkungan, Perusahaan terus memberikan kontribusi untuk menciptakan lingkungan yang sehat melalui pengembangan EBT dan konservasi energi yang fokus pada pengembangan geothermal dan pemanfaatan energi air. Selain itu, kami juga terus mengembangkan Pembangkit EBT lainnya seperti Bayu, Bio Massa, Bio Gas, dan Surya. Pada tahun 2017, Perusahaan telah menandatangani *Power Purchase Agreement* (PPA) sebanyak 70 pembangkit EBT dengan total kapasitas 1.210,70 MW.
  3. Melaksanakan program *Demand Side Management* yang terintegrasi dengan struktur tarif.  
Program *Demand Side Management* dilakukan untuk mengoptimalkan pengoperasian pembangkit sehingga didapatkan Biaya Pokok Penyediaan Listrik optimal. Mekanisme program ini dilakukan dengan memberikan insentif tarif berupa promo diskon pemakaian energi pada waktu di Luar Waktu Beban Puncak (LWBP) untuk mendorong penjualan bagi pelanggan Industri Menengah dan Besar. Pada tahun 2017, total penjualan listrik dengan kWh Promo LWBP adalah sebesar 1.615,7 GWh atau naik sebesar 116,30% dari 746,98 GWh di tahun 2016.
  4. Melanjutkan perbaikan kemampuan meminjam (*Debt Capacity*) dan mendapatkan pinjaman dengan biaya yang paling efisien bagi PLN.  
Kami berkomitmen untuk menjaga sustainabilitas keuangan PLN sehingga memiliki kemampuan pendanaan yang memadai untuk mendukung kebutuhan pertumbuhan perusahaan. Dalam upaya membiayai investasi ketenagalistrikan, kami berupaya untuk terus menjaga rasio pemenuhan *covenant* pinjaman seperti *Debt Service Coverage Ratio*, *Consolidated Interest Coverage Ratio* (CICR), *Ratio of Financial Liabilities to Total Assets*, *EBITDA interest coverage ratio*, dan *Free Assets to interest bearing liabilities ratio*. Selain itu, kami juga berupaya mencari sumber- sumber pendanaan dengan biaya *cost of fund* yang paling efisien.
2. Developing New and Renewable Energy (NRE) and energy conservation including customer participation.  
In addition to addressing the electricity needs of off grid areas and producing environmentally friendly energy, the Company continues to contribute in creating a sound environment through the development of NRE and energy conservation that focuses on geothermal development and utilization of water energy. In addition, we also continue to develop other NRE-based power plants such as Wind, Biomass, Biogas, and Solar Power. In 2017, the Company signed a Power Purchase Agreement (PPA) of 70 EBT generators with a total capacity of 1,210.70 MW.
  3. Executed the Demand Side Management program integrated with tariff structure.  
The Demand Side Management program was conducted to optimize the power plant operation to obtain the optimum Cost of Supply. The mechanism of this program is carried out by providing tariff incentives such as outside Peak Hours (LWBP) discount to boost sales in Medium and Large Industry customers. In 2017, total sales of electricity with LWBP Promo amounted to 1,615.7 GWh or a 116.30% increase from 746.98 GWh in 2016.
  4. Continue Debt Capacity improvement and obtain most cost-efficient loan for PLN.  
We are committed to maintain PLN's financial sustainability to establish adequate funding capabilities to support the company's growth. In an effort to finance electricity investment, we continue to maintain covenant loan fulfillment ratio such as Debt Service Coverage Ratio, Consolidated Interest Coverage Ratio (CICR), Ratio of Financial Liabilities to Total Assets, EBITDA interest coverage ratio, and Free Assets to interest bearing liabilities ratio. In addition, we are constantly on the look for the most cost-effective cost of funds sources.

5. Menurunkan *fuel cost*.  
Penurunan *non fuel cost* dilakukan melalui perbaikan bauran energi, dengan memperbesar penggunaan batubara untuk pembangkit di grid utama dan gas bumi/CNG di pembangkit di kawasan non-grid utama, utamanya daerah Maluku-Papua dan Nusa Tenggara yang jauh dari sumber pasokan batubara. Tahun 2017 strategi ini mampu menurunkan volume konsumsi minyak bumi sebesar 22,9% sehingga bauran energi non BBM meningkat menjadi sebesar 94,40%
  6. Menurunkan angka SAIDI, SAIFI dan Susut Jaringan.  
Penurunan SAIDI, SAIFI dilakukan dengan cara menurunkan volume gangguan transmisi, pembangkit dan distribusi, *update defense scheme*, implementasi *free governor*, peningkatan kesiapan *black start* unit pembangkit dan *line charging*, optimalisasi PDKB, serta pembangunan dan pengembangan sistem distribusi/SCADA. Sementara untuk menurunkan susut jaringan, kami melakukan penambahan penyulang untuk jaringan tegangan menengah maupun rendah, pemasangan gardu sisipan pada jaringan distribusi, *reconductoring*, penyeimbangan beban trafo, pemeliharaan alat ukur kWh meter, mengintensifkan program *Revenue Assurance*, melaksanakan penertiban PJU liar dan P2TL secara konsisten, perbaikan pengadaan Material Distribusi Utama (MDU), penyempurnaan sistem *Billing Management*, serta penyelesaian pembangunan pembangkit dan transmisi terkait.
  7. Mempersiapkan regenerasi pimpinan perusahaan.  
Kami menjalankan program regenerasi melalui implementasi Talent Management dan pelaksanaan program pelatihan. Pelatihan kepemimpinan Perusahaan diimplementasikan melalui *Executive Education I* untuk Level Manajemen Atas yang berdasarkan *global blended leadership module*. Pelatihan regenerasi pimpinan Perusahaan tersebut melalui tahapan yang begitu komprehensif karena memantapkan berbagai aspek seperti *candidate readiness*, *nurturing leadership*, *leader exposure*, dan *leader experiences*.
5. Reduce non-fuel cost.  
Implemented through the improvement of fuel mix, by increasing the use of coal for power plants in the main grid and natural gas/CNG in major non-grid area power plants, mainly Maluku-Papua and Nusa Tenggara regions that are located far from the coal supply. In 2017, this strategy was able to reduce the volume of fuel consumption by 22.9% hence the non-petroleum fuel mix increased by 94.40%.
  6. Reduce the number of SAIDI, SAIFI and Electricity Loss.  
The reduction of SAIDI and SAIFI was carried out by reducing the volume of transmission interruption, power generation and distribution, defense scheme updates, free governor implementation, improved black start unit and line charging preparation, PDKB optimization, and development of distribution systems/SCADA. Meanwhile, to decrease network losses, we placed additional feeders for medium and low voltage networks, installation of substations insertion in the distribution network, reconductoring, transformer load balancing, kWh meter equipment maintenance, intensifying the Revenue Assurance program, enforcing control on illegal PJU and P2TL, improvements on the procurement of Major Material Distribution (MDU), improvements to the Billing Management system, as well as finishing the construction of related power plants and transmissions.
  7. Prepare for regeneration of company leaders.  
We administer a regeneration program through the implementation of Talent Management and training programs. The Company leadership training is implemented through Executive Education I for Top Management Levels based on the global blended leadership module. The regeneration training of the Company leaders is implemented through comprehensive stages as it develops various aspects such as candidate preparation, nurturing leadership, leader exposure, and leader experiences.

## Laporan Direksi

### Board of Directors Reports

8. Melanjutkan program Listrik Prabayar/Listrik Pintar. Program ini kami lanjutkan untuk memberi pilihan penggunaan tenaga listrik yang efektif dan efisien kepada pelanggan. Hingga akhir tahun 2017, kami mencatatkan jumlah pelanggan sebesar 30.377.840 pelanggan prabayar, naik 17,39% dari 25.878.612 di tahun sebelumnya.

8. Continue the Prepaid Electricity/Smart Electricity program. This program was continued to provide efficient and effective electricity for the customers. By the end of 2017, we recorded a total of 30,377,840 prepaid subscribers, or a 17.39% increase from 25,878,612 in the previous year.

## PERBANDINGAN ANTARA HASIL YANG DICAPAI DENGAN YANG DITARGETKAN

Sebagai Perusahaan dengan lingkup tugas mencakup peran penyedia layanan umum, *public service obligation* (PSO) yakni menyediakan tenaga listrik yang memadai dengan harga yang terjangkau, PLN mencatatkan kinerja yang bervariasi berdasarkan ukuran target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Pada umumnya target-target operasional yang mencakup pelaksanaan tugas PSO, dapat dicapai dengan baik. Namun untuk kinerja keuangan, utamanya target laba bersih dan laba usaha, tidak tercapai, terutama disebabkan keputusan kami untuk tidak menaikkan tarif agar dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan bisnis dan industri di tengah *exposure* kenaikan harga energi primer dan pelemahan nilai tukar rupiah. Namun demikian, secara keseluruhan kinerja PLN tahun 2017 menunjukkan perkembangan yang membanggakan, seperti uraian berikut.

## PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

Kami berupaya keras mengatasi seluruh kendala yang mengiringi dalam merealisasikan target pembangunan infrastruktur tersebut, dan pada akhir tahun 2017, berhasil mencatatkan penyelesaian pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, sebagai berikut: Tambahan kapasitas untuk pembangkit dengan total 2.104 MW, Transmisi 4.616 kms dan Gardu Induk 16.210 MVA.

## REALIZATION AND TARGETS

As a company with public service obligation (PSO), which includes providing adequate electricity at an affordable price, PLN recorded varied performance based on the targets set in the Company's Work and Budget Plan (RKAP). In general, operational targets that include the implementation of PSO tasks was well achieved. However, in terms of financial performance, especially net income and operating income target, was not achieved, mainly due to our decision not to raise tariffs to be able to contribute to business and industry growth amidst primary energy price increases and the weakening of the rupiah. Nevertheless, PLN's overall performance in 2017 rendered a satisfactory development, as described below.

## DEVELOPMENT OF ELECTRICAL INFRASTRUCTURE

We enforced substantial efforts in overcoming the challenges in attaining the infrastructure development targets. By the end of 2017, we succeeded in completing the following construction of electricity power infrastructure: Additional capacity for the plant with a total of 2,104 MW, 4,616 kms Transmission and 16,210 MVA for substations.

## KINERJA OPERASIONAL

Dedikasi, kerja keras, kedisiplinan dan integritas seluruh jajaran dalam melaksanakan beragam inisiatif strategis untuk mencapai target-target prioritas di tahun 2017 memberikan capaian sebagai berikut:

### Produksi, Pembelian Tenaga Listrik dan Bauran Energi

PLN terus berupaya meningkatkan suplai tenaga listrik, melalui produksi dari pembangkit milik sendiri, pembelian dari pembangkit swasta, dan sewa. Hasilnya, total produksi tenaga listrik tahun 2017 naik 2,43% menjadi 254.660 GWh dari tahun sebelumnya, sebesar 248.611 GWh. Realisasi produksi tersebut, kendati meningkat dari tahun 2016 masih belum memenuhi target produksi tahun 2017 sebesar 257.460 GWh atau berarti pencapaian sebesar 98,91%.

Sebesar 167.978 GWh atau 66% dari total produksi tenaga listrik tahun 2017 berasal dari pembangkit milik sendiri, sebesar 73.235 GWh atau 28,8% berasal dari pembelian listrik swasta, sementara sisanya sebesar 13.447 GWh atau 5,2% berasal dari pembangkit sewa.

Kami menerapkan strategi mengurangi penggunaan BBM, dan meningkatkan penggunaan sumber energi lain seperti batubara, gas dan sumber energi terbarukan guna mendapatkan pola bauran energi yang memberi *benefit* optimal dalam rangka menekan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP).

Produksi tenaga listrik yang berasal dari pembangkit sendiri berbahan bakar minyak (BBM) kembali berhasil kami turunkan sebesar 22,77% dari tahun 2016, menunjukkan usaha untuk menekan produksi tenaga listrik dari pembangkit berbahan bakar minyak telah sejalan dengan prioritas program kerja Perseroan, yakni menurunkan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik melalui optimalisasi produksi tenaga listrik dari pembangkit non BBM. Sementara produksi listrik berbahan bakar BBM turun, kami terus mencatatkan kenaikan produksi listrik non-BBM, sehingga kondisi bauran energi semakin baik.

## OPERATIONAL PERFORMANCE

Dedication, hard work, discipline and integrity from all levels of the Company in implementing various strategic initiatives to achieve the priority targets in 2017 have made the following achievements possible:

### Production, Purchase of Electricity and Energy mix

PLN continued to improve its supply of electricity, through the production of its own generators, purchases from private power plants, and leased plants. As a result, total power production in 2017 increased by 2.43% to 254,660 GWh from the previous year which amounted to 248,611 GWh. This number, although an increase from 2016, still did not meet the production target in 2017 of 257,460 GWh or 98.91% of the target.

A total of 167,978 GWh or 66% of total electricity production in 2017 was produced by the company-owned power plants, 73,235 GWh or 28.8% derived from private electricity purchases, while the remaining 13,447 GWh or 5.2% was produced by leased plants.

We implemented strategies to reduce fuel use, and increased the use of other energy sources such as coal, gas and renewable energy sources to obtain energy mix pattern that provides optimal benefit in order to reduce Cost of Supply.

Production of electricity generated from the company-owned fossil-fuel power plants was currently decreased by 22.77% from 2016, indicating that our efforts in reducing electricity production from fossil-fuel power plants have been in line with the Company's priority work program, which is to reduce Cost of Supply through optimization of electricity production from non-fuel power plants. Meanwhile, the production of fuel-generated electricity has declined, and we continue to book an increase in non-fuel electricity production that improved the energy mix.

## Laporan Direksi

Board of Directors Reports

Tahun 2017, bauran energi pembangkit BBM hanya sebesar 6%, mayoritas produksi listrik yakni 94% menggunakan energi non BBM. Dari 94% tersebut, 58,14% merupakan produksi listrik dari pembangkit batubara. Kami juga semakin intens mengembangkan pembangkit listrik menggunakan bahan bakar terbarukan (EBT) baik panas bumi, Air, biomass, bayu dan lain-lain, sebagai wujud partisipasi PLN dalam mendukung pencapaian beragam tujuan pembangunan berkelanjutan dalam SDGs.

Tahun 2017, terjadi kenaikan substansial pada harga batubara. Mengingat prosentase pemakaian batubara sebagai sumber energi terus meningkat, kenaikan harga batubara tersebut langsung berdampak pada naiknya BPP menjadi di kisaran Rp1.318,0/kWh naik 4,2% dari Rp1.265,0/kWh di tahun 2016. Sekalipun meningkat, raihan BPP tersebut masih berada dibawah target BPP yang sebesar Rp1.350,0/kWh. Mengingat kualitas bauran energi memberi dampak nyata terhadap besaran BPP, kami akan tetap berupaya meningkatkan kualitas bauran energi dimaksud.

In 2017, the fuel power plant energy mix was only 6%, with the majority or 94% of the electricity production using non-fuel energy. Of the 94%, 58.14% of the electricity was produced by from coal plants. We also have intensified the development of NRE-based power plants using geothermal, water, biomass, wind and others, as a form of PLN's participation in supporting various sustainable development goals in SDGs.

In 2017, there was a substantial increase in coal prices. Given the percentage of coal consumption as an energy source continued to increase, the coal price hike directly affected the rise of Cost of Supply within the range of Rp1,318.0/kWh or a 4.2% increase from Rp1,265.0/kWh in 2016. Despite this increase, the Cost of Supply was still under the targeted Cost of Supply of Rp1,350.0/kWh. With the substantial impact of the quality of energy mix quality to Cost of Supply, we will continue to improve the quality of energy mix.

Keterangan	Satuan Unit	Target - 2017	Realisasi Realization		Capaian Achievement (%)	Tumbuh Growth (%)	Description
		(a)	2017 (b)	2016 (c)	(b) / (a)	(b) / (c)	
Produksi Tenaga Listrik Sendiri	GWh	170.345	167.978	166.457	98,6%	0,9%	Self-generated Electricity
Produksi Tenaga Listrik Sewa	GWh	14.905	13.447	17.352	90,2%	-22,5%	Leased Power Plant Electricity Production
Produksi Tenaga Listrik IPP	GWh	72.210	73.245	64.802	101,4%	13,0%	IPP Electricity Production
Total Produksi Listrik	GWh	257.460	254.670	248.611	98,9%	2,4%	Total Electricity Production

## Penjualan Tenaga Listrik dan Daya Tersambung

Volume penjualan tenaga listrik tahun 2017 naik, kali ini sebesar 3,3% menjadi 223.134 GWh dari 216.004 GWh di tahun sebelumnya. Di tahun 2016 tingkat pertumbuhan konsumsi listrik adalah 6,5%. Kenaikan penjualan listrik tahun 2017 terjadi pada penjualan kepada seluruh kelompok pelanggan, yakni: penjualan pada kelompok pelanggan rumah tangga naik 0,88%, penjualan kepada kelompok pelanggan bisnis naik 4,04%, kelompok industri naik 6,01%, sementara penjualan kepada kelompok pelanggan lainnya naik 4,19%.

## Sale of Electricity and Connected Power

Electricity sales volume in 2017 increased by 3.3% to 223,134 GWh from 216,004 GWh in the previous year. In 2016, the growth of electricity consumption was 6.5%. The increase in electricity sales in 2017 occurred to all customer groups: 0.88% increase in household customer group, 4.04% in business customers, 6.01% increase in industry customer group, while sales to other customer groups rose by 4.19%.

Laporan Direksi  
Board of Directors Reports

Di tahun 2017, kami kembali berhasil mencatatkan penambahan pelanggan. Terdapat tambahan 3,79 juta pelanggan baru, atau naik 21,56% dari tahun 2016, dengan kontribusi terbesar adalah kenaikan pelanggan rumah tangga adalah sebesar 3,30 juta atau naik 25,07% dari tahun sebelumnya. Dengan penambahan pelanggan tersebut, total jumlah pelanggan diakhir tahun 2017 menjadi 68,07 juta, dan membuat rasio elektrifikasi secara nasional menjadi 93,03% dari 89,10% pada tahun 2016 (tidak termasuk pelanggan non PLN). Jika memperhitungkan pelanggan non-PLN, Rasio Elektrifikasi 2017 adalah 95,4%.

Namun demikian, berbeda dengan kelompok pelanggan lain, penambahan pelanggan dari kelompok bisnis di tahun 2017 mencatatkan sedikit penurunan, 1,5% dari tahun sebelumnya. Tahun 2016 kelompok pelanggan ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 28,3%.

Sementara itu, penambahan daya tersambung di tahun 2017 turun 1,24% menjadi sebesar 7.670 MVA di bawah pertumbuhan tahun 2016 sebesar 7.767 MVA, sehingga total daya tersambung kini menjadi 122.018 MVA.

Berikut adalah tabel realisasi kegiatan operasional dari aspek pemasaran.

In 2017, we managed to book customer growth of 3.79 million new customers, or 21.56% higher than 2016, with the largest contribution being the increase in household customers by 3.30 million, a 25.07% increase from the previous year. With this increase, the total number of subscribers at the end of 2017 amounted to 68.07 million, boosting the national electrification ratio to 93.03% from 89.10% in 2016 (excluding non-PLN customers). Taking non-PLN customers into account, the 2017 Electrification Ratio was at 95.4%.

However, unlike other customer groups, business group customers experienced a slight decline in 2017 by 1.5% from the previous year. In 2016, this customer group recorded a growth of 28.3%.

Moreover, growth of Connected Power in 2017 dropped 1.24% to 7,670.0 MVA, lower than 2016 growth of 7,766.7 MVA, bringing the total Connected Power to 122,018 MVA.

Below is the Company's operational activities from the marketing aspect.

Keterangan	Satuan Unit	Target - 2017	Realisasi Realization		Capaian Achievement (%)	Tumbuh Growth (%)	Description
		(a)	2017 (b)	2016 (c)	(b) / (a)	(b) / (c)	
Penjualan tenaga listrik	GWh	224.787	223.134	216.004	99,3%	3,3%	Sale of electricity
Penambahan pelanggan	Pelanggan Customer	3.244.995	3.785.790	3.114.513	116,7%	21,6%	Increase of customers
Penambahan daya tersambung	MVA	7.892	7.670	7.767	97,2%	-1,2%	Increase in Connected Power

Dari tabel tersebut, tampak bahwa aspek pemasaran yang tidak mencapai target adalah penjualan tenaga listrik dan penambahan daya tersambung, sekalipun tetap naik dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebabnya antara lain: (i) Menurunnya daya beli masyarakat, (ii) isu kenaikan tarif pada awal tahun yang menyebabkan terjadinya penghematan pemakaian listrik yang dilakukan untuk kelompok pelanggan rumah tangga, (iii) perubahan gaya hidup konsumen (hemat energi dan e-commerce) (iv)

As described in the above table, electricity sales and Connected Power were the marketing aspects that did not reach its targets, despite achieving better result compared to the previous year. This was due to (i) the customer's declining buying power (ii) tariff increase at the beginning of the year leading to conservative electricity consumption for household customers, (iii) changes in consumer lifestyles (energy saving and e-commerce) (iv)

## Laporan Direksi

### Board of Directors Reports

Peningkatan impor barang jadi dan setengah jadi yang menekan konsumsi listrik kelompok industri.

### Kapasitas Terpasang

Untuk mengimbangi peningkatan permintaan, PLN melakukan penambahan kapasitas pembangkit terpasang dan melakukan pemeliharaan pembangkit eksisting agar tetap memberikan unjuk kerja yang optimal. Di tahun 2017, kami berhasil menyelesaikan pembangunan beberapa pembangkit milik sendiri dalam skema Program 7.000 MW maupun Pembangkit Program 35.000 MW. Total tambahan kapasitas terpasang yang sudah COD sebagaimana kami sampaikan sebelumnya adalah 2.104 MW.

Realisasi penambahan pembangkit COD membuat total kapasitas terpasang pembangkit PLN di tahun 2017 meningkat 2,31% menjadi sebesar 55.926 MW dari 54.664 MW di tahun 2016.

### Kehandalan dan Susut Jaringan

Selain untuk mengimbangi peningkatan permintaan tenaga listrik; realisasi penambahan pembangkit, pembangunan jaringan transmisi dan distribusi serta peningkatan kapasitas Gardu Induk yang konsisten kami laksanakan juga bertujuan untuk meningkatkan kehandalan sistem kelistrikan nasional.

Penambahan kapasitas yang terus dijalankan kini telah mengatasi defisit daya pada seluruh sistem kelistrikan, sehingga mulai tahun 2017, tidak ada lagi pemadaman listrik bergilir yang disebabkan oleh defisit daya. Penyelesaian defisit daya secara nasional ini menjadi salah satu capaian substansial di tahun 2017.

Kini dan ke depan, kami akan semakin berkonsentrasi pada upaya meningkatkan kehandalan sistem kelistrikan melalui perbaikan kualitas sistem transmisi, gardu induk, dan distribusi, serta memantau dengan seksama kinerja indeks lama gangguan, SAIDI (*System Average Interruption Duration Index*) maupun indeks frekuensi gangguan, SAIFI (*System Average Interruption Frequency Index*). Upaya tersebut memberi hasil yang membesarkan hati, yakni di tahun 2017, kami berhasil mengurangi indeks SAIDI sebesar 24,29% menjadi sebesar 1.159,82 menit/pelanggan dari 1.532,0 menit/ pelanggan. Kami

Increase in imports of finished and semi-finished goods that curbed the electricity consumption of industrial groups.

### Installed Capacity

To keep up with the increasing demand, PLN will increased the capacity of installed power plants and maintain existing plants to maintain optimum performance. In 2017, we successfully completed the construction of several self-owned power plants under the 7,000 MW Program scheme and the 35,000 MW Power Plant Program. The total additional installed capacity that has reached its COD as we have mentioned, was 2,104 MW.

The additional COD power plant has increased PLN's total installed capacity in 2017 by 2.31% to 55,926 MW from 54,664 MW in 2016.

### Reliability and Electricity Losses

In addition to sustain the increasing demand for electricity, we also added power plants, developed transmission and distribution network and consistently increased the capacity of the substations in order to improve the reliability of the national electricity system.

Extended capacity addition had successfully overcome the power deficit in all of the electrical systems, subsequently, there were no more outages caused by power deficits in 2017. The completion of this nationwide power deficit was one of the most substantial achievements of 2017.

From this point on, we will concentrate more on improving the reliability of the electrical system by improving the quality of the transmission system, substations and distribution, as well as monitoring closely SAIDI (*System Average Interruption Duration Index*) and the SAIFI (*System Average Interruption Frequency Index*). These efforts gave satisfactory results in 2017, as we succeeded in reducing the SAIDI index by 24.29% to 1,159.82 minutes/customer from 1,532.0 minutes/customer. We

Laporan Direksi  
Board of Directors Reports

juga berhasil menurunkan indeks SAIFI sebesar 16,17% menjadi tinggal 12,65 kali/pelanggan dari 15,09 kali/pelanggan di tahun sebelumnya. Kedua indeks tersebut lebih baik dari target kinerja terkait yang ditetapkan sebelumnya.

Upaya kami meningkatkan unjuk kerja sistim transmisi dan distribusi juga memberi hasil menggembirakan, dengan turunnya Susut Jaringan sebesar 7,7% menjadi sebesar 8,75% dari angka 9,48% di tahun sebelumnya. Susut distribusi, kini juga membaik menjadi sebesar 6,53% dari 7,37% di tahun 2016, sementara Susut transmisi meningkat tipis menjadi 2,39% dari 2,29% di tahun sebelumnya. Ketiga indeks susut tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan sebelumnya. Lebih rendahnya indeks susut, menunjukkan keberhasilan kami dalam meningkatkan efisiensi penyaluran daya listrik.

also managed to lower the SAIFI index by 16.17% to 12.65 times/customer from 15.09 times/customer in the previous year. Both indices were better than the targeted number.

Our efforts to improve the performance of transmission and distribution systems also led to satisfactory results, with 7.7% decrease in Network Losses to 8.75% from 9.48% in the previous year. Distribution losses also improved to 6.53% from 7.37% in 2016, while transmission losses increased slightly to 2.39% from 2.29% in the previous year. These three losses indices were lower than the set targets and demonstrated our success in improving the efficiency of electric power distribution.

Tabel Kinerja SAIDI / SAIFI dan Susut Jaringan

SAIDI / SAIFI and Network Losses Table of Performance

Keterangan	Satuan Unit	Target - 2017 (a)	Realisasi Realization		Capaian Achievement (%) (b) / (a)	Tumbuh Growth (%) (b) / (c)	Description
			2017 (b)	2016 (c)			
SAIDI	menit/pelanggan minutes/customer	1.200,00	1.159,82	1.532,00	96,65%	-24,29%	SAIDI
SAIFI	kali / pelanggan times/customer	13,00	12,65	15,09	97,31%	-16,17%	SAIFI
Susut Jaringan	%	9,12	8,75	9,48	95,94%	-7,70%	Electricity Losses
- Susut Transmisi	%	2,50	2,39	2,29	95,60%	4,37%	- Transmission Losses
- Susut Distribusi	%	7,01	6,53	7,37	93,15%	-11,40%	- Distribution Losses

### Inovasi

Kami juga akan terus berupaya merealisasikan program inovasi dengan membangun pembangkit listrik bersumberkan energi baru dan terbarukan, terutama untuk memasok listrik pada area terpencil. Kami akan semakin mengintensifkan upaya optimalisasi sumber energi sesuai kondisi setempat, seperti membangun pembangkit listrik menggunakan: energi nabati, energi bayu, energi surya, maupun energi air pada pembangkit mikro hidro. Kami juga terus berupaya mengintensifkan upaya pengembangan pusat pembangkit energi panas bumi di Indonesia dengan potensi terbesar di dunia. Dalam rangka menekan penggunaan BBM, kami juga

### Innovation

We will also continue to work on our innovation programs by building new and renewable energy sources, primarily to supply electricity to remote areas. We will intensify our efforts in optimizing energy sources that's suitable to the local conditions, such as building power plants that utilize biofuels, wind, solar power, and water at micro hydro plants. We also continue to intensify efforts to develop a geothermal power plant in Indonesia that has one of the greatest potential in the world. In order to reduce

## Laporan Direksi

Board of Directors Reports

semakin intensif memanfaatkan teknologi *Compressed Natural Gas* (CNG) sebagai sumber energi alternatif pembangkit *peaker*.

Sebagai komitmen dalam mendukung pengembangan kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan, kami juga mulai membangun jaringan stasiun pengisian listrik umum (SPLU) untuk sebagai tempat pengisian baterai kendaraan listrik. Implementasi Inisiatif inovatif tersebut akan memberi benefit lain, yakni turunnya intensitas emisi CO<sub>2</sub> dari proses produksi listrik PLN, sebagai wujud dukungan Perusahaan terhadap tekad Pemerintah Indonesia terhadap komitmen pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam SDGs yang disampaikan saat pelaksanaan ParisCop 21.

Sementara itu, kami juga menyempurnakan layanan dengan *limitless service* melalui aplikasi PLN Mobile. Aplikasi ini adalah suatu aplikasi *Mobile Customer Self Service* yang terintegrasi dengan Aplikasi Pengaduan dan Keluhan Terpadu (APKT) dan Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T). Secara keseluruhan melalui aplikasi PLN Mobile, pelanggan dapat mengetahui berbagai info mulai dari tagihan rekening listrik, transaksi token, riwayat pemakaian kWh listrik, lokasi pembayaran melalui banking terdekat serta info status/ progres permohonan dan pengaduan. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan informasi kepada pelanggan terkait status-status pekerjaan PLN termasuk fitur baru Tracking Regu Pelayanan Teknik dan Fitur Rating atau Feedback Layanan Teknik, yang diharapkan pelayanan gangguan dapat diatasi dengan cepat dan berkualitas.

### Subsidi Listrik

Seluruh upaya yang kami jalankan guna meningkatkan efisiensi dan menekan Biaya Pokok Penyediaan ditambah dengan implementasi kebijakan subsidi tepat sasaran telah berhasil menurunkan subsidi listrik di tahun 2017. Tahun 2017, nilai subsidi yang diberikan kepada PLN adalah sebesar Rp45,74 triliun, turun 21,2% dari Rp58,04 triliun di tahun 2016. Realisasi subsidi tersebut juga lebih kecil dari target sebesar Rp52,28 triliun yang ditetapkan sebelumnya.

fuel consumption, we also intensively utilize Compressed Natural Gas (CNG) technology as an alternative energy source for peaker power plants.

As a commitment to support the development of environmentally friendly electric vehicles, we have also begun to build a network of electric charging stations (SPLU) for electric vehicle charging. This innovative initiative will also provide another benefit of lowering the CO<sub>2</sub> emission intensity of PLN's electricity generating process, as the Company's support to the Government of Indonesia's commitment in achieving sustainable development objectives set forth in the SDGs, delivered during the ParisCop 21.

At the same time, we are also fine-tuning the limitless service of PLN's Mobile Customer Self Service application that's connected with the Integrated Complaint Application (APKT) and the Centralized Customer Service Application (AP2T). Through PLN Mobile application, customers can find various information including electricity bill, token transaction, history of electricity usage, the nearest payment location as well as status/ progress of application and complaint. In addition, this application also provides information to customers regarding PLN maintenance statuses including the new features of Technical Services Team Tracking and Rating or Feedback of Technical Services that is expected to provide fast and quality service.

### Electricity Subsidy

Our efforts in improving efficiency, reducing Cost of Supply and in the implementation of subsidy policies have succeeded in reducing electricity subsidy in 2017. The value of subsidies granted to PLN in 2017 amounted to Rp45.74 trillion, or decreased by 21.2% from Rp58.04 trillion in 2016. This account is also lower than the target set at Rp52.28 trillion.

Laporan Direksi  
Board of Directors Reports

Pendapatan subsidi merupakan pendapatan dari Pemerintah Indonesia atas selisih dari biaya yang diperbolehkan ditambah margin 7% dengan harga jual aktual per masing-masing golongan tarif kecuali untuk golongan tarif dimana PLN telah mendapatkan penyesuaian tarif otomatis menurut Peraturan Menteri ESDM No. 09/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 31/2014 tentang tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Subsidy revenue represents the revenue from the Government of Indonesia for the difference between allowable cost plus 7% margin with actual sales price for each tariff group except for tariff group which received automatic tariff adjustment based on the Minister of Energy and Mineral Resources (EMR) Regulation No. 09 of 2015 on the amendment of the EMR Minister Regulation No. 31 of 2014 regarding the electricity tariff provided by Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

**KINERJA KEUANGAN**

Berbagai upaya yang dilakukan pada aspek operasional tersebut, yakni peningkatan efisiensi operasional, upaya perbaikan bauran energi dan menekan BPP, membuat kinerja keuangan PLN di tahun 2017 menunjukkan hasil yang cukup baik, kendati Perusahaan harus menghadapi kenaikan bahan bakar yang cukup substansial. Beberapa target kinerja keuangan berhasil memenuhi target yang ditetapkan, khususnya dalam menurunkan besaran subsidi yang diterima, namun beberapa lainnya tidak memenuhi target sekalipun tetap menunjukkan pertumbuhan, seperti pada realisasi nilai penjualan tenaga listrik.

**FINANCIAL PERFORMANCE**

Various efforts implemented in the operational aspects, including improving operational efficiency, improving energy mix and curbing the Cost of Supply, resulted in good results for PLN's 2017 financial performance, despite the company facing a substantial fuel increase. Some financial performance targets were achieved, particularly in reducing the amount of subsidies received, although some did not meet the targets despite its growth, such as in the sales of electricity.

**Tabel Ikhtisar Kinerja Keuangan Perusahaan, 2016-2017****The Company Financial Performance Overview, 2016-2017**

Keterangan	Satuan Unit	Target - 2017	Realisasi Actual		Capaian Achievement (%)	Tumbuh Growth (%)	Description
		(a)	2017 (b)	2016 (c)	(b) / (a)	(b) / (c)	
Pendapatan Penjualan Listrik	Rp miliar Billion IDR	250.350,47	246.586,86	214.139,83	98,50%	15,15%	Electricity Sales Revenue
Total Pendapatan Usaha	Rp miliar Billion IDR	259.672,02	255.295,24	222.821,96	98,31%	14,57%	Total Revenue
Beban Usaha	Rp miliar Billion IDR	280.789,72	275.474,09	254.449,80	98,11%	8,26%	Operating Expenses
Laba / Rugi Usaha Sebelum Subsidi	Rp miliar Billion IDR	-21.117,70	-20.178,85	-31.627,84	95,55%	-36,20%	Operating income/Losses Before Subsidy
Subsidi	Rp miliar Billion IDR	52.283,62	45.738,22	58.043,27	87,48%	-21,20%	Subsidy
Laba Usaha Setelah Subsidi	Rp miliar Billion IDR	31.165,92	25.559,37	26.415,43	82,01%	-3,24%	Operating Income After subsidy
Laba Bersih Tahun Berjalan	Rp miliar Billion IDR	6.035,46	4.428,12	8.150,38	73,37%	-45,67%	Net Income for the Year
Biaya Pokok Penyediaan (BPP)	Rp/kWh	1.350,00	1.318,00	1.265,00	97,63%	4,19%	Cost of Electricity Supply

\*) Angka disajikan kembali | Restatement

## Laporan Direksi

### Board of Directors Reports

### Nilai Penjualan dan Rugi Usaha

Nilai pendapatan penjualan tenaga listrik di tahun 2017 naik 15,15% menjadi Rp246,59 triliun dari Rp214,14 triliun di tahun 2016 dengan volume penjualan sebesar 223.134 GWh di tahun 2017 dan migrasi pelanggan rumah tangga mampu secara bertahap yang berkontribusi pada kenaikan harga jual rata-rata sebesar 10,7% menjadi sebesar Rp1.105/kWh di tahun 2017 dari rata-rata Rp998/kWh di tahun sebelumnya. Harga jual rata-rata tersebut tetap masih berada di bawah BPP tahun 2017 yang sebesar Rp1.318/kWh, sehingga kami masih membutuhkan subsidi, dengan nilai yang terus menurun sebagaimana disebutkan sebelumnya. Pendapatan penjualan listrik berkontribusi sebesar 96,6% nilai total pendapatan usaha Perusahaan.

PLN memperoleh pendapatan jasa penyambungan dan pendapatan lain-lain, sehingga nilai total pendapatan usaha meningkat 14,57% menjadi Rp255,30 triliun dari Rp222,82 triliun di tahun sebelumnya. Pendapatan usaha dari area regional Jawa-Bali tetap mendominasi, dengan kontribusi mencapai 85,45%, diikuti Sumatera sebesar 10,81%.

Realisasi pendapatan usaha tersebut, kendati meningkat, merepresentasikan pencapaian sebesar 98,31% dari target tahun 2017 yang ditetapkan sebesar Rp259,67 triliun. Pada saat bersamaan, kami berhasil membatasi kenaikan beban usaha agar berada dibawah pertumbuhan pendapatan. Di tahun 2017 beban usaha hanya meningkat 8,26% menjadi sebesar Rp275,47 triliun dari Rp254,45 triliun di tahun sebelumnya, sebagai wujud keberhasilan kami dalam meningkatkan kualitas bauran energi, mengurangi susut jaringan dan keberhasilan implementasi beragam program peningkatan efisiensi lainnya.

Kontributor utama kenaikan beban usaha adalah kenaikan biaya bahan bakar. Di tahun 2017, biaya bahan bakar per kWh untuk batubara naik dari Rp 333/kWh di tahun 2016 menjadi Rp419/kWh di tahun 2017 atau naik 25,82%. Sementara itu, BBM naik dari Rp1.473/kWh menjadi Rp1.797/kWh di tahun 2016 atau 21,99%, biaya bahan bakar gas naik dari Rp897/kWh menjadi Rp935/kWh atau naik 4,2%, panas bumi naik dari Rp716/kWh menjadi Rp 738/kWh atau 3%, serta air naik dari Rp23/kWh menjadi Rp26/kWh atau 13,04%.

### Revenues and Operating Losses

Our revenues from the sale of electricity in 2017 rose by 15.15% to Rp246.59 trillion from Rp214.14 trillion in 2016 with sales volume in 2017 stood at 223,134 GWh. The gradual migration of affluent household contributed to the increase in average sales tariff by 10.7% to Rp1,105/kWh in 2017 from an average of Rp998/kWh in 2016. However, the average sales tariff was still below the 2017 Cost of Supply of Rp1,318/kWh. Subsidy was therefore required, although the amount has continued to decline as mentioned earlier. The sale of electricity contributed 96.6% to the total revenues that PLN generated.

PLN also gained revenues from connection fees and other revenues. In total, operating revenues increased by 14.57% to Rp255.30 trillion from Rp222.82 trillion in 2016. Operating revenues predominantly came from Java-Bali region that accounted for 85.45% of the total revenues followed by Sumatra with 10.81% contribution.

In spite of the increase, the revenue represented 98.31% achievement of the target set for 2017 amounted to Rp259.67 trillion. At the same time, we were able to limit the increase of our operating costs at 8.26% to Rp275.47 trillion from Rp254.45 trillion in the previous year. This resonated our success in maintaining the quality of energy mix, curtailing electricity losses, and in implementing various programs aimed at enhancing operational efficiency.

The main driver of operating cost increase was fuel cost. In 2017, coal cost per kWh rose from Rp333/kWh in 2016 to Rp419/kWh in 2017 or by 25.82%. In the meantime, fossil fuel rose from Rp1,473/kWh to Rp1,797/kWh in 2017 or by 21.99%; gas increased from Rp897/kWh to Rp935/kWh or by 4.2%; geothermal increased from Rp716/kWh to Rp 738/kWh or by 3%; water hydro increased from Rp23/kWh to Rp26/kWh or by 13.04%.

## Laporan Direksi

Board of Directors Reports

Akibat kenaikan tersebut, beban bahan bakar tahun 2017 dengan kontribusi 42,5% terhadap total beban usaha, naik 6,8% menjadi sebesar Rp116,95 triliun dari Rp109,49 triliun di tahun sebelumnya.

Kontributor utama lain dari kenaikan beban usaha tersebut adalah meningkatnya beban pembelian tenaga listrik yang naik 21,30% menjadi Rp72,43 triliun dari Rp59,73 triliun.

Namun demikian kami berhasil mengelola komponen biaya usaha lain, sehingga prosentase peningkatannya berada di bawah prosentase kenaikan pendapatan usaha. Biaya kepegawaian naik 2,1% dari Rp22,66 triliun di tahun 2016 menjadi Rp23,12 triliun di tahun 2017, sementara biaya pemeliharaan justru berhasil kami turunkan 8,1% dari Rp21,23 triliun di tahun 2016 menjadi Rp19,52 triliun di tahun 2017.

Dengan seluruh kondisi tersebut, PLN berhasil menurunkan rugi usaha sebesar 36,2% dari Rp31,63 triliun di tahun 2016 menjadi Rp20,18 triliun di tahun 2017. Rugi usaha tahun 2017 yang merepresentasikan pencapaian sebesar 95,55% dari target Rp21,12 triliun di tahun 2017, menunjukkan keberhasilan manajemen dalam mengelola biaya usaha.

### Laba Usaha Setelah Subsidi dan Laba Sebelum Pajak

Kami berhasil mendukung upaya menurunkan beban negara, melalui pengurangan penerimaan subsidi. Di tahun 2017, sebagaimana disinggung sebelumnya, PLN hanya menerima subsidi sebesar Rp45,74 triliun, atau 21,2% di bawah subsidi tahun 2016 yang sebesar Rp58,04 triliun. Angka subsidi ini juga berada di bawah target yang sebesar Rp52,28 triliun.

Dengan subsidi yang menurun tersebut, kami mencatatkan laba usaha setelah subsidi sebesar Rp25,56 triliun, hanya turun sebesar 3,2% dari Rp26,42 triliun di tahun sebelumnya, dan merepresentasikan pencapaian target laba setelah subsidi sebesar Rp31,17 triliun atau 82%.

PLN sebetulnya mencatatkan penghasilan lain-lain dan penghasilan keuangan total sebesar Rp4,48 triliun naik 167,9% dari Rp1,67 triliun di tahun sebelumnya, namun karena terdampak oleh rugi kurs yang naik 170%

Due to the increase, the total fuel expenses in 2017 that accounted for 42.5% to the total operating expenses increased by 6.8% to Rp116.95 trillion from Rp109.49 trillion in 2016.

Another significant driver of operating expenses was the increase in purchased electricity, which was up 21.30% to Rp72.43 trillion from Rp59.73 trillion.

However, we were able to exert more control in other operating expense components and the increase in percent was below operating expenses'. Personnel expense rose by 2.1% from Rp22.66 trillion in 2016 to Rp23.12 trillion in 2017, but we managed to lower maintenance expense by 8.1% from Rp21.23 trillion in 2016 to Rp19.52 trillion in 2017.

From the overall condition, PLN was able to reduce operating losses by 36.2% from Rp31.63 trillion in 2016 to Rp20.18 trillion in 2017, which represented 95.55% achievement of the targeted Rp21.12 trillion of losses cut in 2017. This result also reflected the management's capability in managing operating expenses.

### Operating Income After Subsidy and Income Before Tax

Our achievement in bringing down subsidy reflected our success in easing up the state's spending. In 2017, as mentioned earlier, PLN received subsidy amounted to Rp45.74 trillion or 21.2% less than 2016 subsidy of Rp58.04 trillion. The 2017 subsidy also surpassed the targeted Rp52.28 trillion.

With the reduced subsidy, our operating income after subsidy stood at Rp25.56 trillion, decreased by 3.2% from Rp26.42 trillion in the previous year and represented 82% of the targeted amount of operating income after subsidy at Rp31.17 trillion.

PLN also recorded other revenues and financial revenues amounting to Rp4.48 trillion, up 167.9% from Rp1.67 trillion in the previous year. However, foreign exchange losses rose by 170% to Rp2.94 trillion and finance

## Laporan Direksi

Board of Directors Reports

menjadi sebesar Rp2,94 triliun dan meningkatnya beban keuangan menjadi sebesar Rp18,56 triliun, membuat kami akhirnya membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp8,54 triliun, turun 37,1% dari nilai sebesar Rp13,58 triliun di tahun 2016.

### Laba Bersih dan Laba Persaham

Di tahun 2017, kami dikenakan pajak badan sebesar Rp4,12 triliun, sehingga akhirnya membukukan laba bersih sebesar Rp4,43 triliun turun 45,7% dari Rp8,15 triliun di tahun sebelumnya dan merepresentasikan 73,4% pencapaian target laba bersih 2017 yang sebesar Rp6,04 triliun.

Capaian laba bersih tersebut, bersamaan dengan adanya realisasi penambahan modal negara, membuat laba persaham PLN tahun 2017 adalah sebesar Rp50.541, dari Rp150.009 di tahun sebelumnya.

## ASPEK PENDANAAN

Pada tahun 2017, PLN berhasil memperkuat dukungan pendanaan bagi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melalui penerbitan 12 seri obligasi dan sukuk ijarah lokal, senilai total Rp5,24 triliun dan 2 seri obligasi global berdenominasi US Dollar senilai total US\$2 miliar. Seluruh perolehan penerbitan dana obligasi tersebut telah digunakan sebagaimana disebutkan dalam prospektus.

## PENGHARGAAN

Selain perbaikan kinerja operasional dan meningkatnya fondasi keuangan tersebut, konsistensi seluruh jajaran manajemen dalam meningkatkan kualitas pengelolaan fasilitas pembangkit, dan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, membuat PLN mendapatkan berbagai penghargaan dari pihak ketiga, mencakup:

1. "The Best Indonesia Green Awards" dengan meraih seluruh 5 kategori penghargaan pada ajang Indonesia Green Award.
2. Best Practices in Clean Coal Use and Technology pada ajang The 3rd ASEAN Coal Awards (ASEAN Center for Energy), melalui PLTU Tarahan.

charges increased to Rp18.56 trillion; as the result, our income before tax stood at Rp8.54 trillion, down 37.1% from Rp13.58 trillion in 2016.

### Net Income and Earnings per Share

In 2017, our corporate tax payable amounted to Rp4.12 trillion. Taking this into account, we eventually booked net income amounting to Rp4.43 trillion, decreased by 45.7% from Rp8.15 trillion in the previous year, and achieved 73.4% of our net income target for 2017 amounting to Rp6.04 trillion.

Given the the net income position coupled with additional capital stock, PLN's earnings per share in 2017 stood at Rp50,541 from Rp150,009 in the previous year.

## FUNDING

PLN was able to raise funds in 2017 for the development of power infrastructure by issuing 12 series of national bonds and sukuk ijarah for a total combined amount of Rp5.24 trillion as well as 2 series of global bonds in US Dollar for a total amount of US\$2 billion. The proceeds have been used in the manner detailed in our prospectus.

## ACCOLADES

In addition to improved operational performance and strengthened financial foundation, PLN was also proud to receive recognitions from various entities that celebrated the consistency of our management in improving our power plants management quality and the Company in general:

1. "The Best Indonesia Green Awards" where PLN was recognized across all five of the categories in Indonesia Green Award
2. Best Practices in Clean Coal Use and Technology in the 3rd ASEAN Coal Awards (ASEAN Center for Energy) through Tarahan Coal Power Plant.

3. 1 Proper Emas melalui PLTU Paiton yang dikelola Pembangkitan Jawa Bali dan 15 Proper Hijau lainnya melalui PLTU yang dikelola PLN, PJB maupun IPP dari Kementerian Lingkungan Hidup.
  4. Indonesian Trusted Companies 2017 dari The Indonesia Institute For Corporate Governance (IICG) dan Majalah SWA)
  5. 6 Penghargaan dalam ajang Indonesia Corporate Public Relations Excellence Award 2017 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi.
3. From the Ministry of Environment, 1 “Gold” Proper through Paiton Coal Power Plant managed by Java Bali Power Plant and 15 other “Green” Proper recognitions through Coal Power Plants managed by PLN, PJB and IPPs
  4. Indonesian Trusted Companies 2017 from the Indonesia Institute For Corporate Governance (IICG) and SWA Magazine
  5. 6 awards in Indonesia Corporate Public Relations Excellence Award 2017 organized by Warta Ekonomi.

## KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

Selain melaksanakan tugas dalam bentuk *public services obligation*, Perseroan juga memberikan kontribusi besar kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak dan dividen, serta membantu meringankan beban keuangan negara dengan menurunkan jumlah subsidi listrik.

Untuk tahun 2017, total kontribusi pajak dan dividen yang dibayarkan adalah sebesar Rp29,3 triliun, terdiri atas pembayaran pajak sebesar Rp27,15 triliun dan dividen tunai sebesar Rp2,15 triliun. Sedangkan tahun 2016, total pajak dan dividen yang dibayarkan sebesar Rp38,5 triliun, terdiri atas pajak senilai Rp36,36 triliun dan dividen tunai Rp2,15 triliun.

Beban subsidi listrik negara, sebagaimana disebutkan sebelumnya, turun dari Rp58,04 triliun di tahun 2016, menjadi sebesar Rp45,74 triliun.

## KINERJA KORPORASI

Seluruh capaian operasional dan finansial tersebut diatas membuat skor *Key Performance Indicators* (KPI) Manajemen PT PLN (Persero) di akhir tahun 2017 adalah 96,61 (masuk pada golongan perusahaan BUMN yang SEHAT, kategori AAA) dengan pencapaian masing-masing indikator adalah Fokus Pelanggan 21,88, Efektivitas Produk dan Proses 24,18, Fokus Tenaga Kerja 11,0, Keuangan dan Pasar 20,58, serta Kepemimpinan dan Tata Kelola 18,97.

## CONTRIBUTION TO THE STATE

In addition to exercising our public services obligation, PLN also considerably contributed to the state by meeting its tax and dividend payments, and easing the state budget by lowering the amount of power subsidy.

In 2017, we paid a total of Rp29.3 trillion in taxes and dividends – consisting of Rp27.15 trillion of taxes and cash dividends amounting to Rp2.15 trillion. In 2016, we paid a total of Rp38.5 trillion in taxes and dividends, each amounted to Rp36.36 trillion and cash dividends of Rp2.15 trillion.

Power subsidy borne by the state, as mentioned earlier, was reduced from Rp58.04 trillion in 2016 to Rp45.74 trillion.

## CORPORATE PERFORMANCE

Based on our operational and financial performance, as of the end of 2017 the Key Performance Indicators (KPIs) score of the management of PT PLN (Persero) stood at 96.61 (recognized as SOUND SOE in the AAA category). The score for each category is as follows: 21.88 for Customer-related KPIs, 24.18 for Product and Process Effectiveness, 11.0 for Labor, 20.58 for Finance and Market, and 18.97 for Leadership and Corporate Governance-related KPIs.

Laporan Direksi  
Board of Directors Reports**MENGEMBANGKAN INSAN PLN  
BERKOMPETENSI GLOBAL DAN  
BERINTEGRITAS UNTUK MASA DEPAN  
GEMILANG**

Kami memandang pengelolaan SDM sebagai investasi jangka panjang, dengan mengedepankan orientasi untuk membangun SDM yang cerdas nuraninya, yang memiliki etika, sopan santun, integritas dan moral baik. Kami menargetkan untuk membentuk seluruh jajaran pegawai PLN menjadi insan profesional, bertanggung jawab dalam menjalankan amanah, dan punya semangat serta etos kerja yang baik bagi kemajuan perusahaan.

Kami meyakini upaya ini akan lebih cepat terealisasi jika dilakukan dengan menjadikan setiap pemimpin unit sebagai *role model* yang harus mampu menunjukkan sikap-sikap profesional, berintegritas dan memiliki etos kerja baik sebagai panutan. Kami bertekad mencetak banyak *champion*, calon pemimpin masa depan yang akan memegang estafet kepemimpinan perusahaan di masa mendatang.

Kami juga bertekad menginisiasi terjadinya transfer pengetahuan diantara seluruh jajaran melalui penerapan program *knowledge management* dalam proses bisnis. Dalam rangka menciptakan *leader-leader* baru, kami telah merealisasikan Program Kepemimpinan bernama program Executive Education, yang terdiri dari: Executive Education I untuk level manajemen atas, Executice Education II untuk level manajemen menengah, dan Executive Education III untuk level manajemen dasar. Di tahun 2017, sebanyak 401 pegawai telah mengikuti program Executive Education I,II,III, disesuaikan dengan kebutuhan jabatan.

Selanjutnya sebagai bagian dari pengelolaan SDM yang berkualitas, kami bertekad menyempurnakan implementasi Sistem Manajemen Kinerja Pegawai (SIMKP), dengan tujuan menciptakan budaya kinerja Pegawai melalui penyelarasan dan pemahaman bersama antara Perusahaan dan Pegawai mengenai tujuan yang harus dicapai melalui *cascading* KPI dan penetapan target yang akurat, serta cara mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai tujuan dimaksud.

**NURTURING PLN'S HUMAN CAPITAL WITH  
GLOBAL COMPETENCE AND INTEGRITY FOR A  
BRIGHTER FUTURE**

We view human capital management as a long-term investment. Our efforts in this regard are oriented to nurturing conscientious individuals with upstanding ethics, respectful, have integrity, and good moral conduct. We seek to train the personnel of PLN to become professional and responsible employees in carrying out their duties, spirited, and adhering to strong mindset in contributing to the Company's growth.

We believe that our aims in human capital area can be more speedily realized through a top-down approach where we position each unit leader as a role model demanded to demonstrate professionalism, integrity, and sound work traits. We are also committed to create as many champions as possible – they are our future leaders that will one day assume leadership positions.

As part of our commitment, we aim to initiate knowledge transfer between employees by implementing knowledge management programs in business processes. To create new leaders, we have a leadership program named Executive Education, consisting of Executive Education I for senior management level, Executice Education II for middle management level, and Executice Education III for basic management level. In 2017, a total of 401 employees attended this program and across the levels they considered suitable for their positions.

Dedicated to manage a quality HC management, we also refine our Employee Performance Management System (SIMKP), aiming at creating a performance culture among employees by aligning and building the understanding between the company and employees. To that end, we have carried out KPI cascading, accurately identified work targets, and optimized our resources.

Laporan Direksi  
Board of Directors Reports

Seluruh program-program tersebut kami integrasikan dalam *Human Capital Management System* yang memiliki tujuh pilar utama, yakni (i) Pengembangan Organisasi dan Perencanaan Tenaga Kerja, (ii) Rekrutmen yang profesional, (iii) Pembinaan Kompetensi dan Karir, (iv) Pembelajaran dan Peningkatan Kompetensi, (v) *Performance Management System*, (vi) Sistem Penghargaan dan (vii) Pembinaan Hubungan Industrial yang Harmonis.

Pada tahun 2017, sebagai bagian dari pengembangan PLN guna mendukung peningkatan kualitas pengelolaan perusahaan dan program regionalisasi, kami merealisasikan proses rekrutmen terhadap 4.484 orang calon pegawai baru dengan latar belakang pendidikan dari jenjang SMA/SMK sampai S-2.

Sebagai bagian dari pengelolaan SDM yang bermartabat, kami menyelenggarakan *Employee Engagement Survey* guna mendapatkan umpan balik bagi perbaikan pengelolaan SDM dalam rangka menjadikan PLN sebagai pilihan calon-calon pegawai bertalenta terbaik di masa mendatang.

## PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Di tahun 2017, kami merealisasikan beberapa inisiatif strategis di bidang TI, yakni: Implementasi Lanjutan Project Management Office, Implementasi Lanjutan Enterprise Asset Management, Implementasi ISO 27001 tentang Keamanan TI dan Implementasi Topologi Jaringan Nasional.

Implementasi Lanjutan *Project Management Office* kami lakukan untuk mengkoordinasikan proyek-proyek yang saling terkait secara terpusat guna tercapainya kontrol, tujuan, dan manfaat strategis yang tidak dapat dicapai masing-masing proyek secara individual.

Implementasi Lanjutan *Enterprise Asset Management* kami lakukan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan asset dengan tujuan memaksimalkan nilai manfaat aset pembangkitan, transmisi dan distribusi.

Implementasi ISO 27001 tentang Keamanan TI, untuk meningkatkan keamanan data dan meningkatkan kualitas pengendalian keamanan berbasis TI.

All of those programs above have been integrated in our Human Capital Management System. The system has seven key pillars, which are (i) Organizational Management and Manpower Planning, (ii) Professional Recruitment, (iii) Competency and Career Building, (iv) Learning and Competency Enhancement, (v) Performance Management System, (vi) Reward System, and (vii) Harmonious Industrial Relations.

In 2017, as part of PLN's quality enhancement and regionalization, we organized recruitment process joined by a total of 4,484 prospective new employees with educational background ranging from high school/vocational schools to graduate degree.

Committed to deliver a dignified HC management, we regularly conduct Employee Engagement Survey to gain feedback to improve our HC management and eventually build PLN as the employer of choice for the best talents in the future.

## INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT

In 2017, we realized several strategic initiatives in IT: next-phase implementation of Project Management Office, next-phase implementation of Enterprise Asset Management, implementation of ISO 27001 on IT Security, and Implementation of National Network Topology.

Project Management Office was important to provide centralized coordination of interlinked projects. The aim is to achieve the level of control, goal alignment, and strategic benefits that the projects will not be able to accomplish individually.

In terms of Enterprise Asset Management, we sought to optimize asset management and maximize the value of our power plants, transmission, and distribution assets.

The ISO 27001 on IT Security was required to improve data security and IT-based security control.

## Laporan Direksi

Board of Directors Reports

Kami menerapkan Topologi Jaringan Nasional dengan tujuan melakukan standarisasi perangkat dan konfigurasi jaringan dalam rangka meningkatkan keamanan jaringan, baik jaringan LAN maupun WAN.

Seluruh inisiatif strategis tersebut difokuskan untuk mendukung pencapaian empat sasaran strategis perusahaan, yakni: Mensukseskan pembangunan proyek 35.000 MW, Peningkatan efisiensi perusahaan, Peningkatan penjualan energi listrik dan Peningkatan keamanan informasi.

Kami juga tetap merealisasikan pengembangan berbagai program aplikasi berbasis TI untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan kegiatan operasional, seperti: ERP, P2APST, AP2T, E-Proc, AMS (Aplikasi Manajemen Surat), *Program Management Office* (PMO), EAM (*Enterprise Asset Management for Distribution*), EAM Transmisi dan SIP2A (Sistem Perencanaan dan Pengendalian Anggaran). Kami menargetkan seluruh aplikasi berbasis TI tersebut dapat dijalankan di seluruh unit-unit yang relevan, sehingga Manajemen mendapatkan gambaran yang akurat dan *real time* atas seluruh aspek pengelolaan Perusahaan.

### PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Sebagai salah satu wujud komitmen untuk meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, kami kembali melakukan *assessment* penerapan GCG untuk tahun 2017 sesuai Surat Sekretaris Menteri BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tentang indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Penilaian dilakukan melalui mekanisme *Self Assessment*, didukung penggunaan sistem aplikasi "*GCG Monitoring System*" yang dikembangkan dengan mengacu pada ketentuan Kementerian BUMN tersebut. Total Skor hasil penilaian adalah 87,40 (2016: 87,14), dengan kualifikasi 'Sangat Baik'. Pelaksanaan *assessment* kami tindak lanjuti dengan pelaksanaan berbagai rekomendasi perbaikan kualitas penerapan praktek terbaik GCG.

Pada Tahun 2017, untuk pertama kalinya PLN juga mengikuti penilaian Corporate Governance Perception

Meanwhile, the National Network Topology was implemented to standardize our tools and network configurations and eventually enhance our LAN and WAN network security.

The strategic initiatives were focused on supporting the attainment of the Company's four strategic goals: realizing the 35,000 MW project, improving PLN's efficiency, increasing sale of electricity, and increasing information security.

We also continued to realize the development of IT-based applications that support the quality of our operations, such as: ERP, P2APST, AP2T, E-Proc, AMS (Correspondence Management System), Program Management Office (PMO), EAM (Enterprise Asset Management for Distribution), EAM Transmission, and SIP2A (Budget Planning and Control System). Our target is for all IT-based applications to run in every relevant unit, thereby allowing the Management to receive accurate and real-time data on the Company's operations.

### ENHANCING GOOD CORPORATE GOVERNANCE QUALITY

Committed to continuously enhance our Good Corporate Governance (GCG) implementation, in 2017 we carried out GCG assessment. This also adhered to the Letter from SOE Minister Secretary No. SK-16/S.MBU/2012 on the Assessment and Evaluation Indicators/Parameters of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. The assessment was carried out by self assessment mechanism, supported by GCG Monitoring System application developed according to the stipulations of the SOE Minister. Our score in the assessment was 87.40 (2016: 87.14) and "Very Good" evaluation. We followed-up the recommendations from that assessment to improve our GCG best practices.

In 2017, PLN for the first time joined the Corporate Governance Perception Index (CGPI), an assessment

Laporan Direksi  
Board of Directors Reports

Index (CGPI). Pelaksanaan penilaian ini diselenggarakan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). Pada penilaian Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang mencakup aspek struktur tata kelola, aspek proses tata kelola, dan aspek hasil tata kelola ini, perusahaan berhasil mendapatkan skor 84,35 dengan predikat sebagai perusahaan "Terpercaya" atau "Trusted Company".

Adapun berbagai program perbaikan kualitas penerapan GCG di tahun 2017 yang telah dan sedang kami laksanakan mencakup diantaranya:

1. Rekomendasi pelaksanaan GCG bagi Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Melaksanakan pemutakhiran Pedoman LHKPN
3. Melaksanakan Pemutakhiran Pedoman Gratifikasi
4. Pelaksanaan mekanisme tindak lanjut dan pelaporan Whistleblowing System yang dilakukan setiap Triwulan
5. Merancang sistem web based untuk Komitmen Kepatuhan terhadap CoC.
6. Pemutakhiran kebijakan Komunikasi Korporat sekaligus pengelolaan Website
7. Pembuatan kebijakan pendanaan melalui pinjaman.

## PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) selaku RUPS PLN No. SK-138/MBU/07/2017 tanggal 24 Juli 2017, Saudara Murtaqi Syamsuddin, Saudara Nasri Sebayang dan Saudara Amin Subekti diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Direktur. Pada kesempatan yang sama, RUPS mengangkat Saudari Syofvi Felienty Roekman sebagai Direktur Perencanaan Korporat, Saudara Wiluyo Kusdwiarto sebagai Direktur Bisnis Regional Sumatera, Saudara Syamsul Huda sebagai Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Saudara Ahmad Rofik sebagai Direktur Bisnis Regional Maluku & Papua. Setelah itu, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PLN No. SK-257/MBU/11/2017 tanggal 27 November 2017, RUPS memberhentikan dengan hormat Saudari Nicke Widyawati sebagai Direktur Pengadaan Pengadaan Strategis 1, sehingga susunan Direksi Perseroan per 31 Desember tahun 2017 adalah sebagai berikut.

program carried out by the Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). CGPI covers aspects such as governance structure, process, and outcomes. PLN scored 84.35 and qualified as a "Trusted Company".

There were other specific GCG improvement programs that we carried out or started to commence in 2017, among others:

1. GCG implementation recommendations for shareholders and the Board of Commissioners and Directors
2. Updated Asset Declaration (LHKPN) Guideline
3. Updated Gratification Guideline
4. Implemented whistleblowing system follow-up mechanisms and quarterly reporting
5. Designed web-based system for Compliance Commitment to the CoC.
6. Updated Corporate Communication guideline and website management
7. Prepared policy on funding from borrowings.

## CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS' COMPOSITION

Pursuant to the State-Owned Enterprises (SOE) Minister Decree as the PLN's GMS No. SK-138/MBU/07/2017 dated 24 July 2017, Mr. Murtaqi Syamsuddin, Mr. Nasri Sebayang, and Mr. Amin Subekti were honorably discharged from their positions as Directors. On the same occasion, the GMS appointed Ms. Syofvi Felienty Roekman as Director of Corporate Planning, Mr. Wiluyo Kusdwiarto as Regional Business Director of Sumatera, Mr. Syamsul Huda as Regional Business Director of Sulawesi, and Mr. Ahmad Rofik Regional Business Director of Maluku & Papua. Furthermore, by virtue of SOE Minister Decree as the PLN's GMS No. SK-257/MBU/11/2017 dated 27 November 2017, the GMS honorably discharged Ms. Nicke Widyawati as Director of Strategic Procurement 1. Taking the changes into account, the composition of PLN's Board of Directors as of 31 December 2017 is as follows:

Laporan Direksi  
Board of Directors Reports

No	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Akhir Masa Jabatan End of Office Term
1	Sofyan Basir	Direktur Utama   President Director	23 Desember 2014 23 December 2014	23 Desember 2019 23 December 2019
2	Sarwono Sudarto	Direktur Keuangan   Director of Finance	23 Desember 2014 23 December 2014	23 Desember 2019 23 December 2019
3	Syofvi Felienty Roekman	Direktur Perencanaan Korporat   Director of Corporate Planning	24 Juli 2017 24 July 2017	24 Juli 2022 24 July 2022
4	Supangkat Iwan Santoso	Direktur Pengadaan Strategis 2   Director of Strategic Procurement 2	23 Desember 2014 23 December 2014	23 Desember 2019 23 December 2019
5	Muhamad Ali	Direktur Human Capital Management   Director of Human Capital Management	30 Oktober 2015 30 October 2015	30 Oktober 2020 30 October 2020
6	Wiluyo Kusdwiarto	Direktur Bisnis Regional Sumatera   Regional Business Director of Sumatra	24 Juli 2017 24 July 2017	24 Juli 2022 24 July 2022
7	Haryanto W.S.	Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat   Regional Business Director of West Java	30 Oktober 2015 30 October 2015	30 Oktober 2020 30 October 2020
8	Amir Rosidin	Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah   Regional Business Director of Central Java	23 Desember 2014 23 December 2014	23 Desember 2019 23 December 2019
9	Djoko Rahardjo Abumanan	Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara   Regional Business Director of East Java, Bali & Nusa Tenggara	30 Oktober 2015 30 October 2015	30 Oktober 2020 30 October 2020
10	Machnizon	Direktur Bisnis Regional Kalimantan   Regional Business Director of Kalimantan	30 Oktober 2015 30 October 2015	30 Oktober 2020 30 October 2020
11	Syamsul Huda	Direktur Bisnis Regional Sulawesi   Regional Business Director of Sulawesi	24 Juli 2017 24 July 2017	24 Juli 2022 24 July 2022
12	Ahmad Rofik	Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua   Regional Business Director of Maluku & Papua	24 Juli 2017 24 July 2017	24 Juli 2022 24 July 2022

Sehubungan telah berakhirnya masa tugas Saudari Nicke Widyawati, Saudara Murtaqi Syamsuddin, Saudara Nasri Sebayang dan Saudara Amin Subekti, kami mengucapkan terimakasih atas sumbangsih pemikiran dan kerjasamanya selama menjalankan tugas sebagai Direksi di posisi masing-masing dan kami ucapkan selamat menjalankan tugas di tempat baru kelak.

With respect to the end of tenure of Ms. Nicke Widyawati, Mr. Murtaqi Syamsuddin, Mr. Nasri Sebayang, and Mr. Amin Subekti, we wish to thank them for their contribution and cooperation during their tenure, and we wish them continued success in their future endeavors.

## PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab operasional, Perseroan telah membentuk komite di bawah Direksi yang beranggotakan anggota direksi. Komite Direktur dibagi menjadi 8 Komite, yakni Komite IPP dan Kerja Sama Kemitraan, Komite Energi Primer, Komite Investasi dan Pendanaan, Komite Niaga, Komite SDM dan Organisasi, Komite Anak Perusahaan dan Afiliasi, Komite Penghapusan dan Pelepasan Aset, dan Komite Operasional.

Mempertimbangkan beratnya tugas yang telah dijalankan selama ini dan memperhatikan masukan-masukan yang diberikan, kami memandang bahwa Komite Direksi telah menjalankan tugasnya dengan baik, melalui pemberian masukan independen yang memungkinkan seluruh jajaran Direksi mengambil keputusan strategis mengenai pengembangan usaha maupun isu-isu strategi lainnya dengan baik dan berlandaskan pertimbangan yang semakin obyektif.

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Kami terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan secara menyeluruh guna mewujudkan misi perusahaan sekaligus menciptakan pertumbuhan yang berkualitas dan memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan, yakni: pelanggan, mitra kerja, pemerintah, pegawai, lembaga-lembaga swadaya, media massa dan masyarakat sekitar, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Perbaikan kualitas pelaksanaan tersebut mengandung maksud pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak terbatas pada kegiatan pemberian bantuan semata, melainkan menjadi salah satu pendukung keberhasilan pengembangan usaha jangka panjang Perusahaan.

## PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOD'S COMMITTEES

To ensure effective operational duties and responsibilities, the Company has established eight committees under the Board of Directors where all of the Directors serve as members: IPP and Partnership Committee, Primary Energy Committee, Investment and Funding Committee, Commerce Committee, Human Capital and Organization Committee, Subsidiary and Affiliates Committee, Asset Write-Off and Disposal Committee, and Operations Committee.

With regards to the challenging tasks at hand and considering the inputs from the committees, the Board of Directors would like to report that all committees have soundly performed their duties. All committees provided the Board of Directors with impartial, objective recommendations that informed the Board of Directors' strategic decision-making on business development and other vital issues.

## CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

We continuously strive to enhance the quality of our corporate social responsibility (CSR) implementation to realize our corporate missions, create sustainable growth, and meet the expectations of stakeholders; customers, business partners, the government, employees, non-governmental organizations, the media, local communities, and the environment.

Enhancing the quality of our CSR means we extend the scope of our activities beyond one-off donations or assistance; instead, CSR programs are seen as one of the drivers of the Company's long-term business development.

## Laporan Direksi

Board of Directors Reports

Dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya, untuk tahun 2017, PLN merealisasikan penyaluran dana Program Kemitraan (PK) senilai Rp616,38 juta dengan menggunakan dana bergulir.

Untuk mendukung munculnya calon mitra PK dan membina mitra PK PLN, kami telah mendirikan dan mengoperasikan 15 Rumah Kreatif BUMN (RKB), sebagai wadah/ tempat berbagi/ *sharing* ilmu dalam bisnis UMKM dan mendorong kemajuan UKM menuju *go digital*.

Selanjutnya kami merealisasikan penyaluran dana program Bina Lingkungan pada 7 jenis kegiatan sesuai ketentuan tersebut diatas, dengan total dana sebesar Rp91,34 miliar. PLN juga menyalurkan dana Program CSR pada 7 kegiatan sesuai peraturan yang berlaku dengan dukungan dana total sebesar Rp90,84 miliar.

## PROSPEK DAN STRATEGI 2018

Sekalipun pada akhir tahun 2017 tingkat Rasio Elektrifikasi Nasional telah mencapai 95,4% (termasuk pelanggan non-PLN), capaian tersebut masih menunjukkan Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara tetangga di kawasan Asia, yang telah mencapai 100%. Konsumsi listrik per Kapita Indonesia, juga termasuk rendah, jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia, baik yang masih termasuk negara berkembang, maupun yang telah termasuk kelompok negara maju, sesuai dengan data Bank Dunia berikut.

In accordance with the SOE Minister Regulation No: PER-09/MBU/07/2015 on the Community Partnership and Development Program of State-Owned Enterprises and SOE Minister Regulation No. PER-02/MBU/7/2017 dated 5 July 2017, in 2017 PLN realized a total of Rp616.38 million of Community Partnership programs sourced from revolving funds.

To support the presence of prospective program partners and to develop our existing partners, PLN has founded and has been managing 15 SOE Creative Houses (RKB), a place for knowledge sharing for SME communities and to encourage the SMEs to go digital.

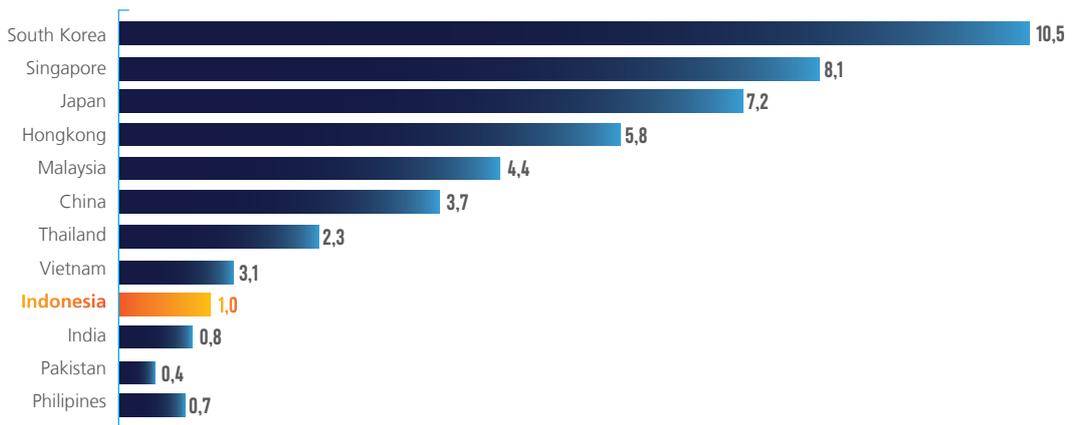
For Community Development programs, we disbursed a total of Rp91.34 billion to 7 types of activities in compliance with the regulations. PLN also disbursed CSR program funds amounting to Rp90.84 billion to 7 types of activities set out in the regulations.

## 2018 PROSPECTS AND STRATEGIES

While the National Electrification Ratio reached 95.4% as of the end of 2017 (including non-PLN customers), Indonesia in fact is still lagging behind its neighbouring countries in Southeast Asia – some have achieved 100% ratio. Indonesia's power consumption per capita was also low compared to Asian countries – developing and developed – as shown by the following figure from the World Bank.

## Konsumsi Listrik Per Kapita (MWh)

## Power Consumption per Capita (MWh)



Sumber | Source : worldbank.org

Setelah termasuk sebagai salah satu negara dengan nilai GDP diatas US\$1 triliun pada akhir tahun 2017 lalu, dalam kurun waktu 13 tahun mendatang, yakni tahun 2030, Indonesia diprediksikan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi no-5 terbesar di seluruh dunia. Dengan mempertimbangkan fakta tersebut dan mempertimbangkan laju pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun terakhir dan proyeksi tahun mendatang, dan tahun-tahun berikutnya, maka permintaan listrik di Indonesia akan terus tumbuh.

After achieving above US\$1 trillion of GDP at the end of 2017, in the next 13 years or by 2030 Indonesia is predicted to be the world's fifth largest economies. In light of this and considering the nation's historical and projected economic growth, power demand in Indonesia will certainly grow.

Berdasarkan asumsi-asumsi yang ditetapkan dalam APBN 2018 dan rencana pengembangan usaha yang ditetapkan oleh PLN bersama Pemerintah, telah ditetapkan serangkaian target kuantitatif yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahun 2018, dengan beberapa sasaran pokok diantaranya adalah:

Based on the assumptions defined in the 2018 State Budget and the business development plan that PLN designed together with the government, the following targets are articulated in the 2018 corporate plan. The key targets are:

Keterangan	Satuan Unit	Realisasi Realization 2017	Target 2018	Perubahan Change %	Description
Volume Penjualan Tenaga Listrik	TWh TWh	223,1	241,6	8,3%	Volume of Sale of Electricity
Penambahan Pelanggan	Juta Pelanggan Million Customer	3,8	3,6	-4,4%	Customer Increase
Penambahan Daya Tersambung	MVA MVA	7.670,0	8.908,4	16,1%	Connected Power

Laporan Direksi  
Board of Directors Reports

Keterangan	Satuan Unit	Realisasi Realization 2017	Target 2018	Perubahan Change %	Description
Pendapatan Penjualan Tenaga Listrik	Rp miliar Billion IDR	246.587	282.294	14,5%	Revenues from Sale of Electricity
Laba Usaha Setelah Subsidi	Rp miliar Billion IDR	25.559	38.249	49,6%	Operating Income After Subsidy
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp miliar Billion IDR	4.428	10.440	135,8%	Net Income After Tax

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RKAP, kami juga telah menetapkan sejumlah program prioritas, diantaranya:

1. Menyelesaikan program 35.000 MW termasuk jaringan transmisi dan gardu induk.
2. Menurunkan BPP melalui upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi operasi aset
3. Mengembangkan EBT dan konservasi energi termasuk melalui partisipasi pelanggan.
4. Melaksanakan program *Demand Side Management* yang terintegrasi dengan struktur tarif (insentif-disinsentif).
5. Melanjutkan perbaikan kemampuan meminjam (*Debt Capacity*) dan mendapatkan pinjaman dengan biaya yang paling efisien bagi PLN.
6. Menurunkan angka SAIDI, SAIFI dan Menurunkan non *fuel cost*.
7. Menurunkan susut jaringan.
8. Menciptakan sistem supply chain management yang terintegrasi.
9. Melanjutkan inisiatif pengembangan smart grid dan infrastruktur kendaraan listrik (*charging station*).

To achieve the strategic goals, we have determined a number of priority programs, among others:

1. Complete 35,000 project including transmission network and substations
2. Reduce cost of supply by increasing productivity and efficiency of asset operations
3. Develop NRE and energy conservation including through customer participation
4. Carry out Demand Side Management integrated with tariff structure (incentive-disincentive).
5. Continue the improvement of Debt Capacity and to obtain borrowings with the most efficient charges for PLN
6. Reduce SAIDI and SAIFI level as well as non-fuel costs
7. Curtail electricity losses
8. Create integrated supply chain management system
9. Continue smart grid and electric vehicle infrastructure development (charging stations)

## APRESIASI

Akhir kata, kami memberikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran atas dedikasi dan loyalitasnya dalam berkarya dan bekerja untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan negara. Kemudian kami mengajak seluruh jajaran insan PLN untuk kembali bekerja keras dengan seluruh kompetensi yang dimiliki dan mengedepankan integritas untuk bersama-sama mengatasi setiap tantangan, mewujudkan program besar yang sangat dibutuhkan bagi kemajuan bangsa, sebagaimana telah ditunjukkan melalui raihan berbagai prestasi selama ini.

Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang mendalam atas dukungan dan arahan dari Dewan Komisaris beserta seluruh jajarannya, sehingga seluruh program kerja PLN dapat terlaksana dengan baik. Kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya, kami juga mengucapkan terimakasih atas sumbang saran perbaikan dan kerja sama yang terjalin dengan semakin baik, semakin menjunjung tinggi transparansi untuk memberi manfaat terbaik dalam merealisasikan seluruh kerjasama yang berkelanjutan.

Menghadapi tahun 2018, kami, jajaran Direksi yang baru, bersama-sama dengan seluruh jajaran manajemen dan pegawai PLN bertekad mengembangkan infrastruktur ketenagalistrikan yang memadai untuk mendukung pembangunan negeri, menjunjung tinggi praktik terbaik Tata Kelola Perusahaan, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan serta memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan.

## APPRECIATION

In conclusion, we would like to express our appreciation and deepest gratitude to all of our employees, across all levels, for their dedication and loyalty in delivering the best services for the people and the country. We would like to invite everyone in PLN to continue the hard work, to utilize their competencies, and to work with integrity. Together, as we have seen many times in the past, we can overcome any challenge and accomplish the ambitious goals that our nation needs.

We also would like to convey our sincere thanks to the Board of Commissioners for their support, direction, and assistance in implementing all of PLN programs. We thank our stakeholders for their input and cooperation and their call for transparency as an important quality in our efforts of delivering value and continuous partnerships.

Embarking upon 2018, the new Board of Directors, the management, and all PLN employees are hereby committed to develop quality electricity infrastructure, support national development, uphold best GCG practices, provide excellent services to our customers, and meet the expectations of our stakeholders.

Jakarta, April 2018



**Sofyan Basir**  
Direktur Utama  
President Director

## Direksi Board of Directors



1. **Djoko Rahardjo Abumanan**  
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara  
Regional Business Director of East Java, Bali & Nusa Tenggara

2. **Sarwono Sudarto**  
Direktur Keuangan  
Director of Finance

3. **Sofyan Basir**  
Direktur Utama & Plt Direktur  
Pengadaan Strategis 1  
President Director & Acting Director  
of Strategic Procurement 1

4. **Syofvi Felienty Roekman**  
Direktur Perencanaan Korporat  
Director of Corporate Planning

5. **Muhamad Ali**  
Direktur Human Capital Management  
Director of Human Capital Management

6. **Supangkat Iwan Santoso**  
Direktur Pengadaan Strategis 2  
Director of Strategic Procurement 2

Direksi  
Board of Directors

7

7.  
**Machnizon**  
Direktur Bisnis Regional Kalimantan  
Regional Business Director of Kalimantan

8

8.  
**Haryanto W.S.**  
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat  
Regional Business Director of West Java

9

9.  
**Syamsul Huda**  
Direktur Bisnis Regional Sulawesi  
Regional Business Director of Sulawesi

10

10.  
**Amir Rosidin**  
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah  
Regional Business Director of Central Java

11.  
**Ahmad Rofik**  
Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua  
Regional Business Director of Maluku & Papua

11

12.  
**Wiluyo Kusdwiarto**  
Direktur Bisnis Regional Sumatera  
Regional Business Director of Sumatera

12



# PROFIL PERUSAHAAN

## Company Profile

Memantapkan perjalanan Transformasi PLN menjadi Korporasi Kelas Dunia Berkinerja Unggul, Perseroan melakukan perubahan struktur organisasi agar semakin lincah dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang pertumbuhan, mengembangkan usaha yang semakin terintegrasi dan meningkatkan kompetensi SDM. Dengan kemampuan prima dalam mengelola salah satu aset korporasi terbesar di Indonesia, Manajemen PLN bersama seluruh jajarannya kini semakin siap mendukung pembangunan negeri, menjadi negara maju di kawasan yang berdaya saing tinggi di pasar global.

Sharpening PLN Transformation journey into a World Class Corporation with Excellent Performance, the Company transformed its organizational structure aiming at being agile in addressing the challenges and taking the growth opportunities, enhancing an integrated business development and improving HR competency. Backed by excellent capability in managing one of the largest corporate assets in Indonesia, PLN Management and all its elements are now ready to foster the nation's development, to become a progressive nation in the region ready to address global market's high competition.

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 88 <b>Informasi Umum</b><br>General Information                      | 106 <b>Road Map Budaya Perusahaan 2017-2021</b><br>Corporate Culture Road Map 2017-2021                                | 138 <b>Prinsip Kesetaraan Gender</b><br>Gender Equality Principle            |
| 92 <b>Riwayat Singkat Perusahaan</b><br>Company at a Glance          | 108 <b>Profil Dewan Komisaris</b><br>Board of Commissioners Profiles   | 142 <b>Program Pengembangan Kompetensi</b><br>Competence Development Program |
| 94 <b>Kegiatan dan Bidang Usaha</b><br>Activities and Business Lines | 117 <b>Profil Direksi</b><br>Board of Directors Profiles   | 144 <b>Program Kepemimpinan PLN</b><br>PLN Leadership Program                |
| 98 <b>Struktur Organisasi</b><br>Organizational Structure            | 129 <b>Pejabat Senior – Satu Tingkat Dibawah Direksi</b><br>Senior Executives – One Level Below the Board of Directors | 145 <b>Knowledge Management</b>  |



**147 Sistem Manajemen Kinerja Pegawai (SIMKP)**

Employee Performance Management System (SIMKP)

**150 Remunerasi**

Remuneration

**152 Sinergi Hubungan Industrial**

Industrial Relations Synergy

**156 Informasi Pemegang Saham dan Obligasi**

Shareholders and Bonds Information

**177 Entitas Anak**

Subsidiaries

**180 Daftar Alamat Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Ventura Bersama**

Address of Subsidiaries, Associates, Joint Ventures

**182 Struktur Usaha Group PLN**

PLN Business Group Structure

**184 Wilayah Operasi**

Operational Area

**186 Jejak Langkah Perusahaan**

Company Milestones

**188 Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan di Pasar Modal**

Capital Market Supporting Institutions and Professions

**194 Penghargaan dan Pengakuan Eksternal**

Awards and External Recognitions

**199 Sertifikasi**

Certification

**202 Alamat Unit Bisnis dan Kantor Perwakilan**

Address of Business Units and Representative Offices

**205 Akses Informasi Dan Situs Perseroan**

Information Access and Corporat Website

**208 Peristiwa Penting 2017**

Event Highlights 2017

# INFORMASI UMUM

## General Information

	<b>Nama</b>   Name	<b>PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)</b>
	<b>Bidang Usaha</b>   Line of Business	<b>Pembangkitan, Distribusi, Transmisi dan Jasa Lain Terkait Kelistrikan</b> Generation, Distribution, Transmission and Other Services Related To Electricity
	<b>Kepemilikan</b>   Ownership	<b>100% Pemerintah Indonesia</b> The Government of Indonesia 100%
	<b>Alamat</b> Address	<b>Kantor Pusat</b> Head Office PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Jl. Trunojoyo Blok M-I No.135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia Tel. : +62 21 725 1234, 725 0550, 726 1122 Fax. : +62 21 722 1330 Email : pln123@pln.co.id Website : www.pln.co.id
	<b>Tanggal</b> <b>Pendirian</b>   Date of Establishment	1 Januari 1961, dengan nama Jawatan Listrik dan Gas dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga. 1 January 1961, with the name of Jawatan Listrik dan Gas under the Ministry of Public Works and Energy.



Informasi Umum  
General Information

	<b>Dasar Hukum Pendirian  </b> Establishment Legal Basis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah No. 1 s/d tanggal 27 Oktober 1945 berdiri sebagai Jawatan Listrik dan Gas.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1961, diganti sebagai Perusahaan Negara, disebut sebagai Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1965, dibentuk sebagai Perusahaan Listrik Negara.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1972, tanggal 3 Juni 1972, ditegaskan menjadi Perum Perusahaan Listrik Negara.</li> <li>5. Akta 169, 30 Juli 1994 dari Sutjipto, Notaris, Perum PLN diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT PLN (Persero).</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Government Regulation No. 1 to 27 October 1945, established as Jawatan Listrik dan Gas.</li> <li>2. Government Regulation No. 67 of 1961, changed to State Company (Perusahaan Negara), and called State-Owned Electricity Ultimate Enterprise.</li> <li>3. Government Regulation No. 19 of 1965, established as State-Owned Electricity Enterprise.</li> <li>4. Government Regulation No. 18 of 1972, dated 3 June 1972, affirmed as State-Owned Electricity Enterprise.</li> <li>5. Deed No. 169, 30 July 1994 from Sutjipto, Notary, Perum PLN was changed to a Limited Liability Company under the name of PT PLN (Persero).</li> </ol>
	<b>Modal Dasar  </b> Authorized Capital	Rp 439 Triliun   Trillion
	<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh  </b> Issued and Fully Paid Capital	Rp 109,8 Triliun   Trillion
	<b>Kode Obligasi  </b> Bonds Code	PPLN

## Informasi Umum

General Information

## Obligasi Domestik | Domestic Bonds

Obligasi   Bonds	Kode Obligasi   Bonds Codes
Obligasi PLN VIII Seri B   PLN Bond VIII Serie B	PPLN08B
Obligasi PLN IX Seri B   PLN Bond IX Serie B	PPLN09B
Obligasi PLN XI Seri B   PLN Bond XI Serie B	PPLN11B
Sukuk Ijarah PLN IV Seri B   PLN Sukuk Ijarah IV Serie B	SIKPPLN03B
Obligasi PLN XII Seri B   PLN Bond XII Serie B	PPLN12B
Sukuk Ijarah PLN V Seri B   PLN Sukuk Ijarah V Serie B	SIKPPLN04B
Berkelanjutan I PLN Tahap I Seri A   PLN Shelf I Tranche I Serie A	PPLN01ACN1
Berkelanjutan I PLN Tahap I Seri B   PLN Shelf I Tranche I Serie B	PPLN01BCN1
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I   PLN Shelf Sukuk Ijarah I Tranche I	SIPPLN01CN1
Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri A   PLN Shelf I Tranche II Serie A	PPLN01ACN2
Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri B   PLN Shelf I Tranche II Serie B	PPLN01BCN2
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri A   PLN Shelf Sukuk Ijarah I Tranche II Serie A	SIPPLN01ACN2
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri B   PLN Shelf Sukuk Ijarah I Tranche II Serie B	SIPPLN01BCN2
Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri A   PLN Shelf II Tranche I Serie A	PPLN02ACN1
Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri B   PLN Shelf II Tranche I Serie B	PPLN02BCN1
Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri C   PLN Shelf II Tranche I Serie C	PPLN02CCN1
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri A   PLN Shelf Sukuk Ijarah II Tranche I Serie A	SIPPLN02ACN1
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri B   PLN Shelf Sukuk Ijarah II Tranche I Serie B	SIPPLN02BCN1
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri A   PLN Bond Shelf II Tranche II Serie A	PPLN02ACN2
Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri B   PLN Shelf II Tranche I Serie B	PPLN02BCN1
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri B   PLN Bond Shelf II Tranche II Serie B	PPLN02BCN2
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri C   PLN Bond Shelf II Tranche II Serie C	PPLN02CCN2
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri D   PLN Bond Shelf II Tranche II Serie D	PPLN02DCN2
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri A   PLN Shelf Sukuk Ijarah II Tranche II Serie A	SIPPLN02ACN2
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri B   PLN Shelf Sukuk Ijarah II Tranche II Serie B	SIPPLN02BCN2
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri C   PLN Shelf Sukuk Ijarah II Tranche II Serie C	SIPPLN02CCN2

Informasi Umum  
General Information

## Obligasi Internasional | International Bonds

Obligasi   Bonds	Kode Obligasi   Bonds Codes
Global Bond II B	CUSIP 56068TAD9 N54360AD9
Global Bond III	CUSIP N54360AE7 56068TAE7
Global Bond IV	CUSIP N54360AF4 56068TAF4
Global Medium Term Notes 2011	CUSIP 71568PAA7 71568QAA5
Global Medium Term Notes 2012	CUSIP 71568PAB5 71568QAB3
Global Medium Term Notes 2017 - 10Y	CUSIP 71568PAC3 71568QAC1
Global Medium Term Notes 2017 - 30Y	CUSIP 71568PAD1 71568QAD9

Untuk informasi lebih lanjut mengenai PLN silahkan menghubungi | For further information, please contact:

**Bambang Dwiyanto**

Sekretaris Perusahaan | Corporate Secretary  
PT PLN (Persero)  
Jalan Trunojoyo Blok M – I No 135  
Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia  
Telp. : (62-21) 7251234, 7261122  
Fax. : (62-21) 7221330



[www.pln.co.id](http://www.pln.co.id)



@pln\_123



PLN 123



@plnkita



PT PLN (Persero)

## RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

### Company at a Glance

Perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia bermula sejak akhir abad ke-19, melalui pembangunan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri di beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan perkebunan teh. Hingga kemudian antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang.

Seiring dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, di akhir tahun 1945, para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas bersama-sama dengan Pimpinan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Tanggal 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno kemudian membentuk Jawatan Listrik dan Gas, yang berada di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik saat itu adalah sebesar 157,5 MW. Tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) dengan bidang usaha penyediaan listrik, gas dan kokas. Tanggal 1 Januari 1965 BPU-PLN dibubarkan, diikuti pembentukan 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas.

The development of electricity in Indonesia was beginning at the end of the 19<sup>th</sup> century, several Dutch companies owning sugar mills and tea plantations built power plants as self-necessity. Between the years 1942-1945 the management of these plantations with power plants was transferred to the Japanese.

With the fall of Japan into the Allies, and as Indonesia proclaimed independence in August 17, 1945, Indonesia took over the control of the electricity plants from the Japanese. The youth and electricity workingmen through the Delegation of Electricity and Gas Employees together with the leaders of the Central Indonesian National Committee (KNIP) took the initiative to meet President Sukarno to hand over these power plants to the Government of the Republic of Indonesia.

In October 27, 1945, President Sukarno established the Electricity and Gas Bureau, under the Public Works and Energy Department, which at that time oversaw a power generator capacity of 157.5 MW. On January 1, 1961, the Electricity and Gas Bureau was reconstituted and renamed BPU-PLN (Board of General Administration of the State Electricity Company), with its main business as the supply of electricity, gas and coking coal. In January 1, 1965 BPU-PLN was dismissed and divided with State Electricity Company (PLN) managing electricity power and the National Gas Company (PGN) managing gas.



## Riwayat Singkat Perusahaan

Company at a Glance

Tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) berubah menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara, bertindak sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Tahun 1994 Pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik. PLN kemudian beralih menjadi Perusahaan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum.

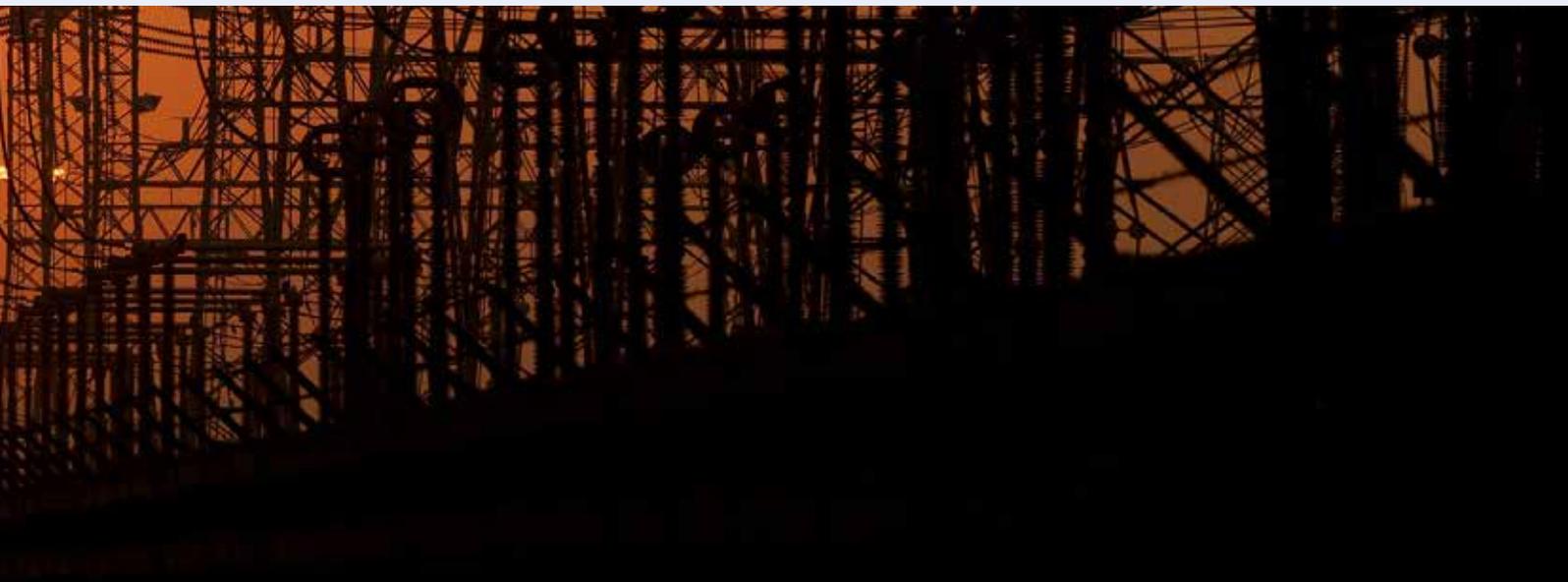
Seiring dengan terbitnya UU Nomor 30 Tahun 2009, PLN bukan lagi sebagai PKUK namun sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

PLN kini telah berkembang sebagai salah satu dari kelompok korporasi dengan aset terbesar di seluruh dunia. Total daya pembangkit milik PLN yang dikelola sampai akhir tahun 2017 telah semakin berkembang menjadi 39.651,80 (2016: 39.785,06 MW).

In 1972, based on the Government Regulation No. 17, the State Electricity Company (PLN) was renamed as the Public State-Owned Electricity Company, acting as the Authorized Agency for Electrical Power Business (PKUK) with the task to provide electricity to fulfill public needs. In 1994, the Government provided opportunities to the private sector to be involved in the business of electricity supply. PLN was then turned into a Limited Liability Company (PT) as state owned (Persero), continuing as PKUK in providing electricity for public use.

With the issuance of Law No. 30 of 2009, PLN no longer acted as an authorized agency in the electrical power business (PKUK), but as a State Owned Enterprise (SOE) where its main business is to supply electricity to meet public needs.

PLN is now developing as one of the largest asset companies in the world. Until the end of 2017, the total capacity of the power plants owned by PLN had developed to 39,651.80 MW (2016: 39,785.06 MW).



# KEGIATAN DAN BIDANG USAHA

## Activities and Business Lines

### KEGIATAN USAHA

#### Kegiatan Usaha yang Dijalankan

Sesuai Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan serta Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan usaha PLN, adalah:

- Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang mencakup:
  - Pembangkitan tenaga listrik.
  - Penyaluran tenaga listrik.
  - Distribusi tenaga listrik.
  - Perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik.
  - Pengembangan penyediaan tenaga listrik.
  - Penjualan tenaga listrik.
- Menjalankan usaha penunjang tenaga listrik yang mencakup:
  - Konsultasi ketenagalistrikan.
  - Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan.
  - Pemeriksaan dan pengujian peralatan ketenagalistrikan.
  - Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan.
  - Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik.
  - Sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik.
  - Sertifikasi kompetensi tenaga teknik, ketenagalistrikan.
- Kegiatan-kegiatan lainnya mencakup:
  - Pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan sumber energi lainnya untuk tenaga listrik.
  - Jasa operasi dan pengaturan (*dispatcher*) pada pembangkitan, penyaluran, distribusi dan *retail* tenaga listrik.
  - Industri perangkat keras, lunak dan lainnya di bidang ketenagalistrikan.
  - Kerjasama dengan pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan di bidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan informasi terkait dengan ketenagalistrikan.
  - Usaha jasa ketenagalistrikan.

### BUSINESS ACTIVITIES

#### Business Activities

In accordance with Law No. 30 of 2009 regarding Electricity and in the Company's Articles of Association, the Company's lines of business are:

- Provision of electrical power, which includes:
  - Generation of electricity.
  - Transmission of electricity.
  - Distribution of electricity.
  - Planning and constructing facilities to supply electrical power.
  - Development of electricity supply.
  - Sales of electricity.
- Provision of service business units to support electricity services, which include:
  - Electricity consultation.
  - Construction and installation of electrical power equipment.
  - Assessment and testing of electrical power equipment
  - Operation and maintenance of electrical power equipment.
  - Laboratory of electrical power equipment and consumer testing.
  - Certification of electrical power equipment and consumer.
  - Certification of competence for electricity technicians.
- Other activities, which include:
  - Manage and utilize natural resources and other energy sources for electrical power.
  - Operating and dispatching services for generation, transmission, distribution and retail sales of electricity.
  - Industry of hardware, software and other electricity equipment.
  - Cooperate with other parties and related electricity industry institutions in the fields of development, operations, telecommunications and other information related to electricity.
  - Electricity services business.

## Kegiatan dan Bidang Usaha

Activities and Business Lines

### Bidang Usaha

Adapun bidang usaha PLN, meliputi:

1. Kegiatan perencanaan pengembangan fasilitas tenaga listrik (pembangkitan, transmisi dan distribusi umum) dan penunjang, rencana pendanaan, pengembangan usaha, pengembangan organisasi, dan SDM.
2. Kegiatan pembangunan konstruksi sarana penyediaan tenaga listrik pembangkitan, transmisi dan gardu induk.
3. Kegiatan perusahaan/operasi pusat-pusat pembangkit tenaga listrik misalnya: Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG-gas turbine); Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) serta pengoperasian transmisi dan distribusi listrik pada pelanggan. PLN juga menjalankan kegiatan sewa pembangkit dan pembelian tenaga listrik yang diproduksi oleh pusat-tenaga listrik swasta.
4. Kegiatan riset dan penunjang berkaitan dengan bidang kelistrikan.

Produk dan jasa yang dihasilkan:

- a. Jasa layanan dan penyediaan tenaga listrik.
- b. Jasa sertifikasi peralatan dan instalasi ketenagalistrikan.
- c. Jasa konsultasi ketenagalistrikan.
- d. Jasa pembangunan, pemeliharaan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan.
- e. Jasa pengembangan ketenagalistrikan (riset dan penunjang).
- f. Jasa lainnya di bidang ketenagalistrikan.

Jasa-jasa yang disebutkan di atas dilaksanakan oleh PLN melalui 15 Unit Wilayah, 7 Unit Distribusi, 3 Unit Pembangkitan, 3 Unit Transmisi, 2 Unit Pembangkitan & Penyaluran, 18 Unit Induk Pembangunan, 2 Unit Pusat Pengatur Beban dan 6 Unit Pusat/Jasa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

### Business Lines

The following are PLN's business lines:

1. Planning and development activities of electric power facilities (generation, transmission and distribution) and supporting activities of budgeting, business development, organization development and human resources.
2. Construction of electricity infrastructure, including construction of power generating facilities, transmission and substations (transformers, facility stations).
3. Utilization and commercialization activities of power plants, which consist of Coal Power Plants, hydro power plants, gas turbine power plants, geothermal power plants, diesel power plants, solar cell power plants and wind power plants, also operation of electricity transmission and distribution to customers. PLN also purchases electrical power produced by private power plants and rents other public power plants to be utilized.
4. Research and development, activities and other related to electricity.

Products and Services includes:

- a. Provision of electricity.
- b. Equipment certification and electrical power installation.
- c. Electrical power consultation.
- d. Building, maintaining and installing equipment to produce electrical power.
- e. Electrical power development services (research and support).
- f. Other services related to electrical power.

The services mentioned above are conducted by PLN through its 15 Regional Units, 7 Distribution Units, 3 Generation Units, 3 Transmission Units, 2 Generation and Transmission Units, 18 Construction Units, 2 Dispatcher Center Units and 6 Central/Service Units across Indonesia.

## Kegiatan dan Bidang Usaha

### Activities and Business Lines



## SEGMENT OPERASI

Segmen operasi adalah komponen entitas terkait aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan. Segmen Operasi PLN dibagi berdasarkan aspek penjualan tenaga listrik, yakni: (a). Segmen Operasi Rumah Tangga, (b). Segmen Operasi Industri, (c) Segmen Operasi Bisnis, (d) Segmen Operasi Lainnya.

### Segmen Operasi Rumah Tangga

Segmen Operasi Rumah Tangga terdiri dari 2 bentuk, yakni: (a). Golongan Tarif Subsidi untuk R-1 / s/d 450 VA dan R-1 / 900 VA dan (b). Golongan Tarif Non-Subsidi untuk R-1 / 900 VA, R-1 / 1300 VA, R-1 / 2200 VA, R-2 / 3500 s/d 5500 VA, dan R-3 /  $\geq 6600$  VA.

### Segmen Operasi Industri

Segmen Operasi Industri diklasifikasikan dalam 2 bentuk, yaitu (a) Golongan Tarif Subsidi untuk I-1 / 450 VA, I-1 / 900 VA, I-1 / 1300 VA, I-1 / 2200 VA, I-1 / 3500 VA s/d 14 kVA, dan I-2 /  $> 14$  kVA s/d 200 kVA, serta (b) Golongan Tarif Non-Subsidi untuk I-3 /  $> 200$  kVA dan I-4 /  $\geq 30.000$  kVA.

## OPERATION SEGMENTS

The operation segments are entities related to business activities aiming at generating revenues. The PLN's Operation Segments are divided based on power selling aspects, which are (a) Households Operation Segment, (b) Industrial Operation Segment, (c) Business Operations Segment, (d) Other Operation Segments.

### Households Operation Segment

The Households Operation Segment consists of 2 groups: (a) Subsidy Tariff Group for R-1/ to 450 VA and R-1/ 900 VA and (b). Non-Subsidy Tariff Group for R-1/ 1300 VA, R-1/ 2200 VA, R-2/ 3500 VA to 5500 VA, and R-3/  $\geq 6600$  VA.

### Industrial Operation Segment

The Industrial Operation Segment is classified into 2 groups: (a) Subsidy Tariff Group for I-1/ 450 VA, I-1/ 900 VA, I-1/ 1300 VA, I-1/ 2200 VA, I-1/ 3500 VA to 14 kVA, and I-2/  $> 14$  kVA to 200 kVA, and (b) Non-Subsidy Tariff Group for I-3/  $> 200$  kVA and I-4/  $\geq 30,000$  kVA.

## Kegiatan dan Bidang Usaha

### Activities and Business Lines

#### Segmen Operasi Bisnis

Segmen Operasi Bisnis diklasifikasikan dalam 4 bentuk, yaitu (a). Golongan Tarif Subsidi untuk B-1 / 450 VA, B-1 / 900 VA, B-1 / 1300 VA, dan B-1 / 2200 VA s/d 5500 VA, (b). Golongan Tarif Non Subsidi untuk B-2 / 6600 VA s/d 200 kVA dan B-3 / > 200 kVA, (c). Traksi yang terdapat pada golongan tarif subsidi untuk T / > 200 kVA, (d). Curah yang terdapat pada golongan tarif subsidi untuk C / >200 kVA, serta (e). Layanan Khusus.

#### Segmen Operasi Lainnya

Segmen Operasi Lainnya terdiri dari beberapa segmen operasi, yakni Segmen Operasi Sosial, Segmen Operasi Publik, Segmen Operasi Traksi, dan Segmen Operasi Curah.

- **Segmen Operasi Sosial**  
Segmen Operasi Sosial merupakan kelas dalam golongan tarif subsidi untuk S-1 / 220 VA, S-2 / 450 VA, S-2 / 900 VA, S-2 / 1300 VA, S-2 / 2200 VA, S-2 / 3500 VA s/d 200 kVA, dan S-3 / > 200 kVA.
- **Segmen Operasi Publik**  
Segmen Operasi Publik dapat diklasifikasikan dalam 2 bentuk, yaitu (a). Golongan Tarif Subsidi untuk P-1 / 450 VA, P-1 / 900 VA, P-1 / 1300 VA, dan P-1 / 2200 VA - 5500 VA, serta (b). Golongan Tarif Non-Subsidi untuk P-1 / 2200 VA - 5500 VA, P-2 / > 200 kVA, dan P-3.
- **Segmen Operasi Traksi**  
Segmen Operasi Traksi adalah tarif untuk T / > 200 kVA.
- **Segmen Operasi Curah**  
Segmen Operasi Curah adalah tarif untuk C / > 200 kVA.
- **Segmen Operasi Layanan Khusus**  
Segmen Operasi Lainnya adalah tarif layanan khusus.

#### Business Operations Segment

The Business Operations Segment is classified into 4 groups: (a) Subsidy Tariff Group for B-1/ 450 VA, B-1/ 900 VA, B-1/ 1300 VA, and B-1/ 2200 VA to 5500 VA, (b). Non-Subsidy Tariff Group for B-2/ 6600 VA to 200 kVA and B-3/ >200 kVA, (c). Tractions in the subsidy tariff group for T/>200 kVA, (d) Bulks in the subsidy tariff group for C/>200 kVA, and (e). Special Services.

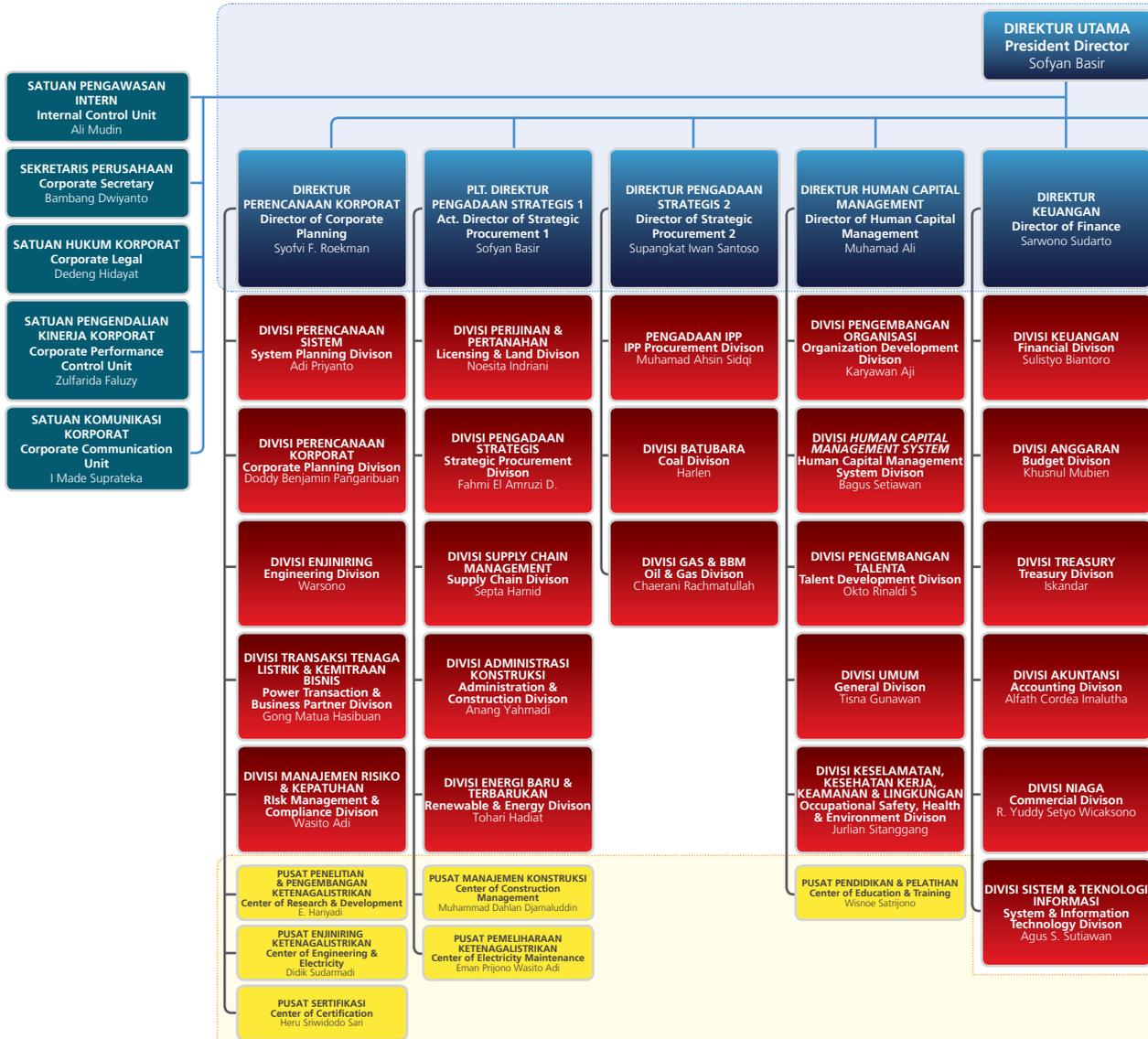
#### Other Operations Segment

Other Operations Segment consists of various operations segments, which are Social Operation Segment, Public Operation Segment, Traction Operations Segment, and Bulk Operations Segment.

- **Social Operation Segment**  
The Social Operation Segment is included in subsidy tariff group for S-1/ 220 VA, S-2/ 450 VA, S-2/ 900 VA, S-2/ 1300 VA, S-2/ 2200 VA, S-2/ 3500 VA to 200 kVA, and S-3/ > 200 kVA.
- **Public Operation Segment**  
The Public Operation Segment is classified into 2 groups: (a) Subsidy Tariff Group for P-1/ 450 VA, P-1/ 900 VA, P-1/ 1300 VA, and P-1/ 2200 VA – 5500 VA, and (b). Non-Subsidry Tariff Group P-1/ 2200 VA – 5500 VA, P-2/ >200 kVA, and P-3.
- **Traction Operation Segment**  
Traction Operation Segment has the tariff for T / > 200 kVA.
- **Bulk Operation Segment**  
Bulk Operation Segment has the tariff for C / > 200 kVA.
- **Special Service Operation Segment**  
Special Service Operation Segment has the tariff for special services.

# STRUKTUR ORGANISASI

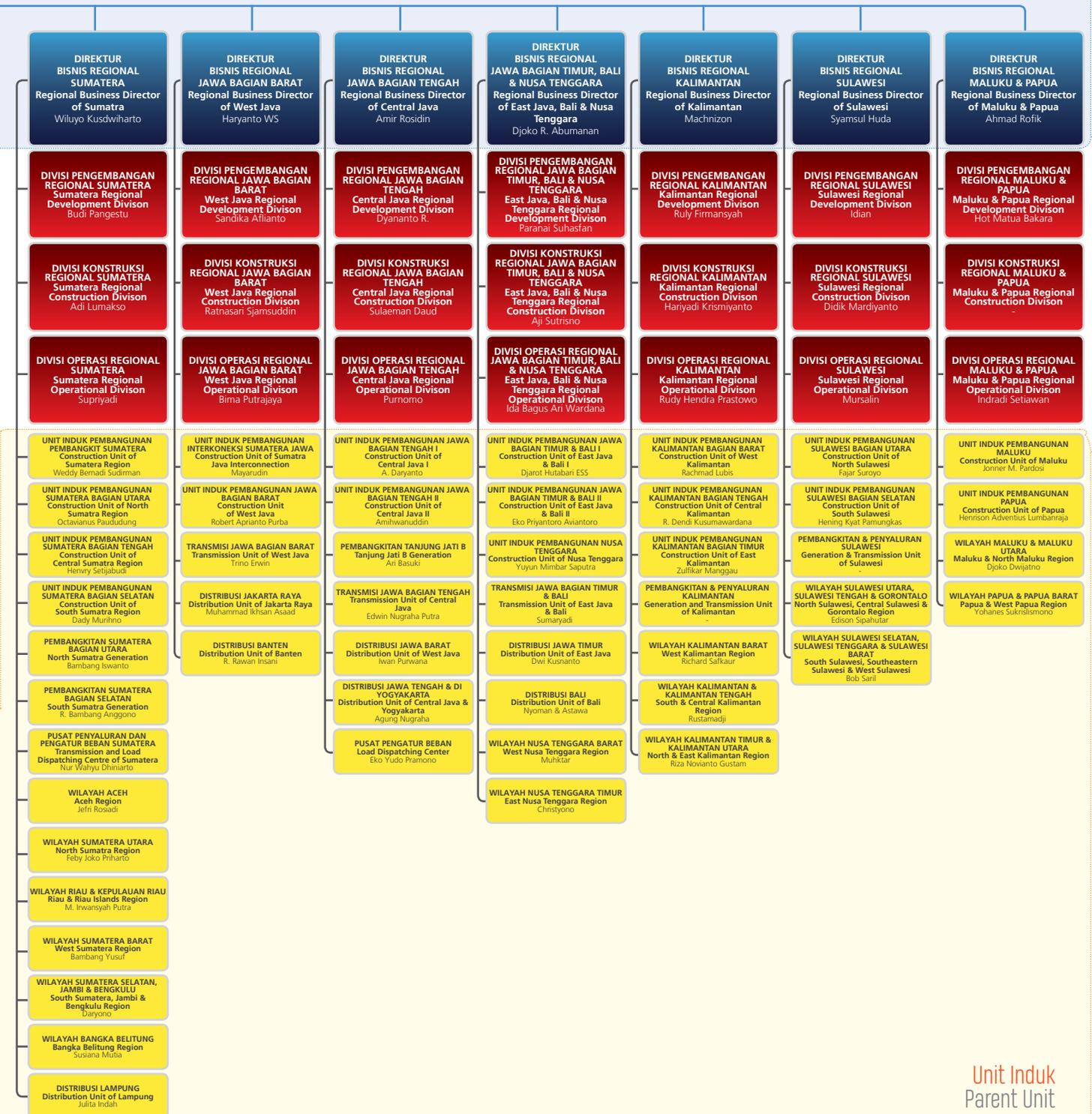
## Organizational Structure



Status Per 31 Desember 2017  
December 31, 2017 Status

Struktur Organisasi  
Organizational Structure

Direksi  
Board of Directors



Unit Induk  
Parent Unit

# Visi, Misi, Moto & Budaya Perusahaan

## Vision, Mission, Motto and Culture of the Company

# VISI

## Vision

**Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.**

To be acknowledged as a growing, superior and trusted world-class company, supported by its competent human resources.

# MISI

## Mission

- 1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.**
- 2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.**
- 3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.**
- 4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.**

1. Running an electricity business and other related sectors, oriented to customer satisfaction, company members and shareholders.
2. Making electricity as a medium to improve quality of life of the public.
3. Making every effort for electricity as an economic booster.
4. Operating an environmentally friendly business.

### Persetujuan Visi dan Misi | Vision and Mission Statements

Pernyataan visi dan misi telah disepakati oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2002 dan telah dideklarasikan pada saat Hari Listrik Nasional 27 Oktober 2002. | The vision and mission statements were approved by the Boards of Directors and Commissioners in 2002 and declared on National Electricity Day on October 27, 2002.

Visi, Misi, Moto & Budaya Perusahaan  
Vision, Mission, Motto and Culture of the Company



## Kelas Dunia

World Class

Perusahaan mampu memberikan pelayanan dengan standar kualitas pelayanan kelas dunia, memiliki cakrawala pemikiran yang mutakhir, terdepan dalam pemanfaatan teknologi, haus akan kesempurnaan kerja dan perilaku, serta merupakan perusahaan idaman bagi pencari kerja. Pelayanan kelas dunia yang dimaksud diharapkan dapat diwujudkan pada tahun 2025 dimana perusahaan menjadi 25% terbaik dunia dengan sasaran antara 35% terbaik dunia di tahun 2022.

The Company is able to provide a world-class services standard, has an advanced reflection, at the forefront in technology utilization, striving for work and conduct refinement, as well as a company of choice by the community. The world class service aimed to be realized in 2025 where the Company strives to become the best 25% in the world with the target of between the best 35% in the world by 2022.



## Terpercaya

Trustworthy

Perusahaan mampu memegang teguh etika bisnis, konsisten memenuhi standar layanan yang dijanjikan, serta menjadi perusahaan favorit para pihak yang berkepentingan.

The Company is able to firmly upholding business ethics, consistent in delivering services standards, and becomes favourite entity for the stakeholders.



## Tumbuh Kembang

Sustainable Growth

Perusahaan mampu mengantisipasi berbagai peluang dan tantangan usaha, serta konsisten dalam pengembangan standar kerja.

The Company is able to anticipate business opportunities and challenges, and consistent in developing working standards.



## Unggul

Excellent

Perusahaan menjadi yang terbaik, terkemuka dan mutakhir dalam bisnis kelistrikan, fokus dalam usaha mengoptimalkan potensi insani, serta mampu meningkatkan kualitas input, proses, dan output produk dan jasa pelayanan secara berkesinambungan.

The Company strives to be the best, prominent and advance in electricity business, focus in optimizing its people potentials, and able to enhance the quality of inputting, processing, and output of product and services continuously.



## Potensi Insani

People Potentials

Perusahaan mampu mengembangkan insan yang kompeten, profesional dan berpengalaman, serta memenuhi standar etika dan kualitas.

The Company is able to enhance competent, professional and experience human resources, as well as delivering ethical and quality standards.

Visi, Misi, Moto & Budaya Perusahaan  
Vision, Mission, Motto and Culture of the Company

# STRATEGI PLN

## PLN Strategies

Dalam rangka mencapai tujuan strategis perusahaan, disusunlah delapan strategi utama perusahaan – empat strategi berkaitan dengan fungsi bisnis inti, tiga strategi sebagai *enabler*, dan satu strategi sebagai *ultimate result* dari strategi lainnya. Delapan strategi utama yang dimaksud di atas adalah:

To achieve the company's strategic goals, the Company developed eight main strategies – four strategies are related with the core business functions, three strategies as the enabler, and one strategy as the ultimate result from the other strategies. The eight main strategies are as follows:



### 1. Membangun Kapasitas | Developing Capacity

- a. Penambahan Kapasitas yang Optimal dan Efisien (Pembangkit, Transmisi, Distribusi) | Optimum and Efficient Capacity Expansion (Power Plants, Transmission, Distribution)
- b. Peningkatan Efektivitas Manajemen Konstruksi | Construction Management Effectiveness Improvement
- c. Penambahan Kapasitas IPP yang Optimal dan Efisien | Optimum and Efficient IPP Capacity Expansion



### 2. Menyempurnakan Pengelolaan Energi Primer | Improving Primary Energy Management

- a. Pengamanan Pasokan dan Harga Batu Bara yang Optimal | Optimum Coal Supply Security and Price
- b. Pengamanan Pasokan dan Harga Gas & BBM yang Optimal | Optimum Gas & Fuel Supply Security and Price
- c. Pengamanan Pasokan dan Harga Energi Baru Terbarukan (EBT) yang Optimal | Optimum New & Renewable Energy Supply Security and Price



### 3. Meningkatkan Kinerja Operasional | Improving Operational Performance

- a. Peningkatan Efisiensi Operasi Pembangkitan | Plants Operation Efficiency Improvement
- b. Peningkatan Efisiensi Operasi Transmisi | Transmission Operation Efficiency Improvement
- c. Peningkatan Efisiensi Operasi Distribusi | Distribution Operation Efficiency Improvement
- d. Peningkatan Pengelolaan Keamanan, Kesehatan Kerja, Keselamatan dan Lingkungan (K3L) | Occupational Health & Safety and Environment (OHSE) Management Improvement
- e. Peningkatan Efisiensi *Supply Chain Management* (SCM) | Efficiency Supply Chain Management Improvement

## Visi, Misi, Moto & Budaya Perusahaan Vision, Mission, Motto and Culture of the Company



#### 4. Mewujudkan Pelayanan Pelanggan yang Prima | Building Customer Service Excellence

- a. Peningkatan Penjualan Tenaga Listrik | Electric Power Sales Improvement
- b. Penetapan Harga Jual yang Optimal | Optimum Selling Price Determination
- c. Peningkatan Kepuasan dan Keterikatan Pelanggan | Customer Satisfaction and Engagement Improvement



#### 5. Mengembangkan Usaha dan Portofolio | Developing Business and Portfolio

- a. Pengembangan Model Bisnis Baru untuk Sektor Ketenagalistrikan | New Business Model Development for Electricity Sector
- b. Perkuatan Pengelolaan Portofolio | Portfolio Management Strengthening



#### 6. Meningkatkan Kemampuan Keuangan | Improving Financial Capability

- a. Peningkatan Pendapatan dan Kesehatan Keuangan | Financial Revenue and Soundness Improvement
- b. Peningkatan Pengelolaan Pembiayaan untuk Optimalisasi BPP | Financing Management Improvement for Cost of Supply Optimization



#### 7. Meningkatkan Keunggulan Pengelolaan Organisasi dan SDM | Improving Organization and HCM Excellence

- a. Pengembangan Organisasi PLN yang *Lean, Clean, Agile* dan *Adaptive* | Lean, Clean, Agile and Adaptive PLN Organization Development
- b. Penyempurnaan Perencanaan Tenaga Kerja & Sistem Rekrutmen untuk Mendapatkan Talent Terbaik yang Berdasarkan *Base Capacity & Core Competency* | Employment Planning and Recruitment System Refinement to Attain the Best Talent based on Base Capacity & Core Competency
- c. Penyempurnaan Program *Training and Education* dan Sertifikasi Kompetensi | Training and Education Program and Competence Certification Refinement
- d. Pengembangan Kemampuan Leadership yang Unggul | Excellent Leadership Capability Development
- e. Optimalisasi dan Pengembangan Program Retensi | Retention Program Development and Optimization
- f. Penyempurnaan Sistem Pengembangan Karir (*Career Path*) | Career Path System Refinement
- g. Pengembangan Budaya Perusahaan yang Unggul | Excellent Corporate Culture Development



#### 8. Menyempurnakan Manajemen Stakeholder dan Regulasi | Improving Stakeholders and Regulatory Management

- a. Peningkatan Manajemen *Stakeholder* | Stakeholders Management Improvement
- b. Peningkatan Manajemen Regulasi | Regulatory Management Improvement

# **MOTO** Motto **Listrik** untuk **Kehidupan** yang **Lebih Baik** Electricity for Better Life



## **NILAI PERUSAHAAN** Corporate Value

Nilai-nilai dasar PLN adalah Saling Percaya, Integritas, Peduli, dan Pembelajar (SIPP). | Nilai-nilai dasar PLN adalah Saling Percaya, Integritas, Peduli, dan Pembelajar (SIPP).

### **SALING PERCAYA**

Suasana saling menghargai dan terbuka diantara sesama anggota perusahaan yang dilandasi oleh keyakinan akan integritas, itikad baik, dan kompetensi dari pihak-pihak yang saling berhubungan dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang bersih dan etis.

### **INTEGRITAS**

Wujud dari sikap anggota perusahaan yang secara konsisten menunjukkan kejujuran, keselarasan antara perkataan dan perbuatan, dan rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan dan pemanfaatan kekayaan perusahaan untuk kepentingan baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta rasa tanggung jawab terhadap semua pihak yang berkepentingan.

### **PEDULI**

Cerminan dari suatu niat untuk menjaga dan memelihara kualitas kehidupan kerja yang dirasakan anggota perusahaan, pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka bertumbuh kembang bersama, dengan dijiwai kepekaan setiap permasalahan yang dihadapi Perusahaan serta mencari solusi yang tepat.

### **PEMBELAJAR**

Sikap anggota perusahaan untuk selalu berani mempertanyakan kembali sistem dan praktik pembangunan, manajemen dan operasi, serta berusaha menguasai perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir demi pembaharuan Perusahaan secara berkelanjutan.

### **MUTUAL TRUST**

An atmosphere of mutual trust and openness between fellow members of the company based on a belief in integrity, good faith and competence from parties connected in the implementation of clean and ethical business practices.

### **INTEGRITY**

The manifestation of an attitude shown by members of the company in which they consistently show honesty, harmony between words and deeds, and a sense of responsibility towards company management and use of corporate property both for short and long-term benefit, as well as a sense of responsibilities toward all stakeholders.

### **CARE**

A reflection of the intention to protect and care for the work-life quality felt by company members and stakeholders growing together as imbued with sensitivity toward problems faced by the company and the desire to find the right solution.

### **LEARNING**

The attitude of company members who always have the courage to question the system and practices of development, management and operations, as well as mastering cutting-edge science and technology for the renewal and sustainability of the company.

## Budaya Perusahaan

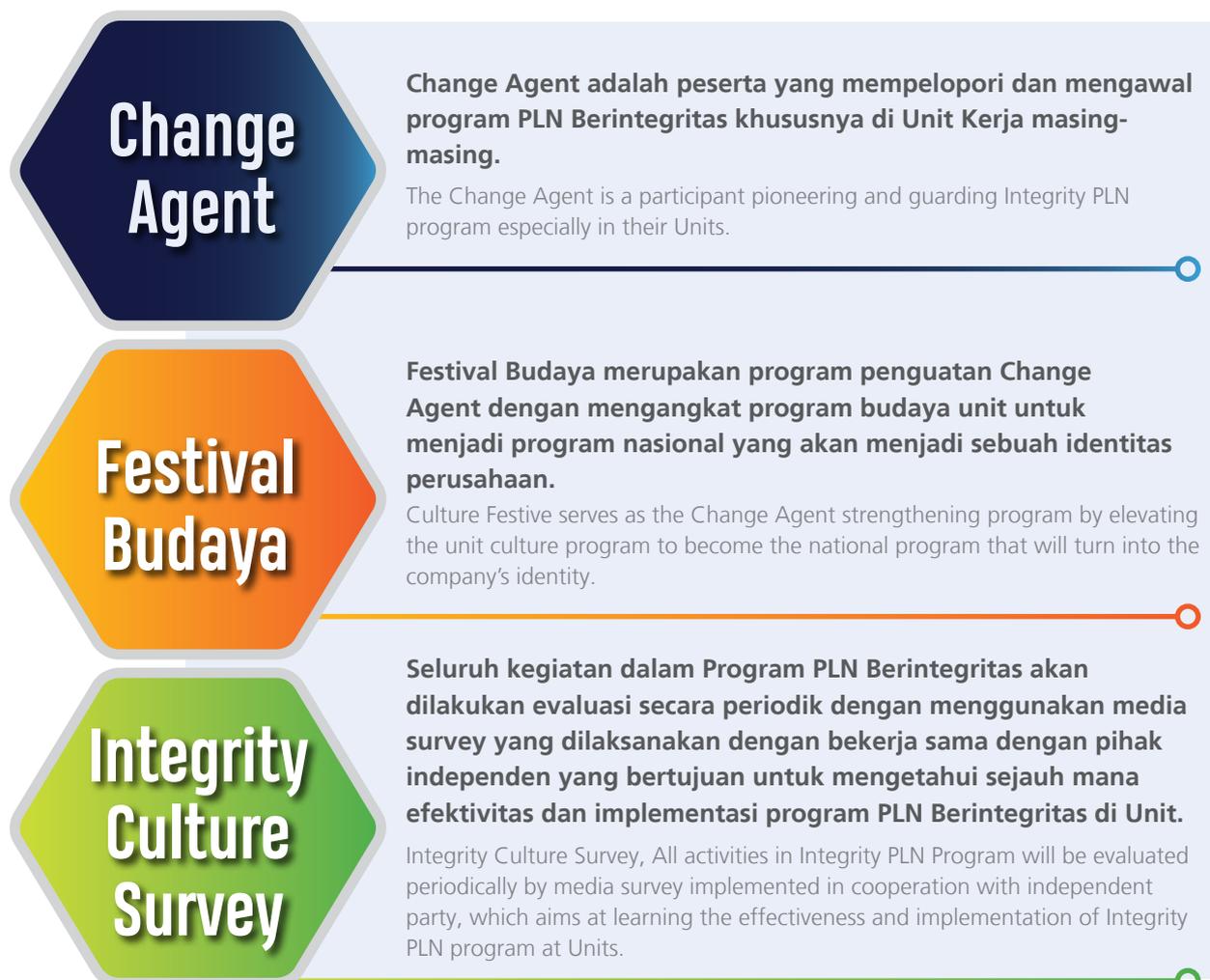
### Corporate Culture

Budaya Perusahaan memiliki peranan penting dalam mengelola *Human Capital Management* guna mencapai visi, misi, dan target perusahaan. Budaya Perusahaan kami adalah PLN Berintegritas yang terus digalakkan PLN untuk mendukung program strategis PLN untuk menjadikan mindset, values, dan beliefs PLN menjadi standar & identitas bagi perusahaan serta profesional bagi pegawainya.

Pada tahun 2017 fokus program ini terdiri dari 3 bagian utama yaitu:

Corporate culture holds key roles in managing the Human Capital Management in order to attain the company's vision, mission and targets. Our Corporate Culture is Integrity PLN that continuously upholds to enhance PLN strategic programs to create the PLN mindset, values and beliefs that becomes the standard and identity for the company as well as professionalism of its employees.

The program focuses on 3 main elements in 2017, as follows:

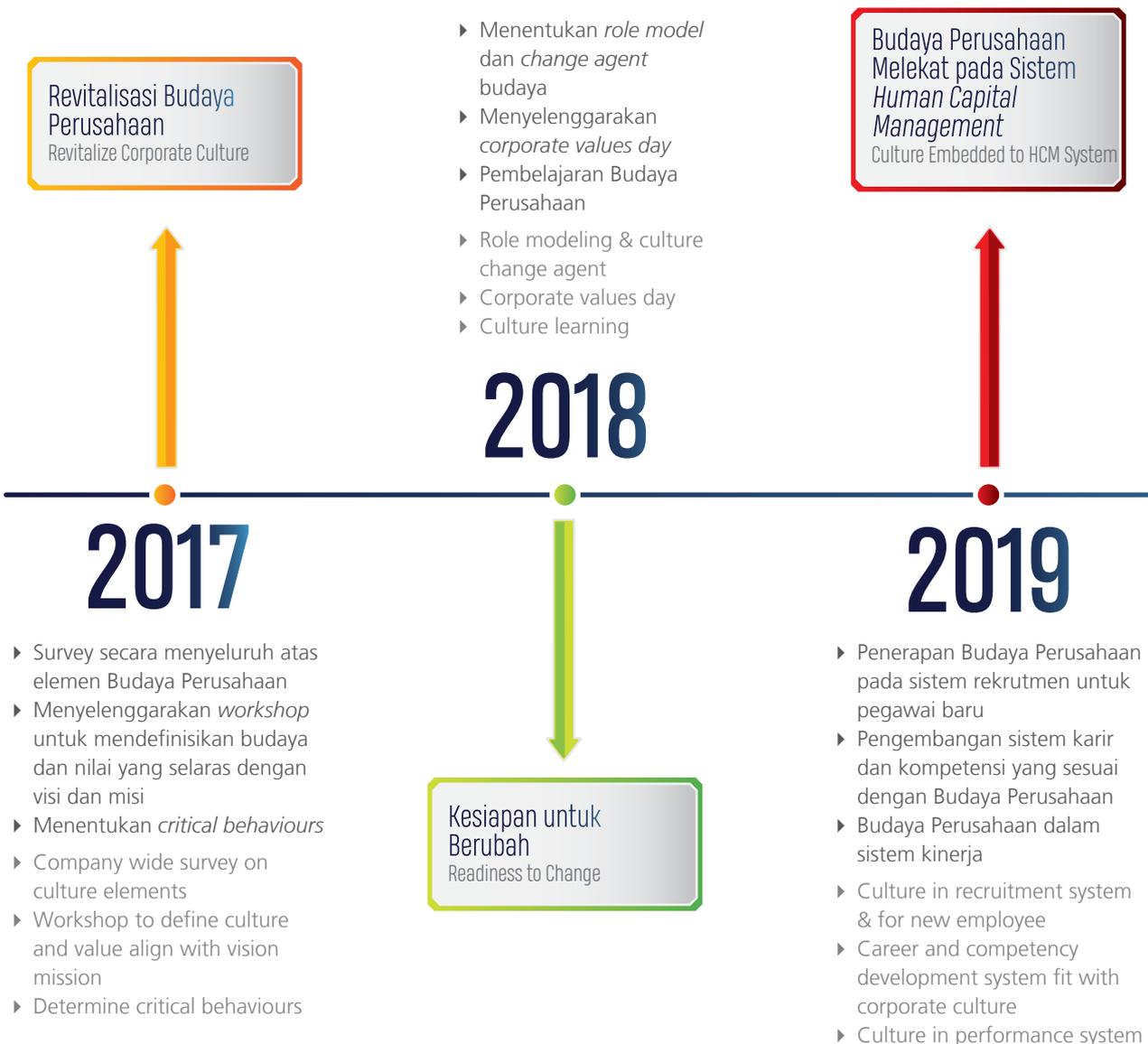


Tahun 2017 merupakan momentum untuk revitalisasi *corporate culture* dengan melakukan survey budaya, *workshop*, dan penentuan critical behavior seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

2017 serves as the momentum on corporate culture revitalization by organizing culture survey, workshop, and determination of critical behaviour as illustrated in the following diagram.

# ROAD MAP BUDAYA PERUSAHAAN 2017-2021

## Corporate Culture Road Map 2017-2021



Road Map Budaya Perusahaan 2017-2021  
Corporate Culture Road Map 2017-2021

- ▶ Budaya Perusahaan dalam sistem pelatihan
- ▶ Sistem *reward* selaras dengan Budaya Perusahaan
- ▶ Budaya Perusahaan dalam hubungan industrial
- ▶ Pengembangan organisasi selaras dengan Budaya Perusahaan
- ▶ Culture in training system
- ▶ Reward system fit with corporate culture
- ▶ Culture in industrial relations
- ▶ Organizational development fit with corporate culture

2020



Budaya Perusahaan Melekat pada Sistem *Human Capital Management*  
Culture Embedded to HCM System

**Sosialisasi Nilai-Nilai & Budaya Perusahaan**

Penyebaran informasi dan sosialisasi dilakukan melalui portal perusahaan, tayangan desktop komputer pegawai, pemasangan *banner* di tempat strategis di lingkungan Perusahaan, dan pemutaran video *corporate culture*.

Penciptaan Nilai bagi Pemangku Kepentingan & Peningkatan Citra Perusahaan  
Value for External Stakeholder & Brand Image



2021

- ▶ Para Pemangku Kepentingan mengalami & dipengaruhi oleh nilai tambah yang diberikan Perusahaan
- ▶ External stakeholder experience & influenced by corporate adding value

**Dissemination of Corporate Values & Culture**

Information dissemination and socialization is conducted through the company's portal, employees' desktop screens, banners installation at strategic places in the Company's environment, and corporate culture video display.

**Budaya Berkinerja Tinggi sebagai Perusahaan Kelas Dunia**

High Performance Culture for World Class Company

# Profil Dewan Komisaris

## Board of Commissioners Profiles



### Hasan Bisri

Pelaksana Tugas Komisaris Utama & Komisaris  
Acting President Commissioner & Commissioner

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia	Indonesian
<b>Usia/ Tempat &amp; Tanggal Lahir</b> Age/ Place & Date of Birth	60 tahun, per 31 Desember 2017 Tegal, 8 Mei 1957	60 years as of 31 Dec 2017 Tegal, 8 May 1957.
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana Ekonomi Bisnis - Fakultas Ekonomi Universitas Islam Djakarta (UID), (1985)</li> <li>2. Magister Manajemen - Manajemen Keuangan - Universitas Satyagama Jakarta (2004)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bachelor's degree in Business Economics, Faculty of Economics, University of Islam Djakarta (UID), Jakarta (1985)</li> <li>2. Master's degree in Financial Management, University Satyagama, Jakarta in 2004</li> </ol>
<b>Riwayat Jabatan</b> Professional Background		
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Appointment Legal References	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diangkat sebagai Komisaris sejak 23 Desember 2014, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-273/MBU/12/2014, 23 Des 2014</li> <li>• Diangkat sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama, sejak 24 Mei 2016, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-106/MBU/05/2016, 24 Mei 2016.</li> <li>• Masa jabatan sebagai Komisaris Perseroan adalah 5 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appointed as Commissioner since December 23, 2014, by the Minister of State-Owned Enterprises Decree as the GMS No. SK-273/MBU/12/2014 Dec 23, 2014</li> <li>• Acting Commissioner since May 24, 2016, based on the Decree of the Minister of SOEs as AGM No. SK-106/MBU/05/2016 May 24, 2016.</li> <li>• The term as Commissioner of the Company is 5 years.</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi Umum Sub Bagian Konsultasi Hukum I, BPK (1977).</li> <li>• Kepala Unit Pemeriksa Sub Bagian Pemberhentian (1980).</li> <li>• Verifikatur bagian Konsultasi dan Bantuan Hukum (1981)</li> <li>• Verifikatur Auditorat ODIT A di BPK RI Jakarta (1981)</li> <li>• Penilik Auditorat ODIT E (1986)</li> <li>• Penilik Auditorat ODIT A (1986)</li> <li>• Pemeriksa Muda Auditorat ODIT E (1988)</li> <li>• Kasub Bidang Litbang Fiskal di BPK RI Jakarta (1994 – 1999)</li> <li>• Kepala Sub Auditorat II.A.1 di BPK RI Jakarta (1999 – 2001)</li> <li>• Kepala Sub Auditorat II.B.2 – BPPN di BPK RI Jakarta (2001 – 2004)</li> <li>• Auditor Ahli Madya Sub Auditorat II.B.2 – BPPN (2003)</li> <li>• Kepala Auditorat II.C (2004), dan</li> <li>• Anggota BPK RI (2004-2014)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administration Sub Section Legal Consultancy I, BPK (1977)</li> <li>• Head of the Audit Unit Sub Section Termination (1980)</li> <li>• Verificator in the Consultancy and Legal Aid Section (1981)</li> <li>• Verificator of Auditorat ODIT A in BPK RI Jakarta (1981),</li> <li>• Inspector of Auditorat ODIT E (1986),</li> <li>• Inspector of Auditorat ODIT A (1986),</li> <li>• Young Investigator of Auditorat ODIT E (1988),</li> <li>• Head of Fiscal R &amp; D Sub-Div in BPK RI Jakarta (1994-1999),</li> <li>• Head of Sub Auditorat II.A.1 BPK RI in Jakarta (1999 - 2001),</li> <li>• Head of Sub Auditorat II.B.2 - IBRA in BPK Jakarta (2001-2004),</li> <li>• Associate Expert Auditor Sub Auditorat II.B.2 - IBRA (2003),</li> <li>• Head of Auditorat II. C (2004), and</li> <li>• Member of BPK RI (2004-2014)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	Tidak Ada	None
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Working Visit</i> ke PLN PJB Unit Pembangkit Gresik, UIP JBTB I &amp; II, PLTA Sutami Karangates.</li> <li>• <i>Working Visit</i> ke PLN Wilayah Sumut, PLN Pembangkitan Sumut, UIP I&amp;II Pembangkitan dan PLN P3B Sumatera Area Medan.</li> <li>• <i>Working Visit</i> ke PLN Wilayah Bangka Belitung, UIP Pembangkitan dan Transmisi Sumatera bagian selatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Working Visit to PLN PJB Gresik Generating Unit, UIP JBTB I &amp; II, Hydro Power Plant Sutami Karangates</li> <li>• Working Visit to North Sumatera PLN, PLN Generating in North Sumatera, Generating UIP I &amp; II, and PLN P3B Sumatera Area Medan</li> <li>• Working Visit to Bangka Belitung PLN, Generating and Transmission UIP in South Sumatera</li> </ul>
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliates	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders
<b>Domisili</b> Domicile	Tangerang Selatan, Banten	South Tangerang, Banten
<b>Jumlah Kepemilikan Saham PLN</b> Total Share Ownership of PLN	Tidak Ada	None



## Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profiles

<b>Oegroseno</b> Komisaris Independen Independent Commissioner		
<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia	Indonesian
<b>Usia/ Tempat &amp; Tanggal Lahir</b> Age/ Place & Date of Birth	61 tahun, per 31 Desember 2017 Jakarta, 17 Februari 1956	61 Years, as of 31 December 2017 Jakarta, February 17, 1956.
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	1. Akademi Kepolisian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) (1978) 2. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (1986)	1. Armed Forces Police Academy of the Republic of Indonesia (AKABRI) in 1978 2. Police Institute in 1986.
<b>Riwayat Jabatan</b> Professional Background		
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Appointment Legal References	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Diangkat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 16 Oktober 2014, berdasarkan SK Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-211/MBU/10/2014 Tanggal 16 Oktober 2014</li> <li>· Masa jabatan sebagai Komisaris Perseroan adalah 5 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Appointed as Independent Commissioner since October 16, 2014, based on Minister of SOE Decree as GMS, No. SK-211/MBU/10/2014, October 16, 2014</li> <li>· The term as Commissioner of the Company is 5 years.</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kepala Divisi Propam POLRI (2009).</li> <li>· Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (2010).</li> <li>· Kepala Lembaga Pendidikan POLRI (2011),</li> <li>· Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes POLRI (2012)</li> <li>· Wakil Kepala POLRI (2013),</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Head of the National Police Professions and Security Division (2009)</li> <li>· Head of North Sumatra Police (2010)</li> <li>· Head of the National Police Education Institute (2011)</li> <li>· Head of Security Maintenance at National Police Headquarters (2012)</li> <li>· Deputy Chief of Police (2013),</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	Tidak Ada	None
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Expand Leadership Program oleh CLDI</li> <li>· <i>Working Visit</i> ke PLN PJB Unit Pembangkit Gresik, UIP JBTB I &amp; II, PLTA Sutami Karangates.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Expand Leadership Program by CLDI</li> <li>· Working Visit to PLN PJB Gresik Generating Unit, UIP JBTB I &amp; II, Hydro Power Plant Sutami Karangates</li> </ul>
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliates	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders
<b>Domisili</b> Domicile	Jakarta Timur, Jakarta	East Jakarta, Jakarta
<b>Jumlah Kepemilikan Saham PLN</b> Total Share Ownership of PLN	Tidak Ada	None

## Profil Dewan Komisaris

### Board of Commissioners Profiles



#### Darmono

Komisaris Independen  
Independent Commissioner

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia	Indonesian
<b>Usia/ Tempat &amp; Tanggal Lahir</b> Age/ Place & Date of Birth	64 tahun, per 31 Desember 2017 Klaten, 5 Juni 1953	64 years as of 31 December 2017 Klaten, 5 June 1953
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana Hukum Perusahaan dari Universitas Islam Indonesia (UII), tahun 1977</li> <li>2. Magister Manajemen IPWI Jakarta, tahun 2000</li> <li>3. Doktor Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran, tahun 2010.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bachelor's degree in Corporate Legal from Universitas Islam Indonesia (UII), in 1977</li> <li>2. Master degree in Management from IPWI Jakarta in 2000,</li> <li>3. Phd in Law from Padjadjaran University in 2010.</li> </ol>
<b>Riwayat Jabatan</b> Professional Background		
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Appointment Legal References	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Diangkat sebagai Komisaris sejak 16 Oktober 2014, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-211/MBU/10/2014 Tanggal 16 Oktober 2014.</li> <li>· Masa jabatan sebagai Komisaris Perseroan adalah 5 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Appointed as Independent Commissioner since October 16, 2014, based on the Decree of Minister of SOE as the GMS No. SK-211/MBU/10/2014 dated October 16, 2014.</li> <li>· The term as Commissioner of the Company is 5 years.</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Anggota Tim Pemberantasan Mafia Hukum (2009-2010).</li> <li>· Wakil Jaksa Agung RI (2009-2013),</li> <li>· Plt. Jaksa Agung RI (2010)</li> <li>· Ketua Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi (2010-2013).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· member of the Team for Eradication of Legal Mafia (2009-2010).</li> <li>· Deputy Attorney General of the Republic of Indonesia (2009-2013),</li> <li>· Acting Attorney General of the Republic of Indonesia (2010)</li> <li>· Head of the Integrated Team to Locate Suspects of Corruption Cases (2010-2013)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	Tidak Ada	None
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Expand Leadership Program oleh CLDI</li> <li>· <i>Working Visit</i> ke PLN PJB Unit Pembangkit Gresik, UIP JBTB I &amp; II, PLTA Sutami Karangates.</li> <li>· <i>Working Visit</i> ke PLN Wilayah NTT Bima dan Dompu</li> <li>· <i>Working Visit</i> ke PLN Wilayah Lampung, Distribusi Lampung, UIP Pembangkit, PLN Sektor Tarahan dan PLN Batam MPP- PLTG Tarahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Working Visit to PLN PJB Gresik Generating Unit, UIP JBTB I &amp; II, Hydro Power Plant Sutami Karangates</li> <li>· Working Visit to East Nusa Tenggara PLN in Bima and Dompu Areas</li> <li>· Working Visit to PLN Lampung Area, Lampung Distribution, UIP Plant, PLN Tarahan Sector, and PLN Batam Mobile Power Plant-PLTG Tarahan</li> </ul>
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliates	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders
<b>Domisili</b> Domicile	Tangerang Selatan, Banten	South Tangerang, Banten
<b>Jumlah Kepemilikan Saham PLN</b> Total Share Ownership of PLN	Tidak Ada	None



## Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profiles

### Andy Noorsaman Sommeng

Komisaris  
Commissioner

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia	Indonesian
<b>Usia/ Tempat &amp; Tanggal Lahir</b> Age/ Place & Date of Birth	58 tahun, per 31 Desember 2017 Jakarta, 31 Maret 1959	58 years as of 31 December 2017 Jakarta, 31 March 1959
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana Teknik Gas, Universitas Indonesia, 1984</li> <li>2. Master Teknik Kimia dan Komputer University of Compiegne, Paris, 1989</li> <li>3. Doktor Teknik Kimia dan Komputer Ecole Centrale Paris, 1993</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bachelor's Degree in Gas Engineering, University of Indonesia, 1984</li> <li>2. Master degree in chemical and Computer Engineering, University of Compiegne, Paris, 1989</li> <li>3. Doctorate degree in Chemical and Computer Engineering, University of Compiegne, Paris, 1993</li> </ol>
<b>Riwayat Jabatan</b> Professional Background		
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Appointment Legal References	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Diangkat sebagai Komisaris Perseroan sejak 12 Juli 2017, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No.SK-128/MBU/07/11/2017, tanggal 12 Juli 2017.</li> <li>· Masa jabatan sebagai Komisaris Perseroan adalah 5 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Appointed as Commissioner since 12 Juli 2017, based on the Decree of Minister of SOE as the GMS No. SK-128/MBU/07/11/2017 dated 12 July 2017.</li> <li>· The term as Commissioner of the Company is 5 years.</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kepala Laboratorium Sistem Proses Kimia, Universitas Indonesia (1994-1996)</li> <li>· Ketua Jurusan Teknik Gas dan Petrokimia, Universitas Indonesia (1996 – 1999)</li> <li>· Wakil Dekan IV Bidang kerjasama, Universitas Indonesia (2000 – 2001)</li> <li>· Direktur Teknologi Informasi, Ditjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM (2001 - 2007)</li> <li>· Direktur Jenderal HKI, Kementerian Hukum dan HAM (2007 - 2010)</li> <li>· Kepala BPH MIGAS (2012 – 2017)</li> <li>· Komisaris Independen PT Pertamina (Persero) (2014 – 2016)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Head of Chemical Process System Laboratorium, University of Indonesia (1994-1996)</li> <li>· Head of Gas and Petrochemical Engineering, University of Indonesia (1996-1999)</li> <li>· Vice Dean IV of Cooperation, University of Indonesia (2000-2001)</li> <li>· Information Technology Director, Directorate General HKI, Law and Human Rights Ministry (2001 – 2007).</li> <li>· Directorate General of HKI, Law and Human Rights Ministry (2007 – 2010)</li> <li>· Chairman of BPH MIGAS (2012 – 2017)</li> <li>· Independent Commissioner of PT Pertamina (Persero) (2014 – 2016)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM (2017 – sampai sekarang).	Director General of Electricity, Ministry of Energy and Natural Resources (2017-present).
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	Working Visit ke PLN Wilayah Bangka Belitung, UIP Pembangkitan dan Transmisi Sumatera Bagian Selatan.	Working Visit to Bangka Belitung PLN, Generating and Transmission UIP in South Sumatera
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliates	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders
<b>Domisili</b> Domicile	Kota Bogor, Jawa Barat	Bogor City, West Java
<b>Jumlah Kepemilikan Saham PLN</b> Total Share Ownership of PLN	Tidak Ada	None

## Profil Dewan Komisaris

### Board of Commissioners Profiles



#### Budiman

Komisaris  
Commissioner

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia	Indonesian
<b>Usia/ Tempat &amp; Tanggal Lahir</b> Age/ Place & Date of Birth	61 tahun, per 31 Desember 2017 Jakarta, 25 September 1956	61 years as of 31 December 2017 Jakarta, 25 September 1956
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<ol style="list-style-type: none"> <li>Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Magelang, 1978</li> <li>Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (1994)</li> <li>Sekolah Staf dan Komando TNI (2001).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>The Armed Forces Academy, Magelang in 1978</li> <li>Army Staff and Command College (1994)</li> <li>Armed Forces Staff and Command College (2001).</li> </ol>
<b>Riwayat Jabatan</b> Professional Background		
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Appointment Legal References	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diangkat sebagai Komisaris Perseroan sejak 23 Desember 2014, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-273/MBU/12/2014 Tanggal 23 Desember 2014.</li> <li>Masa jabatan sebagai Komisaris Perseroan adalah 5 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appointed as Commissioner since 23 December 2014, based on the Decree of Minister of SOE as the GMS No. SK-273/MBU/12/2014 dated 23 December 2014.</li> <li>The term as Commissioner of the Company is 5 years.</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>Panglima Daerah Militer IV/ Diponegoro (2009).</li> <li>Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI AD (2010)</li> <li>Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (2011)</li> <li>Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (2013)</li> <li>Kepala Staff Angkatan Darat (2013)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Military Commander IV / Diponegoro (2009).</li> <li>Army Commander of Education, Training and Doctrine Command (2010)</li> <li>Deputy Army Chief of Staff (2011)</li> <li>Secretary General of the Ministry of Defense (2013)</li> <li>Army Chief of Staff (2013)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	Tidak ada	None
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>Expand Leadership Program oleh CLDI</li> <li>PLN Wilayah Bangka Belitung, UIP Pembangkitan dan Transmisi Sumatera Bagian Selatan.</li> <li>Working Visit ke PLN Wilayah Lampung, Distribusi Lampung, UIP Pembangkit, PLN Sektor Tarahan dan PLN Batam MPP- PLTG Tarahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Expand Leadership Program by CLDI</li> <li>PLN Bangka Belitung, Generating and Transmission UIP of South Sumatera</li> <li>Working Visit to PLN Lampung Area, Lampung Distribution, UIP Plant, PLN Tarahan Sector, and PLN Batam Mobile Power Plant-PLTG Tarahan</li> </ul>
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliates	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders
<b>Domisili</b> Domicile	Jakarta Timur, Jakarta	East Jakarta, Jakarta
<b>Jumlah Kepemilikan Saham PLN</b> Total Share Ownership of PLN	Tidak Ada	None



## Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profiles

### Harry Susetyo Nugroho

Komisaris  
Commissioner

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia	Indonesian
<b>Usia/ Tempat &amp; Tanggal Lahir</b> Age/ Place & Date of Birth	62 tahun, per 31 Desember 2017 Jakarta, 22 September 1955	62 years as of 31 Dec 2017 Jakarta, 22 September 1955
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1980</li> <li>2. Master Business Administration (Finance) dari University of Denver di Colorado Amerika Serikat pada tahun 1988.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bachelor's Degree in Industrial Engineering from Bandung Institute of Technology (1980)</li> <li>2. Master's degree in Business Administration (Finance) from the University of Denver, Colorado, USA (1988).</li> </ol>
<b>Riwayat Jabatan</b> Professional Background		
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Appointment Legal References	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Diangkat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2 April 2013, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-199/MBU/2013 Tanggal 2 April 2013.</li> <li>· Masa jabatan sebagai Komisaris Perseroan adalah 5 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Appointed as Company's Commissioner since since 23 Dec 2014, based on Decision Letter of Ministry of SOE as the GMS No. SK-199/MBU/2013 dated 2 April 2013.</li> <li>· The term as Commissioner of the Company is 5 years.</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Asisten Deputi Bidang Usaha Aneka Industri Lainnya, Kementerian BUMN (2003-2005).</li> <li>· Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata, Kementerian BUMN (2005-2010)</li> <li>· Staf Ahli Tata Kelola, Kementerian BUMN (2010 - 2013)</li> <li>· Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, Kementerian BUMN (2013 - 2015)</li> <li>· Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk (2007-2012)</li> <li>· Dewan Pengawas Perum Peruri (2007-2012)</li> <li>· Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) (2008-2012)</li> <li>· Komisaris PT Pertamina (Persero) (2012-2013)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Deputy Assistant of Other Miscellaneous Industries, SOE Ministry (2003-2005).</li> <li>· Deputy of Logistics and Tourism, SOE Ministry (2005-2010)</li> <li>· Expert Governance Staff, SOE Ministry (2010-2013)</li> <li>· Deputy of Business Infrastructure, SOE Ministry (2013-2015)</li> <li>· Commissioner of PT Adhi Karya (Persero) Tbk (2007-2012)</li> <li>· Supervisory Board of Perum Peruri (2007-2012)</li> <li>· President Commissioner of PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) (2008-2012)</li> <li>· Commissioner of PT Pertamina (Persero) (2012-2013)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	Tidak Ada	None
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <i>Benchmarking</i> Kelistrikan</li> <li>· <i>Working Visit</i> PLN Wilayah Lampung, Distribusi Lampung, UIP Pembangkit, PLN Sektor Tarahan dan PLN Batam MPP- PLTG Tarahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Electricity Benchmarking</li> <li>· Working Visit to PLN Lampung Area, Lampung Distribution, UIP Plant, PLN Tarahan Sector, and PLN Batam Mobile Power Plant-PLTG Tarahan</li> </ul>
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliates	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham utama	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders
<b>Domisili</b> Domicile	Kota Depok, Jawa Barat	Depok City, West Java
<b>Jumlah Kepemilikan Saham PLN</b> Total Share Ownership of PLN	Tidak Ada	None

## Profil Dewan Komisaris

### Board of Commissioners Profiles



#### Aloysius K. Ro

Komisaris  
Commissioner

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia	Indonesian
<b>Usia/ Tempat &amp; Tanggal Lahir</b> Age/ Place & Date of Birth	56 tahun, per 31 Desember 2017 Kupang, 29 April 1961	56 years as of 31 December 2017 Kupang, 29 April 1961
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Master of Business Administration (Finance) dari University of Illinois, Amerika Serikat, 1994</li> <li>2. PhD-Finance dari University of Kentucky Lexington, Amerika Serikat, 1998.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masters of Business Administration-Finance, University of Illinois, USA (1994)</li> <li>2. PhD in Finance, University of Kentucky Lexington, USA (1998).</li> </ol>
<b>Riwayat Jabatan</b> Professional Background		
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Appointment Legal References	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Diangkat sebagai Komisaris Perseroan sejak 25 September 2015, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-183/MBU/09/2015 Tanggal 25 September 2015</li> <li>· Masa jabatan sebagai Komisaris Perseroan adalah 5 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Appointed as Commissioner since 23 December 2014, based on the Decree of Minister of SOE as the GMS No. SK-183/MBU/09/2015 dated 25 September 2015.</li> <li>· The term as Commissioner of the Company is 5 years.</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Asisten Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi, Kementerian BUMN (2002-2005)</li> <li>· Komisaris PT Pelindo III, Surabaya (2002 - 2005).</li> <li>· Tim Asistensi Menteri Keuangan (2006-2009)</li> <li>· Direktur Keuangan PT Antam (31 Maret 2015 - 27 Juli 2015)</li> <li>· Direktur Eksekutif PT Danareksa (Juli 2005-Maret 2015)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Assistant Deputy for Restructuring and Privatization, SOE Ministry (2002-2005).</li> <li>· Commissioner of PT Pelindo III, Surabaya (2002-2005).</li> <li>· Assistance Team to the Minister of Finance (2006-2009)</li> <li>· Executive Director of PT Danareksa (July 2005-March 2015)</li> <li>· Finance Director of PT Antam (31 March 2015 - 27 July 2015)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, Kementerian BUMN (2015-sampai sekarang)	Deputy of Business Restructuring and Development, Ministry of SOE (2015-present)
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	-	
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliates	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders
<b>Domisili</b> Domicile	Jakarta Utara, Jakarta	North Jakarta, Jakarta
<b>Jumlah Kepemilikan Saham PLN</b> Total Share Ownership of PLN	Tidak Ada	None



## Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profiles

### Ilya Aviati

Komisaris  
Commissioner

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia	Indonesian
<b>Usia/ Tempat &amp; Tanggal Lahir</b> Age/ Place & Date of Birth	58 tahun, per 31 Desember 2017 Bandung, 12 Juli 1959	58 years as of 31 December 2017 Bandung, 12 July 1959
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana Ekonomi &amp; Akuntan, UNPAD, Bandung, 1984</li> <li>2. Magister Sains bidang Akutansi, UNPAD, Bandung, 1994</li> <li>3. Doktor bidang Akutansi, UNPAD Bandung, 2000</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bachelor degree in Economics &amp; Accounting, UNPAD, Bandung, 1984</li> <li>2. Master of Science in Accounting, UNPAD, Bandung, 1994</li> <li>3. Doctor degree in Accounting, UNPAD, Bandung, 2000</li> </ol>
<b>Riwayat Jabatan</b> Professional Background		
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Appointment Legal References	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Diangkat sebagai Komisaris Perseroan sejak 28 Juli 2017, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PLN, No. SK-145/MBU/07/2017 tanggal 28 Juli 2017</li> <li>· Masa jabatan sebagai Komisaris Perseroan adalah 5 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Appointed as Company's Commissioner since since 28 July 2017, based on Decision Letter of Ministry of SOE as the GMS No. SK-145/MBU/07/2017 dated 28 July 2017</li> <li>· The term as Commissioner of the Company is 5 years.</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Managing Partner pada Akuntan Publik (1985 – sekarang)</li> <li>· Staf Ahli Pembantu Rektor I, UNPAD (1996 - 2005)</li> <li>· Sekretaris Program Doktor Bidang Ekonomi Pascasarjana UNPAD (2001 - 2004)</li> <li>· Kepala Satuan Pengawasan Intern, UNPAD, (2001 - 2005).</li> <li>· Anggota Komite Audit PT Bio Farma (2002 - 2007)</li> <li>· Sekretaris Bidang Akademik Magister Akutansi, UNPAD (2002 - 2009)</li> <li>· Komisaris PT Tuban Petro Industry (2006 – 2009)</li> <li>· Tenaga Ahli Menteri Keuangan RI (2005 – 2006)</li> <li>· Tenaga Ahli Badan Pemeriksa Keuangan RI (2007 – 2008)</li> <li>· Staf Ahli Badan Pemeriksa Keuangan RI (2008 – 2010)</li> <li>· Pelaksana Tugas Auditor Utama Keuangan Negara VII pada AUDITORAT Utama Keuangan Negara VII merangkap Staf Ahli (2009 – 2010)</li> <li>· Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK RI (2010 – 2012)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Managing Partner in Public Accountant (1985 – present)</li> <li>· Expert Staff of Rector Assistant I, UNPAD (1996 – 2005)</li> <li>· Secretary of Doctorate Program of Economics Postgraduate UNPAD (2001 – 2004)</li> <li>· Head of Internal Control Unit, UNPAD (2001 – 2005)</li> <li>· Member of Audit Committee PT Bio Farma (2002 – 2007)</li> <li>· Secretary of Accounting Master Academy, UNPAD (2002 – 2009)</li> <li>· Commissioner PT Tuban Petro Industry (2006 – 2009)</li> <li>· Expert Staff of Finance Ministry of RI (2005 – 2006)</li> <li>· Expert of Audit Board of RI (2007 – 2008)</li> <li>· Expert Staff of Audit Board of RI (2007 – 2008)</li> <li>· Main Auditor of State Finance VII at the Main AUDITORAT of State Finance VII and Expert Staff (2009 – 2010)</li> <li>· Main Auditor of State Finance VII of Audit Board of RI (2010 – 2012)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Guru Besar Fakultas Ekonomi, UNPAD (2007- Sekarang)</li> <li>· Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan RI (2012- sekarang)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Professor of Economics Faculty, UNPAD (2007 – present)</li> <li>· Chairman of Audit Board and Member of the Board of Commissioners of Financial Services Authority of RI (2012 – present)</li> </ul>
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <i>Working Visit</i> ke PLN Wilayah Bangka Belitung, UIP Pembangkitan dan Transmisi Sumatera bagian selatan.</li> <li>· Workshop Integrated Reporting di Paris. Diadakan oleh IFACI atau Institut of Internal Auditor (IIA)</li> <li>· <i>Working Visit</i> ke PLTGU Tambak Lorok dan PLTGU Gresik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Working Visit to Bangka Belitung PLN, Generating and Transmission UIP in South Sumatera</li> <li>· Workshop Integrated Reporting in Paris. Held by IFACI or Institute of Internal Auditor (IIA)</li> <li>· Working Visit to Combined Cycle Power Plant Tambak Lorok and Gresik</li> </ul>
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliates	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders
<b>Domisili</b> Domicile	Jakarta	Jakarta
<b>Jumlah Kepemilikan Saham PLN</b> Total Share Ownership of PLN	Tidak Ada	None

## Profil Dewan Komisaris

### Board of Commissioners Profiles



### Rionald Silaban

Komisaris  
Commissioner

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia	Indonesian
<b>Usia/ Tempat &amp; Tanggal Lahir</b> Age/ Place & Date of Birth	51 tahun, per 31 Desember 2017 Pekanbaru, 23 April 1966	51 years as of 31 December 2017 Pekanbaru, 23 April 1966
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana Hukum, Universitas Indonesia, 1989</li> <li>2. Magister Hukum, George Town University, Washington DC USA, 1993</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bachelor degree, University of Indonesia, 1989</li> <li>2. Master degree in Law, George Town University, Washington DC USA, 1993</li> </ol>
<b>Riwayat Jabatan</b> Professional Background		
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Appointment Legal References	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Diangkat sebagai Komisaris Perseroan sejak 28 Februari 2017, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-41/MBU/02/2017 Tanggal 28 Februari 2017</li> <li>· Masa jabatan sebagai Komisaris Perseroan adalah 5 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Appointed as Commissioner since 28 February 2017, based on the Decree of Ministry of SOE as the GMS No. SK-41/MBU/02/2017 dated 28 February 2017</li> <li>· The term as Commissioner of the Company is 5 years.</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kasubbag, Biro Hukum dan Humas, Setjen, Depkeu (1994 – 1997)</li> <li>· KasubDit Privatisasi, Dit Privatisasi, DJPBUMN, Depkeu (1997 - 1998)</li> <li>· Kabag Hukum, Biro Hukum dan Humas, Setjen, Depkeu (1998 - 2000)</li> <li>· Ka Div/SVP Asset Monitoring, AMI, BPPN (2000 – 2002)</li> <li>· Kabag TU Pim, Biro Umum, Setjen, Depkeu (2002 - 2004)</li> <li>· Senior Advisor, SEA VG ED Office, World Bank (2004 – 2006)</li> <li>· Kepala Pusat Penjaminan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal, Depkeu. (2006 – 2008)</li> <li>· Kepala PUSHAKA, Setjen, Kemenkeu. (2008 – 2012)</li> <li>· Staf Ahli Menkeu bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi (2012-2014)</li> <li>· Executive Director SEAVG, World Bank, Washington DC USA (2014 – 2016)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Head of Sub Division, Legal and Public Relations Bureau, Secretary General of Finance Department (1994 – 1997)</li> <li>· Head of Sub Directorate of Privatisation, Directorate of Privatization, DJPBUMN, Finance Ministry (1997 – 1998)</li> <li>· Head of Division, Legal and Public Relations Bureau, Secretary General of Finance Department (2000 – 2002)</li> <li>· Head of Division TU Pim, General Affairs Bureau, Secretary General of Finance Department (2002 – 2004)</li> <li>· Senior Advisor, SEA VG ED Office, World Bank (2004 – 2006)</li> <li>· Head of Fiscal Risk Guarantee Center, Fiscal Policy Agency, Finance Department (2006 – 2008)</li> <li>· Head of PUSHAKA, Secretary General of Finance Department (2008 – 2012)</li> <li>· Expert Staff Finance Ministry of Organization, Bureaucracy and Information Technology (2012 – 2014)</li> <li>· Executive Director SEAVG, World Bank, Washington DC USA (2014 – 2016)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	Staf Ahli Menkeu Bidang Makro dan Keuangan Internasional (2016- Sekarang)	Expert Staff of Finance Mistry in Macro and International Finance (2016 – present)
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	-	
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliates	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Komisisoners, Board of Directors, and Shareholders
<b>Domisili</b> Domicile	Jakarta Selatan, Jakarta	South Jakarta, Jakarta
<b>Jumlah Kepemilikan Saham PLN</b> Total Share Ownership of PLN	Tidak Ada	None



## Profil Direksi

### Board of Directors Profiles

#### Sofyan Basir

Direktur Utama dan Pelaksana Tugas Direktur Pengadaan Strategis 1  
President Director and Acting Director of Strategic Procurement 1

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia	Indonesian
<b>Usia/ Tempat &amp; Tanggal Lahir</b> Age/ Place & Date of Birth	59 tahun, per 31 Desember 2017 Bogor, 2 Mei 1958	59 years as of 31 December 2017 Bogor, 2 May 1958.
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diploma dari STAK Trisakti pada tahun 1980</li> <li>2. Sarjana Ekonomi dari STIE Ganesha Jakarta pada tahun 2010</li> <li>3. Doktor Kehormatan dari Universitas Trisakti pada tahun 2012.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diploma from STAK Trisakti in 1980</li> <li>2. Bachelor of Economics from STIE Ganesha Jakarta in 2010</li> <li>3. Honorary Doctorate from Trisakti University Jakarta in 2012.</li> </ol>
<b>Riwayat Jabatan</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Diangkat sebagai Direktur Utama sejak 23 Desember 2014, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No.SK-272/MBU/12/2014.</li> <li>· Ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Pengadaan Strategis 1 sejak 27 November 2017 dengan Keputusan Direksi Sirkuler Nomor 108/DIR/2017 tentang Penunjukan Dan Pengaturan Pelaksanaan Tugas Serta Tanggung Jawab Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN (Persero)</li> <li>· Masa jabatan sebagai Direksi Perseroan adalah 5 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Appointed as President Director as of December 23, 2014, by the Decree of Minister of SOE as the AGM No. SK-272/MBU/12/2014.</li> <li>· Stipulated as Acting Director of Strategic Procurement 1 since 27 November 2017 by the Circular Decision of the Board of Directors No. 108/DIR/2017 on the Appointment and Delegation of Duties as well as Responsibilities of the Director of Strategic Procurement 1 PT PLN (Persero)</li> <li>· The term as Director of the Company is 5 years.</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Berbagai Jabatan Manajemen Level di Bank Bukopin</li> <li>· Direktur Utama Bank Bukopin (2005)</li> <li>· Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (2005-2014)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Several management level positions at Bank Bukopin</li> <li>· President Director of Bank Bukopin (2005)</li> <li>· President Director of Bank Rakyat Indonesia (2005-2014)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	Tidak Ada	None
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Working Visit ke Pabrik Tesmec dan Wartsila di Italia dan Jerman</li> <li>· Roadshow dan investor meeting sebagai salah satu kegiatan pemasaran GMTN PLN Tahun 2017 di Amerikat Serikat &amp; Inggris</li> <li>· Kunjungan Due Diligence untuk Gas Insulated Switchgear (GIS), Power Transformer dan Material Transmisi Utama (MTU)</li> <li>· Benchmarking Pembelajaran Riset, Development Universitas &amp; Utilitas Ketenagalistrikan di China</li> <li>· Menghadiri acara One Planet Summit (OPS) di Perancis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Working visit to Tesmec and Wartsila Factory in Italy and Germany</li> <li>· Roadshow and investor meeting as one of GMTN PLN marketing activity in 2017 in the United States &amp; England</li> <li>· Due Diligence visit for Gas Insulated Switchgear (GIS), Power Transformer and Main Transmission Material (MTU)</li> <li>· Benchmarking Research Study, Development University &amp; Electricity Utility in China</li> <li>· Attended One Planet Summit (OPS) in France</li> </ul>
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliates	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commisioners, and Shareholders
<b>Domisili</b> Domicile	Jakarta Selatan, Jakarta	South Jakarta, Jakarta
<b>Jumlah Kepemilikan Saham PLN</b> Total Share Ownership of PLN	Tidak Ada	None

## Profil Direksi

### Board of Directors Profiles



### Syofvi Felienty Roekman

Direktur Perencanaan Korporat  
Director of Corporate Planning

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia	Indonesian
<b>Usia/ Tempat &amp; Tanggal Lahir</b> Age/ Place & Date of Birth	46 tahun, per 31 Desember 2017 Surabaya, 17 Maret 1971	46 years as of 31 December 2017 Surabaya, 17 March 1971
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Indonesia, 1994</li> <li>2. Master Teknik Elektro dari Staffordshire University, 2004</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bachelor degree in Electrical Engineering from University of Indonesia, 1994</li> <li>2. Master degree in Electrical Engineering from Staffordshire University, 2004</li> </ol>
<b>Riwayat Jabatan</b> Professional Background		
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Appointment Legal References	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Diangkat sebagai Direktur Perencanaan Korporat sejak 24 Juli 2017, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No.SK-138/MBU/07/2017.</li> <li>· Masa jabatan sebagai Direksi Perseroan adalah 5 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Appointed as Director of Corporate Planning since 24 July 2017, by the Decree of SOE Minister as the GMS No. SK-138/MBU/07/2017.</li> <li>· The term as Director of the Company is 5 years.</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Memulai karir di PLN pada tahun 1994.</li> <li>· Kepala Divisi Perencanaan Korporat (2015)</li> <li>· General Manager PLN Distribusi Banten (2016-2017)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Began his career in PLN in 1994</li> <li>· Head of Corporate Planning Division (2015)</li> <li>· General Manager PLN Distribution Banten (2016-2017)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	Tidak Ada	None
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>· USAID Clean Energy Executive Exchange for PLN di Amerika Serikat</li> <li>· GE Digital Industrial Forum 2017</li> <li>· Indonesia Infrastructure Investment Forum di Seoul, Korea</li> <li>· Keynote Speaker Raker PLN Puslitbang 2017</li> <li>· Kunjungan Due Diligence untuk Gas Insulated Switchgear (GIS), Power Transformer dan Material Transmisi Utama (MTU) di Italy, Perancis, Zurich</li> <li>· Working Visit to Shanghai di China</li> <li>· One Planet Summit di Perancis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· USAID Clean Energy Executive Exchange for PLN in the US</li> <li>· GE Digital Industrial Forum 2017</li> <li>· Indonesia Infrastructure Investment Forum in Seoul, Korea</li> <li>· Keynote Speaker of PLN Work Meeting Puslitbang 2017</li> <li>· Due Diligence visit for Gas Insulated Switchgear (GIS), Power Transformer and Main Transmission Material (MTU) in Italy, France, Zurich</li> <li>· Working Visit to Shanghai in China</li> <li>· One Planet Summit in France</li> </ul>
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliates	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders
<b>Domisili</b> Domicile	Jakarta Selatan, Jakarta	South Jakarta, Jakarta
<b>Jumlah Kepemilikan Saham PLN</b> Total Share Ownership of PLN	Tidak Ada	None



## Profil Direksi

Board of Directors Profiles

### Supangkat Iwan Santoso

Direktur Pengadaan Strategis 2  
Director of Strategic Procurement 2

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia	Indonesian
<b>Usia/ Tempat &amp; Tanggal Lahir</b> Age/ Place & Date of Birth	59 tahun, per 31 Desember 2017 Lampung, 19 Desember 1958	59 years as of 31 December 2017 Lampung, 19 December 1958
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Indonesia, 1987</li> <li>Master Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung, 1997</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bachelor's degree in Mechanical Engineering from University of Indonesia (1987)</li> <li>Masters degree in Mechanical Engineering from Bandung Institute of Technology (1997).</li> </ol>
<b>Riwayat Jabatan</b> Professional Background		
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Appointment Legal References	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diangkat sebagai Direktur sejak 23 Desember 2014, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No.SK-272/ MBU/12/2014.</li> <li>Diangkat sebagai Direktur Pengadaan Strategis 2 sejak 24 Juli 2017, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No.SK-138/ MBU/07/2017.</li> <li>Masa jabatan sebagai Direksi Perseroan adalah 5 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appointed as Director since December 23, 2014, by the Decree of Minister of SOE as the GMS No. SK-272/ MBU/12/2014.</li> <li>Appointed as Director of Strategic Procurement 2 since 24 July 2017, by the Decree of SOE Minister as the GMS No. SK-138/MBU/07/2017</li> <li>The term as Director of the Company is 5 years.</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memulai karir di PT PLN pada tahun 1987 sebagai Mechanical Engineer.</li> <li>Direktur Pengembangan dan Niaga PT Indonesia Power.</li> <li>Kepala Divisi Pembangkitan Jawa Bali di Direktorat Operasi Jawa Bali Sumatera PLN</li> <li>Direktur Utama PT Indonesia Power (2013)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Began his career at PT PLN in 1987 as a Mechanical Engineer.</li> <li>Director of Development and Commerce in PT Indonesia Power</li> <li>Division Head of Java Bali Generation in PLN's Java Bali Sumatra Operations Directorate.</li> <li>President Director of PT Indonesia Power (2013)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	Tidak Ada	None
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>Working Visit di Jepang</li> <li>Working Visit &amp; Due Diligence Shipyard FSRU di Korea Selatan</li> <li>Benchmarking Coal Terminal di India</li> <li>Working Visit ke Shenhua di China</li> <li>Working Visit ke Sabah di Malaysia</li> <li>Benchmarking Pembelajaran Riset, Development Universitas &amp; Utilitas Ketenagalistrikan di China</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Working Visit in Jepang</li> <li>Working Visit &amp; Due Diligence Shipyard FSRU in South Korea</li> <li>Benchmarking Coal Terminal in India</li> <li>Working Visit to Shenhua, China</li> <li>Working Visit to Sabah, Malaysia</li> <li>Benchmarking of Research Study, Development University &amp; Electricity Utility in China</li> </ul>
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliates	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders
<b>Domisili</b> Domicile	Jakarta Selatan, Jakarta	South Jakarta, Jakarta
<b>Jumlah Kepemilikan Saham PLN</b> Total Share Ownership of PLN	Tidak Ada	None

## Profil Direksi

### Board of Directors Profiles



### Sarwono Sudarto

Direktur Keuangan  
Director of Finance

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia	Indonesian
<b>Usia/ Tempat &amp; Tanggal Lahir</b> Age/ Place & Date of Birth	65 tahun, per 31 Desember 2017 Sragen pada 21 Maret 1952	65 years as of 31 December 2017 Sragen, 21 March 1952
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana di bidang Administrasi Niaga dari Universitas Diponegoro, 1975</li> <li>2. MBA dari Tulane University Amerika Serikat, 1987</li> <li>3. Doktor Manajemen Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, 2011</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bachelor's degree in Business Administration from Diponegoro University, 1975</li> <li>2. MBA from Tulane University, USA, 1987</li> <li>3. PhD Educational Management, Universitas Negeri Jakarta, 2011</li> </ol>
<b>Riwayat Jabatan</b> Professional Background		
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Appointment Legal References	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Diangkat sebagai Direktur sejak 23 Desember 2014, berdasarkan</li> <li>· Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No.SK-272/ MBU/12/2014.</li> <li>· Diangkat sebagai Direktur Keuangan sejak 24 Juli 2017, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-138/MBU/07/2017.</li> <li>· Masa jabatan sebagai Direksi Perseroan adalah 5 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Appointed as Director since December 23, 2014, by Decree of SOE Minister as the GMS No.SK-272/ MBU/12/2014.</li> <li>· Appointed as the Director of Finance since 24 July 2017, by the Decree of SOE Minister as the GMS No. SK-138/MBU/07/2017.</li> <li>· The term as Director of the Company is 5 years.</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Treasury Manager dan Chief Dealer of BRI Finance Ltd. Hongkong.</li> <li>· Guest Officer Sanwa International Finance Ltd. Hongkong</li> <li>· Pemimpin Cabang BRI Palembang Sriwijaya</li> <li>· Wakil Kepala Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan BRI</li> <li>· Kepala Divisi Audit Intern BRI,</li> <li>· Kepala Divisi Bisnis Ritel BRI</li> <li>· Kepala Divisi Treasury BRI,</li> <li>· Kepala Divisi Renstra BRI.</li> <li>· Direktur Operasional BRI (2006-2014)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Treasury Manager and Chief Dealer of BRI Finance Ltd. Hong Kong.</li> <li>· Guest Officer of Sanwa International Finance Ltd. Hong Kong</li> <li>· Branch Manager of BRI Palembang Sriwijaya.</li> <li>· Vice Head of Management Accounting and Finance Division BRI</li> <li>· Head of Retail Business Division BRI</li> <li>· Head of Internal Audit Division BRI</li> <li>· Head of Strategic Planning Division BRI</li> <li>· Head of Treasury Division BRI</li> <li>· BRI Operations Director (2006-2014)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	Tidak Ada	None
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Working Visit ke Pabrik Tesmec dan Wartsila di Italia dan Jerman</li> <li>· Roadshow dan investor meeting sebagai salah satu kegiatan pemasaran GMTN PLN Tahun 2017 di Amerika Serikat &amp; Inggris</li> <li>· Kunjungan Due Diligence untuk Gas Insulated Switchgear (GIS), Power Transformer dan Material Transmisi Utama (MTU)</li> <li>· Benchmarking Pembelajaran Riset, Development Universitas &amp; Utilitas Ketenagalistrikan di China</li> <li>· Menghadiri acara One Planet Summit (OPS) di Perancis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Working visit to Tesmec and Wartsila Factory in Italy and Germany</li> <li>· Roadshow and investor meeting as one of GMTN PLN marketing activity in 2017 in the United States &amp; England</li> <li>· Due Diligence visit for Gas Insulated Switchgear (GIS), Power Transformer and Main Transmission Material (MTU)</li> <li>· Benchmarking Research Study, Development University &amp; Electricity Utility in China</li> <li>· Attended One Planet Summit (OPS) in France</li> </ul>
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliates	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders
<b>Domisili</b> Domicile	Jakarta Pusat, Jakarta	Central Jakarta, Jakarta
<b>Jumlah Kepemilikan Saham PLN</b> Total Share Ownership of PLN	Tidak Ada	None



## Profil Direksi

Board of Directors Profiles

<b>Muhamad Ali</b> Direktur Human Capital Management Director of Human Capital Management		
<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia	Indonesian
<b>Usia/ Tempat &amp; Tanggal Lahir</b> Age/ Place & Date of Birth	56 tahun, per 31 Desember 2017 Purworejo, 24 Februari 1961	56 years as of 31 December 2017 Purworejo, 24 Februari 1961
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada, 1987	Bachelor's degree in Law from Gadjah Mada University, 1987
<b>Riwayat Jabatan</b> Professional Background		
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Appointment Legal References	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diangkat sebagai Direktur sejak Oktober 2015, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No.SK-211/MBU/10/2015.</li> <li>Diangkat sebagai Direktur Human Capital Management sejak 24 Juli 2017, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No.SK-138/MBU/07/2017.</li> <li>Masa jabatan sebagai Direksi Perseroan adalah 5 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appointed as Director since October 2015, by the Decree of SOE Ministry as the GMS No.SK-211/MBU/10/2015.</li> <li>Appointed as Director of Human Capital Management since 24 July 2017, by the Decree of SOE Minister as the GMS No. SK-138/MBU/07/2017.</li> <li>The term as Director of the Company is 5 years.</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manager Loan Officer, BRI.</li> <li>Pemimpin Cabang Kantor Cabang BRI Kandangan Kantor Wilayah Banjarmasin, BRI</li> <li>Pemimpin Kantor Cabang BRI Selong Kantor Wilayah Denpasar</li> <li>Kepala Bagian Pemasaran Consumer Banking, BRI</li> <li>Pemimpin Cabang Kantor Cabang BRI Surakarta</li> <li>Wakil Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Kantor Pusat BRI</li> <li>Kepala Biro Direksi Divisi Sekretariat Perusahaan Kantor Pusat BRI,</li> <li>Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Kantor Pusat</li> <li>Pemimpin Wilayah Kantor BRI Yogyakarta (2014)</li> <li>Koordinator Bisnis Ritel BRI (2015)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Loan Officer Manager, BRI</li> <li>Banjarmasin BRI Regional Office</li> <li>Branch Manager BRI Kandangan</li> <li>Branch Manager BRI Selong, Denpasar Regional Office.</li> <li>Head of Marketing Consumer Banking</li> <li>Branch Manager BRI Surakarta</li> <li>Deputy Head of Corporate Sekretariat Division BRI Head Office</li> <li>Corporate Sekretariat Division BRI Head Office</li> <li>Division Head of the Board of Directors Bureau</li> <li>Head of Corporate Sekretariat Division at BRI Head Office</li> <li>Branch Manager of BRI Yogyakarta (2014)</li> <li>Bank Rakyat Indonesia Retail Business Coordinator (2015)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	Tidak Ada	None
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>Benchmarking Ketenagalistrikan di Korea</li> <li>Seminar Apresiasi PPM 2017</li> <li>Benchmarking Pembelajaran Riset, Development Universitas &amp; Utilitas Ketenagalistrikan di China</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Benchmarking Electricity in Korea</li> <li>Appreciation Seminar PPM 2017</li> <li>Benchmarking Research Study, Development University &amp; Electricity Utility in China</li> </ul>
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliates	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commisioners, and Shareholders
<b>Domisili</b> Domicile	Jakarta	Jakarta
<b>Jumlah Kepemilikan Saham PLN</b> Total Share Ownership of PLN	Tidak Ada	None

## Profil Direksi

Board of Directors Profiles



### Wiluyo Kusdiharto

Direktur Bisnis Regional Sumatera  
Regional Business Director of Sumatera

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia	Indonesian
<b>Usia/ Tempat &amp; Tanggal Lahir</b> Age/ Place & Date of Birth	46 tahun, per 31 Desember 2017 Jakarta, 25 Juli 1971	46 years, as of 31 December 2017 Jakarta, 25 July 1971
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 1994</li> <li>2. Magister Manajemen dari Universitas Tenaga Nasional, 2005</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bachelor degree in Mechanical Engineering from the Institute of Teknologi Sepuluh Nopember, 1994</li> <li>2. Master of Management from University of Tenaga Nasional, 2005</li> </ol>
<b>Riwayat Jabatan</b> Professional Background		
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Appointment Legal References	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Diangkat sebagai Direktur Bisnis Regional Sumatera sejak 24 Juli 2017, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No.SK-138/MBU/07/2017.</li> <li>· Masa jabatan sebagai Direksi Perseroan adalah 5 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Appointed as Regional Business Director of Sumatera since 24 July 2017, by the Decree of SOE Minister as the GMS No. SK-138/MBU/07/2017</li> <li>· The term as Director of the Company is 5 years</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mulai berkarir di PLN pada tahun 1995.</li> <li>· General Manager PLN Unit Induk Pembangunan VIII (2013-2015).</li> <li>· Kepala Divisi Konstruksi Regional Sumatera (2015-2017).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Begin a career in PLN in 1995.</li> <li>· General Manager of PLN Construction Unit VIII (2013-2015).</li> <li>· Head of Sumatra Regional Construction Division (2015-2017).</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	Tidak Ada	None
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Due Diligence Material Transmisi Utama (MTU) di Perancis</li> <li>· Workshop Upaya Penurunan Susut Jaringan Tenaga Listrik</li> <li>· Forum Sumatera Tumbuh</li> <li>· Kompas 100 CEO Forum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Due Diligence of Main Transmission Material (MTU) in France</li> <li>· Electric Power Network Losses Reduction Effort Workshop</li> <li>· Growing Sumatra Forum</li> <li>· Kompas 100 CEO Forum</li> </ul>
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliates	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders
<b>Domisili</b> Domicile	Jakarta	Jakarta
<b>Jumlah Kepemilikan Saham PLN</b> Total Share Ownership of PLN	Tidak Ada	None



## Profil Direksi

Board of Directors Profiles

### Haryanto W.S.

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat  
Regional Business Director of West Java

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia	Indonesian
<b>Usia/ Tempat &amp; Tanggal Lahir</b> Age/ Place & Date of Birth	58 tahun, per 31 Desember 2017 Boyolali, 6 April 1959	58 years as of 31 December 2017 Boyolali, 6 April 1959
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana Elektro dari Institut Teknologi Bandung, 1983</li> <li>2. Master Manajemen STIE IPWJJA pada tahun 2003.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Electrical Engineering, Bandung Institute of Technology, 1983</li> <li>2. Masters in Management at STIE IPWJJA in 2003.</li> </ol>
<b>Riwayat Jabatan</b> Professional Background		
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Appointment Legal References	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Diangkat sebagai Direktur sejak 30 Oktober 2015, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No.SK-211/MBU/10/2015.</li> <li>· Diangkat sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat sejak 24 Juli 2017, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No.SK-138/MBU/07/2017.</li> <li>· Masa jabatan sebagai Direksi Perseroan adalah 5 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Appointed as Director since 30 October 2015, by the Decree of SOE Minister as the GMS No.SK-211/MBU/10/2015.</li> <li>· Appointed as the Regional Business Director of West Java since 24 July 2017, by the Decree of SOE Minister as the GMS No. SK-138/MBU/07/2017</li> <li>· The term as Director of the Company is 5 years.</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mulai berkarir di PLN pada tahun 1983.</li> <li>· Manajer Bidang Perencanaan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (2003-2008), serta jabatan Manajer lainnya</li> <li>· General Manager PLN Wilayah Kalimantan Barat (2008-2009)</li> <li>· General Manager PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara &amp; Sulawesi Barat (2010)</li> <li>· Kepala Divisi Distribusi Jawa-Bali pada Direktorat Operasi Jawa Bali PLN Kantor Pusat (2010-2011)</li> <li>· General Manager PLN Distribusi Jawa Timur (2011-2014)</li> <li>· General Manager PLN distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (2014-2015)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· He began his career with PLN in 1983.</li> <li>· Planning Manager at PLN Distribution Jakarta and Tangerang (2003-2008), as well as Manager of other PLN areas.</li> <li>· General Manager PLN West Kalimantan (2008-2009)</li> <li>· General Manager of PLN South Sulawesi, Southeast Sulawesi and West Sulawesi (2010)</li> <li>· Division Head of Java-Bali Distribution at the Java-Bali Operations Directorate at PLN Head Office (2010-2011)</li> <li>· General Manager of PLN East Java distribution (2011-2014)</li> <li>· General Manager of PLN Jakarta and Tangerang distribution (2014-2015)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	Tidak Ada	None
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Business Road Show &amp; Investor Meeting di Inggris</li> <li>· Working Visit (Kunjungan Kenegaraan Presiden RI) &amp; CEO Meeting di Turki</li> <li>· Due Diligence Material Transmisi Utama (MTU) di Polandia &amp; Jerman</li> <li>· Working Visit ke Mitsubishi di Jepang</li> <li>· Working Visit &amp; pemeriksaan Produksi Zeck TSE Int. di Thailand</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Business Road Show &amp; Investor Meeting in England</li> <li>· Working Visit (State Visit of the President of RI) &amp; CEO Meeting in Turki</li> <li>· Due Diligence of Main Transmission Material (MTU) in Poland &amp; Germany</li> <li>· Working Visit to Mitsubishi, Japan</li> <li>· Working Visit &amp; Production Audit in Zeck TSE Int., Thailand</li> </ul>
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliates	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders
<b>Domisili</b> Domicile	Bogor, Jawa Barat	Bogor, West Java
<b>Jumlah Kepemilikan Saham PLN</b> Total Share Ownership of PLN	Tidak Ada	None

## Profil Direksi

### Board of Directors Profiles



#### Amir Rosidin

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah  
Regional Business Director of Central Java

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia	Indonesian
<b>Usia/ Tempat &amp; Tanggal Lahir</b> Age/ Place & Date of Birth	58 tahun, per 31 Desember 2017 Malang, 7 Juni 1959	58 years as of 31 December 2017 Malang, 7 June 1959
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung, 1985</li> <li>2. Master di bidang Manajemen dari Sekolah Manajemen PPM, Jakarta pada tahun 1998.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bachelor's degree in Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology, 1985</li> <li>2. Master's Degree in Management from PPM Management Institute, Jakarta in 1988</li> </ol>
<b>Riwayat Jabatan</b> Professional Background		
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Appointment Legal References	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Diangkat sebagai Direktur sejak 23 Desember 2014, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-272/MBU/12/2014.</li> <li>· Diangkat sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah sejak 24 Juli 2017, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No.SK-138/MBU/07/2017.</li> <li>· Masa jabatan sebagai Direksi Perseroan adalah 5 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Appointed as Director since 23 December 2014, by the Decree of SOE Minister as the GMS No. SK-272/MBU/12/2014.</li> <li>· Appointed as Regional Business Director of Central Java since 24 July 2017, by the Decree of SOE Minister as the GMS No. SK-138/MBU/07/2017</li> <li>· The term as Director of the Company is 5 years.</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mulai berkarir di PLN pada tahun 1985.</li> <li>· General Manager PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur (2008)</li> <li>· General Manager PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (2010)</li> <li>· Kepala Divisi Manajemen Risiko pada Direktorat Bisnis &amp; Manajemen Risiko PLN Kantor Pusat (2010-2013)</li> <li>· Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali(PJB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· He began his career with PLN in 1985.</li> <li>· General Manager of PLN East Nusa Tenggara (2008)</li> <li>· General Manager of PLN South Sumatra, Jambi, Bengkulu (2010)</li> <li>· Head of Risk Management Division in the Business &amp; Risk Management Directorate at PLN Head Office (2010-2013)</li> <li>· President Director of PT Java Bali Generation (PJB)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	Tidak Ada	None
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Working Visit ke Pabrik Tesmec &amp; Wartsila di Jerman &amp; Italia</li> <li>· Business Road Show &amp; Investor Meeting di Hongkong &amp; USA</li> <li>· Working Visit &amp; Due Diligence di Austria &amp; Swiss</li> <li>· Working Visit &amp; pemeriksaan Produksi Zeck TSE Int. di Thailand</li> <li>· Working Visit &amp; Due Diligence Prysmian Group &amp; SGB-SMT Group di Belanda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Working Visit to Tesmec &amp; Wartsila Factory in Germany &amp; Italy</li> <li>· Business Road Show &amp; Investor Meeting in Hongkong &amp; USA</li> <li>· Working Visit &amp; Due Diligence in Austria &amp; Swiss</li> <li>· Working Visit &amp; Production Audit at Zeck TSE Int., Thailand</li> <li>· Working Visit &amp; Due Diligence Prysmian Group &amp; SGB-SMT Group in Holland</li> </ul>
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliates	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commisioners, and Shareholders
<b>Domisili</b> Domicile	Jakarta Selatan, Jakarta	South Jakarta, Jakarta
<b>Jumlah Kepemilikan Saham PLN</b> Total Share Ownership of PLN	Tidak Ada	None



## Profil Direksi

Board of Directors Profiles

### Djoko Rahardjo Abumanan

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara  
Regional Business Director of East Java, Bali & Nusa Tenggara

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia	Indonesian
<b>Usia/ Tempat &amp; Tanggal Lahir</b> Age/ Place & Date of Birth	57 tahun, per 31 Desember 2017 Surabaya, 10 September 1960	57 years as of 31 December 2017 Surabaya, 10 September 1960
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung, 1985	Bachelor's degree in Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology, 1985
<b>Riwayat Jabatan</b> Professional Background		
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Appointment Legal References	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Diangkat sebagai Direktur sejak 30 Oktober 2015, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-211/MBU/10/2015.</li> <li>· Diangkat sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara sejak 24 Juli 2017, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No.SK-138/MBU/07/2017.</li> <li>· Masa jabatan sebagai Direksi Perseroan adalah 5 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Appointed as Director since 30 October 2015, by the Decree of SOE Minister as the GMS No. SK-211/MBU/10/2015.</li> <li>· Appointed as Regional Business Director of East Java, Bali &amp; Nusa Tenggara since 24 July 2017, by the Decree of SOE Minister No. SK-138/MBU/07/2017</li> <li>· The term as Director of the Company is 5 years.</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mulai berkarir di PLN pada tahun 1985.</li> <li>· General Manager PLN Wilayah Riau &amp; Kepri (2011-2012).</li> <li>· General Manager PLN Distribusi Jawa Tengah &amp; DIY (2013-2014)</li> <li>· Kepala Divisi Energi Baru dan Terbarukan PLN Kantor Pusat (2014-2015)</li> <li>· General Manager Distribusi Jawa Barat &amp; Banten (2015)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· He began his career with PLN in 1985.</li> <li>· General Manager of PLN Riau and Riau Islands Region (2011-2012)</li> <li>· General Manager of PLN Distribution Central Java and Yogyakarta (2013-2014)</li> <li>· Head of New and Renewable Energy Division at PLN Head Office (2014-2015)</li> <li>· General Manager of Distribution West Java and Banten (2015)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	Tidak Ada	None
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Working visit (kunjungan kerja Menko Perekonomian RI) di Teheran – Iran</li> <li>· Kaltara Investment Forum 2017 di Jakarta</li> <li>· Kompas 100 CEO Forum di Jakarta</li> <li>· Working Visit di China</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Working visit (working visit of Coordinating Minister of Economic Affairs of RI) in Teheran – Iran</li> <li>· Kaltara Investment Forum 2017 in Jakarta</li> <li>· Kompas 100 CEO Forum in Jakarta</li> <li>· Working Visit in China</li> </ul>
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliates	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders
<b>Domisili</b> Domicile	Jakarta	Jakarta
<b>Jumlah Kepemilikan Saham PLN</b> Total Share Ownership of PLN	Tidak Ada	None

## Profil Direksi

### Board of Directors Profiles



### Machnizon

Direktur Bisnis Regional Kalimantan  
Regional Business Director of Kalimantan

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia	Indonesian
<b>Usia/ Tempat &amp; Tanggal Lahir</b> Age/ Place & Date of Birth	49 tahun, per 31 Desember 2017 Batusangkar, 2 Mei 1968	49 years as of 31 December 2017 Batusangkar, 2 May 1968
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana Elektro dari Institut Teknologi Bandung, 1993</li> <li>2. Master of Business Administration dari Universiti Tenaga Nasional Malaysia, 2006.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bachelor degree in Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology, 1993</li> <li>2. Master of Business Administration from Universiti Tenaga Nasional, Malaysia, 2006.</li> </ol>
<b>Riwayat Jabatan</b> Professional Background		
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Appointment Legal References	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Diangkat sebagai Direktur sejak 30 Oktober 2015, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No.SK-211/MBU/10/2015.</li> <li>· Diangkat sebagai Direktur Bisnis Regional Kalimantan sejak 24 Juli 2017, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No.SK-138/MBU/07/2017.</li> <li>· Masa jabatan sebagai Direksi Perseroan adalah 5 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Appointed as Director since 30 October 2015, by the Decree of SOE Minister as the GMS No.SK-211/MBU/10/2015.</li> <li>· Appointed as Regional Business Director of Kalimantan since 24 July 2017, by the Decree of SOE Minister as the GMS No. SK-138/MBU/07/2017</li> <li>· The term as Director of the Company is 5 years.</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mulai berkarir di PLN pada tahun 1993.</li> <li>· General Manager Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (2014-2015).</li> <li>· Kepala Divisi Operasi Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (Persero) (2015).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· He began his career with PLN in 1993.</li> <li>· General Manager of East Kalimantan and North Kalimantan (2014-2015).</li> <li>· Operations Division Head of Central Java at the Directorate of Regional Business Central Java at PLN Head Office (2015)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	Tidak Ada	None
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Working Visit ke Control Center for Renewable Energy di Spanyol</li> <li>· Roadshow dan investor meeting sebagai salah satu kegiatan pemasaran GMTN PLN Tahun 2017 di Amerika Serikat &amp; Inggris</li> <li>· Kunjungan ke SESB, Sabah terkait Proyek interkoneksi Malaysia -Indonesia di Malaysia</li> <li>· Asean Engineering on The Asean Federation of Engineering Organization 2017 di Bangkok, Thailand</li> <li>· Working Visit &amp; Roadshow di Jepang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Working Visit to Control Center for Renewable Energy in Spain</li> <li>· Roadshow and investor meeting as one of GMTN PLN marketing activity in 2017 in the US &amp; England</li> <li>· Visit to SESB, Sabah on interconnection project of Malaysia -Indonesia in Malaysia</li> <li>· Asean Engineering on The Asean Federation of Engineering Organization 2017 in Bangkok, Thailand</li> <li>· Working Visit &amp; Roadshow in Japan</li> </ul>
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliates	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders
<b>Domisili</b> Domicile	Bekasi Jawa Barat	Bekasi, West Java
<b>Jumlah Kepemilikan Saham PLN</b> Total Share Ownership of PLN	Tidak Ada	None



## Profil Direksi

Board of Directors Profiles

### Syamsul Huda

Direktur Bisnis Regional Sulawesi  
Regional Business Director of Sulawesi

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia	Indonesian
<b>Usia/ Tempat &amp; Tanggal Lahir</b> Age/ Place & Date of Birth	49 tahun, per 31 Desember 2017 Nganjuk, 31 Mei 1968	49 Years as of 31 December 2017 Nganjuk, 31 May 1968
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sarjana Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 1993</li> <li>Magister Manajemen dari Institut Teknologi Bandung, 2006</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bachelor degree in Electrical Engineering from Institute of Teknologi Sepuluh Nopember, 1993</li> <li>Master of Management from Institute of Technology Bandung, 2006</li> </ol>
<b>Riwayat Jabatan</b> Professional Background		
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Appointment Legal References	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diangkat sebagai Direktur Bisnis Regional Sulawesi sejak 24 Juli 2017, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No.SK-138/MBU/07/2017.</li> <li>Masa jabatan sebagai Direksi Perseroan adalah 5 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appointed as Regional Business Director of Sulawesi since 24 July 2017, by the Decree of SOE Minister as the GMS No. SK-138/MBU/07/207</li> <li>The term as Director of the Company is 5 years</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mulai berkarir di PLN pada tahun 1993.</li> <li>General Manager PLN Distribusi Bali (2014-2015).</li> <li>General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya (2015-2016).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Began his career with PLN in 1993</li> <li>General Manager of PLN Distribution Bali (2014-2015)</li> <li>General Manager of PLN Distribution Jakarta Raya (2015-2016)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	Tidak Ada	None
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>Working Visit &amp; Due Diligence SKTT Sumitomo Cable Factory di Jepang</li> <li>Working Visit &amp; Due Diligence SAS, AC/DC System, Relay Protection Control, Power Transformer Mitsubishi Factory di Jepang</li> <li>Indonesia-Japan JWVG dan FPDF Annual Meeting di Jepang</li> <li>PJB Connect Double Capacity Expo &amp; Conference di Surabaya</li> <li>Kompas 100 CEO Forum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Working Visit &amp; Due Diligence SKTT Sumitomo Cable Factory in Japan</li> <li>Working Visit &amp; Due Diligence SAS, AC/DC System, Relay Protection Control, Power Transformer Mitsubishi Factory in Japan</li> <li>Indonesia-Japan JWVG and FPDF Annual Meeting in Japan</li> <li>PJB Connect Double Capacity Expo &amp; Conference in Surabaya</li> <li>Kompas 100 CEO Forum</li> </ul>
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliates	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commisioners, and Shareholders
<b>Domisili</b> Domicile	Jakarta Selatan, Jakarta	South Jakarta, Jakarta
<b>Jumlah Kepemilikan Saham PLN</b> Total Share Ownership of PLN	Tidak Ada	None

## Profil Direksi

Board of Directors Profiles



### Ahmad Rofik

Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua  
Regional Business Director of Maluku & Papua

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia	Indonesian
<b>Usia/ Tempat &amp; Tanggal Lahir</b> Age/ Place & Date of Birth	50 tahun, per 31 Desember 2017 Jakarta, 4 Desember 1967	50 years as of 31 December 2017 Jakarta, 4 December 1967
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Indonesia, 1992	Bachelor degree in Mechanical Engineering from University of Indonesia, 1992
<b>Riwayat Jabatan</b> Professional Background		
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Appointment Legal References	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Diangkat sebagai Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua sejak 24 Juli 2017, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No.SK-138/MBU/07/2017.</li> <li>· Masa jabatan sebagai Direksi Perseroan adalah 5 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Appointed as Regional Business Director of Maluku &amp; Papua since 24 July 2017, by the Decree of SOE Minister as the GMS No. SK-138/MBU/07/2017</li> <li>· The term as Director of the Company is 5 years</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja</b> Professional Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mulai berkarir di PLN pada tahun 1992.</li> <li>· General Manager PLN Unit Induk Pembangunan I (2014-2015).</li> <li>· Kepala Divisi Pengadaan Strategis PT PLN (Persero) (2015-2017).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Began his career with PLN in 1992</li> <li>· General Manager of PLN Development Holding Unit (2014-2015)</li> <li>· Head of Strategic Procurement Division PT PLN (Persero) (2015-2017)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b> Concurrent Position	Tidak Ada	None
<b>Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi</b> Trainings and Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Working Visit &amp; Due Dilligence ke GE Factory di Swiss</li> <li>· Working Visit &amp; Due Dilligence ke GE Factory di Jerman</li> <li>· Working Visit &amp; Due Dilligence ke Nexans Factory di Jerman</li> <li>· Working Visit ke Wartsila Indonesia Training and Digital Expertise Centres</li> <li>· Kompas 100 CEO Forum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Working Visit &amp; Due Dilligence to GE Factory in Swizertland</li> <li>· Working Visit &amp; Due Dilligence to GE Factory in Germany</li> <li>· Working Visit &amp; Due Dilligence to Nexans Factory in Germany</li> <li>· Working Visit to Wartsila Indonesia Training and Digital Expertise Centres</li> <li>· Kompas 100 CEO Forum</li> </ul>
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliates	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commisioners, and Shareholders
<b>Domisili</b> Domicile	Tangerang, Banten	Tangerang, Banten
<b>Jumlah Kepemilikan Saham PLN</b> Total Share Ownership of PLN	Tidak Ada	None

## PEJABAT SENIOR – SATU TINGKAT DIBAWAH DIREKSI

### Senior Executives – One Level Below the Board of Directors



**Dedeng Hidayat**  
Kepala Satuan Hukum Korporat  
Head of Corporate Legal Unit

Riwayat Pendidikan :

- ▶ S1 Hukum, Universitas Indonesia (1992)
- ▶ S2 Hukum, Universitas Indonesia (2002)

Riwayat Pekerjaan :

- ▶ Senior Specialist I Pelayanan Hukum Korporat, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2013-2014)
- ▶ Kepala Bidang Regulasi Dan Kepatuhan, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2010-2013)
- ▶ Manajer Komunikasi Kelembagaan, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2009-2010)

Educational Background :

- ▶ Bachelor of Law, Universitas Indonesia (1992)
- ▶ Master of Law, Universitas Indonesia (2002)

Employment History :

- ▶ Senior Specialist I, Corporate Law, PT PLN (Persero) Head Office (2013-2014)
- ▶ Head of Regulation and Compliance, PT PLN (Persero) Head Office (2010-2013)
- ▶ Manager of Institutional Communication, PT PLN (Persero) Head Office (2009-2010)



**Ali Mudin**  
Kepala Satuan Pengawasan Intern  
Head of Internal Supervisory Unit

Riwayat Pendidikan :

- ▶ S1 Hukum, Universitas Padjadjaran (1981)
- ▶ S2 Hukum, Universitas Padjadjaran (2006)

Riwayat Pekerjaan :

- ▶ Kepala Audit Intern BRI Kantor Pusat, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2008-2015)
- ▶ Kepala Divisi Logistik Kantor Pusat, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2005-2008)
- ▶ Kepala Wilayah BRI Banda Aceh, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Educational Background:

- ▶ Bachelor of Law, Universitas Padjadjaran (1981)
- ▶ Master of Law, Universitas Padjadjaran (2006)

Employment History :

- ▶ Head of Internal Audit of BRI Head Office, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2008-2015)
- ▶ Head of Logistics, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2005-2008)
- ▶ Head of BRI Banda Aceh, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2004-2005)



**Zulfarida Faluzu**  
Kepala Satuan Pengendalian Kinerja Korporat  
Head of Corporate Performance Control Unit

Riwayat Pendidikan :

- ▶ S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (1991)
- ▶ S2 Hukum Bisnis, Universitas Indonesia (2012)

Riwayat Pekerjaan :

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung (2012-2013)
- ▶ Senior Specialist II Kinerja Perusahaan Pada PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung (2011-2012)
- ▶ Kepala Bidang Program Metamorfosa Pada Satuan Pengendalian Kinerja Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2010-2011)

Educational Background :

- ▶ Bachelor of Electrical Engineering, Institut Teknologi Bandung (1991)
- ▶ Master of Business Law, Universitas Indonesia (2012)

Employment History :

- ▶ General Manager of PT PLN (Persero) for The Region of Bangka Belitung (2012-2013)
- ▶ Senior Performance Specialist II of PT PLN (Persero) for The Region of Bangka Belitung (2011-2012)
- ▶ Head of The Metamorphic Program In The Unit of Corporate Performance Management, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2010-2011)



**Bambang Dwiyanto**  
Sekretaris Perusahaan  
Corporate Secretary

Riwayat Pendidikan :

- ▶ S1 Komunikasi, Universitas Gadjah Mada (1990)

Riwayat Pekerjaan :

- ▶ Manajer Senior Stakeholder Management, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2015-2016)
- ▶ Manajer Senior Komunikasi Korporat, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2010-2015)

Educational Background :

- ▶ Bachelor of Communication, Universitas Gadjah Mada (1990)

Employment History :

- ▶ Senior Manager of Stakeholder Management, PT PLN (Persero) Head Office (2015-2016)
- ▶ Senior Manager of Corporate Communication, PT PLN (Persero) Head Office (2010-2015)



**I Made Suprateka Yadnya**  
Kepala Satuan Komunikasi Korporat  
Head Of Corporate Communication Unit

Riwayat Pendidikan :

- ▶ S1 Ekonomi Akuntansi, UPN Veteran Yogyakarta (1986)
- ▶ S2 Bidang Manajemen, IPWI Jakarta (1998)

Riwayat Pekerjaan :

- ▶ Kepala Wilayah BRI Pekanbaru PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2011-2015)
- ▶ Wakil Kepala Divisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2007-2011)
- ▶ Kepala Bagian Hubungan Lembaga PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2007-2011)

Educational Background :

- ▶ Bachelor of Accounting, UPN Veteran (1986)
- ▶ Master of Management, IPWI (1998)

Employment History :

- ▶ Regional Head of Pekanbaru Region, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2011-2015)
- ▶ Deputy Division Head, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2007-2011)
- ▶ Head of Institutional Relations, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2007-2011)

## Pejabat Senior – Satu Tingkat Dibawah Direksi

### Senior Executives – One Level Below the Board of Directors

## DIREKTORAT PERENCANAAN KORPORAT

### Directorate of Corporate Planning



**Adi Priyanto**  
Kepala Divisi Perencanaan Sistem  
Head of System Planning Division

#### Riwayat Pendidikan :

- ▶ S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1991)
- ▶ S2 Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (1998)
- ▶ S2 Manajemen, IPWI (1998)

#### Riwayat Pekerjaan :

- ▶ Manajer Senior Perencanaan Sistem II Pada Divisi Perencanaan Sistem Direktorat Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2016)
- ▶ Manajer Perencanaan Pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Dan Tangerang (2014-2015)
- ▶ Senior Specialist II Manajemen Resiko (Pit Manajer Perencanaan) Pada PT PLN (Persero) Distribusi Bali (2014)

#### Educational Background :

- ▶ Bachelor of Electrical Engineering, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1991)
- ▶ Master of Electrical Engineering, Institut Teknologi Bandung (1998)
- ▶ Master of Business Management, IPWI (1998)

#### Employment History :

- ▶ Senior Manager of System Planning II, PT PLN (Persero) Head Office (2016)
- ▶ Planning Manager In PT PLN (Persero), Jakarta Raya and Tangerang Distribution (2014-2015)
- ▶ Risk Management Senior Specialist II (Acting Planning Manager) In PT PLN (Persero), Bali Distribution (2014)



**Doddy Benyamin Pangaribuan**  
Kepala Divisi Perencanaan Korporat  
Head Of Corporate Planning Division

#### Riwayat Pendidikan :

- ▶ S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (1992)
- ▶ S2 Manajemen, HEC - Montreal Canada (2002)

#### Riwayat Pekerjaan :

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Bali (2014-2015)
- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau (2013-2014)
- ▶ Manajer Senior Perencanaan Strategis Korporat, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2011-2013)

#### Educational Background :

- ▶ Bachelor of Electrical Engineering, Institut Teknologi Bandung (1992)
- ▶ Master of Business Management, HEC - Montreal Canada (2002)

#### Employment History :

- ▶ General Manager of PT PLN (Persero) for Bali Distribution (2014-2015)
- ▶ General Manager of PT PLN (Persero) for Riau and Riau Islands (2013-2014)
- ▶ Senior Manager of Corporate Strategic Planning, PT PLN (Persero) Head Office (2011-2013)



**Warsono**  
Kepala Divisi Enjiniring  
Head of Engineering Division

#### Riwayat Pendidikan

- ▶ S1 Teknik Elektro, Universitas Gadjah Mada (1989)
- ▶ S1 Manajemen, Universitas Terbuka (2009)
- ▶ S2 Teknik Elektro, University of Abertay Dundee (2006)

#### Riwayat Pekerjaan

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Timur Dan Bali (2016-2017)
- ▶ Manajer Perencanaan pada PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali (2014-2015)
- ▶ Kepala Satuan Operational Performance Improvement (OPI) (2013-2014)

#### Educational Background

- ▶ Bachelor degree in Electrical Engineering, University of Gadjah Mada (1989)
- ▶ Bachelor degree in Management, Universitas Terbuka (2009)
- ▶ Master degree of Electrical Engineering, University of Abertay Dundee (2006)

#### Employment History

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) East Java and Bali Transmission (2016-2017)
- ▶ Planning Manager PT PLN (Persero) Java Bali Load Control Center and Distribution (2014-2015)
- ▶ Head of Operational Performance Improvement Unit (OPI) (2013-2014)



**Gong Matua Hasibuan**  
Kepala Divisi Transaksi Tenaga Listrik & Kemitraan Bisnis  
Head of Electricity Transaction and Business Partnership Division

#### Riwayat Pendidikan :

- ▶ S1 Ekonomi Akuntansi, STIE Nusa Bangsa (1994)
- ▶ S2 Manajemen Keuangan, Universitas Indonesia(2008)

#### Riwayat Pekerjaan :

- ▶ Kepala Divisi Perencanaan Dan Pengendalian Anggaran, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2012-2015)
- ▶ Senior Specialist II Keuangan, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2012)
- ▶ Manajer Senior Perencanaan Keuangan, PT PLN

#### Educational Background :

- ▶ Bachelor of Accounting, STIE Nusa Bangsa (1994)
- ▶ Master of Finance, Universitas Indonesia(2008)

#### Employment History :

- ▶ Head of The Budget Planning and Control Division, PT PLN (Persero) Head Office (2012-2015)
- ▶ Senior Specialist II for Finance, PT PLN (Persero) Head Office (2012)
- ▶ Senior Manager for Financial Planning, PT PLN (Persero) Head Office (2011)



**Wasito Adi**  
Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan  
Head of Risk Management and Compliance Division

#### Riwayat Pendidikan:

- ▶ S1 Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1991)

#### Riwayat Pekerjaan

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (2015-2017)
- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat (2013-2015)
- ▶ Manajer Bidang Distribusi pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta (2011-2013)

#### Educational Background

- ▶ Bachelor degree in Industrial, Institute of Teknologi Sepuluh Nopember (1991)

#### Employment History

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) South Sulawesi, Sulawesi Tenggara and West Sulawesi Regional (2015-2017)
- ▶ General Manager PT PLN (Persero) West Sumatra Regional (2013-2015)
- ▶ Manager of Distribution PT PLN (Persero) Central Java and DI Yogyakarta Distribution (2011-2013)

## Pejabat Senior – Satu Tingkat Dibawah Direksi

Senior Executives – One Level Below the Board of Directors

### DIREKTORAT PENGADAAN STRATEGIS 1

Directorate of Strategic Procurement 1



**Noesita Indriani**  
Kepala Divisi Perijinan dan Pertanahan  
Head Of Licensing And Land Division

**Riwayat Pendidikan :**

- ▶ S1 Teknik Elektro, Universitas Indonesia (1991)
- ▶ S2 Ekonomi, Universitas Gadjah Mada (2009)

**Riwayat Pekerjaan :**

- ▶ Kepala Divisi Manajemen Risiko, PT Indonesia Power (2012-2014)
- ▶ Sekretaris Perusahaan, PT Indonesia Power (2009-2012)
- ▶ Kepala Divisi Perencanaan dan Anggaran, PT Indonesia Power (2006-2012)

**Educational Background :**

- ▶ Bachelor of Electrical Engineering, Universitas Indonesia (1991)
- ▶ Master of Finance, Universitas Gadjah Mada (2009)

**Employment History :**

- ▶ Head of Risk Management Division, PT Indonesia Power (2012-2014)
- ▶ Corporate Secretary, PT Indonesia Power (2009-2012)
- ▶ Head of The Division of Planning and Budget, PT Indonesia Power (2006-2012)



**Fahmi El Amruzi D**  
Kepala Divisi Pengadaan Strategis  
Head of Strategic Procurement Division

**Riwayat Pendidikan :**

- ▶ S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (1993)
- ▶ S2 Manajemen Bisnis, University of Missouri (2006)

**Riwayat Pekerjaan :**

- ▶ Senior Specialist I Strategi Bisnis, PT Unindo (2013-2015)
- ▶ Senior Specialist I Perencanaan, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2012-2013)

**Educational Background :**

- ▶ Bachelor of Electrical Engineering, Institut Teknologi Bandung (1993)
- ▶ Master of Business Management, University of Missouri (2006)

**Employment History :**

- ▶ Senior Specialist I for Business Strategy, PT Unindo (2013-2015)
- ▶ Senior Specialist I for Planning, PT PLN (Persero) Head Office (2012-2013)



**Septa Hamid**  
Kepala Divisi Supply Chain Management  
Head of Supply Chain Management Unit

**Riwayat Pendidikan :**

- ▶ S1 Teknik Mesin, Institut Teknologi Bandung (1993)
- ▶ S2 Manajemen, Universitas Indonesia (2004)

**Riwayat Pekerjaan :**

- ▶ Direktur Utama PT Cogindo Bersama (2009-2013)
- ▶ Wakil Direktur Bidang Kelistrikan PT Indonesia Power (2009)
- ▶ Senior Expert pada Pengembangan Bisnis PT Indonesia Power (2009)

**Educational Background :**

- ▶ Bachelor of Mechanical Engineering, Institut Teknologi Bandung (1993)
- ▶ Master of Management, Universitas Indonesia (2004)

**Employment History :**

- ▶ President Director of PT Cogindo Daya Bersama (2009-2013)
- ▶ Vice President of Engineering, PT Indonesia Power (2009)
- ▶ Senior Expert On Business Development, PT Indonesia Power (2009)



**Anang Yahmadi**  
Kepala Divisi Administrasi Konstruksi  
Head of Construction Administration Division

**Riwayat Pendidikan**

- ▶ S1 Teknik Sipil, Universitas Brawijaya (1987)
- ▶ S2 Teknik Sipil, University Of Melbourne (2001)

**Riwayat Pekerjaan:**

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I (2016-2017)
- ▶ General Manager Unit Induk Pembangunan VI PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VI (2016)
- ▶ Senior Specialist II Kinerja (Plt General Manager) PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VI (2014-2016)

**Educational Background**

- ▶ Bachelor degree in Civil Engineering, University of Brawijaya (1987)
- ▶ Bachelor degree in Civil Engineering, University of Melbourne (2001)

**Employment History**

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Central Java Development Holding Unit (2016-2017)
- ▶ General Manager of Development Holding Unit VI PT PLN (Persero) Development Holding Unit VI (2016)
- ▶ Senior Specialist II Performance (Acting General Manager) PT PLN (Persero) Development Holding Unit VI (2014-2016)



**Tohari Hadiat**  
Kepala Divisi Energi Baru dan Terbarukan  
Head of New and Renewable Energy Division

**Riwayat Pendidikan:**

- ▶ S1 Teknik Geodesi, Institut Teknologi Bandung (1989)
- ▶ S2 Manajemen Bisnis, Universitas Tenaga Nasional Malaysia (2005)

**Riwayat Pekerjaan:**

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara (2015-2017)
- ▶ Manajer Senior Niaga Korporasi, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2012-2015)
- ▶ Manajer Bidang Niaga PT PLN (Persero) Wilayah Kaltim

**Educational Background**

- ▶ Bachelor degree in Geodesy, Institute of Technology Bandung (1989)
- ▶ Master degree in Business Management, University of Tenaga Nasional Malaysia (2005)

**Employment History**

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) East Kalimantan and North Kalimantan Regional (2015-2017)
- ▶ Senior Manager of Corporate Commerce, PT PLN (Persero) Head Office (2012-2015)
- ▶ Commercial Manager PT PLN (Persero) of East Kalimantan Regional

## Pejabat Senior – Satu Tingkat Dibawah Direksi

Senior Executives – One Level Below the Board of Directors

## DIREKTORAT PENGADAAN STRATEGIS 2

Directorate of Strategic Procurement 2

**Muhamad Ahsin Sidqi**  
Kepala Satuan Pengadaan IPP  
Head of IPP Procurement Unit

## Riwayat Pendidikan:

- ▶ S1 Teknik Nuklir, Universitas Gadjah Mada (1985)
- ▶ S2 Manajemen, STIE IPWI (1999)

## Riwayat Pekerjaan:

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan

## Educational Background

- ▶ Bachelor degree in Nuclear Engineering, University of Gadjah Mada (1985)
- ▶ Master degree in Management, STIE IPWI (1999)

## Employment History

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) South Sumatra Plant

**Harlen**  
Kepala Divisi Batubara  
Head of Coal Division

## Riwayat Pendidikan :

- ▶ S1 Teknik Elektro, Universitas Brawijaya (1993)

## Riwayat Pekerjaan :

- ▶ Kepala Divisi Batubara Pada Direktorat (Pengadaan Dan Energi Primer) PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2015)
- ▶ Senior Specialist II Audit Teknik (Tk), PT Indonesia Power (2012-2015)
- ▶ Engineer Teknik Mesin Dan Listrik (Tk), PT Indonesia Power (2009-2011)

## Educational Background :

- ▶ Bachelor of Electrical Engineering, Universitas Brawijaya (1993)

## Employment History :

- ▶ Head of Coal In The Directorate of Procurement and Primary Energy, PT PLN (Persero)
- ▶ Head Office (2015) Senior Specialist II In Technical Audit, PT Indonesia Power (2012-2015)
- ▶ Mechanical and Electrical Engineer of PT Indonesia Power (2009-2011)

**Chairani Rachmatullah**  
Kepala Divisi Gas dan BBM  
Head of Oil and Gas Division

## Riwayat Pendidikan :

- ▶ S1 Teknik Sipil, Universitas Sriwijaya (1992)
- ▶ S2 Program Studi Energi, The University of Melbourne (2005)
- ▶ S2 Teknik Sipil, Universitas Indonesia (2001)

## Riwayat Pekerjaan :

- ▶ Manajer Senior Perencanaan dan Evaluasi Energi Primer, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2013-2015)
- ▶ Manajer Senior Perencanaan Energi Primer, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2011-2013)
- ▶ Asisten Kepala Bidang Pengendalian Energi BBM, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2008-2010)

## Educational Background :

- ▶ Bachelor of Civil Engineering, Universitas Sriwijaya (1992)
- ▶ Master of Energy, The University of Melbourne (2005)
- ▶ Master of Civil Engineering, Universitas Indonesia (2001)

## Employment History :

- ▶ Senior Manager of Primary Energy Planning and Evaluation, PT PLN (Persero) Head Office (2013-2015)
- ▶ Senior Manager of Primary Energy Planning, PT PLN (Persero) Head Office (2011-2013)
- ▶ Deputy Head of Oil Control, PT PLN (Persero) Head Office (2008-2010)

## DIREKTORAT HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

Directorate of Human Capital Management

**Karyawan Aji**  
Kepala Divisi Pengembangan Organisasi  
Head of Organizational Development Division

## Riwayat Pendidikan:

- ▶ S1 Teknik Nuklir, Universitas Gadjah Mada (1986)
- ▶ S2 Teknik Elektro, Curtin University of Technology (2007)

## Riwayat Pekerjaan:

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat (2016-2017)
- ▶ Manajer Eksekutif Direksi PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2015-2016)
- ▶ Manajer Senior Operasi Dan Pemeliharaan Pembangkit, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2015)

## Educational Background

- ▶ Bachelor degree in Nuclear Engineering, University of Gadjah Mada (1986)
- ▶ Master degree in Electrical Engineering, Curtin University of Technology (2007)

## Employment History

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) for West Nusa Tenggara Region (2016-2017)
- ▶ Executive Manager of the Board of Directors PT PLN (Persero) Head Office (2015-2016)
- ▶ Senior Manager Plant Operations and Maintenance, PT PLN (Persero) Head Office (2015)

**Bagus Setiawan**  
Kepala Divisi Human Capital Management System  
Head of Human Capital Management System Division

## Riwayat Pendidikan :

- ▶ S1 Teknik Mesin, Institut Teknologi Bandung (1993)
- ▶ S2 Manajemen Bisnis, University of Missouri (2006)

## Riwayat Pekerjaan :

- ▶ Kepala Divisi Pengembangan Sistem SDM, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2013-2015)
- ▶ Senior Specialist I Manajemen SDM, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2011-2013)
- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung (2010-2011)

## Educational Background :

- ▶ Bachelor of Mechanical Engineering, Institut Teknologi Bandung (1993)
- ▶ Master of Business Management, University of Missouri (2006)

## Employment History :

- ▶ Head of Human Capital Management System Development, PT PLN (Persero) Head Office (2013-2015)
- ▶ Senior Specialist I of Human Capital Management, PT PLN (Persero) Head Office (2011-2013)
- ▶ General Manager of PT PLN (Persero) for Bangka Belitung Region (2010-2011)

**Okto Rinaldi S**  
Kepala Divisi Pengembangan Talenta  
Head of Talents Development Division

## Riwayat Pendidikan :

- ▶ S1 Ekonomi, STIEI (1990)
- ▶ S2 Manajemen, Universitas Syiah Kuala (2001)

## Riwayat Pekerjaan :

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan Dan Pelatihan (Corporate University) (2015)
- ▶ Kepala Pusdiklat (Chief Learning Officer) Pada PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan Dan Pelatihan (Corporate University) (2014-2015)
- ▶ Manajer Senior Manajemen Kinerja SDM Pada Divisi Pengembangan Sistem SDM Direktorat (SDM Dan Umum) PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2013-2014)

## Educational Background :

- ▶ Bachelor of Economics, STIEI (1990)
- ▶ Master of Business Management, Universitas Syiah Kuala (2001)

## Employment History :

- ▶ General Manager of PT PLN (Persero), Education and Training Centre (Corporate University) (2015)
- ▶ Chief Learning Officer In PT PLN (Persero), Centre for Education and Training Centre (Corporate University) (2014-2015)
- ▶ Senior Manager for HR Performance Management In The Division of HR System Development, PT PLN (Persero) Head Office (2013-2014)

## Pejabat Senior – Satu Tingkat Dibawah Direksi

Senior Executives – One Level Below the Board of Directors



**Tisna Gunawan**  
Kepala Divisi Umum  
Head of General Affairs Division

- Riwayat Pendidikan :
- ▶ S1 Ekonomi Akuntansi, Universitas Andalas (1991)
- Riwayat Pekerjaan :
- ▶ Senior Specialist I Perencana Pengadaan Kantor Pusat Dan Fasilitas Korporat (2016)
  - ▶ Senior Specialist I Pengawasan Intern (2016)
  - ▶ Kepala Bidang Audit Regional V PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2014-2015)
- Educational Background :
- ▶ S1 Ekonomi Akuntansi, Universitas Andalas (1991)
- Employment History :
- ▶ Senior Procurement Planning Specialist I, Head Office and Corporate Facilities, PT PLN (Persero) Head Office (2016)
  - ▶ Senior Internal Audit Specialist I, PT PLN (Persero) Head Office (2016)
  - ▶ Head of Regional Audit V, PT PLN (Persero) Head Office (2014-2015)



**Jurlian Sitanggang**  
Kepala Divisi Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan Dan Lingkungan

- Riwayat Pendidikan:
- ▶ S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Minahasa (1995)
  - ▶ S2 Manajemen Bisnis, University of Missouri (2006)
- Riwayat Pekerjaan:
- ▶ General Manager Unit Induk Pembangunan II PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II (2015-2017)
  - ▶ General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XIV (2014-2015)
  - ▶ Manajer Perencanaan Pada Bidang Perencanaan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku, dan Papua (2012-2014)
- Educational Background:
- ▶ S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Minahasa (1995)
  - ▶ S2 Manajemen Bisnis, University of Missouri (2006)
- Employment History:
- ▶ General Manager of Construction Unit II PT PLN (Persero) (2015-2017)
  - ▶ General Manager PT PLN (Persero) of Construction Unit XIV (2014-2015)
  - ▶ Planning Manager PT PLN (Persero) Construction Unit of Interconnection Sulawesi, Maluku, and Papua (2012-2014)

## DIREKTORAT KEUANGAN

Directorate of Finance



**Sulisty Biantoro**  
Kepala Divisi Keuangan  
Head of Finance Division

- Riwayat Pendidikan :
- ▶ S1 Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2001)
  - ▶ S2 Akuntansi, The University of Queensland (2006)
- Riwayat Pekerjaan :
- ▶ Senior Specialist I Akuntansi Manajemen (Plt Kepala Divisi Akuntansi) PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2014-2015)
  - ▶ Kepala Bidang Audit Regional V PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2012-2014)
- Educational Background :
- ▶ Bachelor of Accounting, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2001)
  - ▶ Master of Accounting, The University of Queensland (2006)
- Employment History :
- ▶ Senior Accounting Management Specialist I (Acting Head of Accounting) PT PLN (Persero) Head Office (2014-2015)
  - ▶ Head of Audit Regional V, PT PLN (Persero) Head Office (2012-2014)



**Khusnul Mubien**  
Kepala Divisi Anggaran  
Head of Budget Division

- Riwayat Pendidikan:
- ▶ S1 Akuntansi, Universitas Brawijaya (1987)
  - ▶ S2 Manajemen, UNKRIS (1998)
- Riwayat Pekerjaan :
- ▶ Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (2016-2017)
  - ▶ Direktur Keuangan dan Administrasi PT PLN Tarakan (2013-2016)
  - ▶ Direktur Keuangan dan Administrasi PT PLN Tarakan (2010-2012)
- Educational Background:
- ▶ S1 Akuntansi, Universitas Brawijaya (1987)
  - ▶ S2 Manajemen, UNKRIS (1998)
- Employment History :
- ▶ Director of Business and Development of PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (2016-2017)
  - ▶ Director of Finance and Administration of PT PLN Tarakan (2013-2016)
  - ▶ Director of Finance and Administration of PT PLN Tarakan (2010-2012)



**Iskandar**  
Kepala Divisi Treasury  
Head of Treasury Division

- Riwayat Pendidikan :
- ▶ S1 Ekonomi Akuntansi, UII, (1994)
- Riwayat Pekerjaan :
- ▶ Senior Specialist I Manajemen Keuangan (Tk), PT Indonesia Comnets Plus (2012-2015)
  - ▶ Manajer Senior Pengelolaan Pendapatan, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2010-2012)
  - ▶ Manajer Bidang Keuangan, PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat (2008-2010)
- Educational Background :
- ▶ Bachelor of Accounting, UII(1994)
- Employment History :
- ▶ Senior Specialist I for Financial Management (Tk), PT Indonesia Comnets Plus (2012-2015)
  - ▶ Senior Manager for Revenue Management, PT PLN (Persero) Head Office (2010-2012)
  - ▶ Finance Manager, PT PLN (Persero) West Sumatera Region (2008-2010)

## Pejabat Senior – Satu Tingkat Dibawah Direksi

### Senior Executives – One Level Below the Board of Directors



**Alfath Cordea Imalutha**  
Kepala Divisi Akuntansi  
Head of Accounting Division

- Riwayat Pendidikan :**
- ▶ S1 Ekonomi Akuntansi, STESIA (1988)
  - ▶ S2 Manajemen, Prasetya Mulya Jakarta (2004)
- Riwayat Pekerjaan :**
- ▶ Manajer Senior Perencanaan Keuangan pada Divisi Keuangan, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2013-2017)
  - ▶ Senior Specialist II Keuangan pada Divisi Keuangan Korporat Direktorat Keuangan PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2013)
  - ▶ Senior Specialist II Pendanaan pada Sub Bidang Pendanaan Dalam Negeri Bidang Pendanaan Divisi Keuangan Korporat Direktorat Keuangan PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2013)
- Educational Background**
- ▶ Bachelor degree in Economics Accounting, STESIA (1988)
  - ▶ Master degree in Management, Prasetya Mulya Jakarta (2004)
- Employment History**
- ▶ Senior Manager of Financial Planning, Finance Division, PT PLN (Persero) Head Office (2013-2017)
  - ▶ Senior Specialist II Finance, Corporate Finance Division of Finance Directorate PT PLN (Persero) Head Office (2013)
  - ▶ Senior Specialist II Planning, Home Affairs Planning Sub Division, Funding of Corporate Finance Division, Finance Directorate PT PLN (Persero) Head Office (2013)



**R. Yuddy Setyo Wicaksono**  
Kepala Divisi Niaga  
Head of Commercial Division

- Riwayat Pendidikan :**
- ▶ S1 Teknik Fisika, Institut Teknologi Bandung (1990)
  - ▶ S2 Teknik Mesin, Universitas Indonesia (2001)
- Riwayat Pekerjaan :**
- ▶ Direktur Operasi I PT PJB (2013-2017)
  - ▶ General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Tengah (2011-2013)
- Educational Background**
- ▶ Bachelor degree in Physics Engineering, Institute of Technology Bandung (1990)
  - ▶ Master degree in Mechanical Engineering, University of Indonesia (2001)
- Employment History**
- ▶ Director of Operations I PT PJB (2013-2017)
  - ▶ General Manager PT PLN (Persero) for South Kalimantan and Central Kalimantan Region (2011-2013)



**Agus Sutiawan**  
Kepala Divisi Sistem Dan Teknologi Informasi  
Head Of System And Information Technology Division

- Riwayat Pendidikan :**
- ▶ S1 Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung (1998)
  - ▶ S2 Master of Information Technology, UNSW, Sydney-Australia (2006)
- Riwayat Pekerjaan :**
- ▶ Kepala Divisi IT Bank Bukopin (2007 – 2014)
- Educational Background :**
- ▶ Bachelor of Information Technology, Institut Teknologi Bandung (1998)
  - ▶ Master of Information Technology, UNSW, Sydney-Australia (2006)
- Employment History :**
- ▶ Head of IT, Bank Bukopin (2007 – 2014)

## DIREKTORAT BISNIS REGIONAL SUMATERA

Directorate of Sumatra Regional Business



**Budi Pangestu**  
Kepala Divisi Pengembangan Regional Sumatera  
Head of Regional Development Division for Sumatra Region

- Riwayat Pendidikan :**
- ▶ S1 Teknik Geologi, Institut Teknologi Bandung (1988)
- Riwayat Pekerjaan :**
- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi Dan Bengkulu (2015-2017)
  - ▶ Manajer Niaga Dan Pelayanan Pelanggan Pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur (2013-2015)
  - ▶ Manajer Perencanaan Pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat (2013)
- Educational Background**
- ▶ Bachelor degree in Geology, Institute of Technology Bandung (1988)
- Employment History**
- ▶ General Manager PT PLN (Persero) South Sumatra, Jambi and Bengkulu Region (2015-2017)
  - ▶ Commercial and Customer Service Manager PT PLN (Persero) East Java Distribution (2013-2015)
  - ▶ Planning Manager PT PLN (Persero) for West Sumatra Region (2013)



**Adi Lumakso**  
Kepala Divisi Konstruksi Regional Sumatera  
Head of Construction Division for Sumatra Region

- Riwayat Pendidikan :**
- ▶ S1 Teknik Sipil, Universitas Diponegoro (1993)
  - ▶ S2 Manajemen Bisnis, Universitas Tenaga Nasional (2005)
  - ▶ S2 Manajemen Bisnis, Universitas Sriwijaya (2001)
- Riwayat Pekerjaan :**
- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan V (2015)
  - ▶ General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan X (2014-2015)
  - ▶ Senior Specialist II Kinerja (Plt General Manager Unit Induk Pembangunan X) PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan X (2014)
- Educational Background :**
- ▶ Bachelor of Civil Engineering, Universitas Diponegoro (1993)
  - ▶ Master of Business Management, Universitas Tenaga Nasional (2005)
  - ▶ Master of Business Management, Universitas Sriwijaya (2001)
- Employment History :**
- ▶ General Manager of PT PLN (Persero) Construction Unit V (2015)
  - ▶ General Manager of PT PLN (Persero) Constructionunit X (2014-2015)
  - ▶ Performance Senior Specialist II (Acting General Manager of Construction Unit X) PT PLN (Persero)



**Supriyadi**  
Kepala Divisi Operasi Regional Sumatera  
Head of Regional Operation Division for Sumatra Region

- Riwayat Pendidikan :**
- ▶ S1 Teknik Elektro, Universitas Gadjah Mada (1991)
  - ▶ S2 Manajemen Bisnis, Institut Teknologi Bandung (2007)
- Riwayat Pekerjaan :**
- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat (2015-2016)
  - ▶ Manajer Senior Risk Infrastructure Pada Divisi Manajemen Risiko Direktorat (Niaga, Manajemen Risiko, Dan Kepatuhan) PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2010-2015)
- Educational Background :**
- ▶ Bachelor of Electrical Engineering, Universitas Gadjah Mada (1991)
  - ▶ Master of Business Management, Institut Teknologi Bandung (2007)
- Employment History :**
- ▶ General Manager of PT PLN (Persero) for The Region of West Sumatra (2015-2016)
  - ▶ Senior Manager for Risk Infrastructure In The Risk Management Division, The Directorate of Commerce, Risk Management and Compliance, PT PLN (Persero) Head Office (2010-2015)

## Pejabat Senior – Satu Tingkat Dibawah Direksi

Senior Executives – One Level Below the Board of Directors

### DIREKTORAT BISNIS REGIONAL JAWA BAGIAN BARAT

Directorate of West Java Regional Business



#### Sandika Aflianto

Kepala Divisi Pengembangan Regional Jawa Bagian Barat  
Head of Regional Development Division for West Java Region

##### Riwayat Pendidikan:

- ▶ S1 Teknik Elektro, Universitas Brawijaya (1988)
- ▶ S2 Manajemen, University of Missouri St. Louis (2004)

##### Riwayat Pekerjaan:

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Bali (2016-2017)
- ▶ Direktur Utama PT PLN Tarakan (2012-2015)

##### Educational Background

- ▶ Bachelor degree in Electrical Engineering, University of Brawijaya (1988)
- ▶ Master degree in Management, University of Missouri St. Louis (2004)

##### Employment History

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Bali Distribution (2016-2017)
- ▶ President Director PT PLN Tarakan (2012-2015)



#### Ratnasari Sjamsuddin

Kepala Divisi Konstruksi Regional Jawa Bagian Barat  
Head of Regional Construction Division for West Java Region

##### Riwayat Pendidikan:

- ▶ S1 Teknik Elektro, Universitas Hasanuddin (1989)
- ▶ S2 Teknik Elektro, Universitas Indonesia (2006)

##### Riwayat Pekerjaan:

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Interkoneksi Sumatera Jawa (2016-2017)
- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan IV (2015-2016)
- ▶ Manajer Senior Enjiniring Dan Perencanaan Pengadaan Transmisi Dan Distribusi, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2013-2015)

##### Educational Background

- ▶ Bachelor degree in Electrical Engineering, University of Hasanuddin (1989)
- ▶ Bachelor degree in Electrical Engineering, University of Indonesia (2006)

##### Employment History

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Sumatra Java Interconnection Development Holding Unit (2016-2017)
- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Development Holding Unit IV (2015-2016)
- ▶ Senior Manager of Engineering and Transmission and Distribution Procurement Planning, PT PLN (Persero) Head Office (2013-2015)



#### Bima Putrajaya

Kepala Divisi Operasi Regional Jawa Bagian Barat  
Head of Regional Operations Division for West Java Region

##### Riwayat Pendidikan:

- ▶ S1 Teknik Elektro, Universitas Gadjah Mada (1985)
- ▶ S2 Manajemen, STIE IPWIJA (2002)
- ▶ S2 Manajemen, Universiti Tenaga Nasional (2005)

##### Riwayat Pekerjaan:

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat (2016-2017)
- ▶ Expert Manajemen Risiko Pada (Tugas Karya Ke PT Pelayaran Bahtera Adhiguna) PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2014-2016)
- ▶ Senior Specialist I Manajemen Risiko pada (Tugas Karya Ke PT Pelayaran Bahtera Adhiguna) PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2012-2014)

##### Educational Background

- ▶ Bachelor degree in Electrical Engineering, University of Gadjah Mada (1985)
- ▶ Master degree in Management, STIE IPWIJA (2002)
- ▶ Master degree in Management, Universiti Tenaga Nasional (2005)

##### Employment History

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) for West Kalimantan Region (2016-2017)
- ▶ Risk Management Expert (Duty of Work to PT Pelayaran Bahtera Adhiguna) PT PLN (Persero) Head Office (2014-2016)
- ▶ Senior Specialist I Risk Management (Duty of Work to PT Pelayaran Bahtera Adhiguna) PT PLN (Persero) Head Office (2012-2014)

### DIREKTORAT BISNIS REGIONAL JAWA BAGIAN TENGAH

Directorate of Central Java Regional Business



#### Dyananto R

Kepala Divisi Pengembangan Regional Jawa Bagian Tengah  
Head of Regional Development Division for Central Java Region

##### Riwayat Pendidikan :

- ▶ S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1988)
- ▶ S1 Hukum, Universitas Kartini Surabaya (2006)
- ▶ S2 Teknik Elektro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (2001)
- ▶ S2 Hukum (Notariat), Universitas Putra Bangsa (2005)
- ▶ S2 Manajemen, Universitas Muhammadiyah (1998)

##### Riwayat Pekerjaan :

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara (2013-2015)
- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Lampung (2011-2013)
- ▶ Manajer Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara Dan Sulawesi Barat (2008-2011)

##### Educational Background :

- ▶ Bachelor of Electrical Engineering, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1988)
- ▶ Bachelor of Law, Universitas Kartini Surabaya (2006)
- ▶ Master of Electrical Engineering, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (2001)
- ▶ Master of Law (Notary), Universitas Putra Bangsa (2005)
- ▶ Master of Business Management, Universitas Muhammadiyah (1998)

##### Employment History :

- ▶ General Manager of PT PLN (Persero) for North Sumatera Region (2013-2015)
- ▶ General Manager of PT PLN (Persero) for Lampung Distribution (2011-2013)
- ▶ Manager for The Region of South Sulawesi, Southeast Sulawesi and West Sulawesi (2008-2011)



#### Sulaiman Daud

Kepala Divisi Konstruksi Regional Jawa Bagian Tengah  
Head of Regional Construction Division for Central Java Region

##### Riwayat Pendidikan :

- ▶ S1 Teknik Sipil, Unsyiah Darussalam (1983)

##### Riwayat Pekerjaan :

- ▶ Kepala Divisi Operasi Regional Jawa Bagian Tengah, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2015-2017)
- ▶ Kepala Divisi Konstruksi Regional Jawa Bagian Tengah, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2015)
- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Aceh (2012-2015)

##### Educational Background

- ▶ Bachelor degree in Civil Engineering, Unsyiah Darussalam (1983)

##### Employment History

- ▶ Head of Regional Operations Division for Central Java Region PT PLN (Persero) Head Office (2015-2017)
- ▶ Head of Regional Construction Division for Central Java Region, PT PLN (Persero) Head Office (2015)
- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Aceh Region (2012-2015)



#### Purnomo

Kepala Divisi Operasi Regional Jawa Bagian Tengah  
Head of Regional Operations Division for Central Java Region

##### Riwayat Pendidikan:

- ▶ S1 Teknik Elektro, Universitas Indonesia (1994)
- ▶ S2 Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (2005)

##### Riwayat Pekerjaan:

- ▶ Plt General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (2015-2017)
- ▶ Kepala Bidang Program Strategis Pada Satuan Pengendalian Kinerja Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2015-2015)
- ▶ Kepala Bidang Program Metamorfosa Pada Satuan Pengendalian Kinerja Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2014-2015)

##### Educational Background

- ▶ Bachelor degree in Electrical Engineering, University of Indonesia (1994)
- ▶ Bachelor degree in Electrical Engineering, Institute of Technology Bandung (2005)

##### Employment History

- ▶ Acting General Manager PT PLN (Persero) for South Kalimantan and Central Kalimantan Region (2015-2017)
- ▶ Head of Strategic Program, Corporate Performance Control Unit PT PLN (Persero) Head Office (2015)
- ▶ Head of Metamorphosis Program, Corporate Performance Control Unit PT PLN (Persero) Head Office (2014-2015)

## Pejabat Senior – Satu Tingkat Dibawah Direksi

Senior Executives – One Level Below the Board of Directors

## DIREKTORAT BISNIS REGIONAL JAWA BAGIAN TIMUR, BALI &amp; NUSA TENGGARA

Directorate of East Java, Bali &amp; Nusa Tenggara Regional Business

**Paranal Suhasfan**

Kepala Divisi Pengembangan Regional Jawa Bagian Timur, Bali & Nusa Tenggara  
Head Of Regional Development Division For East Java, Bali & Nusa Tenggara Region

## Riwayat Pendidikan :

- ▶ S1 Teknik Elektro, Universitas Indonesia (1992)

## Riwayat Pekerjaan :

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi Dan Bengkulu (2014-2015)
- ▶ Senior Specialist I Kinerja (Plt General Manager) PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi Dan Bengkulu (2013-2014)
- ▶ Manajer Bidang Distribusi PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Dan Tangerang (2011-2013)

## Educational Background :

- ▶ Bachelor of Electrical Engineering, Universitas Indonesia (1992)

## Employment History :

- ▶ General Manager of PT PLN (Persero) for South Sumatera Selatan, Jambi and Bengkulu (2014-2015)
- ▶ Senior Performance Specialist I (Acting General Manager) of PT PLN (Persero) for The Regions of South Sumatera, Jambi and Bengkulu (2013-2014)
- ▶ Distribution Manager of PT PLN (Persero) Jakarta Raya and Tangerang Distribution (2011-2013)

**Aji Sutrisno**

Kepala Divisi Konstruksi Regional Jawa Bagian Timur, Bali & Nusa Tenggara  
Head of Regional Construction Division for East Java, Bali & Nusa Tenggara Region

## Riwayat Pendidikan:

- ▶ S1 Teknik Mesin, Institut Teknologi Bandung (1985)
- ▶ S2 Manajemen, University of Missouri (2005)

## Riwayat Pekerjaan:

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat (2017)
- ▶ Senior Specialist I Kinerja (Plt General Manager) PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan IX (2016)

## Educational Background

- ▶ Bachelor degree in Mechanical Engineering, Institute of Technology Bandung (1985)
- ▶ Master degree in Management, University of Missouri (2005)

## Employment History

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) West Kalimantan Development Holding Unit (2017)
- ▶ Senior Specialist I Performance (Acting General Manager) PT PLN (Persero) Development Holding Unit IX (2016)

**Ida Bagus Ari Wardana**

Kepala Divisi Operasi Regional Jawa Bagian Timur, Bali & Nusa Tenggara  
Head of Regional Operations Division for East Java, Bali & Nusa Tenggara Region

## Riwayat Pendidikan:

- ▶ S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1987)
- ▶ S2 Teknik Elektro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1999)

## Riwayat Pekerjaan:

- ▶ Kepala Divisi Operasi Regional Maluku dan Papua, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2015-2017)
- ▶ General Manager, PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung (2014-2015)
- ▶ Kepala Bidang Program Metamorfosa, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2012-2013)

## Educational Background

- ▶ Bachelor degree in Electrical Engineering, Institute of Technology Sepuluh Nopember (1987)
- ▶ Master degree in Electrical Engineering, Institute of Technology Sepuluh Nopember (1999)

## Employment History

- ▶ Head of Regional Operations Division for Maluku and Papua Region, PT PLN (Persero) Head Office (2015-2017)
- ▶ General Manager, PT PLN (Persero) Bangka Belitung Region (2014-2015)

## DIREKTORAT BISNIS REGIONAL KALIMANTAN

Directorate of Kalimantan Regional Business

**Rully Firmansyah**

Kepala Divisi Pengembangan Regional Kalimantan  
Head of Regional Development Division for Kalimantan Region

## Riwayat Pendidikan:

- ▶ S1 Teknik Elektro, Universitas Indonesia (1986)

## Riwayat Pekerjaan:

- ▶ Kepala Divisi Operasi Regional Kalimantan, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2015-2017)
- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Unit Pembangunan Jawa Bali (2015)
- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (2012-2015)

## Educational Background

- ▶ Bachelor degree in Electrical Engineering, University of Indonesia (1986)

## Employment History

- ▶ Head of Regional Operations Division for Kalimantan Region, PT PLN (Persero) Head Office (2015-2017)
- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Java Bali Plants Unit (2015)
- ▶ General Manager PT PLN (Persero) South Sumatra Plant (2012-2015)

**Hariyadi Krimiyanto**

Kepala Divisi Konstruksi Regional Kalimantan  
Head of Regional Construction Division for Kalimantan Region

## Riwayat Pendidikan :

- ▶ S1 Teknik Nuklir, Universitas Gadjah Mada (1993)
- ▶ S2 Manajemen Bisnis, Institut Teknologi Bandung (2001)

## Riwayat Pekerjaan :

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Ix (2015)
- ▶ Senior Engineer I Konstruksi ApbnPT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan X (2013-2014)
- ▶ Manajer Bidang Perencanaan, PT PLN (Persero) Pembangunan Kalimantan Dan Nusa Tenggara (2010-2013)

## Educational Background :

- ▶ Bachelor In Nuclear Engineering, Universitas Gadjah Mada (1993)
- ▶ Master of Business Management, Institut Teknologi Bandung (2001)

## Employment History :

- ▶ General Manager of PT PLN (Persero) Construction Unit Ix (2015)
- ▶ Senior Engineer I of Apbnpt, PT PLN (Persero), Construction Unit X (2013-2014)
- ▶ Manager In The Field of Planning, PT PLN (Persero) for Generators In Kalimantan and Nusa Tenggara (2010-2013)

**Rudy Hendra Prastowo**

Kepala Divisi Operasi Regional Kalimantan  
Head of Regional Operations Division for Kalimantan Region

## Riwayat Pendidikan:

- ▶ S1 Teknik Mesin, Institut Teknologi Bandung (1983)
- ▶ S2 Manajemen Teknik, Institut Teknologi Bandung (2000)
- ▶ S2 Manajemen Bisnis, Universiti Tenaga Nasional (2004)

## Riwayat Pekerjaan:

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi (2016-2017)
- ▶ Kepala Satuan Teknologi PJB (2015-2016)
- ▶ Kepala Satuan Pengadaan & Logistik PJB (2012-2015)

## Educational Background

- ▶ Bachelor degree in Mechanical Engineering, Institute of Technology Bandung (1983)
- ▶ Master degree in Engineering Management, Institute of Technology Bandung (2000)

## Employment History

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Certification Center (2016-2017)
- ▶ Head of PJB Technology Unit (2015-2016)
- ▶ Head of PJB Procurement & Logistic Unit (2012-2015)

## Pejabat Senior – Satu Tingkat Dibawah Direksi

Senior Executives – One Level Below the Board of Directors

### DIREKTORAT BISNIS REGIONAL SULAWESI

Directorate of Sulawesi Regional Business



**Idian**  
Kepala Divisi Pengembangan Regional Sulawesi  
Head Of Regional Development Division For Sulawesi  
Region

Riwayat Pendidikan :

- ▶ S1 Teknik Elektro, Universitas Sriwijaya (1986)
- ▶ S2 Teknik Elektro, Universitas Gadjah Mada (2006)

Riwayat Pekerjaan :

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (2016)
- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XIII (2015-2016)
- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XI (2015)

Educational Background :

- ▶ Bachelor of Electrical Engineering, Universitas Sriwijaya (1986)
- ▶ Master of Electrical Engineering, Universitas Gadjah Mada (2006)

Employment History :

- ▶ General Manager of PT PLN (Persero) for the Construction Unit of South Sulawesi Region (2016)
- ▶ General Manager of PT PLN (Persero) for the Construction Unit XIII (2015-2016)
- ▶ General Manager of PT PLN (Persero) for the Construction Unit XI (2015)



**Didik Mardiyanto**  
Kepala Divisi Konstruksi Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara  
Head of Regional Construction Division for Sulawesi and Nusa Tenggara Region

Riwayat Pendidikan:

- ▶ S1 Teknik Sipil, Universitas Gajah Mada (1987)
- ▶ S1 Ekonomi, UT (1997)
- ▶ S2 Manajemen, Curtin University of Technology (2006)

Riwayat Pekerjaan:

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Konstruksi (2014-2017)
- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I (2013-2014)
- ▶ Manajer Senior Rekrutmen dan Seleksi PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2010-2011)

Educational Background

- ▶ Bachelor degree in Civil Engineering, University of Gadjah Mada (1987)
- ▶ Bachelor degree in Economics, UT (1997)
- ▶ Master degree in Management, Curtin University of Technology (2006)

Employment History

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Construction Management Center (2014-2017)
- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Development Holding Unit I (2013-2014)
- ▶ Senior Manager of Recruitment and Selection PT PLN (Persero) Head Office (2010-2011)



**Mursalin**  
Kepala Divisi Operasi Regional Sulawesi  
Head Of Regional Operation Division For Sulawesi  
Region

Riwayat Pendidikan :

- ▶ S1 Teknik Mesin, Universitas Syiah Kuala (1989)
- ▶ S2 Manajemen Sumber Daya Manusia, Universitas Hasanuddin (2009)

Riwayat Pekerjaan :

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (2014-2015)
- ▶ Senior Specialist I Kinerja PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (2011-2014)

Educational Background :

- ▶ Bachelor of Mechanical Engineering, Universitas Syiah Kuala (1989)
- ▶ Master of Human Resources Management, Universitas Hasanuddin (2009)

Employment History :

- ▶ General Manager of PT PLN (Persero) for South Kalimantan Selatan and Central Kalimantan (2014-2015)
- ▶ Senior Performance Specialist I of PT PLN (Persero) South Kalimantan and Central Kalimantan (2011-2014)

### DIREKTORAT BISNIS REGIONAL MALUKU & PAPUA

Directorate Maluku & Papua Regional Business



**Hot Martua Bakara**  
Kepala Divisi Pengembangan Regional Maluku dan Papua  
Head Of Regional Development Division Of Maluku And Papua Region

Riwayat Pendidikan :

- ▶ S1 Teknik Elektro, Universitas Tanjung Pura (1993)

Riwayat Pekerjaan :

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat (2013-2015)
- ▶ Manajer Senior Hubungan Internasional PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2010-2013)
- ▶ Senior Specialist II Proyeksi Keuangan PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2008-2010)

Educational Background :

- ▶ Bachelor of Electrical Engineering, Universitas Tanjung Pura (1993)

Employment History :

- ▶ General Manager of PT PLN (Persero) for West Kalimantan Region (2013-2015)
- ▶ Senior Manager of International Relations, PT PLN (Persero) Head Office (2010-2013)
- ▶ Senior Specialist II for Financial Projections, PT PLN (Persero) Head Office (2008-2010)



**Indradi Setiawan**  
Kepala Divisi Operasi Regional Maluku dan Papua  
Head of Regional Operations Division for Maluku and Papua Region

Riwayat Pendidikan:

- ▶ S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1986)
- ▶ S2 Manajemen, STIE Ipwija (2002)

Riwayat Pekerjaan:

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Maluku Dan Maluku Utara (2015-2017)
- ▶ Manajer Senior Manajemen Aset Distribusi, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2014-2015)
- ▶ Kepala Bidang Program Strategis, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2011-2014)

Educational Background

- ▶ Bachelor degree in Electrical Engineering, Institute of Technology Sepuluh Nopember (1986)
- ▶ Master degree in Managemen, STIE IPWUJA (2002)

Employment History

- ▶ General Manager PT PLN (Persero) Maluku and North Maluku Region (2015-2017)
- ▶ Senior Manager Distribution Asset Management, PT PLN (Persero) Head Office (2014-2015)
- ▶ Head of Strategic Program, PT PLN (Persero) Head Office (2011-2014)

# PRINSIP KESETARAAN GENDER

## Gender Equality Principle

Perusahaan memiliki kebijakan untuk rekrutmen, penilaian kinerja, remunerasi, dan *career path* secara profesional tanpa membedakan *gender* dan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

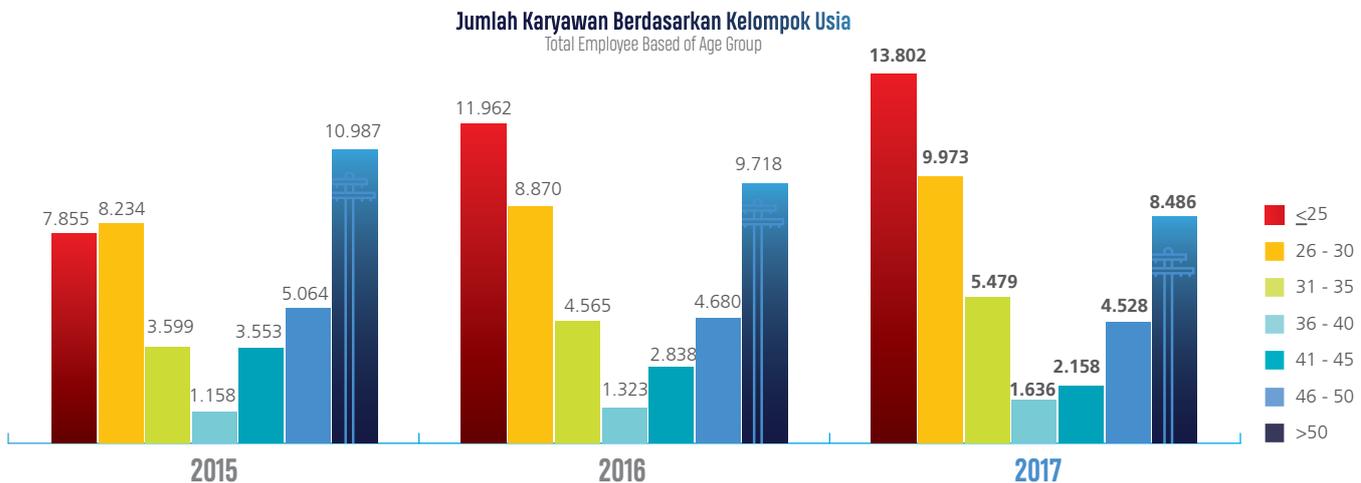
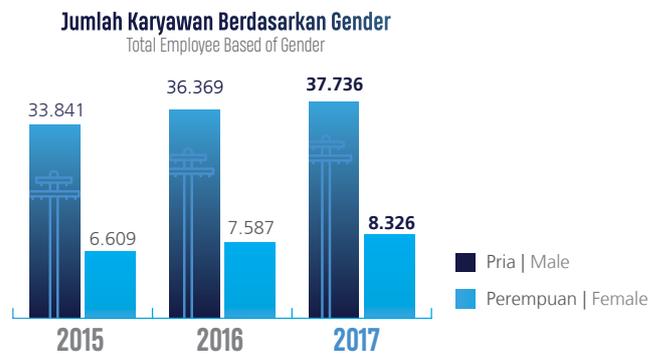
The Company has professional policies on recruitment, performance assessment, remuneration and career path regardless of gender and ethnicity, religion, race, and intergroup (SARA).

### KESETARAAN GENDER DALAM BEKERJA

Pada tahun 2017, total jumlah pegawai PLN adalah sebesar 54.820 yang terbagi atas pegawai holding (46.062) dan pegawai anak perusahaan (8.758). Komposisi Pegawai PLN berdasarkan *gender* menunjukkan data bahwa 81,91% pegawai adalah berjenis kelamin pria pada tahun 2017, menurun dari 82,74% di tahun 2016 dan 83,66% di tahun 2015. Angka di atas menunjukkan bahwa Perusahaan menerapkan prinsip non-diskriminasi dalam sisi rekrutmen. Mayoritas pegawai berjenis kelamin pria semata-mata karena sifat usaha yang lebih banyak berlangsung di lapangan yang membuat kebutuhan pegawai pria menjadi lebih dominan.

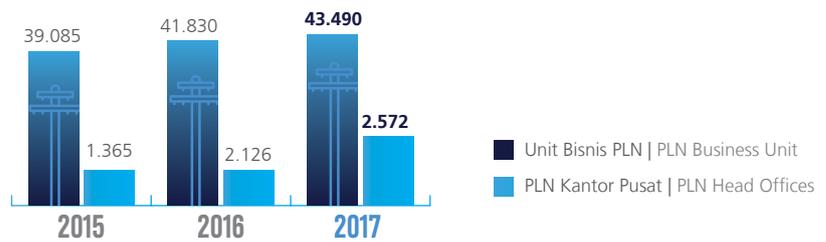
### GENDER EQUALITY IN WORK ENVIRONMENT

In 2017, total PLN employee was 54,820 divided by holding employees (46,062) and subsidiaries employees (8,758). The composition of PLN employees based on gender indicates that 81.91% employees are in the male gender in 2017, decreased from 82.74% in 2016 and 83.66% in 2015. This number indicates that the Company implements non-discrimination principle in recruitment. The majority of male gender employees is merely due to the nature of business that are executed in the field hence the need of male employees is more dominants.

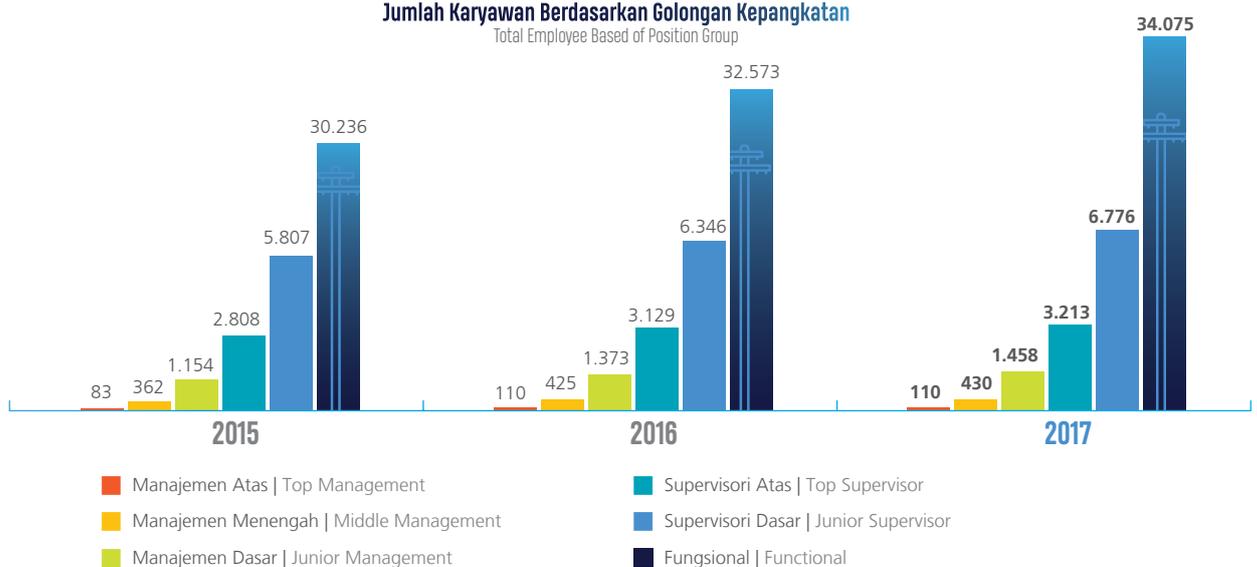


Prinsip Kesetaraan Gender  
Gender Equality Principle

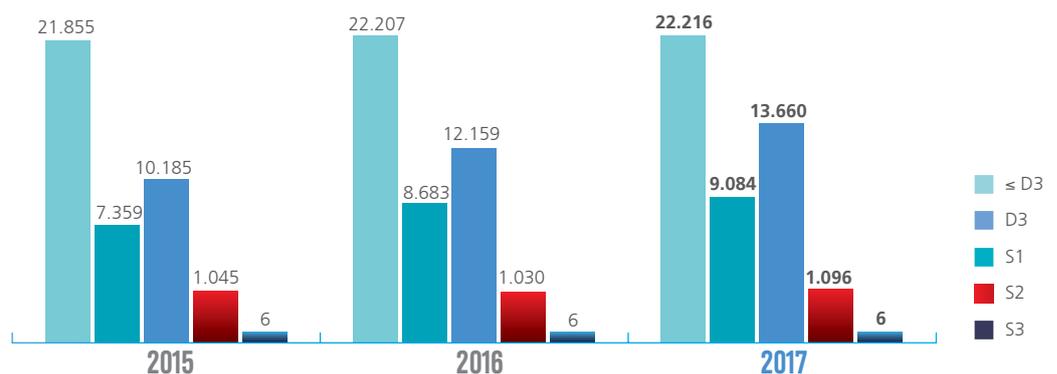
Jumlah Karyawan Berdasarkan Level Organisasi  
Total Employee Based of Organization Level



Jumlah Karyawan Berdasarkan Golongan Kepangkatan  
Total Employee Based of Position Group

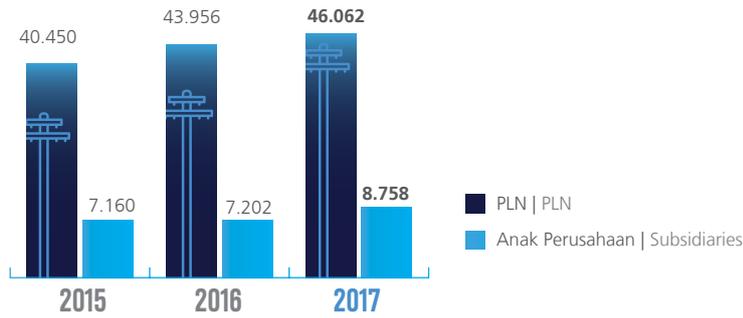


Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Total Employee Based of Education Level

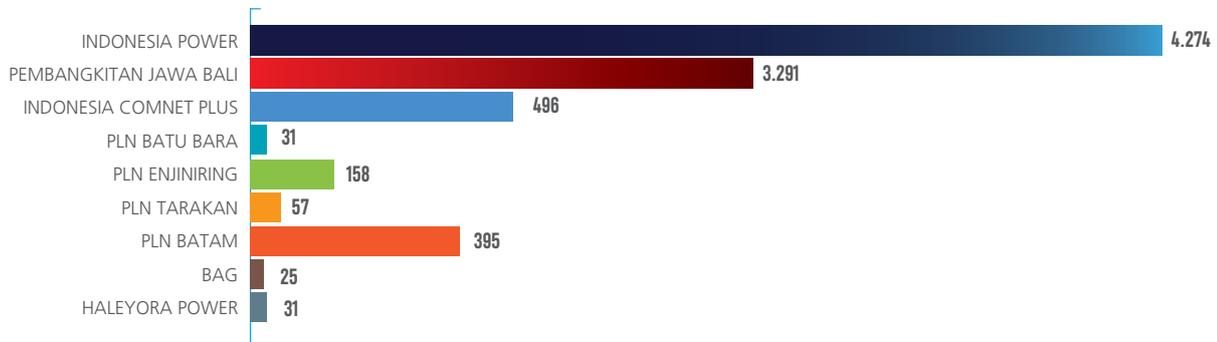


Prinsip Kesetaraan Gender  
Gender Equality Principle

**Jumlah Karyawan Holding & Anak Perusahaan**  
Total Employees in Holding & Subsidiaries



**Jumlah Pegawai Anak Perusahaan**  
Total Employees of Subsidiaries



## Prinsip Kesetaraan Gender

Gender Equality Principle

### Tingkat Perputaran Pegawai

Dengan berbagai upaya pengelolaan SDM yang dilakukan secara adil, transparan dan berimbang, PLN berhasil menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi segenap pegawai. Hal ini dapat dilihat dari relatif rendahnya tingkat turn-over pegawai. Pada Tahun 2017 tercatat 158 pegawai keluar dengan rincian 135 pegawai mengundurkan diri dan 23 pegawai diputus hubungan kerja, berarti mencapai 0,34% dari total 46.062 pegawai.

Pada tahun 2017, tercatat 2.098 pegawai keluar karena pensiun. Sementara itu, PLN merekrut 4.484 pegawai untuk berbagai posisi tertentu.

### Employee Turnover Level

Through HR management efforts conducted in fairness, transparent and balance, PLN succeeded in creating favorable working environment for all employees. This can be seen from the relatively low of employee's turnover level. In 2017, 158 employees were resigned with 135 were personally resigned and 23 through work termination, making it 0.34% from the total of 46.062 employees.

In 2017, a total of 2,098 employees were resigned due to retirement. While, PLN has recruited a total of 4,484 employees for certain positions.



# PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI

## Competence Development Program

Perusahaan terus menerus berupaya menumbuh kembangkan kompetensi dan potensi yang diperlukan PLN dalam bisnis ketenagalistrikan di Indonesia saat ini dan mendatang, serta memastikan bahwa proses pembelajaran potensi insani PLN ditransformasikan untuk mewujudkan kinerja unggul. Selanjutnya dalam mewujudkan transformasi proses pembelajaran yang memberikan dampak pada peningkatan kinerja korporat maka ditetapkan PLN Corporate University (PLN CorpU) sebagai unit bisnis.

Seiring dengan perubahan situasi internal maupun eksternal, PLN CorpU melakukan pendefinisian kembali visi dan misi PLN CorpU agar dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran dan memberikan solusi terbaik terhadap persoalan yang dihadapi unit operasional dan korporat. Jika sebelumnya pada periode 2013 – 2017, Visi PLN CorpU adalah untuk Menjadi pusat pendidikan setara kelas dunia dalam menyiapkan insan PLN yang profesional, bersemangat, dan berintegritas guna mendukung penciptaan nilai korporasi yang berkelanjutan, maka pada periode 2018 – 2022 PLN CorpU menetapkan Visi untuk “Menjadi pusat pengembangan kompetensi ketenagalistrikan setara kelas dunia dalam menyiapkan tenaga kerja sektor ketenagalistrikan yang profesional guna mendukung penciptaan nilai korporasi yang berkelanjutan”.

Sehubungan dalam mendukung target tahun 2020, untuk menjadi Total Learning Solution serta menjawab tantangan dan strategi korporat kedepan, sehingga PLN CorpU dalam pelayanannya berfokus pada

1. *Speed, Quality dan Agility*
2. Meningkatkan efektivitas pembelajaran
3. Penguatan dan peningkatan peran Unit Assessment Center dan Unit Sertifikasi agar menjadi Unit Bisnis Mandiri pada Tahun 2022 dengan penciptaan value baru bagi korporasi.

The Company continuously strives to develop competency and potential required by PLN in the current and future electricity business in Indonesia, as well as ensuring that PLN employees' potential learning process are transformed to realize excellent performance. Furthermore, in realizing learning process transformation that resulted in improved corporate performance, PLN then set the Corporate University (PLN CorpU) as business unit.

Align with the internal and external changes, PLN CorpU has redefined the PLN CorpU vision and mission in order to address learning needs and provide the best solutions on the issues experienced by the operational and corporate units. The previous vision of PLN CorpU for the period of 2013 – 2017 was to Become a world class education center in preparing professional, spirit, and integrity PLN employee in order to support the creation of sustainable corporate value. For the period of 2018 – 2022, PLN CorpU has set the Vision to “Become a world class electricity competence development center in preparing professional manpower in electricity sector in order to support the creation of sustainable corporate values”.

To support the 2020 target, to become a Total Learning Solution and to answer future corporate challenges and strategies, in its services PLN CorpU is focusing on:

1. *Speed, Quality and Agility*
2. Improving learning effectiveness
3. Strengthening and improving the role of Assessment Center Unit and Certification Unit in order to become Independent Business Unit in 2022 by creating new corporate value.

## Program Pengembangan Kompetensi Competence Development Program

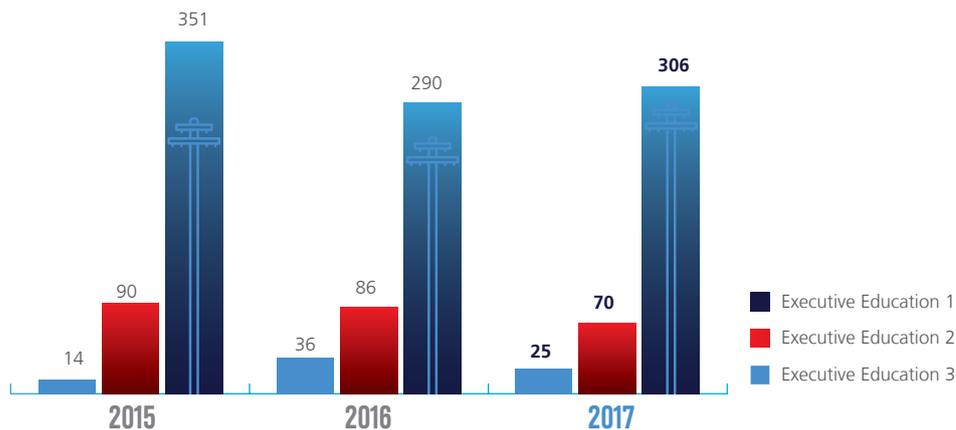


## PROGRAM KEPEMIMPINAN PLN

### PLN Leadership Program

Dalam rangka menciptakan *leader-leader* baru, Perusahaan merealisasikan Program Kepemimpinan bernama program *Executive Education*, yang terdiri dari: *Executive Education I* untuk level manajemen atas, *Executive Education II* untuk level manajemen menengah, dan *Executive Education III* untuk level manajemen dasar. Di tahun 2017, sebanyak 401 pegawai mengikuti program *Executive Education I,II,III* yang disesuaikan dengan kebutuhan jabatan saat itu.

In an effort to create new leaders, the Company manifests Leadership Program called Executive Education, which consists of: Executive Education I for top management level, Executive Education II for middle management level, and Executive Education III for junior management level. In 2017, a total of 401 employees were participated in the Executive Education I, II, III that adjusted with the position requirements.



### Data Pengembangan Kompetensi Karyawan.

Secara total, pada tahun 2017, PLN telah melaksanakan program-program pelatihan baik yang berasal dari internal PLN, Anak Perusahaan, maupun pihak eksternal, dengan total realisasi anggaran diklat sebesar Rp847,53 Miliar.

### Employees Competencies Development

In total, PLN has implemented internal training programs in 2017 including from subsidiaries and external parties, with a total actual budget of Rp847.53 billion.

## KNOWLEDGE MANAGEMENT

### Knowledge Management

PLN menyadari keberhasilan suatu korporasi untuk menjadi perusahaan yang unggul dan berkualitas kelas dunia pada dasarnya bukan disebabkan oleh banyaknya tangible asset yang dimiliki perusahaan tersebut, namun juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan yang merupakan salah satu *intangible asset* berharga. Semakin maju kualitas dan tingkat pengetahuan karyawan yang dapat ditransformasikan menjadi pengetahuan organisasi, maka akan semakin mudah pula bagi perusahaan itu untuk menghasilkan inovasi dan nilai tambah bisnis, dan pada akhirnya memenangkan kompetisi bisnisnya.

Oleh karena pentingnya pengelolaan pengetahuan tersebut, selain mengembangkan *Corporate University*, sejak beberapa tahun terakhir PLN melaksanakan program-program *Knowledge Management* untuk membangun Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*). Dengan *Knowledge Management*, diharapkan aliran pengetahuan di Perusahaan akan makin lancar dan berkembang, sehingga memungkinkan terciptanya insan-insan pekerja PLN yang kompeten, produktif, inovatif, dan responsif terhadap perkembangan bisnis.

PLN realizes the success of a corporation to become an excellent entity and a world class quality is basically not because of notable tangible assets recorded by such companies, however its also influenced by knowledge level that become one of the valued intangible assets. The more progressive is the employees' quality and knowledge level that can be transformed into organization knowledge, then it will also be more easier for the company to deliver business innovation and added value, and eventually to win its business competitions.

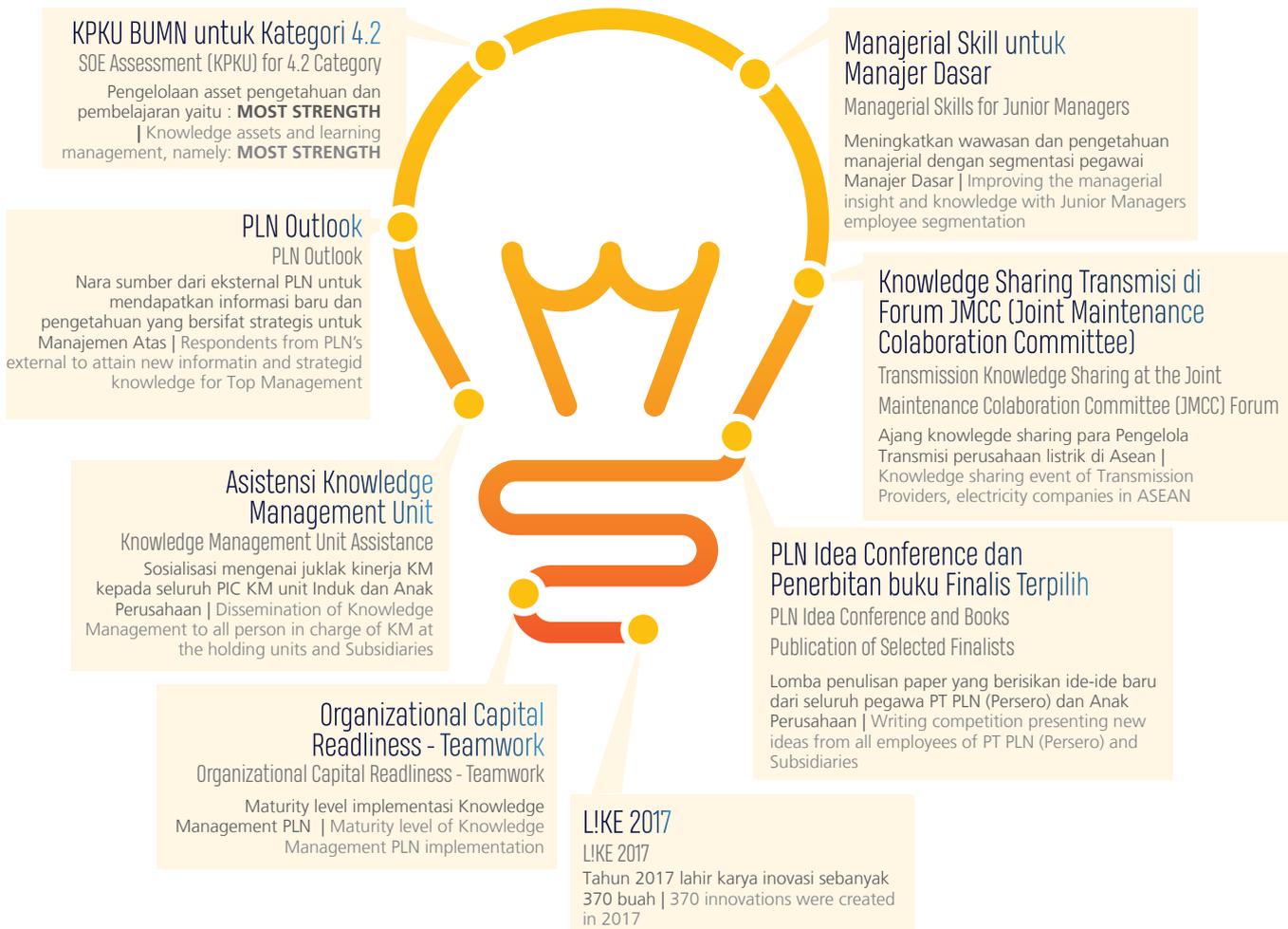
Due to the importance of such knowledge management, in addition to developing the Corporate University, PLN in the last couple of years implements Knowledge Management programs to develop Learning Organization. With Knowledge Management, it is expected the progress of knowledge in the Company will increasingly efficient and developing, hence enabling the creation of competent, productive, innovative and responsive employees toward business development.



Knowledge Management  
Knowledge Management

**Implementasi Knowledge Management Tahun 2017**

Knowledge Management Implementation in 2017

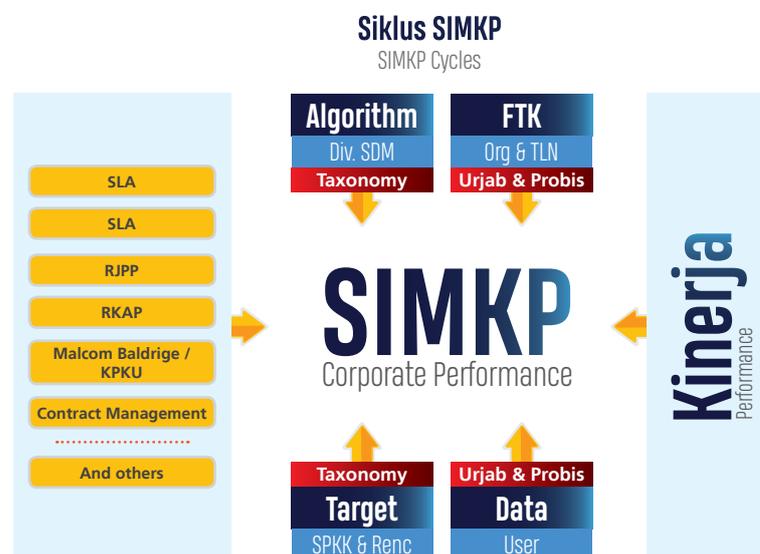


## SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI (SIMKP)

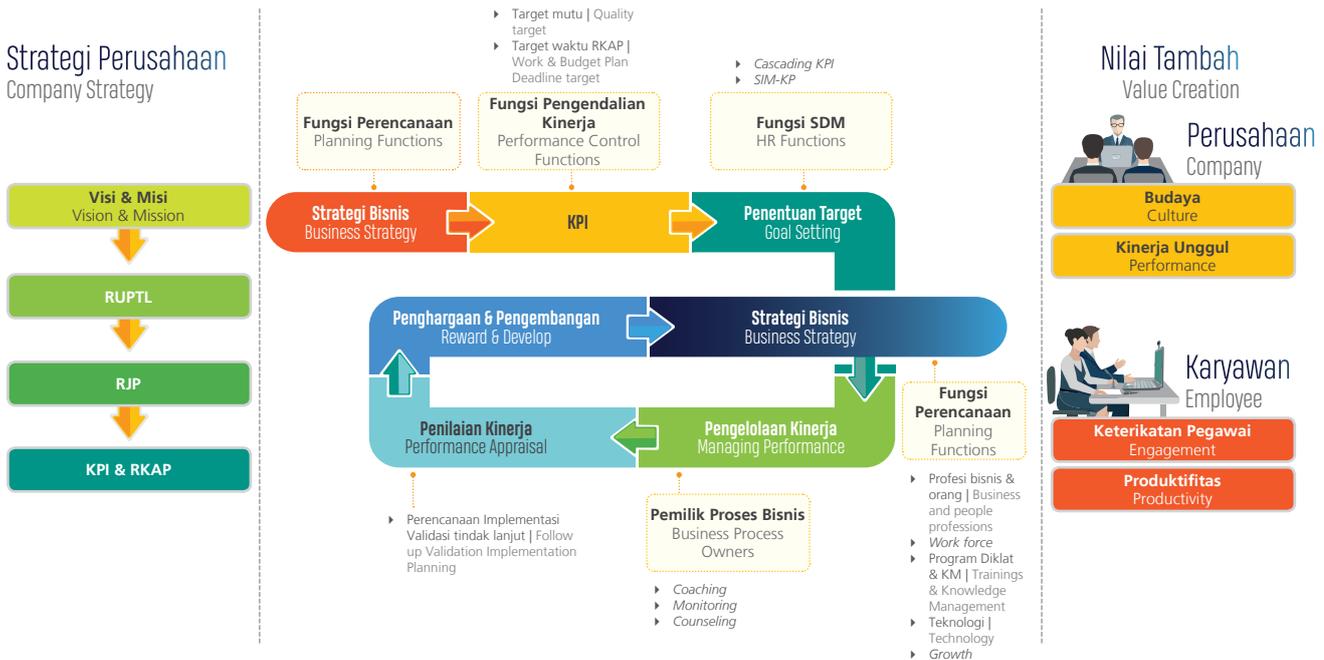
### Employee Performance Management System (SIMKP)

Perusahaan memiliki Sistem Manajemen Kinerja Pegawai (SIMKP) sebagai sebuah aplikasi *online system* yang digunakan untuk mengukur dan *monitoring* kinerja pegawai secara obyektif, transparan dan terukur sehingga terjadi keselarasan dengan kinerja korporat dan strategi perusahaan. Tujuan aplikasi ini adalah untuk menciptakan budaya kinerja Pegawai melalui penyelarasan dan pemahaman bersama antara Perusahaan dan Pegawai mengenai tujuan yang harus dicapai melalui *cascading* KPI dan penetapan target yang akurat, serta cara mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut sehingga penilaian kinerja yang dilakukan dapat membangun dan membina budaya pembelajar dan berprestasi serta memotivasi Pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan kontribusi Pegawai bagi Perusahaan.

The Company has in place the Employee Performance Management System (SIMKP) as an online application system used to objectively measure and monitoring the employees' performance, which subsequently aligning the corporate performance and company's strategy. This apps aims at creating Employee performance culture by harmonizing and comprehension of the Company and Employee on the goals achievements through cascading KPI and accurate target determination, including methods to optimize resources thereby the performance assessment can build and foster the learning culture and achievement as well as motivate the Employee to improve competency and contribution to the Company.



## Sistem Manajemen Kinerja Pegawai (SIMKP) Employee Performance Management System (SIMKP)



### PELAKSANAAN SIMKP

Proses pelaksanaan SIMKP dibagi menjadi 3 tahap :

1. Tahap Perencanaan Kinerja Pegawai (PKP)  
Merupakan tahap penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai yang dilakukan pada awal tahun. Sasaran kinerja disusun berdasarkan hasil *cascading* KPI dari strategi organisasi yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.
2. Tahap Revisi Kinerja Pegawai (RKP)  
Merupakan siklus dimana atasan dan pegawai mengkomunikasikan aktifitasnya di pertengahan semester terkait:
  - a. Pencapaian KPI
  - b. *Coaching, mentoring, dan counseling.*
  - c. Revisi sasaran kinerja pegawai.

### SIMKP IMPLEMENTATION

SIMKP implementation process is divided into 3 stages:

1. Employee Performance Planning Stage (PKP)  
The Employee Performance Target development stage conducted at the beginning of the year. The performance targets are developed based on the cascading KPI results from organization strategy related with principal duties and organizational functions.
2. Employee Performance Revision Stage (RKP)  
A cycle in which the supervisors and employees communicate their activities at mid year, on the:
  - a. KPI Achievements
  - b. Coaching, mentoring, and counseling
  - c. Revision of Employees Performance Evaluation (EKP)

## Sistem Manajemen Kinerja Pegawai (SIMKP) Employee Performance Management System (SIMKP)

3. Tahap Evaluasi Kinerja Pegawai (EKP)  
Merupakan tahapan dimana atasan melakukan evaluasi terhadap sasaran kinerja pegawai termasuk program pengembangan diri pegawai dan pengukuran kompetensi dalam kurun waktu 1 semester. Pengukuran kompetensi pegawai secara individu dilakukan melalui pengisian kuisioner kompetensi dari atasan langsung yang mengacu terhadap direktori kompetensi PLN.

Dari hasil pengukuran kinerja pegawai tersebut akan terbit Kriteria Talenta yang disetujui oleh Komite *Appraisal*. Atas kriteria talenta tersebut, Pegawai mendapatkan penghargaan atas prestasi kerja dan kontribusinya dalam mencapai sasaran kinerja pegawai sesuai KPI dan peningkatan kompetensi individu sesuai kebutuhan perusahaan berupa *Pay For Performance* 1 (P3-1) dengan besaran yang ditetapkan melalui keputusan direksi.

3. A stage where the supervisors conduct evaluation on employee performance targtes including self development program and competencies measurement within 1 semester. The individual competence measurement is carried out by completing the competency questionnaires by direct supervisor referring to PLN competency directory.

The results then will be rendered by issuance of agreed Talent Criteria approved by the Appraisal Committee. On such talent criteria, the Employees will attain award on work achievements and their contributions in achieving employees' performance target according to KPI and individual competence enhancement based on the company's requirements in terms of Pay For Performance 1 (P3-1) with the amount approved by the Decree of the Board of Directors.

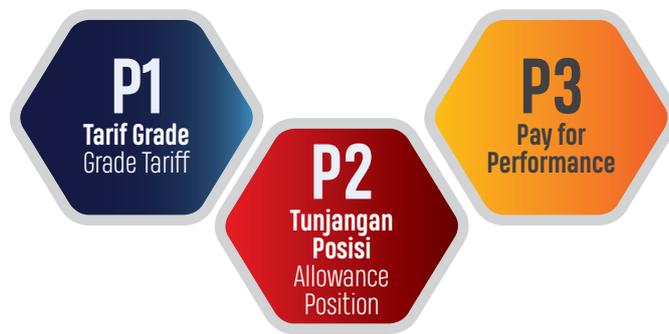


# REMUNERASI

## Remuneration

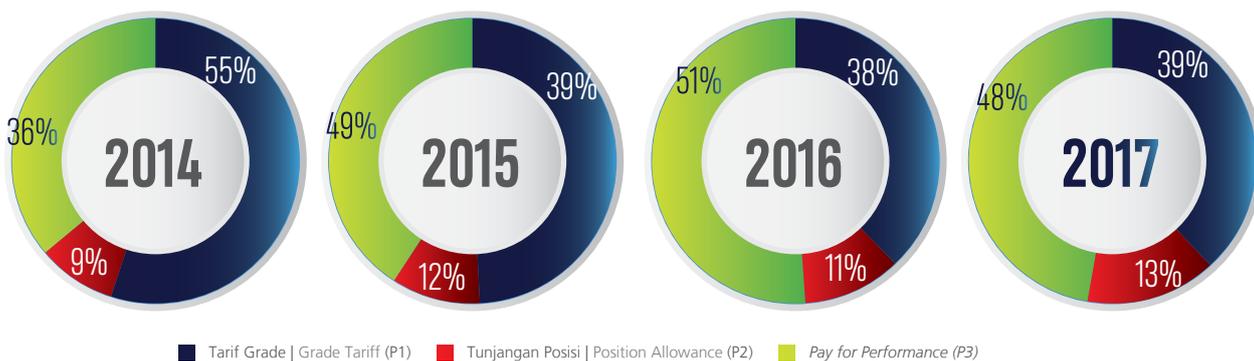
Di tahun 2017 mulai ditajamkan kembali pemberian Remunerasi yang memiliki sifat *Performance based Remuneration* sejak 2015.

In 2017, the Remuneration is again being sharpened by conducting Performance based Remuneration since 2015.



Sehingga seluruh parameter dalam Total Earning tahunan menjadi lebih banyak yang berdasarkan performansi pegawai tersebut dibandingkan dengan sesuatu yang dipastikan dapat oleh pegawai tersebut (*Fix Annual Cash*). Jika dilihat dari penganggaran Biaya Kepegawaian akan terlihat sebagai berikut:

Thereby all parameters under the annual Total Earnings is expanded based on such employees performance compared to fix annual cash. The following charts illustrate If seen from the Employment cost budgeting:



Besaran untuk penghasilan yang *Performance based* sudah di angka sekitar 50% dari Total Earning yang didapatkan dalam 1 tahun selain *Pay for Person* (P1)/ Penghasilan tetap berdasarkan kompetensi dan *Pay for Position* (P2)/Tunjangan untuk menyelesaikan pekerjaannya atau tunjangan jabatan dan tunjangan kemahalan daerah. Pada tahun 2017 kembali membesar pada P1 dan P2 dikarenakan banyaknya rekrutmen yang dilakukan oleh PLN untuk keperluan 35 GW. Parameter yang sudah menggunakan *performance based* salah satunya *Pay for Performance-1* (P3-1). Berikut Realisasi *Pay for Performance-1* (P3-1) PLN.

The amount for around 50% performance based from Total Earning attained within 1 year in addition to *Pay for Person* (P1)/fixed Income based on competency and *Pay for Position* (P2)/Allowance to complete the work or regional position allowance and living allowance. In 2017, the P1 and P2 were increased due to additional recruitments by PLN tu support 35 GW. One of the parameters that use performance based was *Pay for Performance-1* (P3-1). The following is PLN actual *Pay for Performance-1* (P3-1).

Remunerasi  
Remuneration

Tahun   Year	Anggaran Tahunan   Annual Budget	Semester 1   Quarter 1	Semester 2   Quarter 2
2017	2.520.900.211.246	1.128.998.882.263	1.391.901.328.983
2016	2.411.638.103.875	914.598.458.938	1.303.109.101.567

## KOMPONEN REMUNERASI PEGAWAI | EMPLOYEE REMUNERATION COMPONENTS

Komponen Remunerasi	Ya   Yes	Tidak   No	Remuneration Component
Upah	√	-	Wages
Insentif Bulanan	-	√	Monthly Incentive
Tunjangan Transport	√	-	Transportation Allowance
Lembur	-	√	Overtime
Insentif Manajemen	-	√	Management Incentive
Insentif Local	-	√	Local Incentive
Tunjangan Shift	√	-	Shift Allowance
Tunjangan Risiko Kerja	√	-	Work Risk Allowance
Piket	√	-	Watchman
Tunjangan Khusus	-	√	Special Allowance
Insentif Tahunan	-	√	Annual Incentive
Insentif Pencapaian Target	√	-	Target Achievement Incentive
Insentif Kerja Tahunan	√	-	Annual Work Incentive
Cuti	√	-	Leave
Tunjangan Hari Raya	√	-	Religious Allowance
Manfaat	√	-	Benefits
Jaminan Kesehatan	√	-	Health Assurance
BPJS Kesehatan	√	-	BPJS Health
BPJS Ketenagakerjaan	√	-	BPJS Employment
Dana Pensiun	√	-	Pension Fund
Asuransi Kesehatan	-	√	Health Insurance

## KEPESERTAAN PADA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Per 31 Desember 2017, PT PLN (Persero) telah mendaftarkan 41.620 Pegawai dan 36.594 anggota keluarganya pada program JKN KIS dari BPJS Kesehatan. Iuran Pemberi Kerja yang dikeluarkan oleh PLN dalam rangka mengikuti program BPJS Kesehatan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 58.547.960.960,-. Sebagai informasi, pendaftaran kepesertaan Direksi dan Dewan Komisaris PT PLN (Persero) pada program BPJS Kesehatan dilaksanakan pada Bulan Maret 2018.

## PARTICIPATION IN THE NATIONAL HEALTH WARRANTY PROGRAM (JKN)

As of December 31, 2017, PT PLN (Persero) has registered 41,620 employees and 36,594 family members on the JKN KIS program from BPJS Kesehatan. Contribution of Employers issued by PLN in order to follow the BPJS Kesehatan Program in 2017 is Rp. 58,547,960,960, -. For information, registration of membership of Board of Directors and Board of Commissioners of PT PLN (Persero) in BPJS Health program has been implemented in March 2018.

# SINERGI HUBUNGAN INDUSTRIAL

## Industrial Relations Synergy



PLN berupaya membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan melalui sarana-sarana hubungan industrial.

1. Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKS Bipartit)  
Lembaga Kerjasama Bipartit ("LKS Bipartit") merupakan forum komunikasi dan konsultasi sebagai salah satu upaya mengoptimalkan sarana hubungan industrial untuk mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan Manajemen, mencari alternatif solusi kendala-kendala yang mungkin dan/atau telah terjadi serta mendapatkan masukan untuk perbaikan dalam meminimalisir potensi permasalahan hubungan industrial yang mungkin terjadi. PLN menetapkan LKS Bipartit di seluruh Unit PLN sebagai *Key Performance Indicator* (KPI) dalam *Organization Capital Readiness* (OCR) tahun 2017. Tahapan kinerja LKS Bipartit yaitu Pembentukan, Pendaftaran, Pelaksanaan dan Pelaporan.

PLN strives to develop harmonious, dynamic and justified industrial relations through industrial relations facilities.

1. Bipartite Cooperation Agency (LKS Bipartite)  
The Bipartite Cooperation Agency (LKS Bipartite) is a communication and consultation forum as one of the efforts to optimize industrial relations facility to communicate the Management policies, finding alternative solutions on possible and/or occurred obstacles, as well as obtaining inputs for improvements in minimizing possible industrial relations issues potentials. PLN sets the LKS Bipartite in all PLN Units as *Key Performance Indicators* (KPI) in the *Organization Capital Readiness* (OCR) in 2017. The LKS Bipartite performance stages include Establishment, Registration, Implementation and Reporting.

Sinergi Hubungan Industrial  
Industrial Relations Synergy

## 2. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

PLN telah memulai tahapan awal rangkaian perundingan dalam rangka penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Untuk maksud tersebut Perseroan telah menyusun materi perundingan PKB dan melakukan pembekalan kepada Tim Perunding PKB, baik dari unsur manajemen maupun unsur serikat pekerja.

Tim Perunding PKB dari Perseroan tersebut dibentuk dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0088.K/DIR/2015 tanggal 15 April 2015 kemudian diubah dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0139.K/DIR/2015 tanggal 24 Juni 2015.

Sementara PKB yang baru masih dalam tahap perundingan, maka yang saat ini berlaku adalah PKB 2010-2012 beserta Addendumnya yang ditanda tangani pada tanggal 11 Oktober 2013. Perundingan PKB beberapa kali terhenti dikarenakan adanya dinamika organisasi serikat pekerja di PT PLN (Persero).

## 3. Serikat Pekerja

Dinamika serikat pekerja di lingkungan PT PLN (Persero) dalam beberapa tahun terakhir ini mengakibatkan adanya 4 (empat) serikat pekerja. Manajemen mendorong keempat serikat pekerja untuk bersatu guna memudahkan mekanisme hubungan industrial antara manajemen perseroan dengan serikat pekerja.

## 4. Pembinaan Hubungan Industrial

Dalam mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, PLN menetapkan Pembinaan hubungan industrial di seluruh Unit PLN sebagai salah satu *Key Performance Indicator* (KPI) dalam target *Organization Capital Readiness* (OCR) tahun 2017. Tujuan dari pembinaan hubungan industrial tersebut untuk mengedukasi pegawai dan pengelola hubungan industrial di Unit agar memiliki pemahaman terkait ketentuan hubungan industrial dan dapat mempraktekkan hubungan industrial sesuai ketentuan yang berlaku.

## 2. Collective Labor Agreement (CLA)

PLN has begun the initial stage of discussion series in developing the Collective Labor Agreement (CLA). For this purpose, the Company has developed CLA discussion materials and conducted training for the CLA Mediator Team, from the management and labor union.

The Company's CLA Mediator Team is established by the Board of Directors' Decree of PT PLN (Persero) No. 0088.K/DIR/2015 dated 15 April 2015 that in lieu of the Board of Directors' Decree of PT PLN (Persero) No. 0139.K/DIR/2015 dated 24 June 2015.

The new CLA is still undergoing the discussion, thereby the current valid CLA is for the period of 2010-2012 and its Addendum signed on 11 October 2013. The CLA discussion was delayed several times due to the labor union organization dynamics in PT PLN (Persero).

## 3. Labor Union

The dynamics of labor union in PT PLN (Persero) environment in the last couple of years resulted in the creation of 4 (four) labor unions. The Management encourages these labor unions to merge in order to facilitate industrial relations mechanisms between the Company's management with labor union.

## 4. Industrial Relations Mentoring

In creating harmonious, dynamic and just Industrial Relations, PLN sets industrial relations mentoring in all PLN Units as one of Key Performance Indicators (KPI) in the 2017 Organization Capital Readiness (OCR) target. The Industrial Relations aims at educating employees and industrial relations administrators in Units in order to understand the rules and able to practices the industrial relations according to the prevailing regulations.

## Sinergi Hubungan Industrial

### Industrial Relations Synergy

Untuk mempercepat penyamaan pengetahuan tentang hubungan industrial dilakukan juga pembinaan dengan cara pendidikan dan pelatihan hubungan industrial di lingkungan PT PLN (Persero) yang dilaksanakan oleh internal maupun eksternal PLN. Selain itu, juga dilaksanakan studi banding (*benchmarking*) ke beberapa perusahaan untuk mendapatkan *best practices* terkait pengelolaan hubungan industrial.

5. Forum Hubungan Industrial  
Forum Hubungan Industrial baru pertama kali diadakan pada tanggal 20-21 November 2017 di Yogyakarta yang dibuka oleh Direktur *Human Capital Management* PLN. Forum Hubungan Industrial dilakukan sebagai upaya untuk menampung dan saling bertukar informasi segala aspirasi, keluhan, kesulitan dan sebagainya terkait hal yang menjadi permasalahan hubungan industrial yang terjadi. Dalam Forum Hubungan Industrial diundang beberapa Manajer Unit Pelaksana dan pengelola hubungan industrial di Unit, dengan menghadirkan narasumber dari Kemnaker RI, Akademisi dan Praktisi.
6. Penegakkan Peraturan Disiplin Pegawai  
Dalam rangka penegakkan peraturan disiplin pegawai dan mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan PT PLN (Persero), Manajemen PLN telah menindak tegas dan memberikan sanksi disiplin kepada para pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

## EMPLOYEE ENGAGEMENT SURVEY (EES)

Hasil survey engagement tahun 2017 menyatakan keterikatan pegawai PLN dalam kondisi baik. Memang terjadi penurunan skor indikator *Job Satisfaction* sehingga berdampak juga pada penurunan tingkat *engagement* pegawai, namun terjadi peningkatan signifikan pada indikator *Job Demand* yang dapat diartikan bahwa pegawai PLN cukup nyaman dengan tuntutan pekerjaan sehingga memperbaiki indikator *Burnout* atau perasaan

To accelerate common knowledge on industrial relations, mentoring by education and training is conducted in PT PLN (Persero) by both internal and external parties. Moreover, benchmarking to several companies is also carried out to obtain best practices in industrial relations.

5. Industrial Relations Forum  
The Industrial Relations Forum was initially held on 20-21 November 2017 in Yogyakarta introduced by Human Capital Management Director of PLN. The Industrial Relations Forum is carried out to collect and exchange information on all aspirations, complaints, difficulties and others that related to industrial relations issues. The Forum invites Unit Manager and the industrial relations administrator from the Unit, by presenting respondent from the Manpower Ministry of RI, Academics and Practitioners.
6. Employee Discipline Regulation Enforcement  
In enforcing employee discipline regulation and realizing Good Corporate Governance (GCG) in PT PLN (Persero), the PLN Management has firmly disciplined and rendered sanction to employees that are proved in violating the discipline.

## EMPLOYEE ENGAGEMENT SURVEY (EES)

The engagement survey results in 2017 stated of good engagement of PLN employees. The decrease was occurred in the Job Satisfaction indicator scores thereby lowering the employee engagement level, however the Job Demand indicator showed significant increase. This means sufficient comfort level in PLN employees thereby improving the Burnout indicator or bored/disinterested in working. This improvement led to the increase of

Sinergi Hubungan Industrial  
Industrial Relations Synergy

bosan/jenuh dalam bekerja. Perbaikan ini kemudian meningkatkan skor indikator *Extra Role Performance* atau kinerja di luar tugas pokok. Selain itu, terjadi peningkatan sangat signifikan pada indikator *Organizational Identity* yang menyatakan bahwa Perusahaan memiliki identitas tersendiri atau "kekhasan" yang membedakan PLN dengan organisasi yang lain di mata pegawai.

Extra Role Performance indicator or performance outside main duties. In addition, the Organizational Identity is significantly increased, which stated the Company's special identity or "uniqueness" for employee that differs PLN with other organizations.

No	Indikator   Indicator	Polaritas Polarity	2015	2016	2017	Trend   Trend
1	<i>Leadership Quality</i>	+	71	73	73	Konstan   Constant
2	<i>Job Demand</i>	-	42	43	38	Membaik (5 poin)   Improved (5 points)
3	<i>Social Support</i>	+	77	78	78	Konstan   Constant
4	<i>Burn Out</i>	-	29	27	24	Membaik (3 poin)   Improved (3 points)
5	<i>Job Satisfaction</i>	+	72	75	74	Menurun (1 poin)   Decreased (1 point)
6	<i>Organizational Commitment</i>	+	77	79	79	Konstan   Constant
7	<i>Work Engagement</i>	+	78	80	79	Menurun (1 Poin)   Decreased (1 point)
8	<i>Extra-role Performance</i>	+	80	80	81	Membaik (1 Poin)   Improved (1 point)
9	<i>In-role Performance</i>	+	79	80	80	Konstan   Constant
10	<i>Innovative Work Behavior</i>	+	62	77	77	Konstan   Constant
11	<i>Organizational Memory</i>	+	68	74	74	Konstan   Constant
12	<i>Organization Identity</i>	+	52	67	74	Membaik (7 Poin)   Improved (7 points)

Skor Scores	Interpretasi   Interpretation	
	Polaritas Positif   Positive Polarity	Polaritas Negatif   Negative Polarity
86-100	Sangat Baik   Excellent	Sangat Buruk   Very Bad
70-85	Baik   Good	Buruk   Bad
60-69	Cukup Baik   Moderate	Kurang Baik   Not Good
40-59	Kurang Baik   Not Good	Cukup Baik   Moderate
20-39	Buruk   Bad	Baik   Good
0-19	Sangat Buruk   Very Bad	Sangat Baik   Excellent

## PRODUKTIVITAS PEGAWAI

Dari sisi produktivitas, di tahun 2017 penjualan listrik per Karyawan adalah sebesar 4.799 MWh per Pegawai.

## EMPLOYEE PRODUCTIVITY

On productivity, the electricity sales per Employee in 2017 was 4,799 MWh per Employee.

	Target   Target	Realisasi   Realization	Pencapaian   Achievement
Penjualan   Sales (MWH)	223.212.619	221.066.380	95,6%
Jumlah Pegawai   Total Employee	48.139	46.062	95,7%
Produktivitas (MWh/Pegawai)   Productivity (MWh/Employee)	4.803	4.799	99,9%

# INFORMASI PEMEGANG SAHAM DAN OBLIGASI

## Shareholders and Bonds Information

### IKHTISAR PEMEGANG SAHAM

PLN adalah perusahaan BUMN dengan kepemilikan saham Pemerintah Republik Indonesia sebesar 100%.

### DIVIDEN

#### Kebijakan Dividen

PLN membagikan dividen laba bersih, sesuai dengan keputusan pemegang saham, dalam forum Rapat Pemegang Saham, yang ditetapkan berdasarkan kinerja tahun berjalan dan kebutuhan pengembangan usaha jangka panjang.

#### Total Dividen Dibagikan

Dalam beberapa tahun terakhir, PLN membagikan dividen dengan rekapitulasi sebagai berikut.

Uraian	2015	2016	2017	Description
Tanggal Pembayaran Dividen	26 Juni 2015	29 Juli 2016	22 Juni 2017	Dividend Payout Dates
Jumlah Dividen (Dlm Rp miliar)	3.962,40	2.137,75	2.150,84	Total Dividend (in Rp billion)
Dividen Per Lembar Saham (Dlm Rp)	85.771	38.407	19.584	Dividend Per Share (In Rp)
Dividen Pay Out Ratio (%)	65,74%	26,23%	48,57%	Dividend Payout Ratio (%)

### IKHTISAR OBLIGASI

#### Pencatatan Obligasi

Dengan durasinya yang panjang, obligasi merupakan salah satu sumber pendanaan bagi kegiatan investasi pembangunan pembangkit maupun infrastruktur ketenagalistrikan selain Penyertaan Modal Negara (PMN), *Project Loan*, *Subsidiary Loan Agreement*, dan *Direct Lending* dengan Jaminan atau Tanpa Jaminan Pemerintah.

Pada tahun 2017, terjadi peningkatan *rating* untuk indeks Fitch menjadi BBB dari BBB- (2016). Sementara itu, indeks lain seperti Moody (Baa3), S&P (BB), dan Pefindo (AAA) tetap sama dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, PLN kembali menerbitkan 12 obligasi domestik dengan total dana sebesar Rp5,24 triliun dan 2 obligasi global sebesar USD2,00 miliar. Dengan penerbitan obligasi tersebut, total *outstanding* obligasi domestik PLN adalah Rp14,12 triliun, sedangkan untuk obligasi global adalah USD6,5 miliar.

### SHAREHOLDERS HIGHLIGHTS

PLN is an SOE company with 100% shares ownership by the Republic of Indonesia.

### DIVIDEND

#### Dividend Policy

PLN distributes net profit dividend, in accordance with the shareholders resolution, in the Shareholders Meeting Forum, which was stipulated based on current year performance and requirement of long term business development.

#### Total Dividend Payout

In the last couple of years, PLN distributes dividend with the following recapitulatons.

### BONDS HIGHLIGHTS

#### Bonds Listing

With its long durations, bonds serves as one of funding sources for plants development investment and electricity infrastructure in addition to State Equity Investment (PMN), *Project Loans*, *Subsidiary Loans Agreement*, and *Direct Lending with Collateral or Government Non Collateral*.

In 2017, Fitch index was increased to BBB from BBB- (2016). While, other indices such as Moody (Baaa3), S&P (BB), and Pefindo (AAA) remain the same with the previous year. In 2017, PLN again issues 12 domestic bonds with total fund of Rp5.24 trillion and 2 global bonds amounted to USD2.00 billion. With these bonds issuance, total domestic bonds outstanding of PLN was Rp14.12 trillion, whereas the global bonds was USD6.5 billion.

Informasi Pemegang Saham dan Obligasi  
Shareholders and Bonds Information

## OBLIGASI DOMESTIK | DOMESTIC BONDS

## Data Outstanding Obligasi Lokal PLN | PLN Domestic Bonds Outstanding Data

Obligasi Lokal   Local Bond	Plafon   Plafond	Penerbitan Issued	Tenor (tahun   year)	Kupon Coupon	Kode Obligasi Bond Code	Jatuh Tempo Notional Payment Due	Pefindo	
							2016	2017
Obligasi PLN VIII Seri B   Bonds PLN VIII Series B	IDR 865.000.000.000	21-Jun-06	15	13,75%	PPLN08B	21 June 2021	AAA	AAA
Obligasi PLN IX Seri B   Bonds PLN IX Series B	IDR 1.200.000.000.000	10-Jul-07	15	10,90%	PPLN09B	10 July 2022	AAA	AAA
Obligasi PLN XI Seri B   Bonds PLN IX Series B	IDR 1.783.000.000.000	12-Jan-10	10	12,55%	PPLN11B	12 January 2020	AAA	AAA
Sukuk Ijarah PLN IV Seri B   Sukuk Ijarah PLN IV Series B	IDR 167.000.000.000	12-Jan-10	10	12,55%	SIKPPLN03B	12 January 2020	AAA	AAA
Obligasi PLN XII Seri B   Bonds PLN XII Series B	IDR 1.855.000.000.000	8-Jul-10	12	10,40%	PPLN12B	8 July 2022	AAA	AAA
Sukuk Ijarah PLN V Seri B   Sukuk Ijarah PLN V Series B	IDR 340.000.000.000	8-Jul-10	12	10,40%	SIKPPLN04B	8 July 2022	AAA	AAA
Berkelanjutan I PLN Tahap I Seri A   Bonds Shelf I PLN Tranche I Series A	IDR 182.000.000.000	5-Jul-13	7	8,00%	PPLN01ACN1	5 July 2020	AAA	AAA
Berkelanjutan I PLN Tahap I Seri B   PLN Tranche I Series B	IDR 697.000.000.000	5-Jul-13	10	8,25%	PPLN01BCN1	5 July 2023	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I   Sukuk Ijarah Shelf I Tranche I PLN	IDR 121.000.000.000	5-Jul-13	7	8,00%	SIPPLN01CN1	5 July 2020	AAA	AAA
Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri A Shelf I PLN Tranche II Series A	IDR 593.000.000.000	10-Dec-13	5	9,00%	PPLN01ACN2	10 December 2018	AAA	AAA
Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri B   Shelf I PLN Tranche II Series B	IDR 651.000.000.000	10-Dec-13	10	9,60%	PPLN01BCN2	10 December 2023	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri A   Sukuk Ijarah Shelf I PLN Tranche II Series A	IDR 321.000.000.000	10-Dec-13	5	9,00%	SIPPLN01ACN2	10 December 2018	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri B   Sukuk Ijarah Shelf I PLN Tranche II Series B	IDR 108.000.000.000	10-Dec-13	10	9,60%	SIPPLN01BCN2	10 December 2023	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri A   Bonds Shelf II PLN Tranche I Series A	IDR 214.000.000.000	11-Jul-17	5	7,70%	PPLN02ACN1	11 July 2022	AAA	AAA

## Informasi Pemegang Saham dan Obligasi

## Shareholders and Bonds Information

Obligasi Lokal   Local Bond	Plafon   Plafond	Penerbitan Issued	Tenor (tahun   year)	Kupon Coupon	Kode Obligasi Bond Code	Jatuh Tempo Notional Payment Due	Pefindo	
							2016	2017
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri B   Bonds Shelf II PLN Tranche I Series B	IDR 169.000.000.000	11-Jul-17	7	8,10%	PPLN02BCN1	11 July 2024	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri C   Bonds Shelf II PLN Tranche I Series C	IDR 1.217.000.000.000	11-Jul-17	10	8,50%	PPLN02CCN1	11 July 2027	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri A   Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche I Series A	IDR 186.000.000.000	11-Jul-17	5	7,70%	SIPPLN02ACN1	11 July 2022	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri B   Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche I Series B	IDR 214.000.000.000	11-Jul-17	10	8,50%	SIPPLN02BCN1	11 July 2027	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri A   Bonds Shelf II PLN Tranche II Series A	IDR 451.500.000.000	3-Nov-17	5	7,20%	PPLN02ACN2	3-Nov-22	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri B   Bonds Shelf II PLN Tranche II Series B	IDR 201.000.000.000	3-Nov-17	7	7,50%	PPLN02BCN2	3-Nov-24	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri C   Bonds Shelf II PLN Tranche II Series C	IDR 800.000.000.000	3-Nov-17	10	8,20%	PPLN02CCN2	3-Nov-27	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri D   Bonds Shelf II PLN Tranche II Series D	IDR 1.093.000.000.000	3-Nov-17	15	8,70%	PPLN02DCN2	3-Nov-32	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri A   Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche II Series A	IDR 83.500.000.000	3-Nov-17	5	7,20%	SIPPLN02ACN2	3-Nov-22	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri B   Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche II Series B	IDR 121.000.000.000	3-Nov-17	10	8,20%	SIPPLN02BCN2	3-Nov-27	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri C   Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche II Series C	IDR 490.000.000.000	3-Nov-17	15	8,70%	SIPPLN02CCN2	3-Nov-32	AAA	AAA

## Informasi Pemegang Saham dan Obligasi Shareholders and Bonds Information

### Obligasi PLN VIII Seri B

Obligasi PLN VIII Seri B diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2006 dengan kupon 13,75% dan masih *outstanding* hingga 21 Juni 2021.

### Bonds PLN VIII Series B

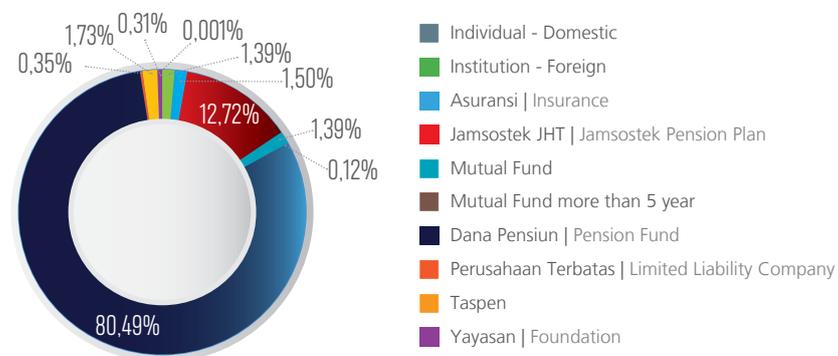
Bonds PLN VIII Series B was issued on 21 June 2006 with 13.75% coupon and still outstanding until 21 June 2021.

### Jadwal Pembayaran Kupon Obligasi PLN VIII Seri B

#### Coupon Payment Schedule of Bonds PLN VIII Series B

Obligasi Lokal Local Bond	Plafon Plafond	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon I Coupon Payment I Due	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon II Coupon Payment II Due	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon III Coupon Payment III Due	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon IV Coupon Payment IV Due
Obligasi PLN VIII Seri B   Bonds PLN VIII Series B	IDR 865.000.000.000	21 Maret   March	21 June   June	21 September	21 Desember   December

### Komposisi Pemegang Obligasi PLN VIII Seri B | Holders Composition of Bonds PLN VIII Series B



### Harga & Yield to Maturity (YtM) Bid Obligasi PLN VIII Seri B | Price & Yield to Maturity (YtM) of Bid Bonds PLN VIII Series B



Informasi Pemegang Saham dan Obligasi  
Shareholders and Bonds Information

**Obligasi PLN IX Seri B**

Obligasi PLN IX Seri B diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2007 dengan kupon sebesar 10,90% dan masih *outstanding* hingga 10 Juli 2022.

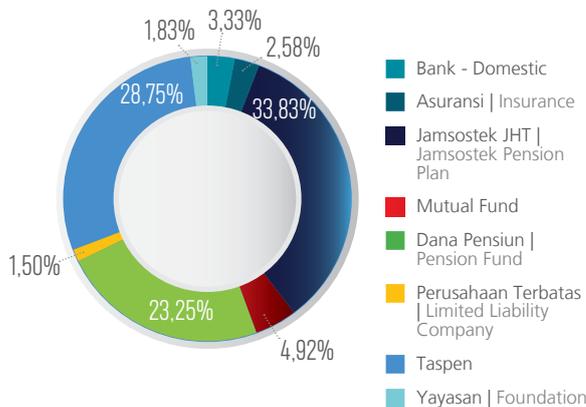
**Bonds PLN IX Series B**

Bonds PLN IX Series B was issued on 10 July 2007 with 10.90% coupon and still outstanding until 10 July 2022.

**Jadwal Pembayaran Kupon Obligasi PLN IX Seri B**  
Coupon Payment Schedule of Bonds PLN IX Series B

Obligasi Lokal Local Bond	Plafon Plafond	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon I Coupon Payment I Due	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon II Coupon Payment II Due	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon III Coupon Payment III Due	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon IV Coupon Payment IV Due
Obligasi PLN IX Seri B   Bonds PLN IX Series B	IDR 1.200.000.000.000	10 Januari   January	10 April	10 Juli   July	10 Oktober   October

**Komposisi Pemegang Obligasi PLN IX Seri B**  
Holders Composition of of Bonds PLN IX Series B



**Harga & Yield to Maturity (YtM) Bid Sukuk Ijarah PLN IX Seri B**  
Price & Yield to Maturity (YtM) of Bid Bonds PLN IX Series B



**Obligasi PLN XI Seri B & Sukuk Ijarah PLN IV Seri B**

Obligasi PLN XI Seri B diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2010 dengan kupon 12,55% dan masih *outstanding* hingga 12 Januari 2020. Sementara itu, Sukuk Ijarah PLN IV Seri B diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2010 dengan fee ijarah sebesar 12,55% dan masih *outstanding* hingga 12 Januari 2020.

**Bonds PLN XI Series B & Sukuk Ijarah PLN IV Series B**

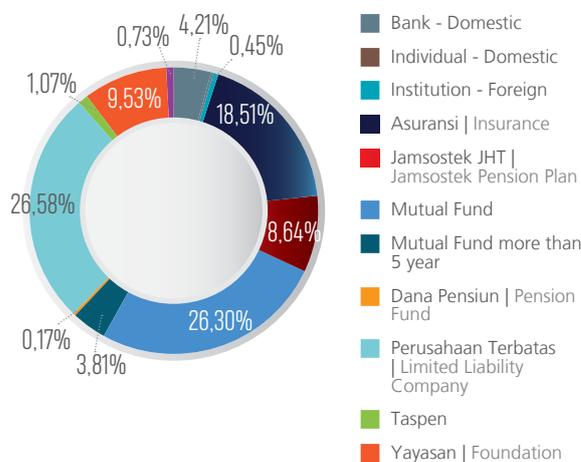
Bonds PLN XI Series B was issued on 12 January 2010 with 12.55% coupon and still outstanding until 12 January 2020. While Sukuk Ijarah PLN IV Series B was issued on 12 January 2010 with ijarah fee of 12.55% and still outstanding until 12 January 2020.

Informasi Pemegang Saham dan Obligasi  
Shareholders and Bonds Information

Jadwal Pembayaran Kupon Obligasi PLN XI Seri B & Fee Ijarah Sukuk Ijarah PLN IV Seri B  
Coupon Payment Schedule of Bonds PLN XI Series B & Ijarah Fee of Sukuk Ijarah PLN IV Series B

Obligasi Lokal Local Bond	Plafon Plafond	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon I Coupon Payment I Due	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon II Coupon Payment II Due	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon III Coupon Payment III Due	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon IV Coupon Payment IV Due
Obligasi PLN XI Seri B   Bonds PLN XI Series B	IDR 1.783.000.000.000	12 Januari   January	12 April	12 Juli   July	12 Oktober   October
Sukuk Ijarah PLN IV Seri B   Sukuk Ijarah PLN IV Series B	IDR 167.000.000.000	12 Januari   January	12 April	12 Juli   July	12 Oktober   October

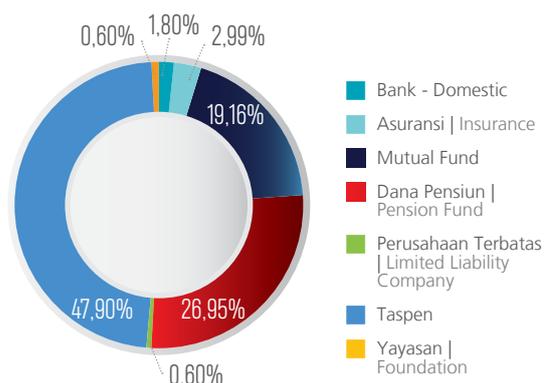
Komposisi Pemegang Obligasi PLN XI Seri B  
Holders Composition of Bonds PLN XI Series B



Harga & Yield to Maturity (YtM) Bid Obligasi PLN XI Seri B  
Price & Yield to Maturity (YtM) of Bid Bonds PLN XI Series B



Komposisi Pemegang Sukuk Ijarah PLN IV Seri B  
Holders Composition of Sukuk Ijarah PLN IV Series B



Harga & Yield to Maturity (YtM) Bid Sukuk Ijarah PLN IV Seri B  
Price & Yield to Maturity (YtM) of Bid Sukuk Ijarah PLN IV Series B



## Informasi Pemegang Saham dan Obligasi

Shareholders and Bonds Information

### Obligasi PLN XII Seri B & Sukuk Ijarah PLN V Seri B

Obligasi PLN XII Seri B dengan kupon sebesar 10,4% dan Sukuk Ijarah PLN V Seri B dengan fee ijarah 10,4% secara bersamaan diterbitkan pada tanggal 8 Juli 2010 dan masih *outstanding* hingga 8 Juli 2022.

### Bonds PLN XII Series B & Sukuk Ijarah PLN V Series B

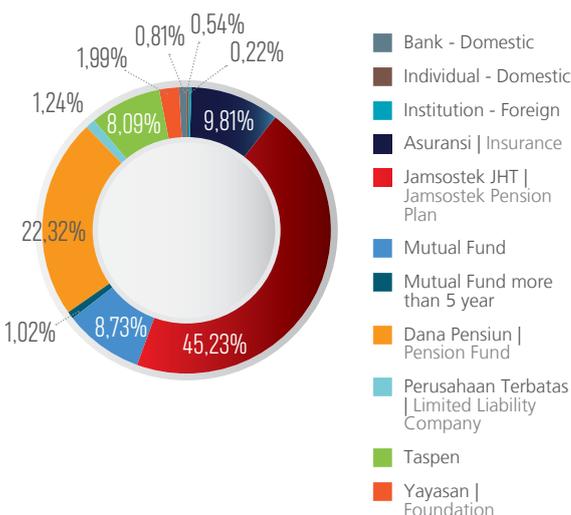
Bonds PLN XII Series B with 10.4% coupon and Sukuk Ijarah PLN V Series B with ijarah fee of 10.4% were jointly issued on 8 July 2010 and still outstanding until 8 July 2022.

### Jadwal Pembayaran Kupon Obligasi PLN XII Seri B & Fee Ijarah Sukuk Ijarah PLN V Seri B

### Coupon Payment Schedule of Bonds PLN XI Series B & Ijarah Fee of Sukuk Ijarah PLN IV Series B

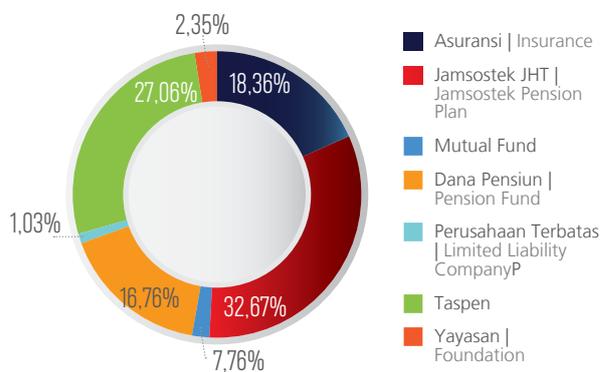
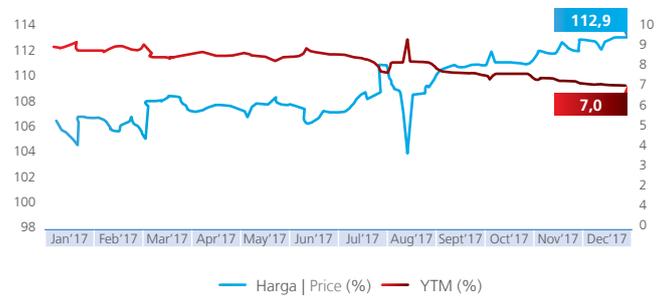
Obligasi Lokal Local Bond	Plafon Plafond	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon I Coupon Payment I Due	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon II Coupon Payment II Due	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon III Coupon Payment III Due	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon IV Coupon Payment IV Due
Obligasi PLN XII Seri B Bonds PLN XII Series B	IDR 1.855.000.000.000	8 Januari   January	8 April	8 Juli   July	8 Oktober   October
Sukuk Ijarah PLN V Seri B   Sukuk Ijarah PLN V Series B	IDR 340.000.000.000	8 Januari   January	8 April	8 Juli   July	8 Oktober   October

### Komposisi Pemegang Obligasi PLN XII Seri B Terbesar Per 31 Desember 2017 Holders Composition of Bonds PLN XII Series B as of 31 December 2017



### Harga & Yield to Maturity (YtM) Bid Obligasi PLN XII Seri B Per 31 Desember 2017 Price & Yield to Maturity (YtM) Bid Bonds PLN XII Series B as of 31 December 2017



Informasi Pemegang Saham dan Obligasi  
Shareholders and Bonds InformationKomposisi Pemegang Sukuk Ijarah PLN V Seri B  
Terbesar Per 31 Desember 2017  
Holders Composition of Sukuk Ijarah PLN V Series B  
as of 31 December 2017Harga & Yield to Maturity (YtM) Bid Sukuk Ijarah  
PLN V Seri B Per 31 Desember 2017  
Price & Yield to Maturity (YtM) Bid Sukuk Ijarah  
PLN V Series B as of 31 December 2017Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Seri A dan Seri B &  
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I PLN Seri A

Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I PLN Seri A & Seri B, serta Sukuk Ijarah I Tahap I PLN secara bersamaan diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2013. Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I PLN Seri A dengan kupon 8% & Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I PLN dengan fee ijarah 8% jatuh tempo pada 5 Juli 2020, sementara Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I PLN Seri B dengan kupon 8,25% jatuh tempo pada 5 Juli 2023.

Bonds Shelf I PLN Tranche I Series A and Series B &  
Sukuk Ijarah Shelf I Tranche I PLN Series A

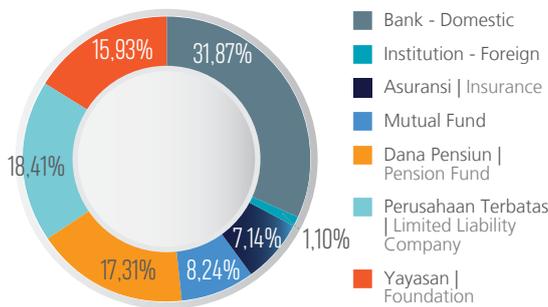
Bonds Shelf I PLN Tranche I Series A and Series B and Sukuk Ijarah I Tranche I PLN Series A were jointly issued on 5 July 2013. The Bonds Shelf I PLN Tranche I Series A with 8% coupon and Sukuk Ijarah Shelf I Tranche I PLN Series A with 8% ijarah fee are matured on 5 July 2020, while Bonds Shelf I PLN Tranche I Series B with 8.25% coupon is matured on 5 July 2023.

Jadwal Pembayaran Kupon Obligasi Berkelanjutan I  
PLN Tahap I & Fee Ijarah Sukuk Ijarah Berkelanjutan  
I Tahap I PLNCoupon Payment Schedule of Bonds Shelf I PLN  
Tranche I & Ijarah Fee of Sukuk Ijarah Shelf I  
Tranche I PLN

Obligasi Lokal Local Bond	Plafon Plafond	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon I Coupon Payment I Due	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon II Coupon Payment II Due	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon III Coupon Payment III Due	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon IV Coupon Payment IV Due
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Seri A   Bonds Shelf I PLN Tranche I Series A	IDR 182.000.000.000	5 Januari   January	5 April	5 Juli   July	5 Oktober   October
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Seri B   Bonds Shelf I PLN Tranche I Series B	IDR 697.000.000.000	5 Januari   January	5 April	5 Juli   July	5 Oktober   October
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I   Sukuk Ijarah Shelf I PLN Tranche I	IDR 121.000.000.000	5 Januari   January	5 April	5 Juli   July	5 Oktober   October

Informasi Pemegang Saham dan Obligasi  
Shareholders and Bonds Information

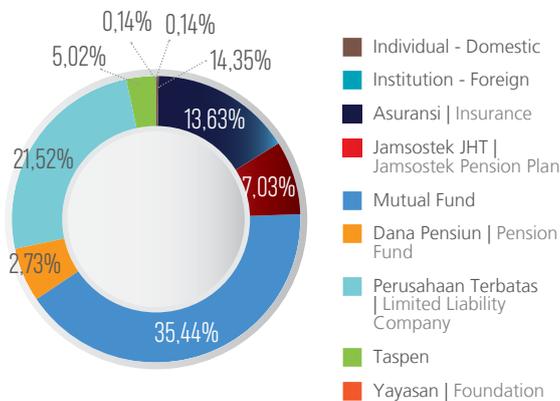
Komposisi Pemegang Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Seri A  
Holders Composition of Bonds Shelf I PLN Tranche I Series A



Harga & Yield to Maturity (YtM) Bid Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Seri A  
Price & Yield to Maturity (YtM) Bid Bonds Shelf I PLN Tranche I Series A



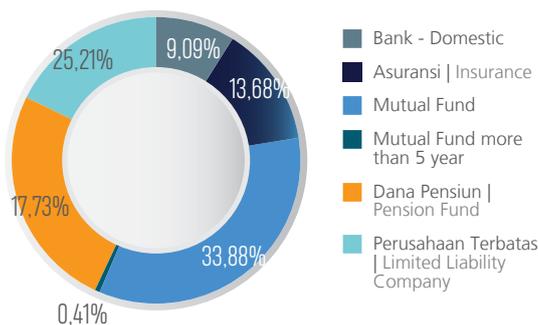
Komposisi Pemegang Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Seri B  
Holders Composition of Bonds Shelf I PLN Tranche I Series B



Harga & Yield to Maturity (YtM) Bid Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Seri B  
Price & Yield to Maturity (YtM) Bid Bonds Shelf I PLN Tranche I Series B



Komposisi Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I  
Holders Composition of Sukuk Ijarah Shelf I PLN Tranche I



Harga & Yield to Maturity (YtM) Bid Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I  
Price & Yield to Maturity (YtM) Bid Sukuk Ijarah Shelf I PLN Tranche I



Informasi Pemegang Saham dan Obligasi  
Shareholders and Bonds Information

## Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri A dan Seri B &amp; Sukuk Ijarah I Berkelanjutan PLN Tahap II Seri A dan Seri B

Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri A & Seri B, serta Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri A & B secara bersamaan diterbitkan pada tanggal 10 Desember 2013. Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri A dengan kupon 9% & Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri A dengan fee ijarah 9% masih *outstanding* hingga 10 Desember 2018, sementara Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri B dengan kupon 9,6% dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri B dengan fee ijarah 9,6% masih *outstanding* hingga 10 Desember 2023.

## Bonds Shelf I PLN Tranche II Series A and Series B &amp; Sukuk Ijarah Shelf I PLN Tranche II Series A and Series B

Bonds Shelf I PLN Tranche II Series A & Series B and Sukuk Ijarah I PLN Tranche II Series A & Series B were jointly issued on 10 December 2013. The Bonds Shelf I PLN Tranche II Series A with 9% coupon and Sukuk Ijarah I PLN Tranche II Series A with 9% ijarah fee are still outstanding until 10 December 2018, while Bonds Shelf I PLN Tranche II Series B with 9.6% coupon and Sukuk Ijarah I PLN Tranche II Series B with 9.6% ijarah fee are still outstanding until 10 December 2023.

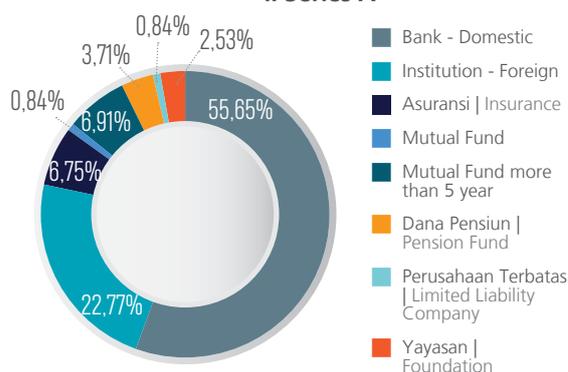
## Jadwal Pembayaran Kupon Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri A dan Seri B &amp; Fee Ijarah Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri A dan Seri B

## Coupon Payment Schedule of Bonds Shelf I PLN Tranche II Series A &amp; Series B &amp; Ijarah Fee of Sukuk Ijarah Shelf I PLN Tranche II Series A and Series B

Obligasi Lokal Local Bond	Plafon Plafond	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon I Coupon Payment I Due	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon II Coupon Payment II Due	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon III Coupon Payment III Due	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon IV Coupon Payment IV Due
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri A   Bonds Shelf I PLN Tranche II Series A	IDR 593.000.000.000	10 Maret   March	10 Juni   June	10 September	10 Desember   December
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri B   Bonds Shelf I PLN Tranche II Series B	IDR 651.000.000.000	10 Maret   March	10 Juni   June	10 September	10 Desember   December
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri A   Sukuk Ijarah Shelf I PLN Tranche II Series A	IDR 321.000.000.000	10 Maret   March	10 Juni   June	10 September	10 Desember   December
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri B   Sukuk Ijarah Shelf I PLN Tranche II Series B	IDR 108.000.000.000	10 Maret   March	10 Juni   June	10 September	10 Desember   December

## Komposisi Pemegang Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri A

## Holders Composition of Bonds Shelf I PLN Tranche II Series A



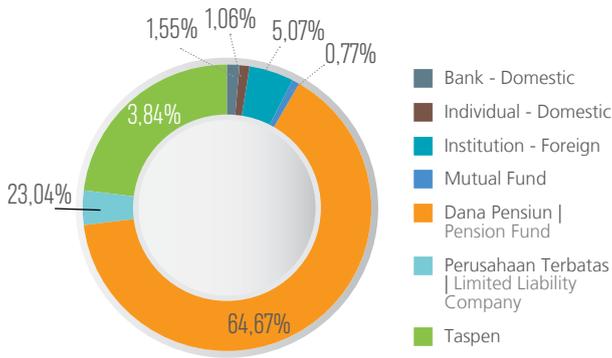
## Harga &amp; Yield to Maturity (YtM) Bid Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri A

## Price &amp; Yield to Maturity (YtM) Bid Bonds Shelf I PLN Tranche II Series A



Informasi Pemegang Saham dan Obligasi  
Shareholders and Bonds Information

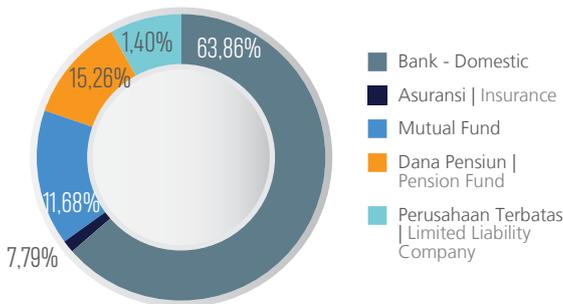
**Komposisi Pemegang Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri B**  
Holders Composition of Bonds Shelf I PLN Tranche II Series B



**Harga & Yield to Maturity (YtM) Bid Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri B**  
Price & Yield to Maturity (YtM) Bid Bonds Shelf I PLN Tranche II Series B



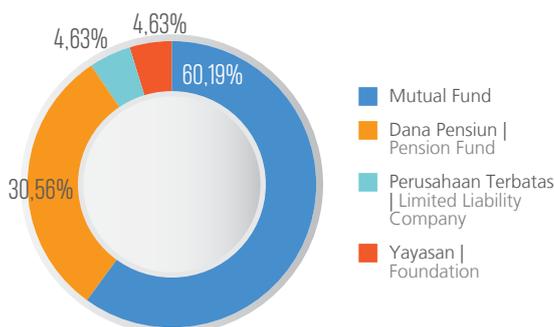
**Komposisi Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri A**  
Holders Composition of Sukuk Ijarah Shelf I PLN Tranche II Series A



**Harga & Yield to Maturity (YtM) Bid Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri A**  
Price & Yield to Maturity (YtM) Bid Sukuk Ijarah Shelf I PLN Tranche II Series A



**Komposisi Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri B**  
Holders Composition of Sukuk Ijarah Shelf I PLN Tranche II Series B



**Harga & Yield to Maturity (YtM) Bid Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri B**  
Price & Yield to Maturity (YtM) Bid Sukuk Ijarah Shelf I PLN Tranche II Series B



Informasi Pemegang Saham dan Obligasi  
Shareholders and Bonds Information**Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri A, Seri B dan Seri C & Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri A dan Seri B**

Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, serta Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri A & B secara bersamaan diterbitkan pada tanggal 11 Juli 2017. Obligasi tersebut memiliki *maturity date* yang berbeda-beda. Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri A dengan kupon 7,7% & Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri A dengan fee ijarah 7,7% masih *outstanding* hingga 11 Juli 2022, Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri B dengan kupon 8,1% masih *outstanding* hingga 11 Juli 2024, sementara Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri C dengan kupon 8,5% dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri B dengan fee ijarah 8,5% masih *outstanding* hingga 11 Juli 2027.

**Bonds Shelf II PLN Tranche I Series A, Series B and Series C & Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche I Series A and Series B**

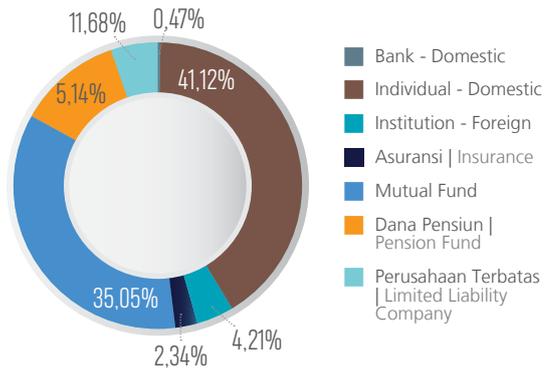
Bonds Shelf II PLN Tranche I Series A, Series B, Series C and Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche I Series A & Series B were jointly issued on 11 July 2017. These bonds have different maturity dates. The Bonds Shelf II PLN Tranche I Series A with 7.7% coupon and Sukuk Ijarah II PLN Tranche I Series A with 7.7% ijarah fee are still outstanding until 11 July 2022, Bonds Shelf II PLN Tranche I Series B with 8.1% coupon is still outstanding until 11 July 2024, while Bonds Shelf II PLN Tranche I Series C with 8.5% coupon and Sukuk Ijarah II PLN Tranche I Series B with 8.5% ijarah fee are still outstanding until 11 July 2027.

**Jadwal Pembayaran Kupon Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I & Fee Ijarah Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I****Coupon Payment Schedule of Bonds Shelf II PLN Tranche I & Ijarah Fee of Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche I**

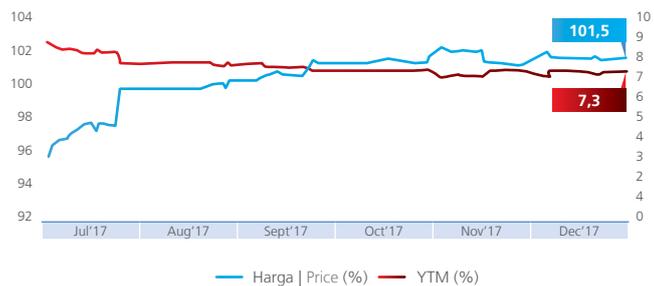
Obligasi Lokal Local Bond	Plafon Plafond	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon I Coupon Payment I Due	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon II Coupon Payment II Due	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon III Coupon Payment III Due	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon IV Coupon Payment IV Due
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri A   Bonds Shelf II PLN Tranche I Series A	IDR 214.000.000.000	11 Januari   January	11 April	11 July	11 Oktober   October
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri B   Bonds Shelf II PLN Tranche I Series B	IDR 169.000.000.000	11 Januari   January	11 April	11 July	11 Oktober   October
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri C   Bonds Shelf II PLN Tranche I Series C	IDR 1.217.000.000.000	11 Januari   January	11 April	11 July	11 Oktober   October
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I SERI A   Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche I Series A	IDR 186.000.000.000	11 Januari   January	11 April	11 July	11 Oktober   October
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I SERI B   Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche I Series A	IDR 214.000.000.000	11 Januari   January	11 April	11 July	11 Oktober   October

Informasi Pemegang Saham dan Obligasi  
Shareholders and Bonds Information

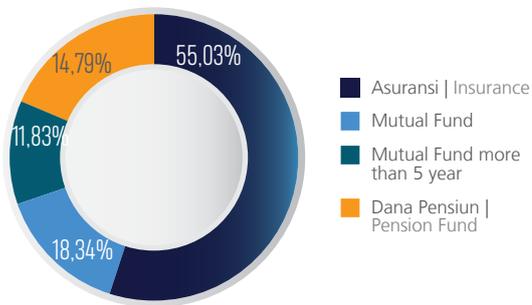
**Komposisi Pemegang Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri A**  
Holders Composition of Bonds Shelf II PLN Tranche I Series A



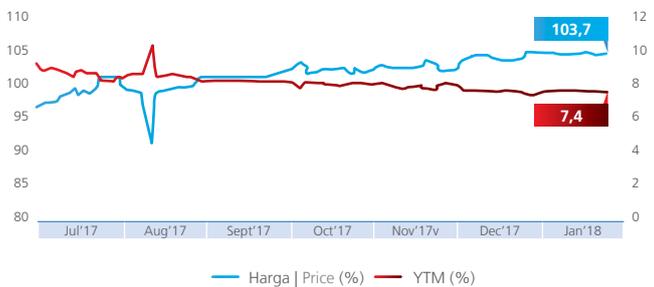
**Harga & Yield to Maturity (YtM) Bid Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri A**  
Price & Yield to Maturity (YtM) Bid Bonds Shelf II PLN Tranche I Series A



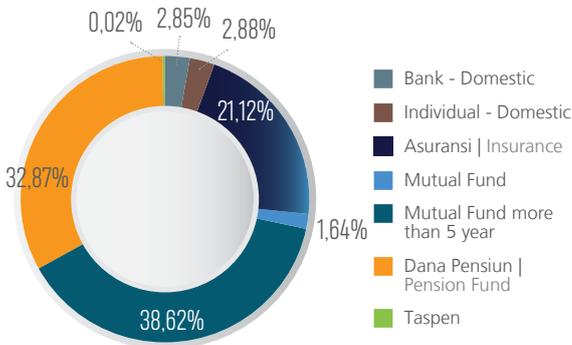
**Komposisi Pemegang Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri B**  
Holders Composition of Bonds Shelf II PLN Tranche I Series B



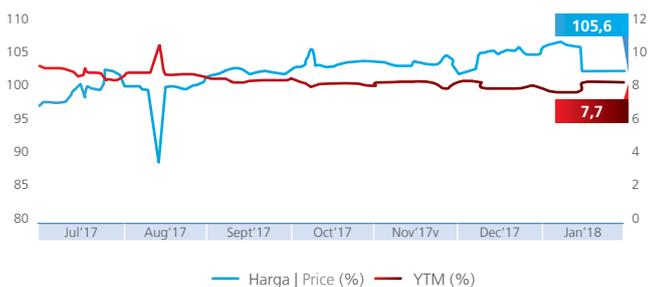
**Harga & Yield to Maturity (YtM) Bid Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri B**  
Price & Yield to Maturity (YtM) Bid Bonds Shelf II PLN Tranche I Series B

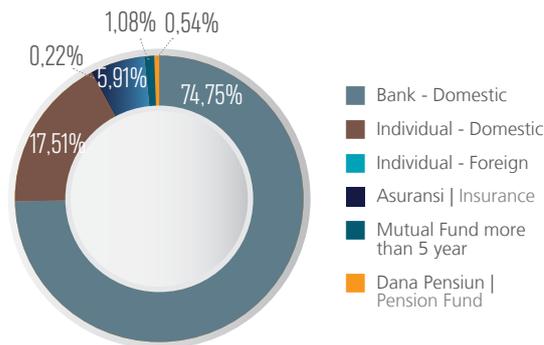
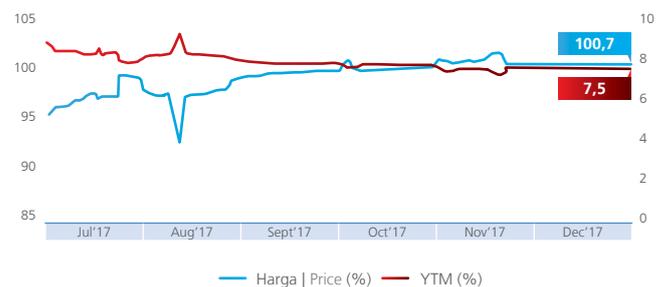
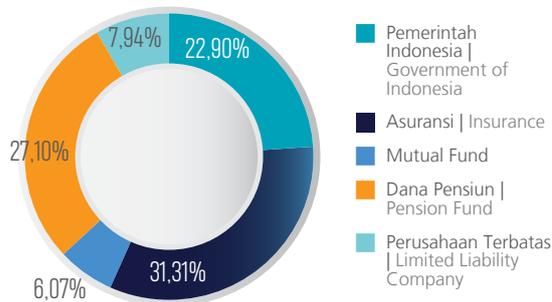


**Komposisi Pemegang Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri C**  
Holders Composition of Bonds Shelf II PLN Tranche I Series C



**Harga & Yield to Maturity (YtM) Bid Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri C**  
Price & Yield to Maturity (YtM) Bid Bonds Shelf II PLN Tranche I Series C



Informasi Pemegang Saham dan Obligasi  
Shareholders and Bonds InformationKomposisi Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan II  
PLN Tahap I Seri A  
Holders Composition of Sukuk Ijarah Shelf II PLN  
Tranche I Series AHarga & Yield to Maturity (YtM) Bid Sukuk Ijarah  
Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri A  
Price & Yield to Maturity (YtM) Bid Sukuk Ijarah  
Shelf II PLN Tranche I Series AKomposisi Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan II  
PLN Tahap I Seri B  
Holders Composition of Sukuk Ijarah Shelf II PLN  
Tranche I Series BHarga & Yield to Maturity (YtM) Bid Sukuk Ijarah  
Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri B  
Price & Yield to Maturity (YtM) Bid Sukuk Ijarah  
Shelf II PLN Tranche I Series B

## Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D &amp; Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri A, Seri B dan Seri C

Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri A, Seri B, Seri C, Seri D dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri A Seri B, Seri C secara bersamaan diterbitkan pada tanggal 3 November 2017. Obligasi tersebut memiliki *maturity date* yang berbeda-beda. Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri A dengan kupon 7,2% & Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri A dengan fee ijarah 7,2% masih *outstanding* hingga 3 November 2022, Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri B dengan kupon 7,5% masih *outstanding* hingga 3 November 2024, Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri C dengan kupon 8,2% dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri B dengan fee ijarah 8,2% masih *outstanding* hingga 3 November 2027, serta Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri D dengan kupon 8,7% & Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri C dengan fee ijarah 8,7% masih *outstanding* hingga 3 November 2032.

## Bonds Shelf II PLN Tranche II Series A, Series B, Series C and Series D &amp; Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche II Series A, Series B and Series C

Bonds Shelf II PLN Tranche II Series A, Series B, Series C, Series D and Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche II Series A, Series B, Series C were jointly issued on 3 November 2017. These bonds have different maturity dates. The Bonds Shelf II PLN Tranche II Series A with 7.2% coupon and Sukuk Ijarah II PLN Tranche II Series A with 7.2% ijarah fee are still outstanding until 3 November 2022, Bonds Shelf II PLN Tranche II Series B with 7.5% coupon is still outstanding until 3 November 2024, while Bonds Shelf II PLN Tranche II Series C with 8.2% coupon and Sukuk Ijarah II PLN Tranche II Series B with 8.2% ijarah fee are still outstanding until 3 November 2027, and Bonds Shelf II PLN Tranche II Series D with 8.7% coupon and Sukuk Ijarah II PLN Tranche II Series C with 8.7% ijarah fee are still outstanding until 3 November 2032.

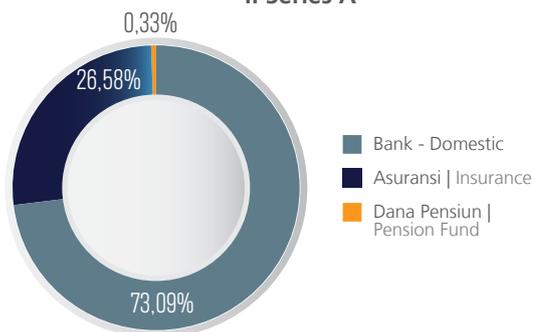
Informasi Pemegang Saham dan Obligasi  
Shareholders and Bonds Information

**Jadwal Pembayaran Kupon Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II & Fee Ijarah Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap II PLN | Jadwal Pembayaran Kupon Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II & Fee Ijarah Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap II PLN**

Obligasi Lokal Local Bond	Plafon Plafond	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon I Coupon Payment I Due	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon II Coupon Payment II Due	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon III Coupon Payment III Due	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon IV Coupon Payment IV Due
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri A   Bonds Shelf II PLN Tranche II Series A	IDR 451.500.000.000	3 Februari   February	3 Mei   May	3 Agustus   August	3 November
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri B   Bonds Shelf II PLN Tranche II Series B	IDR 201.000.000.000	3 Februari   February	3 Mei   May	3 Agustus   August	3 November
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri C   Bonds Shelf II PLN Tranche II Series C	IDR 800.000.000.000	3 Februari   February	3 Mei   May	3 Agustus   August	3 November
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri D   Bonds Shelf II PLN Tranche II Series D	IDR 1.093.000.000.000	3 Februari   February	3 Mei   May	3 Agustus   August	3 November
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri A   Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche II Series A	IDR 83.500.000.000	3 Februari   February	3 Mei   May	3 Agustus   August	3 November
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri B   Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche II Series B	IDR 121.000.000.000	3 Februari   February	3 Mei   May	3 Agustus   August	3 November
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri C   Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche II Series C	IDR 490.000.000.000	3 Februari   February	3 Mei   May	3 Agustus   August	3 November

**Komposisi Pemegang Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri A**

**Holders Composition of Bonds Shelf II PLN Tranche II Series A**

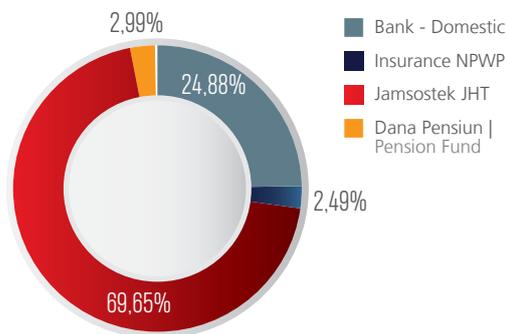


**Harga & Yield to Maturity (YtM) Bid Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri A**  
**Price & Yield to Maturity (YtM) Bid Bonds Shelf II PLN Tranche II Series A**



Informasi Pemegang Saham dan Obligasi  
Shareholders and Bonds Information

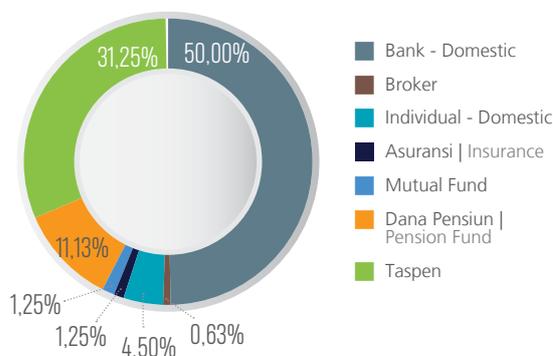
**Komposisi Pemegang Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri B**  
**Holders Composition of Bonds Shelf II PLN Tranche II Series B**



**Harga & Yield to Maturity (YtM) Bid Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri B**  
**Price & Yield to Maturity (YtM) Bid Bonds Shelf II PLN Tranche II Series B**



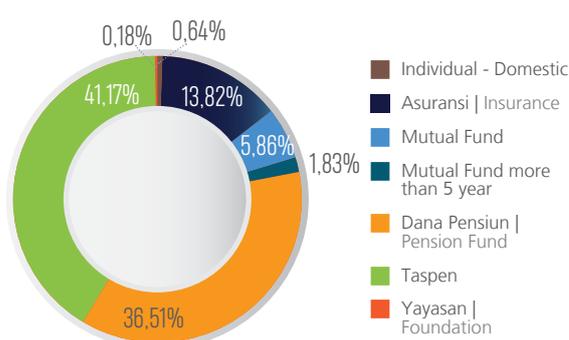
**Komposisi Pemegang Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri C**  
**Holders Composition of Bonds Shelf II PLN Tranche II Series C**



**Harga & Yield to Maturity (YtM) Bid Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri C**  
**Price & Yield to Maturity (YtM) Bid Bonds Shelf II PLN Tranche II Series C**



**Komposisi Pemegang Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri D**  
**Holders Composition of Bonds Shelf II PLN Tranche II Series D**

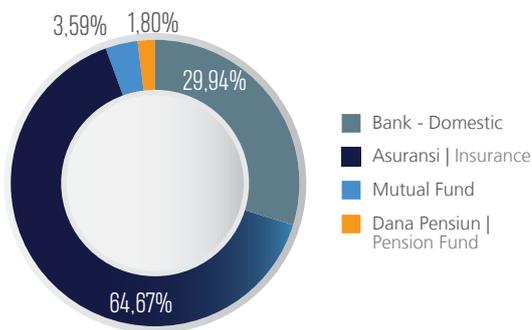


**Harga & Yield to Maturity (YtM) Bid Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri D**  
**Price & Yield to Maturity (YtM) Bid Bonds Shelf II PLN Tranche II Series D**



Informasi Pemegang Saham dan Obligasi  
Shareholders and Bonds Information

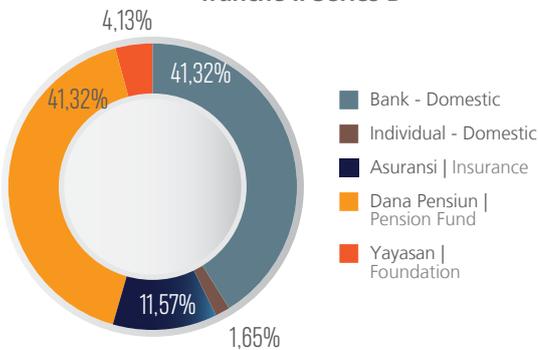
**Komposisi Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri A**  
Holders Composition of Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche II Series A



**Harga & Yield to Maturity (YtM) Bid Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri A**  
Price & Yield to Maturity (YtM) Bid Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche II Series A



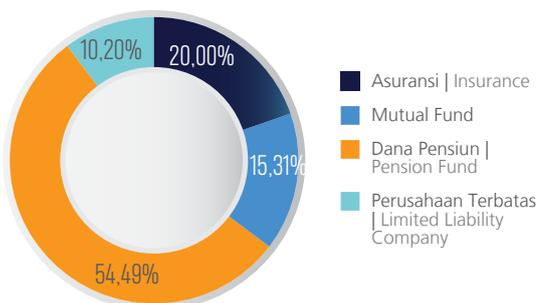
**Komposisi Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri B**  
Holders Composition of Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche II Series B



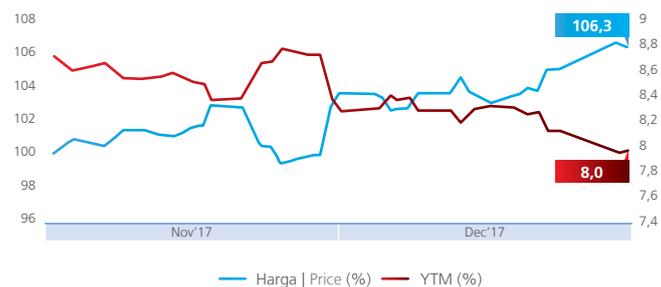
**Harga & Yield to Maturity (YtM) Bid Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri B**  
Price & Yield to Maturity (YtM) Bid Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche II Series B



**Komposisi Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri C**  
Holders Composition of Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche II Series C



**Harga & Yield to Maturity (YtM) Bid Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri C**  
Price & Yield to Maturity (YtM) Bid Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche II Series C



Informasi Pemegang Saham dan Obligasi  
Shareholders and Bonds Information

## OBLIGASI INTERNASIONAL

## INTERNATIONAL BONDS

## Data Outstanding Obligasi Internasional PLN

## PLN International Bonds Outstanding Data

Obligasi Global Bond	Plafon Plafond	Penerbitan Issued	Tenor (Tahun   year)	Kupon Coupon	Kode Obligasi Bond Code	Jatuh Tempo Notional Payment Due	S & P		Moody		Fitch		
							2016	2017	2016	2017	2016	2017	
II B	USD	500.000.000	28 Juni 2007 28 June 2007	30	7,875%	56068TAD9 N54360AD9	29 Juni 2037 29 June 2037	BB BB	BB BB	Baa3 Baa3	Baa3 Baa3	BBB- BBB-	BBB BBB
III	USD	750.000.000	7 Agustus 2009 7 August 2009	10	8,00%	N54360AE7 56068TAE7	7 Agustus 2019 7 August 2019	BB BB	BB BB	Baa3 Baa3	Baa3 Baa3	BBB- BBB-	BBB BBB
IV	USD	1.250.000.000	6 November 2009 6 November 2009	10	7,75%	N54360AF4 56068TAF4	20 Januari 2020 20 January 2020	BB BB	BB BB	Baa3 Baa3	Baa3 Baa3	BBB- BBB-	BBB BBB
GMTN 2011	USD	1.000.000.000	22 November 2011 22 November 2011	10	5,50%	71568PAA7 71568QAA5	22 November 2021 22 November 2021	BB BB	BB BB	Baa3 Baa3	Baa3 Baa3	BBB- BBB-	BBB BBB
GMTN 2012	USD	1.000.000.000	24 Oktober 2012 24 October 2012	30	5,25%	71568PAB5 71568QAB3	24 Oktober 2042 24 October 2042	BB BB	BB BB	Baa3 Baa3	Baa3 Baa3	BBB- BBB-	BBB BBB
GMTN 2017 - 10Y	USD	1.500.000.000	15 Mei 2017 15 May 2017	10	4,125%	71568PAC3 71568QAC1	15 Mei 2027 15 May 2027	BB BB	BB BB	Baa3 Baa3	Baa3 Baa3	BBB- BBB-	BBB BBB
GMTN 2017 - 30Y	USD	500.000.000	15 Mei 2017 15 May 2017	30	5,25%	71568PAD1 71568QAD9	15 Mei 2047 15 May 2047	BB BB	BB BB	Baa3 Baa3	Baa3 Baa3	BBB- BBB-	BBB BBB

## Global Bond II Tr.B

Global Bond II Tr.B diterbitkan pada tanggal 28 Juni 2007 dengan kupon 7,875% dan masih *outstanding* hingga 29 Juni 2037.

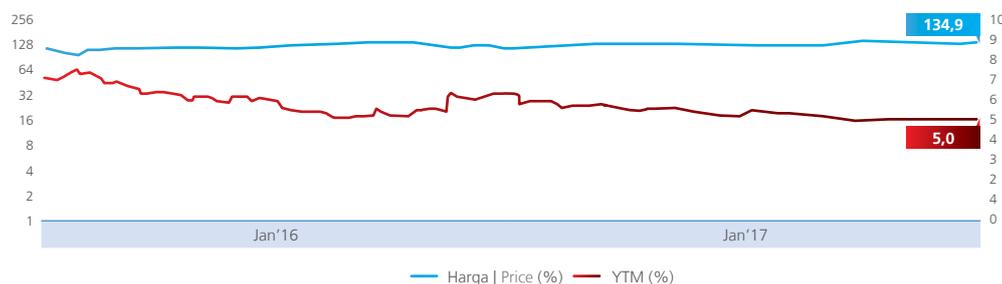
## Global Bond II Tr.B

The Global Bond II Tr.B was issued on 28 June 2007 with 7.875% coupon and still outstanding until 29 June 2037.

## Jadwal Pembayaran Kupon Global Bond II Tr.B

## Coupon Payment Schedule of Global Bond II Tr.B

Obligasi Global Global Bond	Plafon Plafond	Kupon Coupon	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon I Coupon Payment I Due	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon II Coupon Payment II Due
II B	USD	500.000.000	28 Juni   June	28 Desember   December

Harga & Yield to Maturity (YtM) Bid Global Bond II Tr.B  
Price & Yield to Maturity (Ytm) Bid Global Bond II Tr.B

## Informasi Pemegang Saham dan Obligasi

Shareholders and Bonds Information

### Global Bond III

Global Bond III diterbitkan pada tanggal 7 Agustus 2009 dengan kupon 8% dan masih *outstanding* hingga 7 Agustus 2019.

### Global Bond III

The Global Bond III was issued on 7 August 2009 with 8% coupon and still outstanding until 7 August 2019.

#### Jadwal Pembayaran Kupon Global Bond III

#### Coupon Payment Schedule of Global Bond III

Obligasi Global Bond	Plafon Plafond	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon I Coupon Payment I Due	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon II Coupon Payment II Due
III	USD 750.000.000	7 Februari   February	7 Agustus   August

Harga & Yield to Maturity (YtM) Bid Global Bond III  
Price & Yield to Maturity (Ytm) Bid Global Bond III



### Global Bond IV

Global Bond IV diterbitkan pada tanggal 6 November 2009 dengan kupon 7,75% dan masih *outstanding* hingga 20 Januari 2020.

### Global Bond IV

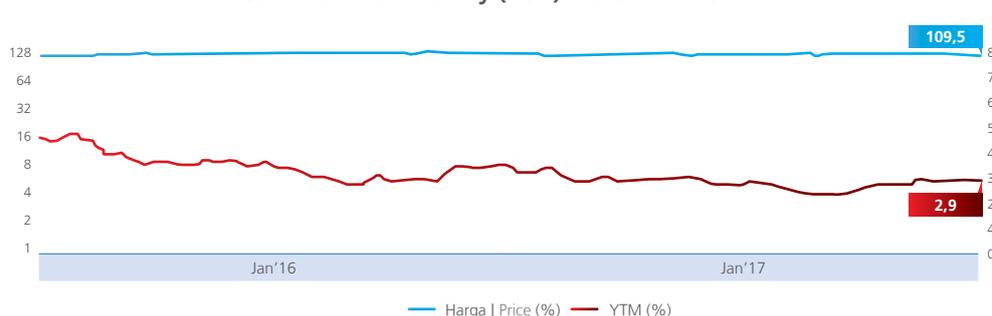
The Global Bond IV was issued on 6 November 2009 with 7.75% coupon and still outstanding until 20 January 2020.

#### Jadwal Pembayaran Kupon Global Bond IV

#### Coupon Payment Schedule of Global Bond IV

Obligasi Global Bond	Plafon Plafond	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon I Coupon Payment I Due	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon II Coupon Payment II Due
IV	USD 1.250.000.000	20 Januari   January	20 Juli   July

Harga & Yield to Maturity (YtM) Bid Global Bond IV  
Price & Yield to Maturity (Ytm) Bid Global Bond IV



## Informasi Pemegang Saham dan Obligasi

### Shareholders and Bonds Information

#### Global Medium Term Notes 2011

Global Medium Term Notes 2011 diterbitkan pada tanggal 22 November 2011 dengan kupon 5,5% dan masih *outstanding* hingga 22 November 2021.

#### Global Medium Term Notes 2011

The Global Medium Term Notes 2011 was issued on 22 November 2011 with 5.5% coupon and still outstanding until 22 November 2021.

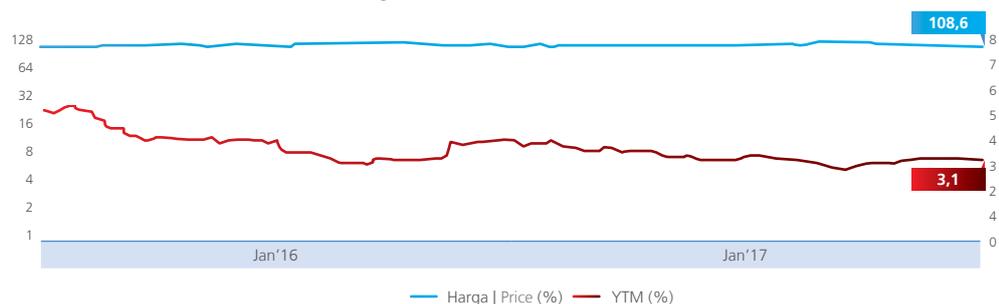
#### Jadwal Pembayaran Kupon Global Medium Term Notes 2011

#### Coupon Payment Schedule of Global Medium Term Notes 2011

Obligasi Global Global Bond	Plafon Plafond	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon I Coupon Payment I Due	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon II Coupon Payment II Due
GMTN 2011	USD 1.000.000.000	22 Mei   May	22 November

#### Harga & Yield to Maturity (Ytm) Bid Global Medium Term Notes 2011

#### Price & Yield to Maturity (Ytm) Bid Global Medium Term Notes 2011



#### Global Medium Term Notes 2012

Global Medium Term Notes 2012 diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2012 dengan kupon 5,25% dan masih *outstanding* hingga 24 October 2042.

#### Global Medium Term Notes 2012

The Global Medium Term Notes 2012 was issued on 24 October 2012 with 5.5% coupon and still outstanding until 24 October 2042.

#### Jadwal Pembayaran Kupon Global Medium Term Notes 2012

#### Coupon Payment Schedule of Global Medium Term Notes 2012

Obligasi Global Global Bond	Plafon Plafond	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon I Coupon Payment I Due	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon II Coupon Payment II Due
GMTN 2012	USD 1.000.000.000	24 April	24 Oktober   October

#### Harga & Yield to Maturity (Ytm) Bid Global Medium Term Notes 2011

#### Price & Yield to Maturity (Ytm) Bid Global Medium Term Notes 2012



## Informasi Pemegang Saham dan Obligasi Shareholders and Bonds Information

### Global Medium Term Notes 2017

Global Medium Term Notes 2017- 10Y & 30Y diterbitkan pada tanggal 15 Mei 2017. Global Medium Term Notes 2017- 10Y dengan kupon 4,125% masih *outstanding* hingga 15 Mei 2027, sementara itu *Global Medium Term Notes 2017- 30Y 5,25%* dan masih *outstanding* hingga 15 Mei 2047.

### Global Medium Term Notes 2017

The Global Medium Term Notes 2017- 10Y & 30Y was issued on 15 May 2017. The Global Medium Term Notes 2017-10Y with 4,125% coupon is still outstanding until 15 May 2027, while the Global Medium Term Notes 2017- 30Y with 5.25% coupon is till outstanding until 15 May 2047.

### Jadwal Pembayaran Kupon Global Medium Term Notes 2017

### Coupon Payment Schedule of Global Medium Term Notes 2017

Obligasi Global Global Bond	Plafon Plafond	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon I Coupon Payment I Due	Jatuh Tempo Pembayaran Kupon II Coupon Payment II Due
GMTN 2017 - 10Y	USD 1.500.000.000	15 Mei   May	15 November
GMTN 2017 - 30Y	USD 500.000.000	15 Mei   May	15 November

### Global Medium Term Notes 2017



### Harga & Yield to Maturity (YtM) Bid Global Medium Term Notes 2017 Price & Yield to Maturity (Ytm) Bid Global Medium Term Notes 2017



## REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Seluruh dana hasil pencatatan obligasi yang terakumulasi ditahun 2017 digunakan untuk mendanai ekspansi ketenagalistrikan.

## REALIZATION OF PROCEEDS USAGE FROM BONDS PUBLIC OFFERING

All proceeds from bonds listing accumulated in 2017 was utilized to finance various Coal Power Plant construction project of large and medium scales.

## ENTITAS ANAK

### Subsidiaries

No	Entitas Anak Subsidiaries	Domisili Domicily	Jenis Usaha Business Types	Persentase Kepemilikan (%) Ownership (%)
<b>Kepemilikan Langsung   Direct Ownership</b>				
1	PT Indonesia Power	Indonesia	Pembangkitan Tenaga Listrik   Power Generation	99,99%
2	PT Pembangkitan Jawa Bali	Indonesia	Pembangkitan Tenaga Listrik   Power Generation	99,99%
3	PT Indonesia Comnets Plus	Indonesia	Jasa Penyedia Jaringan Telekomunikasi   Telecommunication Provider	99,99%
4	PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	Indonesia	Pembangkitan Tenaga Listrik   Power Generation	99,99%
5	PT Prima Layanan Nasional Enjiniring	Indonesia	Jasa Enjiniring, Pengadaan Dan Konstruksi   Engineering, Procurement and Construction	99,90%
6	PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan	Indonesia	Operation & Maintenance (O&M), Layanan Teknik di WIT dan Industri   Operation & Maintenance (O&M), Engineering Services in Eastern Indonesia and Industry	99,97%
7	PT PLN Batubara	Indonesia	Perdagangan Batubara   Coal Trading	99,99%
8	PT PLN Gas dan Geothermal	Indonesia	Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi   Geothermal Power Generation	99,99%
9	Majapahit Holding BV	Belanda	Lembaga Keuangan   Financial Institution	100%
10	PT Pelayanan Bahtera Adiguna	Indonesia	Pelayaran   Shipping	99,99%
11	PT Haleyora Power	Indonesia	Pembangkitan Tenaga Listrik   Power Generation	99,99%

Entitas Anak  
Subsidiaries

## ENTITAS AFILIASI ANAK PERUSAHAAN

No	Entitas Anak Subsidiaries	Domisili Domicily	Jenis Usaha Business Types	Persentase Kepemilikan (%) Ownership (%)
<b>Kepemilikan Tidak Langsung   Kepemilikan Tidak Langsung</b>				
<b>1</b>	<b>PT Indonesia Power</b>			
	PT Cogindo Daya Bersama (CDB)	Jakarta	Cogeneration, pemasok energi, jasa pelayanan dan manajemen/   Cogeneration, energy distribution, energy service and management	99,99%
	PT Artha Daya Coalindo	Jakarta	Perdagangan batu bara   Coal Trading	80,00%
	PT Indo Ridlatama Power	Kutai	Pembangkitan tenaga listrik   Power generation	90,00%
	PT Indo Tenaga Hijau	Jakarta	Pengembangan energi baru terbarukan   Development of new and renewable energy	95.21%
	PT Putra Indotenaga	Jakarta	Ketenagalistrikan dan Energi   Electricity and Energy	99,99%
<b>2</b>	<b>PT Pembangkitan Jawa Bali</b>			
	PT PJB Services	Surabaya	Jasa   Service	98,00%
	PT Rekadaya Elektrika (RE)	Jakarta	Jasa listrik dan enjiniring   Electricity and engineering	98,90%
	PT Navigat Innovative Indonesia (NII)	Palembang	Perdagangan, konstruksi, pertambangan dan pertanian   Trading, construction, mining and agriculture	72,97%
	PT PJB Investasi	Jakarta	Ketenagalistrikan   Electricity	99,90%
<b>3</b>	<b>PT Pelayanan Listrik Nasional Batam</b>			
	PT Pelayanan Energi Batam	Batam	Pembangunan pipa gas dan energi lainnya   Construction of gas pipeline and other energy sector	99,99%
<b>4</b>	<b>PT Prima Layanan Nasional Enjiniring</b>			
	PT Prima Power Nusantara	Jakarta	Jasa enjiniring, pengadaan dan konstruksi   Engineering, procurement and construction	99,99%
<b>5</b>	<b>Majapahit Holding B.V. (MH)</b>			
	Majapahit Finance B.V. (MF)	Belanda	Lembaga Keuangan   Financial Institution	100%
<b>6</b>	<b>PT Pelayanan Bahtera Adiguna</b>			
	PT PBM Adhiguna Putera	Jakarta	Pelayaran   Shipping	24,95%
<b>7</b>	<b>PT Haleyora Power</b>			
	PT Haleyora Powerindo (HPI)	Jakarta	Jasa   Service	90.00%
<b>8</b>	<b>PT PLN Batubara</b>			
	PT Jambi Prima Coal	Jambi	Pertambangan batubara   Coal mining	60%
<b>9</b>	<b>PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PLN Tarakan)</b>			
	PT Paguntaka Cahaya Nusantara Balikpapan	Balikpapan	Jasa pemeliharaan dan operasi   Maintenance and operation	99,96%

## ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA | ASSOCIATES AND JOINT VENTURES

No	Nama Perusahaan Company Name	Domisili Domicile	Jenis Usaha / Hubungan Business Types / Relations	Persentase Kepemilikan   Ownership (%)	
				Langsung Direct	Tak Langsung In-Direct
<b>Perusahaan Asosiasi</b>					
1	PT Geo Dipa Energi	Jakarta	Pembangkitan tenaga Listrik   Power Generation	6,67%	
2	PT Mitra Energi Batam	Batam	Pembangkitan tenaga Listrik   Power Generation		30,00% / PT PLN Batam
3	PT Indo Pusaka Berau	Berau	Perdagangan Batubara   Coal Trading		46,80% / PT IP
4	PT Sumber Segara Primadaya	Cilacap	Penyedia Tenaga Listrik   Electricity Supplier		49,00% / PT PJB
5	PT Dalle Energy Batam	Batam	Pembangkitan tenaga Listrik   Power Generation		20,00% / PTPLN Batam
6	PT Tanjung Kasam Power	Batam	Pembangkitan tenaga Listrik   Power Generation		10,00% / PT PLN Batam
7	PT Energi Pelabuhan Indonesia	Jakarta	Pembangkitan tenaga Listrik   Power Generation		45,00% / PT Haleyora Power
8	PT PBM Adhiguna Putra	Jakarta	Pelayaran   Shipping		25% / PT BAG
<b>Ventura Bersama</b>					
1	PT Unelec Indonesia	Jakarta	Penunjang Penyedia Tenaga Listrik   Electricity Supplier Supports	32,25%	
2	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	Jepara	Operasi dan Pemeliharaan   Operations and Maintenance		49,00% / PT PJB
3	PT Bajradaya Sentranusa	Asahan	Pembangkitan tenaga Listrik   Power Generation		36,61% / PT PJB
4	PT Bukit Pembangkit Innovative	Palembang	Pembangkitan tenaga Listrik   Power Generation		37,25% / PT PJB
5	PT Perta Daya Gas	Jakarta	Transportasi dan penyimpanan LNG   LNG transportation and storage		35,00% / PT IP
6	PT Rajamandala Electric Power	Jakarta	Pembangkitan tenaga Listrik   Power Generation		51,00% / PT IP
7	PT Crompton Power Switchgear Indonesia	Jakarta	Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik   Control Equipment and Electricity Distribution		49,00% / PT PLNE
8	PT Rekind Daya Mamuju	Jakarta	Pembangkitan tenaga Listrik   Power Generation		10,00% / PT PJB
9	PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali	Jakarta	Pembangkitan tenaga Listrik   Power Generation		30,00% / PT PJB
10	PT GCL Indotenaga	Jakarta	Pembangkitan tenaga Listrik   Power Generation		35,00% / PT IP
11	PT Guohua Taidian – PJB	Jakarta	Pembangkitan tenaga Listrik   Power Generation		35,00% / PT PJB
12	PT North Sumatra Hydro Energy	Sumatera Utara	Pembangkitan tenaga Listrik   Power Generation		25% / PT PJB
13	PT Indo Raya Tenaga	Jakarta	Pembangkitan tenaga Listrik   Power Generation		51% / PT PIT

# DAFTAR ALAMAT ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, VENTURA BERSAMA

Address of Subsidiaries, Associates, Joint Ventures

## DAFTAR ALAMAT ENTITAS ANAK | ADDRESS OF SUBSIDIARIES

### PT Indonesia Power

Jalan Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta Selatan

### PT Pembangunan Jawa Bali

Jl. Ketintang Baru No.11  
Surabaya60231 Indonesia  
Telepon : (62-31) 8283180 (Hunting)  
Faksimili : (62-31) 8283183  
Email : info@ptpjb.com

### PT Indonesia Comnets Plus

Kawasan PLN Cawang,  
Jl. Mayjend Sutoyo No. 1, Cililitan  
Jakarta Timur, 13640

### PT Pelayanan Listrik Nasional Batam

Jl. Engku Puteri No. 3, Batam Centre, Batam, Prov  
Kepri

### PT Prima Layanan Nasional Enjiniring

Jl. Wijaya I no. 61, Jakarta 12170 – Indonesia  
Tel : (62-21) 27510363 (Hunting)  
Fax : (62-21) 27510362  
Email : contact@pln-enjiniring.com  
Website : www.pln-enjiniring.com  
Twitter : @enjiniring

### PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan

Jl. RE Martadinata No. 35 RT 52, Balikpapan- Kaltim  
76121  
Telepon: (0542) 850 6674

### PT PLN Geothermal

PT PLN (Persero) Kantor Pusat Gedung 1 Lantai 7  
Head Office, Building 1, 7th Floor Trunojoyo Street  
Blok M I/135, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160  
Telp. (021) 7251234, 7261122 ext. 4171 Fax : (021)  
7227063

### Majapahit Holding BV

Amsterdam, Belanda.

### PT Pelayanan Bahtera Adiguna

Jl. Kalibesar Timur Street No. 10 – 12, Jakarta Barat  
11110  
Telp. (021) 6912547, 6912548, 6912549 Fax : (021)  
6901450, 6902726  
Email : pelba@bahteradiguna.co.id Website : http://  
www.bahteradiguna.co.id

### PT Haleyora Power

Pejaten Office Park Blok B  
Jl. Pejaten Office Park Block B Warung Buncit Raya  
Street No. 79, Pejaten Barat Jakarta Selatan  
Telp. (021) 79192517 Fax : (021) 79192516 Email :  
sekper@haleyora.co.id

## DAFTAR ALAMAT ENTITAS ASOSIASI | ADDRESS OF ASSOCIATES

### PT Geo Dipa Energi

Recapital Building 8th Floor  
Jl. Adityawarman Street Kav. 55, Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan  
Telp. (021) 7245673 (hunting)  
Fax. (021) 7247539  
E-mail : pusat@geodipa.co.id

### PT Mitra Energi Batam

Jl. Lintas Gas Negara Trans Bareleng KM3.5  
Pananan- Kepulauan Riau 29438, Indonesia  
Telp. +6278 3583331/32  
Fax. +6278 3583333

### PT Indo Pusaka Berau

Jl. Pemuda No 356 Tanjung Redeb, Kabupaten Berau -  
Kalimantan Timur  
Pemuda Street No 356, Tanjung Redeb, Berau District –  
East Kalimantan

### PT Sumber Segara Primadaya

Office 8 Lantai 9 SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman  
Kav.52-53  
(Jl. Senopati Raya No.8B) Jakarta 12190

### PT Dalle Energy Batam

Jl. Lintas Gas Negara Trans Bareleng KM3.5  
Pananan- Kepulauan Riau 29438, Indonesia  
Telp. +6278 3583331/32 Fax. +6278 3583333

### PT Tanjung Kasam Power

Jl. Patimura, Sei Kasam Telaga Punggur, Batam-  
KepRiau 29467  
Telp. +6278 8070196 Fax. +6278 8070 198

### PT Energi Pelabuhan Indonesia

Jl. Yos Sudarso No. 30 Jakarta Utara, cs@  
ecopowerport.co.id  
Pelayanan Administrasi: 021-4305052 Pelayanan  
Teknik: 021-4370510

## Daftar Alamat Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Ventura Bersama

Address of Subsidiaries, Associates, Joint Ventures

### DAFTAR ALAMAT VENTURA BERSAMA | ADDRESS OF JOINT VENTURES

#### PT Unelec Indonesia

Jl. Swadaya PLN, Klender Jakarta Timur 13930

#### PT Rajamandala Electric Power

Jl. PMI Building 2nd Floor, Wijaya I Street No.63  
Kebayoran Baru - Jakarta Selatan Jakarta 12170

#### PT Bajradaya Sentranusa

Jl. Wijaya III Street No.5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170

#### PT Bukit Pembangkit Inovatif

Gedung Graha Surveyor Indonesia, Lantai 17, Suite 1703

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.56, Jakarta

#### PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali

PLTU Tabjung Jati B Unit 3 dan 4, Tubana Village,  
Rembang, Jepara District, Jawa Tengah 59453  
Telp (0291) 4270493, Fax (0291) 427060

#### PT Perta Daya Gas

Patra Office Tower Lt. 2, Jl. Jend. Gatot Subroto  
Kav.32-34 Jakarta Selatan 12950

#### PT Crompton Power Switchgear Indonesia

Jl. Wijaya I No. 61, Kebayoran Bar, Jakarta Selatan  
12170

Factory Office: (Correspondence)

Kawasan Industri Modern Cikande Jl. Modern Industri  
VI Blok A No.4

Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang  
Banten 42185

Telp +62254 8408448 Fax +62254 8408848

#### PT Rekind Daya Mamuju

Jl. MT Haryono Kav.27 Jakarta Selatan

Tel : 021-83789152, 021-83785961

Fax : 021-8307578

Email : Info@rdm.co.id

Website: www.rdm.co.id

#### PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali

APL Tower Lt.39 unit Jl. Letjend S. Parman Kav.28  
Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan Jakarta Barat

#### PT GCL Indotenaga

Chase Plaza Lantai 9

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta Selatan  
12920

Telp. : (62 21) 25989710

Fax : (62 21) 25989712

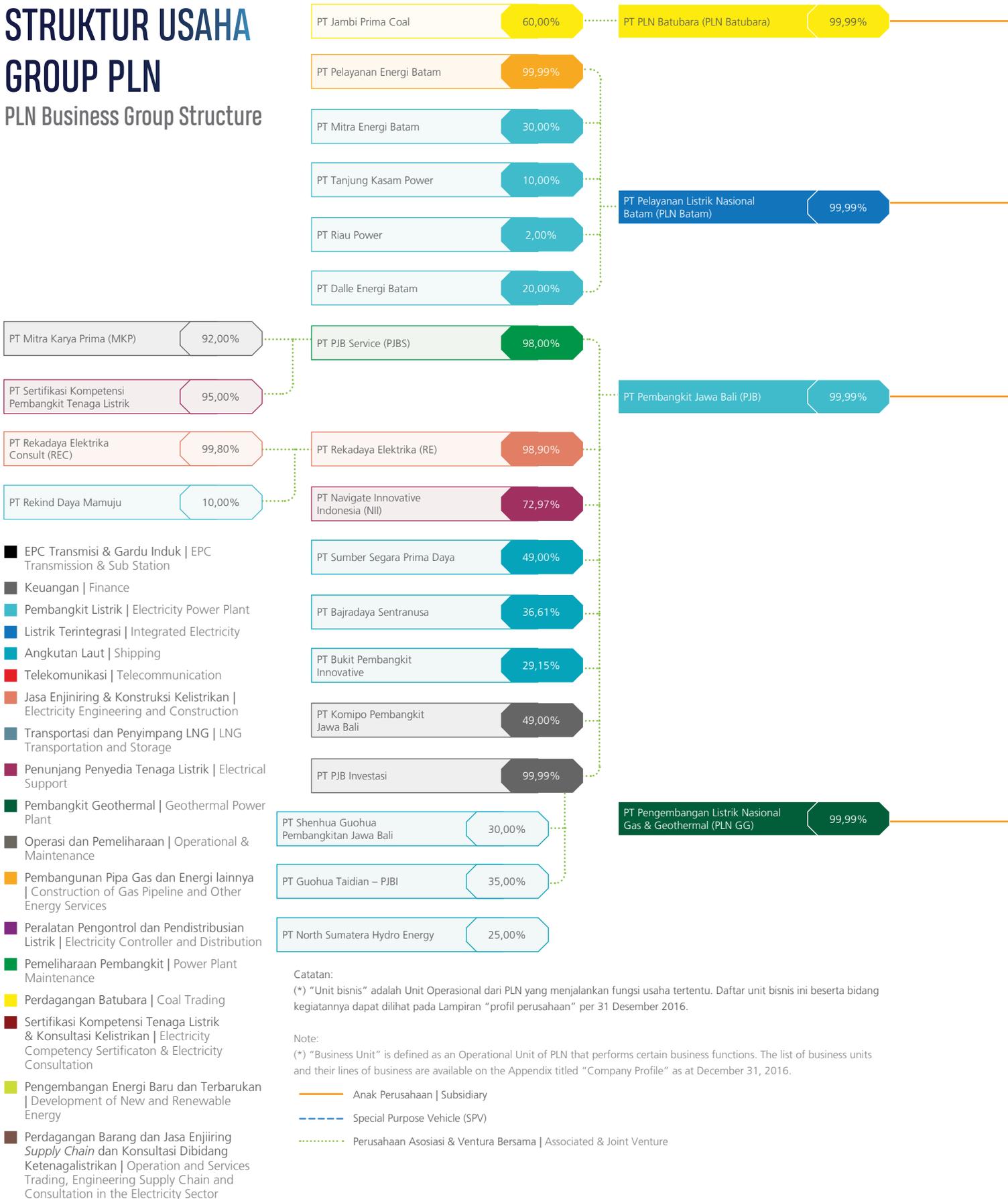
#### PT Guohua Taidian – PJBI

APL Tower Lt.39 Floor Suite 1 ,Podomoro City,(Central  
Park)unit

Jl. Letjend S. Parman Kav.28 Tanjung Duren Selatan,  
Grogol Petamburan - Jakarta Barat

# STRUKTUR USAHA GROUP PLN

## PLN Business Group Structure





PT Indonesia Power (IP) 99,99%

PT Pelayaran Listrik Nasional Tarakan (PLN Tarakan) 99,97%

PT Haleyora Power ( HP) 99,99%

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna 99,99%

PT BPM Adhiguna Putera 25,00%

PT Icon Plus 99,99%

PT PLN Engineering 99,90%

PT Unelec Indonesia 32,35%

PT Geodipa Energi 6,67%

PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang 100%

Majapahit Holding B.V (MH) 100%

PT Indo Tenaga Hijau 95,21%

PT Indo Pusaka Berau (IPB) 46,53%

PT Artha Daya Colindo(ADC) 80,00%

PT Cogindo Daya Bersama (CBD) 99,99%

PT Indo Ridatama Power (IRP) 90,00%

PT Putra Indotenaga 99,99%

PT GCL Indo Tenaga 35,00%

PT Rajamandala Electric Power 51,00%

PT Indo Raya Tenaga 51,00%

PT Tangkuban Perahu Geothermal Power (TPGP) 95,21%

PT Perta Daya Gas 35,00%

PT Paguntaka Cahaya Nusantara 99,96%

PT Haleyora Powerindo (HPI) 90,00%

PT Energi Pelabuhan Indonesia 45,00%

PT Energi Prima ElektriKa 7,50%

PT Multidaya Prima Elektrindo 15,00%

PT Crompton Prima Switthgear Indonesia 49,00%

PT Prima Power Nusantara 99,99%

PT Permata Prima Elektrindo 15,00%

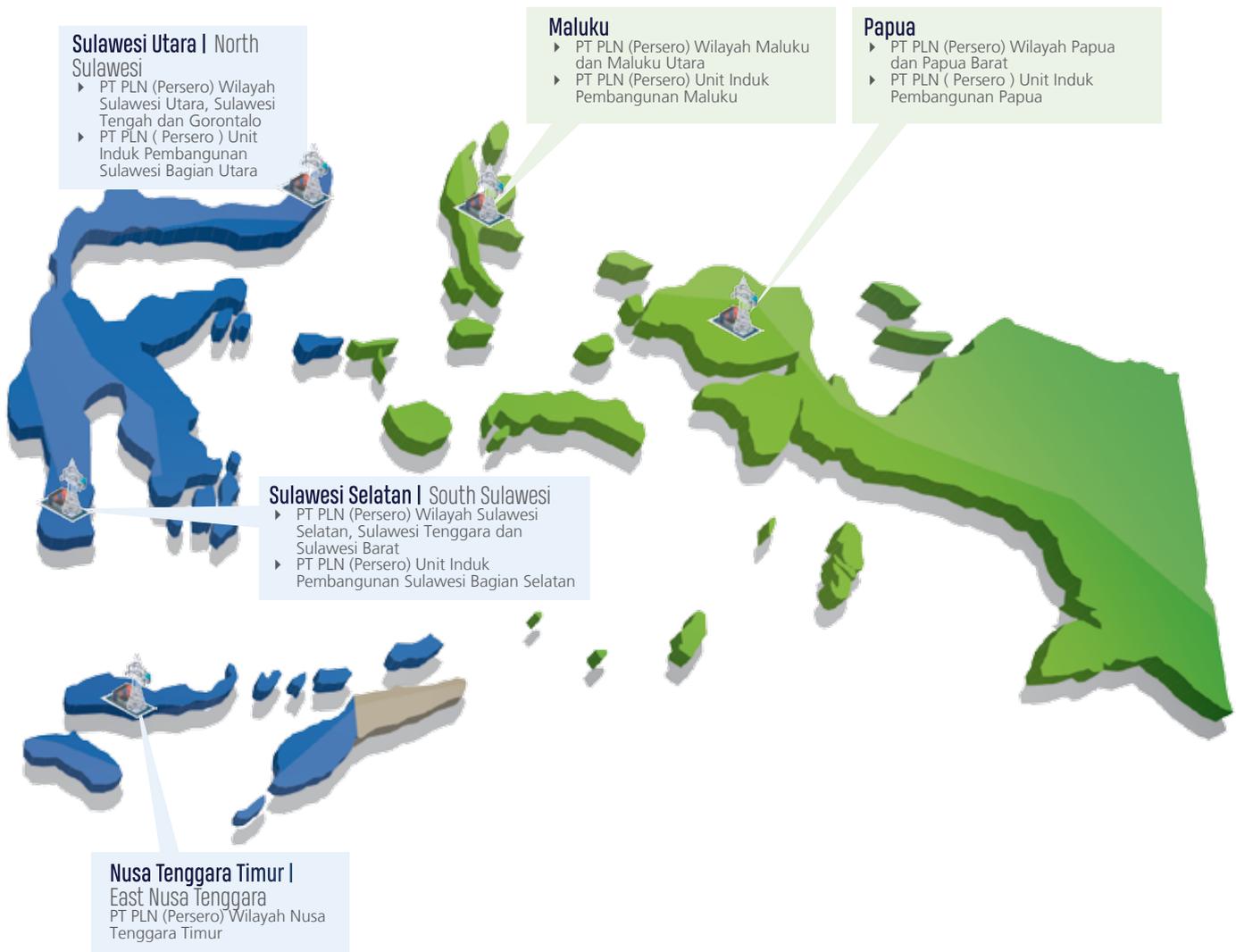
PT Pura Daya Prima 15,00%

Majapahit Finance B.V (MF) 100%

# WILAYAH OPERASI

## Operational Area



Wilayah Operasi  
Operational Area

# JEJAK LANGKAH PERUSAHAAN

## Company Milestones

### Akhir Abad 19

#### Late 19<sup>th</sup> Century

Perusahaan-perusahaan Belanda di bidang Pabrik Gula dan Perkebunan Teh membangun pembangkit listrik untuk keperluan sendiri. | Dutch companies (sugar factories and tea plantations) constructed power plants for their own use.

### 1942–1945

Seluruh perusahaan Penyedia Tenaga Listrik eks Belanda diambil alih Jepang. | All of the electricity generating facilities under the Dutch rule were taken over by Japan.

### 27 Oktober 1945

27 October 1945

Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. | President Sukarno established the Electricity and Gas Bureau under the command of the Department of Public Works and Energy.

### 1 Januari 1961

1 January 1961

Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) dengan bidang usaha penyediaan listrik, gas dan kokas. | The Electricity and Gas Bureau reconstituted into BPU-PLN (Board of General Administration of the State Electricity Company) with its line of business as provider of electricity, gas, and coking coal.

### 1 Januari 1965

1 January 1965

BPU-PLN dibubarkan, dibentuk Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas. | BPU-PLN was dismissed, followed by the establishment of two state companies, namely the State Electricity Company (PLN) managing the electricity sector and the National Gas Company (PGN) managing the gas sector.

### 2006

Sesuai Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2006, PLN ditugasi untuk membangun PLTU berbahan bakar batubara sebesar 10.000 MW tahap pertama (FTP I). | In accordance to the Presidential Regulation No. 71 of 2006, PLN was mandated to build coal-fired Power Plant with a capacity of 10,000 MW for the first phase (FTP I).

### 2009

Undang-undang No. 30 Tahun 2009 disahkan, PLN bukan lagi sebagai PKUK, namun beroperasi sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. | With the issuance of Law No. 30 of 2009, PLN was no longer designated as PKUK but operated as a State-Owned Entity (SOE) with the mandate to provide electricity to the public.

### 2010

Sesuai Peraturan Presiden No.4 Tahun 2010, PLN ditugasi untuk membangun PLTU berbahan bakar batubara, gas maupun panas bumi dalam bentuk program percepatan tahap kedua (FTP II). | In accordance to the Presidential Regulation No. 4 of 2010, PLN was mandated to build coal, gas, and geothermal Power Plants as a second phase fast track program (FTP II).

### 2011

Pemerintah menyerahkan saham BUMN PT Pelayaran Bahtera Adiguna (BAG) kepada PT PLN (Persero) pada tanggal 5 Agustus 2011 dan menjadi anak perusahaan PT PLN (Persero). | The Government handed over the SOE shares of PT Pelayaran Bahtera Adiguna (BAG) to PT PLN (Persero) in August 5, 2011, thus establishing BAG as a subsidiary of PT PLN (Persero).

### 2013

PLN mengoperasikan *Compressed Natural Gas* (CNG) sebagai bahan bakar pengganti BBM untuk memenuhi kebutuhan pembangkit beban puncak (*peaker*). | PLN operated Compressed Natural Gas (CNG) as a fuel substituting oil to meet the demand of its peaker power plant.

Jejak Langkah Perusahaan  
Company Milestones

## 1970

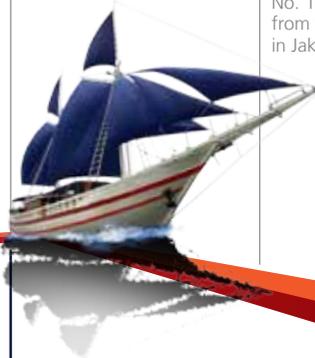
Status Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) sesuai ketetapan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1970. | The Company's status was changed to Public Company (Perum) in accordance with the Government Regulation No. 30 of 1970.

## 1972

Status PLN berubah menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara dan bertindak sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. | PLN's status was changed to Public State-Owned Electricity Company and acted as the Holder of the Authority to Conduct Electricity Business (Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan—PKUK) with the mandate to provide electricity for public use.

## 1992

Tahun pertama mendapatkan dana investasi dari pasar modal domestik, melalui penerbitan Obligasi PLN I. | For the first time PLN obtained investment funds from the domestic capital market through the issuance of the PLN Bonds I.



## 1994

Status badan hukum berubah menjadi Perseroan Terbatas, sesuai Akta No. 169 Tanggal 30 Juli 1994 dari Sutjipto S.H. Notaris, Jakarta. | PLN's legal status was changed into Limited Liability Company, in accordance with the Act No. 169 dated July 30, 1994 from Sutjipto S.H., Notary in Jakarta.

## 2005

PLN memulai program transformasi menjadi Perusahaan Penyedia dan Penyalur Listrik Kelas Dunia. | PLN began its transformation program into a World-Class Electricity Supplier and Distributor.

## 2014

PLN menjadi salah satu dari kelompok perusahaan dengan pendapatan terbesar di dunia versi Fortune 500. | PLN became one of the companies with the largest revenues in the world, according to Fortune 500.

## 2015

PLN mendeklarasikan dimulainya pembangunan PLTU berbahan bakar batubara, gas maupun panas bumi sebesar 35.000 MW dengan target penyelesaian 5 tahun ke depan.

PLN mulai merealisasikan proyek pembangunan PLTU berteknologi *ultra super critical* dengan kapasitas 2.000 MW di Batang (Jawa Tengah) melalui skema *Public Private Partnership*. | PLN declared the construction of coal, gas, and geothermal Coal Power Plants of 35,000 MW capacity with target of completion within the next five years.

PLN commenced the construction of coal power plant with the ultra super critical technology, with a capacity of 2,000 MW in Batang (Central Java) through the Public Private Partnership scheme.

## 2016

Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No.4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, PLN mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah untuk eksekusi proyek ketenagalistrikan dalam hal penjaminan, percepatan perizinan dan non perizinan, penyediaan energi primer, tata ruang, penyediaan tanah, penyelesaian hambatan dan permasalahan, serta penyelesaian masalah hukum yang dihadapi. | With the issuance of Presidential Decree No.4 / 2016 on the Acceleration of Electricity Infrastructure Development, PLN received full support from the Government for the execution of electricity projects in terms of guarantee, acceleration of permit and non-permit, provision of primary energy, the provision of land, the settlement of obstacles and problems, and problem solving laws faced.

## 2017

Tiada lagi sistem kelistrikan di Indonesia yang mengalami defisit. Ini berarti masalah pemadaman karena kurangnya pasokan daya listrik sudah terselesaikan. | There is no longer a deficit in Indonesia's electricity system. This means the blackout problem due to lack of power supply has been resolved.

# LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PERUSAHAAN DI PASAR MODAL

## Capital Market Supporting Institutions and Professions

### AKUNTAN PERUSAHAAN | PUBLIC ACCOUNTANT

<b>Nama   Name</b>	<b>KAP RSM Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &amp; Rekan (KAP RSM AAJ)</b>	
<b>Alamat   Address</b>	Plaza Asia Lantai 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190	
<b>Jasa yang Diberikan   Services</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jasa audit umum laporan keuangan</li> <li>Jasa Audit kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern</li> <li>Audit Atas Pekerjaan Dalam Pelaksanaan</li> <li>Audit Atas <i>Project Financial Statement</i></li> <li>Audit Atas <i>Financial Covenant Ratio</i></li> <li>Audit atas Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian</li> <li>Audit Atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)</li> <li><i>Review</i> Atas Laporan Evaluasi Kinerja</li> <li><i>Review</i> Atas Laporan KPI per Direktorat</li> <li><i>Review</i> atas perhitungan <i>Consolidated Interest Coverage Ratio (CICR)</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>General audit of financial statements</li> <li>Audit compliance with the Laws and Regulations and Internal Control</li> <li>Audit on Undergoing Works</li> <li>Audit of Financial Statements project</li> <li>Audit on Financial Covenant Ratio</li> <li>Audit on Prudential Principle Application Activity Report</li> <li>Audit on Partnership and Community Development Program (PKBL)</li> <li>Performance Evaluation Report Review</li> <li>KPI per Directorate Report Review</li> <li>Consolidated Interest Coverage Ratio (CICR) computing review</li> </ol>
<b>Biaya   Fees</b>	Rp 13,48 miliar   billion (2017)	
<b>Periode   Period</b>	2016-2017	

### BIRO ADMINISTRASI EFEK | SHARE REGISTRAR

<b>Nama   Name</b>	<b>PT Kustodian Sentral Efek Indonesia</b>	
<b>Alamat   Address</b>	Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia	
<b>Jasa yang Diberikan   Services</b>	Pencatatan Daftar Pemegang Saham (DPS) atau jasa administrasi saham di Pasar Sekunder yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Shareholder Registry or shares registry services in Secondary Market listed at the Indonesia Stock Exchange
<b>Biaya   Fees</b>	<p><i>Annual Fee</i> Rp10.000.000 per tahun, dibebankan atas setiap seri Efek Bersifat Utang dan atau Sukuk yang didaftarkan.</p> <p>Pelaksanaan tugas Agen Pembayaran 0,05% dari bunga Efek Bersifat Utang dan bagi hasil untuk Sukuk yang dibayarkan. Biaya diperhitungkan per seri dengan ketentuan min. Rp2.500.000 dan maks Rp10.000.000</p>	<p><i>Annual Fee</i> Rp10,000,000 per year, charged on every listed Debt Securities and or Sukuk series</p> <p><i>Payment Agent Duties</i> 0.05% from Debt Securities interest and profit sharing for paid Sukuk. Cost is computed per series with minimum plafond of Rp2,500,000 and maximum of Rp10,000,000.</p>
<b>Periode   Period</b>	2004 - sampai dengan Obligasi PLN dan/atau Sukuk PLN dinyatakan lunas.	2004 – until the Bonds PLN and/or Sukuk PLN are completed.

## Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan di Pasar Modal

Capital Market Supporting Institutions and Professions

### BURSA EFEK | STOCK EXCHANGE

Nama   Name	PT Bursa Efek Indonesia	
Alamat   Address	Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I Lantai 6 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta - 12190	
Jasa yang Diberikan   Services	Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.	Organizing and providing a system or facility to bring about securities sale and purchase offers of other parties that aims at trading securities between them.
Biaya   Fees	Sekurang-kurangnya Rp10.000.000 dan sebanyak-banyaknya Rp150.000.000 per masing-masing jenis Efek bersifat utang	At least Rp10,000,000 and as much as Rp150,000,000 per each debt securities types
Periode   Period	1992 - 2018	

Nama   Name	Singapore Exchange Securities Trading Limited ("SGX")	
Alamat   Address	2 Shenton Way, #02-02 SGX Centre 1, Singapore 068804	
Jasa yang Diberikan   Services	Penyelenggaraan dan penyediaan sistem dan/ atau sarana untuk mempertemukan permintaan dan penawaran jual-beli Efek oleh pihak-pihak terkait dengan tujuan perdagangan Efek (salah satunya obligasi).	Organizing and providing a system or facility to bring about securities sale and purchase offers of related parties that aim at trading the securities (such as bonds).
Biaya   Fees	±SGD25,000 per penerbitan	±SGD 25,000 per issuance
Periode   Period	Program Obligasi Internasional tahun 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, dan 2017	International Bonds Programs for 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, and 2017

## Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan di Pasar Modal

### Capital Market Supporting Institutions and Professions

#### WALI AMANAT OBLIGASI | BONDS TRUSTEE

Nama   Name	PT CIMB Niaga Tbk.	
Alamat   Address	Gedung Graha Niaga Lt 7 Jln Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190	
Jasa yang Diberikan   Services	Wali Amanat atau Badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para pemegang Obligasi PLN IX seri A & B, XI seri A & B, XII seri B dan Sukuk Ijarah PLN II, IV seri A & B, dan V seri B.	Trustee or Agency trusted to represent the interest of holders of Bonds PLN IX series A & B, XI series A & B, XII series B and Sukuk Ijarah PLN II, IV series A & B, and V series B.
Periode   Period	Tahun 2004 – sampai dengan obligasi dinyatakan lunas.	2004 – until all bonds are completed.

Nama   Name	PT Bank Permata Tbk.	
Alamat   Address	PermataBank, WTC II Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 - 31, Jakarta 12920 Telepon: +62 21 523 7788 Fax: +62 21 523 7253	
Jasa yang Diberikan   Services	Wali Amanat atau Badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para pemegang Obligasi PLN Obligasi Berkelanjutan I PLN dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN.	Trustee or Agency trusted to represent the interest of holders of Bonds PLN Bonds Shelf I PLN and Sukuk Ijarah Shelf I PLN.
Periode   Period	Tahun 2013 – sampai dengan obligasi dinyatakan lunas.	2013 – until all bonds are completed.

Nama   Name	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
Alamat   Address	Menara Bank BTN Lt. 18 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta – 10130	
Jasa yang Diberikan   Services	Wali Amanat atau Badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para pemegang Obligasi PLN VIII seri B, Obligasi Berkelanjutan II PLN dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN.	Trustee or Agency trusted to represent the interest of holders of Bonds PLN VIII series B, Bonds Shelf II PLN and Sukuk Ijarah Shelf II PLN.
Periode   Period	Sampai dengan Obligasi PLN dan/atau Sukuk Ijarah PLN dinyatakan lunas.	Until Bonds PLN and/or Sukuk Ijarah PLN are completed.

Nama   Name	Deutsche Bank Trust Company Americas	
Alamat   Address	60 Wall Street, MS: NYC 60-1630, New York, New York 10005	
Jasa yang Diberikan   Services	Trustee atau Wali Amanat yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para pemegang obligasi serta menjadi agen pembayaran transaksi yang berhubungan dengan para pemegang obligasi.	Trustee or Agency trusted to represent the interest of bondholders as well as the agent for transaction payment related with the bondholders.
Periode   Period	Program Obligasi Internasional tahun 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, dan 2017	International Bonds Programs for 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, and 2017

## Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan di Pasar Modal

Capital Market Supporting Institutions and Professions

### PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK | RATING AGENCIES

<b>Nama   Name</b>	<b>PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)</b>	
Alamat   Address	Panin Tower Senayan City 17th floor Jalan Asia Afrika Lot. 19	
Jasa yang Diberikan   Services	Pemeringkatan atas Perseroan	Rating for the Company
Biaya   Fees	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya Jasa Pemeringkatan atas Obligasi / Sukuk (Excl. PPN) (0,042% x setiap penerbitan) Rp840.000.000 s/d Rp1.360.800.000</li> <li>- Biaya Pemantauan Tahunan (Excl. PPN) Rp175.000.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rating Fees on Bonds / Sukuk (Excluding VAT) (0.042% x every issuance) Rp840,000,000 up to Rp1,360,800,000</li> <li>· Annual Monitoring Fees (Excluding VAT) Rp175,000,000</li> </ul>
Periode   Period	Sampai dengan PLN menginginkan diakhirinya kerjasama pemeringkatan / dinyatakan pailit / dibubarkan.	Until the termination request by PLN on the cooperation for rating/ upon bankruptcy / liquidated.
<b>Nama   Name</b>	<b>Moody's Investor Service Hongkong Limited</b>	
Alamat   Address	24/F, One Pacific Place, 88 Quesway Hongkong	
Jasa yang Diberikan   Services	Pemeringkatan atas Perseroan	Rating for the Company
Periode   Period	Program Obligasi Internasional tahun 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, dan 2017	International Bonds Programs for 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, and 2017
<b>Nama   Name</b>	<b>Standard and Poor's Singapore Pte. Ltd.</b>	
Alamat   Address	12 Marina Boulevard #23-01 Marina Bay Financial Centre Tower 3 Singapore 018982	
Periode   Period	Program Obligasi Internasional tahun 2006, 2007, 2009, 2011, dan 2012.	International Bonds Programs for 2006, 2007, 2009, 2011, and 2012
<b>Nama   Name</b>	<b>Fitch Ratings Ltd</b>	
Alamat   Address	30 North Colonnade London E14 5GN	
Jasa yang Diberikan   Services	Pemeringkatan atas Perseroan	Rating for the Company
Periode   Period	Program Obligasi Internasional tahun 2011, 2012, dan 2017	International Bonds Programs for 2011, 2012, and 2017

## Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan di Pasar Modal

### Capital Market Supporting Institutions and Professions

#### NOTARIS | NOTARY

##### **Lenny Janis, SH**

Jln. Hang Lekir 9 No.1  
Jakarta 12120

##### **Aryanti Artisari, SH, M.Kn.**

Menara Sudirman Lantai 18  
Jl. Jend Sudirman Kav 60  
Jakarta Selatan 12190

##### **Ati Mulyati, SH, MKn**

Cyber 2 Tower Lantai 22 E  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13  
Jakarta Selatan 12950

##### **Yualita Widyadhari, SH., MKn.**

TCC Batavia Tower One Lantai 9 Suite 9  
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126  
Jakarta Pusat 10220

#### KONSULTAN HUKUM | LEGAL CONSULTANTS

##### **Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo Law Office**

Office 8 Lantai 15 Unit H-SCBD Lot 28  
Jln Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

##### **Amanah**

Gedung Victoria Lt 3  
Jln Sultan Hasanudin No. 47/51  
Jakarta

##### **A. Hakim G. Nusantara, Harman & Partners**

Menara Jamsostek Lt 4  
Suite TA 0402  
Jln. Jend Gatot Subroto No.38  
Jakarta

##### **Hadiputranto, Hadinoto & Partners**

Indonesia Stock Exchange Building Tower II Lt 21  
Jln. Jend Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190



### Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan di Pasar Modal Capital Market Supporting Institutions and Professions



# PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN EKSTERNAL

## Awards and External Recognitions

### DAFTAR PENGHARGAAN YANG DITERIMA PLN TAHUN 2017 LIST OF AWARDS RECEIVED BY PLN IN 2017

No	Waktu Date	Jenis Penghargaan   Awards	Jumlah Penghargaan Total Awards	Kategori Category
1	25 Januari 2017	Penghargaan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)   Award from the Ministry of State-Owned Enterprise (SOE)	1	Penghargaan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada Sofyan Basir sebagai salah satu Direksi BUMN yang berprestasi dan berkontribusi terhadap negara   Award from the Ministry of State-Owned Enterprise (SOE) to Sofyan Basir as one of the Board of Directors of SOE with high achievements and contribution to the State
2	24 Maret 2017	PR Indonesia Award 2017	1	PLN meraih penghargaan kategori: Media Relations, Program PR dan Media Internal sub kategori Video Profile (Video Dokumenter PDKB).   PLN received award of the category: Media Relations, PR Program and Media Internal sub category of Video Profile (PDKB Documentary Video)
3	3 Mei 2017	Indonesia Green Awards (IGA) 2017 (The La Tofi School of CSR)	5	<p>PLN raih gelar The Best Indonesia Green Awards 2017 karena berhasil meraih di seluruh kategori penghargaan.</p> <p>Kategori Penghargaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelamatan Sumber Daya Air.</li> <li>2. Menghemat Energi dan Penggunaan Energi Baru dan Terbarukan.</li> <li>3. Mengembangkan Keanekaragaman Hayati.</li> <li>4. Pelopor Pencegahan Polusi.</li> <li>5. Mengembangkan Pengolahan Sampah Terpadu</li> </ol> <p>PLN received The Best Indonesia Green Awards 2017 as the Company received all awards categories.</p> <p>Awards Category:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Water Resources Conservation</li> <li>2. Energy Saving and Use of New and Renewable Energy</li> <li>3. Biodiversity Development</li> <li>4. Pioneer in Pollution Prevention</li> <li>5. Developing Integrated Waste Management</li> </ol>



## Penghargaan dan Pengakuan Eksternal

### Awards and External Recognitions

#### DAFTAR PENGHARGAAN YANG DITERIMA PLN TAHUN 2017

##### LIST OF AWARDS RECEIVED BY PLN IN 2017

No	Waktu Date	Jenis Penghargaan   Awards	Jumlah Penghargaan Total Awards	Kategori Category
4	19 Juli 2017	Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 2017 (Kementerian Ketenagakerjaan)   Occupational Health and Safety (OHS) 2017 Award (Manpower Ministry)	79	<p>Kategori penghargaan yang diraih unit-unit PLN dan beberapa Anak Perusahaan PLN meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecelakaan Nihil: PLN Distribusi Jawa Barat Area Bandung dan PLN Pembangkitan Tanjung Jati B</li> <li>2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3):               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kategori Tingkat Lanjutan: 44 Sertifikat Emas dan Bendera Emas serta 1 Sertifikat Perak dan Bendera Perak</li> <li>b. Kategori Tingkat Awal: 28 Sertifikat Emas dan 3 Sertifikat Perak</li> </ol> </li> <li>3. Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja: PLN Pembangkitan Tanjung Jati B</li> </ol> <p>The following awards categories received by PLN Units and several PLN Subsidiaries:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nil Accident: PLN West Java Bandung Distribution and PLN Tanjung Jati B Power Plant</li> <li>2. Occupational Health and Safety Management System (OHSMS):               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Advance Level Category: 44 Gold Certificates and Gold Flags and 1 Silver Certificate and Silver Flag</li> <li>b. Beginner Level Category: 28 Gold Certificates and 3 Silver Certificates</li> </ol> </li> <li>3. Prevention and cure program for HIV/AIDS at Work Place: PLN Tanjung Jati B Power Plant</li> </ol>
5	1 Agustus 2017	Penghargaan dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP)   Award from Work Unit of Pancasila Ideology Mentoring President (JKP-PIP)	1	<p>Penghargaan ini diberikan karena PLN dianggap mampu menjamin pasokan dan kehandalan listrik selama lebaran.   The award was rendered to PLN because the Company is considered able to ensure the electricity supplies and reliability during religious holidays.</p>
6	18 Agustus 2017	Social Business Innovation Award 2017 (Warta Ekonomi)	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Social Business Innovation Award Kategori Energy.</li> <li>2. Sofyan Basir (President Director of PLN) as The Best Green CEO 2017 Kategori Energy</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Social Business Innovation Award Kategori Energy</li> <li>2. Sofyan Basir (President Director of PLN) as The Best Green CEO 2017 Kategori Energy</li> </ol>



## Penghargaan dan Pengakuan Eksternal

### Awards and External Recognitions

#### DAFTAR PENGHARGAAN YANG DITERIMA PLN TAHUN 2017

#### LIST OF AWARDS RECEIVED BY PLN IN 2017

No	Waktu Date	Jenis Penghargaan   Awards	Jumlah Penghargaan Total Awards	Kategori Category
7	6-Sep-17	Nusantara CSR Awards 2017 (The La Tofi School of CSR)	7	<p>PLN raih gelar The Best Nusantara CSR Awards 2017 karena berhasil meraih di seluruh kategori penghargaan.</p> <p>Tiga kategori penghargaan dalam Nusantara CSR Awards 2017 yang keseluruhannya diraih oleh PLN, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat</li> <li>2. Peningkatan Ekonomi Masyarakat (start-up ekonomi kreatif)</li> <li>3. Peningkatan Mutu Kesehatan Masyarakat</li> </ol> <p>PLN received The Best Nusantara CSR Awards 2017 as the Company received all awards categories.</p> <p>Three awards category:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Communities Education Quality Improvements</li> <li>2. Communities Economic Improvements (creative economics start-up)</li> <li>3. Communities Health Quality Improvements</li> </ol>
8	27-Sep-17	The 3rd ASEAN Coal Awards (ASEAN Center for Energy)	1	PLTU Tarahan mendapatkan penghargaan kategori Best Practices in Clean Coal Use and Technology   Tarahan Coal Power Plant received the Best Practices award in the category of Clean Coal Use and Technology
9	29-Sep-17	Indonesia Corporate Public Relations Excellence Award 2017 (Warta Ekonomi)   Indonesia Corporate Public Relations Excellence Award 2017 (Warta Ekonomi)	8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Most Popular Company: PT PLN (Persero), PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali.</li> <li>2. The Best PR for CEO: Sofyan Basir.</li> <li>3. The Most Popular CEO: Sofyan Basir.</li> <li>4. The Most Popular Company in Business Performance: PT PLN (Persero).</li> <li>5. The Most Popular Company in Innovation: PT PLN (Persero).</li> <li>6. The Most Popular Company in Business Expansion PT PLN (Persero).</li> </ol>
10	23-Nov-17	Penghargaan Transformasi dan Inovasi Keuangan BUMN 2017	1	PLN raih Penghargaan Transformasi dan Inovasi Keuangan BUMN 2017 karena berhasil meningkatkan kapasitas pendanaan, kemampuan pengelolaan risiko keuangan dan peningkatan kontribusi pada Pemerintah



## Penghargaan dan Pengakuan Eksternal

Awards and External Recognitions

### DAFTAR PENGHARGAAN YANG DITERIMA PLN TAHUN 2017

LIST OF AWARDS RECEIVED BY PLN IN 2017

No	Waktu Date	Jenis Penghargaan   Awards	Jumlah Penghargaan Total Awards	Kategori Category
11	28-Nov-17	Indonesian CSR Award 2017 (Badan Standardisasi Nasional)   (National Standardization Agency)	8	<p><b>Grand Platinum Award</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bidang Lingkungan, kategori pengelolaan lingkungan               <ol style="list-style-type: none"> <li>Platinum - Program Bank Sampah PLN Surabaya Dan Malang.</li> <li>Platinum - Batu Kapur Bersihkan Langit Jepara.</li> <li>Platinum - Pengelolaan DAS Berbasis Masyarakat, andar Lampung.</li> </ol> </li> <li>Bidang Konsumen, kategori kepuasan pelanggan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Silver - Program PLN Mobile.</li> <li>Platinum - Program Contact Center PLN 123.</li> <li>Gold - Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU).</li> </ol> </li> <li>Bidang Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (CID)               <ol style="list-style-type: none"> <li>Siler - Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis inovasi Sentra ternak di PLTU Tanjung jati B Jepara.</li> <li>Gold- Program pelestarian Sungai Mudal.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Grand Platinum Award</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Environment, category of environmental management               <ol style="list-style-type: none"> <li>Platinum - Waste Bank Program of PLN Surabaya and Malang</li> <li>Platinum - Limestone is Cleaning Jepara's Sky</li> <li>Platinum - DAS Management of Community Basis, andar Lampung</li> </ol> </li> <li>Consumer, category of customer satisfaction:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Silver - PLN Mobile Program</li> <li>Platinum - Contact Center PLN 123 Program</li> <li>Gold - General Electricity Supplier Station</li> </ol> </li> <li>Community Engagement and Development (CID)               <ol style="list-style-type: none"> <li>Silver - Community economics empowerment of innovation basis for livestock Sentra at Tanjung Jati B Jepara Power Plant</li> <li>Gold - Mudal River conservation program.</li> </ol> </li> </ol>
12	30-Nov-17	Apresiasi Indonesia untuk BUMN 2017 (Warta Ekonomi)   Indonesian Appreciation for SOE 2017 (Warta Ekonomi)	1	<p>PLN sebagai Top 5 Environmental SOE Kategori Pengadaan Gas, Uap dan Udara Dingin   PLN as the Top 5 Environmental SOE for the Category of Gas, Steam and Cold Air Procurement</p>



## Penghargaan dan Pengakuan Eksternal

### Awards and External Recognitions

#### DAFTAR PENGHARGAAN YANG DITERIMA PLN TAHUN 2017

#### LIST OF AWARDS RECEIVED BY PLN IN 2017

No	Waktu Date	Jenis Penghargaan   Awards	Jumlah Penghargaan Total Awards	Kategori Category	
13	12 Desember 2017	Penghargaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Komisi Pemberantasan Korupsi)   State Assets Management Report Award (Corruption Eradication Commission)	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>Implementasi e-LHKPN terbaik</li> <li>Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN terbaik</li> </ol>	
14	18 Desember 2017	Pembangkit PLN Raih 1 PROPER Emas Dan 15 PROPER Hijau Di Tahun 2017 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)   PLN Power Generation Received 1 Gold PROPER and 15 Green PROPER in 2017 (Ministry of Environment and Forestry)	16	<ol style="list-style-type: none"> <li>PROPER Emas: PLTU Paiton yang dikelola oleh PJB</li> <li>PROPER Hijau: PLTU Asam-asam (PLN), PLTG Indralaya (PLN), PLN Tanjung Jati B, PLTU Labuan (IP), PLTU Banten 1 (PLN), PLTGU Cilegon (IP), PLTGU Gresik (PJB), PLTGU Priok (IP), PLTU Suralaya (IP), PLTGU Pesanggaran (IP), PLTG Gilimanuk (IP), PLTGU Muara Karang (PJB), PLTGU Muara Tawar (PJB), PLTP Kamojang (IP), dan Indonesia Power UP Semarang.</li> </ol>	
15	20 Desember 2017	Good Corporate Governance (The Indonesia Institute For Corporate Governance (IICG) dan Majalah SWA)	1	Indonesia Trusted Companies 2017	
16	20 Desember 2017	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) (Komisi Informasi Pusat)   Public Information Disclosures Award (Center of Information Commission)	1	Peringkat ke-5 Kategori Badan Publik dengan Skor : 77,92   5th Place in the Category of Public Entity with a score of 77.92	

## SERTIFIKASI Certification

Unit-unit PLN umumnya telah menerapkan standar operasional terakreditasi, baik dalam aspek manajemen mutu, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, manajemen pengamanan, manajemen lingkungan, manajemen energi, implementasi manajemen aset, dan lainnya.

PLN Units are generally have implemented accredited operating standards, both in quality management, occupation health and safety management, safety management, environmental management, energy management, assets management aspects, and so forth.



### PAS 99:2012 - Integrated Management System (IMS)

Sertifikasi PAS 99:2012 - Integrated Management System (IMS) dimiliki oleh 2 Unit Induk PLN. | The Integrated Management System (IMS) is held by 2 Units of PLN Holding.



### SNI ISO 9001:2015 atau ISO 9001 : 2008 – Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 atau ISO 9001 : 2008 – Quality Management System

Sistem Manajemen Mutu berjumlah 55 sertifikasi yang dimiliki oleh 16 unit induk PLN dan 39 unit pelaksana PLN. | 55 Quality Management System certificates are held by 16 Units of PLN Holding and 39 PLN Managing Units.



### PP No 50-2012 - Sistem Manajemen K3 PP No 50-2012 - OHS Management System

Sertifikasi Sistem Manajemen K3 dimiliki oleh 183 Unit PLN, yang terdiri dari 39 Unit Induk PLN dan 144 Unit Pelaksana PLN. | The OHS Management System certificate is held by 183 Units of PLN, which consisted of 39 Units of PLN Holding and 144 PLN Managing Units.



### Perkapolri No 24-2007 - Sistem Manajemen Pengamanan Perkapolri No 24-2007 – Safety Management System

Sistem Manajemen Pengamanan dimiliki oleh 40 Unit PLN, yang terdiri dari 4 Unit Induk PLN & 36 Unit Pelaksana PLN. | The Safety Management System is held by 40 Units of PLN, which consisted of 4 Units of PLN Holding and 36 PLN Managing Units.



### SNI ISO 14001:2015 atau ISO 14001 : 2004 – Sistem Manajemen Lingkungan SNI ISO 14001:2015 atau ISO 14001 : 2004 – Environmental Management System

Sistem Manajemen Lingkungan dimiliki oleh 31 Unit, yang terdiri dari 5 Unit Induk PLN & 26 Unit Pelaksana PLN. | The Environmental Management System is held by 31 Units, which consisted of 5 Units of PLN Holding and 26 PLN Managing Units.

Sertifikasi  
Certification
**SNI ISO 50001:2012 – Sistem Manajemen Energi**  
**SNI ISO 50001:2012 – Energy Management System**

Sistem Manajemen Energi dimiliki oleh 2 Unit Induk PLN. | The Energy Management System is held by 2 Units of PLN Holding.


**SNI ISO 55001:2014 – Pengenalan dan Implementasi Manajemen Assets (EAM)**  
**SNI ISO 55001:2014 – Assets Management Introduction and Implementation (EAM)**

Pengenalan dan Implementasi Manajemen Assets (EAM) dimiliki oleh 4 Unit PLN, yang terdiri dari 3 Unit Induk PLN & 1 Unit Pelaksana PLN. | The Assets Management Introduction and Implementation (EAM) is held by 4 Units of PLN, which consisted of 3 Units of PLN Holding and 1 PLN Managing Unit.


**SNI ISO 17020, ISO 17021, ISO 17025, ISO 17065 – Akreditasi Laboratorium**  
**SNI ISO 17020, ISO 17021, ISO 17025, ISO 17065 – Laboratories Accreditation**

Akreditasi Laboratorium dimiliki oleh 4 unit PLN, yang terdiri dari 3 Unit Induk PLN & 1 Unit Pelaksana PLN. | The Laboratories Accreditation is held by 4 Units of PLN, which consisted of 3 Units of PLN Holding and 1 PLN Managing Unit.


**SNI ISO 27001 : 2013 – Sistem Manajemen Keamanan Informasi**  
**SNI ISO 27001 : 2013 – Information Safety Management System**

Sistem Manajemen Keamanan Informasi dimiliki oleh 1 Unit Induk PLN. | The Information Safety Management System is held by 1 Unit of PLN Holding.


**SNI ISO 20000-1 : 2011 – IT Service Management**  
**SNI ISO 20000-1 : 2011 – IT Service Management**

IT Service Management dimiliki oleh 2 Unit Induk PLN. | The IT Service Management is held by 2 Units of PLN Holding.

Sertifikasi  
Certification**HASIL REKAPITULASI SERTIFIKASI TAHUN 2017 | CERTIFICATE RECAPITULATIONS IN 2017**

No	Standar Sertifikasi yang Diimplementasikan di Unit Induk/Unit Pelaksana Certifications Standards Implemented by Holding Units/Managing Units	Singkatan Abbreviation	Total
1	PAS 99:2012 - Integrated Management System (IMS)	SMT (IMS)	2
2	SNI ISO 9001:2015 atau ISO 9001 : 2008 – Sistem Manajemen Mutu   Quality Management System	SMM	55
3	PP No 50-2012 - Sistem Manajemen K3   OHS Management System	SMK3	183
4	Perkapolri No 24-2007 - Sistem Manajemen Pengamanan   Safety Management System	SMP	40
5	SNI ISO 14001:2015 atau ISO 14001 : 2004 – Sistem Manajemen Lingkungan   Environmental Management System	SML	31
6	SNI ISO 50001:2012 – Sistem Manajemen Energi   Energy Management System	SME	2
7	SNI ISO 55001:2014 – Pengenalan dan Implementasi Manajemen Assets (EAM)   Assets Management Introduction and Implementation (EAM)	AMS	4
8	SNI ISO 17020, ISO 17021, ISO 17025, ISO 17065 - Akreditasi Laboratorium   Laboratories Accreditation	AL	4
9	SNI ISO 27001 : 2013 - Sistem Manajemen Keamanan Informasi   Information Safety Management System	ISMS	1
10	SNI ISO 20000-1 : 2011 - IT Service Management	ITIL	2

# ALAMAT UNIT BISNIS DAN KANTOR PERWAKILAN

## Address of Business Units and Representative Offices

No.	Kantor Cabang Branch Offices	Alamat Address
I	PT PLN (Persero) – KANTOR PUSAT   BRANCH OFFICES	<b>Jl. Trunojoyo Blok M I – 135 JAKARTA 12160</b> Trunojoyo Street, Blok M I – 135 JAKARTA 12160 Tel. : (021) 7261 875, 726 1122, 726 2234, 725 1234, 725 0550 Fax. : (021) 722 1330, 739 7150 E-mail : webmaster@pln.co.id Home page : www.pln.co.id
II.	PT PLN (Persero) PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PT PLN (Persero) RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER ISO/IEC 17025 – 2005	<b>Jl. Duren Tiga No. 102, Jakarta 12760</b> Duren Tiga Street No. 102, Jakarta 12760 Tel. : (021) 797 3774, 798 0190, 798 9982 (Hunting), 7991155 (GM) Fax. : (021) 7991762, 7975414 E-mail : customercare@pln-litbang.co.id Home Page : www.pln-litbang.co.id Jwots : 13107,13109,13110,13111,13115,13121
III.	PT PLN (Persero) PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PT PLN (Persero) EDUCATION AND TRAINING CENTER	<b>Jl. HR. Harsono RM. No. 59, Ragunan - Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550</b> HR. Harsono RM. Street No. 59, Ragunan - Pasar Minggu South Jakarta 12550 Tel. : (021) 781 1292, 781 1293, 780 0832, 781 1368 (KPUSDIKLAT) Fax. : (021) 7811294, 781 1295 (Sekretaris KPUSDIKLAT), 7829263 (SDM) Website : http://pln-pusdiklat.co.id Vicon : 192.168.13.178
IV.	PT PLN (Persero) PUSAT ENJINIRING KETENAGALISTRIKAN PT PLN (Persero) ELECTRICAL ENGINEERING CENTER ISO 9001 : 2008	<b>Jl. Aipda K.S. Tubun I/2 Petamburan, Jakarta Barat 11420</b> Aipda K.S. Tubun Street I/2, Petamburan, Jakarta Barat 11420 Tel. : (021) 564 0141, 563 8642, 563 8644 Fax. : (021) 563 8658, 563 8661 E-mail : puseulis@pln.co.id
V.	PT PLN ( Persero ) PUSAT PEMELIHARAAN KETENAGALISTRIKAN PT PLN (Persero) ELECTRICAL MAINTENANCE CENTER	<b>Jl. Banten No. 10 Bandung 40272</b> Banten Street No. 10, Bandung 40272 Tel. : (022) 723 6791-3 Fax. : (022) 723 6794 Email : pusharlis@pln.co.id Homepage : www.pln.co.id/pusharlis
VI.	PT PLN (Persero) PUSAT MANAJEMEN PT PLN (Persero) MANAGEMENT CENTER KONSTRUKSI   CONSTRUCTION ISO 9001 : 2000 LMK - KAN	<b>Jl. Slamet No. 1, Gajah Mungkur, Semarang 50232</b> Slamet Street No. 1, Gajah Mungkur, Semarang 50232 Tel. : (024) 831 0060 Fax. : (024) 831 7241 E-mail : plnjmk@pln.co.id
VII.	PT PLN (Persero) PUSAT SERTIFIKASI PT PLN (Persero) CERTIFICATION CENTER ISO 17021 : 2011	<b>Jl. Laboratorium, Duren Tiga, Jakarta Selatan 12760</b> Laboratorium Street, Duren Tiga, South Jakarta 12760 Tel. : (021) 7900034 Fax. : (021) 7982034, 7992056, 7943450 Jwots : 15192, 15193, 15194, 1595 E-mail : niaga@pln-jaser.co.id, skt@pln-jaser.co.id, psm@pln-jaser.co.id Homepage : www.pln.co.id/jaser Vicon : 192.168.1.154
VIII.	PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN DISTRIBUTION AND LOAD CONTROL CENTER	
1.	PT PLN (Persero) PUSAT PENGATUR BEBAN (P2B) ISO 9001 : 2000	<b>Cinere 16514, Jakarta Selatan</b> Tel. : (021) 7542646, 7543566 Fax. : (021) 7542516 E-mail : plnp3b@pln-jawa-bali.co.id
2.	PT PLN (Persero) TRANSMISI JAWA BAGIAN BARAT	<b>Krukut-Limo, Cinere 16514, Jakarta Selatan</b> Tel. : (021) 7543566 Fax. : (021) 7542380
3.	PT PLN (Persero) TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH	<b>Jl. Moh. Toha Km. 4 Komplek PLN GI Cigereleng</b> Moh. Toha Street Km. 4, Komplek PLN GI Cigereleng BANDUNG 40255 Tel. : (022) 5201725 Fax. : (022) 5220214 E-mail : RBR@pln-jawa-bali.co.id

No.	Kantor Cabang Branch Offices	Alamat Address
4.	PT PLN (Persero) TRANSMISI JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI	<b>Jl. Suningrat No. 45 Taman, Sidoarjo SURABAYA 61257</b> Suningrat Street No. 45, Taman, Sidoarjo Tel. : (031) 7882113, 7882114 Fax. : (031) 7882578, 7883266 Email : tjbtb1@pln.co.id
5.	PT PLN (Persero) PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN SUMATERA	<b>Jl. Musyawarah/Nangka Ujung Kel.Labuh Baru Barat</b> Musyawarah Street, Nangka Ujung Kel.Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru RIAU 28233 Tel. : (0761) 6700011, 6700012 Fax (0761) 6700015 E-mail : p3bs@pln.co.id Website : www.pln.co.id/p3bs
<b>IX. KANTOR WILAYAH   REGIONAL OFFICES</b>		
1.	PT PLN (Persero) WILAYAH ACEH	<b>Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureu-eh No. 172 Lampriet Banda Aceh, ACEH 23243</b> Tgk. H. Mohd. Daud Beureu-eh Street No. 172, Lampriet Tel. : (0651) 22188 (Hunting 8 Saluran) Fax. : (0651) 21516 E-mail : plnwilaceh@pln.co.id Website : www.plnaceh.co.id
2.	PT PLN (Persero) WILAYAH SUMATERA UTARA	<b>Jl. K.L. Yos Sudarso No. 284 MEDAN 20115 Kotak Pos 2000</b> K.L. Yos Sudarso Street No. 284 Tel. : (061) 6615155 Fax. : (061) 6613789 E-mail : plnsumut@plnwill.co.id
3.	PT PLN (Persero) WILAYAH SUMATERA BARAT	<b>Jl. Dr. Wahidin No. 8, PADANG 25121</b> Dr. Wahidin Street No. 8, PADANG 25121 Tel. : (0751) 33446 Fax. : (0751) 29540, 31564 E-mail : PLN W3@indosat.net.id
4.	PT PLN (Persero) WILAYAH RIAU DAN KEPRI	<b>Jl. Musyawarah RT. 01 RW. 09 Kel. Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki Pekanbaru, RIAU 28295</b> Musyawarah RT. 01 RW. 09 Kel. Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki Pekanbaru, RIAU 28295 Musyawarah Street RT. 01 RW. 09 Tel. : (0761) 855840, 855841, 853737, 855309 Fax. : (0761) 855310 E-mail : wrkr@pln.co.id
5.	PT PLN (Persero) WILAYAH SUMATERA SELATAN JAMBI DAN BENGKULU	<b>Jl. Kapten A. Rivai No. 37, PALEMBANG 30129</b> Kapten A. Rivai Street No. 37, PALEMBANG 30129 Tel. : (0711) 358355, 358804, 358859, 313217 (GM) Fax. : (0711) 310376, 356759 (GM) E-mail : gmws2jb@plnpalembang.co.id Website : http://www.plnpalembang.co.id
6.	PT PLN (Persero) WILAYAH BANGKA BELITUNG	<b>Jl. Soekarno Hatta KM 5 Pangkalpinang 33171 Kep. BANGKA BELITUNG</b> Soekarno Hatta Street KM 5, Pangkalpinang 33171 Tel. : (0717) 439300 (Hunting) Fax. : (0717) 439600 E-mail : wbabel@pln.co.id
7.	PT PLN (Persero) WILAYAH KALIMANTAN BARAT	<b>Jl. Adi Sucipto Km 7,3 Sei Raya Kubu Raya PONTIANAK 78391</b> Adi Sucipto Street Km 7,3 Sei Raya Kubu Raya PONTIANAK 78391 Tel. : (0561) 722037 (Hunting), 721960 (GM) Fax. : (0561) 721395 E-mail : kalbar@pln.co.id Web : www.plnkalbar.co.id
8.	PT PLN (Persero) WILAYAH KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TENGAH	<b>Jl. Panglima Batur Barat No. 1, Banjarbaru KALIMANTAN SELATAN 70711</b> Panglima Batur Barat Street No. 1, Banjarbaru SOUTH KALIMANTAN 70711 Tel. : (0511) 4772520, 4774342, 4772261 Fax. : (0511) 4772442 E-mail : humas.kalseteng@pln.co.id

Alamat Unit Bisnis dan Kantor Perwakilan  
Address of Business Units and Representative Offices

No.	Kantor Cabang Branch Offices	Alamat Address
9.	PT PLN (Persero) WILAYAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA	<b>Jl. M.T. Haryono No. 384, BALIKPAPAN 76114</b> M.T. Haryono Street No. 384, BALIKPAPAN 76114 Tel. : (0542) 871840 (Hunting ) Fax. : (0542) 876130 E-mail : humas.kaltim@pln.co.id
10.	PT PLN (Persero) WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH DAN GORONTALO	<b>Jl. Bethesda No. 32, MANADO 95116</b> Bethesda Street No. 32, MANADO 95116 Telp. : (0431) 863644, 865651, 862444 (GM) Fax. : (0431) 863660, 862360 E-mail : gmsutg@pln.co.id
11.	PT PLN (Persero) WILAYAH SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA DAN SULAWESI BARAT	<b>Jl. Letjend Hertasning Blok B, Kotak Pos 1206</b> Let.Jend Hertasning Street, Blok B, Kotak Pos 1206 Panakukang, MAKASSAR 90222 Tel. : (0411) 457155, 457157 Fax. : (0411) 444800
12.	PT PLN (Persero) WILAYAH MALUKU DAN MALUKU UTARA	<b>Jl. Diponegoro No. 2, AMBON 97127</b> Diponegoro Street No. 2, AMBON 97127 Tel. : (0911) 311810, 347766, 354696 Fax. : (0911) 310910 E-mail : plnwilmaluku@plnmmu.co.id
13.	PT PLN (Persero) WILAYAH PAPUA DAN PAPUA BARAT	<b>Jl. Ahmad Yani No. 18, JAYAPURA 99111 Kotak Pos 1045</b> Ahmad Yani Street No. 18, JAYAPURA 99111 Kotak Pos 1045 Tel. : (0967) 533891, 533981, 536637 Fax. : (0967) 534694 E-mail : wilpapua@pln.co.id Http : // www.pln.co.id
14.	PT PLN (Persero) WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT	<b>Jl. Langko No. 25-27 Ampenan MATARAM 83114</b> Langko Street No. 25-27, Ampenan, MATARAM 83114 642868 (GM) Tel. : (0370) 643123 Fax. : (0370) 634401 E-mail : sekretariat@plnntb.co.id Website : http://www.plnntb.co.id
15.	PT PLN (Persero) WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR	<b>Jl. Piet A. Tallo No. 101, KUPANG 85228</b> Piet A. Tallo Street No. 101, KUPANG 85228 Tel. : (0380) 8554005 (Hunting) Fax. : (0380) 8554010 E-mail : ntt@pln.co.id Website : http://www.pln.co.id/ntt
<b>X. KANTOR DISTRIBUSI</b>		
1.	PT PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA TIMUR	<b>Jl. Embong Trengguli No. 19 - 21</b> Embong Trengguli Street No. 19 - 21 SURABAYA 60271 Tel. : (031) 5340651 - 5340655 Fax. : (031) 5310057 Jwots : 71016 - 18 Hunting E-mail : moch.sulaty@pln.co.id Website : www.pln-jatim.co.id
2.	PT PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA	<b>Jl. Teuku Umar No. 47, SEMARANG</b> Teuku Umar Street No. 47, SEMARANG Tel. : (024) 8411991 (hunting) Fax. : (024) 8412268 E-mail : plnajatengdiy@pln.co.id Website : www.plnajateng.co.id E-mail : plnubd@plnajateng.co.id
3.	PT PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA BARAT B	<b>Jl. Asia Afrika No. 63, BANDUNG 40111</b> Asia Afrika Street No. 63, BANDUNG 40111 Tel. : (022) 4230747 (hunting), 4206287 (GM) Fax. : (022) 4230822, 4207114 Jwots : 30995 E-mail : info.djbb@pln.co.id
4.	PT PLN (Persero) DISTRIBUSI BANTEN	<b>Jl. Jendral Sudirman (Akses By Pass) No. 1 TANGERANG 15118</b> Jendral Sudirman Street (Akses By Pass) No. 1 TANGERANG 15118 Tel. : (021) 5526716, 5526717 Fax. : (021) 5526721 Email : disbanten@pln.co.id

No.	Kantor Cabang Branch Offices	Alamat Address
5.	PT PLN (Persero) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA ISO 9001 : 2008	<b>Jl. M. I. Ridwan Rais No. 1, JAKARTA 10110</b> M. I. Ridwan Rais Street No. 1, JAKARTA 10110 Tel. : (021) 3454000, 3455000 Fax. : (021) 3456694 Email : humasjaya@pln.co.id
6.	PT PLN (Persero) DISTRIBUSI BALI ISO 9001 : 2000	<b>Jl. Letda Tantarul No. 1 Renon DENPASAR 80234</b> Letda Tantarul Street No. 1 Renon DENPASAR 80234 Tel. : (0361) 221960 s.d 221968, 221957 Fax. : (0361) 227101
7.	PT PLN (Persero) DISTRIBUSI LAMPUNG ISO 9001 : 2008	<b>Jl. Z.A. Pagar Alam No. 05 Rajabasa BANDAR LAMPUNG 35144</b> Z.A. Pagar Alam Street No.05, Rajabasa BANDAR LAMPUNG 35144 Tel. : (0721) 774868 Fax. : (0721) 780247 Email : kanwil.lampung@pln.co.id
<b>XI. PEMBANGKITAN</b>		
1.	PT PLN (Persero) PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN UTARA	<b>Jl. Brigjend Katamso, KM. 5.5 No. 30 Titikuning</b> Brigjend Katamso Street, KM. 5.5 No. 30, Titikuning Telp. : (061) 7869025 Fax. : (061) 7867967 Website : http://www.pln.co.id/Kitsbu Email : plnksu@pln.co.id
2.	PT PLN (Persero) PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN	<b>Jl. Demang Lebar Daun No. 375 PALEMBANG 30128</b> Demang Lebar Daun Street No. 375, PALEMBANG 30128 Tel. : (0711) 374955 (Hunting) Fax. : (0711) 374958, 374959 E-mail : info.kitsbs@pln.co.id Website : http://www.pln.co.id/kitsbs/
3.	PT PLN (Persero) PEMBANGKITAN TANJUNG JATI B	<b>Desa Tubanan, Kec Kembang Kab. Jepara JAWA TENGAH 59453</b> Tubanan Village, Kembang District. Jepara JAWA TENGAH 59453 Tel. : (0291) 772121, 772123, 772124 Fax. : (0291) 772125 E-mail : tanjungjatib@pln.co.id
<b>XII. UNIT INDUK PEMBANGUNAN</b>		
1.	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT SUMATERA	<b>Jl. Kartini No. 23 MEDAN 20152</b> Kartini Street No. 23 MEDAN 20152 Tel. : (061) 4568532, 4568539, 4568504 Fax. : (061) 4568532 Email : www.plnsumatera-1.co.id
2.	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN UTARA	<b>Jl. Dr. Cipto No. 12, MEDAN 20152</b> Dr. Cipto Street No. 12, MEDAN 20152 Tel. : (061) 4144151, 4144152, 4518580 (GM) Fax. : (061) 4144153 E-mail : sekr.gm@pikitringsuar.co.id
3.	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN TENGAH	<b>Komplek Citragarden Square Blok R1 No. 7 - 11</b> <b>Jl. Purwodadi Panam, Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampar, Kota Pekanbaru, RIAU 28294</b> Citragarden Square Complex, Blok R1 No. 7 - 11 Purwodadi Panam Street, Kelurahan Sidomulyo Barat , Tampar District, Pekanbaru City, RIAU 28294 Tel. : (0761) 6704881 Fax. : (0761) 6704882 Email : uipsumbagteng@gmail.com
4.	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN SELATAN	<b>Jl. Residen Abdul Rozak No. 2180 Sekojo, PALEMBANG 30118</b> Residen Abdul Rozak Street No. 2180, Sekojo, PALEMBANG 30118 Tel. : (0711) 719103 s.d 719109 Fax. : (0711) 719102 Email : info@uipring-sumatera2.co.id

## Alamat Unit Bisnis dan Kantor Perwakilan

Address of Business Units and Representative Offices

No.	Kantor Cabang Branch Offices	Alamat Address
5.	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN INTERKONEKSI SUMATERA JAWA	<b>Jl. Aipda K. S. Tubun I/2 Lantai 3 Petamburan, JAKARTA BARAT 11420</b> Aipda K. S. Tubun I/2 Street, 3rd Floor Petamburan, WEST JAKARTA 11420 Tel. : (021) 56950412, 56950413 Fax. : (021) 56950409 Email : sekr.uipiv@pln.co.id
6.	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN BARAT	<b>Jl. Ehave-Gandul Kel. Gandul Kec. Cinere DEPOK 16514</b> Ehave-Gandul Street, Gandul Cinere District Tel. : (021) 7535500, 7548461, 7548467 Fax. : (021) 7535599
7.	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN TENGAH 1	<b>Jl. Karawitan No. 32, BANDUNG 40264</b> Karawitan Street No. 32, BANDUNG 40264 Tel. : (022) 7320595 Fax. : (022) 7320596 Website : www.pln.co.id/hidrojb Email : hidro_jawa@yahoo.co.id
8.	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN TENGAH II	<b>Jl. P. Mangkubumi No. 16, YOGYAKARTA 55232</b> P. Mangkubumi Street No. 16, YOGYAKARTA 55232 Tel. : (0274) 582912, 582922 Fax. : (0274) 582971
9.	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI 1	<b>Jl. Ketintang Baru I No. 1-3 SURABAYA 60231</b> Ketintang Baru I Street No. 1-3 SURABAYA 60231 Tel. : (031) 8281200 Fax. : (031) 8280214 Email : sekre.uip7@pln.co.id; sekretariat.uip7@gmail.com
10.	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI II	<b>Jl. Ketintang Baru I No. 1-3, Surabaya</b> Ketintang Baru I Street No. 1-3, Surabaya JAKARTA TIMUR 60231 Tel. : (031) 8291377, 8291538 Fax. : (031) 8288959 Email : komunikasijbtb2@pln.co.id
11.	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN BAGIAN TIMUR	<b>Jl. MT. Haryono Street No. 384, Kotak Pos 210 Ring Road, Balikpapan 76114, KALIMANTAN TIMUR</b> MT. Haryono Street No. 384, Kotak Pos 210 Ring Road, Balikpapan 76114, EAST KALIMANTAN Tel. : (0542) 871559 (Hunting), 872192 (GM) Fax. : (0542) 871558, 871565 (Sek GM) E-mail : pikitringkal@pln-pikal.co.id
12.	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN BAGIAN TENGAH	<b>Jl. Mistar Cokrokusumo Street KM. 39, Banjarbaru KALIMANTAN SELATAN 70733</b> Mistar Cokrokusumo Street KM. 39, Banjarbaru SOUTH KALIMANTAN 70733 Tel. : (0511) 4777571, 6749571 Fax. : (0511) 6749900
13.	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN BAGIAN BARAT	<b>Jl. Letjen Suprpto Street No. 50 G, Pontianak KALIMANTAN BARAT 78121</b> Letjen Suprpto Street No. 50 G, Pontianak WEST KALIMANTAN 78121 Tel. : (0561) 762580 Fax. : (0561) 762579 Email : uip.kalimantan.barat@gmail.com
14.	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA	<b>Jl. Pendidikan No. 56, MATARAM 83125</b> Pendidikan Street No. 56, MATARAM 83125 Tel. : (0370) 621732, 621733 Fax. : (0370) 621734 Email : pln@uip-nusra.co.id
15.	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN SULAWESI BAGIAN UTARA	<b>Jl. Bethesda No. 32, Kota Manado SULAWESI UTARA 95116</b> Bethesda Street No. 32, Kota Manado SULAWESI UTARA 95116 Tel. : (0431) 855620 Fax. : (0431) 855630 Email : uipsulbagut@pln.co.id

No.	Kantor Cabang Branch Offices	Alamat Address
16.	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN SULAWESI BAGIAN SELATAN	<b>Jl. Letjend. Hertasning, Panakkukang</b> Letjend. Hertasning Street, Panakkukang MAKASSAR 90222 Tel. : (0411) 852519 Fax. : (0411) 444339 E-mail : pln.uipsulbagsel@pln.co.id
17.	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN PAPUA	<b>Jl. Building I. 4th Floor, PT PLN (Persero) Head Office Trunojoyo Street Blok M I/135, Kebayoran Baru JAKARTA SELATAN</b> Building I. 4th Floor, PT PLN (Persero) Head Office Trunojoyo Street Blok M I/135, Kebayoran Baru SOUTH JAKARTA Tel. : (0967) 581740 Fax. : (0967) 582323 Email : uipxiv@gmail
18.	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN MALUKU	<b>Jl. Kapt. Piere Tendean, Halong, AMBON 97127</b> Kapt. Piere Tendean Street, Halong, AMBON 97127 Tel. : (0911) 341089 Fax. : (0911) 341089 Email : uip.maluku@pln.co.id
XIII.	IKATAN KELUARGA PENSIUNAN LISTRIK NEGARA (IKPLN) PUSAT	<b>Gedung Lt. 4 PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jl. Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru JAKARTA SELATAN</b> Building I. 4th Floor, PT PLN (Persero) Head Office Trunojoyo Street Blok M I/135, Kebayoran Baru JAKARTA SELATAN Tel. : (021) 7261122, 7251234, Pest: 1919, 1691 Fax. : (021) 7227073
XIV.	DANA PENSIUN PLN	<b>Jl. Wolter Monginsidi Street No. 5 Kebayoran Baru JAKARTA SELATAN</b> Wolter Monginsidi Street No. 5 Kebayoran Baru SOUTH JAKARTA Tel. : (021) 7222867 (Hunting 4 nomor) Fax. : (021) 7255358, 7206019, 7231390 E-Mail: webmaster@dppln.co.id, Pelayanan@dppln.co.id
XV.	YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PT PLN (PERSERO)	<b>Jl. Trunojoyo Street Blok M I/135, Building I 4th Floor, Kebayoran Baru-JAKARTA SELATAN</b> Trunojoyo Street Blok M I/135, Building I 4th Floor, Kebayoran Baru- SOUTH JAKARTA Tel. : (021) 7261875, 7261122, 7262234, Pest: 5563 Fax. : (021) 7221330
XVI.	SEKOLAH TINGGI TEKNIK-PLN (STT - PLN)	<b>Kampus Jl. Lingkar Luar Barat, Duri Kosambi Kotak Pos 6569/ JKBC, CENGKARENG BARAT JAKARTA 11750</b> Campus Lingkar Luar Barat Street, Duri Kosambi Kotak Pos 6569/ JKBC, CENGKARENG BARAT JAKARTA 11750 Tel. : (021) 5440342, 5440344 Fax. : (021) 5440343
XVII.	DPP SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO)	<b>Jl. Trunojoyo Street Blok M I/135 Building 1 3rd Floor Kebayoran Baru, JAKARTA SELATAN</b> Trunojoyo Street Blok M I/135 Building 1 3rd Floor Kebayoran Baru, SOUTH JAKARTA Tel. : (021) 7251846 Ext. 1700 Fax. : (021) 7251650 E-mail : dppsp@pln.co.id <b>Jl. Trunojoyo Blok M I/135 Gedung 1 Lantai 9 Kebayoran Baru, JAKARTA SELATAN</b> Trunojoyo Street Blok M I/135, Building 1, 9th Floor Kebayoran Baru, SOUTH JAKARTA Tel. : (021) 7250550 Ext. 1699

# AKSES INFORMASI DAN SITUS PERSEROAN

## Information Access and Corporat Website

Seluruh informasi berkaitan dengan PT PLN (Persero) dapat di peroleh di:

### Sekretariat Perusahaan PT PLN (Persero)

Jl. Trunojoyo Blok M I No.135  
Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia  
Tel.+62 21 7251234, 7250550, 7261122  
Fax.+62 21 7221330  
Website : [www.pln.co.id](http://www.pln.co.id)

Pada situs ini PLN memberikan informasi yang mencakup aspek pelayanan pelanggan, info umum, info korporat dan hubungan investor.

All information related with PT PLN (Persero) can be accessed from:

### Corporate Secretary of PT PLN (Persero)

Trunojoyo Street Blok M I No.135  
Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia  
Tel.+62 21 7251234, 7250550, 7261122  
Fax.+62 21 7221330  
Website : [www.pln.co.id](http://www.pln.co.id)

In this website, PLN provides information covering customer services, general information, corporate information and investor relations.

### Media Publikasi

1. Untuk Level Korporasi mencakup : Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, *Company Profile*, CSR, *PLN Kita*, *majalah internal Fokus*.
2. Untuk level Unit Bisnis mencakup : Yes, Saburai, Pelita Bertuah, INFO PJB, SULUHETAM, DAYA, Warta PLN 8, LMK, ICONEWS, Fokus, Tabaos, WARTA Serumpun Sebalai, P3BSumatera, LISTRIK KITA, Floeksi, SULUH DEWATA dan CAHAYA.
3. Untuk menunjukkan komitmen PLN dalam meningkatkan kualitas penerapan praktik terbaik GCG.
4. Media Sosial, berupa twitter @pln\_123, dan facebook : PLN123

### Publication Media

1. Corporate Levels include: Annual Reports, Sustainability Reports, Company Profile, CSR, PLN Kita, Fokus internal magazine.
2. Business Unit Level include: Yes, Saburai, Pelita Bertuah, INFO PJB, SULUHETAM, DAYA, Warta PLN 8, LMK, ICONEWS, Fokus, Tabaos, WARTA Serumpun Sebalai, P3BSumatera, LISTRIK KITA, Floeksi, SULUH DEWATA and CAHAYA.
3. Rendering PLN's commitment in enhancing quality implementation of GCG best practices
4. Social Media, such as twitter @pln\_123, and facebook: PLN123

## SITUS WEBSITE PLN

### Situs Web PLN

Untuk menerapkan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengadopsi peraturan-peraturan terkait yang ada. Salah satu peraturan yang diadopsi terkait keterbukaan dalam penyampaian informasi perusahaan adalah Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

## PLN WEBSITE

### PLN Website

To comply with transparency principle in the management of the Company, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) adopted several pertaining regulations. One of the regulations adopted is the transparency on information delivery is FSA Regulation No. 8/POJK.04/2015 concerning Website of Issuers or Public Listed Companies and FSA Regulation No. 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Governance Guidelines for Public Companies.

## Akses Informasi dan Situs Perseroan

Alamat Unit Bisnis dan Kantor Perwakilan

PT PLN (Persero) memiliki *corporate website* dengan alamat <http://www.pln.co.id>. PLN selalu berupaya menyempurnakan *corporate website* PLN secara berkala agar menjadi semakin informatif dan mudah untuk diakses.

Website ini menggunakan bahasa Indonesia. Website PLN secara garis besar dibagi menjadi 6 bagian besar yang terdiri dari:

1. Informasi terkait Pelanggan:  
Layanan Online, Listrik Pintar, Tarif Tenaga Listrik, Tanya Jawab Seputar Tarif Listrik, Uang Jaminan Langganan, dan Informasi P2TL.
2. Informasi terkait Hubungan Investor (Hubungan Investor):  
Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, Laporan Statistik, RUPTL, 35.000 MW, IPP, ESSA, PLTU Batang, PLTU Indramayu, Proyek Jawa-Bali Crossing, PUB I PT PLN (Persero), Sutet 500 KV Kendal, LARP Jawa-Bali 500 KV Crossing, IPTD II Loan IBRD, Investor Presentation, dan Request for Meeting.
3. Informasi tentang Media:  
Siaran Pers, Warta PLN, 35.000 MW, Profil Perusahaan, Video Berita, dan Istilah Kelistrikan.
4. Informasi tentang Supplier:  
Syarat Menjadi Vendor, Pengumuman, Portal E-Proc, Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa, Local Product Announcement, Pengadaan Batubara, Model PJBL PLTM, dan Pedoman penyambungan
5. Informasi terkait Profil Perusahaan (Tentang Kami):  
Profil Perusahaan, Good Corporate Governance, Struktur Perusahaan, Dewan Komisaris, Direksi, Bisnis PLN, Unit PLN, Inovasi dan Penghargaan, Unit Note, Anak Perusahaan, PLN Peduli, Pedoman Perilaku, dan Whistleblowers System.
6. Informasi tentang keterbukaan informasi (KIP)  
Layanan Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik.

PT PLN (Persero) has a corporate website <http://www.pln.co.id>. PLN continually updates its corporate website to be more informative and convenient to access.

Website PLN is Indonesian and is categorized into six major sections consisting of:

1. Customer Related Information:  
Online Services, Listrik Pintar, Electrical Power Pricing, Questions & Answers Regarding Electricity Rates, Deposit Subscriptions and P2TL Information.
2. Investor Relations Related Information:  
Financial Statements, Annual Report, Statistics Report, RUPTL, 35,000 MW, IPPs, ESSA, Batang Coal Power Plant, Indramayu Coal Power Plant, Project Java-Bali Crossing, PUB I PT PLN (Persero), SUTET 500 KV Kendal, LARP Java-Bali 500 KV Crossing , IPTD II IBRD Loan, Investor Presentation, and Request for Meeting
3. Information on Media:  
Press Releases, PLN News, 35,000 MW, Company Profile, Video News, and Electricity Terminology
4. Information on Suppliers:  
Vendor Prerequisites, Announcements, Portal E-Proc, Registration Suppliers of Goods / Services, Local Product Announcement, Coal Supply, Model PJBL micro hydro power plants, and Connection Guidelines
5. Company Profile Related Information (About Us):  
Company Profile, Good Corporate Governance, Corporate Structure, Board of Commissioners, the Board of Directors, PLN Business, PLN Unit, Innovation and Awards, Unit Note, Subsidiaries, PLN Peduli, Code of Conduct and Whistle blowers System.
6. Disclosure of Information (KIP)  
Public Information Services and List of Public Information.

## Akses Informasi dan Situs Perseroan

Alamat Unit Bisnis dan Kantor Perwakilan

Sesuai dengan POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Perusahaan mengunggah Ringkasan Risalah RUPS pada website Perusahaan sesuai pemenuhan prinsip 1 Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yakni Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

Website korporat PLN telah mencakup 4 (empat) bagian utama informasi yang wajib dimuat pada website perusahaan, yaitu:

- a. Informasi umum Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. Informasi bagi pemodal atau investor
- c. Informasi tata kelola perusahaan, dan
- d. Informasi tanggung jawab sosial perusahaan.

Selain itu, website PLN juga memuat informasi-informasi lain yang dapat berfungsi untuk menambah pengetahuan mengenai istilah-istilah dalam kelistrikan dan lain-lain yang terkait dalam bisnis PLN.

In accordance with POJK 8/POJK.04/2015 on the Website of Issuers or Public Companies and FSA Regulation No. 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Governance Guidelines for Public Companies. The Company uploads the GMS Minutes on its corporate website according to the fulfillment of principle 1 Governance Guideline of Public Company, which is to Improve the Value of General Meeting of Shareholders Implementation.

PLN's corporate website comprises four (4) primary category of information that must be published on the Company's website, which are:

- a. General information regarding Issuers or Public Companies;
- b. Information for financiers or investors
- c. Corporate governance information, and
- d. Information on corporate social responsibility

In addition, PLN website also contains other information that functions as additional knowledge on the electricity terminology and other information on PLN business.

# PERISTIWA PENTING 2017

## Event Highlights 2017

### 1 Januari 2017

1 January 2017

#### Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran Diterapkan, Tarif Listrik Tidak Naik | Implementation of Accurate Target of Electricity Subsidy Policy, No Increase of Electricity Tariff

Pemerintah menerapkan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran bagi pelanggan PLN golongan rumah tangga daya 900 VA mulai 1 Januari 2017. Kebijakan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No.30 Tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, bahwa dana subsidi yang disediakan Pemerintah hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tidak mampu. Dalam periode 2017, tidak ada kenaikan tarif listrik untuk semua golongan tarif. | The Government sets the accurate target of electricity subsidy policy for PLN household segment with 900 VA from 1 January 2017. The policy is aligned with the mandate of Law No. 30/2017 on the Energy and Law No. 30/2009 on Electricity, which stated the subsidy funding from the Government is only aimed for underprivileged communities. In 2017, there was no increase of electricity tariff for all tariff group.



### 6 Januari 2017

6 January 2017

#### SUTT 275 KV Lahat -Muara Bungo Sukses Beroperasi | SUTT 275 KV Lahat – Muara Bungo is successfully operating

PLN berhasil mengoperasikan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 275 kV sepanjang 389 kilo meter sirkit (kms) dari Lahat hingga ke Muara Bungo pada 1 Januari 2017. | PLN succeeded in operating the High Voltage Air Ducts transmission 275 KV at the length of 389 kilo meter circuit from Lahat to Muara Bungo on 1 January 2017.

### 25 Januari 2017

25 January 2017

#### Penerimaan Penghargaan Tokoh BUMN Kategori Kepemimpinan | Leadership Category of SOE Figures Award

Direktur Utama PLN Sofyan Basir menerima penghargaan Tokoh BUMN kategori Kepemimpinan dari Kementerian BUMN. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri BUMN Rini Soemarno di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat acara Executive Leadership Program (ELP). | PLN President Director Sofyan Basir received the SOE Figures award in the category of Leadership from the SOE Ministry. The award was directly presented by the SOE Minister Rini Soemarno in front of the President Joko Widodo (Jokowi) at the Executive Leadership Program (ELP).

### 31 Januari 2017

31 January 2017

#### Penandatanganan PPA PLTGU Jawa 1 antara PLN dengan PT Jawa Satu Power | Signing of PPA Java 1 Combined Cycle Power Plant between PLN and PT Jawa Satu Power

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero dan PT Jawa Satu Power menandatangani Power Purchase Agreement (PPA) Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa-1 berkapasitas total 1760 MW. PLTGU Jawa-1 ini akan dibangun di Cilamaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. | PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero and PT Jawa Satu Power signed the Power Purchase Agreement (PPA) for the Java-1 Combined Cycle Power Plant with a total capacity of 1760 MW. The Java-1 Combined Cycle Power Plant will be constructed in Cilamaya, Karawang Regency, West Java Province.

### 17 Maret 2017

17 March 2017

#### PLN Tandatangani 16 Proyek 35.000 MW Total Rp21,1 Triliun PLN Signs 16 Projects of 35,000 MW Totaling Rp21.1 Trillion

Direktur Utama PLN Sofyan Basir didampingi oleh jajaran Direksi PLN menandatangani 16 proyek dengan nilai investasi pembangkit sebesar Rp 13 triliun (belum termasuk PLTD), nilai investasi transmisi sebesar Rp 2,1 triliun, dan biaya Long Term Service Agreement (LTSA) untuk 5 tahun senilai Rp 6 triliun. | PLN President Director Sofyan Basir and PLN Board of Directors signed the 16 projects with power generation investment value of Rp13 trillion (excluding Diesel Power Plant), transmission investment value of Rp2.1 trillion, and Long Term Service Agreement (LTSA) fees for 5 years at Rp6 trillion.



Peristiwa Penting 2017  
Event Highlights 2017**18 Maret 2017**

18 March 2017

**Presiden Jokowi Resmikan Pembangkit Listrik Total Kapasitas 500 MW  
President Jokowi Inaugurates Power Generation of 500 MW Total Capacity**

Presiden RI Joko Widodo melakukan Peresmian PLTMG MPP yang tersebar di 8 lokasi dengan total kapasitas 500 MW dan Peresmian 9 Infrastruktur Ketenagalistrikan di Kalimantan Barat. | President RI Joko Widodo Inaugurates the Gas Engine Power Plant Mobile Power Plant at 8 locations with a total capacity of 500 MW and Inaugurates 9 Electricity Infrastructure in West Kalimantan.

**27 Maret 2017**

27 March 2017

**Financial Close PLTU Jawa-4, Tokyo**

PLN mempercepat tercapainya tahap financial close pembangunan pembangkit listrik Tanjung Jati B Ekspansi 2 x 1.000 Megawatt (MW) dengan menandatangani dokumen Pernyataan dan Jaminan. | PLN accelerates the financial close of power generation construction of Tanjung Jati B Expansion 2 x 1,000 MW by signing the Statement and Guarantee document.

**29 Maret 2017**

29 March 2017

**Penandatanganan MOU dengan Pengembang EBT, Jakarta | Signing of MOU with EBT Developer, Jakarta**

PLN terus melakukan perluasan pemanfaatan energi baru terbarukan, salah satunya dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan beberapa perusahaan asal Perancis yang berkomitmen untuk membangun pembangkit listrik berbasis renewable energy, oleh Direktur Perencanaan PLN, Nicke Widyawati. | PLN continues to expand new renewable energy utilization, one of it by signing the MoU with several companies from France that are committed to develop power generation of energy renewable basis. The signing was done by PLN Planning Director, Nicke Widyawati.

**21 April 2017**

21 April 2017

**PLN Gandeng Amerika untuk Peningkatan Kinerja Pembangkit & Transmisi serta Pengembangan EBT | PLN Invites the US to Improve the Performance of Generator & Transmission as well as EBT Development**

Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Perencanaan Korporat PLN Nicke Widyawati dan empat direktur perusahaan asal Amerika Serikat tersebut serta disaksikan oleh Wakil Presiden Amerika Mike Pence dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla serta Menteri ESDM Ignasius Jonan di Hotel Shangri-La Jakarta pada 21 April 2017. | The signing was carried out PLN Director of Corporate Planning Nicke Widyawati and four directors from the US company and witnessed by the the US Vice President Mike Pence and RI Vice President Jusuf Kalla as well as Minister of Energy Mineral Resources Ignasius Jonan in Hotel Shangri-La Jakarta on 21 April 2017.

**9 Mei 2017**

9 May 2017

**Jokowi Lakukan Ground Breaking Pembangkit dan Resmikan Listrik Desa di Papua | Ground Breaking of Generator and Inauguration of Village Electricity in Papua by Jokowi**

Presiden RI Joko Widodo melakukan Groundbreaking PLTMG MPP Jayapura 70 MW, Peresmian Listrik Desa di Papua-Papua Barat dan Maluku-Maluku Utara, Peresmian PLTU Tidore 2 x 7 MW, dan Peresmian PLTMH dan PLTS Tersebar. | President RI Joko Widodo conducted the Groundbreaking of Jayapura Gas Engine Power Plant Mobile Power Plant 70 MW, Inauguration of Village Electricity in Papua-West Papua and Maluku-North Maluku, Inauguration of Tidore Coal Power Plant 2 x 7 MW, and Inauguration of Microhydro Power Plant and Scattered Solar Power Plant.

**17 Mei 2017**

17 May 2017

**PLN dan BP Tangguh Tandatangani Perjanjian Jual Beli Gas | PLN and BP Tangguh Sign the Gas Sale and Purchase Agreement**

## Peristiwa Penting 2017

### Event Highlights 2017

#### 18 Mei 2017

18 May 2017

#### PLN Tandatangani 8 Proyek 35.000 MW Total 7,2 Triliun

#### PLN Sigs the 8 Projects of 35,000 MW Totaling Rp7.2 Trillion

PLN telah menandatangani 8 kontrak yang terdiri dari pembangunan pembangkit EPC (Engineering, Procurement, Construction) total sebesar 735,5 Megawatt dengan biaya Rp 6,28 triliun ditambah jaringan transmisi 150 kilo Volt (kV) sepanjang 246 kilometer sirkit (kms) dari Kabupaten Tayan sampai Sekadau, Kalimantan Barat dengan biaya mencapai Rp 299 miliar. Total biaya keseluruhan proyek ini mencapai Rp 7,2 triliun | PLN has signed 8 contracts that consists of EPC generator (Engineering, Procurement, Construction) of 735.5 MW amounted to Rp6.28 trillion and transmission network of 150 kilo volt (kV) at 246 kilometer circuit from Tayan to Sekadau Regency, West Kalimantan amounted to Rp299 billion. The overall cost of this project reached Rp7.2 trillion



#### 19 Mei 2017

19 May 2017

#### PLN Teken 37 MOU dan 2 PPA untuk Energi Baru Terbarukan

#### PLN Signs the 37 MOU and 2 PPA for New Renewable Energy

PLN tandatangani 37 MoU dan 2 PPA dengan pengembang Energi Baru Terbarukan (EBT), total 283 MW, dengan rincian: PLTM 150 MW, PLT Biomass 55 MW, PLT Biogas 71 MW, PLTS 7 MW, sebagai respons terbitnya Permen ESDM No.12 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber EBT untuk Penyediaan Tenaga Listrik dan Kepmen ESDM No.1404 tahun 2017 tentang Besar Biaya Pokok Penyediaan (BPP) PLN, merupakan momentum yang tepat bagi PLN. | PLN signed the 37 MoU and 2 PPA with New Renewable Energy (EBT) developer, total 283 MW, as the following details: Microhydro Power Plant 150 MW, Biomass Power Plant 55 MW, Biogas Power Plant 71 MW, Solar Power Plant 7 MW, due to the issuance of ESDM Ministry Regulation No. 12/2017 on the EBT Sources Utilization for Electricity Supplies and ESDM Ministry Regulation No. 1404/2017 on the Cost of Supply of PLN. This is an appropriate momentum for PLN.



#### 18 Juni 2017

18 June 2017

#### PLN Berikan Diskon Biaya Penyambungan Tambah Daya

#### PLN Provides Discount on Additional Load Installation Fee

Dalam rangka menyambut, idul fitri, PLN memberikan diskon biaya tambah daya 50% sebesar 450 VA-197 kVA di seluruh Indonesia dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1438 H, berupa potongan biaya penyambungan tambah daya listrik bagi seluruh pelanggan PLN, khususnya rumah ibadah. | In welcoming the Eid Fitr, PLN provided 50% discount on additional load by 450 VA-197 KVA across Indonesia in conjunction with the led Fitr 1438 H. The discount was given for electricity load addition for all PLN customers, especially religious facilities.



#### 20 Juni 2017

20 June 2017

#### PLN Groundbreaking PLTP Tulehu

PLN melaksanakan *Groundbreaking* Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Tulehu berkapasitas 2x10MW yang terletak di Desa Suli dan Tulehu Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. | PLN conducted the Groundbreaking of Geothermal Power Plant Groundbreaking of Tulehu with a capacity of 2x10MW located in Suli Village and Tulehu Regency Central Maluku, Maluku Province.

Peristiwa Penting 2017  
Event Highlights 2017**7 Juli 2017**

7 July 2017

**Sinergi BUMN Percepat Pembangunan Infrastruktur | SOE Synergy Acceleration of Infrastructure Development**

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyaksikan penandatanganan kontrak pembangunan transmisi 500 kilo volt (kV) Sumatera, Muara Enim - New Aurduri sepanjang 554 kilo meter sirkit (kms) yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Adapun proyek pembangunan yang ditandatangani mencakup pekerjaan konstruksi pembangunan SUTET 500 kV Sumatera Jalur Muara Enim – New Aurduri (Sumsel-Jambi), Pendanaan, Pembebasan lahan dan ROW, Perijinan serta studi AMDAL. | Minister of SOE Rini Soemarno witnessed the signing of the contract for 500 kilo volt transmission construction in Sumatera, Muara Enim – New Aurduri at 554 kilo meter circuit enacted by PT PLN (Persero) and PT Waskita Karya (Persero) Tbk. The signed construction project covers construction for SUTET 500 kV Sumatera, Muara Enim – New Aurduri (South Sumatra-Jambi), Funding, Land Clearing and ROW, Permits and AMDAL study.

**14 Juli 2017**

14 July 2017

**Tambak Lorok 780 MW Segera Dibangun  
Construction of Tambak Lorok 780 MW**

Direktur Utama PLN Sofyan Basir menyaksikan langsung penandatanganan kontrak untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tambak Lorok Combined Cycle Power Plant (CCPP) Blok 3 di Jawa Tengah, dengan asumsi produksi pertahunnya mencapai 3,7 Giga Watt Hour (GWH) per-tahun yang dilakukan oleh PT Indonesia Power dengan GE Consortium, Marubeni dan Utama Karya. | PLN President Director Sofyan Basir directly witnessed the contract signing for the construction of Power Generator Tambak Lorok Combined Cycle Power Plant (CCPP) Block 3 in Central Java, with the annual production assumption reaching 3.7 Giga Watt Hour (GWH) per annum. The signing was enacted by PT Indonesia Power with GE Consortium, Marubeni and Utama Karya.

**24 Juli 2017**

24 July 2017

**PLN menerima penghargaan K3 dari Kemenaker | PLN receives the OHS award from Manpower Ministry**

Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia memberikan penghargaan pada perusahaan di seluruh Indonesia yang menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tahun 2017. Dalam hal ini, unit-unit PLN turut mendapatkan penghargaan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). | Manpower Ministry of the Republic of Indonesia rendered recognition from companies across Indonesia that implements the Occupational Health and Safety (OHS) in 2017. In this instance, PLN Units received the OHS award.

## Peristiwa Penting 2017

### Event Highlights 2017

#### 24 Juli 2017

24 July 2017

#### Susunan Direksi Baru

#### New Composition of the Board of Directors

Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN menegaskan adanya Susunan Direksi Baru.

Dengan demikian susunan Direksi PLN yang baru adalah sebagai berikut :

1. Sofyan Basir sebagai Direktur Utama
2. Nicke Widyawati sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1
3. Supangkat Iwan Santoso sebagai Direktur Pengadaan Strategis 2
4. Sarwono Sudarto sebagai Direktur Keuangan
5. Muhamad Ali sebagai Direktur Human Capital Management
6. Amir Rosidin sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa bagian Tengah
7. Djoko Rahardjo Abumanan sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara
8. Machnizon sebagai Direktur Bisnis Regional Kalimantan
9. Haryanto W.S. sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa bagian Barat
10. Syofvi Felienty Roekman sebagai Direktur Perencanaan Korporat
11. Syamsul Huda sebagai Direktur Bisnis Regional Sulawesi
12. Ahmad Rofik sebagai Direktur Bisnis Maluku dan Papua
13. Wiluyo Kusdwiarto sebagai Direktur Bisnis Regional Sumatera.

SOE Minister Decree as the General Meeting of Shareholders (GMS) that stated PLN's resolution on New Board of Directors Composition.

The new composition is as follows:

1. Sofyan Basir, Presidend Director
2. Nicke Widyawati, Director of Strategic Procurement 1
3. Supangkat Iwan Santoso, Director of Strategic Procurement 2
4. Sarwono Sudarto, Director of Finance
5. Muhamad Ali, Director of Human Capital Management
6. Amir Rosidin, Regional Business Director of Central Java
7. Djoko Rahardjo Abumanan, Regional Business Director of East Java, Bali & Nusa Tenggara
8. Machnizon, Regional Business Director of Kalimantan
9. Haryanto W.S., Regional Business Director of West Java
10. Syofvi Felienty Roekman, Director of Corporate Planning
11. Syamsul Huda, Regional Business Director of Sulawesi
12. Ahmad Rofik, Director of Regional Business Maluku and Papua
13. Wiluyo Kusdwiarto, Regional Business Director of Sumatera.



#### 2 Agustus 2017

2 August 2017

#### PLN Tandatangani PPA Dengan IPP di 64 Lokasi tersebar

#### PLN Signs the PPA with IPP at 64 Locations

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyaksikan penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) Energi Baru Terbarukan (EBT) antara PLN dengan Independent Power Producer (IPP) di 64 lokasi dengan kapasitas 350 MW. | Minister of Energy and Mineral Resources Ignasius Jonan witnessed the signing of Power Purchase Agreement (PPA) of New Renewable Energy between PLN with Independent Power Producer (IPP) at 64 locations with a capacity of 350 MW.



Peristiwa Penting 2017  
Event Highlights 2017**31 Agustus 2017**

31 August 2017

**PLTU Jawa 4 Siap Dibangun****Coal Power Plant Java 4 Ready for Construction**

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan (31/8) meresmikan dimulainya pembangunan (groundbreaking) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 4 (2x1.000 MW) yang berlokasi di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah untuk memperkuat daya listrik Sistem Interkoneksi Jawa-Bali dan akan terhubung ke Saluran Transmisi 500 kV Tanjung Jati-Tx Ungaran. | Minister of Energy and Mineral Resources Ignasius Jonan inaugurated the groundbreaking of Coal Power Plant Java 4 (2x1,000 MW) located in Tubanan Village, Kembang District, Jepara Regency, Central Java to strengthen electricity load of Java-Bali Interconnection and will be connected to the 500 kV Transmission Channel of Tanjung Jati-Tx Ungaran.

**4 September 2017**

4 September 2017

**Hari Pelanggan Nasional | National Customer Day**

Dalam memperingati Hari Pelanggan Nasional, seluruh Direksi, General Manager, Manager Area dan Manager Rayon PLN dari Sabang hingga Merauke mengunjungi pelanggan untuk mendengarkan langsung apa saja yang dikeluhkan dan harapan pelanggan terhadap layanan PLN. Dalam hal ini, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengunjungi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk bersilaturahmi sekaligus mendengarkan masukan dari RSCM demi peningkatan pelayanan PLN yang lebih baik. | In commemorating the National Customer Day, all Board of Directors, General Manager, Area Manager and Rayon Manager of PLN from Sabang to Merauke visit the customers to directly attain the complaints and expectation toward PLN services. In this event, PLN President Director Sofyan Basir visited Cipto Mangunkusumo Hospital for a gathering at the same time to attain the input from the hospital in order to improve PLN services.

**4 September 2017**

4 September 2017

**Penerbitan Efek Beragunan Aset PT Indonesia Power Senilai Rp 4 Triliun | Issuance of Assets Backed Securities of PT Indonesia Power amounted Rp 4 Trillion**

PT Indonesia Power ("IP") menawarkan kepada investor berupa Efek Beragunan Aset (EBA) Danareksa Indonesia Power PLN – 1 dengan nilai maksimum sebesar Rp 4 Triliun dan rating awal AAA dari PEFINDO. Pembukaan penawaran EBA Danareksa Indonesia Power PLN ini dihadiri oleh Direktur Keuangan PLN, Sarwono Sudarto, beserta Direktur Utama PT IP, Sripeni Inten Cahyani di Bursa Efek Indonesia. Adapun aset dasar yang disekuritisasi adalah aset keuangan berupa Piutang dari Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik PLTU Suralaya 1-7. | PT Indonesia Power ("IP") offered to investors the Assets-Backed Securities (EBA) of Danareksa Indonesia Power PLN – 1 with a maximum amount of Rp 4 trillion and initial rating of AAA from PEFINDO. The opening of EBA Danareksa Indonesia Power PLN offering was attended by PLN Director of Finance, Sarwono Sudarto, and President Director of PT IP, Sripeni Inten Cahyani at the Indonesia Stock Exchange. The basic assets securitized was financial assets i.e. Receivables from the Sale Purchase Agreement of Coal Power Plant Suralaya 1-7.

**8 September 2017**

8 September 2017

**11 PPA Ditandatangani, Menteri ESDM : Listrik EBT Sangat Kompetitif  
Signing of 11 PPA, ESDM Minister: EBT Electricity is very Competitive**

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan bersama Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir, menyaksikan penandatanganan 11 (sebelas) Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) atau Power Purchase Agreement (PPA) pembangkit dari energi baru terbarukan (EBT) antara PT PLN (Persero) dengan pengembang pembangkit tenaga listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) dengan total kapasitas 291,4 mega Watt (MW) di Kementerian ESDM. | Minister of Energy and Mineral Resources Ignasius Jonan and PLN President Director Sofyan Basir witnessed the signing of 11 Power Purchase Agreement (PPA) from new renewable energy between PT PLN (Persero) with Independent Power Producer (IPP) with a total capacity of 291.4 mega Watt (MW) at the ESDM Ministry.



## Peristiwa Penting 2017

Event Highlights 2017

**13 September 2017**

13 September 2017

**Penandatanganan MoU Pengembangan Panas Bumi | Signing of MOU for Geothermal Development**

Penandatanganan *Memorandum of Understanding* Pendanaan untuk Pengembangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) antara PLN dan SMI. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka penyiapan fasilitas pendanaan untuk pengembangan panas bumi mulai dari tahap eksplorasi sampai dengan pembangunan PLTP di 6 (enam) WKP penugasan pemerintah kepada PLN yang memiliki total kapasitas 160 MW dengan estimasi total nilai proyek sebesar 640 juta USD dan penyiapan fasilitas pendanaan untuk WKP penugasan berikut hingga 14 WKP dengan total kapasitas pengembangan sebesar 1.000 MW. | Signing of MoU for the Funding of Geothermal Work Area Development between PLN and SMI. The cooperation is enacted in preparing funding facility for the geothermal development from exploration stage to the construction of Geothermal Power Plant at 6 (six) WKP government assignment to PLN that has the capacity of 16 MW with estimation of project total value of USD640 million and funding facility preparation for the next WKP assignment up to 14 WKP with a total development capacity of 1,000 MW.

**5 Oktober 2017**

5 October 2017

**Jokowi Groundbreaking 3 PLTU IPP Kapasitas 4.000 MW DAN Resmikan PLTU IPP Kapasitas 660 MW****Groundbreaking by Jokowi for 3 PLTU IPP Capacity of 4,000 MW and Inaugurates the IPP PLTU of 660 MW capacity**

Presiden Joko Widodo hari ini (5/10) melakukan groundbreaking 3 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) IPP di Banten dengan total kapasitas mencapai 4.000 MW. Selain itu Jokowi juga meresmikan beroperasinya PLTU Banten kapasitas 660 MW. Listrik yang dihasilkan akan mensupport kehandalan sistem Jawa-Bali. | President Joko Widodo this day (5/10) enacted the groundbreaking of 3 coal power plant of IPP in Banten with a total capacity of 4,000 MW. In addition Jokowi also inaugurated the commercial operation of Banten Coal Power Plan with 660 MW capacities. The electricity will support system reliability of Java-Bali.

**20 Oktober 2017**

20 October 2017

**Menteri ESDM Groundbreaking 6 PLTMG Tersebar Nusra 350 MW Dan Resmikan PLTU Lombok Timur Kapasitas 50 MW****Groundbreaking by the ESDM Minister for 6 PLTMG Tersebar Nusra 350 MW and Inaugurates the Lombok Timur PLTU of 50 MW Capacities**

Menteri ESDM Ignasius Jonan, Groundbreaking 5 Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) dan 1 MPP tersebar di Nusa Tenggara dengan total kapasitas mencapai 350 MW. Selain itu Jonan juga meresmikan beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Independent Power Producer (IPP) Lombok Timur kapasitas 50 MW (2x25). | ESDM Minister Ignasius Jonan, enacted Groundbreaking of 5 Gas Engine Power Plan (PLTMG) and 1 Mobile Power Plant across Nusa Tenggara with a total capacity of 350 MW. In addition, Jonan also inaugurates the operation of Coal Power Plant of Independent Power Producer (IPP) East Lombok of 50 MW capacity (2x25)



Peristiwa Penting 2017  
Event Highlights 2017**27 Oktober 2017**

27 October 2017

**Peringatan Hari Listrik Nasional yang ke-72  
72nd National Electricity Day Commemoration**

Upacara Peringatan Hari Listrik Nasional yang ke-72 dilaksanakan di PLN Kantor Pusat dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir menjadi pembina upacara. Pada waktu yang sama, PLN meluncurkan aplikasi PLN Mobile versi iOS (*iPhone Operating System*) di Hari Listrik Nasional ke-72. | The 72nd National Electricity Day Commemoration in PLN Head Office with PLN President Director Sofyan Basir as the head of ceremony. At the same time, PLN launched the PLN Mobile apps version iOS (*iPhone Operating System*).

**2 November 2017**

2 November 2017

**PLN Peroleh Pinjaman Rp16,3 Triliun Dari Sindikasi Untuk Pendanaan  
Infrastruktur Ketenagalistrikan  
PLN Received Rp16.3 Trillion Syndication Loan for Electricity  
Infrastructure Funding**

PLN kembali mendapatkan pinjaman Kredit Investasi dari sindikasi Lembaga Keuangan Bank dan non-Bank Nasional dengan total Rp 16,3 Triliun melalui skema konvensional dan syariah, masing-masing sebesar Rp12 triliun dan Rp4,3 triliun. Pinjaman berjangka waktu 10 tahun tersebut akan digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur ketenagalistrikan. | PLN again received Investment Loan from the syndication of National Bank and non-Bank Financial Institutions totaling Rp16.3 Trillion through conventional and sharia schemes, each at Rp12 trillion and Rp4.3 trillion. The 10 years term of Lending will be allocated for electricity infrastructure project funding.

**19 Desember 2017**

19 December 2017

**Konsisten Terapkan GCG, PLN Dinobatkan sebagai Indonesia Trusted  
Companies 2017****Consistent GCG Implementation, PLN is awarded as the Indonesia  
Trusted Companies 2017**

Kerja keras untuk menjalankan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan telah mengantarkan PLN meraih prestasi sebagai "Indonesia Trusted Companies 2017" di ajang Malam Penghargaan dan Konferensi Corporate Governance Perception Index (CGPI) ke-16, Selasa (19/12). | Effort in implementing consistent and sustainable GCG has led PLN to achieve "Indonesia Trusted Companies 2017" award at the 16th Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award and Conference Night, Tuesday (19/12).





# ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis

Ketersediaan tenaga listrik berperan besar dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Nasional yang berkualitas. Oleh karenanya, PLN berupaya keras meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat, dengan Biaya Pokok Penyediaan yang semakin efisien.

The availability of electricity plays a major role in supporting the growth of a quality national economy. Subsequently, PLN strives to improve its ability to meet the growing demand for electricity, with more efficient Basic Supply Cost for Electricity.

## 224 Kinerja Segmen Operasi

Operation Segment  
Performance

## 234 Uraian Kinerja Operasional Perusahaan

Company's Operational  
Performance

## 253 Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

Company's Financial  
Performance



Untuk itu, bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan, PLN memastikan terjadinya transformasi penyediaan tenaga listrik melalui pembangunan pembangkit berteknologi terkini dan ramah lingkungan, pengembangan sistem transmisi dan distribusi yang efisien dan handal dengan mengoptimalkan penggunaan sumberdaya dalam negeri dalam rangka mensejajarkan Indonesia dengan negara-negara kawasan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

To that end, together with all stakeholders, PLN ensures the transformation of electricity supply through the development of state-of-the-art technology and environmentally friendly, the development of efficient and reliable transmission and distribution system by optimizing the domestic resources in order to align Indonesia with the neighboring countries and to improve the welfare of all levels of society.



# Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

## Analisis dan Pembahasan Manajemen

### Management Discussion and Analysis

### GAMBARAN UMUM

Tahun 2017, perekonomian global terus membaik didorong oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi negara maju, khususnya Amerika Serikat (AS), China dan Eropa. Penguatan ekonomi domestik AS mendorong Bank Sentral AS - The Federal Reserve (The Fed) memulai program normalisasi kebijakan moneter pada tahun 2017 dimana The Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin di akhir tahun ke level 1,5%.

Seiring dengan membaiknya perekonomian negara-negara utama dunia tersebut, harga komoditas juga menunjukkan tren bertumbuh sehingga memberi dampak positif bagi negara-negara berkembang penghasil komoditas primer perkebunan maupun pertambangan seperti Indonesia.

Perbaikan perekonomian global tersebut memberi dampak positif terhadap perekonomian domestik, yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,07%, lebih baik dari tingkat pertumbuhan tahun sebelumnya, sebesar 5,02%. Peningkatan pertumbuhan tersebut didukung oleh relatif tingginya konsumsi, tumbuhnya investasi dalam negeri dan perbaikan kinerja ekspor yang diantaranya didukung oleh meningkatnya berbagai harga komoditas non migas maupun migas seperti *crude palm oil* (CPO) dan batubara. Peningkatan investasi dalam negeri, diantaranya berasal dari peningkatan realisasi belanja pemerintah (*government spending*) dari kenaikan belanja pegawai dan belanja modal seperti pembangunan infrastruktur.

Di pasar keuangan domestik, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan *yield* Surat Berharga Negara (SBN) terus melanjutkan penguatan, ditopang oleh investor domestik. Hal ini merupakan indikator bahwa investasi di Indonesia semakin membaik. Salah satu indikatornya adalah di akhir tahun, Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings menaikkan peringkat utang Indonesia menjadi BBB dengan *outlook* stabil. Sebelumnya, Fitch memberikan peringkat Indonesia dengan peringkat utang BBB-.

### OVERVIEW

Broadly, the global economy in 2017 exhibited an uptrend as indicated by improved economic growth of the developed countries in particular the United States (US), China, and Europe. The US domestic economy strengthening prompted the US Federal Reserve (The Fed) to launch a program of normalizing monetary policy in 2017. The Fed decided to raise its benchmark interest rate by 25 basis points by the end of the year to 1.5%.

In line with the improving economies of the world's major countries, the commodity prices are also showing growing trends that have a positive impact on developing countries as the primary producers of plantation and mining commodities, such as Indonesia.

The global economy improvement with 5.07% record, had a positive impact on the domestic economy with a growth rate of 5.02%, better than the previous year. The growth is supported by relatively high consumption, domestic investment growth, and improved export performance. These phenomena are supported by the increasing prices of non-oil and gas commodities, such as crude palm oil (CPO) and coal. The domestic investment improvement is influenced by, among others, increased realization of government spending from increased personnel spending and capital expenditure, such as infrastructure development.

In the domestic financial market, the Indonesia Composite Index (IHSG/IDX Composite) and yield of Government Securities (SBN) continued to strengthen, supported by domestic investors. This is an indicator that investment in Indonesia is getting better. One of the indicators is at the end of the year, the international Fitch Ratings agency upgraded Indonesia to BBB with a stable outlook. Previously, Fitch rated Indonesia with BBB rated debt.

## Analisis dan Pembahasan Manajemen

### Management Discussion and Analysis

Kenaikan peringkat ini menunjukkan perbaikan-perbaikan struktural yang telah dilakukan oleh Pemerintah tampaknya mulai membuahkan hasil. Indikator lain juga dapat dilihat dari data yang dirilis World Bank dalam laporan yang bertajuk *Doing Business 2018: Reforming to Create a Jobs*, yang diterbitkan oleh World Bank pada bulan November 2017, dimana Indonesia berhasil menempati posisi 72 dari 190 negara yang disurvei. Posisi tersebut meningkat 19 peringkat dari tahun lalu, dimana pada saat itu posisi Indonesia masih menempati posisi 91. Tahun lalu sendiri, peringkat Indonesia naik 15 tingkat dari tahun 2015 yang di posisi 106. Sementara skor kemudahan berbisnis di Indonesia tahun 2017 mendapat skor 66,47 atau naik dari 64,22 pada tahun 2016 lalu.

Berbagai kemudahan berusaha serta upaya-upaya lain yang telah ditempuh oleh pemerintah antara lain dengan mengeluarkan 15 paket kebijakan mulai berdampak terhadap perbaikan iklim investasi dan peringkat daya saing Indonesia. Peringkat daya saing Indonesia di tahun 2017 naik ke posisi 36 menurut laporan *World Economic Forum (WEF)*. Dalam laporan yang bertajuk *Global Competitiveness Index 2017-2018 edition*, daya saing Indonesia naik 5 peringkat ke posisi 36, setelah tahun lalu berada di posisi 41. Indonesia, seperti halnya Korea Selatan, dinilai telah memperbaiki kinerja di semua pilar ekonominya, mulai dari infrastruktur hingga pengelolaan makro ekonomi yang *prudent*.

Berdasarkan berbagai capaian di tahun 2017 tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian menargetkan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yakni 5,4% dengan asumsi dasar tingkat inflasi terkendali di sekitar 3,5%, nilai tukar rupiah dikisaran Rp13.400/USD dan suku bunga rujukan 7 hari RR 4,25%, serta Suku Bunga SPN 3 bulan 5,2%. Asumsi-asumsi makro ini akan menentukan besaran kenaikan konsumsi listrik di tahun mendatang.

This rating upgrade shows the Government's structural improvements that seem to be paying off. Other indicators are reported in the World Bank report entitled *Doing Business 2018: Reforming to Create a Jobs*, published by the World Bank in November 2017, Indonesia managed to rank at the 72nd positions from 190 countries surveyed, or moved upward by 19 positions compared to the previous year where Indonesia ranked 91. In the previous year, Indonesia climbed 15 ranks from the 106th position in 2015. Meanwhile, Indonesia rated 66.47 for the Ease of Doing Business, increased from the last year's score, i.e. 64.22.

The Government has conducted various efforts, such as by issuing 15 policy packages, which began to impact on improving the investment climate and the competitiveness of Indonesia. In 2017, Indonesia's competitiveness rank increased to the 36th place according to the World Economic Forum (WEF) report. In the Global Competitiveness Index 2017-2018 edition, Indonesia's competitiveness rose 5 ranks to 36th position, after being at the 41st position in the previous year. Like South Korea, Indonesia is considered to have improved its economic performance in all pillars, from infrastructure to prudent macroeconomic management.

Based on these achievements in 2017, the Government of Indonesia targets a higher economic growth rate, i.e. 5.4%, with the basic assumption of controlled inflation rate of around 3.5%, the rupiah exchange rate at Rp13,400/USD, and the 7-day RR of 4.25%, and 3-months SPN interest rate of 5.2%. These macro assumptions will determine the magnitude of the increase in electricity consumption in the coming year.



**Pertumbuhan  
Ekonomi**  
Economic  
Growth

**5,4%**



**Inflasi**  
Inflation

**3,5%**



**Suku Bunga  
SPN 3 Bulan**  
3-Months SPN  
Interest Rate

**5,2%**



**Nilai Tukar  
Rupiah**  
Rupiah  
Exchange Rate

**13.400**

Sumber | Source : UU APBN 2018

## Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis

### GAMBARAN KINERJA PERUSAHAAN DI SEKTOR KELISTRIKAN

Pembangunan nasional selanjutnya menargetkan naiknya GDP perkapita agar Indonesia termasuk kedalam kelompok negara berpendapatan tinggi, yang mensyaratkan pemenuhan berbagai infrastruktur dasar, termasuk ketenagalistrikan. Meningkatnya pendapatan perkapita, akan mendorong pertumbuhan kebutuhan berbagai produk dan jasa termasuk kebutuhan tenaga listrik.

Sesuai perkembangan terakhir, sebagai hasil dari pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang massive dan merata di seluruh wilayah Indonesia, tingkat rasio elektrifikasi nasional hingga akhir tahun 2017 adalah sekitar 95,40% (termasuk pelanggan non-PLN). Angka ini berarti telah melampaui target awal sebesar 92,75%. Namun demikian realisasi rasio elektrifikasi tersebut masih dibawah rata-rata negara lain dikawasan Asia yang telah mencapai rasio sekitar 99% (Malaysia, Thailand, Vietnam), bahkan 100% (Singapore, Brunei).

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, sejak beberapa tahun terakhir Pemerintah Indonesia telah mancanangkan pembangunan infrastruktur, yang meliputi: ketenagalistrikan, jalan raya, jalan tol, pelabuhan, bendungan, bandara hingga pos-pos perbatasan. Pemerintah Indonesia bahkan telah menetapkan pembangunan berbagai proyek infrastruktur tersebut dalam suatu paket, Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui penerbitan Keputusan Presiden No.3 Tahun 2016 tentang "Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional". Untuk ketenagalistrikan, Pemerintah Bahkan mengeluarkan Peraturan Presiden No.4/2016 "Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan", berikut PerPres Nomor 14 Tahun 2017 (Perpres 14/2017) Perubahan Atas Perpres Nomor 4 Tahun 2016.

Melalui PSN tersebut Pemerintah bertekad merealisasikan pembangunan infrastruktur dasar, berupa jalan dan jalur kereta api yang tersebar di seluruh kawasan Nusantara, guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dimasa mendatang. Dalam PSN tersebut, termasuk pula pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan.

### COMPANY PERFORMANCE OVERVIEW IN THE ELECTRICAL SECTOR

National development further targets the increase in GDP per capita for Indonesia to be included in a group of high-income countries, which requires the fulfillment of various basic infrastructure, including electricity. The increase in income per capita will encourage the growth of various products and services need, including electricity.

In accordance with recent developments, as a result of massive and equal power infrastructure development throughout Indonesia, the national electrification ratio until the end of 2017 is 94.50% (including non-PLN subscribers). This means Indonesia has exceeded the initial target of 92.75%. However, the realization of electrification ratio is still below the average of other countries in Asia, which have reached the 99% ratio (Malaysia, Thailand, Vietnam), and even 100% (Singapore, Brunei).

To improve on that, for the last few years, the Government of Indonesia has launched infrastructure development, which includes: electricity, highways, toll roads, ports, dams, airports, and border posts. The Government of Indonesia has established the construction of these infrastructure projects in a National Strategic Project (PSN) package under the issuance of Presidential Decree No. 3 of 2016 on "Accelerating the Implementation of National Strategic Projects". For electricity, the Government issued Presidential Regulation No. 4 of 2016, "Acceleration of Electricity Infrastructure Development", along with Presidential Regulation No. 14 of 2017 (Perpres 14/2017) on the Amendment to Presidential Decree No. 4 of 2016.

Through PSN, the Government strives to realize the basic infrastructure development, in the form of roads and railway spread throughout the Archipelago, to ensure more equal economic growth in the future. In PSN, the electricity projects development are included.

## Analisis dan Pembahasan Manajemen

### Management Discussion and Analysis

Realisasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur tersebut, diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dan dengan demikian pertumbuhan ketenagalistrikan dimasa mendatang akan meningkat lebih cepat lagi. Studi empiris menunjukkan, setiap pertumbuhan PDB 1%, perlu didukung dengan pertumbuhan suplai listrik sebesar 1,2-1,5%. Sehingga dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 5-6% pertahun, Indonesia membutuhkan tambahan suplai listrik antara 7,5% sampai 9,0% per tahun.

Realisasi penyesuaian tarif listrik secara periodik sampai ke tarif keekonomian, diyakini akan menjadikan PLN memiliki kemampuan keuangan yang semakin baik, sehingga mampu membiayai pembangunan pembangkit baru dengan sumber dana dari kas internal, melengkapi sumber pendanaan dari kreditor maupun sumber lainnya. Namun demikian, sejalan dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mempermudah proses perizinan, dan meningkatkan kualitas iklim investasi maka tetap terbuka peluang bagi badan usaha swasta dan investor lain untuk turut mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Sejak tahun 2015, PLN ditugasi Pemerintah untuk merealisasikan pembangunan proyek ketenagalistrikan 35.000 MW beserta jaringan transmisi dan distribusi yang dibutuhkan pada periode 2015-2019. Adapun kebutuhan dana yang diperlukan Untuk membangun pembangkit baru berkapasitas total 35.000 MW lengkap dengan jaringan transmisi dan distribusi (gardu induk) diperkirakan mencapai US\$72,3 miliar. Oleh karena besarnya dana yang dibutuhkan, Pemerintah mengundang partisipasi maksimal investasi swasta dalam pembangunan pembangkit dengan mekanisme Independent Power Producers (IPP), selain dari menugaskan PLN untuk membangun pembangkit melalui *Engineering Procurement Contract* (EPC) berikut sarana transmisi dan distribusi yang diperlukan.

The realization of the development of these infrastructure projects, is believed to encourage higher economic growth. Thus, future electricity growth will improve faster. Empirical study shows every 1% GDP growth needs to be supported by electricity supply of 1.2-1.5%. Therefore, for a 5-6% growth per year projection, Indonesia needs an additional of electricity supply of 7.5-9.0% per year.

The realization of electricity tariff adjustments to economic tariffs periodically will provide PLN with better financial capability, thereby enabling PLN to finance the construction of new power plants with sources of funds from internal cash, complementing the sources of funding from creditors and other sources. Nevertheless, in line with the effort of Government of Indonesia to simplify the licensing process and improve the quality of the investment climate, there are open opportunities for private entities and other investors to contribute to the development of electricity infrastructure.

Since 2015, the Government assigned PLN to realize the 35,000 MW electricity project development, including the transmission and distribution network needed for 2015-2019 period. The funding required to build new power plants with a total capacity of 35,000 MW, complete with transmission and distribution network (substations) is estimated at US\$72.3 billion. Due to the large amount of funds required, the Government invites maximum participation of private investment in the construction of power plants under the Independent Power Producers (IPP) mechanism, in addition to assigning PLN to build the plant and the transmission and distribution network required through *Engineering Procurement Contract* (EPC).

## Analisis dan Pembahasan Manajemen

### Management Discussion and Analysis

Hingga akhir tahun 2017, beberapa unit pembangkit listrik skala besar dari program 35.000 MW telah mulai dibangun, seperti: PLTU Jawa 4 (2 x 1.000 MW), PLTU Jawa 7 (2 x 1.000 MW), PLTU Jawa 9-10 (2.000 MW).

Kebutuhan pendanaan bagi pembangunan ketenagalistrikan tersebut bersumber dari dana internal maupun eksternal Perusahaan. Sumber dana internal berasal dari laba usaha, sedangkan sumber dana eksternal dapat berupa pinjaman *two step loan*, pinjaman pemerintah melalui rekening dana investasi, obligasi nasional maupun internasional, serta pinjaman komersial perbankan lainnya.

Seluruh uraian data tersebut menggambarkan prospek industri ketenagalistrikan dimasa mendatang yang terus berkembang. Hal tersebut juga mengindikasikan besarnya peran PLN dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia di masa mendatang.

By the end of 2017, several constructions for large-scale power generation units for 35,000 MW program have begun, such as: Jawa 4 Coal Power Plant (2 x 1,000 MW), Jawa 7 Coal Power Plant (2 x 1,000 MW), Jawa 9-10 Coal Power Plant (2,000 MW).

The source of funding for the electricity construction development is from internal funds and external parties. Internal funds come from revenue. External fund is in the form of two-step loan, Government loan through investment fund account, national and international bonds, and other commercial banking loans.

All the data descriptions illustrate the prospects for the electricity industry growth in the future. It also indicates the role of PLN in supporting the growth of the Indonesian economy in the future.



# KINERJA SEGMENT OPERASI

## Operation Segment Performance



Segmen operasi adalah komponen entitas terkait aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan. Segmen Operasi PLN dibagi berdasarkan aspek penjualan tenaga listrik, yakni: (a). Segmen Operasi Rumah Tangga, (b). Segmen Operasi Industri, (c) Segmen Operasi Bisnis, (d) Segmen Operasi Lainnya.

The operation segments are entities related to business activities aiming at generating revenues. The PLN's Operation Segments are divided based on power selling aspects, which are (a). Households Operation Segment, (b) Industrial Operation Segment, (c) Business Operations Segment, (d) Other Operation Segments.

### STRATEGI PENGEMBANGAN SEGMENT OPERASI

Pada dasarnya, strategi pengembangan segmen usaha PLN adalah sebagai berikut:

#### A. Program Promo Diskon Tarif Luar Waktu Beban Puncak

Untuk mempertahankan produktifitas industri dalam negeri, PLN meluncurkan Program Promo Diskon Luar Waktu Beban Puncak LWBP bagi pelanggan industri skala menengah dan besar. Program ini merupakan bentuk dukungan PLN terhadap kemajuan industri dan merupakan dukungan perusahaan terhadap peluncuran berbagai Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah.

### OPERATION SEGMENT DEVELOPMENT STRATEGIES

Basically, the strategy for developing PLN's business segment is as follows:

#### A. Outside Peak Hours Discount Tariff Programs

In order to maintain domestic industry productivity, PLN unveiled Outside Peak Hours (LWBP) Discount Tariff Program for medium and large-scale industry customers. This program is a form of PLN's support for industrial progress and is the Company's support for the launching of various Government Economic Policy Packages.

## Kinerja Segmen Operasi

### Operation Segment Performance

Paket program promo diskon LWBP ini memberikan diskon tarif sebesar 30% terhadap tambahan (*increment*) pemakaian di atas rata-rata normal selama 3 bulan terakhir, dari pemakaian jam 23.00 s/d 08.00.

#### B. Utilisasi Fasilitas *Contact Center* PLN 123

PLN terus berupaya dan berkomitmen untuk memberikan kemudahan akses layanan tanpa batas kepada pelanggan. Komitmen PLN tersebut diwujudkan dengan menghadirkan layanan CC PLN 123.

Masyarakat umum dan seluruh kelompok pelanggan semakin dipermudah untuk melakukan proses penyambungan baru (PB), perubahan daya (PD), penyambungan sementara (PS), informasi dan keluhan, serta pemulihan gangguan penyaluran tenaga listrik dengan cukup dengan mengakses CC PLN 123. CC PLN 123 ini juga untuk menghilangkan potensi korupsi berupa gratifikasi atau pungutan tambahan biaya oleh petugas dan praktik-praktik percaloan, sehingga dapat meningkatkan integritas layanan PLN kepada publik.

Tujuan program ini adalah:

- Memberikan informasi ke masyarakat adanya layanan CC PLN 123
- Memberikan pemahaman tentang proses bisnis CC PLN 123
- Meningkatkan brand awareness CC PLN 123.

#### C. Menindaklanjuti Hasil Survey Kepuasan Pelanggan

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan sebagai bagian dari implementasi strategi pemasaran, PLN melakukan survey kepuasan pelanggan. Dari hasil survei tersebut diperoleh beberapa umpan balik yang kemudian ditindak lanjuti dengan beberapa kegiatan terkait pemasaran, mencakup:

- Menyelenggarakan Forum Bisnis dengan stakeholders untuk menyampaikan kesiapan PLN dalam memasok seluruh kebutuhan listrik di Indonesia
- Menyelenggarakan *customer gathering* forum stakeholders, FGD, mengoptimalkan peran *Account Executive* (AE), memberikan reward kepada pelanggan tertentu. sebagai bentuk komunikasi PLN dengan pelanggannya serta meningkatkan *engagement* pelanggan

This LWBP discount program provides a 30% discount rate on increments above average during the last 3 months, from 11 PM to 8 AM.

#### B. Utilization of PLN 123 Contact Center Facilities

PLN is committed to providing easy and unlimited services access to customers. PLN's commitment is shown by presenting PLN 123 CC service.

The public and customers find it easy to make a new connection (PB), change voltage (PD), create a temporary connection (PS), gain information, make a complaint, and recover electricity distribution after a disruption by accessing PLN 123 CC. PLN 123 CC is also aimed to eliminate potential of dishonest practice in form of seeking gratuities or additional charges by officers and touting practices, to increase PLN service integrity to the public.

The objective of this program is to:

- Provide information to the public about PLN 123 CC.
- Provide understanding of the business process of PLN 123 CC.
- Increase PLN 123 CC brand awareness.

#### C. Follow-Up on Customer Satisfaction Survey Results

In order to improve the quality of service and as part of the implementation of marketing strategy, PLN conducts customer satisfaction survey. The survey results provided some feedback, which then is followed-up with some marketing related activities, including:

- Organizing Business Forum with stakeholders to deliver PLN readiness in supplying all electricity needs in Indonesia
- Organizing a customer gathering forum for stakeholders, FGD, optimizing the Account Executive (AE) roles, providing rewards for certain customers as a form of PLN communications with its customers and to increase customer engagement

## Kinerja Segmen Operasi

### Operation Segment Performance

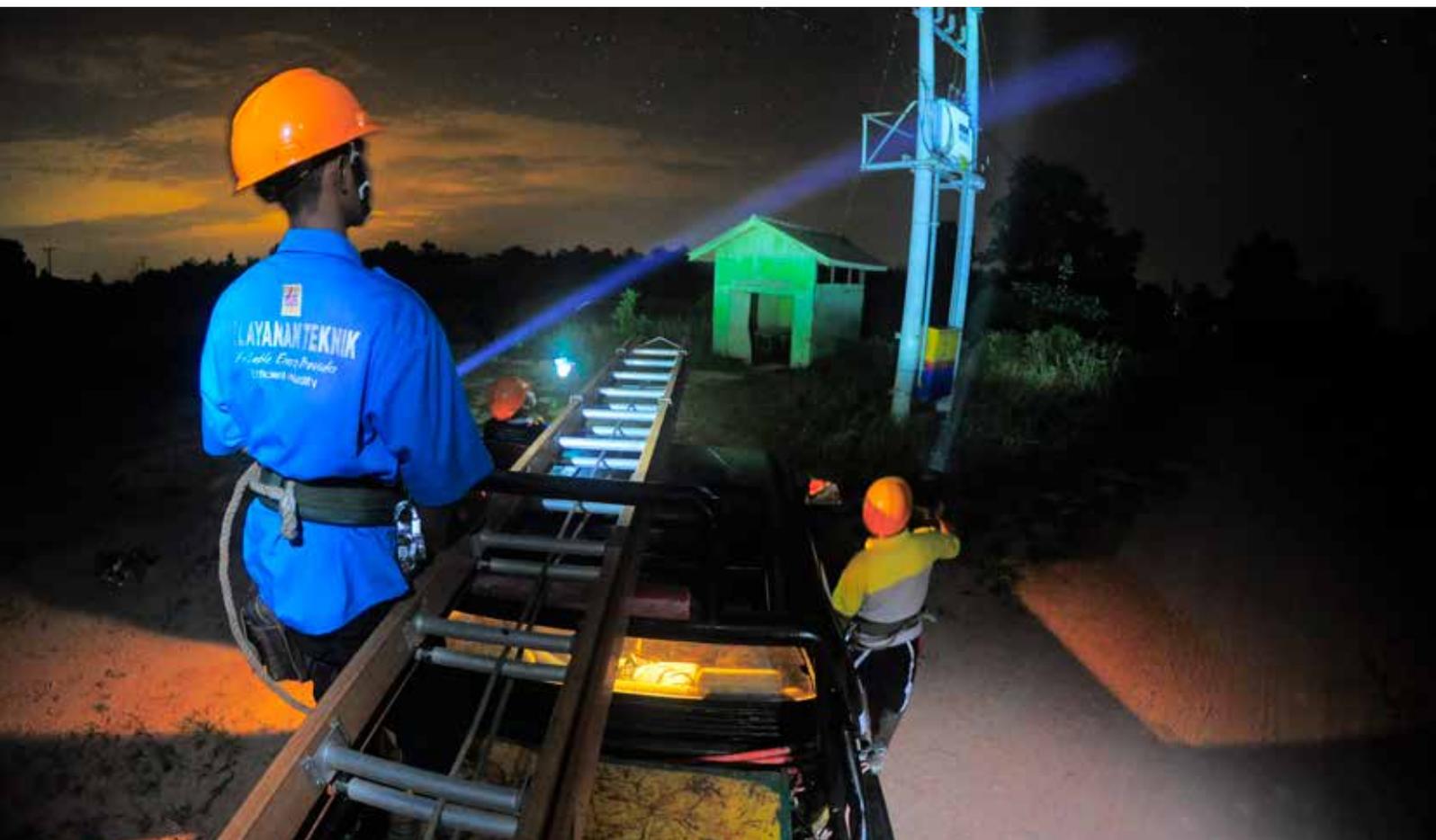
- Memberikan kemudahan kepada pelanggan Industri Menengah dan Besar untuk mendapatkan sambungan baru maupun menambah kapasitas pasokan guna memeperkuat daya saing industri dalam negeri
- Meningkatkan kemudahan dalam mendapatkan layanan penyambungan listrik bagi usaha kecil dan menengah daya 100 – 200 kVA
- Memberikan kemudahan kepada konsumen tegangan rendah untuk dapat meningkatkan kapasitas daya listriknya melalui program promo tambah daya
- Meluncurkan produk-produk layanan yang di sesuai dengan kebutuhan pelanggan, diantaranya : Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), Powerbank/Unit Gardu Bergerak (UGB) untuk kegiatan konstruksi
- Menambah pintu layanan melalui peluncuran PLN Mobile guna mempermudah pelanggan berkomunikasi dan mendapatkan layanan dari PLN
- Menyusun dan melaksanakan program perbaikan layanan sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil survey kepuasan pelanggan
- Upskilling petugas pelayanan teknik untuk meningkatkan respon terhadap pengaduan keluhan dan gangguan, serta pemeliharaan dan inspeksi jaringan secara berkala
- Menyediakan kemudahan informasi layanan dengan menyebarkan brosur, pamphlet, PLN Mobile serta media social yang terkait informasi layanan PLN
- Memperbanyak pintu layanan
- Memastikan kecukupan material
- Facilitating the Medium and Large Industry customers to install new connections and increase supply capacity to strengthen the competitiveness of domestic industries
- Improving the facilitation in obtaining electricity connection services for small and medium enterprises power 100 - 200 kVA
- Facilitating low voltage consumers to be able to increase their electrical power capacity through power promotion program (Thematic program: Gemerlap Lebaran, Gebyar Kemerdekaan, and Indonesia Terang/Harlisnas)
- Launching products in accordance with customer needs, including: Electric Charging Stations (SPLU), Powerbank/Moving Substation (UGB) for constructions
- Adding service for PLN Mobile launching to facilitate customer communication and obtain services from PLN
- Developing and implementing service improvement programs as a follow-up recommendation of customer satisfaction survey results
- Upskilling technical service personnel to improve response to complaints and disturbance complaints, and regular maintenance and inspection of networks
- Providing ease of service information by distributing brochures, pamphlets, PLN Mobile, and related social media for PLN information service
- Adding facilities
- Ensuring the adequacy of the material

Kinerja Segmen Operasi  
Operation Segment Performance**D. Program Pemasaran Khusus Pelanggan Bisnis dan Industri**

- Bagi pelanggan komersial dan industri menengah/besar diberikan fasilitas kemudahan apabila memerlukan penambahan kapasitas pasokan listrik
- Menyediakan layanan premium pelanggan komersial dan industri sesuai kualitas dan tingkat keandalan yang dibutuhkan oleh pelanggan;
- Meningkatkan daya mampu pasok sebagai kelistrikan mulai dari pembangkitan, transmisi, Gardu Induk, dan distribusi.
- Mengupayakan reliability system pembangkitan hingga distribusi untuk meningkatkan penjualan.
- Meningkatkan mutu pasokan listrik dengan pemasangan trafo TAP khusus untuk perbaikan mutu tegangan, penambahan dan optimalisasi titik remote SCADA.

**D. Business and Industrial Marketing Program**

- For commercial and middle/large industrial customers, PLN provides facilities to add power supply capacity
- To provide premium services to commercial and industrial customers, according to quality and reliability required by the customers;
- To increase the electricity supply from the generation, transmission, substation, and distribution.
- To strive for generation system reliability up to distribution to increase sales.
- To improve the quality of power supply by installing a special TAP transformer for improving the voltage quality, addition, and optimization of SCADA remote points.



## Kinerja Segmen Operasi

### Operation Segment Performance



#### E. Program Peningkatan Kualitas Layanan Kepada Seluruh Segmen Pelanggan

- Mendeklarasikan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP)/ *Service Level Agreement* kepada pelanggan melalui 13 indikator pelayanan dan memberikan kompensasi atas 6 indikator bila tingkat pelayanan PLN melebihi 10% dari yang dideklarasikan.
- Melakukan upaya-upaya perbaikan agar pencapaian TMP lebih baik dari yang dideklarasikan. Program yang dijalankan antara lain membangun Aplikasi Pengaduan Keluhan terpadu (APKT Mobile), Aplikasi Catat Meter Terpusat (ACMT), Automatic Meter Reading (AMR) terpusat dan lain-lain.

#### E. Service Quality Improvement Program to All Customer Segments

- Declare Service Quality (TMP)/Service Level Agreement to customers through 13 service indicators and provide compensation for 6 indicators if PLN service quality exceeds 10% of the declaration.
- To conduct refinement to achieve better quality service than the declaration. The programs include building an Integrated Complaint Application (APKT Mobile), Centralized Meter Record (ACMT), Centered Automatic Meter Reading (AMR), etc.

Kinerja Segmen Operasi  
Operation Segment Performance**F. Program Penjualan Tematik**

Pada tahun 2017, kami memiliki sejumlah program penjualan tematik berupa program gemerlap lebaran, program gemerlap kemerdekaan, dan program Indonesia terang.

**Program Gemerlap Lebaran**

Program ini memberikan diskon 50% untuk semua golongan tariff pada Tegangan Rendah, khusus untuk Rumah Ibadah diberikan Diskon 100%.

**Sparkling Eid Mubarak Program**

This program provides 50% discount for all Low Voltage tariff. This program provides free electricity for House of Worship.

**Program Gemerlap Kemerdekaan**

Program Gemerlap Kemerdekaan memberi diskon Biaya Penyambungan 17% + 8% selama 45 hari untuk Layanan Penyambungan Baru & Program Promo Layanan Penyambungan Sementara untuk Pesta Kemerdekaan.

**Sparkling Independence Day Program**

Sparkling Independence Day Program provides 17%+8% discount for new installation for 45 days. The program includes New Installation Service & New Connection Services Promo Program for the Country's Anniversary.

**Program Indonesia Terang**

Program Indonesia Terang dilakukan seiring dengan menyambut Hari Listrik Nasional Ke-72 dengan memberikan potongan harga dengan hanya membayar BP 72% dari Biaya Penyambungan Normal untuk tegangan 450 VA- 197 KVA.

**Bright Indonesia Program**

Bright Indonesia Program was conducted in conjunction with the 72nd National Electric Power Day by providing a rebate by paying only BP 72% of the Normal Connection Cost for 450 VA to 197 KVA voltage.

# KINERJA SEGMENT OPERASI PERUSAHAAN

## Operation Segment Performance

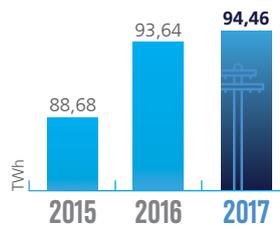
### SEGMENT OPERASI RUMAH TANGGA

Segmen Operasi Rumah Tangga terdiri dari 2 jenis, yakni: (a). Golongan Tarif Subsidi untuk R-1 / s/d 450 VA dan R-1 / 900 VA dan (b). Golongan Tarif Non-Subsidi untuk R-1 / 900 VA, R-1 / 1300 VA, R-1 / 2200 VA, R-2 / 3500 s/d 5500 VA, dan R-3 /  $\geq$ 6600 VA.

### HOUSEHOLDS OPERATION SEGMENT

The Households Operation Segment consists of 2 groups: (a). Subsidy Tariff Group for R-1/ to 450 VA and R-1/ 900 VA, and (b). Non-Subsidy Tariff Group for R1-900VA, R-1/1300 VA, R-1/ 2200 VA, R-2/ 3500 VA to 5500 VA, and R-3/  $\geq$ 6600 VA.

**Penjualan Listrik Segmen Operasi Rumah Tangga**  
Electricity sales on Household Operations Segment



Pada tahun 2017, Realisasi penjualan tenaga listrik untuk segmen operasi rumah tangga adalah sebesar 94,46 TWh meningkat sebesar 0,88% dibandingkan 93,64 TWh tahun 2016. Peningkatan penjualan segmen operasi rumah tangga sebesar 0,88% ini lebih rendah dibanding peningkatan penjualan tahun sebelumnya, yakni 5,58%. Pada tahun 2017, terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi penjualan listrik bagi segmen operasi rumah tangga seperti menurunnya daya beli masyarakat, adanya isu kenaikan tarif pada awal tahun yang menyebabkan terjadinya penghematan pemakaian listrik yang dilakukan untuk kelompok pelanggan rumah tangga, penggunaan dan penggantian peralatan-peralatan rumah tangga dan lampu yang hemat energi, penggunaan teknologi terbaru hemat energi, serta pengurangan frekuensi penggunaan peralatan elektronik oleh konsumen rumah tangga.

Perilaku konsumen rumah tangga eksiting cenderung konstan, oleh karena itu PLN berupaya untuk memacu pertumbuhan konsumsi pelanggan rumah tangga dengan cara memberikan program promo diskon tambah daya (Gemerlap Lebaran) dan program promo diskon penyambungan baru (Indonesia Terang), sehingga dengan adanya program tersebut dapat memacu pertumbuhan konsumsi pelanggan rumah tangga yang signifikan.

In 2017, the realization of electricity sales for the household segment was 94.46 TWh, increased by 0.88% compared to 93.63 TWh in 2016. The increase in sales of household operating segment by 0.88% is lower than the previous year's sales increase, i.e. 5.58%. In 2017, there are various obstacles that affect electricity sales for household, such as the decrease of public purchasing power, the issue of tariff increases at the beginning of the year which leads to savings in electricity consumption for household customers, the use and replacement of home appliances equipment and energy-efficient lamps, the use of the latest energy-efficient technology, and the reduction of the frequency of electronic appliances used by households customers.

The behavior of household customers is constants. Thus, PLN strives to spur the growth of household customers consumption by providing discount for additional capacity (Sparkling Eid Mubarak) and discount for new installation (Bright Indonesia) to boost significant growth in household consumption.

Kinerja Segmen Operasi Perusahaan  
Operation Segment Performance**SEGMENT OPERASI INDUSTRI**

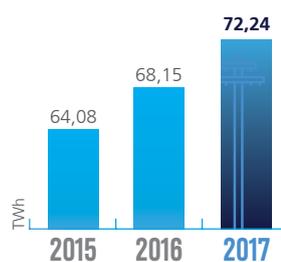
Segmen Operasi Industri diklasifikasikan dalam 2 jenis, yaitu (a) Golongan Tarif Subsidi untuk I-1 / 450 VA, I-1 / 900 VA, I-1 / 1300 VA, I-1 / 2200 VA, I-1 / 3500 VA s/d 14 kVA, dan I-2 / >14 kVA s/d 200 kVA, serta (b) Golongan Tarif Non-Subsidi untuk I-3 / >200 kVA dan I-4 / >=30.000 kVA.

**Penjualan GWh Segmen Operasi Industri Selama 3 Tahun Terakhir****INDUSTRIAL OPERATION SEGMENT**

The Industrial Operation Segment is classified into 2 groups: (a) Subsidy Tariff Group for I-1/ 450 VA, I-1/ 900 VA, I-1/ 1300 VA, I-1/ 2200 VA, I-1/ 3500 VA to 14 kVA, and I-2/ >14 kVA to 200 kVA, and (b) Non-Subsidy Tariff Group for I-3/ >200 kVA and I-4/ >=30,000 kVA.

**GWh Industrial Operation Segment Sales Over the Last 3 Years**

**Penjualan Listrik Segmen Operasi Industri**  
Industrial Operation Segment Sales



Pada tahun 2017, Realisasi penjualan tenaga listrik untuk segmen operasi industri adalah sebesar 72,24 TWh atau meningkat sebesar 6,01% dibandingkan 68,15 TWh di tahun 2016. Peningkatan Penjualan pada segmen operasi industri sebesar 6,01% ini lebih rendah bila dibandingkan peningkatan penjualan pada tahun sebelumnya, yakni 6,35%. Hal ini disebabkan oleh kondisi beberapa pelanggan industri berhenti menjadi pelanggan dan turun daya yang salah satunya dipicu oleh pertumbuhan impor barang jadi dan setengah jadi cukup tinggi sehingga industri dalam negeri mengalami tekanan produk dari luar negeri. Meskipun begitu, kami tetap melakukan upaya-upaya terukur untuk meningkatkan penjualan tenaga listrik pada segmen operasi ini, berupa melakukan sosialisasi program atau pertemuan forum bisnis secara regular guna mendengar harapan dan keinginan pelanggan, melakukan kajian potensi demand pelanggan besar, memberikan program pemasaran yang berupa diskon 30% Tarif LWBWP, dan melakukan percepatan progress pembangunan Transmisi/Gardu Induk/Gardu Distribusi untuk melayani calon pelanggan.

In 2017, the industrial operating segment sold 72.24 TWh of electricity, or increased by 6.01% compared to 68.15 TWh in 2016. The 6.01% increase in sales in the industrial operating segment is lower than the previous year's sales increase of 6.35%. This is due to the condition of some industrial customers who stopped using PLN's services, and decrease in power, which is triggered by the growth of finished and semi-finished goods imports. Thus, the domestic industry experienced products pressure from abroad. Nevertheless, we continue to make measurable efforts to increase sales of electricity in this operating segment, in the form of socialization programs or regular business forum meetings in order to hear the expectations and wishes of customers, to study potential customer demand large, provide marketing programs in the form of discounts 30% LWBWP tariffs, and accelerate the progress of Transmission / Substation / Distribution Distribution to serve potential customers.

## Kinerja Segmen Operasi Perusahaan

### Operation Segment Performance

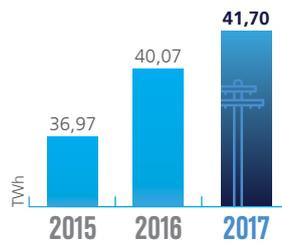
### SEGMENT OPERASI BISNIS

Segmen Operasi Bisnis diklasifikasikan dalam 4 jenis, yaitu (a). Golongan Tarif Subsidi untuk B-1 / 450 VA, B-1 / 900 VA, B-1 / 1300 VA, dan B-1 / 2200 VA s/d 5500 VA, (b). Golongan Tarif Non Subsidi untuk B-2 / 6600 VA s/d 200 kVA dan B-3 / > 200 kVA.

### BUSINESS OPERATIONS SEGMENT

The Business Operations Segment is classified into 4 groups: (a) Subsidy Tariff Group for B-1/ 450 VA, B-1/ 900 VA, B-1/ 1300 VA, and B-1/ 2200 VA to 5500 VA, (b). Non-Subsidy Tariff Group for B-2/ 6600 VA to 200 kVA and B-3/ >200 kVA.

**Penjualan Listrik Segmen Operasi Bisnis**  
Electricity sales on Business Operations Segment



Pada tahun 2017, Realisasi penjualan tenaga listrik untuk segmen operasi bisnis adalah sebesar 41,70 TWh atau meningkat sebesar 4,04% dibandingkan 40,07 TWh di tahun 2016. Peningkatan Penjualan pada segmen operasi bisnis sebesar 4,04% ini lebih rendah bila dibandingkan peningkatan penjualan pada tahun sebelumnya, yakni 8,37%. Hal ini disebabkan oleh Perilaku konsumen dalam berbelanja mulai bergeser ke e-commerce online shopping sehingga gerai retail konvensional sepi pengunjung bahkan sebagian ada yang tutup, serta penurunan rata-rata suhu harian di beberapa kota besar di Jawa (sumber BMKG) tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016, sehingga ditengarai menurunkan pemakaian tenaga listrik untuk penyejuk udara (AC) di kantor-kantor. Namun demikian PLN berupaya untuk memberikan kemudahan mendapatkan penyambungan listrik untuk pelanggan bisnis khususnya daya 100 s.d 200 kVA melalui program Getting Electricity. Melalui program tersebut, diharapkan akan memacu pertumbuhan pelaku usaha bisnis untuk dapat berinvestasi di Indonesia.

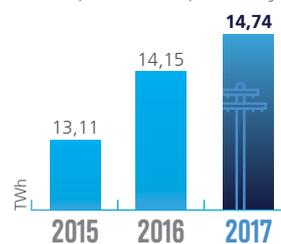
In 2017, the business operation segment sold 41.70 TWh of electricity, or increased by 4.04% compared to 40.07 TWh in 2016. The 4.04% increase in sales in the business operation segment is lower than the previous year's sales increase of 8.37%. This is caused by consumer behavior in shopping that began to shift to e-commerce online shopping. Thus, the conventional retail outlets were slow and some even closed. It is also caused by the decreasing daily average temperature in some big cities in Java (source: BMKG) in 2017 compared to year 2016. Therefore, it caused the reduction in electricity usage such as air conditioning (AC) in offices. However, PLN seeks to provide ease of obtaining electricity connection for business customers, especially for 100-200 kVA, through Getting Electricity program. The program is expected to encourage the growth of business actors to be able to invest in Indonesia.

Kinerja Segmen Operasi Perusahaan  
Operation Segment Performance

## SEGMENT OPERASI LAINNYA

## OTHER OPERATIONS SEGMENT

Penjualan Listrik Segmen Operasi Lainnya  
Electricity sales on Other Operations Segment



Segmen Operasi Lainnya, terdiri atas: (i) Segmen Operasi Sosial merupakan kelas dalam golongan tariff subsidi untuk S-1 / 220 VA, S-2 / 450 VA, S-2 / 900 VA, S-2 / 1300 VA, S-2 / 2200 VA, S-2 / 3500 VA s/d 200 kVA, dan S-3 / > 200 kVA, (ii) Segmen Operasi Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum dapat diklasifikasikan dalam 2 jenis, yaitu (a). Golongan Tarif Subsidi untuk P-1 / 450 VA, P-1 / 900 VA, P-1 / 1300 VA, dan P-1 / 2200 VA - 5500 VA, serta (b). Golongan Tarif Non- Subsidi untuk P-1 / 2200 VA - 5500 VA, P-2 / > 200 kVA, dan P-3, (iii) Traksi yang terdapat pada golongan tariff subsidi untuk T / > 200 kVA, (iv). Curah yang terdapat pada golongan tarif subsidi untuk C / >200 kVA, serta (v). Layanan Khusus.

Pada tahun 2017, Realisasi penjualan tenaga listrik untuk segmen operasi lainnya adalah sebesar 14,74 TWh atau meningkat sebesar 4,19% dari 14,15 TWh di tahun 2016. Untuk mendorong penjualan pada segmen operasi lainnya, contohnya untuk layanan khusus seperti listrik untuk pesta, panggung hiburan, atau acara temporer lainnya, Perusahaan memberikan Layanan Khusus Konstruksi melalui Unit Gardu Bergerak.

Other Operations Segment consists of: (i) Social Operation Segment, which includes subsidy tariff group for S-1/ 220 VA, S-2/ 450 VA, S-2/ 900 VA, S-2/ 1300 VA, S-2/ 2200 VA, S-2/ 3500 VA to 200 kVA, and S-3/ > 200 kVA, (ii) Segments of Government Operations and Public Street Lighting, classified into 2 types, i.e.: (a). Subsidy Tariff Group for P-1/450 VA, P-1/900 VA, P-1/1300 VA, and P-1/2200 VA to 5500 VA, and (b). Non-Subsidy Tariff Group for P-1/2200 VA-5500 VA, P-2/> 200 kVA, and P-3, (iii) Traction contained in the subsidized tariff group for T/> 200 kVA, (iv). Bulks in the subsidy tariff group for C / >200 kVA, and (v). Special Services.

In 2017, the other operation segment sold 14.74 TWh of electricity, or increased by 4.19% compared to 14.15 TWh in 2016. The Company provides Special Service for Construction through Mobile Substation Units to encourage sales in other operating segments, for example for special services such as electricity for parties, entertainment stage, or other temporary events.

# URAIAN KINERJA OPERASIONAL PERUSAHAAN

## Company's Operational Performance

### PRODUKSI LISTRIK

Perseroan memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat melalui pembangkit milik sendiri, pembangkit sewa dan pembelian tenaga listrik dari pembangkit milik swasta.

Produksi tenaga listrik tahun 2017 mencapai 254.660 GWh, meningkat 2,43% dari tahun 2016 sebesar 248.611 GWh. Produksi tenaga listrik tahun 2017 dari pembangkit sendiri adalah sebesar 167.978 GWh, berkontribusi 65,96% dari total produksi. Pembelian listrik swasta sebesar 73.235 GWh atau 28,75% dari total produksi 2017, meningkat 13,01% dari 64.802 GWh (26,06% total 2016). Sedangkan produksi dari pembangkit sewa sebesar 13.447 GWh atau 5,28% dari total produksi, menurun 22,50% dari 17.352 GWh di tahun 2016.

Peningkatan pembelian listrik swasta adalah konsekuensi dari semakin banyaknya pembangkit swasta dalam skema PPI yang telah operasional dan sebagai wujud realisasi PPA.

### ELECTRICITY GENERATION

The Company meets the increasing demand for electricity through its own power plants, lease power plants, and power purchase from private power plants.

Electricity generation in 2017 reached 254,660 GWh, an increase of 2.43% from 2016, which was 248,610 GWh. In 2017, electricity generation from owned generator is 167,978 GWh, which contributed to 65.96% of total production. Private electricity purchases amounted to 73,235 GWh or 28.75% of total production in 2017, an increase of 13.01% from 64,802 GWh (26.06% of total purchase in 2016). Meanwhile, the generation of lease power plants is 13,447 GWh or 5.28% of total productions, decreasing 22.50% from 17,352 GWh in 2016.

Increased private power purchase is a consequence of the growing number of private power generators in operational PPI schemes and as a form of PPA realization.

Produksi Listrik (GWh)	2015	2016	2017	Electricity Production (GWh)
<b>Produksi Sendiri</b>	<b>156.631</b>	<b>166.457</b>	<b>167.978</b>	<b>Own Production</b>
BBM	5.783	4.673	3.612	Fuel
Non-BBM	150.848	161.784	164.366	Non-Fuel
Batubara	90.275	91.701	101.244	Coal
Gas Alam	46.039	51.890	46.356	Natural Gas
Panas Bumi	4.392	3.958	4.096	Geothermal
Air	10.004	13.886	12.425	Water
Lainnya	138	350	245	Others
<b>Sewa</b>	<b>19.841</b>	<b>17.352</b>	<b>13.447</b>	<b>Lease</b>
<b>Pembelian - IPP dan Proyek</b>	<b>57.506</b>	<b>64.802</b>	<b>73.235</b>	<b>Purchase - IPP and Projects</b>
<b>Total Produksi Listrik</b>	<b>233.978</b>	<b>248.611</b>	<b>254.660</b>	<b>Total Electricity Production</b>

Dari tabel di atas tampak bahwa produksi tenaga listrik yang berasal dari pembangkit sendiri berbahan bakar minyak (BBM), mengalami penurunan sebesar 22,72% dari tahun 2016. Usaha yang dilakukan untuk menekan produksi tenaga listrik dari pembangkit berbahan bakar minyak, telah sejalan dengan prioritas program kerja Perseroan untuk menurunkan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik melalui optimalisasi produksi tenaga listrik dari pembangkit non BBM.

The table above showed that the production of electricity derived from own fuel decreased by 22.72% from 2016. The efforts to suppress the production of electricity from oil-fired generators have been in line with the priority of the Company's work program to reduce the Basic Supply Cost of Electricity through the optimization of the production of electricity from non-fuel plants.



## Uraian Kinerja Operasional Perusahaan Company's Operational Performance

Produksi tenaga listrik dari pembangkit non-BBM (batubara, gas alam, tenaga air, panas bumi, surya dan angin) mengalami peningkatan sebesar 2.582 GWh menjadi 164.366 GWh di tahun 2017 atau naik 1,60% dibanding 2016. Kenaikan produksi listrik sendiri tersebut terutama dikontribusikan oleh kenaikan produksi pembangkit berbahan bakar batubara dan panas bumi yang mengalami peningkatan masing-masing sebesar 10,41% dan 3,48%. Listrik dari pembangkit sendiri berbahan-bakar gas alam, air, biodiesel dan surya, justru mengalami penurunan.

Menurunnya produksi tenaga listrik yang berasal dari pembangkit BBM dan meningkatnya produksi tenaga listrik dari pembangkit non-BBM tercapai, disebabkan oleh:

- Telah beroperasinya beberapa proyek pembangkit yang berbahan bakar batu bara.
- Selesainya proses pemeliharaan pembangkit eksisting non-bbm.
- Meningkatnya penggunaan teknologi CNG sebagai pembangkit *peaker*.
- Meningkatnya pasokan listrik dari pembangkit panas bumi yang lebih ramah lingkungan.

The electricity generation from non-fuel (coal, natural gas, hydropower, geothermal, solar, and wind) plants increased by 2,582 GWh to 164,366 GWh in 2017, an increase of 1.60% from 2016. The increase in electricity production was mainly due to the increase of coal and geothermal power plant production, which increased respectively by 10.41% and 3.48%. The electricity from its own generators, fueled by natural gas, water, biodiesel, and solar, actually decreased.

The decline in electricity production generated from oil fuel plants and the increased production of electricity from non-fuel power plants is achieved, because of:

- Operation of several coal-fired power plant projects.
- Completion of maintenance process for existing non-fuel plant.
- Increased use of CNG technology as a peaker power plant.
- Increased power supplies from geothermal power plants, which is more environmentally friendly.

## Uraian Kinerja Operasional Perusahaan

### Company's Operational Performance

Sejalan dengan program Pemerintah untuk menggunakan energi baru terbarukan dan mengurangi pemakaian BBM, PLN menggunakan bahan bakar biodiesel dalam memproduksi tenaga listrik, terutama didaerah-daerah yang memiliki area perkebunan kelapa sawit skala besar, seperti di Kalimantan dan Sumatera. Perusahaan juga semakin intens mengembangkan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu sebagai salah satu alternatif sumber energi bagi daerah-daerah terpencil dengan potensi bayu yang besar.

In line with the Government's program to use renewable energy and reduce fuel consumption, PLN uses biodiesel fuel to generate electricity, especially in areas with large oil palm plantations, such as in Kalimantan and Sumatera. The Company is also increasingly intense developing the potential of Wind Power Plant as an alternative source of energy for remote areas with large wind potential.

## KAPASITAS TERPASANG

Kapasitas terpasang pembangkit secara nasional sampai dengan akhir tahun 2017 adalah 55.925,97 MW, meningkat sebesar 2,31% dibanding tahun sebelumnya sebesar 54.664,49 MW. Komposisi kapasitas pembangkit terpasang pada tahun 2017 adalah milik sendiri 70.90%, swasta (IPP) 23,73%, dan sewa 5,37%.

## INSTALLED CAPACITY

Installed owned plant capacity as of the end of 2017 was 55,925.97 MW, increased by 2.31% compared to the previous year, which was 54,664.49 MW. In 2017, the composition of installed capacity is owned plants 70.90%, privates (IPP) 23.73%, and leased plants 5.37%.

### Kapasitas Terpasang Pembangkit (MW)

Status Kepemilikan	2015	2016	2017	Ownership Status
Milik PLN	38.265,25	39.785,06	39.651,80	Owned by PLN
Swasta (IPP)	8.964,54	11.370,87	13.269,93	Privats (IPP)
Sewa Pembangkit	3.629,48	3.508,56	3.004,24	Power Plants Lease
<b>Jumlah</b>	<b>50.859,27</b>	<b>54.664,49</b>	<b>55.925,97</b>	<b>Total</b>

### Electricity Generation by Regions (GWh)

## BAURAN ENERGI

Sepanjang tahun 2017, Perseroan terus mengupayakan perbaikan bauran energi BBM melalui program-program konversi energi dari BBM ke non BBM, optimasi peran pembangkit non BBM pada sistem-sistem interkoneksi maupun tambahan pembangkit-pembangkit baru batubara, gas ataupun energi baru dan terbarukan terus diupayakan berdasarkan prinsip *least cost*.

Bauran energi BBM terus menurun dari tahun-tahun sebelumnya, dimana realisasi tahun 2017 mencapai 6%. Penurunan tersebut jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 6,46%. Perseroan terus mengintensifkan langkah-langkah upaya nyata untuk mengurangi ketergantungan akan bahan bakar minyak secara bertahap.

## FUEL MIX

In 2017, the Company continues to improve the fuel mix of fuel through energy conversion programs from fuel to non-fuel, optimization of the non-fuel power plants role in the interconnection systems, and the addition of new coal, gas, or new and renewable energy plants, which are continuously pursued based on principle of least cost.

The fuel energy mix continues to decline from previous years. In 2017, the realization achieved 6%. The decline is much better when compared with the year 2016 which was 6.46%. The Company continues to intensify concrete steps to reduce the dependency on oil-based fuel gradually.

## Uraian Kinerja Operasional Perusahaan

Company's Operational Performance

Jenis Pembangkit	Fuel Mix (%)			Power Plant Types
	2015	2016	2017	
<b>BBM</b>	8,22	6,46	6	<b>Fuel</b>
<b>Non-BBM</b>	91,78	93,54	94	<b>Non-Fuel</b>
Batubara	55,79	54,45	58,14	Coal
Gas Alam	25,34	26,28	23,33	Natural Gas
Panas Bumi	4,29	4,29	4,98	Geothermal
Air	5,87	7,79	7,32	Water
Lainnya	0,49	0,73	0,24	Others

Pada tabel di atas terlihat bahwa bauran energi BBM dapat diturunkan karena peningkatan bauran energi dari pembangkit berbahan bakar batubara dan panas bumi. Sebaliknya terlihat bauran energi gas menurun jika dibandingkan tahun 2016. Menurunnya bauran energi gas ini adalah dampak pengoptimalan pembangkit yang lebih murah yaitu pembangkit batubara pada sistem Jawa-Bali dan sistem Sumatera sebagai langkah yang diambil Perusahaan dalam program penurunan BPP. Meskipun bauran energi gas mengalami penurunan, tetapi peran pembangkit gas tetap didorong untuk menggantikan peran pembangkit BBM pada sistem-sistem di luar sistem Jawa-Bali dan Sumatera.

Upaya yang dilakukan untuk menekan bauran energi BBM pada tahun 2017 diantaranya sebagai berikut:

1. Beroperasinya PLTU baru baik milik PLN maupun IPP.
2. Membaiknya kinerja operasional PLTU Milik PLN sehingga dapat meminimalisir pemakaian Pembangkit BBM.
3. Telah selesainya rekonfigurasi dan penambahan jaringan transmisi pada sistem Jawa- Bali, sehingga Pembangkit berbahan bakar murah dapat lebih dioptimalkan.
4. Pengoperasian PLTG baru di Sumatera dan Kalimantan yaitu MPP Lampung, MPP Paya Pasir, PLTMG Siberida dan PLTMG Bangkanai.
5. Optimalisasi produksi pembangkit hidro dengan memanfaatkan secara optimal tingginya curah hujan pada periode Januari sampai dengan bulan Mei 2017, misalnya dengan menerapkan strategi penyeimbangan waduk untuk beberapa *cascaded* PLTA sehingga tidak ada air waduk yang melimpah.

In the table above, the fuel mix decline is due to increased energy mix from coal-fired and geothermal power plants. On the contrary, gas energy mix is decreasing compared to 2016. The decrease of gas energy mix is the impact of cheaper generator optimization of coal plants in Java-Bali system and Sumatra system, as the Company's measure in Cost of Supply reduction program. Although the gas energy mix has decreased, the role of the gas generator is still encouraged to replace the role of fuel oil in systems outside the Java-Bali and Sumatra systems.

Efforts to suppress fuel energy mix in 2017 are as follows:

1. Operation of new Coal Power Plants owned by PLN or IPP.
2. Improved operational performance of owned Coal Power Plant to minimize the use of Fuel Generators.
3. Completion of reconfiguration and transmission network in Java-Bali system. Thus, cheaper-fuel generators can be optimized.
4. The new Gas Power Plant operation in Sumatra and Kalimantan, i.e. Lampung Mobile Power Plant, Paya Pasir Mobile Power Plant, Siberida Combined Cycle Power Plant, and Bangkanai Combined Cycle Power Plant.
5. Optimization of hydro generator production by optimally utilizing high rainfall in January to May 2017 period, e.g. by applying a reservoir balancing strategy for several cascaded hydropower plants to ensure there is no abundant water reservoir.

Uraian Kinerja Operasional Perusahaan  
Company's Operational Performance

**KONSUMSI DAN HARGA ENERGI PRIMER**

Pada tahun 2017, Perusahaan mengimplementasikan Program Penurunan BPP untuk dapat menjaga kondisi keuangan Perusahaan agar tetap sehat, melalui upaya pengoptimalan operasi pembangkit-pembangkit dengan bahan bakar murah. Pengoptimalan pengoperasian pembangkit non BBM terlihat dari kenaikan bauran energi batubara yang mencapai 58,14% dengan total konsumsi batubara mencapai 54.711.847 ton naik signifikan jika dibandingkan konsumsi pada tahun 2016 sebesar 50.556.446 ton. Kenaikan konsumsi batubara ini sangat berperan dalam penurunan konsumsi BBM yang turun signifikan menjadi 3.298.165 kilo liter dari konsumsi pada tahun 2016 sebesar 4.279.067 kilo liter.

Penyerapan gas pada tahun 2017 sebesar 447.072 BBTU turun jika dibandingkan dengan konsumsi pada tahun 2016 yang mencapai 505.125 BBTU. Hal ini disebabkan oleh optimasi *merit order* pembangkit yang memprioritaskan PLTU yang lebih murah pada sistem Jawa Bali dan sistem Sumatera. Meskipun begitu, pengoperasian pembangkit gas masih dioptimalkan untuk dapat menekan penggunaan BBM pada sistem kelistrikan di luar Jawa Bali dan Sumatera.

**CONSUMPTION AND PRIMARY ENERGY PRICE**

In 2017, the Company implemented the Cost of Supply Reduction Program to maintain the Company's financial condition to stay healthy, through efforts to optimize the operation of low-cost power plants. Optimizing the operation of non-fuel power plant is seen from the increase of coal energy mix which reached 58.14% with total consumption of coal reaching 54,711,847 tons, a significant increase compared to consumption in 2016 which was 50,556,446 tons. The increase in coal consumption significantly declined the fuel consumption to 3,298,165 kiloliters from 2016, which amounted to 4,279,067 kiloliters.

Gas absorption in 2017 is 447,072 BBTU, decreased compared with consumption in 2016, which reached 505,125 BBTU. This is due to the optimization of merit orders for power plants that prioritize less expensive Coal Power Plants in the Java Bali system and Sumatra system. Nevertheless, the operation of gas generators is still optimized to suppress the use of fuel in electricity systems outside Java Bali and Sumatra.

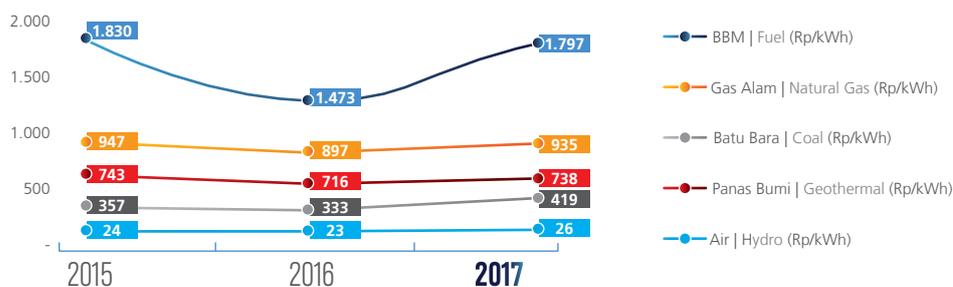
**Pemakaian Energi Primer**

**Primary Energy Utilization**

Jenis Bahan Bakar	2015	2016	2017	Fuel Types
BBM (Kilo liter)	5.478.863	4.279.067	3.298.165	Fuel (Kilo litre)
Batubara (ton)	48.995.169	50.556.446	54.711.847	Coal (ton)
Gas Alam (BBTU)	456.494	505.125	447.072	Natural Gas (BBTU)

**Grafik Beban Bahan Bakar Per kWh (Rp/KWh) Menurut Sumber Energi**

**Graph: Fuel Load per kWh (Rp/KWh) by Energy Sources**

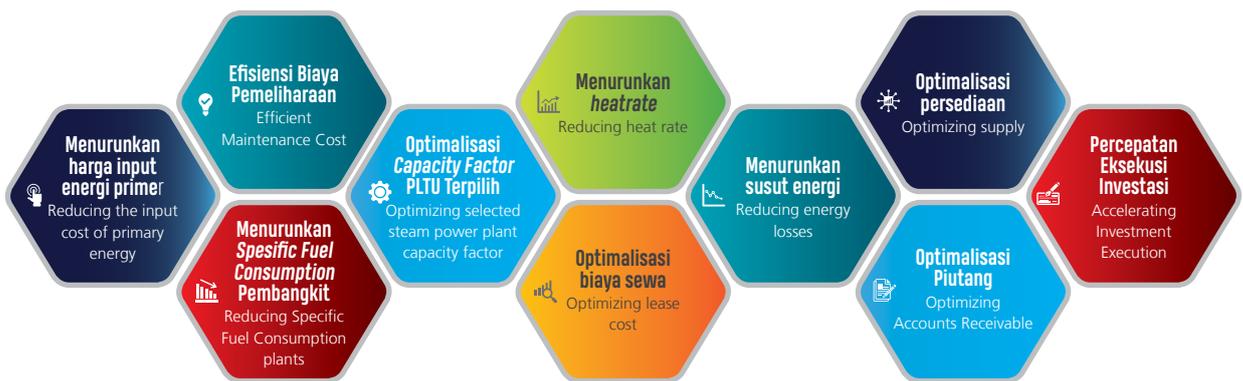


## Uraian Kinerja Operasional Perusahaan Company's Operational Performance

### BIAYA POKOK PENYEDIAAN (BPP)

Perusahaan berupaya menurunkan BPP melalui penerapan berbagai program dengan tujuan menurunkan komponen biaya yang paling berpengaruh secara signifikan terhadap BPP. Salah satu komponen utama dari BPP adalah biaya pembangkitan yang sangat dipengaruhi oleh jenis energi primer yang digunakan unit pembangkit.

Upaya yang dilakukan oleh Perseroan untuk menurunkan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP) adalah :



Berbagai program yang dijalankan dengan konsisten tersebut telah memberikan hasil nyata berupa relatif terjaganya besaran BPP dalam empat tahun terakhir, seperti ditunjukkan pada grafik berikut.

Dari data tersebut tampak, bahwa dalam empat tahun terakhir, sejak tahun 2014, BPP cenderung terus menurun, selaras dengan keberhasilan PLN dalam memperbaiki kualitas Bauran Energi dan meningkatkan efisiensi operasional. Kenaikan BPP di tahun 2017 terjadi terutama karena adanya kenaikan biaya energi primer, terutama batubara yang volume penggunaannya terus meningkat. Perusahaan berupaya meningkatkan penggunaan energi primer batubara dan gas sebagai sumber bahan bakar utama pengganti minyak bumi. Perusahaan juga mengembangkan penggunaan sumber energi baru dan terbarukan seperti panas bumi, bayu, surya, dan *biofuel* (CPO) dengan tujuan menurunkan BPP.

### COST OF SUPPLY

PLN strives to reduce the cost of supply by implementing various program aiming to lower the most significant component to the cost of supply. One of the core components of the cost of supply is the cost of power generating, which is heavily influenced by the type of energy used.

PLN's efforts to lower the Cost of Supply are:

These consistently implemented programs have provided tangible results of relatively substantial levels of Cost of Supply in the last four years, as shown in the following graph.

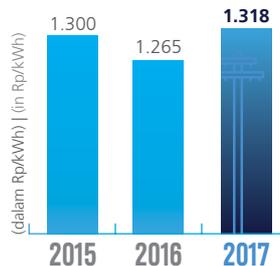
From these data, in the last four years, since 2014, Cost of Supply has been declining steadily, in line with PLN's success to improve the quality of the Fuel Mix and improve operations efficiency. The increase of Cost of Supply in 2017 occurs mainly due to the increase in primary energy costs, especially coal, which usage volume continues to increase. The company strives to increase the use of primary energy of coal and gas as the main fuel source of petroleum replacement. The Company also develops the use of new and renewable energy sources, such as geothermal, wind, solar, and *biofuel* I (CPO) to lower Cost of Supply.

## Uraian Kinerja Operasional Perusahaan

### Company's Operational Performance

#### Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP)

Electricity Cost of Supply (BPP)



Mengingat pentingnya perhitungan biaya pokok pengadaan ini terhadap keseluruhan operasional Perseroan, PLN berupaya meningkatkan akuntabilitas dan akurasi pencatatan transaksi keuangan (termasuk penerimaan pembayaran dari pelanggan) dengan menerapkan berbagai program, meliputi:

1. Perbaikan sistem akuntansi pencatatan keuangan dengan menerapkan PSAK terbaru sesuai ketentuan.
2. Perbaikan sistem transaksi keuangan dengan menerapkan P2APST dan AP2T sebagai bagian perbaikan sistem bisnis ini.
3. Pengelolaan seluruh transaksi keuangan secara terpusat.
4. Bekerjasama dengan BPK untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pencatatan dan pengelolaan keuangan.
5. Bekerjasama dengan KPK untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara.

Considering the importance of cost calculation of procurement to the Company's overall operations, PLN strives to improve accountability and accuracy of recording of financial transactions (including receipt of payments from customers) by applying various programs, including:

1. Improvement in financial records accountancy system by implementing the latest PSAK in accordance with the prevailing regulations.
2. Improvement in financial transaction system by implementing Integrated Income Cashflow Management and Monitoring (P2APST) and Integrated Customer Service Application (AP2T) as part of business system improvement.
3. Centralized financial transaction management.
4. Cooperation with the National Audit Board to enhance accountability and transparency of financial records and management.
5. Cooperation with the Commission of Corruption Eradication to enhance accountability and prevent actions that may harm the Company and/or the country.

## TARIF TENAGA LISTRIK

Komponen utama pendapatan PLN adalah penjualan tenaga listrik dengan dasar perhitungan Tarif Tenaga Listrik (TTL). TTL ditetapkan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian digunakan sebagai dasar menghitung jumlah tagihan rekening listrik kepada pelanggan. Besaran TTL ditinjau dan ditetapkan secara berkala dan terdiri dari berbagai kelompok tarif sesuai dengan kelompok pelanggan.

## ELECTRICITY TARIFF

The main component of PLN's revenue is the electricity sales with the base calculation of the electricity tariff (TTL). Electricity Tariff is set forth by the Government and the House of Representative (DPR) to be used as the basis for calculating the utility bill for customers. Electricity Tariff is reviewed and adjusted periodically and consist of a number of tariff groups for different customer groups.

## Uraian Kinerja Operasional Perusahaan

### Company's Operational Performance

TTL ditetapkan dengan memperhitungkan kemampuan pelanggan dan mempertimbangkan daya terpasang dari masing-masing kelompok pelanggan. Semakin tinggi daya terpasang pada suatu tegangan, maka akan semakin besar pula besaran Tarif Tenaga Listrik yang dikenakan pada tegangan tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, terdapat 12 (dua belas) golongan tarif yang diberlakukan mekanisme penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment), yaitu:

1. R-1/TR, 1300 VA (rumah tangga kecil)
2. R-1/TR, 2200 VA (rumah tangga kecil)
3. R-2/TR, 3500 VA – 5500 VA (rumah tangga menengah)
4. R-3/TR, 6600 VA ke atas (rumah tangga besar)
5. B-2/TR, 6600 VA – 200 kVA (bisnis menengah)
6. B-3/TM, di atas 200 kVA (bisnis besar)
7. P-1/TR, 6600 VA – 200 kVA (kantor pemerintah sedang)
8. I-3/TM, di atas 200 kVA (industri menengah)
9. I-4/TT, 30000 kVA ke atas (industri besar)
10. P-2/TM, di atas 200 kVA (kantor pemerintah besar)
11. P-3/TR (penerangan jalan umum)
12. Layanan Khusus (L/TR, TM, TT)

Penyesuaian atas 12 golongan tarif tersebut dapat dilaksanakan setiap bulan apabila terjadi perubahan terhadap nilai tukar mata uang Dollar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah (kurs), *Indonesia Crude Price* (ICP) dan inflasi. Meskipun begitu pada tahun 2017, Perusahaan tidak memberlakukan *Tariff Adjustment* demi menjaga daya beli masyarakat, serta mempertahankan tingkat daya saing pelaku industri dan bisnis tanah air.

Rata-rata TTL yang dikenakan terhadap pelanggan sesuai golongan tarif sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut.

The electricity tariffs are set by taking into account the customer's ability and the installed power of each customer group. The higher the installed power, the greater tariff imposed.

In line with the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 9 of 2015 on the Amendment to the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 31 of 2014 on Electricity Tariff Provision by Liability Company (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, there are 12 (twelve) tariff groups stipulated by the tariff adjustment mechanism, which consist of:

1. R-1/TR, 1300 VA (small households)
2. R-1/TR, 2200 VA (small households)
3. R-2/TR, 3500 VA – 5500 VA (medium households)
4. R-3/TR, 6600 VA and above (big households)
5. B-2/TR, 6600 VA – 200 kVA (medium enterprises)
6. B-3/TM, above 200 kVA (big enterprises)
7. P-1/TR, 6600 VA – 200 kVA (medium government offices)
8. I-3/TM, above 200 kVA (medium industries)
9. I-4/TT, 30000 kVA and above (big industries)
10. P-2/TM, above 200 kVA (big government offices)
11. P-3/TR (public street lighting)
12. Special Services (L/TR, TM, TT)

The adjustment of the 12 tariff groups is conducted every month should there is a necessary change of currency rate exchange of the US Dollar against Rupiah, Indonesia Crude Price (ICP), and inflation. However, in 2017, the Company did not impose Tariff Adjustment in order to maintain the purchasing power of the people, and maintain the competitiveness of industry and business actors of the country.

The average Electricity Tariff charged to customers based on the tariff class in 2017 is as follows.

## Uraian Kinerja Operasional Perusahaan

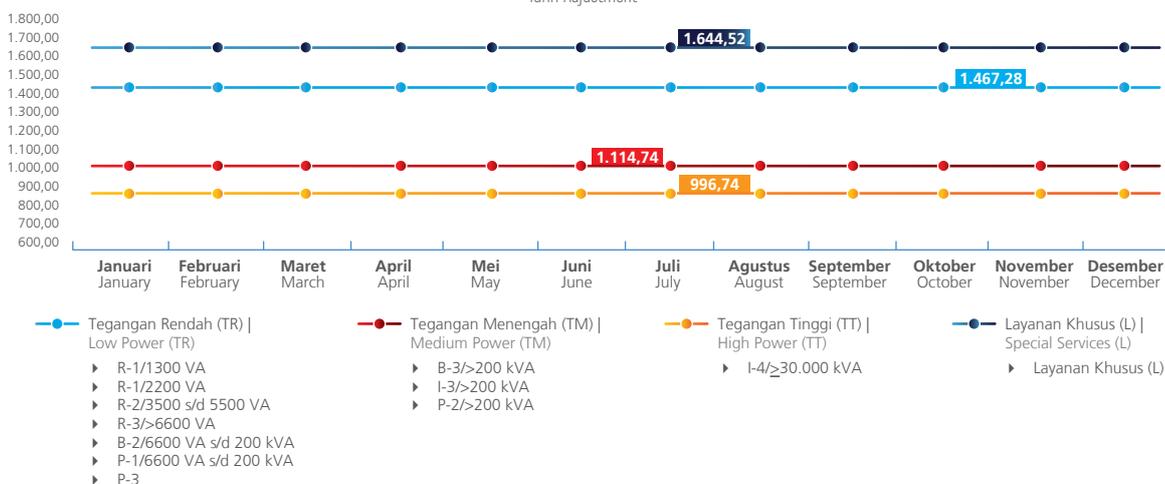
### Company's Operational Performance

### Realisasi Rata-Rata Tarif Tenaga Listrik Tahun 2017

### Realization of Average Electricity Tariff in 2017

#### Tren Penetapan Tariff Adjustment

##### Tariff Adjustment



## SUBSIDI LISTRIK

Subsidi listrik dihitung dari selisih negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif dikurangi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing golongan tarif dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap golongan tarif. PLN memerlukan subsidi listrik karena rata-rata harga penjualan tenaga listrik masih berada dibawah rata-rata biaya pokok penyediaan listrik.

## ELECTRICITY SUBSIDY

The electricity subsidy is calculated by the negative difference between average selling prices of electricity (Rp/kWh) of each tariff group and the electricity Cost of Supply (Rp/kWh) based on each voltage rating tariff group, multiplied by the volume of sales (kWh) for each tariff group. PLN still needs subsidies because the average sales of electricity is still below the average cost of supply.

### Tarif Tenaga Listrik dan Besaran Subsidi per Golongan Tarif (Rp/kWh)

### Electricity Tariff and Subsidy Rate per Tariff Class (Rp/kWh)

Golongan Tarif Tariff Group	Harga Jual Selling Price (Rp/kWh)	BPP + 7% (Rp/kWh)	Subsidi Subsidy (Rp/kWh)
S.2 / 450 VA	322.3	1,446.4	(1,124.1)
S.2 / 900 VA	437.6	1,446.4	(1,008.8)
S.2 / 1.300 VA	719.7	1,446.4	(726.7)
S.2 / 2.200 VA	770.4	1,446.4	(676.1)
S.2 / > 3.500 s/d 200 kVA	923.6	1,446.4	(522.9)
S.3 > 200 kVA	921.3	1,244.2	(322.9)
R.1 / s/d 450 VA	416.7	1,446.4	(1,029.7)
R.1 / 900 VA	1,069.5	1,446.4	(376.9)
B.1 / s/d 450 VA	507.4	1,446.4	(939.0)
B.1 / 900 VA	608.0	1,446.4	(838.4)
B.1 / 1.300 VA	984.5	1,446.4	(461.9)
B.1 / 2.200 s/d 5.500 VA	1,129.0	1,446.4	(317.4)

Uraian Kinerja Operasional Perusahaan  
Company's Operational Performance

Golongan Tarif Tariff Group	Harga Jual Selling Price (Rp/kWh)	BPP + 7% (Rp/kWh)	Subsidi Subsidy (Rp/kWh)
I.1 / 450 VA	459.8	1,446.4	(986.6)
I.1 / 900 VA	573.7	1,446.4	(872.7)
I.1 / 1.300 VA	942.9	1,446.4	(503.5)
I.1 / 2.200 VA	977.0	1,446.4	(469.4)
I.1 / 3.500 s/d 14 kVA	1,183.2	1,446.4	(263.2)
I.2 / > 14 kVA s/d 200 kVA	1,126.0	1,446.4	(320.4)
P.1 / s/d 450 VA	649.5	1,446.4	(796.9)
P.1 / 900 VA	723.2	1,446.4	(723.3)
P.1 / 1.300 VA	1,083.1	1,446.4	(363.3)
P.1 / 2.200 s/d 5.500 VA	1,110.2	1,446.4	(336.2)
T / > 200 kVA	745.5	1,244.2	(498.8)
C / > 200 kVA	853.7	1,244.2	(390.5)

Pada tahun 2017, PLN ditetapkan untuk dapat memperoleh subsidi sebesar Rp45,74 triliun, menurun 26,90% dari Rp58,04 triliun pada tahun 2016.

In 2017, PLN obtained subsidies amounting to Rp45.74 trillion, which decreased by 26.90% from Rp58.04 trillion in 2016.

## Tren Subsidi Listrik

## Electricity Subsidy Trends

Keterangan	2015	2016	2017	Description
Subsidi Pemerintah (Dlm Rp Miliar)	56.553	58.043	45.738	Government Subsidy (In Rp Billion)

## SUSUT JARINGAN

Realisasi susut jaringan mengalami penurunan dari 9,48% di tahun 2016 menjadi 8,75% di tahun 2017, yang terdiri dari susut transmisi sebesar 2,39% dan susut distribusi sebesar 6,53%. Realisasi susut jaringan yang lebih baik dibanding tahun lalu adalah hasil keberhasilan dari upaya Perusahaan dalam penyelesaian proyek transmisi dan gardu induk, perbaikan jaringan distribusi, pengimplementasian *regional balance*, pengoptimalan pembebanan trafo, penggantian kWh meter tua dan rusak, mengefektifkan Program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), penertiban Penerangan Jalan Umum (PJU) ilegal, dan lainnya.

## NETWORK LOSSES

Realization of network losses decreased from 9.48% in 2016 to 8.75% in 2017, consisting of 2.39% transmission losses and 6.53% distribution losses. The realization of better network losses compared to last year is the result of the Company's success in finishing the transmission and substation projects, the distribution network refinement, regional balance implementation, transformer load optimization, the replacement of old and damaged kWh meters, the effectiveness of the Electricity Usage Control (P2TL), Street Lighting (PJU) Control, etc.

## Susut Jaringan

## Network Losses

Jenis Susut	2015	2016	2017	Type of Losses
Susut Distribusi	7,64%	7,37%	6,53%	Distribution Losses
Susut Transmisi	2,33%	2,29%	2,39%	Transmission Losses
Susut Jaringan	9,77%	9,48%	8,75%	Network Losses

## Uraian Kinerja Operasional Perusahaan

### Company's Operational Performance

Sementara itu, realisasi susut jaringan menurut wilayah regional menunjukkan hasil bervariasi, dengan kecenderungan menurun setiap tahunnya.

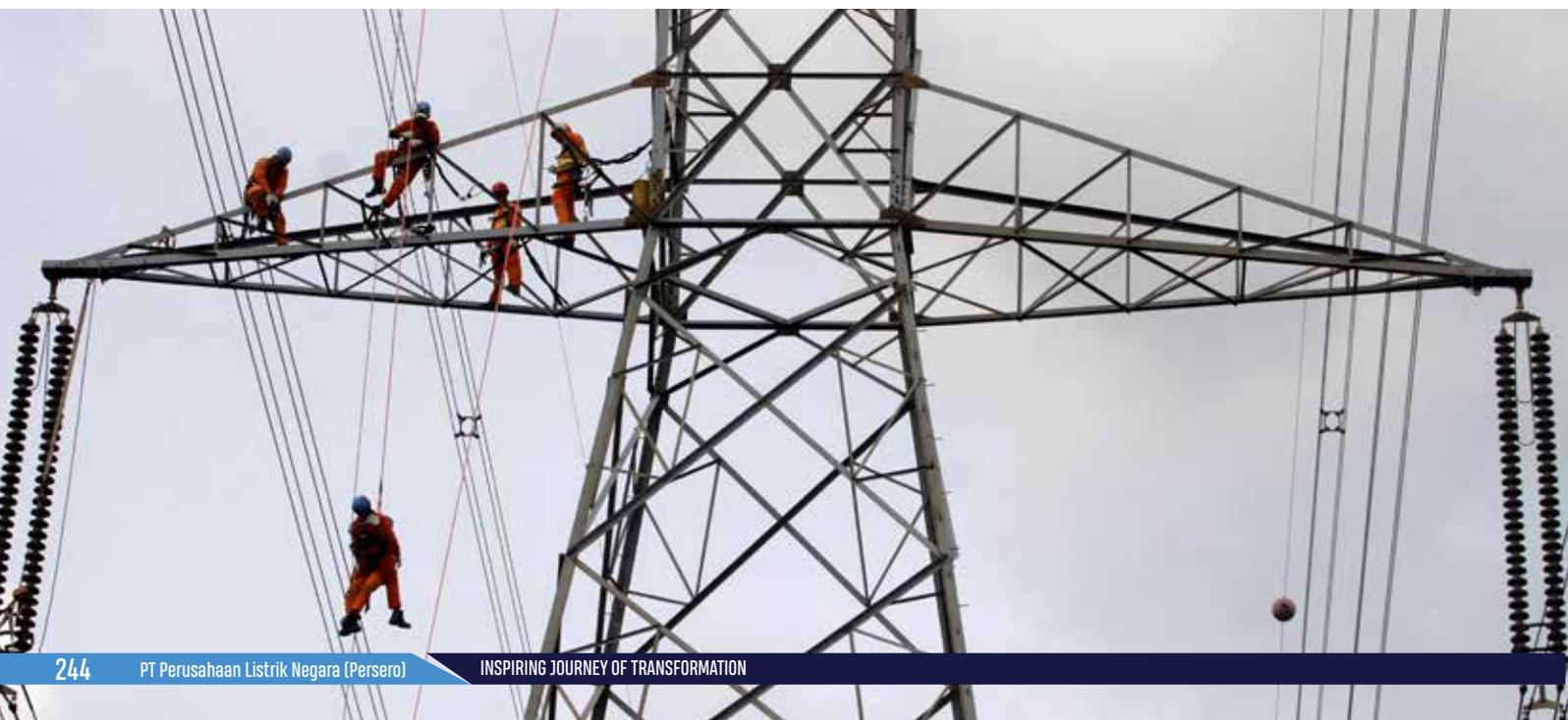
Meanwhile, the realization of network losses by region shows various results, with a declining trend every year.

### Susut Jaringan per Wilayah Regional

### Network Losses per Region

Keterangan	2015	2016	2017	Description
<b>Susut Transmisi - Konsolidasi</b>	<b>2,33%</b>	<b>2,29%</b>	<b>2,39%</b>	<b>Transmission Losses - Consolidated</b>
Sumatera	2,46%	2,72%	3,02%	Sumatra
Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Timur & Bali	2,44%	2,36%	2,47%	West Java, Central Java, East Java & Bali
Kalimantan		1,01%	2,24%	Kalimantan
Sulawesi & Nusa Tenggara	1,30%	1,44%	2,15%	Sulawesi & Nusa Tenggara
Maluku & Papua		1,36%	2,28%	Maluku & Papua
<b>Susut Distribusi - Konsolidasi</b>	<b>7,64%</b>	<b>7,37%</b>	<b>6,53%</b>	<b>Distribution Losses - Consolidated</b>
Sumatera	11,88%	11,11%	9,91%	Sumatra
Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Timur & Bali	6,28%	6,02%	5,42%	West Java, Central Java, East Java & Bali
Kalimantan		10,02%	9,03%	Kalimantan
Sulawesi & Nusa Tenggara	10,61%	11,32%	8,73%	Sulawesi & Nusa Tenggara
Maluku & Papua		12,38%	10,50%	Maluku & Papua
<b>Susut Jaringan - Konsolidasi</b>	<b>9,77%</b>	<b>9,48%</b>	<b>8,75%</b>	<b>Network Losses - Consolidated</b>
Sumatera	8,55%	13,52%	12,47%	Sumatra
Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Timur & Bali	14,04%	8,23%	7,83%	West Java, Central Java, East Java & Bali
Kalimantan		10,92%	10,36%	Kalimantan
Sulawesi & Nusa Tenggara	11,76%	12,59%	10,16%	Sulawesi & Nusa Tenggara
Maluku & Papua		12,38%	10,71%	Maluku & Papua

\* Pada tahun 2015, Wilayah Regional Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua tergabung dalam Regional Indonesia Timur | In 2015, Kalimantan, Sulawesi and Nusa Tenggara, Maluku and Papua are incorporated in the Region of East Indonesia.



## Uraian Kinerja Operasional Perusahaan Company's Operational Performance

### TINGKAT KEANDALAN LAYANAN

Tingkat keandalan pelayanan diukur dengan menggunakan indeks lama gangguan (*System Average Interruption Duration Index/SAIDI*) yang dihitung lamanya pelanggan mengalami gangguan dalam satuan menit per pelanggan per tahun. Sedangkan indeks frekuensi gangguan (*System Average Interruption Frequency/SAIFI*) menghitung banyaknya jumlah gangguan per pelanggan per tahun.

Pada tahun 2017, indeks SAIDI adalah sebesar 1.159,82 jam/pelanggan/tahun menurun 24,29% dari 1.532 jam/pelanggan/tahun. Sedangkan SAIFI adalah sebesar 12,65 kali/pelanggan/tahun menurun 16,17% dari 15,09 kali/pelanggan/tahun.

Untuk Indeks SAIDI Wilayah Regional, peningkatan terjadi di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Maluku & Papua. Sementara untuk indeks SAIFI, peningkatan terjadi di Wilayah Regional Sumatera, Kalimantan, Maluku & Papua dan Jawa Bagian Barat. Penyebabnya adalah meningkatnya pembangkit dan instalasi transmisi dan distribusi baru di sistem kelistrikan di wilayah tersebut.

### SERVICE RELIABILITY LEVEL

The service reliability level is measured by using System Average Interruption Duration Index (SAIDI) which calculates how long the customer experiences a minute turnover per customer per year. System Average Interruption Frequency (SAIFI) calculates the number of disturbances per customer per year.

In 2017, the SAIDI is 1,159.82 hours/customer/year, decreased by 24.29% from 1,532 hours/customer/year. SAIFI is 12.65 times/customer/year, decreased by 16.17% from 15.09 times/customer/year.

Regional SAIDI Index increased in Sumatera, Kalimantan, and Maluku & Papua. SAIFI index increased in the Sumatera, Kalimantan, Maluku & Papua, and West Java. The reason for the increase is the increase of new transmission and distribution plants and installations in the electrical systems in the region.

#### SAIDI – SAIFI per Wilayah Regional

#### SAIDI – SAIFI per Region

Wilayah	2016	2017	Perubahan Growth 2017	Regions
<b>SAIDI (Menit / Pelanggan)</b>				<b>SAIDI (Minutes / Customer)</b>
Sumatera	1.607,55	1.989,50	+23,76%	Sumatra
Jawa Bagian Barat	426,07	393,27	-7,70%	West Java
Jawa Bagian Tengah	1.593,25	844,56	-46,99%	Central Java
Jawa Bagian Timur dan Bali	1.605,43	539,82	-66,38%	East Java & Bali
Kalimantan	2.027,78	2.303,71	+13,61%	Kalimantan
Sulawesi & Nusa Tenggara	2.129,88	1.905,02	-10,56%	Sulawesi & Nusa Tenggara
Maluku & Papua	704,25	2.169,29	+208,03%	Maluku & Papua
<b>Konsolidasi</b>	<b>1.532,00</b>	<b>1.159,82</b>	<b>-24,29%</b>	<b>Consolidated</b>
<b>SAIFI (Kali / Pelanggan)</b>				<b>SAIFI (Times / Customer)</b>
Sumatera	13,30	17,87	+34,34%	Sumatra
Jawa Bagian Barat	4,81	5,19	+7,90%	West Java
Jawa Bagian Tengah	15,51	9,74	-37,19%	Central Java
Jawa Bagian Timur dan Bali	12,73	5,50	-56,76%	East Java & Bali
Kalimantan	20,35	28,18	+38,46%	Kalimantan
Sulawesi & Nusa Tenggara	32,01	23,67	-26,06%	Sulawesi & Nusa Tenggara
Maluku & Papua	12,13	30,52	+151,57%	Maluku & Papua
<b>Konsolidasi</b>	<b>15,09</b>	<b>12,65</b>	<b>-16,17%</b>	<b>Consolidated</b>

## Uraian Kinerja Operasional Perusahaan

Company's Operational Performance

### Peningkatan Mutu Layanan dan Keandalan

Upaya berkesinambungan yang dilakukan PLN agar terus dapat meningkatkan mutu layanan keandalan sistem ketenagalistrikan kepada pelanggan adalah:

- Melengkapi manajemen dengan *tools* pemantauan gangguan penyulang guna mendorong kinerja penyulang yang lebih baik
- Meningkatkan peralatan proteksi, melakukan pembenahan pemeliharaan dan pengaturan alat proteksi agar di masa depan tidak terjadi lagi malfungsi
- Melakukan pembersihan *Right of Way* (ROW) secara efektif dengan memanfaatkan informasi peta pohon
- Melakukan pengawasan yang ketat terhadap kinerja trafo distribusi yang meliputi: pemeliharaan, penyeimbangan beban, pengurangan jumlah trafo yang berbeban lebih (*overblast*), trafo sisipan maupun relokasi, sekaligus mengurangi resiko kerusakan trafo.

### Improved Service Quality and Reliability

PLN continuously strives to improve the service quality of electricity system reliability to customers, by:

- Providing management with feeder disruption monitoring tools to support better feeder performance.
- Increasing protection tools and revamping maintenance and protection tools to avoid malfunctions in the future.
- Conducting more effective Right of Way (ROW) cleaning using tree map information.
- Monitoring distribution transformer performance tightly, which covers: maintenance, load balancing, reducing numbers of overblast transformers, inserting or relocating transformers, and reducing transformer breakage risk.

## PENJUALAN TENAGA LISTRIK

Penjualan tenaga listrik di tahun 2017 tumbuh 3,3% lebih lambat dibanding pertumbuhan tahun 2016 yang mencapai 6,49%. Pada tahun 2017, volume total penjualan listrik nasional adalah 223.134 GWh meningkat 7.130 GWh dari 216.004 GWh di tahun 2016.

## ELECTRICITY SALES

Electricity sales in 2017 grew 3.3% slower than the 2016 growth which reached 6.49%. In 2017, the total volume of national electricity sales is 223,134 GWh, increased by 7,130 GWh from 216,004 GWh in 2016.

### Penjualan Tenaga Listrik (GWh) per Kelompok Pelanggan

Kelompok Pelanggan	2015	2016	2017	Customer Group
Rumah Tangga	88.682	93.635	94.457	Households
Bisnis	36.978	40.074	41.695	Business
Industri	64.079	68.145	72.238	Industrial
Lainnya	13.106	14.150	14.743	Others
<b>Jumlah</b>	<b>202.846</b>	<b>216.004</b>	<b>223.134</b>	<b>Total</b>

### Electricity Sales (GWh) by Customer Groups

## Uraian Kinerja Operasional Perusahaan

### Company's Operational Performance

Berdasarkan segmen Wilayah Regional, kontribusi penjualan terbesar berasal dari wilayah regional Jawa Bagian Tengah, yakni sebesar 32,51% dari penjualan tenaga listrik tahun 2017, diikuti oleh regional Jawa Bagian Barat 23,90% dan Jawa Bagian Timur & Bali 17,56%. Jika ketiga regional Jawa tersebut digabungkan, maka total kontribusi penjualannya adalah 73,97% dari keseluruhan penjualan listrik di Indonesia.

Based on the Regional segment, the largest sales contribution came from the Central Java, which amounted to 32.51% of electricity sales in 2017, followed by West Java by 23.90% and East Java & Bali by 17.56%. If those three Java regions are combined, the total sales contribution is 73.97% of the total electricity sales in Indonesia.

#### Penjualan Listrik (GWh) per Wilayah Regional

Area Geografis	Electricity Sales (GWh) per Region			Geographics Areas
	2015	2016	2017	
Sumatera	31.206	33.306	34.627	Sumatra
Jawa Bagian Barat		51.662	53.325	West Java
Jawa Bagian Tengah	150.898	70.516	72.552	Central Java
Jawa Bagian Timur & Bali		38.026	39.184	East Java & Bali
Kalimantan		9.000	9.197	Kalimantan
Sulawesi & Nusa Tenggara	20.742	11.336	11.943	Sulawesi & Nusa Tenggara
Maluku & Papua		2.157	2.306	Maluku & Papua
<b>Jumlah</b>	<b>202.846</b>	<b>216.004</b>	<b>223.134</b>	<b>Total</b>

\* Pada tahun 2015, Wilayah Regional Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua tergabung dalam Regional Indonesia Timur | In 2015, Kalimantan, Sulawesi and Nusa Tenggara, Maluku and Papua are incorporated in the Region of East Indonesia.

## JUMLAH PELANGGAN

Penambahan pelanggan tahun 2017 mencapai 3,79 juta pelanggan atau naik 21,55% dibanding penambahan pelanggan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,11 juta pelanggan baru. Pada tahun 2017, penambahan pelanggan terbesar terjadi pada kelompok pelanggan rumah tangga, yang mencapai sebesar 3,30 juta pelanggan.

## NUMBER OF CUSTOMERS

There are 3.79 million new customers in 2017 or increased by 21.55%, compared to the previous year customers of 3.11 million. In 2017, the largest customer additions is the household customer group, which reached 3.30 million subscribers.

#### Penambahan Pelanggan per Kelompok Pelanggan

Kelompok Pelanggan	New Customers by Customer Group			Customer Group
	2015	2016	2017	
Rumah Tangga	3.295.935	2.638.412	3.299.762	Households
Bisnis	268.830	344.774	339.600	Business
Industri	4.964	6.315	7.187	Industrial
Lainnya	105.017	125.012	139.241	Others
<b>Jumlah</b>	<b>3.674.746</b>	<b>3.114.513</b>	<b>3.785.790</b>	<b>Total</b>

## Uraian Kinerja Operasional Perusahaan

### Company's Operational Performance

Menurut Wilayah Regional, persentase pertumbuhan pelanggan tertinggi justru dicatatkan oleh Regional Sulawesi & Nusa Tenggara, sebesar 42,15% , diikuti oleh regional Maluku & Papua, sebesar 30,49% dan regional Jawa Bagian Barat, sebesar 30,14%.

Based on the Region, the customer growth is recorded highest at Sulawesi & Nusa Tenggara of 42.15%, followed by Maluku & Papua of 30.49%, and West Java of 30.14%.

### Jumlah Penambahan Pelanggan per Wilayah Regional

### New Customers by Region

Area Geografis	2015	2016	2017	Geographics Areas
Sumatera	680.619	687.443	852.759	Sumatra
Jawa Bagian Barat		300.410	390.951	West Java
Jawa Bagian Tengah	2.425.303	1.014.371	1.213.224	Central Java
Jawa Bagian Timur & Bali		524.513	541.427	East Java & Bali
Kalimantan		202.176	246.271	Kalimantan
Sulawesi & Nusa Tenggara	568.824	325.419	462.594	Sulawesi & Nusa Tenggara
Maluku & Papua		60.181	78.528	Maluku & Papua
<b>Jumlah</b>	<b>3.674.746</b>	<b>3.114.513</b>	<b>3.785.790</b>	<b>Total</b>

\* Pada tahun 2015, Wilayah Regional Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua tergabung dalam Regional Indonesia Timur | In 2015, Kalimantan, Sulawesi and Nusa Tenggara, Maluku and Papua are incorporated in the Region of East Indonesia.

Sementara berdasarkan jumlah penambahan pelanggan dan regional, maka Wilayah Regional Jawa Bagian Tengah mencatatkan penambahan terbesar, yakni 1.213.224 pelanggan baru, diikuti regional Sumatera, yakni 852.795 pelanggan baru dan Jawa Bagian Timur & Bali, yakni 541.427 pelanggan baru.

Meanwhile, based on the new customers addition and region, the Central Java recorded the biggest addition, i.e. 1,213,224 new customers, followed by Sumatra with 852,795 new customers, and East Java & Bali with 541,427 new customers.

Pertambahan pelanggan yang cukup besar di Sumatera, serta persentase pertumbuhan pelanggan yang cukup signifikan di wilayah Sulawesi & Nusa Tenggara, serta Maluku & Papua mengindikasikan semakin membaiknya kondisi perekonomian di wilayah tersebut, juga mengindikasikan pemerataan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan telah menunjukkan hasil positif.

The substantial number of customers addition in Sumatra, the significant percentage growth of new customers in Sulawesi & Nusa Tenggara, and Maluku & Papua indicate the improving economic conditions in the regions, and equity in electricity infrastructure development, which have shown positive results.

Pertumbuhan jumlah pelanggan di tahun 2017 tersebut membuat rasio elektrifikasi secara nasional menjadi sebesar 95,40% (termasuk pelanggan non PLN) dari angka tahun sebelumnya sebesar 91,20%.

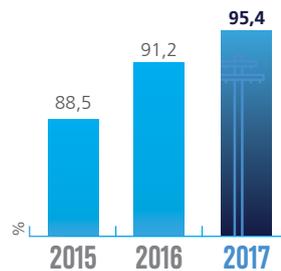
The growth of the number of customers in 2017 caused the national electrification ratio to be at 95.40% (including non-PLN customers) from the previous year's figure of 91.20%.



## Uraian Kinerja Operasional Perusahaan Company's Operational Performance

### Perkembangan Rasio Elektrifikasi Nasional 2015 – 2017 (termasuk Pelanggan Non-PLN)

National Electrification Ratio Development 2013 – 2017 (Including Non-PLN Customers)



Penambahan jumlah pelanggan di tahun 2017 tersebut membuat total jumlah pelanggan PLN terus meningkat menjadi 68,07 juta pelanggan naik 5,89% total 64,28 juta pelanggan di tahun sebelumnya.

Berdasarkan segmen pelanggan, kelompok pelanggan rumah tangga memiliki persentase terbesar, yaitu 91,88%, diikuti dengan kelompok pelanggan bisnis 5,26%, kelompok pelanggan lainnya 2,75%, dan kelompok pelanggan industri sebesar 0,11%.

The increase in the number of customers in 2017 caused the total number of PLN subscribers to increase to 68.07 million subscribers, an increase of 5.89% from the 64.28 million customers in the previous year.

Based on the customer segment, the household customer group has the largest percentage, i.e. 91.88%, followed by the business customer group of 5.26%, the other customers with 2.75%, and the industrial customers with the rest of 0.11%.

#### Jumlah Pelanggan Per Kelompok Pelanggan

#### Number of Customers by Customer Groups

Kelompok Pelanggan	2015	2016	2017	Customer Group
Rumah Tangga	56.605.260	59.243.672	62.543.434	Households
Bisnis	2.894.990	3.239.764	3.579.364	Business
Industri	63.314	69.692	76.816	Industrial
Lainnya	1.604.416	1.729.428	1.868.669	Others
<b>Jumlah</b>	<b>61.167.980</b>	<b>64.282.493</b>	<b>68.068.283</b>	<b>Total</b>

## Uraian Kinerja Operasional Perusahaan

### Company's Operational Performance

Berdasarkan segmen regional, jumlah pelanggan di Wilayah Regional Jawa-Bali tetap mendominasi, dengan total jumlah pelanggan 43,45 juta dan kontribusi sebesar 63,84%. Jika pelanggan Jawa & Bali ini dirinci lebih jauh, maka jumlah pelanggan di regional Jawa Bagian Tengah adalah 23,99 juta (35,25% pelanggan nasional), Jawa Bagian Timur & Bali adalah 12,32 juta (18,10% pelanggan nasional) dan Jawa Bagian Barat adalah 7,14 juta (10,49% pelanggan nasional). Selanjutnya jumlah pelanggan yang cukup besar lainnya berada di wilayah regional Sumatera, yakni 13,67 juta (20,08% nasional) dan regional Sulawesi & Nusa Tenggara, sebesar 6,09 juta (8,94% nasional) seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Based on the regional segment, the number of customers in the Java-Bali continued to dominate, with the total 43.45 million customers and contribution of 63.84%. If Java & Bali customers are further detailed, the number of customers in the Central Java region is 23.99 million (35.25% of national customers), East Java & Bali is 12.32 million (18.10% of national customers), and West Java is 7.14 million (10.49% of national customers). Another substantial number of customers is in Sumatera, i.e. 13.67 million (20.08% of national customers), and Sulawesi & Nusa Tenggara with 6.09 million (8.94% of national customers) as shown in the following table.

### Jumlah Pelanggan per Wilayah Regional

### Customers by Region

Area Geografis	2015	2016	2017	Geographics Areas
Sumatera	12.129.363	12.816.806	13.669.601	Sumatra
Jawa Bagian Barat		6.746.995	7.137.946	West Java
Jawa Bagian Tengah	39.469.948	22.782.047	23.995.271	Central Java
Jawa Bagian Timur & Bali		11.780.200	12.321.627	East Java & Bali
Kalimantan		3.493.498	3.739.769	Kalimantan
Sulawesi & Nusa Tenggara	9.568.669	5.623.061	6.085.655	Sulawesi & Nusa Tenggara
Maluku & Papua		1.039.886	1.118.414	Maluku & Papua
<b>Jumlah</b>	<b>61.167.980</b>	<b>64.282.493</b>	<b>68.068.283</b>	<b>Total</b>

\* Pada tahun 2015, Wilayah Regional Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua tergabung dalam Regional Indonesia Timur | In 2015, Kalimantan, Sulawesi and Nusa Tenggara, Maluku and Papua are incorporated in the Region of East Indonesia.

### Daya Tersambung

Selaras dengan laju pertumbuhan jumlah pelanggan, daya tersambung di tahun 2017 bertambah sebesar 7.670 MVA, turun 1,24% dibanding laju penambahan tahun sebelumnya sebesar 7.767 MVA. Penyebab utama penurunan laju pertumbuhan daya tersambung adalah konstruksi terkendala pembebasan lahan, terkendala kapasitas pembangkit / gardu induk, dan terkendala ketersediaan material sambungan.

Pertumbuhan penambahan daya tersambung hanya terjadi pada kelompok pelanggan rumah tangga dan pelanggan lainnya, sebagai dampak positif pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berlangsung di seluruh wilayah Indonesia. Juga sebagai dampak positif dari pembangunan infrastruktur pendukung transportasi.

### Connected Power

In line with the increasing number of customers, the connected power in 2017 increased by 7,670 MVA, decreased by 1.24% compared to the previous year's increase, which was 7,767 MVA. The main cause of the decline in the growth rate of connected power are the constrained construction of land acquisition, constrained generating capacity/substations, and constrained availability of material connection.

The growth of additional connected power occurs only in household and other customer groups, as a positive impact of electricity infrastructure development throughout Indonesia. This also happens as a positive impact of the development of transport supporting infrastructure.

Uraian Kinerja Operasional Perusahaan  
Company's Operational Performance

## Penambahan Daya Tersambung per Kelompok Pelanggan (MVA)

## Addition of Connected Power per Customer Group (MVA)

Kelompok Pelanggan	2015	2016	2017	Customer Group
Rumah Tangga	3.280	3.631	3.973	Households
Bisnis	1.254	1.885	1.835	Business
Industri	1.482	1.546	1.015	Industrial
Lainnya	536	705	847	Others
<b>Jumlah</b>	<b>6.552</b>	<b>7.767</b>	<b>7.670</b>	<b>Total</b>

Pembangunan infrastruktur yang lebih merata tersebut, membuat seluruh wilayah regional yang selama ini relatif tertinggal, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi & Nusa Tenggara serta Maluku & Papua tumbuh lebih tinggi dibandingkan wilayah regional Jawa Bali.

The development of more evenly distributed infrastructures has resulted in high growth of all regions that have been relatively lagging behind, such as Sumatera, Kalimantan, Sulawesi & Nusa Tenggara, and Maluku & Papua. These regions have higher growth compared to Java-Bali.

## Penambahan Daya Tersambung per Wilayah Regional (MVA)

## Addition of Connected Power per Region (MVA)

Area Geografis	2015	2016	2017	Geographics Areas
Sumatera	1.128	1.534	1.599	Sumatra
Jawa Bagian Barat		1.615	1.281	West Java
Jawa Bagian Tengah	4.483	2.150	2.199	Central Java
Jawa Bagian Timur & Bali		1.258	1.130	East Java & Bali
Kalimantan		436	462	Kalimantan
Sulawesi & Nusa Tenggara	941	644	835	Sulawesi & Nusa Tenggara
Maluku & Papua		130	164	Maluku & Papua
<b>Jumlah</b>	<b>6.552</b>	<b>7.767</b>	<b>7.670</b>	<b>Total</b>

\* Pada tahun 2015, Wilayah Regional Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua tergabung dalam Regional Indonesia Timur | In 2015, Kalimantan, Sulawesi and Nusa Tenggara, Maluku and Papua are incorporated in the Region of East Indonesia.

Penambahan daya tersambung tersebut membuat total daya tersambung hingga akhir 2017 mencapai 122.017,6 MVA, naik 6,7% dari tahun sebelumnya 114.347,6, seperti terlihat pada tabel berikut.

Due to the addition of connected power, at the end of 2017, the total connected power reached 122,017.6 MVA, increased by 6.7% compared to the previous year which was 114,347.6, as shown in the following table.

## Daya Tersambung per Kelompok Pelanggan (MVA)

## Connected Power by Customer Group (MVA)

Kelompok Pelanggan	2015	2016	2017	Customer Group
Rumah Tangga	51.655	55.285	59.257	Households
Bisnis	22.477	24.362	26.198	Business
Industri	25.024	26.570	27.585	Industrial
Lainnya	7.426	8.131	8.978	Others
<b>Jumlah</b>	<b>106.583</b>	<b>114.348</b>	<b>122.018</b>	<b>Total</b>

## Uraian Kinerja Operasional Perusahaan

### Company's Operational Performance

Secara geografis, daya tersambung untuk wilayah regional Jawa Bagian Tengah mendominasi hingga sekitar 30,6% dari total daya tersambung nasional, disusul oleh daya tersambung di wilayah regional Jawa Bagian Barat sebesar 22,6%, Jawa Bagian Timur & Bali sebesar 17,8% dan Sumatera sebesar 16,7% seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Geographically, the connected power for the Central Java dominates up to 30.6% of the total national connected power, followed by the connected power in the West Java of 22.6%, East Java & Bali of 17.8%, and Sumatera at 16.7%, as shown in the following table.

#### Daya Tersambung per Wilayah Regional (MVA)

#### Connected Power by Region (MVA)

Area Geografis	2015	2016	2017	Geographics Areas
Sumatera	17.241	18.775	20.373	Sumatera
Jawa Bagian Barat		26.344	27.625	West Java
Jawa Bagian Tengah	76.958	35.094	37.293	Central Java
Jawa Bagian Timur & Bali		20.541	21.671	East Java & Bali
Kalimantan		4.901	5.363	Kalimantan
Sulawesi & Nusa Tenggara	12.384	7.235	8.070	Sulawesi & Nusa Tenggara
Maluku & Papua		1.459	1.623	Maluku & Papua
<b>Jumlah</b>	<b>106.583</b>	<b>114.348</b>	<b>122.018</b>	<b>Total</b>

\* Pada tahun 2015, Wilayah Regional Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua tergabung dalam Regional Indonesia Timur | In 2015, Kalimantan, Sulawesi and Nusa Tenggara, Maluku and Papua are incorporated in the Region of East Indonesia.

#### Pendapatan Penjualan Tenaga Listrik

Pendapatan penjualan tenaga listrik pada tahun 2017 mencapai angka sebesar Rp246,59 triliun, naik 15,2% dari tahun sebelumnya, sebesar Rp214,14 triliun.

#### Electricity Sales Revenue

In 2017, the electricity sales revenue reached Rp246.59 trillion, increased by 15.2% from the previous year which was Rp214.14 trillion.

Kenaikan tarif listrik pada tahun 2017 membuat harga jual rata-rata penjualan tenaga listrik menjadi sebesar Rp1.105/kWh atau 10,72% di atas harga rata-rata tahun 2016 sebesar Rp998/kWh.

The increase in electricity tariffs in 2017 stimulates the average selling price of electricity to be at Rp1,105/kWh, or 10.72% above the 2016 average price of Rp998/kWh.

#### Pendapatan Penjualan Tenaga Listrik

#### Electricity Sales Revenue

Keterangan	2015	2016	2017	Description
Pendapatan Penjualan Listrik (Rp miliar)	209.845	214.140	246.587	Sale of Electricity Revenue (Rp billion)
Harga Jual Rata-rata (Rp/kWh)	1.041	998	1.105	Average Selling Price (Rp/kWh)

# URAIAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

## Company's Financial Performance



### URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

Uraian Analisis dan Pembahasan Manajemen mengenai kinerja keuangan berikut disusun berdasarkan data-data keuangan dari Laporan Keuangan Konsolidasian PT PLN (Persero) untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2017. Laporan Keuangan tersebut disajikan sesuai dengan kaidah yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Indonesia. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar dan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

### DESCRIPTION OF COMPANY'S FINANCIAL PERFORMANCE

Management Discussion and Analysis description of the financial performance is prepared based on the financial data from the Consolidated Financial Statements of PT PLN (Persero) for the years ended December 31, 2016, and 2017. These Financial Statements are presented in accordance with the principles set forth in Indonesian Statements Financial Accounting Standards (SFAS). All information in the consolidated financial statements is published in complete and accurate manner and does not contain inaccurate material information or facts, and does not omit material information or facts.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

### Company's Financial Performance

Laporan keuangan konsolidasian Laporan Keuangan Konsolidasian PT PLN (Persero) untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2017 yang menjadi dasar pembahasan, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner (Member of RSM International). Laporan Keuangan tersebut memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT PLN (Persero) dan Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 2016 dan 2017, kinerja keuangan, serta arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Posisi keuangan berdasarkan mata uang asing telah disajikan dalam jumlah yang setara Rupiah dengan kurs yaitu Rp13.548/USD dan Rp13.436/USD pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

The Consolidated Financial Statements of PT PLN (Persero) for years ending on December 31, 2016, and 2017, are the basis for discussion, and have been audited by Public Accountant Office Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner (Member of RSM International). The Financial Statement received unqualified opinion on all material matters, consolidated financial position of PT PLN (Persero) and Subsidiaries as of December 31, 2016, and 2017, financial performance, and consolidated cash flows for the year then ended on those dates, in accordance with the Indonesian Standard Financial Accounting.

The financial position based on foreign currencies has been presented in equal value in Rupiah with exchange rate of Rp13,548/USD and Rp13,436/USD per 31 December 2017 and 2016, respectively.

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN

### Implementasi Program Penyesuaian Tarif

Sebagian besar pelanggan listrik di Indonesia, terutama dari golongan tarif R1/450-900 VA menikmati listrik dengan tarif subsidi yang cukup besar. Sesuai hasil verifikasi lapangan, sebagian besar pelanggan dari golongan tarif ini sebenarnya tidak termasuk kedalam kelompok pelanggan Rumah tangga miskin dan rentan miskin, yang berhak mendapatkan subsidi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pemerintah, bersama PLN telah mencapai kesepakatan, dengan persetujuan DPR untuk menerapkan program penyesuaian tarif secara bertahap terhadap pelanggan dari golongan tarif ini yang berdasarkan survey Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tidak termasuk kategori miskin dan rentan miskin, sehingga mencapai tarif keekonomian.

## FACTORS THAT INFLUENCE FINANCIAL PERFORMANCE

### Tariff Adjustment Program

Most of the electricity customers in Indonesia, mainly the R1/450-900 VA customer group, enjoy electricity at substantial subsidized rates. As a result of field verification, most of these tariff customers are not actually included in the poor and vulnerable households category, which is the category to be eligible for subsidies, in accordance with the provisions of the law.

The Government, in cooperation with PLN, have reached an agreement, under the approval of DPR, to implement the gradual tariff adjustments for this recipients who are not categorized as poor and vulnerable, based on the Survey of National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K), in order to achieve economic tariff.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

### Company's Financial Performance

- **Kenaikan Biaya Energi Primer**

Energi primer utama pembangkit tenaga listrik di Indonesia adalah BBM, Batubara dan Gas. Guna mengurangi konsumsi BBM yang relatif mahal, Perusahaan dalam beberapa tahun terakhir meningkatkan *energy mix* untuk pembangkit bersumber energi primer batubara dan gas. Meskipun begitu, Harga batubara dan gas dalam satu tahun belakang cenderung meningkat. Peningkatan harga batubara akan memberi dampak substansial terhadap besaran beban usaha, mengingat volume penggunaannya diproyeksikan akan terus meningkat.

Formula penentuan *automatic tariff adjustment*, selama ini juga belum memperhitungkan faktor kenaikan harga batubara dan gas sehingga kenaikan harga energi primer ini akan meningkatkan beban usaha dan menekan tingkat profitabilitas PLN

- **Ketepatan Penyelesaian Pembangunan Pembangkit**

Ketepatan penyelesaian pembangunan pembangkit memiliki pengaruh terhadap kondisi keuangan Perusahaan. Keterlambatan penyelesaian pembangunan pembangkit akan membuat PLN kehilangan *opportunity cost* dari penjualan kWh serta berpotensi meningkatkan biaya bunga, biaya pembangunan pembangkit dan biaya pokok penyediaan jika menyediakan alternatif pembangkit sewa.

- **Ketepatan Penyelesaian Pembangunan Sistem Transmisi dan Distribusi**

Pembangunan pembangkit juga memerlukan infrastruktur kelistrikan yang memadai seperti gardu induk, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi. Keterlambatan atau ketidak sinkronan penyelesaian pembangunan sistem transmisi dan distribusi, baik karena hambatan penyediaan lahan maupun sebab lain, akan mengakibatkan *bottlenecking* evakuasi daya sehingga membuat daya listrik dari pembangkit tidak dapat disalurkan secara optimal.

- **Primary Energy Tariff Increase**

The primary energy for power plants in Indonesia is Fuel, Coal, and Gas. In order to reduce the relatively expensive fuel consumption, the Company has increased energy mix for coal and gas primary energy plants in the recent years. However, in the last year, the coal and gas price tended to increase. Increased coal prices have a substantial impact on the amount of operating expenses, given the projected volume usage that will continue to increase.

The formula to determine automatic tariff adjustment has not yet calculated the factor of price hike of coal and gas. Thus, the increase of primary energy price will increase the operating expense and depress the level of profitability of PLN

- **Accuracy of Completion of Power Plant Construction**

The timely completion of the construction of the power plant influences the Company's financial condition. The delay in the completion of the power plant will result in opportunity cost for PLN from the kWh sales and potentially increase the interest cost, the cost of building the plant, and the cost of supply if there is alternative of the lease plant.

- **Accuracy of Transmission and Distribution System Completion**

Power plant development also requires adequate electricity infrastructure, such as substations, transmission lines, and distribution networks. The delay or lack of synchronization of the completion of transmission and distribution system, either due to constraints on the provision of land or other causes, will result in the bottlenecking of power evacuation, thus the power from the plant cannot be channeled optimally.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan Company's Financial Performance

### • Fluktuasi Nilai Tukar

Pelemahan nilai tukar rupiah di tahun 2017 membuat PLN mencatatkan rugi translasi valas dari portofolio pinjaman dalam mata uang valas (Pinjaman, Obligasi maupun dalam bentuk lainnya). Namun demikian, PLN tetap mencatatkan laba bersih yang substantial sebagai buah keberhasilan implementasi program efisiensi operasional, termasuk di dalamnya pengendalian BPP melalui peningkatan strategi bauran energi dan efisiensi biaya pemeliharaan.

### • Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

Kondisi perekonomian global dan nasional berpengaruh terhadap tekanan daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat yang berimplikasi pada pendapatan penjualan listrik.

### • Exchange Rate Fluctuations

In 2017, the weakening rupiah exchange rate caused PLN to record a foreign currency translation losses from loan portfolio (Loans, Bonds, and other forms). Nevertheless, PLN continues to record substantial net income as a fruit of successful operational efficiency program implementation, including Cost of Supply control through improved energy mix strategy and maintenance cost efficiency.

### • Global and National Economic Condition

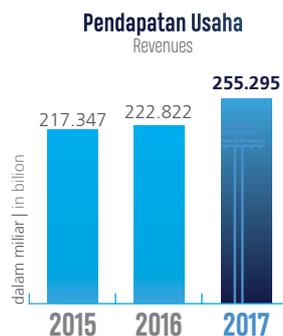
The condition of the global and national economy affects the pressure on purchasing power and the level of public consumption, which influences the electricity sales revenue.

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

### PENDAPATAN USAHA

## CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

### REVENUES



Seperti tahun sebelumnya, pendapatan usaha PLN di tahun 2017 terutama berasal dari penjualan tenaga listrik kepada pelanggan, jasa penyambungan pelanggan dan lain-lain. Total pendapatan usaha PLN di tahun 2017 sebesar Rp255,29 triliun, naik 14,6% dibandingkan tahun 2016 yang sebesar Rp222,82 triliun.

As in previous years, PLN's revenues in 2017 derives mainly from sales of electricity to customers, customer installation services, etc. Total PLN's revenues in 2017 amounted to Rp255.29 trillion, a decline of 14.6% compared to the 2016 figure of Rp222.82 trillion.

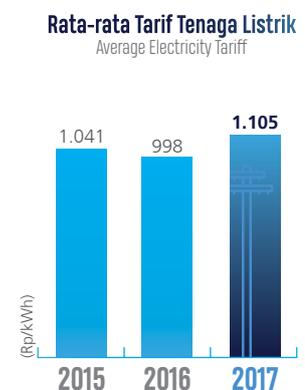
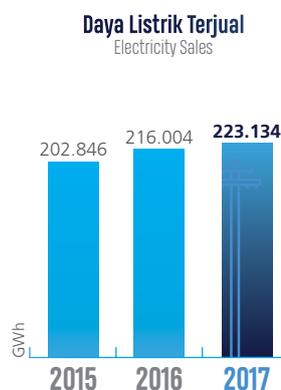
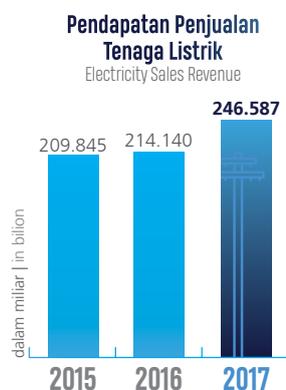
## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan Company's Financial Performance

### Pendapatan Penjualan Listrik

Pendapatan penjualan tenaga listrik di tahun 2017 naik 15,2% menjadi Rp246,59 triliun dari tahun 2015 yang sebesar Rp214,14 triliun.

### Electricity Sales Revenue

Electricity sales revenues in 2017 increased by 15.2% to Rp246.59 trillion, from 2016 figure of Rp214.14 trillion.



Realisasi daya listrik terjual sangat dipengaruhi oleh dua parameter, yakni penambahan jumlah pelanggan dan volume penggunaan tiap pelanggan/kelompok pelanggan. Jumlah pelanggan pada tahun 2017 naik 5,89%, atau 3,79 juta pelanggan, sehingga total daya listrik terjual ikut meningkat.

The realization of electricity sales is heavily influenced by two parameters, i.e. the addition of the new customers and the volume of use of each customer/customer group. The number of customers in 2017 increased by 5.89%, or 3.79 million subscribers, bringing the total electricity sales to increase.

Kontribusi kenaikan pendapatan penjualan listrik adalah sebesar 15,15% yang masih didominasi oleh kenaikan penjualan listrik kelompok pelanggan umum sebesar 15,26%. Pendapatan penjualan kepada kelompok BUMN juga naik sebesar 7,1%. Kelompok pelanggan lain juga mencatatkan pertumbuhan penjualan, dimana Lembaga Pemerintah dan Kementerian naik 5,9% serta kelompok TNI & Polri naik 9,3%.

The contribution of electricity sales revenues increase of 15.15% is still dominated by the public electricity sales group of 15.25%. Sales revenue to SOEs group also increased by 7.1%. Other customer groups also recorded sales growth, with 5.9% for Government Institutions and Ministries, and 9.3% for Indonesian Army and Police.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

### Company's Financial Performance

#### Pendapatan Biaya Penyambungan

Pendapatan biaya penyambungan pelanggan naik 0,9% menjadi sebesar Rp7,11 triliun dari Rp7,05 triliun di tahun 2016 karena bertambahnya jumlah pelanggan, meningkatnya daya listrik untuk pelanggan dan naiknya TTL. Penambahan 3,79 juta pelanggan baru di tahun 2017 membuat total pelanggan PLN berkembang menjadi 68,07 juta pelanggan. Daya tersambung juga naik 6,71% dari 114.348 MVA di tahun 2016, bertambah sebesar 7.670 MVA menjadi sebesar 122.018 MVA.

#### Pendapatan Usaha Lain-lain

Pendapatan lain-lain turun 2,2% menjadi sebesar Rp1,59 triliun dari Rp1,63 triliun di tahun 2016. Pada tahun 2017, permintaan jasa jaringan, jasa telekomunikasi dan sewa transformator meningkat. Namun demikian, permintaan jasa-jasa lainnya dan perubahan daya tersambung dan administrasi menurun signifikan, sehingga secara keseluruhan pendapatan lain-lain PLN mengalami penurunan.

#### Connection Fees Revenues

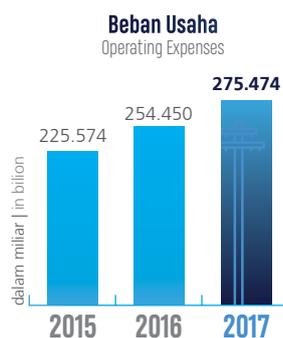
The fees for new connection increased by 0.9% to Rp7.11 trillion from Rp7.05 trillion in 2016 due to the increase of new customers, electricity for the customers, and electricity tariff. The 3.79 million new customers in 2017 grew PLN's total customer to 68.07 million customers. Connected power also increased by 6.71% from 114,348 MVA in 2016 to 122,018 MVA, an increase of 7,670 MVA.

#### Other Revenues

Other revenues decreased by 2.2% to Rp1.59 trillion, from Rp1.63 trillion in 2016. In 2017, demand for network services, telecommunications services, and transformer rentals increased. However, demand for other services and changes in connected and administrative power decreased significantly, resulting in overall PLN's other revenues decline.

## BEBAN USAHA

## OPERATING EXPENSES



Total beban usaha di tahun 2017 naik 8,3% menjadi Rp275,47 triliun dari Rp254,45 triliun di tahun 2016. Adapun rincian beban usaha di tahun 2017 adalah:

#### Beban Bahan Bakar

Realisasi pembelian BBM di tahun 2017 turun 3,1% dari Rp24,06 triliun menjadi Rp23,32 triliun. Komponen beban usaha ini berkontribusi sebesar 42,5% dari total beban usaha, terdiri dari pembelian BBM dan non BBM (batubara, gas alam dan panas bumi).

In 2017, total operating expenses increased by 8.3% to Rp275.47 trillion from Rp254.45 trillion in 2016. The details of operating expenses in 2017 are:

#### Fuel Expenses

The realization of fuel purchases in 2017 decreased by 3.1% from Rp24.06 trillion to Rp23.32 trillion. This component contributes to 42.5% of the total expenses, which consists of fuel and non-fuel (coal, natural gas, and geothermal) purchases.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

### Company's Financial Performance

PLN berupaya keras menurunkan penggunaan BBM dengan bahan bakar lain yang lebih ekonomis. Upaya tersebut menunjukkan hasil positif, ditunjukkan dengan turunnya fuel mix menjadi 6%.

### Beban Bahan Bakar Non Minyak

#### • Batu Bara

Sejalan dengan kebijakan PLN untuk meningkatkan porsi pembangkit PLTU berbahan batubara untuk mencukupi kebutuhan listrik nasional, volume kebutuhan batubara naik 8,22% menjadi 54.711,8 ribu ton dari 50.556,4 ribu ton di tahun 2016.

Sama halnya dengan minyak bumi, harga batubara di pasar global tahun 2017 cenderung naik, dengan kisaran kenaikan sebesar 17,6% (FOB Newcastle). Kenaikan harga batubara ini bersama-sama dengan penambahan volume, membuat total beban pembelian batubara naik signifikan sebesar 37,3% atau Rp11,52 triliun menjadi Rp42,42 triliun di tahun 2017 dari sebelumnya sebesar Rp30,90 triliun di tahun 2016.

#### • Gas Alam

Volume kebutuhan gas alam turun 11,5% menjadi 447.072 MMSCF dari 505.125 MMSCF di tahun 2016. Hal ini sebanding dengan penurunan beban pembelian gas alam sebesar 6,8% menjadi Rp47,60 triliun dari Rp51,08 triliun di tahun 2016.

#### • Panas Bumi

Sementara itu, beban bahan bakar panas bumi naik 6,6% dari Rp2,83 triliun di tahun 2016 menjadi Rp3,02 triliun di tahun 2017.

### Beban Pembelian Tenaga Listrik dan Sewa

Beban Pembelian Tenaga Listrik dan Sewa naik cukup signifikan sebesar 21,3% menjadi Rp72,43 triliun dari Rp59,73 triliun di tahun sebelumnya. Beban pembelian tenaga listrik ini berkontribusi 26,3% terhadap total beban usaha PLN.

PLN is working hard to reduce the use of fuel with other fuel that is more economical. These efforts showed positive results, indicated by the decrease of fuel mix to 6%.

### Non-Fuel Expenses

#### • Coal

In line with PLN's policy to increase the portion of coal-fired power plants to meet the national electricity demand, coal volume needs increased 8.22% to 54,711.8 thousand tons from 50,556.4 thousand tons in 2016.

Similar to petroleum, global coal prices in 2017 tended to increase, with an approximate increase of 17.6% (FOB Newcastle). The increase in coal prices along with the increase in volume, caused the coal purchase expenses to increase significantly by 37.3% or Rp11.52 trillion to Rp42.42 trillion in 2017, from Rp30.90 trillion in 2016.

#### • Natural Gas

Natural gas demand volume decreased 11.5% to 447,072 MMSCF from 505,125 MMSCF in 2016. This is proportional to the decrease of natural gas purchase expenses by 6.8% to Rp47.60 trillion from Rp51.08 trillion in 2016.

#### • Geothermal

Meanwhile, geothermal fuel expenses increased by 6.6% from Rp2.83 trillion in 2016, to Rp3.02 trillion in 2017.

### Purchased Electricity and Lease Expenses

Purchased Electricity and Lease Expenses increased significantly by 21.3% to Rp72.43 trillion, from Rp59.73 trillion in the previous year. The purchased electricity expenses contributes to 26.3% of PLN's total operating expenses.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

### Company's Financial Performance

Kenaikan terutama disebabkan bertambahnya daya listrik yang dibeli dari Pembangkit Listrik Swasta, yakni dari 64.802 GWh di tahun 2016 menjadi 73.235 GWh di tahun 2017, naik 13,01%. Penambahan pembelian listrik swasta dan pihak berelasi dilakukan diantaranya karena terbatasnya pertambahan kapasitas pembangkit milik sendiri untuk menutup defisit daya, disamping karena naiknya jumlah pelanggan. Beban pembelian tenaga listrik swasta dimasa mendatang akan terus meningkat, seiring dengan semakin meningkatnya partisipasi pembangkit listrik swasta dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional.

Sementara itu, selaras dengan semakin bertambahnya pembangkit IPP dan pembangkit milik sendiri yang telah memasuki masa COD, kenaikan beban sewa pembangkit semakin kecil. Tahun 2017, biaya sewa pembangkit hanya naik sebesar 0,6% dari Rp6,55 triliun di tahun 2016 menjadi Rp6,59 triliun di tahun 2017. Beban sewa pembangkit berkontribusi sebesar 2,4% terhadap total beban usaha PLN.

### Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan berkontribusi sebesar 7,1% dari total Beban Usaha PLN di tahun 2017. Beban ini turun sebesar 8,1% menjadi sebesar Rp19,52 triliun di tahun 2017 dari Rp21,23 triliun di tahun 2016.

Penurunan beban pemeliharaan, menunjukkan keberhasilan PLN dalam menerapkan program efisiensi dengan dukungan teknologi informasi. Sistem *pooling* suku cadang dan kebijakan penggunaan tipe-tipe peralatan standar yang sejenis membuat realisasi program pemeliharaan dan penggantian suku cadang dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien dan lebih hemat biaya. Penerapan sistem lelang berbasis teknologi informasi, *e-auction* /*e-procurement* yang membuat biaya jasa borongan dalam pelaksanaan pemeliharaan turut berkontribusi terhadap penurunan beban ini.

The increase was primarily due to the increase in power purchased from Independent Power Producers, i.e. The increase was primarily due to the increase in power purchased from Independent Power Producers, i.e. 64,802 GWh in 2016 to 73,235 GWh in 2017, which increased by 13.01%. The increase in purchases of private electricity and related parties is due to the limited increase in own generating capacity to cover the power deficit, and the increasing number of customers. The purchase of power expenses will continue to increase in the future, in line with the increasing participation of Independent Power Producers in meeting the needs of the national electricity.

In line with the increasing IPP and own power plants that have entered the COD period, the expenses of power plants lease is decreasing. In 2017, the lease expenses only increased by 0.6% from Rp6.55 trillion in 2016 to Rp6.59 trillion in 2017. The lease expenses contributed to 2.4% of PLN's total operating expenses.

### Maintenance Expenses

Maintenance Expenses contributed to 7.1% of the PLN's total Operating Expenses in 2017. This expense decreased by 8.1% to Rp19.52 trillion in 2017 from Rp21.23 trillion in 2016.

The decrease in maintenance expenses indicates PLN's success in implementing efficiency programs with the support of information technology. Pooling system for spare parts and policies on the use of similar types of standard equipment realizes a more efficient and cost-effective maintenance and spare part replacement programs. Implementation of an information technology-based auction system, e-auction/e-procurement, caused the cost of leasing services in the maintenance implementation to contribute to decrease in expenses.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan Company's Financial Performance

### Beban Kepegawaian

Beban Kepegawaian berkontribusi sebesar 8,4% terhadap Total Beban Usaha PLN di tahun 2017. Beban ini naik 2,1% menjadi Rp23,13 triliun, dari sebesar Rp22,66 triliun di tahun 2016 seiring dengan pertambahan jumlah pegawai PLN sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

### Beban penyusutan

Beban penyusutan berkontribusi sebesar 10,6% terhadap total Beban Usaha PLN di tahun 2017. Beban ini naik 6,0% menjadi sebesar Rp29,16 triliun dari Rp27,51 triliun di tahun 2016, terutama karena adanya realisasi kegiatan pembangunan instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi baru.

### Beban lain-lain

PLN mencatat beban lain-lain pada tahun 2017 sebesar Rp7,71 triliun, naik 5,9% dari sebesar Rp7,28 triliun di tahun sebelumnya. Penyebab utama kenaikan beban lain-lain adalah adanya kenaikan pengelolaan pelanggan sebesar 21,6%, teknologi informasi sebesar 19,6%, penagihan rekening sebesar 11,7%, dan lainnya.

### Personnel Expenses

Personnel Expenses contributes to 8.4% of PLN's Total Operating Expenses in 2017. This expense increased by 2.1% to Rp23.13 trillion, from Rp22.66 trillion in 2016, in line with the increasing number of PLN employees, which is adjusted to the Company's needs.

### Depreciation expenses

Depreciation expenses contributes to 10.6% of PLN's total Operating Expenses in 2017. This expense increased by 6.0% to Rp29.16 trillion, from Rp27.51 trillion in 2016, primarily due to the realization of the development of power plants, transmission networks, and distribution networks.

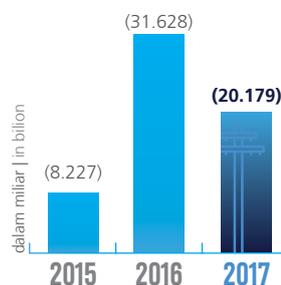
### Other expenses

In 2017, PLN recorded other expenses of Rp7.71 trillion, increased by 5.9% from Rp7.28 trillion in the previous year. The main cause of the increase in other expenses is the increase in customer management by 21.6%, information technology by 19.6%, account billing by 11.7%, etc.

## LABA (RUGI) USAHA SEBELUM SUBSIDY

## OPERATING INCOME (LOSS) BEFORE SUBSIDY

**Laba (Rugi) Usaha Sebelum Subsidi**  
Operating Income (Loss) Before Subsidy



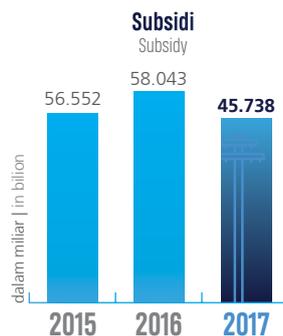
Sebagai akibat peningkatan pendapatan yang lebih tinggi dari peningkatan beban usaha, maka rugi usaha sebelum subsidi PLN di tahun 2017 berkurang 36,2% menjadi sebesar Rp20,18 triliun dari Rp31,63 triliun rugi usaha di tahun 2016. Pengurangan rugi usaha sebelum subsidi mencerminkan keberhasilan Manajemen PLN dalam meningkatkan efisiensi operasional.

As a result of higher revenues from higher operating expenses, PLN's operating loss before subsidy in 2017 decreased by 36.2% to Rp20.18 trillion, from Rp31.63 trillion in 2016. The reduction of operating loss before subsidy reflects the success of PLN Management in improving operational efficiency.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan Company's Financial Performance

### SUBSIDI

### SUBSIDY



Realisasi subsidi di tahun 2017 adalah sebesar Rp45,74 triliun, turun 21,2% dari Rp58,04 triliun di tahun sebelumnya. Penurunan nilai subsidi tersebut merupakan dampak langsung dari kebijakan pencabutan subsidi energi yang diterapkan Pemerintah melalui penyesuaian TTL secara berkala tersebut.

Disisi lain, pencairan subsidi sebesar Rp45,74 triliun tersebut menunjukkan komitmen dukungan Pemerintah terhadap PLN agar tetap merealisasikan investasi pengembangan ketenagalistrikan, tetap menyalurkan listrik kepada masyarakat yang kurang mampu dibawah nilai ke-ekonomian dan menjaga rasio kecukupan modal terhadap hutang sesuai persyaratan pinjaman yang ditentukan.

Penentuan besaran subsidi listrik tetap dilakukan melalui serangkain proses yang melibatkan masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK – RI), yang telah mendapatkan akses terhadap pencatatan pembukuan keuangan PLN sesuai kerjasama antara BPK dan PLN dan pembahasan intensif antara PLN, Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian Keuangan dan DPR.

Actual subsidies in 2017 amounted to Rp45.74 trillion, decreased by 21.2% from Rp58.04 trillion in the previous year. The decline in the subsidy value is a direct impact of the policy revocation of energy subsidies applied by the Government through gradual electricity tariff adjustments.

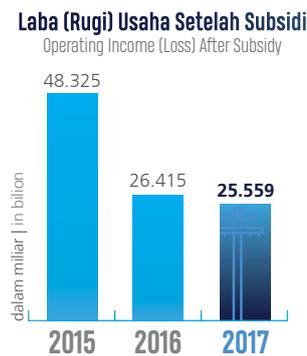
On the other hand, the disbursement of subsidy amounting to Rp45.74 trillion reflects the Government's commitment to PLN to realizing the investment in electricity development, by channeling the electricity to the underprivileged people in terms of economic value, and maintaining the capital adequacy ratio to the debt in accordance with the specified loan terms.

The amount of electricity subsidy will be conducted through a series of processes, involving input from the Indonesian Audit Board (BPK - RI), which has the access to the recording of PLN's financial accounting in cooperation with BPK and PLN, and the intensive discussions between PLN, the Director General of Electricity, the Ministry of Finance, and the House of Representatives (DPR).

Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan  
Company's Financial Performance

## LABA (RUGI) USAHA SETELAH SUBSIDI

## OPERATING INCOME (LOSS) AFTER SUBSIDY



Di tahun 2017, PLN mencatatkan Laba Usaha setelah subsidi sebesar Rp25,56 triliun, turun 3,3% dari Rp26,42 triliun di tahun sebelumnya. Sekalipun laba usaha setelah subsidi turun, yang menjadi pembeda adalah jumlah subsidi yang diterima PLN di tahun 2017, kembali berkurang dibandingkan tahun sebelumnya.

In 2017, PLN recorded Operating Income after subsidy amounted to Rp25.56 trillion, which decreased by 3.3% from Rp26.42 trillion in 2016. Although the operating income after subsidy decreased, the difference is the subsidies received by PLN in 2017, which decreased compared to the previous year.

## BEBAN LAIN-LAIN

PLN mencatat beban lain-lain sebesar Rp17,02 triliun, naik 32,5% dari tahun 2016 yang sebesar Rp12,84 triliun. Beban lain-lain ini terbentuk atas beberapa hal:

- Rugi translasi akibat melemahnya nilai tukar. PLN memiliki eksposur pinjaman bank maupun penerbitan obligasi dan surat utang berjangka menengah panjang yang dalam mata uang US dollar. Pelemahan nilai tukar rupiah membuat jumlah eksposur hutang PLN bertambah saat dicatat dalam mata uang rupiah. Hal ini berlaku sebaliknya, dimana pada tahun 2016, PLN mencatatkan keuntungan kurs mata uang saat Rupiah menguat di akhir periode pembukuan.

Tahun 2017, PLN mencatatkan rugi selisih kurs sebesar Rp2,94 triliun. Sebaliknya, tahun 2016, PLN mencatatkan keuntungan selisih kurs sebesar Rp4,20 triliun atau mengalami penurunan sebesar 7,14 triliun.

## OTHER EXPENSES

PLN recorded other expenses at Rp17.02 trillion, increased by 32.5% from 2016, which was Rp12.84 trillion. These other expenses consist of several things:

- Translation loss due to weakening of exchange rate. PLN has exposure to bank loans and the issuance of medium and long-term bonds, local and global (denominated in US dollars). The weakening of the rupiah caused PLN's debt exposure to increase when recorded in rupiah. This applies vice versa, in 2016, PLN recorded a currency exchange gain when the Rupiah strengthened at the end of the reporting period.

In 2017, PLN recorded a foreign exchange loss amounting to Rp2.94 trillion. In contrast, in 2016, PLN recorded a foreign exchange gain of Rp4.20 trillion, or decreased by Rp7.14 trillion.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

### Company's Financial Performance

- **Besarnya Beban Keuangan**  
Beban keuangan mengalami penurunan sebesar 0,7% menjadi sebesar Rp18,56 triliun dari Rp18,70 triliun di tahun sebelumnya. Beban keuangan ini berasal dari pihak berelasi (utang bank, penerusan pinjaman, utang kepada pemerintah, dan instrumen derivatif) dan pihak ketiga (utang sewa pembiayaan, utang obligasi, utang bank, utang listrik swasta, dan lain-lain).
- **Financial Cost**  
Financial cost decreased by 0.7% to Rp18.56 trillion, from Rp18.70 trillion in the previous year. These financial costs originate from related parties (bank loans, two-step loans, government loans, and derivative instruments), and third parties (lease liabilities, bonds payable, bank loans, electricity purchase payable, and others).
- **PLN sebenarnya mendapatkan bunga dari penempatan dananya di bank-bank dalam negeri maupun di bank asing, dengan nilai sebesar Rp1,07 triliun di tahun 2017, namun jumlah ini tidak dapat menutup beban keuangan PLN.**  
PLN obtains interest from the placement of funds in domestic banks and foreign banks, with a value of Rp1.07 trillion in 2017. However, this amount did not cover PLN's financial cost.
- **PLN juga mencatatkan kenaikan penghasilan lain-lain bersih sebesar 212,8% dari Rp1,09 triliun di tahun 2016 menjadi Rp3,41 triliun di tahun 2017. Kenaikan ini disebabkan oleh pendapatan denda administrasi, bagian laba bersih entitas asosiasi & ventura bersama, penghasilan jasa & klaim, serta keuntungan penjualan aset tidak digunakan dalam operasi.**  
PLN also recorded a 212.8% increase in net other income, from Rp1.09 trillion in 2016 to Rp3.41 trillion in 2017. This increase is attributed to administrative penalty income, equity in net income of associates & joint venture, claim & service income, and gain on sale of assets not used in operations.

## LABA SEBELUM PAJAK

Dengan naiknya beban lain-lain tersebut, pada tahun 2017 PLN mencatatkan laba sebelum Pajak sebesar Rp8,54 triliun, turun 37,1% dari Rp13,58 triliun di tahun sebelumnya.

## INCOME BEFORE TAX

In 2017, along with the increase in other expenses, PLN recorded income before tax at Rp8.54 trillion, decreased by 37.1%, as it was Rp13.58 trillion in the previous year.

## LABA TAHUN BERJALAN

PLN mencatatkan beban pajak sebesar Rp4,12 triliun, sehingga di akhir tahun 2017 membukukan Laba tahun berjalan sebesar Rp4,43 triliun, turun 45,7% dari Rp8,15 triliun di tahun sebelumnya.

## INCOME FOR THE YEAR

PLN recorded tax expenses of Rp4.12 trillion. Thus, at the end of 2017, the Company recorded the income for the year of Rp4.43 trillion, decreased by 45.7% from Rp8.15 trillion in the previous year.

Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan  
Company's Financial Performance**PENGHASILAN (PENGELUARAN) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN**

Pada tahun 2017, PLN mencatatkan pengeluaran komprehensif tahun berjalan sebesar Rp10,7 triliun, naik dari pengeluaran komprehensif tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,08 triliun.

Setelah ditambah laba bersih tahun berjalan sebesar Rp4,43 triliun, maka PLN membukukan Pengeluaran Komprehensif Tahun Berjalan Total sebesar Rp6,27 triliun. Tahun sebelumnya, PLN mencatatkan Penghasilan Komprehensif tahun berjalan sebesar Rp6,07 triliun.

**COMPREHENSIVE INCOME (EXPENDITURE) FOR THE YEAR**

In 2017, PLN recorded comprehensive expenditure for the year amounted to Rp10.7 trillion, an increase compared to the comprehensive expenditure of the previous year of Rp2.08 trillion.

After adding the net income for the year of Rp4.43 trillion, PLN recorded Comprehensive Expenditure for the Year of a total Rp6.27 trillion. In the previous year, PLN recorded a Comprehensive Income for the year amounted to Rp6.07 trillion.

**LABA BERSIH DAN LABA PERSAHAM TAHUN BERJALAN**

Di tahun 2017 PLN membukukan Laba Tahun berjalan diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp4,41 triliun dan diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali sebesar Rp17,91 miliar, sehingga Total Laba Bersih Tahun Berjalan adalah sebesar Rp4,43 triliun, turun 45,6% dari nilai sebesar Rp8,15 triliun di tahun sebelumnya.

Dengan laba bersih tersebut, maka laba persaham PLN di tahun 2017 menjadi sebesar Rp50.541 rupiah per saham, turun dari posisi sebesar Rp150.009 per saham di tahun 2016.

**NET INCOME AND EARNINGS PER SHARE FOR THE YEAR**

In 2017, PLN recorded Net Income for the year attributable to Owners of the Parent of Rp4.41 trillion, and attributable to Non-Controlling Interest of Rp17.91 billion. Thus, the Total Net Income for the Year is Rp4.43 trillion, decreased by 45.6% from Rp8.15 trillion in the previous year.

With the net income, PLN's earnings per share in 2017 amounted to Rp50,541 per share, down from Rp150,009 per share in 2016.

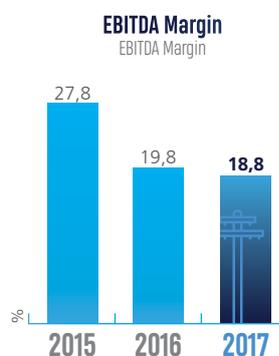
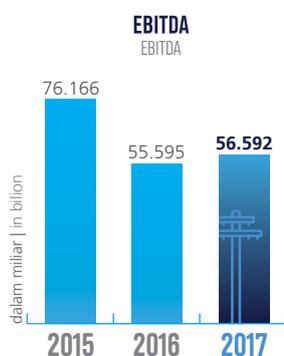
## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

### Company's Financial Performance

## EBITDA DAN EBITDA MARGIN

## EBITDA AND EBITDA MARGIN

Keterangan	2015	2016	2017	Description
EBITDA (Miliar)	76.166	55.595	56.592	EBITDA (Miliar)
EBITDA Margin	27,8%	19,8%	18,8%	EBITDA Margin



Seluruh angka keuangan tahun 2016 & 2017 tidak menerapkan ISAK 8 Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.04/2017. | All financial figures for 2016 & 2017 does not applied ISAK 8 In accordance with the Rules of the Financial Services Authority no. 6 / POJK.04 / 2017.

PLN mencatatkan EBITDA tahun 2017 sebesar Rp56,59 triliun, naik 1,8% dari Rp55,59 triliun di tahun 2016. Hal ini selaras dengan naiknya pendapatan Perusahaan akibat naiknya jumlah pelanggan dan TTL dan usaha efisiensi yang berhasil dilakukan oleh PLN.

EBITDA Margin 2017 adalah sebesar 18,8%, turun dari 19,8% di tahun 2016, akibat naiknya beban usaha, terutama oleh kenaikan beban bahan bakar & pelumas, pembelian tenaga listrik swasta dan naiknya biaya penyusutan yang belum dapat diimbangi oleh kenaikan pendapatan, terutama oleh kenaikan TTL.

In 2017, PLN recorded the EBITDA of Rp56.59 trillion, increased by 0.02% from Rp55.59 trillion in 2016. This is consistent with the Company's revenue increase due to the increase in the number of customers, electricity tariff, and efficiency made by PLN.

EBITDA Margin 2017 is 18.8%, declined by 19.8% in 2016, due to increase in the operating expenses, primarily by increases in fuel & lubricant expenses, purchase of electricity to the independent power producers, and increase in depreciation cost, which are not balanced with the revenue increase, mainly the electricity tariff.

Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan  
Company's Financial Performance

## IKHTISAR POSISI KEUANGAN

## FINANCIAL POSITION HIGHLIGHTS



Pada ikhtisar posisi keuangan tersebut, total aset PLN per 31 Desember 2017 meningkat 4,9% menjadi Rp1.334,96 triliun dari Rp1.272,18 triliun di tahun 2016. Kemudian total Liabilitas naik 18,2% menjadi Rp465,54 triliun dari Rp393,78 triliun di tahun 2016. Sementara ekuitas Perusahaan turun 1,0% menjadi Rp869,42 triliun dari posisi Rp878,40 triliun di tahun sebelumnya.

In the financial position highlights, PLN's total assets as of December 31, 2017, increased by 4.9% to Rp1,334.96 trillion from Rp1,272.18 trillion in 2016. Then the total Liabilities increased by 18.2% to Rp465.54 trillion from Rp393.78 trillion in 2016. The Company's equity decreased by 1.0% to Rp869.42 trillion, from Rp878.40 trillion in the previous year.

Adapun ringkasan pos-pos neraca utama yang menyebabkan perubahan tersebut adalah sebagai berikut.

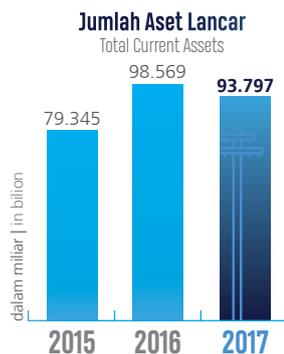
The summary of the main balance sheets that influences the change is as follows.

- Kenaikan total aset, terutama dikontribusikan oleh naiknya aset tetap bersih 5,2% menjadi sebesar Rp1.204,57 triliun, kendati terdapat penurunan aset lancar 4,8% yang terutama disebabkan oleh adanya penurunan piutang subsidi listrik 39% menjadi sebesar Rp7,59 triliun dari Rp12,45 triliun dan penurunan pajak dibayar dimuka 30,7% menjadi sebesar Rp5,00 triliun dari Rp7,21 triliun di tahun sebelumnya.
- Kenaikan total liabilitas terutama dikontribusikan oleh naiknya utang bank 15,6% di tahun 2017 menjadi sebesar Rp116,02 triliun dari Rp100,36 triliun, serta utang obligasi dan sukuk ijarah 45,9% menjadi Rp100,40 triliun dari Rp68,83 triliun di tahun 2016. Komponen liabilitas lancar juga meningkat, terutama dikontribusikan oleh naiknya utang usaha 44,8% di tahun 2017 menjadi sebesar Rp43,71 triliun dari Rp30,19 triliun di tahun sebelumnya.
- The increase in total assets was primarily contributed by a 5.2% net property, plant, and equipment to Rp1,204.57 trillion, despite a 4.8% decline in current assets, primarily due to a 39% reduction in receivables on electricity subsidy to Rp7.59 trillion, from Rp12.45 trillion, and a reduction in prepaid taxes of 30.7% to Rp5.00 trillion, from Rp7.21 trillion in the previous year.
- The increase in total liabilities was mainly contributed by the 15.6% increase in bank loan in 2017 to Rp116.02 trillion, from Rp100.36 trillion, and 45.9% increase in bonds payable and sukuk ijarah to Rp100.40 trillion, from Rp68.83 trillion in the year 2016. The components of current liabilities also increased, mainly contributed by a 44.8% increase in trade payables in 2017 to Rp43.71 trillion, from Rp30.19 trillion in the previous year.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

### Company's Financial Performance

## ASET



Bidang usaha PLN yang padat modal, membuat komponen aset tetap yang termasuk kedalam kelompok akun Aset Tidak Lancar terus mendominasi nilai posisi keuangan. Seperti tampak pada tabel sebelumnya dan ditunjukkan pada 2 grafik berikut, komponen aset tidak lancar (didalamnya didominasi oleh akun aset tetap) mendominasi komposisi aset hingga pada kisaran 90,2%. Nilai Aset tersebut akan terus bertambah seiring dengan program pembangunan pembangkit dan infrastruktur kelistrikan pada Program 35.000 MW & 7.000 MW.

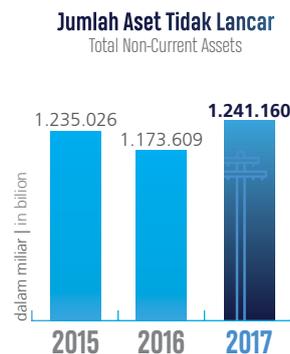
### ASET TIDAK LANCAR

Jumlah aset tidak lancar Perusahaan pada akhir tahun 2017 adalah Rp1.241,16 triliun, naik 5,8% dari Rp1.173,61 triliun di tahun 2016. Komposisi terbesar aset tidak lancar di tahun 2017 adalah aset tetap bersih, mencapai 97,05%, diikuti aset pajak tangguhan 0,8% dan rekening bank dan deposito yang dibatasi penggunaannya sebesar 0,6%, serta aset tidak lancar lainnya sebesar 0,6% dari total aset tidak lancar.

#### Aset Tetap

PLN mencatatkan kenaikan aset tetap 5,2% menjadi sebesar Rp1.204,57 triliun pada akhir tahun dari nilai sebesar Rp1.145,53 triliun di tahun 2016. Kenaikan aset tetap bersih sebesar Rp59,04 triliun tersebut berasal dari realisasi berbagai proyek pembangunan pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi di tahun 2017 dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi dan perbaikan keandalan jaringan.

## ASSETS



As PLN business field requires intense capital, the component of property, plant, and equipment, which is categorized as Non-Current Assets, continues to dominate the financial position. As shown in the previous table and shown in the following 2 graphs, the non-current assets component (dominated by property, plant, and equipment) dominates the asset composition up to 90.2%. The value of Assets will continue to grow, in line with the power plant and electricity infrastructure development in the 35,000 MW & 7,000 MW Program.

### NON-CURRENT ASSETS

The Company's non-current assets at end of 2017 amounted to Rp1,241.16 trillion, increased by 5.8% from Rp1,173.61 trillion in 2016. The largest non-current assets in 2017 were net property, plant, and equipment, up to 97.05%, followed by 0.8% deferred tax assets, 0.6% restricted cash in banks and time deposits, and 0.6% of other non-current assets.

#### Property, Plant, and Equipment

PLN recorded a 5.2% increase in property, plant, and equipment to Rp1,204.57 trillion at the end of the year, from Rp1,145.53 trillion in 2016. The increase of net property, plant, and equipment in the amount of Rp59.04 originated from the realization of various power plant, transmission and distribution networks development in 2017 to improve the electrification ratio and network reliability.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan Company's Financial Performance

### Aset Pajak Tangguhan

Nilai aset tangguhan tahun 2017 adalah sebesar Rp9,57 triliun, turun 3,2%, dari Rp9,88 triliun di tahun 2016. Penurunan ini disebabkan oleh realisasi penerapan POJK 6/2017 yang menetapkan bahwa transaksi dengan IPP adalah merupakan perjanjian jual beli tenaga listrik dan bukan perjanjian sewa atau mengandung sewa, serta akibat revaluasi Aset Tetap di tahun 2016.

### Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya

Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya naik 0,4% dari posisi tahun 2016 sebesar Rp7,46 triliun menjadi Rp7,49 triliun. Deposito yang dibatasi penggunaannya, merupakan akun yang mencatat nilai jaminan dana yang dialokasikan untuk menyelesaikan proyek tertentu. Jaminan tersebut dapat berupa uang muka pembelian barang modal maupun uang muka kontrak pembangunan proyek tenaga listrik.

### Aset tidak lancar lain

Nilai aset tidak lancar naik 42,3% dari Rp4,96 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp7,06 triliun pada tahun 2017, terutama disebabkan oleh kenaikan uang muka pengembangan proyek, biaya dibayar di muka untuk pembelian gas dan batubara, serta properti pertambangan.

### Investasi pada ventura bersama

Investasi pada ventura bersama naik signifikan sebesar 140,3% dari Rp1,85 triliun menjadi Rp4,45 triliun sebagai akibat adanya penambahan investasi pada perusahaan eksisting dan investasi baru pada perusahaan penyedia peralatan listrik.

### Deferred Tax Assets

In 2017, the deferred tax assets is Rp9.57 trillion, decreased by 3.2% from Rp9.88 trillion in 2016. This decrease is due to the implementation of POJK 6/2017, which stipulates that transactions with IPP are a power purchase agreement and not a lease agreement or contain lease agreement, and due to the revaluation of Property, Plant, and Equipment in 2016.

### Restricted cash in banks and time deposits

Restricted cash in banks and time deposits increased by 0.4% to Rp7.49 trillion, from Rp7.46 trillion in 2016. Restricted deposits are accounts that record fund collateral allocated to settle certain projects. The collateral can be in the form of down payment for capital goods purchase or down payment for electricity project contracts.

### Other non-current assets

In 2017, other non-current assets increased by 42.3% to Rp7.06 trillion, from Rp4.96 trillion in 2016. The increase is mainly due to an increase in project development advance payments, prepaid expenses for gas and coal purchases, and mining properties.

### Investments in joint ventures

Investments in joint ventures increased significantly by 140.3% from Rp1.85 trillion to Rp4.45 trillion due to the additional investment in existing companies and new investments in electrical equipment provider companies.

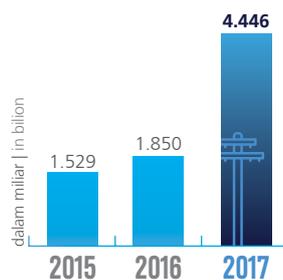
## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan Company's Financial Performance

Termasuk kedalam akun ini adalah kerjasama pada: PT Unelec Indonesia, PT Bajradaya Sentranusa, PT Bukit Pembangkit Innovative, PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali, PT Rekind Daya Mamuju, PT Indo Raya Tenaga, PT Perta Daya Gas, PT Rajamandala Electric Power, PT Crompton Power Switchgear, PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali, PT GCL Indo Tenaga, PT Guohua Taidian – PJBI, dan PT North Sumatera Hydro Energy.

The accounts include cooperation with: PT Unelec Indonesia, PT Bajradaya Sentranusa, PT Bukit Pembangkit Innovative, PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali, PT Rekind Daya Mamuju, PT Indo Raya Tenaga, PT Perta Daya Gas, PT Rajamandala Electric Power, PT Crompton Power Switchgear, PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali, PT GCL Indo Tenaga, PT Guohua Taidian – PJBI, and PT North Sumatera Hydro Energy.

### Investasi pada ventura bersama

Investments in joint ventures



### Investasi pada entitas asosiasi

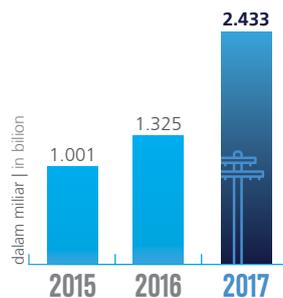
Mengalami kenaikan sebesar 22,8% dari Rp1,98 triliun menjadi Rp2,43 triliun sebagai realisasi berbagai proyek pembangunan pembangkit yang dilakukan bersama-sama partner strategis, yaitu: PT Geo Dipa Energi, PT Mitra Energi Batam, PT Sumber Segara Primadaya, PT Dalle Energy Batam, PT Indo Pusaka Berau, PT Energi Pelabuhan Indonesia, PT Tanjung Kasam Power, serta PT PBM Adhiguna Putra.

### Investments in Associates

Investments in associates increased by 22.8% from Rp1.98 trillion to Rp2.43 trillion as the realization of various power plant development conducted jointly with strategic partners, i.e.: PT Geo Dipa Energi, PT Mitra Energi Batam, PT Sumber Segara Primadaya, PT Dalle Energy Batam, PT Indo Pusaka Berau, PT Energi Pelabuhan Indonesia, PT Tanjung Kasam Power, and PT PBM Adhiguna Putra.

### Investasi pada entitas asosiasi

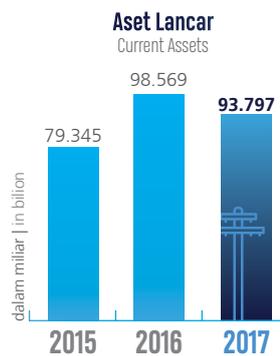
Investments in associates



Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan  
Company's Financial Performance

## ASET LANCAR

## CURRENT ASSETS



Nilai aset lancar PLN pada akhir tahun 2017 turun 4,8% menjadi Rp93,80 triliun dari nilai sebesar Rp98,57 triliun di tahun sebelumnya. Komposisi terbesar aset lancar di tahun 2017 adalah kas dan setara kas 45,1%, diikuti piutang usaha 23,9%, persediaan sebesar 13,7% piutang subsidi listrik 8,1%, dan serta beberapa akun yang jumlahnya kurang dari 7% terhadap total aset lancar.

**Kas dan setara kas**

Posisi kas dan setara kas pada tahun 2017 naik 0,9% menjadi senilai Rp42,29 triliun dari Rp41,91 triliun di tahun sebelumnya. Kenaikan saldo kas dan setara kas tersebut salah satunya dikontribusikan oleh naiknya dana Kas pada Rekening Bank-Pihak Ketiga yang melonjak 83,1% dari 3,6 triliun di tahun 2016 menjadi 6,7 triliun di tahun 2017.

Kas dan setara kas pada tahun 2017 terdiri dari kas di tangan sebesar Rp8,58 miliar dan Kas pada Rekening Bank, ditempatkan di rekening giro dalam mata uang asing maupun Rupiah sebesar Rp38,77 triliun yang merupakan 91,7% dari jumlah keseluruhan kas dan setara kas. Sisanya merupakan deposito berjangka sebesar Rp3,51 triliun atau sebesar 8,31% dari jumlah keseluruhan kas dan setara kas. Kas dan setara kas Perusahaan dalam bentuk deposito, ditempatkan diantaranya di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Bukopin.

At the end of 2017, PLN's current assets decreased by 4.8% to Rp93.80 trillion, from Rp98.57 trillion in the previous year. The largest component of current assets in 2017 is cash and cash equivalents of 45.1%, followed by 23.9% trade receivables, 13.7% inventories, 8.1% receivables on electricity subsidy, and several accounts with less than 7% of total current assets.

**Cash and Cash Equivalents**

In 2017, cash and cash equivalents increased by 0.9% to Rp42.29 trillion, from Rp41.91 trillion in the previous year. The increase in cash and cash equivalents was due to the increase in Cash Funds in Third Party Bank Accounts, which increased by 83.1% from Rp3.6 trillion in 2016 to Rp6.7 trillion in 2017.

In 2017, cash and cash equivalents consists of cash on hand amounting to Rp8.58 billion, and Cash in Banks, placed in demand deposits denominated in foreign currency or Rupiah of Rp38.77 trillion, which represents 91.7% of the total cash and cash equivalents. The rest is time deposits amounting to Rp3.51 trillion or equal to 8.31% of total cash and cash equivalents. The Company's cash and cash equivalents in the form of time deposits is placed in, among others, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, and PT Bank Bukopin.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

### Company's Financial Performance

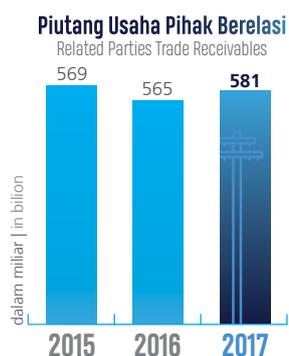
Dari penempatan dana tersebut PT PLN (Persero) mendapatkan bunga antara 6,0%-7,0% untuk penempatan dana dalam Rupiah dan 0% untuk penempatan dana dalam mata uang asing.

Dengan pola penempatan dana seperti tersebut Perusahaan memperoleh pendapatan bunga sebesar Rp1,07 triliun, naik 84,4% dari Rp579 miliar di tahun 2016.

PT PLN (Persero) earns interest between 6.0-7.0% for the placement of funds in Rupiah, and 0% for placement of funds in foreign currency.

With the fund placement pattern, the Company earned interest income of Rp1.07 trillion, increased by 84.4% compared to Rp579 billion in 2016.

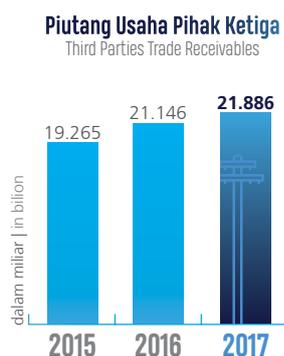
### Piutang Usaha



PLN mencatat Piutang Usaha dengan membagi pelanggan ke dalam dua kelompok besar, yakni piutang berdasarkan kelompok pelanggan dan piutang berdasarkan umur piutang usaha.

- Piutang berdasarkan pelanggan terdiri atas piutang pihak berelasi yang merupakan pelanggan dari lingkungan BUMN, dan piutang pihak ketiga, yakni kelompok pelanggan umum, TNI dan Polri serta institusi lainnya.  
Saldo piutang pihak berelasi untuk tahun buku 2017 adalah sebesar Rp580,99 miliar naik 2,7% dari tahun 2016, sebesar Rp565,46 miliar. Kenaikan ini merefleksikan adanya realisasi investasi oleh BUMN selain dipengaruhi oleh penyesuaian Tarif Tenaga Listrik.

### Trade Receivables



PLN recorded Trade Receivables by categorizing the customers into two major groups, i.e. trade receivables by debtor, and trade receivables by age category of receivables that are not impaired.

- Trade receivables by debtor consists of receivables of related parties from SOEs and receivables of third parties, i.e. public, Indonesian Armed Forces, Indonesian Police, and other institutions.  
The related parties' trade receivables for fiscal year 2017 amounted to Rp580.99 billion, increased by 2.7% from 2016, which was Rp565.46 billion. This increase reflects the realization of investment by SOEs in addition to being influenced by the adjustment of Electricity Tariffs.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

### Company's Financial Performance

Piutang usaha-pihak ketiga bersih, adalah sebesar Rp21,89 triliun, naik 3,5% dari posisi tahun 2016 yang sebesar Rp21,15 triliun. Penyebabnya adalah naiknya piutang usaha pihak ketiga - untuk pelanggan umum dan TNI & Polri masing-masing sebesar 4,3% dan 5,2% yang juga dikontribusikan oleh naiknya jumlah pelanggan dan adanya penyesuaian Tarif Tenaga Listrik. Sedangkan piutang usaha institusi lainnya mengalami penurunan 2,2% dari tahun sebelumnya.

Piutang Usaha Menurut Umur Piutang yang belum diturunkan nilainya.

Jumlah cadangan piutang ragu-ragu yang harus disisihkan meningkat 15,7% menjadi sebesar Rp1,18 triliun dari posisi Rp1,02 triliun di tahun 2016 seiring naiknya jumlah piutang usaha. PLN terus berupaya menyelesaikan piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 360 hari ini sesuai peraturan yang berlaku.

Pada tahun 2017, piutang usaha yang belum jatuh tempo mengalami kenaikan sebesar 4,03% menjadi Rp20,61 triliun dari Rp19,81 triliun di tahun 2016. Sedangkan piutang yang lewat jatuh tempo mengalami peningkatan 3,75% menjadi sebesar Rp 3,04 triliun dari Rp 2,93 triliun di tahun 2016.

PLN menerapkan kebijakan pemutusan aliran listrik jika ada keterlambatan pembayaran pada periode tertentu, didukung oleh sistem Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T) maupun sistem Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat (P2APT). Kebijakan ini membuat PLN lebih cepat mendeteksi adanya keterlambatan pembayaran dan mempercepat tindakan penyelesaian. Namun jika piutang tersebut menyangkut kepentingan umum yang lebih besar, PLN menunda penyelesaian.

### Piutang subsidi listrik

Total piutang subsidi listrik di tahun 2017 adalah sebesar Rp7,59 triliun, turun 39,04% dari posisi tahun 2016 yang sebesar Rp12,45 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan pada tahun 2017 dan 2016, Perusahaan telah menerima pembayaran atas piutang subsidi listrik Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp5,22 triliun.

Trade receivables of third parties - public, net, amounted to Rp21.89 trillion, increased by 3.5% from Rp21.15 trillion in 2016. The main cause is the increase in trade receivables of third parties for public, Indonesian Armed Forces, and Indonesian Police, of 4.3% and 5.2% respectively. The increase is also influenced by the increase number of customers and adjustment of Electricity Tariff. Meanwhile, trade receivables of other institutions decreased by 2.2% compared to the previous year.

Trade Receivables by Age Category of receivables that are not impaired.

The amount of provision for doubtful accounts to be set aside increased by 15.7% to Rp1.18 trillion from Rp1.02 trillion in 2016, in line with the increase in trade receivables. PLN continues to settle receivables that have matured more than 360 days, in compliance with prevailing regulations.

In 2017, trade receivables that have not matured grew by 4.03% to Rp20.61 trillion from Rp19.81 trillion in 2016. Meanwhile, trade receivables that have matured increased by 3.75% to Rp3.04 trillion from Rp2.93 trillion in 2016.

PLN implements a policy to terminate electricity if there is a delay in payment for a certain period, supported by the Centralized Customer Service Application (AP2T) and Centralized Revenue Flow Supervisory Management (P2APT) system. This policy causes PLN to be faster in detecting any late payment and speeding up the settlement activity. However, if the receivables is related to the greater public interest, PLN postpones the settlement.

### Receivables on electricity subsidy

In 2017, total receivables on electricity subsidy is Rp7.59 trillion, decreased by 39.04% from 2016, which was Rp12.45 trillion. The decrease was primarily due to receipt of payment of electricity subsidy for Fiscal Year 2015 amounting to Rp5.22 trillion in 2016 and 2017.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

### Company's Financial Performance

### Persediaan

Nilai saldo persediaan bersih tahun 2017 naik 10,9% menjadi sebesar Rp12,83 triliun, dari nilai sebesar Rp11,57 triliun di tahun sebelumnya. Nilai persediaan terbesar adalah persediaan bahan bakar dan pelumas, diikuti persediaan umum, persediaan *switchgear* & jaringan serta alat ukur, pembatas dan kontrol diikuti dengan transformator dan kabel. Seiring dengan trend kenaikan harga BBM dan batubara, serta intensifnya pembangunan sarana ketenagalistrikan, saldo seluruh komponen utama persediaan tersebut meningkat.

### LIABILITAS

Total liabilitas PLN di tahun 2017 naik 18,2% menjadi sebesar Rp465,54 triliun dari Rp393,78 triliun di tahun sebelumnya. Komposisi liabilitas tersebut terdiri dari 70,1% liabilitas jangka panjang dan 29,9% liabilitas jangka pendek. Peningkatan total liabilitas terjadi baik pada liabilitas jangka panjang maupun pendek. Liabilitas jangka panjang naik 19,96% menjadi sebesar Rp326,47 triliun sebagai hasil realisasi penerbitan obligasi baru dan penerimaan pinjaman perbankan untuk mendukung pembangunan berbagai proyek pembangkit listrik, transmisi dan distribusi.

Sementara untuk liabilitas jangka pendek yang naik 14,3% menjadi sebesar Rp139,07 triliun di tahun 2017 dari Rp121,62 triliun di tahun sebelumnya. Kontributor utama kenaikannya adalah utang usaha, utang bank dan surat utang jangka menengah, dan uang jaminan langganan.

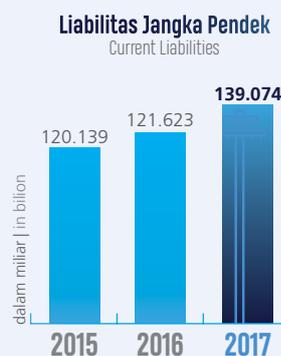
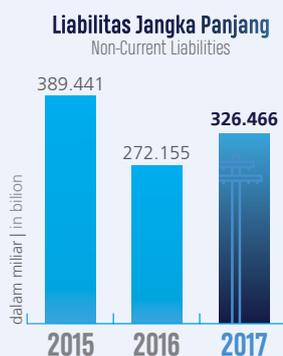
### Inventories

In 2017, net inventories of the Company increased by 10.9% to Rp12.83 trillion, from Rp11.57 trillion in the previous year. The largest inventory value is fuel and lubricant, followed by general inventories, switchgear & networks, gauges, limits and controls, followed by transformers and cables. Along with the rising trend of fuel and coal prices, and the intensification of electricity supply development, the balance of all major inventory components increases.

### LIABILITIES

PLN's total liabilities in 2017 increased by 18.2% to Rp465.54 trillion from Rp393.78 trillion in the previous year. The liabilities consist of 70.1% long-term liabilities and 29.9% short-term liabilities. Both long-term and short-term liabilities experienced increase. Long-term liabilities increased by 19.96% to Rp326.47 trillion because of the issuance of new bonds and the receipt of bank loans to support the construction of various power plants, transmission, and distribution projects.

Meanwhile, short-term liabilities increased by 14.3% to Rp139.07 trillion in 2017 from Rp121.62 trillion in the previous year. The main contributors to the increase are trade payables, bank loans and global medium-term notes, and customers' security deposits.



## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

### Company's Financial Performance

Sesuai dengan sifat usaha yang padat modal dan periode pengembalian investasi yang berjangka waktu lama, komposisi liabilitas PLN mayoritas adalah liabilitas jangka panjang. Selama tiga tahun terakhir prosentase liabilitas jangka panjang sangat dominan, yakni berada di kisaran 70% dari total liabilitas PLN.

### LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas jangka panjang pada akhir tahun 2017 naik 20,0% menjadi sebesar Rp326,47 triliun dari sebesar Rp272,16 triliun di tahun sebelumnya. Komposisi liabilitas jangka panjang terutama terdiri atas: utang obligasi dan sukuk ijarah sebesar 30,8%, utang bank (bagian jangka panjang) sebesar 35,5%, liabilitas imbalan kerja sebesar 13,3%, penerusan pinjaman sebesar 9,6%, utang sewa pembiayaan sebesar 4,8%, dan beberapa akun lain dengan jumlah masing-masing kurang dari 3,0%.

#### Penerusan Pinjaman

Akun ini merupakan pinjaman luar negeri Pemerintah Republik Indonesia yang tidak diikat jaminan dan diteruskan kepada Perusahaan untuk membiayai proyek-proyek ketenagalistrikan PLN.

Saldo penerusan pinjaman tahun 2017 naik 8,1% dari Rp29,13 triliun di tahun 2016 menjadi sebesar Rp31,49 triliun, karena adanya pencairan pinjaman dan adanya pengaruh pelemahan mata uang rupiah. Sebagian pinjaman penerusan ini diperoleh dalam mata uang asing.

#### Utang Kepada Pemerintah

Pada 20 Juni 2001, PLN dan Pemerintah Republik Indonesia menyetujui restrukturisasi tunggakan angsuran pokok penerusan pinjaman sebesar Rp5,29 triliun sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.S-352/MK.06/2001 menjadi pinjaman berjangka waktu 20 tahun. Pinjaman ini dikenakan bunga 4% per tahun dan tanpa jaminan. Pinjaman dibayar secara angsuran setiap semester sebesar Rp146,90 miliar hingga 30 Juli 2021.

In accordance with the nature of capital-intensive businesses and long-term returns on investment, the majority of PLN liabilities is the long-term liabilities. In the last three years the long-term liabilities is very dominant, in the range of 70% of PLN's total liabilities.

### NON-CURRENT LIABILITIES

At the end of 2017, long-term liabilities increased by 20.0% to Rp326.47 trillion, from Rp272.16 trillion in the previous year. The long-term liabilities consist primarily of 30.8% bonds payable and sukuk ijarah, 35.5% bank loans (long-term), 13.3% employee benefits liabilities, 9.6% two-step loans, 4.8% lease liabilities, and other accounts totaling of less than 3.0%.

#### Two-Steps Loans

This account represents overseas, collateral-free loans of the Government of the Republic of Indonesia, which are passed on to the Company to finance its projects.

In 2017, the balance of two-steps loans increased by 8.1% from Rp29.13 trillion in 2016 to Rp31.49 trillion, due to loan disbursement and the influence of weakening of rupiah currency. Some of these two-steps loans are obtained in foreign currency.

#### Government Loans

On June 20, 2001, PLN and the Government of the Republic of Indonesia agreed upon the restructuring of loan principal repayment arrears amounting to Rp5.29 trillion, in accordance with the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Letter No. S-352/MK.06/2001 to a loan with 20 years term. This loan bears interest at 4% per annum and is unsecured. Loans are payable in semi-annual installments of Rp146.90 billion up to July 30, 2021.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

### Company's Financial Performance

Selain pokok pinjaman tersebut, Perusahaan juga mendapatkan fasilitas pinjaman dari 'Pusat Investasi Pemerintah' sebesar Rp7,50 triliun dengan bunga 5,25% dan jangka waktu 15 tahun. Fasilitas ini telah dialihkan ke PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), perusahaan pembiayaan dengan kepemilikan 100% Pemerintah RI, pada 23 Desember 2015. Tahun 2017 Perusahaan melakukan pembayaran cicilan sebesar Rp750 miliar.

Sebagai hasil dari realisasi pembayaran cicilan-cicilan dimaksud, saldo pinjaman tersebut saat ini adalah sebesar Rp6,31 triliun, turun 13,1% dari sebesar Rp7,26 triliun di tahun sebelumnya.

### Utang Sewa Pembiayaan

Akun ini menunjukkan pencatatan nilai saldo pembelian daya listrik oleh PLN terhadap pembangkit listrik milik swasta (*Independent Power Producer/IPP*) PT Central Java Power ("CJP"), pengelola Tanjung Jati B. Akun ini juga meliputi beberapa kontrak sewa mesin pembangkit pada PLTG Payo Selincah, PLTG Talang Duku dan PLTG Merah Mata.

Sebagai dampak pembayaran kewajiban PLN, saldo akun utang sewa pembiayaan di tahun 2017 mencatatkan penurunan 12,4% menjadi sebesar Rp15,71 triliun dari saldo tahun 2016 yang sebesar Rp17,93 triliun.

### Utang Bank

Saldo akun utang bank PLN jangka panjang di akhir tahun 2017 naik 15,6% dari posisi saldo tahun 2016 sebesar Rp100,36 triliun menjadi sebesar Rp116,02 triliun. Peningkatan saldo ini terutama berasal dari realisasi pinjaman program pembangunan pembangkit reguler diikuti pinjaman untuk mendukung realisasi program percepatan pembangunan pembangkit. Pinjaman Percepatan Pembangunan Pembangkit dilakukan untuk membiayai 85% dari nilai kontrak *Engineering Procurement and Construction* (EPC). Pinjaman ini sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (PP) No.91 Tahun 2007 pengganti dari PP No.86 Tahun 2006, tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara.

In addition to the principal loan, the Company also obtained a loan from 'Pusat Investasi Pemerintah' amounting to Rp7.50 trillion with 5.25% interest and 15 years term. On December 23, 2015, this loan is transferred to PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), a financing company that is owned 100% by the Gol. In 2017, the Company paid the installments amounted to Rp750 billion.

Because of the installment payments, the outstanding balance of this loan amounted to Rp6.31 trillion, decreased by 13.1% from Rp7.26 trillion in the previous year.

### Lease Liabilities

This account represents the value of the purchase of electricity by PLN to Independent Power Producer (IPP), PT Central Java Power ("CJP"), the manager of Tanjung Jati B. This account also includes several power plant lease contracts at Gas Turbine Power Plant Payo Selincah, Gas Turbine Power Plant Talang Duku, and Gas Turbine Power Plant Merah Mata.

As a result of the payment of PLN's obligations, in 2017, the balance of lease liabilities account decreased by 12.4% to Rp15.71 trillion from the balance of 2016, which was Rp17.93 trillion.

### Bank Loans

In 2017, the Company's bank debt position increased by 15.6% from the position in 2016, which was Rp100.36 trillion to Rp116.02 trillion. The increase in the balance is primarily derived by the realization of regular construction program and loans to support the realization of the accelerated power plant development program. The Accelerated Power Plant Development Program loan is conducted to finance 85% of the Engineering Procurement and Construction (EPC) contract. This loan is fully guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia, in accordance with the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia (PP) No. 91 of 2007, which replaced Government Regulation No. 86 of 2006, on the Provision of Government Guarantee for the Acceleration of Coal Power Plant Development.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan Company's Financial Performance

### Utang obligasi dan Sukuk Ijarah

Pada tahun 2017, PLN kembali menerbitkan beberapa seri obligasi berkelanjutan dan Sukuk Ijarah sebagai bagian dari upaya penggalangan dana untuk mendukung pembangunan pembangkit dan infrastruktur kelistrikan seperti jaringan transmisi/distribusi dan gardu induk.

Sebagai dampak realisasi penerbitan obligasi dan sukuk ijarah tersebut, saldo akun terkait di akhir tahun 2017 meningkat 45,9% menjadi sebesar Rp100,44 triliun dari Rp68,82 triliun di akhir tahun 2016.

### Penyisihan Imbalan Kerja

Saldo akun penyisihan untuk manfaat pensiun dan kesejahteraan karyawan pada tahun 2017 kembali naik 6,0% menjadi Rp43,56 triliun dari tahun sebelumnya, sebesar Rp41,1 triliun.

Kenaikan penyisihan imbalan kerja ini disebabkan oleh meningkatnya imbalan pemeliharaan kesehatan dikarenakan Perusahaan dan entitas anak menyediakan program imbalan kesehatan tanpa pendanaan bagi pensiunan dan tanggungannya yang memenuhi persyaratan. Naiknya jumlah tenaga kerja juta menyebabkan meningkatnya saldo penyisihan imbalan kerja.

## LIABILITAS JANGKA PENDEK

Liabilitas Jangka Pendek pada akhir tahun 2017 naik 14,3% menjadi sebesar Rp139,07 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp121,62 triliun. Kontributor utama akun liabilitas jangka pendek ini diantaranya meliputi: total utang usaha sebesar 31,4%, utang bank yang akan jatuh tempo 19,1%, utang jaminan langganan 9,1%, biaya masih harus dibayar 8,3%, sewa pembiayaan sebesar 3,5%, dan beberapa akun lain dengan jumlah masing-masing dibawah 8%.

### Bonds payable and Sukuk ijarah

In 2017, PLN re-issued several series of sustainable bonds and Sukuk Ijarah as part of fundraising efforts to support the construction of power plants and electricity infrastructure, such as transmission/distribution, and substations.

As a result of the issuance of the bonds and sukuk ijarah, the account balance at the end of 2017 increased by 45.9% to Rp100.44 trillion from Rp68.82 trillion at the end of 2016.

### Employee Benefit Provision

In 2017, total provision for pension and employee benefits increased by 6.0% to Rp43.56 trillion, from Rp41.1 trillion in the previous year.

The increase in employee benefits provision was due to increasing healthcare benefit because the Company and subsidiaries provided health program benefits without funding for pensioners and dependents who fulfill requirements. Addition of the number of workforces led to an increase in the balance of employee benefits allowance.

## CURRENT LIABILITIES

Short-term Liabilities at the end of 2017 increased by 14.3% to Rp139.07 trillion from the previous year of Rp121.62 trillion. The contributors to this short-term liabilities account include: 31.4% of trade payables, 19.1% of matured bank loans, 9.1% customers' security deposits, 8.3% of accrued expenses, 3.5% of lease liabilities, and several other accounts with amounts under 8%.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

Company's Financial Performance

### Utang Usaha

Utang usaha pihak berelasi kembali meningkat 44,4% menjadi Rp11,22 triliun dari posisi Rp7,77 triliun di tahun 2016. Peningkatan disebabkan oleh karena naiknya harga rata-rata BBM maupun batubara, selain disebabkan oleh naiknya volume kebutuhan bahan bakar dalam memenuhi pasokan daya. Sementara itu, Utang usaha kepada pihak ketiga di tahun 2017 naik 44,96% menjadi sebesar Rp32,50 triliun dari posisi tahun sebelumnya sebesar Rp22,42 triliun, terutama karena naiknya pembelian beragam barang dan jasa lainnya.

### Utang bank

Bagian dari utang bank yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun mendatang naik tipis 0,6% dari posisi tahun 2016 yang sebesar Rp26,39 triliun menjadi sebesar Rp26,55 triliun, terutama karena akan jatuh temponya beberapa fasilitas pinjaman bank, baik dari bank BUMN maupun dari bank swasta dalam dan luar negeri.

### Biaya Masih Harus Dibayar

Akhir tahun 2017, biaya masih harus dibayar naik 7,9% menjadi sebesar Rp11,48 triliun dari Rp10,64 triliun di tahun 2016, terutama disebabkan oleh adanya pembayaran kewajiban pihak berelasi yang akan jatuh tempo, meliputi: utang bank, utang penerusan pinjaman dan utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non bank ditambah imbalan kerja karyawan jangka pendek dan biaya operasional. Kenaikan biaya masih harus dibayar juga disebabkan oleh peningkatan jumlah kewajiban terhadap pihak ketiga lainnya, yakni: utang obligasi & sukuk ijarah, utang bank, utang sewa pembiayaan, dan utang listrik swasta.

### Uang jaminan langganan

Di tahun 2017, saldo akun ini naik sebesar 4,9% menjadi sebesar Rp12,64 triliun dari Rp12,05 triliun di akhir tahun 2016, sebagai cerminan naiknya jumlah pelanggan baru PLN. Akun ini mencatat uang jaminan langganan yang ditentukan berdasarkan besaran daya dan golongan tarif. Berlakunya ketentuan TTL baru dan naiknya jumlah pelanggan baru, maupun pelanggan yang menambah daya membuat jumlah uang jaminan meningkat. Uang jaminan langganan akan dikembalikan apabila pelanggan berhenti menjadi pelanggan, dengan memperhitungkan rekening listrik belum dibayar.

### Trade Payables

Trade payables to related parties increased by 44.4% to Rp11.22 trillion from Rp7.77 trillion in 2016. The increase is due to the rise in the average price of fuel and coal, in addition to the increase of fuel volume requirements in fulfilling the power supply. Meanwhile, trade payables to third parties in 2017 increased by 44.96% to Rp32.50 trillion from Rp22.42 trillion in the previous year, due to the increase of variety of goods and services purchases.

### Bank loans

The share of the bank debt that will mature in the next one year increased slightly by 0.6% from Rp26.39 trillion in 2016 to Rp26.55 trillion, mainly due to the maturity of some bank loans, both SOEs bank and private banks domestic and abroad.

### Accrued Expenses

At the end of 2017, accrued expenses increased by 7.9% to Rp11.48 trillion from Rp10.64 trillion in 2016. The increase is mainly due to the payment of liabilities to related parties that has matured, including: bank loans, two-step loans, Government loans non-bank Government financial institution loan, and short-term employee benefits and operational charges. The increase in accrued expenses is also caused by the increase in other liabilities to third parties, i.e.: bonds payable & sukuk ijarah, bank loan, lease liabilities, and electricity purchase payable.

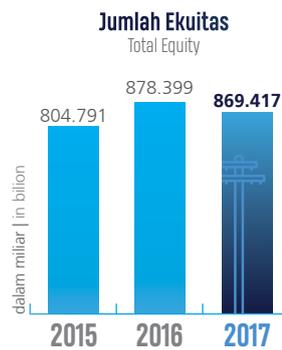
### Customers' security deposits

In 2016, customers' security deposits increased by 4.9% to Rp12.64 trillion from Rp12.05 trillion in 2016, as a reflection of new PLN's customers. This account records customer security deposits based on voltage and tariff categories. The enactment of new electricity tariff provisions and an increase in the number of new customers, and additional power for existing customers, caused the deposit amount to increase. Customer security deposits will be returned if the customers stop subscribing, after calculating unpaid electricity bills.

Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan  
Company's Financial Performance

## EKUITAS

## EQUITY



Ekuitas Perusahaan di tahun 2017 turun 1,02% menjadi sebesar Rp869,42 triliun dari Rp878,40 triliun di tahun 2016. Penurunan terutama disebabkan oleh berkurangnya penghasilan komprehensif lain sebesar 1,7% atau senilai Rp10,70 triliun menjadi sebesar Rp618,46 triliun.

Tahun 2017 juga ditandai dengan terealisirnya tambahan modal disetor dari Pemerintah Indonesia untuk mendukung struktur modal PLN yang semakin kuat, agar mampu meningkatkan leverage Perusahaan dalam mencari tambahan dana guna memastikan realisasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dalam skema 35.000 MW dalam beberapa tahun mendatang.

Dengan tambahan tersebut, maka ekuitas PLN kini terdiri atas modal ditempatkan dan disetor penuh dengan komposisi 12,6% dari total modal senilai Rp109,83 triliun, tambahan modal disetor 2,4% senilai Rp20,87 triliun, 5,6% total saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya senilai Rp48,67 triliun, 8,2% saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp71,09 triliun, serta komponen ekuitas terbesar dengan prosentasi kontribusi sebesar 71,1% adalah Penghasilan Komprehensif lain, senilai Rp618,46 triliun.

In 2017, the Company's equity decreased by 1.02% to Rp869.42 trillion from Rp878.40 trillion in 2016. The decline was primarily due to a reduction in other comprehensive income of 1.7% or equivalent to Rp10.70 trillion, causing the balance to be Rp618.46 trillion.

The year 2017 is also marked by the realization of additional paid-up capital from the Government of Indonesia to support PLN's stronger capital structure in order to increase the Company's leverage in seeking additional funds to realize electricity infrastructure development of the 35,000 MW scheme in the next few years.

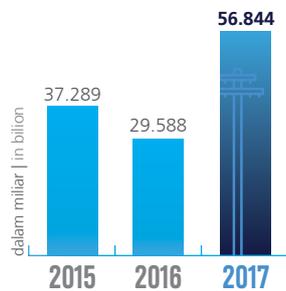
In addition, PLN's equity subscribed and paid-up capital with a composition of 12.6% of total capital, i.e. Rp109.83 trillion, 2.4% additional paid-up capital valued at Rp20.87 trillion, 5.6% of appropriated retained earnings of Rp48.67 trillion, 8.2% unappropriated retained earnings of Rp71.09 trillion, and the largest equity component of 71.1% is other comprehensive income, valued at Rp618.46 trillion.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan Company's Financial Performance

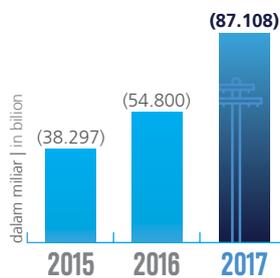
### ARUS KAS

### CASH FLOWS

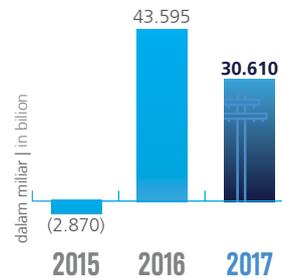
**Arus Kas Bersih yang diperoleh  
dari Aktivitas Operasi**  
Net Cash Flows from Operating Activities



**Arus Kas Bersih yang diperoleh  
dari Aktivitas Investasi**  
Net Cash Flows from Investing Activities



**Arus Kas Bersih yang diperoleh  
dari Aktivitas Pendanaan**  
Net Cash Flows from Financing Activities



PLN mencatatkan kenaikan arus kas pada tahun 2017, sebesar Rp345,11 miliar. Perusahaan memperoleh arus kas masuk bersih dari kegiatan operasi sebesar Rp56,84 triliun, naik dari Rp29,59 triliun di tahun 2016. Arus kas masuk dari kegiatan operasional terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp257,34 triliun, penerimaan subsidi listrik sebesar Rp50,60 triliun, penerimaan bunga sebesar Rp1,07 triliun dan penerimaan restitusi pajak penghasilan sebesar Rp725,36 miliar.

Dana dari hasil operasional tersebut kemudian digunakan untuk membayar jasa dan barang kepada para pemasok sebesar Rp207,56 triliun, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp21,21 triliun, bunga pinjaman Rp17,89 triliun dan pajak penghasilan sebesar Rp6,22 triliun.

Kas yang digunakan untuk kegiatan investasi naik 58,96% dari Rp54,80 triliun menjadi sebesar Rp87,11 triliun, terutama digunakan untuk membiayai perolehan aset tetap dan perolehan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, selain digunakan untuk membayar penerimaan kembali pinjaman kepada pihak berelasi sebesar Rp1,51 miliar. Dari kegiatan investasi ini PLN menerima dana penjualan aset tidak digunakan dalam operasi sebesar Rp45,98 miliar, memperoleh dividen dari entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar Rp241,51 miliar, menerima pembayaran kembali atas pinjaman kepada pihak berelasi-bersih sebesar Rp24,27 miliar, menarik deposito rekening bank dan deposito dibatasi penggunaannya sebesar Rp245,33 miliar serta mendapatkan dana investasi jangka pendek sebesar Rp85,08 miliar.

In 2017, PLN recorded an increase in cash flows of Rp345.11 billion. The Company obtained net cash flows from operating activities of Rp56.84 trillion, increased from Rp29.59 trillion in 2016. Cash flows from operating activities primarily came from cash receipts from customers of Rp257.34 trillion, government subsidy receipts of Rp50.60 trillion, interest receipts of Rp1.07 trillion, and income tax restitution received of Rp725.36 billion.

Funds from the operating activities are then used to pay services and goods to suppliers of Rp207.56 trillion, cash paid to employees of Rp21.11 trillion, interest expenses of Rp17.89 trillion, and income tax of Rp6.22 trillion.

Cash used for investing activities increased by 58.96% from Rp54.80 trillion to Rp87.11 trillion, primarily used to finance the acquisition of property, plant, and equipment, investment in associates and joint ventures, and repayment of loans to related parties amounting to Rp1.51 billion. From this investment activity, PLN receives proceeds from sale of assets not used in operations of Rp45.98 billion, proceeds from dividend of associates and joint ventures of Rp241.51 billion, repayments of loans from related parties – net of Rp24.27 billion, withdrawal of restricted cash in banks and time deposits of Rp245.33 billion, and placement of short-term investments of Rp85.08 billion.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

### Company's Financial Performance

Dari sisi pendanaan, PLN mencatatkan perolehan kas bersih sebesar Rp30,61 triliun, turun 29,8% dari perolehan tahun 2016 yang sebesar Rp43,60 triliun. Perolehan dana berasal dari: perolehan utang bank jangka pendek sebesar Rp37,26 triliun, perolehan pinjaman dari bank jangka panjang sebesar Rp28,71 triliun, perolehan utang obligasi sebesar Rp31,84 triliun dan perolehan utang KIK-EBA sebesar Rp3,69 triliun.

Sementara dari sisi pengeluaran, meliputi diantaranya: membayar dividen sebesar Rp2,15 triliun, membayar dana pinjaman penerusan sebesar Rp2,59 triliun, membayar utang Permerintah & Lembaga Keuangan Pemerintah Non-Bank Rp1,04 triliun, membayar hutang bank jangka pendek sebesar Rp37,80 triliun, membayar utang bank jangka panjang sebesar Rp12,90 triliun dan membayar utang obligasi sebesar Rp9,51 triliun.

PLN juga mencatat pengaruh perubahan kurs mata uang sebesar Rp37,63 miliar, sehingga setelah ditambah Kas dan Setara Kas di awal tahun dan ditambah kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp345,11 miliar tersebut diatas, maka posisi Kas dan Setara Kas di akhir tahun menjadi sebesar Rp42,29 triliun.

In terms of funding, PLN recorded a net cash gain of Rp30.61 trillion, decreased by 29.8% from Rp43.60 trillion in 2016. Funds obtained from: short-term bank loans of Rp37.26 trillion, long-term bank loans of Rp28.71 trillion, acquisition of bonds of Rp31.84 trillion, and acquisition of KIK-EBA debt of Rp3.69 trillion.

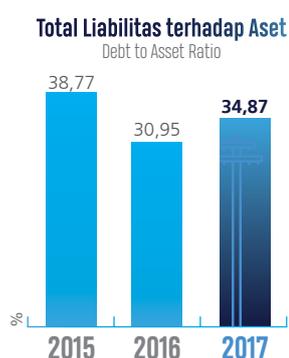
In terms of expenditures, it covers: payment of dividends of Rp2.15 trillion, payment of two-step loans of Rp2.59 trillion, payment of Government & Non-Bank Government Financial Institutions of Rp1.04 trillion, repayment of short-term bank loans of Rp37.80 trillion, repayment of long-term bank loans of Rp12.90 trillion, and repayment of bonds of Rp9.51 trillion.

PLN also recorded the effect of currency exchange rate change of Rp37.63 billion, thus, after adding it to the Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year, taking into account the increase in cash and cash equivalents amounting to Rp345.11 billion, the Cash and Cash Equivalents at the end of the year becomes Rp42.29 trillion.

## KEMAMPUAN MEMBAYAR HUTANG

Kemampuan PLN dalam membayar hutang, dapat dilihat dari tiga rasio keuangan yang relevan, yakni rasio solvabilitas, rasio likuiditas dan tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan. Sesuai dengan tetap terjaganya kinerja keuangan pada tahun 2017, kemampuan PLN dalam membayar hutang dapat disimpulkan sangat baik, seperti tampak pada uraian ringkas berikut.

### Rasio Solvabilitas



## SOLVENCY

PLN's solvency is reflected in three relevant financial ratios: solvency ratio, liquidity ratio, and account receivable collectability ratio. In line with maintaining the financial performance in 2017, PLN's solvency is very sound, as shown in the following brief description.

### Solvency Ratio



## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

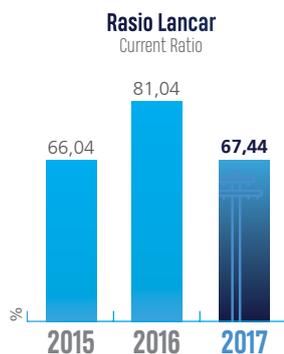
### Company's Financial Performance

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang yang akan jatuh tempo. Rasio ini juga terpengaruh oleh hasil revaluasi aset yang dilakukan PLN yang membuat total aset dan modal perusahaan naik substansial.

Kenaikan jumlah total kewajiban pada tahun 2017 menyebabkan solvabilitas Perusahaan terhadap aset naik menjadi 34,87% dari 30,95% di tahun 2016, sedangkan solvabilitas terhadap ekuitas adalah 53,55%, naik dari posisi 44,83% di tahun 2016. Tetap terjaganya rasio DER salah satu faktornya juga ditopang oleh peningkatan ekuitas PLN dari program penyertaan modal negara (PMN).

Kenaikan solvabilitas tersebut merupakan imbas langsung dari naiknya kewajiban yang dilakukan untuk mendukung belanja modal yang akan berimbas positif pada peningkatan pendapatan dimasa mendatang. Dengan tetap terjaganya rasio solvabilitas, dimasa mendatang PLN masih memiliki kapabilitas besar dalam menggalang dana untuk mendukung pengembangan usaha.

### Rasio Likuiditas



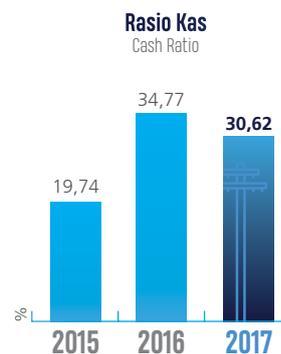
Rasio ini menunjukkan kemampuan PLN dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo, dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar.

These ratios show the Company's ability in fulfilling maturing short-term and long-term liabilities. This ratio is also affected by asset revaluation results conducted by PLN, which caused the Company's total assets and capital to increase substantially.

The increase in total liabilities in 2017 caused the Company's solvency to assets to increase by 34.87% from 30.95% in 2016, while solvency to equity is 53.55%, increased from 44.83% in 2016. The subdued level of DER ratio is also supported by the increase in PLN's equity from state capital participation program (PMN).

The increase in solvency is a direct impact of the increase in liabilities to support capital expenditures that will have a positive impact on future revenue increase. By maintaining the solvency ratio, in the future, PLN still has a great capability in raising funds to support business development.

### Liquidity Ratio



This ratio illustrates PLN's ability to meet its short-term liabilities that is maturing, calculated by dividing the current assets by current liabilities.

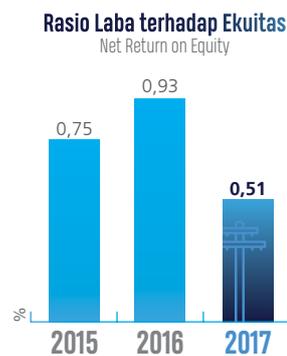
## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

### Company's Financial Performance

Untuk tahun 2017 rasio likuiditas (*current ratio*) PLN adalah sebesar 67,44%, turun dari posisi 81,04% di tahun 2016. Hal ini menunjukkan tetap tingginya kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sementara rasio kas (*cash ratio*) adalah sebesar 30,62% di tahun 2017, turun dari 34,77% di tahun 2016.

In 2017, PLN's liquidity ratio (*current ratio*) is 67.44%, decreased from 81.04% in 2016. This depicts the Company's high ability to meet its short-term liabilities. In 2017, the cash ratio is 30.62%, decreased from 34.77% in 2016.

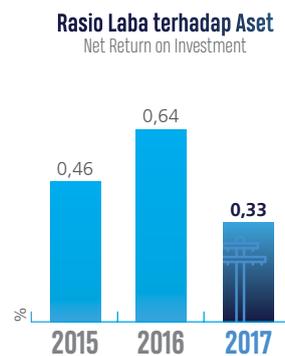
## RASIO-RASIO KEUANGAN



Rasio ini menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Rentabilitas terhadap ekuitas (*Net Return On Equity*) di tahun 2017 menjadi 0,51% turun dari angka 0,93% di tahun 2016. Rentabilitas terhadap aset (*Net Return on Asset*) juga mengalami penurunan, yaitu menjadi 0,33% dari angka tahun 2016, sebesar 0,64%.

Kedua rasio ini menunjukkan PLN tetap mampu mencetak laba di tengah tekanan kenaikan harga energi primer, yakni batubara dan minyak bumi dan pelemahan nilai tukar rupiah di tahun 2017.

## FINANCIAL RATIOS

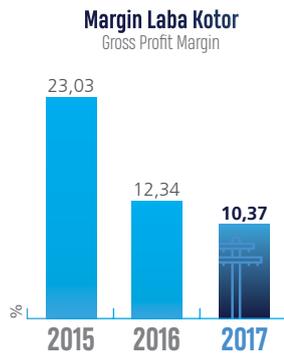


This ratio shows the Company's ability to generate net income by using available resources. In 2017, Net Return On Equity is 0.51%, decreased from 0.93% in 2016. Net Return on Asset also decreased to 0.33% from 0.64% in 2016.

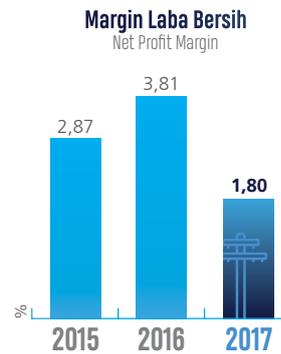
Both these ratios illustrate that PLN is still able to make profits amidst pressure from primary energy price increases, i.e. coal and petroleum, and the weakening of rupiah exchange rate in 2017.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan Company's Financial Performance

### Rasio Profitabilitas



### Profitability Ratio

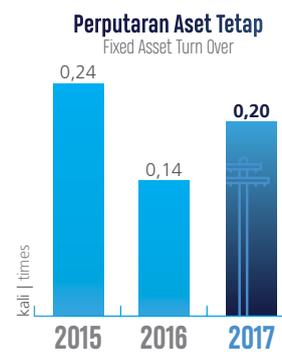
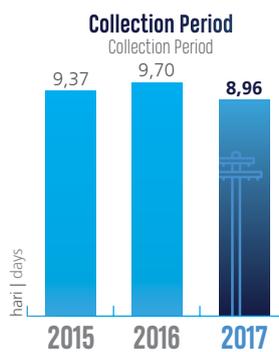
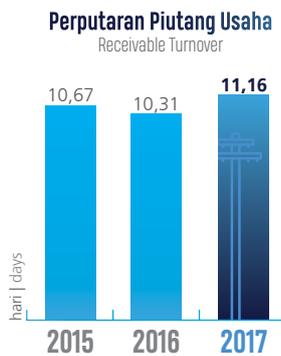


Rasio *profitabilitas* ini menunjukkan PLN tetap mampu mencetak laba di tengah tekanan kenaikan harga energi primer, yakni batubara dan minyak bumi dan pelemahan nilai tukar rupiah di tahun 2017.

Profitability ratio illustrates that PLN is still able to make profits amidst pressure from primary energy price increases, i.e. coal and petroleum, and the weakening of rupiah exchange rate in 2017.

### Rasio Operasional

### Operational Ratio



Adapun posisi piutang PLN tahun 2017 secara keseluruhan adalah senilai Rp23,64 triliun. Dari total piutang usaha tersebut hanya 5,4% yang melebihi masa pembayaran diatas 360 hari. Sisanya adalah terdiri dari piutang usaha dengan masa lewat jatuh tempo kurang dari 360 hari, seperti ditunjukkan tabel berikut.

Overall, in 2017, PLN's receivables is Rp23.64 trillion. Of the total trade receivables, only 5.4% exceeds the payment period above 360 days. The balance consists of accounts receivable with a maturity period of less than 360 days, as shown in the following table.

Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan  
Company's Financial Performance

Piutang Usaha Menurut Umur Tagihan	2015	2016	2017	Perubahan   Changes 2017 (%)	Trade Receivables by Maturity
	Rp Miliar   Rp Billion				
<b>Belum Jatuh Tempo</b>	17.462	19.806	20.608	4%	<b>No</b>
<b>Lewat Jatuh Tempo</b>					<b>Overdue</b>
1 s/d 90 Hari	1.554	1.121	1.125	0%	1-90 Days
91 s/d 360 Hari	740	736	631	-14%	91-360 Days
Lebih dari 360 hari	941	1.074	1.280	19%	More than 360 days
<b>Jumlah</b>	<b>20.697</b>	<b>22.737</b>	<b>23.644</b>	<b>4%</b>	<b>TOTAL</b>

**STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL**

Struktur modal PLN di tahun 2017 terdiri dari 34,87% berupa liabilitas dan 65,13% berupa ekuitas. Liabilitas PLN sebagian besar digunakan untuk membiayai modal investasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, sebagian digunakan untuk memenuhi modal kerja. Sedangkan ekuitas seluruhnya digunakan untuk membiayai modal investasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan risiko usaha.

**Tabel Struktur Modal**

Dalam Rp miliar | In Rp billion

Keterangan Description	2015	% Komposisi   Composition	2016	% Komposisi   Composition	2017	% Komposisi   Composition
Liabilitas   Liability	509.580	38,77%	393.778	30,95%	465.541	34,87%
Ekuitas   Equity	804.791	61,23%	878.400	69,05%	869.417	65,13%
<b>Jumlah Modal   Total</b>	<b>1.314.371</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.272.178</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.334.957</b>	<b>100,00%</b>

**Kebijakan Struktur Modal**

Perusahaan menetapkan kebijakan terkait struktur modal yang meliputi:

1. Struktur modal mencerminkan keseimbangan antara risiko keuangan dan tingkat pengembalian untuk meningkatkan nilai perusahaan.
  - Hal ini dilakukan dengan memperhitungkan penggunaan hutang yang proporsional untuk menjaga kemampuan pembayaran kewajiban keuangan (tingkat bunga) dan pokok pinjaman yang sejalan dengan pengendalian likuiditas perusahaan.
  - Mengoptimalkan rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri.

**CAPITAL STRUCTURE AND CAPITAL STRUCTURE POLICY**

In 2017, PLN's capital structure comprised of 34.87% liabilities and 65.13% equity. PLN's liabilities were mostly used for investment in electricity infrastructure development, such as for plant installations, transmission and distribution network, and partly for working capital. Meanwhile, overall equity was used to finance investment capital of electricity infrastructure development and business risks.

**Table Capital Structure****Capital Structure Policy**

The Company set a capital structure related policy covering:

1. The capital structure reflects a balance between financial risk and returns to increase Company's value.
  - This is done by considering proportional debt use to maintain ability in liability payments for interest and principal debt, in line with the Company's liquidity management.
  - Optimizing economic rentability and owned capital rentability.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

### Company's Financial Performance

- Struktur modal ditinjau dengan melakukan evaluasi hubungan antara *financial leverage*, nilai perusahaan dan biaya modal.
- Struktur modal terdiri atas kombinasi yang optimal atas hutang dan modal sendiri (ekuitas) yang dapat memaksimalkan nilai Perusahaan dan memastikan pelaksanaan program pengembangan usaha.
- Kombinasi struktur modal yang mencakup perbandingan ekuitas terhadap likuiditas ditetapkan melalui pelaksanaan analisa sensitivitas dengan berbagai variasi asumsi inti yang paling mungkin dihadapi oleh PLN.
- Perusahaan telah memilih kebijakan struktur modal dengan menetapkan batas pemenuhan covenant dari para kreditor.
- Capital structure is reviewed by making relationship evaluations between financial leverage, corporate value, and capital cost.
- Capital structure consists of an optimal combination of debt and equity capital, which can maximize the Company's value and ensure business development program implementation.
- The capital structure combination covers the equity to liquidity ratio, as set forth through sensitivity analysis with various core assumptions that could be faced by PLN.
- The Company has selected a capital structure policy by setting covenant fulfillment limits from creditors.

## MODAL KERJA BERSIH

Tahun 2017 modal kerja PLN adalah sebesar negatif Rp45,28 triliun menurun dari modal kerja di tahun 2016 yang sebesar negatif Rp23,05 triliun. Penurunan modal kerja bersih terjadi disebabkan oleh adanya peningkatan aktivitas Perusahaan, seperti pengembangan kapasitas daya listrik dari realisasi pembangunan pembangkit, penambahan pelanggan dan jumlah daya listrik terjual, namun belum dapat dikompensasi secara proporsional oleh realisasi peningkatan TTL.

## IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Guna memenuhi kebutuhan barang modal dalam rangka menyelesaikan proses pembangunan instalasi ketenagalistrikan untuk mencukupi kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat, Perusahaan mengadakan ikatan pengadaan peralatan utama dengan para pemasok utama yang umumnya melibatkan kreditor penyandang dana.

Ikatan pengadaan untuk investasi barang modal tersebut dilakukan pada saat berlangsungnya pembangunan instalasi terkait, umumnya dilakukan sebelum atau sebagai bagian dari tahap *engineering, procurement, and construction* (EPC).

Ikatan material yang dilakukan dimaksud dicatat dan disajikan dalam Laporan Keuangan Audit Konsolidasian, dalam bahasan "Ikatan dan Kontinjensi dan Perolehan

## NET WORKING CAPITAL

In 2017, the Company's working capital was a negative Rp45.28 trillion, decreased compared to the working capital in 2016, of a negative Rp23.05 trillion. The decrease in net working capital occurs due to the Company's increasing activities, such as the development of electric power capacity from the realization of power plant construction, the addition of customers and the electricity sales, which were not compensated proportionately by the realization of electricity tariff increase.

## MATERIAL COMMITMENTS ON CAPITAL INVESTMENTS

The Company has main equipment procurement commitments with key suppliers, generally involving financier creditors to fulfill capital goods needs in the electricity installation development process in order to meet the growing need for electricity.

The commitments for investment on capital goods were conducted during related installation developments, generally carried out prior to or as a part of the engineering, procurement, and construction (EPC) phases.

Material commitments conducted were recorded and presented in the Consolidated Audited Financial Statements and in the "Commitments and Contingencies,

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

### Company's Financial Performance

Barang Modal". Beberapa penjelasan menyangkut ikatan tersebut, meliputi:

- Ikatan material yang dilakukan dimaksud dicatat dan disajikan dalam Laporan Keuangan Audit Konsolidasian, "Ikatan dan Kontinjensi dan Perolehan Barang Modal".
- Tujuan ikatan barang modal adalah terkait dengan ikatan proses pembangunan dan pengadaan Pembangkitan, Transmisi dan Distribusi dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
- Per tanggal 31 Desember 2017, jumlah ikatan perolehan barang modal berdasarkan kontrak terutama sehubungan dengan pengadaan pembangkit, transmisi dan jaringan distribusi adalah sebagai berikut:

**Tabel Ikatan Material Barang Modal**

Tujuan Transaksi Transaction Objectives	Mata Uang Currencies	Jumlah dalam Mata Uang asing Amount in Foreign Currency	Setara Rupiah (Dlm Rp Miliar) Rupiah Equivalent (in Rp Billion)
<b>PROGRAM PERCEPATAN   ACCELERATION PROGRAM</b>			
Kontrak Pembangkitan   Power Plant Contracts	USD	194,219,081	2,631.28
	Rupiah	-	1,041.43
Subjumlah   Subtotal			<b>3,672.71</b>
Kontrak Transmisi   Transmission Contracts	Rupiah		30.15
Subjumlah   Subtotal			<b>30.15</b>
<b>KONTRAK KONSTRUKSI RUTIN   ROUTINE CONSTRUCTION CONTRACTS</b>			
	USD	198,532,652	2,689.72
	EUR	225,607,098	3,648.88
	JPY	30,336,912,086	3,647.06
	KRW	106,613,124,170	1,353.99
	Rupiah		37,612.10
Subjumlah   Subtotal			<b>48,951.74</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>52,654.60</b>

#### Kontrak Pembangkitan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, PLN telah menandatangani 37 kontrak EPC meliputi 10 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa-Bali dan 27 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 2.489 MW di luar Jawa - Bali. Berdasarkan kontrak EPC tersebut, Perusahaan diharuskan membayar uang muka sekitar 15% dari nilai kontrak dan 85% akan didanai melalui fasilitas kredit perbankan.

and Capital Goods Acquisition". Several explanations related to the commitments:

- Material commitments conducted were recorded and presented in the Consolidated Audited Financial Statements, "Commitments and Contingencies, and Capital Goods Acquisition".
- The objective of the capital goods commitments is related to the development process commitment and procurement of Plants, Transmission, and Distribution, in fulfilling electricity demand.
- As of December 31, 2017, total capital goods acquisition commitments based on contract related to procurement of plants, transmission, and distribution networks, are as follows:

**Table Material Commitments for Capital Investments**

#### Power Plant Contracts

As of December 31, 2017, the Company has signed 37 EPC contracts, including 10 power plants with capacity of 7,490 MW in Java-Bali, and 27 power plants with capacity of 2,486 MW outside Java-Bali. Based on the EPC contracts, the Company must pay down payments of 15% of contract value and the rest 85% will be funded through bank credit facilities.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

### Company's Financial Performance

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, PLN telah membayar uang muka sebesar US\$876.217.780 dan Rp4,79 triliun untuk 35 kontrak EPC yang dicatat sebagai pekerjaan dalam pelaksanaan. Uang muka tersebut didanai dari hasil penerbitan Obligasi Terjamin dan penarikan fasilitas kredit program percepatan.

- **Kontrak Transmisi.**

Kontrak transmisi merupakan kontrak untuk peningkatan dan pembangunan transmisi baru dan gardu induk di Jawa dan luar Jawa. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan penarikan fasilitas kredit perbankan.

- **Kontrak Konstruksi Rutin**

Ikatan pengadaan barang modal untuk konstruksi rutin merupakan kontrak yang telah ditandatangani untuk tambahan pembangkit listrik dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan pihak luar melalui pinjaman luar negeri, bantuan dan proyek investasi sebagai bagian dari anggaran belanja negara.

As of December 31, 2017, the Company made a total down payment of US\$876,217,780 and Rp4,79 trillion for 35 EPC contracts, which is recorded as construction in progress. Such down payments are funded by the proceeds of the issued Guaranteed Notes and withdrawal of credit facilities for the fast track program.

- **Transmission Contracts**

A transmission contract is a contract to improve and develop new transmission lines and substations in Java and outside Java. The projects are self-funded and through bank credit facilities withdrawal.

- **Routine Construction Contracts**

A capital goods procurement commitment for routine construction is a contract that has been signed for additional power plants and development of the transmission and distribution network. These projects are self-funded and through external parties, such as overseas loans, aids, and investment project as part of the state budget.

## REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

Investasi ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kapasitas daya untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus tumbuh. Disamping berasal dari penambahan daya masyarakat golongan mampu, pertambahan kebutuhan daya listrik adalah sejalan dengan program peningkatan rasio elektrifikasi secara nasional, yang ditargetkan mencapai angka 97,4% diakhir tahun 2019 mendatang. Untuk mencapai sasaran elektrifikasi rasio tersebut, PLN menargetkan penambahan daya listrik sebesar 7 GW per tahun.

Oleh karena itu, di tahun 2017 PLN terus merealisasikan pembangunan berbagai proyek pembangkit maupun sistim transmisi dan distribusi. Adapun berbagai proyek yang berhasil direalisasikan sepanjang tahun 2017 lalu, mencakup:

- Pembangunan beberapa instalasi pembangkit listrik baru.
- Pembangunan proyek jaringan transmisi T/L 500 kV Jawa – Bali, T/L 150 kV untuk luar Jawa-Bali, proyek gardu induk 150 Kv serta proyek interkoneksi jaringan.

## REALIZATION OF CAPITAL GOODS INVESTMENT

This type of investment is made to increase voltage capacity to fulfill growing electricity needs. In addition to providing additional power for well-off customers, the electricity needs increase is in line with the national electrification ratio increase program and is targeted to achieve 97.4% at the end of 2019. The Company adds 7 GW electricity voltage per year to achieve such electrification ratio.

Therefore, in 2017, the Company continued realizing the development of several plant projects and transmission and distribution system. In 2017, several projects have been realized, i.e.:

- Development of several new electricity plant installations.
- Construction of T/L 500 kV Java-Bali transmission project, T/L 150 kV outside Java-Bali, 150 Kv of substation projects and network interconnection project.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

### Company's Financial Performance

- Pelaksanaan proyek jaringan distribusi tegangan menengah dan rendah 20 Kv serta proyek gardu distribusi dengan tegangan 220V.
- Peningkatan sistem Teknologi Informasi Perusahaan dan sistem pendukung kegiatan operasional maupun administrasi lainnya.
- Implementation of medium and low voltage distribution network project 20 Kv and distribution substation project with voltage 220V.
- Improvement of Corporate Information Technology system and supporting system for operations and other administrations.

Adapun rekapitulasi investasi pembangkitan, transmisi, distribusi dan pengembangan sarana pendukung lain di tahun 2016 - 2017 adalah sebagai berikut.

The investment recapitulation for generation, transmission, distribution, and development of other supporting facilities in 2016 - 2017 are as follows.

Investasi Barang Modal Per Fungsi	Nilai Investasi (Rp Miliar)		Perubahan Changes (%)	Capital Goods Investment by Function
	Investment Value (Rp billion)			
	2017	2016		
Pembangkitan PLTA	1.822,1	2.102,4	-13%	Hydro Power Plant
Pembangkitan PLTU	16.028,6	870,0	1742%	Coal Power Plant
Pembangkitan PLTD	3.130,3	716,4	337%	Diesel Power Plant
Pembangkitan PLTG	7.171,1	12.569,1	-43%	Gas Turbine Power Plant
Pembangkitan PLTP	495,1	225,0	120%	Geothermal Power Plant
Pembangkitan PLTGU	6.500,1	3.279,9	98%	Combined Cycle Power Plant
Pembangkitan PLTS	39,2	3,2	1111%	Solar Power Plant
Sistem Transmisi	29.879,1	19.083,1	57%	Transmission System
Sistem Tele-Informasi Data	750,2	1.282,5	-42%	Data Teleinformation System
Sistem Distribusi	26.341,9	17.393,4	51%	Distribution System
Sistem Penunjang	2.071,9	824,3	151%	Supporting System
<b>Total Jumlah Investasi Barang Modal</b>	<b>94.229,7</b>	<b>58.349,3</b>	<b>61%</b>	<b>Total of Capital Goods Investment</b>

## TRANSAKSI LINDUNG NILAI

Sejak tahun 2015, Perusahaan telah melakukan transaksi lindung nilai terhadap beberapa eksposur ikatan dan kontinjensi dalam mata uang asingnya. Transaksi lindung nilai tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. 09/MBU/2013 tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai Badan Usaha Milik Negara, beserta peraturan teknis pelaksanaan terkait.

Hingga berakhirnya tahun buku 2017, total kewajiban Perusahaan dalam mata uang asing yang telah dilindungi dengan fasilitas lindung nilai mencapai Rp28,95 miliar.

## HEDGING TRANSACTION

Since 2015, the Company has made hedging transactions on several commitment and contingency exposures in foreign currencies. Hedging transactions were made according to Minister of SOEs Regulation No. 09/MBU/2013 on Hedging Transaction General Policy for State-Owned Enterprises, and related implementing technical rules.

As at end of 2017 fiscal year, total Company liabilities in foreign currencies covered by hedging facilities reached Rp28.95 billion.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

Company's Financial Performance

### REALISASI DIBANDINGKAN TARGET

Setiap periode operasional, PLN menyusun rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) sebagai acuan kegiatan usaha pada tahun buku tersebut. RKAP untuk tahun 2017 juga telah disusun dan dipresentasikan dihadapan para pemegang saham. RKAP dimaksud, dibahas dan disahkan melalui rapat umum pemegang saham.

Dalam pelaksanaannya, RKAP 2017 mengalami perubahan dan mendapat persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara melalui surat Nomor: S-578/MBU/10/2017. Perubahan ini, antara lain mempertimbangkan perkembangan kondisi eksternal yang berada diluar kendali Perusahaan, mencakup:

- Kenaikan harga energi primer (BBM, batubara dan gas);
- Perubahan asumsi kurs USD;
- Penundaan migrasi pelanggan 450 dan 900 VA yang tidak terdapat dalam data TNP2K ke golongan pelanggan non subsidi;
- Penundaan *automatic tariff adjustment*;
- Perubahan alokasi subsidi tunai.

Berikut adalah ringkasan capaian beberapa target utama dalam RKAP dengan realisasi operasional – keuangan di tahun 2017.

### COMPARISON OF REALIZATION AND TARGET

Every operational period, PLN prepares the Company's Work and Budget Plan (RKAP) as a business reference for the fiscal year. The 2017 RKAP is compiled and presented to the shareholders. The RKAP is discussed and ratified by General Meeting of Shareholders.

In the implementation, the 2017 RKAP experienced changes and was approved by the Minister of State-Owned Enterprises through Letter No. S-578/MBU/10/2017. This change considers the development of the Company's external conditions that are beyond the Company's control, which include:

- Increase in primary energy prices (fuel, coal, and gas);
- Changes in USD exchange rate;
- Delayed in 450 and 900 VA customer migration that are not included in TNP2K, to non-subsidized customer group;
- Delayed in automatic tariff adjustment;
- Changes in cash subsidy allocation.

The following is the summary of some key targets in the RKAP with operational - finance realization in 2017.

Keterangan	Satuan Unit	RKAP		Realisasi Realization		Pencapaian Achievement (%)	Perubahan Changes (%)	Description
		(a)	2017 (b)	2016 (c)	(b) / (a)	(b) / (c)		
Pendapatan Usaha	Rp miliar Rp billion	259,672.0	255,295.2	222,822.0	98,3	14,6%	Revenues	
Beban Usaha	Rp miliar Rp billion	280,789.7	275,474.1	254,449.8	98,1	8,3%	Operating Expenses	
Rugi Usaha	Rp miliar Rp billion	(21,117.7)	(20,178.9)	(31,627.8)	95,6	-36,2%	Operating Loss	
Subsidi Listrik Pemerintah	Rp miliar Rp billion	52,283.6	45,738.2	58,043.3	87,5	-21,2%	Government's Electricity Subsidy	
Laba Setelah Subsidi	Rp miliar Rp billion	31,165.9	25,559.4	26,415.4	82,0	-3,2%	Income After Subsidy	
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp miliar Rp billion	6,035.5	4,428.1	8,150.4	73,4	-45,7%	Net Profit After Tax	

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

Company's Financial Performance

- Pendapatan Penjualan tenaga listrik tidak mencapai target dikarenakan belum beberapa faktor seperti menurunnya daya beli masyarakat dan isu kenaikan tarif yang menyebabkan terjadinya perilaku hemat listrik kelompok pelanggan rumah tangga, lesunya bisnis ritel pada kelompok bisnis, serta realita beberapa pelanggan industri berhenti menjadi pelanggan dan menurunkan daya.
- Beban Usaha berhasil ditekan, sebagai hasil upaya PLN dalam mengurangi volume penggunaan bahan bakar minyak, selain didukung keberhasilan PLN menekan biaya pemeliharaan tanpa mengurangi kualitas kegiatan pemeliharaan. PLN juga berhasil mengelola pengeluaran untuk sewa pembangkit, sehingga relatif sama dengan tahun sebelumnya
- PLN berhasil mengelola pengeluaran kepegawaian sehingga peningkatannya berada dibawah level kenaikan pendapatan, bahkan kenaikannya berada dibawah laju inflasi.
- Rugi Usaha berhasil mencapai target sebagai wujud keberhasilan PLN dalam mengelola biaya dan beban operasional sebagaimana penjelasan tersebut diatas.
- Subsidi yang turun menjadi Rp45,74 triliun di tahun 2017 dari sebelumnya Rp58,04 triliun di tahun 2016.
- Sales of electricity revenues do not reach the target due to several factors, such as the decrease of people's purchasing power, issue of tariff increase, which cause the electricity-saving behavior of household customer groups, slow retail business in the business groups, and some industrial customers that stop being customers or reduce their power.
- Operating Expenses were successfully pressed, as a result of PLN's efforts to reduce the volume of fuel use, in addition to PLN's success to reduce maintenance costs without reducing the quality of maintenance activities. PLN also successfully managed expenses for the lease expenses to be relatively similar to the previous year
- PLN managed the personnel expenses, thus the increase was below the level of income increase, and even below the rate of inflation.
- Operating Loss successfully achieved the target as a manifestation of PLN's success in managing costs and operating expenses as described above.
- The subsidy lowered to Rp45.74 trillion in 2017 from Rp58.04 trillion in 2016.

### TARGET-TARGET KUANTITATIF PADA TAHUN MENDATANG

PLN telah menyusun serangkaian target kuantitatif yang dituangkan dalam rencana kerja tahun 2018. Penetapan target tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kondisi eksternal maupun internal yang mungkin dihadapi Perusahaan dan berada dalam kendali manajemen.

Beberapa target yang diharapkan dicapai untuk tahun operasional 2018, diantaranya tercakup pada tabel berikut.

### QUANTITATIVE TARGETS AHEAD

PLN has developed a series of quantitative targets set forth in the work plan of 2018. The target setting is conducted by taking into account the various external and internal conditions that may be faced by the Company and are under management control.

Several targets to be achieved in 2018 operational year are included in the following table.

Keterangan	Satuan Unit	Realisasi Realizaiton 2017	Target 2018	Perubahan Changes %	Description
Pendapatan Usaha	Rp miliar   Rp bilion	255.295	292.453	14,6%	Revenues
Beban Usaha	Rp miliar   Rp bilion	275.474	303.247	10,1%	Operating Expenses
Rugi Usaha	Rp miliar   Rp bilion	(20.179)	(10.794)	-46,5%	Operating Loss
Subsidi Listrik Pemerintah	Rp miliar   Rp bilion	45.738	49.043	7,2%	Government's Electricity Subsidy
Laba Setelah Subsidi	Rp miliar   Rp bilion	25.559	38.249	49,6%	Income After Subsidy
Laba Bersih	Rp miliar   Rp bilion	4.428	10.440	135,8%	Net Profit

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

### Company's Financial Performance

### PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Untuk tahun 2017, PLN mencatatkan tiga informasi dan fakta material setelah periode pelaporan, yakni:

- Pada tanggal 23 Februari 2018, PLN telah menerima putusan Direktur Jendral Pajak atas keberatan Perusahaan terhadap SKPKB PPh Badan tahun 2016. Hasil putusan tersebut mengabulkan sebagian keberatan perusahaan sehingga nilai kurang bayar dalam SKPKB Perusahaan yang semula sebesar Rp5,61 triliun menjadi Rp564,04 miliar.
- Pada tanggal 23 Februari 2018, PLN menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PLN tahap III Tahun 2018 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2,54 triliun, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, dan Obligasi Seri E dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.
- Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II PLN tahap III tahun 2018, Perseroan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN tahap III tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp698,50 miliar, terdiri dari seri A, Seri B, Seri C, dan Seri D dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp6,76 miliar per tahun untuk seri A, Rp6,38 miliar per tahun untuk seri B, Rp4,72 miliar per tahun untuk seri C, dan Rp39,83 per tahun untuk Seri D dibayarkan setiap tiga bulan sejak 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah.

### PROSPEK USAHA PLN

Akhir tahun 2017, berkat kerja keras seluruh jajaran PLN dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Rasio Elektrifikasi Indonesia telah mencapai 95,4% (termasuk pelanggan non-PLN). Sekalipun sudah melampaui target awal rasio elektrifikasi tahun 2017 yang sebesar 92,75%, tingkat RE ini masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara di Asia, seperti: Vietnam 96%, serta Thailand, Malaysia dan Singapore, yang telah mencapai 100%, seperti tampak pada Grafik Berikut.

### SUBSEQUENT EVENTS

For 2017, PLN records three material information and facts after the reporting period:

- On February 23, 2018, the Company received the decision from the Director General of Taxes regarding the Company's appeal over the SKPKB of 2016 fiscal year Corporate Income Tax. The decision has partly granted the Company's appeal on the underpayment in the Company's SKPKB which was previously stated as Rp5.62 trillion to become Rp564.04 billion.
- On February 23, 2018, the Company issued PLN Bond Shelf II Tranche III Year 2018 with a total nominal value amounting to Rp2.54 trillion, consisting of Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, and Serie E bonds, with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk as Trustee. The payment of interest is based on a quarterly basis, starting from May 22, 2018, until the maturity date of the bonds.
- Concurrent with the issuance of PLN Bond Shelf II Tranche III Year 2018, the Company also issued PLN Shelf Sukuk Ijarah II Tranche III Year 2018, with a nominal value amounting to Rp698.50 billion, consisting of Serie A, Serie B, Serie C, and Serie D, with PT Bank Tabungan Negara (Persero) as Trustee. The total ijarah fee amounted to Rp6.76 billion per annum for Serie A, Rp6.38 billion per annum for Serie B, Rp4.72 billion per annum for Serie C, and Rp39.83 billion per annum for Serie D, which is paid based on a quarterly basis starting from May 22, 2018, until the maturity date of the Sukuk Ijarah.

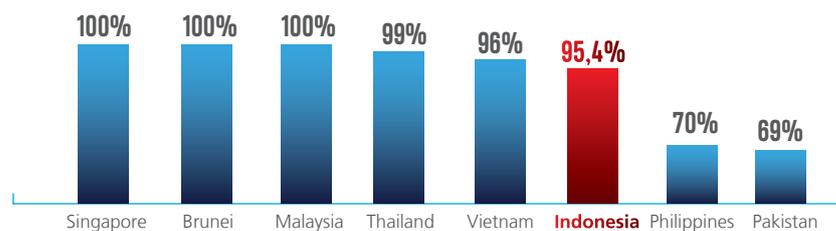
### PLN BUSINESS PROSPECT

By the end of 2017, thanks to the hard work of all PLN's ranks and the support of all stakeholders, Indonesia's Electrification Ratio has reached 95.4% (including non-PLN customers). Even though it has exceeded the initial target of 92.75% electrification ratio in 2017, the level of RE is still lagging, compared to Asian countries, such as: Vietnam 96%, and Thailand, Malaysia, and Singapore that have reached 100%, as shown in the following Graph.

Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan  
Company's Financial Performance

## Rasio Elektrifikasi Beberapa Negara Utama di Asia.

## Electrification Ratios of Several Countries in Asia.

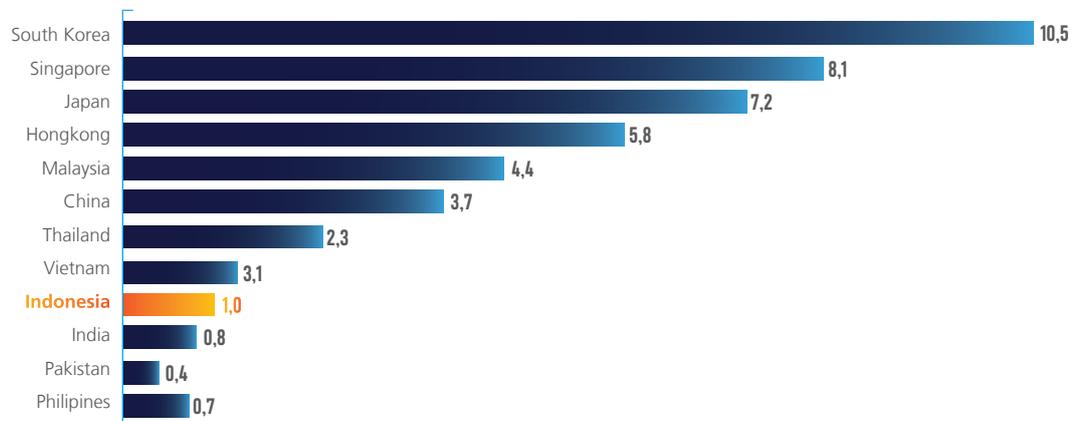


Lebih jauh lagi, dengan Rasio Elektrifikasi 95,4%, konsumsi listrik per Kapita Indonesia, juga termasuk rendah, jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia, baik yang masih termasuk negara berkembang, maupun yang telah termasuk kelompok negara maju, seperti tampak pada grafik berdasarkan data Bank Dunia berikut.

Further, with 94.5% Electrification Ratio, power consumption per capita in Indonesia is still low compared to Asian countries, both developing and developed countries, as shown in the following graph based on the World Bank data.

## Konsumsi Listrik Per Kapita (MWh)

## Electricity Consumption per Capita (MWh)



Sumber | Source : worldbank.org

Sebagai salah satu negara berpenduduk terbesar di dunia, Indonesia diprediksi akan terus berkembang menjadi salah satu negara dengan nilai ekonomi terbesar di dunia. Setelah termasuk sebagai salah satu negara dengan nilai GDP diatas US\$1 triliun pada akhir tahun 2017 lalu, dalam kurun waktu 13 tahun mendatang, Indonesia diprediksikan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi no-5 terbesar di seluruh dunia (PWC).

As one of the most populated countries in the world, Indonesia is projected to grow into one of the countries with the greatest economic value in the world. After achieving above US\$1 trillion of GDP at the end of 2017, in the next 13 years or by 2030 Indonesia is predicted to be the world's fifth largest economies (PWC).

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

### Company's Financial Performance

Dengan berbagai gambaran tersebut, dan mempertimbangkan laju pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi serta kestabilan sosial-politik selama beberapa tahun terakhir, maka kebutuhan tenaga listrik Indonesia akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, setiap pertumbuhan ekonomi 1%, membutuhkan dukungan tambahan daya listrik sebesar 1,5x proyeksi tingkat pertumbuhan. Sehingga dengan memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang disusun oleh Pemerintah dalam APBN, dapat diperkirakan besaran tambahan kebutuhan daya listrik yang harus dipenuhi oleh PLN, seperti uraian berikut.

Penyusunan prospek usaha PLN ini telah memperhatikan sejumlah variabel eksternal yang berpotensi mempengaruhi kinerja usaha Perseroan pada tahun mendatang, baik indikator-indikator ekonomi maupun ekspektasi yang telah disusun oleh Pemerintah sebagai sumber resmi.

Tahun 2018, Pemerintah Indonesia menggunakan asumsi yang moderat dalam menyusun proyeksi pertumbuhan ekonomi. Seperti tampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) tahun 2018, target pertumbuhan adalah 5,4%, sebelumnya, pada APBN 2017 ditargetkan 5,2%.

Untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, patokannya sebesar Rp13.400 per dolar, lebih tinggi dibandingkan tahun APBN 2017 yang Rp13.300 per dolar. Harga minyak mentah dipatok US\$48 per barel, lebih tinggi dibandingkan APBN 2017 yang US\$45 per barel. Sedangkan lifting minyak dan gas bumi tahun 2018 diperkirakan masing-masing mencapai 800 ribu barel per hari dan 1.200 ribu barel setara minyak per hari, inflasi 3,5% dan suku bunga SPN adalah 5,2%

Memperhatikan proyeksi dan sasaran makro dalam APBN tersebut Perseroan telah menyusun serangkaian target kuantitatif yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2018. Beberapa sasaran pokok dimaksud diantaranya adalah:

In light of this, and considering the nation's historical and projected economic growth, and socio-politic stability in the last few years, power demand in Indonesia will certainly grow. As outlined earlier, a 1% economic growth would require 1.5% increase in power generation. Considering the projected economic growth by the Government in the State Budget, it is estimated that there are additional power needs to be met by PLN, as described below.

The formulation of PLN's business prospects has taken into account a number of external variables that could potentially affect the Company's business performance in the coming year, both economic indicators and expectations set by the Government as the official source.

In 2018, the Government of Indonesia uses a moderate assumption in preparing the economic growth projection. As shown in the 2018 State Budget (APBN), the growth target is 5.4%, which previously was 5.2% in 2017 APBN.

The benchmark for rupiah exchange rate against the US dollar is Rp13,400 per dollar, higher than the 2017 State Budget, which was Rp13,300 per dollar. The crude oil price is set at US\$48 per barrel, higher than the 2017 State Budget, which was US\$45 per barrel. Oil and gas lifting in 2018 is estimated to reach 800 thousand barrels per day and 1,200 thousand barrels of oil equivalent per day, 3.5% inflation and 5.2% SPN interest rate.

Taking into account the macro projections and targets in the State Budget, the Company has developed a series of quantitative targets set forth in the Company's Work and Budget Plan (RKAP) 2018. The main objectives are:

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

Company's Financial Performance

Keterangan	Satuan Satuan	Realisasi Realization 2017	Target 2018	Perubahan Changes %	Description
Volume Penjualan Tenaga Listrik	TWh   TWh	223,1	241,6	8,3%	Electricity Sales Volume
Penambahan Pelanggan	Juta Pelanggan   Million Customers	3,8	3,6	-4,4%	New Customers
Penambahan Daya Tersambung	MVA   MVA	7.670,0	8.908,4	16,1%	Addition of Connected Power
Pendapatan Penjualan Tenaga Listrik	Rp miliar   Rp billion	246.587	282.294	14,5%	Electricity Sales Revenue
Laba Usaha Setelah Subsidi	Rp miliar   Rp billion	25.559	38.249	49,6%	Operating Income After Subsidy
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp miliar   Rp billion	4.428	10.440	135,8%	Net Profit After Tax

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, PLN memiliki sejumlah program prioritas. Di antaranya adalah:

1. Menyelesaikan program 35.000 MW termasuk jaringan transmisi dan gardu induk.
2. Menurunkan BPP melalui upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi operasi aset
3. Mengembangkan *Strategic partnership* yang *leverage* nama besar dan pengalaman PLN dalam membangun tambahan kapasitas.
4. Mengantisipasi kebijakan *power wheeling* (sewa jaringan transmisi dan distribusi).
5. Mengembangkan *Mobile Power Plant* untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik jangka pendek.
6. Mengembangkan EBT dan konservasi energi termasuk melalui partisipasi pelanggan.
7. Melaksanakan program *Demand Side Management* yang terintegrasi dengan struktur tarif (insentif-disinsentif).
8. Mengupayakan struktur tarif listrik yang dapat memenuhi *revenue requirement* untuk kegiatan operasi dan investasi.
9. Melanjutkan upaya pemberian subsidi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan
10. Melanjutkan perbaikan kemampuan meminjam (*Debt Capacity*) dan mendapatkan pinjaman dengan biaya yang paling efisien bagi PLN.
11. Mengupayakan agar pelaksanaan *Performance Based Regulatory* (PBR) sesuai dengan best practice.
12. Menurunkan angka SAIDI SAIFI.
13. Menurunkan non *fuel cost*.

PLN has a number of priority programs to achieve the strategic objectives. The programs are to:

1. Complete 35,000 MW project including transmission network and substations.
2. Reduce Cost of Supply by increasing productivity and efficiency of asset operations
3. Develop a Strategic Partnership that leverages PLN names and experiences in building additional capacity.
4. Anticipate the power wheeling policy (leased transmission and distribution network).
5. Develop Mobile Power Plant to overcome the short-term electricity supply.
6. Develop NRE and energy conservation including through customer participation.
7. Carry out Demand Side Management integrated with tariff structure (incentive-disincentive).
8. Work on electricity tariff structure that can meet revenue requirement for operation and investment.
9. Continue the efforts to provide direct subsidies to those who are in need
10. Continue the improvement of Debt Capacity and to obtain borrowings with the most efficient charges for PLN.
11. Strive for Performance-Based Regulatory (PBR) in accordance with best practice.
12. Reduce SAIDI SAIFI figures.
13. Lower non-fuel costs.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

### Company's Financial Performance

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>14. Menurunkan susut jaringan.</li> <li>15. Menciptakan sistem <i>Supply Chain Management</i> yang terintegrasi.</li> <li>16. Melayani dan mencukupi kebutuhan permintaan listrik yang tinggi termasuk melayani daftar tunggu, dan meningkatkan rasio elektrifikasi di propinsi tertinggal sesuai dengan pertumbuhan permintaan (<i>demand</i>), ketersediaan pembangkit, dan kemampuan pendanaan.</li> <li>17. Melanjutkan program listrik Prabayar/listrik pintar.</li> <li>18. Melanjutkan inisiatif pengembangan <i>smart grid</i> dan infrastruktur kendaraan listrik (<i>charging station</i>).</li> <li>19. Mempersiapkan regenerasi pimpinan Perusahaan.</li> <li>20. Menjadikan PLN sebagai perusahaan yang menjadi pilihan utama pasar tenaga kerja.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>14. Curtail network losses.</li> <li>15. Create integrated supply chain management system.</li> <li>16. Serve and fulfill the high demand for electricity including serving the waiting list and increasing electrification ratios in underdeveloped provinces, according to demand growth, plant availability, and financing capabilities.</li> <li>17. Continue the prepaid/smart electricity program.</li> <li>18. Continue smart grid and electric vehicle infrastructure development (charging stations).</li> <li>19. Prepare the regeneration of the Company's leadership.</li> <li>20. Make PLN a company that is the primary choice of the employment market.</li> </ol> |
|--|--|

## DIVIDEN DAN KEBIJAKAN DIVIDEN

### Kebijakan Dividen

PLN memiliki kebijakan pembagian dividen yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun demikian, realisasi pembagian dividen setiap tahun operasional ditetapkan dalam RUPS untuk tahun buku bersangkutan. Adapun kebijakan umum mengenai pembagian dividen laba usaha mencakup:

1. Laba bersih Perseroan dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.
2. Laba bersih tersebut akan dibagikan untuk cadangan, dividen dan lain-lain yang persentasinya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh RUPS.
3. Dividen harus sudah diambil dalam waktu maksimal lima tahun, atau jika tidak diambil akan dimasukkan kedalam dana cadangan, kecuali dividen untuk Pemerintah Republik Indonesia.
4. Perseroan hanya dapat memberikan tantiem kepada Komisaris dan Direksi jika seluruh akumulasi kerugian telah terkompensasikan oleh akumulasi laba tahun-tahun selanjutnya.

## DIVIDEND AND DIVIDEND POLICY

### Dividend Policy

The Company has a dividend policy set out in the Company's Articles of Association. However, the actual distribution of dividends for every operating year is set at the GMS for the said fiscal year. The general policy regarding dividend distribution of business profit includes:

1. The Company's net profit for one fiscal year as stated in the balance sheet and income statement approved by the General Meeting of Shareholders is divided accordingly as determined by the meeting.
2. The net profit will be distributed for reserves, dividends, and others with respective percentages determined each year by the GMS.
3. Dividends must be taken within a maximum of five years, otherwise, it will be put into a reserve fund, except for dividends to the Government of the Republic of Indonesia.
4. The Company can only give a tantiem to the Board of Commissioners and Board of Directors if all accumulated losses have been compensated by the cumulative gains in the following year.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

Company's Financial Performance

### Total Dividen Dibagikan

Pada tahun 2017, PLN membagikan dividen kepada Pemerintah sebesar Rp2.150,84 miliar yang disisihkan dari laba bersih tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2016, PLN membagikan dividen sebesar Rp2.137,75 miliar dari penyesuaian laba bersih tahun 2015. Kebijakan pembagian dividen dan besaran dividen dibagikan tersebut merupakan keputusan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2017.

### Total Dividends Payout

In 2017, PLN shared dividends to the Government amounted to Rp2,150.84 billion, set aside from the 2016 net profit. In 2016, PLN shared dividends to the Government amounted to Rp2,137.75 billion, set aside from the 2015 net profit. The policy of dividends distribution and amount of dividends paid is in the GMS Resolutions to Approve Annual Report and Ratify Financial Statements Fiscal Year 2016, which is conducted on May 26, 2017.

Tahun Year	Jumlah Dividen Amount of Dividends (Rp Miliar) (Rp billion)	Dividen Per Lembar Saham Dividen Per Share (Rp)	Dividen Payout Ratio (%)	Tanggal Pengumuman Pembayaran Date of Payment Announcement	Realisasi Pembayaran Payment Realization (Rp Miliar)   (Rp billion)
2017	2.150,84	19.584	48,57%	6/22/17	Pembayaran dilakukan tiga tahap:   Payments are conducted in three steps: 1. 22 Juni 2017 - Rp717,0 miliar   June 22, 2017 - Rp717.0 billion 2. 25 Juli 2017 - Rp716,92 miliar   July 25, 2017 - Rp716.92 billion 3. 23 Agustus 2017 - Rp716,92 miliar   August 23, 2017 - Rp716.92 billion
2016	2.137,75	38.407	26,23%	7/29/16	Pembayaran dilakukan tiga tahap:   Payments are conducted in three steps: 1. 29 Juli 2016 - Rp712,58   July 29, 2016 - Rp712.58 billion 2. 26 Agust 2016 - Rp712,58   August 26, 2016 - Rp712.58 billion 3. 28 Sept 2016 - Rp712,58   September 28, 2016 - Rp712.58 billion
2015	3.962,40	85,771	65,74%	6/26/15	Pembayaran dilakukan dalam 4 tahap:   Payments are conducted in 4 stages: 1. 26 Juni 2015 - Rp990,60   June 26, 2015 - Rp990.6 billion 2. 22 Juli 2015 - Rp600,00   July 22, 2015 - Rp600 billion 3. 21 Agust 2015 - Rp990,60   August 21, 2015 - Rp990.6 billion 4. 22 Sept 2015 - Rp1.381,20   September 22, 2015 - Rp1,381.20 billion

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

### Company's Financial Performance

## REALISASI PENGGUNAAN DANA OBLIGASI DAN EFEK LAINNYA

Pada Tahun 2017 PLN menerbitkan beberapa seri obligasi lokal dan global serta Sukuk Ijarah untuk membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Total ada 12 seri obligasi lokal dan sukuk ijarah yang diterbitkan, sementara untuk obligasi global ada 2 seri yang diterbitkan. Daftar obligasi yang diterbitkan selama tahun 2017, jumlah dan tanggal penerbitan adalah sebagai berikut.

## USE OF PROCEEDS FROM BONDS AND OTHER SHARES

In 2017, PLN issued several series of local and global bonds and Sukuk Ijarah to finance the construction of electricity infrastructure. There are 12 local bonds and sukuk ijarah issued, and 2 global bonds issued. In 2017, the list of bonds issued, the number, and the date of issuance are as follows.

Tabel Penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah Lokal

Table: Local Bond and Sukuk Ijarah Issuance

No	Nama Obligasi Name of Bonds	Mata Uang Currency	Nominal Nominal	Tanggal Terbit Date of Issuance	Tenor Tenor	Kupon Coupon
1	Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri A   PLN Shelf II Tranche I Serie A	IDR	214,000,000,000	11-Jul-17	5	7.70%
2	Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri B   PLN Shelf II Tranche I Serie B	IDR	169,000,000,000	11-Jul-17	7	8.10%
3	Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri C   PLN Shelf II Tranche I Serie C	IDR	1,217,000,000,000	11-Jul-17	10	8.50%
4	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I SERI A   PLN Shelf Sukuk Ijarah II Tranche I Serie A	IDR	186,000,000,000	11-Jul-17	5	7.70%
5	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I SERI B   PLN Shelf Sukuk Ijarah II Tranche I Serie B	IDR	214,000,000,000	11-Jul-17	10	8.50%
6	Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri A   PLN Bond Shelf II Tranche II Serie A	IDR	451,500,000,000	3-Nov-17	5	7.20%
7	Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri B   PLN Bond Shelf II Tranche II Serie B	IDR	201,000,000,000	3-Nov-17	7	7.50%
8	Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri C   PLN Bond Shelf II Tranche II Serie C	IDR	800,000,000,000	3-Nov-17	10	8.20%
9	Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri D   PLN Bond Shelf II Tranche II Serie D	IDR	1,093,000,000,000	3-Nov-17	15	8.70%
10	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri A   PLN Shelf Sukuk Ijarah II Tranche II Serie A	IDR	83,500,000,000	3-Nov-17	5	7.20%
11	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri B   PLN Shelf Sukuk Ijarah II Tranche II Serie B	IDR	121,000,000,000	3-Nov-17	10	8.20%
12	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri C   PLN Shelf Sukuk Ijarah II Tranche II Serie C	IDR	490,000,000,000	3-Nov-17	15	8.70%
<b>Jumlah Total   Jumlah Total</b>		<b>IDR</b>	<b>5,240,000,000,000</b>			

Tabel Penerbitan Obligasi Global

Table: Global Bond Issuance

Obligasi Global Global Bonds	Mata Uang Currency	Nominal Nominal	Tanggal Terbit Date of Issuance	Tenor Tenor	Kupon Coupon
GMTN 2017 - 10Y	USD	1.500.000.000	15 May 2017	10	4,1250%
GMTN 2017 - 30Y	USD	500.000.000	15 May 2017	30	5,2500%
<b>Jumlah   Total</b>	<b>USD</b>	<b>2.000.000.000</b>			

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan Company's Financial Performance

Seluruh dana penerbitan obligasi/Sukuk Ijarah lokal, serta obligasi global telah digunakan sebagaimana dijelaskan pada Prospektus penerbitannya, yakni untuk membiayai ekspansi infrastruktur ketenagalistrikan.

All local bonds/Sukuk Ijarah funds, and global bonds have been used as described in the Issuing Prospectus, which is to finance the expansion of electricity infrastructure.

### DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI ATAU RESTRUKTURISASI HUTANG/MODAL

PLN tidak melakukan divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi atau restrukturisasi hutang/modal di tahun 2017.

### DIVESTATION, BUSINESS MERGER/ DISSOLUTION, ACQUISITION, OR RESTRUCTURING OF DEBT/CAPITAL

PLN did not perform any divestation, business merger/ dissolution, acquisition, or restructuring of debt/capital in 2017.

### INFORMASI MATERIAL MENGENAI :

- **Ekspansi**

PLN melakukan ekspansi usaha dengan menambah kapasitas daya listrik melalui pembangunan unit pembangkit sendiri, membeli daya listrik dari pembangkit swasta maupun melalui sewa pembangkit. Pembangunan pembangkit dilakukan melalui skema reguler, FTP 1 maupun FTP 2, dan yang terakhir sebagai integrasi dari seluruh program tersebut, Program Pembangkit 35.000 MW. Selain pembangkit, PLN juga membangun jaringan transmisi dan distribusi, termasuk unit-unit gardu induk. Pada kondisi tertentu, PLN juga adakalanya melakukan ekspansi kegiatan usaha terkait ketenagalistrikan dengan mendirikan entitas anak usaha.

Di tahun 2017, PLN telah berhasil membangun pembangkit dengan total kapasitas sebesar 2.104 MW. Untuk transmisi yang berhasil di selesaikan adalah sebesar 4.616 kms dan gardu induk sebesar 16.210 MVA. Realisasi investasi yang dikeluarkan sepanjang tahun 2017 adalah sebesar Rp 94,23 triliun.

- **Perubahan Nama Entitas Anak & Entitas Afiliasi Anak**

1. PT Pengembang Listrik Nasional Geothermal (PLN Geothermal) berganti nama menjadi PT Pengembang Listrik Nasional Gas dan Geothermal (PLN Gas & Geothermal) serta menambah lingkup usahanya di bidang usaha pengelolaan gas beserta infrastrukturnya khususnya yang berkaitan dengan midstream gas.

### MATERIAL INFORMATION REGARDING:

- **Expansion**

PLN is expanding its business by increasing its power capacity through the development of its own power plant, purchasing power from private power plants, or through leasing of power plants. The plant is constructed through regular schemes, FTP 1, FTP 2, and the integration of the entire program, the 35,000 MW Program. In addition to power plants, PLN also builds transmission and distribution networks, including the substations. In certain circumstances, PLN also occasionally expands business activities related to electricity by establishing subsidiary entities.

In 2017, PLN has constructed plants with a total capacity of 2,104 MW. There were also 4,616 km transmission networks and 16,210 MVA substations. Throughout 2017, the investment realization amounted to Rp94.23 trillion.

- **Changes in the Name of the Subsidiaries & Affiliates**

1. PT Pengembang Listrik Nasional Geothermal (PLN Geothermal) changed its name to PT Pengembang Listrik Nasional Gas dan Geothermal (PLN Gas & Geothermal), as it adds the business scope to engage in the gas management and infrastructures, particularly midstream gas.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

### Company's Financial Performance

- PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (TPGP), entitas anak Indonesia Power (IP), berganti nama menjadi PT Indo Tenaga Hijau (ITH) serta menambah lingkup usahanya di bidang perusahaan energi baru dan/ atau terbarukan.

#### • Pendirian Entitas Afiliasi Anak

- PJB dan IP, entitas anak, mendirikan PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLN SC) dengan penyertaan saham masing-masing sebesar Rp76,5 miliar dan Rp73,5 miliar yang merupakan 51% dan 49% kepemilikan saham di PLN SC.
- Pada tahun 2017, PLN Tarakan, entitas anak, melakukan penyertaan saham di PCN sebesar Rp2,5 miliar atau setara 99,96% saham PT Paguntaka Cahaya Nusantara (PCN).

#### • Perubahan Kegiatan Usaha Anak Perusahaan

- Pada tahun 2017, jenis usaha PLN Tarakan, entitas anak, berubah menjadi perusahaan jasa pemeliharaan dan operasi.

#### • Penyertaan Modal Entitas Afiliasi Anak Perusahaan

- Pada tahun 2017, IP, entitas anak, dan PT Ridlatama Bangun Mandiri, pihak nonpengendali, melakukan penambahan penyertaan saham di Indo Ridlatama Power (IRP) masing-masing sebesar Rp22,96 Miliar dan Rp18,33 Miliar. Penambahan penyertaan saham ini mengubah kepemilikan IP di IRP menjadi 90%.
- Pada tahun 2017, IP, entitas anak, menambah penyertaan saham di PT Putra Indo Tenaga (PIT) sebesar Rp278,96 Miliar tanpa mengubah kepemilikan.

#### • Akuisisi Entitas Afiliasi Anak Perusahaan

- Pada tahun 2017, PLN Batubara, entitas anak, melakukan akuisisi 60% saham PT Jambi Prima Coal (JPC) dengan biaya perolehan sebesar Rp521,47 Miliar.

- PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (TPGP), a subsidiary of Indonesia Power (IP), changed its name to PT Indo Tenaga Hijau (ITH) and adds the business scope to engage in the new and/or renewable energy.

#### • Establishment of Affiliates

- PJB and IP, subsidiaries of PLN, established PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLN SC), with equity participation of Rp76.5 Billion and Rp73.5 Billion respectively, or equivalent to 51% and 49% ownership of PLN SC.
- In 2017, PLN Tarakan, a subsidiary, participated in the PCN shares amounted to Rp2.5 billion or equivalent to 99.96% ownership of PT Paguntaka Cahaya Nusantara (PCN).

#### • Changes in Subsidiaries' Business Activities

- In 2017, PLN Tarakan, a subsidiary, changed its business into maintenance and operating service company.

#### • Equity Participation in Affiliates of Subsidiaries

- In 2017, IP, a subsidiary of PLN, and PT Ridlatama Bangun Mandiri, a non-controlling party, added the equity participation in Indonesia Ridlatama Power (IRP) of Rp22.96 Billion and Rp18.33 Billion respectively. The addition of this investment changed the IP ownership of IRP to 90%.
- In 2017, IP, a subsidiary, added the equity participation in PT Putra Indo Tenaga (PIT) of Rp278.96 Billion without changing ownership.

#### • Acquisition of Affiliates/Subsidiaries

- In 2017, PLN Batubara, a subsidiary, acquired a 60% shares in PT Jambi Prima Coal (JPC) at the cost of Rp521.47 billion.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan Company's Financial Performance

- **Restrukturisasi Utang/Modal**

Tidak ada restrukturisasi Utang/Modal pada periode laporan.

- **Debt/Capital Restructuring**

There is no restructuring of Debt/Capital during the reporting period.

### TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Tidak ada transaksi benturan kepentingan selama periode pelaporan.

### TRANSACTION OF CONFLICT OF INTERESTS

There are no transactions of conflict of interest during the reporting period.

### TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI (AFILIASI)

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan dan anak perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang berelasi (hubungan afiliasi). Seluruh transaksi signifikan dengan pihak hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan atau tidak sama dengan pihak ketiga, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.

### TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (AFFILIATES)

In its business activities, the Company and its subsidiaries entered into certain transactions with related parties (affiliated relationships). All significant transactions with related parties, whether performed under the same terms and conditions equal to or not equal to the third parties, are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

#### Sifat Hubungan Berelasi:

1. Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara.
2. Perusahaan dan entitas anak mempunyai pengaruh signifikan atas investasi pada entitas asosiasi.
3. Pengurus Koperasi Karyawan juga merupakan karyawan Perusahaan dan entitas anak.
4. Pendiri dan pengawas Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) merupakan pengurus dan karyawan Perusahaan dan entitas anak.
5. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) merupakan pemegang saham mayoritas PT Tugu Kresna Pratama.
6. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan dan entitas anak.

#### Nature of Relationship:

1. The government of the Republic of Indonesia is the shareholder of the Company and State-Owned Enterprise.
2. Company and the subsidiaries have significant influence on the investment on associated entity.
3. The Employee Cooperative Manager is also an employee of the Company and its subsidiaries.
4. Founder and supervisor of Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) are the management and employees of the Company and its subsidiaries.
5. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) is the major shareholder of PT Tugu Kresna Pratama.
6. The Board of Commissioners and Board of Directors are the key management personnel of the Company and its subsidiaries.

#### Ketentuan Transaksi Berelasi

Dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi tersebut, PLN menerapkan kebijakan, meliputi:

1. Penjualan produk dan jasa kepada pihak berelasi ditetapkan berdasarkan kontrak-kontrak penjualan, yang pada umumnya menggunakan dasar harga pasar yang berlaku ditambah margin tertentu sesuai kesepakatan.

#### Terms of Related Transactions

In conducting transactions with related parties, PLN implements policies, including:

1. Product and service sales with affiliates are assigned based on sales contracts, which commonly use the prevailing market price plus a previously agreed specific margin.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

### Company's Financial Performance

- Pengangkutan bahan bakar maupun sukucadang oleh pihak berelasi ditetapkan berdasarkan kontrak pengangkutan yang disepakati bersama berdasarkan hasil negosiasi dengan memperhatikan unsur-unsur biaya yang ada ditambah dengan margin tertentu.
- Penempatan dana dilakukan berdasarkan kebutuhan dan perjanjian yang saling menguntungkan dan memberikan benefit optimal pada Perseroan.
- Perolehan dana pinjaman dilakukan melalui negosiasi term dan kondisi yang paling optimal bagi kepentingan operasional Perseroan.
- The shipment of fuel and spare parts conducted by affiliates is assigned based on the shipping contract signed and negotiated together in consideration of the costs which may arise, plus a specific margin.
- Funds are allocated in consideration of requirements, mutual agreement, and the Company's optimal benefit.
- Loans are acquired through a negotiation of terms and conditions which will provide optimal benefit to the Company's operational interest.

Daftar para pihak yang memiliki transaksi berelasi dengan PLN terdapat pada catatan 51-Laporan Keuangan Auditan Perseroan.

A list of the parties with related transactions with PLN is contained in Note 51 of the Company's Audited Financial Statements.

Pihak-pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
Pemerintah Republik Indonesia   Government of Republic of Indonesia	Pemegang saham akhir   Ultimate Shareholder	Penerimaan subsidi listrik, penerimaan penerusan pinjaman, dan utang kepada pemerintah   Receipt of electricity subsidy, two step loan and government loan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia   Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas, rekening bank dan deposito yang dibatasi penggunaannya, investasi jangka pendek, dan penerimaan utang bank   Placement of cash and cash equivalents, restricted cash in bank and time deposits, short-term investment, and receipt of bank loans
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia   Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, dan penerimaan utang bank   Placement of restricted cash in bank and time deposit, cash and cash equivalents, short-term investment, and receipt of bank loans
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia   Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, kas dan setara kas, dan penerimaan utang bank   Placement of restricted cash in bank and time deposit, cash and cash equivalents, and receipt of bank loans
PT Bank DKI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia   Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas dan penerimaan utang bank   Placement of cash and cash equivalents and receipt of bank loans
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia   Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas   Placement of cash and cash equivalents
PT Pertamina Geothermal Energy	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia   Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian tenaga listrik   Purchase of electricity
PT Pertamina (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia   Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas   Purchase of fuels and lubricants
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia   Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar   Purchase of fuels

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

Company's Financial Performance

Pihak-pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia   Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar   Purchase of fuels
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia   Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi jasa konstruksi   Construction services transaction
PT Nusantara Regas	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia   Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar   Purchase of fuels
PT Surveyor Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia   Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pelayanan teknik, survei dan pengukuran batubara   Engineering services, survey and coal measurement
PT Sucofindo (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia   Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pelayanan teknik, survei dan pengukuran batubara   Engineering services, survey and coal measurement
PT Djakarta Lloyd (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia   Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi jasa transportasi bahan bakar dan batubara   Fuels and coals transportation services transaction
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia   Control through the Government of the Republic of Indonesia	Asuransi bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi serta kapal milik Perusahaan   Insurance services for Company's buildings, installation and power plant, transmission equipment and vessels
Perum Jasa Tirta	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia   Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian tenaga listrik   Purchase of electricity
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia   Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penerimaan utang dari lembaga keuangan pemerintah nonbank   Receipt of non-bank government financial institution
PT Geo Dipa Energi (Persero)	Entitas asosiasi   Associate	Transaksi pembelian tenaga listrik   Purchase of electricity
PT Tanjung Kasam Power	Entitas asosiasi   Associate	Transaksi pembelian tenaga listrik   Purchase of electricity
PT Dalle Energy Batam	Entitas asosiasi   Associate	Transaksi pembelian tenaga listrik   Purchase of electricity
PT Mitra Energi Batam	Entitas asosiasi   Associate	Transaksi pembelian tenaga listrik   Purchase of electricity
PT Sumber Segara Primadaya	Entitas asosiasi   Associate	Transaksi pembelian tenaga listrik   Purchase of electricity
PT Bajradaya Sentranusa	Ventura bersama   Joint venture	Transaksi pembelian tenaga listrik   Purchase of electricity
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	Ventura bersama   Joint venture	Transaksi pembelian tenaga listrik dan pemberian pinjaman jangka panjang   Purchase of electricity and issuance of long-term loan
PT Bukit Pembangkit Innovative	Ventura bersama   Joint venture	Transaksi pembelian tenaga listrik   Purchase of electricity
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali	Ventura bersama   Joint venture	Transaksi pembelian tenaga listrik   Purchase of electricity
PT Perta Daya Gas	Ventura bersama   Joint venture	Pemberian pinjaman jangka panjang   Issuance of long-term loan
Dana pensiun PLN	Program imbalan pascakerja   Post-employment benefit plan	Pembayaran kontribusi program manfaat pasti   Payment of contribution for defined benefit plan

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

### Company's Financial Performance

Pihak-pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Transportasi Gas Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia   Control Through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi jasa penyaluran gas   Gas distribution services
PT Wijaya Karya Industri Energi	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia   Control Through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi sewa mesin pembangkit   Lease power plant machinery
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia   Control Through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi jasa konstruksi   Construction services

Adapun ringkasan saldo realisasi transaksi berelasi menurut masing-masing jenis transaksi adalah sebagai berikut:

The summary of the related transaction realization balance according to each transaction type is as follows:

Jenis transaksi   Type of transaction	Nilai transaksi (Rp miliar) Transaction value (Rp billion)		Keterangan   Description	Persentasi Percentage (%)	
	2017	2016		2017	2016
Piutang berelasi   Related receivables	242,48	299,61	Persentase terhadap total aset   Percentage to total assets	0,02	0,02
Rekening Bank & Deposito Berjangka yang dibatasi penggunaannya   Restricted Bank Accounts & Time Deposits	204,42	13,43	Persentase terhadap total aset   Percentage to total assets	0,02	0,00
Kas dan Setara Kas   Cash and Cash Equivalents	34.973,46	37.191,00	Persentase terhadap total aset   Percentage to total assets	2,61	2,92
Investasi Jangka Pendek   Short-Term Investment	280,00	367,20	Persentase terhadap total aset   Percentage to total assets	0,02	0,03
Piutang Usaha   Trade Receivables	583,54	568,12	Persentase terhadap total aset   Percentage to total assets	0,04	0,04
Piutang subsidi listrik   Receivables on electricity subsidy	7.588,98	12.446,11	Persentase terhadap total aset   Percentage to total assets	0,57	0,98
<b>Total Terhadap Aset   Total to Assets</b>	<b>43.872,87</b>	<b>50.885,47</b>	<b>Persen terhadap Aset   Percent to Assets</b>	<b>3,28</b>	<b>3,99</b>
Penerusan pinjaman   Two step loan	34.221,49	31.696,09	Persentase terhadap total liabilitas   Percentage to total liabilities	7,35	8,05
Utang kepada Pemerintah dan Lembaga keuangan Pemerintah non Bank   Government loan and Non-bank Government Financial Institution	7.352,97	8.301,60	Persentase terhadap total liabilitas   Percentage to total liabilities	1,58	2,11

Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan  
Company's Financial Performance

Jenis transaksi   Type of transaction	Nilai transaksi (Rp miliar) Transaction value (Rp billion)		Keterangan   Description	Persentasi Percentage (%)	
	2017	2016		2017	2016
Utang Sewa Pembiayaan   Lease Liabilities	239,81	-	Persentase terhadap total liabilitas   Percentage to total liabilities	0,05	0,0
Utang bank   Bank loans	75.158,78	75.050,18	Persentase terhadap total liabilitas   Percentage to total liabilities	16,15	19,06
Utang Pihak Berelasi   Payable to Related Parties	0,79	2,30	Persentase terhadap total liabilitas   Percentage to total liabilities	0,00	0,00
Utang usaha   Account payable	11.215,24	7.772,69	Persentase terhadap total liabilitas   Percentage to total liabilities	2,40	1,96
Biaya masih harus dibayar   Accrued expenses	755,75	822,41	Persentase terhadap total liabilitas   Percentage to total liabilities	0,16	0,22
<b>Total Terhadap Liabilitas   Total to Liabilities</b>	<b>128.944,80</b>	<b>123.645,28</b>	<b>Persen terhadap Liabilitas   Percent to Liabilities</b>	<b>27,69</b>	<b>31,40</b>
<b>Penjualan tenaga listrik - BUMN   Sales of Electricity - SOEs</b>	<b>5.487,61</b>	<b>5.125,59</b>	<b>Persentase terhadap total penjualan tenaga listrik   Percentage to total sales of electricity</b>	<b>2,23</b>	<b>2,39</b>
<b>Subsidi Listrik Pemerintah   Government's Electricity Subsidy</b>	<b>45.738,22</b>	<b>58.043,27</b>	<b>Persentase terhadap total subsidi   Percentage to total subsidy</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Beban bahan bakar dan pelumas   Fuel and lubricants expenses</b>	<b>39.302,44</b>	<b>42.602,25</b>	<b>Persentase terhadap total beban   Percentage to total expenses</b>	<b>33,61</b>	<b>38,90</b>
<b>Pembelian Tenaga Listrik   Purchase of Electricity</b>	<b>11.349,23</b>	<b>6.554,16</b>	<b>Persentase terhadap total beban   Percentage to total expenses</b>	<b>15,68</b>	<b>10,96</b>
<b>Beban pemeliharaan   Maintenance Expenses</b>	<b>235,03</b>	<b>216,56</b>	<b>Persentase terhadap total beban   Percentage to total expenses</b>	<b>1,20</b>	<b>1,02</b>
<b>Beban Usaha lain-lain   Other Operating Expenses</b>	<b>359,53</b>	<b>314,61</b>	<b>Persentase terhadap total beban   Percentage to total expenses</b>	<b>4,67</b>	<b>4,33</b>
<b>Beban Keuangan   Financial Cost</b>	<b>6.669,77</b>	<b>5.072,27</b>	<b>Persentase terhadap total beban   Percentage to total expenses</b>	<b>35,95</b>	<b>27,12</b>

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan Company's Financial Performance

### PERUBAHAN PERATURAN

Beberapa Peraturan Baru yang berpengaruh signifikan terhadap operasional PLN, mencakup diantaranya:

### REGULATORY CHANGES

Some of the New Regulations that significantly impacted PLN's operations include:

Peraturan Perundang-undangan Legislation	Dampak Terhadap PLN   Impact on PLN
<p>Permen ESDM 49/2017 (tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik)</p> <p>Permen ini mencabut Permen ESDM 10/2017.</p> <p>Minister of Energy and Mineral Resources Regulation (ESDM Minister Regulation) No. 49 of 2017 (on the Principles of Power Purchase Agreement)</p> <p>This Regulation revokes the ESDM Minister Regulation 10/2017.</p>	<p>Perubahan Permen ESDM 49/2017 meliputi alokasi risiko, pengalihan hak, dan keadaan kahar (<i>force majeure</i>). Dalam aturan baru ini, ketentuan mengenai risiko yang ditanggung PT PLN (Persero) dan Badan Usaha berupa perubahan kebijakan atau regulasi (<i>government force majeure</i>) dan ketentuan keadaan kahar (<i>force majeure</i>) dihapus.   Amendment to the Minister of ESDM Regulation 49/2017 includes risk allocation, transfer of rights, and force majeure. In this new regulation, the provisions on the risks borne by PT PLN (Persero) and the Business Entity in the form government force majeure and the provisions of force majeure are deleted.</p>
<p>Permen ESDM 45/2017 (tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik)</p> <p>Peraturan ini mencabut Permen ESDM 11/2017</p> <p>ESDM Minister Regulation 45/2017 (on Utilization of Natural Gas for Power Plant)</p> <p>This Regulation revokes the ESDM Minister Regulation 11/2017.</p>	<p>Permen ini menetapkan PLN dapat membeli gas bumi dengan harga paling tinggi sebesar 14,5% <i>Indonesian Crude Price</i> (ICP)/MMBTU untuk <i>plant gate</i>. Sementara itu, harga gas bumi paling tinggi sebesar 8% dari ICP/MMBTU untuk penunjukan langsung mulut sumur dengan efisiensi pembangkit dengan <i>Specific Fuel Consumption</i> (SFC) setara minyak solar 0,25 liter/kWh.   This Permen stipulates that PLN may purchase natural gas at the highest price of 14.5% Indonesian Crude Price (ICP)/MMBTU for plant gate. Meanwhile, the price of natural gas is highest at 8% of ICP/MMBTU for direct appointment of well mouth with generating efficiency of Specific Fuel Consumption (SFC) equivalent to 0.25 liter/kWh diesel oil.</p>
<p>Permen ESDM 50/2017 (tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik).</p> <p>Peraturan ini mencabut Permen ESDM 12/2017</p> <p>ESDM Minister Regulation 50/2017 (on the Utilization of Renewable Energy Resources for the Provision of Electricity).</p> <p>This Regulation revokes the ESDM Minister Regulation 12/2017.</p>	<p>Peraturan ini berdampak pada kemampuan PLN untuk membeli tenaga listrik bersumber energi baru terbarukan, dan mengatur kewajiban PLN untuk mengoperasikan pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) secara terus menerus (must-run).   Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud, wajib mendapat persetujuan harga jual tenaga listrik dari Menteri.   This regulation has an impact on PLN's ability to purchase renewable energy from renewable energy sources, and to regulate PLN's obligation to operate a power plant that utilizes Renewable Energy Resources, with a capacity of up to 10 MW (ten megawatts) continuously (must-run). The purchase of electricity as intended, shall be subject to approval of the electricity selling price from the Minister.</p>

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

Company's Financial Performance

Peraturan Perundang-undangan Legislation	Dampak Terhadap PLN   Impact on PLN
<p>Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 19/2017 (Pemanfaatan Batubara Untuk Pembangkit Listrik Dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (Excess Power).</p> <p>Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan mengenai pemanfaatan Batubara untuk pembangkit listrik dan pembelian kelebihan tenaga listrik (excess power) dari pemegang izin operasi.</p> <p>Minister of Energy and Mineral Resources Regulation 19/2017 (Coal Utilization for Power Plant and Purchase of Excess Power).</p> <p>This Ministerial Regulation regulates provisions on the utilization of Coal for power generation and the purchase of excess power from operating license holders.</p>	<p>Peraturan berdampak pada adanya kepastian jaminan pasokan batubara untuk PLTU mulut tambang, dengan harga sesuai kesepakatan, kepastian PLN dalam melakukan pembelian listrik dari PLTU mulut tambang dengan mekanisme penunjukan langsung   The regulation affects the certainty of coal supply for Coal Power Plant Mine Mouth, at an agreed price, and PLN's certainty in purchasing electricity from Coal Power Plant Mine Mouth by direct appointment mechanism</p>
<p>Peraturan Presiden 14/2017 (tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan).</p> <p>Peraturan ini mengatur tentang kompensasi terhadap pemanfaatan atas tanah infrastruktur lainnya yang dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha, maka perlu ketentuan lebih lanjut mengenai Kompensasi terhadap Pemanfaatan atas Tanah Infrastruktur Lainnya yang Dilintasi Infrastruktur Ketenagalistrikan baik di Atas maupun di Bawah Tanah dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.</p> <p>Presidential Regulation 14/2017 (on Amendment to Presidential Regulation No. 4 of 2016 on Acceleration of Electricity Infrastructure Development).</p> <p>This Regulation regulates the compensation for the utilization of other infrastructure carried out in cooperation with the Central Government, Local Government, and/or enterprises, it is necessary to further stipulate the Compensation of the Utilization of Other Infrastructure Crossing the Electricity Infrastructure, both Above and Under the Ground, in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation.</p>	<p>Peraturan ini memberi dampak kepastian bagi PLN dalam memperhitungkan nilai kompensasi terhadap tanah maupun fasilitas lain yang dilintasi jaringan transmisi/distribusi maupun dijadikan tempat pembangunan pembangkit listrik.   This regulation gives certainty to PLN in calculating the value of compensation to the land and other facilities that are crossed by the transmission/distribution network or used as a place for the construction of power plants.</p>

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan Company's Financial Performance

### PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

#### A. Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.04/2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("POJK No.6")

Perusahaan dan entitas anak mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik, yakni Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("PPA") dan Kontrak Penjualan Energi ("ESC"), dengan Penyedia dan Pengembang Tenaga Listrik Swasta ("IPP"). IPP tersebut merupakan pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, yang dapat diserahkan kepada entitas usaha lain dengan tanggung jawab untuk menghasilkan tenaga listrik guna kepentingan umum.

Sebelum 1 Januari 2016, Perusahaan dan entitas anak menerapkan ISAK 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa ("ISAK 8") dalam mengevaluasi apakah PPA dan ESC dengan IPP mengandung unsur sewa.

Pada tanggal 1 Maret 2017, Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") menerbitkan POJK No.6 yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik. Berdasarkan POJK No.6, transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik diperlakukan sebagai transaksi jual beli, meskipun perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut mengandung substansi selain jual beli. POJK No.6 berlaku secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai sejak 1 Januari 2017 dan mengizinkan perlakuan lebih awal sejak 1 Januari 2016. POJK No.6 berlaku sampai akhir periode tahun buku berakhirnya penugasan untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berdasarkan Peraturan Presiden.

### CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES APPLIED IN THE CURRENT FISCAL YEAR

#### A. Implementation of Financial Services Authority Regulation No. 6/POJK.04/2017 on Accounting Treatment for Transactions Based on Power Purchase Agreements ("POJK No. 6")

The Company and its subsidiaries entered into power purchase agreements, i.e. Power Purchase Agreements ("PPA") and Energy Sales Contracts ("ESC"), with Independent Power Producers ("IPPs"). Those IPPs are holders of Electricity Business License for public use, which may be granted to other business entities with responsibility to generate electricity for public use.

Before January 1, 2016, the Company and its subsidiaries implemented ISFAS 8: Determining Whether an Arrangement Contain a Lease ("ISFAS 8") in evaluating whether PPAs and ESCs with IPPs contain a lease.

On March 1, 2017, Financial Services Authority ("OJK") issued POJK No. 6, which is applicable for listed and public companies. Based on POJK No. 6, transactions based on a power purchase agreement are treated as sale and purchase transactions, even though the power purchase agreements contain substances other than of a sale and purchase. POJK No. 6 applies prospectively for the year beginning on January 1, 2017, and early implementation is allowed for the year beginning on January 1, 2016. POJK No. 6 is valid until the end of the assignment on acceleration of electricity infrastructures development in accordance with Presidential Regulation.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

### Company's Financial Performance

Perusahaan memutuskan untuk menerapkan lebih awal POJK No.6 secara prospektif sejak 1 Januari 2016. Oleh karena itu transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik yang mengandung sewa, mulai 1 Januari 2016 disajikan sebagai pembelian tenaga listrik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pada tanggal 1 Januari 2016 Perusahaan dan entitas anak telah melakukan penyesuaian atas aset dan liabilitas terkait.

Entitas anak yang memiliki transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik, yaitu PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("PLN Batam") dan PT Indonesia Power ("IP"), bukan merupakan emiten atau perusahaan publik sehingga POJK No.6 tidak diterapkan oleh entitas anak tersebut. Untuk tujuan konsolidasi, laporan keuangan PLN Batam dan IP disesuaikan agar kebijakan akuntansi untuk transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik sesuai dengan POJK No.6.

**B. Pada tahun pelaporan 2017, Perseroan telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") baru dan revisi serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017.**

Pengesahan amandemen dan penyesuaian atas PSAK dan ISAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI"), berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017, adalah sebagai berikut:

- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") PSAK 1 (Amandemen): Penyajian Laporan Keuangan, tentang petunjuk untuk materialitas dan penggabungan, penyajian sub total, struktur dari laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi.

The Company decided to early implement POJK No. 6 prospectively beginning on January 1, 2016. Therefore, the electricity sale and purchase transactions based on power purchase agreement, which contains a lease, since January 1, 2016, are presented as purchased electricity in the statement of profit or loss and other comprehensive income when incurred. On January 1, 2016, the Company and its subsidiaries have adjusted the related assets and liabilities.

The subsidiaries that have transactions based on power purchase agreement, i.e. PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("PLN Batam") and PT Indonesia Power ("IP"), are not listed or public companies. Thus, POJK No. 6 is not applied for those subsidiaries. For consolidation purposes, adjustments are made on the financial statements of PLN Batam and IP to bring their accounting policy for transactions based on power purchase agreement in accordance with POJK No. 6.

**B. In the 2017 reporting period, the Company has implemented the New and Revised Statements of Financial Accounting Standard ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standard ("ISFAS"), issued by the Financial Accounting Standard Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI"), which are relevant to the operations, and effective for the year beginning on or after January 1, 2017.**

Ratification of amendments and improvements of SFAS and ISFAS issued by the Financial Accounting Standard Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI"), effective for the year beginning on or after January 1, 2017, are as follows:

- Indonesian Statements of Financial Accounting Standard ("SFAS") SFAS 1 (Amendment): Presentation of Financial Statements regarding the guidance on materiality and aggregation, the presentation of subtotals, the structure of financial statements, and the disclosure of accounting policies.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

### Company's Financial Performance

- PSAK 3 (Amandemen):  
Laporan Keuangan Interim, tentang klarifikasi apa yang dimaksud dengan acuan dalam standar terhadap informasi yang diungkapkan di tempat lain di laporan keuangan interim.
- PSAK 24 (Amandemen):  
Imbalan Kerja, tentang klarifikasi penentuan tingkat diskon untuk imbalan pascakerja, bahwa mata uang yang mendenominasi kewajiban tersebut yang menentukan, bukan negara dimana kewajiban tersebut timbul.
- PSAK 58 (Amandemen):  
Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan, tentang klarifikasi bahwa ketika sebuah aset (atau kelompok lepasan) direklasifikasi dari dimiliki untuk dijual ke dimiliki untuk didistribusikan, atau sebaliknya, tidak merupakan perubahan rencana untuk menjual atau mendistribusikan, dan tidak perlu dicatat seperti tersebut.
- PSAK 60 (Amandemen):  
Instrumen Keuangan: Pengungkapan, tentang apa yang dimaksud dengan keterlibatan berkelanjutan dalam konteks ini.
- ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13 Properti Investasi.
- ISAK 32: Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan.
- SFAS 3 (Amendment):  
Interim Financial Statements, regarding clarification on the reference in the standard to information disclosed elsewhere in the interim financial report.
- SFAS 24 (Amendment):  
Employee Benefits, regarding clarification on when determining the discount rate for post-employment benefit obligations, it is the currency that the liabilities are denominated in that is important, and not the country where they arise.
- SFAS 58 (Amendment):  
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations, regarding clarification on when an asset (or disposal group) is reclassified from 'held-for-sale' to 'held-for-distribution', or vice versa, this does not constitute a change to a plan of sale or distribution, and it does not have to be accounted for as such.
- SFAS 60 (Amendment):  
Financial Instruments: Disclosure, regarding guidance on what is meant by continuing involvement in this context.
- ISFAS 31: Interpretation of SFAS No. 13 Investment Property.
- ISFAS 32: Definition and Hierarchy of Financial Accounting Standards.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior fiscal years.

#### C. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 dan setelahnya.

Amandemen standar dan interpretasi berikut ini efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:

#### C. New and Revised Statements of Financial Accounting Standard ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standard ("ISFAS") effective for the year beginning on or after January 1, 2018, and onwards.

The following amendments and interpretations of standard will be effective for the year beginning on or after January 1, 2018, for which early adoption is permitted:

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

### Company's Financial Performance

- PSAK 2 (Amandemen).  
Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan, yang mensyaratkan entitas untuk menjelaskan perubahan pada kewajibannya untuk arus kas yang telah, atau yang akan di klasifikasi sebagai aktivitas pembiayaan pada laporan arus kas.
- PSAK 13 (Amandemen): Properti Investasi tentang pengalihan properti investasi.
- PSAK 15 (Penyesuaian): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, tentang kepentingan jangka panjang pada entitas asosiasi dan ventura bersama.
- PSAK 16 (Amandemen): Aset Tetap-Agrikultur: Tanaman Produktif, tentang klarifikasi atas aset biologis yang memenuhi definisi dari tanaman produksi dicatat sebagai aset tetap.
- PSAK 46 (Amandemen): Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi, tentang klarifikasi persyaratan untuk mengakui aset pajak tangguhan atas rugi yang belum terealisasi.
- PSAK 53 (Amandemen): Pembayaran Berbasis Saham, tentang klasifikasi dan pengukuran transaksi pembayaran berbasis saham.
- PSAK 67 (Amandemen): Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain, tentang kepentingan di entitas yang dikategorikan sebagai dimiliki untuk dijual kecuali untuk ringkasan informasi keuangan.
- PSAK 69: Agrikultur
- PSAK 111: Akuntansi Wa'd

Interpretasi standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- ISAK 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka.

- SFAS 2 (Amendment):  
Statement of Cash Flows about Disclosure Initiative, which requires entity to explain changes in their liabilities for which cash flows have been, or will be classified as financing activities in the statement of cash flows.

- SFAS 13 (Amendment): Investment Property, regarding transfer of investment property.

- SFAS 15 (Improvement): Investments in Associates and Joint Ventures, regarding long-term interest in associates and joint ventures.

- SFAS 16 (Amendment): Property, Plant, and Equipment-Agriculture: Bearer Plants, regarding clarification on biological assets that meet the definition of bearer plants are accounted for as fixed assets.

- SFAS 46 (Amendment): Income Tax: Recognition on Deferred Tax Assets for Unrealized Losses, regarding clarification on the requirements for recognizing deferred tax assets on unrealized losses.

- SFAS 53 (Amendment): Share-based Payment, regarding classification and measurement of share-based payment transactions.

- SFAS 67 (Amendment): Disclosures of Interest in Other Entities, regarding interests in entities classified as held-for-sale except for summarized financial information.

- SFAS 69: Agriculture

- SFAS 111: Wa'd Accounting

Interpretation to standard effective for periods beginning on or after January 1, 2019, with early application is permitted:

- ISFAS 33, Foreign Currency Transactions and Advance Consideration.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

### Company's Financial Performance

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (Amandemen): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.
- PSAK 62 (Amandemen): Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi
- PSAK 71: Instrumen Keuangan
- PSAK 71 (Amandemen): Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73: Sewa.

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anak masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen standar, dan interpretasi atas standar serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak.

Standards and amendments to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early application is permitted are:

- SFAS 15 (Amendment): Investments in Associates and Joint Ventures, regarding Long-Term Interest in Associates and Joint Ventures.
- SFAS 62 (Amendment): Insurance Contract - Applying SFAS 71: Financial Instruments with SFAS 62: Insurance Contract
- SFAS 71: Financial Instruments
- SFAS 71 (Amendment): Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation
- SFAS 72: Revenue from Contracts with Customers
- SFAS 73: Leases.

As of the authorization date of these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are still evaluating the potential impact of these new standards, amendments, and interpretations of standards to the Company and its subsidiaries' consolidated financial statements.

## INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Perusahaan percaya dan yakin untuk kelangsungan usahanya meskipun di tahun 2017 terdapat berbagai tantangan seperti kenaikan harga energi primer dan pelemahan nilai tukar rupiah. Perusahaan memiliki basis pelanggan yang loyal dan terjadi peningkatan Indeks Kepuasan Pelanggan setiap tahunnya. Pada tahun 2017, IKP PLN adalah sebesar 88,52 dari 88,42 di tahun 2016. Kami terus berupaya untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan dengan menyediakan pasokan listrik yang aman, handal, dan terpercaya dengan tarif yang terjangkau.

## BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

The Company believes and is confident in its business continuity although in 2017 there are various challenges, such as the increase in primary energy prices and the weakening of the rupiah exchange rate. The Company has a loyal customer base and the Customer Satisfaction Index is increasing every year. In 2017, PLN's IKP is 88.52, whereas in 2016, it was 88.42. We strive to maintain customer trust by providing safe, reliable, and trusted power supplies at affordable rates.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

### Company's Financial Performance

Pada tahun 2017, beberapa kondisi makro mempengaruhi kenaikan Biaya Pokok Penyediaan Listrik, seperti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata uang asing, kenaikan harga *Indonesia Crude Price*, serta naiknya rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) sebesar 38,97% yang mendorong kenaikan harga Batubara untuk PLTU milik PLN. Dengan kondisi seperti tersebut Perusahaan seharusnya dapat menaikkan tarif tenaga listrik melalui mekanisme Tariff Adjustment, untuk pelanggan Non-Subsidi. Namun untuk menjaga agar sektor Bisnis dan Industri tetap kompetitif, Perusahaan memutuskan untuk tidak menaikkan tarif tenaga listrik pada golongan pelanggan tersebut.

Di samping tidak membebani masyarakat dengan tidak menaikkan tarif, PLN juga telah membantu Pemerintah Republik Indonesia melakukan penghematan anggaran dengan menurunkan subsidi tenaga listrik selama 5 tahun terakhir. Sebagai perbandingan pada tahun 2012, PLN menerima subsidi tenaga listrik sebesar Rp103,3 Triliun, dan periode yang sama pada tahun 2017 PLN hanya menerima sebesar Rp45,7 Triliun atau turun sebesar 55,8%.

Perusahaan juga tetap melakukan pengelolaan pengelolaan bisnis secara cermat dan terukur sehingga Perusahaan tetap memiliki kemampuan untuk memberikan dividen bagi pemegang saham dan manfaat bagi para stakeholders. Dengan mempertimbangkan potensi risiko bisnis yang ada, perusahaan telah melakukan mitigasinya dengan mengimplementasikan sejumlah program kerja, meliputi:

1. Meningkatkan tingkat kesehatan keuangan perusahaan.
2. Menyelesaikan pembangunan pembangkit program 10.000 MW tahap I dan Tahap II termasuk jaringan transmisi dan gardu induknya.
3. Melanjutkan proses konstruksi pembangunan pembangkit 35.000 MW termasuk transmisi dan gardu induk terkait.
4. Melakukan percepatan proses perizinan dan proses pembebasan lahan untuk pembangunan proyek kelistrikan dengan mengupayakan terbitnya regulasi Pemerintah yang mempermudah eksekusi di lapangan.

In 2017, several macro conditions affected the increase in the Electricity Cost of Supply, i.e. the weakening of the rupiah exchange rate to foreign currencies, the increase of Indonesia Crude Price, and the average increase of Coal Reference Price (HBA) of 38.97%, which increased the price of Coal for PLN's power plant. Under such conditions, the Company has the right to raise electricity tariff through Tariff Adjustment mechanism for Non-Subsidized customers. However, to maintain competitiveness of Business and Industry sectors, the Company decided not to increase the electricity tariffs on those customer group.

In addition to not burdening the people with increase tariffs, PLN has also assisted the Government of the Republic of Indonesia to save the budget by lowering electricity subsidies over the last 5 years. As a comparison, in 2012, PLN received electricity subsidy of Rp103.3 trillion, and in 2017, PLN only received electricity subsidy of Rp45.7 trillion, or a decline of 55.8%.

The Company also conducts the business management carefully and measurably. Therefore, the Company still has the ability to provide dividends for shareholders and benefits for stakeholders. Taking into account potential business risks that exist, the Company has performed its mitigation by implementing various work programs, including:

1. Improving corporate financial health level.
2. Completing plant development of 10,000 MW phase I and phase II programs including transmission network and substations.
3. Starting construction process of 35,000 MW plants, including transmission and related substations.
4. Accelerating permit process and land clearance process for electricity project development by encouraging the issuance of government regulation which eased execution in the field.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

### Company's Financial Performance

5. Mendorong penyelesaian *financial closing* untuk *Independent Power Producer* (IPP) dan penyelesaian konstruksi sesuai jadwal.
  6. Menjaga kecukupan pasokan listrik.
  7. Menjamin ketersediaan energi primer.
  8. Mengoptimalkan bauran energi melalui produksi listrik dari pembangkit berbahan bakar non BBM, meningkatkan kapasitas energi listrik yang dapat ditransfer melalui kabel laut dan mengoperasikan pembangkit *renewable energy* termasuk biofuel dan *solar cell*.
  9. Meningkatkan efisiensi operasi.
  10. Meningkatkan konsolidasi proses bisnis untuk integritas pelayanan dan efisiensi.
  11. Melakukan optimalisasi organisasi dan peningkatan kualitas SDM.
  12. Memperkuat bisnis dan sinergi Anak Perusahaan untuk mendukung pencapaian arah strategis korporat dan proses bisnis perusahaan.
  13. Mendorong kemitraan dalam rangka peningkatan efisiensi proses bisnis.
  14. Meningkatkan citra Perusahaan diantaranya melalui peningkatan GCG berupa perbaikan aspek *risk management* maupun *compliance* Perusahaan, serta meningkatkan fungsi *public relations* agar terjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan *stakeholders*.
5. Pushing for financial closing completion for Independent Power Producers (IPP) and construction completion as scheduled.
  6. Maintaining sufficient electricity supply.
  7. Guaranteeing primary energy availability.
  8. Optimizing fuel mix through electricity production from non-oil based fuel plants, increasing electricity energy capacity which can be transferred through submarine cables and operating renewable energy plants including biofuel and solar cell.
  9. Increasing operating efficiency.
  10. Increasing business process consolidation for service integrity and efficiency.
  11. Optimizing organization and increasing HR quality.
  12. Strengthening business and synergy of Subsidiaries to support achievement of corporate strategic objective and business process.
  13. Encouraging partnership in increasing efficient business process.
  14. Enhancing corporate image through GCG strengthening in form of risk management and compliance improvement and increasing public relations functions to maintain good relations and communications with stakeholders.

### **SANKSI ADMINISTRATIF YANG DIKENAKAN KEPADA PERSEROAN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI, OLEH OTORITAS PASAR MODAL DAN OTORITAS LAINNYA.**

Pada tahun 2017 tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Perseroan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas pasar modal dan otoritas lainnya

### **ADMINISTRATIVE SANCTIONS IMPOSED ON THE COMPANY, THE MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS, BY THE CAPITAL MARKET AUTHORITIES AND OTHER AUTHORITIES.**

In 2017, there is no sanction imposed on the Company, members of Board of Commissioners and Directors, by the capital market authorities and other authorities

Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan  
Company's Financial Performance**INFORMASI KEUANGAN YANG TELAH  
DILAPORKAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN  
YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN JARANG  
TERJADI**

Laporan Keuangan PLN yang diaudit untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 tidak memiliki informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi.

**PENINGKATAN YANG MATERIAL DIKAITKAN  
DENGAN VOLUME PRODUK YANG DIJUAL/ JASA  
BARU**

Volume penjualan listrik PLN di tahun 2017 adalah 223.134 GWh, naik 3,3% dari 216.004 GWh di tahun 2016. Pertambahan volume penjualan listrik didorong oleh pertumbuhan penjualan kelompok pelanggan industri sebesar 6,01% dan kelompok pelanggan bisnis 4,04% karena peningkatan jumlah pelanggan kedua segmen tarif tersebut yang cukup signifikan di tahun 2017, dimana jumlah pelanggan industri tumbuh 10,32% dan bisnis 10,48%. Lebih lanjut, Penjualan pada kedua segmen tarif ini meningkat karena program penjualan yang dilakukan Perusahaan seperti kemudahan mendapat sambung baru, tambahan kapasitas pasokan listrik, layanan premium, serta Program Diskon Tarif Luar Waktu Beban Puncak (LWBP) bagi pelanggan Industri Menengah dan Besar.

Adapun nilai penjualan listrik di tahun 2017 adalah sebesar Rp246,59 triliun, naik 15,2% dari Rp214,14 triliun di tahun sebelumnya. Prosentasi kenaikan pendapatan penjualan tenaga listrik disebabkan juga oleh penerapan kebijakan Pemerintah untuk subsidi tepat sasaran bagi pelanggan rumah tangga tidak mampu 900 VA.

**FINANCIAL INFORMATION THAT HAS BEEN  
REPORTED WHICH IS EXTRAORDINARY IN  
NATURE AND IS UNLIKELY TO HAPPEN**

The PLN's audited Financial Statements for the years ended on December 31, 2017, and 2016, do not have any reported financial information containing extraordinary and rare events.

**MATERIAL IMPROVEMENTS RELATED TO  
VOLUME OF PRODUCTS SALES/NEW SERVICES**

PLN's electricity sales volume in 2017 is 223,134 GWh, increased by 3.3% from 216,004 GWh in 2016. The increase in electricity sales was driven by the growth of 6.01% in industry customer sales and 4.04% in business customers due to the significant increase in the number of tariff segments in 2017, with growth of 10.32% industrial customers and 10.48% business customers. Further, Sales in these two tariff segments increased due to the Company's sales program, such as new installment, additional power supply capacity, premium services, and Outside Peak Hours Discount (LWBP) Program for Medium and Large Industry customers.

The electricity sales in 2017 amounted to Rp246.59 trillion, increased by 15.2% from Rp214.14 trillion in the previous year. The percentage increase in electricity sales revenue is also attributable to the implementation of the Government's policy of targeted subsidies for household customers less than 900 VA.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

### Company's Financial Performance

### PROFITABILITAS

Meskipun peningkatan pendapatan penjualan listrik PLN 2017 dibayangi oleh kenaikan seluruh biaya energi primer utama, Perusahaan berhasil menurunkan rugi usaha sebelum subsidi sebesar Rp11,45 triliun dari rugi usaha sebesar Rp31,63 triliun menjadi Rp20,18 triliun. Dimana, salah satu penyebabnya adalah efisiensi biaya pemeliharaan sebesar Rp 1,7 triliun dari Rp21,23 triliun di tahun 2016 menjadi Rp19,52 triliun di tahun 2017.

Keberhasilan penerapan subsidi tepat sasaran terhadap pelanggan rumah tangga mampu 900 VA telah memberi kontribusi penurunan subsidi listrik dari Pemerintah sebesar Rp12,3 Triliun dari Rp59,04 triliun di tahun 2016 menjadi 45,74 triliun di tahun 2017.

EBITDA yang merupakan salah satu ukuran kinerja operasi terus mengalami pertumbuhan dari Rp55,59 triliun di tahun 2016 naik menjadi Rp56,59 triliun di tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa PLN mampu melakukan efisiensi di tengah kenaikan biaya energi primer dan mampu membiayai sebagian kebutuhan investasi melalui dana internal. Adapun laba bersih Perusahaan di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp4,43 triliun atau 45,6% dibawah laba tahun sebelumnya, sebesar Rp8,15 triliun terutama disebabkan karena kerugian selisih kurs mata uang asing yang mencapai Rp2,94triliun atau lebih rendah sebesar Rp7,13 triliun di banding tahun 2016 yang mengalami keuntungan selisih kurs sebesar RP4,2 triliun.

### PROFITABILITY

Although the increase in PLN's 2017 revenues was overshadowed by an increase in all primary energy costs, the Company succeeded in reducing its operating loss before subsidy by Rp11.45 trillion, from an operating loss of Rp31.63 trillion to Rp20.18 trillion. One of the causes is the maintenance cost efficiency of Rp1.7 trillion, from Rp21.23 trillion in 2016 to Rp19.52 trillion in 2017.

The successful implementation of targeted subsidies for 900 VA household customers has contributed to a decrease in electricity subsidy from the Government of Rp12.3 trillion, from Rp59.04 trillion in 2016 to Rp45.74 trillion in 2017.

EBITDA, which is one of the operation performance indicators also grew from Rp55.83 trillion in 2016 to Rp57.08 trillion in 2017. This shows that PLN is able to make efficiency in the middle of primary energy cost increase and able to finance some of the investment through internal fund. The Company's net profit in 2017 decreased to Rp4.43 trillion or 45.6% compared to the previous year's profit of Rp8.11 trillion. This is mainly due to the foreign currency exchange loss of Rp2.94 trillion, as in 2016 it was Rp7.13 trillion due to a foreign exchange gain of Rp4.2 trillion.

## Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

Company's Financial Performance

### KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

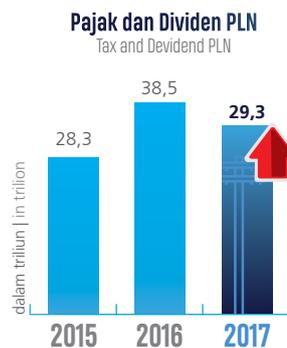
Dengan tetap positifnya kinerja operasional dan keuangan, di tahun 2017 PLN memberi kontribusi keuangan berupa pembayaran pajak dan dividen sebesar Rp29,3 triliun kepada kas negara.

Jika diakumulasikan, selama tiga tahun terakhir (2015-2017), PLN memberi kontribusi fiskal kepada Negara berupa pajak dan dividen sebesar Rp 96,1 triliun .

### CONTRIBUTION TO THE STATE

With positive operational and financial performance, in 2017 PLN provides financial contributions in the form of tax payments and dividends of Rp29.3 trillion to the state treasury.

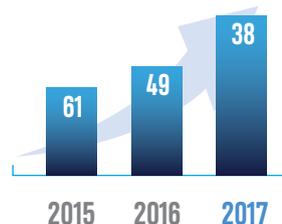
If accumulated, during the last three years (2015-2017), PLN contributes fiscal to the State in the form of taxes and dividends of Rp 96.1 trillion.



Selain dalam bentuk fiskal, PLN juga memberi kontribusi kepada negara melalui kenaikan peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) oleh World Bank yang menunjukkan semakin baiknya iklim investasi di Indonesia. Di tahun 2017, peringkat Kemudahan Mendapatkan Listrik (*Getting Electricity*) mengalami perbaikan posisi menjadi peringkat 38 di tahun 2018. Kontribusi tersebut membuat peringkat Indonesia dalam survey EoDB turut meningkat dari peringkat 91 di tahun 2017 menjadi posisi 72 dari 190 negara di tahun 2018.

In addition to fiscal, PLN also contributed to the country through the increase rank of World Bank's Ease of Doing Business (EoDB), which illustrates better investment climate in Indonesia. In 2017, the Getting Electricity rank increased to rank 38 in 2018. The contribution also encouraged Indonesia's EoDB ranking to increase, from 91st in 2017 to 72th out of 190 countries in 2018.

**Peringkat Kemudahan Mendapatkan Listrik terus Membaik**  
The Ease of Gaining Electricity Keeps Getting Better  
Survei Ease of Doing Business - EoDB oleh WorldBank | Ease of Doing Business Survey - EoDB by WorldBank





# TATA KELOLA PERUSAHAAN

## Corporate Governance

PLN menunjukkan komitmen untuk menerapkan praktik terbaik Tata Kelola Perusahaan dengan melengkapi dan meninjau secara berkala seluruh pranata organisasi yang ada, menjunjung tinggi integritas, menjalankan prinsip-prinsip GCG serta melaksanakan seluruh aturan perundangan, kebijakan dan pedoman kerja sesuai kaidah pengelolaan perusahaan terkini untuk menjamin pertumbuhan usaha yang berkualitas dalam jangka panjang dan menjalin hubungan timbal balik harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan.

PLN demonstrates its commitment to apply the best Corporate Governance practices by completing and periodically reviewing all existing organizational institutions, upholding integrity, implementing GCG principles, and implementing all laws, policies, and work guidance, in accordance with the current corporate governance rules to ensure long-term business growth of high quality and mutual harmonious relationships with all stakeholders.

**331 Implementasi Prinsip Dasar dan Praktek GCG yang Baik**  
Implementation of Basic Principles and Good Corporate Governance

**350 Rapat Umum Pemegang Saham**  
General Meeting of Shareholders

**363 Tata Laksana Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi**  
Working Procedures of the Board of Commissioners and Directors

**365 Dewan Komisaris**  
Board of Commissioners

**407 Organ Pendukung Dewan Komisaris**  
Board of Commissioners' Supporting Organs

**410 Komite Audit**  
Audit Committee

**418 Komite Manajemen Risiko**  
Risk Management Committee

**428 Komite Nominasi dan Remunerasi**  
Nomination and Remuneration Committee

**433 Direksi**  
Board of Directors



- 462 Komite-Komite di Bawah Direksi**  
Committees Reporting Directly to the Board of Directors
- 465 Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris & Direksi**  
Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors Composition
- 469 Sekretaris Perusahaan**  
Corporate Secretary
- 474 Audit Internal**  
Internal Audit
- 485 Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal**  
Internal Control and Monitoring System

- 488 Akuntan Perusahaan**  
Company's Accounting Firm
- 490 Manajemen Risiko**  
Risk Management
- 509 Tata Kelola Teknologi Informasi**  
Information Technology Governance
- 523 Akses Informasi dan Data Perusahaan**  
Access to the Company's Information and Data
- 525 Pengadaan Barang & Jasa**  
Procurement of Goods and Services

- 529 Permasalahan Hukum yang Melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi**  
Legal Issues Facing the Board of Commissioners and Board of Directors
- 530 Sanksi Administratif oleh Regulator**  
Administrative Sanctions Imposed by Regulator
- 532 Standar Etika Perusahaan**  
Company's Code of Conduct
- 536 Whistle Blowing System**

# Tata Kelola Perusahaan

## Corporate Governance

### PERNYATAAN TATA KELOLA

Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan mekanisme atau prinsip-prinsip yang mengatur dan mendasari hubungan antara semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang diwujudkan dalam suatu sistem pengendalian perusahaan yang dapat diterima dan berdasarkan peraturan yang berlaku guna menciptakan nilai dan tujuan Perusahaan. Oleh karena itu, PLN bertekad terus menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan, yakni tumbuh berkelanjutan dan memberi benefit optimal kepada seluruh pemangku kepentingan. Hal tersebut dilandasi oleh keyakinan seluruh elemen perusahaan dari Top Manajemen hingga pelaksana, bahwa penerapan *best practices* GCG akan meningkatkan kepercayaan sekaligus nilai perusahaan secara berkelanjutan.

### GOVERNANCE STATEMENT

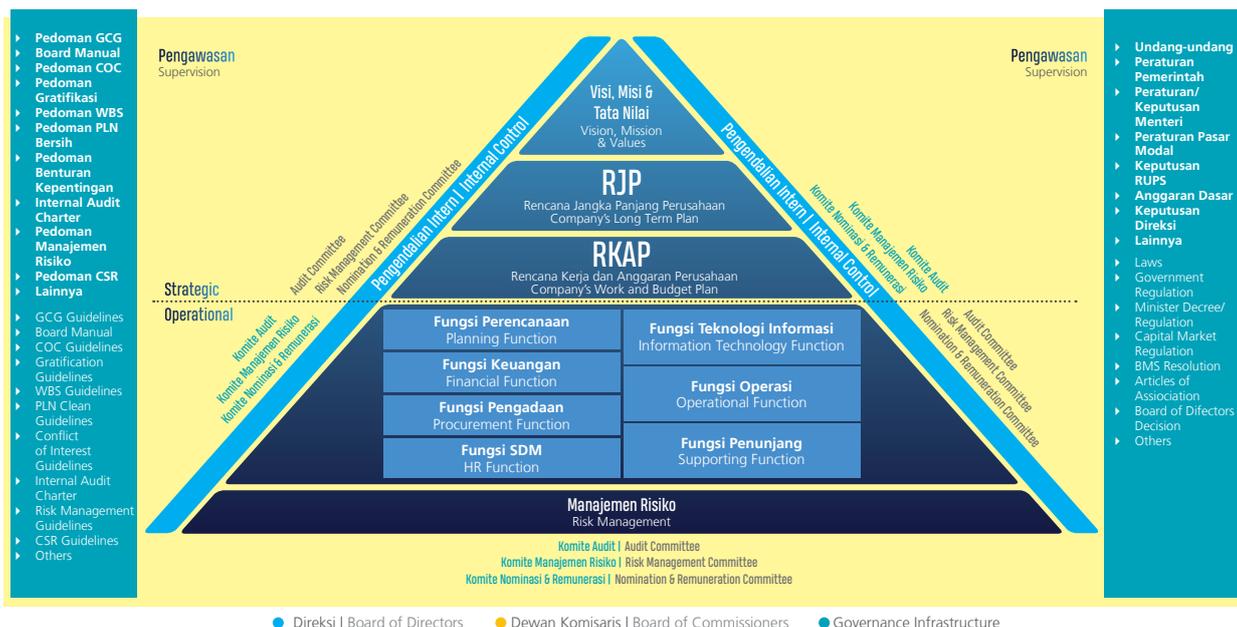
Good Corporate Governance (GCG) is a mechanism or principles that organizes and regulates the relationship between all parties concerned with the Company. The GCG is embodied in an acceptable corporate control system and under applicable regulations in order to create the Company's values and objectives. Therefore, PLN is committed to continuously implementing Good Corporate Governance to support the achievement of corporate objectives, i.e. sustainable growth and optimum benefit to all stakeholders. It is the basis for all Company's elements, from the Top Management to executors, to believe that the implementation of GCG best practices will increase the Company's trust and value in a sustainable way.

### MODEL TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perusahaan telah memiliki model pelaksanaan Tata Kelola dimana memperlihatkan peran strategic dan operasional dari Perusahaan.

### CORPORATE GOVERNANCE MODEL

The Company has a model of Corporate Governance implementation, which shows the Company's strategic and operational role.



Tata Kelola Perusahaan  
Corporate Governance**TUJUAN PENERAPAN**

Penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten diyakini akan meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG dengan target tercapainya tujuan dari penerapan GCG bagi PLN yaitu :

**IMPLEMENTATION OBJECTIVE**

The consistent implementation of GCG principles is believed to improve the quality of GCG implementation, with the target of achieving the GCG objectives for PLN, i.e.:

 <p><b>Memaksimalkan nilai Perusahaan dengan dilandasi prinsip GCG agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional.</b> Maximizing the value of PLN based on the GCG principles in order to help the company to be competitive, both nationally and internationally</p>	 <p><b>Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ.</b> Encouraging professional, transparent, and efficient Company's management, empowering all functions, and improving the independence of all Organs</p>	 <p><b>Mendorong Perusahaan agar senantiasa patuh terhadap Peraturan dengan dilandasi nilai moral yang tinggi serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan.</b> Encouraging the Company to Comply with the Regulations, based on high moral values and in awareness of the social responsibility and environmental sustainability</p>
 <p><b>Meningkatkan kontribusi PT PLN (Persero) dalam perekonomian nasional</b> Increasing PT PLN (Persero)'s contribution to the national economy</p>	 <p><b>Meningkatkan iklim investasi nasional</b> Improving the national investment climate</p>	

PLN berupaya memastikan tercapainya tujuan tersebut, dengan senantiasa menerapkan perilaku yang berdasarkan GCG dan melakukan langkah-langkah perbaikan secara berkesinambungan, baik dari sisi komitmen berupa kebijakan maupun dari sisi proses dan output. Sebagai upaya dalam mengawal tercapainya tujuan tersebut, Perusahaan secara konsisten melakukan penilaian kualitas penerapan praktik GCG yang baik setiap tahunnya.

PLN strives to ensure the achievement of the objectives, by always implementing GCG-based behavior and performing continuous improvement measures, both in terms of policy commitments and process and output sides. As an effort to guard the achievement of these objectives, the Company consistently assesses the quality of GCG practices annually.

**KOMITMEN PENERAPAN GCG**

Seluruh jajaran PLN, mulai dari jajaran Direksi, Manajemen Atas, Manajemen Menengah, Manajemen Dasar hingga pelaksana, memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan seluruh aturan dan kebijakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen implementasi praktik tata kelola perusahaan yang baik didasarkan pada keputusan dan penetapan kebijakan operasional yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kaidah-kaidah pengelolaan perusahaan terbaik.

**GCG IMPLEMENTATION COMMITMENT**

The entire Company, starting from the Board of Directors, Top Management, Middle Management, Basic Management, to staff level, have high commitment to follow all rules and policies as part of the effort to implement Good Corporate Governance. Commitment to the Good Corporate Governance implementation is based on the Decision and establishment of operational policies in accordance with prevailing laws and regulations, and the guidelines of best GCG management.

## Tata Kelola Perusahaan

### Corporate Governance

Direksi dan Dewan Komisaris juga senantiasa menjadi pelopor atas pelaksanaan GCG di Perusahaan, dimana setiap tahunnya Direksi dan Dewan Komisaris menandatangani pakta integritas sebagai komitmen untuk tunduk, taat dan konsisten melaksanakan seluruh aturan yang berlaku dalam menjalankan Perusahaan sesuai dengan Kaidah GCG. Sebagai bentuk komitmen penerapan GCG, Perusahaan juga telah memutakhirkan aturan dan kebijakan yang selama ini menjadi Pedoman dalam pelaksanaan perilaku GCG di Perusahaan, antara lain :

The Board of Directors and the Board of Commissioners pioneered the GCG implementation in the Company. Every year, the Directors and the Board of Commissioners sign integrity pact as a commitment to submit, obey, and consistently adhere to all major regulations and policies outlined in the Company, in line with the GCG principles. As a commitment to the GCG implementation, the Company has also updated the rules and policies that have been the Guidelines for the GCG implementation in the Company, such as:



### MILESTONE PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan GCG telah menjadi komitmen Perusahaan sebagaimana milestone Tata Kelola Perusahaan, dimana Perusahaan berupaya di tahun 2019, perilaku GCG dapat menjadi Budaya dalam pengelolaan Perusahaan.

### MILESTONE OF THE CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The GCG implementation has become the Company's commitment as the milestone of Corporate Governance, in which the Company strives the GCG behavior shall be a Culture in the Company's management by 2019.

Tata Kelola Perusahaan  
Corporate Governance

Commitment	System	Culture
Corporate Governance Commitment	Good Governed Company	Good Corporate Citizen
2002 ▶ 2003 ▶ 2005	2009 ▶ 2010 ▶ 2012 ▶ 2013 ▶ 2014 ▶ 2015 ▶ 2016 ▶ 2017 ▶ 2019	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pengukuran/Analisis Gap Implementasi GCG</li> <li>▶ GCG Implementation Measurement/Gap Analysis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Peluncuran Board Manual</li> <li>▶ Pembentukan Komite GCG Dekom</li> <li>▶ Pembentukan Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan</li> <li>▶ GCG sebagai Indikator Kinerja Perusahaan</li> <li>▶ Board Manual Dissemination</li> <li>▶ Establishment of GCG Committee of BOC</li> <li>▶ Establishment of Risk Management and Compliance Division</li> <li>▶ GCG as the Company's Performance Indicators</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Deklarasi Komitmen GCG</li> <li>▶ Peluncuran Pedoman GCG</li> <li>▶ GCG Commitment Declaration</li> <li>▶ GCG Guidelines Dissemination</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Peluncuran Buku Saku Pedoman (COC)</li> <li>▶ Code of Conduct Pocket Book Launching</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Peluncuran Pedoman Perilaku (COC)</li> <li>▶ Peluncuran <i>Internal Audit Charter</i></li> <li>▶ Pedoman Implementasi CSR</li> <li>▶ Code of Conduct Guidelines Dissemination</li> <li>▶ Internal Audit Charter Dissemination</li> <li>▶ CSR Implementation Guidelines</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Peluncuran Pedoman Gratifikasi</li> <li>▶ Peluncuran Kebijakan WBS</li> <li>▶ Pemutakhiran Pedoman Pengadaan Barang &amp; Jasa</li> <li>▶ Gratification Guidelines Dissemination</li> <li>▶ WBS Policy Dissemination</li> <li>▶ Updating of Goods &amp; Services Procurement Guidelines</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kerjasama dengan TII terkait program PLN berintegritas</li> <li>▶ Pengendalian internal berbasis COSO-ICoFR</li> <li>▶ Cooperation with TII on PLN-Integrity program</li> <li>▶ Internal control of COSO-IcoFR basis</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Peluncuran Program PLN Bersih (Gratifikasi, LKHN, <i>Complaint Handling System</i>)</li> <li>▶ Pembentukan <i>Change Agent</i></li> <li>▶ PLN Clean Program Launching (Gratification, State Assets Management Report, Complaint Handling System)</li> <li>▶ Change Agent Establishment</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Penguatan Struktur CSR</li> <li>▶ CSR Structure Strengthening</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pemutakhiran Pedoman GCG dan <i>Board Manual</i></li> <li>▶ Pemutakhiran kebijakan <i>Whistle Blower System</i></li> <li>▶ Updating the GCG Guidelines and Board Manual</li> <li>▶ Updating the Whistleblowing System policy</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pemutakhiran <i>Internal Audit Charter</i></li> <li>▶ Pemutakhiran <i>Code of Ethic</i> dan <i>Code of Conduct</i></li> <li>▶ Pemutakhiran Pedoman Gratifikasi dan LHKPN</li> <li>▶ Updating the Internal Audit Charter</li> <li>▶ Updating Code of Ethic and Code of Conduct</li> <li>▶ Updating Gratification and State Assets Management Report</li> </ul>	

## KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pedoman GCG telah menjadi pegangan bagi pelaksanaan tata kelola maupun landasan setiap kebijakan pengelolaan operasional perusahaan, serta merupakan penjabaran dari 12 Prinsip Praktis implementasi GCG di lingkungan PLN, yaitu:

## CORPORATE GOVERNANCE POLICY

The GCG handbook has become the guidelines for the implementation of good corporate governance and the policy cornerstone of any Company's operational management, as well as an elaboration of the 12 Principles of practical GCG Implementation in PLN, i.e.:

## Tata Kelola Perusahaan

### Corporate Governance



Implementasi GCG di PLN didukung oleh perangkat yang lengkap yaitu dengan memiliki dan memberlakukan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang berisi panduan, batasan dan nilai-nilai yang mengatur segala kebiasaan dan tata pergaulan profesional di lingkungan PLN.

PLN telah memiliki *Board Manual*, yakni Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris yang berisi panduan bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang menjelaskan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten sehingga menjadi acuan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi Perusahaan. Juga dilengkapi dengan *Charter* masing-masing Organ utama dan Organ pendukung perusahaan sebagai pedoman dalam menjalankan peran wewenang dan tanggung jawabnya.

Tujuan dari penyusunan dan pemberlakuan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris adalah:

1. Memperjelas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta memperjelas hubungan kerja di dalam maupun di antara kedua organ perusahaan tersebut;

GCG implementation in PLN is equipped with complete devices, i.e. by having and imposing the Code of Conduct, which contains guidelines, limits, and values that govern all practices and procedures in interaction among professionals within the PLN environment.

PLN has a Board Manual, which is a Work Guidelines for the Board of Directors and the Board of Commissioners that contains the activities in a structured, systematic, and easily understood manner and can be implemented consistently, thereby it becomes a reference for the Board of Directors and the Board of Commissioners in carrying out their respective duties to achieve the Company's vision and mission. There is also a Charter for each of the Company's main and supporting Organs that serves as a guideline when fulfilling its authority and responsibilities.

The purpose of the preparation and application of the Board Manual, is as follows:

1. Clarify the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as the working relationships within and between them;

Tata Kelola Perusahaan  
Corporate Governance

2. Mempermudah organ-organ di bawah Dewan Komisaris dan Direksi untuk memahami tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, maupun hubungan tugas keduanya.

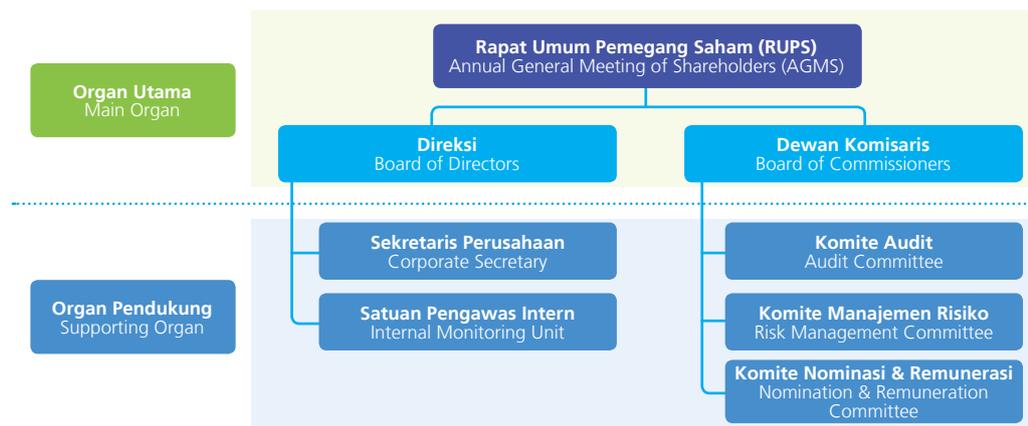
2. Assist the organs reporting directly to the Board of Commissioners and the Board of Directors in understanding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as the relationship of both parties' duties

## STRUKTUR PENGENDALI TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur mekanisme GCG di lingkungan PT PLN (Persero) adalah:

## CONTROLLING STRUCTURE OF CORPORATE GOVERNANCE

The structure of GCG mechanism within PT PLN (Persero) is:



## MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perusahaan memiliki 3 Organ Utama dalam pelaksanaan GCG, yaitu :

## CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM

The Company has 3 Main Organs in the GCG implementation, i.e.:



Dalam Mekanisme ini Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) merupakan Organ Perseroan yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.

In this Mechanism, the General Meeting of Shareholders (GMS) is an organ of the Company, which has exclusive authority not granted to the Board of Directors and Board of Commissioners. The GMS cannot intervene the duties, functions, and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors without prejudice to the power of the GMS to exercise their rights in accordance with the Articles of Association and regulations, including to replace or dismiss members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors.

Tata Kelola Perusahaan  
Corporate Governance

Dewan Komisaris merupakan Organ Perseroan yang memiliki tugas mengawasi dan memberikan nasehat terhadap jalannya Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.

The Board of Commissioners is a Company's Organ, which has the duty to supervise and provide advice related to the Company's operations, carried out by the Board of Directors.

Direksi merupakan Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

The Board of Directors is a Company's Organ that has the authority and is fully responsible for the Company's management in line with the Company's interest, in accordance with the purposes and objectives of the Company, and to represent the Company, both inside and outside the court in accordance with the Articles of Association provisions.

**Dalam pengelolaan perusahaan dan pelaksanaan keputusan RUPS yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris wajib mengawasi dan memberikan nasihat guna memastikan tujuan Perusahaan serta Keputusan RUPS terlaksana dan tercapai. Untuk memastikan keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sedemikian besar, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi.**

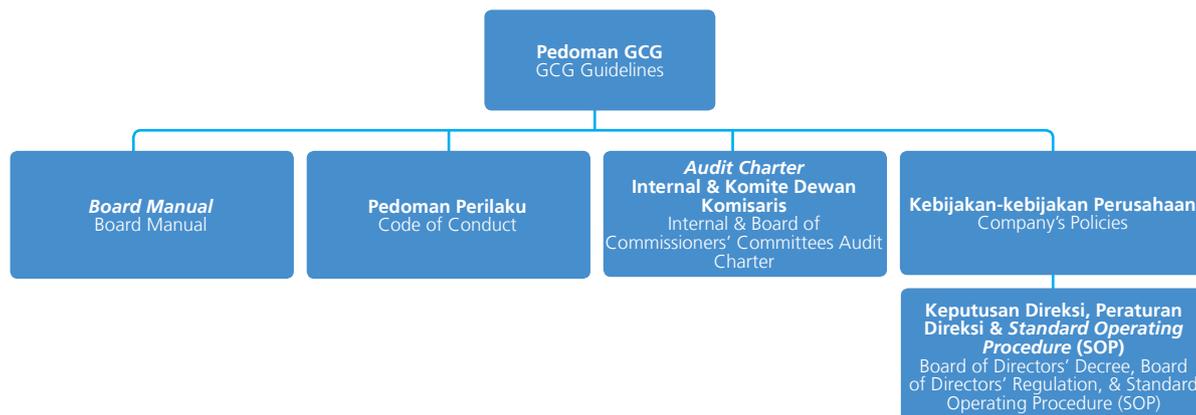
In the management of the company and the execution of GMS Resolutions by the Board of Directors, the Board of Commissioners shall supervise and provide advice to ensure the Company's objectives and the RUPS Resolutions are executed and achieved. The Board of Commissioners is assisted by supporting organs, i.e. the Secretary of the Board of Commissioners, the Audit Committee, the Risk Management Committee, and the Nomination and Remuneration Committee to ensure the successful and smooth implementation of its duties and responsibilities.

Sementara itu pelaksanaan GCG di Organ Direksi secara khusus dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan, Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta Satuan Pengawasan Intern sebagai Organ Pendukung.

Meanwhile, the GCG implementation in the Board of Directors is specifically conducted by Corporate Secretary, Division of Risk Management and Compliance, and Internal Control Unit as the Supporting Organs.

**STRUKTUR KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN**

**CORPORATE GOVERNANCE POLICY STRUCTURE**



## KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Untuk menunjang peningkatan penerapan tatakelola perusahaan yang baik PLN terus berupaya melengkapi aturan kebijakan operasional sebagai bagian dari panduan GCG. Berikut adalah beberapa aturan kebijakan (*soft structure*) yang telah selesai disusun dan diimplementasikan.



### 1. Board Manual

PLN memiliki peraturan “Transaksi Benturan Kepentingan”, yang menegaskan bahwa pihak-pihak internal maupun eksternal yang memiliki peluang keuntungan dari terjadinya benturan kepentingan dalam suatu transaksi, dilarang terlibat dalam proses pembuatan keputusan menyangkut transaksi tersebut.

Direksi dan Dewan Komisaris setiap tahun menandatangani Pakta Integritas Benturan Kepentingan sebagai salah satu bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bentuk integritas Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan seluruh kegiatan Perusahaan

### 2. Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*)

Pedoman perilaku atau *Code of Conduct* sebagai implementasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG. *Code of Conduct* berisi kebiasaan baik dan tata pergaulan profesional di lingkungan Perusahaan. Selain hal tersebut seluruh “warga Perusahaan” secara sadar dan senantiasa berusaha

## COMPANY MANAGEMENT POLICY

PLN strives to complement the operational policy as part of the GCG guidelines to support the improvement of good corporate governance implementation. The followings are some policy rules (*soft structure*) that have been compiled and implemented.

### 1. Board Manual

PLN has a “Conflict of Interest” regulation, which affirms that internal and external parties who have an opportunity to profit from the occurrence of a conflict of interest in a transaction, are prohibited from engaging in the decision-making process of the said transaction.

The Board of Directors and the Board of Commissioners annually sign the Conflict of Interest Integrity Pact as a form of compliance with the prevailing laws and regulations, and a form of integrity of the Board of Directors and Board of Commissioners in carrying out all of the Company’s activities

### 2. Code of Conduct

Code of Conduct is applied to improve the quality of GCG implementation. Code of Conduct emphasizes good habits and behavior, and professional conduct in the Company’s environment. In addition, all “Company’s citizens” are aware and always strive to achieve the corporate philosophy, Company’s

## Tata Kelola Perusahaan

### Corporate Governance

mewujudkan falsafah, visi dan misi perusahaan dilandasi oleh Budaya Perusahaan yang mengandung nilai-nilai Saling Percaya, Integritas, Peduli, Pembelajar (SIPP). Budaya Perusahaan menjadi alat agar tercipta integritas di seluruh “warga PLN” sekaligus meningkatkan kualitas penerapan GCG.

#### 3. Internal Audit Charter

Internal Audit Charter merupakan Pedoman yang melandasi pelaksanaan Internal Audit di Perusahaan dan Internal Audit Charter telah dimutakhirkan serta telah disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

#### 4. Pedoman LHKPN

Perusahaan telah memiliki aturan dalam pelaksanaan kepatuhan penyampaian LHKPN, implementasi LHKPN Perusahaan telah mendapat apresiasi dari KPK sebagai Perusahaan dengan Implementasi e-LHKPN Terbaik.

#### 5. Pedoman Gratifikasi

PLN melarang pemberian maupun penerimaan hadiah dan donasi baik oleh pihak dalam maupun di luar lingkungan perusahaan. Larangan ini diberlakukan untuk menegakkan independensi pengambilan keputusan maupun potensi terjadinya benturan kepentingan dan atau turunnya kepercayaan publik terhadap integritas perusahaan.

#### 6. Pedoman Whistleblowing System

Untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas terhadap seluruh proses bisnis yang dilakukan, serta untuk mencegah tindakan korupsi, *fraud* dan tindakan penyalahgunaan kewenangan lainnya, PLN telah menerapkan Kebijakan *whistleblowing system* sejak akhir tahun 2012 dan kebijakan ini telah dimutakhirkan pada tahun 2016.

#### 7. Pedoman Manajemen Risiko

PLN menyusun dan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko sebagai bagian dari sistem pengawasan dan pengendalian internal dengan tujuan meminimalisir potensi kerugian yang mungkin terjadi.

vision and mission based on the Corporate Culture, upholding the values of Mutual Trust, Integrity, Caring, and Keeness to learn (SIPP). Corporate Culture becomes a tool to create integrity for all “PLN citizens”, while improving the quality of GCG implementation

#### 3. Internal Audit Charter

Internal Audit Charter is a Guideline as the base of Internal Audit implementation in the Company. Internal Audit Charter has been updated and approved by the Board of Directors and Board of Commissioners.

#### 4. LHKPN Guidelines

The Company has regulated the implementation of compliance with LHKPN submission. The Company's LHKPN implementation has received appreciation from KPK with the Best e-LHKPN Implementation predicate.

#### 5. Gratification Control Guidelines

PLN prohibits the giving and receiving of gifts and donations either by internal or external parties in the Company's environment. This prohibition is enforced to uphold the independence of decision-making and the potential for conflict of interest and/or decrease of public confidence in the Company's integrity.

#### 6. Whistleblowing System Guidelines

To improve accountability, transparency, and responsiveness to all business processes undertaken, and to prevent corruption, fraud, and other abuse actions, PLN has implemented a whistleblowing system Policy since the end of 2012 and this policy has been updated in 2016

#### 7. Risk Management Guidelines

PLN has formulated and established the Risk Management Policy as part of the internal control system to minimize potential losses.

Tata Kelola Perusahaan  
Corporate Governance

PLN telah memiliki Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, sebagai ujung tombak dalam meningkatkan pengelolaan risiko secara terus menerus, tepat dan komprehensif. Pengelolaan risiko disertai upaya mitigasi risiko yang telah diidentifikasi, sehingga terhindar dari dampak negatif yang mungkin timbul dalam mencapai tujuannya.

#### 8. Pedoman Pengadaan

PLN menerapkan kebijakan pengadaan yang transparan dan akuntabel, memenuhi prinsip-prinsip efektif dan efisien, terbuka dan bersaing dengan adil serta tidak diskriminatif. Proses pengadaan barang dan jasa diupayakan melalui persaingan yang sehat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### 9. Pedoman Komunikasi Perusahaan

Perusahaan juga telah memiliki Pedoman Komunikasi Perusahaan, dimana mencakup seluruh Unit Perusahaan serta juga telah memiliki Pedoman dalam pengelolaan website Perusahaan.

#### 10. Pedoman Kebijakan Mutu dan Pelayanan

Perusahaan sadar bahwa kepuasan pelanggan merupakan faktor penting bagi keberlangsungan usaha Perusahaan, atas dasar tersebut perusahaan telah memiliki kebijakan Mutu dan Pelayanan dalam rangka menjaga kepercayaan pelanggan.

#### 11. Pedoman Manajemen Kinerja

Dalam rangka optimalisasi kinerja korporasi, PLN membuat Kontrak Manajemen yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris yang mencakup lima perspektif *Key Performance Indicators* yang berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) yang diterbitkan oleh Kementerian BUMN, yaitu perspektif pelanggan; efektivitas produk dan proses; fokus tenaga kerja; keuangan dan pasar; kepemimpinan dan tata kelola.

Kontrak Manajemen ini tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2017, yang ditandatangani oleh Direksi, Dewan Komisaris dan telah disetujui oleh Menteri Negara BUMN / RUPS.

PLN has a Division of Risk Management and Compliance, as a spearhead for improving risk management continuously, accurately, and comprehensively. Risk management, and risk mitigation, will ensure that negative impact is avoided in achieving the Company's objectives.

#### 8. Procurement Guidelines

PLN implements a transparent and accountable procurement policy, fulfilling the principles of effective and efficient, open, fair competition, and non-discriminatory. The procurement process of goods and services is performed in a fair competition in accordance with the prevailing laws and regulations

#### 9. Corporate Communication Guidelines

The Company also has a Corporate Communication Guideline, which covers all the Company Units. The Company also has a guide in the management of the Company's website.

#### 10. Quality and Services Policy Guidelines

The Company is aware that customer satisfaction is an important factor in the Company's business continuity, on the basis of which the company has a Quality and Service policy in order to maintain customer trust.

#### 11. Performance Management Guidelines

In order to optimize the corporate performance, PLN stipulates a Management Contract, agreed upon and signed by the Shareholders, Board of Directors, and Board of Commissioners, which includes five Key Performance Indicators based on the Criteria for Superior Performance Assessment (KPKU) issued by the Ministry of SOEs, i.e. customer perspective; product and process effectiveness; focus of workforce; finance and markets; leadership and governance.

This Management Contract is contained in the Company's Work and Budget Plan 2017, signed by the Board of Directors, Board of Commissioners, and has been approved by the State Minister for SOEs/ GMS

Tata Kelola Perusahaan  
Corporate Governance

12. Pedoman Pengelolaan Anak Perusahaan

Perusahaan telah memiliki Pedoman Anak Perusahaan dan secara bersama-sama PLN Grup telah mendeklarasikan Misi Portofolio Perusahaan dalam "SOLID", sebagai berikut :

12. Subsidiary Management Guidelines

The Company has a Subsidiary Guideline and together with PLN Group, have declared the Company Portfolio Mission in "SOLID", as follows:



# IMPLEMENTASI PRINSIP DASAR DAN PRAKTEK GCG YANG BAIK

## Implementation of Basic Principles and Good Corporate Governance

PLN senantiasa memastikan bahwa seluruh prinsip-prinsip dasar GCG, yakni: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kesetaraan (*Fairness*) diterapkan pada setiap aspek bisnis di semua tingkat/struktur operasional perusahaan. Implementasi kelima prinsip dasar GCG dalam kegiatan operasional perusahaan dijelaskan dalam uraian berikut ini.

### TRANSPARANSI

Implementasi asas transparansi tercermin dalam berbagai kegiatan dan media komunikasi yang intensif dan dikelola secara profesional, sehingga para investor, kreditor, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kinerja dan kegiatan pengelolaan perusahaan secara merata.

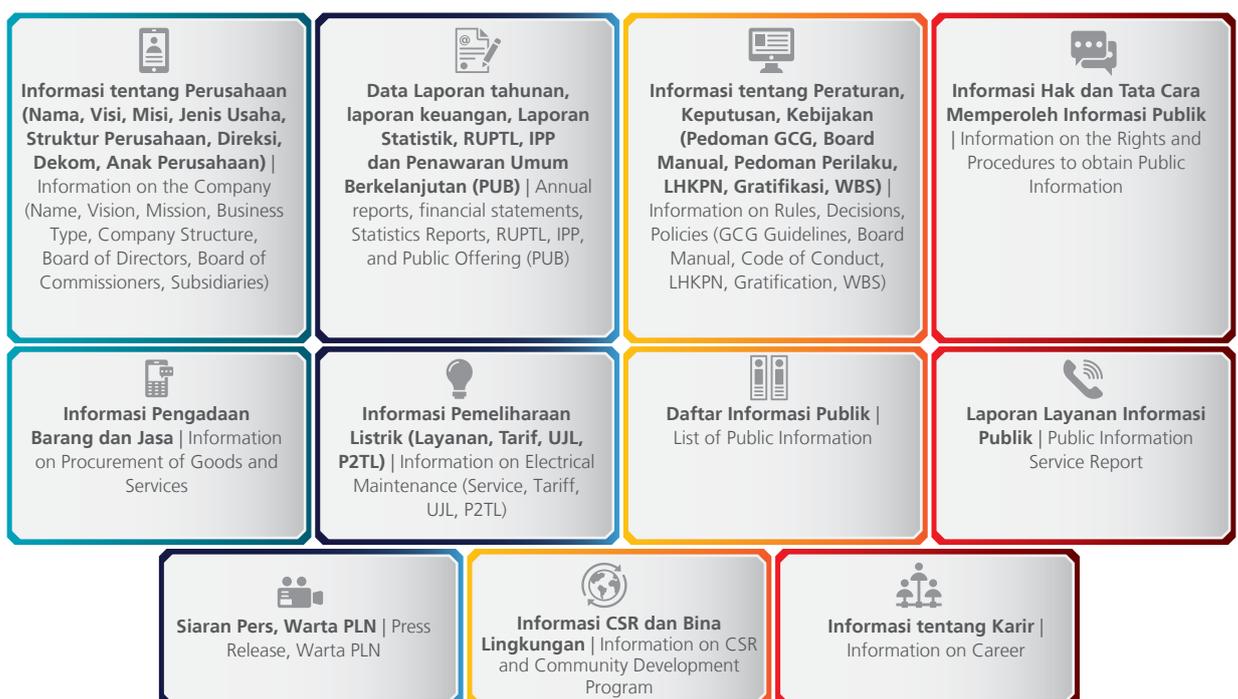
Sebagai perusahaan yang telah menerbitkan obligasi, maka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), UU PT serta UU KIP, PLN berkewajiban mengungkapkan informasi perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Perusahaan menyediakan informasi terkait dengan Keterbukaan Publik sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), selain itu Perusahaan juga menyajikan informasi antara lain :

PLN always ensures that all GCG basic principles, i.e.: Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness applied to every aspect of business at all levels/corporate operational structures. The implementation of the five basic GCG principles in the Company's operations is described as followed.

### TRANSPARENCY

Transparency principle implementation is reflected in various intensive and professionally managed activities and communication media. Thus, the investors, creditor, community, and all stakeholders know the performance and management activities of the Company evenly.

As a company that has issued bonds, in accordance with the Financial Services Authority (OJK) Regulations, the Law on Limited Liability Company, and Law on Freedom of Information, PLN and the Act on KIP, PLN has the obligation to disclose company information to stakeholders. The Company provides information related to Public Disclosure in accordance with Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure (KIP). In addition, the Company also provides information such as:



## Implementasi Prinsip Dasar Dan Praktek GCG yang Baik Implementation of Basic Principles and Good Corporate Governance

### AKUNTABILITAS

Prinsip akuntabilitas dilaksanakan dengan fokus peningkatan fungsi dan peran setiap organ perusahaan dan manajemen, sehingga pengelolaan usaha dapat berjalan dengan baik. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas operasional. Perusahaan menerapkan berbagai aturan perundangan yang berlaku dan berbagai kebijakan dasar pengelolaan perusahaan sesuai ketentuan regulator di pasar modal, antara lain :

### ACCOUNTABILITY

The principles of accountability are implemented with a focus on improving the function and role of each organ of the Company, to ensure the function of the business management. In order to improve accountability of operational duties implementation. The Company implements various rules and regulations and various basic policies of corporate management in accordance with the regulator in the capital market, as follows:

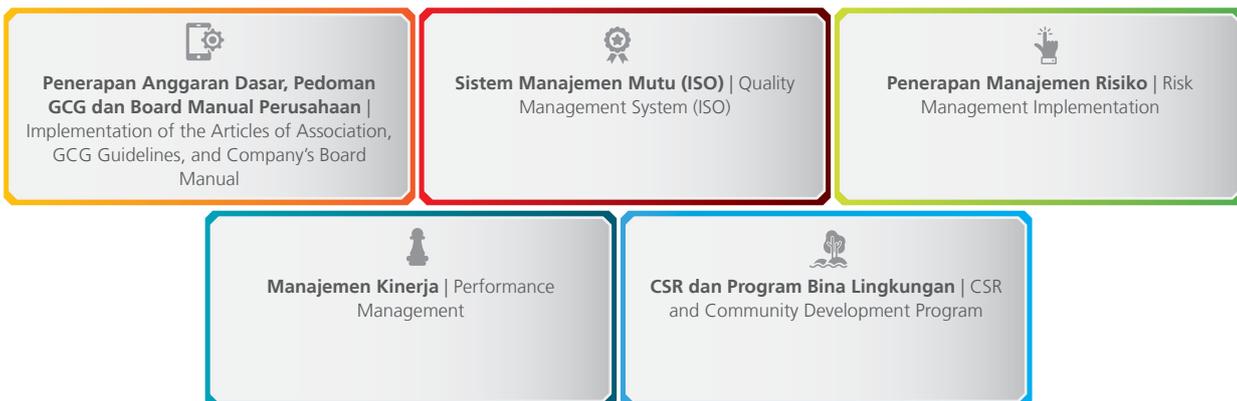


### RESPONSIBILITAS

Responsibilitas atau asas pertanggungjawaban diterapkan melalui ketaatan pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perusahaan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menerapkan kaidah pengelolaan sesuai standar-standar korporasi yang berlaku universal serta melaksanakan tanggung jawab sosial.

### RESPONSIBILITY

Responsibility or accountability is applied through strict adherence to the precautionary principles and ensures compliance with Company guidelines, Articles of Association, and prevailing rules and legislation. Responsibility is also applied to management principles in accordance with universal corporate standards and to the implementation of corporate social responsibility.



## Implementasi Prinsip Dasar Dan Praktek GCG yang Baik

Implementation of Basic Principles and Good Corporate Governance

### INDEPENDENSI

Kondisi dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Prinsip kemandirian diterapkan melalui penyusunan dan penerapan *code of conduct* termasuk pengaturan seluruh transaksi maupun rencana investasi yang mengandung atau berpotensi mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*) serta menerapkan kebijakan larangan adanya hubungan keluarga atau kekerabatan antara para Direktur dengan Dewan Komisaris.

### INDEPENDENCE

Independence refers to a professionally managed company, free of conflict of interest and influence/pressure from any parties that are not in accordance with the prevailing rules and legislation.

The principle of independence is applied through the development and implementation of the Code of Conduct, including the complete categorization of transactions and investment plans that contain or potentially contain conflicts of interest. It is also applied by implementing a policy of prohibition on family or kinship relationship between the Directors and the Board of Commissioners.



**Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris** | Board of Directors and Board of Commissioners' Commitment



**Aturan Benturan Kepentingan** | Conflict of Interest Rules

### KESETARAAN (FAIRNESS)

Asas kesetaraan diterapkan dengan memperlakukan seluruh stakeholder secara berimbang antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada dan oleh PLN. PLN juga membuka akses informasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan sumbang-saran bagi kemajuan dan peningkatan mutu layanan perusahaan. Kesetaraan diterapkan dalam proses pengelolaan sumber daya manusia dan pemilihan vendor barang maupun jasa.

### FAIRNESS

The principle of fairness is applied by treating all stakeholders equally for the rights and obligations granted to and by PLN. PLN allows access of information to all stakeholders to elicit suggestions for progress, and improvements to the Company's quality of service. Equality is also applied in the human resources management process and vendors selection, both goods and services.



**Kejelasan keseimbangan antara hak dan kewajiban stakeholder** | Clarity of balance between the stakeholder's rights and obligations



**Adanya hak menerima informasi yang relevan bagi stakeholder** | The right to receive information relevant to stakeholders



**Pelaksanaan Pengadaan secara Profesional** | Professional Procurement



**Pelaksanaan Rekrutmen secara profesional** | Professional Recruitment

### SOSIALISASI KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pada tahun 2017, Perusahaan melakukan sosialisasi Tata Kelola Perusahaan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai implementasi GCG di PLN melalui sosialisasi *Board Manual* kepada Manajemen

### SOCIALIZATION OF CORPORATE GOVERNANCE POLICY

In 2017, the Company socializes Corporate Governance to provide a comprehensive understanding of GCG implementation in PLN, through the socialization of the Board Manual to Top Management in July 2017. Further,

## Implementasi Prinsip Dasar Dan Praktek GCG yang Baik

### Implementation of Basic Principles and Good Corporate Governance

Atas pada Bulan Juli 2017. Selanjutnya, Perusahaan juga melakukan sosialisasi Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0076.P/DIR/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di PT PLN (Persero) dan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0074.P/DIR/2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT PLN (Persero) di bulan Oktober 2017 kepada pegawai PLN.

## PENILAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perusahaan secara berkesinambungan melakukan penilaian atas implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) sejak tahun 2002 dalam rangka mendapatkan umpan balik bagi perbaikan kualitas penerapan praktik terbaik GCG. Pada setiap periode penilaian menghasilkan rekomendasi yang Perusahaan gunakan untuk memperbaiki kualitas penerapan GCG secara menyeluruh di setiap unsur perusahaan.

Perusahaan senantiasa berupaya melakukan perbaikan beberapa kebijakan, mekanisme kerja maupun pembentukan infrastruktur tata kelola baru sesuai rekomendasi hasil *assessment* GCG pada periode sebelumnya.

## KRITERIA YANG DIGUNAKAN DALAM PENILAIAN GCG

PLN Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melaksanakan *assessment* penerapan GCG di Perusahaan sesuai dengan Peraturan Kementerian BUMN yaitu :

1. Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
2. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

the Company also disseminates the PT PLN (Persero) Board of Directors' Regulation No. 0076.P/DIR/2017 on Gratification Control Guideline at PT PLN (Persero), and PT PLN (Persero) Directors' Regulation No. 0074.P/DIR/2017 on the Report of State Official Assets Guideline within PT PLN (Persero) Environment in October 2017 to PLN's employees.

## CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

The Company is continuously assessing the Good Corporate Governance (GCG) implementation since 2002 in order to obtain feedback on improving the quality of GCG best practices. Each valuation period produces recommendations that the Company uses to improve the overall quality of GCG implementation in every element.

The Company continuously strives to improve some of the policies, working mechanisms, and the establishment of new governance infrastructure as per the recommendations of the GCG assessment results in the previous period.

## THE CRITERIA FOR GCG ASSESSMENT

PLN, as a State-Owned Enterprise (SOE), performed the GCG assessment in the Company pursuant to the Ministry of SOEs Regulations, i.e.:

1. Minister of State-Owned Enterprises (SOE) Regulation No. Per-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 on the Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises (SOEs).
2. Secretary of the Minister of SOEs Decree No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, on Assessment Indicator/Parameter and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation on State-Owned Enterprises.

## Implementasi Prinsip Dasar Dan Praktek GCG yang Baik

Implementation of Basic Principles and Good Corporate Governance

### PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Pada awal tahun 2017, pelaksanaan penilaian implementasi GCG di PT PLN (Persero) masuk dalam Periode *assessment* yang dilakukan oleh Assessor Independen dan pelaksanaan *assessment* ini untuk menilai implementasi penerapan GCG untuk Periode tahun 2016 yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sementara itu, Assessment GCG pada tahun 2018 untuk Tahun 2017 masuk pada periode *Self Assessment*.

### SISTEM INFORMASI TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam Pelaksanaan *Assessment GCG*, perusahaan melakukan penilaian secara *web based* melalui "GCG Monitoring System", yang merupakan system aplikasi yang dibuat dan dikelola secara mandiri oleh Perusahaan dengan mengacu kepada Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

### ASSESSING PARTY

At the beginning of 2017, the GCG assessment at PT PLN (Persero) is included in the assessment Period conducted by Independent Assessor, which is to assess the GCG implementation for the 2016 period was Finance and Development Supervisory Agency (BPKP). Meanwhile, GCG Assessment in 2018 for the Period of 2017 entered in the Self Assessment period.

### CORPORATE GOVERNANCE INFORMATION SYSTEM

In the GCG Assessment, the Company conducts web-based assessment through "GCG Monitoring System", which is an application system created and managed independently by the Company, with reference to the Secretary of the Minister of SOEs Decree No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, on Assessment Indicator/ Parameter and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation on State-Owned Enterprises.



Gambar aplikasi "GCG Monitoring System" | Figure: "GCG Monitoring System" Application

## Implementasi Prinsip Dasar Dan Praktek GCG yang Baik

### Implementation of Basic Principles and Good Corporate Governance

#### SKOR PENILAIAN MASING-MASING KRITERIA

Perusahaan melakukan assessment GCG untuk menilai implementasi penerapan GCG untuk Periode tahun 2016 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai *assessor* independen. Hasil *assessment* terhadap penerapan GCG di PT PLN (Persero) untuk periode tahun 2016 mencapai total skor sebesar 87,14. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di PT PLN (Persero) untuk periode tahun 2016 mencapai kualifikasi "Sangat Baik".

Pada awal tahun 2018, Perusahaan memasuki periode *self assessment* untuk menilai implementasi penerapan GCG untuk Periode tahun 2017, dimana pelaksanaan *assessment* dilaksanakan secara mandiri oleh Perusahaan. Pelaksanaan *self assessment* penerapan GCG ini merupakan bagian dari proses implementasi GCG yang berkelanjutan di Perusahaan, sehingga hasil *self assessment* juga merupakan penilaian atas kemajuan pelaksanaan GCG di Perusahaan.

Adapun tujuan pelaksanaan *self assessment* penerapan GCG adalah untuk:

1. Menilai kecukupan infrastruktur dan praktik tata kelola perusahaan dalam memenuhi kriteria tata kelola perusahaan yang baik yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN untuk periode tahun 2017;
2. Tindak lanjut terhadap rekomendasi *assessment* yang telah dilakukan pada tahun 2017
3. Mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan (*area of improvement*);
4. Memonitor konsistensi penerapan GCG di PT PLN (Persero) dan merumuskan langkah perbaikan dan penyempurnaan yang masih diperlukan.

Hasil *self assessment* terhadap penerapan GCG di PT PLN (Persero) untuk periode tahun 2017 mencapai total skor sebesar 87,40, dimana Perusahaan mendapat kualifikasi "Sangat Baik".

Hasil *self assessment* penerapan GCG di PT PLN (Persero) untuk periode tahun 2017 dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

#### ASSESSMENT SCORE ON EACH CRITERIA

The Company performs a GCG appraisal to assess the GCG implementation for the 2016 Period, which is conducted by Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) as the independent assessor. The GCG assessment results at PT PLN (Persero) for the 2016 period reached a total score of 87.14. This indicated that the application of GCG in PLN in 2016 achieved a "Very Good" qualification.

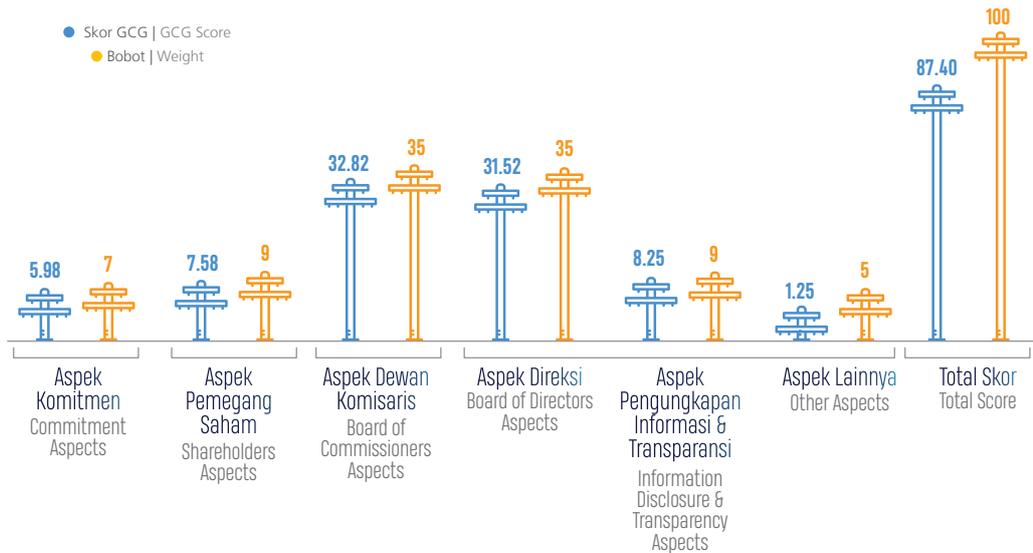
In early 2018, the Company entered the self-assessment period to assess the GCG implementation for the 2017 Period, in which the assessment was carried out independently by the Company. The implementation of GCG self-assessment is part of the ongoing implementation process of GCG in the Company. Thus, the self-assessment result is also an assessment of the progress of GCG implementation in the Company.

The objectives of GCG self-assessment are to:

1. Assess the adequacy of infrastructure and corporate governance practices in fulfilling the good corporate governance criteria set by the Ministry of SOEs for the 2017 period;
2. Follow-up on the recommendation of assessment in 2017
3. Identify the area of improvement;
4. Monitor the consistency of GCG implementation at PT PLN (Persero) and formulate necessary improvement and refinement measures.

The results of GCG Self-Assessment at PT PLN (Persero) in 2017 reached the total score of 87.40, which is qualified as "Very Good".

The result of GCG self-assessment at PT PLN (Persero) for the 2017 period can be summarized as follows:

Implementasi Prinsip Dasar Dan Praktek GCG yang Baik  
Implementation of Basic Principles and Good Corporate Governance

## HASIL PENILAIAN LAINNYA

Pada Tahun 2017, untuk pertama kalinya perusahaan juga mengikuti penilaian Corporate Governance Perception Index (CGPI). Pelaksanaan penilaian ini diselenggarakan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). Pada penilaian Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang mencakup aspek struktur tata kelola, aspek proses tata kelola, dan aspek hasil tata kelola ini, perusahaan berhasil mendapatkan skor 84,35 dengan predikat sebagai perusahaan "Terpercaya" atau "Trusted Company".

## OTHER ASSESSMENT RESULTS

In 2017, for the first time, Company uses the standard assessment of Corporate Governance Perception Index (CGPI). The assessment is performed by Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). In the assessment of Corporate Governance Perception Index (CGPI), which covers aspects of governance structure, governance process, and governance results, the Company managed to get a score of 84.35 with a predicate as a "Trusted Company".

Aspek & Indikator Penilaian Assessment Aspects & Indicators	Bobot Weight	Tahapan Analisis Analysis		Tahapan Observasi Observation	Nilai Akhir Score
		Self Assessment	Penilaian Dokumen Document Assessment		
1. Aspek Struktur Tata Kelola   Governance Structure Aspect	32,72	30,67	26,84	26,29	27,93
2. Aspek Proses Tata Kelola   Governance Process Aspect	33,64	31,50	27,19	27,04	28,58
3. Aspek Hasil Tata Kelola   Governance Result Aspect	33,46	31,09	26,98	25,46	27,84
Total Skor CGPI & Rating   Total CGPI Score & Rating					<b>84,35</b> <b>(Terpercaya   Trusted)</b>

## Implementasi Prinsip Dasar Dan Praktek GCG yang Baik Implementation of Basic Principles and Good Corporate Governance

### REKOMENDASI HASIL PENILAIAN

Pelaksanaan *self assessment* GCG secara mandiri oleh Perusahaan untuk menilai implementasi GCG periode tahun 2017, menghasilkan rekomendasi sebagai berikut :

#### 1. Pemegang Saham

Rekomendasi pelaksanaan GCG bagi Pemegang Saham, sebagai berikut :

✓  
**Menetapkan pedoman/kebijakan Deviden dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris** | Establish the Dividend guidelines/policies and Supervisory Report of the Board of Commissioners

✓  
**Konsistensi Pelaksanaan Pemberian persetujuan secara tepat waktu termasuk Pengesahan Aksi Korporasi Perusahaan** | Implement the consistency of approval in a timely manner, including the Approval of Corporate Action

✓  
**Menindaklanjuti Area of Improvement (AoI) Tata Kelola Perusahaan** | Follow-up on the Area of Improvement (AoI) of Company's Governance

#### 2. Dewan Komisaris

Rekomendasi pelaksanaan GCG bagi Dewan Komisaris, sebagai berikut :

✓  
**Dewan Komisaris perlu menyusun rencana secara komprehensif terkait dengan pelaksanaan peningkatan Kompetensi** | The Board of Commissioners needs to develop a comprehensive plan related to the Competency improvement

✓  
**Menetapkan rencana dan menjalankan pengawasan secara komprehensif terhadap Sistem Teknologi Informasi, dan Kebijakan Mutu dan Pelayanan yang dijalankan oleh Direksi** | Establish a plan and conduct a comprehensive monitoring of the Information Technology System, and the Quality and Service Policy performed by the Board of Directors

✓  
**Melakukan penilaian secara khusus atas kinerja Direksi secara individu dan melaporkannya kepada Pemegang Saham** | Conduct a special assessment of the performance of the Board of Directors individually and report it to the Shareholders

✓  
**Melaporkan Pengangkatan Komite Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham** | Report the Appointment of Board of Commissioners' Committee to Shareholders

✓  
**Konsistensi pelaksanaan pemberian persetujuan secara tepat waktu** | Consistent implementation of approval in a timely manner

### RECOMMENDATION ON THE ASSESSMENT RESULT

The GCG self-assessment of GCG is carried out independently by the Company to assess the GCG implementation in 2017. The assessment produced the following recommendations:

#### 1. Shareholders

GCG implementation recommendations for Shareholders, are as follows:

#### 2. Board of Commissioners

GCG implementation recommendations for Board of Commissioners, are as follows:

## Implementasi Prinsip Dasar Dan Praktek GCG yang Baik

Implementation of Basic Principles and Good Corporate Governance

### 3. Direksi

Rekomendasi pelaksanaan GCG bagi Dewan Komisaris, sebagai berikut :

### 3. Board of Directors

GCG implementation recommendations for Board of Directors, are as follows:



## Implementasi Prinsip Dasar Dan Praktek GCG yang Baik Implementation of Basic Principles and Good Corporate Governance

### TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PENERAPAN GCG

Perusahaan telah menindaklanjuti rekomendasi assessment GCG Periode Tahun 2016 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai assessor independen, antara lain :

### FOLLOW-UP ON THE RECOMMENDATIONS OF GCG IMPLEMENTATION

The Company has followed-up the GCG assessment recommendations for the 2016 Period conducted by the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) as the independent assessor, as follows:

<p><b>Perusahaan telah memutakhirkan Pedoman LHKPN</b>   The Company has updated LHKPN Guidelines on LHKPN</p>	<p><b>Perusahaan telah memutakhirkan Pedoman Gratifikasi pada tanggal 29 September 2017</b>   The Company has updated Gratification Control Guidelines on September 29, 2017</p>	<p><b>Pelaksanaan mekanisme tindak lanjut dan pelaporan Whistleblowing System yang dilakukan setiap Triwulan</b>   Implementation of Whistleblowing System follow-up and reporting mechanisms conducted every Quarter</p>	<p><b>Telah dirancang sistem web based untuk Kepatuhan terhadap CoC</b>   A web-based system designed for Compliance Commitment with CoC</p>	<p><b>Perusahaan telah memutakhirkan kebijakan Komunikasi Korporat sekaligus pengelolaan Website</b>   The Company has updated the Corporate Communications policy and the the management of the Website</p>	<p><b>Perusahaan telah membuat kebijakan pendanaan melalui pinjaman</b>   The Company has made a funding policy through loans</p>
--	--	---	--	--	---

### PEMENUHAN PERATURAN OJK TENTANG PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

#### PEMENUHAN PERUSAHAAN TERHADAP PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 21/ POJK.04/2015 TENTANG PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

COMPANY'S COMPLIANCE WITH FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NO. 21/POJK.04/2015 ON CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINE FOR PUBLIC COMPANIES

#### A. HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM | GOOD RELATIONSHIP BETWEEN THE PUBLIC COMPANY AND THE SHAREHOLDERS IN ENSURING THE RIGHTS OF SHAREHOLDERS

##### Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham | Principle 1 Improving the Value of General Meeting of Shareholders' Execution

**1.1 Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham** | **1.1 Public Company has methods or procedures of voting both open and close voting, in order to emphasize independence, and interests of shareholders.**

**Terpenuhi**

**Fulfilled**

Perusahaan telah memiliki prosedur teknis pengumpulan suara Pemegang Saham (voting) dalam pelaksanaan RUPS sebagaimana tertera dalam Tata Tertib RUPS dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Board Manual Perusahaan dengan mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham.

The Company already have the voting procedures for Shareholders in the GMS execution, as stipulated in the GMS Code of Conduct and in accordance with the Company's Articles of Association and Board Manual, by prioritizing the independence and interest of shareholders.

**1.2 Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan**

**1.2 Every member of Directors and Board of Commissioners of Public Company attends the Annual GMS.**

**Terpenuhi**

**Fulfilled**

Implementasi Prinsip Dasar Dan Praktek GCG yang Baik  
Implementation of Basic Principles and Good Corporate Governance**PEMENUHAN PERUSAHAAN TERHADAP PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 21/ POJK.04/2015 TENTANG PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA****COMPANY'S COMPLIANCE WITH FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NO. 21/POJK.04/2015 ON CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINE FOR PUBLIC COMPANIES**

Dalam setiap pelaksanaan RUPS, Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris hadir sebagaimana tertera dalam Risalah RUPS Tahunan Perusahaan.

In every GMS, all Directors and Board of Commissioners are present as stipulated in the Minutes of Annual GMS of the Company.

**1.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun****1.3 The Minutes of GMS is available on the Public Company's website at least for 1 (one) year.****Terpenuhi****Fulfilled**

Ringkasan Risalah RUPS setiap tahun telah dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan bagian GCG dan tersedia dalam Website menu Stakeholder bagian Laporan Tahunan.

Summary of Minutes of GMS is published in the Company's Annual Report of the GCG Section, and is available on the Website on the Stakeholder menu, Annual Report section.

**Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor****Principle 2 Improving the Quality of Public Corporate Communication with the Shareholders or Investors****2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan Pemegang saham atau Investor****2.1 Public Company has a communication policy with the Shareholders or Investors****Terpenuhi****Fulfilled**

Perusahaan telah mempunyai kebijakan terkait komunikasi dengan Pemegang Saham atau investor. Adapun kebijakannya sebagai berikut: Kebijakan Hubungan & Komunikasi dengan Pihak Eksternal & Internal Perusahaan melalui Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0119.P/DIR/2017 tentang Pedoman Tata Kelola Stakeholder Kebijakan Proses Hubungan dengan Investor dan Pemegang Saham melalui Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0002.P/DIR/2018 tentang Kebijakan Pendanaan Melalui Pinjaman dan Board Manual PT PLN (Persero) Kebijakan Pengungkapan Informasi Perusahaan melalui Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0008.P/DIR/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Komunikasi Perusahaan

Company has a policy related to communication with the Shareholders or Investors. The policy is as follows:  
Policy on Relationship & Communication with Company's External & Internal Parties through PT PLN (Persero) Directors' Regulation No. 0119.P/DIR/2017 on Stakeholders' Governance Guideline Policy on Relationship with Investors and Shareholders through PT PLN (Persero) Directors' Regulation No. 0002.P/DIR/2018 on Financing Policy Through Loans and PT PLN (Persero) Board Manual  
Policy on Disclosure of Company Information through PT PLN (Persero) Directors' Decree No. 0008.P/DIR/2017 on Corporate Communication Guidelines

**2.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web****2.2 Public Company expressed the communication policy of the Public Company with the shareholders or investor on the Website****Terpenuhi****Fulfilled**

Kebijakan terkait komunikasi dengan Pemegang Saham atau investor terdapat dalam website Perusahaan pada Menu Layanan Informasi Publik pada Bagian Mekanisme Pelayanan Informasi Publik. Selain itu di dalam website Perusahaan juga tersedia Menu *Request for Meeting* yang memudahkan investor dalam menghubungi kami.

Policy related to communication with Shareholders or investors is on the Company's website on the Public Information Services Menu in the Public Information Services Mechanism Section. In addition, the Request for Meeting menu is also available on the Company's website to facilitate the investors to contact us.

**B. FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS | DUTIES AND ROLES OF BOARD OF COMMISSIONERS****Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris****Principle 3 Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners****3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka****3.1 Determine the number of Board of Commissioners, taking into consideration the condition of Public Company****Terpenuhi****Fulfilled**

## Implementasi Prinsip Dasar Dan Praktek GCG yang Baik

Implementation of Basic Principles and Good Corporate Governance

**PEMENUHAN PERUSAHAAN TERHADAP PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 21/ POJK.04/2015 TENTANG PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA****COMPANY'S COMPLIANCE WITH FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NO. 21/POJK.04/2015 ON CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINE FOR PUBLIC COMPANIES**

Perusahaan telah memenuhi ketentuan yang berlaku bagi Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka sebagaimana Peraturan OJK No. POJK No.33/POJK.04/2014 Pasal 20 Ayat 1 yaitu Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Penentuan jumlah Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dan telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan, yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan.

The Company complies with the applicable requirements as a Public Company, as stipulated in the OJK Regulation No. POJK No.33/POJK.04/2014 Article 20 Paragraph 1, i.e.

Board of Commissioners must consist of at least 2 (two) members of Board of Commissioners. The number of Board of Commissioners is determined by the GMS with due regards to the Company's condition, which is in accordance with the prevailing laws and regulations and the Company's Articles of Association.

**3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan****3.2 Determining the composition of the Board of Commissioners, taking into account the skills diversity, knowledge, and experience needed****Terpenuhi****Fulfilled**

Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dan telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Hal ini juga mengacu pada *Board Manual* dan berdasarkan latar belakang keahlian dan riwayat pekerjaan anggota Dewan Komisaris. Komposisi anggota Dewan Komisaris merupakan hak dari RUPS. Selama Tahun 2017, Dewan Komisaris PLN memiliki latar belakang keahlian yang mencakup bidang keuangan/ekonomi, hukum dan kelistrikan.

GMS determines the composition of Board of Commissioners, taking into account the skills diversity, knowledge, and experienced needed. This also refers to the Board Manual and is based on the expertise and history of the work of members of the Board of Commissioners. The composition of the members of the Board of Commissioners is the right of the GMS. During 2017, PLN's Board of Commissioners has a background of expertise which covers the areas of finance/economics, law, and electricity.

**Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris****Principle 4 Improving the Execution of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners****4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris****4.1 Board of Commissioners has their own self-assessment policy to evaluate the Board of Commissioners' performance****Terpenuhi****Fulfilled**

Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris yang diungkap dalam Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris PT PLN (Persero) Tahun 2017.

Board of Commissioners has their own self-assessment policy to evaluate the Board of Commissioners' performance, which is disclosed in the PT PLN (Persero) Supervisory Report of the Board of Commissioners 2017.

**4.2 Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka****4.2 Self-assessment policy to evaluate Board of Commissioners' performance is stated on the Public Company's Annual Report****Terpenuhi****Fulfilled**

Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris yang tercantum dalam *Board Manual* Dewan Komisaris telah diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan bagian Tata Kelola Perusahaan.

Self-assessment policy to evaluate Board of Commissioners' performance, which is stipulated in the Board Manual of the Board of Commissioners, is disclosed in the Company's Annual Report in the Corporate Governance chapter.

**4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan****4.3 Board of Commissioners has their own policy related to resignation of member of Board of Commissioners if involved in financial crime****Terpenuhi****Fulfilled**

Implementasi Prinsip Dasar Dan Praktek GCG yang Baik  
Implementation of Basic Principles and Good Corporate Governance**PEMENUHAN PERUSAHAAN TERHADAP PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 21/ POJK.04/2015 TENTANG PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA**

COMPANY'S COMPLIANCE WITH FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NO. 21/POJK.04/2015 ON CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINE FOR PUBLIC COMPANIES

Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan *Board Manual*.

Board of Commissioners has their own policy related to resignation of member of Board of Commissioners if involved in financial crime, which is stated in the Company's Articles of Association and Board Manual.

**4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi****4.4 Board of Commissioners or Committee who carries out function of Nomination and Remuneration compiles succession policy in the Nomination process of the Director's member****Terpenuhi****Fulfilled**

Perusahaan telah mempunyai Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR). Salah satu tugas Komite NR adalah memastikan Direksi telah melaksanakan proses rekrutmen, pengembangan karier, nominasi dan remunerasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Komite NR akan menyeleksi kandidat internal dan hasil pemilihan kandidat internal tersebut kemudian diajukan kepada Kementerian BUMN untuk proses suksesi Direksi dan menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi Perusahaan yang diatur dalam *Board Manual* yang telah mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER 03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

The Company has Nomination and Remuneration Committee (KNR). One of the duties of Nomination and Remuneration Committee is to carry out the recruitment process, career development, nomination and remuneration, in accordance with the provisions that have been set. Nomination and Remuneration Committee will select the internal candidate and the result of the selection of the internal candidate is then submitted to the Ministry of SOEs for the succession process of the Board of Directors and to undertake the fit and proper test. Succession policy in the Nomination process of members of the Company's Board of Directors is governed by the Board Manual, which refers to the Minister of SOEs Regulation No. PER-03/MBU/02/2015 on the Requirements and Procedures to Appoint and Dismiss Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises.

**C. FUNGSI DAN PERAN DIREKSI | FUNCTION AND ROLES OF BOARD OF DIRECTORS****Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi****Principle 5 Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors****5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan****5.1 Determining the member of Directors taking into account the condition of the Public Company and the effectiveness in decision-making****Terpenuhi****Fulfilled**

Perusahaan telah memenuhi ketentuan yang berlaku bagi Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka sebagaimana Peraturan OJK No. POJK No.33/POJK.04/2014 Pasal 2 Ayat 1 yaitu Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. Penentuan jumlah Direksi ditetapkan oleh RUPS dan telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan, yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan.

The Company complies with the applicable requirements as a Public Company, as stipulated in the OJK Regulation No. POJK No.33/POJK.04/2014 Article 2 Paragraph 1, i.e. The Directors of Issuers or Public Company must at least consist of 2 (two) members of Board of Directors. The number of Board of Directors is determined by the GMS with due regards to the Company's condition, which is in accordance with the prevailing laws and regulations and the Company's Articles of Association.

**5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan****5.2 Determining the composition of Board of Directors, taking into account the diversity of skills, knowledge, and experience needed****Terpenuhi****Fulfilled**

## Implementasi Prinsip Dasar Dan Praktek GCG yang Baik

Implementation of Basic Principles and Good Corporate Governance

**PEMENUHAN PERUSAHAAN TERHADAP PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 21/ POJK.04/2015 TENTANG PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA****COMPANY'S COMPLIANCE WITH FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NO. 21/POJK.04/2015 ON CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINE FOR PUBLIC COMPANIES**

Penentuan komposisi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Hal ini juga mengacu pada *Board Manual* dan berdasarkan latar belakang keahlian dan riwayat pekerjaan anggota Direksi. Komposisi anggota Direksi merupakan hak dari RUPS. Selama Tahun 2017, Direksi PLN memiliki latar belakang keahlian yang mencakup bidang ekonomi/keuangan, hukum, dan kelistrikan.

GMS determines the composition of Board of Directors, taking into account the skills diversity, knowledge, and experienced needed. This also refers to the Board Manual and is based on the expertise and history of the work of members of the Board of Directors. The composition of the members of the Board of Directors is the right of the GMS. During 2017, PLN's Board of Directors has a background of expertise which covers the areas of finance/economics, law, and electricity.

**5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi****5.3 Directors' member who oversees accounting or financial sectors must have expertise and/or knowledge in accounting****Terpenuhi****Fulfilled**

Direktur Keuangan Perusahaan adalah seorang ahli keuangan yang berpengalaman di bidang perbankan serta memiliki latar belakang pendidikan keuangan yaitu lulusan dari Master of Business Administration dari Tulane University, Amerika Serikat.

The Company's Director of Finance is an experienced financial expert in banking and has a financial education background, i.e. a graduate of Master of Business Administration from Tulane University, USA.

**Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi****Principle 6 Improving the Execution of Duties and Responsibilities of the Board of Directors****6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi****6.1 Board of Directors has their own self-assessment policy to evaluate the Board of Directors' performance****Terpenuhi****Fulfilled**

Perusahaan memiliki penilaian sendiri untuk menilai kinerja Direksi melalui Kinerja Unggul (KPKU) dan Key Performance Indicator (KPI) masing-masing Direktorat selama tahun 2017.

The Company has its own assessment to assess the Board of Directors' performance through Superior Performance (KPKU) and Key Performance Indicator (KPI) of each Directorate in 2017.

**6.2 Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka****6.2 Self-assessment policy to evaluate Board of Directors' performance is stated on the Public Company's Annual Report****Terpenuhi****Fulfilled**

Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi telah tercantum dalam Laporan Tahunan PLN.

Self-assessment policy to evaluate Board of Directors' performance is stated in PLN's Annual Report.

**6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan****6.3 Board of Directors has their own policy related to resignation of member of Board of Directors if involved in financial crime****Terpenuhi****Fulfilled**

Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan *Board Manual*.

Board of Directors has their own policy related to resignation of member of Board of Directors if involved in financial crime, which is stated in the Company's Articles of Association and Board Manual.

Implementasi Prinsip Dasar Dan Praktek GCG yang Baik  
Implementation of Basic Principles and Good Corporate Governance**PEMEMUHAN PERUSAHAAN TERHADAP PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 21/ POJK.04/2015 TENTANG PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA**

COMPANY'S COMPLIANCE WITH FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NO. 21/POJK.04/2015 ON CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINE FOR PUBLIC COMPANIES

**D. PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN | STAKEHOLDERS' PARTICIPATION****Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan** **Principle 7 Improving the Good Corporate Governance Aspects through the Participation of the Stakeholders****7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading** **7.1 Public Company has policy to prevent insider trading****Terpenuhi****Fulfilled**

Tercantum dalam Kebijakan Transaksi Keuangan Perusahaan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0054.K/DIR/2014 tentang Pedoman Transaksi Keuangan Antara PT PLN (Persero) dengan Mitra Kerja Guna Mendukung PLN Bersih.

Listed in the Company's Financial Transaction Policy, which is stipulated based on the PT PLN (Persero) Board of Directors' Regulation No. 0054.K/DIR/2014 on Financial Transactions Guideline Between PT PLN (Persero) and Partners to Support PLN Bersih.

**7.2 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud****7.2 Public Company has policy for anti-corruption and anti-fraud****Terpenuhi****Fulfilled**

Tercantum dalam Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT PLN (Persero) dan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0076.P/DIR/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di PT PLN (Persero)

Listed in the PT PLN (Persero) Code of Conduct and PT PLN (Persero) Board of Directors' Regulation No. 0076.P/DIR/2017 on Gratification Control Guidelines at PT PLN (Persero)

**7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor****7.3 Public Company has policy on selection and improvement of the suppliers/vendors ability****Terpenuhi****Fulfilled**

Proses seleksi pemasok tercantum dalam Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0620.K/DIR/2013 Tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero). Dalam pelaksanaan Proses Pengadaan, Perusahaan menggunakan Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) dimana daftar tersebut diperbaharui setiap tahun. Pemasok atau Vendor dapat setiap saat mengajukan untuk menjadi DPT, disamping itu Perusahaan senantiasa melakukan peningkatan kemampuan vendor melalui pertemuan (gathering) dengan pemasok dan melakukan survey terhadap kualitas Pemasok serta survey Pemasok kepada Perusahaan.

The supplier selection process is listed in the Policy on Procurement of Goods/Services, based on the PT PLN (Persero) Board of Directors' Decree No. 0620.K/DIR/2013 on Guideline of Procurement of Goods/Services at PT PLN (Persero). In the Procurement Process, the Company uses a List of Selected Providers (DPT), and the list is updated annually. Supplier or Vendor may at any time propose to become DPT. In addition, the Company continuously improves the vendors' capability through gathering with suppliers and conducting surveys on Supplier quality and surveys on Supplier to Company.

**7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur****7.4 Public Company has policy on creditor's right fulfillment****Terpenuhi****Fulfilled**

Tercantum dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0119.P/DIR/2017 tentang Pedoman Tata Kelola Stakeholder dan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0002.P/DIR/2018 tentang Kebijakan Pendanaan Melalui Pinjaman.

Listed in the PT PLN (Persero) Board of Directors' Regulation No. 0119.P/DIR/2017 on Stakeholder Governance Guidelines and PT PLN (Persero) Board of Directors' Regulation No. 0002.P/DIR/2018 on Financing Policy Through Loans.

## Implementasi Prinsip Dasar Dan Praktek GCG yang Baik

Implementation of Basic Principles and Good Corporate Governance

**PEMENUHAN PERUSAHAAN TERHADAP PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 21/ POJK.04/2015 TENTANG PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA****COMPANY'S COMPLIANCE WITH FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NO. 21/POJK.04/2015 ON CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINE FOR PUBLIC COMPANIES****7.5 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan Sistem Whistleblowing 7.5 Public Company has Whistleblowing System policy****Terpenuhi**

Kebijakan WBS berdasarkan Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) No. 0008.E/DIR/2016 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2016 dan dipublikasikan di Laporan Tahunan.

**Fulfilled**

WBS Policy is based on PT PLN (Persero) Board of Directors' Circular Letter No. 0008.E/DIR/2016 on Whistleblowing System, which is issued on September 30, 2016, and published on the Annual Report.

**7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberi insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan 7.6 Public Company has policy on long-term incentive for the Directors and employee**

Mengacu kepada Keputusan RUPS berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya. Sedangkan untuk karyawan, kebijakan tersebut terdapat dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 379.K/DIR/2010 Tentang *Human Capital Management System*.

Referring to the GMS Resolution, based on the Minister of SOEs Regulation No. PER-04/MBU/2014 on Guidelines for Remuneration of Directors, Board of Commissioners, and Board of Trustees of State-Owned Enterprise and its amendment. As for employees, the policy is set forth in the PT PLN (Persero) Board of Directors' Decree No. 379.K/DIR/2010 on Human Capital Management System.

**E. KETERBUKAAN INFORMASI | INFORMATION DISCLOSURE****Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Principle 8 Improving the Information Disclosure****8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi 8.1 Public Company utilizes the information technology more broadly than the Website as disclosure medium****Terpenuhi**

Selain *Website*, Perusahaan memanfaatkan teknologi informasi dan aplikasi media sosial lainnya seperti melalui Aplikasi Mobile, Email, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Call Center. Aplikasi Android & IOS: PLN Mobile Twitter: @pln\_123 Facebook: PLN 123 Instagram: @plnkita Youtube: PT PLN (Persero) Call Centre: 123

**Fulfilled**

In addition to the Website, the Company utilizes information technology and other social media applications, such as through Mobile Application, Email, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, and Call Center. Android & iOS Applications: PLN Mobile, Twitter: @pln\_123, Facebook: PLN 123, Instagram: @plnkita, Youtube: PT PLN (Persero), Call Centre: 123

**8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali 8.2 Public Company Annual Report discloses the benefits for shareholders in Public Company at least 5% (five percent), as well as the disclosure of the final beneficial of shareholders in Public Company, especially through the main shareholders and the controlling shareholder****Terpenuhi**

Dalam laporan Tahunan 2017 ini, telah diungkapkan bahwa 100% kepemilikan saham dimiliki oleh Republik Indonesia, sehingga tidak ada pemegang saham lain yang mempunyai kepemilikan saham lebih dari 5%.

**Fulfilled**

In this Annual Report 2017, it has been disclosed that 100% share is owned by the Republic of Indonesia. Thus, there are no other shareholders who own more than 5% of share ownership.

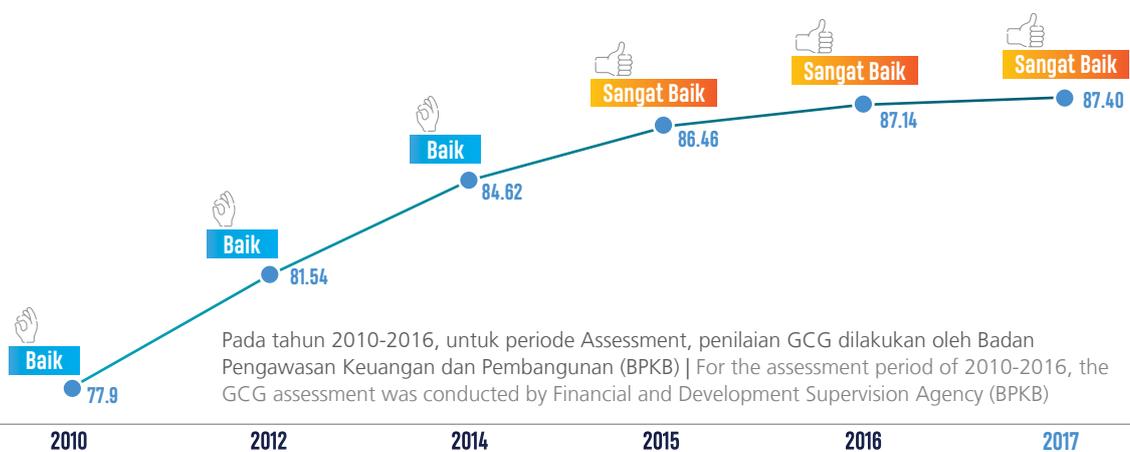
Implementasi Prinsip Dasar Dan Praktek GCG yang Baik  
Implementation of Basic Principles and Good Corporate Governance

PENCAPAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

1. Pencapaian Implementasi GCG berdasarkan Kriteria Kementerian BUMN

CORPORATE GOVERNANCE ACHIEVEMENT

1. Achievement of GCG Implementation based on Criteria of Ministry of SOEs



2. Pencapaian Corporate Governance Perception Indeks (CGPI)

2. Corporate Governance Perception Index (CGPI) Achievement



Tahun ini, untuk pertama kalinya PLN mengikuti penilaian Corporate Governance Perception Index (CGPI) dan berhasil mendapatkan predikat sebagai perusahaan "Terpercaya" atau "Trusted Company" | PLN for the first time was participating in the Corporate Governance Perception Index (CGPI) this year and succeeded in obtaining "The Most Trusted" or "Trusted Company" predicate.

## Implementasi Prinsip Dasar Dan Praktek GCG yang Baik Implementation of Basic Principles and Good Corporate Governance

### 3. Pencapaian LHKPN

### 3. LHKPN Achievement



Apresiasi atas kesungguhan PLN juga diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2017 sebagai "Instansi dengan Implementasi e-LHKPN terbaik". | Apresiasi atas kesungguhan PLN juga diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2017 sebagai "Instansi dengan Implementasi e-LHKPN terbaik".

### 4. Kepatuhan Penuh "Fully Comply" atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

### 4. Full Compliance on the Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 on the Implementation of



**100%**  
Fully Comply

## Implementasi Prinsip Dasar Dan Praktek GCG yang Baik

Implementation of Basic Principles and Good Corporate Governance

### RENCANA TATA KELOLA 2018

Untuk meningkatkan penerapan GCG di tahun 2018, Perusahaan telah menyusun dan merencanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Memutakhirkan Pedoman *Code of Conduct*
2. Memperbaharui Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris terhadap CoC secara *Web Based*.
3. Memutakhirkan pedoman Pendanaan Melalui Pinjaman
4. Memutakhirkan Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris terhadap Peraturan Gratifikasi Perusahaan

### GOVERNANCE PLAN 2018

The Company has prepared and planned the following activities to improve the GCG implementation in 2018:

1. Updating Code of Conduct
2. Updating Commitment of the Board of Directors and Board of Commissioners on the CoC using website
3. Updating the Financing Policy through Loans guideline
4. Updating Commitment of the Board of Directors and Board of Commissioners on the Company's Gratification Control



# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

## General Meeting of Shareholders

Sebagai instansi tertinggi dalam Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang tersebut mencakup meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pengelolaan Perseroan, mengubah anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan Direktur dan Anggota Dewan Komisaris, memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara Direktur dan lain-lain.

RUPS merupakan forum bagi pemegang saham untuk memberikan suara dan menetapkan sikap dalam proses pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan rencana strategis Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar (AD) Perseroan RUPS terdiri atas:

1. RUPS Tahunan yang diselenggarakan tiap tahun, RUPS Tahunan bersifat rutin, RUPS Tahunan terdiri dari:
  - RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan.
  - RUPS Tahunan tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
2. RUPS Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

RUPS diselenggarakan dengan wewenang utama dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan, di antaranya:

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Meningkatkan permodalan Perseroan, memecah maupun mengurangi jumlah saham dan membeli kembali saham.
3. Menggabungkan, melebur, mengambil alih maupun memisahkan unit usaha Perseroan dengan perusahaan lain atau menjadi unit usaha yang lain.
4. Menjaminkan sebagian besar aktiva perusahaan.
5. Mengesahkan transaksi material atau perubahan kegiatan usaha utama yang dilakukan Perseroan, serta benturan kepentingan

As the highest Organ in the Company, the General Meeting of Shareholders (GMS) has the authority not granted to the Board of Commissioners or the Board of Directors within the limits set forth in the Articles of Association and prevailing laws and regulations. The authorities include requesting the responsibility of the Board of Commissioners and the Board of Directors in relation to the Company's management, amending the Articles of Association, appointing and dismissing the members of Directors and Board of Commissioners, deciding on the segregation of duties and authority of management among Directors, etc.

The GMS is a forum for shareholders to vote and establish settings in important decision-making processes related to the Company's strategic plan.

Based on the Company's Articles of Association (AD), the GMS consists of:

1. Annual GMS, which is held annually and regularly. Annual GMS consists of:
  - Annual GMS on Annual Report Approval and Financial Statements Ratification.
  - Annual GMS on Ratification of Company's Work and Budget Plan
2. Extraordinary GMS, i.e. General Meeting of Shareholders held at any time, in accordance with the needs.

The GMS is held with the main authority and responsibility for making decisions, including:

1. Appointing and dismissing member of Board Of Commissioners and Directors.
2. Increasing the Company's capital, breaking down or reducing the number of shares and buying back shares.
3. Combining, merging, acquiring, or separating the Company's business unit with another company or to become another business unit.
4. Assuring most of the Company's assets.
5. Approving material transactions or changes to the main business activities of the Company, as well as conflicts of interest

Rapat Umum Pemegang Saham  
General Meeting of Shareholders**PEMEGANG SAHAM**

Pemegang Saham melalui RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris atau Direksi.

Pemegang Saham memiliki kewenangan untuk mempengaruhi dan/atau melakukan evaluasi dan/atau mengubah rencana Perseroan hanya melalui RUPS, baik RUPS Tahunan maupun RUPSLB (termasuk RUPS Sirkuler).

Pemegang Saham tidak mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

**SHAREHOLDERS**

Shareholders, through the GMS, hold all authorities that are not granted to the Board of Commissioners or the Board of Directors.

Shareholders have the authority to influence and/or evaluate and/or amend the Company's plans only through the GMS, either the Annual GMS or the EGMS (including Circular GMS).

Shareholders do not interfere with the Company's operations, which is the responsibility of the Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations.

**DAFTAR KEPEMILIKAN SAHAM PEMERINTAH INDONESIA PER 31 DESEMBER 2017****LIST OF SHAREHOLDINGS OF THE GOVERNMENT OF INDONESIA AS OF DECEMBER 31, 2017**

Nama Pemegang Saham Shareholders Name	Jumlah Saham (Lembar)* Total Shares (Share)*	Persentase Percentage
<b>Pemerintah Republik Indonesia  </b> Government of the Republic of Indonesia	<b>109.826.526</b>	<b>100%</b>

\* Satu Lembar Saham senilai Rp1.000.000,- | One Share as Rp1.000.000,-

PLN merupakan perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karenanya, tata cara dan prosedur pelaksanaan RUPS yang diselenggarakan mengacu pada keputusan Kementerian BUMN sebagai Pembina seluruh BUMN di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan.

PLN is a company that is 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, the procedures of GMS are organized based on the decision of the Ministry of SOEs as the Guide of all State-Owned Enterprises in Indonesia and the Company's Articles of Association.

## Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

### HAK PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham sebagai pemilik modal, memiliki hak dan tanggung jawab atas Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, Pemegang Saham sebagai pemilik Perseroan memiliki kepentingan terhadap :

1. Peningkatan keuntungan Perseroan
2. Peningkatan nilai Perseroan; dan
3. Bagaimana Perseroan dijalankan.

### TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham memiliki tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundangan yang berlaku, selain itu setidaknya Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham memiliki tanggung jawab untuk :

1. Memberikan Persetujuan Laporan dan Pengesahan atas Rencana Kerja Perusahaan
2. Memberikan Persetujuan Laporan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan, Laporan Kinerja dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
3. Memberikan Pelunasan Tanggung Jawab pengelolaan Perusahaan kepada Direksi dan Dewan Komisaris

### KEBIJAKAN HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

PLN Mengacu Pada Serangkaian Ketentuan Internal Terkait Pembinaan Hubungan Dengan Pemegang Saham.

### SHAREHOLDERS' RIGHT

Shareholders, as the owner of capital, have the rights and responsibilities of the Company in accordance with the Company's Articles of Association and legislation. In exercising its rights and responsibilities, the Shareholder, as the owner of the Company has an interest in:

1. Increasing Company's profits
2. Improving Company's value; and
3. How the Company operates.

### RESPONSIBILITIES OF SHAREHOLDERS

Shareholders have responsibilities as set forth in the Company's Articles of Association and the prevailing Laws and Regulations. In addition, the Shareholders, through the General Meeting of Shareholders, have the responsibility to:

1. Grant Approval of Reports and Ratification of the Company's Work Plan
2. Grant Approval of Reports and Ratification of the Financial Statements, Performance Reports, and Supervisory Reports of the Board of Commissioners
3. Provide Responsibility of the Company's management to the Board of Directors and Board of Commissioners

### RELATION POLICY WITH SHAREHOLDERS

PLN refers to a series of Internal Provisions Related to the Relationship Fostering with Shareholders.

**Anggaran Dasar PT PLN (Persero)**

PT PLN (Persero)'s Articles of Association

**Pedoman GCG**

GCG Guidelines

**Board Manual Buku 1 (Direksi dan Dewan Komisaris)**

Board Manual Book 1 (Directors and Board of Commissioners)

**Kebijakan Stakeholder Management Berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0119.P/DIR/2017 tentang Pedoman Tata Kelola Stakeholder**

Stakeholder Management Policy, under the Board of Directors' Regulation of PT PLN (Persero) No. 0119.P/DIR/2017 on Stakeholders' Governance Guideline

**Kebijakan Pengungkapan Informasi Perusahaan melalui Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 501.K/DIR/2012 tentang Pelayanan, Pengungkapan, dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT PLN (Persero)**

Policy on Disclosure of Company Information through PT PLN (Persero) Directors' Decree No. 501.K/DIR/2012 on Services, Disclosure, and Public Information Disclosure within PT PLN (Persero)

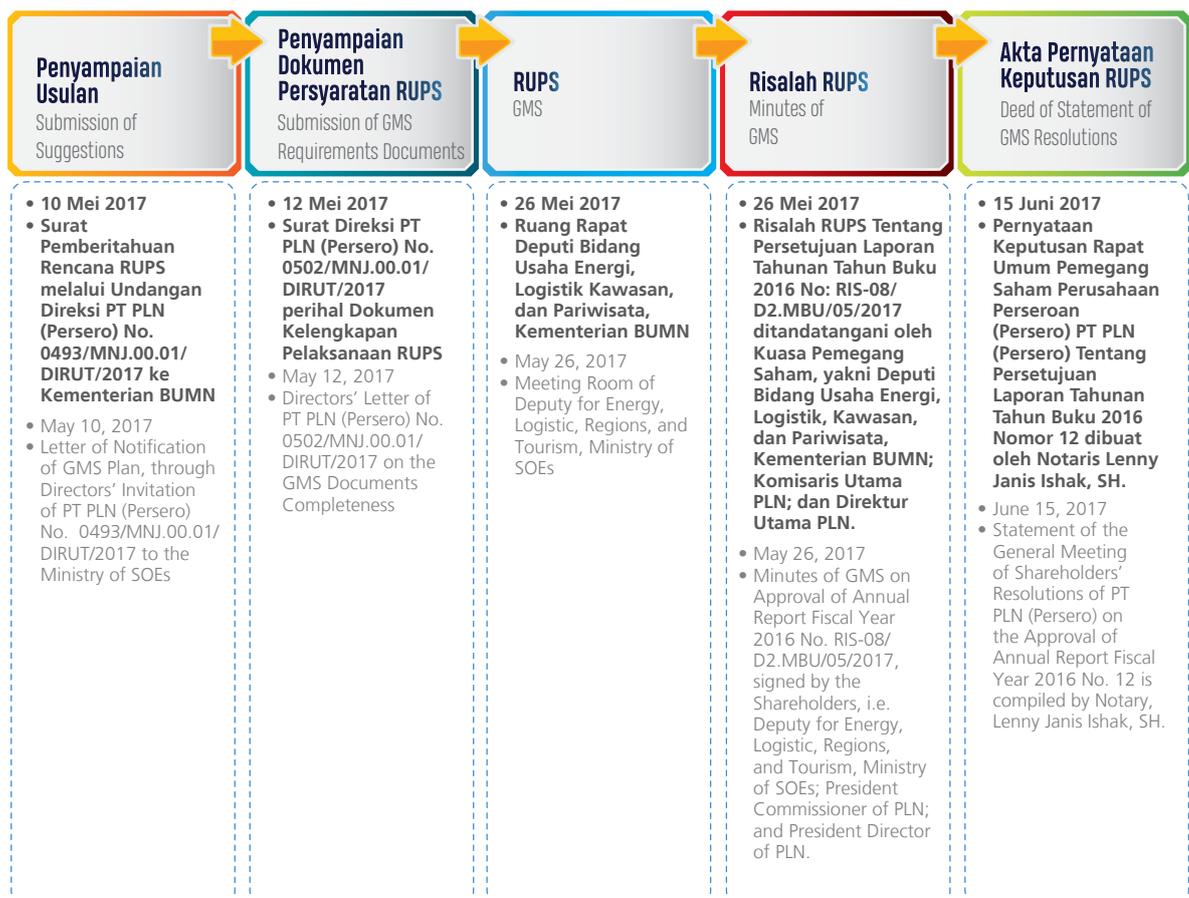
Rapat Umum Pemegang Saham  
General Meeting of Shareholders

## PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Selama tahun 2017, PLN melaksanakan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2017. Proses penyelenggaraan RUPS dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.

## THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS

Throughout 2017, PLN executed GMS to Approve Annual Report and Ratify Financial Statements Fiscal Year 2016, which is conducted on May 26, 2017. The process of organizing the GMS is conducted pursuant to Law No. 19 of 2013 on State-Owned Enterprises, Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, and refers to the Company's Articles of Association.



Pelaksanaan RUPS dapat berlangsung dengan hadirnya kuasa pemegang saham Pemerintah RI, dalam hal ini Menteri BUMN beserta staff yang ditugaskan serta dihadiri oleh seluruh jajaran Komisaris dan Direksi PLN.

The GMS may take place in the presence of the representative of the Government of the Republic of Indonesia, in this case, the Minister of SOEs, and the staff assigned, and GMS is attended by all members of PLN's Board of Commissioners and Board of Directors.

## Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Pemberitahuan rencana RUPS disampaikan oleh Direksi secara resmi kepada Kementerian BUMN beberapa waktu sebelum pelaksanaan, lengkap dengan agenda RUPS.

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham sebanyak 6 kali yaitu:

1. RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2017
2. RUPS Luar Biasa tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2017
3. RUPS Luar Biasa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2017
4. RUPS Luar Biasa tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2017
5. RUPS Luar Biasa tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2017
6. RUPS Luar Biasa tentang Pemberhentian Anggota Direksi yang ditetapkan pada tanggal 27 November 2017

Notification of GMS plan is submitted by the Board of Directors officially to the Ministry of SOEs sometime before the implementation, complete with the GMS' agenda.

In 2017, the Company has held 6 General Meeting of Shareholders, i.e.:

1. GMS to Approve Annual Report and Ratify Financial Statements Fiscal Year 2016, which is conducted on May 26, 2017
2. Extraordinary GMS to Appoint Members of the Board of Commissioners, stipulated on February 28, 2017
3. Extraordinary GMS to Dismiss and Appoint Members of the Board of Commissioners, stipulated on July 12, 2017
4. Extraordinary GMS on Dismissal, Change of Nomenclature of Position, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors, stipulated on July 24, 2017
5. Extraordinary GMS to Appoint Members of the Board of Commissioners, on July 28, 2017
6. Extraordinary GMS to Dismiss Members of the Board of Commissioners, stipulated on November 27, 2017

## KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI DALAM RUPS TAHUNAN

Pelaksanaan RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat sampai pada saat Rapat tersebut diselenggarakan, yaitu:

## ATTENDANCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS & BOARD OF DIRECTORS IN ANNUAL GMS

The Annual GMS is attended by members of Board of Commissioners and Directors who serve whilst the Meeting is held, i.e.:

Dewan Komisaris   Board of Commissioners				Direksi   Board of Directors		
Nama Name	Jabatan Position	Keanggotaan pada Komite Membership on Committee	Kehadiran dalam RUPS Tahunan Attendance on Annual GMS	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran dalam RUPS Tahunan Attendance on Annual GMS
Hasan Bisri	Plt. Komisaris Utama dan Komisaris   President Commissioner and Commissioner	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi   Nomination and Remuneration Committee Members	√	Sofyan Basir	Direktur Utama   President Director	√

Rapat Umum Pemegang Saham  
General Meeting of Shareholders

Dewan Komisaris   Board of Commissioners				Direksi   Board of Directors		
Nama Name	Jabatan Position	Keanggotaan pada Komite Membership on Committee	Kehadiran dalam RUPS Tahunan Attendance on Annual GMS	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran dalam RUPS Tahunan Attendance on Annual GMS
Oegroseno	Komisaris Independen   Independent Commissioner	Ketua Komite Manajemen Risiko   Chairman Risk Management Committee	√	Sarwono Sudarto	Direktur   Director	√
Darmono	Komisaris Independen   Independent Commissioner	Ketua Komite Audit   Chairman Audit Committee	√	Nicke Widyawati	Direktur   Director	√
Harry Susetyo Nugroho	Komisaris   Commissioner	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi   Nomination and Remuneration Committee Member	√	Supangkat Iwan Santoso	Direktur   Director	√
Jarman	Komisaris   Commissioner	Ketua Komite Manajemen Risiko   Chairman Risk Management Committee	√	Muhamad Ali	Direktur   Director	√
Budiman	Komisaris   Commissioner	Ketua Komite Nominasi & Remunerasi   Chairman Nomination and Remuneration Committee	√	Amir Rosidin	Direktur   Director	√
Aloysius K. Ro	Komisaris   Commissioner	Anggota Komite Manajemen Risiko   Risk Management Committee Member	√	Murtaqi Syamsuddin	Direktur   Director	√
Rionald Silaban	Komisaris   Commissioner	Anggota Komite Audit   Audit Committee Member	√	Nasri Sebayang	Direktur   Director	√
				Amin Subekti	Direktur   Director	√
				Djoko Rahardjo Abumanan	Direktur   Director	√
				Machnizon	Direktur	
				Haryanto W.S.	Direktur   Director	√

## Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

### KEPUTUSAN DAN REALISASI RUPS 2017

Penyelenggaraan RUPS di tahun 2017 tersebut menghasilkan beberapa keputusan yang telah ditindaklanjuti, dengan Rekapitulasi sebagai berikut.

#### HASIL RUPS TAHUNAN

RUPS Tahunan adalah RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2017.

### DECISIONS AND REALIZATION OF GMS 2017

The GMS in 2017 resulted in several decisions that have been followed-up, with the Recapitulation as follows.

#### RESULTS OF ANNUAL GMS

Annual GMS is a GMS to Approve Annual Report and Ratify Financial Statements Fiscal Year 2016, which is conducted on May 26, 2017.

No.	Agenda   Agenda	Keputusan   Decisions	Realisasi   Realization
1.	<p>Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun 2016 dan laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan selama tahun 2016.</p> <p>Approval of the Company's Annual Report on the circumstances and progress of the Company in 2016, and the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Annual Report of the Partnership and Community Development Program in 2016.</p>	<p>RUPS menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2016 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2016 serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) selama tahun buku 2016</p> <p>The GMS approved the Company's Annual Report on the circumstances and progress of the Company in the fiscal year 2016, the Supervisory Report of the Board of Commissioners Fiscal Year 2016, and the Annual Report of the Partnership and Community Development Program (PKBL) in the fiscal year 2016</p>	<p>Keputusan telah diberlakukan</p> <p>The decision immediately applies</p>
2.	<p>Persetujuan Penyajian Kembali (<i>Restatement</i>) Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan tahun buku 2015</p> <p>Approval of the restatement to the Financial Statements for Fiscal Year 2015, and granting of volledig acquit et de charge to the Board of Directors and Board of Commissioners on the management and supervision of the fiscal year 2015</p>	<p>RUPS menyetujui dan mengesahkan penyajian kembali (<i>restatement</i>) atas Laporan Keuangan tahun buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan tahun buku 2015</p> <p>The GMS approved and ratified the restatement to the Financial Statements for fiscal year 2015, and granted volledig acquit et de charge to the Board of Directors and Board of Commissioners on the management and supervision of the fiscal year 2015</p>	<p>Keputusan telah diberlakukan</p> <p>The decision immediately applies</p>

Rapat Umum Pemegang Saham  
General Meeting of Shareholders

No.	Agenda   Agenda	Keputusan   Decisions	Realisasi   Realization
3.	<p>Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016, termasuk Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2016, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan tahun buku 2016 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan</p> <p>Ratification of the Company's Annual Financial Statement for the Fiscal Year 2016, including the PKBL Financial Statements of the Fiscal Year 2016, as well as the granting of full <i>volledig acquit et de charge</i> to the Board of Directors and the Board of Commissioners on the management and supervision of the fiscal year 2016, and the granting of <i>acquit et de charge</i> to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision of the Partnership and Community Development Program</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &amp; Rekan, a Member of the RSM Network.</li> <li>· RUPS mengesahkan Laporan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &amp; Rekan, a Member of the RSM Network.</li> <li>· RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan dari tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et decharge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.</li> <li>· The GMS ratified the Company's Annual Financial Statement for the Fiscal Year 2016, which has been audited by KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &amp; Rekan, a Member of the RSM Network.</li> <li>· The GMS ratified the Partnership and Community Development Program Report for the Fiscal Year 2016, which has been audited by KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &amp; Rekan, a Member of the RSM Network.</li> <li>· The GMS granted full <i>volledig acquit et decharge</i> to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision on the Company which has been executed during the financial year ended on December 31, 2017.</li> </ul>	<p>Keputusan telah diberlakukan</p> <p>The decision immediately applies</p>

## Rapat Umum Pemegang Saham

### General Meeting of Shareholders

No.	Agenda   Agenda	Keputusan   Decisions	Realisasi   Realization
4.	<p>Penetapan pembagian laba bersih Perseroan Tahun Buku 2016</p> <p>Determination of the net profit sharing of the Company for the fiscal year 2016</p>	<p>RUPS menyetujui penetapan pembagian laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2016 sebesar Rp 10.511.911 juta sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Dividen tunai sebesar Rp 2.150.836 juta atau 20,46% dari laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2016</li> <li>· Sisa laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2016 sebesar Rp 8.361.075 juta ditetapkan sebagai cadangan dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pengembangan Perusahaan</li> </ul> <p>The GMS approved the determination of the current year profit sharing attributable to owners of the parent of the fiscal year 2016 of Rp10,511,911 million, as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Cash dividend of Rp2,150,836 million or 20.46% of the income for the year attributable to owners of the parent for the fiscal year 2016</li> <li>· The remaining of income for the year attributable to owners of the parent for fiscal year 2016 amounted to Rp8,361,075 million is designated as the reserve to support Company's operations and development</li> </ul>	<p>Dividen tunai sebesar Rp 2.150.836 juta telah dibayarkan kepada Pemilik Entitas Induk dan sisa laba sebesar Rp 8.361.075 telah ditetapkan sebagai Cadangan Umum</p> <p>Cash dividends as Rp 2.150.836 million is paid to the Owners of the Entity, and the remaining profit of Rp8,361,075 million is designated as General Reserves</p>
5.	<p>Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2016 dan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017</p> <p>Determination of Tantiem for Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the Fiscal Year 2016 and Salary/Honorarium, Facilities, and Allowances for Board of Directors and Board of Commissioners for the Fiscal Year 2017</p>	<p>RUPS menetapkan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2016 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2017</p> <p>GMS determined the Tantiem for Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the fiscal year 2016 and salary/honorarium, facilities, and allowances for Board of Directors and Board of Commissioners for the fiscal year 2017</p>	<p>Tantiem beserta gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris telah dibayarkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris</p> <p>Tantiem, along with salary/honorarium along with facilities and allowances for Board of Directors and Board of Commissioners, have been paid to the Board of Directors and Board of Commissioners</p>

Rapat Umum Pemegang Saham  
General Meeting of Shareholders

No.	Agenda   Agenda	Keputusan   Decisions	Realisasi   Realization
6.	<p>Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017</p> <p>Approval of the appointment of Public Accountants Firm to audit the Company's Financial Statement and Financial Statement on the Partnership and Community Development Program for Fiscal Year 2017</p>	<p>RUPS menyetujui :</p> <p>a. Penunjukan dan penetapan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &amp; Rekan, a member of the RSM network, untuk melaksanakan pekerjaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2017</li> <li>2) Audit umum atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2017</li> <li>3) Audit kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan pengendalian internal tahun buku 2017</li> <li>4) Evaluasi kinerja Perseroan tahun buku 2017</li> <li>5) Evaluasi capaian Key Performance Indicalor (Kpl) tahun buku 2017</li> </ol> <p>b. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbal jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut</p> <p>c. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &amp; Rekan, a member of the RSM network, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan PKBL Perseroan untuk tahun buku yang berakhir padatanggal 31 Desember 2017</p>	<p>Keputusan telah diberlakukan</p> <p>The decision immediately applies</p>

## Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

No.	Agenda   Agenda	Keputusan   Decisions	Realisasi   Realization
		<p>The GMS approved:</p> <p>a. Appointment and reestablishment of Public Accountant Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &amp; Rekan, a member of the RSM network, to perform:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). General Audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year 2017</li> <li>2). General Audit of the Financial Statement of Partnership and Community Development Program 2017</li> <li>3). Compliance audit of prevailing laws and regulations and internal control of fiscal year 2017</li> <li>4). Evaluation of Company's performance in the fiscal year 2017</li> <li>5). Evaluation of Key Performance Indicator (KPI) achievement in the fiscal year 2017</li> </ol> <p>b. Delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of audit fee, additional scope of work required, and other reasonable requirements for the said KAP</p> <p>c. Authorize the Board of Commissioners to determine the replacement KAP in the event of KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &amp; Rekan, a member of the RSM network, for any reason, cannot complete the audit of the Company's Financial Statement and the Financial Statement of the Company's PKBL for the fiscal year ended on December 31, 2017</p>	

### HASIL RUPS LUAR BIASA | RESULTS OF EXTRAORDINARY GMS

No.	Agenda   Agenda	Keputusan   Decisions	Realisasi   Realization
1.	<p>RUPS Luar Biasa tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2017</p> <p>Extraordinary GMS to Appoint Members of the Board of Commissioners, on February 28, 2017</p>	<p>Mengangkat Sdr. Rionald Silaban sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara</p> <p>To appoint Mr. Rionald Silaban as a member of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)</p>	<p>Telah dilakukan pengangkatan "Sdr. Rionald Silaban" sebagai Komisaris Perseroan dan mulai aktif sejak tanggal 28 Februari 2017</p> <p>"Mr. Rionald Silaban" has been appointed as the Company's Commissioner effective immediately since February 28, 2017</p>

Rapat Umum Pemegang Saham  
General Meeting of Shareholders

No.	Agenda   Agenda	Keputusan   Decisions	Realisasi   Realization
2.	RUPS Luar Biasa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2017  Extraordinary GMS to Dismiss and Appoint Members of the Board of Commissioners, stipulated on July 12, 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberhentikan dengan Hormat Sdr. Jarman sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara</li> <li>2. Mengangkat Sdr. Andy Noorsaman Sommeng sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara</li> </ol>	<p>Telah dilakukan pemberhentian dengan Hormat "Sdr. Jarman" sebagai Komisaris Perseroan dan Pengangkatan "Sdr. Andy Noorsaman Sommeng" sebagai Komisaris Perseroan dan mulai aktif sejak tanggal 12 Juli 2017</p> <p>"Mr. Jarman" has been dismissed honorably as the Company's Commissioner, and "Mr. Andy Noorsaman Sommeng" has been appointed as the Company's Commissioner, effective immediately since July 12, 2017</p>
3.	RUPS Luar Biasa tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2017  Extraordinary GMS on Dismissal, Change of Nomenclature of Position, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors, stipulated on July 24, 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberhentikan dengan Hormat : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sdr. Murtaqi Syamsuddin</li> <li>b. Sdr. Nasri Sebayang</li> <li>c. Sdr. Amin Subekti</li> </ol> Sebagai Direktur Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara. </li> <li>2. Merubah Nomenklatur Jabatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan</li> <li>3. Mengalihkan Penugasan Anggota-Anggota Direksi Perseroan</li> <li>4. Mengangkat : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sdr. Syofvi Felienty Roekman</li> <li>2) Sdr. Syamsul Huda</li> <li>3) Sdr. Ahmad Rofik</li> <li>4) Sdr. Wiluyo Kusdwiarto</li> </ol> Sebagai Direktur Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara </li> </ol>	<p>Telah dilakukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberhentian dengan Hormat : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sdr. Murtaqi Syamsuddin</li> <li>b. Sdr. Nasri Sebayang</li> <li>c. Sdr. Amin Subekti</li> </ol> Sebagai Direktur Perseroan. </li> <li>2. Perubahan Nomenklatur Jabatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan</li> <li>3. Pengalihan Penugasan Anggota-Anggota Direksi Perseroan</li> <li>4. Pengangkatan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sdr. Syofvi Felienty Roekman</li> <li>2) Sdr. Syamsul Huda</li> <li>3) Sdr. Ahmad Rofik</li> <li>4) Sdr. Wiluyo Kusdwiarto</li> </ol> Sebagai Direktur Perseroan dan mulai aktif sejak tanggal 24 Juli 2017</li> </ol> <p>Have been performed:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dismissed honorably: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mr. Murtaqi Syamsuddin</li> <li>b. Mr. Nasri Sebayang</li> <li>c. Mr. Amin Subekti</li> </ol> as the Company's Directors. </li> <li>2. Changed the Nomenclature of Positions of Members of Board of Directors of the Company</li> <li>3. Transferred the Duties of the Members of Company's Board of Directors</li> <li>4. Appointed: <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Ms. Syofvi Felienty Roekman</li> <li>2). Mr. Syamsul Huda</li> <li>3). Mr. Ahmad Rofik</li> <li>4). Mr. Wiluyo Kusdwiarto</li> </ol> as the Company's Directors effective immediately since July 24, 2017</li> </ol>

## Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

No.	Agenda   Agenda	Keputusan   Decisions	Realisasi   Realization
4.	<p>RUPS Luar Biasa tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2017</p> <p>Extraordinary GMS to Appoint Members of the Board of Commissioners, on July 28, 2017</p>	<p>Mengangkat Sdri. Ilya Avianti sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara</p> <p>To appoint Mrs. Ilya Avianti as a member of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)</p>	<p>Telah dilakukan pengangkatan "Sdri. Ilya Avianti" sebagai Komisaris Perseroan dan mulai aktif sejak tanggal 28 Juli 2017</p> <p>"Mrs. Ilya Avianti" has been appointed as the Company's Commissioner effective immediately since July 28, 2017</p>
5.	<p>RUPS Luar Biasa tentang Pemberhentian Anggota Direksi yang ditetapkan pada tanggal 27 November 2017</p> <p>Extraordinary GMS to Dismiss Members of the Board of Commissioners, stipulated on November 27, 2017</p>	<p>Memberhentikan dengan Hormat Sdri. Nicke Widyawati sebagai anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara</p> <p>To dismiss honorably Mrs. Nicke Widyawati as a member of the Board of Directors of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)</p>	<p>Telah dilakukan pemberhentian dengan Hormat "Sdri. Nicke Widyawati" sebagai Direktur Perseroan dan mulai aktif sejak tanggal 27 November 2017</p> <p>"Mrs. Nicke Widyawati" has been dismissed honorably as the Company's Director effective immediately since November 27, 2017</p>

# TATA LAKSANA HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

## Working Procedures of the Board of Commissioners and Directors

Board Manual merupakan perangkat atau aturan yang menjadi dasar tata laksana hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi, Board Manual digunakan sebagai tata laksana hubungan antar Organ Perusahaan yang mengacu kepada Peraturan Menteri dan Perundang-undangan yang berlaku.

The Board Manual is a tool or rule that forms the basis of the working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Board Manual is used as the working procedures between the Company's Organs, which refers to the prevailing Ministerial Regulations and Laws.

### PEMBAGIAN WEWENANG DAN PENGATURAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Isi dari Board Manual diantaranya adalah pendelegasian wewenang kepada Direksi pada batas-batas tertentu sesuai Anggaran Dasar dan sesuai butir-butir ketentuan Board Manual, untuk merealisasikan aksi korporasi tertentu sesuai dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagai pengelola Perusahaan. Namun, jika nilai maupun dampak dari aksi korporasi yang akan dilaksanakan Direksi ternyata melebihi dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Board Manual tersebut, maka Direksi harus terlebih dahulu mengajukan usulan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

### AUTHORITY DELEGATION AND APPROVAL MANAGEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The contents of the Board Manual include the delegation of authority to the Board of Directors within certain limits according to the Articles of Association and to the Board Manual provisions, to realize certain corporate actions in accordance with the duties, authorities, and responsibilities of the Board of Directors as the Manager of the Company. However, if the value and impact of corporate actions implemented by the Board of Directors exceed the provisions as stipulated in the Board Manual, the Board of Directors must first submit a proposal to the Board of Commissioners and obtain their written approval.

**Board Manual diantaranya berisi aturan pendelegasian wewenang kepada Direksi pada batas-batas tertentu sesuai Anggaran Dasar dan sesuai butir-butir ketentuan Board Manual, untuk merealisasikan aksi korporasi tertentu sesuai dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagai pengelola Perusahaan.**

The contents of the Board Manual include the delegation of authority to the Board of Directors within certain limits according to the Articles of Association and to the Board Manual provisions, to realize certain corporate actions in accordance with the duties, authorities, and responsibilities of the Board of Directors as the Manager of the Company.



Board Manual  
Dewan Komisaris dan Direksi  
Board Manual of the Board of  
Commissioners and Board of  
Directors

## Tata Laksana Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Working Procedures of the Board of Commissioners and Directors

Apabila untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan penjelasan lebih detail dari Direksi, maka Dewan Komisaris dapat mengundang dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi. Dalam menjalankan peran dan fungsi pengelolaan perusahaan serta mengelola hubungan dengan Dewan Komisaris, Direksi mengacu pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) yang berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan.

If such approval is required, in order to obtain a more detailed explanation from the Board of Directors, the Board of Commissioners may call a joint meeting, inviting the Board of Directors. In performing the roles and functions of the Company's management and managing the relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors refers to the Board Manual, which contains guidance on the governance of the Board of Commissioners and the Board of Directors and explains the stages of activities in a structured, systematic, easily understandable, and consistent. The Board Manual shall be a reference for the Board of Commissioners and the Board of Directors in performing their respective duties to achieve the Company's Vision and Mission.



## DEWAN KOMISARIS

### Board of Commissioners

Sebagai salah satu BUMN, PLN tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menegaskan bahwa semua Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia wajib mempunyai Dewan Komisaris yang bertugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan Direksi, serta memberi nasihat kepada Direksi. Agar tidak terjadi benturan kepentingan, setiap anggota Dewan Komisaris PLN dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

As one of the SOEs, PLN is subject to the provisions of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (UUPT), which states that all companies incorporated under the laws of Indonesia shall have a Board of Commissioners to supervise management policy and the course of management, either of the Company itself or the Company's business, conducted by the Board of Directors, as well as to provide advice to the Board of Directors. In order to avoid any conflict of interest, every member of PLN's Board of Commissioners is prohibited from holding concurrent positions as a member of the Board of Directors in SOEs, Regional-Owned Enterprises, Private-Owned Enterprises, and/or other positions, in accordance with the provisions of legislation.

### PEDOMAN BOARD MANUAL DEWAN KOMISARIS (TATA LAKSANA KERJA DEWAN KOMISARIS)

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual). Selain itu, Dewan Komisaris memiliki Pedoman Board Manual Dewan Komisaris (Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris) yang merupakan satu kesatuan dengan Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi. Pedoman ini mengatur mekanisme kerja Dewan Komisaris dan Unit Kerja Dewan Komisaris (Sekretariat Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris).

### BOARD MANUAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS (BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER)

In order to supervise and provide advice to the Board of Directors, the Board of Commissioners refers to the Work Guidelines for the Board of Commissioners and Board of Directors (Board Manual). In addition, the Board of Commissioners refers to the Board Manual of the Board of Commissioners (Board of Commissioners Charter), which is a joint effort with the Board Manual of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The guidelines govern the working mechanism of the Board of Commissioners and the Working Units of the Board of Commissioners (Board of Commissioners' Secretariat and Board of Commissioners' Committees),

Pedoman Board Manual Dewan Komisaris (Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris), mencakup:

1. Ketentuan Umum Jabatan Anggota Dewan Komisaris
2. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
3. Hak dan Kewajiban Dewan Komisaris
4. Prosedur Pengawasan Terhadap Kegiatan Operasional Perseroan
5. Rapat Dewan Komisaris
6. Rencana Kerja Tahunan dan Key Performance Indicators Dewan Komisaris
7. Organ Pendukung Dewan Komisaris

Board Manual Dewan Komisaris  
Board of Commissioners Charter



Board of Commissioners Charter includes:

1. General Provisions of the Member of the Board of Commissioners
2. Duties and Authorities of the Board of Commissioners
3. Authorities and Obligations of the Board of Commissioners
4. Supervision Procedure on the Company's Operations
5. Board of Commissioners' Meeting
6. Annual Work Plan and Key Performance Indicators of the Board of Commissioners
7. Direct Report to the Board of Commissioners

## Dewan Komisaris

Board of Commissioners

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Tugas tersebut dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundangan yang berlaku, tugas Dewan Komisaris adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perseroan rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS;
4. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut;
5. Mengambil alih tugas dan tanggung jawab operasional selayaknya Direksi pada kondisi dimana Perseroan tidak memiliki satu pun Direktur;
6. Mewakili Perseroan dalam hal seluruh Direksi memiliki benturan kepentingan;
7. Melakukan proses penunjukan Auditor Eksternal Perseroan untuk ditetapkan oleh RUPS.

### DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The duties and responsibilities of the Board of Commissioners are to supervise management policies, manage the Company and its interests, and advise the Board of Directors. The duties are conducted in the interests of the Company and are based on its purposes and objectives, not on the interests of particular parties or groups.

According to the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners' duties are:

1. Supervising the Company's management policies carried out by the Directors, and providing advice to the Directors on the Company's development plan, work and budget plan, and implementation of provisions of the Articles of Association, and decisions of the General Meeting of Shareholders and on prevailing laws and regulations;
2. Performing duties, authorities, and responsibilities, in line with the Articles of Association and GMS Resolutions, as well as the prevailing laws and regulations;
3. Fulfilling the Company's interests by taking into consideration the interests of Shareholders, and being accountable to the GMS;
4. Examining and reviewing the Annual Report prepared by the Board of Directors, and signing the said report;
5. Taking over the operational duties and responsibilities of the Board of Directors in the event that the Company does not have any single Director;
6. Representing the Company in the event that the Board of Directors has a conflict of interest;
7. Organizing the appointment of the External Auditor of the Company to be determined by the GMS.

## WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris berwenang untuk:

1. Secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak:
  - Memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan; dan
  - Memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain, surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Membentuk Komite-komite yang berfungsi sebagai penunjang tugas pengawasan Dewan Komisaris atau menunjuk tenaga ahli;
3. Meminta penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan;
4. Meminta Direksi dan/atau Pejabat Perseroan dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
5. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
6. Mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris;
7. Memberhentikan sementara waktu seorang atau lebih Anggota Direksi.

## AUTHORITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In conducting supervisory duties, the Board of Commissioners is authorized to:

1. Collectively or individually, at all times:
  - Entering buildings, yards, and locations used by or owned by the Company; and
  - Examining books, evidence papers, inventory, examining and matching cash positions for verification and other purposes, examining securities, and acknowledging any actions taken by the Board of Director.
2. Establishing Committees that functions as the support to the supervisory task of the Board of Commissioners or appointing experts;
3. Inquiring explanation on matters that are asked to the Board of Directors, to which the Board of Directors must provide answers;
4. Requesting Directors and/or other Company's officials reporting to Directors, upon Directors' knowledge, to attend Board of Commissioners' Meeting;
5. Attending the Board of Directors' Meeting and providing opinions on the matters discussed;
6. Appointing Board of Commissioners' Secretary;
7. Dismissing temporarily one or more Members of the Board of Directors.

**Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretariat Dewan Komisaris dan tiga komite yang terdiri dari Komite Audit, Komite Manajemen Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi serta membagi tugas dan wewenang diantara Dewan Komisaris dalam bentuk penetapan Komisaris sebagai Ketua maupun anggota pada komite-komite tersebut.**

In performing its duties, the Board of Commissioners is assisted by the Secretariat of the Board of Commissioners and three committees, i.e. Audit Committee, Risk Management Committee, and Nomination and Remuneration Committee. The Board of Commissioners also segregates the duties and authorities of the Board of Commissioners, in the form of appointment of Commissioners as Chairman or members on the Committees.

## Dewan Komisaris

Board of Commissioners

### KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Kewajiban Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perusahaan adalah:

1. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan serta perubahan dan tambahannya, laporan berkala dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
2. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dalam hal ini Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
4. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan;
5. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
6. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris;
7. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain;
8. Memberikan laporan tentang tugas dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham

Selain hal tersebut di atas, Dewan Komisaris juga mengawasi kepatuhan terhadap semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan melakukan penelaahan, pembahasan dan pemberian nasehat atas pengendalian internal Perseroan, yaitu seluruh sistem dan proses yang terdapat dalam perusahaan yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan perusahaan, khususnya dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### OBLIGATIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners, according to the Company's Articles of Association, are obliged to:

1. Provide opinions and advice to the General Meeting of Shareholders on the Company's development plan, annual work and budget plan, including its amendments and supplements, regular reports, and other reports from the Board of Directors;
2. Supervise the execution of the Company's Work and Budget Plan, inform of the evaluation results and its opinion in the General Meeting of Shareholders;
3. Follow developments in the Company's activities. If the Company is showing signs of decline, the Board of Commissioners must report it in the General Meeting of Shareholders with recommendations on corrective measures;
4. Provide opinions and advice to the General Meeting of Shareholders on all other issues deemed necessary to the Company's management;
5. Perform other supervisory duties as required by the General Meeting of Shareholders;
6. Compile the Minutes of the Meeting of the Board of Commissioners;
7. Report to the Company on any share ownership and/or familial relationship in the Company or in other companies;
8. Provide report on the supervisory and duties that have been carried out during the previous fiscal year to the General Meeting of Shareholders

In addition to the above, the Board of Commissioners supervises compliance with all prevailing laws and regulations.

### BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES

Board of Commissioners' supervisory task is to perform evaluations, have discussions, and provide advice for the Company's internal control, i.e. the entire system and processes contained within the Company, designed to provide reasonable assurance on the achievement of corporate objectives, particularly in improving the effectiveness and efficiency of operations, financial reporting reliability, and compliance with laws and regulations.

Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

1. Pengawasan atas Efektifitas dan Efisiensi Operasi dan Investasi:
  - a. Pengawasan atas efektifitas pengelolaan organisasi dan SDM.  
Pengawasan dilaksanakan untuk menilai efektifitas organisasi dan tata kerja, antara lain struktur organisasi dan pengelolaan jabatan strategis dan manajemen SDM.
  - b. Pengawasan atas usulan RKAP yang diajukan oleh Direksi dilakukan dengan cara :
    - Memastikan bahwa rencana kerja yang tertuang dalam RKAP telah disusun sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan serta penugasan dari Pemerintah;
    - Sasaran yang ditetapkan dalam usulan RKAP dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien.
  - c. Pengawasan atas Laporan Pelaksanaan RKAP berupa Laporan Manajemen dan Realisasi Key Performance Indicators (KPI) Korporat PT PLN (Persero).
    - Melakukan penelaahan atas Laporan Manajemen dan Realisasi KPI Triwulanan dan Laporan Manajemen serta Realisasi KPI Tahunan guna memastikan akurasi dan keandalan data/informasi yang disajikan dalam Laporan Manajemen tersebut.
    - Pengawasan atas Pelaksanaan Audit PT PLN (Persero) Tahun 2016 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), meliputi Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Keuangan PKBL Perseroan, Kinerja dan Kepatuhan Perseroan.
  - d. Pengawasan atas Pengelolaan Risiko.  
Pengawasan atas pengelolaan risiko dilakukan dengan :
    - Melakukan telaah atas analisa risiko yang dilakukan Direksi terutama yang terkait dengan permintaan rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris atas rencana tindakan Direksi (tertentu), dengan mengkaji apakah analisa risiko yang dilakukan telah memadai sesuai ketentuan manajemen risiko di lingkungan perusahaan;
    - Melakukan telaahan atas risiko dengan level tinggi dan ekstrem serta mengingatkan atas
1. Supervision of the Effectiveness and Efficiency of Operations and Investment:
  - a. Effective supervision of the management of the organization and human resources.  
Supervision is conducted to assess the effectiveness of organization and work procedures, including organizational structure and management of strategic positions and HR.
  - b. The supervision of the proposed Work and Budget Plan (RKAP) suggested by the Board of Directors, is performed by:
    - Ensuring that the work plan in the RKAP has been prepared in accordance with the vision, mission, and objectives of the Company, and with the assignment of the Government;
    - The goals set out in the proposed RKAP can be achieved more effectively and efficiently.
  - c. Supervision over RKAP Implementation Report is a Management and Realization Report of Corporate Key Performance Indicators (KPI) of PT PLN (Persero).
    - Reviewing the Management Report, and KPI Quarterly Realization and Management Report, and Annual KPI Realization to ensure the accuracy and reliability of the data/information presented in the Management Report.
    - Supervision over Audit of PT PLN (Persero) 2016 by Public Accountant Firm (KAP), which covers the Company's Financial Statement, Company's PKBL Financial Statement, and the Company's Performance and Compliance.
  - d. Supervision of Risk Management.  
Supervision of risk management is conducted by:
    - Conducting a review of the risk assessment by the Board of Directors, particularly related to the request of recommendation or approval of the Board of Commissioners for (certain) action plan of the Directors, by examining whether the risk analysis was conducted adequately, in accordance with risk management within the Company's environment;
    - Conducting research for risks with high and extreme levels, being alert to mitigation

## Dewan Komisaris

Board of Commissioners

- monitoring* terhadap mitigasi yang dilakukan serta memberikan saran-asaran atas risiko yang mungkin belum teridentifikasi.
2. Pengawasan atas keandalan informasi/pelaporan keuangan  
Pengawasan atas keandalan sistem informasi dilakukan dengan menelaah, membahas dan memberikan nasehat atas :
    - a. Prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi dan sistem informasi yang telah berjalan serta memastikan bahwa Program Pengembangan Teknologi Informasi berjalan sesuai rencana;
    - b. Temuan audit oleh KAP mengenai kelemahan sistem informasi perseroan, untuk memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan tersebut.
  3. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
    - a. Pengawasan atas Efektifitas Pemeriksaan Internal  
Pengawasan dilakukan dengan pertemuan secara regular dengan Satuan Pengawas Intern (SPI)
    - b. Pengawasan atas tindak lanjut temuan hasil audit eksternal  
Pengawasan dilakukan melalui penelaahan, pembahasan dan pemberian nasehat untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil temuan audit oleh KAP dan BPK telah ditindak lanjuti oleh Direksi.
    - c. Pengawasan atas Penerapan Unsur GCG  
Pengawasan atas penerapan unsur GCG dilakukan dengan memastikan bahwa semua usulan yang diajukan Direksi yang meminta persetujuan maupun rekomendasi Dewan Komisaris telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  4. Pengawasan atas Pengelolaan PKBL  
Pembahasan dan penelaahan dilakukan atas langkah-langkah yang telah dilakukan perseroan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PKBL.
  5. Nasehat dan Teguran  
Dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pengelolaan Perseroan, Dewan Komisaris telah memberikan beberapa nasehat dan peringatan kepada Direksi berdasarkan informasi yang diperoleh circumstances, and providing advice on possible risks that have not been identified.
  2. Controlling the reliability of information/financial reporting  
Supervising the reliability of information systems is performed by examining, discussing, and providing advice on:
    - a. Preparation procedure of the consolidated financial statements and the information systems that have been running, and ensuring that the Information Technology Development Program runs accordingly;
    - b. The KAP has some audit findings regarding the weaknesses of the Company's information system, and the Board of Directors has to follow-up on the findings.
  3. Monitoring the Compliance with Prevailing Legislation and regulations.
    - a. Review on the effectiveness of Internal Audit Supervision is conducted through regular meetings with the Internal Audit Unit (SPI)
    - b. Supervision of the follow-up on external audit findings  
Supervision is conducted through review, discussion, and provision of advice to ensure that the recommendations of audit findings by KAP and BPK have been followed-up by the Board of Directors.
    - c. Supervision of the GCG Elements Implementation  
The supervision of GCG elements implementation is conducted by ensuring that all the proposals from the Board of Directors for approval and recommendation to the Board of Commissioners, is in accordance with applicable regulations.
  4. Supervision of the Partnership and Community Development Program (PKBL) Management  
The Company has discussed and reviewed the measures to improve the transparency and accountability in PKBL management.
  5. Advice and Reprimand  
In controlling the course of the Company's management, the Board of Commissioners has provided advice and reprimand to the Board of Directors, based on the information obtained and

Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

dan fakta/kenyataan yang diterima dari sumber yang layak dipercaya, dari hasil evaluasi dalam kunjungan kerja yang dilakukan serta dari penyampaian surat-surat yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan, antara lain berkaitan dengan penghapusan Piutang Ragu-Ragu (PRR), ATTB dan lainnya.

the facts from a credible source, from the evaluation results of a work visit, as well as from letters that were addressed to the Board of Commissioners from both inside and outside of the Company, relating to the elimination of Doubtful Accounts (PRR), ATTB, etc.

**KRITERIA DAN PROSEDUR PENETAPAN DEWAN KOMISARIS**

Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Persyaratan formal anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah: (a) dinyatakan pailit, (b) menjadi anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit, dan (c) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

**CRITERIA AND PROCEDURES FOR DETERMINATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS**

The Board of Commissioners is an assembly and each member of the Board of Commissioners cannot act alone, but has to abide by a consensus. Formal requirements of the members of the Board of Commissioners are individuals who have Indonesian citizens who are competent to perform legal acts, with the exception that within 5 (five) years of the appointment, he/she: (a) is declared bankrupt, (b) was a member of Directors or Board of Commissioners, or Board of Trustees, which was responsible for causing a Company or State-Owned Enterprise to be declared bankrupt, and (c) has been convicted of a criminal offense that is detrimental to the country's financial state and/or SOEs and/or related to the financial sector.

**Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Susunan, persyaratan, nominasi, dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

The Board of Commissioners is appointed and dismissed by the GMS. The structure, requirements, nomination, and appointment of the Board of Commissioners are determined by the GMS, in accordance with the provision of the Articles of Association and applicable legislation.

Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Kuasa Pemegang Saham Pemerintah Republik Indonesia, Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila permohonan pengunduran diri tidak mencantumkan tanggal efektif pengunduran diri dan tidak ada keputusan RUPS mengenai pengunduran diri tersebut, maka anggota Dewan Komisaris tersebut efektif berhenti sejak lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal diterimanya surat permohonan pengunduran diri.

Members of the Board of Commissioners are entitled to resign from their position by notifying the Company in writing of their intention, with a copy to the Authority of the Shareholders of the Government of the Republic of Indonesia, members of the Board of Commissioners, and Board of Directors no later than 30 (thirty) days before the date of his/her resignation. If the resignation does not specify an effective date and no decision is made in the GMS, then the resigning member of the Board of Commissioners is deemed to have resigned 30 (thirty) days from the date of receipt of the letter of resignation.

## Dewan Komisaris Board of Commissioners

### MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan bunyi Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, masa tugas anggota Dewan Komisaris ditetapkan untuk 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk melakukan penggantian sewaktu-waktu apabila dianggap perlu, demi kebaikan perusahaan yang bersangkutan.

### KEBIJAKAN TERKAIT PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS APABILA TERLIBAT DALAM KEJAHATAN KEUANGAN

Apabila dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris terlibat dalam kejahatan keuangan, maka proses tindak lanjut yang dilakukan Perusahaan akan didasarkan pada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### PENDELEGASIAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pendelegasian wewenang oleh seorang anggota Dewan Komisaris kepada anggota Dewan Komisaris lainnya hanya dapat dilakukan melalui surat kuasa khusus untuk keperluan dimaksud dan pendelegasian wewenang tersebut tidak melepaskan tanggung jawab Dewan Komisaris secara kolektif. Praktiknya, pada tahun 2017 terdapat pendelegasian wewenang seorang Anggota Dewan Komisaris lainnya melalui surat kuasa khusus. Dengan demikian, kuorum Rapat Dewan Komisaris untuk pengambilan keputusan dapat terpenuhi.

### PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretariat Dewan Komisaris dan tiga komite yang terdiri dari Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi serta membagi tugas dan wewenang diantara Dewan Komisaris dalam bentuk penetapan Komisaris sebagai Ketua maupun anggota pada komite-komite tersebut.

### TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In accordance with the Article 28 Paragraph 3 Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, the duty of members of the Board of Commissioners shall be stipulated for 5 (five) years and the member shall be reappointed for 1 (one) term of office, without prejudice to the GMS's right to make changes at any time if deemed necessary, for the good of the Company concerned.

### POLICY RELATED TO RESIGNATION OF BOARD OF COMMISSIONERS IF INVOLVED IN FINANCIAL CRIME

If in performing its duties, the Board of Commissioners is engaged in financial crimes, then the Company's follow-up process will be based on the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations.

### DELEGATION OF AUTHORITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Delegation of authority by a member of the Board of Commissioners to other members of the Board of Commissioners may only be granted by a special power of attorney for such purpose, and the delegation of such authority shall not release the responsibility of the Board of Commissioners collectively. In practice, in 2017 there is a delegation of authority of another member of the Board of Commissioners by a special power of attorney. Thus, the quorum of the Board of Commissioners' Meeting for decision-making can be fulfilled.

### SEGREGATION OF DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In performing its duties, the Board of Commissioners is assisted by the Secretariat of the Board of Commissioners and three committees, i.e. Audit Committee, Risk Management Committee, and Nomination and Remuneration Committee. The Board of Commissioners also segregates the duties and authorities of the Board of Commissioners, in the form of appointment of Commissioners as Chairman or members on the Committees.

Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

Komite Audit Audit Committee	Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee	Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee
Darmono	Oegroseno	Budiman
Rionald Silaban	Aloysius Kiik Ro	Hasan Bisri
Ilya Avianti	Andy Noorsaman Sommeng	Harry Susetyo Nugroho

SUSUNAN PERSONALIA DAN MASA TUGAS  
DEWAN KOMISARIS

Komposisi Dewan Komisaris PLN selama tahun 2017 mengalami 3 kali perubahan, sebagai berikut:

- Sesuai Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor: SK-266/MBU/12/2016 tanggal 14 Desember 2016, susunan personalia Dewan Komisaris Perseroan hingga 28 Februari 2017 adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan   Position	Nama   Name
1	Plt. Komisaris Utama dan Komisaris   Acting President Commissioner and Commissioner	Hasan Bisri
2	Komisaris Independen   Komisaris Independen	Oegroseno
3	Komisaris Independen   Independent Commissioner	Darmono
4	Komisaris   Commissioner	Harry Susetyo Nugroho
5	Komisaris   Commissioner	Jarman
6	Komisaris   Commissioner	Budiman
7	Komisaris   Commissioner	Aloysius K. Ro

- Sesuai Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS,
  - Nomor: SK-41/MBU/02/2017 tanggal 28 Februari 2017
  - Nomor: SK-128/MBU/07/2017 tanggal 12 Juli 2017
  - Nomor: SK-145/MBU/07/2017 tanggal 28 Juli 2017

Susunan personalia Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan   Position	Nama   Name
1	Plt. Komisaris Utama dan Komisaris   Acting President Commissioner and Commissioner	Hasan Bisri
2	Komisaris Independen   Independent Commissioner	Oegroseno
3	Komisaris Independen   Independent Commissioner	Darmono
4	Komisaris   Commissioner	Harry Susetyo Nugroho
5	Komisaris   Commissioner	Budiman
6	Komisaris   Commissioner	Aloysius K. Ro
7	Komisaris   Commissioner	Rionald Silaban
8	Komisaris   Commissioner	Andy Noorsaman Sommeng
9	Komisaris   Commissioner	Ilya Avianti

THE PERSONNEL AND THE TERMS OF OFFICE OF  
THE BOARD OF COMMISSIONERS

In 2017, the composition of the Board of Commissioners changed 3 times, as follows:

- In line with the Minister of SOEs Regulation by GMS No. SK-266/MBU/12/2016 dated December 14, 2016, the personnel of the Company's Board of Commissioners up to February 28, 2017, is as follows:

- In accordance with the Minister of SOEs' Decree by the GMS,
  - No: SK-41/MBU/02/2017 dated February 28, 2017
  - No: SK-128/MBU/07/2017 dated July 12, 2017
  - No: SK-145/MBU/07/2017 dated July 28, 2017

The composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

## Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Sehingga ringkasan perubahan komposisi personalia Dewan Komisaris, tanggal pengangkatan dan masa jabatan tahun 2017, sebagai berikut :

Thus, the brief summary of the changes in the Board of Commissioners' composition, the date of appointment, and terms of office in 2017, are as follow:

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Akhir Masa Jabatan End of Term of Office
Hasan Bisri	Pt. Komisaris Utama   Acting President Commissioner	24 Mei 2016 May 24, 2016	-
	Komisaris   Commissioner	23 Desember 2014 December 23, 2014	23 Desember 2019 December 23, 2019
Oegroseno	Komisaris Independen   Independent Commissioner	16 Oktober 2014 October 16, 2014	16 Oktober 2019 October 16, 2019
Darmono	Komisaris Independen   Independent Commissioner	16 Oktober 2014 October 16, 2014	16 Oktober 2019 October 16, 2019
Budiman	Komisaris   Independent Commissioner	23 Desember 2014 December 23, 2014	23 Desember 2019 December 23, 2019
Harry Susetyo Nugroho	Komisaris   Commissioner	2 April 2013 April 2, 2013	2 April 2018 April 2, 2018
Aloysius K. Ro	Komisaris   Commissioner	25 September 2015 September 25, 2015	25 September 2020 September 25, 2020
Rionald Silaban	Komisaris   Commissioner	28 Februari 2017 February 28, 2017	28 Februari 2022 February 28, 2022
Andy Noorsaman Sommeng	Komisaris   Commissioner	12 Juli 2017 July 12, 2017	12 Juli 2022 July 12, 2022
Ilya Avianti	Komisaris   Commissioner	28 Juli 2017 July 28, 2017	28 Juli 2022 July 28, 2022

## INDEPENDENSI & KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Setiap anggota Dewan Komisaris menandatangani pakta integritas pada tiap awal tahun untuk menyatakan status independensinya dan pada setiap akhir tahun untuk menyatakan apakah selama tahun terakhir terdapat situasi yang memiliki benturan kepentingan oleh Dewan Komisaris atas tindakan yang dilakukan. Sekretaris Dewan Komisaris bertugas memastikan apakah praktik ini telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip GCG.

## INDEPENDENCE & SHARE OWNERSHIP OF THE MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS

Each member of the Board of Commissioners signs an integrity pact at the beginning of each year to declare its independence status and at the end of each year to state whether during the year, there had been any conflict of interests by the Board of Commissioners for the actions taken. The Secretary of the Board of Commissioners has the duty to ensure that this practice is carried out in accordance with the GCG principles.

Pakta Integritas Integrity Pact	Hasan Bisri	Oegroseno	Darmono	Budiman	Harry Susetyo Nugroho	Aloysius K. Ro	Rionald Silaban	Andy Noorsaman Sommeng	Ilya Avianti
Sanggup mengemban amanah atas dasar kepercayaan ( <i>fiduciary duty</i> ) Willing to have the fiduciary duty	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

Pakta Integritas Integrity Pact	Hasan Bisri	Oegroseno	Darmono	Budiman	Harry Susetyo Nugroho	Aloysius K. Ro	Rionald Silaban	Andy Noorsaman Sommeng	Ilya Avianti
Mengupayakan capaian kinerja Perusahaan secara maksimal dengan mengindahkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik ( <i>good corporate governance</i> ) Striving for Company's maximum performance by adhering to the principles of good corporate governance	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Bersikap dan mengambil keputusan dengan penuh kehati-hatian atau <i>prudent</i> ( <i>duty of care</i> ) Being careful and prudent in making decisions ( <i>duty of care</i> )	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Berani mengambil tanggung jawab penuh atas jalannya Perusahaan ( <i>responsibility</i> ) Taking full responsibility for the Company	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Secara konsisten mendahulukan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi ( <i>duty of loyalty</i> ) Consistently prioritizing the Company's best interests over personal interests ( <i>duty of loyalty</i> )	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Menjauhi segala bentuk benturan kepentingan baik potensi maupun actual ( <i>Conflict of Interest Rule</i> ) Steering clear of any potential or actual conflict of interest ( <i>Conflict of Interest Rule</i> )	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Mentaati semua ketentuan perundangan yang berlaku ( <i>accountability</i> ) Complying with all prevailing laws ( <i>accountability</i> )	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

Pakta Integritas Integrity Pact	Hasan Bisri	Oegroseno	Darmono	Budiman	Harry Susetyo Nugroho	Aloysius K. Ro	Rionald Silaban	Andy Noorsaman Sommeng	Ilya Avianti
Selama menjabat, tidak akan memanfaatkan posisi pada Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan saudara, maupun golongan tertentu. During their tenure, they will not take advantage of the Company's position, directly or indirectly, for their personal, family, and relative's interests, and certain groups' interests.	√	√	√	√	√	√	√	√	√

## Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Keluarga

## Share Ownership of the Board of Commissioners and Families

Nama Name	Kepemilikan Saham   Shareholding		
	Pribadi pada Perusahaan Personal in the Company	Keluarga Pada Perusahaan Family at the Company	Pribadi/ Keluarga Pada Perusahaan Lain Personal/Family at Other Companies
Hasan Bisri	Tidak ada   None	Tidak ada   None	Tidak ada   None
Oegroseno	Tidak ada   None	Tidak ada   None	Tidak ada   None
Darmono	Tidak ada   None	Tidak ada   None	Tidak ada   None
Budiman	Tidak ada   None	Tidak ada   None	Tidak ada   None
Harry Susetyo Nugroho	Tidak ada   None	Tidak ada   None	Tidak ada   None
Aloysius K. Ro	Tidak ada   None	Tidak ada   None	Tidak ada   None
Rionald Silaban	Tidak ada   None	Tidak ada   None	Tidak ada   None
Andy Noorsaman Sommeng	Tidak ada   None	Tidak ada   None	Tidak ada   None
Ilya Avianti	Tidak ada   None	Tidak ada   None	Tidak ada   None

## RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Beberapa anggota Dewan Komisaris PLN memiliki jabatan pada beberapa institusi lain. Namun demikian perangkapan jabatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan larangan rapat jabatan sebagaimana ditetapkan dalam kriteria Dewan Komisaris PLN. Adapun rincian Rangkap Jabatan dari anggota Dewan Komisaris PLN adalah sebagai berikut:

## CONCURRENT POSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Several members of the PLN's Board of Commissioners have positions at other institutions. However, the concurrent positions are not in incompliance with the provisions of prohibition of concurrent positions, as stipulated in the PLN's Board of Commissioners criteria. The details of Concurrent Positions of the members of the Board of Commissioners of PLN are as follows:

Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan di PLN Position in PLN	Jabatan di Instansi/ Perusahaan Lain Position in Other Institutions/ Companies	Nama Instansi/ Perusahaan Lain Name of the Other Institutions/Companies
Hasan Bisri	Plt. Komisaris Utama dan Komisaris   Acting President Commissioner and Commissioner	-	-
Oegroseno	Komisaris Independen   Independent Commissioner	-	-
Darmono	Komisaris Independen   Independent Commissioner	-	-
Budiman	Komisaris   Commissioner	-	-
Harry Susetyo Nugroho	Komisaris   Commissioner	-	-
Aloysius K. Ro	Komisaris   Commissioner	Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha   Deputy for Restructuring and Business Development	Kementerian BUMN Ministry of SOEs
Rionald Silaban	Komisaris   Commissioner	Staf Ahli Bidang Makro dan Keuangan Internasional   Expert Staff of Macro-Finance and International Finance	Kementerian Keuangan Ministry of Finance
Andy Noorsaman Sommeng	Komisaris   Commissioner	Dirjen Ketenagalistrikan   Director General of Electricity	Kementerian ESDM Ministry of EMR
Ilya Avianti	Komisaris   Commissioner	Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisiner   Chairman of Audit Board, concurrently the member of Board of Commissioners	Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Financial Services Authority

## PROGRAM PENGENALAN PERUSAHAAN UNTUK DEWAN KOMISARIS

Program Pengenalan ditujukan bagi Komisaris yang baru pertama kali diangkat di Perseroan agar Komisaris tersebut segera mengenal proses bisnis Perseroan, termasuk seluruh permasalahan yang telah, sedang dan akan dihadapi sehingga dapat bekerja dengan optimal untuk kepentingan Perseroan.

Program pengenalan yang diberikan kepada Komisaris sekurang-kurangnya meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh Perseroan.

## TRAINING AND INTRODUCTION PROGRAM OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The introduction program is intended for new Commissioners appointed for the first time in the Company to be able to immediately recognize the business processes of the Company, including all previous problems, and potential problems in the future, in order to work optimally for the benefit of the Company.

The introduction program for the new Commissioners consists of the following:

1. Implementation of the *Good Corporate Governance* principles in the Company.

## Dewan Komisaris

Board of Commissioners

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang, posisi komposisi, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.</li> <li>Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan Audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian intern serta Komite Audit.</li> <li>Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta Organ Pendukung Dewan Komisaris dan Direksi</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Description of the Company relating to the objectives, nature, scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term plans, the composition and position of personnel, risks, and other strategic issues.</li> <li>Explanation on the authority that is delegated to the internal and external Audit, internal control systems and policies, and the Audit Committee</li> <li>Description of the tasks and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors, and the Supporting Organs of the Board of Commissioners and the Board of Directors</li> </ol> |
|---|--|

Pada Tahun 2017 telah dilakukan Program Pengenalan Komisaris yang baru diangkat, program pengenalan selain dilakukan secara personal melalui rapat juga dilakukan Program pengenalan melalui kunjungan ke :

- PLTP Kamojang dan Unit Area Garut Distribusi Jawa barat tanggal 26 sd 28 Nopember 2017.
- Unit Pembangkit Tambak Lorok Semarang dan Unit Pembangkit Grati Jawa Timur tanggal 14 sd 16 Desember 2017.

In 2017, the Company held an Introduction Program for newly appointed Commissioners. The program is conducted personally and through meeting and visitation to:

- Geothermal Power Plant Kamojang and Garut Unit for West Java Distribution on November 26-28, 2017.
- Tambak Lorok Semarang Generating Unit and Grati Generatign Unit in East Java on December 14-16, 2017.

## PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melakukan peningkatan kompetensi dengan mengikuti seminar, *workshop*, *benchmarking*, *training/diklat*, dan kunjungan kerja.

## TRAINING AND DEVELOPMENT PROGRAM OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners increased its competence with seminars, workshops, benchmarking, training, and education.

Nama Name	Tanggal Date	Program Pelatihan & Pengembangan Training & Development Program	Lokasi Location
Hasan Bisri	27 sd 29 April 2017 April 27-29, 2017	<i>Working Visit</i> ke PLN PJB Unit Pembangkit Gresik, UIP JBTB I & II, PLTA Sutami Karangates.   <i>Working Visit</i> to PLN PJB Gresik Generating Unit, UIP JBTB I & II, Hydro Power Plant Sutami Karangates.	Jawa Timur East Java
	15 sd 17 Mei 2017 May 15-17, 2017	<i>Working Visit</i> ke PLN Wilayah Sumut, PLN Pembangkitan Sumut, UIP I&II Pembangkitan dan PLN P3B Sumatera Area Medan.   <i>Working Visit</i> to North Sumatera PLN, PLN Generating in North Sumatera, Generating UIP I & II, and PLN P3B Sumatera Area Medan.	Sumatera Utara North Sumatra
	9 sd 12 Agustus 2017 August 9-12, 2017	<i>Working Visit</i> ke PLN Wilayah Bangka Belitung, UIP Pembangkitan dan Transmisi Sumatera bagian selatan.   <i>Working Visit</i> to Bangka Belitung PLN, Generating and Transmission UIP in South Sumatera.	Bangka Belitung Bangka Belitung
Oegrosono	8 s.d. 11 Februari 2017 8 s.d. February 11, 2017	Expand Leadership Program oleh CLDI	Bali Bali
	27 sd 29 April 2017 April 27-29, 2017	<i>Working Visit</i> ke PLN PJB Unit Pembangkit Gresik, UIP JBTB I & II, PLTA Sutami Karangates.   <i>Working Visit</i> to PLN PJB Gresik Generating Unit, UIP JBTB I & II, Hydro Power Plant Sutami Karangates.	Jawa Timur East Java

Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

Nama Name	Tanggal Date	Program Pelatihan & Pengembangan Training & Development Program	Lokasi Location
Darmono	8 s.d. 11 Februari 2017 8 s.d. February 11, 2017	Expand Leadership Program oleh CLDI	Bali Bali
	27 sd 29 April 2017 April 27-29, 2017	<i>Working Visit</i> ke PLN PJB Unit Pembangkit Gresik, UIP JBTB I & II, PLTA Sutami Karangates.   <i>Working Visit</i> to PLN PJB Gresik Generating Unit, UIP JBTB I & II, Hydro Power Plant Sutami Karangates.	Jawa Timur East Java
	12 sd 14 Juli 2017 July 12-14, 2017	<i>Working Visit</i> ke PLN Wilayah NTT Bima dan Dompu   <i>Working Visit</i> to East Nusa Tenggara PLN in Bima and Dompu Areas	NTT dan NTB East Nusa Tenggara & West Nusa Tenggara
	6 sd 7 Desember 2017 December 6-7, 2017	<i>Working Visit</i> ke PLN Wilayah Lampung, Distribusi Lampung, UIP Pembangkit, PLN Sektor Tarahan dan PLN Batam MPP- PLTG Tarahan.   <i>Working Visit</i> to PLN Lampung Area, Lampung Distribution, UIP Plant, PLN Tarahan Sector, and PLN Batam Mobile Power Plant-Tarahan Gas Power Plant.	Lampung Lampung
Budiman	8 s.d. 11 Februari 2017 8 s.d. February 11, 2017	Expand Leadership Program oleh CLDI	Bali Bali
	9 sd 12 Agustus 2017 August 9-12, 2017	PLN Wilayah Bangka Belitung, UIP Pembangkitan dan Transmisi Sumatera Bagian Selatan.   PLN Bangka Belitung, Generating and Transmission UIP of South Sumatera.	Bangka Belitung Bangka Belitung
	6 sd 7 Desember 2017 December 6-7, 2017	<i>Working Visit</i> ke PLN Wilayah Lampung, Distribusi Lampung, UIP Pembangkit, PLN Sektor Tarahan dan PLN Batam MPP- PLTG Tarahan.   <i>Working Visit</i> to PLN Lampung Area, Lampung Distribution, UIP Plant, PLN Tarahan Sector, and PLN Batam Mobile Power Plant-Tarahan Gas Power Plant.	Lampung Lampung
Harry Susetyo Nugroho	22 sd 29 Juli 2017 July 22-29, 2017	Benchmarking Kelistrikan   Electricity Benchmarking	Korea Selatan South Korea
	6 sd 7 Desember 2017 December 6-7, 2017	<i>Working Visit</i> ke PLN Wilayah Lampung, Distribusi Lampung, UIP Pembangkit, PLN Sektor Tarahan dan PLN Batam MPP- PLTG Tarahan.   <i>Working Visit</i> to PLN Lampung Area, Lampung Distribution, UIP Plant, PLN Tarahan Sector, and PLN Batam Mobile Power Plant-Tarahan Gas Power Plant.	Lampung Lampung
Andy Noorsaman Sommeng	9 sd 12 Agustus 2017 August 9-12, 2017	<i>Working Visit</i> ke PLN Wilayah Bangka Belitung, UIP Pembangkitan dan Transmisi Sumatera Bagian Selatan.   <i>Working Visit</i> to Bangka Belitung PLN, Generating and Transmission UIP in South Sumatera.	Bangka Belitung Bangka Belitung
Ilya Avianti	9 sd 12 Agustus 2017 August 9-12, 2017	<i>Working Visit</i> ke PLN Wilayah Bangka Belitung, UIP Pembangkitan dan Transmisi Sumatera bagian selatan.   <i>Working Visit</i> to Bangka Belitung PLN, Generating and Transmission UIP in South Sumatera.	Bangka Belitung Bangka Belitung
	14 sd 25 September 2017 September 14-25, 2017	Workshop Integrated Reporting di Paris. Diadakan oleh IFACI atau Institut of Internal Auditor (IIA)   Workshop Integrated Reporting in Paris. Held by IFACI or Institute of Internal Auditor (IIA)	Perancis France
	14 sd 16 Desember 2017 December 14-16, 2017	<i>Working Visit</i> ke PLTGU Tambak Lorok dan PLTGU Gresik   <i>Working Visit</i> to Combined Cycle Power Plant Tambak Lorok and Gresik	Jawa Timur East Java

**PROSEDUR DAN PENETAPAN REMUNERASI  
DEWAN KOMISARIS**

Prosedur penetapan dan besaran nilai remunerasi Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER - 04/ MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN beserta perubahannya yang terakhir No. 01/MBU/06/2017.

**PROCEDURE AND DETERMINATION OF BOARD OF  
COMMISSIONERS' REMUNERATION**

The procedure for determining the amount and value of the remuneration of the Board of Commissioners shall be based on the Minister of SOEs Regulation No. PER-04/MBU/2014 on the Guidelines for Determination of Remuneration for the Board of Directors, Board of Commissioners, and Board of Trustees of SOEs and its latest amendment, No. 01/MBU/06/2017.

## Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Peraturan tersebut menyatakan bahwa RUPS menetapkan penghasilan anggota Dewan Komisaris berupa honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem.

The regulation states that the GMS determines the income of members of the Board of Commissioners in the form of honorarium, benefits, facilities, and tantiem.

### STRUKTUR DAN BESARAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Besaran honorarium Dewan Komisaris disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menetapkan besaran honorarium tersebut diterapkan Faktor Penyesuaian Industri yang mempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur (benchmark), kondisi persaingan usaha (*competitiveness*) atau kompleksitas usaha, serta kelangkaan sumber daya manusia.

### STRUCTURE AND REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The honorarium of the Board of Commissioners shall be adjusted to the conditions and financial capabilities of the Company and shall not be contrary to the laws and regulations. In determining the amount of honorarium, Industrial Adjustment Factors is applied, taking into account benchmark for similar industry, the condition of business competition (*competitiveness*) or business complexity, and the scarcity of human resources.

**Besaran remunerasi Dewan Komisaris sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER - 04/MBU/2014 adalah Komisaris Utama sebesar 45% dari Direktur Utama, sedangkan besaran remunerasi anggota Komisaris lainnya adalah 90% dari Komisaris Utama.**

The amount of remuneration of the Board of Commissioners, according to the Minister of SOEs Regulation No. PER-04/MBU/2014 is, that the President Commissioner shall have the rights to 45% of the President Director's remuneration, and other members of the Board of Commissioners shall have the rights to 90% of the President Commissioner's remuneration.

### TUNJANGAN DAN FASILITAS DEWAN KOMISARIS

### BENEFITS AND FACILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Putusan RUPS/ Menteri (dalam Rupiah) GMS Resolutions/Ministerial Decree (in Rupiah)		Keterangan Description
		Komisaris Utama President Commissioner	Komisaris Board of Commissioners	
1	Honorarium   Honorarium	135.000.000,00	121.500.000,00	a. Komut : 45% gaji Dirut b. Komisaris : 90% Honorarium Komut a. President Commissioner: 45% of President Director's salary b. Commissioner: 90% of President Commissioner's Honorarium

Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Putusan RUPS/ Menteri (dalam Rupiah) GMS Resolutions/Ministerial Decree (in Rupiah)	Komisaris Board of Commissioners	Keterangan Description
<b>2</b>	<b>Tunjangan   Allowances</b>			
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan   Religious Holiday Allowance	1 (satu) bulan Honorarium   1 (one) month of Honorarium		
	Tunjangan Transportasi   Transportation Allowance	sebesar 20% dari Honorarium   in the amount of 20% of Honorarium		
	Asuransi Purna Jabatan   Post-Tenure Insurance	Premi yang ditanggung 25% dari honorarium dalam satu tahun   Premium covers 25% of annual honorarium		
<b>3</b>	<b>Fasilitas   Facilities</b>			
	Fasilitas Kesehatan   Health Facilities	1 istri dan 3 orang anak usia maksimum 25 th   One wife and three children with maximum age of 25 years		
	Fasilitas Bantuan Hukum   Legal Assistance	diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku   Provided in accordance with prevailing laws and regulations		
	Fasilitas <i>Club Membership</i>   Club Membership	dapat dikutsertakan <i>Business Club</i>   Membership in Business Clubs		
	Pakaian Seragam   Uniform	2 (dua) stel setiap 1 (satu) tahun   2 (two) sets every 1 (one) year		

## REMUNERASI DEWAN KOMISARIS\* | REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS\*

Tipe Remunerasi & Fasilitas Lainnya	Jumlah Total	Juta (Rp) Million (Rp)	Remuneration & Other Facilities Types
<b>Remunerasi</b>		<b>47.016</b>	<b>Remuneration</b>
Honorarium	10	12.190	Honorarium
Tantiem Dipotong Pajak	9	34.826	Tantium Cut Taxes
<b>Tunjangan</b>		<b>3.403</b>	<b>Allowance</b>
Tunjangan Transportasi	10	2.438	Transportation Allowance
Tunjangan Hari Raya	8	965	Religious Day Allowance

\*Termasuk Mantan Anggota Dewan Komisaris | Including former members of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

## RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 22 kali, rincian pelaksanaan rapat sebagai berikut:

## BOARD OF COMMISSIONERS' MEETING

Throughout 2017, the Board of Commissioners held 22 meetings, and the details are as follow:

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Dewan Komisaris Attendance			Uraian Description	Agenda Rapat Meeting Agenda
		Kehadiran Dewan Komisaris Attendance				
1	10 Januari 2017 January 10, 2017	Kuorum Quorum	100%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Jarman, Aloysius Kiik Ro	<ol style="list-style-type: none"> <li>Monitoring Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris Terdahulu</li> <li>Permohonan Rekomendasi Proses Pinjaman Langsung kepada PLN dari ADB untuk Program RBL di Regional SNT sebesar USD 600 juta</li> <li>Permohonan Persetujuan Pembelian LNG dari PERUSDA Sulawesi Selatan</li> <li>Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (Kinerja) Dewan Komisaris termasuk Laporan Kinerja Komite Dewan Komisaris tahun 2016.</li> </ol>	
2	24 Januari 2017 January 24, 2017	Kuorum Quorum	71%	Hasan Bisri, Darmono, Budiman, Jarman, Harry Susetyo Nugroho	<ol style="list-style-type: none"> <li>Monitoring Tindak Lanjut Keputusan Rapat dewan Komisaris Terdahulu</li> <li>Persetujuan Penghapusan Piutang Ragu-Ragu</li> <li>Persetujuan Pinjaman Langsung Tanpa Jaminan Pemerintah Dalam Mata Uang Asing dengan Nilai Maksimum Ekuivalen EUR 112.05 Juta Untuk Pendanaan PLTGU Sumbagut 2 Peaker 250 MW melalui Skema ECA</li> <li>Lain – Lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana Kunjungan Kerja Dekom;</li> <li>Peserta Program Expand Leadership Program For BOD/ BOC</li> </ul> </li> </ol>	

Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Dewan Komisaris Attendance		Uraian Description	Agenda Rapat Meeting Agenda
		Kehadiran Dewan Komisaris Attendance			
3	8 Februari 2017 February 8, 2017	Kuorum Quorum	86%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Jarman	<ol style="list-style-type: none"> <li>Monitoring Tindak lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris Terdahulu</li> <li>Persetujuan Penghapusan ATTB</li> <li>Permohonan LNG SPA antara PT PLN (Persero) dengan Tangguh PSC <i>Contractor Parties</i> (BP Tangguh) a.d surat Direksi No. 0045/EPI 01.02/DIRUT/2017 tanggal 27 Januari 2017</li> <li>Lain-lain</li> </ol>
4	21 Februari 2017 February 21, 2017	Kuorum Quorum	100%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Jarman, Aloysius Kiik Ro	<ol style="list-style-type: none"> <li>Monitoring Tindak lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris Terdahulu;</li> <li>Permohonan Rekomendasi Proses Pinjaman Langsung kepada PLN dari ADB untuk Program RBL di Regional SNT sebesar USD 600 juta;</li> <li>Laporan Manajemen PT PLN (Persero) Tahun 2016 Unaudited;</li> <li>Lain-lain</li> </ol>
5	8 Maret 2017 March 8, 2017	Kuorum Quorum	75%	Hasan Bisri, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius Kiik Ro, Rionald Silaban	<ol style="list-style-type: none"> <li>Monitoring Tindak lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris Terdahulu;</li> <li>Laporan Peninjauan ATTB <ul style="list-style-type: none"> <li>Di Maluku &amp; Maluku Utara;</li> <li>Di Wilayah Sumatera Utara;</li> </ul> </li> <li>Persetujuan Rencana Perjanjian Pendanaan Kredit Investasi dengan Kreditur Dalam Negeri dengan Nilai Maksimum Rp44 Triliun Periode Tahun 2017;</li> <li>Lain-lain</li> </ol>
					<ol style="list-style-type: none"> <li>Monitoring the Follow-Up of the previous Board of Commissioners' Meeting Decision</li> <li>Request for Recommendation on Direct Loan Process to PLN from ADB for RBL Program in SNT Regional of USD600 million</li> <li>Unaudited Management Report of PT PLN (Persero) 2016;</li> <li>Others</li> </ol>
					<ol style="list-style-type: none"> <li>Monitoring the Follow-Up of the previous Board of Commissioners' Meeting Decision</li> <li>ATTB Review Report <ul style="list-style-type: none"> <li>In Maluku &amp; North Maluku;</li> <li>In North Sumatera Area;</li> </ul> </li> <li>Approval of Investment Credit Financing Agreement with Domestic Lender, with Maximum Value of Rp44 Trillion for the 2017 Period;</li> <li>Others</li> </ol>

Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Dewan Komisaris Attendance		Uraian Description	Agenda Rapat Meeting Agenda
		Kehadiran Dewan Komisaris Attendance			
6	21 Maret 2017 March 21, 2017	Kuorum Quorum	63%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho	<ol style="list-style-type: none"> <li>Monitoring Tindak lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris Terdahulu;</li> <li>Monitoring loan serta pinjaman yang mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Dewan Komisaris;</li> <li>SOP proses persetujuan/rekomendasi atas permintaan Direksi;</li> <li>Lain-lain.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitoring the Follow-Up of the previous Board of Commissioners' Meeting Decision</li> <li>Monitoring loan as well as loans obtained by approval/recommendation from the Board of Commissioners;</li> <li>SOP for approval/recommendation process at the request of the Board of Directors;</li> <li>Others.</li> </ol>
7	4 April 2017 April 4, 2017	Kuorum Quorum	63%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho	<ol style="list-style-type: none"> <li>Monitoring Tindak lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris Terdahulu;</li> <li>Persetujuan Penghapusan Material HSD PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan;</li> <li>Persetujuan Penghapusan PRR PLN Distribusi Jawa Barat dan PLN Wilayah Bangka Belitung;</li> <li>Persetujuan Penghapusan ATTB PLN P3B Sumatera;</li> <li>Lain-lain.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitoring the Follow-Up of the previous Board of Commissioners' Meeting Decision</li> <li>Approval of Material HSD Disposal PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan;</li> <li>Approval of Deletion of Doubtful Accounts of PLN Distribusi Jawa Barat and PLN of Bangka Belitung Region;</li> <li>Approval on the Abolition of ATTB PLN P3B Sumatra;</li> <li>Others.</li> </ol>
8	18 April 2017 April 18, 2017	Kuorum Quorum	63%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho	<ol style="list-style-type: none"> <li>Monitoring Tindak lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris Terdahulu;</li> <li>Persetujuan Penghapusan ATTB PLN Distribusi Jawa Timur;</li> <li>Persetujuan Penghapusan Material ex HSD PLN Kalimantan Barat;</li> <li>Lain-lain</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Monitoring the Follow-Up of the previous Board of Commissioners' Meeting Decision</li> <li>Approval of Deletion of Doubtful Accounts of PLN Distribusi Jawa Timur;</li> <li>Approval of Material Removal of ex-HSD PLN West Kalimantan;</li> <li>Others</li> </ol>

Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Dewan Komisaris Attendance		Uraian Description	Agenda Rapat Meeting Agenda
		Kehadiran Dewan Komisaris Attendance			
9	23 Mei 2017 May 23, 2017	Kuorum Quorum	75%	Hasan Bisri, Darmono, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Jarman, Aloysius Kiik Ro	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring Tindak lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris Terdahulu;</li> <li>2. Penjelasan Loan IBRD untuk Upper Cisokan Pumped Storage;</li> <li>3. Pendapat Dekom atas Laporan Manajemen PLN Tahun 2016 Audited;</li> <li>4. Laporan Manajemen PLN TW I Tahun 2017;</li> <li>5. Persiapan RUPS LPT Tahun Buku 2016;</li> <li>6. Lain-lain.</li> </ol>
					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring the Follow-Up of the previous Board of Commissioners' Meeting Decision</li> <li>2. Explanation of IBRD Loan for Upper Cisokan Pumped Storage;</li> <li>3. Board of Commissioners' opinion on PLN Audited Management Report 2016;</li> <li>4. PLN Management Report Quarter I 2017;</li> <li>5. Preparation of GMS for LPT Fiscal Year 2016;</li> <li>6. Others.</li> </ol>
10	6 Juni 2017 June 6, 2017	Kuorum Quorum	63%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Jarman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring Tindak lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris Terdahulu;</li> <li>2. Persetujuan/rekomendasi Penghapusan ATTB PLN Distribusi DKI, PLN Distribusi Banten, PLN Distribusi Jawa Tengah &amp; DIY, PLN Distribusi Jawa Timur, PLN Wilayah S2JB dan PLN Kit Sumbagut;</li> <li>3. Struktur Hutang PLN;</li> <li>4. Laporan Hasil Rapat Koordinasi dengan SPI;</li> <li>5. Lain-lain.</li> </ol>
					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring the Follow-Up of the previous Board of Commissioners' Meeting Decision</li> <li>2. Approval/Removal of ATTB PLN Distribusi DKI, PLN Distribusi Banten, PLN Distribusi Jawa Tengah &amp; DIY, PLN Distribusi Jawa Timur, PLN Wilayah S2JB, and PLN Kit Sumbagut;</li> <li>3. Structure of PLN Debt;</li> <li>4. Coordination Meeting Result Report with SPI;</li> <li>5. Others.</li> </ol>

Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Dewan Komisaris Attendance		Uraian Description	Agenda Rapat Meeting Agenda
		Kehadiran Dewan Komisaris Attendance			
11	21 Juni 2017 June 21, 2017	Kuorum Quorum	75%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho Aloysius Kiik Ro	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring Tindak lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris Terdahulu;</li> <li>2. Persetujuan/rekomendasi Penghapusan ATTB Tanah dan Bangunan di Bangkinang PLN Wilayah Riau;</li> <li>3. Persetujuan Pembentukan Organisasi Unit Induk Kitlur Kalimantan dan Kitlur Sulawesi;</li> <li>4. Persetujuan PJBG antara Medco E&amp;P dengan PLN untuk Pembangkit Listrik Indralaya, Borang;</li> <li>5. Rekomendasi Proses Penjaminan Pemerintah atas Pinjaman Langsung untuk PLTA Bakaru dari KFW kepada PLN;</li> <li>6. Lain-lain</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring the Follow-Up of the previous Board of Commissioners' Meeting Decision</li> <li>2. Approval/Removal of ATTB of Land and Building at Bangkinang PLN Riau;</li> <li>3. Approval of the Establishment of the Kitlur Main Organization Unit of Kalimantan and Kitlur Sulawesi;</li> <li>4. Approval of PJBG between Medco E&amp;P and PLN for Indralaya Power Plant, Borang;</li> <li>5. Recommendation of Government Guarantee Process on Direct Loans for Hydro Power Plant Bakaru from KFW to PLN;</li> <li>6. Others</li> </ol>
12	11 Juli 2017 July 11, 2017	Kuorum Quorum	88%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Jarman, Aloysius Kiik Ro	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring Tindak lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris Terdahulu;</li> <li>2. Persetujuan/Rekomendasi Penghapusan ATTB tanah dan bangunan di Bangkinang, untuk keperluan tukar menukar aset PLN Wilayah Riau dengan Pemkab Kampar;</li> <li>3. Kesepakatan penggunaan asumsi discount factor yang digunakan untuk menetapkan batas kewenangan Direksi untuk PJBG antara PLN dengan PT Medco E&amp;P;</li> <li>4. Lain-lain</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring the Follow-Up of the previous Board of Commissioners' Meeting Decision</li> <li>2. Approval/Recommendation of ATTB Removal of land and building in Bangkinang, for the purpose of exchange of assets of PLN Riau with Kampar Regency;</li> <li>3. Agreement on the use of discount factor assumptions used to establish the limit of authority of the Board of Directors for PJBG between PLN and PT Medco E&amp;P;</li> <li>4. Others</li> </ol>

Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Dewan Komisaris Attendance		Uraian Description	Agenda Rapat Meeting Agenda
		Kehadiran Dewan Komisaris Attendance			
13	18 Juli 2017 July 18, 2017	Kuorum Quorum	63%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Andy Noorsaman Sommeng	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring Tindak lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris Terdahulu;</li> <li>2. Laporan Realisasi KPI dan Anggaran Dewan Komisaris sd Semester I tahun 2017;</li> <li>3. Penjelasan permohonan persetujuan ulang untuk penghapusan ATTB P3B Jawa Bali;</li> <li>4. Persetujuan atas Laporan Realisasi Penyerapan PMN sd Triwulan II tahun 2017</li> <li>5. Lain-lain</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring the Follow-Up of the previous Board of Commissioners' Meeting Decision</li> <li>2. Report on KPI Realization and Budget of Board of Commissioners up to Semester I 2017;</li> <li>3. Explanation of reapproval application for the abolition of ATTB P3B Jawa Bali;</li> <li>4. Approval of the Report on the Realization of PMN Absorption up to Quarter II 2017</li> <li>5. Others</li> </ol>
14	8 Agustus 2017 August 8, 2017	Kuorum Quorum	89%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius Kiik Ro, Rionald Silaban, Ilya Avianti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring Tindak lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris Terdahulu;</li> <li>2. Persetujuan Penghapusan Piutang Ragu-ragu (PRR) PLN Wilayah Jateng &amp; DIY dan ATTB HSD PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah;</li> <li>3. Evaluasi Laporan Manajemen PLN Triwulan II Tahun 2017;</li> <li>4. Laporan Pertemuan dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI);</li> <li>5. Lain-lain</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring the Follow-Up of the previous Board of Commissioners' Meeting Decision</li> <li>2. Approval on the Elimination of Doubtful Accounts (PRR) of PLN Central Java and Yogyakarta, and ATTB HSD PLN South and Central Kalimantan;</li> <li>3. Evaluation of PLN Management Report Quarter II 2017;</li> <li>4. Meeting Report with Internal Audit Unit (SPI);</li> <li>5. Others</li> </ol>
15	22 Agustus 2017 August 22, 2017	Kuorum Quorum	89%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius Kiik Ro, Andy Noorsaman Sommeng, Ilya Avianti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring Tindak lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris Terdahulu;</li> <li>2. Pendapat Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen PLN Triwulan II Tahun 2017;</li> <li>3. Laporan Pertemuan dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI);</li> <li>4. Lain-lain</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring the Follow-Up of the previous Board of Commissioners' Meeting Decision</li> <li>2. The Board of Commissioners' opinion on the PLN Management Report Quarter II 2017;</li> <li>3. Meeting Report with Internal Audit Unit (SPI);</li> <li>4. Others</li> </ol>

Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Dewan Komisaris Attendance		Uraian Description	Agenda Rapat Meeting Agenda
		Kehadiran Dewan Komisaris Attendance			
16	5 September 2017 September 5, 2017	Kuorum Quorum	89%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius Kiik Ro, Andy Noorsaman Sommeng, Ilya Avianti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris terdahulu;</li> <li>2. Rekomendasi penghapusan ATTB PLN Wilayah Sumsel, Jambi dan Bengkulu;</li> <li>3. Laporan hasil pertemuan dengan Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan;</li> <li>4. Laporan hasil pembahasan dengan Divisi Pengadaan IPP tentang progers IPP;</li> <li>5. Laporan hasil pembahasan dengan Divisi Administrasi Konstruksi tentang progres PMN tahun 2015 dan 2016;</li> <li>6. Lain-lain</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring the Follow-Up of the previous Board of Commissioners' Meeting Decision;</li> <li>2. Recommendations for the removal of ATTB PLN Areas of South Sumatera, Jambi, and Bengkulu;</li> <li>3. Report on the results of meetings with the Risk and Compliance Management Division;</li> <li>4. Report on the results of the discussion with the IPP Procurement Division on IPP progress;</li> <li>5. Report on the results of the discussion with the Construction Administration Division on PMN progress in 2015 and 2016;</li> <li>6. Others</li> </ol>
17	19 September 2017 September 19, 2017	Kuorum Quorum	78%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Andy Noorsaman Sommeng, Ilya Avianti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris terdahulu;</li> <li>2. Persetujuan Dewan Komisaris untuk pinjaman sindikasi kredit Dalam Negeri dengan jaminan Pemerintah untuk kredit investasi program 35.000 MW sebesar maksimum Rp5,5 Triliun;</li> <li>3. Laporan pengaktifan kembali PLN Geothermal dan pengembangan lingkup bisnis infra struktur Midstream Gas;</li> <li>4. Lain-lain</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring the Follow-Up of the previous Board of Commissioners' Meeting Decision;</li> <li>2. Approval of the Board of Commissioners for domestic credit syndication loan with Government guarantee for investment credit of 35,000 MW program at maximum of Rp5.5 Trillion;</li> <li>3. Report on PLN Geothermal reactivation and development of Midstream Gas infrastructure business scope;</li> <li>4. Others</li> </ol>

Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Dewan Komisaris Attendance		Uraian Description	Agenda Rapat Meeting Agenda
		Kehadiran Dewan Komisaris Attendance			
18	10 Oktober 2017 October 10, 2017	Kuorum Quorum	67%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Ilya Avianti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring Tindak lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris Terdahulu;</li> <li>2. Permohonan Persetujuan Tertulis atas Rencana Perjanjian Kredit Investasi Skema Konvensional dan Skema Syari'ah dengan Kreditur Dalam Negeri;</li> <li>3. Pembahasan Draft RKAP PT PLN (Persero) 2018;</li> <li>4. Lain-lain</li> </ol>
					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring the Follow-Up of the previous Board of Commissioners' Meeting Decision</li> <li>2. Request for Written Agreement on Investment Credit Scheme Agreement of Conventional Scheme and Sharia Scheme with Domestic Lender;</li> <li>3. Discussion on RKAP Draft of PT PLN (Persero) 2018;</li> <li>4. Others</li> </ol>
19	24 Oktober 2017 October 24, 2017	Kuorum Quorum	89%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius Kiik Ro, Andy Noorsaman Sommeng, Ilya Avianti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris terdahulu;</li> <li>2. Persetujuan perubahan penggunaan tambahan dana PMN tahun 2015/2016;</li> <li>3. Persetujuan pinjaman langsung tanpa jaminan Pemerintah melalui skema ECA untuk proyek PLTG/MG Bangkanai (Peaker), 140 MW;</li> <li>4. Persetujuan pinjaman langsung tanpa jaminan Pemerintah melalui skema ECA untuk proyek PLTG/MG Sumbagut 2 (Peaker), 250 MW;</li> <li>5. Permohonan Persetujuan untuk Proyek PLTA Kumbih III dengan Pinjaman Langsung tanpa Jaminan Pemerintah Pendanaan KFW Development Bank dengan besaran sampai dengan EUR 85,000,000;</li> <li>6. Lain-lain</li> </ol>
					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring the Follow-Up of the previous Board of Commissioners' Meeting Decision;</li> <li>2. Approval of change of use of additional PMN funds 2015/2016;</li> <li>3. Approval of direct Government loan through ECA scheme for Combined Cycle Power Plant(Gas Power Plant)/MG Bangkanai (Peaker) project, 140 MW;</li> <li>4. Approval of direct Government loan through ECA scheme for Gas Power Plant/MG Sumbagut 2 (Peaker) project, 250 MW;</li> <li>5. Request for Approval of Kumbih III Hydro Power Plant with Direct Government Unsecured Loan Funding KFW Development Bank with amount up to EUR85,000,000;</li> <li>6. Others</li> </ol>

Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Dewan Komisaris Attendance		Uraian Description	Agenda Rapat Meeting Agenda
		Kehadiran Dewan Komisaris Attendance			
20	31 Oktober 2017 October 31, 2017	Kuorum Quorum	78%	Hasan Bisri, Darmono, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius Kiik Ro, Andy Noorsaman Sommeng, Ilya Avianti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan pinjaman langsung tanpa jaminan Pemerintah melalui skema ECA untuk proyek PLTG/MG Bangkanai (Peaker), 140 MW;</li> <li>2. Persetujuan pinjaman langsung tanpa jaminan Pemerintah melalui skema ECA untuk proyek PLTG/MG Sumbagut 2 (Peaker), 250 MW;</li> <li>3. Lain-lain</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Approval of direct Government loan through ECA scheme for Combined Cycle Power Plant(PLTG)/MG Bangkanai (Peaker) project, 140 MW;</li> <li>2. Approval of direct Government loan through ECA scheme for PLTG/MG Sumbagut 2 (Peaker) project, 250 MW;</li> <li>3. Others</li> </ol>
21	22 November 2017 November 22, 2017	Kuorum Quorum	78%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Andy Noorsaman Sommeng, Ilya Avianti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris Terdahulu;</li> <li>2. Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris untuk PJBG dari Lapangan Jambaran Tiung Biru antara PT PLN (Persero) dengan PT Pertamina (Persero);</li> <li>3. Lain-lain.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring the Follow-Up of the previous Board of Commissioners' Meeting Decision;</li> <li>2. Request for Approval by the Board of Commissioners for PJBG from Jambaran Tiung Biru Field between PT PLN (Persero) and PT Pertamina (Persero);</li> <li>3. Others.</li> </ol>
22	5 Desember 2017 December 5, 2017	Kuorum Quorum	78%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius Kiik Ro, Ilya Avianti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring tindak lanjut keputusan Rapat Dewan Komisaris Terdahulu;</li> <li>2. Permohonan pinjaman langsung tanpa jaminan Pemerintah untuk pendanaan PLTGU Muara Tawar Blok 2, 3 dan 4 add on (650 MW) melalui skema Export Credit Agency (ECA);</li> <li>3. Permohonan persetujuan tertulis atas rencana penerbitan Global Medium Term Note (GMTN) PT PLN (Persero) ahun 2017 – 2019 senilai USD 5,000,000,000.00;</li> <li>4. Lain - lain.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring the Follow-Up of the previous Board of Commissioners' Meeting Decision;</li> <li>2. Application for direct unsecured loan by the Government for Muara Tawar Combined Cycle Power Plant Block 2, 3 and 4 add-on (650 MW) funds through the Export Credit Agency (ECA) scheme;</li> <li>3. Application for written approval of PT PLN (Persero) Global Medium Term Notes (GMTN) 2017 - 2019 issuance, worth USD5,000,000,000.00;</li> <li>4. Others.</li> </ol>

\*) Sejak 28 Februari 2017, Bpk. Rionald Silaban menjabat sebagai Komisaris

\*\*) Sejak 12 Juli 2017, Bpk. Jarman sudah tidak menjabat sebagai Komisaris dan Bpk. Andy Noorsaman Sommeng menjabat sebagai Komisaris

\*\*) Sejak 28 Juli 2017, Ibu Ilya Avianti menjabat sebagai Komisaris

\*) Since February 28, 2017, Mr. Rionald Silaban serves as Commissioner

\*\*) Since July 12, 2017, Mr. Jarman no longer serves as Commissioner, and Mr. Andy Noorsaman Sommeng serves as Commissioner

\*\*) Since July 28, 2017, Mrs. Ilya Avianti serves as Commissioner

## RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Rapat Konsultasi adalah Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi atau rapat Direksi yang dihadiri oleh Dewan Komisaris. Rapat dapat berlangsung atas inisiatif Dewan Komisaris maupun Direksi. Rapat tersebut dilaksanakan untuk mendapatkan kesatuan pandangan dan keselarasan tindakan antara Dewan Komisaris sebagai pengawas, dengan Direksi sebagai pelaksana operasional.

## JOINT MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Consultation Meetings are attended by both the Board of Commissioners and by the Board of Directors. Meetings can take place on the initiative of the Board of Commissioners or the Board of Directors. The meetings are held to promote unity and harmony on points of view of the Board of Commissioners as the supervisor, and Directors as the operational executor.

**Melalui Rapat tersebut diharapkan dihasilkan keputusan-keputusan strategis mengenai suatu rencana aksi korporasi, jika rencana dimaksud berada di luar batas kewenangan Direksi. Rapat tersebut juga dapat menjadi tempat bagi Dewan Komisaris memberikan pandangan dan arahan strategis pengembangan perusahaan.**

The meetings are expected to produce strategic decisions concerning corporate action plans, if the plan is beyond the authority of the Board of Directors. The meetings also serve as an opportunity for the Board of Commissioners to provide insight and strategic direction to the Company's development.

Selama tahun 2017, PLN menyelenggarakan 15 kali Rapat Konsultasi Dewan Komisaris dan Direksi. Rincian rapat gabungan adalah sebagai berikut:

Throughout 2017, PLN held 15 Consultation Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors. The details of Consultation Meeting are as follow:

## Dewan Komisaris

Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Dewan Komisaris Board of Commissioners' Attendance		Uraian Description	Kehadiran Direksi Board of Directors' Attendance	Agenda Rapat Meeting Agenda
		Kehadiran Attendance	Uraian Description			
1	1 Februari 2017 February 1, 2017	Kuorum Quorum	71%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho,	Sarwono Sudarto, Nasri Sebayang, Supangkat Iwan Santoso, Nicke Widyawati, Murtaqi Syamsuddin, Muhamad Ali, Djoko Abumanan, Machnizon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi terkini khususnya pengadaan IPP Jawa-1</li> <li>2. Penjelasan menyeluruh mengenai manajemen energi primer (batubara, gas dan BBM) termasuk energi primer untuk pembangkit IPP, antara lain mengenai strategi pengamanan supply chain, pengadaan, harga, pengendalian mutu/kualitas, pengendalian stock dan pengendalian konsumsi/ penggunaan</li> <li>3. Tindak Lanjut permintaan klarifikasi atas pengaduan masyarakat terkait dugaan terhadap proses lelang elektromekanik PLTA Upper Cisokan Pumped Storage Power Plant 1.040 MW (surat No. S-169/D2-MBU/12/2016 tgl. 23 Desember 2016</li> <li>4. Progres pelaksanaan Program 35.000 MW s/d Trw IV 2016</li> <li>5. Lain-Lain.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The latest information, especially the procurement of IPP Jawa-1</li> <li>2. Comprehensive explanations of primary energy management (coal, gas, and fuel) include primary energy for IPP plants, including supply chain, procurement, price, quality control, stock control and consumption/usage control strategies</li> <li>3. Follow-up request for clarification on public complaints related to the alleged electromechanical auction process of Upper Cisokan Pumped Storage Hydro Power Plant 1,040 MW (Letter No. S-169/D2-MBU/12/2016 dated December 23, 2016</li> <li>4. Progress of 35,000 MW Program by Quarter IV 2016</li> <li>5. Others.</li> </ol>

Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Dewan Komisaris Board of Commissioners' Attendance		Uraian Description	Kehadiran Direksi Board of Directors' Attendance	Agenda Rapat Meeting Agenda
		Kehadiran Attendance	100%			
2	1 Maret 2017 March 1, 2017	Kuorum Quorum	100%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Jarman, Aloysius Kiik Ro, Rionald Silaban	Sofyan Basir, Nasri Sebayang, Supangkat Iwan Santoso, Anir Rosidin, Nicke Widyawati, Murtaqi Syamsuddin, Amin Subekti, Muhamad Ali, Machnizon, Haryanto WS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi terkini</li> <li>2. Tindak Lanjut permintaan klarifikasi atas pengaduan masyarakat terkait dugaan adanya penyimpangan dalam proses lelang elektromekanik PLTA Upper Cisokan Pumped Storage Power Plant 1.040 MW (surat No. S-169/D2-MBU/12/2016 tgl. 23 Desember 2016</li> <li>3. Progres pelaksanaan Program 35.000 MW s/d Trw IV 2016</li> <li>4. Laporan Manajemen PT PLN (Persero) Tahun 2016 Unaudited</li> <li>5. Lain-Lain.</li> </ol>
3	14 Maret 2017 March 14, 2017	Kuorum Quorum	75%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius Kiik Ro	Sarwono Sudarto	<p>Rencana Pinjaman Perbankan Dalam Negeri Dengan Nilai Maksimum Rp44 triliun untuk Pendanaan Investasi Tahun 2017</p> <p>Plan for Domestic Banking Credit with a Maximum Value of Rp44 trillion for Investment Funding 2017</p>
4	31 Maret 2017 March 31, 2017	Kuorum Quorum	100%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Jarman, Aloysius Kiik Ro, Rionald Silaban	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Nicke Widyawati, Nasri Sebayang, Murtaqi Syamsuddin, Haryanto WS, Amin Subekti, Muhamad Ali, Djoko Abumanan, Machnizon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi terkini</li> <li>2. Evaluasi atas pelaksanaan perubahan organisasi, antara lain meliputi :</li> <li>3. Penataan Struktur Organisasi; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan tugas pokok dan fungsi;</li> <li>b. Penetapan wewenang dalam pengambilan keputusan;</li> <li>c. Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Capital);</li> </ol> </li> <li>4. Lain-Lain.</li> </ol>
						<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latest information</li> <li>2. Follow-up request for clarification on public complaints related to the alleged deviation of electromechanical auction process of Upper Cisokan Pumped Storage Hydro Power Plant 1,040 MW (Letter No. S-169/D2-MBU/12/2016 dated December 23, 2016</li> <li>3. Progress of 35,000 MW Program by Quarter IV 2016</li> <li>4. Unaudited Management Report of PT PLN (Persero) 2016</li> <li>5. Others.</li> </ol>
						<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latest information</li> <li>2. Evaluation of the organizational changes, such as:</li> <li>3. Organizational Alignment; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Determination of main tasks and functions;</li> <li>b. Determination of authority in decision-making;</li> <li>c. Human Capital;</li> </ol> </li> <li>4. Others.</li> </ol>

Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Dewan Komisaris Board of Commissioners' Attendance		Uraian Description	Kehadiran Direksi Board of Directors' Attendance	Agenda Rapat Meeting Agenda
		Kehadiran Attendance				
5	18 April 2017 April 18, 2017	Kuorum Quorum	63%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho	Sofyan Basir, Sarwono, Sudarto, Supangkat, Iwan Santoso, Amir Rosidin, Nicke Widyawati, Djoko Abumanan, Machnizon, Haryanto WS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi terkini</li> <li>2. Strategi Pembiayaan Jangka Panjang Perusahaan</li> <li>3. Lain-Lain</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latest information</li> <li>2. Company's Long-Term Funding Strategies</li> <li>3. Others</li> </ol>
6	21 Juni 2017 June 21, 2017	Kuorum Quorum	75%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius Kiik Ro	Sarwono, Sudarto, Nasri Sebayang, Amir Rosidin, Murtaqi Syamsudin, Muhamad Ali, Djoko Abumanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi terkini</li> <li>2. Penjelasan dan tindak lanjut terminasi Loan IBRD untuk Upper Cisokan Pumped Storage</li> <li>3. Penjelasan surat Direksi Nomor : 0125/AGA.00.02/DIRUT/2017 tanggal 12 Mei terkait susut jaringan</li> <li>4. Lain-Lain.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latest information</li> <li>2. Explanation and follow-up on IBRD Loan termination for Upper Cisokan Pumped Storage</li> <li>3. Explanation of the Directors' Letter No. 0125/AGA.00.02/DIRUT/2017 dated May 12, related to the network decrease</li> <li>4. Others.</li> </ol>
7	26 Juli 2017 July 26, 2017	Kuorum Quorum	88%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius Kiik Ro, Rionald Silaban, Andy Noorsaman, Sommeng	Sofyan Basir, Sarwono, Sudarto, Nicke Widyawati, Supangkat, Iwan Santoso, Amir Rosidin, Djoko Abumanan, Machnizon, Achmad Rofik, Wiluyo Kusdwiarto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi terkini</li> <li>2. Penjelasan surat Direksi Nomor : 0252/AGA.00.02/DIRUT/2017 tanggal 12 Mei 2017 terkait susut jaringan</li> <li>3. Penjelasan mengenai proyeksi keuangan tahun 2017 apabila tidak ada kenaikan tarif listrik sampai dengan Desember 2017</li> <li>4. Penjelasan mengenai hasil penjualan obligasi dan sukuk baik di dalam maupun luar negeri (GMTN dan PUB)</li> <li>5. Lain-Lain</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latest information</li> <li>2. Explanation of the Directors' Letter No. 0252/AGA.00.02/DIRUT/2017 dated May 12, related to the network decrease</li> <li>3. Explanation on financial projection 2017 with the assumption that there is no electricity tariff increase up to December 2017</li> <li>4. Explanation of the proceeds of bonds and sukuk sales both at home and abroad (GMTN and PUB)</li> <li>5. Others</li> </ol>

Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Dewan Komisaris Board of Commissioners' Attendance		Uraian Description	Kehadiran Direksi Board of Directors' Attendance	Agenda Rapat Meeting Agenda
		Kehadiran Attendance	Uraian Description			
8	30 Agustus 2017 August 30, 2017	Kuorum Quorum	89%	Hasan Bisri, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius Kiik Ro, Rionald Silaban, Andy Noorsaman Sommeng, Ilya Avianti	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Nicke Widyawati, Supangkat Iwan Santoso, Muhamad Ali, Syofvi Felienty Roekman, Haryanto WS, Djoko Abumanan, Wiluyo KUSDWIHARTO, Syamsul Huda, Ahmad Rofik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi terkini</li> <li>2. Progres pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai dana PMN sesuai surat Dekom No. 153/DK-PLN/2017, tanggal 21 Juli 2017</li> <li>3. Pencapaian KPI Direktorat sampai dengan Semester I tahun 2017</li> <li>4. Penjelasan Direksi tentang konsep perubahan/penyesuaian organisasi sebagai tindak lanjut SK Menteri BUMN sebagai RUPS No.SK-138/MBU/07/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara serta Surat Menteri BUMN Nomor S-418/MBU/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 hal Penambahan Direktorat Baru di PT PLN (Persero) yang Khusus Menangani Aset Tetap</li> <li>5. Lain-Lain.</li> </ol>
9	13 September 2017 September 13, 2017	Kuorum Quorum	67%	Hasan Bisri, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius Kiik Ro, Ilya Avianti	Nicke Widyawati, Supangkat Iwan Santoso	<p>Progres Perkembangan Proyek-proyek Pembangkit EPC dan IPP terkait Program 35.000 MW</p> <p>Progress of Development of EPC and IPP Power Plant Projects related to the 35,000 MW Program</p>
10	15 September 2017 September 15, 2017	Kuorum Quorum	67%	Hasan Bisri, Darmono, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius Kiik Ro, Ilya Avianti	Dihadiri oleh Direksi	<p>Perubahan Organisasi PT PLN (Persero).</p> <p>Organizational Change of PT PLN (Persero).</p>

Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Dewan Komisaris Board of Commissioners' Attendance		Uraian Description	Kehadiran Direksi Board of Directors' Attendance	Agenda Rapat Meeting Agenda
		Kehadiran Attendance	Uraian Description			
11	26 September 2017 September 26, 2017	Kuorum Quorum	56%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, Ilya Avianti	Dihadiri oleh Direksi	Penjelasan kondisi keuangan PLN saat ini dan prediksinya sampai dengan akhir tahun 2017 serta langkah-langkah yang akan dilakukan beserta mitigasi risikonya  Explanation of PLN's current financial condition and its prediction until the end of 2017, and the steps to be taken along with risk mitigation
12	18 Oktober 2017 October 18, 2017	Kuorum Quorum	56%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, Ilya Avianti	Dihadiri oleh Direksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi terkini dari Direksi PT PLN (Persero)</li> <li>2. Penjelasan Direksi terkait dengan Surat Menkeu No.S-781/MK.08/2017 tanggal 19 September 2017</li> <li>3. Penjelasan Direksi terkait RKAP PT PLN (Persero) tahun 2018 beserta mitigasi risikonya</li> <li>4. Lain-Lain.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latest information from the Board of Directors of PT PLN (Persero)</li> <li>2. Board of Directors' explanation related to Ministry of Finance's Letter No. S-781/MK.08/2017 dated September 19, 2017</li> <li>3. Explanation of the Board of Directors related to RKAP of PT PLN (Persero) in 2018 and its risk mitigation</li> <li>4. Others.</li> </ol>
13	7 November 2017 November 7, 2017	Kuorum Quorum	78%	Hasan Bisri, Darmono, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius Kiik Ro, Andy Noorsaman Sommeng, Ilya Avianti	Dihadiri oleh Direksi dan Direksi PT PLN Batubara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjelasan progres kinerja tahun 2017</li> <li>2. Penjelasan mengenai rencana akuisisi perusahaan tambang batubara</li> <li>3. Rencana jangka panjang PT PLN Batubara</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Performance progress 2017</li> <li>2. Explanation of the acquisition plan of a coal mining company</li> <li>3. Long-term Plan of PT PLN Batubara</li> </ol>
14	15 November 2017 November 15, 2017	Kuorum Quorum	67%	Hasan Bisri, Darmono, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius Kiik Ro, Ilya Avianti	Dihadiri oleh Direksi	Penjelasan PJBG dari Lapangan Jambaran Tiung Biru antara PT PLN (Persero) dengan PT Pertamina (Persero)   Explanation of PJBG from Jambaran Tiung Biru Field between the PT PLN (Persero) and PT Pertamina (Persero)

Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Dewan Komisaris Board of Commissioners' Attendance		Uraian Description	Kehadiran Direksi Board of Directors' Attendance	Agenda Rapat Meeting Agenda
		Kehadiran Attendance				
15	20 Desember 2017 December 20, 2017	Kuorum Quorum	67%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, Andy Noorsaman Sommeng, Ilya Avianti	Dihadiri oleh Direksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi Terkini dari Direksi PT PLN (Persero)</li> <li>2. Penjelasan tentang rencana usulan penyederhanaan tarif pelanggan</li> <li>3. Penjelasan Direksi tentang kesiapan transmisi dan distribusi dalam rangka penyaluran daya pembangkit program 35.000 MW</li> <li>4. Lain-Lain.</li> </ol>

\*) Sejak 28 Februari 2017, Bpk. Rionald Silaban menjabat sebagai Komisaris

\*\*) Sejak 12 Juli 2017, Bpk. Jarman sudah tidak menjabat sebagai Komisaris dan Bpk. Andy Noorsaman Sommeng menjabat sebagai Komisaris

\*\*\*) Sejak 28 Juli 2017, Ibu Ilya Avianti menjabat sebagai Komisaris

\*\*\*\*) sejak 27 November 2017, Ibu Nicke Widyawati sudah tidak menjabat sebagai Direktur Pengadaan 1

\*) Since February 28, 2017, Mr. Rionald Silaban serves as Commissioner

\*\*) Since July 12, 2017, Mr. Jarman no longer serve as Commissioner, and Mr. Andy Noorsaman Sommeng serves as Commissioner

\*\*\*) Since July 28, 2017, Mrs. Ilya Avianti serves as Commissioner

\*\*\*\*) Since November 27, 2017, Mrs. Nicke Widyawati does not longer serve as Director of Procurement 1

## PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham. Penilaian kinerja Dewan Komisaris mengacu pada Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) Dewan Komisaris. *Key Performance Indicators* Dewan Komisaris disusun dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan Kementerian BUMN.

## BOARD OF COMMISSIONERS' PERFORMANCE ASSESSMENT

The party who conduct the performance assessment of the Board of Commissioners is the Shareholders. The Board of Commissioners' performance assessment refers to Key Performance Indicators of the Board of Commissioners. Key Performance Indicators of the Board of Commissioners are compiled by taking into account the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, based on the Articles of Association and regulations of the Ministry of SOEs.

Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

No.	Program Kerja Work Program	Uraian Description	KPI 2017			
			Sasaran Target	Bobot Portion	Realisasi Realization	Bobot Portion
<b>Dewan Komisaris dengan Direksi   Board Of Commissioners and Directors</b>			<b>54</b>	<b>53</b>		
I	I.1 Review dan tanggapan Rencana Perusahaan   Review and feedback on Company's Plan	Pembahasan, saran dan atau persetujuan atas RKAP, KPI dan RJS   Discussion, suggestions, and/or approval of Work Budget and Plan, KPI, and Company's Long-term Plan (RJP).	2 kali setahun   Twice a Year	7	3 kali, yaitu : - Revisi RKAP 2016 - RKAP dan KPI Korporat 2017 - RJP 2017-2025  3 times, i.e.: - RKAP 2016 Revision - RKAP and Corporate KPI 2017 - RJP 2017-2025	7
		Ketepatan waktu pemberian tanggapan setelah diperoleh dari Direksi dengan data akurat   Timeliness of response after accurate data from the Board of Directors	14 hari kerja   14 Workdays	3	Rata-rata 3 hari kerja   An average of 3 working days	3
	I.2 Review dan tanggapan kinerja perusahaan   Review and feedback on Company's performance	Pembahasan, tanggapan dan persetujuan atas : - LM dan KPI PLN Triwulanan - LM dan KPI PLN Tahunan - KPI Direksi Tahunan  Discussion, feedback, and approval of: - Management Report and PLN's KPI Quarterly - Management Report and PLN's KPI Annually - Annual Directors' KPI	5 kali setahun   5 times a year	9	5 kali , yaitu : - LM dan KPI Korporat 2015 - KPI Direktorat 2015LM dan KPI Korporat Triwulanan 2016  5 times, i.e.: - Management Report and Corporate KPI 2015 - 2015 KPI Directorate, Management Report and KPI Corporate Quarterly 2016	9
		Ketepatan waktu pemberian tanggapan setelah diperoleh dari Direksi dengan data yang akurat   Timeliness of response after accurate data from the Board of Directors	14 hari kerja   14 Workdays	3	Rata-rata 7 hari kerja   An average of 7 working days	3

Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

No.	Program Kerja Work Program	Uraian Description	KPI 2017			
			Sasaran Target	Bobot Portion	Realisasi Realization	Bobot Portion
I.3	Review tindak lanjut hasil / temuan audit internal /eksternal   Review of follow-up results/findings of internal/external audit	Pembahasan dan tanggapan/saran atas Efektifitas pemeriksaan internal dan monitoring tindak lanjut temuan auditor   Discussion and feedback/advice on the effectiveness of internal inspections and follow-up monitoring of the auditor's findings	6 kali setahun   6 times a year	10	10 kali   10 times	10
I.4	Memberi tanggapan tertulis/persetujuan / nasehat /saran / teguran kepada Direksi   Provide a written response/approval/counsel/ advice/warning to the Board of Directors	Pembahasan dan pemberian tanggapan tertulis /persetujuan atas permintaan Direksi setelah data lengkap   Discussion and provision of written response/approval at the request of the Board of Directors after complete data has been obtained	usulan Direksi ditanggapi   Proposal of the Board of Directors is addressed	15	96%	15
		Ketepatan waktu pemberian tanggapan setelah usulan diperoleh dari Direksi dengan data dan dokumen pendukung yang lengkap   Timeliness of response following a proposal from the Board of Directors' data with the complete supporting data and documents	14 hari kerja   14 Workdays	3	Rata-rata 15 hari kerja   An average of 15 working days	2
		Pemberian nasehat/saran/ teguran   Provide advice/recommendation/warning	4 kali   4 times	4	23 kali   23 times	4
<b>Dewan Komisaris Dengan RUPS   Board of Commissioners and GMS</b>				<b>20</b>		<b>18</b>
II	II.1 Menyampaikan program kerja dan KPI Dekom tahunan   Delivering the work program and annual KPI of BOC	Rencana Kerja dan KPI Dewan Komisaris Tahunan   Work Plan and Annual KPI BOC	1 paper   1 paper	3	1 Paper, yaitu : RKA dan KPI 2017   1 Paper, i.e.: RKA and KPI 2017	3
		Ketepatan waktu penyampaian   Timely Submission	sebelum RUPS   Before GMS	2	21 hari kerja sebelum RUPS   21 working days prior to the GMS	2

Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

No.	Program Kerja Work Program	Uraian Description	KPI 2017			
			Sasaran Target	Bobot Portion	Realisasi Realization	Bobot Portion
II.2	Menyampaikan pendapat/usul Dekom kepada Pemegang Saham/RUPS   Delivering opinion/proposal of Board of Commissioners to the Shareholders/GMS	Pendapat atas : - RJP - RKAP - LM & KPI PLN Tahunan Menyampaikan : - Usulan penetapan kantor akuntan publik (KAP) - Usulan Remunerasi Opinion on: - RJP - RKAP - Annual Management Report and PLN's KPI To deliver: - Proposed appointment of Public Accounting Firm (KAP) - Remuneration Proposal	4 pendapat atau usul setahun   4 opinions or ideas in a year	4	4 pendapat/usul , yaitu : - RKAP 2017 - LM dan KPI Korporat 2015 - KAP 2016 - Remunerasi 2016 4 opinions/ideas, i.e.: - RKAP 2017 - Management Report and Corporate KPI 2015 - KAP 2016 - Remuneration 2016	4
	Ketepatan waktu penyampaian   Timely Submission		sebelum RUPS   Before GMS	2	Rata-rata 8 hari kerja sebelum RUPS   An average of 8 working days before GMS	1

Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

No.	Program Kerja Work Program	Uraian Description	KPI 2017			
			Sasaran Target	Bobot Portion	Realisasi Realization	Bobot Portion
II.3	Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan Dekom   Delivering report about the supervisory duty of the Board of Commissioners	<p>Laporan terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Progres KPI Semesteran</li> <li>- Laporan Pengawasan dan KPI Tahunan</li> </ul> <p>The report consists of:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KPI Progress Report per Semester</li> <li>- Annual Monitoring Report and KPI</li> </ul>	2 laporan setahun   2 reports a year	4	<p>2 laporan, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pengawasan dan realisasi KPI Dewan Komisaris Tahun 2015</li> <li>- Laporan Progres KPI Dewan Komisaris Semester I Tahun 2016</li> </ul> <p>2 reports, i.e.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Supervision and realization of KPI of Board of Commissioners 2015</li> <li>- Report on KPI Progress of the Board of Commissioners Semester I 2016;</li> </ul>	4
		<p>Ketepatan waktu penyampaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan KPI Semesteran</li> </ul> <p>Timely submission of:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Semester KPI Report</li> </ul>	30 hari kerja sejak berakhirnya periode   30 working days after the end of the period	1	16 hari kerja sejak berakhirnya periode   16 working days after the end of the period	1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Pengawasan Tahunan   Annual Supervisory Report</li> </ul>	Sebelum RUPS   Before GMS	2	2 hari kerja sebelum RUPS   2 working days prior to the GMS	1
II.4	RUPS   GMS	<p>Kehadiran Komisaris korum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RUPS RKAP</li> <li>- RUPS Tahunan/LPT</li> </ul> <p>The presence of a quorum of BOC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RKAP GMS</li> <li>- Annual GMS/Annual Calculation Report (LPT)</li> </ul>	2 kali setahun   2 times a year	2	<p>Korum pada RUPS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RKAP 2017</li> <li>- LPT 2015</li> </ul> <p>Quorum on GMS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RKAP 2017</li> <li>- LPT 2015</li> </ul>	2
<b>Internal Dewan Komisaris   Internal of the Board of Commissioners</b>				<b>26</b>		<b>26</b>
III	III.1 Rapat Dewan Komisaris   Board of Commissioners' Meeting	Rapat Dewan Komisaris terdiri dari Rapat internal dan rapat konsultasi   Meetings of the Board of Commissioners consisting of internal meetings and consultation meetings	24 kali setahun   24 times a year	20	41 kali   41 times	20

Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

No.	Program Kerja Work Program	Uraian Description	KPI 2017			
			Sasaran Target	Bobot Portion	Realisasi Realization	Bobot Portion
III.2	Pengenalan/ Induksi / peningkatan kompetensi   Introduction/ Induction/ competence development	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikuti seminar/ workshop di luar negeri maupun dalam negeri</li> <li>- Induksi jika Komisaris baru</li> <li>- Attending seminar/ workshop abroad and domestic</li> <li>- Induction for new Commissioner</li> </ul>	3 kali setahun   3 times a year	2	5 kali   5 times	2
III.3	Pengelolaan GCG   GCG Management	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penunjukan assessor GCG   GCG Assessor Appointment</li> <li>Pencapaian skor assesmen GCG Dewan Komisaris   GCG assessment score for BOC</li> </ul>	1 kali setahun   1 times a year	1	Assesor GCG 2016 : BPKP   Assesor GCG 2016: BPKP	1
			Capaian Skor minimum 75%   Minimum score of 75%	3	92,4% untuk Tahun 2016   92.4% in 2016	3
<b>TOTAL</b>				<b>100</b>		<b>97</b>

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
DEWAN KOMISARIS SELAMA TAHUN 2017

Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan melakukan penelaahan, pembahasan dan pemberian nasehat atas pengendalian internal Perusahaan, yaitu seluruh sistem dan proses yang terdapat dalam perusahaan yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan perusahaan, khususnya dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pengawasan atas Efektifitas dan Efisiensi Operasi dan Investasi :
  - a. Pengawasan atas efektifitas pengelolaan organisasi dan SDM.  
Pengawasan dilaksanakan untuk menilai efektifitas organisasi dan tata kerja, antara lain struktur organisasi dan pengelolaan jabatan strategis dan manajemen SDM. Pengawasan dilakukan dengan melakukan pembahasan dan pemberian pendapat/persetujuan Dewan Komisaris atas usulan Direksi.

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND  
RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF  
COMMISSIONERS IN 2017

Board of Commissioners' supervisory task is to perform evaluations, have discussions, and provide advice for the Company's internal control, i.e. the entire system and processes contained within the Company, designed to provide reasonable assurance on the achievement of corporate objectives, particularly in improving the effectiveness and efficiency of operations, financial reporting reliability, and compliance with laws and regulations.

1. Supervision of the Effectiveness and Efficiency of Operations and Investment:
  - a. Effective supervision of the management of the organization and human resources.  
Supervision is conducted to assess the effectiveness of organization and work procedures, including organizational structure and management of strategic positions and HR. Supervision is conducted by discussing and providing opinion/approval of the Board of Commissioners on the proposal of the Board of Directors.

Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

- b. Pengawasan atas usulan RKAP Tahun 2017 yang diajukan oleh Direksi dilakukan dengan cara :
- Memastikan bahwa rencana kerja yang tertuang dalam RKAP telah disusun sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan serta penugasan dari Pemerintah;
  - Sasaran yang ditetapkan dalam usulan RKAP dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien.
- c. Pengawasan atas Pelaksanaan RKAP dan KPI PT PLN (Persero) 2017.  
Pengawasan atas pelaksanaan RKAP dan KPI Tahun 2017 dilakukan melalui penelaahan dan pembahasan laporan pelaksanaan RKAP, hambatan dalam pelaksanaan RKAP serta langkah-langkah yang dilakukan oleh Direksi untuk mengatasi hambatan tersebut.
- Penelaahan dan pembahasan atas dasar Laporan Manajemen Triwulanan dan Laporan Manajemen Tahunan serta Laporan Pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI), juga dilakukan pembahasan tersendiri untuk permasalahan tertentu.
- d. Pengawasan atas Pengelolaan Risiko.  
Pengawasan atas pengelolaan risiko dilakukan dengan :
- Melakukan telaah atas analisa risiko yang dilakukan Direksi terutama yang terkait dengan permintaan rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris atas rencana tindakan Direksi (tertentu), dengan mengkaji apakah analisa risiko yang dilakukan telah memadai sesuai ketentuan manajemen risiko di lingkungan perusahaan;
  - Melakukan telaah atas risiko dengan level tinggi dan ekstrem serta mengingatkan atas monitoring terhadap mitigasi yang dilakukan serta memberikan saran-asas atas risiko yang mungkin belum teridentifikasi.
- b. The supervision of the proposed Work and Budget Plan (RKAP) in 2017 suggested by the Board of Directors, is performed by:
- Ensuring that the work plan in the RKAP has been prepared in accordance with the vision, mission, and objectives of the Company, and with the assignment of the Government;
  - The goals set out in the proposed RKAP can be achieved more effectively and efficiently.
- c. Supervision over the Implementation of RKAP and KPI of PT PLN (Persero) 2017.  
Supervision over the implementation of RKAP and KPI 2017 is conducted through the review and discussion of RKAP implementation report, obstacles in the implementation of RKAP, and steps taken by the Board of Directors to overcome these obstacles.
- Reviewing and discussing on Quarterly Management Report, Annual Management Report, and Key Performance Indicators (KPI) Achievement Report, and separate discussion for certain problems.
- d. Supervision of Risk Management.  
Supervision of risk management is conducted by:
- Conducting a review of the risk assessment by the Board of Directors, particularly related to the request of recommendation or approval of the Board of Commissioners for (certain) action plan of the Directors, by examining whether the risk analysis was conducted adequately, in accordance with risk management within the Company's environment;
  - Conducting research for risks with high and extreme levels, being alert to mitigation circumstances, and providing advice on possible risks that have not been identified.

## Dewan Komisaris

Board of Commissioners

2. Pengawasan atas keandalan informasi/pelaporan keuangan  
Pengawasan atas keandalan sistem informasi dilakukan dengan menelaah, membahas dan memberikan nasehat atas :
  - a. Prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi dan sistem informasi yang telah berjalan serta memastikan bahwa Program Pengembangan Teknologi Informasi berjalan sesuai rencana;
  - b. Temuan audit oleh KAP mengenai kelemahan sistem informasi perseroan, untuk memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan tersebut.
3. Pengawasan atas Laporan Pelaksanaan RKAP berupa Laporan Manajemen dan Realisasi Key Performance Indicators (KPI) Korporat PT PLN (Persero).  
Melakukan penelaahan atas Laporan Manajemen dan Realisasi KPI Triwulanan dan Laporan Manajemen serta Realisasi KPI Tahunan guna memastikan akurasi dan keandalan data/informasi yang disajikan dalam Laporan Manajemen tersebut.  
  
Pengawasan atas Pelaksanaan Audit PT PLN (Persero) Tahun 2017 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), meliputi Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Keuangan PKBL Perseroan, Kinerja dan Kepatuhan Perseroan.
4. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - a. Pengawasan atas Efektifitas Pemeriksaan Internal  
Pengawasan dilakukan dengan pertemuan secara regular dengan Satuan Pengawas Intern (SPI)
  - b. Pengawasan atas tindak lanjut temuan hasil audit eksternal  
Pengawasan dilakukan melalui penelaahan, pembahasan dan pemberian nasehat untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil temuan audit oleh KAP dan BPK telah ditindak lanjuti oleh Direksi.
  - c. Pengawasan atas Penerapan Unsur GCG  
Pengawasan atas penerapan unsur GCG dilakukan dengan memastikan bahwa semua usulan yang diajukan Direksi yang meminta persetujuan maupun rekomendasi Dewan Komisaris telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Controlling the reliability of information/financial reporting  
Supervising the reliability of information systems is performed by examining, discussing, and providing advice on:
  - a. Preparation procedure of the consolidated financial statements and the information systems that have been running, and ensuring that the Information Technology Development Program runs accordingly;
  - b. The Public Accounting Firm has some audit findings regarding the weaknesses of the Company's information system, and the Board of Directors has to follow-up on the findings.
3. Supervision over RKAP Implementation Report is a Management and Realization Report of Corporate Key Performance Indicators (KPI) of PT PLN (Persero).  
Reviewing the Management Report, and KPI Quarterly Realization and Management Report, and Annual KPI Realization to ensure the accuracy and reliability of the data/information presented in the Management Report.  
  
Supervision over Audit of PT PLN (Persero) 2017 by Public Accountant Firm (KAP), which covers the Company's Financial Statement, Company's PKBL Financial Statement, and the Company's Performance and Compliance.
4. Monitoring the Compliance with Prevailing Legislation and regulations.
  - a. Review on the effectiveness of Internal Audit  
Supervision is conducted through regular meetings with the Internal Audit Unit (SPI)
  - b. Supervision of the follow-up on external audit findings  
Supervision is conducted through review, discussion, and provision of advice to ensure that the recommendations of audit findings by Public Accounting Firm and BPK have been followed-up by the Board of Directors.
  - c. Supervision of the GCG Elements Implementation  
The supervision of GCG elements implementation is conducted by ensuring that all the proposals from the Board of Directors for approval and recommendation to the Board of Commissioners, is in accordance with applicable regulations.

Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

- |  |   |
|--|---|
| <p>5. Pengawasan atas Pengelolaan PKBL<br/>Pembahasan dan penelaahan dilakukan atas langkah-langkah yang telah dilakukan perseroan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PKBL.</p> <p>6. Nasehat dan Teguran<br/>Dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pengelolaan Perseroan, Dewan Komisaris telah memberikan beberapa nasehat dan peringatan kepada Direksi berdasarkan informasi yang diperoleh dan fakta/kenyataan yang diterima dari sumber yang layak dipercaya, dari hasil evaluasi dalam kunjungan kerja yang dilakukan serta dari penyampaian surat-surat yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan, antara lain berkaitan dengan penghapusan Piutang Ragu-Ragu (PRR), ATTB dan lainnya.</p> <p>7. Kinerja Direksi<br/>Penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui pembahasan dan pemberian pendapat atas Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan yang juga mencantumkan realisasi KPI Triwulanan dan Tahunan.</p> | <p>5. Supervision of the Partnership and Community Development Program (PKBL) Management<br/>The Company has discussed and reviewed the measures to improve the transparency and accountability in PKBL management.</p> <p>6. Advice and Reprimand<br/>In controlling the course of the Company's management, the Board of Commissioners has provided advice and reprimand to the Board of Directors, based on the information obtained and the facts from a credible source, from the evaluation results of a work visit, as well as from letters that were addressed to the Board of Commissioners from both inside and outside of the Company, relating to the elimination of Doubtful Accounts (PRR), ATTB, etc.</p> <p>7. Board of Directors' Performance<br/>The Board of Directors' performance assessment is carried out through discussion and opinion on the Quarterly and Annual Management Report that include the actual Quarterly and Annual KPI.</p> |
|--|---|

**REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS ATAU  
JENIS-JENIS KEPUTUSAN YANG MEMBUTUHKAN  
PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS**

Pemberian pendapat Dewan Komisaris atas permintaan Direksi terkait rencana tindakan yang memerlukan rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar, antara lain :

1. Penghapusan piutang ragu-ragu, penghapusan Aktiva Tetap Tidak Beroperasi (ATTB);
2. Perolehan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri;
3. Transaksi pembelian tenaga listrik dari IPP ;
4. Penerusan pinjaman kepada anak perusahaan ;
5. Direksi/Komisaris Anak Perusahaan PT PLN (Persero);
6. Sekretaris Perusahaan PT PLN (Persero)
7. Struktur Organisasi PT PLN (Persero)
8. Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN (Persero) Tahun 2016 dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN (Persero) Tahun 2017
9. Pembagian Laba PT PLN (Persero) Tahun 2016;

**RECOMMENDATION OF BOARD OF  
COMMISSIONERS OR TYPES OF DECISIONS  
REQUIRING APPROVAL OF BOARD OF  
COMMISSIONERS**

According to the Articles of Association, provision of opinion of the Board of Commissioners at the request of the Board of Directors on action plans requiring recommendation or approval of the Board of Commissioners, includes:

1. Removal of doubtful accounts, write-off of Non-Operating Property, Plant, and Equipment (ATTB);
2. Loan receipt from both domestic and foreign;
3. Power purchase transactions from IPP;
4. Loan forwarding to subsidiaries;
5. Directors/Commissioners of Subsidiaries of PT PLN (Persero);
6. Corporate Secretary of PT PLN (Persero)
7. Organizational Structure of PT PLN (Persero)
8. Tantiem of the Board of Commissioners and Board of Directors PT PLN (Persero) 2016 and Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors PT PLN (Persero) 2017
9. Profit Sharing of PT PLN (Persero) 2016;

## Dewan Komisaris

Board of Commissioners

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>10. Dukungan Pengecualian ISAK 8 dan PSAK 10 kepada PT PLN (Persero)</li> <li>11. KAP untuk Audit LK dan PKBL PT PLN (Persero) 2017;</li> <li>12. Revisi RKAP PT PLN (Persero) Tahun 2017;</li> <li>13. RKAP PT PLN (Persero) Tahun 2018;</li> <li>14. Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan PT PLN (Persero) Tahun 2017;</li> <li>15. Laporan Pencapaian KPI Triwulanan dan Tahunan PT PLN (Persero) Tahun 2017;</li> <li>16. Tindak lanjut temuan hasil audit eksternal dan internal.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>10. Support for Exceptions of ISAK 8 and PSAK 10 to PT PLN (Persero)</li> <li>11. Public Accounting Firm for Audit for Financial Statements and PKBL of PT PLN (Persero) 2017;</li> <li>12. RKAP 2017 Revision of PT PLN (Persero);</li> <li>13. RKAP 2018 PT PLN (Persero);</li> <li>14. Quarterly and Annual Management Report of PT PLN (Persero) 2017;</li> <li>15. Quarterly and Annual KPI Achievement Report PT PLN (Persero) 2017;</li> <li>16. Follow-up findings of external and internal audit results.</li> </ul> |
|--|--|

## PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS KEPADA PEMEGANG SAHAM

Pada tahun 2017, Dewan Komisaris juga memberikan Persetujuan kepada Pemegang Saham, terkait beberapa hal:

1. Rencana Kerja dan KPI Dewan Komisaris PT PLN (Persero) Tahun 2017;
2. Laporan perkembangan Realisasi KPI Dewan Komisaris PT PLN (Persero) Triwulan II Tahun 2017;
3. Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Realisasi KPI Dewan Komisaris PT PLN (Persero) Tahun 2017;
4. Rekomendasi Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN (Persero) 2017 dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN (Persero) 2017;
5. Rekomendasi Penggunaan Laba Bersih PT PLN (Persero) 2017;
6. Usulan KAP untuk Audit PT PLN (Persero) Tahun 2017;
7. Pendapat Dewan Komisaris Terhadap Laporan Manajemen PT PLN (Persero) Tahun 2017;
8. Rekomendasi dan Pendapat Dewan Komisaris atas RKAP PT PLN (Persero) 2017;

## PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES REPORTING DIRECTLY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

In 2017, the Board of Commissioners also rendered the Approval to the Shareholders on the following matters:

1. Work Plan and KPI of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) Year 2017;
2. KPI Realization development Report of the the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) Quarter II Year 2017;
3. Oversight Duty Implementation Report of the Board of Commissioners and KPI Realization of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) Year 2017;
4. Recommendation of Tantiem for the Board of Commissioners and Board of Directors of PT PLN (Persero) Year 2017 and Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT PLN (Persero) Year 2017;
5. Recommendation of Net Profit Allocation of PT PLN (Persero) Year 2017;
6. Proposal of Public Accounting Firm to Audit PT PLN (Persero) Year 2017;
7. Opinion of the Board of Commissioners on the Management Report of PT PLN (Persero) Year 2017;
8. Recommendation and Opinion of the Board of Commissioners on RKAP of PT PLN (Persero) Year 2017.

## ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

### Board of Commissioners' Supporting Organs

Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, Dewan Komisaris membentuk Komite-komite yang berfungsi sebagai penunjang tugas pengawasan Dewan Komisaris. Keanggotaan komite tersebut terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dan bertanggung-jawab kepada Dewan Komisaris. Anggota Komite Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

In accordance with the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners shall establish Committees that function to support the supervisory duties of the Board of Commissioners. The committee consists of one or more members of the Board of Commissioners and is accountable to the Board of Commissioners. The Board of Commissioners appoints and dismisses the members of the Board of Commissioners' Committees.

**Sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan BUMN dan Surat Menteri Negara BUMN No. S-371/MBU/06/2015 tanggal 26 Juni 2015, Dewan Komisaris PLN membentuk Komite Audit (KA), Komite Manajemen Risiko (KMR), dan Komite Nominasi & Remunerasi (KNR).**

In accordance with the provisions in the State Minister of SOEs' Decree No. KEP-12/MBU/2012 dated August 24, 2012, on Supporting Organs of the Board of Commissioners/Board of Trustees of SOEs, and State Minister of SOEs Letter No. S-371/MBU/06/2015 dated June 26, 2015, the PLN's Board of Commissioners established Audit Committee (KA), Risk Management Committee (KMR), and Nomination and Remuneration Committee (KNR).

### SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris, adalah individu yang diangkat oleh Dewan Komisaris untuk memimpin dan menjalankan fungsi Sekretariat Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris berasal dari luar Perusahaan dan memiliki masa jabatan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

### BOARD OF COMMISSIONERS' SECRETARY

Secretary of the Board of Commissioners is an individual who is appointed by the Board of Commissioners to lead and perform the functions of the Secretariat of the Board of Commissioners. The Secretary of the Board of Commissioners is from outside the Company and has a term of office stipulated by the Board of Commissioners.

### PEDOMAN KERJA SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Pedoman Kerja Sekretaris Dewan Komisaris tercantum dalam *Board Manual* PT PLN (Persero) yang memuat tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Dewan Komisaris yang rincian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris.
2. Mengkoordinir penyediaan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris seperti laporan berkala dari Direksi (Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Laporan Hasil Pemeriksaan SPI) serta laporan/informasi lainnya mengenai Perseroan.

### WORKING GUIDELINES OF BOARD OF COMMISSIONERS' SECRETARY

Working Guidelines of the Board of Commissioners' Secretary are listed in Board Manual of PT PLN (Persero), which contains the following duties and responsibilities:

1. Leading and organizing activities in the secretariat within the Board of Commissioners' environment, and the details of duties are further stipulated by the Board of Commissioners.
2. Coordinating the provision of information required by the Board of Commissioners, such as periodic report from the Board of Directors (Monthly Report, Quarterly Report, Annual Report, SPI Audit Results Report) and other reports/information regarding the Company.

## Organ Pendukung Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Supporting Organs

3. Menyusun dan memfinalisasi laporan dan dokumen yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris, antara lain Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
4. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris, persiapan dan pengiriman undangan, penyampaian materi Rapat serta pembuatan risalah Rapat, serta tugas-tugas lain yang terkait.
5. Mengkoordinasikan dan memfasilitasikan kegiatan Komite Komisaris.
6. Menyusun dan mengadministrasikan risalah Rapat dan dokumen Dewan Komisaris lainnya serta mengirimkan hasil-hasil keputusan Rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
7. Sekretaris Dewan Komisaris menetapkan prosedur teknis Kunjungan Kerja Dewan Komisaris.
8. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.
9. Menjadi penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.
10. Dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris dan wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut.
11. Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan tugasnya.

## PROFIL SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

## PROFILE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' SECRETARY



<b>Nama</b>   Name	Djoko Hastowo
<b>Usia</b>   Age	63 tahun, per 31 Desember 2017   63 years, as of December 31, 2017
<b>Kewarganegaraan</b>   Citizenship	Indonesia
<b>Riwayat Pendidikan</b>   History of Education	S1 Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1979).   Bachelor of Electric Engineering, Bandung Institute of Technology (1979).

Organ Pendukung Dewan Komisaris  
Board of Commissioners' Supporting Organs

## Riwayat Jabatan | History of Position

<b>Dasar Hukum Penunjukan</b>   Legal Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris PT PLN (Persero) No. 36/SK/DK-PLN/2015   Board of Commissioners' Decree of PT PLN (Persero) No. 36/SK/DK-PLN/2015
<b>Pengalaman Kerja</b>   Working Experience	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kepala Dinas Operasi dan Pemeliharaan pada Divisi Penyaluran PLN P3B (1996-2001)</li> <li>· Manajer Bidang Teknik pada PLN P3B (2001-2004)</li> <li>· Deputi Direktur Pembinaan Transmisi pada PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2004-2008)</li> <li>· General Manajer PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi (2008-2009)</li> <li>· Deputi Direktur Pengembangan SDM dan Talenta pada PLN Kantor Pusat (2009)</li> <li>· Direktur Utama PT Indonesia Power (2009-2014)</li> <li>· Komisaris Utama PT Comestoarra Bentarra Noesantarra (2013)</li> <li>· Advisor PT Enviromate Technology Internasional (2014).</li> <li>· Head of Department of Operations and Maintenance on Distribution Division of PLN P3B (1996-2001)</li> <li>· Manager of Engineering at PLN P3B (2001-2004)</li> <li>· Deputy Director of Transmission Development at PT PLN (Persero) Head Office (2004-2008)</li> <li>· General Manager of PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi (2008-2009)</li> <li>· Deputy Director of Human Resource Development and Talents at PLN Head Office (2009)</li> <li>· President Director of PT Indonesia Power (2009-2014)</li> <li>· President Commissioner of PT Comestoarra Bentarra Noesantarra (2013)</li> <li>· Advisor of PT Enviromate Technology International (2014).</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap</b>   Concurrent Positions	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tidak memiliki jabatan rangkap sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 terkait Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN   Shall not have concurrent positions in accordance with the State Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 on the Supporting Organs of the SOEs Board of Commissioners/Board of Trustees</li> </ul>
<b>Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi</b>   Education and Training for Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <i>Working Visit</i> ke PLN PJB Unit Pembangkit Gresik, UIP JBTB I &amp; II, PLTA Sutami Karangates.   <i>Working Visit</i> to PLN PJB Gresik Generating Unit, UIP JBTB I &amp; II, Hydro Power Plant Sutami Karangates</li> <li>· <i>Working Visit</i> ke PLN Wilayah Sumut, PLN Pembangkitan Sumut, UIP I&amp;II Pembangkitan dan PLN P3B Sumatera Area Medan.   <i>Working Visit</i> to North Sumatera PLN, PLN Generating in North Sumatera, Generating UIP I &amp; II, and PLN P3B Sumatera Area Medan</li> <li>· <i>Working Visit</i> ke PLN Wilayah Bangka Belitung, UIP Pembangkitan dan Transmisi Sumatera Bagian Selatan.   <i>Working Visit</i> to Bangka Belitung PLN, Generating and Transmission UIP in South Sumatera</li> <li>· <i>Working Visit</i> ke PLN Wilayah NTT Bima dan Dompu   <i>Working Visit</i> to East Nusa Tenggara PLN in Bima and Dompu Areas</li> <li>· <i>Working Visit</i> ke PLN Wilayah Lampung, Distribusi Lampung, UIP Pembangkit, PLN Sektor Tarahan dan PLN Batam MPP- PLTG Tarahan.   <i>Working Visit</i> to PLN Lampung Area, Lampung Distribution, UIP Plant, PLN Tarahan Sector, and PLN Batam Mobile Power Plant-PLTG Tarahan</li> </ul>

## KOMITE AUDIT

### Audit Committee

Komite Audit, adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dengan memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terkait dengan laporan dan informasi keuangan yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan para pemangku kepentingan lainnya serta tentang efektifitas dari pengendalian internal Perseroan. Lebih lanjut, PLN membentuk Komite Audit guna memenuhi prinsip akuntabilitas pada perusahaan BUMN sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan di Indonesia.

### KOMPOSISI KOMITE AUDIT

Penetapan komposisi Komite Audit PLN telah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Poin-poin pemenuhan PLN atas peraturan diatas terdapat pada Pasal 3 bahwa Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, Pasal 4 bahwa Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan Pasal 5 bahwa Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

Anggota Komite Non Komisaris dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris, baik dari calon-calon yang mengajukan lamaran kepada Dewan Komisaris maupun calon-calon yang diusulkan oleh Anggota Dewan Komisaris.

Anggota Komite Non Komisaris harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- 1) Memiliki integritas yang baik.
- 2) Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan;
- 3) Memiliki kecukupan waktu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
- 4) Mempunyai kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan yang baik.
- 5) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang industri/bisnis Perseroan;
- 6) Bagi anggota Komite Audit, maka salah seorang anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan/keahlian bidang akuntansi
- 7) Berasal dari luar Perseroan

The Audit Committee is a committee established by the Board of Commissioners to assist the execution of the duties and functions of the Board of Commissioners, by providing professional and independent opinion to the Board of Commissioners related to the reports and financial information submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners and other stakeholders, as well as on the effectiveness of Company's internal control. Further, PLN established the Audit Committee in order to meet the principle of accountability in state-owned enterprises in accordance with the laws and regulations in Indonesia.

### AUDIT COMMITTEE'S COMPOSITION

The determination of the composition of PLN's Audit Committee refers to the Finance Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines of the Audit Committee. PLN's compliance with the said regulation is provided in Article 3, stating that the Audit Committee Members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners, Article 4, the Audit Committee shall be comprised of at least 3 (three) members from Independent Commissioners and Parties from outside the Issuer or Company Public, and Article 5, that the Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner.

Non-Commissioner Members of the Committee shall be elected and stipulated in the Board of Commissioners' Meeting, both for candidates applying to the Board of Commissioners or nominees proposed by the Board of Commissioners.

The Non-Commissioner Members of the Committee shall have the qualifications as follow:

- 1). Show good integrity.
- 2). Must not have the benefit of private relationships that may cause a negative impact and conflict of interest;
- 3). Have sufficient time to perform his or her duties.
- 4). Have the ability to communicate and coordinate effectively.
- 5). Have an adequate knowledge of the industry and the Company's business;
- 6). Specifically for Audit Committee, one of the members of Audit Committee must have educational background/expertise in accounting
- 7). Shall be from the outside of the Company

Komite Audit  
Audit Committee

Pada tahun 2017, komposisi Komite Audit PLN adalah sebagai berikut:

In 2017, the PLN's Audit Committee composition is as follows:

No	Jabatan Position	1 Januari s.d 19 Oktober 2017 January 1 - October 19, 2017	20 Oktober s.d 31 Desember 2017 October 20 - December 31, 2017
1.	Ketua merangkap anggota Chairman and concurrently Member	Darmono	Darmono
2.	Anggota   Member	Rionald Silaban	Rionald Silaban
3.	Anggota   Member	Ilya Avianti	Ilya Avianti
4.	Anggota   Member	Achmad Wahyudi	Achmad Wahyudi
5.	Anggota   Member	Krisna Simbaputra	Krisna Simbaputra
6.	Anggota   Member	Gunawan Sidauruk	

## Profil Komite Audit Bukan Dewan Komisaris

## Profile of Non-Commissioner Members of Audit Committee



<b>Nama   Name</b>	Achmad Wahyudi
<b>Usia   Age</b>	53 tahun, per 31 Desember 2017   53 years, as of December 31, 2017
<b>Kewarganegaraan   Citizenship</b>	Indonesia
<b>Riwayat Pendidikan   History of Education</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· S1 Ekonomi dari Universitas Airlangga (1986)   Bachelor of Economics from Airlangga University (1986)</li> <li>· Sertifikasi CPA   CPA Certification</li> </ul>
<b>Riwayat Jabatan   History of Position</b>	
<b>Dasar Hukum Penunjukan   Legal Basis of Appointment</b>	Keputusan Dewan Komisaris PT PLN (Persero) No. 03/SK/DK- PLN/2016   Board of Commissioners' Decree of PT PLN (Persero) No. 03/SK/DK-PLN/2016
<b>Pengalaman Kerja   Working Experience</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Anggota Komite Manajemen Risiko PT PLN (Persero) (1 Maret 2016-1 Agustus 2016)</li> <li>· Konsultan mandiri di bidang akuntansi, keuangan, dan perpajakan (2014-sekarang)</li> <li>· Direktur Keuangan Susi Air (2011-2013)</li> <li>· Akuntan publik, sekaligus konsultan manajemen dan perpajakan (1992-2010)</li> <li>· Konsultan di Hadori &amp; Co, auditor internal di Mercedes Benz Grup, dan staf akuntansi dan keuangan perusahaan pertambangan Australia, New Hope (1986-1992)</li> <li>· Member of Risk Management Committee of PT PLN (Persero) (March 1, 2016 – August 1, 2016)</li> <li>· Independent consultants in accounting, finance, and taxation (2014-present)</li> <li>· Director of Finance of Susi Air (2011-2013)</li> <li>· Public accountant, and management and taxation consultant (1992-2010)</li> <li>· Consultant at Hadori &amp; Co, internal auditor at Mercedes Benz Group, and mining accounting and finance staff in Australian Mining, New Hope (1986-1992)</li> </ul>

## Komite Audit

Audit Committee

<b>Jabatan Rangkap  </b> Concurrent Positions	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak memiliki jabatan rangkap sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 terkait Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN   Shall not have concurrent positions in accordance with the State Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 on the Supporting Organs of the SOEs Board of Commissioners/Board of Trustees</li> </ul>
<b>Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi  </b> Education and Training for Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>Workshop Integrated Reporting di Paris 15 s.d. Desember 2017   Workshop Integrated Reporting in Paris on December 15, 2017</li> </ul>



<b>Nama  </b> Name	Krisna Simbaputra
<b>Usia  </b> Age	56 tahun, per 31 Desember 2017   56 years, as of December 31, 2017
<b>Kewarganegaraan  </b> Citizenship	Indonesia
<b>Riwayat Pendidikan  </b> History of Education	<ul style="list-style-type: none"> <li>S1 Teknik Elektro, ITB (1985)   Bachelor of Electric Engineering, Bandung Institute of Technology (1985).</li> <li>S2 Bidang Information Management dari Sheffield University, United Kingdom, (1995)   Master of Information Management from Sheffield University, United Kingdom (1995)</li> </ul>
<b>Riwayat Jabatan  </b> History of Position	
<b>Dasar Hukum Penunjukan  </b> Legal Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris PT PLN (Persero) No. 16/SK/DK-PLN/2017   Board of Commissioners' Decree of PT PLN (Persero) No. 16/SK/DK-PLN/2017
<b>Pengalaman Kerja  </b> Working Experience	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepala Divisi Manajemen Risiko &amp; Kepatuhan (2013 – 2017)</li> <li>GM PLN Wilayah Sumatera Utara (2011 – 2013)</li> <li>GM PLN Wilayah Sumatera Barat (2010 – 2011)</li> <li>Manager Bidang Distribusi PLN Distribusi Jatim (2009)</li> <li>Manager Bidang Operasi PLN P3B Jawa Bali (2008 – 2009)</li> <li>Manager Bidang Perencanaan PLN Wilayah Kalimantan Timur (2006 – 2008)</li> <li>Manajer PLN Area Cimahi (2000 – 2006)</li> <li>Head of Risk &amp; Compliance Management Division (2013-2017)</li> <li>GM PLN for North Sumatera Region (2011 – 2013)</li> <li>GM PLN for West Sumatera Region (2010 – 2011)</li> <li>Manager of Distribution PLN Distribusi Jatim (2009)</li> <li>Operations Manager PLN P3B Jawa Bali (2008 - 2009)</li> <li>Manager of Planning for PLN East Kalimantan Region (2006 - 2008)</li> <li>PLN Manager Cimahi Area (2000 - 2006)</li> </ul>

<b>Jabatan Rangkap  </b> Concurrent Positions	· Tidak memiliki jabatan rangkap sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 terkait Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN   Shall not have concurrent positions in accordance with the State Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 on the Supporting Organs of the SOEs Board of Commissioners/Board of Trustees
<b>Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi  </b> Education and Training for Competence Development	· Konferensi Nasional Profesional Manajemen Resiko 21 s.d. 24 November 2017   National Risk Management Professional Conference, November 21-24, 2017

## INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE AUDIT

Sesuai dengan peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, maka salah satu dari kriteria menjadi anggota Komite Audit adalah independen dan bebas dari benturan kepentingan sehingga dapat bersikap objektif dalam memberikan pendapat terhadap permasalahan yang dihadapi. Hal lain yang ditekankan kepada seluruh anggota komite adalah agar bersikap profesional di dalam melaksanakan tugas dan dalam memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris.

## INDEPENDENCE OF AUDIT COMMITTEE MEMBERS

In line with the State Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011, one of the criteria to be a member of Audit Committee is the independence and free of conflict of interest. Thus, the member can act objectively in providing opinion on the problems faced. The members of Audit Committee also emphasizes to be professional in carrying out duties and in providing opinion to the Board of Commissioners.

**Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen atau yang dapat bersifat independen, sedangkan anggota Komite (non Komisaris) terdiri dari akademisi dan profesional (akutansi, keuangan, teknik) yang memiliki kompetensi dan pengalaman sesuai dengan bidang tugasnya atau mantan pegawai/pejabat perusahaan yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan luas berkaitan dengan perusahaan dan aktivitasnya.**

The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner or anyone who may be independent. Non-Commissioner Members of the Committee consist of academics and professionals (accounting, finance, engineering) who have competence and experience in accordance with their respective duties or former employees/broad knowledge related to the Company and its activities.

Pengukuran terhadap Independensi Komite Audit PT PLN (Persero) dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

The Independence of Audit Committee of PT PLN (Persero) is measured by referring to Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines of the Audit Committee.

## Komite Audit

Audit Committee

Kriteria Independensi   Independence Criteria	Darmono	Rionald Silaban	Ilya Avianti	Achmad Wahyudi	Krisna Simbaputra
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik, atau Pihak Lain yang Memberi Jasa Asuransi, Jasa Non-Asuransi, Jasa Penilai dan/atau Jasa Konsultasi lain kepada PLN dalam 6 bulan terakhir   Shall not be an employee in the Public Accountants Firm, Legal Consultant Office, Public Appraiser Service Office, or any other party providing Insurance Services, Non-Insurance Services, Appraisers, and/or other Consulting Services to PLN within the last 6 months	√	√	√	√	√
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan atau mengawasi kegiatan PLN dalam 6 bulan terakhir   Shall not be a person who is employed or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the PLN activities within the last 6 months	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di PLN   Shall have no direct or indirect shares in PLN	√	√	√	√	√
Keluarga tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di PLN   His/her family shall have no direct or indirect shares in PLN	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama PLN   Shall not have Affiliations with any members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Major Shareholder of PLN	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PLN   Shall have no direct or indirect business relationship related to PLN business activities	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislative dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai kepala/ wakil kepala pemerintahan daerah   Shall not serve as a party official and/or candidate/legislative member and/or a candidate or serving as head/deputy head of local government	√	√	√	√	√
Tidak memiliki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan di PLN   Shall not have other positions that may cause a conflict of interest related to a position at PLN	√	√	√	√	√

## PIAGAM KOMITE AUDIT

Detail tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite Audit dijabarkan dalam Piagam (*Charter*) Komite Audit yang diberlakukan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Salah satu tugas utama Komite Audit adalah melakukan pengawasan (*oversight*) terhadap proses pelaporan keuangan termasuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap independensi dari auditor independen, di luar tanggung jawab atas isi Laporan Keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen.

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah:

1. Melakukan telaah atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan PLN, seperti Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Manajemen dan informasi keuangan lainnya;
2. Melakukan pemilihan Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit atas Laporan Keuangan PLN dan melakukan telaah untuk memastikan efektivitas kegiatan dan hasil audit yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik;
3. Melakukan telaah untuk menilai keandalan dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal PLN;
4. Melakukan telaah untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) PLN;
5. Melakukan telaah atas ketaatan PLN terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang berhubungan dengan pelaporan kepada para pemangku kepentingan;
6. Melakukan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan PLN;
7. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris, diantaranya adalah:
  - Memastikan bahwa penghapusan piutang, penghapusan persediaan dan penghapusan aktiva tidak beroperasi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - Tugas-tugas khusus lainnya yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## AUDIT COMMITTEE CHARTER

The Audit Committee's duties, responsibilities, and obligations are explained in detail in the Audit Committee Charter, which is enacted in accordance with the Board of Commissioners' decision. One of the Audit Committee's main duties is to supervise the financial reporting process, including monitoring and evaluating the independent auditor's independence, out of responsibility for the contents of the Financial Statement which is the responsibility of management.

## AUDIT COMMITTEE'S DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Audit Committee's duties and responsibilities are:

1. Reviewing the financial information that PLN publishes, such as the Financial Statement, the Work and Budget Plan, Management Report, and other financial information;
2. Selecting a Public Accounting Firm to perform the audit of PLN's Financial Statement and conduct an assessment of the results to ensure the effectiveness of the audit conducted by the Public Accounting Firm;
3. Reviewing the reliability and effectiveness of PLN Internal Control System;
4. Reviewing the effectiveness of audit results and activities, performed by Internal Audit Unit (SPI) of PLN;
5. Conducting a review of PLN's compliance with laws and regulations, in particular relating to reporting to stakeholders;
6. Reviewing complaints relating to PLN;
7. Carrying out other duties granted by the Board of Commissioners, such as:
  - Ensuring that proposals for accounts receivable removal, inventory removal, non-operating Property, plant and equipment removal, and other assets removal are in accordance with the prevailing laws and regulations;
  - Other special duties in accordance with applicable laws and regulations.

## Komite Audit

### Audit Committee

- |  |  |
|--|--|
| <p>8. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris;</p> <p>9. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam bentuk laporan tahunan dan laporan atas setiap pelaksanaan tugas khusus ;</p> <p>10. Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi mengenai PLN, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya;</p> <p>11. Melaksanakan self assessment atas efektivitas Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan melakukan penyempurnaan Piagam Komite Audit secara periodik.</p> | <p>8. The Audit Committee is independent, both in its performance of duties and in reporting, and is responsible to the Board of Commissioners;</p> <p>9. The Audit Committee's report to Board of Commissioners is conveyed in the form of Annual Report and reports on each particular duty assignment;</p> <p>10. 10. The Audit Committee is obliged to maintain the confidentiality of documents, data, and information related to PLN, either from internal or external parties and only used for the purpose of performing its duties;</p> <p>11. Carrying out self-assessment of the effectiveness of the Audit Committee in performing its duties, and conducting periodic Audit Committee Charter improvements.</p> |
|--|--|

## RAPAT KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2017, Komite Audit melaksanakan rapat 89 kali rapat yang dihadiri anggota komite unsur Komisaris sebanyak 44 kali dan rapat yang hanya dihadiri anggota komite unsur non komisaris 45 kali. Rapat dilaksanakan dengan mengundang para pihak yang berkepentingan sesuai tuntutan tugas dan tanggung jawab Komite Audit yakni Satuan Pengawasan Intern, Auditor Eksternal dan Manajemen Perusahaan.

## AUDIT COMMITTEE'S MEETINGS

Throughout 2017, the Audit Committee held 89 meetings, which attended committee from Commissioner Members is 44 times, and the meetings attended by Non-Commissioner Member is 45 times. Meetings are held by inviting the interested parties, in accordance with the duties and responsibilities of the Audit Committee, i.e. Internal Audit Unit, External Auditor, and Corporate Management.

Komite Audit  
Audit Committee

No	Uraian   Description	Jumlah   Total
1.	Rapat Komite Audit dengan Dewan Komisaris   Audit Committee Meeting with the Board of Commissioners	16
2.	Rapat Internal Komite Audit dengan Staf Dewan Komisaris   Internal Meeting of Audit Committee with the Board of Commissioners' Staff	19
3.	Rapat pembahasan dengan Direktorat terkait (pembahasan RKAP, Laporan Manajemen dan permasalahan dengan masing-masing Direktorat   Discussion meeting with relevant Directorates (discussion of RKAP, Management Report and issues with each Directorate)	15
4.	Rapat dengan SPI PT PLN (Persero)   Meeting with Internal Control System of PT PLN (Persero)	11
5.	Rapat dengan Kantor Akuntan Publik   Meeting with Public Accounting Firm	7
6.	Mengikuti kunjungan kerja Dewan Komisaris dan rapat dengan pimpinan Unit PLN setempat   Participating in work visit of the Board of Commissioners and meeting with Head of Units of local PLN	9
7.	Pembahasan dengan manajemen untuk menelaah permohonan penghapusan atas ATTB, PRR, Aktiva Lainnya, Piutang macet lainnya yang diajukan Direksi   Discussion with the management on the write-off request on ATTB, PRR, Other Assets, non-performing Receivables proposed by the Board of Directors	12
<b>Total</b>		<b>89</b>

**REMUNERASI KOMITE AUDIT**

Remunerasi Komite Audit tercantum pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara mengatur terkait penghasilan anggota Komite Audit, yakni berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

**REMUNERATION OF THE AUDIT COMMITTEE**

Remuneration of Audit Committee is stipulated in Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 on the Supporting Organs of the SOEs Board of Commissioners/ Board of Trustees, which set forth the income of Audit Committee's members, i.e. honorarium of maximum 20% (twenty percent) of the Company's President Director's salary, provided that the tax is liable to the Company and the member is not allowed to receive any other income other than the honorarium.

## KOMITE MANAJEMEN RISIKO

### Risk Management Committee

Komite Manajemen Risiko, adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dengan memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terkait pelaksanaan sistem dan kebijakan, evaluasi Manajemen Risiko dan pemantauan kesesuaian potensi risiko di Perseroan.

The Risk Management Committee is a committee established by the Board of Commissioners to assist the execution of the duties and functions of the Board of Commissioners, by providing professional and independent opinion to the Board of Commissioners related to the implementation of the system and policy, evaluation of Risk Management, and monitoring of potential risk conformance in the Company.

### KOMPOSISI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Anggota Komite Manajemen Risiko PLN terdiri dari 3 orang anggota Dewan Komisaris dan 3 orang anggota ahli yang bukan karyawan kunci di PLN dalam 6 (enam) bulan terakhir. Anggota Komite Non Komisaris dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris, baik dari calon-calon yang mengajukan lamaran kepada Dewan Komisaris maupun calon-calon yang diusulkan oleh Anggota Dewan Komisaris.

Anggota Komite Non Komisaris harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- 1) Memiliki integritas yang baik.
- 2) Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan;
- 3) Memiliki kecukupan waktu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
- 4) Mempunyai kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan yang baik.
- 5) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang industri/bisnis Perseroan;
- 6) Berasal dari luar Perseroan

Pada tahun 2017, komposisi Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

### COMPOSITION OF RISK MANAGEMENT COMMITTEE

PLN's Risk Management Committee consists of 3 members of the Board of Commissioners and 3 expert members who are not the key employees at PLN in the last 6 (six) months. Non-Commissioner Members of the Committee shall be elected and stipulated in the Board of Commissioners' Meeting, both for candidates applying to the Board of Commissioners or nominees proposed by the Board of Commissioners.

The Non-Commissioner Members of the Committee shall have the qualifications as follow:

- 1). Show good integrity.
- 2). Must not have the benefit of private relationships that may cause a negative impact and conflict of interest;
- 3). Have sufficient time to perform his or her duties.
- 4). Have the ability to communicate and coordinate effectively.
- 5). Have an adequate knowledge of the industry and the Company's business;
- 6). Shall be from the outside of the Company

In 2017, the composition of Risk Management Committee is as follows:

No	Jabatan Position	1 Januari s.d 11 Juli 2017 January 1 - July 11, 2017	12 Juli s.d 31 Desember 2017 July 12 - December 31, 2017
1.	Ketua merangkap anggota Chairman and concurrently Member	Oegroseno	Oegroseno
2.	Anggota   Member	Aloysius Kiik Ro	Aloysius Kiik Ro
3.	Anggota   Member	Marlius Alrobin	Andy Noorsaman Sømmeng
4.	Anggota   Member	Bambang Purwo	Marlius Alrobin
5.	Anggota   Member	Firman Dini	Bambang Purwo
6.	Anggota   Member	-	Firman Dini

Komite Manajemen Risiko  
Risk Management CommitteeProfil Komite Manajemen Risiko Bukan Dewan  
KomisarisProfile of Non-Commissioner Member of Risk  
Management Committee

<b>Nama   Name</b>	Marlius Alrobin
<b>Usia   Age</b>	58 tahun, per 31 Desember 2017   58 years, as of December 31, 2017
<b>Kewarganegaraan   Citizenship</b>	Indonesia
<b>Riwayat Pendidikan   History of Education</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· S1 Ekonomi dari Universitas Trisakti (1986)   Bachelor of Economics from Trisakti University (1986)</li> <li>· S2 Manajemen dari Universitas Sumatera Utara (1999)   Master of Management from University of North Sumatera (1999)</li> </ul>
<b>Riwayat Jabatan   History of Position</b>	
<b>Dasar Hukum</b>	Keputusan Dewan Komisaris PT PLN (Persero) No.12/SK/DK-PLN/2015   Board of
<b>Penunjukan   Legal Basis of Appointment</b>	Commissioners' Decree of PT PLN (Persero) No. 12/SK/DK-PLN/2015
<b>Pengalaman Kerja   Working Experience</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vice President Departemen Head Corporate Risk Bank Mandiri (2008-2015)</li> <li>· Vice President Special Project Officer Credit Recovery, Bank Mandiri (2008)</li> <li>· Vice President Regional Recovery Manager Bank Mandiri (2007-2008)</li> <li>· Assistant Vice President Senior Credit Recovery Manager, Bank Mandiri (2002-2007).</li> <li>· Vice President Department Head Corporate Risk Bank Mandiri (2008-2015)</li> <li>· Vice President Special Project Officer Credit Recovery, Bank Mandiri (2008)</li> <li>· Vice President Regional Recovery Manager Bank Mandiri (2007-2008)</li> <li>· Assistant Vice President Senior Credit Recovery Manager, Bank Mandiri (2002-2007).</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap   Concurrent Positions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tidak memiliki jabatan rangkap sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 terkait Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN   Shall not have concurrent positions in accordance with the State Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 on the Supporting Organs of the SOEs Board of Commissioners/Board of Trustees</li> </ul>

## Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee

**Pendidikan dan Pelatihan  
untuk Meningkatkan  
Kompetensi** | Education  
and Training for  
Competence Development

- Working Visit ke Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (PLTG Jakabaring) tanggal 23 - 24 Maret 2017
- Working Visit ke Wilayah Jawa Timur (PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB- Anak Perusahaan PT PLN (Persero), Unit Pembangkitan Gresik, Proyek CNG Plant Gresik, CNG Plant Lombok dan Vessel Angkutan Gas, PLTA Sutami Karang Kates) tanggal 27 - 29 April 2017
- Working Visit ke Wilayah Medan (Pusat Listrik Belawan, PLTU Pangkalan Susu, MPP (Mobile Power Plant) Paya Pasir, MVPP Belawan, PLTU 2x150 MW milik PT Mabar Elektrindo) tanggal 15 - 17 Mei 2017
- Working Visit ke Wilayah Bangka dan Belitung tanggal 9 - 11 Agustus 2017
- Workshop Best Practise Penerapan Manajemen Risiko di BUMN dan Anak Perusahaan tanggal 7 Agustus 2017
- Workshop Integrated Reporting di Paris Perancis dan ECIIA 2017 Conference 2017 di Basel Switzerland tanggal 15 s.d. 24 September 2017
- Working Visit to North Sumatera, Jambi, and Bengkulu (Gas Power Plant Jakabaring) on March 23-24, 2017
- Working Visit to East Java, i.e. PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB – Subsidiary of PT PLN (Persero), Gresik Generating Unit, CNG Plant Gresik Project, PCNG Plant Lombok, and Gas Transport Vessel, Hydro Power Plant Sutami Karang Kates) on April 27-29, 2017
- Working Visit to Medan (Belawan Electricity Center, Pangkalan Susu Coal Power Plant, MPP (Mobile Power Plant) Paya Pasir, MVPP Belawan, Coal Power Plant 2x150 MW of PT Mabar Elektrindo) on May 15-17, 2017
- Working Visit to Bangka Belitung on August 9-11, 2017
- Workshop Best Practise of Risk Management Implementation in SOEs and Subsidiaries on August 7, 2017
- Workshop Integrated Reporting in Paris, France, and ECIIA Conference 2017 at Basel, Switzerland, September 15-24, 2017


**Nama** | Name Bambang Purwo

**Usia** | Age 61 tahun, per 31 Desember 2017 | 61 years, as of December 31, 2017

**Kewarganegaraan** |  
Citizenship Indonesia

**Riwayat Pendidikan** |  
History of Education

- S1 Hukum, Universitas Negeri Djember (1980) | Bachelor of Law, State University Djember (1980)
- Notariat (Sp1), Universitas Negeri Diponegoro, Semarang, (2000) | Notariat (Sp1), State University Diponegoro, Semarang, (2000)
- S2-Hukum, Universitas Indonesia (2005) | Master of Law, University of Indonesia (2005)

Komite Manajemen Risiko  
Risk Management Committee

## Riwayat Jabatan | History of Position

<b>Dasar Hukum Penunjukan  </b> Legal Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris PT PLN (Persero) No. 21/SK/DK-PLN/2016   Board of Commissioners' Decree of PT PLN (Persero) No. 21/SK/DK-PLN/2016
<b>Pengalaman Kerja  </b> Working Experience	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Instruktur pada Udiklat Cibogo, PLN (2012-2015)</li> <li>· Konsultan Jasa Manajemen Konstruksi, PLN (2013-2015)</li> <li>· VP Hukum, PT Indonesia Power (2002-2012)</li> <li>· Ahli Kinerja merangkap DM Kepegawaian PLN Disjaya &amp; Tangerang (2000-2002)</li> <li>· Instructor at Cibogo University Education, PLN (2012-2015)</li> <li>· Construction Management Services Consultant, PLN (2013-2015)</li> <li>· VP of Law, PT Indonesia Power (2002-2012)</li> <li>· Performance Experts concurrently DM Personnel PLN Disjaya &amp; Tangerang (2000-2002)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap  </b> Concurrent Positions	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tidak memiliki jabatan rangkap sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 terkait Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN   Shall not have concurrent positions in accordance with the State Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 on the Supporting Organs of the SOEs Board of Commissioners/Board of Trustees</li> </ul>
<b>Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi  </b> Education and Training for Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Training Expand Leadership Program yang diselenggarakan oleh CLDI di Bali tanggal 8 s.d. 11 Februari 2017</li> <li>· <i>Working Visit</i> ke Wilayah Jawa Timur (PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB- Anak Perusahaan PT PLN (Persero), Unit Pembangkitan Gresik, Proyek CNG Plant Gresik, CNG Plant Lombok dan Vessel Angkutan Gas, PLTA Sutami Karang Kates) tanggal 27 - 29 April 2017</li> <li>· <i>Working Visit</i> ke Wilayah Nusa Tenggara Barat (Area Bima dan Rayon Dompus) tanggal 12 - 14 Juli 2017</li> <li>· <i>Working Visit</i> ke Wilayah Bangka dan Belitung tanggal 9 - 11 Agustus 2017</li> <li>· <i>Workshop Best Practise</i> Penerapan Manajemen Risiko di BUMN dan Anak Perusahaan tanggal 7 Agustus 2017</li> <li>· Training Expand Leadership Program by CLDI in Bali on February 8-11, 2017</li> <li>· Working Visit to East Java, i.e. PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB – Subsidiary of PT PLN (Persero), Gresik Generating Unit, CNG Plant Gresik Project, PCNG Plant Lombok, and Gas Transport Vessel, Hydro Power Plant Sutami Karang Kates) on April 27-29, 2017</li> <li>· Working Visit to West Nusa Tenggara (Bima and Rayon Dompus) on July 12-14, 2017</li> <li>· Working Visit to Bangka Belitung on August 9-11, 2017</li> <li>· Workshop Best Practise of Risk Management Implementation in SOEs and Subsidiaries on August 7, 2017</li> </ul>

## Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee



<b>Nama   Name</b>	Firman Dini
<b>Usia   Age</b>	60 tahun, per 31 Desember 2017   60 years, as of December 31, 2017
<b>Kewarganegaraan   Citizenship</b>	Indonesia
<b>Riwayat Pendidikan   History of Education</b>	S1 Teknik Elektro, ITB (1983)   Bachelor of Electric Engineering, Bandung Institute of Technology (1983)
<b>Riwayat Jabatan   History of Position</b>	
<b>Dasar Hukum Penunjukan   Legal Basis of Appointment</b>	Keputusan Dewan Komisaris No. 10/SD/DK-PLN/2017   Board of Commissioners' Decree No. 10/SD/DK-PLN/2017
<b>Pengalaman Kerja   Working Experience</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Assessor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik pada PT ELESKA IATKI, Bandung (2015-sekarang)</li> <li>· Project Advisor pada PT Multi Daya Lestari, Jakarta (2014-sekarang)</li> <li>· Komisaris Utama PT Artha Daya Coalindo (2012-2014)</li> <li>· Komisaris PT Rekadaya ElektriKA (2012-2014)</li> <li>· Anggota Badan Pengawas Harian STT-PLN (2012-2014)</li> <li>· Anggota Badan Pengawas Harian Dana Pensiun PLN (2010-2013)</li> <li>· Direktur SDM PT Indonesia Power (2009-2013)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Assessor of Power Generation Field at PT ELESKA IATKI, Bandung (2015-present)</li> <li>· Project Advisor at PT Multi Daya Lestari, Jakarta (2014-present)</li> <li>· President Commissioner of PT Artha Daya Coalindo (2012-2014)</li> <li>· Commissioner of PT Rekadaya ElektriKA (2012-2014)</li> <li>· Member of Daily Supervisory Agency STT-PLN (2012-2014)</li> <li>· Member of Daily Supervisory Agency PLN Pension Fund (2010-2013)</li> <li>· Human Resources Director of PT Indonesia Power (2009-2013)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap   Concurrent Positions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tidak memiliki jabatan rangkap sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 terkait Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN   Shall not have concurrent positions in accordance with the State Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 on the Supporting Organs of the SOEs Board of Commissioners/Board of Trustees</li> </ul>

Komite Manajemen Risiko  
Risk Management Committee**Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi |**

Education and Training for Competence Development

- *Working Visit* ke Pusat Listrik Belawan, PLTU Pangkalan Susu, MPP (*Mobile Power Plant*) Paya Pasir, MVPP Belawan, PLTU 2x150 MW milik PT Mabar Elektrindo) tanggal 15 - 17 Mei 2017
- *Working Visit* ke Wilayah Nusa Tenggara Barat (Area Bima dan Rayon Dompu) tanggal 12 - 14 Juli 2017
- *Working Visit* ke Wilayah Bangka dan Belitung tanggal 9 - 11 Agustus 2017
- *Working Visit* ke PLTU Suralaya (PT Indonesia Power) tanggal 12-13 Okt 2017
- *Working Visit* ke Wilayah Bandung – Area Garut (Kunjungan kerja dalam rangka induksi ke Anak Perusahaan PT Indonesia Power yaitu PLTP Kamojang, PLTP Darajat dan PT PLN (Persero) Area Garut) tanggal 26 -28 Nov. 2017
- Working Visit to Medan (Belawan Electricity Center, Pangkalan Susu Coal Power Plant, MPP (Mobile Power Plant) Paya Pasir, MVPP Belawan, Coal Power Plant 2x150 MW of PT Mabar Elektrindo) on May 15-17, 2017
- Working Visit to West Nusa Tenggara (Bima and Rayon Dompu) on July 12-14, 2017
- Working Visit to Bangka Belitung on August 9-11, 2017
- Working Visit to Suralaya Coal Power Plant (PT Indonesia Power) on October 12-13, 2017
- Working Visit to Bandung – Garut (Working visit in the event of induction to Subsidiary of PT Indonesia Power, i.e. Geothermal Power Plan Kamojang, Geothermal Power Plant Darajat, and PT PLN (Persero) Area Garut) on November 26-28, 2017

**PIAGAM KOMITE MANAJEMEN RISIKO**

Detail tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite Manajemen Risiko dijabarkan dalam Piagam (Charter) Komite Manajemen Risiko yang diberlakukan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Salah satu tugas utama Komite Manajemen Risiko adalah menjalankan fungsi sebagai penilai independen dalam melakukan penelaahan terhadap kebijakan strategis perusahaan, yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, dan telah dilengkapi dengan hasil kajian manajemen risiko untuk kegiatan perusahaan yang memiliki potensi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan; serta kegiatan lain yang masuk kedalam lingkup tugas pengawasan Dewan Komisaris.

**RISK MANAGEMENT COMMITTEE CHARTER**

Details of duties, responsibilities, and obligations of the Risk Management Committee are outlined in the Charter of the Risk Management Committee, which is enacted under the Board of Commissioners' decisions. One of the main tasks of the Risk Management Committee is to carry out the function of an independent appraiser in reviewing the company's strategic policies, submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, and completed with the results of risk management studies for the activities of companies with potential risks that may affect the performance of the company; as well as other activities that fall within the scope of the supervisory duties of the Board of Commissioners.

## Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah:

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite;
2. Mendapatkan pemahaman atas manajemen risiko perusahaan yang mencakup berbagai risiko yang dihadapi perusahaan, strategi, sistem dan kebijakan manajemen risiko perusahaan, pengendalian intern perusahaan, termasuk kebijakan, metodologi dan infrastruktur;
3. Melakukan evaluasi terhadap model pengukuran risiko yang digunakan perusahaan dan memberikan rekomendasi penyempurnaan lebih lanjut;
4. Memantau kesesuaian berbagai potensi risiko yang dihadapi perusahaan;
5. Mengevaluasi berbagai kebijakan manajemen risiko perusahaan;
6. Melakukan koordinasi implementasi dan pengawasan keberadaan dan tingkat efektivitas masing-masing komponen dari Enterprise Risk Management dalam perusahaan;
7. Mengukur efektivitas masing-masing komponen dari ERM yang telah ditetapkan di perusahaan;
8. Mengkaji hasil kajian risiko dan dokumen lainnya yang disampaikan oleh Direksi sebagai kelengkapan atas usulan rencana investasi/pendanaan/transaksi dan kegiatan operasional lainnya yang berdampak besar terhadap perusahaan serta memberikan tanggapan kepada Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi tersebut;
9. Mengawasi dan memantau bahwa mitigasi risiko terhadap kegiatan investasi dan operasional perusahaan yang berdampak besar telah dilaksanakan secara konsisten;
10. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
11. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
12. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris guna kelancaran pelaksanaan tugas Komite;
13. Menyampaikan Laporan Realisasi Triwulanan Komite.

### RISK MANAGEMENT COMMITTEE'S DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The duties and responsibilities of the Risk Management Committee are:

1. Preparing the Committee's Annual Work Plan and Budget;
2. Gaining an understanding of the Company's risk management that includes the various risks facing the company, its strategies, systems, and risk management policies, corporate internal controls, including policies, methodologies, and infrastructure;
3. Evaluating various risk measurement models utilized by the company and providing recommendations for further improvement;
4. Monitoring the suitability of various potential risks facing the company;
5. Evaluating various corporate risk management policies;
6. Coordinating the implementation and supervision of the existence and level of effectiveness of each component and Enterprise Risk Management in the Company;
7. Assessing the effectiveness of each ERM component that has been implemented in the Company;
8. Reviewing the results of risk assessment and other documents submitted by the Board of Directors as completion of the proposed investment/fund/transaction plan and other operational activities that have a major impact on the Company and responding to the Board of Commissioners on the proposal of the Board of Directors;
9. Supervising and monitoring that risk mitigation of large-scale corporate investment and operational activities has been carried out consistently;
10. Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners;
11. Carrying out other duties granted by the Board of Commissioners in accordance with applicable legislation;
12. Coordinating with the Secretary of the Board of Commissioners to smooth the execution of the Committee's duties;
13. Delivering the Quarterly Committee Realization Report.

Komite Manajemen Risiko  
Risk Management Committee**INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN  
RISIKO**

Salah satu kriteria menjadi anggota Komite Manajemen Risiko adalah independen dan bebas dari benturan kepentingan sehingga dapat bersikap objektif dalam memberikan pendapat terhadap permasalahan yang dihadapi. Hal lain yang ditekankan kepada seluruh anggota komite adalah agar bersikap profesional di dalam melaksanakan tugas dan dalam memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris.

**INDEPENDENCE OF RISK MANAGEMENT  
COMMITTEE MEMBERS**

One of the criteria to be a member of Risk Management Committee is the independence and free of conflict of interest. Thus, the member can act objectively in providing opinion on the problems faced. The members of the Committee also emphasizes to be professional in carrying out duties and in providing opinion to the Board of Commissioners.

**Ketua Komite adalah Komisaris Independen, sedangkan anggota Komite (non Komisaris) berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kepemilikan dan kegiatan usaha perusahaan karena anggota Komite merupakan akademisi yang memiliki kompetensi dan pengalaman sesuai dengan bidang tugasnya atau mantan pegawai/pejabat perusahaan yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan luas berkaitan dengan perusahaan dan aktivitasnya.**

The Chairman of the Committee is an Independent Commissioner, while the members of the Committee (Non-Commissioners) are from outside the Company and have no connection with the management, ownership, and business activities of the Company, because the members of the Committee are academicians with competence and experience, in accordance with their respective duties or former employees/have extensive experience and knowledge related to the Company and its activities.

Kriteria Independensi   Independence Criteria	Oegroseno	Aloysius Kiik Ro	Andy Noorsaman Sommeng	Marlius Alrobin	Bambang Purwo	Firman Dini
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama PLN   Shall not have Affiliations with any members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Major Shareholder of PLN	√	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PLN   Shall have no direct or indirect business relationship related to PLN business activities	√	√	√	√	√	√

## Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee

Kriteria Independensi   Independence Criteria	Oegroseno	Aloysius Kiik Ro	Andy Noorsaman Sommeng	Marlius Alrobin	Bambang Purwo	Firman Dini
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislative dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai kepala/ wakil kepala pemerintahan daerah   Shall not serve as a party official and/or candidate/legislative member and/or a candidate or serving as head/deputy head of local government	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan di PLN   Shall not have other positions that may cause a conflict of interest related to a position at PLN	√	√	√	√	√	√

## RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Sepanjang tahun 2017 Komite Manajemen Risiko melaksanakan rapat sebanyak 34 kali, yang terdiri dari rapat dengan mengundang para pihak yang berkepentingan sesuai tuntutan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko. Di samping itu, Komite Manajemen Risiko juga melaksanakan rapat internal Dewan Komisaris.

## RISK MANAGEMENT COMMITTEE'S MEETING

The Risk Management Committee convened 34 meetings during 2017 that consisted of meeting with stakeholders according to the duties and responsibilities of the Committee. In addition, the Risk Management Committee was also held internal meetings with the Board of Commissioners.

Komite Manajemen Risiko  
Risk Management CommitteePokok Bahasan Rapat Komite Manajemen Risiko  
Tahun 2017Meeting Agenda of the Risk Management  
Committee 2017

No	Uraian   Description	Total
1	Pembahasan Usulan Penambahan Organisasi UIP   Discussion on UIP Organization Expansion Proposal	1
2	Penyertaan Modal Negara   State Equity Investment	2
3	Penambahan Modal Anak Perusahaan   Capital Injection for Subsidiaries	1
4	Pembahasan Usulan Pendanaan   Funding Proposal Discussion	11
5	Update Informasi Kondisi Perusahaan   Update on the Company's Condition Information	9
6	Pembahasan mengenai Kemitraan   Partnership Discussion	1
7	Persetujuan Leasing   Leasing Approval	1
8	Pembahasan Laporan Manajemen   Management Report Discussion	2
9	RKAP   Work and Budget Plan	3
10	RJP   Corporate Plan	2
11	Rencana Akuisisi   Acquisition Plan	1
<b>Total</b>		<b>34</b>

## REMUNERASI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Remunerasi Komite Manajemen Risiko tercantum pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara mengatur terkait penghasilan anggota Komite Manajemen Risiko, yakni berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

REMUNERATION OF THE RISK MANAGEMENT  
COMMITTEE

Remuneration of Risk Management Committee is stipulated in Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 on the Supporting Organs of the SOEs Board of Commissioners/Board of Trustees, which set forth the income of Risk Management Committee's members, i.e. honorarium of maximum 20% (twenty percent) of the Company's President Director's salary, provided that the tax is liable to the Company and the member is not allowed to receive any other income other than the honorarium.

## KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

### Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi, adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris terkait pengusulan seseorang untuk ditempatkan dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris (Nominasi) dan imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Anggota Komite Non Komisaris dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris, baik dari calon-calon yang mengajukan lamaran kepada Dewan Komisaris maupun calon-calon yang diusulkan oleh Anggota Dewan Komisaris.

Anggota Komite Non Komisaris harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- 1) Memiliki integritas yang baik.
- 2) Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan;
- 3) Memiliki kecukupan waktu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
- 4) Mempunyai kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan yang baik.
- 5) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang industri/bisnis Perseroan;
- 6) Salah seorang anggota Komite berasal dari manajemen PLN yang menangani SDM

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PLN terdiri dari 3 anggota Dewan Komisaris dan 1 orang anggota ahli. Komposisi Komite GCG-NR telah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 3 terkait dengan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi.

The Nomination and Remuneration Committee is a committee established by and responsible to the Board of Commissioners in assisting the duties and functions of the Board of Commissioners, related to the nomination of a person in a position as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners (Nomination), and the remuneration assigned and given to members of the Board of Directors and Board of Commissioners with due regards to their position and role, in accordance with their duties, authorities, and responsibilities. Non-Commissioner Members of the Committee shall be elected and stipulated in the Board of Commissioners' Meeting, both for candidates applying to the Board of Commissioners or nominees proposed by the Board of Commissioners.

The Non-Commissioner Members of the Committee shall have the qualifications as follow:

- 1). Show good integrity.
- 2). Must not have the benefit of private relationships that may cause a negative impact and conflict of interest;
- 3). Have sufficient time to perform his or her duties.
- 4). Have the ability to communicate and coordinate effectively.
- 5). Have an adequate knowledge of the industry and the Company's business;
- 6). One of the members of the Committee is from PLN management that handles human resources

The Nomination and Remuneration Committee of PLN consists of 3 members of the Board of Commissioners and 1 expert member. The determination of the composition of GCG-NR Committee refers to the Finance Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 on Nomination and Remuneration Committee of Issuer or Public Company, Article 3, related to Membership of Nomination and Remuneration Committee.

### KOMPOSISI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

### COMPOSITION OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

No	Jabatan Position	1 Januari s.d 24 Agustus 2017 January 1 - August 24, 2017	25 Agustus s.d 31 Desember 2017 August 25 - December 31, 2017
1.	Ketua merangkap anggota Chairman and concurrently Member	Budiman	Budiman
2.	Anggota   Member	Hasan Bisri	Hasan Bisri
3.	Anggota   Member	Harry Susetyo Nugroho	Harry Susetyo Nugroho
4.	Anggota   Member	Murniati	Okto Rinaldi

Komite Nominasi dan Remunerasi  
Nomination and Remuneration CommitteeProfil Komite Nominasi dan Remunerasi Bukan  
Dewan KomisarisProfile of Non-Commissioner Member of  
Nomination and Remuneration Committee

<b>Nama   Name</b>	Okto Rinaldi
<b>Usia   Age</b>	54 tahun, per 31 Desember 2017   54 years, as of December 31, 2017
<b>Kewarganegaraan   Citizenship</b>	Indonesia
<b>Riwayat Pendidikan   History of Education</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· S1 Ekonomi Umum/Administrasi Negara, STIEI (1990)   Bachelor of General Economic/State Administration, STIEI (1990)</li> <li>· S2 Bisnis Manajemen, Universitas Syiah Kuala, (2001)   Master of Business Management, University of Syiah Kuala, (2001)</li> </ul>
<b>Riwayat Jabatan   History of Position</b>	
<b>Dasar Hukum Penunjukan   Legal Basis of Appointment</b>	Keputusan Dewan Komisaris PT PLN (Persero) No. 06/SK/DK-PLN/2016   Board of Commissioners' Decree of PT PLN (Persero) No. 06/SK/DK-PLN/2016
<b>Pengalaman Kerja   Working Experience  </b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kepala Divisi Pengembangan Talenta pada Direktorat Human Capital Management (2016-2018)</li> <li>· General Manajer Pusat Pendidikan dan Pelatihan (2015-2016)</li> <li>· Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Corporate University) PLN (2014-2015)</li> <li>· Manajer Senior Manajemen Kinerja SDM PLN Kantor Pusat (2013-2014)</li> <li>· Head of Talent Development Division at Directorate of Human Capital Management (2016-2018)</li> <li>· General Manager of Center for Education and Training (2015-2016)</li> <li>· Head of Center for Education and Training (Corporate University) PLN (2014-2015)</li> <li>· Senior Manager of HR Performance Management PLN Head Office (2013-2014)</li> </ul>
<b>Jabatan Rangkap   Concurrent Positions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tidak memiliki jabatan rangkap sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 terkait Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN   Shall not have concurrent positions in accordance with the State Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 on the Supporting Organs of the SOEs Board of Commissioners/Board of Trustees</li> </ul>

## Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

### INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi Kriteria menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah independen dan bebas dari benturan kepentingan sehingga dapat bersikap objektif dalam memberikan pendapat terhadap proses penetapan nominasi dan remunerasi. Hal lain yang ditekankan kepada seluruh anggota komite adalah agar bersikap profesional di dalam melaksanakan tugas dan dalam memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris.

### INDEPENDENCE OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The criteria to become a member of the Nomination and Remuneration Committee is independent and free of conflict of interest. Thus, the member can act objectively in providing opinion on the problems faced. The members of the Committee also emphasizes to be professional in carrying out duties and in providing opinion to the Board of Commissioners.

**Kriteria Independensi Komite Nominasi & Remunerasi disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.**

The Independent Criteria of the Nomination & Remuneration Committee are established under the Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Listed Companies or Public Companies.

Kriteria Independensi   Independence Criteria	Hasan Bisri	Budiman	Harry Susetyo Nugroho	Okto Rinaldi
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama PLN   Shall not have Affiliations with any members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Major Shareholder of PLN	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PLN   Shall have no direct or indirect business relationship related to PLN business activities	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/ anggota legislative dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai kepala/ wakil kepala pemerintahan daerah   Shall not serve as a party official and/or candidate/legislative member and/or a candidate or serving as head/deputy head of local government	√	√	√	√
Tidak memiliki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan di PLN   Shall not have other positions that may cause a conflict of interest related to a position at PLN	√	√	√	√

### PEDOMAN KERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Pedoman Kerja Komite Nominasi & Remunerasi diatur dalam *Board Manual* Perusahaan yang telah dimutakhirkan pada tahun 2016. Pedoman kerja

### GUIDELINES OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Working Guidelines of the Nomination & Remuneration Committee are set out in the Board of Manual, updated in 2016. Nomination & Remuneration

Komite Nominasi dan Remunerasi  
Nomination and Remuneration Committee

Nominasi & Remunerasi mencakup struktur keanggotaan, persyaratan keanggotaan, kewenangan, dan fungsi.

working guidelines include membership structure, membership requirements, authority, and functions.

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

1. Menelaah dan memantau untuk memastikan bahwa Direksi telah menetapkan sistem Nominasi dan Remunerasi PT PLN (Persero) secara benar;
2. Menelaah dan memantau untuk memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan proses rekrutmen, pengembangan karier, nominasi dan remunerasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
3. Membantu merumuskan dalam menentukan kebijakan remunerasi berupa gaji dan honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap serta insentif dan tantiem yang bersifat variable bagi Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Melakukan identifikasi atas hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;
5. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
6. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris guna kelancaran pelaksanaan tugas Komite;
7. Membuat laporan sesuai bidang tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

**DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE**

1. Reviewing and monitoring to ensure that the Board of Directors has properly established the Nomination and Remuneration System of PT PLN (Persero);
2. Reviewing and monitoring to ensure that Directors has carried out the recruitment process, career development, nomination and remuneration, in accordance with the provisions that have been set;
3. Assisting in formulating the remuneration policy in the form of salary and honorarium, allowances, and facilities of a fixed nature, and incentives and tantiems that are variable for the Board of Commissioners and the Board of Directors;
4. Identifying matters that require the attention and duties of the Board of Commissioners and other duties of the Board of Commissioners;
5. Carrying out other obligations assigned by the Board of Commissioners;
6. Coordinating with the Secretary of the Board of Commissioners to smooth the execution of the Committee's duties;
7. Creating reports according to their field of work in accordance with applicable provisions.

**RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

Sepanjang tahun 2017, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan rapat sebanyak 13 kali dengan agenda membahas mengenai usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris PLN, Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan, dan lainnya.

**MEETING OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE**

The Nomination and Remuneration Committee held 13 meetings with the agenda to discuss the proposed remuneration of PLN's Board of Directors and Board of Commissioners, Board of Directors and Commissioners of Subsidiaries.

No	Uraian   Description	Jumlah
1	Pembahasan Calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan   Discussion on Candidate of the Board of Commissioners of Subsidiaries	4
2	Pembahasan Calon Direksi Anak Perusahaan   Discussion on Candidate of the Board of Directors of Subsidiaries	7
3	Penggantian Anggota KNR   Replacement of Members of NRC	1
4	Pembahasan usulan tantiem dan gaji Direksi dan Dewan Komisaris.    Discussion on the Board of Commissioners and Board of Directors tantiem and salary proposal	1
<b>Total</b>		<b>13</b>

## Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

### REMUNERASI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Remunerasi Komite Nominasi dan Remunerasi tercantum pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara mengatur terkait penghasilan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, yakni berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

### KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Untuk mempersiapkan kader-kader pimpinan masa depan, PLN menyelenggarakan program *Talent Management*. Kader-kader potensial yang masuk kedalam *Talent Pool* akan menjalani serangkaian program pelatihan dengan muatan utama adalah peningkatan kapabilitas di bidang manajemen, strategi pengembangan usaha, evaluasi rencana strategis dan sejenisnya. Pada saat tibanya pergantian kepemimpinan, PLN akan mengajukan kandidat internal melalui pemilihan yang dilakukan oleh Panitia *Adhoc* dan difasilitasi oleh Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. Hasil pemilihan kandidat internal tersebut kemudian diajukan kepada Kementerian BUMN untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Adapun ketentuan suksesi Direksi adalah sebagai berikut:

1. Calon Direktur diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham dan dari Internal BUMN;
2. Pengangkatan Direktur dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) kepada calon Direktur;
3. Komposisi Direksi harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Perseroan sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat;
4. Calon Direktur dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Direktur atau Komisaris di BUMN/BUMD/Perusahaan swasta lain atau jabatan lainnya di Perusahaan lain, baik swasta maupun milik Negara, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, kecuali apabila mendapatkan persetujuan dari RUPS.

### REMUNERATION OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Remuneration of Nomination and Remuneration Committee is stipulated in Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 on the Supporting Organs of the SOEs Board of Commissioners/Board of Trustees, which set forth the income of Nomination and Remuneration Committee's members, i.e. honorarium of maximum 20% (twenty percent) of the Company's President Director's salary, provided that the tax is liable to the Company and the member is not allowed to receive any other income other than the honorarium.

### SUCCESSION POLICY OF THE BOARD OF DIRECTORS

In an attempt to prepare future executives cadres, PLN organizes Talent Management program. Potential cadres who join the Talent Pool will participate in several training programs with management capability improvement as the main substance, business development strategy, strategic plan evaluation, and other similar subject matter. When the time comes for leadership succession, PLN will propose individuals from within the Company as candidates through selections conducted by an ad-hoc committee and facilitated by the Board of Commissioners. The selected candidates will then be proposed to the Ministry of SOEs to undergo fit and proper test.

The provisions of the succession of Directors is as follows:

1. Prospective Directors shall be appointed by the GMS from the candidates proposed by the shareholders and the Internal SOE;
2. Appointment of Directors is conducted through a fit and proper test of the prospective Director;
3. Composition of the Board of Directors must always be tailored to the needs and development of the Company, thus enabling effective, appropriate and prompt decision making;
4. Candidates for Director are forbidden to hold another position as Director or Commissioner in the SOEs/Regional-Owned Enterprises/Private-Owned Enterprises/other private company or other positions in other companies, both private and state-owned, which may result in a conflict of interest, unless approved by the GMS.

## DIREKSI

### Board of Directors

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan sehari-hari untuk kepentingan dan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam menjalankan tugas-tugas pengelolaan perusahaan, Direksi wajib berpegang pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS dan Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*).

Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara, sedangkan tugas Direktur Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi.

The Board of Directors is a constituent of the Company responsible for the daily management on behalf of the Company interest to accomplish its objectives. The Board of Directors has the right to represent the Company in and out of court, in accordance with the Company's Articles of Association. In conducting managerial duties of the Company, the Board of Directors is required to act in accordance with the Company's Articles of Association, GMS Resolutions, and the Board Manual.

While the President Director coordinates the duties of the Directors, both are structurally equal.

**Dalam pengelolaan perusahaan, masing-masing anggota Direksi dapat bertindak dan memutuskan suatu kebijakan sesuai tugas dan wewenang yang diberikan pada masing-masing anggota Direksi, namun demikian tetap bertanggung jawab secara kolegiat dalam pengelolaan perusahaan. Pelaksanaan tugas sesuai kewenangan tersebut harus semata-mata dijalankan sesuai maksud dan tujuan pendirian perusahaan.**

In managing the Company, each Director may act and pursue policies in accordance with the duties and authorities delegated to him/her. Nevertheless, each is collegially accountable in the Company's management. The duties must be conducted in the interests and objectives of the Company.

Saat ini, Direksi juga telah memiliki Pedoman *Board Manual* Direksi (Tata Laksana Kerja Direksi) yang merupakan satu kesatuan dengan Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi. Pedoman ini secara khusus mengatur tata laksana kerja Direksi dan Unit Kerja Direksi.

Currently, the Board of Directors refers to the Board Manual of the Board of Directors (Board of Directors Charter), which is a joint effort with the Board Manual of the Board of Commissioners and the Board of Directors. This Guideline specifically regulates the working procedures of the Board of Directors and the Board of Directors.

## Direksi

Board of Directors

Board Manual Direksi | Board Manual of the Board of Directors

Pedoman *Board Manual* Direksi (Tata Laksana Kerja Direksi) mencakup :

1. Ketentuan Umum Jabatan Anggota Direksi
2. Tugas dan Wewenang Direksi
3. Hak dan Kewajiban Direksi
4. Rapat Direksi
5. Komite Direktur
6. Sekretaris Perusahaan
7. Satuan Pengawasan Intern
8. Hubungan dengan Anak Perusahaan.



Guidelines of the Board Manual of the Board of Directors include:

1. General Provisions of the Member of the Board of Directors
2. Duties and Authorities of the Board of Directors
3. Rights and Duties of the Board of Directors
4. Board of Directors' Meeting
5. Directors' Committee
6. Corporate Secretary
7. Internal Audit Unit
8. Working Relationship with Subsidiaries.

## TUGAS DIREKSI

Tugas pokok Direksi adalah:

1. Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perusahaan; dan
2. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas itu, wewenang Direksi sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundangan yang berlaku diatur sebagai berikut:

## BOARD OF DIRECTORS' DUTIES

The main duties of the Board of Directors are:

1. Leading and managing the Company in accordance with the Company's purposes and objectives, and continuously striving to improve the efficiency and effectiveness of the Company; and
2. Mastering, maintaining, and managing the Company's wealth.

In performing the duties, the authority of the Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association and the prevailing Laws and Regulations, shall be regulated as follows:



### Pelaksanaan wewenang Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris

| Implementation of the authority of the Board of Directors, which must obtain written approval from the Board of Commissioners



### Pelaksanaan wewenang Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari RUPS

| Implementation of the authority of the Board of Directors, which must obtain approval from the GMS



### Pelaksanaan wewenang Direksi yang dapat dilakukan setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS

| Implementation of the authority of the Board of Directors, which is performed after receiving a written response from the Board of Commissioners and approval of the GMS

## HAK DAN KEWAJIBAN DIREKSI

Hak dan kewajiban Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Dalam menjalankan tugas pokoknya, Direksi berhak untuk:

1. Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengurus Perusahaan;
2. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun dan jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai perusahaan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan keputusan rapat umum pemegang saham;
3. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai perusahaan baik sendiri sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain atau badan lain; dan
5. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Direksi berkewajiban untuk:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perusahaan sesuai maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
2. Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan perusahaan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk selanjutnya disampaikan kepada rapat umum pemegang saham guna mendapatkan pengesahan;
3. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi perusahaan sesuai dengan kelazimannya yang berlaku bagi suatu perusahaan;

## RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Rights and obligations of the Board of Directors are stipulated in the Company's Articles of Association. In performing its main duties, the Board of Directors shall be entitled to:

1. Establish discretion in leading and managing the Company;
2. Arrange provisions on employment of employers including the determination of salaries, pensions and old-age pens and other income for company employees under applicable laws and regulations and resolutions of general meetings of shareholders;
3. Appoint and dismiss Company employees based on Company employment regulations and applicable laws and regulations;
4. Arrange the transfer of power of the Board of Directors to represent the Company in and out of court to a person or several members of the Board of Directors specifically appointed to it, or to one or more employees of the company either individually or jointly or to other persons or bodies; and
5. Carry out other acts both on management and ownership in accordance with the provisions set forth in the Articles of Association and adopted by the General Meeting of Shareholders, pursuant to the prevailing laws and regulations.

In performing its main duties, the Board of Directors is obligated to:

1. Strive and ensure the implementation of business and activities of the company in accordance with the intent and purpose and business activities;
2. Prepare for timely corporate development plans, work plans, and annual budgets including other plans relating to the implementation of the company's business and activities, and submit them to the Board of Commissioners and Shareholders to be submitted to the general meeting of shareholders for approval;
3. Perform and maintain the Company's books and administration in accordance with the prevailing rules for a Company;

## Direksi

Board of Directors

4. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
5. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya perusahaan berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan kepada rapat umum pemegang saham;
6. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta pemegang saham;
7. Menyiapkan susunan organisasi perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
8. Menyiapkan neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA DIREKSI

Direksi melaksanakan pembagian tugas dan wewenang antar anggota Direksi guna memastikan pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab serta penggunaan wewenangnya berjalan optimal. Aturan pembagian tugas dan wewenang Direksi sebagai berikut:

1. Pembagian tugas dan wewenang dari setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.
2. Penjabaran tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perusahaan tentang Struktur Organisasi dan Peraturan Perusahaan lainnya yang mengatur mengenai kewenangan setiap anggota Direksi.

## SEGREGATION OF DUTIES AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors delegates duties and authorities among its members to ensure optimum execution of both. Segregation of Duties and Authorities of the Board of Directors are as follows:

1. The duties and responsibilities delegated to each member of the Board of Directors are determined by the Resolutions of the General Meeting of Shareholders. If the General Meeting of Shareholders does not do so, delegation is determined following a meeting of the Board of Directors.
2. The description of duties, authorities, and responsibilities of the members of the Board of Directors is stipulated in Company Regulations on Organizational Structure and other Company Regulations stipulating the authority of each member.

## KRITERIA, KETENTUAN DAN PEMILIHAN ANGGOTA DIREKSI

Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan dalam RUPS. Calon Direktur dapat berasal dari internal maupun eksternal perusahaan.

**Untuk dapat dipilih, calon Direktur harus menjalani tahap fit and proper test terlebih dahulu. Setiap Direktur PLN memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun berikutnya yang dimulai sejak tanggal pengangkatan. Namun demikian, pemegang saham melalui RUPS tahunan atau RUPS luar biasa berhak untuk memberhentikan anggota Direksi pada setiap saat sebelum masa jabatannya berakhir.**

To be eligible for appointment, the candidate must first undergo a fit and proper test. Every PLN Director is tenured for up to 5 (five) years since his/her date of appointment. However, shareholders may, in annual or extraordinary GMS, dismiss a member of the Board of Directors before his/her tenure ends.

Kriteria Anggota Direksi Sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri BUMN No. PER- 03/MBU/02/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN, maka yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah:

1. Dinyatakan pailit;
2. Menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Pemilihan anggota Direksi PLN dilakukan melalui tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK/ *fit and proper test*) berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.

## CRITERIA, REQUIREMENTS, AND APPOINTMENT OF DIRECTORS

The Board of Directors is appointed and dismissed by the GMS. A prospective candidate may be from both inside and outside of the Company. Prospective Directors may come from internal or external companies.

The criteria for Directors are in accordance with Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and the Minister of SOEs' Regulation No. PER- 03/MBU/02/2015 on Procedures of Appointment and Dismissal of the Members of the Board of Directors of SOEs. These regulations state that a Director is able to perform legal action, with the exception that within the period of 5 (five) years prior to appointment:

1. Is declared bankrupt;
2. Be a Member of a Board of Directors or Board of Commissioners/Board of Trustees declared guilty of bankrupting an SOE and/or Company;
3. Is sentenced for crimes which caused losses to the state, a state-owned company, the Company, and/ or other entities in the financial sector.

Selection of a member of the Board of Directors of PLN is conducted using a fit and proper test, in accordance with the Minister of SOEs Regulation No. PER-03/MBU/02/2015 on Procedures of Appointment and Dismissal of the Members of the Board of Directors of SOEs.

## Direksi

Board of Directors

INDEPENDENSI & KEPEMILIKAN SAHAM  
ANGGOTA DIREKSI

Setiap anggota Direksi menandatangani pakta integritas pada tiap awal tahun untuk menyatakan status independensinya dan pada setiap akhir tahun untuk menyatakan apakah selama tahun terakhir terdapat situasi yang memiliki benturan kepentingan oleh Dewan Komisaris atas tindakan yang dilakukan. Sekretaris Dewan Komisaris bertugas memastikan apakah praktik ini telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip GCG.

INDEPENDENCE & SHARE OWNERSHIP OF THE  
MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS

Each member of the Board of Directors signs an integrity pact at the beginning of each year to declare its independence status and at the end of each year to state whether during the year, there had been any conflict of interests by the Board of Commissioners for the actions taken. The Secretary of the Board of Commissioners has the duty to ensure that this practice is carried out in accordance with the GCG principles.

Pakta Integritas   Integrity Pact	Sofyan Basir	Sarwono Sudarto	Muhamad Ali	Supangkat Iwan Santoso	Amir Rosidin	Haryanto WS	Djoko R Abumanan	Machnizon	Syamsul Huda	Ahmad Rofik	Syofvi Felienty Roekman	Wiluyo Kusdwiarto
Sanggup mengemban amanah atas dasar kepercayaan ( <i>fiduciary duty</i> )   Willing to have the fiduciary duty	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Mengupayakan capaian kinerja Perusahaan secara maksimal dengan mengindahkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik ( <i>good corporate governance</i> )   Striving for Company's maximum performance by adhering to the principles of good corporate governance	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Bersikap dan mengambil keputusan dengan penuh kehati-hatian atau <i>prudent (duty of care)</i>   Being careful and prudent in making decisions ( <i>duty of care</i> )	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Berani mengambil tanggung jawab penuh atas jalannya Perusahaan ( <i>responsibility</i> )   Taking full responsibility for the Company	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Direksi  
Board of Directors

Pakta Integritas   Integrity Pact	Sofyan Basir	Sarwono Sudarto	Muhamad Ali	Supangkat Iwan Santoso	Amir Rosidin	Haryanto WS	Djoko R Abumanan	Machnizon	Syamsul Huda	Ahmad Rofik	Syofvi Felienty Roekman	Wiluyo Kusdwiarto
Secara konsisten mendahulukan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi ( <i>duty of loyalty</i> )   Consistently prioritizing the Company's best interests over personal interests ( <i>duty of loyalty</i> )	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Menjauhi segala bentuk benturan kepentingan baik potensi maupun actual ( <i>Conflict of Interest Rule</i> )   Steering clear of any potential or actual conflict of interest ( <i>Conflict of Interest Rule</i> )	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Mentaati semua ketentuan perundangan yang berlaku ( <i>accountability</i> )   Complying with all prevailing laws ( <i>accountability</i> )	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Selama menjabat, tidak akan memanfaatkan posisi pada Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan saudara, maupun golongan tertentu.   During their tenure, they will not take advantage of the Company's position, directly or indirectly, for their personal, family, and relative's interests, and certain groups' interests.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Direksi  
Board of Directors

## Kepemilikan Saham Direksi dan Keluarga

## Share Ownership of the Board of Directors and Families

Nama Name	Kepemilikan Saham   Shareholding		
	Pribadi pada Perusahaan Personal in the Company	Keluarga Pada Perusahaan Family at the Company	Pribadi/ Keluarga Pada Perusahaan Lain Personal/Family at Other Companies
Sofyan Basir	Tidak ada   None	Tidak ada   None	Tidak ada   None
Sarwono Sudarto	Tidak ada   None	Tidak ada   None	Tidak ada   None
Muhamad Ali	Tidak ada   None	Tidak ada   None	Tidak ada   None
Supangkat Iwan Santoso	Tidak ada   None	Tidak ada   None	Tidak ada   None
Amir Rosidin	Tidak ada   None	Tidak ada   None	Tidak ada   None
Haryanto WS	Tidak ada   None	Tidak ada   None	Tidak ada   None
Djoko R Abumanan	Tidak ada   None	Tidak ada   None	Tidak ada   None
Machnizon	Tidak ada   None	Tidak ada   None	Tidak ada   None
Syamsul Huda	Tidak ada   None	Tidak ada   None	Tidak ada   None
Ahmad Rofik	Tidak ada   None	Tidak ada   None	Tidak ada   None
Syofvi Felienty Roekman	Tidak ada   None	Tidak ada   None	Tidak ada   None
Wiluyo Kusdwiarto	Tidak ada   None	Tidak ada   None	Tidak ada   None

KOMPOSISI DAN MASA JABATAN ANGGOTA  
DIREKSI

Komposisi Direksi selama tahun 2017 mengalami 2 kali perubahan, sebagai berikut :

1. Sesuai Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor: SK-272/MBU/12/2014 tanggal 23 Desember 2014 dan Keputusan Menteri BUMN No. S-548/MBU/09/2015, susunan personalia Direksi Perseroan hingga 24 Juli 2017 adalah sebagai berikut :

## COMPOSITION AND TENURE OF THE BOARD OF DIRECTORS

In 2017, the composition of the Board of Directors changed 2 times, as follows:

1. In line with the Minister of SOEs Regulation by GMS No. SK-272/MBU/12/2014 dated December 23, 2014, and Minister of SOEs' Decree No. S-548/MBU/09/2015, the personnel of the Company's Board of Directors up to July 24, 2017, is as follows:

Jabatan   Position	Nama   Name
Direktur Utama   President Director	Sofyan Basir
Direktur Keuangan   Director of Finance	Sarwono Sudarto
Direktur Perencanaan Korporat   Director of Corporate Planning	Nicke Widyawati
Direktur Pengadaan   Director of Procurement	Supangkat Iwan Santoso
Direktur Human Capital Management   Director of Human Capital Management	Muhamad Ali
Direktur Bisnis Regional Sumatera   Regional Business Director of Sumatera	Amir Rosidin
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat   Regional Business Director of West Java	Murtaqi Syamsuddin
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah   Regional Business Director of Central Java	Nasri Sebayang
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur dan Bali   Regional Business Director of East Java and Bali	Amin Subekti
Direktur Bisnis Regional Kalimantan   Regional Business Director of Kalimantan	Djoko Rahardjo Abumanan
Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara   Regional Business Director of Sulawesi and Kalimantan	Machnizon
Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua   Regional Business Director of Maluku & Papua	Haryanto W.S.

Direksi  
Board of Directors

2. Sesuai Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS,
- Keputusan Menteri BUMN No. SK-138/MBU/07/2017
  - Keputusan Menteri BUMN No. SK-257/MBU/11/2017
- Susunan personalia Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :
2. In accordance with the Minister of SOEs' Decree by the GMS,
- Minister of SOEs Decree No. SK-138/MBU/07/2017
  - Minister of SOEs Decree No. SK-257/MBU/11/2017
- The composition of the Company's Board of Directors is as follows:

Jabatan   Position	Nama   Name
Direktur Utama   President Director	Sofyan Basir
Direktur Keuangan   Director of Finance	Sarwono Sudarto
Direktur Perencanaan Korporat   Director of Corporate Planning	Syofvi Felienty Roekman
Direktur Pengadaan Strategis 2   Director of Strategic Procurement 2	Supangkat Iwan Santoso
Direktur Human Capital Management   Director of Human Capital Management	Muhamad Ali
Direktur Bisnis Regional Sumatera   Director of Sumatra Regional Business	Wiluyo Kusdwiarto
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat   Regional Business Director of West Java	Haryanto W.S.
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah   Regional Business Director of Central Java	Amir Rosidin
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara   Regional Business Director of East Java, Bali & Nusa Tenggara	Djoko Rahardjo Abumanan
Direktur Bisnis Regional Kalimantan   Regional Business Director of Kalimantan	Machnizon
Direktur Bisnis Regional Sulawesi   Regional Business Director of Sulawesi	Syamsul Huda
Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua   Regional Business Director of Maluku & Papua	Ahmad Rofik

Sehingga ringkasan perubahan komposisi personalia Direksi, tanggal pengangkatan dan masa jabatan tahun 2017, sebagai berikut :

Thus, the brief summary of the changes in the Board of Directors' composition, the date of appointment, and terms of office in 2017, are as follow:

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Akhir Masa Jabatan End of Term of Office
Sofyan Basir	Direktur Utama   President Director	23 Desember 2014 December 23, 2014	23 Desember 2019 December 23, 2019
Sarwono Sudarto	Direktur Keuangan   Director of Finance	23 Desember 2014 December 23, 2014	23 Desember 2019 December 23, 2019
Syofvi Felienty Roekman	Direktur Perencanaan Korporat   Director of Corporate Planning	24 Juli 2017 July 24, 2017	24 Juli 2022 July 24, 2022
Supangkat Iwan Santoso	Direktur Pengadaan Strategis 2   Director of Strategic Procurement 2	23 Desember 2014 December 23, 2014	23 Desember 2019 December 23, 2019
Muhamad Ali	Direktur Human Capital Management   Director of Human Capital Management	30 Oktober 2015 October 30, 2015	30 Oktober 2020 October 30, 2020
Wiluyo Kusdwiarto	Direktur Bisnis Regional Sumatera   Director of Sumatra Regional Business	24 Juli 2017 July 24, 2017	24 Juli 2022 July 24, 2022
Haryanto W.S.	Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat   Regional Business Director of West Java	30 Oktober 2015 October 30, 2015	30 Oktober 2020 October 30, 2020

## Direksi

Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Akhir Masa Jabatan End of Term of Office
Amir Rosidin	Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah   Regional Business Director of Central Java	23 Desember 2014 December 23, 2014	23 Desember 2019 December 23, 2019
Djoko Rahardjo Abumanan	Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara   Regional Business Director of East Java, Bali & Nusa Tenggara	30 Oktober 2015 October 30, 2015	30 Oktober 2020 October 30, 2020
Machnizon	Direktur Bisnis Regional Kalimantan   Regional Business Director of Kalimantan	30 Oktober 2015 October 30, 2015	30 Oktober 2020 October 30, 2020
Syamsul Huda	Direktur Bisnis Regional Sulawesi   Regional Business Director of Sulawesi	24 Juli 2017 July 24, 2017	24 Juli 2022 July 24, 2022
Ahmad Rofik	Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua   Regional Business Director of Maluku & Papua	24 Juli 2017 July 24, 2017	24 Juli 2022 July 24, 2022

## RUANG LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI

### Direktur Utama (DIRUT):

1. Memastikan bahwa arah pengelolaan Perusahaan berjalan dengan benar menuju terwujudnya Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan;
2. Memastikan bahwa Perusahaan dikelola sesuai dengan kaidah bisnis dan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*);
3. Memastikan bahwa Perusahaan terus berkembang dan memberikan nilai tambah bagi para *Stakeholder*;
4. Melaksanakan fungsi *corporate leader* untuk memastikan *engagement* seluruh anggota Perusahaan sekaligus sebagai inspirator dan motivator yang mengarahkan semua sumber daya Perusahaan melangkah mencapai Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan.

### Direktur Perencanaan Korporat (DIRREN):

1. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam mencapai Visi melalui perencanaan dan pengembangan sistem ketenagalistrikan serta pengembangan bisnis Perusahaan yang dituangkan dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) serta dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, termasuk didalamnya merencanakan proyeksi keuangan Perusahaan dan merancang pendanaannya;

## SCOPES OF WORK AND RESPONSIBILITIES OF EACH BOARD OF DIRECTORS' MEMBER

### President Director (DIRUT):

1. Ensuring that the managerial direction of the Company is based on its Vision, Mission, and Objectives;
2. Ensuring that the Company is managed in accordance with Good Corporate Governance principles;
3. Ensuring that the Company maintains growth and offers added value for Stakeholders;
4. Carrying out corporate leader functions to ensure full engagement of every member of the Company. The President Director also inspires and motivates Company resources to meet the Company's Vision, Mission, and Objectives.

### Director of Corporate Planning (DIRREN):

1. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies to meet the Company's Vision by planning and developing power systems and business development plans as outlined in the Electricity Power Supply Business Plan, Long-term Company Plan, and Work and Budget Plan. These include planning the Company's financial projections and funding;

2. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam perencanaan, pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT);
3. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengembangan teknologi ketenagalistrikan, penelitian dan pengembangan ketenagalistrikan, standarisasi enjiniring dan tersedianya perencanaan pengadaan barang dan jasa strategis termasuk di dalamnya hasil *feasibility study*, *engineering design*, Rencana Kerja dan Spesifikasi untuk proses pengadaan;
4. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan transaksi tenaga listrik, kemitraan bisnis, pengembangan model bisnis IPP, transmisi dan distribusi ketenagalistrikan, serta pengembangan Anak Perusahaan dan Usaha Patungan;
5. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam Manajemen Risiko dan Kepatuhan;
6. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan Risiko pada Direktorat Perencanaan Korporat, melakukan pembinaan dan pengembangan Anak Perusahaan dan Usaha Patungan, pembinaan dan pengembangan Regional dan Unit di bawah Direktorat Perencanaan Korporat serta pembinaan Regional dan Unit Pusat Pengatur Beban.

#### Direktur Pengadaan Strategis 1 (DIRDAN 1):

1. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan perijinan, pengadaan tanah, serta penyediaan tanah bagi penduduk yang terkena dampak kegiatan Perusahaan;
2. Menetapkan dan memastikan tersedianya regulasi, kebijakan dan strategi pengadaan barang dan jasa korporat, terlaksananya pengadaan barang dan jasa strategis, terlaksananya pembinaan pengadaan barang dan jasa kepada Regional dan Unit, serta pengelolaan administrasi pengadaan barang dan jasa dan kontrak korporat;
3. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi pengadaan korporat dalam penyediaan material operasi melalui pengelolaan *supply chain management* dan pengelolaan logistik korporat;

#### Director of Strategic Procurement 1 (DIRDAN 1):

1. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in the management of licenses, land procurement, and land allocation for those affected by Company business;
2. Adopting and ensuring the availability of regulations on, policies for, and strategies in corporate goods and services procurement, execution of strategic goods and services procurement, execution of Regional and Unit goods, and administration of goods and services procurement and corporate contracts;
3. Adopting and ensuring the execution of corporate procurement policies and strategies in procuring operational materials via management of supply chain and corporate logistics;

## Direksi

Board of Directors

4. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi pengelolaan aplikasi pengadaan barang dan jasa secara *online* serta melakukan integrasi proses dan pemusatan pengadaan korporat;
5. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengelolaan data base dan administrasi proyek, pengelolaan *Project Management Information System* (PMIS), pengelolaan anggaran proyek, dan melaksanakan integrasi dan pembinaan pelaksanaan konstruksi;
6. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan Risiko pada Direktorat Pengadaan Strategis 1.
4. Adopting and ensuring the availability of policies and strategies on online procurement applications for goods and services, and corporate procurement integration and centralization;
5. Adopting and ensuring the execution of project database and administration management, Project Management Information System (PMIS), project budgets management, and construction integration and development;
6. Adopting and ensuring the implementation of business process development and risk management at the Directorate of Strategic Procurement 1.

### Direktur Pengadaan Strategis 2 (DIRDAN 2):

1. Menetapkan dan memastikan tersedianya regulasi, kebijakan dan strategi pengadaan IPP dan Energi Primer untuk kebutuhan korporat, terlaksananya pengadaan IPP dan energi primer strategis, terlaksananya pembinaan pengadaan energi Primer kepada Regional dan Unit, serta pengelolaan administrasi pengadaan IPP dan energi Primer dan kontrak korporat;
2. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi pengadaan korporat dalam penyediaan energi primer;
3. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan Risiko pada Direktorat Pengadaan Strategis 2.
1. Adopting and ensuring the availability of IPP and Primary Energy supply regulations, policies and strategies for the provision of IPP, and primary energy strategic, the implementation of primary energy procurement to the Regional and Unit, and administration of procurement of IPP and primary energy and corporate contracts;
2. Adopting and ensuring the implementation of corporate procurement policies and strategies in the provision of primary energy;
3. Adopting and ensuring the implementation of business process development and risk management at the Directorate of Strategic Procurement 2.

### Direktur Human Capital Management (DIRHCM):

1. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengembangan organisasi dan sumber daya manusia meliputi antara lain perencanaan tenaga kerja, sistem rekrutmen, sistem pendidikan dan pelatihan, pengembangan sistem *Human Capital Management*, sistem remunerasi dan pemberian penghargaan, sistem administrasi SDM, budaya Perusahaan dan manajemen perubahan;
2. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi dalam pengelolaan hubungan industrial dan kebijakan pengelolaan tenaga kerja alih daya;
3. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi dalam pengelolaan pelayanan umum di kantor pusat dan pengelolaan properti korporat secara terintegrasi;
1. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in organizational and human resources development. The duties consist of planning the workforce, recruitment systems, education and training systems, developing the Human Capital Management system, remuneration and recognition systems, HR administration systems, corporate culture, and change management;
2. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in industrial relations and outsourcing policies;
3. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in general services at the head office and integrated management of corporate properties;

Direksi  
Board of Directors

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan kesehatan, keselamatan kerja, keamanan dan pengelolaan lingkungan;</li> <li>5. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan sistem <i>knowledge management</i>, pengembangan sistem informasi SDM;</li> <li>6. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan Risiko pada Direktorat Human Capital Management, serta melakukan pembinaan dan pengembangan Regional dan Unit di bawah Direktorat Human Capital Management.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in health management, work safety, and environmental management and safety;</li> <li>5. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in knowledge management systems and HR information system development;</li> <li>6. Adopting and ensuring the execution of business process development and Risk management at the Directorate of Human Capital Management and development and growth of Regions and Units under the Director of Human Capital Management.</li> </ol> |
|---|--|

**Direktur Keuangan (DIRKEU):**

1. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam penyediaan dan pengelolaan keuangan, kebutuhan pendanaan, pengelolaan pinjaman dan pemenuhan terhadap kewajiban serta *covenant* Perusahaan;
2. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan anggaran untuk mendukung Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
3. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan perbendaharaan (*treasury*), kepemilikan saham, pengelolaan kas dan likuiditas, pengelolaan pendapatan dan aset *liability management*, pengelolaan piutang, pengelolaan akuntansi, serta pengelolaan pajak dan asuransi;
4. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan niaga tenaga listrik, pengelolaan *corporate & industry account* untuk pelanggan besar dengan layanan khusus, pengelolaan dan pelaksanaan *Public Services Obligation* (PSO) dan *Performance Base Regulation* (PBR);
5. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam hal pengelolaan sistem dan teknologi informasi, pemusatan serta integrasi system dan aplikasi teknologi informasi korporat;
6. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan risiko pada Direktorat Keuangan, serta melakukan pembinaan dan pengembangan Regional dan Unit di bawah Direktorat Keuangan.

**Director of Finance (DIRKEU):**

1. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in funding and financial management, funding allocation, loan management, and settlement of the Company's obligations and covenant.
2. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in managing funds to support the Work and Budget Plan;
3. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in treasury management, share ownership, cash and liquidity management, income and asset liability management, debt servicing, accounting practices, and tax and insurance management;
4. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in commercial power management, corporate and industrial accounts management of special services customers, Public Services Obligation (PSO) management and execution, and Performance Based Regulation (PBR);
5. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in information systems and technology as well as centralization and integration of corporate IT systems and applications;
6. Adopting and ensuring the execution of business process development and risk management at the Directorate of Finance, development, and growth of Regions and Units under the Directorate of Finance.

## Direksi

Board of Directors

### Direktur Bisnis Regional Sumatera, Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku & Papua (DIRREG-SUM, DIRREG-JBB, DIRREG-JBT, DIRREG-JTBN, DIRREG-KAL, DIRREG-SUL, DIRREG-MP):

1. Menetapkan dan memastikan terlaksananya perencanaan, pengembangan dan pengendalian bisnis regional, termasuk di dalamnya perencanaan pengadaan dan pelaksanaan pengadaan regional (*capital expenditure* dan *operation expenditure*) sesuai dengan kewenangannya, serta melakukan evaluasi dan pengelolaan kinerja regional;
2. Menetapkan dan memastikan terlaksananya konstruksi pembangkit, transmisi/gardu induk dan distribusi regional, terlaksananya pembangunan IPP sampai dengan COD, serta mengelola kontrak dan administrasi konstruksi di regionalnya;
3. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi dalam pengelolaan operasi dan pemeliharaan aset pembangkit, transmisi/gardu induk dan distribusi, serta merencanakan dan mengelola kebutuhan suku cadang di regionalnya;
4. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pembelian tenaga listrik dari IPP, pemasaran tenaga listrik, pengelolaan *corporate & industry account* untuk pelanggan besar dengan layanan khusus di regionalnya, pengelolaan niaga dan bisnis tenaga listrik, serta penjualan tenaga listrik di regionalnya;
5. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengelolaan pelayanan pelanggan, serta mengelola pendapatan dan biaya operasi di regionalnya;
6. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan risiko pada Direktorat Bisnis Regional, serta melakukan pembinaan dan pengembangan Regional dan Unit di bawah Direktorat Bisnis Regional.

### Director of Sumatra, West Java, Central Java, East Java, Bali and Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, and Maluku & Papua Regional Business (DIRREG-SUM, DIRREG-JBB, DIRREG-JBT, DIRREG-JTBN, DIRREG-KAL, DIRREG-SUL, DIRREG-MP):

1. Adopting and ensuring the execution of planning, development, and control of regional businesses, including procurement plans as well as capital and operation expenditures in accordance with their respective authorities. In addition, the Directors evaluate and manage regional performance;
2. Adopting and ensuring the construction of generators, transmissions, substations, and regional distributions, execution of IPP to COD developments, and management of contracts and construction administrations in their respective regions;
3. Adopting and ensuring the operation and maintenance of generators, transmissions, substations, and regional distributions, and management and planning of their spare parts in their respective regions;
4. Adopting and ensuring the execution of power procurement from IPPs, electricity marketing, corporate and industrial accounts management of special services customers in their respective regions, commercial and business power management, and electricity sales in their respective regions.
5. Adopting and ensuring the execution of customer service management and income and operational costs of their respective regions;
6. Adopting and ensuring the execution of business process development and risk management at the Directorate of Regional Businesses, development and growth of Regions and Units under the Directors of Regional Businesses.

## PROGRAM PENGENALAN PERUSAHAAN UNTUK DIREKSI

Program Pengenalan ditujukan bagi Direktur yang baru pertama kali diangkat di Perseroan agar Direktur tersebut segera mengenal proses bisnis Perseroan, termasuk seluruh permasalahan yang telah, sedang dan akan dihadapi sehingga dapat bekerja dengan optimal untuk kepentingan Perseroan. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan

## INDUCTION PROGRAM FOR THE BOARD OF DIRECTORS

The introduction program is intended for new Directors appointed for the first time in the Company to be able to immediately recognize the business processes of the Company, including all previous problems, and potential problems in the future, in order to work optimally for the benefit of the Company. The Corporate Secretary or

atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.

Program Pengenalan yang diberikan kepada Direktur antara lain:

- Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh Perseroan;
- Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang, posisi komposisi, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
- Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan. Audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian intern serta Komite Audit;
- Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta Organ Pendukung Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Program pengenalan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk yang dianggap sesuai dengan Perseroan.

Pada Tahun 2017 telah dilakukan Program Pengenalan Direktur yang baru diangkat, yaitu :

No.	Direktur   Director	Tanggal Induksi   Induction Date
1.	Syamsul Huda	22 Agustus 2017   August 22, 2017
2.	Wiluyo Kusdiharto	22 Agustus 2017   August 22, 2017
3.	Ahmad Rofik	30 Agustus 2017   August 30, 2017
4.	Syofvi Felienty Roekman	30 Agustus 2017   August 30, 2017

## PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, PLN memfasilitasi anggota Direksi untuk mengikuti berbagai pelatihan, seminar maupun lokakarya untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuannya. Beberapa program sejenis yang sempat diikuti oleh anggota Direksi, mencakup:

any other official tasked to do the function of Corporate Secretary is responsible for the Induction Program.

The Induction Program for the new Director covers:

- Implementation of the Good Corporate Governance principles in the Company;
- Description of the Company relating to the objectives, nature, scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term plans, the composition and position of personnel, risks, and other strategic issues;
- Description with regard to delegated authority. Internal and external Audit, internal control systems and policies, and the Audit Committee;
- Description of the tasks and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors, and the Supporting Organs of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as things prohibited.

The induction program may be implemented in a form deemed to be in line with the Company.

In 2017, the newly appointed Directors have followed the Induction Program, i.e.:

## TRAINING AND COMPETENCE DEVELOPMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

In order to improve knowledge and competence, PLN facilitates the Board of Directors members to attend various training, seminars, and workshops, to improve their knowledge, skills, and understanding. Programs that were attended by members of the Board of Directors, include:

Direksi  
Board of Directors

Nama Name	Tanggal Date	Program Pelatihan & Pengembangan Training & Development Program	Lokasi Location
Sofyan Basir	08-15 April 2017 April 8-15, 2017	<i>Working Visit</i> ke Pabrik Tesmec dan Wartsila   <i>Working Visit</i> to Tesmec and Wartsila factories	Italia & Jerman Italy & Germany
	30 April - 11 Mei 2017 April 30 - May 11, 2017	<i>Roadshow</i> dan <i>investor meeting</i> sebagai salah satu kegiatan pemasaran GMTN PLN Tahun 2017   <i>Roadshow</i> and <i>investor meeting</i> as one of marketing activities of PLN GMTN Year 2017	Amerikat Serikat & Inggris USA & England
	5-8 Desember 2017 December 5-8, 2017	<i>Benchmarking Pembelajaran Riset, Development Universitas &amp; Utilitas Ketenagalistrikan</i>   <i>Benchmarking</i> of Research Learning, University Development & Utilities of Electricity	China China
	11-15 Desember 2017 December 11-15, 2017	Menghadiri acara <i>One Planet Summit (OPS)</i>   Attended <i>One Planet Summit (OPS)</i>	Perancis France
Syofvi Felienty Roekman	25 Maret - 01 April 2017 March 25 - April 1, 2017	<i>USAID Clean Energy Executive Exchange for PLN</i>   <i>USAID Clean Energy Executive Exchange</i> for PLN	Amerikat Serikat USA
	13-April-17 April 13, 2017	<i>GE Digital Industrial Forum 2017</i>   <i>GE Digital Industrial Forum 2017</i>	Jakarta Jakarta
	19 - 21 September 2017 September 19-21, 2017	<i>Indonesia Infrastructure Investment Forum</i>   <i>Indonesia Infrastructure Investment Forum</i>	Seoul, Korea Seoul, Korea
	22-30 September 2017 September 22-30, 2017	Kunjungan <i>Due Diligence</i> untuk Gas Insulated Switchgear (GIS), Power Transformer dan Material Transmisi Utama (MTU)   <i>Due Diligence Visitation</i> for Gas Insulated Switchgear (GIS), Power Transformer, and Main Transmission Material (MTU)	Italia, Perancis, Swiss Italy, France, Swiss
	04-08 Desember 2017 December 4-8, 2017	<i>Working Visit to Shanghai</i>   <i>Working Visit</i> to Shanghai	China China
	10-14 Desember 2017 December 10-14, 2017	Mendampingi Kunjuran Menteri ESDM - <i>One Planet Summit</i>   Accompanying <i>Working Visit</i> of the Minister of EMR - <i>One Planet Summit</i>	Perancis France
	27 Maret 2017 March 27, 2017	<i>Working Visit</i>   <i>Working Visit</i>	Jepang Japan
Supangkat Iwan Santoso	23 - 26 April 2017 April 23-26, 2017	<i>Working Visit &amp; Due Diligence Shipyard</i> FSRU   <i>Working Visit &amp; Due Diligence Shipyard</i> FSRU	Korea Selatan South Korea
	12 Mei 2017 May 12, 2017	<i>Benchmarking Coal Terminal</i>   <i>Benchmarking Coal Terminal</i>	India India
	11 Agustus 2017 August 11, 2017	<i>Working Visit</i> ke Shenhua   <i>Working Visit</i> to Shenhua	China China
	14 September 2017 September 14, 2017	<i>Working Visit</i> ke Sabah   <i>Working Visit</i> to Sabah	Malaysia Malaysia
	5 - 8 Desember 2017 December 5-8, 2017	<i>Benchmarking Pembelajaran Riset, Development Universitas &amp; Utilitas Ketenagalistrikan</i>   <i>Benchmarking</i> of Research Learning, University Development & Utilities of Electricity	China China
	11 - 14 Desember 2017 December 11-14, 2017	Menghadiri acara <i>One Planet Summit (OPS)</i>   Attended <i>One Planet Summit (OPS)</i>	Perancis France
	24-28 Juli 2017 July 24-28, 2017	<i>Benchmarking Ketenagalistrikan</i>   <i>Electricity Benchmarking</i>	Korea Selatan South Korea
Muhamad Ali	23 Agustus 2017 August 23, 2017	Seminar Apresiasi PPM 2017   <i>PPM Appreciation Seminar 2017</i>	Jakarta Jakarta
	04-09 Dec 2017 December 4-9, 2017	<i>Benchmarking Pembelajaran Riset, Development Universitas &amp; Utilitas Ketenagalistrikan</i>   <i>Benchmarking</i> of Research Learning, University Development & Utilities of Electricity	China China

Direksi  
Board of Directors

Nama Name	Tanggal Date	Program Pelatihan & Pengembangan Training & Development Program	Lokasi Location
Sarwono Sudarto	08-15 April 2017 April 08-15, 2017	Working Visit ke Pabrik Tesmec dan Wartsila   Working Visit to Tesmec and Wartsila factories	Italia & Jerman Italy & Germany
	30 April - 11 Mei 2017 April 30 - May 11, 2017	Roadshow dan investor meeting sebagai salah satu kegiatan pemasaran GMTN PLN Tahun 2017   Roadshow and investor meeting as one of marketing activities of PLN GMTN Year 2017	Amerikat Serikat & Inggris USA & England
	5-8 Desember 2017 December 5-8, 2017	Benchmarking Pembelajaran Riset, Development Universitas & Utilitas Ketenagalistrikan   Benchmarking of Research Learning, University Development & Utilities of Electricity	China China
	11-15 Desember 2017 December 11-15, 2017	Menghadiri acara One Planet Summit (OPS)   Attended One Planet Summit (OPS)	Perancis France
Wiluyo Kusdwiarto	09 - 16 Oktober 2017 October 9-16, 2017	Due Diligence Material Transmisi Utama (MTU)   Due Diligence of Main Transmission Material (MTU)	Perancis France
	24 - 25 Oktober 2017 October 24-25, 2017	Workshop Upaya Penurunan Susut Jaringan Tenaga Listrik   Workshop on the Effort to Decrease Electricity Network	Jakarta Jakarta
	30 Oktober 2017 October 30, 2017	Forum Sumatera Tumbuh   Sumatera Grows Forum	Lampung Lampung
	21 Nopember 2017 November 21, 2017	Kompas 100 CEO Forum   Kompas 100 CEO Forum	Jakarta Jakarta
Haryanto WS	02 - 06 Mei 2017 May 2-6, 2017	Business Road Show & Investor Meeting   Business Road Show & Investor Meeting	Inggris England
	05 - 08 Mei 2017 May 5-8, 2017	Working Visit (Kunjungan Kenegaraan Presiden RI) & CEO Meeting   Working Visit (Visitation of the President of the Republic of Indonesia) & CEO Meeting	Turki Turkey
	27 September - 04 Oktober 2017 September 27 - October 4, 2017	Due Diligence Material Transmisi Utama (MTU)   Due Diligence of Main Transmission Material (MTU)	Polandia & Jerman Poland & Germany
	30 Oktober - 01 November 2017 October 30 - November 1, 2017	Working Visit ke Mitsubishi   Working Visit to Mitsubishi	Jepang Japan
	16 - 18 November 2017 November 16-18, 2017	Working Visit & pemeriksaan Produksi Zeck TSE Int.   Working Visit & Production Inspection of Zeck TSE Int.	Thailand Thailand
Amir Rosidin	10-15 April 2017 April 10-15, 2017	Working Visit ke Pabrik Tesmec & Wartsila   Working Visit to Tesmec and Wartsila factories	Jerman & Italia Germany & Italy
	04-11 Mei 2017 May 4-11, 2017	Business Road Show & Investor Meeting   Business Road Show & Investor Meeting	Hongkong & Amerika Serikat Hongkong & USA
	24-28 September 2017 September 24-28, 2017	Working Visit & Due Diligence   Working Visit & Due Diligence	Austria & Swiss Austria & Swiss
	16 -18 Nopember 2017 November 16 -18, 2017	Working Visit & pemeriksaan Produksi Zeck TSE Int.   Working Visit & Production Inspection of Zeck TSE Int.	Thailand Thailand
Djoko R Abumanan	4 s/d 8 Desember 2017 December 4-8, 2017	Working Visit & Due Diligence Prysmian Group & SGB-SMT Group   Working Visit & Due Diligence Prysmian Group & SGB-SMT Group	Belanda Netherland
	25/02 sd 01/03/2017 February 25 - March 1, 2017	Working visit (kunjungan kerja Menko Perekonomian RI)   Working visit (Coordinating Minister for Economics of the Republic of Indonesia)	Teheran - Iran Teheran - Iran
	08 Maret 2017 March 8, 2017	Kaltara Investment Forum 2017   Kaltara Investment Forum 2017	Jakarta Jakarta
	21 November 2017 November 21, 2017	Kompas 100 CEO Forum   Kompas 100 CEO Forum	Jakarta Jakarta
	03-08 Desember 2017 December 3-8, 2017	Working Visit   Working Visit	China China

Direksi  
Board of Directors

Nama Name	Tanggal Date	Program Pelatihan & Pengembangan Training & Development Program	Lokasi Location
Machnizon	17 April 2017 April 17, 2017	<i>Working Visit</i> ke Control Center for Renewable Energy   Working Visit to Control Center for Renewable Energy	Spain Spain
	30 April 2017 April 30, 2017	<i>Roadshow dan investor meeting</i> sebagai salah satu kegiatan pemasaran GMTN PLN Tahun 2017   Roadshow and investor meeting as one of marketing activities of PLN GMTN Year 2017	Amerikat Serikat & Inggris USA & England
	11 September 2017 September 11, 2017	Kunjungan ke SESB, Sabah terkait Proyek interkoneksi Malaysia-Indonesia   Visits to SESB, Sabah related to Malaysia-Indonesia interconnection project	Malaysia Malaysia
	18 November 2017 November 18, 2017	<i>Asean Engineering on The Asean Federation of Engineering Organization 2017</i>   Asean Engineering on The Asean Federation of Engineering Organization 2017	Thailand Thailand
	29 November 2017 November 29, 2017	<i>Working Visit &amp; Road Show</i>   Working Visit & Road Show	Jepang Japan
Syamsul Huda	28 September 2017 September 28, 2017	<i>Working Visit &amp; Due Diligence</i> SKTT Sumitomo Cable Factory   Working Visit & Due Diligence SKTT Sumitomo Cable Factory	Jepang Japan
	29 September 2017 September 29, 2017	<i>Working Visit &amp; Due Diligence</i> SAS, AC/DC System, Relay Protection Control, Power Transformer Mitsubishi Factory   Working Visit & Due Diligence SAS, AC/DC System, Relay Protection Control, Power Transformer Mitsubishi Factory	Jepang Japan
	6 - 7 Oktober 2017 October 6-7, 2017	Indonesia-Japan JWG dan FPDF <i>Annual Meeting</i>   Indonesia-Japan JWG and FPDF Annual Meeting	Jepang Japan
	23 - 24 Oktober 2017 October 23-24, 2017	PJB Connect Double Capacity <i>Expo &amp; Conference</i>   PJB Connect Double Capacity Expo & Conference	Surabaya Surabaya
	21 November 2017 November 21, 2017	Kompas 100 CEO Forum   Kompas 100 CEO Forum	Jakarta Jakarta
7 Desember 2017 December 7, 2017	Nara Sumber dalam Kegiatan Koordinasi Potensi Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi di Wilayah Sulawesi'   Speakers in Coordination Activities for the Potential of Infrastructure Development of Natural Gas in Sulawesi Region	Jakarta Jakarta	
Ahmad Rofik	11 Oktober 2017 October 11, 2017	<i>Working Visit &amp; Due Diligence</i> ke GE Factory   Working Visit & Due Diligence to GE Factory	Swiss Swiss
	12 Oktober 2017 October 12, 2017	<i>Working Visit &amp; Due Diligence</i> ke GE Factory   Working Visit & Due Diligence to GE Factory	Jerman Germany
	13 Oktober 2017 October 13, 2017	<i>Working Visit &amp; Due Diligence</i> ke Nexans Factory   Working Visit & Due Diligence to Nexans Factory	Jerman Germany
	8 November 2017 November 8, 2017	<i>Working Visit</i> ke Wartsila Indonesia Training and Digital Expertise Centres   Working Visit to Wartsila Indonesia Training and Digital Expertise Centres	Jerman Germany
	21 November 2017 November 21, 2017	Kompas 100 CEO Forum   Kompas 100 CEO Forum	Jakarta Jakarta

PROSEDUR DAN PENETAPAN BESARAN  
REMUNERASI DIREKSI

Remunerasi Komisaris dan Direksi dikaji oleh Dewan Komisaris. Hasil kajian melibatkan konsultan independen yang kompeten di bidangnya. Kajian tersebut mempertimbangkan beberapa faktor utama, antara lain Kinerja Perusahaan, pencapaian target sesuai key performance Indicators yang ditetapkan terhadap Dewan Komisaris dan Direksi, serta imbal jasa yang terkait dengan tanggung jawab atas tindakan masing-masing yang mengandung risiko bagi pribadi masing-masing.

PROCEDURE AND DETERMINATION OF THE  
REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners assesses the remuneration of the Board of Directors. The assessment involves an independent consultant competent in his or her field. Some main factors taken into account in the assessment are time commitment, target achievement in line with the key performance indicators (KPI) set by the Board of Commissioners and Board of Directors, and initiatives related to responsibility for individual actions that involve personal risk.

**Pemberian remunerasi bagi anggota Direksi dihitung dengan mengacu pada persentase gaji Direktur Utama yang telah disetujui oleh RUPS, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri BUMN PER-04/MBU/2014 beserta perubahannya yang terakhir No. 01/MBU/06/2017.**

Remuneration for the Board of Directors members, including salary, is calculated with reference to the percentage of salary of the President Director approved by the GMS, taking into account the provisions of the Minister of SOEs Regulation No. PER-04/MBU/2014 and its latest amendment, No. 01/MBU/06/2017.

## STRUKTUR DAN BESARAN REMUNERASI DIREKSI

Penetapan besaran remunerasi, yang terdiri dari komponen gaji, tunjangan dan tantiem Direksi didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014. Direksi juga mendapatkan fasilitas lain yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi PLN yang mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014.

## STRUCTURE AND REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Directors' remuneration, comprising of salary, allowances, and tantiem, are established pursuant to Minister of SOEs Regulation No. PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014. The Directors also receive allowances and other facilities established in the PLN Board of Directors Meeting Decision, which refers to Minister of SOEs Regulation No. PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014.

## TUNJANGAN DAN FASILITAS DIREKSI

## ALLOWANCES AND FACILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Putusan RUPS/ Menteri (dalam Rupiah) GMS Resolutions/Ministerial Decree (in Rupiah)		Keterangan Description
		Direktur Utama President Director	Direksi Director	
1	Gaji   Salary	300.000.000,00	270.000.000,00	a. Direktur Utama   President Director : 100% b. Direktur   Director : 90% dari Direktur Utama   of President Director
2	Tunjangan   Allowances			
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan   Religious Holiday Allowance	1 (satu) bulan gaji   1 (one) month salary		
	Tunjangan Perumahan   Housing Allowances	27.500.000,00	27.500.000,00	
	Asuransi Purna Jabatan   Post- Tenure Insurance	Premi yang ditanggung 25% dari Gaji dalam satu tahun   Premium covers 25% of annual salary		
3	Fasilitas   Facilities			
	Fasilitas Kendaraan Dinas   Vehicle Facility	1 (satu) unit   1 (one) unit		
	Fasilitas Kesehatan   Health Facilities	1 istri dan 3 orang anak usia maksimum 25 th   1 One wife and three children with maximum age of 25 years		

Direksi  
Board of Directors

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Putusan RUPS/ Menteri (dalam Rupiah) GMS Resolutions/Ministerial Decree (in Rupiah)		Keterangan Description
		Direktur Utama President Director	Direksi Director	
	Fasilitas Bantuan Hukum   Legal Assistance	diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku   Provided in accordance with prevailing laws and regulations		
	Fasilitas Club Membership   Club Membership	dapat diikutsertakan 2 (dua) keanggotaan Club Membership yaitu Business Club atau Sport Club   Given up to 2 Club Memberships, i.e. Business Club or Sports Club		
	Fasilitas Komunikasi   Communication	biaya komunikasi ditanggung sepenuhnya oleh perseroan   Costs covered entirely by the Company		
	Corporate Credit Card	1 (satu) kartu kredit untuk keperluan menjamu tamu dinas perseroan atau biaya representasi kedinasan lainnya   1 (one) credit card for entertaining guests of the Company or other official representation expenses		Pemakaian untuk keperluan pribadi tidak ditanggung oleh perseroan   Personal use is not borne by the company
	Pakaian Seragam   Uniform	2 (dua) stel setiap 1 (satu) tahun   2 (two) sets every 1 (one) year		

## REMUNERASI DIREKSI\* | REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS\*

Tipe Remunerasi & Fasilitas Lainnya	Jumlah Total	Juta (Rp) Million (Rp)	Remuneration & Other Facilities Types
<b>Remunerasi</b>		<b>150.965</b>	<b>Remuneration</b>
Honorarium	16	40.320	Honorarium
Tantiem Dipotong Pajak	12	110.645	Tantium Cut Taxes
<b>Tunjangan</b>		<b>5.965</b>	<b>Allowance</b>
Tunjangan Perumahan	12	2.695	Housing Allowance
Tunjangan Hari Raya	12	3.270	Religious Day Allowance

\* Termasuk Mantan Anggota Direksi | Including former members of the Board of Directors

## Rapat Direksi

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga ditetapkan tanpa diadakan Rapat Direksi, asal saja keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi.

Direksi menetapkan hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan melalui Rapat Direksi sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan terkait dengan pelaksanaan wewenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar, yaitu:
  - a. Kewenangan yang memerlukan persetujuan Direksi;
  - b. Kewenangan yang memerlukan persetujuan Komisaris; dan
  - c. Kewenangan yang memerlukan persetujuan RUPS.
2. Tindakan Terkait Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan; dan
3. Tindakan Strategis lainnya, dengan batasan:
  - a. Bersifat strategis/signifikan mempengaruhi operasional perusahaan;
  - b. Di luar rencana dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
  - c. Bersifat mendesak; dan
  - d. Atau, menyangkut pegawai dalam jabatan strategis.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 dan Board Manual, Rapat Direksi harus dilaksanakan secara berkala dan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan. Direksi PT PLN (Persero) memutuskan untuk mengadakan rapat direksi secara rutin setiap hari Kamis.

Selain rapat rutin tersebut, dapat dilaksanakan juga rapat tambahan sesuai kebutuhan yang mendesak dan memerlukan keputusan segera. Rapat Direksi dihadiri oleh Direksi berikut seluruh jajaran pejabat yang terkait, dan kehadiran Direksi dalam rapat tersebut harus bersifat kuorum.

## Board of Directors' Meeting

Meetings of the Board of Directors are meetings held by the Board of Directors. Decisions that bind are normally made in the Board of Directors' meeting. The decisions are in the form of writing, which must be approved and signed by all members of the Board of Directors.

The Board of Directors determines several issues which require decision making through the Directors Meeting, as follows:

1. Actions related to implementation of authority in accordance with the provisions in the Articles of Association, i.e.:
  - a. Authorities that require the Directors' approval;
  - b. Authorities that require the Commissioners' approval; and
  - c. Authorities that require the GMS' approval.
2. Actions associated with Goods and Service Procurement in accordance with applicable Company regulations; and
3. Other Strategic Actions, with limitations as follows:
  - a. Tendency to influence Company operations, strategically and significantly
  - b. Not included in the Work and Budget Plan as set in the GMS;
  - c. Urgent matter; and
  - d. Involving employees in strategic positions.

In line with the State Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 and Board Manual, Directors' Meeting must be organized periodically and at least once a month. The Board of Directors of PT PLN (Persero) decided to hold a Directors' meeting every Thursday.

In addition to routine meetings, additional meetings can be held based on urgent needs that require an immediate decision. Directors' Meeting is participated in by the Board of Directors and all related officials. The attendance of the Directors in the meeting must be a quorum.

Direksi  
Board of Directors

Rapat Direksi dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Rapat yang dilakukan melalui sarana elektronik harus senantiasa direkam dan dibuatkan risalahnya sebagai sarana tertib administrasi dan dokumentasi hukum.

The Board of Directors meeting can be conducted via teleconference, video conference, or other electronic media that enables all participants to see and listen to each other directly and participate in the meeting. Meetings conducted via electronic media should always be recorded and compiled in the Minutes of Meeting as an administrative obligation and legal documentation.

Jumlah Rapat Direksi pada tahun 2017 sebanyak 15 kali dengan ringkasan tingkat kehadiran masing-masing Direktur sebagai berikut:

There were 15 Board of Directors' Meetings in 2017, with the attendance rate of each member as follows:

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Direksi   Board of Directors' Attendance		Uraian Description	Agenda Rapat Meeting Agenda
		Kehadiran Direksi Attendance			
1	12 Januari 2017 January 12, 2017	Kuorum Quorum	83%	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Supangkat Iwan Santoso, Nicke Widyawati, Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Amin Subekti, Djoko R. Abumanan, Machnizon, Haryanto W.S	1. Akselerasi Peningkatan Kinerja Pembangkit FTP- Jawa Bali 2. Penjelasan tentang kontrak pengadaan barang <i>sparepart</i> mekanisme <i>Long Term Service Agreement</i> (LTSA) 3. Laporan PLTGU Jawa I
2	19 Januari 2017 January 19, 2017	Kuorum Quorum	83%	Sarwono Sudarto, Supangkat Iwan Santoso, Nicke Widyawati, Muhamad Ali, Amir Rosidin, Nasri Sebayang, Amin Subekti, Djoko R. Abumanan, Machnizon, Haryanto W.S	1. Solusi penyelesaian proyek pembangkit terkendala di Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara 2. Pengadaan Gardu Induk GI Terpusat
					1. Solutions for completion of power plant projects in Sulawesi and Nusa Tenggara 2. Procurement of Central GI Substation

Direksi  
Board of Directors

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Direksi   Board of Directors' Attendance		Uraian Description	Agenda Rapat Meeting Agenda
		Kehadiran Direksi Attendance			
3	2 Februari 2017 February 2, 2017	Kuorum Quorum	58%	Supangkat Iwan Santoso, Nicke Widyawati, Muhamad Ali, Amin Subekti, Djoko R. Abumanan, Machnizon, Haryanto W.S	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tax Amnesty</li> <li>2. Dampak Permen ESDM 11/2017 terhadap harga Gas dan LNG untuk kontrak baru</li> <li>3. Pengadaan FSRU Gorontalo</li> <li>4. Laporan hasil due diligence lelang EPC Pipa Gas Tanjung Batu</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tax Amnesty</li> <li>2. Impact of Minister of EMR Regulation No. 11 of 2017 on the price of gas and LNG for new contracts</li> <li>3. Procurement of FSRU Gorontalo</li> <li>4. Report of due diligence result of Tanjung Priok Pipeline EPC tender</li> </ol>
4	6 Februari 2017 February 6, 2017	Kuorum Quorum	100%	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Supangkat Iwan Santoso, Nicke Widyawati, Muhamad Ali, Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Nasri Sebayang, Amin Subekti, Djoko R. Abumanan, Machnizon, Haryanto W.S	Program Listrik Pedesaan   Rural Electrical Program
5	13 Maret 2017 March 13, 2017	Kuorum Quorum	58%	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Supangkat Iwan Santoso, Nicke Widyawati, Muhamad Ali, Amir Rosidin, Haryanto W.S	Laporan Progress PLTP Rantau Dadap   Progress Report of GPP Rantau Dadap

## Direksi

Board of Directors

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Direksi   Board of Directors' Attendance		Uraian Description	Agenda Rapat Meeting Agenda
		Kehadiran Direksi Attendance			
6	20 Maret 2017 March 20, 2017	Kuorum Quorum	67%	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Supangkat Iwan Santoso, Nicke Widyawati, Amir Rosidin, Djoko R. Abumanan, Machnizon, Haryanto W.S	Penyesuaian Harga PLTP Muara Laboh   Price Adjustment of GPP Muara Laboh
7	23 Maret 2017 March 23, 2017	Kuorum Quorum	58%	Sarwono Sudarto, Muhamad Ali, Amir Rosidin, Nasri Sebayang, Amin Subekti, Djoko R. Abumanan, Machnizon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspirasi BoD untuk Arah dan Strategi Pengembangan Portofolio Bisnis</li> <li>2. PLTA Poso sebagai Peaker .</li> <li>3. Tindak Lanjut Kontrak Paket 1 PLTA Upper Cisokan</li> <li>4. Rencana pengadaan GI prioritas</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BoD Aspirations for Business Portfolio Directions and Strategies</li> <li>2. Hydro Power Plant Poso as Peaker.</li> <li>3. Follow-up of Contract Package 1 Upper Cisokan Hydro Power Plant</li> <li>4. Procurement plan for priority GI</li> </ol>
8	15 Mei 2017 May 15, 2017	Kuorum Quorum	58%	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Supangkat Iwan Santoso, Nicke Widyawati, Muhamad Ali, Amir Rosidin, Amin Subekti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penugasan Proyek RUPTL kepada Anak Perusahaan</li> <li>2. Persetujuan Harga IPP PLTU Tanjung Jati A (Jawa 3)</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assignment of RUPTL Project to Subsidiaries</li> <li>2. Approval of IPP Tanjung Jati A Coal Power Plant (Jawa 3)</li> </ol>
9	30 Mei 2017 May 30, 2017	Kuorum Quorum	75%	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Nicke Widyawati, Muhamad Ali, Amir Rosidin, Nasri Sebayang, Amin Subekti, Machnizon, Haryanto W.S	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PLTA Poso</li> <li>2. Penetapan Calon Pengembang PLTA di 11 Lokasi</li> <li>3. Penetapan Pengembang dan Harga Pembelian Energi Listrik dari PLTS di 6 Lokasi</li> <li>4. <i>Unfreezing</i> PLN Geothermal dan Penugasan menjadi PLN Geothermal dan Gas</li> <li>5. Tindak Lanjut <i>Assessment</i> UNINDO</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hydro Power Plant Poso</li> <li>2. Determination of Prospective Hydropower Developer at 11 Locations</li> <li>3. Determination of Developers and Purchasing Prices of Electrical Energy from Solar Power Plant in 6 Locations</li> <li>4. Unfreezing PLN Geothermal and Assignment to PLN Geothermal and Gas</li> <li>5. Follow-Up on UNINDO Assessment</li> </ol>

Direksi  
Board of Directors

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Direksi Attendance	Kehadiran Direksi   Board of Directors' Attendance	Uraian Description	Agenda Rapat Meeting Agenda
10	9 Juni 2017 June 9, 2017	Kuorum Quorum	67%	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Supangkat Iwan Santoso, Nicke Widyawati, Muhamad Ali, Djoko R. Abumanan, Machnizon, Haryanto W.S	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindak lanjut proyek terkendala PLTU Sampit dan PLTU Kotabaru</li> <li>2. Laporan Pelelangan oleh PT Rekadaya untuk penugasan PLTU Way-Ambon</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Follow-up constrained project, i.e. Sampit Coal Power Plant and Kotabaru Coal Power Plant</li> <li>2. Auction Report by PT Rekadaya for assignment of Way-Ambon Coal Power Plant</li> </ol>
11	22 Juni 2017 June 22, 2017	Kuorum Quorum	92%	Sofyan Basir, Supangkat Iwan Santoso, Nicke Widyawati, Muhamad Ali, Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Nasri Sebayang, Amin Subekti, Djoko R. Abumanan, Machnizon, Haryanto W.S	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan arah portofolio PLN oleh PWC</li> <li>2. Penugasan Indonesia Power untuk mengembangkan pembangkit di Sorong</li> <li>3. Pembahasan tentang Pendanaan PLTA Peusangan</li> <li>4. Utilisasi FSRU max</li> <li>5. Pasokan batubara untuk PLTU Mulut Tambang</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Approval of PLN portfolio direction by PWC</li> <li>2. Assignment of Indonesia Power to develop power plant in Sorong</li> <li>3. Discussion on Hydro Power Plant Peusangan Funding</li> <li>4. Utilization of FSRU max</li> <li>5. Coal supply for Mine Mouth Coal Power Plant</li> </ol>
12	13 Juli 2017 July 13, 2017	Kuorum Quorum	100%	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Supangkat Iwan Santoso, Nicke Widyawati, Muhamad Ali, Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Nasri Sebayang, Amin Subekti, Djoko R. Abumanan, Machnizon, Haryanto W.S	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Progres Proyek CNG Marine Gresik-Lombok</li> <li>2. Progres Proyek PLTA <i>Upper</i> Cisokan</li> <li>3. <i>Shipyards Survey</i> FSRU Gorontalo</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Progress of CNG Marine Gresik-Lombok Project</li> <li>2. Progress of Hydro Power Plant Upper Cisokan Project</li> <li>3. <i>Shipyards Survey</i> FSRU Gorontalo</li> </ol>

## Direksi

Board of Directors

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Direksi   Board of Directors' Attendance		Uraian Description	Agenda Rapat Meeting Agenda
		Kehadiran Direksi Attendance			
13	14 September 2017 14, 2017	Kuorum Quorum	77%	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Nicke Widyawati, Syofvi F. Roekman, Muhamad Ali, Amir Rosidin, Djoko R Abumanan, Haryanto W.S, Syamsul Huda, Ahmad Rofik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implikasi Organisasi dari Manajemen Portofolio PLN oleh PWC</li> <li>2. Pengoperasian PLTG Bekasi Power</li> <li>3. Persetujuan Penunjukan Langsung pekerjaan Under Ground Cable (UGC) Simpang Tugu Ngurah Rai Bali</li> <li>4. Prognosa kinerja sampai akhir tahun</li> <li>5. Skema Bisnis kemitraan untuk Pengembangan WKP Panas Bumi milik PLN</li> <li>6. Tarif Kereta Cepat Indonesia – China</li> </ol>
14	14 November 2017 14, 2017	Kuorum Quorum	77%	Sarwono Sudarto, Syofvi F. Roekman, Muhamad Ali, Amir Rosidin, Djoko R Abumanan, Machnizon, Haryanto W.S, Wiluyo Kusdwiarto, Syamsul Huda, Ahmad Rofik	<p>Mendorong Pemanfaatan Listrik yang lebih Nyaman dan Produktif Melalui Pengelompokan Daya Tersambung   Encouraging a More Convenient and Productive Electricity Through Connected Power Groupings</p>

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Kehadiran Direksi   Board of Directors' Attendance		Uraian Description	Agenda Rapat Meeting Agenda
		Kehadiran Direksi Attendance			
15	30 November 2017 November 30, 2017	Kuorum Quorum	100%	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Syofvi F. Roekman, Supangkat Iwan Santoso, Muhamad Ali, Amir Rosidin, Djoko R Abumanan, Machnizon, Haryanto W.S, Wiluyo Kusdwiarto, Syamsul Huda, Ahmad Rofik	1. Rencana akuisisi tambang batubara 2. Vessel CNG 3. Perubahan harga gas Medco untuk IPP Gunung Megang di Sumsel 4. Update rencana FSRU untuk di Jawa  1. Coal mining acquisition plan 2. CNG Vessel 3. Medco price change for IPP Gunung Megang in South Sumatera 4. Update the FSRU plan for Java

\*) Sejak 24 Juli 2017, Ibu Syofvi F Roekman, Bpk. Syamsul Huda, Bpk. Wiluyo Kusdwiarto dan Bpk. Ahmad Rofik diangkat sebagai Direktur

\*\*) Sejak 24 Juli 2017, Bpk. Murtaqi Syamsuddin, Bpk. Nasri Sebayang dan Bpk. Amin Subekti diberhentikan dengan Hormat sebagai Direktur

\*\*\*) Sejak 27 November 2017, Ibu Nicke Widyawati diberhentikan dengan Hormat sebagai Direktur

\*) Since July 24, 2017, Mrs. Syofvi F Roekman, Mr. Syamsul Huda, Mr. Wiluyo Kusdwiarto, and Mr. Ahmad Rofik are appointed as Directors.

\*\*) Since July 24, 2017, Mr. Murtaqi Syamsuddin, Mr. Nasri Sebayang, and Mr. Amin Subekti are dismissed honorably as Directors

\*\*\*) Since November 27, 2017, Mrs. Nicke Widyawati is dismissed honorably as Director

## ASESMEN TERHADAP DIREKSI

### Prosedur, Kriteria dan Pelaksana Asesmen

Pihak yang melakukan asesmen terhadap kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris dengan dukungan Komite Dewan Komisaris Audit. Hasil asesmen kemudian menjadi catatan untuk dibahas dalam RUPS dan menjadi dasar bagi perpanjangan maupun perubahan posisi tugas Direktur di jajaran Direksi.

Dasar penilaian dalam pelaksanaan asesmen kinerja Direksi adalah *Key Performance Indicators* Direksi/ *Key Performance Indicators* Korporat yang ditetapkan bersama-sama dengan Dewan Komisaris pada awal periode kepengurusan. *Key Performance Indicators* tersebut pada dasarnya adalah besaran kualitatif maupun kuantitatif dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang menjadi tujuan penyusunan dan pelaksanaan anggaran kegiatan.

## ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

### Procedures, Criteria, and Implementation of Assessment

The Board of Commissioners with the support of the Audit Committee performed the assessment on the performance of the Board of Directors. The results of the assessment shall then become a record to be discussed in the GMS and shall become the basis for the extension or change of the Director's position of duties in the Board of Directors.

The basis for the evaluation of the performance of the Directors' performance assessment is the Key Performance Indicators of the Board of Directors/Key Performance Indicators of the Corporation, which is established jointly with the Board of Commissioners at the beginning of the management period. Key Performance Indicators are basically qualitative and quantitative quantities of the Company's Work and Budget Plan, which are the objectives of the preparation and implementation of the activity budget.

## Direksi

Board of Directors

Pihak yang menjadi penilai dari capaian Key Performance Indicators Direksi adalah RUPS. Melalui RUPS, Direksi bersama Komisaris mempertanggungjawabkan raihan kinerja Key Performance Indicators korporat pada tahun operasional. Dalam pertanggung jawaban tersebut, Direksi harus mampu menjabarkan kaitan raihan Key Performance Indicators dengan kondisi lapangan dan respon operasional yang dijalankan oleh Direksi. Adapun Dewan Komisaris memberi penjelasan dan mempertanggungjawabkan aspek pengawasan dan penasehatan yang telah dilaksanakan selama tahun operasional.

GMS assesses the achievement of Directors' Key Performance Indicators. Through the GMS, the Board of Directors together with the Board of Commissioners shall be responsible for the achievement of Key Performance Indicators corporate performance in the operational year. In such accountability, the Board of Directors shall be able to explain the Key Performance Indicators relationship to field conditions and operational responses carried out by the Board of Directors. The Board of Commissioners provides explanation and accountability of the supervision and advisory aspects that have been implemented during the operational year.

## KEY PERFORMANCE INDICATORS DIREKSI

Mengacu pada Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN (Persero) No. RIS-025/D2.MBU/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2017, maka penilaian Tingkat Kesehatan PT PLN (Persero) terhitung tahun 2012, mencakup 5 perspektif Key Performance Indicators berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) sesuai Kontrak Manajemen yang meliputi perspektif Fokus pelanggan, efektivitas produk dan proses, Fokus Tenaga Kerja, Keuangan dan Pasar, Kepemimpinan dan Tatakelola.

Evaluasi atas pencapaian kinerja perusahaan dilakukan oleh Satuan Pengendalian Kinerja Korporat.

Adapun pencapaian kinerja Perusahaan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Perspektif	Nilai   Score	Perspective
Fokus Pelanggan	21,88	Customer Focus
Efektivitas Produk dan Proses	24,18	Products and Process Effectiveness
Fokus Tenaga Kerja	11,00	Employment Focus
Keuangan dan Pasar	20,58	Finance and Market
Kepemimpinan dan Tata Kelola	18,97	Leadership and Governance
<b>Total</b>	<b>96,61</b>	<b>Total</b>

Adapun gambaran Key Performance Indicators Direksi/Korporat untuk tahun 2017 selengkapnya adalah sebagai berikut:

## BOARD OF DIRECTORS' KEY PERFORMANCE INDICATORS

Referring to the Minutes of General Meeting of Shareholders (GMS) of PT PLN (Persero) No. RIS-025/D2.MBU/12/2016 dated December 23, 2016 on Ratification of Corporate Work and Budget Plan 2017, the rating of Health Assessment of PT PLN (Persero) as of 2012 includes 5 Key Performance Indicators, based on Criteria of Superior Performance Evaluation (KPKU), in accordance with Contract Management, which includes Perspective Focus, effectiveness of products and processes, Focus of Labor, Finance and Markets, Leadership and Governance.

Corporate Performance Control Unit evaluates the achievement of the Company's performance.

The achievement of the Company's performance in 2017 is as follows:

The full description of the Key Performance Indicators of Directors/Corporations for 2017 is as follows:

Direksi  
Board of Directors

No.	Perspektif Perspective	Satuan Unit	Bobot Weight	Target	Realisasi	Pencapaian	Nilai Score
				a	b	b/a	
<b>1</b>	<b>Fokus Pelanggan   Customer Focus</b>						<b>21.88</b>
1.1	Rasio Elektrifikasi PLN   PLN Electrification Ratio	%	6	90.30	93.03	103.02%	6.00
1.2	Penjualan Tenaga Listrik Pelanggan Non Subsidi   Electricity Sales of Non Subsidy Customers						
a	Pelanggan Rumah Tangga   Household Customers	TWh	4	65.60	64.45	98.25%	3.93
b	Pelanggan Non Rumah Tangga   Non Household Customers	TWh	6	109.90	108.97	99.15%	5.95
1.3	Kehandalan Jaringan   System Reliability						
a	System Average Interruption Duration Index (SAIDI)	Menit/Plgn Minute/ Customer	3	1,200	1,160	103.33%	3.00
b	System Average Interruption Frequency Index (SAIFI)	Kali/Plgn Time/ Customer	3	13.00	12.65	102.69%	3.00
<b>2</b>	<b>Efektivitas Produk dan Proses   Products and Process Effectiveness</b>						<b>24.18</b>
2.1	Penambahan Kapasitas Infrastruktur Tenaga Listrik   Additional of Electricity Infrastructure						
a	Penambahan Kapasitas Pembangkit   Additional of Power Plant Capacity	GW	3	2.60	2.13	81.76%	2.45
b	Penambahan Kapasitas Transmisi   Additional of Transmission Line	Kms   Kmc	3	8,594	4,601	53.54%	1.61
c	Penambahan Kapasitas Gardu Induk   Additional of Substation Capacity	MVA	3	14,280	16,240	113.73%	3.00
2.2	Plant Capacity Utilization Rate Pembangkit PLN   PLN Power Plant Capacity Utilization Rate						
a	Power Plant Baseload	%	4	62.00	65.35	105.40%	4.00
b	Power Plant Peaker	%	4	36.00	36.13	100.36%	4.00
2.3	Energy Mix	%	4	100.00	92.45	92.45%	3.70
a	BBM   Oil			5.80	6.00	96.56%	
b	Batubara   Coal			56.90	58.14	102.17%	
c	Gas   Gas			25.30	23.33	92.21%	
d	Panas Bumi   Geothermal			4.50	4.98	110.58%	
e	Air   Hydro			7.00	7.32	104.52%	
f	Lainnya   Others			0.50	0.24	48.65%	
2.4	Susut Jaringan   Network Losses	%	3	9.12	8.75	103.98%	3.00
2.5	Jumlah PPA IPP yang ditandatangani   Total of PPA IPP Signed	MW	3	12,710	10,251	80.65%	2.42
<b>3</b>	<b>Fokus Tenaga Kerja   Employment Focus</b>						<b>11.00</b>
3.1	Human Capital Readiness	Level	4	4.00	4.17	104.25%	4.00
3.2	Organization Capital Readiness	Level	4	4.00	4.21	105.25%	4.00
3.3	Produktifitas Pegawai   Employee Productivity	MWh/Pegawai MWH/ Employee	3	4,625	4,799	103.77%	3.00
<b>4</b>	<b>Keuangan dan Pasar   Finance and Market</b>						<b>20.58</b>
4.1	Biaya Pokok Penyediaan   Cost of Supply	Rp/kWh	5	1,350	1,318	102.39%	5.00
4.2	EBITDA Margin	%	4	19.13	18.80	98.27%	3.93
4.3	CICR	kali   times	4	2.00	3.19	159.50%	4.00
4.4	Pencapaian Investasi   Investment Achievement	Rp Trilyun	6	85.00	84.83	99.80%	5.99
4.5	Realisasi Penyerapan dana PMN   Realization of State Injection Fund	%	2	85.00	70.68	83.15%	1.66
<b>5</b>	<b>Kepemimpinan dan Tata Kelola   Leadership and Governance</b>						<b>18.97</b>
5.1	Pencapaian Skor KPKU   KPKU Score Achievement	Skor   Score	4	615.00	665.50	108.21%	4.00
5.2	Pencapaian GCG   GCG Score Achievement	Skor   Score	3	85.00	87.40	102.82%	3.00
5.3	Pemenuhan Portal BUMN   SOEs Portal Compliance	%	3	100.00	100.00	100.00%	3.00
5.4	Penyelesaian temuan auditor (BPK, KAP, SPI dan Auditor Lainnya)   Completion of auditor findings (Public Accounting Firm, Internal Audit and Other Auditors)	%	3	100.00	100.00	100.00%	3.00
5.5	Program PMN   State Injection Program						
a	Pelaksanaan Program Pendanaan PMN   State Injection Fund Implementation Program	%	2	100.00	98.56	98.56%	1.97
b	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Realisasi Program Penggunaan dana PMN   Timeliness of Program Realization Report Delivery Use of PMN funds	%	2	100.00	100.00	100.00%	2.00
5.6	Implementasi Enterprise Resource Planning (ERP)   Enterprise Resource Planning Implementation	%	2	100.00	100.00	100.00%	2.00
<b>Jumlah   Total</b>			<b>100.00</b>				<b>96.61</b>

## KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

### Committees Reporting Directly to the Board of Directors

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab operasional, PLN telah membentuk komite di bawah Direksi yang beranggotakan Direktur-Direktur. Komite Direktur dibagi menjadi 8 Komite, dengan ruang lingkup Komite dan keanggotaan Direktur sebagai berikut:

In order to support effectiveness in performing operational duties and responsibilities, PLN has formed committees under the Board of Directors, with the Directors as members. There are 8 Committees of the Board of Directors, with the scope and membership as follow:

Komite Direktur Directors' Committee	Ruang Lingkup Pembahasan Scope of Discussion	Keanggotaan Direktur Membership
Komite IPP dan Kerjasama Kemitraan IPP Committee and Partnership Cooperation	Pembelian Tenaga Listrik dari IPP, Excess Power, Kemitraan dan Kerjasama Komersial lainnya   Purchasing Power Plant from IPP, Excess Power, Partnership, and other Commercial Cooperation	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Utama</li> <li>2. Direktur Perencanaan Korporat</li> <li>3. Direktur Pengadaan</li> <li>4. Direktur Keuangan</li> <li>5. Direktur Regional terkait</li> </ol>
Komite energi Primer Primary energy committee	Pengadaan Gas, Batubara, BBM, Uap Panas Bumi dan Air   Procurement of Gas, Coal, Fuel, Geothermal, and Hydro	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. President Director</li> <li>2. Director of Corporate Planning</li> <li>3. Director of Procurement</li> <li>4. Director of Finance</li> <li>5. Director of Related Regions</li> </ol>
Komite Investasi dan Pendanaan Investment and Financing Committee	Proyek Pembangkit Baru, Pembangkit Existing, Repowering, Refurbishment dan Konversi   New Generation Project, Existing Power Plant, Repowering, Refurbishment, and Conversion	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. President Director</li> <li>2. Director of Corporate Planning</li> <li>3. Director of Procurement</li> <li>4. Director of Finance</li> <li>5. Director of Related Regions</li> </ol>
Komite Niaga Commerce Committee	Mekanisme dan Aspek Komersial Transaksi Tenaga Listrik Khusus, Tarif Tenaga Listrik, Subsidi serta Aspek Komersial Lainnya   Mechanisms and Commercial Aspects of Electric Power Special Transactions, Electric Power Rates, Subsidies, and Other Commercial Aspects	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Utama</li> <li>2. Direktur Perencanaan Korporat</li> <li>3. Direktur Keuangan</li> <li>4. Direktur Regional terkait</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. President Director</li> <li>2. Director of Corporate Planning</li> <li>3. Director of Finance</li> <li>4. Director of Related Regions</li> </ol>

## Komite-Komite di Bawah Direksi

Committees Reporting Directly to the Board of Directors

Komite Direktur Directors' Committee	Ruang Lingkup Pembahasan Scope of Discussion	Keanggotaan Direktur Membership
Komite SDM dan Organisasi HR and Organization Committee	Sistem SDM, Remunerasi, Suksesi Manajerial Unit Bisnis dan AP/Afiliasi, Perubahan Organisasi, Pengembangan/ Penyederhanaan Organisasi   HR System, Remuneration, Managerial Business Unit Succession, and AP/Affiliate, Organizational Change, Organizational Development/ Simplification	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Utama</li> <li>2. Direktur Human Capital Management</li> <li>3. Direktur Keuangan</li> <li>4. Direktur Regional terkait Direktur</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. President Director</li> <li>2. Director of Human Capital Management</li> <li>3. Director of Finance</li> <li>4. Director of Related Regions</li> </ol>
Komite Anak Perusahaan dan Afiliasi Subsidiaries and Affiliates Committee	Pembentukan AP, Akuisisi Perusahaan menjadi AP, Penyertaan atau Pelepasan Modal pada AP/ Afiliasi, Penggabungan, Pemisahan, Peleburan dan Pembubaran AP/Afiliasi, Pembentukan Yayasan, Pembebanan Biaya Perseroan yang bersifat tetap untuk Yayasan/Organisasi Perkumpulan.   Subsidiaries formation, Company Acquisitions into Subsidiaries, Subscription or Waiver Capital of Subsidiaries/Affiliates, Merger, Separation, Dissolution, and Liquidation of Subsidiaries/ Affiliates, Formation of Foundation, Charging the Company that is fixed to the Foundation/Society Organization.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Utama</li> <li>2. Direktur Perencanaan Korporat</li> <li>3. Direktur Human Capital Management</li> <li>4. Direktur Keuangan</li> <li>5. Direktur Regional terkait</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. President Director</li> <li>2. Director of Corporate Planning</li> <li>3. Director of Human Capital Management</li> <li>4. Director of Finance</li> <li>5. Director of Related Regions</li> </ol>
Komite Penghapusan dan Pelepasan Aset Committee on the Elimination and Disposal of Assets	Penghapusan ATTB, PRR, Piutang Macet, persediaan atau Material, Pelepasan dan Penghapusan Aktiva Tetap (kecuali Aktiva Beroperasi) dengan Umur Ekonomis s/d 5 tahun.   Elimination of ATTB, PRR, Loss Accounts Receivable, Inventory or Materials, Discharge and Elimination of Fixed Assets (except Operating Assets) with Economical Age up to 5 years.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Utama</li> <li>2. Direktur Keuangan</li> <li>3. Direktur Human Capital Management</li> <li>4. Direktur Regional terkait</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. President Director</li> <li>2. Director of Finance</li> <li>3. Director of Human Capital Management</li> <li>4. Director of Related Regions</li> </ol>
Komite Operasional Operating Committee	Sewa Pembangkit, Transmisi, Distribusi, Sistem Grid Code dan Sistem Operasional Tenaga Listrik Lainnya.   Lease of Power Plant, Transmission, Distribution, System Grid Code, and Other Electricity Operating Systems.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Utama</li> <li>2. Direktur Keuangan</li> <li>3. Direktur Perencanaan Korporat</li> <li>4. Direktur Regional terkait</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. President Director</li> <li>2. Director of Finance</li> <li>3. Director of Corporate Planning</li> <li>4. Director of Related Regions</li> </ol>

## Komite-Komite di Bawah Direksi

Committees Reporting Directly to the Board of Directors

### PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Komite Direksi merupakan Komite yang dibentuk dan beranggotakan Direksi. Komite Direksi sebagai sarana pengambilan Keputusan didasarkan atas batasan kewenangan pengambilan keputusan yang diatur dalam Keputusan Direksi No. 304.K/DIR/2009 dan perubahannya yang dalam pelaksanaannya seluruh Keputusan yang diambil dalam Komite Direksi diangkat kembali dalam Rapat Direksi dan menjadi keputusan Rapat Direksi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Direksi memandang bahwa kinerja komite di bawah Direksi telah berjalan dengan efektif. Komite-Komite telah memberikan masukan yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Direksi dalam mengambil keputusan dan kebijakan strategi pengembangan usaha Perusahaan.

### PERFORMANCE ASSESSMENT FOR COMMITTEE REPORTING DIRECTLY TO BOARD OF DIRECTORS

The Directors' Committee is a committee established and consisted of the Board of Directors. The Committee of the Board of Directors is a means of decision-making, based on the limits of decision-making authority regulated in the Board of Directors' Decree No. 304.K/DIR/2009 and its amendments, in which all Decisions made in the Committee of the Board of Directors to be discussed again during the Board of Directors' Meeting and shall be a Decree of the Board of Directors.

Based on these considerations, the Board of Directors deem that the committee of the Board of Directors has performed effectively. The Committees have provided valuable advice and recommendations to be considered by the Board of Directors in decisions making and business strategy policies formulation.

## KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

### Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors Composition

#### KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Mengingat bidang usaha PLN merupakan salah satu bidang usaha strategis dalam mendukung pertumbuhan perekonomian dengan posisi kegiatan operasional berada di seluruh wilayah Indonesia serta fasilitas distribusi meliputi area publik, komposisi personalia Dewan Komisaris PLN dibentuk dengan memperhitungkan latar belakang kompetensi yang beragam, namun dapat saling melengkapi, sehingga membentuk satu lembaga dengan kompetensi menyatu dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS, disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan dengan memperhatikan visi, misi dan rencana strategis pengembangan PLN agar dimungkinkan terlaksananya pengawasan yang efektif dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat serta independen.

Keberagaman keahlian dan pengalaman anggota Dewan Komisaris mencakup beberapa bidang diantaranya bidang ekonomi/keuangan, hukum, dan kelistrikan.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris terlihat pada tabel di bawah ini :

#### DIVERSITY IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Given that the field of PLN's business is one of the strategic business areas in supporting the economic growth by locating operational activities in all regions of Indonesia, the composition of the Board of Commissioners of PLN was established, by taking into account the diversity in competence background. Thus, the members complement each other, and are able to form a single body with united competencies to perform supervisory duties.

The number and composition of the Board of Commissioners have been set by the GMS, in accordance with the Articles of Association, and in consideration of the vision, mission, and strategic development plan of PLN in order to perform effective monitoring, and fast, precise, and independent decision making.

The diversity of expertise and experience of members of the Board of Commissioners covers several areas such as economics/finance, law, and electricity.

The diversity of the composition of the Board of Commissioners is shown in the table below:

Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Usia Per 31 Desember 2017 Age as of December 31, 2017	Pendidikan Terakhir Last Education			Keahlian Expertise		
			S1 Bachelor	S2 Magister	S3 Doctor	Ekonomi/ Keuangan Economic/ Finance	Hukum Law	Kelistrikan Electricity
Hasan Bisri	Laki- Laki   Male	60 Tahun   years		√		√		
Darmono	Laki- Laki   Male	64 Tahun   years			√		√	
Oegroseno	Laki- Laki   Male	61 Tahun   years	√				√	
Harry Susetyo Nugroho	Laki- Laki   Male	62 Tahun   years		√		√		
Budiman	Laki- Laki   Male	61 Tahun   years	√				√	
Aloysius Kiik Ro	Laki- Laki   Male	56 Tahun   years			√	√		
Rionald Silaban	Laki- Laki   Male	51 Tahun   years		√			√	
Andy Noorsaman Sommeng	Laki- Laki   Male	58 Tahun   years			√			√
Ilya Avianti	Perempuan Female	58 Tahun   years			√		√	

## Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris & Direksi

Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors Composition

### KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

Keberagaman Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan dari segi organ Direksi secara keseluruhan maupun secara individu masing-masing calon anggota Direksi sesuai dengan kebutuhan pengembangan Perseroan. Kombinasi tersebut ditetapkan melalui pertimbangan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mendukung pencapaian tujuan Perseroan. Dengan cara tersebut Perseroan memastikan kombinasi karakteristik maupun keahlian dari masing-masing anggota Direksi membentuk suatu kesatuan yang akan berdampak pada ketetapan dan kecepatan pengambilan keputusan pengelolaan oleh Direksi yang selalu bertanggung jawab secara kolegal.

Dalam menentukan komposisi Direksi, Perseroan senantiasa mempertimbangkan aspek keahlian tertentu untuk jabatan dan tugas strategis, secara garis besar Perseroan telah membagi tugas direksi ke dalam dua bagian besar, yaitu tugas-tugas korporasi yang dilakukan oleh Direktur yang membidangi keuangan, perencanaan, pengadaan, dan sumber daya manusia. Sedangkan, tugas-tugas operasional dilakukan oleh Direktur Bisnis Regional yang terbagi dalam 7 regional, yaitu Bisnis Regional Sumatera, Bisnis Regional Jawa Bagian Barat, Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah, Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Bisnis Regional Kalimantan, Bisnis Regional Sulawesi, dan Bisnis Regional Maluku & Papua.

**Seluruh anggota Direksi yang saat ini menjabat, telah memenuhi komposisi dan keberagaman keahlian kolegal maupun individu yang dipersyaratkan agar kepemimpinan Perusahaan berlangsung profesional, efektif, dan akuntabel agar dapat menjalankan tugas yang diberikan dengan optimal dan mampu memenuhi harapan para pemangku kepentingan.**

The current members of the Board of Directors have satisfied the composition and regional expertise on both collegial and individual levels. Thus, this ensures that the Company's management is professional, effective, and accountable to ensure optimum execution of duties and satisfy shareholder demands.

Keberagaman keahlian dan pengalaman anggota Direksi mencakup beberapa bidang diantaranya bidang ekonomi/keuangan, hukum, dan kelistrikan.

### DIVERSITY IN COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Diversity on the Board of Directors is a desired combination of the directorial organ collectively or individually. Every member of the Board of Directors contributes to the Company's growth. The combination is a considered as mixture of expertise, knowledge, and experience, in line with the delegation of duties and functions of the Director to fulfill the Company's objectives. By using such methods, the Company has ensured a characteristic combination of expertise of each Director to form a cohesive unit capable of taking swift, accurate and collegially responsible business decisions.

In arranging the composition of the Board of Directors, the Company always considers certain expertise for strategic offices and duties. In general, directorship in the Company falls into two major areas, i.e. corporate duties conducted by the Directors of Finance, Planning, Procurement, and Human Resources. Operational duties are performed by the Directors of Regional Businesses, covering 7 regions, i.e. Sumatera, West Java, Central Java, East Java, Bali and Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, and Maluku and Papua.

The diversity of expertise and experience of members of the Board of Directors covers several areas such as economics/finance, law, and electricity.

## Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris & Direksi Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors Composition

Keberagaman komposisi Direksi terlihat pada tabel di bawah ini :

The diversity of the composition of the Board of Directors is shown in the table below:

Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Usia Per 31 Desember 2017 Age as of December 31, 2017	Pendidikan Terakhir Last Education			Keahlian Expertise		
			S1 Bachelor	S2 Magister	S3 Doctor	Ekonomi/ Keuangan Economic/ Finance	Hukum Law	Kelistrikan Electricity
Sofyan Basir	Laki-Laki   Male	59 Tahun   years			√	√		
Sarwono Sudarto	Laki-Laki   Male	65 Tahun   years			√	√		
Muhamad Ali	Laki-Laki   Male	56 Tahun   years	√				√	
Supangkat Iwan Santoso	Laki-Laki   Male	59 Tahun   years		√				√
Amir Rosidin	Laki-Laki   Male	58 Tahun   years		√				√
Haryanto WS	Laki-Laki   Male	58 Tahun   years		√				√
Djoko R Abumanan	Laki-Laki   Male	57 Tahun   years		√				√
Machnizon	Laki-Laki   Male	50 Tahun   years		√				√
Syamsul Huda	Laki-Laki   Male	50 Tahun   years		√				√
Ahmad Rofik	Laki-Laki   Male	50 Tahun   years	√					√
Syofvi Felienty Roekman	Perempuan   Male	46 Tahun   years		√				√
Wiluyo Kusdwiarto	Laki-Laki   Male	46 Tahun   years	√					√

## HUBUNGAN KELUARGA, HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Dalam rangka menjaga independensi, menghindarkan adanya benturan kepentingan dan menjaga akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan dan dalam penyelenggaraan kegiatan operasional, PLN memiliki aturan melarang adanya hubungan afiliasi maupun hubungan keluarga langsung maupun tidak langsung antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Aturan tersebut dipegang teguh, sehingga tidak terdapat hubungan keluarga di antara sesama anggota Dewan Komisaris, sesama anggota Direksi, dan di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Demikian juga tidak ada hubungan bisnis di antara sesama anggota Dewan Komisaris, sesama anggota Direksi, di antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi dengan PLN.

## FAMILY RELATIONSHIPS AND AFFILIATIONS BETWEEN MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, AND CONTROLLING SHAREHOLDERS

In order to maintain independence, to avoid conflict of interest, and to ensure accountability in decision-making and in the operations, PLN has a regulation that prohibits an affiliation or family relationship, directly or indirectly, between the members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and Major and/or Controlling Shareholders.

The rules are adhered to. Thus, there are no familial relationships between fellow members of the Board of Commissioners, fellow members of the Board of Directors, and between members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. Likewise, there is no business relationship between fellow members of the Board of Commissioners, fellow members of the Board of Directors, and members of the Board of Commissioners/ Board of Directors.

## Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris & Direksi

Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors Composition

Keterangan Description	Hubungan Keluarga Dengan Familial Relationship with						Hubungan Afiliasi Dengan Affiliation with					
	Dewan Komisaris Board of Commissioner		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioner		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
<b>Dewan Komisaris   Board of Commissioner</b>												
Hasan Bisri		√		√		√		√		√		√
Oegroseno		√		√		√		√		√		√
Darmono		√		√		√		√		√		√
Budiman		√		√		√		√		√		√
Harry Susetyo Nugroho		√		√		√		√		√		√
Aloysius K. Ro		√		√		√		√		√		√
Rionald Silaban		√		√		√		√		√		√
Andy Noorsaman Sommeng		√		√		√		√		√		√
Ilya Avianti		√		√		√		√		√		√
<b>Direksi   Board of Directors</b>												
Sofyan Basir		√		√		√		√		√		√
Syofvi Felienty Roekman		√		√		√		√		√		√
Supangkat Iwan Santoso		√		√		√		√		√		√
Sarwono Sudarto		√		√		√		√		√		√
Muhammad Ali		√		√		√		√		√		√
Haryanto WS		√		√		√		√		√		√
Amir Rosidin		√		√		√		√		√		√
Djoko Rahardjo Abuman		√		√		√		√		√		√
Wiluyo Kusdiharto		√		√		√		√		√		√
Machnizon		√		√		√		√		√		√
Syamsul Huda		√		√		√		√		√		√
Ahmad Rofik		√		√		√		√		√		√

## SEKRETARIS PERUSAHAAN

### Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan merupakan *liaison officer* yang menjembatani kepentingan antara Perusahaan dengan pihak eksternal, serta memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

The Corporate Secretary is a liaison officer who bridges the interests of the Company with external parties, and ensures the Company's compliance with laws and regulations in the Capital Market.

**Sekretaris Perusahaan PLN berada di bawah Direktur Utama, serta diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi dengan dasar mekanisme internal yang disetujui oleh Dewan Komisaris.**

PLN's Corporate Secretary is responsible to the President Director, and appointed and dismissed based on the Decision of the Board of Directors on the basis of internal mechanism approved by the Board of Commissioners.

### STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0078.P/DIR/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero), Sekretariat Perusahaan berada di bawah Direktur Utama dengan struktur sebagai berikut.

### CORPORATE SECRETARY ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Based on Directors' Regulation of PT PLN (Persero) No. 0078.P/DIR/2017 on the Organization and Administration of PT PLN (Persero), the Corporate Secretariat is reporting directly to the President Director with the following structure.



### DASAR HUKUM PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

### LEGAL BASIS OF APPOINTMENT OF THE CORPORATE SECRETARY

The requirements and procedures for the appointment of the Corporate Secretary refer to the State Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 on Good Corporate Governance Implementation, and Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 on Corporate Secretary of Issuer or Public Listed Companies.

## Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

### Alur Pengangkatan/ Pemberhentian Sekretaris Perusahaan



### Flow of Appointment/Dismissal of Corporate Secretary

## PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

## PROFILE OF THE CORPORATE SECRETARY



<b>Nama   Name</b>	Bambang Dwiyanto
<b>Usia   Age</b>	51 tahun per 31 Desember 2017   51 years, as of December 31, 2017
<b>Kewarganegaraan   Citizenship</b>	Indonesia
<b>Riwayat Pendidikan   History of Education</b>	S1 Jurusan Komunikasi, Universitas Gajah Mada   Bachelor of Communication, Gadjah Mada University
<b>Riwayat Jabatan   History of Position</b>	
<b>Dasar Hukum Penunjukan   Legal Basis of Appointment</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT PLN (Persero) tanggal 30 Desember 2017</li> <li>Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 3210.K/SDM.00.03/DIR/2016 tanggal 30 Desember 2016</li> <li>Board of Commissioners' Circular Decisions of PT PLN (Persero) dated December 30, 2017</li> <li>Directors' Decree of PT PLN (Persero) No. 3210.K/SDM.00.03/DIR/2016 dated December 30, 2016</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja   Working Experience</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asisten Manajer Hubungan Eksternal PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2009-2010)</li> <li>Manajer Senior Komunikasi KORPORAT PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2010-2015)</li> <li>Manajer Senior Stakeholder Management PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2015-2016)</li> <li>Assistant Manager of External Relations of PT PLN (Persero) Head Office (2009-2010)</li> <li>Senior Manager of Corporate Communication of PT PLN (Persero) Head Office (2010-2015)</li> <li>Senior Manager of Stakeholder Management of PT PLN (Persero) Head Office (2015-2016)</li> </ul>

Sekretaris Perusahaan  
Corporate Secretary

<b>Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi  </b> Education and Training for Competence Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Undangan workshop terkait Penerapan Sistem Pernyataan Pendaftaran atau Aksi Korporasi Secara Elektronik (E-Registration)   Workshop related to Application of Registration Statement System or Electronic Corporate Actions (E-Registration)</li> <li>· Seminar Sekuritisasi se BUMN   Seminar SOEs Securitization</li> <li>· Workshop Pengelolaan Ekosistem Mangrove berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat   Sustainable Mangrove Ecosystem Management Workshop for community welfare</li> <li>· Seminar Nasional Outlook Industri 2018   Seminar of Industry National Outlook 2018</li> <li>· Panelis National Infrastructure Conference 2017 dalam rangka HUT Sewindu PT Penjamin Infrastruktur Indonesia   Panelist of National Infrastructure Conference 2017 in the framework of 8th Anniversary of PT Penjamin Infrastruktur Indonesia</li> </ul>
--	--

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan tercantum dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0078.P/DIR/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero). Tugas dan Tanggung jawab utama Sekretaris Perusahaan PLN, yakni:

1. Memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan serta strategi hubungan dengan investor, menyediakan informasi pasar modal, dan memastikan Perusahaan memenuhi ketentuan regulasi pasar modal.
2. Memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan serta strategi pengelolaan tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), memastikan Perusahaan memiliki perangkat dan pedoman GCG serta melakukan pemantauan dan implementasi GCG.
3. Memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan serta strategi pengelolaan kesekretariatan Perusahaan, termasuk di dalamnya protokoler dan integrasi kegiatan Direksi, Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan *stakeholder* lainnya.
4. Memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan serta strategi pengelolaan hubungan kelembagaan, termasuk di dalamnya hubungan dengan lembaga-lembaga Negara, dan hubungan dengan pembuat kebijakan ketenagalistrikan.
5. Memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tersedianya informasi Perusahaan yang dapat diakses oleh *stakeholder*, melalui tetapi tidak terbatas pada media elektronik, media cetak, dan media audio visual.

## DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CORPORATE SECRETARY

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary are listed in the PT PLN (Persero) Board of Directors' Regulation No. 0078.P/DIR/2017 on Organization and Work Procedures of PT PLN (Persero). The main duties and responsibilities of PLN's Corporate Secretary are:

1. Ensuring planning, implementation, and evaluation of policies and investor relations strategy, providing stock market information, and ensuring that the Company complies with capital market regulations.
2. Ensuring the planning, implementation, and evaluation of policies and strategies for the management of good corporate governance (GCG), ensuring the Company has the tools and guidelines for good corporate governance, and monitoring and implementing GCG.
3. Ensuring the planning, implementation, and evaluation of policies and strategies for Company's secretarial management, including protocol and integration activities of the Board of Directors, the Board of Commissioners, the General Meeting of Shareholders (GMS), and other stakeholders.
4. Ensuring the planning, implementation, and evaluation of policy and management strategies on institutional relationships, including relationships with state institutions, and the relationship with electricity policymakers.
5. Ensuring the planning, implementation, and evaluation of the availability of corporate information that can be accessed by stakeholders, though, but not limited to, electronic media, printed media, and audio-visual media.

## Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

- |   |  |
|---|--|
| <p>6. Memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tersedianya informasi dan laporan manajemen, laporan tahunan, laporan statistik Perusahaan, serta laporan Perusahaan lainnya.</p> | <p>6. Ensuring the planning, implementation, and evaluation of the availability of information and the Management Report, Annual Reports, Company Statistics, and other Company reports.</p> |
|---|--|

### PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2017

Selama tahun 2017, Sekretaris Perusahaan melaksanakan tugas antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan RUPS Tahun Buku 2016 dan melakukan dokumentasi risalah rapat, akta RUPS, dan hal lainnya berkaitan dengan pelaksanaan RUPS.
2. Membuat Risalah Rapat Direksi, kemudian mendokumentasikan Risalah Rapat.
3. Menyusun Laporan Manajemen, Laporan Statistik, Laporan Tahunan/ *Annual Report*, dan Laporan Keberlanjutan/*Sustainability Report*.
4. Terkait *Good Corporate Governance*:
  - a. Melaksanakan *Good Corporate Governance Assessment* berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang GCG di BUMN;
  - b. Melaksanakan penilaian penilaian *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*.
5. Terkait Hubungan Investor:
  - a. Melaporkan kepada Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk setiap informasi yang material;

### IMPLEMENTATION OF THE TASKS OF THE CORPORATE SECRETARY IN 2017

During 2017, the Corporate Secretary performs the following tasks:

1. Held the General Meeting of Shareholders of Fiscal Year 2016, documented the minutes of the meeting, the GMS Deed, and other matters related to the execution of the GMS.
2. Compiled minutes of the Board of Directors' Meeting, and documented the Minutes of Meeting.
3. Compiled Management Reports, Statistics Reports, Annual Reports, and Sustainability Reports.
4. Related to Good Corporate Governance:
  - a. Conducted Good Corporate Governance Assessment based on Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 on GCG in SOEs;
  - b. Conducted assessment of Corporate Governance Perception Index (CGPI).
5. Related to Investor Relations:
  - a. Reported to the Indonesia Stock Exchange and the Financial Services Authority for any material information;

Sekretaris Perusahaan  
Corporate Secretary

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Melakukan pengkinian informasi yang ada di dalam website Perusahaan;</li> <li>c. Melaksanakan <i>analyst meeting</i> tahunan;</li> <li>d. Melakukan <i>Investor Conference and Non Deal Roadshows</i>;</li> <li>e. Melakukan korespondensi dengan wali amanat;</li> <li>f. Mengaudiensi kunjungan investor dan <i>analyst</i> terkait <i>analyst update</i> triwulanan.</li> </ul> <p>6. Terkait Stakeholder Management:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun Peraturan Direksi Pedoman Tata Kelola <i>Stakeholder</i>;</li> <li>b. Mengelola hubungan dengan Lembaga Negara dan Stakeholder Lainnya.</li> </ul> <p>7. Terkait Kesekretariatan dan Protokoler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendukung kelancaran tugas Direksi dan Dewan Komisaris;</li> <li>b. Melaksanakan keprotokolan di Lingkungan PLN dan kegiatan kelistrikan strategis PLN (Peresmian, <i>Groundbreaking</i>, dan Peninjauan Proyek Kelistrikan Strategis PLN)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Updated the information on the Company's website;</li> <li>c. Conducted annual analyst meeting;</li> <li>d. Held Investor Conference and Non-Deal Roadshows;</li> <li>e. Conducted correspondence with the trustee;</li> <li>f. Performed hearing of investor visits and analysts related to quarterly update analyst.</li> </ul> <p>6. Related to Stakeholder Management:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Formulated the Board of Directors' Regulation for Stakeholder Governance Guidelines;</li> <li>b. Managed the relationships with State Institutions and Other Stakeholders.</li> </ul> <p>7. Related to Secretariat and Protocol:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Supported the smoothness of the duties of the Board of Directors and Board of Commissioners;</li> <li>b. Implemented protocol in PLN Environment and PLN strategic electricity activities (Inauguration, Groundbreaking, and Review of PLN's Strategic Electricity Project)</li> </ul> |
|--|--|

# AUDIT INTERNAL

## Internal Audit

Fungsi Audit Internal PLN dijalankan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI). SPI bertanggung jawab untuk memimpin, menyusun rencana, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan pembinaan fungsi Satuan Pengawasan Intern yang tidak terbatas pada fungsi audit internal dan audit khusus dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance(GCG)* dengan berbasis risiko.

The PLN's Internal Audit Function is carried out by Internal Supervisory Unit (SPI). SPI is responsible to lead, plan, implement, evaluate, and conduct training on the Internal Audit, and not limited to internal and specific audit functions, in order to implement good corporate governance (risk-based internal audit).

### STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENGAWASAN INTERN

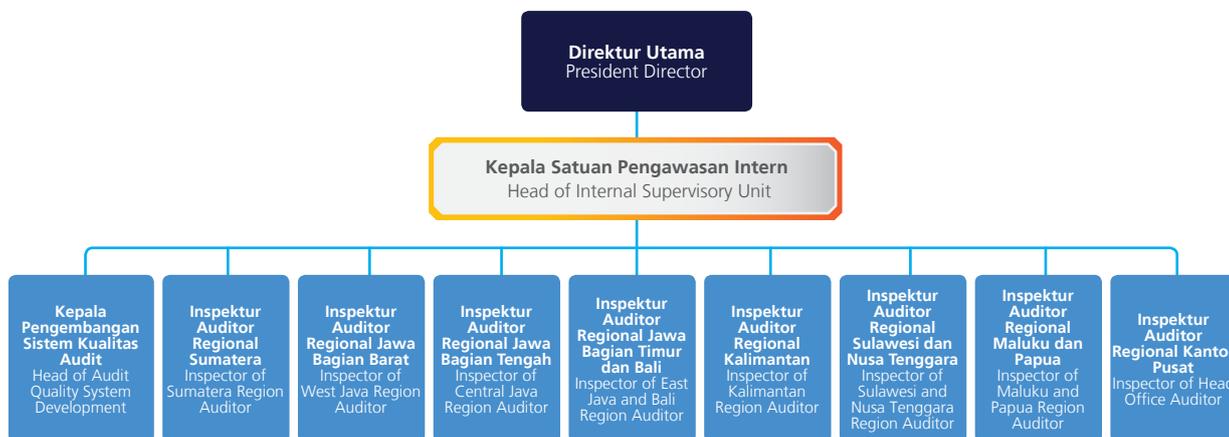
Dalam struktur organisasi Satuan Pengawasan Intern ditempatkan langsung dibawah Direktur Utama sesuai dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0078.P/DIR/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero).

### INTERNAL SUPERVISORY UNIT ORGANIZATIONAL STRUCTURE

In the organizational structure, the Internal Supervisory Unit is placed directly under the President Director, in accordance with PT PLN (Persero) Board of Directors' Regulation No. 0078.P/DIR/2017 on Organization and Work Procedures of PT PLN (Persero).

Struktur Organisasi Satuan Pengawasan Intern

Internal Supervisory Unit Organizational Structure



### PENGGANTIAN KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

Penggantian Kepala Satuan Pengawasan Intern tercantum pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal, dimana salah satu pasalnya, yakni pasal 5 dijelaskan bahwa Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris kemudian pada pasal 11 juga dijelaskan bahwa setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### APPOINTMENT OF THE HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT

Appointment of the Head of Internal Supervisory Unit is set forth in the Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines for the Formulation of the Internal Audit Charter, whereby one of the articles, Article 5, states that the Head of the Internal Audit Unit is appointed and dismissed by President Director upon approval by the Board of Commissioners. Article 11 also explains that any appointment, replacement, or dismissal of the Head of the Internal Audit Unit shall be notified immediately to the Financial Services Authority.

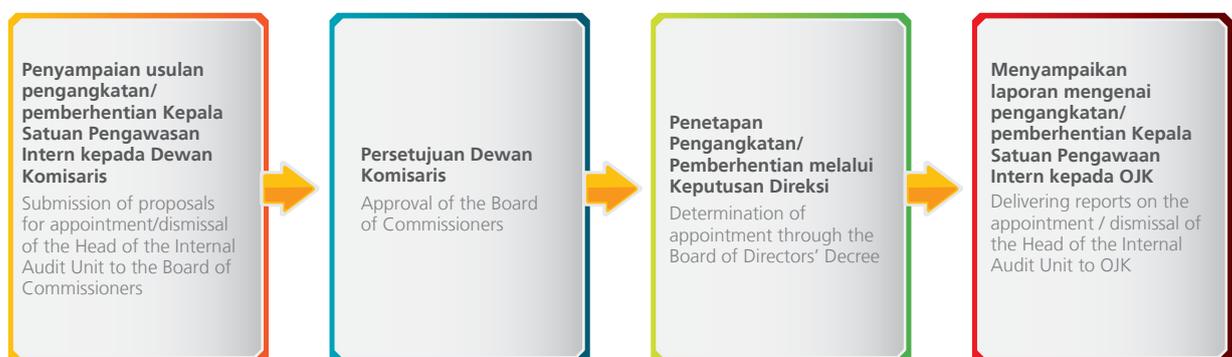
Audit Internal  
Internal Audit

Kepala Satuan Pengawasan Intern PT PLN (Persero) dijabat oleh Ali Mudin.

Ali Mudin is the Head of Internal Audit Unit of PT PLN (Persero).

**Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal harus segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.**

Head of Audit Internal Unit is appointed and dismissed by the President Director based on the approval of Board of Commissioners. Any appointment, replacement, or dismissal of the Head of the Internal Audit Unit shall be notified immediately to the Financial Services Authority.

ALUR PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN  
KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN PT PLN  
(PERSERO)FLOW OF APPOINTMENT/DISMISSAL OF HEAD  
OF INTERNAL AUDIT UNIT OF PT PLN (PERSERO)

## PROFIL KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

## PROFILE OF THE HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT



<b>Nama   Name</b>	Ali Mudin
<b>Usia   Age</b>	60 tahun per 31 Desember 2017   60 years, as of December 31, 2017
<b>Tempat &amp; Tanggal Lahir   Place &amp; Date of Birth</b>	Cirebon, 6 Juli 1957
<b>Kewarganegaraan   Citizenship</b>	Indonesia
<b>Riwayat Pendidikan   History of Education</b>	1. S1 Jurusan Hukum, Universitas Padjajaran   Bachelor of Law, Padjajaran University 2. S2 Jurusan Ekonomi Manajemen, Universitas Padjajaran   Master of Economic Management, Padjajaran University

## Audit Internal

Internal Audit

## Riwayat Jabatan | History of Position

Dasar Hukum Penunjukan |  
Legal Basis of Appointment

- Keputusan Dewan Komisaris No. 156/DK/PLN/2015-R tanggal 27 Agustus 2015
  - Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1158.K/SDM.00.02/DIR/2015 tanggal 31 Agustus 2015
- 
- Board of Commissioners' Decree No. 156/DK/PLN/2015-R dated August 27, 2015
  - PT PLN (Persero) Board of Directors' Decree No. 1158.K/SDM.00.02/DIR/2015 dated August 31, 2015.

Pengalaman Kerja | Working  
Experience

- Pemimpin kantor Wilayah BRI Banda Aceh (2004-2005)
  - Kepala Divisi Logistik BRI, Kantor Pusat (2005-2008)
  - Kepala Audit BRI Kantor Pusat (2008-2015)
  - Kepala Satuan Pengawasan Intern PT PLN (Persero) (2015-Sekarang)
- 
- Head of Banda Aceh BRI Regional Office (2004-2005)
  - Head of Logistics, BRI Head Office (2005-2008)
  - Head of Audit, BRI Head Office (2008-2015)
  - Head of Internal Audit Unit, PT PLN (Persero) (2015-present)

JUMLAH PERSONIL, KUALIFIKASI SERTA  
SERTIFIKASI PERSONIL SATUAN PENGAWASAN  
INTERN

Jumlah SDM SPI PT PLN (Persero) sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

PERSONNEL, QUALIFICATION, AND  
CERTIFICATION OF INTERNAL AUDIT UNIT

Number of SPI Human Resources of PT PLN (Persero) up to December 31, 2017, is as follows:

Uraian	Jumlah   Total	Description
KSPI	1	KSPI
Inspektur Auditor Regional	8	Inspector of Regional Auditor
Kepala PSKA	1	Head of PSKA
Group Head	7	Group Head
Group Head di Regional	16	Regional Group Head
Deputy Group Head	56	Deputy Group Head
Residen Audit	0	Audit Resident
Auditor	926	Auditor
<b>Jumlah</b>	<b>1015</b>	<b>Total</b>

Dalam Menjalankan fungsi pengawasan Satuan Pengawasan Intern memiliki 8 (depalan) Inpektur Auditor Regional dan 1 (satu) Kepala Pengembangan Sistem Kualitas Audit (KPSKA) dengan kualitas sertifikasi sebagai berikut :

In carrying out the supervisory function, the Internal Audit Unit has 8 (eight) Regional Auditor Inspectors and 1 (one) Head of Audit Quality System Development (KPSKA), with certification as follows:

Audit Internal  
Internal Audit

No	Nama Name	Jabatan Position	Latar Belakang Pendidikan Education Background
1	Flodesa Anggarijanto	Inspektur Auditor Regional Kantor Pusat   Inspector of Head Office Auditor	Teknik Mesin (S1)   Bachelor of Machine Engineering Magister Manajemen (S2)   Master of Management
2	Abdul Hakam	Inspektur Auditor Regional Jawa Bagian Barat   Inspector of West Java Region Auditor	Ekonomi Akuntansi (S1)   Bachelor of Accounting Economics <i>Management Business Administration</i> (S2)   Master of Management Business Administration
3	Anjar Novi	Inspektur Auditor Regional Jawa Bagian Tengah   Inspector of Central Java Region Auditor	Ekonomi Manajemen (S1)   Bachelor of Economic Management <i>Management Business Administration</i> (S2)   Master of Management Business Administration
4	Burhanuddin	Inspektur Auditor Regional Jawa Bagian Timur dan Bali   Inspector of East Java and Bali Region Auditor	Ekonomi Akuntansi (S1)   Bachelor of Accounting Economics Manajemen (S2)   Master of Management
5	Yarli	Inspektur Auditor Regional Sumatera   Inspector of Sumatera Region Auditor	Teknik Informatika (S1) Bachelor of Informatics
6	Rusdi	Inspektur Auditor Regional Kalimantan   Inspector of Kalimantan Region Auditor	Ekonomi Manajemen (S1) Bachelor of Economic Management
7	Fakhri	Inspektur Auditor Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara   Inspector of Sulawesi and Nusa Tenggara Region Auditor	Ekonomi Akuntansi (S1) Bachelor of Accounting Economics
8	Heryawan	Inspektur Auditor Regional Maluku dan Papua   Inspector of Maluku and Papua Region Auditor	Ekonomi Akuntansi (S1)   Bachelor of Accounting Economics Hukum (Notariat) (S2)   Master of Law (Notary)
9	Andri Yunaldi	Kepala Sistem Pengembangan Kualitas Audit   Head of Audit Quality System Development	Psikologi (S1)   Bachelor of Psychology Manajemen (S2)   Master of Management

Sertifikasi Personil-Personil Satuan Pengawasan Intern antara lain:

Certification of Internal Audit Personnel, among others, are:

No	Sertifikasi Certification	Dikeluarkan Oleh Issued by	Personil Internal Auditor Internal Audit Division
1	<i>Qualified Internal Audit</i>	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Jakarta <i>Internal Audit Education Foundation Jakarta</i>	<i>Basic</i> : 126 <i>Intermediate</i> : 3 <i>Advance (QIA)</i> : 151
2	<i>Certified Risk Management Professional</i>	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Jakarta <i>Risk Management Professional Certification Agency (LSPMR) Jakarta</i>	1
3	<i>Dunamis Certified Human Capital Management</i>	<i>HCMS Alignment Certification</i>	1
4	<i>Certified Hacking Forensic Investigator</i>	INIXINDO Bandung	13
5	<i>Certified Human Resource Professional</i>	Udiklat PLN Jakarta PLN Corporate University Jakarta	3

## Audit Internal

### Internal Audit

## TUGAS POKOK KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

Kepala Satuan Pengawasan Intern, bertanggung jawab memastikan terlaksananya audit internal berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), dengan tugas pokok:

1. Kebijakan dan strategi pengelolaan audit intern, standar audit, metodologi audit, sistem dan teknologi informasi audit Perusahaan, termasuk didalamnya meningkatkan kualitas audit.
2. Program Audit Berbasis Risiko diseluruh lingkungan PLN yang meliputi Kantor Pusat, Unit Induk, Unit Pelaksana dan Anak Perusahaan, termasuk didalamnya mengevaluasi, memberikan rekomendasi hasil audit intern dan memonitor tindak lanjut penyelesaiannya.
3. Program audit khusus (*investigasi/fraud*) di seluruh lingkungan PLN yang meliputi Kantor Pusat, Unit Induk, Unit Pelaksana dan Anak Perusahaan termasuk didalamnya mengevaluasi, memberikan rekomendasi hasil audit khusus dan memonitor tindak lanjut penyelesaiannya.
4. Hubungan kerja dengan auditor eksternal termasuk dan tidak terbatas pada Badan Pemeriksaan Keuangan dan Kantor Akuntan Publik.

## MAIN DUTIES OF THE HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT

The Head of the Internal Supervisory Unit is responsible for ensuring the implementation of the internal audit in accordance with good corporate governance (GCG). The main tasks are as follows:

1. Policies and strategies for internal audit management, audit standards, methodology, systems, and information technology, which includes improvement of the Company's overall audit quality.
2. Risk-Based Audit Program throughout PLN, that includes the Central Office, Parent Unit, Executive Unit, and its Subsidiaries, including evaluating, making recommendations on the results from the internal audit and monitoring the follow-up completion.
3. Special audit (*investigation/fraud*) throughout PLN, that includes the Central Office, Parent Unit, Executive Unit, and its Subsidiaries, including evaluating, making recommendations on the results from the special audit and monitoring the follow-up completion.
4. The working relationship with the external auditor, including, but not limited to, the Audit Board and the Public Accounting Firm.

## PROGRAM PENGEMBANGAN KAPABILITAS PERSONIL INTERNAL AUDIT SERTIFIKASI PROFESI AUDIT

## DEVELOPMENT PROGRAM OF INTERNAL AUDIT PERSONNEL CERTIFICATION FOR PROFESSIONAL AUDIT CERTIFICATION

No	Training/Workshop/Seminar	Penyelenggara Organizer	Jumlah Number
1	Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero)   Procurement of goods and services of PT PLN (Persero)	Udiklat PLN   PLN Corporate University	299
2	Metodologi Audit Internal Berbasis Risiko Tingkat Dasar Untuk Auditor   Basic Risk-Based Audit Methodology for Auditors	Udiklat PLN   PLN Corporate University	194
3	Teknik Wawancara Untuk Auditor   Interview Technique for Auditors	Udiklat PLN   PLN Corporate University	110
4	Penulisan Laporan Hasil Pemeriksaan   Report Writing of Inspection Result	Udiklat PLN   PLN Corporate University	104
5	Manajemen Risiko Dasar Untuk Pelaksana   Basic Risk Management for Executor	Udiklat PLN   PLN Corporate University	96
6	Manajemen Risiko Ketenagalistrikan Tingkat Pelaksana   Electricity Risk Management for Implementor	Udiklat PLN   PLN Corporate University	21
7	Workshop Pengadaan Barang Jasa   Workshop on Procurement of Goods and Services	Udiklat PLN   PLN Corporate University	17

Audit Internal  
Internal Audit

No	Training/Workshop/Seminar	Penyelenggara Organizer	Jumlah Number
8	Teknik Penyusunan Kontrak   Contract Drafting Technique	Udiklat PLN   PLN Corporate University	16
9	Workshop Quality Assurance Fungsi Internal Audit   Workshop of Quality Assurance on Internal Audit Function	Udiklat PLN   PLN Corporate University	16
10	Pengantar Fraud Risk Management   Introduction to Fraud Risk Management	Udiklat PLN   PLN Corporate University	15
11	Workshop Admin LHKPN   Workshop on LHKPN Admin	Udiklat PLN   PLN Corporate University	14
12	Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa   Arbitration As an Alternative to Dispute Settlement	Udiklat PLN   PLN Corporate University	11
13	Investigasi Pelanggaran Disiplin Pegawai   Investigation of Employee Discrimination Offenses	Udiklat PLN   PLN Corporate University	6
14	Internal Control Financial Reporting (Icofr)   Internal Control Financial Reporting (Icofr)	Udiklat PLN   PLN Corporate University	5
15	Audit Energi Pada PLTU   Energy Audit on Coal Power Plant	Udiklat PLN   PLN Corporate University	4
16	Hukum Dengan Layanan   Law With Service	Udiklat PLN   PLN Corporate University	4
17	Workshop Upaya Penurunan Susut Jaringan Tenaga Listrik   Workshop on the Effort to Decrease Electricity Network	Udiklat PLN   PLN Corporate University	4

**PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL**

PLN telah melakukan pembaruan Piagam Pengawasan Intern PT PLN (Persero) seiring dinamika global, regional maupun lokal sebagai wujud pelaksanaan GCG di tahun 2016.

**Piagam Pengawasan Internal dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi perusahaan dalam mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur dalam mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas operasi, pengelolaan risiko, pengendalian dan proses tata kelola dengan mengedepankan sikap profesionalisme sesuai dengan prinsip GCG.**

The Internal Audit Charter is designed to provide added value and improve the Company's operations in achieving its objectives through a systematic and regular approach in evaluating and improving operational effectiveness, risk management, control and governance processes, by promoting professionalism, in accordance with GCG principles.

Piagam Pengawasan Intern juga dibuat untuk menjelaskan mandat dan kewenangan yang diberikan kepada SPI sebagai landasan tanggung jawab, kewenangan, independensi dan pelaporan kegiatan SPI. Piagam ini tidak membatasi Auditor Internal membuat pertimbangan profesional dan audit yang inovatif.

**INTERNAL AUDIT CHARTER**

PLN has renewed the Internal Audit Charter of PT PLN (Persero) in line with global, regional, and local dynamics as a form of GCG implementation in 2016.

The Internal Audit Charter is also created to explain the mandates and powers granted to the SPI as a basis for responsibility, authority, independence, and reporting of SPI activities. This Charter does not limit the Internal Auditor to make innovative professional and audit considerations.

## Audit Internal

### Internal Audit

## KODE ETIK AUDITOR INTERNAL

Dalam menjalankan tugasnya, Internal Auditor telah memiliki Kode Etik, antara lain



### 1. Integritas

Integrity

Membangun kepercayaan yang menjadi dasar berpijak auditor yang professional, dengan:

- Melakukan pekerjaan audit intern dengan jujur, produktif, profesional dan tanggung jawab.
- Mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan intern PLN yang berlaku
- Tidak ikut serta dalam kegiatan yang tidak legal atau melakukan kegiatan yang dilarang oleh profesi Auditor.
- Menghormati dan berkontribusi pada tujuan hukum dan etika yang ditetapkan PLN.

Building trust as the basis of professional auditors, by:

- Performing internal audit with honesty, productivity, professionalism, and responsibility.
- Complying with applicable internal laws and regulations of PLN
- Not participating in any unauthorized activity or conducting activities that are prohibited by the Auditor's profession.
- Respecting and contributing to the legal and ethical goals set by PLN.



### 2. Objektivitas

Objectivity

Mempraktekkan perilaku obyektif dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas/ kegiatan yang sedang diaudit. Auditor intern membuat penilaian secara bebas (independen) dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sendiri atau pendapat orang lain dalam memberikan pendapat profesionalnya, dengan:

- Tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat mempengaruhi penilaian Auditor.
- Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
- Mengungkapkan semua fakta – fakta penting yang diketahuinya dalam melaksanakan tugasnya dan jika tidak dilaporkan dapat merugikan PLN.

Practicing objective behavior in collecting, evaluating, and communicating information about the audited activities. The Internal Auditor makes the judgment freely (independently) and is not affected by the personal interest or opinion of others in providing his/her professional opinion, by:

- Not participating in activities that may affect the Auditor's judgment.
- Not accepting anything in any form that may affect his/her professional judgment.
- Disclosing all the important facts in carrying out his/her duties, which, if not reported may cause harm to PLN.



### 3. Kerahasiaan

Confidentiality

Menghargai nilai dari informasi yang diterima dan kepemilikan informasi serta tidak membocorkan informasi yang diperoleh tanpa mendapat kuasa kecuali demi hukum dan profesi.

- Bijaksana dalam menggunakan dan melindungi informasi yang didapat dalam melakukan pekerjaan, dengan:
- Tidak menggunakan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan sendiri dengan cara yang tidak legal atau tidak sejalan dengan tujuan hukum dan etika di PLN.

Appreciating the value of the information received and the ownership of information and not divulging information obtained without power unless it is for the sake of law and profession.

- Being wise in using and protecting information obtained in his/her work, by:
- Not using the information obtained in performing its duties for his/her own sake in a way that is not legal or inconsistent with the legal and ethical purposes of PLN.



### 4. Kompetensi

Competency

Menggunakan ketrampilan, pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam melaksanakan audit.

- Hanya melakukan audit pada obyek audit yang sesuai dengan ketrampilan, pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam melaksanakan audit, dengan:
- Melaksanakan audit sesuai dengan Piagam dan Pedoman Audit Intern PLN yang sejalan dengan Standar Profesi Auditor Internal.
- Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan professional berkelanjutan untuk tujuan peningkatan kualitas dan efisiensi kerja.

Using the skills, knowledge, expertise, and experience owned in performing the audit.

- Auditing the audit object in accordance with the skills, knowledge, expertise, and experience owned in performing the audit, by:
- Performing audit in line with the PLN's Internal Audit Guidelines and Charter, in accordance w the Internal Auditor Profession Standard.
- Increasing competence through continuous professional education for the purpose of improving the quality and work efficiency.

## PEMERIKSAAN OPERASIONAL TAHUN 2017 DAN TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, SPI melakukan pemeriksaan/audit yang mencakup :

- Pemeriksaan Operasional & Audit Pendalaman atas hasil Pemeriksaan Operasional
- Melakukan Kegiatan Pemeriksaan Khusus dan *Whistle Blowing System* (WBS)
- Melaksanakan Kegiatan Pemeriksaan Penugasan Khusus dan Penugasan Lainnya dari Dewan Komisaris, Direksi, Divisi/Satuan, dan Unit Induk/Pelaksana.
- Melaksanakan uji petik dalam rangka penghapusan ATTB, PRR dan Pemeriksaan/verifikasi Status *Mothballed* dan *Retired Unit* Pembangkit memenuhi permintaan Unit.
- Memberikan layanan konsultasi bagi Manajemen.
- Melaksanakan kegiatan *Quality Assurance* fungsi SPI

Metode Audit yang dilakukan sejak tahun 2015 adalah Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Internal Audit*) sesuai dengan RJP SPI tahun 2016 – 2019.

Tahun 2017 SPI PLN, memiliki *Audit Universe* sebanyak 410 (empat ratus sepuluh) *Auditee* terdiri dari 18 (delapan belas) Direktorat/Satuan Kantor Pusat, 55 (lima puluh lima) Unit Induk, 9 (sembilan) Anak Perusahaan dan 328 (tiga ratus dua puluh delapan) Unit Pelaksana yang menjadi wewenang 8 (delapan) Inspektorat, 22 (dua puluh dua) Regional, 1 (satu) *Group Head* Audit Khusus dan 1 (satu) *Group Head* TI. Dalam pelaksanaannya, *audit universe* mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

### PERKEMBANGAN JUMLAH AUDIT UNIVERSE

No.	Audit Universe	2015	2016	2017
1	Direktorat/Satuan   Directorate/Unit	11	14	18
2	Unit Induk   Parent Unit	46	54	55
3	Unit Pelaksana   Business Unit	0	323	328
4	Anak Perusahaan   Subsidiaries	4	9	9
<b>Total</b>		<b>61</b>	<b>400</b>	<b>410</b>

Pada tahun 2017, Perusahaan meningkatkan Rencana Pemeriksaan Operasional (RPO) sebanyak 178% bila dibandingkan dengan tahun 2016, berupa

- Pemeriksaan Operasional sebanyak 21 (dua puluh satu) di Direktorat/Satuan PLN Pusat, 84 (delapan puluh empat) di Unit Induk, 280 (dua ratus delapan

## OPERATIONAL AUDIT AND FOLLOW-UP ACTION IN 2017

In performing the supervisory function, SPI conducts audit, which includes:

- Operational Audit & In-depth Audit of Operational Audit results
- Special Audit and Whistleblowing System (WBS)
- Special Audit Assignment and Other Assignments from Board of Commissioners, Directors, Divisions/Units, and Parent/Implementing Units.
- Performing sample test in order to eliminate ATTB, PRR, and Status Verification of *Mothballed* and *Retired* Generating Unit to fulfill the Unit request.
- Providing consultancy services for Management.
- Performing *Quality Assurance* function of SPI

Since 2015, the Audit uses Risk-Based Internal Audit Method, in line with SPI's RJP 2016-2019.

In 2017, SPI PLN has Audit Universe in the amount of 410 (four hundred and ten) Auditee, which consists of 18 (eighteen) Directorate/Units of Head Office, 55 (fifty-five) Units, 9 (Nine) Subsidiaries, and 328 (three hundred twenty eight) Business Units within the authorities of 8 (eight) Inspectorates, 22 (twenty-two) Regionals, 1 (one) Group Head of Special Audit, and 1 (one) IT Head Group. Audit universe has improved from year to year in the implementation.

### AUDIT UNIVERSE GROWTH

In 2017, the Company increased its Operational Audit Plan (RPO) by 178%, compared to 2016, in the form of

- 21 (twenty-one) Operational Audit at Directorate/Unit of PLN Centre, 84 (eighty-four) at Parent Units,

## Audit Internal

### Internal Audit

puluh) di Unit Pelaksana dan 28 (dua puluh delapan) di Anak Perusahaan.

2. Pemeriksaan Khusus sebanyak 70 (tujuh puluh) kali dan Penugasan Uji Petik ATTB dan PRR (sesuai dengan permintaan unit).

280 (two hundred eight) at Business Units, and 28 (twenty-eight) at Subsidiaries.

2. 70 (seventy) Special Audit, ATTB Sampling Tests, and PRR (as per unit request).

### Rencana Pemeriksaan Operasional

No.	Audit Universe	Rencana Pemeriksaan Operasional (PO) Operational Audit Plan (RPO)		
		2015	2016	2017
1	Direktorat/Satuan   Directorate/Unit	10	14	21
2	Unit Induk   Parent Unit	47	93	84
3	Unit Pelaksana   Business Unit	223	116	280
4	Anak Perusahaan   Subsidiaries	5	9	28
<b>Total</b>		<b>285</b>	<b>232</b>	<b>413</b>

### Operational Audit Plan

Pencapaian realisasi pelaksanaan pemeriksaan tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 sebagai berikut : pemeriksaan operasional sebesar 178%, pemeriksaan khusus sebesar 269%, Penugasan uji petik ATTB/PRR/Mothballed dan Retired Unit sebesar 198%, Pemeriksaan *Whistle Blowing System* (WBS) sebesar 159%, pada Tahun 2016 Dekom dan Manajemen (Direksi, Divisi/Satuan dan Unit Induk/Pelaksana) belum banyak memberikan penugasan khusus dan penugasan lainnya kepada SPI, begitu juga dengan Layanan Konsultasi dapat dilihat sesuai tabel dibawah ini:

The achievement of the audit implementation in 2017 has increased compared to the year 2016 as follows: operational examination by 178%, special inspection by 269%, Assignment of ATTB/PRR/Mothballed and Retired Unit by 198%, Whistleblowing System (WBS) by 159%. In 2016, the Board of Commissioners and Management (Directors, Division/Unit, and Parent Unit/Business Unit) have not given any special assignments and other assignments to SPI, including Consultancy Services, as can be seen in the following table:

### Realisasi Pelaksanaan Audit

No	Uraian Description	Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Audit Plan and Realization of Audit					
		2015		2016		2017	
		Target	Realisasi Realization	Target	Realisasi Realization	Target	Realisasi Realization
1	Pemeriksaan Operasional   Operational Audit	295	178	232	244	413	434
2	Audit Khusus   Special Audit	10	11	12	26	70	70
3	Uji Petik ATTB/PRR/Mothballed dan Retired Unit   ATTB/PRR/Mothballed and Retired Unit Sampling Tests	-	13	-	45	-	89
4	Audit <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	-	-	-	17	-	27
5	Pemeriksaan Penugasan Khusus & Penugasan Lainnya dari Dekom, Direksi, Divisi/Satuan dan Unit Induk/Pelaksana   Special Audit Assignment and Other Assignments from Board of Commissioners, Directors, Divisions/Units, and Parent/Business Units.	-	-	-	14	-	378
6	Layanan Konsultasi   Consultancy Services	-	-	-	1	-	10
<b>Total</b>		<b>305</b>	<b>202</b>	<b>244</b>	<b>347</b>	<b>483</b>	<b>1.008</b>

### Audit Realization

Audit Internal  
Internal Audit

Layanan Konsultasi yang dimasukkan pada tabel tersebut diatas adalah yang pelaksanaannya terdokumentasi, selanjutnya kami telah menginstruksikan kepada seluruh SPI Regional dan Grup Audit Khusus dalam pelaksanaan konsultasi agar dilakukan secara formal dan didokumentasikan.

**QUALITY ASSURANCE**

Agar Internal Audit sebagai fungsi assurance perusahaan dapat berjalan dengan baik dan efektif, maka fungsi Internal Audit didukung oleh berbagai komponen/ elemen. Seluruh komponen/ elemen pendukung Internal Audit senantiasa dimonitor untuk dinilai kecukupan dan keefektifannya sebagai *quality assurance* atas kegiatan Internal Audit. Oleh karena itu, secara periodik Internal Audit melaksanakan *periodic internal assessment* untuk me-review seluruh aspek dari kegiatan/ aktivitas Internal Audit dan secara berkelanjutan memonitor tingkat keefektifannya.

Disamping dilaksanakannya *periodic internal assessment*, untuk memenuhi *International Professional Practices Framework* ("IPPF/Standar IIA") yang menyatakan bahwa penilaian oleh pihak eksternal terhadap fungsi audit internal harus dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun, Perusahaan telah menunjuk External Assessor untuk me-review Satuan Pengawasan Intern pada tahun 2014 CBA Consulting Protivity dimana secara keseluruhan jika dibandingkan dengan Standar IIA, praktik praktik Audit Internal di PLN adalah: umumnya sesuai (*generally conform*) dengan Standar tersebut (*International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing*).

**SISTEM INFORMASI APLIKASI AUDIT**

Aplikasi *Electronic Risk Base Audit System* (eRBAS) telah digunakan oleh SPI PLN sejak tahun 2015 dan telah mengalami beberapa pengembangan aplikasi yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan metoda audit internal PLN yang berbasis risiko (*Risk Based Internal Audit*). Aplikasi eRBAS SPI yang menggunakan *software TeamMate* sudah di-upgrade versinya dari versi 10 menjadi versi 12. Upgrade Hardware eRBAS juga telah dilakukan baik dalam sisi peningkatan kapasitas penyimpanan maupun dari kemampuan kecepatan CPU.

The Consultancy Service included in the above table is documented. The Company has instructed all SPI Regional and Special Audit Groups to formalize and document consultations.

**QUALITY ASSURANCE**

The Internal Audit function is support by various components/elements to assure that the Company's assurance functions run effectively. All components/elements of the Internal Audit support are constantly monitored to assess its adequacy and effectiveness as a quality assurance for Internal Audit activities. Therefore, the Internal Audit periodically conducts periodic internal assessments to review all aspects of the Internal Audit activities and continuously monitors their effectiveness.

In addition to the implementation of the periodic internal assessment, to comply with the International Professional Practices Framework ("IPPF / IIA Standards") stating that external assessments of the internal audit function should be conducted at least once in 5 (five) years, the Company has appointed External Assessor to review the Internal Audit Unit in 2014 CBA Consulting Protivity, whereby as a whole as compared to the IIA Standards, Internal Audit Practices at PLN is: generally conforming to the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing.

**AUDIT APPLICATION INFORMATION SYSTEM**

PLN's SPI has used the Electronic Risk Base Audit System (eRBAS) since 2015. The system has experienced several application developments, tailored to the development of Risk Based Internal Audit technology development and PLN's internal audit methods. The eRBAS SPI application uses TeamMate software and has been upgraded from version 10 to version 12. eRBAS Hardware hardware has also been upgraded in terms of storage capacity and CPU speed capabilities.

## Audit Internal

### Internal Audit

Saat ini aplikasi eRBAS sudah menggunakan 2 unit *server* baru yang ditempatkan pada ruang Data Center PLN Pusat dengan rincian pembagian *server* nya menjadi 1 unit untuk *Application Server* dan 1 unit untuk *Database Server*. Penyerahan (*Handover*) pengelolaan *hardware* dan infrastruktur eRBAS juga telah diserahkan kepada Divisi Sistem Teknologi Informasi PLN. Untuk Layanan gangguan aplikasi dan *User Support* Aplikasi eRBAS juga sudah bisa dilakukan dengan melalui *Contact Center Helpdesk* PLN Pusat di ext 4444 atau email [helpdeskplnpusat@pln.co.id](mailto:helpdeskplnpusat@pln.co.id).

Peningkatan kompetensi dan keterampilan pengguna (*user*) eRBAS juga telah dilakukan dengan melakukan *training* aplikasi eRBAS untuk seluruh auditor secara berkala. Saat ini jumlah *user* aplikasi eRBAS sudah mencapai lebih dari 1000 orang *user* termasuk 2 orang *User Champion* yang tersebar di masing-masing regional SPI. Tugas *User Champion* eRBAS diharapkan untuk menjadi *Local Application Support* yang membantu *user* eRBAS regional apabila *user* mengalami kesulitan atau kendala dalam penggunaan aplikasi eRBAS.

Currently, the eRBAS application uses 2 new server units located in the Data Center of PLN Center. The servers are utilized as 1 Application Server and 1 Database Server. The eRBAS hardware and infrastructure management has been handedover to Division of Information Technology System, PLN. For Service interruption and eRBAS User Support, the user can contact the Contact Center Helpdesk at PLN Center at ext 4444 or email to [helpdeskplnpusat@pln.co.id](mailto:helpdeskplnpusat@pln.co.id).

On a regular basis, eRBAS application training for all auditors has been performed to improve competence and skills of eRBAS users. Currently, eRBAS have more than 1,000 users, including 2 Champion Users in each regional SPI. eRBAS Champion User has the duty to be the Local Application Support to assist regional eRBAS user with difficulty or trouble during the utilization of eRBAS application.

## SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL

### Internal Control and Monitoring System

Sesuai Pasal 26 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-01/MBU/2011 sebagai pengganti Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN, ditegaskan bahwa setiap BUMN wajib membentuk sistem pengendalian internal. Pembentukan sistem pengendalian internal ini berfungsi sebagai salah satu mekanisme internal dari setiap unit kerja atau unit organisasi, agar dalam setiap pengambilan keputusan pelaksanaan transaksi ada mekanisme internal yang telah dilalui untuk memastikan bahwa keputusan transaksi tersebut telah berlangsung dengan benar, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

In accordance with Article 26 of Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01/MBU/2011, as a replacement for the Minister of State-Owned Enterprises Decree No. KEP-117/M-MBU/2002 on Good Corporate Governance Implementation in SOEs, it is affirmed that every SOE is obligated to establish an internal control system. The internal control system functions as an internal mechanism of each organizational unit. Thus, an internal mechanism benefits each transaction as a decision-maker in ensuring proper, correct, fair, and accountable decisions.

**Pengendalian internal adalah proses yang dirancang dan dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan anggota manajemen lainnya serta seluruh personil Perusahaan, yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.**

Internal control is a process designed and operated by the Board of Commissioners, the Board of Directors, other members of management, and all Company's personnel, with the objective to provide reasonable assurance on the effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial reporting, and compliance with applicable laws and regulations.

Dalam rangka mengimplementasikan peraturan tersebut dan meningkatkan akuntabilitas setiap keputusan dan meningkatkan transparansi dan akurasi pencatatan transaksi bisnis, PLN mengupayakan pengembangan Sistem Pengendalian Internal dengan menggunakan pendekatan COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commissions*). Sistem Pengendalian Internal tersebut mencakup:

1. Lingkungan pengendalian internal dalam perusahaan yang disiplin dan terstruktur;
2. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha;
3. Aktivitas pengendalian;
4. Sistem informasi dan komunikasi; dan
5. Monitoring, yang secara operasional dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai kebijakan berupa Pedoman, Petunjuk Operasional, maupun Instruksi Kerja.

PLN menerapkan standar COSO pada ICOFR (*Internal Control over Financial Reporting*). Dalam penyusunan rancangan ICoFR, PLN mengacu pada kerangka dan pedoman dari COSO yang merupakan organisasi resmi yang menyediakan kerangka dan pedoman terkait

In order to implement these regulations and increase the accountability of each decision, and the transparency and accuracy of business transaction records, PLN has developed an internal control system using COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions*) approach. The Internal Control System includes:

1. Disciplined and structured internal control environment in the Company;
2. Risk assessment and business management;
3. Control Activities;
4. Information and communication system; and
5. Monitoring; in terms of operations, monitoring is explained further as policies in the form of Guidelines, Operational Guidelines, and Work Instructions.

PLN applies the COSO standards on ICOFR (*Internal Control over Financial Reporting*). In the drafting of ICoFR, PLN refers to the COSO's framework and guidelines, which is the official organization in providing framework and

## Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal

### Internal Control and Monitoring System

manajemen risiko, pengendalian internal dan pencegahan fraud. COSO mendefinisikan pengendalian intern sebagai proses yang dirancang manajemen perusahaan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) agar dapat mencapai tujuan organisasi yang dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Efektivitas dan efisiensi operasi (*effective and efficient operations*);
2. Pelaporan keuangan yang andal (*reliable financial reporting*); dan
3. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan (*compliance with applicable laws and regulations*).

guidance related to risk management, internal control, and fraud prevention. COSO defines internal control as a process designed by corporate management to provide reasonable assurance in order to achieve organizational goals divided into 3 (three) categories, i.e.:

1. Effective and efficient operations;
2. Reliable financial reporting; and
3. Compliance with applicable laws and regulations.



Penerapan ICoFR bertujuan untuk memenuhi kriteria COSO tentang pelaporan keuangan yang andal. Oleh karena itu, pengendalian intern atas pelaporan keuangan (ICoFR) didefinisikan sebagai suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan oleh manajemen perusahaan untuk memberikan keyakinan yang memadai berkaitan dengan keandalan laporan keuangan.

“Keandalan” dalam konteks ICoFR merupakan suatu kondisi laporan keuangan yang bebas dari salah saji yang material. Keandalan laporan keuangan diperoleh dari kelengkapan dan akurasi pencatatan transaksi, pengklasifikasian dan periode pencatatan yang tepat, serta seluruh aspek lainnya dari pengendalian pelaporan keuangan yang secara tradisional telah dilaksanakan.

The ICoFR implementation aims to meet the COSO criteria of reliable financial reporting. Therefore, internal control over financial reporting (ICoFR) is defined as a process that is designed and implemented by the Company's management to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial statements.

In terms of ICoFR, “Reliability” is a condition of financial statement that is free of material misstatements. The reliability of financial statements is obtained from the completeness and accuracy of recording transactions, classification and appropriate listing periods, and all other aspects of traditional financial reporting controls that have been implemented. Thus, ICoFR implementation in PLN

## Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal

### Internal Control and Monitoring System

Sehingga penerapan ICOFR di PLN diharapkan tidak hanya untuk membantu Perusahaan dalam mencapai kehandalan laporan keuangan, tetapi juga untuk membantu memberikan bukti bahwa proses bisnis sudah dijalankan dengan efektif.

is expected not only to assist the Company in achieving financial statement reliability, but also to help provide evidence that the business process runs effectively.

## ROADMAP PENGEMBANGAN ICOFR

Roadmap ICOFR Development

### ✓ Penyesuaian Rancangan ICOFR as-is

Adjustment of ICOFR as-is Design

**Menyesuaikan rancangan piloting ICOFR sesuai dengan struktur organisasi baru.** | Adjustment of ICOFR piloting design in accordance with the new organization structure.

### ✓ Roll-out rancangan ICOFR

Roll-out of ICOFR design

**Roll-out implementasi ICOFR ke Unit Seluruh Indonesia.** | Roll-out of ICOFR implementation to Units Across Indonesia.

### ✓ Proses Pengelolaan dan Pelaporan ICOFR

ICOFR Management and Reporting Process

**CSA perlu dilakukan secara efektif dan efisien dengan pelaporan yang mudah untuk dilaksanakan. Tantangannya antara lain** | Effective and efficient CSA is necessary with easy reporting implementation. The challenges are among others:

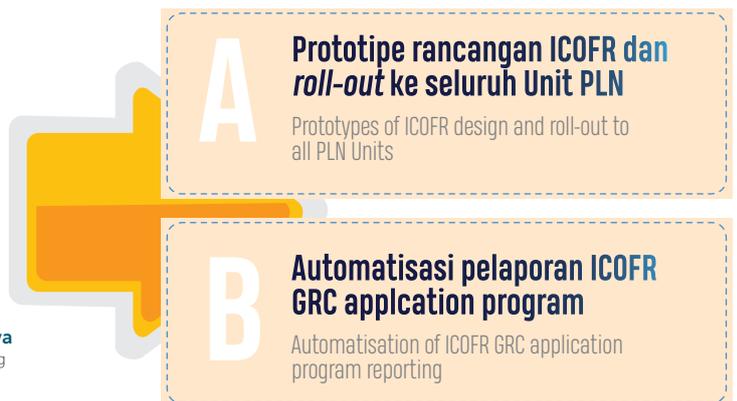
- ⊙ **Pengelolaan dokumen manual (hardcopy) pendukung test of controls** | Manual document (hardcopy) management supporting the test of controls
- ⊙ **Melaporkan informasi status efektifitas kontrol dari seluruh wilayah ke Kantor dengan mudah dan cepat** | Easy and fast reporting on control effectiveness status information from all regions to the Office

### Evaluasi Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal, PLN membentuk Unit Audit Internal sebagai pelaksana yang disebut Satuan Pengawasan Intern. Hasil evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian internal menjadi salah satu dasar evaluasi Manajemen terhadap efektivitas sistem pengendalian internal untuk menentukan perbaikan dan penyempurnaan sistem ataupun kebijakan yang memungkinkan Manajemen menjalankan kegiatan operasional Perusahaan dengan cara yang lebih efektif.

### Evaluation of the Effectiveness of Internal Control System

PLN has established the Internal Audit Unit to evaluate the implementation of its internal control system. The results of the evaluation of the internal control system are used as one of the factors considered by the Management as it evaluates the effectiveness of the internal control system in order to determine the improvements to the system or policies that allow the management to conduct operational activities in a more effective way.



## AKUNTAN PERUSAHAAN

### Company's Accounting Firm

Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 26 Mei 2017 pada mata acara rapat keenam, Perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, a member of the RSM network sebagai Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2017 serta mengaudit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2017.

Penunjukan KAP tersebut, telah memenuhi ketentuan tentang pergantian Kantor Akuntan Publik dan Partner Audit yang terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 423 tahun 2002 yang menyatakan bahwa Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik selaku Partner paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Selama tahun 2017, lingkup audit KAP mencakup:

1. Jasa audit umum laporan keuangan;
2. Jasa Audit kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern;
3. Audit Atas Pekerjaan Dalam Pelaksanaan;
4. Audit Atas Project Financial Statement;
5. Audit Atas Financial Covenant Ratio;
6. Audit atas Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian;
7. Audit Atas Program kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
8. *Review* Atas Laporan Evaluasi Kinerja;
9. *Review* Atas Laporan KPI per Direktorat;
10. *Review* atas perhitungan *Consolidated Interest Coverage Ratio* (CICR)

Based on the Annual GMS Resolutions dated May 26, 2017, on the sixth agenda of the meeting, the Company appointed Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, a member of the RSM network, as the Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statement for fiscal year 2017 and Company's Partnership and Community Development Program Financial Statement for fiscal year 2017.

The appointment of such KAP has complied with the requirement for the replacement of Public Accounting Firm and Audit Partner, stipulated in the Minister of Finance Decree No. 423 of 2002, which states that the provision of general audit services to the financial statements of an entity may be performed by KAP for maximum of 5 (five) consecutive fiscal year, and by a Public Accountant for maximum of 3 (three) consecutive fiscal year.

In 2017, the KAP audit scope includes:

1. General financial statement;
2. Adherence to the Legislation and Internal Control;
3. Audit of Ongoing Work Statement;
4. Audit of Financial Statement's Project;
5. Audit of Financial Covenant Ratio;
6. Audit of Activity's Report on Prudential Principles;
7. Audit of Partnership and Community Development Program (PKBL)
8. Review of Performance Evaluation Report;
9. Review of KPI Report per Directorate;
10. Review of Consolidated Interest Coverage Ratio (CICR)

**JUMLAH PERIODE AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) TELAH MELAKUKAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN**

Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan PLN sepanjang tahun 2013-2017, adalah sebagai berikut:

**PUBLIC ACCOUNTANT AND PUBLIC ACCOUNTING FIRM (KAP) WHO HAVE PERFORMED AUDIT OF ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS**

Public Accounting Firms that have audited PLN Financial Statements throughout 2013-2017, are as follow:

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Publik Public Accountant
2017	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (KAP RSM AAJ)	Saptoto Agustomo
2016	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (KAP RSM AAJ)	Saptoto Agustomo
2015	Tanudiredja, Wibisana & Rekan (Price Waterhouse Coopers Indonesia)	Haryanto Sahari
2014	Tanudiredja, Wibisana & Rekan (Price Waterhouse Coopers Indonesia)	Haryanto Sahari
2013	Osman Bing Satrio dan Eny (Deloitte)	Osman Sitorus

**BESARNYA FEE UNTUK JASA YANG DIBERIKAN OLEH AKUNTAN PUBLIK**

Perusahaan menetapkan nilai fee Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 sebesar Rp 13,48 miliar.

**SERVICE FEE FOR EACH TYPE OF SERVICE PROVIDED BY PUBLIC ACCOUNTANT**

The Company sets the fee for Audit Services of Financial Statement for fiscal year 2017 at Rp13.48 billion.

# MANAJEMEN RISIKO

## Risk Management

Sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN, maka PLN menjalankan manajemen risiko dengan senantiasa memperhatikan profil risiko yang akan dihadapi dan berupaya memitigasi risiko-risiko tersebut.

Dalam rangka mengelola risiko-risiko tersebut, Perseroan telah meletakkan dasar-dasar untuk menerapkan implementasi Manajemen Risiko sesuai dengan kaidah best practice. Sejak tahun 2011, PT PLN (Persero) telah menggambarkan Profil Risiko Perusahaan untuk mencapai sasaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang didasarkan pada Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko sesuai KEPDIR No. 537.K/DIR/2010 yang saat ini telah diperbaharui menjadi PERDIR No. 0355.K/DIR/2014. Dengan semakin membaiknya pengelolaan risiko PT PLN (Persero), maka diharapkan perkembangan tersebut dapat mendukung perubahan paradigma pengelolaan Perusahaan dari crisis management, yang bersifat reaktif korektif terhadap suatu permasalahan yang timbul, menjadi risk management yang berupa pengelolaan preventif sebelum suatu risiko benar-benar terjadi dan menjelma menjadi masalah bagi Perusahaan.

In line with the Minister of SOEs Decree No. PER-01/MBU/2011 on Good Corporate Governance (GCG) Implementation on SOEs, PLN performed risk management by taking into account the risk profile faced and risks mitigation efforts.

In order to manage the risks, the Company puts the basic in implementing the Risk Management in line with the best practice principles. Since 2011, PT PLN (Persero) depicts the Company's Risk Profile to achieve the Company's Work and Budget Plan based on the Risk Management Implementation Guidelines, in line with Directors' Decree No. 537.K/DIR/2010, which has been updated to President Directors' Decree No. 0355.K/DIR/2014. The improved risk management of PT PLN (Persero) is expected to support the change of management paradigm of the Company from crisis management, which is reactive corrective to an emerging problem, into risk management in the form of preventive management before a risk actually occurs and transformed into a problem for the Company.

## Kebijakan Pengelolaan Risiko 2016-2020

Risk Management Policies 2016-2020



### Struktur Pengelolaan Risiko Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0078.P/DIR/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero), Divisi Manajemen Risiko berada di bawah Direktur Perencanaan Korporat dengan struktur sebagai berikut:

### Company's Risk Management Structure

Based on Directors' Regulation of PT PLN (Persero) No. 0078.P/DIR/2017 on the Organization and Administration of PT PLN (Persero), the Risk Management Division is reporting directly to Director of Corporate Planning, with the following structure:

### Struktur Organisasi Divisi Manajemen Risiko



### Risk Management Organizational Structure

Manajemen Risiko  
Risk Management

Struktur Pengelolaan dan Pengawasan Risiko di PLN

Structure of Risk Monitoring and Management in PLN



PROFIL KEPALA DIVISI MANAJEMEN RISIKO & KEPATUHAN

PROFILE OF HEAD OF RISK MANAGEMENT & COMPLIANCE DIVISION



<b>Nama   Name</b>	Wasito Adi
<b>Usia   Age</b>	51 tahun per 31 Desember 2017   51 years, as of December 31, 2017
<b>Kewarganegaraan   Citizenship</b>	Indonesia
<b>Riwayat Pendidikan   History of Education</b>	S1 Jurusan Teknik Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.   Bachelor of Industrial Engineering, Sepuluh Nopember Institute of Technology.
<b>Riwayat Jabatan   History of Position</b>	
<b>Dasar Hukum Penunjukan   Legal Basis of Appointment</b>	Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0162.K/SDM.00.03/DIR/2017   Directors' Decree of PT PLN (Persero) No. 0162.K/SDM.00.03/DIR/2017

Manajemen Risiko  
Risk Management**Pengalaman Kerja |**  
Working Experience

- Manajer Cabang Mataram Pada PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat (2005-2008)
- Manajer Bidang Teknik Pada Bidang Teknik (2009-2011)
- Manajer Bidang Distribusi Pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta (2011-2013)
- General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat (2013-2015)
- General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara Dan Sulawesi Barat (2015-2017)
- Manager of Mataram Branch PT PLN (Persero) of West Nusa Tenggara (2005-2008)
- Manager of Technical Field (2009-2011)
- Manager of Distribution of PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta (2011-2013)
- General Manager PT PLN (Persero) of West Sumatera Area (2013-2015)
- General Manager of PT PLN (Persero) of South Sulawesi Southwest Sulawesi, and West Sulawesi (2015-2017)

**Tugas Dan Tanggung Jawab Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan**

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan tercantum dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0078.P/DIR/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero). Tugas dan Tanggung jawab utama Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan, yakni:

1. Memanfaatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko dan Kepatuhan Perusahaan, serta memastikan tahapan penerapannya baik dalam proses pengambilan keputusan maupun kegiatan strategis lainnya.
2. Memastikan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan lajian Risiko Perusahaan dan mitigasi Risiko bekerja sama dengan pemilik Risiko, serta melakukan *assessment*, pemantauan dan pelaporan risiko-risiko utama Perusahaan
3. Memastikan penyusunan infrastruktur manajemen Risiko dan kepatuhan serta *environment* yang memadai untuk implementasi manajemen Risiko Perusahaan, termasuk didalamnya *risk & compliance management information system* dan memfasilitasi pembangunan kompetensi (*capacity building*) manajemen risiko dan kepatuhan.
4. Memastikan pemantauan kinerja dan *risk maturity* Perusahaan dan perbaikan secara berkesinambungan mengacu pada *best practice* serta berperan sebagai *risk management advisor* bagi pemilik Risiko.

**Duties and Responsibilities of Division of Risk Management & Compliance**

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary are listed in the PT PLN (Persero) Board of Directors' Regulation No. 0078.P/DIR/2017 on Organization and Work Procedures of PT PLN (Persero). The main duties and responsibilities of Division of Risk Management & Compliance are:

1. Utilizing the planning, implementation, and evaluation of the Company's Risk and Compliance Management policies and guidelines, and ensuring the stages of its implementation in both decision-making and other strategic activities.
2. Ensuring planning, implementation, risk management of Company's Risk and Risk mitigation, in collaboration with Risk owners, and conducting assessment, monitoring, and reporting of Company's key risks
3. Ensuring the preparation of Risk management infrastructure and compliance, and an adequate environment for the Risk management implementation, including risk & compliance management information system, and facilitating the risk management and compliance capacity building.
4. Ensuring the Company's performance monitoring, risk maturity, and continuous improvement refers to best practice and serves as risk management advisor for Risk owners.

## Manajemen Risiko

### Risk Management

5. Mengarahkan terkelolanya Risiko Kepatuhan di lingkungan Perusahaan termasuk Anak Perusahaan, berupa kepatuhan terhadap ketentuan internal maupun eksternal, termasuk di dalamnya *legal risk*, pengelolaan gratifikasi, pengembangan integritas dan etika beserta pemantauan dan pelaporannya.
6. Memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dan strategi kepatuhan (*compliance*) Perusahaan.
5. Guiding the management of Compliance Risk within the Company including Subsidiaries, in compliance with internal and external regulations, which cover legal risk, gratification management, integrity, and ethics development along with monitoring and reporting.
6. Ensuring the planning, implementation, and evaluation of the Company's compliance policies and strategies.

### Pengembangan Kompetensi Personil Manajemen Risiko & Kepatuhan

Selama tahun 2017, Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan bersama Pusdiklat (sesuai Program Pembelajaran berbasis LNA) mengadakan 47 Angkatan Diklat Manajemen Risiko yang terdiri dari tingkat Pelaksana sebanyak 38 angkatan, tingkat Manajer sebanyak 5 angkatan, Diklat Teknis Assesmen Risiko 1 angkatan, dan Diklat Pengantar Fraud Risk Management sebanyak 3 Angkatan.

Program pembelajaran manajemen risiko berbasis LNA ini termasuk di dalamnya program Pembelajaran yang non berbasis LNA (Permintaan Pembelajaran Manajemen Risiko berbasis permintaan unit dan program Pembelajaran pembedangan calon auditor dan Prajabatan), yang sampai dengan akhir tahun 2017 telah dilakukan kegiatan:

- a. Diklat Manajemen Risiko Dasar untuk Tingkat Pelaksana sebanyak : 63 Angkatan
- b. Diklat Manajemen Risiko Dasar untuk Tingkat Manajer sebanyak : 15 Angkatan
- c. Diklat Teknis Assesmen Risiko : Tidak ada pelaksanaannya
- d. Diklat Pengantar Fraud Risk Management : 3 Angkatan
- e. Diklat Manajemen Risiko Dasar untuk Pembedangan Calon Auditor : 1 Angkatan
- f. Diklat Risk Assesment Bidang Lingkungan : 1 Angkatan
- g. Diklat Sertifikasi Manajemen Risiko Ketenagalistrikan : 2 Angkatan

Selain diklat internal, program capacity building yang telah dilakukan adalah mengadakan program sertifikasi Manajemen Risiko yang diakui secara nasional maupun internasional oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), ditujukan untuk pegawai (Risk Officer) baik pada

### Risk Management & Compliance Personnel Competency Development

In 2017, Division of Risk Management & Compliance, in collaboration with Training Center (based on LNA-based Learning Program) held 47 batches Risk Management Training, consisting of 38 batches for Executors level, 5 batches of Managerial Level, 1 batch Technical Risk Assessment, and 3 batches of Introduction to Fraud Risk Management.

This LNA-based risk management learning program includes a non-LNA-based Learning program (Risk-Based Learning Demand based on the unit request and Auditor Training and Prepositioning). Until the end of 2017, the activities include:

- a. Training of Basic Risk Management for Executor Level of: 63 batches
- b. Training of Basic Risk Management for Managerial Level of: 15 batches
- c. Training of Technical Risk Assessment: None
- d. Training of Introduction to Fraud Risk Management: 3 batches
- e. Training of Basic Risk Management for Candidates of Auditor: 1 batches
- f. Risk Assessment on Environmental Training: 1 batches
- g. Electricity Risk Management Certification Training: 2 batches

In addition to the internal training, the capacity building program that has been implemented is to conduct Risk Management certification programs that are recognized nationally or internationally by the National Professional Certification Board (BNSP) for employees (Risk Officer)

Manajemen Risiko  
Risk Management

level pelaksana dengan modul Certified Risk Management for Officer (CRMO) maupun level manajer dengan modul Certified Risk Management for Professional (CRMP). Pada tahun 2017, jumlah pegawai yang telah mengikuti CRMP adalah 4 orang dan CMRO sebanyak 20 Orang.

## Sistem Informasi Manajemen Risiko

Perusahaan mengembangkan sistem manajemen risiko Perusahaan yang disebut dengan ERM Software Implementation (Qradar/eRMAP). eRMAP adalah aplikasi manajemen risiko berbasis web; di mana aplikasi tersebut di antaranya untuk kegiatan pemantauan serta update progress pengelolaan risiko maupun pelaporan untuk BOD dalam bentuk dashboard *executive summary* secara *real time*.

at the implementation level with the Certified Risk Management for Officer (CRMO) and manager level with Certified Risk Management for Professional (CRMP) module. In 2017, there are 4 employees who attended CRMP, and 20 employees who attended CMRO.

## Risk Management Information System

The Company developed a corporate risk management system called ERM Software Implementation (QRadat / eRMAP). eRMAP is a web-based risk management application. The applications include monitoring activities and updates on the progress of risk management and reporting for BOD in the form of executive summary dashboard in real time.

## Sasaran Penerapan eRMAP | eRMAP Implementation Target

-  **Menumbuhkan budaya manajemen risiko (preventif) dalam setiap pengelolaan Perusahaan**  
Growing a culture of risk management (preventive) in the Company's management
-  **Memastikan setiap pemilik risiko dalam Perusahaan mampu mengelola risikonya secara efektif dan efisien**  
Ensuring that each risk owner in the Company is able to manage the risks effectively and efficiently
-  **Meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan risiko dalam pencapaian visi, misi dan rencana strategis Perusahaan (jangka panjang maupun pendek)**  
Increasing integration in risk management in achieving the Company's vision, mission, and strategic plan (long-term and short-term)
-  **Mendorong perbaikan (*improvement*) segenap proses bisnis dengan mengintegrasikan (*embedding*) manajemen risiko ke dalam proses bisnis tersebut**  
Encouraging the improvement of all business processes by integrating (embedding) risk management into the business process
-  **Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan**  
Improving decision-making quality

Aplikasi berbasis web based client server yang aman untuk menyimpan *data base* risiko & mitigasi. Lebih lanjut, aplikasi ini dapat memantau dan melaporkan pelaksanaan mitigasi risiko dari Divisi/Satuan & Unit per triwulan & semester. Dalam eRMAP, terdapat ada fungsi *risk analytics* untuk memanfaatkan database risiko yang ada untuk keperluan pengambilan keputusan manajemen (Decision Support System; DSS).

Web-based application server based secure client to store risk database & mitigation. Further, this application is able to monitor and report the risk mitigation action from Division/Unit quarterly and semester. In eRMAP, there is a risk analytics function to take advantage of existing risk databases for management decision making (Decision Support System/DSS).

## Manajemen Risiko

### Risk Management

#### Fitur eRMAP | eRMAP Feature

-  **Menampilkan dashboard yang terintegrasi untuk memonitor risiko di seluruh lingkungan perusahaan.**  
 Displaying an integrated dashboard to monitor risk throughout the Company's environment.
-  **Sebagai alat untuk mengidentifikasi dan memonitor Key Risk Indicator.**  
 As a tool to identify and monitor the Key Risk Indicator.
-  **Mengintegrasikan kinerja perusahaan dengan manajemen risiko.**  
 Integrating Company's performance with risk management.
-  **Sebagai alat untuk mencatat *loss event*.**  
 As a tool to record loss event.
-  **Mampu menghasilkan print out laporan berdasarkan data yang telah diinput dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.**  
 Able to produce print out reports based on data that has been inputted and can be tailored to the needs of the company.
-  **Aplikasi ERM (Q-Radar) menggunakan *Corporate Digital Assurance (CDA)* yang bertujuan untuk meyakini bahwa apa yang dibuat oleh *Risk / Scorecard Owner* sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.**  
 The ERM (Q-Radar) application uses Corporate Digital Assurance (CDA) which aims to ensure that the Risk/ Scorecard Owner is correct and accountable.

#### Risiko-Risiko Utama Perusahaan

Dalam pelaksanaannya, Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan secara berkala melakukan evaluasi efektivitas sistem manajemen risiko korporat, dengan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direksi. Profil risiko dimaksud meliputi laporan pengelolaan risiko strategis, keuangan, operasional, proyek dan kepatuhan serta penilaian atas perbaikan kontrol dan penanganan risiko. Pada tahun 2017, terdapat beberapa profil risiko PLN, yakni:

#### Company's Main Risks

In practice, the Division of Risk Management & Compliance evaluates the effectiveness of the Company's Risk Management System, by submitting a risk profile report to the Board of Directors. These risk profiles include strategic risk, financial, operational, project, and compliance risk reports and assessments of improved control and risk handling. In 2017, there are several PLN Risk Profile, i.e.:

Manajemen Risiko  
Risk Management

No	Risk Type	Risk That Matter	Action Plan Mitigasi Risiko Risk Mitigation Action Plan
1	Keterlambatan Penyelesaian Proyek Transmisi dan GI   Delayed Completion of Project Transmission and GI	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Ketidaksielarasan penyelesaian proyek yang <i>associated</i></li> <li>· Peningkatan biaya sewa dan BBM pembangkit,</li> <li>· Target <i>fuelmix</i> dan BPP tidak tercapai,</li> <li>· Target pencapaian susut jaringan tidak tercapai,</li> <li>· Sustainability pasokan Tenaga listrik terancam Kehilangan kesempatan penjualan tenaga listrik yang ekonomis.</li> <li>· Associated project completeness discrepancy</li> <li>· Increased rental and fuel cost for generator,</li> <li>· Fuel mix and Cost of Supply target not achieved,</li> <li>· The network shrinkage achievement is not achieved,</li> <li>· Supply Sustainability</li> <li>· Electricity is threatened</li> <li>· Loss of opportunity sales of electricity is economical.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mendorong regulasi pemerintah untuk mempermudah eksekusi di lapangan</li> <li>· Melakukan kolaborasi antara unit induk pembangunan dengan unit operasi untuk pengurusan izin dan pengadaan lahan</li> <li>· Melakukan mediasi dengan arbitrase atau BPKP untuk menyelesaikan dispute kontrak</li> <li>· Mengutamakan prinsip fairness pada addendum kontrak</li> <li>· Melakukan rerouting jalur transmisi dengan menggunakan analisis yang akurat.</li> <li>· Encouraging government regulation to facilitate execution in the field</li> <li>· Collaborating with the development parent unit and the operating unit for the processing of permits and land acquisition</li> <li>· Mediating with arbitration or BPKP to complete dispute of contract</li> <li>· Prioritizing the principle of fairness on addendum contract</li> <li>· Rerouting transmission lines using accurate analysis.</li> </ul>
2	Keterlambatan Penyelesaian Proyek Pembangkit   Delayed Completion of Generator Project	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Peningkatan biaya sewa dan BBM pembangkit</li> <li>· Target <i>fuelmix</i> dan BPP tidak tercapai,</li> <li>· Sustainability pasokan tenaga listrik terancam,</li> <li>· Terjadi dispute kontrak / cost over run,</li> <li>· Kehilangan kesempatan penjualan tenaga listrik yang ekonomis,</li> <li>· Rasio elektrifikasi tidak tercapai,</li> <li>· Reputasi Perseroan menurun.</li> <li>· Increased rental and fuel cost for generator,</li> <li>· Fuel mix and Cost of Supply target not achieved,</li> <li>· Sustainability of power supply is threatened,</li> <li>· There was a dispute contract/ cost overrun,</li> <li>· Loss of opportunity sales of electricity is economical,</li> <li>· Electrification ratio not achieved,</li> <li>· Company's reputation declining.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Memperkuat manajemen proyek dan supervisi konstruksi</li> <li>· Meningkatkan akurasi dan kelengkapan data Feasibility Study</li> <li>· Menerapkan klausul penalty apabila terjadi keterlambatan proyek kepada kontraktor sesuai dengan kontrak yang disepakati.</li> <li>· Strengthening project management and construction supervision</li> <li>· Improving accuracy and data completion for Feasibility Study</li> <li>· Applying a penalty clause in the event of a project delay to the contractor in accordance with the agreed contract.</li> </ul>

## Manajemen Risiko

### Risk Management

No	Risk Type	Risk That Matter	Action Plan Mitigasi Risiko Risk Mitigation Action Plan
3	Hambatan pada Pengadaan Barang dan Jasa   Obstacles to Procurement of Goods and Services	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterlambatan pelaksanaan program kerja dan proyek strategis</li> <li>Hasil pengadaan tidak sesuai dengan yang diharapkan</li> <li>Timbul permasalahan hukum.</li> <li>Delays in implementation of work programs and strategic projects</li> <li>Procurement results are not as expected</li> <li>Arising legal issues.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memetakan risiko hukum dan melakukan evaluasi atas realisasi pelaksanaan pengadaan dengan pola baru</li> <li>Menginisiasi kebijakan exit policy untuk pengakuan corporate action pada proses pengadaan berdasarkan prinsip <i>business judgement rule</i></li> <li>Bekerjasama dengan kshk dalam pembuatan/ penerbitan kewenangan dalam pengadaan sesuai kebijakan reorganisasi.</li> <li>Mapping legal risk and evaluating the realization of procurement implementation with new pattern</li> <li>Initiating an exit policy for corporate action recognition in the procurement process based on business judgment rule principle</li> <li>Cooperating with KSHK to compile/issue authority of procurement, in accordance with the reorganization policy.</li> </ul>
4	Pembebasan Lahan Terkendala   Hindered Land Acquisition	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses inisiasi pengadaan proyek terlambat</li> <li>Potensi penjualan hilang</li> <li>COD proyek terlambat</li> <li>The process of initiating procurement project is delayed</li> <li>Sales potential lost</li> <li>Delayed COD project</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan kolaborasi antar fungsi/divisi terkait dalam proses awal perencanaan proyek terutama dalam penentuan lokasi</li> <li>Pembentukan tim kerja percepatan pengadaan tanah</li> <li>Coordination and collaboration among related functions/ divisions in the initial process of project planning especially in location determination</li> <li>Establishment of work team for acceleration of land acquisition</li> </ul>
5	Kenaikan Biaya Energi Primer   Primary energy tariff increase	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan beban operasi dan BPP</li> <li>Kebutuhan subsidi meningkat</li> <li>Improving operating cost and Cost of Supply</li> <li>Subsidy needs are increasing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong Pemerintah agar harga gas untuk industri berlaku juga untuk PLN</li> <li>Program pembelian langsung gas dengan skema G to G</li> <li>Zonasi penyediaan batubara</li> <li>Mengusulkan memperbesar porsi alokasi DMO batubara sesuai volume dan spesifikasi kebutuhan PLTU</li> <li>Mengoptimalkan peran Anak Perusahaan sejalan rencana PLN masuk ke bisnis midstream gas</li> <li>Melakukan pembelian batubara secara spot saat harga pasar turun</li> <li>Clustering penyediaan gas</li> <li>Pembelian spot LNG dalam negeri yang lebih murah saat harga pasar naik</li> <li>Formulasi mekanisme subsidi yang dapat mengakomodasi kenaikan biaya energi primer.</li> <li>Encouraging the Government to make industrial gas prices apply to PLN</li> <li>Direct gas purchase program with G to G scheme</li> <li>Zoning supply of coal</li> <li>Proposing to enlarge portion of coal DMO allocation according to volume and specification of Coal Power Plant requirement</li> <li>Optimizing the Subsidiaries' roles in line with PLN's plan to enter the midstream gas business</li> <li>Conducting spot coal purchases when market prices fall</li> <li>Clustering of gas supply</li> <li>Purchasing cheaper domestic LNG spot when market prices rise</li> <li>Formulating subsidy mechanisms that can accommodate the increase in primary energy costs.</li> </ul>

Manajemen Risiko  
Risk Management

No	Risk Type	Risk That Matter	Action Plan Mitigasi Risiko Risk Mitigation Action Plan
6	Hambatan pada Kontinuitas Pasokan Batubara   Barriers to Continuity of Coal Supply	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penurunan beban PLTU, atau berhenti beroperasi</li> <li>Target fuelmix tidak tercapai</li> <li>Peningkatan BPP dan overrun subsidi</li> <li>Sustainability pasokan tenaga listrik terancam</li> <li>Decline of Coal Power Plant load, or stop operating</li> <li>Fuel mix target not achieved</li> <li>Increased Cost of Supply and subsidy overrun</li> <li>Sustainability of power supply is threatened</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperbaiki/ menambah fasilitas <i>coal handling</i></li> <li>Koordinasi tentang DMO batubara bukan hanya berdasarkan volume batubara tetapi juga berdasarkan spesifikasi batubara</li> <li>Meningkatkan peran PLN BB dan BAG,</li> <li>Membangun laboratorium batubara yang sesuai standar di masing – masing site termasuk kesiapan SDM-nya</li> <li>Menyusun rencana re“Zona”lisasi pengadaan batubara</li> <li>Mempertimbangkan stok dan konsumsi batubara pada manajemen pengiriman batubara.</li> <li>Fixing/adding coal handling facilities</li> <li>Coordination on coal DMO is not only based on coal volumes but also based on coal specifications</li> <li>Improving the role of PLN BB and bag,</li> <li>Establishing a standardized coal laboratory at each site including its human resource readiness</li> <li>Arranging plans for rezoning of coal procurement</li> <li>Considering coal stock and consumption in coal delivery management.</li> </ul>
7	Hambatan pada Kontinuitas Pasokan Gas   Barriers to Continuity of Gas Supply	<ul style="list-style-type: none"> <li>Target fuelmix tidak tercapai</li> <li>Peningkatan BPP dan <i>overrun</i> subsidi</li> <li>sustainability pasokan tenaga listrik terancam.</li> <li>Fuel mix target not achieved</li> <li>Increased Cost of Supply and subsidy overrun</li> <li>Sustainability of power supply is threatened</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan amandemen perpanjangan PJBG untuk kontrak yang akan habis</li> <li>Pengembangan penggunaan pembangkit berbahan bakar LNG dan CNG di PLN</li> <li>Melakukan monitoring status kontrak gas dibandingkan dengan rencana kebutuhan gas untuk pembangkit</li> <li>Mengoptimalkan peran anak perusahaan untuk menggunakan opsi hedging baik <i>futures</i>, <i>swap</i> atau opsi lainnya dalam pengadaan gas</li> <li>Berkoordinasi dengan SKK migas agar pln mendapatkan harga dan volume yang wajar baik untuk perpanjangan kontrak eksisting maupun kontrak baru</li> <li>Merencanakan alternatif suplai bahan bakar lain apabila terjadi kekurangan pasokan gas.</li> <li>Amending the PJBG extension for the almost expired contract</li> <li>Development of the use LNG and CNG fuel power plants in PLN</li> <li>Monitoring the gas contract status compared to the gas needs plan for the plant</li> <li>Optimizing the subsidiaries’ role to use the hedging options and futures, swap, or other options and procuring gas</li> <li>Coordinating with SKKMigas to ensure PLN obtains reasonable price and volume, both for renewal of existing contract and new contract</li> <li>Planning alternatives to other fuel supplies in case of gas shortage.</li> </ul>

## Manajemen Risiko

### Risk Management

No	Risk Type	Risk That Matter	Action Plan Mitigasi Risiko Risk Mitigation Action Plan
8	Aspek Lingkungan / Proper di bawah Standar   Environmental/ Proper Aspect below Standard	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tuntutan ganti rugi dari masyarakat yang melebihi ketentuan Pemerintah</li> <li>Penurunan reputasi dan kepercayaan stakeholder kepada Perseroan</li> <li>Biaya dan prasyarat pendanaan eksternal meningkat</li> <li>Tuntutan hukum sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009</li> <li>The claim of compensation from the public that exceeds the provisions of the Government</li> <li>Decline of reputation and trust of stakeholders to the Company</li> <li>External funding costs and prerequisites are increasing</li> <li>Lawsuits according to Law No. 32 of 2009</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Me-review kebijakan perencanaan, pengelolaan dan pemenuhan aspek lingkungan di PLN</li> <li>Sertifikasi kompetensi bidang lingkungan di Pusat dan Unit/AP,</li> <li>Melakukan pemantauan secara konsisten tingkat Proper di Unit/AP dan memperbaiki proses pengelolaannya,</li> <li>Memasukkan aspek lingkungan sebagai salah satu KPI tahun 2017 dengan sasaran pembangkit PLN minimal kategori proper hijau,</li> <li>Membuat desain pembangkit baru yang komprehensif termasuk infrastruktur pengelolaan lingkungan,</li> <li>Mempercepat implementasi / penguatan fungsi K3L di Unit/AP,</li> <li>Menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait pengelolaan limbah hasil pembangkit,</li> <li>Memperluas implementasi ISO 14001: 2014 di Unit-unit yang belum sepenuhnya menerapkan,</li> <li>Pendekatan ke aparat penegak hukum agar penanganan proper hitam menuju ranah pembinaan.</li> <li>Reviewing planning, management, and fulfillment policy within PLN</li> <li>Certification of environmental competence at the Center and Unit/Subsidiary,</li> <li>Consistent monitoring of the Proper level in the Unit/Subsidiary and improving the management process,</li> <li>Incorporating environmental aspect as one of KPI 2017 with target that PLN power plant has a minimum green PROPER category,</li> <li>Creating a comprehensive new generator design including environmental management infrastructure,</li> <li>Accelerating implementation/strengthening of HSE function in Unit/Subsidiary,</li> <li>Cooperating with stakeholder related to waste management from the power plant,</li> <li>Expanding the ISO 14001: 2014 implementation in Units that haven't fully implemented it yet,</li> <li>Approaching law enforcement officers in order to handle black PROPER to coaching.</li> </ul>

Manajemen Risiko  
Risk Management

No	Risk Type	Risk That Matter	Action Plan Mitigasi Risiko Risk Mitigation Action Plan
9	Keselamatan Kerja / Zero Accident belum Tercapai   Zero Accident not achieved	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Adanya korban jiwa,</li> <li>· Luka berat atau cacat permanen</li> <li>· Aset instalasi rusak berat</li> <li>· Sustainability pasokan tenaga listrik terancam</li> <li>· Penurunan nilai kinerja korporat</li> <li>· Penurunan citra perseroan.</li> <li>· Casualties,</li> <li>· Severe injury or permanent disability</li> <li>· The installation asset is heavily damaged</li> <li>· Sustainability of power supply is threatened</li> <li>· Decrease in the value of corporate performance</li> <li>· Decrease in the Company's image.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Membuat framework peningkatan budaya K3 melalui sosialisasi tentang pelaksanaan K3 hingga ke unit induk pelaksana,</li> <li>· Membuat framework tata kelola K2/K3 oleh manajemen unit sampai ke unit pelaksana, sertifikasi kompetensi bidang K3 di pusat dan unit/ AP,</li> <li>· Menindaklanjuti temuan-temuan baik yang dibuat unit maupun pihak asuransi berupa perbaikan dan perawatan berkala <i>fire protection</i> dan peralatan K3 lainnya di unit pembangkitan dan gardu induk,</li> <li>· Me-review kembali pedoman dan kebijakan tentang pelaksanaan K3L di lingkungan PLN,</li> <li>· Memastikan syarat tentang implementasi K3L baik unit, AP dan mitra kerja,</li> <li>· Memastikan SDM memiliki sertifikasi kompetensi sesuai bidang tugasnya serta penyempurnaan SOP kegiatan operasional penanganan gangguan/ pemeliharaan.</li> <li>· Creating a framework for improving the culture of OHS through socialization of the OHS implementation to the holding unit,</li> <li>· Creating a K2/OHS governance framework by unit management to the implementing unit, competency certification of OHS field in the center and unit/subsidiary,</li> <li>· Following up the findings of both the unit and the insurer in the form of periodic maintenance and maintenance of fire protection and other OHS equipment in the generation unit and substation,</li> <li>· Reviewing the guidelines and policies on K3L implementation in PLN,</li> <li>· Ensuring the requirement for the implementation of good kK3L units, subsidiary, and partners,</li> <li>· Ensuring the human resources has the certificate of competency in accordance with their duties, and improving SOP of operations for handling disruption/maintenance.</li> </ul>

## Manajemen Risiko

### Risk Management

No	Risk Type	Risk That Matter	Action Plan Mitigasi Risiko Risk Mitigation Action Plan
10	Performa Pembangkitan Tenaga Listrik tidak sesuai Target   Performance of Power Generation does not match Target	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sustainability pasokan tenaga listrik terancam</li> <li>· Target <i>fuelmix</i> tidak tercapai</li> <li>· Peningkatan BPP dan <i>overrun</i> subsidi.</li> <li>· Sustainability of power supply is threatened</li> <li>· Fuel mix target not achieved</li> <li>· Increased Cost of Supply and subsidy overrun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Penyempurnaan sarana dan prasarana pendukung operasional pembangkit</li> <li>· Menjalankan program pengelolaan <i>heat rate</i> pembangkit, evaluasi dan tindak lanjut hasil ALCO dari <i>performance</i> dan kebutuhan sdm, kapitalisasi pembangkit, pemulihan dan revitalisasi pembangkit</li> <li>· Mengimplementasikan Enterprise Asset Management System (EAMS) pembangkit dan transmisi, membuat <i>roadmap</i> NPHR pembangkit</li> <li>· Membuat pedoman tentang perhitungan NPHR baik teknis maupun nonteknis, kerjasama O&amp;M dengan vendor atau AP, penyediaan <i>strategic equipment</i>, <i>strategic parts</i> sesuai dengan kajian yang akurat</li> <li>· Melakukan <i>strategic partnerships</i> dalam pengadaan bahan bakar berkualitas terutama untuk pembangkit yang sensitif, dan pelaksanaan program peningkatan keandalan pembangkit, termasuk revitalisasi atau pengadaan pltd pengganti sewa pada daerah dengan sistem listrik yang masih <i>isolated</i>.</li> <li>· Refinement of facilities and infrastructure supporting the operation of the plant</li> <li>· Running the plant's heat rate management program, evaluation and follow-up of alco results from performance and demand for HR, capitalization of the plant, recovery, and revitalization of the plant</li> <li>· Implementing enterprise asset management system (EAMS) of power plant and transmission, compiling NPHR plant roadmap</li> <li>· Making guidance on technical and non-technical NPHR calculations, o&amp;m cooperation with vendors or subsidiaries, providing strategic equipment, strategic parts according to accurate study</li> <li>· Conducting strategic partnerships in the provision of quality fuels, especially for sensitive plants, and the implementation of programs for increasing the reliability of power plants, including revitalization or procurement of replacement leases in areas with still isolated electrical systems.</li> </ul>

Manajemen Risiko  
Risk Management

No	Risk Type	Risk That Matter	Action Plan Mitigasi Risiko Risk Mitigation Action Plan
11	Performa Sistem Penyaluran Tenaga Listrik tidak sesuai Target   Performance of Electricity Transmission System does not match Target	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sustainability of power supply is threatened</li> <li>Fuel mix target not achieved</li> <li>Increased Cost of Supply and subsidy overrun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan suku cadang trafo dan material lainnya dengan prioritas material yang strategis</li> <li>Meningkatkan keandalan transmisi dengan program rekonduktoring dan penggantian SKTT, penggantian trafo berdasarkan hasil assessment</li> <li>Memperbaiki tegangan <i>drop</i> dengan MVAR / kapasitor, perbaikan kebocoran minyak SKTT dan <i>cross bonding</i>, rekondisi gis, rekonfigurasi sistem transmisi sehingga memenuhi persyaratan N – 1,</li> <li>Mengimplementasikan enterprise asset management system (eams) pembangkit dan transmisi</li> <li>Mempersiapkan sistem regional balance untuk menurunkan susut, pengadaan trafo tenaga dengan spesifikasi identik untuk memudahkan kerja paralel, dan melaksanakan program sapu bersih P2TL.</li> <li>Providing transformer spare parts and other materials with strategic material priority</li> <li>Improving transmission reliability by reconditioning and switching program, changing transformer based on assessment result</li> <li>Fixing voltage drop with MVAR/capacitor, SKTT oil leak repair, and cross bonding, recondition GIS, reconfiguration of transmission system to meet the requirements of n - 1</li> <li>Implementing enterprise asset management system (EAMS) of power plant and transmission</li> <li>Preparing a regional balance system to reduce losses, procure power transformers with identical specifications to facilitate parallel work, and implement P2TL sweep program.</li> </ul>
12	Gangguan Eksternal pada Instalasi Vital PLN   External Disruption on PLN Vital Installation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerusakan pada instalasi vital PLN, pemadaman yang meluas dan keamanan regional/nasional terganggu</li> <li>Damage to vital installations of PLN, widespread blackouts and regional/national security is disrupted</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggalakkan keterlibatan masyarakat dalam pengamanan instalasi PLN misalnya dengan optimalisasi CSR</li> <li>Memastikan SOP pengamanan sarana dan instalasi vital PLN dalam SMK3 terinternalisasi dengan baik di seluruh Unit PLN</li> <li>Mendorong seluruh Unit PLN membangun <i>Business Continuity Management System</i> (BCMS).</li> <li>Promoting community involvement in securing PLN installation, for example by optimizing CSR</li> <li>Ensuring SOP of PLN's vital facility and installation in SMK3 is well internalized in all PLN Units</li> <li>Encouraging all PLN units to develop Business Continuity Management System (BCMS).</li> </ul>

## Manajemen Risiko

### Risk Management

No	Risk Type	Risk That Matter	Action Plan Mitigasi Risiko Risk Mitigation Action Plan
13	Layanan TI Terganggu   Disruption of IT Services	<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan pelanggan terganggu, reputasi Perseroan menurun, keamanan data penting Perseroan terganggu, penerimaan pendapatan Perseroan terganggu, dan proses bisnis terhenti.</li> <li>The customer service is impaired, the Company's reputation declined, the Company's critical data security was disrupted, the Company's revenue was disrupted, and the business process stalled.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan kajian DRC site, implementasi ISO 27001 tentang standar sistem manajemen keamanan informasi, implementasi <i>next generation firewall</i></li> <li>Melakukan security assesment dan penetration test pada aplikasi korporat dan aplikasi-aplikasi baru secara regular</li> <li>Penerapan fitur keamanan pada jaringan komunikasi data Perseroan</li> <li>Peningkatan kompetensi SDM IT.</li> <li>Compiling DRC site review, implementing ISO 27001 on standard information security management system, implementing next-generation firewall</li> <li>Performing security assessment and penetration test on corporate application and new applications regularly</li> <li>Implementing security features on the Company's data communications network</li> <li>IT HR competence development</li> </ul>
14	Ketidaksiapan Anak Perusahaan dan Afiliasi untuk Mendukung Bisnis Korporat   Unreadiness of Subsidiaries and Affiliates to Support Corporate Business	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inefisiensi biaya (BPP naik), Opportunity loss dalam hal melaksanakan backward and forward integration,</li> <li>Potensi kehilangan core competency.</li> <li>Cost inefficiency (increase of Cost of Supply),</li> <li>Opportunity loss in terms of backward and forward integration,</li> <li>Potential loss of core competency.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan <i>mapping</i> terhadap keselarasan antara strategi PLN secara korporat dengan Anak Perusahaan/afiliasi dan perusahaan turunannya, termasuk tata kelola dan regulasi</li> <li>Membuat arah dan strategi pengembangan dan pedoman pendirian,</li> <li>Pengembangan bisnis dan restrukturisasi Anak Perusahaan/afiliasi dan perusahaan turunannya.</li> <li>Mapping on the alignment of PLN's corporate strategy with its subsidiaries/affiliates and derivative companies, including governance and regulation</li> <li>Establishing direction, development strategy, and established guidelines,</li> <li>Business development and restructuring of Subsidiaries/affiliates and their subsidiaries.</li> </ul>
15	Ketersediaan Likuiditas tidak Terpenuhi   Liquidity Availability Unfulfilled	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terancam default karena tidak membayar tepat waktu sesuai kontrak/SLA</li> <li>Terancam default karena terlampauinya Debt Covenant</li> <li>Terganggunya pelayanan penyediaan tenaga listrik</li> <li>Reputasi Perseroan menurun.</li> <li>Threatened by default for not paying on time according to contract/SLA</li> <li>Threatened by default due to the exceedance of the Debt Covenant</li> <li>Disruption of electricity supply service</li> <li>Company's reputation declining.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkoordinasi dengan stakeholders terkait pemenuhan minimum cash flow,</li> <li>Berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai kemungkinan terlampauinya Debt Covenant</li> <li>Mempersiapkan strategi efektivitas proses migrasi dan pemberlakuan tarif nonsubsidi</li> <li>Membuat simulasi perhitungan kebutuhan tambahan subsidi untuk usulan pada APBN-P 2017</li> <li>Menjalankan Pro-IDI2 (Program Intensifikasi Dana Internal untuk Investasi) yang efektif.</li> <li>Coordinating with stakeholders in terms of minimum cash flow fulfillment,</li> <li>Coordinating with related institutions on the possibility of Debt Covenant exceedance</li> <li>Preparing strategies for the effectiveness of the migration process and the enforcement of non-subsidized tariffs</li> <li>Simulating the calculation of subsidy additional requirement for proposal in Revised State Budget (APBN-P) 2017</li> <li>Conducting effective Pro-IDI2 (Internal Fund Intensification Program for Investment).</li> </ul>

Manajemen Risiko  
Risk Management

No	Risk Type	Risk That Matter	Action Plan Mitigasi Risiko Risk Mitigation Action Plan
16	Kenaikan Nilai Tukar Mata Uang Asing terhadap IDR   Increase of Foreign Exchange Rates against Rupiah	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Peningkatan beban operasi dan BPP</li> <li>· Peningkatan beban pengembalian pinjaman (pokok dan bunga) berdenominasi valas</li> <li>· Subsidi bertambah besar</li> <li>· Berkurangnya kemampuan pendanaan internal.</li> <li>· Improving operating cost and Cost of Supply</li> <li>· Increased loan repayment expenses (principal and interest) denominated in foreign currency</li> <li>· Growth of subsidy</li> <li>· Reduced internal funding capability.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Meningkatkan kemampuan SDM dan kompetensi</li> <li>· Meningkatkan sistem yang lebih baik dalam penentuan keputusan hedging terus dilakukan.</li> <li>· Improving HR capabilities and competence</li> <li>· Improving the system in determining hedging decisions.</li> </ul>
17	Penyesuaian Tarif Pelanggan Subsidi ke Non Subsidi tidak Optimal   Customers Tariff Adjustment from Subsidies to Non-Subsidies are not Optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Subsidi tidak cukup</li> <li>· Cash flow perseroan terganggu</li> <li>· Debt covenant tidak terpenuhi</li> <li>· Kegiatan operasional dalam rkap tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan.</li> <li>· Inadequate subsidy</li> <li>· Disruption on Company's Cashflow</li> <li>· Debt covenant not achieved</li> <li>· Operational activities in the RKAP are not fully feasible.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Memastikan strategi migrasi pelanggan subsidi ke nonsubsidi sudah diimplementasikan pada awal Januari 2017</li> <li>· Koordinasi dengan pemerintah untuk menetapkan pelanggan bersubsidi</li> <li>· Memastikan aplikasi pengaduan berbasis web yang telah disiapkan berfungsi dengan baik</li> <li>· Memastikan pemerintah membentuk tim posko pusat (ditjen gatrik, kementerian sosial, TNP2K, PLN)</li> <li>· Persiapan tambahan subsidi di apbnp 2017 bila pelanggan rumah tangga 450 VA pelaksanaannya mundur</li> <li>· Melaksanakan survei pencocokan data pelanggan 450 VA sejumlah 19,1 juta pelanggan rumah tangga</li> <li>· Ensuring subsidized subscriber migration strategy has been implemented in early January 2017</li> <li>· Coordinating with Government to set the subsidized customers</li> <li>· Ensuring that web-based complaint application that have been set up and work properly</li> <li>· Ensuring the government establishes a central post team (Directorate General of Electricity, Ministry of Social Affairs, TNP2K, PLN)Preparation of additional subsidies in APBNP-P 2017 if 450 VA household customers did not execute</li> <li>· Conducted a 450 VA customer data matching survey of 19.1 million household customers</li> </ul>

## Manajemen Risiko

### Risk Management

No	Risk Type	Risk That Matter	Action Plan Mitigasi Risiko Risk Mitigation Action Plan
18	Pertumbuhan Konsumsi Tenaga Listrik di bawah Target   Electricity Consumption Growth under Target	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pendapatan dari penjualan listrik lebih rendah dari rencana</li> <li>· Tingkat return on investment aset PLN di bawah target</li> <li>· PLN terkena penalti TOP (take or pay) IPP dan supplier energi primer.</li> <li>· Revenue from electricity sales is lower than planned</li> <li>· The return on investment level of assets is below target</li> <li>· PLN is imposed by penalty (take or pay) from IPP and Supplier of primary energy.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Memastikan program 35gw tepat waktu dalam rangka mencukupi kebutuhan listrik terutama untuk daerah – daerah yang potensi pertumbuhan penjualannya ada</li> <li>· Mendorong pemerintah agar mempertimbangkan optimalisasi peran PLN sebelum memberikan izin wilayah usaha kelistrikan kepada pihak lain</li> <li>· Mendorong pemerintah pusat/ daerah untuk mempercepat arus masuk investasi agar industri dan perdagangan tumbuh lebih cepat sehingga dapat menyerap listrik lebih banyak.</li> <li>· Mempercepat pelayanan penyambungan pelanggan industri menengah dan besar, serta mengupayakan perbaikan peringkat getting electricity untuk merangsang masuknya investasi di Indonesia</li> <li>· Ensuring timeliness of 35GW program in order to meet the demand for electricity, especially for areas where there is potential for sales growth</li> <li>· Encouraging the government to consider optimizing the role of PLN before granting the license of the electric business area to the other party</li> <li>· Encouraging the central/local government to accelerate the inflow of investment so that industry and trade grow faster to absorb more electricity.</li> <li>· Accelerating the service of middle and large industrial customers, and striving to improve the getting electricity rating to stimulate investment in Indonesia</li> </ul>
19	Tidak Diperoleh Pendanaan yang Memadai untuk Korporasi   No Adequate Funding is Provided for Corporations	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Terhambatnya penyediaan infrastruktur tenaga listrik</li> <li>· Inhibition of electricity infrastructure provision</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mencari alternatif skema pendanaan yang praktis dan efisien melalui kemitraan bisnis dalam dan luar negeri</li> <li>· Memperbaiki rating PLN, usulan kepada pemerintah untuk tambahan pmn</li> <li>· Mengusulkan pinjaman dengan/tanpa jaminan pemerintah</li> <li>· Menjalankan secara optimal sumber pendanaan yang <i>feasible</i> untuk mencukupi kebutuhan investasi.</li> <li>· Looking for practical and efficient funding scheme alternatives through domestic and foreign business partnerships</li> <li>· Fixing PLN rating, proposal to government for additional PMN</li> <li>· Proposing loans with/without government guarantees</li> <li>· Conducting an optimally feasible funding source to meet the investment needs.</li> </ul>

Manajemen Risiko  
Risk Management

No	Risk Type	Risk That Matter	Action Plan Mitigasi Risiko Risk Mitigation Action Plan
20	Kapasitas dan Kapabilitas SDM tidak Terpenuhi   HR capacities and capabilities not achieved	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kompetensi dasar Perseroan mengalami penurunan</li> <li>· Terganggunya operasional serta penurunan kinerja Perseroan</li> <li>· Terganggunya beberapa proses bisnis strategis, misal Proses Pengadaan Barang &amp; Jasa</li> <li>· Penurunan citra/kepercayaan stakeholder menurun</li> <li>· Proses transformasi organisasi terlambat.</li> <li>· The Company's basic competence has decreased</li> <li>· Operational disruption and declining performance of the Company</li> <li>· Disruption of some strategic business processes, e.g. Procurement Process of Goods &amp; Services</li> <li>· Decreased image/stakeholders' trust</li> <li>· The process of organizational transformation is delayed.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pembenahan data pegawai terkait profesi dan <i>turnover</i> (nonpensiun normal) dikelola dan dimonitor lebih optimal, evaluasi,</li> <li>· Monitoring dan pelaporan statistik performa pegawai yang optimal sebagai dasar pengembangan, rekrutmen, mutasi, dan promosi,</li> <li>· Memastikan PTK (Perencanaan Tenaga Kerja) yang lebih optimal,</li> <li>· Melakukan evaluasi atas pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja dengan mengacu pada PTK,</li> <li>· Memastikan transfer knowledge pegawai yang mutasi, rotasi, promosi, dan pensiun, memastikan peran pegawai yang mempunyai kompetensi tertentu (<i>critical</i>) tetap terbina dan terpelihara melalui sertifikasi kompetensi personal, memastikan terpenuhinya gap kompetensi dan pengembangan talent sesuai passion dan talentanya melalui program pengembangan SDM, Menerbitkan Surat Penugasan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan di luar uraian jabatan,</li> <li>· Melakukan pemerataan jumlah dan kompetensi antarunit,</li> <li>· Memenuhi gap untuk Pejabat struktural dan program <i>Leadership Development Program</i> dan akselerasi PLT dengan program percepatan EE/SE bagi PLT.</li> <li>· Employee data collection related to profession and turnover (normal non-pension) managed and monitored more optimally, evaluation,</li> <li>· Monitoring, and reporting of employee performance optimal statistics as a basis for development, recruitment, transfer, and promotion,</li> <li>· Ensuring that PTK (Manpower Planning) is more optimal,</li> <li>· Evaluating the recruitment of labor by referring to PTK,</li> <li>· Ensuring the transfer knowledge of mutated, rotated, promoted, and pension employees, ensuring the role of employees with critical competence is maintained and fostered through certification of personal competence, ensuring the competence gap and talent development based on passion and talent through human resource development program,</li> <li>· Issuing an Assignment Letter for the execution of duties and authorities outside the job description,</li> <li>· Performing equal distribution of numbers and competencies between the units,</li> <li>· Filling the gaps for Structural Officials and Leadership Development Program and PLT acceleration programs with EE/ SE acceleration program for PLT.</li> </ul>

## Manajemen Risiko

### Risk Management

No	Risk Type	Risk That Matter	Action Plan Mitigasi Risiko Risk Mitigation Action Plan
21	Regulasi Ketenagalistrikan yang Kurang Mendukung Bisnis PLN   Electricity Regulation that does not support the PLN Business	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi regulasi ketenagalistrikan yang terbit tidak efektif</li> <li>Kinerja perseroan tidak optimal</li> <li>Tingkat pelayanan tidak optimal</li> <li>BPP tinggi</li> <li>Penyelesaian pembangunan ketenagalistrikan terhambat.</li> <li>Implementation of emerging electricity regulations is ineffective</li> <li>Company's performance not optimal</li> <li>Services level not optimal</li> <li>High Cost of Supply</li> <li>The completion of the electricity development is hampered.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan <i>regulatory impact analysis</i></li> <li>Membangun dan mengimplementasikan stakeholders management</li> <li>Melakukan penyesuaian pemahaman terhadap regulasi yang diterbitkan.</li> <li>Conducting regulatory impact analysis</li> <li>Building and implementing stakeholders management</li> <li>Aligning the understanding of published regulations.</li> </ul>

## REVIEW EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Nilai risk maturity level sebesar 3,62 di tahun 2017 menandakan bahwa pengelolaan risiko Perusahaan semakin baik dan optimal. Melalui perbaikan berkelanjutan di dalam proses manajemen risiko serta pengembangan kompetensi dan proses pembelajaran secara berkesinambungan terhadap teknologi dan informasi bidang manajemen risiko, diharapkan tingkat penerapan manajemen risiko Perusahaan akan terus semakin efektif.

## UPAYA PENINGKATAN BUDAYA RISIKO

Guna mencapai efektivitas terbaik, Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan melakukan upaya berkesinambungan untuk mengembangkan *corporate risk culture* di seluruh proses bisnis, seperti halnya menginisiasi pengelolaan risiko dengan pendekatan KPI dan RKAP, mengeluarkan dokumen petunjuk teknis terkait implementasi Enterprise Risk Management (ERM), melakukan audit manajemen risiko oleh auditor internal, melakukan review implementasi dan asesmen risk maturity oleh pihak independen dan pemantauan dan pelaporan kepada *stakeholders*.

## REVIEW ON EFFECTIVENESS OF RISK MANAGEMENT SYSTEM

Risk maturity level in 2017 is 3.62, which indicates that the Company's risk management is getting better and more optimal. Through continuous improvement in risk management process, competency development, and continuous learning process to technology and information of risk management field, it is expected that the implementation level of Company's risk management will be more effective.

## RISK CULTURE IMPROVEMENT EFFORTS

In order to achieve the best possible effectiveness, the Division of Risk Management and Compliance strives to develop corporate risk culture throughout business processes, such as initiating risk management with KPI and RKAP approaches, issuing technical guidance documents related to Enterprise Risk Management (ERM) implementation, conducting risk management audit by internal auditors, reviewing implementation and assessment of risk maturity by independent parties, and monitoring and reporting to stakeholders.

## TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

### Information Technology Governance



Untuk menjaga agar pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara optimal, terukur, terarah dan memenuhi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), PLN menyusun sistem tata kelola TI atau *IT Governance* yang termuat dalam *IT Master Plan*. Tata Kelola Teknologi Informasi memberikan suatu struktur yang mampu menghubungkan proses-proses dan sumber daya teknologi informasi serta informasi itu sendiri dengan strategi dan tujuan Perseroan. Sehingga akan tercipta suatu sistem yang terintegrasi antara tujuan implementasi teknologi informasi serta tujuan usaha Perseroan yang memberi nilai tambah dan menyeimbangkan risiko dengan hasil yang diperoleh.

Implementasi tata kelola teknologi informasi di PT PLN (Persero) mengacu kepada:

- Peraturan Menteri PER-01-MBU-2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Peraturan Menteri PER-02-MBU-2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan TI BUMN
- Kepdir No. 529.K/DIR/2010 perihal Pedoman dan Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan PT PLN (Persero)

PLN develops IT governance system or IT Governance contained in the IT Master Plan to maintain the development and utilization of information technology that can be utilized optimally, measurable, directed, and meet the principles of Good Corporate Governance (GCG). Information Technology Governance provides a structure capable of connecting processes of information technology, information technology resources, and the information itself with the Company's strategy and objectives, to create an integrated system between the implementation objectives of information technology and business objectives of the Company, which provide added value and balance the risk and the results.

Information Technology Governance implementation in PT PLN (Persero) refers to:

- Ministerial Regulation No. PER-01-MBU-2011 on Good Corporate Governance (GCG) Implementation on State-Owned Enterprises (SOEs)
- Ministerial Regulation No. PER-02-MBU-2013 on Guidelines of IT Management for SOEs
- President Director's Decree No. 529.K/DIR/2010 on the Guidelines and Policy of Information Technology Governance within PT PLN (Persero)

## Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technology Governance

- Keputusan Direksi No 026/K.DIR/2010 tentang Pengamanan Sistem dan Teknologi Informasi

Dalam upaya membantu pelaksanaan Tata Kelola Teknologi Informasi maka Perseroan menetapkan 3 (tiga) mekanisme tata kelola:

- Struktur Organisasi Tata Kelola**  
Perseroan menetapkan struktur organisasi tata kelola berkaitan dengan pengelolaan kebijakan Teknologi Informasi yang dapat memastikan berjalannya IT Governance sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku universal.
- Proses Kebijakan Teknologi Informasi**  
Proses kebijakan Teknologi Informasi yaitu proses-proses yang ditujukan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan utama Tata Kelola Teknologi Informasi dapat tercapai, terkait dengan pencapaian tujuan organisasi, pengelolaan sumber daya dan Manajemen Risiko.
- Komunikasi Kebijakan Teknologi Informasi**  
Agar Tata Kelola Teknologi Informasi berjalan efektif, maka harus dikomunikasikan ke seluruh bagian dari Perseroan. Perseroan harus mengedukasi seluruh insan Perseroan mengenai pemahaman Tata Kelola Teknologi Informasi. Komunikasi dilakukan secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan Tata Kelola yang efektif.

### Struktur Kebijakan Tata Kelola TI

Untuk mendukung implementasi tata kelola teknologi informasi, telah disusun struktur untuk menggambarkan posisi kebijakan, Standard dan SOP yang menjadi landasan untuk pengelolaan TI, baik dari segi aplikasi maupun infrastruktur. Berikut struktur tata kelola TI:



- Directors' Decree No. 026/K.DIR/2010 on Security of Information Technology System

In an effort to assist the Information Technology Governance implementation, the Company established 3 (three) governance mechanisms:

- Governance Organizational Structure**  
The Company sets out the governance organizational structure related to the management of the Information Technology policy to ensure that the IT Governance implementation is in accordance with universally accepted norms.
- Information Technology Policies Process**  
The Information Technology policy is the processes aimed at ensuring that key IT Governance goals will be achieved, related to the achievement of organizational goals, resource management, and Risk Management.
- Information Technology Policies Communication**  
In order to ensure the effectiveness of Information Technology Governance, the IT Governance must be communicated to all parts of the Company. The Company shall educate all the employees on the understanding of Information Technology Governance. Communication must be conducted continuously to ensure the effective Governance.

### IT Governance Policies Structure

To support the implementation of information technology governance, structures have been developed to illustrate policy positions, standards, and SOPs that form the basis for IT management, both in terms of applications and infrastructure. The IT governance structure is as follows:

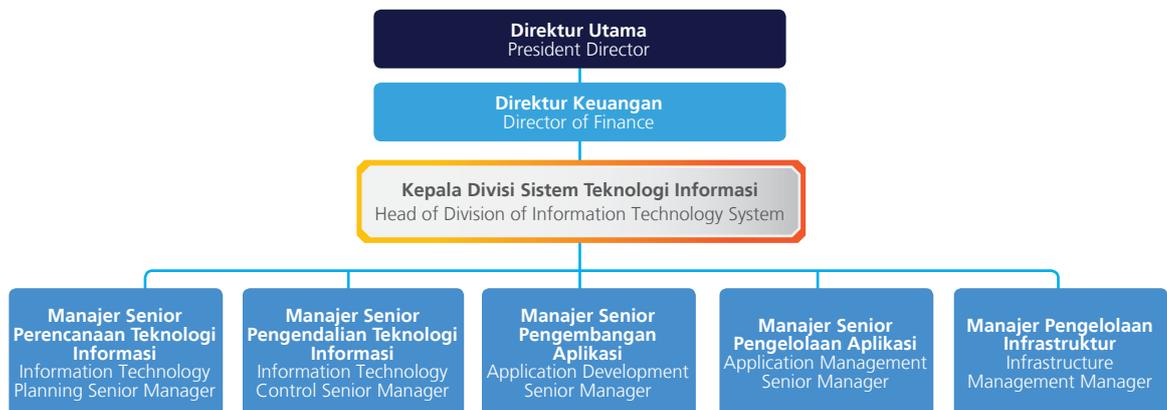
Tata Kelola Teknologi Informasi  
Information Technology Governance

## Struktur Organisasi Divisi Sistem Teknologi Informasi

Berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0078.P/DIR/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero), Divisi Sistem Teknologi Informasi berada di bawah Direktur Keuangan dengan struktur sebagai berikut:

## Organizational Structure of Division of Information Technology System

Based on Directors' Regulation of PT PLN (Persero) No. 0078.P/DIR/2017 on the Organization and Work Procedures of PT PLN (Persero), the Division of Information Technology System is reporting directly to the Director of Finance, and the structure is as follows:



## Komite Teknologi Informasi

Untuk memastikan bahwa TI di perusahaan terlaksana dengan baik, memberikan pencapaian nilai optimal dan selaras dengan bisnis, serta untuk mengambil keputusan strategis TI maka perusahaan membentuk Komite TI atau yang biasa dikenal dengan istilah IT Steering Committee. Komite Teknologi terdiri dari Direksi PLN selaku Dewan Pengarah dan beranggotakan 20 orang Kepala Divisi.

## Information Technology Committee

To ensure that IT in the company is performing well, delivering optimum value, and aligning with business, and to make strategic IT decisions, the Company establishes IT Committees, or commonly known as IT Steering Committee. The Technology Committee consists of PLN's Board of Directors as the Steering Committee and consists of 20 Head of Division.

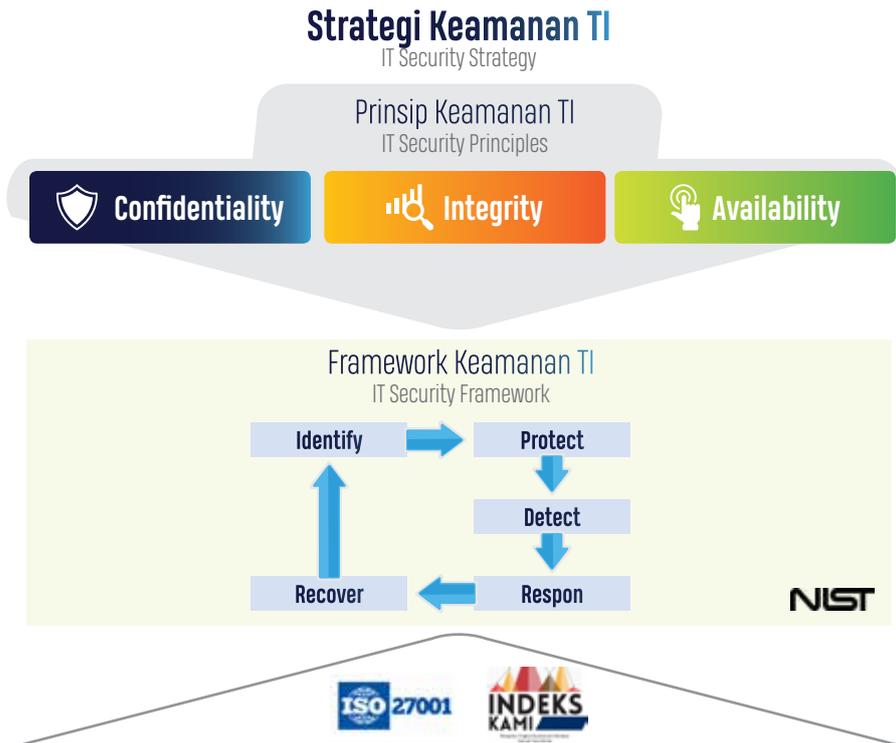
## Tata Kelola Keamanan TI

PLN memastikan semua risiko yang berkaitan dengan *cyber security* dan *disaster recovery* telah dikelola dengan menerapkan 3 prinsip keamanan TI, yaitu *Confidentiality*, *Integrity* dan *Availability* dan mengacu pada *framework National Institute of Standards and Technology (NIST)* dan standar ISO 27001 serta INDEKS KAMI. Framework keamanan TI PLN dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

## IT Security Governance

PLN ensures that all risks related to cyber security and disaster recovery have been managed by implementing the 3 IT security principles, i.e. Confidentiality, Integrity, and Availability, and referring to the framework of National Institute of Standards and Technology (NIST), and ISO 27001 standards and INDEKS KAMI. PLN's IT security framework can be seen in the picture below:

Tata Kelola Teknologi Informasi  
Information Technology Governance



Proses *identify* adalah memahami organisasi untuk pengelolaan resiko, *protect* adalah melaksanakan implementasi *safeguard*, *detect* adalah melakukan *monitoring* gangguan/ serangan, *respon* untuk menindaklanjuti gangguan/serangan yang terdeteksi dan *recover* sebagai upaya mengembalikan kapabilitas atau layanan yang terganggu.

'Identify' is to understand the organization for risk management, 'protect' is to implement safeguard, 'detect' is to monitor the disturbance/attack, 'response' is to follow-up the detected/recovered attack and 'recover' is an effort to restore the capability or service disturbed.

PLN memastikan bahwa layanan TI terkait *Revenue Assurance* yaitu Aplikasi Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Terpusat dan Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat telah terproteksi dengan baik dari ancaman *Cyber Security* melalui *Security Assessment* dan *Penetration Test* secara proaktif. Secara berkesinambungan melakukan pengujian keamanan dan memberikan rekomendasi – rekomendasi perbaikan pada aplikasi – aplikasi yang ada di lingkungan Perseroan untuk menjaga kehandalan keamanan TI. PLN menerapkan *Secure Sockets Layer* pada aplikasi korporat yang bersifat kritikal dan dapat diakses dari internet. Pada lapisan fisik, PLN melakukan pemisahan jaringan untuk kepentingan kantor-kantor PLN dengan jaringan untuk sistem teleproteksi atau SCADA.

PLN ensures that IT Asset-related revenue services, such as the Centralized Revenue Flow Management and Monitoring Application, and Centralized Customer Services Application are well protected from cyber security threats through Security Assessment and Penetration Test proactively. Continuously perform security testing and provide repair recommendations on existing applications within the Company to maintain reliability of IT security. PLN implements Secure Sockets Layer in critical corporate applications that can be accessed on the internet. In the physical layer, PLN separates the network for the interest of PLN offices networks for teleprotection or SCADA systems.

Tata Kelola Teknologi Informasi  
Information Technology Governance**Strategi Pengembangan Teknologi Informasi**

Strategi utama perusahaan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (2015 – 2019), arahan strategi bisnis seperti rasio elektrifikasi, proyek 35.000MW, Optimalisasi Aset dan peningkatan *operational excellence* serta dorongan dari perkembangan TI terkini berimplikasi pada TI PLN yang harus selalu selaras dalam usahanya untuk mendukung bisnis dan strategi utama perusahaan tersebut. Implikasi terhadap TI PLN dapat disarikan menjadi 5 kelompok strategi utama pengembangan TI, yaitu:

1. Prioritas Bisnis Dukungan IT yang berfokus kepada kegiatan bisnis *Capital Projects, Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, dan Penjualan*, serta *Corporate Services*.
2. Optimalisasi Aplikasi Bisnis rasionalisasi, standardisasi, konsolidasi, dan integrasi aplikasi-aplikasi bisnis
3. Integrasi Informasi Arsitektur informasi dengan model tata kelola yang sesuai
4. Infrastruktur & Teknologi *Agility*, kehandalan, ketersediaan, dan keamanan layanan serta sistem IT
5. Model Operasi TI yang mampu mengelola lanskap TI yang semakin kompleks dan luas cakupannya.

Pelaksanaan pengembangan Teknologi Informasi PLN dalam *framework IT Governance* menerapkan *IT Guiding Principles* seperti *IT Business Alignment, IT Financial Management, IT Service Continuity, Information Management, Application Management, Technology Management, IT Policies & Standard, IT Responsibilities dan IT Talent Management* agar senantiasa sesuai dengan kaidah *Good Corporate Governance (GCG)*. Sehingga kebutuhan bisnis yang mengarah kepada penguatan proses bisnis, optimalisasi aplikasi bisnis, integrasi informasi, dan penguatan infrastruktur dapat terpenuhi. Keseluruhan keterhubungan strategi pengembangan TI dapat dilihat pada gambar lebih lanjut.

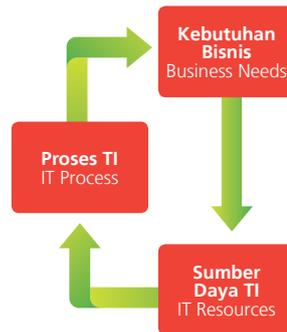
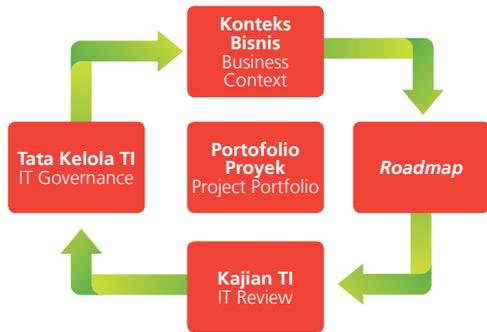
**Information Technology Development Strategies**

The Company's main strategy in Company Long Term Plan (2015 - 2019), the direction of business strategies, such as electrification ratio, 35,000MW project, Asset Optimization, and operational excellence enhancement, and the impetus of the latest IT developments have implications for PLN's IT. It must always be aligned to support the Company's business and main strategy. The implications for PLN's IT are summarized into 5 main IT strategy groups, i.e.:

1. IT Support for Business Priorities, focuses on the business activities of Capital Projects, Generation, Transmission, Distribution, Sales, and Corporate Services.
2. Business Application Optimization rationalization, standardization, consolidation, and integration of business applications
3. Architecture Information Integration, with appropriate governance model
4. Agility of Infrastructure and Technology, reliability, availability, service security, and IT system
5. IT Operation Model to manage the IT landscape that is more complex and ever expanding.

The development of PLN Information Technology in the framework of IT Governance implements the IT Guiding Principles, such as IT Business Alignment, IT Financial Management, IT Service Continuity, Information Management, Application Management, Technology Management, IT Policies & Standard, IT Responsibilities, and IT Talent Management to always be in accordance with the Good Corporate Governance (GCG) principles. Thus, business needs are directed to the strengthening of business processes, business application optimization, information integration, and infrastructure strengthening. Overall connectivity of IT development strategy can be seen in the picture as follows.

## Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technology Governance



- ▶ Penguatan proses bisnis
- ▶ Optimalisasi aplikasi bisnis
- ▶ Integrasi informasi
- ▶ Penguatan Infrastruktur
- ▶ Business process strengthening
- ▶ Business application optimization
- ▶ Information Integration
- ▶ Infrastructure strengthening

Pada gambar diatas juga dijelaskan bahwa perubahan dapat dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan bisnis dan proses TI dengan memperhatikan sumber daya TI.

The picture above also explained that changes can be made to anticipate business needs and IT processes with respect to IT resources.

### Pengembangan Teknologi Informasi

Pengembangan Teknologi Informasi yang disusun dengan sistematika penyajian aritektur kondisi saat ini dan kondisi sasaran beserta RoadMap Pengembangan Teknologi Informasi juga tertuang dalam IT Master Plan.

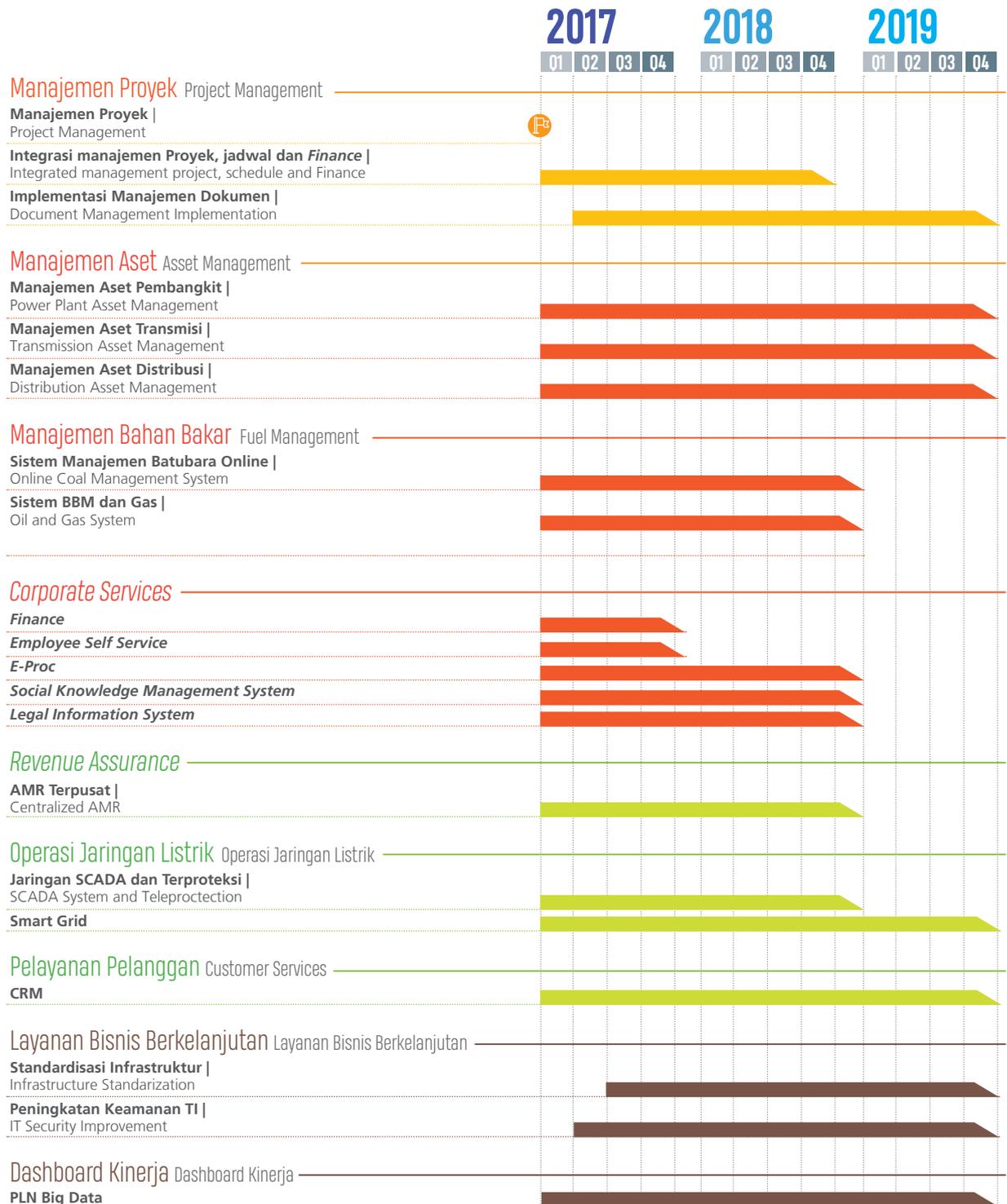
### Information Technology Development

Information Technology Development, which is arranged by systematically presenting the architecture of current condition and target condition along with Roadmap of Information Technology Development, is also stipulated in IT Master Plan.

RoadMap teknologi informasi disusun untuk periode 3-5 tahun kedepan yang diselaraskan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan dimuat dalam rencana tahunan yang menjadi bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) seperti yang tertuang berikut ini.

The information technology roadmap is structured for the next 3-5 years, which is aligned with the Company's Long-Term Plan (RJPP) and is included in the annual plan as part of the Company's Work and Budget Plan (RKAP) as the following.

Tata Kelola Teknologi Informasi  
Information Technology Governance



## Tata Kelola Teknologi Informasi

Information Technology Governance

## IT SERVICE MANAGEMENT

*Service Management* memperkenalkan *Service Desk* TI PLN sebagai sarana, *Single Point of Contact* (SPOC), bagi pegawai PLN yang menggunakan layanan TI Korporat untuk mengajukan keluhan atau permintaan layanan yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan terkait layanan TI agar operasional pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Jumlah layanan yang telah terlayani oleh *Service Desk* PLN dalam 5 tahun terakhir telah bertambah dari 9 layanan menjadi 17 layanan dan dengan rata-rata 1 orang *support* melayani 208 *user*. Divisi STI memiliki *IT Service Catalog* yang mencakup 17 layanan sebagai berikut:

## IT SERVICE MANAGEMENT

*Service Management* introduces PLN's IT Service Desk as a Single Point of Contact (SPOC) for PLN employees who use Corporate IT services to file a complaint or request to assist on solving problems related to IT services to ensure that the operations run smoothly.

PLN Service Desk has averagely increased from 9 services to 17 services and with an average of 1 person support serving 208 users in the last 5 years. Division of STI has IT Service Catalog which covers 17 services as follow:

Jenis Layanan/ Sistem Type of Service/System	Deskripsi   Description	Business Process Owner	User
ERP PLN	Sistem untuk mencatat, mengontrol dan menjalankan proses bisnis Keuangan, Material dan SDM   System to record, control, and perform the Financial, Material, and HR business process	PLN Kantor Pusat PLN Head Office	Internal Nasional National Internal
e-Proc	Sistem untuk menjalankan proses registrasi supplier, lelang, dan seleksi supplier untuk pengadaan barang dan jasa.   System to run supplier registration process, auction, and supplier selection for procurement of goods and services.	PLN Kantor Pusat-Divisi Supply Change Management PLN Head Office - Division of Supply Change Management	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Internal Nasional</li> <li>· Eksternal (Vendor)</li> <li>· National Internal</li> <li>· External (Vendor)</li> </ul>
Email dan Jaringan Data Email and Data Network	Sistem yang digunakan untuk mengirimkan surat melalui jaringan internet   The system is utilized to send letters over the internet network	PLN Kantor Pusat PLN Head Office	Internal Nasional National Internal
Desktop Support	Layanan pemeliharaan <i>desktop</i>   Desktop maintenance services	PLN Kantor Pusat PLN Head Office	Internal PLN Pusat Internal PLN Center
AP2T	Sistem Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T) merupakan aplikasi yang digunakan untuk pelayanan pelanggan mulai permohonan pembukuan piutang, pelaporan dan yang terutama proses billing.   Integrated Customer Service Application System (AP2T) is an application for customer service, starting from the requesting of receivables, reporting, and especially billing process.	PLN Kantor Pusat-Divisi Niaga PLN Head Office - Division of Commerce	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Internal Nasional</li> <li>· Eksternal (Call Center 123)</li> <li>· National Internal</li> <li>· External (Call Center 123)</li> </ul>
P2APST	Sistem <i>payment gateway</i> untuk menjalankan proses penagihan tagihan pelanggan   Payment gateway system to process the billing of the customer	PLN Kantor Pusat-Divisi Treasury PLN Head Office - Division of Treasury	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Internal Nasional</li> <li>· Eksternal (Bank, Switching)</li> <li>· National Internal</li> <li>· External (Bank, Switching)</li> </ul>
AMS	Sistem untuk kemudahan proses surat menyurat internal PLN   System to facilitate the PLN's internal correspondence	PLN Kantor Pusat-Divisi Umum PLN Head Office - Division of General Affairs	Internal Nasional National Internal

Tata Kelola Teknologi Informasi  
Information Technology Governance

Jenis Layanan/ Sistem Type of Service/System	Deskripsi   Description	Business Process Owner	User
ABG	Sistem untuk melakukan pengawasan dan pengaturan jaminan-jaminan.   System for supervision and regulation of guarantees.	PLN Kantor Pusat-Divisi Treasury PLN Head Office - Division of Treasury	Internal Nasional National Internal
A2K	Sistem berbasis web yang mendukung proses pengelolaan dan pengendalian Anggaran Kas   A web-based system that supports the Cash Budget management and control process	PLN Kantor Pusat-Divisi Anggaran PLN Head Office - Division of Budget	Internal Nasional National Internal
EAM	Sistem yang digunakan untuk pengelolaan asset yang terdiri dari EAM Pembangkitan, Transmisi dan Distribusi.   The system is utilized for asset management, consisting of EAM Generation, Transmission, and Distribution.	PLN Kantor Pusat - Direktorat Bisnis Regional PLN Head Office - Directorate of Business Regional	Internal Nasional National Internal
APKT	Sistem yang mengatur keluhan pelanggan akan gangguan yang terjadi di PLN   The system governs customer complaints on the disruption at PLN	PLN Kantor Pusat – Direktorat Bisnis Regional PLN Head Office - Directorate of Business Regional	Internal Nasional National Internal
BBO	Sistem untuk mendukung proses penyediaan batubara.   System to support the process of coal procurement.	PLN Kantor Pusat - Satuan Batubara PLN Head Office - Coal Unit	Internal Nasional National Internal
SIP2A	Sistem untuk memfasilitasi proses penyusunan RKAP secara otomatis dan terintegrasi dengan Aplikasi ERP   System to facilitate the process of preparing RKAP automatically. This system is integrated with ERP Application	PLN Kantor Pusat - Divisi Anggaran PLN Head Office - Division of Budget	Internal Nasional National Internal
ITSM	Sistem yang digunakan oleh Pengelola TI untuk pengelolaan perubahan dan insiden.   System for IT Managers to manage change and incidents.	PLN Kantor Pusat –Divisi Sistem dan Teknologi Informasi PLN Head Office - Division of Information Technology and System	Internal Nasional National Internal
CC123	Sistem untuk melayani keluhan Pelanggan terkait layanan PLN   System to serve Customer complaints related to PLN service	PLN Kantor Pusat –Divisi Niaga PLN Head Office - Division of Commerce	Internal Nasional National Internal
PMO	Sistem untuk monitoring progress proyek   System to monitor the project progress	PLN Kantor Pusat – Divisi Administrasi Konstruksi PLN Head Office - Division of Construction Administration	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Internal Nasional</li> <li>· Eksternal (ESDM dan BUMN)</li> <li>· National Internal</li> <li>· External (EMR and SOE)</li> </ul>
PLN Mobile	Sistem yang digunakan untuk melayani keluhan pelanggan, permintaan sambung baru, penyambungan sementara dan perubahan daya berbasis <i>mobile</i>   The system is utilized to serve customer complaints, new connect requests, temporary switching, and mobile-based power changes	PLN Kantor Pusat – Direktorat Bisnis Regional PLN Head Office - Directorate of Business Regional	Pelanggan PLN PLN Customers

## Tata Kelola Teknologi Informasi

### Information Technology Governance

## PENCAPAIAN DAN KINERJA DIVISI SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam memastikan efektivitas dari Pelaksanaan Tata Kelola Teknologi Informasi, perusahaan melakukan program kerja TI yang mengacu pada Rencana Kinerja Manajemen (RKM) serta RKAP TI yang disusun selaras dengan IT Governance

## SYSTEM TECHNOLOGY AND INFORMATION DIVISION ACHIEVEMENT AND PERFORMANCE

In ensuring the effectiveness of the Information Technology Governance Implementation, the company performs an IT work program that refers to the Management Performance Plan (RKM) and the IT Work and Budget Plan compiled in harmony with IT Governance

No	Program Kerja   Work Program	Aktivitas   Activity	Pencapaian   Achievement
1	Penyusunan Disaster Recovery Strategy   Disaster Recovery Strategy Formulation	Menyusun Disaster Recovery Strategy   Formulating Disaster Recovery Strategy	Dokumen DRS telah selesai   DRS Documents are finished
2	Penerapan Keamanan TI secara korporat berbasis index KAMI   Application of IT Security in the corporate with KAMI index-based	Menerapkan index KAMI sebagai acuan untuk keamanan TI secara korporat   Implementing KAMI index as reference for corporate IT security	Telah selesai kajian penerapan index KAMI   We have completed the KAMI index application
3	Penerapan Aplikasi Standar Asset Management fungsi pembangkit, transmisi dan distribusi   Standard Asset Management Application for generating, transmission and distribution functions	Mengimplementasikan aplikasi EAM   Implementing EAM	Telah diimplementasikan aplikasi EAM di 5 Unit level 1   EAM is implemented in 5 Units of Level 1
4	Penerapan dashboard PLN untuk mendukung monitoring kinerja perusahaan   Implementation of PLN dashboard to support Company's performance monitoring	Mengimplementasikan <i>big data</i>   Implementing big data	Telah terimplementasi <i>Big Data</i> dimana <i>Dashboard</i> terintegrasi dengan <i>Datawarehouse</i>   Big Data has been implemented. The Dashboard is integrated with Datawarehouse
5	Implementasi Standarisasi   Standardization Implementation	Standarisasi   Standardization	Standarisasi perangkat jaringan secara korporat, <i>Geografis Information System</i> , dan pengembangan aplikasi dengan <i>middleware system</i>   Standardization of corporate network devices, Geographic Information System, and application development with middleware system
6	Peningkatan kehandalan   Reliability improvement		
	a. Link komunikasi SCADA dan Teleproteksi   SCADA and Teleprotection communication links	Meningkatkan kehandalan link komunikasi SCADA dan Teleproteksi   Improving the reliability of SCADA and Teleprotection communication links	Telah terpasang 438 titik   Installed at 438 points
	b. Aplikasi AP2T, SAIDI SAIFI, Transaksi Energi dan PMO   AP2T application, SAIDI SAIFI, Energy Transactions, and PMO	Meningkatkan kehandalan aplikasi AP2T, SAIDI SAIFI, Transaksi Energi dan PMO   Improving the reliability of AP2T applications, SAIDI SAIFI, Energy Transactions, and PMO	Realisasi change request   Realizing change request
7	Implementasi ERP di unit level 3   ERP Implementation in the level 3 units	Mengimplementasikan Aplikasi Gudang <i>Online</i>   Implementing Online Warehouse Application	Telah terimplementasi 12 unit   Implemented in 12 units

## REALISASI PENGEMBANGAN TI

### 1. Pembangunan:

- Program Management Office (PMO)**  
 Sistem PMO yang telah digunakan secara nasional untuk memonitor milestone utama pembangunan proyek-proyek pembangkit, transmisi dan gardu induk pada Program 35GW terus dijaga dan ditingkatkan keandalannya oleh Divisi STI. Sepanjang tahun 2017, Divisi STI menyelesaikan permintaan-permintaan perubahan, *support* peningkatan kualitas data, dan pengembangan dashboard *mobile* PMO (DPMO).
- Integrasi Manajemen Proyek, Jadwal dan Biaya**  
 Modul integrasi antara data jadwal dan progress dengan data penagihan biaya proyek ke sistem ERP Sistem pada sistem PMO diperluas ke beberapa proyek lainnya.
- Manajemen Energi Primer**  
 Sistem Manajemen Energi Primer meliputi aplikasi Pengelolaan Batu Bara dan aplikasi Pengelolaan Bahan Bakar Gas dan Minyak (BBM). Aplikasi Pengelolaan Batu Bara melingkupi fungsi pengendalian & penagihan dan telah diterapkan di seluruh Regional Bisnis PLN dengan total 29 PLTU. Pada tahun 2017 pula pengembangan modul BBM fitur monitoring stok harian juga telah selesai dan terimplementasi di Wilayah NTB, NTT, Papua & Papua Barat, serta Riau dan Kep. Riau.

### 2. Transmisi:

- Manajemen Aset Transmisi**  
 Sistem Manajemen Aset (EAM) Transmisi telah terimplementasi di seluruh Unit Pengatur Beban dan Transmisi Sumatera, Jawa-Bali dan Wilayah Sulsebar. Tahun 2017 dilakukan perluasan EAM Transmisi ke Regional Bisnis Kalimantan yaitu Wilayah Kaltimra, Kalbar, dan Kalselteng

## IT DEVELOPMENT REALIZATION

### 1. Development:

- Management Office Program (PMO)**  
 The PMO system has been used nationally to monitor the main milestone of development of power generation, transmission, and substations projects for the 35GW Program. The system is maintained and enhanced by the STI Division. Throughout 2017, the STI Division completed demand for changes, improved data quality support, and developed mobile dashboard PMO (DPMO).
- Integration of Project Management, Schedule, and Cost**  
 The integration module between schedule and progress data with project cost billing data to ERP system System on PMO system is extended to several other projects.
- Primary Energy Management**  
 Primary Energy Management includes the Coal Management and Gas and Oil Fuel Management application. The Coal Management Application covers the billing & control functions, and has been implemented throughout PLN Business Region with a total of 29 Coal Power Plants. In 2017, the BBM module development for daily stock monitoring feature has also been completed and implemented in NTB, NTT, Papua & West Papua, and Riau and Riau Islands.

### 2. Transmission:

- Asset Transmission Management**  
 Asset Transmission Management System (EAM) is implemented in all Load Control and Transmission Unit in Sumatera, Java-Bali, and Sulsebar. In 2017, Transmission EAM is expanded to the Business Region of Kalimantan, i.e. North and East Kalimantan, West Kalimantan, and Southwest Kalimantan.

## Tata Kelola Teknologi Informasi

### Information Technology Governance

- **Penguatan link komunikasi SCADA**

Dalam rangka meningkatkan kehandalan operasi jaringan sistem ketenagalistrikan, link komunikasi SCADA dirancang dengan prinsip redundansi. Tahun 2017 lokasi yang telah ditingkatkan kehandalan link komunikasi SCADA bertambah sebanyak 438 lokasi.

- **Strengthening SCADA communication link**

SCADA communication link is designed with the principle of redundancy to improve the reliability of network operation of power system. By 2017, SCADA communication link reliability increased by 438 locations.

### 3. Distribusi :

- **Manajemen Aset Distribusi**

Tahun 2017 kemajuan pekerjaan implementasi Sistem Material Manajemen untuk unit organisasi level 3 (kantor rayon) telah mencapai 12 unit Distribusi/Wilayah. Selain itu, telah dikembangkan fitur barcode untuk material kWh meter.

### 3. Distribution:

- **Asset Distribution Management**

In 2017, the progress of Material Management System implementation for level 3 organization unit (rayon office) has reached 12 Distribution/Regional units. In addition, barcode features have been developed for kWh meter materials.

- **Manajemen Gangguan dan Pemadaman**

Sistem Manajemen Gangguan dan Pemadaman PLN yang telah terimplementasi di 22 unit PLN per tahun 2016 dilanjutkan dengan pengembangan Modul *Mobile* yang semakin memudahkan para petugas lapangan dalam mencatat status penanganan gangguan dan meningkatkan monitoring pengaduan. Tahun 2017 20 Unit Induk Distribusi/Wilayah telah diberikan pelatihan penggunaan aplikasi *mobile* penanganan gangguan dan pemadaman.

- **Disruption and Blackouts Management**

The PLN Disruption and Blackouts Management System has been implemented in 22 units of PLN in 2016. The Mobile module has been developed to facilitate the field officers to record the status of disturbances handling and improve complaints monitoring. In 2017, 20 Distribution/Regional Units have been training to use the mobile application for disruption and blackouts handling.

### 4. Penjualan:

- **Pengukuran energi terpusat**

Kegiatan pengukuran energi terpusat menggunakan 3 aplikasi, yaitu aplikasi Neraca Energi, Aplikasi Pencatatan Meter Terpusat dan Aplikasi Automatic Meter Reading (AMR) untuk pelanggan-pelanggan daya besar. Aplikasi Pencatatan Meter Terpusat yang ditujukan untuk Produk Paskbayar non AMR telah terimplementasi 100%. Sampai dengan tahun 2017 Aplikasi AMR telah terimplemensi 16 unit Distribusi dan Wilayah dengan total 13 ribuan pelanggan, dimana PLN telah dapat melakukan monitoring profil pemakaian pelanggan AMR. Aplikasi Neraca Energi yang digunakan untuk mengukur energi di sisi hulu sampai dengan tahun 2017 telah terimplementasi di Jawa Bali dan Sumatera.

### 4. Sales:

- **Centralized energy measurement**

Centralized energy measurement uses 3 applications, i.e. Energy Balance, Centralized Meter Reading, and Automatic Meter Reading (AMR) applications for large power customers. Centralized Meter Reading is intended for non-AMR Postpaid products and has been implemented 100%. Up to 2017, AMR application is implemented in 16 Distribution and Regional units with a total of 13 thousand customers. PLN has been able to monitor the profile usage of the AMR customers. Energy Balance application is utilized to measure upstream energy up to 2017 and has been implemented in Java Bali and Sumatra.

Tata Kelola Teknologi Informasi  
Information Technology Governance

- **Pelayanan pelanggan**  
Aplikasi Pelayanan Pelanggan merupakan aplikasi untuk memberikan layanan berbagai kebutuhan pelanggan yang dapat diakses oleh pelanggan melalui berbagai cara seperti mobile application, internet, online payment, pengaduan teknis, dan sebagainya, di samping juga disediakan di berbagai lokasi seperti gerai di Mal, Loker Layanan di kantor unit PLN dan layanan komuter (mobil). Kehandalan aplikasi pelayanan Pelanggan dijaga dengan penyelesaian *change request* dari pemilik proses bisnis
  - **Pengelolaan pendapatan**  
Aplikasi pengelolaan pendapatan merupakan aplikasi untuk mengelola pendapatan perusahaan baik yang diterima secara langsung di loket pembayaran PLN maupun melalui transaksi perbankan.
  - **Customer service**  
Customer Service Application is an application to provide various customer needs that can be accessed by customers through various ways such as mobile application, internet, online payment, technical complaints, etc. The Customer Service also provided in various locations, such as outlet at Mall, Service Counter at PLN office units, and commuter services (cars). Reliability of customer service is maintained with completion of change request from business process owner
  - **Revenue management**  
The revenue management application is an application for managing corporate earnings either received directly at PLN payment counter or through banking transactions.
- 5. Corporate Services:**
- **Finance (Sistem Informasi Perencanaan Pengendalian Anggaran)**  
Tahun 2017 telah dikembangkan Aplikasi *e-budgeting* atau Sistem Informasi Perencanaan Pengendalian Anggaran (SIP2A) untuk melakukan perencanaan RKAP secara terintegrasi dan teragregasi di level korporasi baik dari unit-unit PLN maupun Anak Perusahaan PLN. Seluruh data RKAP 2018 telah termigrasi ke dalam SIP2A.
  - **Laporan Keuangan**  
Laporan Keuangan PT PLN (Persero) saat ini menggunakan aplikasi ERP.
  - **Sumber Daya Manusia (SDM)**  
Sebagian besar fungsi-fungsi pengelolaan SDM menggunakan aplikasi ERP dan fungsi-fungsi lain yang menggunakan aplikasi diluar ERP sudah terintegrasi dengan aplikasi ERP.
  - **Helpdesk TI terpusat**  
Untuk meningkatkan kualitas layanan TI, maka dibangun HelpDesk TI secara terpusat yang di dalamnya terdapat 2 komponen utama
  - **Finance (Budget Control Plan Information System)**  
In 2017, e-Budgeting application or Budget Control Planning Information System (SIP2A) has been developed to conduct RKAP planning in an integrated and aggregated manner at corporate level, either from units of PLN or PLN Subsidiaries. All RKAP 2018 data is migrated into the SIP2A.
  - **Financial Statements**  
PT PLN (Persero) Financial Statements uses ERP application
  - **Human Resources (HR)**  
Most HR management functions use ERP applications and other functions that use applications outside of ERP have been integrated with the ERP applications.
  - **Centralized IT Helpdesk**  
IT Helpdesk is built centrally to improve the quality of IT services. There are 2 main components, i.e. Service Desk and Command

## Tata Kelola Teknologi Informasi

### Information Technology Governance

yaitu *Service Desk* dan *Command Center*. Pengembangan HelpDesk TI Terpusat dilakukan dengan menambah layanan Operational Technology (OT).

- **Audit & Risk Management**

Di dalam mendukung kegiatan Audit dan Manajemen Risiko terdapat aplikasi yang Audit berbasis Risiko (*Risk Base Audit*) yang meliputi 5 komponen yaitu Penilaian Risiko, Electronic Working Paper, Schedule Staff & Audit, Reporting Time & Expense serta Audit Repository.

- **Sistem Dua Arah untuk Mendukung Smart Grid**

*Smart Grid* merupakan konsep jaringan tenaga listrik cerdas untuk pemenuhan kebutuhan energi listrik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi komunikasi dua arah antara produsen listrik dan konsumen.

Sistem dua arah yang merupakan bagian dari *smart grid* adalah infrastruktur dan sistem pembacaan meter dua arah yang memungkinkan pembacaan data meter secara *near-real time*. Tahun 2017 Divisi TI telah melakukan kajian sistem dua arah dan evaluasi atas pilot project di Bali.

### Pengembangan Talenta Divisi STI

Metodologi pengembangan talenta di bidang Teknologi Informasi mengacu kepada kebutuhan keahlian tenaga teknologi informasi yang sejalan dengan rencana pengembangan TI dan sesuai dengan kebutuhan bisnis, untuk tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan bisnis baik dari segi keberlangsungan bisnis maupun pengembangan yang meliputi *development program*, *information technology infrastructure management*, dan *financial managemen*. Sedangkan metode yang digunakan untuk memperoleh dan mengukur tingkat keahlian yang dibutuhkan dilakukan melalui:

1. Meningkatkan keahlian yang ada melalui pelatihan
2. Mengikuti sertifikasi baik lokal maupun internasional
3. Merekrut tenaga ahli berpengalaman dengan keahlian yang telah dimiliki dari organisasi lain.
4. Merekrut dan melatih *fresh graduate*

Center. Centralized IT Helpdesk is developed by adding Operational Technology (OT) services.

- **Audit & Risk Management**

In supporting the Audit and Risk Management activities, there is Risk Base Audit applications that cover 5 components, i.e.: Risk Assessment, Electronic Working Paper, Staff & Audit Schedule, Time & Expense Reporting, and Audit Repository.

- **Two-way System to Support Smart Grid**

Smart Grid is an intelligent power grid concept for meeting electrical energy needs by utilizing information technology and two-way communication technology between electric and consumer manufacturers.

The two-way system, which is part of the smart grid is a two-way meter reading system and infrastructure that allows near-real-time meter reading of data. In 2017 the IT Division has conducted a two-way system review and evaluation of the pilot project in Bali.

### Talent Development of STI Division

The talent development methodology in the Information Technology refers to the information technology expertise needs that are in line with the IT development plan, and in accordance with business needs, to ensure the fulfillment of business needs, both in terms of business continuity, and development, including development programs, information technology infrastructure management, and financial management. The methods to obtain and measure the expertise needed are conducted through:

1. Improving existing skills through training
2. Attending certification both locally and internationally
3. Recruiting experienced experts with expertise already possessed from other organizations.
4. Recruiting and training fresh graduates

## AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

### Access to the Company's Information and Data

PLN secara berkala memperbarui informasi dan memberikan kemudahan akses informasi mengenai aktivitas dan kinerja Perusahaan kepada para pemangku kepentingan agar mengetahui kondisi Perusahaan secara jelas dan komprehensif. PLN memiliki berbagai sarana yang berfungsi sebagai saluran pengungkapan informasi, di antaranya sebagai berikut:

#### RUPS

Sarana komunikasi Perusahaan dengan pemegang saham untuk penyampaian informasi mengenai perusahaan dan pengambilan keputusan yang memerlukan persetujuan pemegang saham.

#### WEBSITE

Melalui situs <http://www.pln.co.id>, para stakeholders dapat menemukan berbagai informasi terkini Perusahaan, seperti Profil Perusahaan, Struktur Organisasi PLN, Inovasi & Sertifikasi, Informasi Kegiatan Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Perilaku, *Whistle Blower System*, Rilis Media, Laporan dan Presentasi termasuk Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, dan Laporan Keuangan. Publikasi informasi yang tersedia di website Perusahaan telah mengacu pada POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

Sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas informasi dan berita terkini, terus memutakhirkan konten secara berkala dan berkelanjutan.

#### EMAIL

Alamat email resmi Perusahaan adalah [pln123@pln.co.id](mailto:pln123@pln.co.id). Tujuan kami membuat email tersebut adalah menyampaikan dan mengetahui kondisi Perusahaan yang selalu *up to date*.

PLN periodically updates the information and provides easy access to information on the Company's activities and performance to all stakeholders in order to be transparent and comprehensive about the Company's condition. PLN has various facilities that serve as channels of information disclosure, as follows:

#### GMS

Company's communication means with shareholders for the delivery of information about the Company and decision-making that require shareholder approval.

#### WEBSITE

Website <http://www.pln.co.id>. On the website, stakeholders can find the Company's latest information, such as Company Profile, PLN Organization Structure, Innovation & Certification, Company Activity Information, Corporate Governance, Code of Conduct, Whistleblower System, Media Release, Reports and Presentations including Annual Report, Sustainability Report, and Financial Statements. Publication of information available on the Company's website has been referred to POJK No. OJK Regulation Number 8/POJK.04/2015 on Issuer Websites or Public Listed Companies

In an effort to improve the quality of information and up-to-date news, keeps regularly updating the content.

#### EMAIL

Our official Company's email is [pln123@pln.co.id](mailto:pln123@pln.co.id). Our goal is the email conveys and understand the Company's condition and is always up to date.

## Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to the Company's Information and Data

### MEDIA KOMUNIKASI LAIN

Media komunikasi lain selama tahun 2017 telah terselenggara antara lain melalui:

#### Media Internal PLN

Media internal yang berfungsi sebagai sarana informasi, edukasi dan sosialisasi kebijakan manajemen untuk seluruh karyawan dan dipublikasikan dalam bentuk *newsletter* PLN Kita dan Majalah Internal Fokus

#### Media Aplikasi Mobile

PLN memiliki Aplikasi PLN Mobile untuk aplikasi Android dan IOS.

#### Media Sosial

PLN memiliki akun media sosial antara

Twitter: @pln\_123

Facebook: PLN 123

Instagram: @plnkita

Youtube: PT PLN (Persero).

#### Media Call Centre

PLN memiliki Call Centre 123 untuk memfasilitasi hubungan dengan para pelanggan.

### OTHER COMMUNICATION MEDIA

Other communication media during 2017 has been established, among others:

#### PLN Internal Media

Internal media that serves as a means of information, education, and socialization of management policies for all employees and published in the form of newsletter PLN Kita and Fokus (Internal Magazine)

#### Mobile Application

PLN has PLN Mobile application for Android and iOS.

#### Social Media

PLN has several social media account, i.e.

Twitter: @pln\_123

Facebook: PLN 123

Instagram: @plnkita

Youtube: PT PLN (Persero).

#### Media Call Centre

PLN has Call Centre 123 to facilitate the relationship with customers.



## PENGADAAN BARANG & JASA

### Procurement of Goods and Services

#### KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

PLN memiliki pedoman pengadaan barang dan jasa yang mengacu pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0620.K/DIR/2013 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/ Jasa PT PLN (Persero). Pedoman pengadaan barang dan jasa tersebut mengatur beberapa hal seperti filosofi pengadaan, organisasi pengadaan barang/ jasa, perencanaan pengadaan korporat, perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan pada kantor pusat dan unit induk, proses pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, pengadaan khusus, pendayaan produk dalam negeri, manajemen pelaksanaan perjanjian/ kontrak, serta pembinaan dan pengawasan.

#### ETIKA PERUSAHAAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Hubungan Perusahaan dan pemasok berdasarkan pada prinsip-prinsip praktik usaha yang *value for money* untuk kualitas, kuantitas, tempat, waktu, tujuan sosial ekonomi, dan harga sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). PLN berharap agar setiap penyedia barang jasa selalu menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pengadaan barang dan jasa.

##### Standar Etika (Code of Conduct)

1. Menjaga dan Mengutamakan Kepentingan Perusahaan;
2. Menilai secara objektif, transparan, dan akuntabel;
3. Membuat perjanjian kerja yang saling menguntungkan;
4. Menjalin komunikasi secara jujur dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi;
5. Memberi sanksi apabila tidak memenuhi kontrak kerja.

#### POLICY OF PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

PLN has guidance on procurement of goods and services, which refers to PT PLN (Persero) Board of Directors' Decree No. 0620.K/DIR/2013 on Guideline of Procurement of Goods/Services at PT PLN (Persero). The procurement guidelines regulate matters such as procurement philosophy, procurement organization, corporate procurement planning, planning and preparation of procurement at head office and parent unit, procurement process of goods/services, special procurement, domestic product empowerment, management of agreement/ contract, and guidance and supervision.

#### COMPANY'S ETHICS IN PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

Company and supplier relationships are based on the principles of value for money business practices, i.e. for the quality, quantity, place, time, socio-economic goals, and prices, in accordance with the Good Corporate Governance (GCG) principles. PLN expects that every service provider always upholds the laws and regulations applicable in the procurement process of goods and services.

##### Code of Conduct

1. Maintaining and Prioritizing the Company's Interests;
2. Assessing objectively, transparently, and accountably;
3. Establishing a mutually beneficial work agreement;
4. Establishing honest and effective communication, while maintaining the confidentiality of data and information;
5. Imposing sanction if contract is not fulfilled.

Kode Etik berdasarkan Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa | Code of Ethics based on Guidelines for Procurement of Goods/Services

 Efisien | Efficient

 Efektif | Effective

 Kompetitif | Competitive

 Transparan | Transparent

 Adil & Wajar | Fair & Reasonable

 Akuntabel | Accountable

## Pengadaan Barang & Jasa

Procurement of Goods and Services

PLN senantiasa mengadakan pertemuan dengan Pemasok dan mengoptimalkan penggunaan Sistem *e-Procurement* (e-Proc) PLN dalam rangka mensosialisasikan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang digunakan oleh PLN. Dalam berbagai kesempatan, Perusahaan juga melakukan sosialisasi anti gratifikasi kepada pemasok bahwa seluruh Insan PLN berkomitmen untuk tidak menerima hadiah atau imbalan dari pihak manapun termasuk dari pemasok melalui Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No.0076.P/DIR/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di PLN.

### KRITERIA DAN PROSES SELEKSI PEMASOK

Kriteria dan seleksi pemasok secara rinci terdapat dalam website Perusahaan pada menu [eproc.pln.co.id](http://eproc.pln.co.id) yang dapat dengan mudah diakses oleh publik. Bagi masyarakat umum yang ingin menjadi rekanan PLN sebagai penyedia barang dan jasa dapat mendaftar melalui [eproc.pln.co.id](http://eproc.pln.co.id). Panduan untuk menjadi mitra kerja PLN dapat diperoleh dengan mengunduh Terms of Condition Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) secara Elektronik yang terdapat pada menu e-Procurement.

### KEBIJAKAN TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR

Komitmen kami dalam upaya memenuhi hak kreditur tercantum dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0002.P/DIR/2018 tentang Kebijakan Pendanaan Melalui Pinjaman untuk memastikan agar pelaksanaan kewajiban PLN sebagai debitor dapat berjalan dengan baik. Pada pengimplementasiannya, kebijakan PLN diorientasikan pada upaya Menjaga kepatuhan terhadap *debt covenant* guna menjaga rating pinjaman dan *corporate value*, menjaga standar minimal kesehatan keuangan PLN, menjaga sustainabilitas keuangan PLN sehingga memiliki kemampuan pendanaan yang memadai untuk mendukung kebutuhan pertumbuhan perusahaan, menjaga agar terhindar dari *default* atau ketidakmampuan memenuhi *covenant* semuaperjanjian hutang baik yang berasal dari pinjaman korporasi maupun pinjaman yang diteruskan dari pemerintah atau *Subsidiary Loan Agreement*, dan Menjaga *rating* Perusahaan.

PLN continues to hold meetings with Suppliers and optimize the use of PLN's e-Procurement (e-Proc) System in order to socialize the Procurement Guidelines for Goods and Services used by PLN. On various occasions, the Company also disseminates anti gratification to suppliers, i.e. all PLN Personnel is committed not to receive any gifts or rewards from any parties, including from suppliers, by the PT PLN (Persero) Directors' Regulation No. 0076.P/DIR/2017 on Guidance on Gratification Control in PLN.

### CRITERIA AND SELECTION PROCESS OF SUPPLIERS

The criteria and selection of suppliers are detailed in the Company's website on the [eproc.pln.co.id](http://eproc.pln.co.id) menu, which is easily accessible to the public. General public who want to become a partner of PLN as a provider of goods and services can register at [eproc.pln.co.id](http://eproc.pln.co.id). Guidance to become PLN's partners can be obtained by downloading Terms of Condition of Procedures of Procurement of Goods/Services of PT PLN (Persero) electronically in the e-Procurement menu.

### POLICY CONCERNING THE FULFILLMENT OF CREDITOR RIGHTS

Our commitment in fulfilling the creditor's rights is stated in the PT PLN (Persero) Board of Directors' Regulation No. 0002.P/DIR/2018 on Financing Policy Through Loans, to ensure the implementation of PLN's obligations as a debtor can run well. In its implementation, PLN's policy is oriented towards efforts to maintain compliance with debt covenant in order to maintain credit rating and corporate value, to maintain minimum financial health standards of PLN, to maintain financial sustainability of PLN so as to have adequate funding capability to support the growth needs of the Company, to avoid default or incapacity fulfill the covenant of all debt indebtedness both from corporate loans or borrowed by government or Subsidiary Loan Agreement,, and to maintain the Company's rating.

## Pengadaan Barang & Jasa

Procurement of Goods and Services

Pembinaan hubungan dengan kreditur juga diatur dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No.0119.P/DIR/2017 tentang Pedoman Tata Kelola *Stakeholder* (Pemangku Kepentingan) di Lingkungan PT PLN (Persero) untuk terus menjalin komunikasi efektif dengan kreditur sebagai pemangku kepentingan Perusahaan lewat penyampaian informasi Perusahaan yang bersifat aktual dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Selama tahun 2017 Perusahaan selalu memenuhi kewajibannya terhadap para kreditur (bank, lembaga keuangan non bank dan pemegang obligasi).

## PERMASALAHAN HUKUM PERUSAHAAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Permasalahan hukum yang dihadapi PLN selama tahun 2017 tidak berpengaruh secara material terhadap status, kedudukan, dan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan.

Perkara hukum yang dijalani Perusahaan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2001 Hendrik Nelwan dan kawan-kawan mengajukan gugatan ganti rugi selaku Ahli Waris kepada PT PLN (Persero) atas tanah PLTA Tonselama sebesar Rp 54.000.000.000,00, di Pengadilan Negeri Manado. Dalam proses berperkara, mulai dari Tingkat Pertama sampai dengan Tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI PT PLN (Persero) kalah. Pada saat akan dilakukan Eksekusi oleh PN Manado, PT PLN (Persero) melakukan Gugatan Perlawanan atas Eksekusi tanah tersebut dan saat ini Perseroan sedang mempersiapkan upaya hukum Peninjauan Kembali Kedua dengan dasar putusan kasasi Pidana Hendrik Meinder Nelwan.
- b. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara: 465/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Agustus 2014 diajukan oleh Ny. Nesah binti Sadih dkk terhadap PT PLN (Persero). Gugatan diajukan atas dasar tanah yang digunakan PLTGU Muara Tawar dianggap belum dibebaskan dan belum dibayarkan ganti rugi dan kompensasi oleh PT PLN (Persero) kepada Penggugat selaku ahli waris pemilik tanah. Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp59.264.000.000,00. PLN menang di Pengadilan Negeri dengan putusan pada

Relationships with creditors are also regulated in PT PLN (Persero) Board of Directors' Regulation No. 0119.P/DIR/2017 on Stakeholders Governance Guidelines at PT PLN (Persero), to communicate effectively with creditors as stakeholders of the Company through the delivery of Company's information that is actual and relevant and can be accounted for.

In 2017, the Company always fulfills its obligations to its creditors (banks, non-bank financial institutions, and bondholders).

## LEGAL ISSUES OF THE COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES

In 2017, PLN faced legal issues that do not materially affect the Company's status, position, and survival.

The Company faces litigations in 2017 as follows:

- a. In 2001 Hendrik Nelwan and Associates filed a lawsuit to obtain compensation as the Beneficiary against PT PLN (Persero) for the land of Tonselama Hydro Power Plant, valued at Rp54,000,000,000.00, to the Manado District Court. In the trial, starting from the First Level to the Review Level at the Supreme Court of RI, PT PLN (Persero) lost. When execution was about to take place by the Manado District Court, PT PLN (Persero) filed a Resisting Lawsuit against the execution of the plot of land. Currently, the Company is preparing a second Legal Review on the basis of the Criminal Court cassation decision of Hendrik Meinder Nelwan.
- b. Tort Lawsuit at the South Jakarta District Court with Case No. 465/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel dated August 21, 2014, filed by Mrs. Nesah binti Sadih et al. against PT PLN (Persero). The lawsuit was filed due to the land used by Muara Tawar Combined Cycle Power Plant had not been released and compensation had not been paid by PT PLN (Persero) to the Plaintiffs as beneficiary of the land. The Plaintiffs claimed for compensation amounting to Rp59,264,000,000. PLN won at the District Court with the verdict on

## Pengadaan Barang & Jasa

### Procurement of Goods and Services

tanggal 5 Oktober 2015. Penggugat Mengajukan Banding dan diputus dengan amar putusan menolak permohonan banding Penggugat. Saat ini perkara dalam proses Kasasi.

- c. Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Netti Pardosi dan Pandapotan Kasmin Simanjuntak dengan register perkara 02/Pdt.G/2016/PN.BLG terkait pembebasan lahan yang dilakukan Perusahaan atas tanah seluas 6,2 Ha untuk pelaksanaan proyek PLTA Asahan III. Penggugat menuntut agar pembebasan lahan tersebut dibatalkan. Nilai gugatan ini sebesar Rp54.548.000.000. PLN kalah dalam tingkat Pengadilan Negeri dengan putusan tanggal 6 September 2015, PLN menyatakan banding dan diputus dengan amar menolak permohonan banding PLN. Saat ini perkara masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung.
- d. Pada tanggal 20 September 2017 Perusahaan menghadapi gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Putera Daya Perkasa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap aset PLN berupa Gardu Induk 150 KV yang terletak di Kawasan Industri Pasar Kemis. Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp86.194.105.000 (delapan puluh enam miliar seratus Sembilan puluh empat juta seratus lima ribu rupiah). Saat ini perkara masih proses di Pengadilan Negeri.

October 5, 2015. Plaintiffs filed an Appeal and is terminated by a ruling to reject the Plaintiff's appeal. Currently, the case is in the process of Cassation.

- c. Tort Lawsuit filed by Netti Pardosi and Pandapotan Kasmin Simanjuntak with Registers No. 02/Pdt.G/2016/PN.BLG related to the land acquisition by the Company on the land area of 6.2 Hectares for the implementation of Asahan III Hydropower project. The Plaintiff demanded that land acquisition is aborted. The lawsuit is valued at Rp54,548,000,000. PLN lost in the District Court Level by decision dated September 6, 2015. PLN filed an appeal and appealed and the case is dismissed by rejecting PLN's appeal. Currently, the case is still in the process of Cassation in the Supreme Court.
- d. On September 20, 2017, the Company faces a Lawsuit filed by PT Putera Daya Perkasa in the South Jakarta District Court against PLN's assets in the form of 150 KV Substation located in Pasar Kemis Industrial Estate. The Plaintiffs demanded compensation amounting to Rp86,194,105,000 (eighty-six billion one hundred ninety-four million one hundred and five thousand Rupiah). Currently, the case is still in proceeding in the District Court.

## PERMASALAHAN HUKUM YANG MELIBATKAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

### Legal Issues Facing the Board of Commissioners and Board of Directors

Selama tahun 2017 tidak terdapat permasalahan hukum yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

In 2017, there are no legal issues involving members of the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors.



## SANKSI ADMINISTRATIF OLEH REGULATOR

### Administrative Sanctions Imposed by Regulator

Pada tahun 2017, tidak terdapat sanksi administratif yang diberikan oleh Otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya. Berikut merupakan tabel pemenuhan Perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

In 2017, there are no administrative sanctions imposed by the Capital Market Authority and other authorities. The following table is the Company's compliance with applicable regulations.

No.	Peraturan Legislation	Ringkasan Isi Peraturan Summary	Penerapan Implementation
1	POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik   POJK No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Listed Companies or Public Companies.	Mengatur persyaratan Direksi dan Dekom   Stipulates the requirements of Board of Directors and Board of Commissioners	Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat dengan Memenuhi persyaratan, memiliki tugas dan tanggungjawab, serta mengimplementasikan mekanisme rapat sesuai POJK Nomor 33/ POJK.04/2014   The Company's Board of Directors and the Board of Commissioners have been appointed with Eligibility, have duties and responsibilities, and implement meeting mechanism according to POJK No. 33/POJK.04/2014
2	POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik   POJK No. 34/ POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Listed Companies or Public Companies.	Mengatur antara lain tentang keanggotaan, penyelenggaraan rapat, serta pedoman komite nominasi dan remunerasi   Stipulating, among other things, about membership, organizing meetings, and guidelines for nomination and remuneration committees	Perusahaan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi dengan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab serta mekanisme penyelenggaraan rapat berdasarkan POJK Nomor 34/ POJK.04/2014   The Company has a Nomination and Remuneration Committee with membership, duties, responsibilities, and mechanism of meeting arrangement based on POJK No. 34/ POJK.04/2014
3	POJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik   POJK No. 35/POJK.04/2014 on Corporate Secretary of Issuer or Public Listed Companies	Mengatur antara lain tentang tugas & tanggung jawab, dan persyaratan sekretaris perusahaan   Stipulating, among other things, about duties & responsibilities, and company secretarial requirements	Perusahaan telah memiliki Sekretaris Perusahaan yang memenuhi persyaratan, dengan tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 35/POJK.04/2014   The Company has a Corporate Secretary who fulfills the requirements, with duties and responsibilities in accordance with the POJK No. 35/ POJK.04/2014

Sanksi Administratif oleh Regulator  
Administrative Sanctions Imposed by Regulator

No.	Peraturan Legislation	Ringkasan Isi Peraturan Summary	Penerapan Implementation
4	POJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik   POJK No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies	Mengatur tentang keterbukaan informasi dalam hal terdapat fakta material, yaitu peristiwa yang berifat material yang dapat mempengaruhi harga efek atau keputusan investor atau calon investor   Regulates the disclosure of information in the event of material facts, i.e. events that are material that can affect the price of securities or decisions of investors or potential investors	Sepanjang tahun 2017, PLN telah melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan yang diatur mekanisme dalam POJK Nomor 31/POJK.04/2015   Throughout 2017, PLN has conducted information disclosure in accordance with the mechanism set out in POJK No. 31/POJK.04/2015
5	POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit   POJK No. 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines of the Audit Committee.	Mengatur antara lain tentang pembentukan, keanggotaan, tugas dan tanggung jawab Komite Audit   Stipulating, among other things, about establishment, membership, duties, and responsibilities of the Audit Committee	Perusahaan telah memiliki Komite Audit dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan, dengan tugas dan tanggung jawab sesuai POJK Nomor 55/POJK.04/2015.   The Company has an Audit Committee with membership that fulfills the requirements, and equipped with duties and responsibilities in accordance with the POJK No. 55/POJK.04/2015.
6	SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik   SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016 on the Form and Content of Annual Reports of Issuers and Public Companies	Mengatur secara lebih rinci tentang bentuk dan isi laporan tahunan   Organizing in more detail about the form and content of annual reports	Laporan Tahunan Perseroan telah disusun dengan bentuk dan isi yang sesuai dengan SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016   The Company's Annual Report has been prepared with the form and content in accordance with SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016

# STANDAR ETIKA PERUSAHAAN

## Company's Code of Conduct

Perusahaan memiliki Standar Etika Perusahaan atau Code of Conduct (CoC) sejak tahun 2005 yang disusun untuk menciptakan kode etik di lingkungan PT PLN (Persero) lewat membudayakan kebiasaan baik di tempat kerja dan tata kelola pergaulan profesional di lingkungan PLN, serta mengatur aspek kepemimpinan PLN, keanggotaan yang bertanggung jawab, hubungan profesional antar anggota dan hubungan dengan pihak eksternal. Selain itu, Pedoman Perilaku merupakan sarana untuk menciptakan hubungan yang harmonis, sinergis dan saling menguntungkan antara Pemangku Kepentingan (stakeholders) dengan Perseroan.

Pada tahun 2010, Perseroan telah melakukan penyusunan ulang atas butir-butir ketentuan dalam Pedoman Perilaku Perusahaan yang telah ada, menyesuaikan kembali aturan di dalamnya dengan Pedoman GCG dan praktek-praktek lazim terkini dan menampilkannya dalam bentuk yang lebih ringkas agar mudah dibawa saat beraktifitas. Penyusunan Buku Pedoman Perilaku tersebut dilaksanakan sesuai SK Direksi No. 548A/K/DIR/2010 tentang "Buku Pedoman Perilaku".

PLN senantiasa mendorong kepatuhan terhadap standar etika dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya, serta mewajibkan seluruh pimpinan di Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pedoman perilaku dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing.

### OBJEK STANDAR ETIKA PERUSAHAAN

Standar Etika Perusahaan wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh:

1. Seluruh Insan PLN di segala tingkatan termasuk Dewan Komisaris, Direksi dan Organ Penunjang Dewan Komisaris;
2. Direksi, Dewan Komisaris serta Pegawai Anak Perusahaan dan afiliasi di bawah pengendalian;
3. Investor PLN (Lender, Pemegang Obligasi, dll); dan
4. Para pemangku kepentingan atau *stakeholder* PLN seperti Pelanggan, Mitra Kerja/Pemasok, Pesaing, Investor, Pemerintah/DPR, Masyarakat, Media Massa, Organisasi, Profesi/Instansi Pendidikan, Penegak Hukum.

The Company has a Code of Conduct (CoC) since 2005, which is designed to create a code of ethics within PT PLN (Persero) through cultivating good workplace habits and professional association governance within PLN, and regulating the leadership aspects of PLN, responsible membership, professional relationships between members and relationships with external parties. In addition, the Code of Conduct is a means to create harmonious, synergistic, and mutually beneficial relationships between Stakeholders and the Company.

In 2010, the Company has rearranged the provisions of the existing Code of Business Conduct, readjusted its rules with the current GCG Guidelines and current practices, and presented them in a more concise format in order to be more portable during the activities. The preparation of the Code of Conduct is carried out in accordance with Board of Directors' Decree No. 548A/K/DIR/2010 on "Code of Conduct Book".

PLN constantly encourages adherence to ethical standards and is committed to implementing them, and requires all leaders in the Company to be responsible for ensuring that the code of conduct is adhered to and carried out well in their respective ranks.

### COMPANY'S CODE OF CONDUCT OBJECTS

The Company's Code of Conduct shall be complied with and implemented by:

1. All PLN Personnel at all levels, including Board of Commissioners, Board of Directors, and Supporting Organs of the Board of Commissioners;
2. Board of Directors, Board of Commissioners, and Employees of Subsidiaries and affiliates controlled;
3. PLN's Investors (Lender, Bondholder, etc.); and
4. PLN stakeholders, such as Customers, Partners/Suppliers, Competitors, Investors, Government/The House of Representatives, Communities, Mass Media, Organizations, Professionals/Education Institutions, Law Enforcement.

Standar Etika Perusahaan  
Company's Code of Conduct**PENANDATANGANAN KOMITMEN STANDAR ETIKA PERUSAHAAN**

Sebagai bentuk komitmen, Standar Etika Perusahaan wajib ditandatangani setiap tahunnya oleh seluruh Insan PLN. PLN telah menggunakan sistem online untuk penandatanganan komitmen melalui portal internal PLN sehingga lebih efisien waktu dan biaya serta lebih mudah untuk didokumentasikan. Pada tahun 2017, persentase pemberian komitmen atas Standar Etika Perusahaan mencapai 85% yang membuktikan bahwa seluruh Insan PLN berkomitmen untuk patuh pada Standar Etika Perusahaan.

**SIGNING OF COMPANY'S CODE OF CONDUCT**

As a form of commitment, the Company's Code of Conduct must be signed annually by all PLN Personnel. PLN utilizes the online system for commitment signing through PLN's internal portal to make it more efficient in terms of time and cost, and it is easier to document. In 2017, the commitment to the Company's Code of Conduct reached 85%, proving that all PLN Personnel are committed to complying with the Company's Code of Conduct.

**POKOK-POKOK STANDAR ETIKA PERUSAHAAN**

Standar Etika PLN saat ini telah memuat sejumlah unsur-unsur penting seperti Kepemimpinan PLN, Keanggotaan yang Bertanggungjawab, Hubungan Profesional Antar Anggota, Hubungan dengan Pihak Eksternal. Cakupan Standar Etika PLN ini adalah:

**CORPORATE ETHICS STANDARDS**

The current PLN Ethics Standards contain a number of important elements, such as PLN Leadership, Responsible Membership, Professional Interagency Relations, Relationship with External Parties. The scope of PLN Ethics Standard is:



## Standar Etika Perusahaan Company's Code of Conduct

### SOSIALISASI & UPAYA PENEGAKAN STANDAR ETIKA PERUSAHAAN

PLN terus melakukan sosialisasi Standar Etika Perusahaan dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam agar seluruh Insan PLN agar dapat menegakkan standar etika perusahaan. Pada tahun 2017, Perusahaan melakukan sosialisasi secara langsung ke Unit Bisnis dan melalui website dan portal internal (intranet) PLN. Selain itu apabila informasi yang telah dipublikasikan kurang lengkap, Karyawan dapat sewaktu-waktu bertanya kepada atasan langsung maupun ke unit kerja yang bertanggung jawab menangani pedoman perilaku, yakni Divisi *Human Capital Management System* dan Sekretaris Perusahaan yang bertanggungjawab terhadap implementasi GCG PLN.

### PENGUKURAN PENYAMPAIAN STANDAR ETIKA PERUSAHAAN

Sejak tahun 2016, Penyampaian Standar Etika Perusahaan telah menjadi bagian dalam *Key Performance Indicator* (KPI) masing-masing Divisi/Unit/ Unit Bisnis. Hal ini diimplementasikan dengan diselenggarakannya *sharing session Code of Conduct* setiap minggunya.

### SANKSI PELANGGARAN STANDAR ETIKA PERUSAHAAN

Sanksi yang diberikan atas pelanggaran terhadap Standar Etika yaitu:

1. Mitra kerja PLN, sanksi sesuai dengan peraturan dan keputusan Perusahaan
2. Insan PLN, tindakan-tindakan disipliner berupa teguran lisan maupun tulisan, peringatan keras dengan skorsing sampai pemutusan hubungan kerja;
3. Apabila mengakibatkan pelanggaran hukum, permasalahan dapat diproses lebih lanjut kepada pihak yang berwajib.

Selama tahun 2017, sanksi atas pelanggaran telah diberikan dengan mengacu pada ketentuan internal Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

### SOCIALIZATION & ENFORCEMENT OF COMPANY ETHICS STANDARDS

PLN continues to disseminate the Company's Ethics Standards with the objective to provide a deep understanding for all PLN personnel to uphold the company's ethical standards. In 2017, the Company disseminates to the Business Unit directly, and through the internal website and portal (intranet) of PLN. In addition, if the information published is incomplete, the Employee may at any time inquire to the direct supervisor or to the work unit responsible for handling the Code of Conduct, i.e. the Division of Human Capital Management System and the Corporate Secretary, who is responsible for the GCG implementation in PLN.

### MEASUREMENT OF COMPANY ETHICS STANDARD

Since 2016, the submission of the Company's Code of Ethics has become part of the Key Performance Indicator (KPI) of each Division/Unit/Business Unit. This is implemented with the sharing session of Code of Conduct every week.

### SANCTION OF VIOLATION OF COMPANY ETHICS STANDARDS

Sanctions given for violations of the Standards of Ethics are:

1. PLN partners, sanctions in accordance with the rules and decisions of the Company
2. PLN personnel, disciplinary actions in the form of oral and written reprimands, strong warning with suspension, and even termination of employment;
3. In case of violation of law, the problem may be further processed by the authorities.

In 2017, sanctions for violations have been imposed with reference to the Company's internal provisions and Collective Labor Agreement (PKB)

Standar Etika Perusahaan  
Company's Code of Conduct

Jenis Pelanggaran Type of Violation	Jumlah Pelanggaran di Tahun 2017 Violations in 2017	Aturan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Regulation in the Collective Labor Agreement (CLA)
<b>Berat</b> Portion	20	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)   Termination of Employment (PHK)
<b>Sedang</b> Moderate	45	Peringatan Tertulis Pertama yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan Kriteria Talenta Perlu Penyesuaian (PPS)   First Written Warning is valid for 6 (six) months with Talent in Need of Adjustment (PPS) Criteria
	4	Peringatan Tertulis Kedua yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan dengan Kriteria Talenta Maksimal Perlu Penyesuaian (PPS)   Second Written Warning is valid for 12 (twelve) months with Talent in Need of Adjustment (PPS) Criteria
	27	Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan dengan Kriteria Talenta Sangat Perlu Perhatian (SPP) dan Penurunan 1 (satu) Grade   First and Last Written Warning which is valid for 12 (twelve) months with Talent in Need of Attention (SPP) Criteria, and Decrease of 1 (one) Grade
<b>Ringan</b> Mild	9	Teguran Lisan Tercatat yang berlaku selama 3 (tiga) bulan   Oral Reprimand in Writings are valid for 3 (three) months
	6	Peringatan Tertulis yang berlaku selama 6 (enam) bulan   Written Warnings are valid for 6 (six) months
<b>Total</b>	111	

# WHISTLE BLOWING SYSTEM

## Whistle Blowing System

Whistle blowing system atau sistem pelaporan pelanggaran merupakan salah satu cara yang dinilai paling efektif dalam mencegah dan memerangi praktik korupsi, suap, ataupun praktik-praktik kecurangan lainnya yang bertentangan dengan kaidah GCG yang paling mungkin diterapkan oleh suatu organisasi, baik di kalangan pemerintahan maupun korporasi, untuk menekan dan mencegah secara dini terjadinya tindak korupsi dan penyimpangan lain yang sejenis.

### PEDOMAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Meyakini efektivitas sistem tersebut dalam mendeteksi, mencegah dan mengatasi terjadinya tindakan korupsi, fraud dan sejenisnya sebelum merebak lebih jauh, PLN bekerja sama dengan lembaga yang kompeten dalam bidang tersebut, merancang sistem pelaporan pelanggaran untuk diterapkan di seluruh jajaran bisnis Perseroan, baik di Unit Bisnis maupun di anak usaha. Sejak pertengahan tahun 2012, Perseroan melakukan kajian dan merancang sistem pelaporan pelanggaran yang sesuai dengan kondisi dan budaya perusahaan. Setelah mengalami pembahasan intensif dan tahap uji coba secara terbatas, pada tanggal 20 Desember 2012, melalui Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) No.21.E/Dir/2012 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Perseroan secara resmi memberlakukan "Sistem Pelaporan Pelanggaran" (*Whistle Blowing System*) diseluruh jajaran bisnis PLN. Dalam ketetapan tertulis yang mengiringi pemberlakuan tersebut, dijelaskan secara ringkas dan jelas seluruh definisi, maksud dan tujuan serta mekanisme pelaporan, perlindungan pelapor dan tindak lanjut.

### PIHAK YANG MENGELOLA

Agar kebijakan Whistle Blowing System dapat dilaksanakan secara konsisten perlu adanya penanggung jawab laporan pelaksanaan whistle blowing, pelaksanaan mekanisme yang telah disepakati dengan penetapan Surat Edaran Direksi No. 008.E/DIR/2016 Tanggal 30 September 2016 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran dengan penanggung jawab adalah Satuan Pengawasan Intern.

The Whistleblowing System or violation reporting system is considered to be the most effective method to prevent and deal with corruption, bribery, and other fraudulent practices, which are contrary to the good corporate governance implementation in an organization, both in the government and corporations, to suppress and prevent early occurrence of acts of corruption and other similar deviations.

### WHISTLEBLOWING SYSTEM GUIDELINES

PLN ensures the effectiveness its system for detecting, preventing, and overcoming the occurrence of corruption, fraud, and other similar problems. It cooperates with competent institutions, designing systems to report violations at all Company's levels (Business Units and subsidiaries). Since mid-2012, the Company has conducted studies and designed a violation reporting system according to its culture and conditions. After conducting intensive discussions and a limited test phase, the Company formally implemented the Whistleblowing System within the Company, under the PT PLN (Persero) Board of Directors Circular Letter No. 21.E/Dir/2012 dated 20 December 2012. It contains definitions, purposes, reporting mechanisms, whistleblower's protection, and follow-ups, which were described succinctly and clearly under a written provision.

### MANAGING PARTY

In order for the Whistleblowing System policy to be carried out consistently, it is necessary to have the person in charge of the whistleblowing implementation report. The mechanism is agreed upon in the Directors' Circular Letter No. 008.E/DIR/2016 dated September 30, 2016, on the System of Reporting Violations by the person responsible in the Internal Supervisory Unit.

Whistle Blowing System  
Whistle Blowing SystemTelepon  
Phone

08119861901

SMS  
Short Message Service

08119861901

Email  
wbpln@pln.co.idKiriman Surat  
Letters  
**Direktur Utama PLN** | President  
Director of PT PLN (Persero)  
Jl. Trunojoyo M1/135  
Kebayoran Baru, Jakarta 12160

Direktur Utama akan meneruskan laporan pengaduan tersebut kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern (KSPI) untuk melakukan pengecekan kebenaran dilapangan melalui Tim Investigasi Audit Khusus, dan petugas database WBS akan mencatat laporan pengaduan tersebut maupun hasil investigasinya. Hasil pengecekan dilaporkan oleh Tim Investigasi kepada KSPI dan atas laporan hasil investigasi tersebut KSPI melaporkan kepada Direktur Utama dan Kepala Divisi *Human Capital Management System* (KDIVHCMS). Jika hasil investigasi terbukti terdapatnya pelanggaran oleh pegawai/pejabat yang dilaporkan, maka akan dikenakan sanksi atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai ketentuan Perusahaan.

The President Director will forward the complaint report to the Head of the Internal Audit Unit (KSPI) to check the truth of the field through the Special Audit Investigation Team. The WBS database officer will record the complaint report and the results of its investigation. The results of the investigation will be reported by the Investigation Team to KSPI. KSPI report the investigation result to the President Director and Head of Division of Human Capital Management System (KDIVHCMS). If the investigation is proven, that there is a violation by the reported officer/official, it will be subject to sanction or Compensation Claim (TGR) in accordance with the Company's provisions.

Pihak pelapor (Internal maupun eksternal PLN) diwajibkan menyampaikan pengaduan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan agar laporan dapat dibuktikan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut | The reporting party (Internal and PLN's external) is required to submit a clear and accountable complaint so that the report can be proven, taking into account the following matters:



**Pelanggaran yang diadukan disebutkan secara singkat dan jelas**

The complained offense is mentioned briefly and clearly



**Pihak yang dilaporkan dan terlibat agar disebutkan dengan jelas nama dan unit kerjanya**

To mention the name and work unit of the persons who are reported and involved



**Waktu terjadinya pelanggaran agar disebutkan dengan jelas dimana terjadinya**

The timing of the violation to be clearly stated



**Tempat terjadinya pelanggaran agar disebutkan dengan jelas dimana tempat terjadinya**

The place of infringement to be mentioned clearly



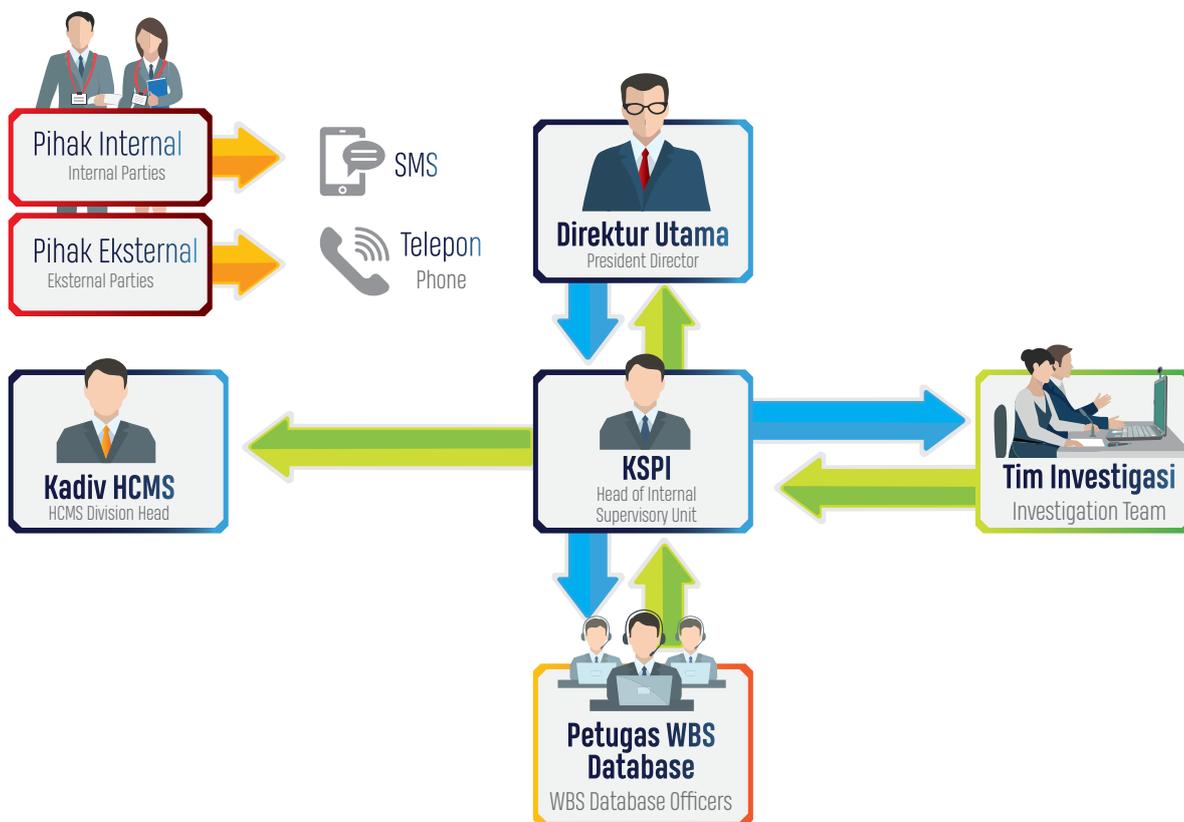
**Kronologi kejadian diuraikan secara jelas dan lengkap, bila perlu dilampirkan bukti-bukti pelanggarannya untuk mempercepat pembuktiannya**

The chronology of events shall be clear and complete, if necessary, to attach evidence of infringement to expedite the proof

Whistle Blowing System  
Whistle Blowing System

PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN  
WHISTLEBLOWING

WHISTLEBLOWING HANDLING PROCEDURES



1. Pelaporan melalui saluran komunikasi yang dipegang oleh lembaga yang diberi mandat oleh Direktur Utama;
2. Direktur Utama menerima dan menyampaikan setiap pengaduan pelanggaran kepada KSPI dan diteruskan ke petugas WBS yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi data dan pengumpulan bukti awal yang cukup dan memadai serta menatakerjakan laporan penerimaan pengaduan;
3. Direktur Utama menetapkan tindak lanjut terhadap pengaduan yang telah diterima;
4. Tim investigasi melaksanakan kegiatan investigasi secara menyeluruh dan menyampaikan hasil investigasi kepada KSPI untuk diteruskan ke Direktur Utama untuk kemudian ditetapkan putusan terhadap pengaduan tersebut;

1. Reporting through a communications channel held by an agency authorized by the President Director;
2. The President Director receives and submits any complaints of violations to Head of Internal Audit Unit and forwards them to the WBS officer appointed to conduct data verification and collection of initial evidence that is deemed to be adequate, and to organize the complaint reports;
3. The President Director assigns follow-up on complaints that have been received;
4. The investigation team conducts a thorough investigation and submits the investigation results to Head of Internal Audit Unit to be forwarded to the President Director for him to set out his ruling on the complaint;

Whistle Blowing System  
Whistle Blowing System

5. PLN memberi jaminan perlindungan dan kerahasiaan terhadap setiap pelapor pengaduan/pengungkapan terhadap: Kerahasiaan identitas pelapor (Nama, alamat, nomor telepon, faksimil, email, unit kerja, dan lain-lain);
6. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau lembaga. Perlindungan dari tekanan penundaan kenaikan pangkat/jabatan, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, tindakan fisik. Perlindungan tersebut tidak hanya berlaku bagi pelapor akan tetapi dapat diperluas hingga anggota keluarga pelapor.

**PERLINDUNGAN PELAPOR**

Untuk tertib pengelolaan, kepastian tindak lanjut pelaporan/pengaduan, monitoring penyelesaian, dan evaluasi secara berkesinambungan maka ditunjuk unit pengelola WBS yaitu Satuan Pengawasan Intern. SPI akan mengevaluasi dan menilai tingkat kompleksitas pelaporan/pengaduan tersebut berkaitan dengan bentuk tindak lanjut penyelesaian atas pelaporan/pengaduan tersebut. SPI akan meneruskan hasil tindak lanjut penyelesaian laporan/pengaduan disertai dengan kesimpulan apakah pelaporan/pengaduan tersebut terbukti atau tidak dan usulan tindak lanjut pelanggarannya kepada Direktur Utama untuk ditetapkan bentuk tindak lanjut penyelesaiannya. Perlindungan bagi Whistle Blower sebagai berikut:

1. Pelapor dijaga kerahasiaannya atas identitas pelapor (nama, alamat, nomor telepon, faksimili, email, unit kerja, dan lain-lain) dengan cara menggunakan media komunikasi email yang di luar pengelolaan perusahaan (bukan alamat email pln.co.id);
2. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor/ lembaga Pelapor;
3. Perlindungan dari tindakan internal PLN:
  - a. Tekanan;
  - b. Penundaan kenaikan pangkat/jabatan;
  - c. Pemecatan;
  - d. Gugatan Hukum;
  - e. Harta benda hingga tindakan fisik;
  - f. Perlindungan tersebut tidak hanya berlaku bagi pelapor tetapi dapat diperluas dengan anggota keluarga pelapor.

**WHISTLEBLOWER'S PROTECTION**

Internal Supervisory Unit is appointed to manage the WBS for the follow-up reporting of complaints, monitoring progress, and evaluating on an ongoing basis. Internal Supervisory Unit will evaluate and assess the level of complexity of reporting of complaints related to the follow-up completion. Internal Supervisory Unit will continue the follow-up of results with a conclusion on whether the complaint is proven or not, and if proven, the proposed follow-up of its violation to the President Director to determine the form of the follow-up to the settlement. The protection for the Whistleblower is as follows:

1. The Whistleblower identity is kept confidential, including name, address, telephone number, fax, email, work unit, etc., by using external email as a communications media outside the Company's email (not the email pln.co.id);
2. Protection from reprisals from the reporting and reported institutions;
3. Protection from internal measures of PLN, such as:
  - a. Pressures;
  - b. Delays in promotion;
  - c. Termination of Employment;
  - d. Lawsuit;
  - e. Possessions as well as physical action;
  - f. The protection applies not only to the whistleblower but may be extended to family members of the whistleblower.

## Whistle Blowing System

### Whistle Blowing System

## PELAPORAN KASUS DAN TINDAK LANJUT

Selama tahun 2017 terdapat 27 (dua puluh tujuh) laporan yang dilaporkan melalui *whistle blowing system*. Dari 27 laporan pengaduan terdapat 24 (dua puluh empat) yang sudah selesai dilaksanakan audit dan telah disusun Laporan Hasil Audit (LHA), naum dari 24 (dua puluh empat) Laporan Hasil Audit (LHA) tersebut hanya terdapat 9 (Sembilan) laporan yang terbukti.

Dan yang terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran sebagai berikut:

1. Pelaporan pelanggaran tentang pelaksanaan kewenangan pejabat setingkat Manajer Dasar;
2. Pelaporan pelanggaran tentang pelaksanaan kewenangan pejabat setingkat Supervisor Dasar;
3. Pelaporan pelanggaran tentang pelaksanaan kewenangan pegawai;
4. Pelaporan pelanggaran tentang pelaksanaan kewenangan pihak eksternal.

## SOSIALISASI WHISTLE BLOWING SYSTEM

Pada tahun 2017, Perusahaan telah melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal Perusahaan secara langsung, melalui portal internal dan website Perusahaan. Pelaksanaan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang sistem pelaporan pelanggaran PLN yang dikelola secara profesional.

## PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

### KEBIJAKAN PELAPORAN LHKPN

PLN memiliki kebijakan mengenai Pelaporan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0074.P/DIR/2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT PLN (Persero).

## CASES REPORTING AND FOLLOW-UP

In 2017, there were 27 (twenty-seven) reports received through the whistleblowing system. Of the 27 complaints reports, 24 (twenty-four) complaints have been completed, and the Audit Result Reports (LHA) have been prepared. Out of the 24 (twenty-four) Audit Result Reports (LHA), only 9 (Nine) are proven.

And the reported who proved to commit the following violations:

1. Reporting of violations in the implementation of authority for Basic Manager;
2. Reporting of violations in the implementation of authority for Basic Supervisor;
3. Reporting violations on the exercise of personnel authority;
4. Reporting violations on the exercise of the authority of external parties.

## SOCIALIZATION OF WHISTLEBLOWING SYSTEM

In 2017, the Company has conducted socialization to the Company's internal and external stakeholders directly, through the Company's internal portal and website. The socialization aims to provide an understanding of the professionally managed reporting system of PLN violations.

## REPORT OF STATE OFFICIAL ASSETS (LHKPN) MANAGEMENT

### LHKPN REPORTING POLICY

PLN has a policy on the Form of Report of State Official Assets (LHKPN) under the PT PLN (Persero) Board of Directors Regulation No. 0074.P/DIR/2017 on the Report of State Official Assets Guideline within PT PLN (Persero) Environment.

Whistle Blowing System  
Whistle Blowing System**WAJIB LAPOR LHKPN**

Berdasarkan Kebijakan Pelaporan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Wajib Lapo LHKPN di lingkungan PLN adalah:

1. Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Manajemen Atas (MA);
3. Manajemen Menengah (MM);
4. Manajemen Dasar (MD);
5. Fungsional I, II, III;
6. Pejabat Perencana Pengadaan;
7. Pejabat Pelaksana Pengadaan; serta
8. Supervisor Atas.

**PENGELOLA LHKPN**

1. Koordinator Pelaksana LHKPN adalah Kepala Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan dengan tugas :
  - a. Menyiapkan infrastruktur, kebijakan, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program pelaporan LHKPN
  - b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan program pelaporan LHKPN
2. Pengelolaan LHKPN juga dilakukan oleh Admin Aplikasi E-LHKPN dengan tugas :
  - a. Melakukan pemutakhiran data Wajib Lapo LHKPN di lingkungan PLN pada aplikasi E-LHKPN;
  - b. Sebagai *Helpdesk* aplikasi E-LHKPN
  - c. Melakukan pengawasan terhadap progress pelaporan LHKPN

**LAPORAN LHKPN TAHUN 2017**

Pelaporan LHKPN hingga periode akhir tahun 2017, terdapat 1.628 Wajib Lapo yang telah melaksanakan pelaporan LHKPN dari total 2.294 Wajib Lapo. Pada akhir tahun 2017, PLN memperluas Wajib Lapo menjadi Manajer Atas (MA), Manajer Menengah (MM), Manajer Dasar (MD) dan Fungsional I, II, III, Pejabat Perencana Pengadaan, Pejabat Pelaksana Pengadaan serta Supervisor Atas sehingga Wajib Lapo LHKPN meningkat menjadi 5.504 Wajib Lapo.

**STATE OFFICIALS MANDATORY TO SUBMIT LHKPN**

Based on the Policies of the Report of State Official Assets, the persons who are obliged to submit the LHKPN in PLN are:

1. Board of Commissioners and Directors;
2. Top Management (MA);
3. Middle Management (MM);
4. Basic Management (MD);
5. Functional I, II, III;
6. Procurement Planning Officer;
7. Procurement Officer; and
8. Top Supervisor.

**LHKPN MANAGER**

1. Coordinator of LHKPN is the Head of Division of Risk Management & Compliance. His/her duties are:
  - a. Preparing infrastructure, policies, and facilities for the implementation of the LHKPN reporting program
  - b. Monitoring the implementation of the LHKPN reporting program
2. LHKPN management is also performed by E-LHKPN Application Administrator with the following tasks:
  - a. Updating the LHKPN Report Required data in PLN environment in E-LHKPN application;
  - b. As a *Helpdesk* of E-LHKPN application;
  - c. Monitoring the supervision of the LHKPN reporting program

**LHKPN REPORT 2017**

Until the end of 2017, there are 1,628 people must report of LHKPN from a total of 2,294 people must report. At the end of 2017, PLN extends the Compulsory Report to Top Managers (MA), Middle Manager (MM), Basic Manager (MD), and Functional I, II, III, Procurement Planning Officer, Procurement Officer, and Top Supervisor. Thus, LHKPN people must report increased to 5,504.

## Whistle Blowing System

Whistle Blowing System

### PENCEGAHAN TRANSAKSI ORANG DALAM

Perusahaan memiliki Kebijakan Transaksi Keuangan Perusahaan berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0054. K/DIR/ 2014 tentang Pedoman Transaksi Keuangan Antara PT PLN (Persero) dengan Mitra Kerja Guna Mendukung PLN Bersih yang bertujuan untuk menghindarkan insan PLN dari segala bentuk penyimpangan praktik bisnis termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Agar terhindar dari kecurangan transaksi, setiap transaksi antara PLN dengan mitra kerja, antara lain melalui perjanjian/kontrak pembangunan fasilitas kelistrikan, perjanjian/kontrak penyediaan barang/jasa, dijalankan melalui transaksi secara *non-cash* (melalui jasa perbankan).

### PENCEGAHAN GRATIFIKASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN

Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bersih, sehat, dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah komitmen PLN. Karena itu PLN juga memiliki acuan mengenai gratifikasi dan benturan kepentingan selain Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No.0060.K/DIR/2014 tentang Pedoman PLN Bersih juga diturunkan lagi kedalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No.0076.P/DIR/ 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di PLN. Pedoman tersebut mengatur secara jelas beragam penafsiran mengenai gratifikasi di lingkungan PT PLN (Persero). Lebih lanjut, pedoman ini memperkuat posisi Perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha, peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya, memaksimalkan nilai Perusahaan secara berkelanjutan serta peningkatan kepercayaan *stakeholders* dan sebagai bentuk komitmen pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang dilakukan secara konsisten.

### PREVENTION OF INSIDER TRADING

The Company has a policy related to Company's Insider Trading, based on the PT PLN (Persero) Board of Directors' Regulation No. 0054. K/DIR/ 2014 on Guidelines of Financial Transactions Between PT PLN (Persero) and Partners to Support PLN Bersih, which aims to prevent PLN from all forms of deviation from business practices including corruption, collusion, and nepotism. To avoid any transaction fraud, all transactions between PLN and its partners, among others through agreements/contracts for construction of electricity facilities, agreements/contracts for the supply of goods/services, are executed through non-cash transactions (through banking services).

### PREVENTION OF GRATIFICATION AND CONFLICT OF INTEREST

PLN is committed to realizing a clean, healthy, and free enterprise management of all forms of Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN). Therefore, PLN gratification and conflict of interest refers to PT PLN (Persero) Board of Directors' Regulation No. 0060.K/DIR/2014 on the Guidance of PLN Bersih, and derived into PT PLN (Persero) Board of Directors' Regulation No. 0076.P/DIR/2017 on Guidelines for Gratification Control at PLN. The guidelines clearly set various interpretations of gratuities within PT PLN (Persero). Further, these guidelines strengthen the Company's position in the face of business competition, enhancing efficiency and effectiveness of resource management, maximizing the Company's value in a sustainable manner, and enhancing the trust of stakeholders, and as a consistent commitment to the Good Corporate Governance implementation.

Whistle Blowing System  
Whistle Blowing System**PENGAWASAN GRATIFIKASI**

Setiap bentuk gratifikasi yang diterima maupun ditolak, wajib untuk disampaikan dan dilaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi yang ditetapkan oleh Direksi PLN. Pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perusahaan yang berlaku.

**ETIKA TERKAIT GRATIFIKASI**

Dalam menjalankan bisnisnya, setiap insan PLN wajib menjunjung tinggi komitmen untuk menjalankan bisnis bebas dengan segala bentuk kecurangan (*fraud*) dan tindakan korupsi, yakni:

1. Semua insan PLN dilarang menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi, dalam bentuk apapun.
2. Semua insan PLN dilarang meminta atau menerima secara langsung ataupun tidak langsung Gratifikasi dari Stakeholders, Mitra Kerja dan/atau Pihak Ketiga karena jabatan Insan PLN dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas insan PLN, baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
3. Semua Insan PLN wajib berpartisipasi dalam mensukseskan program pencegahan korupsi di lingkungan Instansi.
4. Semua Insan PLN wajib melakukan penolakan secara sopan dan santun terhadap gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pedoman gratifikasi
5. Semua Insan PLN harus melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi atas penerimaan, permintaan, dan/atau penolakan gratifikasi yang dilakukan.

**PELAPORAN GRATIFIKASI**

Pelaporan gratifikasi diberikan wadah dalam bentuk aplikasi *Compliance Online System* yang dapat diakses melalui <http://cos.pln.co.id> oleh seluruh pegawai PLN.

**GRATIFICATION CONTROL**

Any form of gratification received or rejected, shall be submitted and reported to the Gratification Control Unit established by PLN's Board of Directors. Violations shall be liable to sanctions in accordance with applicable Laws and Company's Regulations.

**ETHICS RELATED TO GRATIFICATION**

In carrying out its business, every person of PLN must uphold commitment to run a business free of all forms of fraud and corruption, i.e.:

1. All PLN personnel are prohibited from offering or giving bribes, gratuities, in any form.
2. All PLN personnel are prohibited from requesting or receiving directly or indirectly the Gratification from Stakeholders, Partners and/or Third Party because of the position of PLN personnel, and in contrary to the obligations or duties of PLN, whether received domestically or abroad, electronically and non-electronically.
3. All PLN personnel are required to participate in the success of corruption prevention programs within the institution.
4. All PLN personnel shall refuse courteously and gently against gratification that is not in accordance with the provisions of the gratuity guidelines
5. All PLN Personnel must report to the Gratification Control Unit on the receipt, request, and/or rejection of gratification.

**GRATIFICATION REPORTING**

Gratuity reporting is provided in the form of a Compliance Online System application, accessible on <http://cos.pln.co.id> by all PLN employees.



# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## Corporate Social Responsibility

“Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai manifestasi dari budaya perusahaan untuk ikut berperan mendorong kegiatan pembangunan, menumbuhkan dan memberdayakan ekonomi masyarakat, meningkatkan kondisi sosial masyarakat sekitar dan sebagai wujud komitmen PLN untuk mendukung pencapaian berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*), termasuk tanggung jawab pemenuhan harapan seluruh pemangku kepentingan”.

“The implementation of the Corporate Social Responsibility Program as a manifestation of corporate culture plays a role in promoting development activities, fostering, and empowering the people's economy, improving the social condition of the surrounding communities and as a manifestation of PLN's commitment to supporting the achievement of Sustainable Development Goals, including the responsibility of meeting all stakeholders' expectations.”

**550 Program Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan**  
Social Responsibility Program to the Environment

**562 Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja**  
Employment, Occupational Health and Safety

**573 Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan**  
Social and Community Development

**585 Tanggung Jawab Terhadap Konsumen/Pelanggan**  
Responsibility to Customers





# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## Corporate Social Responsibility

Bagi PT PLN (Persero) kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) bukan sekadar pemenuhan kewajiban, namun merupakan bentuk komitmen untuk dapat memberi kontribusi nyata bagi masyarakat, lingkungan, dan sumber daya manusia, juga bentuk komitmen untuk menciptakan harmoni dengan masyarakat dan lingkungan sekitar serta bentuk komitmen dukungan bagi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelibatan para pihak dalam merancang kegiatan, terutama para penerima manfaat, pelaksanaan evaluasi dan yang paling penting adalah penganggaran serta penyaluran anggaran TJSL untuk sejumlah kegiatan dimaksud.

### VISI DAN MISI KEGIATAN TJSL PLN

Visi dan Misi kegiatan TJSL PLN adalah sebagai berikut:

#### Visi:

"Menjadikan TJSL PT PLN (Persero) terdepan dalam meningkatkan kebutuhan Kelistrikan dengan tetap memperhatikan keharmonisan seluruh lapisan *stakeholder* dan Lingkungan".

#### Misi :

"Melaksanakan kegiatan sosial untuk membantu menjembatani semua kepentingan stakeholder perusahaan agar dapat berjalan sinergis menjalankan dan memajukan citra perusahaan".

### MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pelaksanaan Program TJSL adalah mewujudkan misi perusahaan sekaligus menciptakan pertumbuhan yang berkualitas dan memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan, yakni: pelanggan, mitra kerja, pemerintah, pegawai, lembaga-lembaga swadaya, media massa dan masyarakat sekitar, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan TJSL PLN adalah :

1. Mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat.
2. Membantu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan koperasi yang mandiri, tangguh dan berdaya saing dengan pengelolaan yang profesional.

The Corporate Social Responsibility (TJSL) activities of PT PLN (Persero) is not only a fulfillment of obligations, but also a form of commitment to contribute to society, environment, and human resources, and commitment to creating harmony with society and environment, and as form of support commitment to the achievement of sustainable development objectives. The commitment is realized through the involvement of the parties in designing the activities, especially the beneficiaries, the evaluation, and most importantly the budgeting and disbursement of TJSL for such activities.

### VISION AND MISSION OF PLN'S TJSL ACTIVITIES

Vision and Mission of PLN's TJSL activities are as follows:

#### Vision:

"To make TJSL of PT PLN (Persero) the leading TSJL in improving the electricity needs by taking into account the harmony of all stakeholders and the Environment".

#### Mission:

"To carry out social activities to help bridge all Company's stakeholder interests in order to run the Company synergistically and promote the Company's image".

### PURPOSES AND OBJECTIVES

The purpose of TJSL Program is to realize the Company's mission while simultaneously creating quality growth and meeting the expectations of all stakeholders, i.e.: customers, partners, government, employees, non-governmental organizations, mass media, and surrounding communities, while maintaining the environmental sustainability.

The objectives of PLN's TJSL are:

1. Achieving harmonious relationship between the Company and the community.
2. Helping small business and cooperatives to grow to be independent, tough, and competitive with professional management.

## Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

### Corporate Social Responsibility

3. Mengembangkan pola pembinaan usaha kecil dan koperasi, dengan mengedepankan aspek pemerataan, kemandirian, profesional, dan etika.
4. Memelihara kelestarian lingkungan hidup, serta membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

Untuk memastikan tercapainya misi Perusahaan sesuai dengan visi dan misi program TJSL, maka PLN berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Peningkatan kualitas tersebut meliputi peningkatan kualitas dalam tahap penyusunan, pelaksanaan dan tahapan evaluasi Program TJSL yang melibatkan seluruh jajaran pengelola.

Perbaikan kualitas pelaksanaan tersebut mengandung maksud pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL) tidak terbatas pada kegiatan pemberian bantuan semata, melainkan menjadi salah satu pendukung keberhasilan pengembangan usaha jangka panjang Perseroan. Untuk maksud tersebut, PLN mulai memperkenalkan konsep-konsep pengelolaan kegiatan TJSL sesuai standar ISO 26000 – *Management Corporate Social Responsibility*.

### RUANG LINGKUP KEGIATAN DAN SUMBER DANA KEGIATAN TJSL

PLN melaksanakan kegiatan TJSL yang meliputi pelaksanaan tanggung jawab: lingkungan hidup, ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta tanggung jawab produk, dengan tujuan pencapaian misi perusahaan dan terpenuhinya harapan pemangku kepentingan.

Pelaksanaan kegiatan TJSL dilakukan oleh masing-masing unit kerja, dan sumber dana untuk membiayai kegiatan dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahun.

Mengingat kegiatan di bidang ketenagakerjaan, tanggung jawab produk dan keselamatan kerja memberi dampak sangat signifikan terhadap keberlangsungan usaha dalam jangka panjang, PLN berusaha untuk merealisasikan kegiatan dibidang TJSL dengan sungguh-sungguh.

3. Developing the pattern of small business and cooperative development, by prioritizing the aspect of equity, independence, professional, and ethics.
4. Maintaining environmental sustainability, and helping in improving the quality of life of the community, which includes education, health, and welfare.

PLN strives to improve the quality of the programs to ensure the achievement of the Company's mission, in line with the vision and mission of TJSL program. The quality improvement includes improvement in the preparation, implementation, and evaluation stages of TJSL Program, involving all levels of management.

Quality improvement contains the purpose of the corporate social responsibility program (TJSL), which is not limited to the activities of providing the assistance alone, but to be one of the supporters of the Company's long-term business development. For this purpose, PLN began to introduce the concepts of TJSL activities management according to ISO 26000 standards - *Corporate Social Responsibility Management*.

### SCOPE OF ACTIVITIES AND FUND RESOURCES OF TJSL

PLN conducts TJSL activities, which cover the implementation of responsibilities: environment, employment, occupational health and safety, and product responsibility, with the objectives of achieving corporate mission and meeting the stakeholders' expectations.

The TJSL activities are carried out by each work unit, and the source of fund to finance the activities are budgeted in the Company's Work and Budget Plan (RKAP) annually.

PLN strives to realize TJSL activities in earnest given the activities in the field of employment, product and safety responsibilities have a very significant impact on long-term business continuity.

## Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

### Corporate Social Responsibility

Bentuk kegiatan TJSL PLN pada dasarnya terdiri dari dua kegiatan utama, yakni:

- TJSL dalam bentuk kegiatan dengan penerima manfaat para pemangku kepentingan sebagai bentuk amanat dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 74, dan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

#### Sumber Dana Program TJSL – PKBL

Berdasarkan :

1. Risalah RUPS Pengesahan RKAP No. RIS-025/D2.MBU/12/2016, tanggal 23 Desember 2016, perihal Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2017
2. Risalah Rapat pembahasan Laporan Tahunan PKBL Tahun 2016, No. Ris-148/D7.MBU.3/04/2017, tanggal 12 April 2017, menyatakan bahwa mengusulkan sumber dana untuk PK tahun 2017 berasal dari alokasi dana PLN untuk BL dan sisa/ saldo dana PKBL yang tersedia di awal tahun dan dana bergulir/revolving.

## DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM TJSL PKBL

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PLN berkewajiban melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam pelaksanaannya, kegiatan TJSL PLN dalam bentuk PKBL mengacu pada:

1. Peraturan Menteri BUMN No.PER-09/MBU/07/2015, tanggal 3 Juli 2015, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dimana Peraturan Menteri ini langsung diimplementasikan menggantikan Permen BUMN sebelumnya perihal yang sama.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016, tanggal 16 Desember 2016, perihal Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor No.PER-09/MBU/07/2015, tanggal 16 Desember 2016, perihal perubahan atas Permen No.PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN

The PLN's TJSL basically consists of two main activities, i.e.:

- TJSL in the form of activities, whose beneficiaries are the stakeholders, as a form of mandate in Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, Article 74, and Government Regulation No. 47 of 2012 on Social and Environmental Responsibilities of Limited Liability Company.
- Partnership and Community Development Program.

#### Fund Source of TJSL Program – PKBL

Based on:

1. Minutes of GMS to Approve RKAP No. RIS-025/D2.MBU/12/2016, dated December 23, 2016, on the Approval of Company's Work and Budget Plan (RKAP) 2017
2. Minutes of Meeting of PKBL Annual Report 2016, No. Ris-148/D7.MBU.3/04/2017, dated April 12, 2017, stated that the proposed source of funds for PK in 2017 comes from the PLN allocation funds for BL and the remaining funds/available PKBL funds at the beginning of the year, and the revolving funds.

## LEGAL BASIS AND POLICY OF PKBL TJSL PROGRAM

As a State-Owned Enterprise (SOE), PLN is obliged to implement the Partnership and Community Development Program (PKBL). In its implementation, PLN's TJSL activities in the form of PKBL refers to:

1. Minister of SOEs Regulation No. PER-09/MBU/07/2015, dated July 3, 2015, on Partnership Program between the State-Owned Enterprises with Small Business, and Community Development Program. This Ministerial Regulation is implemented immediately in place of the previous Minister of SOEs Regulation.
2. Minister of State-Owned Enterprises (SOE) Regulation No. PER-03/MBU/12/2016, dated December 16, 2016, on the Amendment to Minister of SOEs Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 dated December 16, 2016, on the amendment to Minister of SOEs Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership and Community Development Program in the SOEs Environment

## Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

- Peraturan Menteri BUMN No. Per-02/MBU/07/2017, tanggal 05 Juli 2017, perihal Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor No. PER-09/MBU/07/2015, tanggal 16 Desember 2016, perihal perubahan kedua atas Permen No.PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN

Sesuai dasar hukum sebagai landasan pelaksanaan kegiatan tersebut, pelaksanaan Program TJSL PLN pada dasarnya melibatkan interaksi antara pemangku kepentingan dengan setiap aspek operasional Perseroan. Uraian lengkap yang menggambarkan interaksi tersebut disajikan dalam Laporan Keberlanjutan PT PLN (Persero). Pada Laporan dijelaskan mengenai partisipasi Perseroan dalam menjaga keberlanjutan bumi beserta seluruh isinya melalui pelaksanaan berbagai program dengan tujuan menjaga keseimbangan kinerja di bidang ekonomi, sosial, kemasyarakatan, termasuk menghormati hak pekerja dan juga penerapan tata kelola terbaik dalam mencapai tujuan tersebut.

Sesuai butir-butir ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.30/SEOJK.04/2016 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, pada uraian berikut Perseroan menyampaikan laporan tanggung jawab perusahaan berupa pelaksanaan kegiatan yang mencakup empat topik laporan, yakni tanggung jawab perusahaan terhadap:

- Lingkungan Hidup;
- Praktik Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan; dan
- Tanggung Jawab Produk dan Konsumen

- Minister of State-Owned Enterprises (SOE) Regulation No. PER-02/MBU/07/2017 dated July 5, 2017, on the Amendment to the Minister of SOEs Regulation No. PER-09/MBU/07/2015, dated December 16, 2016, on the second amendment to the Minister of SOEs Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 on the SOEs' Partnership and Community Development Program

In accordance with the legal basis as the basis for the implementation, the PLN's TJSL Program basically involves interaction between stakeholders with every aspect of the Company's operations. The full description of the interaction is presented in PT PLN (Persero) Sustainability Report. The Report describes the participation of the Company in maintaining the Earth sustainability and its contents through the implementation of various programs with the objective to maintain the balance of economic, social, and community performance, including respecting the workers' rights and implementing best governance whilst achieving those objectives.

In accordance with the provisions of Financial Services Authority Circular Letter No. 30/SEOJK.04/2016 on the Form and Content of Annual Report of the Issuer or Public Company, in the following description, the Company submits the report of corporate responsibility in the form of activities covering four report topics, i.e. The Company's responsibilities towards:

- Environment;
- Employment, Occupational Health and Safety;
- Social and Community Development; and
- Accountability of Products and Consumers

# PROGRAM TANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN

## Social Responsibility Program to the Environment



Sebagai wujud implementasi komitmen teguh untuk menjalankan aktivitas usaha yang berwawasan lingkungan, Perusahaan telah menetapkan aspek lingkungan sebagai salah satu unsur penilaian dalam kinerja unit bisnis PLN di seluruh Indonesia untuk terus mengevaluasi ke arah yang lebih baik.

As a manifestation of a firm commitment to carrying out environmentally sound business activities, the Company has established environmental aspects as one of the elements of assessment in the performance of PLN's business units throughout Indonesia, to continue evaluating towards a better direction.

## Program Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Social Responsibility Program to the Environment

Misi perusahaan menegaskan bahwa PT PLN (Persero) akan “Menjalankan Kegiatan Usaha yang Berwawasan Lingkungan”. Oleh sebab itu, PLN selalu berusaha memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan setiap kegiatannya. PLN secara maksimal telah berupaya mengurangi pencemaran tanah, air dan udara oleh zat-zat polutan termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca. Upaya ini dilakukan secara menyeluruh dalam semua kegiatan penyediaan listrik oleh PLN baik itu pada instalasi pembangkit, transmisi/gardu induk dan distribusi termasuk pada aktifitas operasional Anak Perusahaan.

### KEBIJAKAN LINGKUNGAN

PLN memegang teguh komitmen untuk menjalankan aktivitas usaha yang berwawasan lingkungan dan sadar sepenuhnya bahwa bisnis pembangkitan tenaga listrik memiliki dampak langsung terhadap lingkungan sekitarnya, oleh karena itu diperlukan upaya dalam melindungi ekosistem bumi beserta seluruh isinya bagi kepentingan kehidupan generasi mendatang. Sebagai wujud implementasi dari kebijakan tersebut, Perusahaan telah menetapkan aspek lingkungan sebagai salah satu unsur penilaian dalam kinerja unit bisnis PLN di seluruh Indonesia. Melalui penilaian kinerja ini, Perusahaan dapat mengevaluasi pemenuhan komitmennya di bidang lingkungan.

The company's mission affirms that PT PLN (Persero) shall “Run the Business Activities with Environmental Awareness”. Therefore, PLN strives to pay attention to environmental aspects in carrying out every activity. PLN has made its best efforts on reducing the pollution of soil, water, and air by pollutants, including reducing greenhouse gas emission. This effort is being done thoroughly in all electricity provision activities carried out by PLN, in its generator installations, transmissions/substations, and distributions, as well as in the Subsidiaries' operations.

### ENVIRONMENTAL POLICY

PLN stands firmly committed to conducting environmentally sound business activities and is fully aware that the power generation business has a direct impact on the surrounding environment. Therefore, efforts are needed in protecting the earth's ecosystem and its contents for the benefit of future generations. As a manifestation of the policy's implementation, the Company has established environmental aspects as one of the elements of assessment in the performance of PLN business units throughout Indonesia. Through this performance appraisal, the Company can evaluate the fulfillment of its environmental commitments.

A night sky photograph featuring the Milky Way galaxy in the upper right quadrant. The galaxy's core is a bright, reddish-orange glow, surrounded by a dense field of stars. The rest of the sky is filled with a sparse distribution of stars. In the lower left foreground, a tall, metal lattice power line tower stands prominently. Several power lines stretch horizontally across the middle of the frame. The bottom of the image shows a dark, silhouetted landscape with some distant lights.

Program Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan  
Social Responsibility Program to the Environment

## Program Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Social Responsibility Program to the Environment

### PROGRAM-PROGRAM LINGKUNGAN

Program-program lingkungan di Perusahaan bertujuan untuk mewujudkan *Zero Waste Material* dan memberi *Positive Images* terhadap PT PLN (Persero).

Sebagai komitmen PLN terhadap upaya perlindungan lingkungan, pencapaian target program lingkungan dan komitmen dukungan terhadap upaya Pemerintah memenuhi komitmen pencapaian tujuan SDGs, khususnya di bidang reduksi emisi, Perseroan telah menyusun delapan program utama di Bidang Lingkungan, yakni:

1. Pengawasan Penyelesaian Dokumen Lingkungan sesuai dengan RUPTL 2017-2026 dan RKAP 2017;
2. Pemenuhan PROPER Pembangkit minimal Biru pada PLN dan Anak Perusahaan PLN;
3. Pengawasan Kesesuaian Kelengkapan Dokumen Lingkungan, Izin Lingkungan, dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
4. Implementasi Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML);
5. Program Penghijauan;
6. Capacity Building (HSSE Academy);
7. Sistem Visual Manajemen Lingkungan;
8. Implementasi *Project Management Office* (PMO).

### PROGRAM PENGAWASAN PENYELESAIAN DOKUMEN LINGKUNGAN

Dalam melaksanakan pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Program 35 GW yang berwawasan lingkungan, Perseroan berupaya memastikan semua kegiatan memiliki Dokumen Lingkungan. Caranya adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Lingkungan proyek pembangunan yang dilakukan oleh UIP sebagaimana tertuang dalam RUPTL. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini berdasarkan proyek yang sudah memiliki dokumen *Feasibility Study* (FS).

Pada tahun 2017, telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap 10 proyek dari target 10 proyek, yaitu:

1. SUTET Durikosambi-Muarakarang
2. PLTMG Minahasa Peaker
3. PLTU Palu-3
4. PLTU Sulsel-2

### PROGRAMS FOR THE ENVIRONMENT

The Company's environmental programs aim to realize Zero Waste Material and provide Positive Images to PT PLN (Persero).

As PLN's commitment to environmental protection efforts, the achievement of environmental program targets and the commitment to supporting the Government's efforts to fulfill the commitment to achieve the SDGs' objectives, especially in the field of emission reduction, the Company has compiled eight major programs in the Environmental Sector:

1. Supervision of completion of Environmental Document in accordance with RUPTL 2017-2026 and RKAP 2017;
2. PROPER fulfillment on the Plant of at least Blue at PLN and PLN's Subsidiaries;
3. Supervision of Compliance of the Completeness of Environmental Document, Environmental Permit, and Environmental Protection and Management (PPLH) Permit;
4. Implementation of Environmental Management System (SML) Certification;
5. Reforestation Program;
6. Capacity Building (HSSE Academy);
7. Environment Management Visual System;
8. Project Management Office (PMO) Implementation.

### PROGRAM OF SUPERVISION OF COMPLETION OF ENVIRONMENTAL DOCUMENTS

In implementing the construction of the 35 GW environmentally sound Electricity Infrastructure Program, the Company strives to ensure that all activities have Environmental Documents. The Company monitors and evaluates the preparation of Environmental Documents of UIP's development projects as set forth in the RUPTL. The monitoring and evaluation activities are based on projects that already have Feasibility Study (FS) documents.

In 2017, 10 projects out of 10 project targets have been monitored and evaluated, i.e.:

1. SUTET Durikosambi-Muarakarang
2. Minahasa Peaker Gas Engine Power Plant
3. Palu-3 Coal Power Plant
4. Sulsel-2 Coal Power Plant

## Program Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Social Responsibility Program to the Environment

5. PLTMG Lombok Peaker
6. PLTU Lombok FTP 2
7. PLTM Lapai 1
8. PLTM Kalibumi
9. PLTA Riorita
10. PLTA Bakaru

Beberapa program yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian hasil tersebut adalah:

1. Menugaskan Unit Induk Pembangunan untuk melakukan penyusunan Dokumen Lingkungan (termasuk penganggaran dan koordinasi pelaporan progres)
2. Memonitor progres penyelesaian penyusunan Dokumen Lingkungan

5. Lombok Peaker Gas Engine Power Plant
6. Lombok FTP 2 Coal Power Plant
7. Lapai 1 Microhydro Power Plant
8. Kalibumi Microhydro Power Plant
9. Riorita Hydro Power Plant
10. Bakaru Hydro Power Plant

Some of the programs that have been conducted to support the achievement of these results are:

1. Assigning the Development Master Units to prepare the Environmental Documents (including budgeting and coordination of progress reporting)
2. Monitoring the progress of compilation of Environmental Documents

## PEMENUHAN PROPER PEMBANGKIT MINIMAL BIRU PADA PLN DAN ANAK PERUSAHAAN PLN

## PROPER FULFILLMENT ON THE PLANT OF AT LEAST BLUE AT PLN AND PLN'S SUBSIDIARIES



PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) merupakan kegiatan evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

PROPER (Corporate Performance Rating Program in Environmental Management) is an evaluation of obedience and performance that exceeds the obedience of the party responsible for the business and/or activities in the field of pollution control and/or environmental damage, and the management of hazardous and toxic materials waste.

## Program Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Social Responsibility Program to the Environment

Pada tahun 2017, PLN meraih PROPER emas untuk PLTU Paiton yang dikelola oleh PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB). Pencapaian ini adalah bentuk penghargaan terhadap kepedulian terhadap lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam dan peningkatan keanekaragaman hayati, serta kepedulian terhadap masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat melalui program CSR. Selain PROPER Emas, terjadi peningkatan kinerja PROPER Pembangkit PLN dan Anak Perusahaan PLN berupa PROPER Hijau (dari 14 menjadi 15), PROPER Biru (dari 76 menjadi 81), PROPER Merah (dari 6 menjadi 0), PROPER Hitam (dari 0 tetap 0).

In 2017, PLN received gold PROPER for Paiton Coal Power Plant, managed by PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB). This achievement is a form of appreciation for environmental awareness embodied in the form of efficient utilization of Natural Resources and enhancement of biodiversity, and community awareness in the form of community empowerment through CSR program. In addition to the Gold PROPER, there is improvement in the Power Plant Performance of PLN and its Subsidiaries, i.e. Green PROPER (14 to 15), Blue PROPER (76 to 81), Red PROPER (6 to 0), and Black PROPER (still 0).

## Sebaran Hasil Proper 2017 Unit PLN & Anak Perusahaan Per Regional

PROPER distribution 2017 for PLN and its Subsidiaries per region

	2016	2017		2016	2017		2016	2017		2016	2017
<b>Emas</b>   Gold	: 0	▶ 0	<b>Emas</b>   Gold	: 0	▶ 0	<b>Emas</b>   Gold	: 0	▶ 0	<b>Emas</b>   Gold	: 0	▶ 0
<b>Hijau</b>   Green	: 0	▶ 1	<b>Hijau</b>   Green	: 0	▶ 1	<b>Hijau</b>   Green	: 0	▶ 0	<b>Hijau</b>   Green	: 0	▶ 0
<b>Biru</b>   Blue	: 18	▶ 20	<b>Biru</b>   Blue	: 15	▶ 15	<b>Biru</b>   Blue	: 18	▶ 19	<b>Biru</b>   Blue	: 6	▶ 7
<b>Merah</b>   Red	: 4	▶ 0	<b>Merah</b>   Red	: 1	▶ 0	<b>Merah</b>   Red	: 0	▶ 0	<b>Merah</b>   Red	: 1	▶ 0
<b>Hitam</b>   Black	: 0	▶ 0	<b>Hitam</b>   Black	: 0	▶ 0	<b>Hitam</b>   Black	: 0	▶ 0	<b>Hitam</b>   Black	: 0	▶ 0
<b>Regional Sumatera</b> Regional Sumatera			<b>Regional Kalimantan</b> Regional Kalimantan			<b>Regional Sulawesi</b> Regional Sulawesi			<b>Regional Maluku &amp; Papua</b> Regional Maluku & Papua		
<b>Emas</b>   Gold	: 0	▶ 0	<b>Emas</b>   Gold	: 0	▶ 0	<b>Emas</b>   Gold	: 0	▶ 1	<b>Emas</b>   Gold	: 0	▶ 0
<b>Hijau</b>   Green	: 5	▶ 6	<b>Hijau</b>   Green	: 4	▶ 4	<b>Hijau</b>   Green	: 5	▶ 3	<b>Hijau</b>   Green	: 5	▶ 3
<b>Biru</b>   Blue	: 2	▶ 1	<b>Biru</b>   Blue	: 5	▶ 5	<b>Biru</b>   Blue	: 12	▶ 14	<b>Biru</b>   Blue	: 12	▶ 14
<b>Merah</b>   Red	: 0	▶ 0	<b>Merah</b>   Red	: 0	▶ 0	<b>Merah</b>   Red	: 0	▶ 0	<b>Merah</b>   Red	: 0	▶ 0
<b>Hitam</b>   Black	: 0	▶ 0	<b>Hitam</b>   Black	: 0	▶ 0	<b>Hitam</b>   Black	: 0	▶ 0	<b>Hitam</b>   Black	: 0	▶ 0
<b>Regional Jawa Barat</b> Regional West Java			<b>Regional Jawa Tengah</b> Regional Central Java			<b>Regional Jawa Timur, Bali &amp; Nusa Tenggara</b> Regional East Java, Bali & Nusa Tenggara					
	2016	2017		2016	2017		2016	2017		2016	2017
<b>Emas</b>   Gold	: 0	▶ 1	<b>Emas</b>   Gold	: 0	▶ 1	<b>Emas</b>   Gold	: 0	▶ 1	<b>Emas</b>   Gold	: 0	▶ 1
<b>Hijau</b>   Green	: 14	▶ 15	<b>Hijau</b>   Green	: 14	▶ 15	<b>Hijau</b>   Green	: 14	▶ 15	<b>Hijau</b>   Green	: 14	▶ 15
<b>Biru</b>   Blue	: 76	▶ 81	<b>Biru</b>   Blue	: 76	▶ 81	<b>Biru</b>   Blue	: 76	▶ 81	<b>Biru</b>   Blue	: 76	▶ 81
<b>Merah</b>   Red	: 6	▶ 0	<b>Merah</b>   Red	: 6	▶ 0	<b>Merah</b>   Red	: 6	▶ 0	<b>Merah</b>   Red	: 6	▶ 0
<b>Hitam</b>   Black	: 0	▶ 0	<b>Hitam</b>   Black	: 0	▶ 0	<b>Hitam</b>   Black	: 0	▶ 0	<b>Hitam</b>   Black	: 0	▶ 0
<b>Total Peserta</b>   Total	: 96	▶ 97	<b>Total Peserta</b>   Total	: 96	▶ 97	<b>Total Peserta</b>   Total	: 96	▶ 97	<b>Total Peserta</b>   Total	: 96	▶ 97

## Program Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Social Responsibility Program to the Environment

Beberapa program yang telah dilakukan pada tahun 2017 untuk mendukung pencapaian hasil tersebut adalah:

1. Melaksanakan *Self Assement* oleh Tim *Self Assement* PROPER PLN terhadap 6 Unit PLN yang mendapatkan PROPER Merah di tahun 2015-2016.
2. Melaksanakan *Capacity Building* dalam bentuk *Workshop* sebanyak 6 (enam) kali, dengan topik: Peningkatan Pemahaman Pengelolaan Limbah *Fly Ash Bottom Ash* (FABA), Refreshment untuk peningkatan pencapaian PROPER & Bimbingan Teknis Penyusunan DRKPL, Penerapan Aplikasi Perizinan Online Si Raja Limbah, Festronek, serta Perizinan Online, Pemahaman Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup-Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DPLH-DELH), Peningkatan Pemahaman tentang Pengecualian FABA dari Limbah B3 (LB3), Upaya Pemulihan Lahan Terkontaminasi LB3 serta Pemanfaatan Berbasis SNI.
3. Mengevaluasi dan melakukan rapat secara intensif mengenai progress tindak lanjut perbaikan PROPER Merah.
4. Melaksanakan pembahasan rencana tindak lanjut hasil rapor sementara PROPER Tahun 2017.

In 2017, some of the programs that have been conducted to support the achievement of these results are:

1. Self-Assessment by PLN PROPER Self-Assessment Team on 6 PLN Units with Red PROPER in 2015-2016.
2. Capacity Building in the form of Workshop for 6 (six) times, with the topics of: Increased Understanding of Fly Ash Bottom Ash (FABA) Waste Management, Refreshment for PROPER Achievement & Technical Guidance of DRKPL Drafting, Online Licensing Application of Si Raja Limbah, Festronek, and Online Licensing, Understanding the Documents of Environmental Management-Environmental Evaluation (DPLH-DELH), Enhancement of Understanding on FABA Exclusion from B3 Waste (LB3), Recovery Effort for LB3 Contamination Land, and SNI Based Utilization.
3. Evaluation and intensive meetings on the progress of the Red PROPER improvements.
4. Discussion of follow-up plan result for PROPER 2017 report.

### PENGAWASAN KESESUAIAN KELENGKAPAN DOKUMEN LINGKUNGAN, IZIN LINGKUNGAN, DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Program verifikasi kesesuaian & kelengkapan Dokumen Lingkungan, Izin Lingkungan dan Izin PPLH bertujuan untuk menginventarisasi Dokumen Lingkungan (Dokling), Izin Lingkungan (IL) & Izin Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) serta memastikan dokumen yang dimiliki oleh PLN Unit tersebut tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2017, telah dilakukan verifikasi Dokling, IL, dan PPLH terhadap Unit di 5 regional, yaitu:

1. Regional Kalimantan
2. Regional Maluku & Papua
3. Regional Jawa Bagian Barat
4. Regional Jawa Bagian Tengah
5. Regional Jawa Bagian Timur, Bali & Nusa Tenggara

### SUPERVISION OF COMPLIANCE OF THE COMPLETENESS OF ENVIRONMENTAL DOCUMENT, ENVIRONMENTAL PERMIT, AND ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT (PPLH) PERMIT

The Environmental Document, Environmental Permit, and PPLH Permit Compliance Verification Program aims to inventory the Environmental Documents (Dokling), Environmental Permit (IL), & Environmental Protection & Management (PPLH) Permit, and ensure that documents owned by PLN Units are available and complying with the provisions of current regulation.

In 2017, the Company verified the Dokling, IL, and PPLH in the Units throughout 5 regions, i.e.:

1. Kalimantan Region
2. Maluku & Papua Region
3. West Java Region
4. Central Java Region
5. East Java, Bali, & Nusa Tenggara Region

## Program Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Social Responsibility Program to the Environment

Hal-hal yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi Dokling, IL & PPLH untuk kegiatan existing dan perencanaan.
2. Verifikasi kesesuaian & kelengkapan Dokling, IL & PPLH dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Memberikan input perbaikan terhadap Dokling, IL & PPLH yang tidak sesuai dengan implementasi di lapangan.

The things that have been carried out are as follows:

1. Inventory of Dokling, IL, & PPLH for existing and planned activities.
2. Verify the compliance & completeness of Dokling, IL, and PPLH with applicable laws and regulations.
3. Provide input improvements to Dokling, IL, and PPLH that are not in accordance with the field implementation.

### IMPLEMENTASI SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML)

Implementasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) atau lebih dikenal dengan ISO 14001 di tahun 2017 wajib diterapkan pada Kegiatan Pembangkit dengan kapasitas > 10 MW (per lokasi) yaitu 50% pembangkit sudah memiliki sertifikasi SML.

### IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM (SML) CERTIFICATION

Implementation of Environmental Management System (SML) or better known as ISO 14001 in 2017 shall be applied to Generating Activities with capacity > 10 MW (per location), i.e. 50% of power plant already have SML certification.



Meskipun masih terdapat keterbatasan tenaga kerja, baik dalam hal setup SML dan pemahaman yang belum merata tentang SML, di tahun 2017, implementasi SML tercapai di 36 unit. Rinciannya adalah 2 Unit di Regional Sumatera, 1 Unit di Regional Jawa Bagian Tengah, 4 Unit di Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, 20 Unit di Regional Kalimantan, dan 9 Unit di Regional Sulawesi.

Despite the limited workforce, both in terms of SML setup and uneven understanding of SML, in 2017, SML is implemented in 36 units. The 36 units are 2 Units in Sumatera, 1 Unit in Central Java, 4 Units in East Java, Bali, and Nusa Tenggara, 20 Units in Kalimantan, and 9 Units in Sulawesi.

## Program Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Social Responsibility Program to the Environment

### PROGRAM PENGHIJAUAN

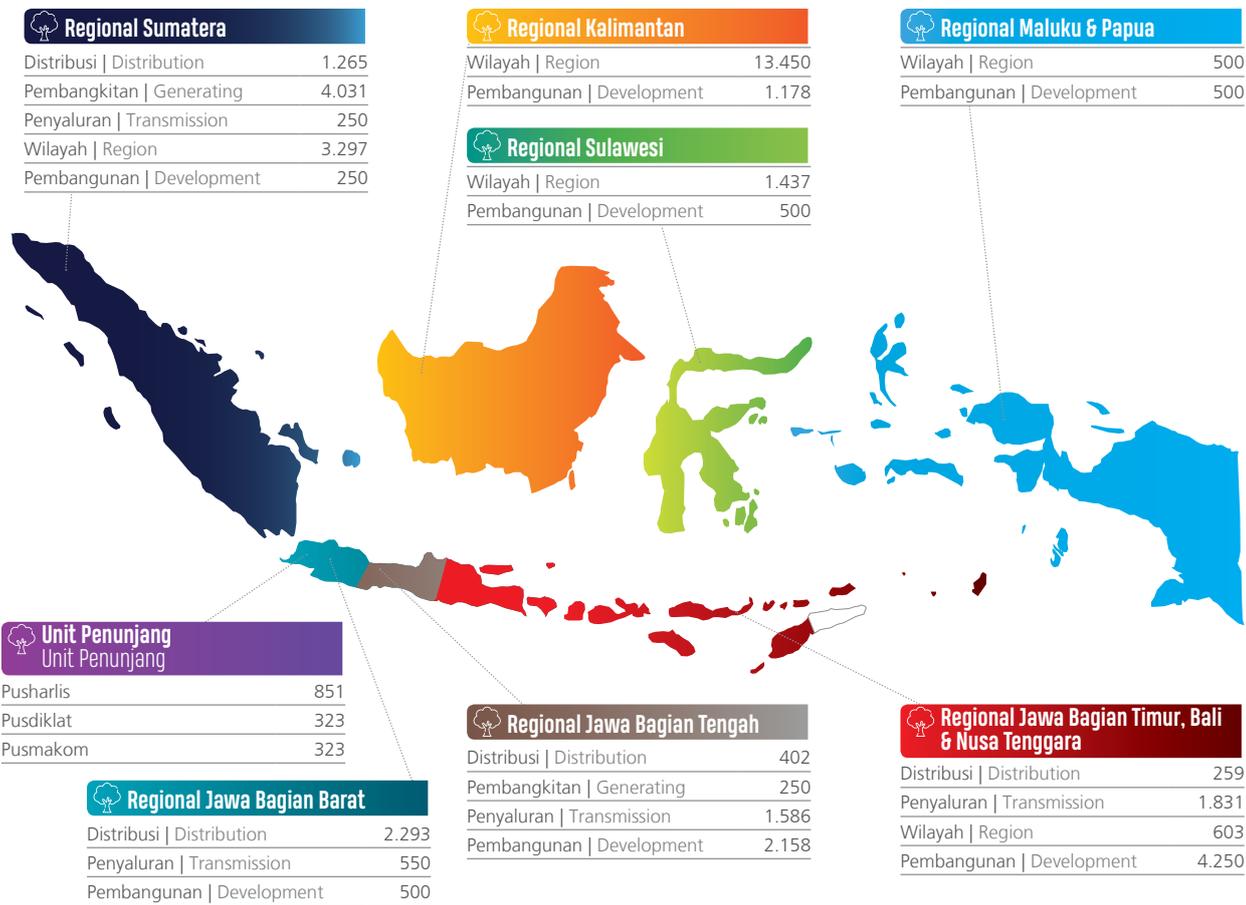
Merupakan program penanaman pohon di unit PLN atau lokasi masyarakat umum sebagai upaya mengurangi pencemaran udara.

Pada tahun 2017, telah dilakukan penanaman pohon sebanyak 42.837 pohon dari target 13.750 pohon.

### REFORESTATION PROGRAM

This program is a tree planting program in PLN unit or public location as an effort to reduce air pollution.

In 2017, there were 42,837 trees planted of the 13,750 trees target.



## Program Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Social Responsibility Program to the Environment

Beberapa program yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian hasil tersebut adalah:

1. Himbauan kepada seluruh unit untuk melakukan gerakan penghijauan di area sekitar unit maupun masyarakat sekitar.
2. Mencantumkan program penghijauan sebagai kriteria penilaian Maturity Level K3L point Lingkungan untuk Unit PLN.
3. Melakukan gerakan sosial dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dengan gerakan mencegah penebangan pohon secara liar dan pembukaan lahan baru.

### CAPACITY BUILDING (HSSE ACADEMY)

Peningkatan kapabilitas/kompetensi Pegawai di bidang Perlindungan Lingkungan dan Aspek K3 dilakukan melalui pengembangan modul pembelajaran sesuai dengan direktori kompetensi PLN dan berjenjang mulai dari pegawai baru sampai dengan para pemimpin. Modul Pembelajaran dikembangkan bekerjasama dengan PLN *Corporate University*. Sebagai wujud komitmen pengembangan tersebut, PLN telah memiliki Peta Program Pembelajaran Aspek K3-L Bidang Lingkungan.

Selama tahun 2017, telah tersusun *grand design* pembelajaran lingkungan sejumlah 39 kurikulum dan silabus program serta pengembangan materi 5 modul pembelajaran Lingkungan, yaitu:

1. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Proper Hijau dan Emas;
3. Dasar-dasar Audit Lingkungan;
4. PROPER;
5. Maturity Lingkungan.

### SISTEM VISUAL MANAJEMEN LINGKUNGAN

Pada tahun 2017, sedang dirintis Aplikasi Sistem Visual Manajemen Lingkungan yang merupakan sebuah perangkat pelaporan pengelolaan lingkungan hidup dan *data base* terpadu. Sistem ini berbentuk sebuah aplikasi terpadu yang dapat diakses oleh seluruh unit. Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah untuk memudahkan unit dalam melaksanakan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup (antara lain pelaporan RKL-RPL, Pelaporan penghijauan, dll). Unit hanya perlu mengisikan data-data yang diminta di aplikasi, sehingga diharapkan aplikasi ini dapat mengurangi penggunaan kertas.

Some of the programs that have been conducted to support the achievement of these results are:

1. All units have been appealed to do the reforestation in the area around the unit and the surrounding community.
2. Including the reforestation program as the criterion of K3L Maturity Level point Environment for PLN Unit.
3. Conducting social movements and socialization to the community to preserve and conserve the environment with a movement to prevent illegal logging and new land clearing.

### CAPACITY BUILDING (HSSE ACADEMY)

Improved capability/competence of Employees in the Environmental Protection and OHS Aspects is conducted through the development of learning modules in accordance with PLN's competency directory and tiered from new employees to leaders. The Learning Modules is developed in cooperation with PLN Corporate University. As a manifestation of these development commitments, PLN already has a K3-L Environmental Aspect Program Mapping.

Throughout 2017, the grand design of 39 curricula and program syllabus on environmental learning and 5 modules of Environmental study have been compiled, i.e.:

1. Environmental Management Policy;
2. Green and Gold PROPER;
3. Basic Environmental Audit;
4. PROPER;
5. Environmental Maturity.

### ENVIRONMENT MANAGEMENT VISUAL SYSTEM

In 2017, Application of Environmental Management Visual System is developed, which is a tool for environmental management reporting and an integrated database. This system is an integrated application accessible to all units. The objective of developing this application is to facilitate the unit in carrying out the environmental management reporting (among others, RKL-RPL reporting, Reporting of reforestation, etc.). The Units need to fill in the requested data in the application, thereby reducing paper usage.

## Program Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

### Social Responsibility Program to the Environment

### IMPLEMENTASI PMO

Project Management Office (PMO) merupakan suatu organisasi atau entitas yang memiliki tanggung jawab terkait pengelolaan seluruh proyek di bawah kewenangan / domain-nya. PMO diperlukan untuk menjembatani dan melakukan sinkronisasi proyek-proyek agar tujuan proyek maupun program keseluruhan dapat tercapai. PMO Proyek ketenagalistrikan menjadi unit organisasi yang melaksanakan koordinasi terpusat untuk seluruh proyek ketenagalistrikan PLN mulai dari Pre-Project, Implementasi Project sampai dengan *Post-Project*. PMO PLN mengembangkan aplikasi monitoring proyek ketenagalistrikan yang berbasis Web (*Platform Sharepoint*) yang dikelola oleh Divisi Administrasi Konstruksi. Divisi K3L berperan dalam proses Pre-Project untuk persiapan perizinan terkait lingkungan dengan menjalankan workflow Penugasan Persiapan lingkungan kepada UIP sesuai list proyek.

### PROGRAM LINGKUNGAN LAINNYA

Perseroan juga menjalankan beberapa inisiatif strategis di bidang lingkungan, meliputi:

1. Pengelolaan Limbah
2. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca.

### PENGELOLAAN LIMBAH

Pengelolaan Limbah B3 di PLN dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2014.

Tujuan dari Pengelolaan Limbah B3 dan non B3 sebagai berikut :

- a). Mencegah terjadinya pencemaran;
- b). Melindungi kesehatan manusia;
- c). Melindungi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain;
- d). Mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan terjadinya kebakaran, ledakan;
- e). Mencegah terjadinya kerusakan Lingkungan.

Sebagai bagian dari upaya mengurangi limbah, PLN menerapkan program program 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) dilakukan di unit-unit pembangkit yang mempunyai target PROPER Hijau. Beberapa Unit telah bekerja sama dengan pihak ketiga yang berizin untuk pengelolaan limbah B3 dan non-B3.

### PMO IMPLEMENTATION

Project Management Office (PMO) is an organization or entity that has responsibility for managing all projects under its authority/domain. PMO needs to bridge and synchronize the projects so that the projects' objective and the overall programs are achieved. PMO for Electrification projects is an organizational unit that performs central coordination for all PLN electricity projects, starting from Pre-Project, Project Implementation, to Post-Project. PLN PMO developed a Web-based application monitoring project (Sharepoint) managed by the Division of Construction Administration. K3L Division plays a role in the Pre-Project process to prepare the environmental related permissions by running the Environmental Assignment workflow to UIP according to the project list.

### OTHER ENVIRONMENTAL PROGRAMS

In addition to the 8 main programs, the Company also carries out several strategic initiatives in the environmental field, which cover:

1. Waste Management
2. Greenhouse Gas Emissions Reduction.

### WASTE MANAGEMENT

B3 Waste Management in PLN is conducted in accordance with Government Regulation No. 101 of 2014.

The objectives of B3 and non-B3 Waste Management are as follow:

- a). Preventing pollution;
- b). Protecting human's health;
- c). Protecting the survival of humans and other living beings;
- d). Preventing the occurrence of work accidents and the occurrence of fire, explosion;
- e). Preventing damage to the environment.

As the effort to reduce waste, PLN implemented 3R program (Reuse, Reduce, Recycle) in power plants with the targets of Green PROPER. Some Units have cooperated with licensed third parties for the management of B3 and non-B3 wastes.

## Program Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Social Responsibility Program to the Environment

PLN juga semakin intensif menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) pada pembangunan proyek ketenagalistrikan. PLN melalui RUPTL merencanakan bauran EBT pada komposisi pembangkit listrik sebesar 23% pada tahun 2027.

PLN is also increasingly intensive in using Renewable Energy (EBT) in the electricity projects development. PLN, through RUPTL, plans a 23% EBT mix on the power plants by 2027.

### REDUKSI EMISI GAS RUMAH KACA (GRK – CO<sub>2</sub>)

Upaya mengurangi emisi GRK dilakukan melalui implementasi Kebijakan Mitigasi Perubahan Iklim, yang menegaskan bahwa PLN:

1. Memprioritaskan pengembangan energi terbarukan Prioritas pembangunan pembangkit EBT untuk masuk ke sistem tenaga listrik kapan saja mereka siap.
2. Menggunakan teknologi rendah karbon
  - Memilih boiler *supercritical* dan *ultra supercritical* untuk PLTU di pulau Jawa dan penggunaan teknologi yang lebih efisien di Sumatera dan Indonesia Timur
  - Mempertimbangkan penggunaan *Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC)* dan *Carbon Capture and Storage (CCS)*.
3. Pengalihan Bahan Bakar (*Fuel Switching*) Mengalihkan pemakaian BBM ke gas pada PLTG, PLTGU dan PLTMG (*gas engine*)
4. Efisiensi energi di pusat pembangkit Melakukan *rehabilitasi/refurbishment* untuk mempertahankan kapasitas, menjaga keandalan mesin dan meningkatkan efisiensi pembangkit.

### GREENHOUSE GAS EMISSIONS REDUCTION (GRK – CO<sub>2</sub>)

The efforts to reduce GRM emission is performed through the implementation of Climate Change Mitigation Policy, which affirms that PLN:

1. Prioritizes development of renewable energy  
Prioritizes building EBT Plant to be combined with the electricity whenever PLN is ready.
2. Uses low-carbon technology
  - Chooses *supercritical* and *ultra-supercritical* boiler for Coal Power Plant in Java and more efficient use of technology in Sumatera and East Indonesia
  - Considers the use of *Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC)* and *Carbon Capture and Storage (CCS)*.
3. Fuel Switching  
Switches oil fuel to gas at Gas Power Plant, Combined Cycle Power Plant, and Gas Engine Power Plant
4. Energy efficiency at the central plant  
Conducts *rehabilitation/refurbishment* to maintain capacity, maintain engine reliability, and improve plant efficiency.

### BIAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Total biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan lingkungan hidup selama tahun 2017, total adalah sebesar Rp255,29 miliar, mencakup kegiatan pembuatan dokumen lingkungan, realisasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta realisasi kegiatan penghijauan di sekitar area operasi pembangkitan maupun area pendukung lainnya.

### ENVIRONMENTAL MANAGEMENT COST

Total costs incurred for environmental activities during 2017, totaling Rp255.29 billion, covering environmental document preparation activities, realization of environmental management and monitoring activities and the realization of reforestation activities around the area of generating operations and other support areas.

# KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

## Employment, Occupational Health and Safety



PLN sangat menyadari makna penting dari terciptanya hubungan kerja sama yang serasi antara manajemen dan seluruh sumber daya manusia Perseroan. Oleh karenanya dalam setiap kegiatan operasional, Perseroan senantiasa menjalankan praktik atau perlakuan yang sama terhadap semua karyawan dengan tidak memandang suku, ras, agama, gender dan haluan politiknya, begitu pula semua karyawan memiliki kebebasan berserikat.

PLN is fully aware of the importance of creating a harmonious working relationship between management and all of the Company's human resources. Therefore, in every operational activity, the Company continues to practice or treats the employees equally, regardless of its tribe, race, religion, gender, and political view. All employees also have the freedom of association.

## Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Employment, Occupational Health and Safety

Untuk merealisasikan hubungan kerja yang mendukung terciptanya kondisi lingkungan kerja yang kondusif, PLN bersama-sama dengan Serikat Pekerja menyetujui untuk tetap menggunakan PKB periode 2010-2012 sebagai dasar bagi penyelenggaraan hubungan industrial yang saling menghargai, sambil membahas PKB untuk periode selanjutnya.

Selain kesepakatan hubungan industrial tersebut, Perseroan aktif menyelenggarakan berbagai forum komunikasi bipartit dalam kerangka formal maupun informal. Kemudian untuk memastikan pengelolaan SDM yang optimal dan selaras dengan tujuan pengembangan usaha PLN mengorganisasikan tenaga kerja dengan kebijakan sesuai butir-butir yang tercantum dalam Keputusan Direksi No.032.K/DIR/2009 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi.

PLN, in cooperation with Workers Union, agree to use the CLA for 2010-2012 period as the basis for the implementation of respectful industrial relations to realize working relationships that support the creation of conducive working environment, while still discussing the CLA for the next period.

In addition to these industrial relations agreements, the Company actively organizes various bipartite communication forums in formal and informal frameworks. Further, to ensure optimal human resource management that is in line with the purpose of business development, PLN organizes the human resources in accordance with the points stated in Directors' Decree No. 032.K/DIR/2009 on Competence Based Human Resources Management System.



# KETENAGAKERJAAN

## Employment

### KEBIJAKAN

PLN berupaya meningkatkan optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan kepentingan pegawai. Sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDM yang berkualitas dan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak secara adil, sesuai dengan kemampuan Perseroan, maka PLN menerapkan kebijakan dasar pengelolaan SDM dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Membina hubungan baik dengan pegawai berlandaskan kerjasama timbal balik yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama dan ditinjau secara berkala.
- Mematuhi seluruh peraturan-peraturan dan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- Memberlakukan sistem pengupahan berdasarkan kinerja yang diterapkan dengan adil, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan
- Menjunjung tinggi hak-hak asasi pegawai dan memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan Serikat Pegawai.
- Menyiapkan berbagai program peningkatan dan pelatihan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kinerja individu, kelompok dan akhirnya korporasi.
- Menerapkan kesetaraan dalam jejang karir.
- Menerapkan kesetaraan gender dalam hal remunerasi.

### POLICY

PLN strives to optimize the human resource management with due regards to the employees' interests. As part of the implementation of a qualified HR management policy and taking into account the interests of both parties fairly, in accordance with the Company's capabilities, PLN implements the basic human resource management policy with the following principles:

- Building good relationship with employees based on reciprocal cooperation set forth in the Collective Labor Agreement document and reviewing the CLA periodically.
- Complying with all laws and regulations in the field of employment.
- Establishing performance-based remuneration system in a fair, transparent and accountable manner
- Honoring the human rights of all employees and providing full support to the establishment of Workers Union.
- Preparing various employee competence enhancement and training programs, to improve the performance of individuals, groups, and corporations.
- Implementing equality in career path.
- Implementing gender equality in terms of remuneration.

Ketenagakerjaan  
Employment**PENGELOLAAN SDM**

Pengelolaan SDM PLN pada dasarnya telah diselaraskan dengan identifikasi tugas PLN dan keahlian inti yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas PLN sebagai penyedia dan pengelola ketenagalistrikan di Indonesia. Dalam rangka menjalankan pengelolaan dan pengembangan SDM yang efektif, efisien dan tepat tujuan, PLN telah mengidentifikasi jenis-jenis kompetensi dasar maupun lanjutan yang diperlukan, menentukan jenis sertifikasi yang relevan menyusun program pelatihan terintegrasi, dan dituangkan dalam Roadmap Learning and Development PLN. Uraian lebih lanjut mengenai beragam kegiatan pengelolaan SDM terdapat dalam bahasan "Profil Perusahaan – Profil Kepegawaian".

**PROGRAM-PROGRAM PENGEMBANGAN, PENILAIAN KINERJA DAN REMUNERASI**

Uraian mengenai beragam kegiatan dibidang pengelolaan ketenagakerjaan ini terdapat dalam bahasan "Profil Perusahaan – Profil Kepegawaian".

**DAMPAK KEUANGAN DARI KEGIATAN**

Sebagai realisasi kebijakan PLN untuk meningkatkan kompetensi pegawai, Perseroan menyelenggarakan berbagai program pelatihan yang terbuka bagi seluruh pegawai, sesuai dengan jenjang jabatan dan program pengembangan perusahaan. Dampak keuangan pengembangan kompetensi dibahas lebih lanjut pada bahasan "Profil Kepegawaian".

**HR MANAGEMENT**

PLN's human resources management has been aligned with the PLN's tasks and core expertise required to carry out PLN's duties as a provider and manager of electricity in Indonesia. In order to carry out effective, efficient, and appropriate management and development of human resources, PLN has identified the types of basic and advanced competencies required, determined the type of certification that is relevant in developing an integrated training program, and outlined them in the PLN's Roadmap Learning and Development. Further details of various HR management activities are included in the "Company Profile - Employment Profile".

**DEVELOPMENT, PERFORMANCE ASSESSMENT, AND REMUNERATION PROGRAMS**

The description of various activities in the employment management is included in the "Company Profile – Employment Profile".

**FINANCIAL IMPACT OF THE ACTIVITIES**

As the realization of PLN's policy to improve employee competence, the Company conducts various training programs open to all employees, in accordance with the Company's position and development program. The financial impact of competence development is discussed further in the "Employment Profile".

# KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

## Occupational Health and Safety

### KEBIJAKAN

Kebijakan PLN dalam pengelolaan K3 menyatu dengan kebijakan Perlindungan Lingkungan sebagaimana telah disinggung pada bahasan Program Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan, dengan prinsip kebijakan sebagai berikut:

1. Mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan kerja, keamanan dan perlindungan lingkungan dalam setiap aktifitas di PT PLN (Persero).
2. Mematuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan kerja, keamanan dan perlindungan lingkungan.
3. Melaksanakan identifikasi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja, identifikasi ancaman keamanan dan identifikasi aspek perlindungan lingkungan sesuai dengan tingkat risiko dan melakukan upaya-upaya pencegahan, perlindungan dan pengendalian serta penanggulangannya yang ditinjau secara berkala dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kesadaran dan kompetensi Pegawai agar dapat melaksanakan pekerjaan secara aman, andal dan ramah lingkungan.
5. Menciptakan dan memelihara harmonisasi hubungan dengan stakeholders pada kegiatan usaha PT PLN (Persero) untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan.

### TARGET DAN PROGRAM-PROGRAM K3

Target pelaksanaan program-program kerja yang telah dilakukan di bidang K3 adalah mewujudkan *Zero Accident*, dan tumbuhnya *Positive Images* terhadap PT PLN (Persero).

Adapun program-program yang dilaksanakan selama tahun 2017, adalah sebagai berikut.

1. Implementasi dan Sertifikasi Sistem Manajemen K3
2. Implementasi dan Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan
3. Implementasi Contractor Safety Management System (CSMS)
4. Implementasi Maturity Level K3L
5. Pengelolaan HSSE Academy

### POLICY

PLN's policy in OHS management integrates with the Environmental Protection policy as mentioned in the Environmental Responsibility Program, with the following principles:

1. Prioritizing aspects of occupational health and safety, security, and environmental protection in every activity at PT PLN (Persero).
2. Complying with laws and other requirements relating to occupational health and safety, and environmental protection.
3. Identifying the hazards of occupational health and safety, identifying the security threats, and identifying the environmental protection aspects according to the level of risk and its prevention, protection and control measures, and mitigation, which is reviewed regularly and continuously.
4. Increasing awareness and competence of Employees in order to carry out the work safely, reliably, and environmentally friendly.
5. Creating and maintaining harmonization of relationships with stakeholders in PT PLN (Persero) business activities to build mutually beneficial partnerships.

### OHS TARGETS AND PROGRAMS

The target of work programs conducted in the OHS field is to realize *Zero Accident*, and the growth of *Positive Images* of PT PLN (Persero).

The programs carried out throughout 2017 are as follow.

1. Implementation and Certification of OHS Management System
2. Implementation and Certification of Security Management System
3. Implementation of Contractor Safety Management System (CSMS)
4. Implementation of K3L Maturity Level
5. HSSE Academy Management

Kesehatan dan Keselamatan Kerja  
Occupational Health and Safety**IMPLEMENTASI DAN SERTIFIKASI SISTEM  
MANAJEMEN K3**

PP Nomor 50 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Penerapan SMK3 bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

**IMPLEMENTATION AND CERTIFICATION OF OHS  
MANAGEMENT SYSTEM**

Government Regulation No. 50 of 2012 states that the Occupational Health and Safety Management System, hereinafter abbreviated as SMK3, is part of the overall corporate management system in order to control risk related to work activities, to create a safe, efficient, and productive workplace. The objectives of SMK3 implementation are:

1. Improving the effectiveness of planned, measurable, structured, and integrated occupational health and safety protection.
2. Preventing and reducing occupational injuries and diseases by involving elements of management, workers/laborers, and/or trade/worker unions.
3. Creating a safe, convenient, and efficient workplace to encourage productivity.



Tahun 2017, 54 Unit dari 54 Unit Induk telah bersertifikasi SMK3 dengan tingkat pencapaian "MEMUASKAN" atau Bendera Emas, sedangkan Unit Pelaksana, 230 Unit dari 230 Unit Pelaksana telah bersertifikasi SMK3 dengan tingkat pencapaian 210 Unit Pelaksana mencapai predikat "MEMUASKAN" atau Bendera Emas dan 20 Unit mencapai predikat "BAIK" atau Bendera Perak.

Selain sertifikasi SMK3, PLN juga menerapkan sertifikasi OHSAS 18001 serta penerapan ISO 14001 : 2004, mengenai pengelolaan lingkungan, pada unit kerja pembangkit skala besar.

In 2017, 54 out of 54 Units have been certified by SMK3 with the "SATISFACTORY" achievement or Gold Flag. In the Implementing Units, 230 out of 230 Implementing Units have been certified SMK3 and 210 Units reached the "SATISFACTORY" achievement or Gold Flag, and the rest 20 Units reached "GOOD" predicate or Silver Flag.

In addition to SMK3 certification, PLN also implements OHSAS 18001 certification and ISO 14001: 2004, on environmental management, on a large-scale generating unit.

## Kesehatan dan Keselamatan Kerja Occupational Health and Safety

### IMPLEMENTASI DAN SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN

Sesuai dengan Keputusan Kementerian ESDM No 3407.K/ Mem/2012 Tentang Penetapan Obvitnas di Sektor ESDM, Peraturan Kapolri No 27 Tahun 2009 Tentang Sistem Manajemen Keamanan telah ditunjuk 47 Instalasi di PT PLN (Persero) yang menjadi Obyek Vital Nasional dan wajib menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP).

### IMPLEMENTATION AND CERTIFICATION OF SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

In accordance with Ministry of EMR Decree No. 3407.K/ Mem/2012 on Determination of National Vital Objects in the EMR Sector, the Chief of Police Regulation No. 27 of 2009 on Security Management System has appointed 47 Installations in PT PLN (Persero), which are categorized as National Vital Objects (OBVITNAS) and must apply Security Management System (SMP).



Tahun 2017, realisasi sertifikasi SMP pada OBVITNAS di unit PLN sebanyak 20 Unit dari target 20 Unit.

In 2017, SMP certification in the OBVITNAS of PLN reached 20 out of 20 targeted Units.

### IMPLEMENTASI CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (CSMS)

CSMS (*Contractor Safety Management System*) adalah suatu sistem manajemen K3 yang diterapkan kepada kontraktor, meliputi beberapa K3 yang sesuai dengan standar yang diacu. CSMS sebagai pertimbangan awal suatu perusahaan untuk menilai kinerja kontraktor yang akan diterimanya.

### IMPLEMENTATION OF CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (CSMS)

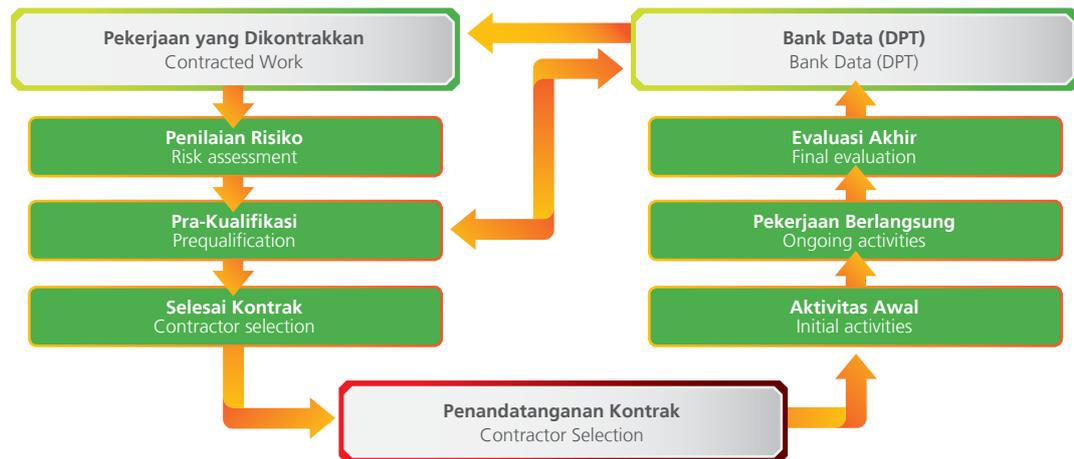
CSMS (*Contractor Safety Management System*) is an OHS management system applied to the contractor, which covers several OHS in accordance with the referred standards. CSMS is an initial consideration of a company in assessing the candidate contractors' performance.

Tahapan CSMS terdiri dari:

1. Tahapan Kualifikasi
  - Penilaian resiko
  - Pra – kualifikasi
  - Pemilihan kontraktor (seleksi)
2. Tahap Pelaksanaan
  - Aktivitas awal pekerjaan
  - Pada saat pekerjaan pekerjaan
  - Evaluasi akhir

CSMS stages consist of:

1. Qualification
  - Risk assessment
  - Prequalification
  - Contractor selection
2. Implementation
  - Initial activities
  - Ongoing activities
  - Final evaluation

Kesehatan dan Keselamatan Kerja  
Occupational Health and Safety

PLN menerapkan prosedur CSMS sehubungan dengan tingginya angka kecelakaan kerja yang dicatatkan oleh mitra kontraktor dalam pelaksanaan tugasnya. Seluruh kontraktor utama telah menjalani program CSMS secara berkala untuk menekan angka insiden kecelakaan kerja secara gradual.

PLN implements the CSMS procedure in relation to the high number of work accidents recorded by the contractor partners in the duties performed. All major contractors have carried out the regular CSMS programs to reduce the incidence of employment injuries gradually.

### IMPLEMENTASI MATURITY LEVEL K3L

Maturity Level K3L adalah alat ukur dalam tingkat kematangan dan konsistensi Implementasi K3L yang terdiri dari:

1. Kepemimpinan, Kebijakan dan Komitmen Manajemen
2. Kuesioner K3
3. Kuesioner Pengamanan
4. Kuesioner Lingkungan Hidup
5. Integritas Laporan

Maturity Level K3L dinilai dan diverifikasi tiap semester.

Tahun 2017, pencapaian (realisasi) Maturity Level K3L untuk KIT Tanjung Jati B, P2B JB, Unit Transmisi, UIP, dan unit penunjang sebesar 82,5% dari target 100% (bobot 4), sedangkan Unit Wilayah, Unit Distribusi, KIT SBU, KIT SBS, dan P3BS sebesar 81,0% dari target 100% (bobot 3).

### IMPLEMENTATION OF K3L MATURITY LEVEL

K3L Maturity Level is a measuring tool in the level of maturity and consistency of HSE Implementation, which consists of:

1. Leadership, Policy, and Management Commitment
2. OHS Questioner
3. Safety Questioner
4. Environmental Questioner
5. Report Integrity

Every semester, K3L Maturity Level is assessed and verified.

In 2017, the achievement of K3L Maturity Level for Tanjung Jati B Kits, P2B JB, Transmission Unit, UIP, and supporting units is 82.5% of the target 100% (weight 4). For Regional Unit, Distribution Unit, KIT SBU, KIT SBS, and P3BS, the K3L Maturity Level is 81.0% of the target 100% (weight 3).

## Kesehatan dan Keselamatan Kerja

### Occupational Health and Safety

#### PENGELOLAAN HSSE ACADEMY

HSSE Academy merupakan Akademi yang mengembangkan serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada bidang Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan, dan Lingkungan. Tuntutan kebutuhan SDM yang kompeten di bidang Keselamatan Ketenagalistrikan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Implementasi SMK3/SMT, meningkatkan mutu dan kegiatan ramah lingkungan baik di unit Pembangkitan, Penyaluran (Transmisi), Distribusi, maupun Proyek yang ada di PLN juga menjadi latar belakang terbentuknya HSSE Academy.

#### KOMITE KESELAMATAN KERJA

Mengingat operasional PLN melalui 56 unit bisnis dan 10 anak usaha berlokasi di seluruh Indonesia, PLN membentuk badan khusus sejenis Panitia Pembina untuk mengkoordinasikan kegiatan dan program terkait dengan K3, yang dinamakan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) melalui Keputusan Direksi No. 0072.K/DIR/2016, yang merupakan penyempurnaan dari Komite Keselamatan Ketenagalistrikan melalui SK Dir No. 017.K/DIR/2011 dan Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui SK Direksi No. 570.K/DIR/2010.

Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ini untuk mewujudkan kondisi yang aman, andal dan ramah lingkungan dalam menjalankan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk mencapai target program nihil kecelakaan/*zero accident*, yang dikoordinasikan oleh Divisi Kesehatan, Keselamatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan (DIVK3L).

#### KINERJA K-3

Sekalipun prosedur kerja aman telah ditetapkan, kegiatan operasional yang banyak berlangsung di lapangan membuat insiden kecelakaan kerja pada unit-unit bisnis PLN yang berlokasi di seluruh wilayah Indonesia masih terjadi. Adapun gambaran insiden kecelakaan kerja selama lima tahun terakhir tergambar dari tabel dan tiga diagram sebagai berikut.

#### HSSE ACADEMY MANAGEMENT

HSSE Academy is an Academy that develops and organizes education and training with focus on the Occupational Health and Safety, Security, and Environment. The demand for competent human resources in the field of Electrical Safety, Occupational Health and Safety, Implementation of SMK3/SMT, quality and environmentally friendly activities improvement in the Generating, Transmission, Distribution, and Project units in PLN is one of the backgrounds of HSSE Academy establishment.

#### OCCUPATIONAL SAFETY COMMITTEE

Considering PLN's operations in 56 business units and 10 subsidiaries located throughout Indonesia, PLN established a special organ, similar to the Coordinating Committee to coordinate activities and programs related to OHS, called the Occupational Health and Safety Committee (P2K3), through Board of Directors' Decree No. 0072.K/DIR/2016, which is a refinement of the Electricity Safety Committee, through Directors' Decree No. 017.K/DIR/2011, and Occupational Health and Safety Committee through the Directors' Decree No. 570.K/DIR/2010.

The establishment of the Occupational Safety and Health Committee (P2K3) is to create conditions that are safe, reliable, and environmentally friendly, in carrying out the Occupational Health and Safety Management System (SMK3) to achieve the zero accident program target, which is coordinated by the Division of Health, Safety, Security, and Environment (DIVK3L).

#### OHS PERFORMANCE

Even though safe work procedures have been established, many on-going operations in the field still have the potential of workplace incidents or accidents on PLN business units located throughout Indonesia. The description of work accidents/incidents during the last five years is illustrated in the table and three diagrams as follows.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja  
Occupational Health and Safety

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, data tahun 2017 menunjukkan bahwa PLN masih harus terus berbenah untuk memperbaiki angka kecelakaan kerja karena masih terjadi 47 kali kejadian kecelakaan kerja, baik yang menimpa mitra kerja (86,7%) maupun pegawai PLN (13.3%), dengan *Frequency Rate* dan *Severity Rate* sebagai berikut :

- *Frequency Rate* 2017: 0.15 Kali Kecelakaan / 1 juta jam orang / Tahun
- *Severity Rate* 2017: 892 hari kerja hilang / 1 juta jam orang / Tahun

Pelajaran yang di ambil dari insiden-insiden kecelakaan tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan prosedur kerja maupun program peningkatan kesadaran budaya sadar aspek K3 dalam kegiatan operasional di seluruh unit bisnis PLN.

## KESEHATAN KERJA

Berkaitan dengan kesehatan karyawan, PLN memiliki program pemeriksaan rutin bagi para pekerja yang bekerja pada lingkungan dan kondisi tertentu, misalnya terhadap para operator pada mesin pembangkit yang kesehariannya bekerja dengan kondisi kebisingan yang melewati ambang batas. PLN juga melakukan upaya pemantauan lingkungan di unit bisnis yang dimaksudkan untuk menjaga kondisi lingkungan

Despite various efforts, in 2017, the data indicate that PLN still needs to improve on the number of accidents, because there are still 47 work accidents, both partners (86.7%) and PLN employees (13.3%), with *Frequency Rate* and *Severity Rate* as follow:

- *Frequency Rate* 2017: 0.15 Times Incident/1 million hour person/Year
- *Severity Rate* 2017: 892 lost business days/1 million hour person/Year

The lessons learned from the work accidents/incidents are utilized as an evaluation for the improvement of work procedures and awareness raising programs of OHS awareness culture in the operations of all PLN business units.

## OCCUPATIONAL HEALTH

In relation to employee health, PLN has a routine inspection program for employees working in particular environments and conditions, e.g. power plant operators, who work daily with noise exceeding the standard threshold. PLN also conducts efforts to monitor the environment around its business units, aimed at maintaining the environmental conditions and avoiding waste disposal that can pollute the environment In regards

## Kesehatan dan Keselamatan Kerja

### Occupational Health and Safety

agar terhindar dari limbah pembuangan yang bisa mencemarkan lingkungan. Dalam kaitan pemantauan kondisi lingkungan ini, PLN menetapkan SE Direksi No. 109 - Tahun 2014 yang didalamnya termasuk mewajibkan pemeriksaan berkala bagi tenaga kerja yang ada. Dalam pengukuran maturity level K3 juga telah dicantumkan kriteria terhadap pemeriksaan kesehatan pegawai.

Dalam hal pemeriksaan kesehatan secara berkala, PLN telah mengatur dalam Keputusan Direksi PLN Nomor : 168.K/DIR/2011 Tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pegawai dan Keluarga yang ditanggung (Pasal 4, ayat 9, poin c) dan Maturity Level K3L tentang melakukan pemeriksaan Kesehatan bagi pegawai secara berkala yang wajib dilaksanakan setiap 1 tahun sekali dan diberikan kepada pegawai yang berumur  $\geq$  40 tahun dan pegawai pada pekerjaan yang beresiko tinggi.

### DAMPAK KEUANGAN DARI KEGIATAN DI BIDANG K3

Total biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja selama tahun 2017 adalah sebesar Rp 715,8 Miliar di seluruh Indonesia.

to these monitoring actions, PLN issued the Director's Circular No. 109 of 2014, which includes the requirement of periodic inspection of workforces. For measuring the Occupational Health and Safety maturity level, the criteria for examining employee health is also included.

PLN has stipulated regular medical examinations in the PLN's Board of Directors Decree No. 168.K/DIR/2011 on the Implementation of Health Care for Employees and Families covered (Article 4, paragraph 9, point c) and K3L Maturity Level, on periodic health checks for employees that must be implemented once every year and given to employees aged  $\geq$  40 years and employees at a high risk job.

### FINANCIAL EFFECTS OF OHS ACTIVITIES

The total cost incurred for Occupational Health and Safety related activities during 2017 amounted to Rp715.8 billion throughout Indonesia.

## PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

### Social and Community Development



Melalui program ini Perusahaan turut berperan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperluas lapangan kerja. Selain itu Perusahaan mengharapkan agar masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap instalasi PLN, sehingga mereka turut berpartisipasi menjaga dan memelihara instalasi PLN.

Through this program, the Company participates in improving people's living standards and expanding employment. In addition, the Company expects the people to have a sense of ownership of the PLN installation, so they participate in protecting and maintaining PLN installation.

## Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

### Social and Community Development

Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L/TJSL) yang memiliki makna sangat berarti bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga Perusahaan.

Melalui program ini Perusahaan turut berperan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperluas lapangan kerja. Selain itu Perusahaan mengharapkan agar masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap instalasi PLN, sehingga mereka turut berpartisipasi menjaga dan memelihara instalasi PLN.

### KEBIJAKAN

Kegiatan pengembangan sosial dan kemasyarakatan PLN, khususnya program PKBL mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor No. PER-09/MBU/07/2015, tanggal 3 Juli 2015, perihal tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017, tanggal 20 Juli 2017 tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015.

Sesuai dengan Peraturan Kementerian BUMN tersebut kegiatan TJSL dilaksanakan dengan tujuan :

1. Membantu pengembangan kemampuan masyarakat
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
3. Mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan
4. Mendorong tersedianya tenaga listrik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat
5. Pengembangan desa mandiri energi
6. Menjaga kesinambungan lingkungan melalui pelestarian alam.

Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan terjadi hubungan emosi yang saling memahami, saling membutuhkan dan saling menjaga antara PLN dengan masyarakat sekitar.

### PROGRAM KEMITRAAN

Program Kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi

This activity is implemented in the Partnership and Community Development Program (PKBL) and Corporate Social Responsibility (P3L/CSR) with very positive benefits, not only for the community, but for the Company as well.

Through this program, the Company contributes to improving the community's standard of living and expanding employment. Further, the Company expects the community to have a sense of ownership towards PLN installations, consequently participating in the protection and maintenance of the installations.

### POLICY

PLN's social and community development activities, in particular, the PKBL program refer to the Minister of SOEs Regulation No. PER-09/MBU/07/2015, dated July 3, 2015, on the SOEs' Partnership and Community Development Program, and Minister of SOEs Regulation No. PER-02/MBU/7/2017 dated July 20, 2017, on the Second Amendment to the Minister of SOEs Regulation No. PER-09/MBU/07/2015.

In accordance with the Minister of SOEs Regulations, the objectives of TJSL activities are:

1. Assisting the development of community capability
2. Empowering the community
3. Assisting the community through education
4. Encouraging the availability of electricity to improve the quality of life of the community
5. Developing self-reliant village in terms of energy
6. Maintaining environmental sustainability through nature conservation.

This activity involves all stakeholders and cooperates with various parties, including government, non-governmental organizations, mass organizations, etc. Thus, PLN expects that there is emotional relationships, mutual understanding, mutual need, and mutual care, with the surrounding community.

### PARTNERSHIP PROGRAM

The Partnership Program is a program to increase the capability of small businesses to be resilient and self-

## Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

### Social and Community Development

tanggung dan mandiri melalui pemanfaatan dana Program Kemitraan yang sudah dialokasikan. Program Kemitraan menyalurkan dana dalam bentuk :

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian asset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan
- b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan
- c. Beban Pembinaan :
  - Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktifitas mitra binaan serta untuk pengkajian / penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
  - Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;
  - Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan mitra binaan

Berdasar risalah RUPS No. RIS-025/D2.MBU/12/2016, tanggal 23 Desember 2016, perihal Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2017 merencanakan penyaluran untuk Program Kemitraan senilai Rp 34.536.070.000 dengan menggunakan dana bergulir.

Sepanjang tahun 2017, PLN telah menyalurkan dana sebesar Rp 616.379.839 untuk mendukung munculnya calon mitra PK dan membina mitra PK PLN, saat ini PLN telah mendirikan dan mengoperasikan 15 Rumah Kreatif BUMN ( RKB ), program ini dimanfaatkan sebagai wadah/ tempat berbagi/ sharing ilmu dalam bisnis UMKM dan mendorong kemajuan UKM menuju go digital.

Adapun rincian penyaluran Program Kemitraan seperti terlihat pada tabel berikut:

reliant through the allocation of Partnership Program funds. The Partnership Program disbursed funds in the form of:

- a. Loans to finance working capital and/or purchase of fixed assets in order to increase production and sales
- b. Special loan to finance the need for funds for the implementation of the business activities of the assisted partners in the form of additional and short-term loans to fulfill the order from the partners' business partners
- c. Coaching expenses:
  - To finance education, training, apprenticeships, marketing, promotions, and other matters related to productivity enhancement of the assisted partners, and assessment/research related to the Partnership Program;
  - Coaching expenses in the form of grants to a maximum of 20% of the Partnership Program funds in the current year;
  - Coaching expenses can only be provided to or for the benefit of the foster partners

Based on the Minutes of GMS No. RIS-025/D2.MBU/12/2016, dated December 23, 2016, on the Approval of Company's Work and Budget Plan (RKAP) 2017, the Partnership Program is planned to disburse Rp34,536,070,000 by utilizing revolving funds.

Throughout 2017, PLN has disbursed Rp616,379,839 to support the Partnership candidates and to coach PLN's Partnership Program. To date, PLN has established and operated 15 SOEs Creative Houses (Rumah Kreatif BUMN/ RKB). This program is a place/forum to share knowledge in MSMEs business and encourage the progress of SMEs to go digital

Details of the Partnership Program disbursements can be viewed in the following table:

Uraian   Description	Realisasi 2017   Realization 2017
Industri   Industry	Rp526.379.839
Perdagangan   Commerce	Rp90.000.000
<b>Total</b>	<b>Rp616.379.839</b>

## Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

### Social and Community Development

### PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Pada tahun 2017 Unit PKBL PT PLN (Persero) telah merealisasikan dana Bina Lingkungan tahun 2017 sebagai berikut:

No	Uraian   Description	Realisasi 2017   Realization 2017
1	Bantuan Korban Bencana Alam   Natural Disaster Assistance	Rp1.915.700.300
2	Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan   Education/Training Assistance	Rp19.718.219.760
3	Bantuan Peningkatan Kesehatan   Health Improvement Aid	Rp4.540.425.561
4	Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum   Development of Public Facilities and Infrastructure	Rp22.291.415.071
5	Bantuan Sarana Ibadah   Houses of Worship Assistance	Rp12.649.188.500
6	Bantuan Pelestarian Alam   Nature Conservation Aid	Rp5.072.967.500
7	Bantuan Sosial Kemasyarakatan untuk Pengentasan Kemiskinan   Poverty Eradication Aid	Rp25.152.195.191
<b>Total</b>		<b>Rp91.340.112.283</b>

Adapun rincian kegiatan Bina Lingkungan sebagai berikut:

1. Bantuan bencana alam senilai Rp1.915.700.300 direalisasikan untuk bantuan bencana alam seperti bantuan tanggap darurat gunung Sinabung, bantuan siklon tropis Cempaka di Yogyakarta, tanah longsor di Pacitan dan banjir di beberapa tempat. Dana bencana ini dialokasikan di setiap Unit di Distribusi dan Wilayah dan dapat langsung melakukan aksi bantuan bencana di tiap provinsi masing-masing.
2. Bantuan Pendidikan / Pelatihan senilai Rp19.718.219.760 direalisasikan melalui program bantuan fasilitas/sarana penunjang pendidikan, pelatihan pemberdayaan masyarakat di Aceh, Sumut, Riau, Jakarta, Jabar, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalbar, Kaltim, Sulsel, dll. Bantuan Program Siswa Mengenal Nusantara di NTT dan Maluku.
3. Bantuan Peningkatan Kesehatan senilai Rp4.540.425.561 direalisasikan untuk bantuan pemeriksaan kesehatan, pembangunan sarana air bersih, bantuan kantong darah dan program bantuan Pembangunan puskesmas, dan MCK.
4. Bantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum senilai Rp22.291.415.071 direalisasikan untuk perbaikan jalan, pembangunan sumur bor, bantuan air bersih, perbaikan jembatan, dan bantuan fasum fasos lainnya.

### COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM

In 2017, the PKBL Unit of PT PLN (Persero) has realized the following Community Development funds:

Details on Community Development activities are as follows:

1. Natural disaster assistance in the amount of Rp1,915,700,300, realized for the natural disaster aid, such as Sinabung volcano emergency relief aids, tropical cyclone Cempaka aid in Yogyakarta, landslides in Pacitan, and floods in several locations. These disaster funds are allocated to each Distribution/Transmission Unit and Regional Unit, and they can directly perform the disaster relief actions in each of their respective provinces.
2. Education/Training assistance in the amount of Rp19,718,219,760, realized through educational supporting facilities assistance and community empowerment training in Aceh, North Sumatera, Riau, Jakarta, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, West Kalimantan, South Sulawesi, etc. Siswa Mengenal Nusantara Program Assistance in East Nusa Tenggara and Maluku.
3. Health Improvement Aid in the amount of Rp4,540,425,561, realized for health examination aid, clean water facilities development, blood drives, Community Health Center development assistance, and washing, bathing, and toilet facilities.
4. Development of Public Facilities and Infrastructure amounted to Rp22,291,415,071, realized through the development of wells, clean water assistance, bridges repair, and other public facilities.

## Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

### Social and Community Development

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Bantuan Sarana Ibadah senilai Rp12.649.188.900 direalisasikan untuk bantuan perbaikan sarana ibadah.</li> <li>6. Bantuan Pelestarian Alam senilai Rp5.072.967.500 direalisasikan untuk bantuan penanaman pohon, dan kegiatan pengelolaan/peduli sampah.</li> <li>7. Bantuan Pengentasan Kemiskinan senilai Rp25.152.195.191 direalisasikan untuk bantuan bedah rumah veteran di NTT, program buka puasa bersama anak yatim-dhuafa, dan program bantuan sembako murah dan santunan anak yatim, program elektrifikasi (sambung listrik gratis) untuk warga kurang beruntung.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Houses of Worship assistance in the amount of Rp12,649,188,900, realized for houses of worship facilities improvement.</li> <li>6. Nature Conservation Aid amounted to Rp5,072,967,500, realized for planting of trees and waste management activities.</li> <li>7. Poverty eradication aid amounted to Rp25,152,195,191, realized through veteran housing improvement assistance in East Nusa Tenggara, breaking the fast with orphans program, and cheap food packages program, orphan aid, and electrification program (free electrification) for those less fortunate.</li> </ol> |
|---|---|

### PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Pelaksanaan program CSR oleh PLN terutama diprioritaskan di lokasi sekitar Unit Pembangkitan, Penyaluran, Transmisi, Proyek Kelistrikan dan Unit Jasa. Pada tahun 2017, total realisasi penyaluran dana CSR sebesar Rp90,84 miliar.

Adapun rincian kegiatan CSR yang dilaksanakan di Unit Pembangkitan, Penyaluran, Transmisi, proyek kelistrikan dan unit jasa adalah sebagai berikut :

### CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PROGRAMS

The execution of PLN's CSR program was prioritized in locations near Powerplants, Transmissions, Electricity Infrastructure Construction Projects, and Service Units. In 2017, total disbursement for CSR project was Rp90.84 billion.

The following are CSR activities conducted at the Units of Power Plants, Distribution, Transmission, electricity infrastructure construction projects and Service Unit:

No	Uraian   Description	Realisasi 2017   Realization 2017
1	Bantuan Korban Bencana Alam   Natural Disaster Assistance	Rp1.599.737.149
2	Pendidikan dan/atau Pelatihan   Education/Training Assistance	Rp13.625.349.780
3	Bantuan Peningkatan Kesehatan   Health Improvement Aid	Rp2.689.823.135
4	Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum   Development of Public Facilities and Infrastructure	Rp28.017.658.024
5	Bantuan Sarana Ibadah   Houses of Worship Assistance	Rp12.332.333.335
6	Bantuan Pelestarian Alam   Nature Conservation Aid	Rp4.472.869.145
7	Bantuan Sosial Kemasyarakatan untuk Pengentasan Kemiskinan   Poverty Eradication Aid	Rp27.849.759.910
	Administrasi   Administration	Rp254.397.978
<b>Total</b>		<b>Rp90.841.928.456</b>

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan bencana alam senilai Rp1.599.737.149 direalisasikan untuk penyaluran bantuan pada peristiwa bencana alam seperti Banjir/ longsor di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Erupsi gunung Agung, Bali, Banjir Solok, Erupsi Gunung Sinabung dan lain-lain.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assistance for natural disasters amounted to Rp1,599,737,149 realized for distribution of aid on the natural disasters, such as Flood/landslide in the Lima Puluh Kota Regency, West Sumatera. Mount Agung eruption, Bali, Solok Flood, Eruption of Mount Sinabung Eruption, etc.</li> </ol> |
|--|--|

## Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

### Social and Community Development

2. Bantuan Pendidikan / Pelatihan senilai Rp.13.625.349.780 direalisasikan untuk bantuan pendidikan disekitar lokasi proyek pembangunan kelistrikan, pelatihan komunitas dengan pemanfaatan potensi setempat, pelatihan keterampilan pengelasan bersertifikat, perbaikan sarana pendidikan, bantuan renovasi dan fasilitas sekolah seperti MCK, pembuatan taman sekolah, perpustakaan, dan lain-lain
3. Bantuan Peningkatan Kesehatan senilai Rp2.689.823.135 direalisasikan untuk pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan masyarakat disekitar proyek menjadi lebih diutamakan, sekaligus memberi fasilitas BPJS kesehatan bagi masyarakat yang belum memiliki karena tidak mampu.
4. Bantuan Fasilitas Umum & Fasilitas Sosial senilai Rp 28.017.658.024 direalisasikan untuk betonisasi jalan umum lingkungan, bantuan air bersih, pembangunan MCK umum, perbaikan drainase, perbaikan sarana taman bermain dan wisata, pembuatan jembatan, pembuatan gapura, dan lain-lain.
5. Bantuan Sarana Ibadah senilai Rp12.332.333.335 direalisasikan untuk Berpartisipasi dalam perbaikan dan pembangunan rumah-rumah ibadah disekitar lokasi proyek pembangunan.
6. Bantuan Pelestarian Alam senilai Rp4.472.869.145 direalisasikan untuk penanaman pohon disekitar proyek pembangunan untuk mendukung proper, seperti mangrove, pohon produktif dan lain-lain.
7. Bantuan Pengentasan Kemiskinan senilai Rp 27.849.759.910 direalisasikan untuk bantuan bedah rumah veteran di Papua dan Papua Barat, bedah rumah pensiunan, program bantuan sembako murah, bingkisan ramadhan dan santunan anak yatim, program elektrifikasi (sambung listrik gratis) dan MCK untuk warga kurang beruntung.
2. Assistance for Education / Trainings amounted to Rp13,625,349,780 realized for educational assistance around the site of electricity development projects, community training with local potential utilization, certified welding skills training, improvement of educational facilities, renovation assistance and school facilities such as MCK, school park, library, etc.
3. Assistance for Healthcare Improvement amounted to Rp2,689,823,135 realized for public health check-up and counseling around the prioritized project, and the provision of BPJS Health for people who are less fortunate.
4. Assistance for Public Facility & Social Facility amounted to Rp28,017,658,024 realized for public road concrete, clean water assistance, public toilets construction, drainage improvement, playground and tourism facilities improvement, bridge construction, gate construction, etc.
5. Assistance for Religious Facility amounted to Rp12,332,333,335 realized by participating in repair and construction of houses of worship around the construction project site.
6. Assistance for Nature Conservation of Rp4,472,869,145 realized for tree planting around development projects to support PROPER, such as mangroves, productive trees, etc.
7. Assistance for Social-Community toward Poverty Eradication amounted to Rp27,849,759,910 realized through veteran housing improvement assistance in Papua and West Papua, veteran housing assistance, cheap food packages program, Ramadhan package and orphan aid, and electrification program (free electrification), and washing, bathing, and toilet for those underprivileged.

## PROGRAM UNGGULAN PKBL DAN CSR

### 1. Program BUMN Hadir Untuk Negeri

Program BUMN Hadir untuk Negeri Tahun 2017 terdiri dari kegiatan :

- a. Siswa Mengenal Nusantara di NTT dan Maluku  
Program Siswa Mengenal Nusantara untuk PLN

## PKBL AND CSR LEADING PROGRAM

### 1. BUMN Hadir untuk Negeri (SOEs for the State) Program

BUMN Hadir untuk Negeri Program in 2017 consists of:

- a. Siswa Mengenal Nusantara at East Nusa Tenggara and Maluku  
Siswa Mengenal Nusantara Program for PLN

## Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

### Social and Community Development

dilaksanakan di Provinsi NTT yang diwakili oleh 24 Siswa Siswi dari 22 Kabupaten dan 2 anak dari difable/ berkebutuhan khusus dari Kupang. Peserta tersebut diberangkatkan ke Provinsi Maluku pada tanggal 15 -25 Juli 2017 bantuan Bina lingkungan untuk delegasi NTT sebesar Rp388.675.000 dan bantuan CSR untuk delegasi Maluku senilai Rp300.075.000.

- b. Program Bedah Rumah Veteran  
Program Bedah rumah Veteran dilaksanakan oleh PLN di tiga Provinsi yaitu di:
  - i. Provinsi NTT, sebanyak 17 rumah Veteran dengan besaran dana bina lingkungan sebesar Rp1.020.000.000.
  - ii. Provinsi Papua, dibangun sebanyak 25 rumah di Jayapura dan 1 rumah di Wamena, bantuan total senilai Rp1.060.000.000 (menggunkan sumber dana CSR).
  - iii. Papua Barat, dibangun sebanyak 30 rumah, bantuan dana BL senilai Rp1.200.000.000 (menggunkan sumber dana CSR).
  
- c. Program Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2017  
Kegiatan Upacara Bendera 17 Agustus 2017 dilaksanakan di Perbatasan TTT dengan negara Timor leste yaitu di Pos Lintas Batas Negara di Mota'ain, Atambua NTT. Kegiatan yang dilaksanakan pada 17 –18 Agustus 2017 dengan rangkaian kegiatan Upacara Bendera 17 Agustus 2017, Lomba Rakyat dan jalan sehat pada tanggal 18 Agustus 2017 bantuan senilai Rp1.993.370.500 (sumber dana PLN) dan bantuan Bina Lingkungan untuk Pendidikan di Sekolah SMA Katolik Suria Atambua senilai Rp330.000.000.

## 2. Rumah Kreatif

Rumah Kreatif BUMN merupakan wadah bagi langkah kolaborasi badan usaha milik negara dalam membentuk Digital Economy Ecosystem melalui pembinaan bagi UKM untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelompok usaha tersebut. Rumah Kreatif BUMN akan menjadi pusat data dan informasi serta sebagai pusat edukasi, pengembangan dan digitalisasi UKM.

is implemented in NTT Province, which is represented by 24 students from 22 regencies and 2 children with disabilities/special needs from Kupang. Participants were dispatched to Maluku Province on July 15-25, 2017. Community development assistance for NTT delegation amounted to Rp388,675,000, and CSR for Maluku delegation amounted to Rp300,075,000.

- b. Veteran Housing Improvement Program  
PLN carried out Veteran Housing Improvement Program in three Provinces, i.e.:
  - i. NTT Provinces, 17 Veteran's houses with a total of Rp1,020,000,000 community development aid.
  - ii. Papua Province, a total aid of Rp1,060,000,000, the Company built 25 houses in Jayapura and 1 house in Wamena (using the CSR fund source).
  - iii. West Papua, the Company built 30 houses, community development aid of Rp1,200,000,000 (using the CSR fund source).
  
- c. Independence Day Program August 17, 2017  
August 17 Ceremony, held at the Border of TTT with the country of Timor Leste, i.e. Post of Cross Country Border in Mota'ain, Atambua NTT. The event was held on August 17-18, 2017, with a series of activities, i.e. August 17 Ceremony, People's Competition and fast walking on August 18, 2017, with aid amounted to Rp1,993,370,500 (PLN fund source, and the Community Development aid for Education in Catholic High School Suria Atambua worth Rp330,000,000).

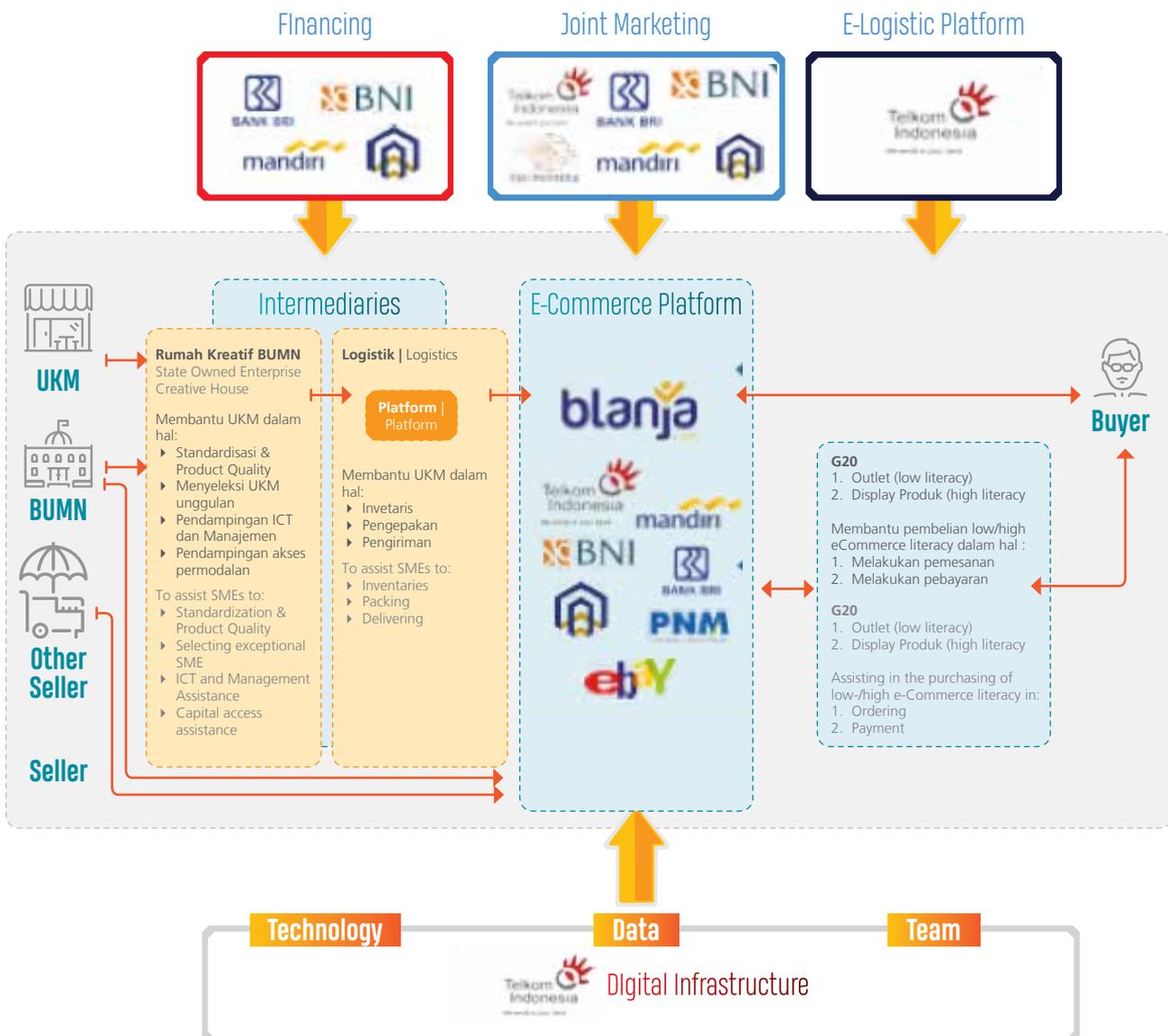
## 2. Creative Houses

Rumah Kreatif (Creative Houses) BUMN is a forum for State-Owned Enterprises collaboration in establishing Digital Economy Ecosystem through coaching for SMEs to improve the capacity and capabilities of the SMEs themselves Rumah Kreatif BUMN will be the center of data and information, and center of SME education, development, and digitization.

## Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Social and Community Development

Untuk mendukung terbentuknya Digital Economy Ecosystem, dilibatkan pula blanja.com yang ditetapkan sebagai marketplace BUMN dimana telah terjadi kolaborasi bisnis antar BUMN di dalamnya. Sebagai platform *marketplace*, blanja.com juga telah menyiapkan modul-modul yang memudahkan UKM untuk mulai memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan bisnisnya. *Positioning* blanja.com dalam Rumah Kreatif dan kolaborasinya untuk mendukung Digital Economy Ecosystem.

To support the formation of Digital Economy Ecosystem, blanja.com is set forth as the SOEs' marketplace, with business collaboration in-between the SOEs. As a marketplace platform, blanja.com has also set up modules that enable SMEs to start utilizing digital technology in running their business. The positioning of blanja.com in Rumah Kreatif, and its collaboration, support the Digital Economy Ecosystem.

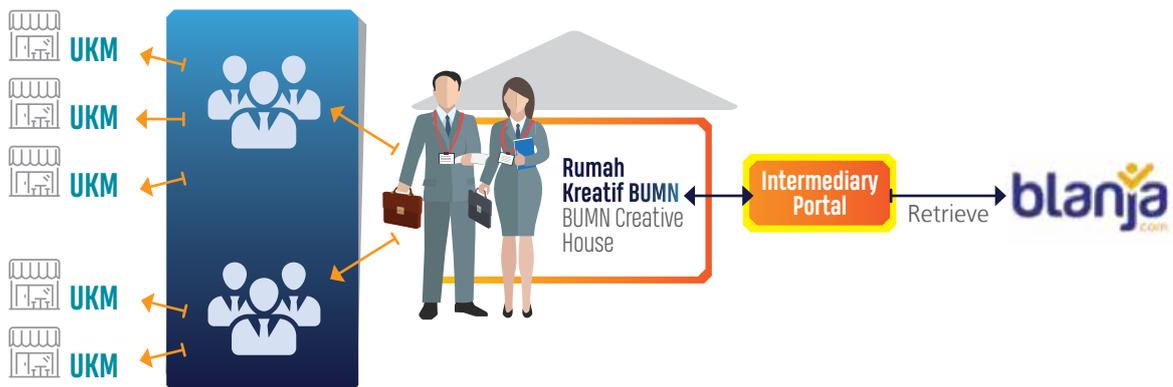


## Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

### Social and Community Development

blanja.com akan membantu UKM dalam memasarkan dan mempromosikan UKM di dunia maya. Untuk dapat terlisting di blanja.com maka di dalam Rumah Kreatif disediakan intermediary portal yang terhubung langsung dengan blanja. Com

Diharapkan dengan adanya blanja.com sebagai media market place BUMN, tujuan untuk membentuk Digital Economy Ecosystem dapat lebih mudah tercapai. Blanja.com sebagai media marketplace UKM melengkapi operasional dari Rumah Kreatif sebagai berikut:



blanja.com will assist the SMEs to market and promote their products in the digital world. To be listed in blanja.com, the Rumah Kreatif provides intermediary portal that is connected directly with blanja. com

blanja.com, as the SOEs marketplace, is expected to facilitate the achievement of Digital Economy Ecosystem. Blanja.com as the SMEs marketplace media, complete the operation of Rumah Kreatif as follows:

Alokasi dana untuk 15 lokasi RKB adalah sebesar bantuan sebesar Rp7,3 miliar.

Aktivitas yang sudah dilakukan adalah:

1. Telah mempunyai 943 UMKM yang tergabung dalam rkb.id
2. UMKM yang telah terdaftar di blanja.com sebanyak 140 UMKM
3. Pelatihan yang telah dilaksanakan sebanyak 31 pelatihan
4. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan di RKB PLN sebanyak 277 peserta

### 3. Program Bank Sampah

Melalui program Bank sampah ini sudah menjangkau 53.550 nasabah, mengolah sampah 337 ton/ bulan di 5 titik Unit Induk Bank Sampah (BS) mempunyai 988 Sub Bank Sampah yang tersebar yaitu di Bandung (131 BS), Yogyakarta (127 BS), Surabaya

Allocation of funds for 15 RKB locations amounted to Rp7.3 billion.

The activities that have been conducted are:

1. There are 943 MSMEs that joined at rkb.id
2. There are 140 MSMEs that joined blanja.com
3. There were 31 training held
4. There were 277 participants of RKB PLN Training

### 3. Waste Bank Program

Waste Bank Program has 53,550 customers, processes 337 tons of garbage per month in 5 Units of Central Waste Bank (BS). The program has 988 Sub-Waste Bank spread across, i.e. in Bandung (131

## Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

### Social and Community Development

(205 BS), Malang (520 BS), Mataram (5 BS), total bantuan untuk program bank sampah di tahun 2017 sebesar Rp714 juta

BS), Yogyakarta (127 BS), Surabaya (205 BS), Malang (520 BS), and Mataram (5 BS). The total aid for waste bank program in 2017 is Rp714 million.



#### 4. Desa Wisata Sungai Mudal

Kabupaten Kulonprogo, di Yogyakarta, nilai bantuan Rp327 juta, dimana jumlah pengunjung yang hadir sudah mencapai 9.000 pengunjung/bulan.

#### 4. Mudal River Tourism Village

Kulonprogo Regency, Yogyakarta. The aid amounted to Rp327 million, and the visitors reached 9,000 visitors/month.



#### 5. Pembangunan Balai Ekonomi Desa ( Balkondes)

PLN membangun Balkondes di Desa Ngadiharjo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Saat ini balkondes sudah banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal dan mancanegara kurang lebih 40 orang per hari. Keunggulan Balkondes Ngadiharjo adalah :

- Kuliner: Mie Entog dan Kopi Kapulaga
- Produk Kerajinan bambu
- Wisata Alam: Pereng Duwet

#### 5. Development of Village Economic Center (Balkondes)

PLN developed Balkondes at Ngadiharjo Village, Borobudur Subdistrict, Magelang, East Java. Currently, the Balkondes has been visited by up to 40 local and international tourists per day. The advantages of Balkondes Ngadiharjo are:

- Culinary: Mie Entog (Entog Noodle) and Kapulaga Coffee
- Bamboo Craft Products
- Natural tourism: Pereng Duwet

## Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

### Social and Community Development

- Tari: Tari Topeng Kawedar, Tari New Edi Siswo, Jatilan Laras Budoyo, Jatilan Turonggo Sari Muda, Hiburan Layar Tancap, Rebana
- Budaya: Gotong Royong
- Dance: Kawedar Mask Dance, New Edi Siswo Dance, Jatilan Laras Budoyo, Jatilan Turonggo Sari Muda, Screen Entertainment, Rebana
- Culture: Gotong Royong (Mutual Cooperation)

## PENGHARGAAN

Penghargaan yang telah didapatkan pada tahun 2017 untuk program PKBL dan CSR adalah :

PLN mendapat penghargaan dari LA TOFI School of CSR dalam Indonesia Green Awards 2017

1. Penyelamatan Sumber Daya Air, "Menjaga Sumber Air Sungai Mudal"
2. Menghemat Energi dan Penggunaan Energi Baru dan Terbarukan, "Gas untuk Nelayan Gebang Mekar"
3. Mengembangkan Keanekaragaman Hayati, "Cahaya dari Lubang Galian"
4. Pelopor Pencegahan Polusi, "Batu Kapur Bersihkan Langit Jepara"
5. Mengembangkan Pengolahan Sampah Terpadu, "Sampah di Tangan Perempuan Ampenan"

PLN mendapat penghargaan dari LA TOFI School of CSR dalam Penghargaan dalam Nusantara CSR Awards 2017 yang keseluruhannya diraih oleh PLN, yakni:

1. Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat :
2. Peningkatan Ekonomi Masyarakat (start-up ekonomi kreatif)
  - Desa Wisata Pandansari (PLN Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta)
  - KU BALI KOPI (PLN Pusat Penyaluran dan Pengaturan Beban Sumatera)
3. Peningkatan Mutu Kesehatan Masyarakat
  - Jembatan Kehidupan di Ende (PLN UIP Nusa Tenggara),
  - Jamban Sehat Bebas Penyakit (PLN Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta)

PLN di bulan November 2017 mendapatkan penganugerahan ICA (Indonesia CSR Awards 2017), yaitu:

1. Bidang Lingkungan
  - a. Kategori pengelolaan lingkungan
    - 1) Penghargaan Platinum untuk "Program Bank Sampah PLN Surabaya dan Malang".
    - 2) Penghargaan Platinum untuk "Batu Kapur bersihkan langit Jepara"
  - b. Kategori perlindungan lingkungan; Penghargaan Platinum untuk "Program

## AWARDS

In 2017, the awards for PKBL and CSR Programs are:

PLN received the award from LA TOFI School of CSR at Indonesia Green Awards 2017

1. Water Resources Savings, "Saving Mudal River Resources"
2. Save Energy and Utilization of New and Renewable Energy, "Gas for Gebang Mekar Fishermen"
3. Developing Biodiversity "Cahaya dari Lubang Galian (Light from the Tunnel)"
4. Pioneer of Pollution Prevention, "Limestone Cleanse the Jepara Sky"
5. Developing Integrated Waste Management, "Waste in the Hand of Ampenan Women"

PLN received the award from LA TOFI School of CSR in the Penghargaan dalam Nusantara CSR Awards 2017, which is overall achieved by PLN, i.e.:

1. Improving the Quality of Community Education:
2. Improving the Community's Economy (start-up of creative economy)
  - Pandansari Tourism Village (PLN Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta)
  - KU BALI KOPI (PLN Pusat Penyaluran dan Pengaturan Beban Sumatera)
3. Improving the Quality of Community Health
  - Ende Life Bridge (PLN UIP Nusa Tenggara),
  - Healthy Free Toilet (PLN Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta)

In November 2017, PLN received ICA (Indonesia CSR Awards 2017), i.e.:

1. Environmental Aspect
  - a. Environmental management
    - 1). Platinum award for "Waste Bank Program of PLN Surabaya and Malang".
    - 2). Platinum award for "Limestone Cleanse the Jepara Sky"
  - b. Environmental protection; Platinum award for "Community Based

## Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

### Social and Community Development

Pengelolaan DAS Berbasis Masyarakat ( Pedas Besai)”.  
Watershed Management Program (Pedas Besai)”.  
2. Bidang Konsumen

Watershed Management Program (Pedas Besai)”.  
2. Customers Aspect

#### 2. Bidang Konsumen

Kategori kepuasan pelanggan :

#### 2. Customers Aspect

Customer satisfaction:

1. Penghargaan Platinum untuk “Program PLN Mobile”
2. Penghargaan Platinum untuk “Program contact center PLN 123”.
3. Penghargaan Stasiun penyedia listrik umum (SPLU), adalah alat yang dipasang PLN untuk mengecharge atau menyalurkan aliran listrik secara legal/ resmi dari PLN, hal ini sangat membantu pedagang kaki lima yang sebelumnya tidak dapat memenuhi kebutuhan listrik dalam berdagang di siang/ malam hari. Alat ini juga nantinya dapat dipergunakan untuk megecharge batrai mobil/ motor listrik di pinggir jalan, (mendapatkan awarding Gold)

1. Platinum award for “Program PLN Mobile”
2. Platinum award for “Contact center PLN 123”.
3. Award for general power supply station (SPLU), i.e. a PLN-installed device to charge or distribute electricity legally from PLN, which is very helpful to street vendors who previously could not meet the electricity needs in daytime/nighttime trading. This tool also can be used to charge car battery/electric motor at the road (obtained Gold award)

#### 3. Bidang Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat

#### 3. Engagement and Community Development Aspect

- a. Kategori penciptaan lapangan kerja Dan peningkatan ketrampilan.  
Penghargaan Silver untuk “Program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis inovasi Sentra ternak di PLTU Tanjung Jati B Jepara”
- b. Kategori peningkatan Dan kekayaan,  
Penghargaan Gold untuk “Program pelestarian sungai Mudal - Membangun Ekowisata Sungai Mudal ” di Desa Mudal Kabupaten Kulonprogro, Yogyakarta

- a. Job creation and skills improvement.  
Silver award for “Community Economic Empowerment innovation-based Program for livestock center at Tanjung Jati B Jepara Coal Power Plant”
- b. Improvement and wealth,  
Gold award for “Mudal River Conservation Program - Building Mudal River Ecotourism” in Mudal Village, Kulonprogro Regency, Yogyakarta



Penghargaan IGA Awards 2017 | IGA Awards 2017

## TANGGUNG JAWAB TERHADAP KONSUMEN/PELANGGAN

### Responsibility to Customers



Sejalan dengan tuntutan efisiensi operasional dan meminimalisir *human error*, PLN semakin intensif mengembangkan sistem layanan berbasis sistem teknologi informasi. PLN juga terus berupaya keras memenuhi harapan dari seluruh kelompok pelanggan, antara lain dengan meningkatkan kehandalan pasokan listrik, yang ditandai dengan semakin berkurangnya intensitas maupun lama gangguan/pemadaman listrik, serta kestabilan tegangan listrik yang sampai ke instalasi pelanggan.

In line with the operational efficiency targets and to minimize human error, PLN intensively developed a service system based on information technology systems. PLN also strives to meet the expectations of all customer groups, among others, by increasing the reliability of electricity supply, which is marked by the decrease in intensity and duration of power outages, and the stability of the voltage to the installation to customer.

## Tanggung Jawab Terhadap Konsumen/Pelanggan

Responsibility to Customers

### KEBIJAKAN

Kebijakan PLN dalam usaha memberikan layanan terbaik kepada pelanggan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Menjamin ketersediaan listrik yang berkualitas bebas dari pemadaman dan gangguan penyaluran.
- Menjamin akurasi pencatatan meter pemakaian dan perhitungan tagihan
- Memberikan pelayanan pelanggan dan menyelesaikan keluhan pelanggan dengan cepat dan akurat.
- Pengoptimalan upaya perbaikan citra perusahaan dan pembangunan *corporate brand* perusahaan.
- Peningkatan keandalan pembangkit, transmisi dan distribusi untuk menekan SAIDI dan SAIFI.
- Pemantauan terhadap angka penyambungan secara rutin.
- Pengoptimalan penggunaan teknologi informasi guna mendukung *Customer Relationship Management System*, perbaikan proses bisnis pelayanan pelanggan serta layanan korporat lainnya secara terpusat setara perusahaan sejenis kelas dunia.

### PROGRAM

Dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap konsumen, PLN berkomitmen untuk memperbaiki kualitas kegiatan operasional dan pengembangan usaha.

Perbaikan ditujukan untuk memperbaiki persepsi para pelanggan terhadap kualitas layanan PLN, sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan listrik. Sejalan dengan tuntutan efisiensi operasional dan meminimalisir *human error*, PLN semakin intensif mengembangkan sistem layanan berbasis sistem teknologi informasi. Berbagai program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas tanggung jawab terhadap konsumen meliputi:

### POLICY

PLN's policy in providing best service to customers refers to the following principles:

- Ensuring electricity supply that is free of power outages and transmission interruptions.
- Ensuring the accuracy of usage meter records and billing calculations
- Providing services to customers and resolving customer complaints in a fast and accurate manner.
- Optimizing the efforts in improving the corporate image and developing the corporate brand.
- Improving the reliability of power plants, transmission, and distribution to reduce SAIDI and SAIFI.
- Regularly monitoring the connection points.
- Optimizing the utilization of information technology to support the Customer Relationship Management System, improving the business process of customer service and other corporate services in a centralized manner, equivalent to the world-class companies.

### PROGRAM

In conducting the operations and developing the business, PT PLN (Persero) is fully committed to continuously improving the quality of operations and business development.

The improvement is aimed at changing or elevating the customers' perception of PLN's quality of services in terms of electricity provisions. In line with the operational efficiency targets and to minimize human error, PLN intensively developed a service system based on information technology systems. Various programs that have been implemented to improve the quality of responsibility to consumers include:

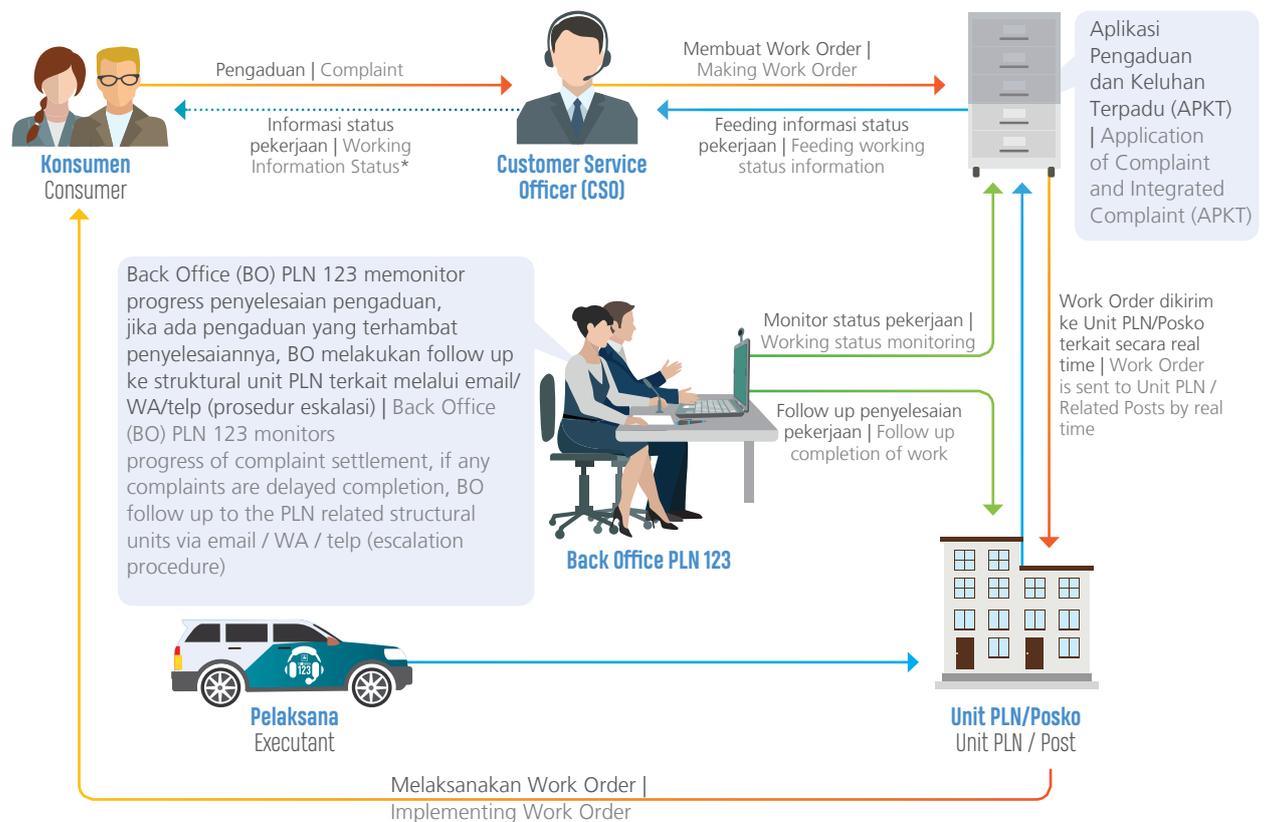
## Tanggung Jawab Terhadap Konsumen/Pelanggan Responsibility to Customers

- Penyediaan *account officer* dan *official account* untuk pelanggan-pelanggan utama maupun pelanggan bisnis dan komersial utama.
- Pengembangan sistem penagihan dan penyambungan, yakni Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpadu (AP2T) dan Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat (P2APST).
- Pengembangan Pelayanan *Borderless*, meliputi:
  - Provision of *account officer* and *official account* for main customers as well as main business and commercial customers.
  - Development of billing and connection system, i.e. Centralized Customer Service Application (AP2T), and Centralized Revenue Flow Supervisory Management (P2APST).
  - Development of *Borderless Service*, including:

Call center PLN 123 via telepon, email: pln123@pln.co.id, website pln www.pln.co.id, twitter @pln\_123, facebook, dan Aplikasi PLN Mobile.

Call center PLN 123 via phone, email: pln123@pln.co.id, website PLN www.pln.co.id, twitter @pln\_123, facebook, and PLN Mobile Application.

### Penanganan Pengaduan Pelanggan di PLN 123 | Handling Customer Complaint at PLN 123



Keterangan | Description :

\*Dilakukan CSO jika konsumen menghubungi PLN 123 meminta status progres pekerjaan | Conducted CSO if the consumer contact PLN 123 requesting progress status of work

## Tanggung Jawab Terhadap Konsumen/Pelanggan Responsibility to Customers

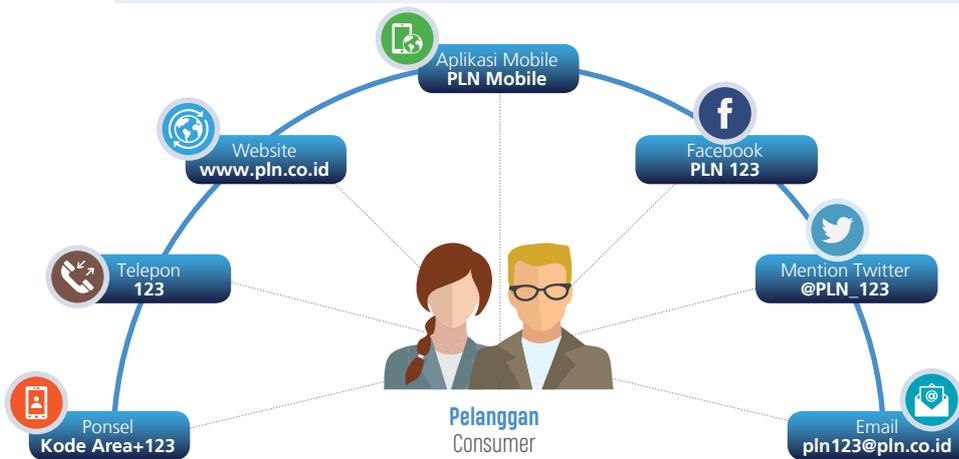


Pelayanan Nasional untuk seluruh rakyat Indonesia dengan mengoperasikan 9 site PLN 123 agar mudah diakses serta meningkatkan keandalan pelayanan PLN 123 dalam memberi pelayanan kepada rakyat Indonesia | National Service for all Indonesians by operating 9 PLN 123 sites to be easily accessible and increasing reliability service PLN 123 in providing services to the people of Indonesia

## Contact Center PLN 123



Masyarakat kini tidak perlu repot mengantre di kantor PLN apabila ingin membuat sambungan baru, melaporkan gangguan atau sekedar mencari informasi tagihan listrik. Pelanggan cukup menghubungi nomor telepon 123, kirim email atau berkomunikasi lewat saluran media sosial Facebook dan Twitter. | People now do not need to report queuing up at PLN's office if they want to make new connections, report a nuisance or just look for information on electricity bills. Customers simply dial 123 phone numbers, send email or communicate via social media channels Facebook and Twitter.



### CAKUPAN LAYANAN | SERVICE COVERAGE

- ▶ Informasi tagihan listrik | Information on electricity bills
- ▶ Pengaduan gangguan dan pelayanan teknik | Complaint handling and technical services
- ▶ Sambungan baru | New connection
- ▶ Ubah daya | Change power
- ▶ Sambungan sementara | Temporary connection
- ▶ Migrasi ke Prabayar | Migrate to prepay

### LAYANAN TANPA BATAS | SERVICE WITHOUT LIMITATION

- ▶ Beroperasi 24 jam | Operates 24 hours
- ▶ Tanpa calo | No brokers
- ▶ Tanpa biaya tambahan | No additional cost
- ▶ Cepat | Express
- ▶ Transparan | Transparent

Tanggung Jawab Terhadap Konsumen/Pelanggan  
Responsibility to Customers

PLN Mobile, Pelayanan PLN dalam Genggaman | PLN Mobile, PLN Service in Hand



**Fitur :**

1. Permohonan :
  - ▶ Pemasangan Baru
  - ▶ Penambahan Daya
  - ▶ Penyambungan Sementara
2. Pengaduan
  - ▶ Gangguan (padam)
  - ▶ Keluhan
3. Informasi Progres
4. Tracking petugas penanganan gangguan
5. Informasi rekening atau token listrik pintar
6. Informasi pemeliharaan
7. Berita PLN

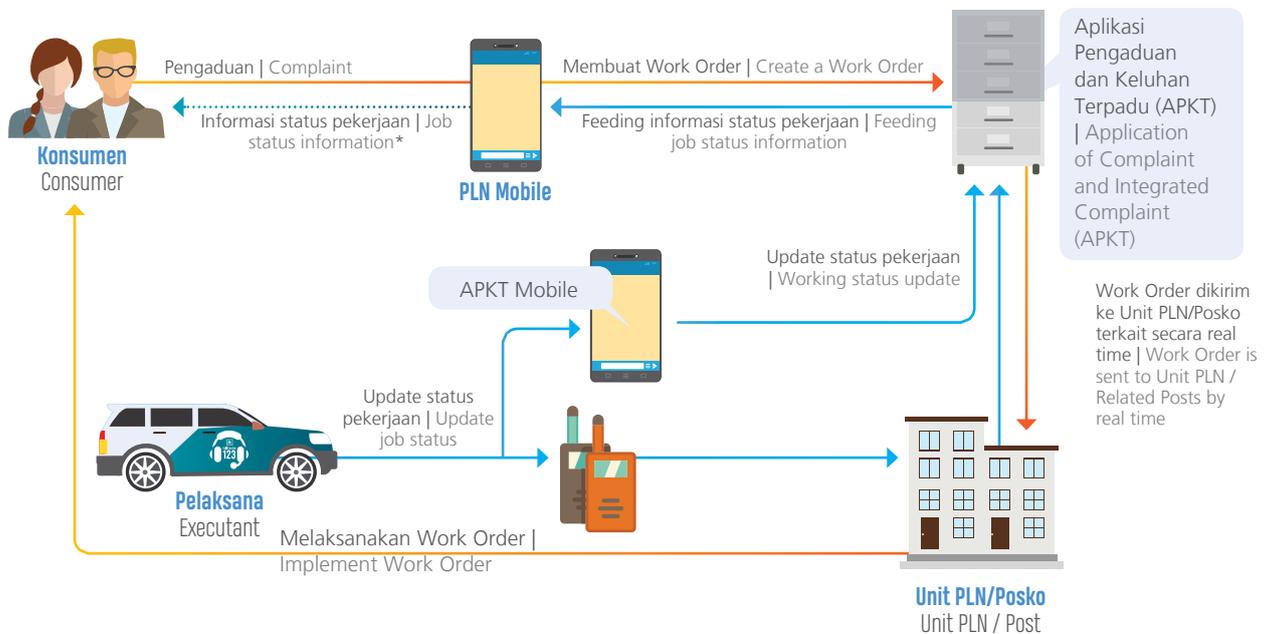
**Features :**

1. Application:
  - ▶ New Installation
  - ▶ Power Addition
  - ▶ Temporary connection
2. Complaint
  - ▶ Disruptions (outages)
  - ▶ Complaint
3. Progress information
4. Tracking disruption officer
5. Account information or smart electrical token
6. Maintenance information
8. PLN News

Telah tersedia di | Available at:




Penanganan Pengaduan Pelanggan di PLN Mobile | Handling Customer Complaint at PLN Mobile



## Tanggung Jawab Terhadap Konsumen/Pelanggan

### Responsibility to Customers

Pengembangan Aplikasi Pengaduan Keluhan Terpadu (APKT).

Development of Integrated Complaint Application (APKT).

#### Aplikasi Pengaduan & Keluhan Terpadu (APKT) | Aplikasi Pengaduan & Keluhan Terpadu (APKT)

##### Fitur :

1. Mencatat pengaduan gangguan (padam 1 persil atau padam meluas) dan keluhan (pelayanan non teknis) konsumen baik melalui PLN 123 atau PLN Mobile
2. Mencatat setiap progress atas tindak lanjut pengaduan pelanggan
3. Laporan-laporan:
  - ▶ Respon & Recovery Time
  - ▶ Volume per Jenis Tipe Permasalahan baik gangguan ataupun keluhan
  - ▶ Volume gangguan dan keluhan per unit PLN

##### Implementasi :

1. Terimplementasi di seluruh unit PLN
2. Telah dikembangkan modul APKT Mobile sehingga petugas lapangan dapat meng-update status pekerjaan melalui gadget dan lokasi petugas lapangan dapat terpantau oleh Unit PLN
3. Terintegrasi dengan aplikasi PLN Mobile yang digunakan oleh Konsumen PLN sehingga progress dapat dipantau oleh gadget konsumen

##### Feature :

1. Recording blackout disruption (1 persil or expansion outage) and customer complaint (non-technical service) both through PLN 123 and PLN Mobile
2. Recording progress of follow-up of each customer complain
3. Reports:
  - ▶ Responses & recovery time
  - ▶ Volume per type of problems (both disruption and complaints)
  - ▶ Volume of disruption and problems per PLN's unit

##### Implementation :

1. Implemented in all PLN's units
2. APKT Mobile to enable the field officer to update the status of work through gadget. Thus, the location of field officer is monitored by PLN's unit
3. Integrated with PLN Mobile application so the PLN's consumers can utilize it to monitor the progress

### Pengembangan program optimalisasi pengelolaan proses bisnis *back office*

Pengembangan sistim operasional berbasis teknologi informasi tersebut selain dapat meningkatkan kecepatan layanan dan efisiensi operasional, juga dapat mengurangi peluang terjadinya tindakan *fraud* akibat kontak langsung dengan pelanggan.

Selain peningkatan kualitas layanan tersebut, PLN tetap konsisten melaksanakan upaya-upaya lain yang ditujukan untuk memenuhi tanggung jawab terhadap konsumen. Upaya tersebut meliputi: pengurangan frekuensi gangguan pemadaman dan lama pemadaman, kestabilan tegangan, dan pengembangan kapasitas pembangkitan untuk memenuhi kecukupan pasokan listrik.

### Development of back-office business process management optimization.

The development of the IT-based operational system can improve the speed of service delivery to end customers, increase the efficiency of operations, and minimize the chance of fraud because there is no direct contact with customers.

In addition to the service quality improvement, PLN consistently engages in other efforts to fulfill its responsibility to customers. The efforts include: reducing the number and duration of power outages, voltage stability improvement, and expansion of power plant capacity to fulfill electricity supply sufficiency.

## Tanggung Jawab Terhadap Konsumen/Pelanggan Responsibility to Customers

### MENGETI DAN MEMENUHI KEBUTUHAN PELANGGAN

Sebagai wujud komitmen tinggi terhadap upaya meningkatkan kualitas layanan, PLN menggunakan pendekatan yang berbeda pada masing-masing kelompok pelanggan, yang terdiri dari pelanggan rumah tangga, bisnis dan industri untuk meningkatkan kualitas layanan sesuai kebutuhannya. Masing-masing kelompok pelanggan PLN tersebut memiliki karakteristik kebutuhan spesifik yang berbeda. Oleh karenanya dengan menekankan program pemasaran yang semakin "Customer Oriented" PLN kini semakin proaktif dan berupaya memahami betul rencana pelanggan dan calon pelanggan, serta kemudian membuat rencana bisnis yang selaras dengan keinginan pelanggan.

Untuk kelompok pelanggan rumah tangga, PLN juga menyiapkan berbagai program layanan sesuai dengan kebutuhan, seperti listrik pintar, akses pengaduan melalui layanan call center 123, PLN Mobile, dan sebagainya.

Untuk kelompok pelanggan industri dan bisnis, PLN merancang beragam program khusus untuk mengetahui, mengerti dan berusaha memenuhi kebutuhan spesifik mereka, seperti layanan premium untuk memberikan *supply* listrik yang handal, *account officer* untuk memberi para pelanggan kemudahan mendapatkan pelayanan listrik, akses informasi perbaikan jaringan listrik, akses keluhan pelanggan dan kemudahan pembayaran tagihan dan sebagainya.

Secara umum pada tahun 2017, PLN memiliki sejumlah program tematik seperti Program Gemerlap Lebaran, Program Gebyar Kemerdekaan 2017, dan Program Indonesia Terang 2017. Khusus untuk kelompok pelanggan industri, PLN memberikan Promo Luar Waktu Beban Puncak yang memberikan diskon tarif untuk pemakaian listrik pada pukul 23.00-08.00.

PLN berupaya keras memenuhi harapan dari seluruh kelompok pelanggan, yakni meningkatnya kehandalan pasokan listrik, yang ditandai dengan semakin berkurangnya intensitas maupun lama gangguan/pemadaman listrik, serta kestabilan tegangan listrik yang sampai ke instalasi pelanggan.

### UNDERSTANDING AND FULFILLING CUSTOMER NEEDS

As a form of high commitment to the efforts of improving service quality, PLN uses different approaches for each customer group, comprising of households, businesses, and industrial customers, to improve the quality of service and fulfill the customers' needs. Each PLN customer group has different characteristics with specific needs. Therefore, by prioritizing a more "Customer Oriented" marketing program, PLN is becoming more proactive, trying to really understand the needs of the customers and prospective customers, and formulating a business plan that is in line with the customers' needs.

For the household customer group, PLN also prepares various service programs based on the customers' needs, such as smart electricity, complaint access through the call center 123, PLN Mobile, etc.

For industry and business customers, PLN designs a range of specialized programs to identify, understand, and work to meet their specific needs, such as premium services to provide reliable power supply, account officers to provide customers with ease of getting electricity, information access to the electricity network repair, access to customer complaints, and ease of billing payment, etc.

In general, in 2017, PLN has a number of thematic programs such as Gemerlap Lebaran Program, Gebyar Kemerdekaan Program 2017, and Indonesia Terang Program 2017. Particularly for industrial customer groups, PLN provides Promo of Outside Peak Hour by providing discount for electricity usage at 23.00-08.00.

PLN strives to meet the expectations of all customer groups, among others, by increasing the reliability of electricity supply, which is marked by the decrease in intensity and duration of power outages, and the stability of the voltage to the installation to customer.

## Tanggung Jawab Terhadap Konsumen/Pelanggan

### Responsibility to Customers

#### SERTIFIKASI MUTU LAYANAN

Untuk meningkatkan standar pelayanan kepada pelanggan, PLN mengadopsi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.

#### SURVEY KEPUASAN PELANGGAN

Dalam rangka mendapatkan feed-back bagi perbaikan kualitas layanan kepada pelanggan, sejak beberapa tahun terakhir PLN secara berkala melaksanakan survey kepuasan pelanggan bekerja sama dengan konsultan independen untuk memastikan bahwa hasil survey tersebut telah mewakili suara pelanggan. Survey dilakukan dengan mengguakan sample acak dari masing-masing unit usaha PLN, untuk mengukur kinerja layanan unit-unit dimaksud, sekaligus mengukur rerata kinerja layanan PLN secara nasional.

Pada tahun 2017, PLN kembali melakukan Survey Kepuasan Pelanggan, untuk mengukur:

1. Indeks Kepuasan Pelanggan
2. Indeks Loyalitas Pelanggan
3. Indeks Customer Engagement
4. Indeks Kepedulian Pelanggan
5. Indeks Efektivitas Pintu Layanan.

Tujuan akhir dari pelaksanaan survey adalah didapatnya Rekomendasi untuk perbaikan kualitas layanan dan kinerja PLN. Adapun hasil-hasil survey yang didapat adalah sebagai berikut:

- **Indeks Kepuasan Pelanggan**

Indeks kepuasan pelanggan PT PLN (persero) tahun 2017 mencapai 88.52%, mengalami peningkatan sebesar 0.10% dari tahun sebelumnya. Peningkatan kepuasan pelanggan terjadi pada segmen Sosial, Bisnis, Industri, dan Curah. Sedangkan penurunan kepuasan pelanggan terjadi pada segmen Rumah tangga, pemerintah, layanan khusus, dan I4.

#### SERVICE QUALITY CERTIFICATION AND AWARD

PLN adopted the Quality Management System ISO 9001:2008 to improve standard of services to the customers.

#### CUSTOMER SATISFACTION SURVEY

To obtain feedback on customer service quality improvement, PLN has conducted customer satisfaction surveys in the last few years, in collaboration with independent consultants, to ensure the survey result represents the customers' opinions. The survey is implemented by random samples from all PLN units to measure the service performance of those units as well as the average PLN service performance nationwide.

In 2017, PLN conducted the Customer Satisfaction Survey, to measure:

1. Customer Satisfaction Index
2. Customer Loyalty Index
3. Customer Engagement Index
4. Customer Care Index
5. Contact Center Effectiveness Index

The ultimate goal of conducting the survey is to obtain the recommendation to improve PLN's quality of service and performance. The survey results are as follows:

- **Customer Satisfaction Index**

Customer satisfaction index of PT PLN (Persero) in 2017 reached 88.52%, which increase by 0.10% compared to the previous year. Increased customer satisfaction occurs in the Social, Business, Industry, and Bulk segments. The decline in customer satisfaction occurs in household, government, special services, and I4 segments.

Tanggung Jawab Terhadap Konsumen/Pelanggan  
Responsibility to Customers

- **Indeks Ketidak Puasan Pelanggan**

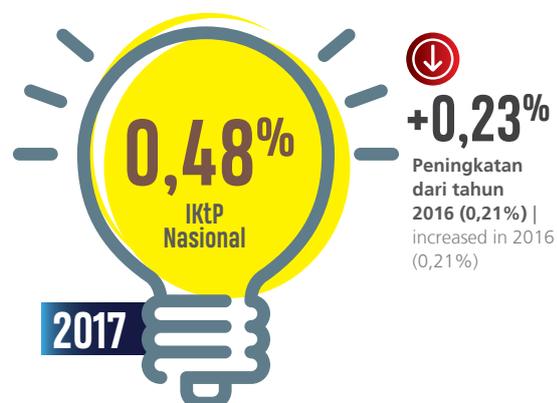
Indeks ketidakpuasan pelanggan (IKTP) adalah nilai yang menggambarkan banyaknya responden yang tidak puas dengan pelayanan PT PLN (persero). IKTP PT PLN (persero) tahun 2017 mencapai 0,48%, menurun sebesar 0,23% dari tahun sebelumnya.

Nilai indeks tersebut menunjukkan kinerja PT PLN (persero) yang membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Hampir di seluruh golongan tarif menunjukkan kondisi yang membaik, kecuali pada golongan tarif layanan khusus.

- **Customer Dissatisfaction Index**

Customer Dissatisfaction Index (IKTP) is a value that depicts how many respondents are dissatisfied with the services of PT PLN (Persero). IKTP of PT PLN (Persero) in 2017 reached 0.48%, which decreased by 0.23% from the previous year.

The value of the index shows the performance improvement of PT PLN (Persero) compared to the previous year. Almost all tariff groups showed improved conditions, except for special service tariff groups.



## Tanggung Jawab Terhadap Konsumen/Pelanggan Responsibility to Customers

### Indeks Loyalitas Pelanggan

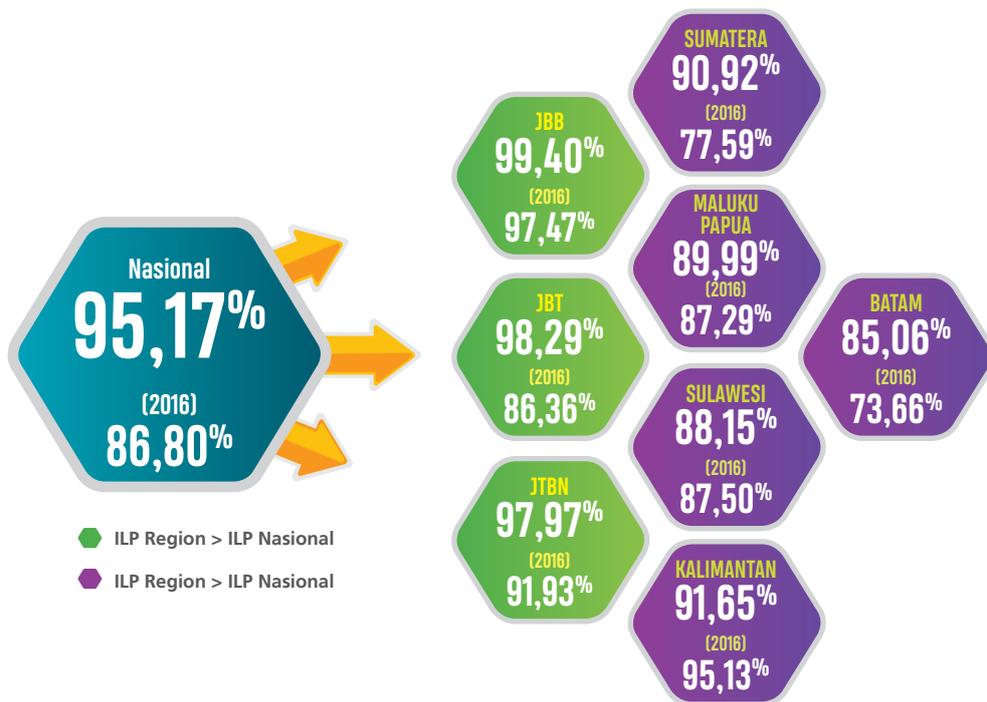
Nilai yang menunjukkan kesetiaan pelanggan dalam menggunakan produk/jasa PT PLN dengan melakukan pembelian secara berulang dan merekomendasikan kepada orang lain.

Indeks loyalitas pelanggan secara nasional meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 86.80% menjadi 95.17%. Nilai indeks loyalitas pelanggan setiap Region pun meningkat kecuali untuk Region Kalimantan. Region dengan nilai indeks loyalitas tertinggi adalah JBB (99.40%) dan terendah Batam (85.06%).

### Customer Loyalty Index

The score indicates customer loyalty in using the products/ services of PT PLN (Persero) by repeated purchases and recommendation to others.

The national customer loyalty index increased significantly from the previous year, from 86.80% to 95.17%. The value of customer loyalty index for each Region also increased except for Kalimantan Region. Region with highest loyalty index value is JBB (99.40%) and the lowest is Batam (85.06%).



## Tanggung Jawab Terhadap Konsumen/Pelanggan

### Responsibility to Customers

#### Indeks Keterikatan (Engagement) Pelanggan

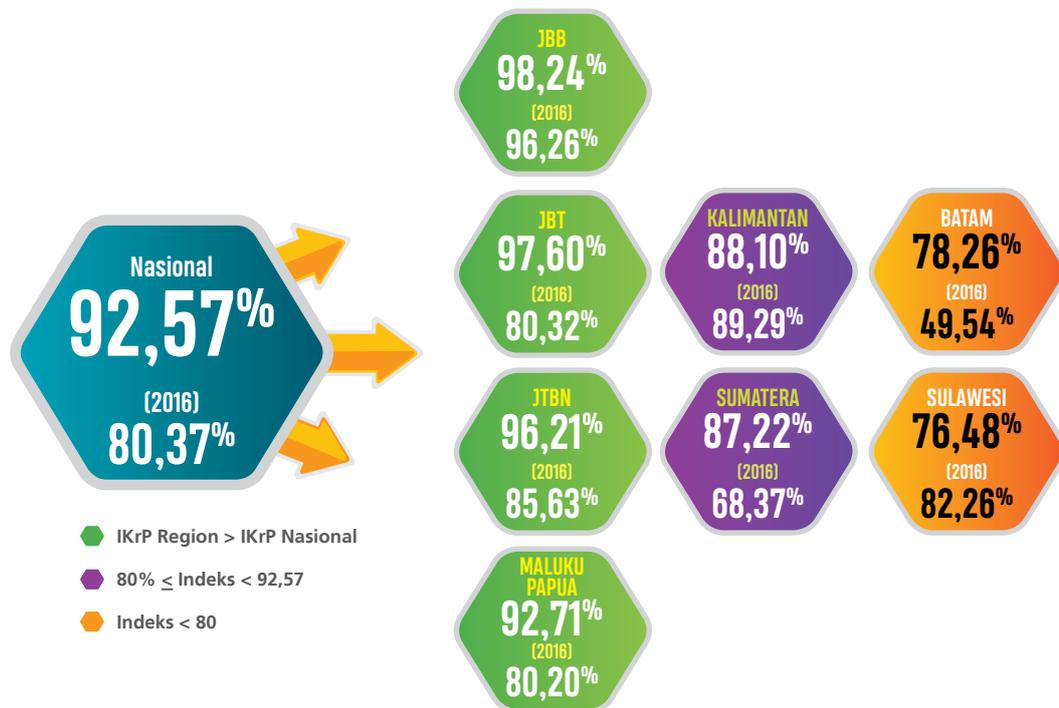
Nilai yang menggambarkan perilaku pelanggan dengan kepercayaan dan kebanggaan serta selalu membicarakan perihal positif PT PLN.

Berdasarkan pencapaian indeks keterikatan pelanggan tahun 2017, terdapat beberapa region yang perlu menjadi prioritas perhatian bagi manajemen PLN untuk ditingkatkan mutu layanannya, yaitu Batam dan Sulawesi dengan pencapaian indeks sebesar 78.26% dan 76.48%. Region Kalimantan dan Sumatera, pencapaian nilai indeksnya juga masih dibawah indeks keterikatan pelanggan nasional, namun sudah diatas 80%.

#### Customer Engagement Index

The value describes customers behaviors with trust and pride, and always talk about the positives of PT PLN.

Based on the achievement of customer engagement index in 2017, there are several regions that need to be the priority of PLN management's attention to improve the service quality, i.e. Batam and Sulawesi with the index of 78.26% and 76.48% respectively. Kalimantan and Sumatera Region also have value below the national engagement index, but still above 80%.



#### Indeks Kepedulian Pelanggan

Nilai yang menggambarkan hubungan antara pelanggan dengan PT PLN (Persero) dalam bentuk perhatian yang lebih terhadap program PLN maupun perihal yang terkait dengan peningkatan perbaikan layanan PLN. Pencapaian indeks

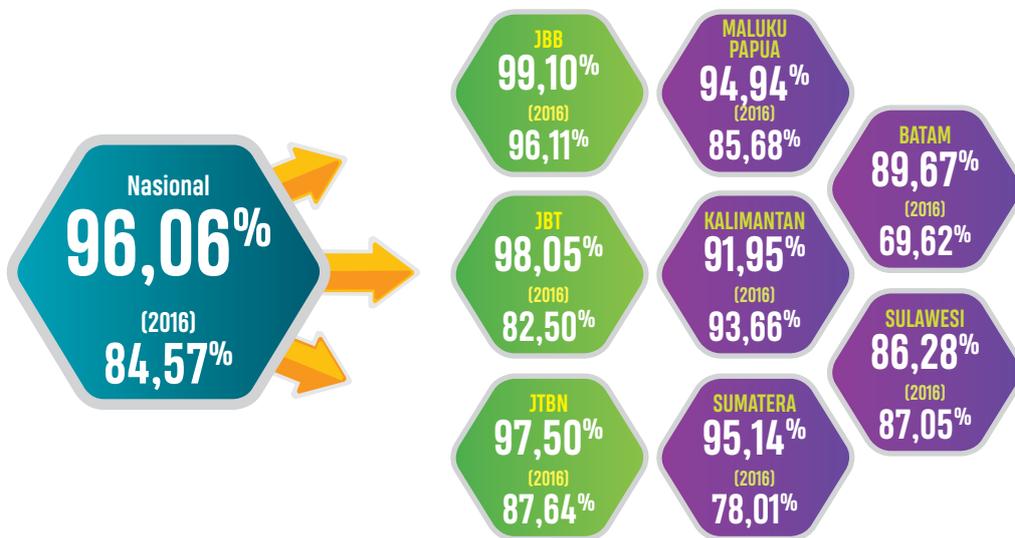
#### Customer Care Index

The score illustrates the relationship between the customers and PT PLN (Persero) in the form of extra attention on PLN programs and subjects related to the service improvement of PT PLN (Persero). The achievement of PT PLN (Persero) customer care index

## Tanggung Jawab Terhadap Konsumen/Pelanggan Responsibility to Customers

kepedulian pelanggan PT PLN (Persero) tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian juga di seluruh region juga mengalami peningkatan dan pencapaian nilai indeks kepedulian pelanggan tahun 2017, seluruhnya telah mencapai diatas 80%.

in 2017 has increased significantly compared to the previous year. Similarly, the region also experienced an increase and achievement of the customer care index in 2017. All region reached over 80%.



### Indeks Efektifitas Pintu Layanan (Contact Center)

Pengukuran indeks efektivitas contact center diukur berdasarkan parameter:

- PLN memberikan solusi yang dibutuhkan saat gangguan melalui *contact center* nya
- PLN memberikan informasi layanan yang dibutuhkan melalui *contact center* nya
- PLN memberikan solusi atas kebutuhan layanan PB/PD/PS melalui *contact center* nya

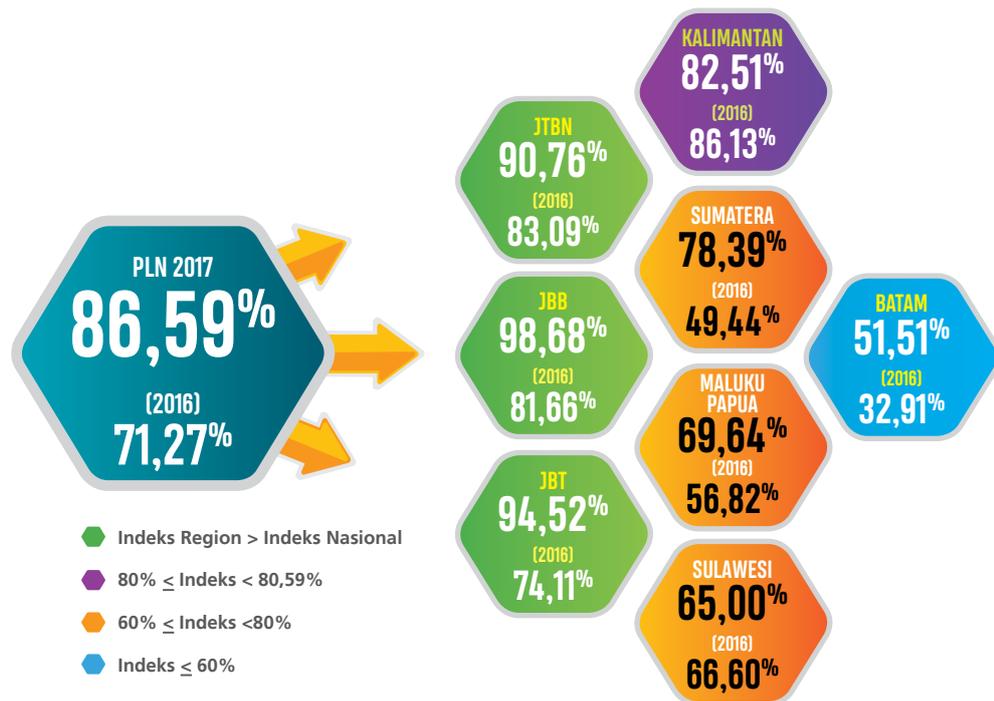
Pencapaian indeks efektivitas contact center PT PLN (Persero) tahun 2017 mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dari nilai 71.27% menjadi 86.59%. Beberapa region yang perlu menjadi prioritas perhatian bagi manajemen PT PLN adalah Region Kalimantan dan Distribusi Batam karena pencapaiannya masih kurang dari 80%. Sedangkan region yang memiliki nilai indeks kurang dari indeks nasional namun sudah diatas 80% adalah Sumatera, Maluku Papua dan Sulawesi.

### Contact Center Effectiveness Index

Contact center effectiveness index is measured by parameters:

- PLN provides the required solution during disruption through its contact center
- PLN provides the required service information through its contact center
- PLN provides solutions for PB/PD/PS service needs through its contact center

Contact center effectiveness index of PT PLN (Persero) in 2017 has increased significantly compared to the previous year, from 71.27% to 86.59%. Some regions that need to be a priority of the management's attention of PT PLN is Kalimantan Region and Batam Distribution because their achievement is still less than 80%. The region with index value less than the national index is Sumatera, Maluku, Papua, and Sulawesi. However, their scores are still above 80%.

Tanggung Jawab Terhadap Konsumen/Pelanggan  
Responsibility to Customers

- Indeks Kepuasan Relatif terhadap Pesaing**  
 Pengukuran indeks relatif ini dilakukan dengan membandingkan indeks kepuasan pelanggan PT PLN (Persero) dengan indeks kepuasan pelanggan kompetitor pada wilayah dan golongan tarif yang sama.

- Index of Satisfaction Relative to Competitor**  
 The assessment of the relative index is conducted by comparing the customer satisfaction index of PT PLN (Persero) with the customer satisfaction index of competitors in the same region and fare class.

**IKP Kompetitor**  
**2017** 57,50%  
**2016** 59,05%

**IKP PLN**  
**2017** 88,89%  
**2016** 97,51%

**IKP PLN 2016**

Pengukuran pada PLN segmen Industri di Batam, Cilegon, Kalselteng | Measurement on PLN of industry segment at Batam, Cilegon, South and Central Kalimantan

**IKP PLN 2017**

Pengukuran pada PLN Batam (Industri), Cilegon (Bisnis, Industri, Rumah Tangga, Sosial), Jakarta (Industri, Bisnis), Jabar (Bisnis, Industri, Sosial), Jatim (Industri), Kaltim (Sosial, Rumah Tangga); dengan data kompetitor : PT Cikarang listrindo, PT Bekasi Power, PT Krakatau Daya Listrik, PT Tunas Energi, PT Panbil Utilitas Sentosa, Pelanggan Paralel, PT Batamindo Investment Cakrawala, PT Cibinong Center Industrial Estate, PGN, dan PT Kaltim Daya Mandiri. | Measurement on PLN Batam (Industry), Cilegon (Business, Industry, Household, Social) Jakarta (Industry, Business), West Java (Business, Industry, Social), East Java (Industry, Business, Household); with competitor data: PT Cikarang listrindo, PT Bekasi Power, PT Krakatau Daya Listrik, PT Tunas Energi, PT Panbil Utilitas Sentosa, Pelanggan Paralel, PT Batamindo Investment Cakrawala, PT Cibinong Center Industrial Estate, PGN, and PT Kaltim Daya Mandiri.

## Tanggung Jawab Terhadap Konsumen/Pelanggan

### Responsibility to Customers

Dari hasil pengukuran terhadap pesaing dapat disimpulkan bahwa Mutu Pelayanan PLN lebih baik dari pesaing.

From result of measurement to competitor, it can be concluded that PLN's Quality of Service is better than the competitors.

### Rekomendasi Hasil Survey Kepuasan Pelanggan

- Untuk memenuhi harapan masyarakat agar dapat berinteraksi langsung dengan PLN namun dengan mengurangi peran Kantor PLN sebagai pintu layanan perlu Diciptakan Ruang Sosial Seperti PLN Keliling Atau Gerai PLN Di Pusat Pembelanjaan/ Lokasi Strategis Lainnya, Dimana Ruang Sosial tersebut berfungsi juga untuk mensosialisasikan pintu layanan PLN saat ini.
- Peningkatan peran PT PLN (Persero) Sebagai wadah promosi bagi pelanggan segmen bisnis untuk kemajuan usahanya melalui iklan perusahaan bisnis baik secara offline (brosur, pamphlet) dan online (website, mobile PLN dll) untuk menciptakan hubungan positif antara dimensi kemudahan informasi terhadap loyalitas pelanggan.
- Meningkatkan Penyelenggaraan *Customer Gathering* secara berkala antara Pelanggan I4 dengan PT PLN (Persero) per wilayah/ area untuk berbagi informasi dan kendala yang dihadapi oleh pelanggan
- memperbanyak agen penjualan pulsa listrik /PPOB terutama di remote area. Agen dapat dioptimalkan fungsinya Sebagai Agent Of Change, Sekaligus sosialisasi Keunggulan Prabayar, Pintu Layanan PLN ke masyarakat dan sosialiasi layanan lainnya
- Untuk jangka panjang, PLN perlu mengadakan voucher isi ulang listrik seperti voucher isi ulang pulsa handphone yang mudah secara distribusi penjualan sehingga mudah diperoleh pelanggan.

### Recommendation of Customer Satisfaction Survey

- To meet the expectations of the community to be able to interact directly with PLN but by reducing the role of the PLN Office as the contact center, it is necessary to create Social Space, such as PLN Keliling or PLN Outlets in Shopping Centers/Other Strategic Locations. The Social Space also functions to socialize the PLN contact center nowadays.
- Increasing the role of PT PLN (Persero) As a promotion for business segment customer for the business development of the companies, both offline (brochures, pamphlets) and online (website, mobile PLN, etc.) to create a positive relationship between the ease of information and the customer loyalty.
- Adding Customer Gathering regularly between Customer I4 with PT PLN (Persero) per region/ area to share information and constraints faced by customers
- Multiplying sales/electricity sales agent/PPOB, especially in the remote area. Agents can be functions as the Agent of Change, and to socialize the advantage of Prepaid Electricity, as the PLN Contact Center to the public, and as other socialization services
- PLN needs to facilitate the recharge of electricity voucher such as that of mobile phone, to facilitate the sales distribution for the customers.

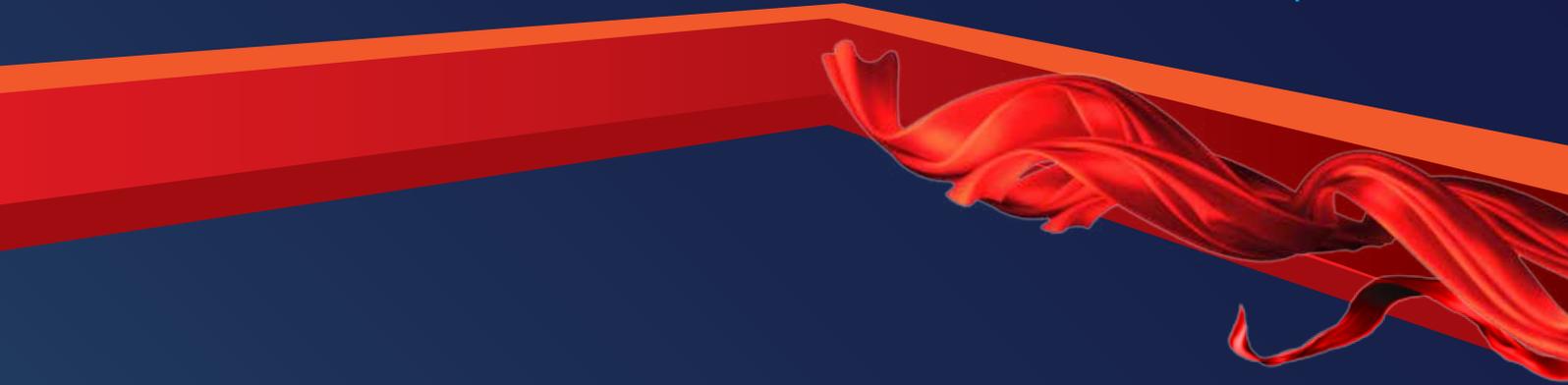






# LAPORAN KEUANGAN 2017

Financial Report 2017



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016**

***Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016***

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

<b>Daftar Isi</b>	<b>Halaman/ <u>Pages</u></b>	<b><i>Table of Contents</i></b>
<b>Surat Pernyataan Direksi</b>		<b><i>Directors' Statement Letter</i></b>
<b>Laporan Auditor Independen</b>		<b><i>Independent Auditors' Report</i></b>
<b>Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016</b>		<b><i>Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2017 and 2016</i></b>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	608	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Kprehensif Lain Konsolidasian	611	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	613	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	614	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	615	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>



**PT PLN (Persero)**

Jalan Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru – Jakarta 12160

Telepon : (021) 7261875, 7261122, 7262234  
(021) 7251234, 7250550

Facsimile : (021) 7221330

Website : www.pln.co.id

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB  
ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER  
RELATING TO THE RESPONSIBILITY  
ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND 2016  
AND FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2017 AND 2016**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini/*We, the undersigned:*

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama/ <i>Name</i><br>Alamat kantor/ <i>Office address</i>                               | : SOFYAN BASIR<br>: PT PLN (Persero)<br>Jl. Trunojoyo Blok MI/135<br>Jakarta Selatan                        |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ <i>Domicile as stated in ID card</i> | : Jl. Taman Bendungan Jatiluhur No. 3<br>Bendungan Hillir<br>Jakarta Pusat                                  |
| Nomor telepon/ <i>Phone number</i><br>Jabatan/ <i>Position</i>                             | : (021) 7220300<br>: DIREKTUR UTAMA/ <i>PRESIDENT DIRECTOR</i>  |
| 2. Nama/ <i>Name</i><br>Alamat kantor/ <i>Office address</i>                               | : SARWONO SUDARTO<br>: PT PLN (Persero)<br>Jl. Trunojoyo Blok MI/135<br>Jakarta Selatan                     |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ <i>Domicile as stated in ID card</i> | : Komplek BRI Blok A No. 45<br>Jl. Pramukasari IV RT 009 RW 005<br>Rawasari, Cempaka Putih<br>Jakarta Pusat |
| Nomor telepon/ <i>Phone number</i><br>Jabatan/ <i>Position</i>                             | : (021) 7392038<br>: DIREKTUR KEUANGAN/ <i>FINANCE DIRECTOR</i>   |

menyatakan bahwa/*state that:*

- |   |  |
|---|--|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian;   | 1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements;</i>  |
| 2. Laporan Keuangan Konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia;   | 2. <i>The Consolidated Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Generally Accepted Accounting Principles;</i>   |
| 3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;<br>b. Laporan Keuangan Konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | 3. a. <i>All information contained in the Consolidated Financial Statements is complete and correct;</i><br>b. <i>The Consolidated Financial Statements do not contain misleading material information or facts and do not omit material information or facts;</i> |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Perusahaan dan Entitas Anak.  | 4. <i>We are responsible for the internal control system of the Company and its Subsidiaries.</i>  |

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*This statement letter is made truthfully.*

Jakarta, 28 Maret 2018/Maret, 28, 2018

SOFYAN BASIR  
Direktur Utama/*President Director*

SARWONO SUDARTO  
Direktur Keuangan/*Finance Director*



# Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan  
Registered Public Accountants

RSM Indonesia  
Plaza ASIA, Level 10  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59  
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340  
F +62 21 5140 1350

[www.rsm.id](http://www.rsm.id)

Nomor/Number : R/181.AGA/sat.2/2018

## Laporan Auditor Independen/ Independent Auditors' Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/  
*The Shareholder, Board of Commissioners and Directors*

### Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

#### Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

*We have audited the accompanying consolidated financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (the "Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2017, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

#### Management's responsibility for the consolidated financial statements

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Generally Accepted Accounting Principles, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
AUDIT | TAX | CONSULTING

**Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia.

**Auditors' responsibility**

*Our responsibility is to express an opinion on the consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.*

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

**Opinion**

*In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara and its subsidiaries as of December 31, 2017, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Generally Accepted Accounting Principles.*

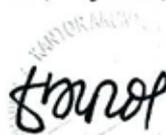
**Penekanan suatu hal**

Kami membawa perhatian ke Catatan 2.a atas laporan keuangan konsolidasian terlampir yang menjelaskan bahwa Perusahaan mengubah kebijakan akuntansi untuk transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan menerapkan lebih dini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6 POJK.04/2017 secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai 1 Januari 2016. Dampak perubahan kebijakan akuntansi ini diungkapkan dalam Catatan 56 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

**Emphasis of matter**

*We draw attention to Note 2.a to the accompanying consolidated financial statements which explains that the Company changed its accounting policy for transactions based on power purchase agreements by early applying the Financial Services Authority Regulation No.6 POJK.04/2017 prospectively for the annual period beginning on January 1, 2016. The effect of such change in accounting policy is disclosed in Note 56 to the accompanying consolidated financial statements. Our opinion is not modified in respect of this matter.*

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



**Saptoto Agustomo**

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0499/  
Public Accountant License Number: AP.0499

Jakarta, 28 Maret/ March 28, 2018

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**

December 31, 2017 and 2016

(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2017 Rp	2016 Rp	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Aset tetap	6	1,204,568,429	1,145,529,527	<i>Property, plant and equipment</i>
Properti investasi	7	4,723,070	1,325,297	<i>Investment properties</i>
Investasi pada entitas asosiasi	8	2,432,830	1,980,118	<i>Investments in associates</i>
Investasi pada ventura bersama	8	4,445,668	1,849,864	<i>Investments in joint ventures</i>
Aset pajak tangguhan	47	9,566,473	9,882,003	<i>Deferred tax assets</i>
Piutang pihak berelasi	9	237,181	263,064	<i>Receivables from related parties</i>
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	10	7,487,709	7,464,260	<i>Restricted cash in banks and time deposits</i>
Piutang lain-lain	16	634,949	350,465	<i>Other receivables</i>
Aset tidak lancar lain	11	7,064,097	4,964,300	<i>Other non-current assets</i>
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>1,241,160,406</b>	<b>1,173,608,898</b>	<b>Total Non-current Assets</b>
<b>ASET LANCAR</b>				<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan setara kas	12	42,291,959	41,909,223	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi jangka pendek	13	286,697	374,771	<i>Short-term investments</i>
Piutang usaha				<i>Trade receivables</i>
Pihak berelasi	14	580,993	565,458	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	14	21,885,850	21,145,503	<i>Third parties</i>
Piutang subsidi listrik	15	7,588,977	12,446,110	<i>Receivables on electricity subsidy</i>
Piutang lain-lain	16	1,672,237	2,411,384	<i>Other receivables</i>
Persediaan	17	12,828,118	11,569,596	<i>Inventories</i>
Pajak dibayar dimuka	18	4,997,393	7,206,530	<i>Prepaid taxes</i>
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	19	1,629,609	898,039	<i>Prepaid expenses and advances</i>
Piutang pihak berelasi	9	5,294	36,548	<i>Receivables from related parties</i>
Aset lancar lain	55	30,124	5,915	<i>Other current assets</i>
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>93,797,251</b>	<b>98,569,077</b>	<b>Total Current Assets</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>1,334,957,657</b>	<b>1,272,177,975</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

*The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
(Continued)**

December 31, 2017 and 2016

(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2017 Rp</u>	<u>2016 Rp</u>	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>EKUITAS</b>				<b>EQUITY</b>
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to owners of the parent
Modal saham - nilai nominal Rp1 per saham				Capital stock - par value of Rp1 per share
Modal dasar - masing-masing 439.000.000 saham dan 204.000.000 saham per 31 Desember 2017 dan 2016				Authorized - 439,000,000 shares and 204,000,000 shares as of December 31, 2017 and 2016, respectively
Modal ditempatkan dan disetor penuh - masing-masing 109.826.526 saham dan 55.666.007 saham per 31 Desember 2017 dan 2016				Subscribed and paid-up 109,826,526 shares and 55,666,007 shares as of December 31, 2017 and 2016, respectively
	20	109,826,526	55,666,007	
Tambahan modal disetor	21	20,871,265	21,797,016	Additional paid-in capital
Penyertaan modal Negara dalam proses penerbitan saham	20	--	54,160,519	Stock subscription from Government in issuance process
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	20	48,665,115	40,304,040	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya	20	71,093,240	77,194,942	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain		<u>618,462,276</u>	<u>629,159,943</u>	Other comprehensive income
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		868,918,422	878,282,467	Equity attributable to owners of the parent
Kepentingan non-pengendali		<u>498,182</u>	<u>116,990</u>	Non-controlling interests
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b><u>869,416,604</u></b>	<b><u>878,399,457</u></b>	<b>Total Equity</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Liabilitas pajak tangguhan	47	2,066,363	59,725	Deferred tax liabilities
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun				Long-term liabilities - net of current portion
Penerusan pinjaman	23	31,485,476	29,133,756	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan				Government and non-bank financial institution loans
Pemerintah non-bank	24	6,309,173	7,257,810	
Utang sewa pembiayaan	25	15,713,269	17,933,075	Lease liabilities
Utang bank	26	116,017,364	100,362,498	Bank loans
Utang obligasi dan sukuk ijarah	27	100,440,360	68,824,683	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang listrik swasta	28	7,026,434	7,315,422	Electricity purchase payable
Utang KIK - EBA	27	2,907,986	--	KIK - EBA loans
Utang pihak berelasi	29	794	2,301	Payable to related parties
Liabilitas imbalan kerja	49	43,559,022	41,110,112	Employee benefits liabilities
Utang lain-lain	31	940,154	155,781	Other payables
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b><u>326,466,395</u></b>	<b><u>272,155,163</u></b>	<b>Total Non-current Liabilities</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
(Continued)**

December 31, 2017 and 2016

(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2017 Rp	2016 Rp	
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang usaha				Trade payables
Pihak berelasi	30	11,215,239	7,772,693	Related parties
Pihak ketiga	30	32,496,186	22,419,391	Third parties
Utang pajak	32	2,387,864	1,950,946	Taxes payable
Biaya masih harus dibayar	33	11,477,437	10,644,559	Accrued expenses
Uang jaminan langganan	34	12,642,333	12,049,554	Customers' security deposits
Utang biaya proyek	35	723,992	384,739	Project cost payable
Pendapatan ditangguhkan	22	1,218,400	1,147,227	Deferred revenue
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun				Current maturities of long-term liabilities
Penerusan pinjaman	23	2,735,992	2,562,332	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan				Government and non-bank Government financial
Pemerintah non-bank	24	1,043,793	1,043,793	institution loans
Utang sewa pembiayaan	25	4,871,908	3,789,317	Lease liabilities
Utang bank	26	26,548,747	26,394,780	Bank loans
Utang obligasi dan sukuk ijarah	27	914,000	9,568,000	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang listrik swasta	28	349,968	328,683	Electricity purchase payable
Utang KIK - EBA	27	630,600	--	KIK - EBA loans
Liabilitas imbalan kerja	49	8,562,927	3,494,487	Employee benefits liabilities
Utang lain-lain	31	21,255,272	18,072,854	Other payables
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>139,074,658</b>	<b>121,623,355</b>	<b>Total Current Liabilities</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>465,541,053</b>	<b>393,778,518</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS</b>		<b>1,334,957,657</b>	<b>1,272,177,975</b>	<b>TOTAL EQUITY AND LIABILITIES</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS  
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2017 Rp	2016 Rp	
<b>PENDAPATAN USAHA</b>				<b>REVENUES</b>
Penjualan tenaga listrik	36	246,586,856	214,139,834	<i>Sale of electricity</i>
Penyambungan pelanggan	22	7,113,454	7,052,136	<i>Customer connection fees</i>
Lain-lain	38	1,594,933	1,629,986	<i>Others</i>
Jumlah Pendapatan Usaha		<u>255,295,243</u>	<u>222,821,956</u>	<i>Total Revenues</i>
<b>BEBAN USAHA</b>				<b>OPERATING EXPENSES</b>
Bahan bakar dan pelumas	39	116,947,824	109,492,383	<i>Fuel and lubricants</i>
Pembelian tenaga listrik	40	72,426,641	59,729,390	<i>Purchased electricity</i>
Sewa	41	6,592,161	6,545,114	<i>Lease</i>
Pemeliharaan	42	19,515,606	21,226,736	<i>Maintenance</i>
Kepegawaian	43	23,124,511	22,659,965	<i>Personnel</i>
Penyusutan	6	29,160,597	27,512,150	<i>Depreciation</i>
Lain-lain	44	7,706,754	7,284,064	<i>Others</i>
Jumlah Beban Usaha		<u>275,474,094</u>	<u>254,449,802</u>	<i>Total Operating Expenses</i>
<b>RUGI USAHA SEBELUM SUBSIDI</b>		<u>(20,178,851)</u>	<u>(31,627,846)</u>	<b>OPERATING LOSS BEFORE SUBSIDY</b>
Subsidi listrik Pemerintah	37	45,738,215	58,043,265	<i>Government's electricity subsidy</i>
<b>LABA USAHA SETELAH SUBSIDI</b>		<u>25,559,364</u>	<u>26,415,419</u>	<b>OPERATING INCOME AFTER SUBSIDY</b>
Penghasilan lain-lain - bersih	46	3,409,941	1,092,366	<i>Other income - net</i>
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih		(2,935,144)	4,195,210	<i>Gain (loss) on foreign exchange - net</i>
Penghasilan keuangan		1,066,842	578,507	<i>Financial income</i>
Beban keuangan	45	(18,556,931)	(18,703,276)	<i>Financial cost</i>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>		<u>8,544,072</u>	<u>13,578,226</u>	<b>INCOME BEFORE TAX</b>
<b>BEBAN PAJAK</b>	47	<u>(4,115,955)</u>	<u>(5,427,843)</u>	<b>TAX EXPENSES</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		<u>4,428,117</u>	<u>8,150,383</u>	<b>INCOME FOR THE YEAR</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

*The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS  
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2017 Rp	2016 Rp	
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		<b>4,428,117</b>	<b>8,150,383</b>	<b>INCOME FOR THE YEAR</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan</b>				<b>Other comprehensive income for the year</b>
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				<i>Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:</i>
Bagian penghasilan (beban) komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama		461,901	(9,313)	<i>Share of other comprehensive income (expenses) from associates and joint venture</i>
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				<i>Items that will not be reclassified to profit or loss:</i>
Surplus revaluasi aset tetap		(6,933,307)	2,287	<i>Property, plant and equipment revaluation surplus</i>
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		(5,635,015)	(2,766,341)	<i>Remeasurement on defined benefit plans</i>
Manfaat pajak terkait		1,408,754	691,585	<i>Related income tax benefits</i>
<b>Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak</b>		<b>(10,697,667)</b>	<b>(2,081,782)</b>	<b>Other comprehensive income for the year after tax</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>(6,269,550)</b>	<b>6,068,601</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR</b>
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada:				<i>Income for the year attributable to:</i>
Pemilik entitas induk		4,410,210	8,113,656	<i>Owners of the parent</i>
Kepentingan non-pengendali		17,907	36,727	<i>Non-controlling interest</i>
<b>Jumlah</b>		<b>4,428,117</b>	<b>8,150,383</b>	<b>Total</b>
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan diatribusikan kepada:				<i>Total comprehensive (expenses) income for the year attributable to:</i>
Pemilik entitas induk		(6,287,457)	6,031,874	<i>Owners of the parent</i>
Kepentingan non-pengendali		17,907	36,727	<i>Non-controlling interest</i>
<b>Jumlah</b>		<b>(6,269,550)</b>	<b>6,068,601</b>	<b>Total</b>
<b>LABA PER SAHAM DASAR (Dalam Rupiah penuh)</b>	48	<b>50,541</b>	<b>150,009</b>	<b>BASIC EARNINGS PER SHARE (In Rupiah full amount)</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**  
For the Years Ended December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Subscribed and paid-up capital	Penyertaan modal Negara dalam proses penerbitan saham/ Stock subscription from Government in issuance process	Saldo laba/ Retained earnings	Surplus revaluasi aset tetap/ Property, plant and equipment revaluation surplus	Pengaruh lain/ Other comprehensive income	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to owner of the parent	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama/ Share of other comprehensive income from associates and joint ventures		Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling interests	Jumlah ekuitas/ Total equity
							Rp	Rp		
	46,197,380	9,468,627	41,222,131	638,105,386	(6,900,639)	804,709,383	36,978	81,234	804,790,617	
Saldo per 31 Desember 2015			26,872,493	41,222,131	(6,900,639)	804,709,383	36,978	81,234	804,790,617	
Penyesuaian berkaitan dengan penerapan POJK No.6 - bersih disesuaikan			--	43,428,454	--	43,428,454	--	--	43,428,454	
Saldo per 1 Januari 2016,	46,197,380	9,468,627	26,872,493	638,105,386	(6,900,639)	848,137,837	36,978	81,234	848,219,071	
Reklasifikasi dari tambahan modal disetor	9,468,627	21,131,892	--	--	--	--	--	--	--	
Penambahan modal tahun berjalan	--	23,560,000	--	--	--	26,156,131	--	--	26,156,131	
Cadangan umum tahun berjalan	--	--	13,431,547	--	--	--	--	--	--	
Selisih antara aset dan liabilitas pengampunan pajak	--	--	--	(2,137,752)	--	94,377	--	127	94,504	
Dividen	--	--	--	--	--	(2,137,752)	--	(1,098)	(2,138,850)	
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	--	--	--	2,287	(2,074,756)	6,031,874	(9,313)	36,727	6,068,601	
Saldo per 31 Desember 2016	55,666,007	54,160,519	40,304,040	638,107,673	(8,975,395)	878,282,467	27,665	116,990	878,399,457	
Reklasifikasi dari tambahan modal disetor	54,160,519	(54,160,519)	--	--	--	--	--	--	--	
Penambahan tahun berjalan	--	--	--	--	--	(972,738)	--	--	(972,738)	
Cadangan umum tahun berjalan	--	--	8,361,075	--	--	--	--	--	--	
Selisih antara aset dan liabilitas pengampunan pajak	--	--	--	--	--	46,987	--	--	46,987	
Penambahan modal dan kenaikan nilai wajar porsi kepentingan non-pengendali	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Dividen	--	--	--	--	--	--	--	365,666	365,666	
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	--	--	--	(6,933,307)	(4,226,261)	(2,150,837)	--	(2,381)	(2,153,218)	
Saldo per 31 Desember 2017	109,826,526	109,826,526	48,665,116	631,174,366	(13,201,656)	869,918,422	489,566	499,182	869,918,604	

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2017 Rp	2016 Rp	
<b>ARUS KAS DARI</b>			
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan kas dari pelanggan	257,336,702	220,970,461	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok	(207,558,346)	(200,943,180)	Cash paid to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan	(21,206,851)	(20,370,584)	Cash paid to employees
Kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	28,571,505	(343,303)	Cash provided by (used in) operations
Penerimaan subsidi listrik	50,595,348	49,568,244	Government subsidy received
Penerimaan bunga	1,066,842	578,507	Interest received
Pembayaran bunga	(17,894,129)	(18,285,840)	Interest expense paid
Penerimaan restitusi pajak penghasilan	725,365	--	Income tax restitution received
Pembayaran pajak penghasilan	(6,218,927)	(1,927,652)	Income tax paid
Pembayaran pengampunan pajak	(2,349)	(1,896)	Payment of tax amnesty
<b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>56,843,655</b>	<b>29,588,060</b>	<b>Net cash provided by operating activities</b>
<b>ARUS KAS DARI</b>			
<b>AKTIVITAS INVESTASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Hasil penjualan aset tidak digunakan dalam operasi	45,983	27,705	Proceeds from sale of assets not used in operations
Akuisisi entitas anak	(521,447)	--	Acquisition of subsidiary
Perolehan aset tetap	(85,210,519)	(55,800,543)	Addition of property, plant and equipment
Perolehan dividen dari entitas asosiasi dan ventura bersama	241,505	207,875	Proceeds from dividend of associates and joint ventures
Perolehan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	(2,016,929)	(381,767)	Acquisition of investments in associates and joint ventures
Penerimaan kembali dari pinjaman kepada pihak berelasi	(1,507)	33,111	Receipt of payments from loans to related parties
Pembayaran kembali atas pinjaman kepada pihak berelasi - bersih	24,270	(265)	Repayments of loans from related parties - net
Penarikan (penempatan) rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	245,332	1,368,632	Withdrawal (placement) of restricted cash in banks and time deposits
Penempatan investasi jangka pendek	85,077	(254,712)	Placement of short-term investments
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(87,108,235)</b>	<b>(54,799,964)</b>	<b>Net cash used in investing activities</b>
<b>ARUS KAS DARI</b>			
<b>AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Perolehan penyertaan modal Pemerintah dalam proses penerbitan saham	--	23,560,000	Proceeds from Government for stock subscription in issuance process
Perolehan penyertaan modal kepentingan non-pengendali	18,333	--	Proceeds from non-controlling interest for stock subscription
Pembayaran dividen	(2,150,837)	(2,137,752)	Payment of dividends
Pembayaran dividen kepada kepentingan non-pengendali	(2,382)	(1,098)	Payment of dividends to non-controlling interest
Pembayaran penerusan pinjaman	(2,588,952)	(2,594,441)	Payment of two-step loans
Pembayaran utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	(1,043,793)	(293,793)	Payment of Government and non-bank Government financial institution loans
Perolehan utang bank - jangka pendek	37,257,322	34,500,000	Proceeds from bank loans - short-term
Perolehan utang bank - jangka panjang	28,713,548	36,341,659	Proceeds from bank loans- long-term
Pembayaran utang bank - jangka pendek	(37,800,000)	(21,000,000)	Payment of bank loans- short-term
Pembayaran utang bank - jangka panjang	(12,901,106)	(11,629,553)	Payment of bank loans- long-term
Perolehan utang obligasi	31,836,000	--	Proceeds from bonds payable
Pembayaran utang obligasi	(9,509,500)	(9,122,350)	Payment of bonds payable
Perolehan utang KIK-EBA	3,688,000	--	Proceeds from KIK-EBA
Pembayaran utang KIK-EBA	(149,414)	--	Payment of KIK-EBA
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(4,429,331)	(3,705,740)	Payments of lease liabilities
Pembayaran utang listrik swasta	(328,199)	(321,879)	Payments of electricity purchase payable
<b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan</b>	<b>30,609,689</b>	<b>43,595,053</b>	<b>Net cash provided by financing activities</b>
<b>KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>345,109</b>	<b>18,383,149</b>	<b>NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	37,627	(70,265)	Effect of changes in foreign currency
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>41,909,223</b>	<b>23,596,339</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>42,291,959</b>	<b>41,909,223</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR</b>

Tambahan informasi transaksi non kas  
disajikan di catatan 50.

Additional information of non cash transaction of  
presented in note 50.

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these  
consolidated financial statements as a whole

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1. Umum**

**a. Pendirian dan Informasi Umum**

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN" atau "Perusahaan") didirikan pada tahun 1961 dalam bentuk Jawatan di dalam lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga. Perusahaan merupakan kelanjutan usaha beberapa perusahaan listrik Belanda yang diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah"). Perusahaan listrik Belanda tersebut meliputi: NV ANIEM, NV SEM, NV OJEM, NV EMS, NV EMBALOM, NV GEBEO, NV OGEM dan NV WEMI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1965, status Perusahaan berubah menjadi perusahaan yang berbadan hukum. Selanjutnya ditetapkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1970 yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972. Kemudian berdasarkan akta No. 169 tanggal 30 Juli 1994 dari Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta, status badan hukum Perusahaan berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara disingkat PT PLN (Persero). Akta perubahan ini disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-11.519.HT.01.01.Th.94 tanggal 1 Agustus 1994, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 13 September 1994, Tambahan No.6731.

Anggaran dasar Perusahaan terakhir diubah berdasarkan akta notaris No. 39 tanggal 30 Mei 2017 dari Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan memiliki 56 unit pelaksana yang tersebar di wilayah Indonesia. Kantor Pusat Perusahaan beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135, Jakarta.

**1. General**

**a. Establishment and General Information**

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN" or "the Company") was established in 1961 as a unit of the Ministry of Energy and Public Works. The Company is a business continuation of several Dutch electricity companies which have been taken over by the Government of the Republic of Indonesia ("the Government"). The Dutch electricity companies include among others: NV ANIEM, NV SEM, NV OJEM, NV EMS, NV EMBALOM, NV GEBEO, NV OGEM and NV WEMI. Based on Government Regulation No. 19 year 1965, the Company's status was changed to a legal entity. Subsequently, based on Government Regulation No. 30 year 1970, as amended by Government Regulation No. 18 year 1972, the Company became a Perusahaan Umum (Perum). Based on the notarial deed of Sutjipto, S.H., notary in Jakarta, No. 169 dated July 30, 1994, the Company's status was changed to Limited Liability Company and it was named Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara or PT PLN (Persero). This change was approved by the Minister of Justice in his decision letter No. C2-11.519.HT.01.01.Th.94 dated August 1, 1994 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 73 dated September 13, 1994, Supplement No.6731.

The articles of association of the Company were recently amended by notarial deed No. 39 dated May 30, 2017 of Lenny Janis Ishak, S.H., notary in Jakarta.

The Company is domiciled in Jakarta, with 56 business unit offices spread all over Indonesia. The Company's Head Office is located at Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135, Jakarta.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang "Badan Usaha Milik Negara ("BUMN")", Pemerintah wajib memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN termasuk margin yang diharapkan kepada BUMN yang diberikan penugasan khusus. Perusahaan merupakan BUMN yang sedang melaksanakan penugasan khusus berupa penyediaan tenaga listrik bersubsidi kepada masyarakat (Catatan 37).

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak masing-masing 54.820 karyawan (tidak diaudit) dan 51.158 karyawan (tidak diaudit). Jumlah karyawan tidak termasuk karyawan dari PT Haleyora Powerindo yang bergerak dibidang jasa tenaga kerja. PT Haleyora Powerindo adalah entitas anak dari PT Haleyora Power, entitas anak Perusahaan.

**b. Penawaran Umum Efek Utang Perusahaan**

Perusahaan telah beberapa kali menerbitkan Obligasi dan Surat Utang PLN, sebagai berikut:

*In accordance with article 3 of the Company's articles of association, the scope of its activities is to run an electricity business for public use, which must be satisfactory both in quantity and quality and also to earn profit and perform Government's assignment in electricity business in order to support the development with the application of the principles of Limited Liability Companies.*

*Based on Law No. 19 year 2003, regarding "State-Owned Enterprises ("BUMN")", the Government is obliged to provide compensation to these BUMN, which were appointed to perform special assignments, for all expenses which they have incurred, including expected return (margin). The Company is a BUMN, which performs a special assignment of providing subsidized electricity to the public (Note 37).*

*As of December 31, 2017 and 2016 the Company and its subsidiaries had a total number of employees of 54,820 (unaudited) and 51,158 (unaudited), respectively. The total employees do not include employees of PT Haleyora Powerindo whose nature of business is manpower services. PT Haleyora Powerindo is a subsidiary of PT Haleyora Power, the Company's subsidiary.*

**b. The Company's Public Offering of Bonds**

*The Company has issued several PLN Bonds and Notes, as follows:*

	Tanggal efektif/ <i>Effective date</i>	Bursa pencatatan/ <i>Listed in*</i>	Tanggal pencatatan/ <i>Listed date</i>	Jumlah yang ditawarkan/ <i>Offered amount</i> Rp	
Obligasi Rupiah					Rupiah Bonds
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017	21 Juni 2017/ <i>June 21, 2017</i>	Bursa Efek Indonesia/ <i>Indonesia Stock Exchange</i>	2 November 2017/ <i>November 2, 2017</i>	2,545,500	Sustainable Bonds II PLN Phase II Year 2017
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017	21 Juni 2017/ <i>June 21, 2017</i>	Bursa Efek Indonesia/ <i>Indonesia Stock Exchange</i>	2 November 2017/ <i>November 2, 2017</i>	694,500	Sustainable Sukuk Ijara II PLN Phase II Year 2017
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017	21 Juni 2017/ <i>June 21, 2017</i>	Bursa Efek Indonesia/ <i>Indonesia Stock Exchange</i>	12 Juli 2017/ <i>July 12, 2017</i>	1,600,000	Sustainable Bonds II PLN Phase I Year 2017
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017	21 Juni 2017/ <i>June 21, 2017</i>	Bursa Efek Indonesia/ <i>Indonesia Stock Exchange</i>	12 Juli 2017/ <i>July 12, 2017</i>	400,000	Sustainable Sukuk Ijara II PLN Phase I Year 2017

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tanggal efektif/ Effective date	Bursa pencatatan/ Listed in*)	Tanggal pencatatan/ Listed date	Jumlah yang ditawarkan/ Offered amount Rp	
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	27 Juni 2013/ June 27, 2013	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	11 Desember 2013/ December 11, 2013	1,244,000	Sustainable Bonds I PLN Phase II Year 2013
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	27 Juni 2013/ June 27, 2013	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	11 Desember 2013/ December 11, 2013	429,000	Sustainable Sukuk Ijarah I PLN Phase II Year 2013
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	27 Juni 2013/ June 27, 2013	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	8 Juli 2013/ July 8, 2013	879,000	Sustainable Bonds I PLN Phase I Year 2013
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	27 Juni 2013/ June 27, 2013	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	8 Juli 2013/ July 8, 2013	121,000	Sustainable Sukuk Ijarah I PLN Phase I Year 2013
Obligasi PLN XII Tahun 2010	30 Juni 2010/ June 30, 2010	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	9 Juli 2010/ July 9, 2010	2,500,000	PLN XII Bonds Year 2010
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010	30 Juni 2010/ June 30, 2010	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	9 Juli 2010/ July 9, 2010	500,000	Sukuk Ijarah V PLN Year 2010
Obligasi PLN XI Tahun 2010	31 Desember 2009/ December 31, 2009	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	13 Januari 2010/ January 13, 2010	2,703,000	PLN XI Bonds Year 2010
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010	31 Desember 2009/ December 31, 2009	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	13 Januari 2010/ January 13, 2010	297,000	Sukuk Ijarah IV PLN Year 2010
Obligasi PLN X Tahun 2009	31 Desember 2008/ December 31, 2008	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	12 Januari 2009/ January 12, 2009	1,440,000	PLN X Bonds Year 2009
Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009	31 Desember 2008/ December 31, 2008	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	12 Januari 2009/ January 12, 2009	760,000	Sukuk Ijarah III PLN Year 2009
Obligasi PLN IX Tahun 2007	29 Juni 2007/ June 29, 2007	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	11 Juli 2007/ July 11, 2007	2,700,000	PLN IX Bonds Year 2007
Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007	29 Juni 2007/ June 29, 2007	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	11 Juli 2007/ July 11, 2007	300,000	Sukuk Ijarah II PLN Year 2007
Obligasi PLN VIII Tahun 2006	12 Juni 2006/ June 12, 2006	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	22 Juni 2006/ June 22, 2006	2,200,100	PLN VIII Bonds Year 2006
Sukuk Ijarah PLN I Tahun 2006	12 Juni 2006/ June 12, 2006	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	22 Juni 2006/ June 22, 2006	200,000	Sukuk Ijarah I PLN Year 2006
Obligasi PLN VII Tahun 2004	3 November 2004/ November 3, 2004	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	12 November 2004/ November 12, 2004	1,500,000	PLN VII Bonds Year 2004
Obligasi PLN VI Tahun 1997	27 Juni 1997/ June 27, 1997	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	12 Agustus 1997/ August 12, 1997	600,000	PLN VI Bonds Year 1997
Obligasi PLN V Tahun 1996	28 Juni 1996/ June 28, 1996	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	28 Agustus 1996/ August 28, 1996	1,000,000	PLN V Bonds Year 1996
Obligasi PLN IV Tahun 1995	30 Juni 1995/ June 30, 1995	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	4 September 1995/ September 4, 1995	680,000	PLN IV Bonds Year 1995
Obligasi PLN III Tahun 1995	30 Januari 1995/ January 30, 1995	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	18 April 1995/ April 18, 1995	318,430	PLN III Bonds Year 1995
Obligasi PLN II Tahun 1993	28 September 1993/ September 28, 1993	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	8 November 1993/ November 8, 1993	600,000	PLN II Bonds Year 1993
Obligasi PLN I Tahun 1992	25 September 1992/ September 25, 1992	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	10 November 1992/ November 10, 1992	300,000	PLN I Bonds Year 1992
<b>Jumlah</b>				<b>26,511,530</b>	<b>Total</b>

\*) Pada tanggal 22 Juli 1995 Bursa Paralel Indonesia diakuisisi oleh Bursa Efek Surabaya.

Pada tanggal 30 Oktober 2007 Bursa Efek Surabaya melakukan merger dengan melebur ke dalam Bursa Efek Jakarta yang selanjutnya berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia.

\*) On July 22, 1995 Indonesia Parallel Exchange was acquired by Surabaya Stock Exchange.

On October 30, 2007 Surabaya Stock Exchange was officially merged to Jakarta Stock Exchange, which then changed its name to Indonesia Stock Exchange.

	Tanggal Efektif/ Effective Date	Bursa Pencatatan/ Listed In	Tanggal Pencatatan/ Listed date	Jumlah Yang Ditawarkan/ Offered Amount *) Rp	
Surat Utang Jangka Menengah Global					Global Medium Term Notes
Penerbitan tahun 2017	15 Mei 2017/ May 15, 2017	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	16 Mei 2017/ May 16, 2017	2,000,000,000	Issued in 2017
Penerbitan tahun 2012	24 Oktober 2012/ October 24, 2012	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	25 Oktober 2012/ October 25, 2012	1,000,000,000	Issued in 2012
Penerbitan tahun 2011	22 November 2011/ November 22, 2011	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	23 November 2011/ November 23, 2011	1,000,000,000	Issued in 2011
<b>Jumlah</b>				<b>4,000,000,000</b>	<b>Total</b>

\*) Dalam jumlah penuh/ In full amount

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Majapahit Holding B.V., Belanda, entitas anak yang bertujuan khusus yang sepenuhnya milik Perusahaan, menerbitkan Obligasi Terjamin, sebagai berikut:

*Majapahit Holding B.V., Netherlands, a wholly-owned special-purpose subsidiary of the Company, issued Guaranteed Notes, as follows:*

	Tanggal Efektif/ Effective Date	Bursa Pencatatan/ Listed In	Tanggal Pencatatan/ Listed date	Jumlah Yang Ditawarkan/ Offered Amount *) Rp	
Obligasi Terjamin					Guaranteed notes
Penerbitan 2009	6 November 2009/ November 6, 2009	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	9 November 2009/ November 9, 2009	1,250,000,000	Issued in 2009
Penerbitan 2009	7 Agustus 2009/ August 7, 2009	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	11 Agustus 2009/ August 11, 2009	750,000,000	Issued in 2009
Penerbitan 2007	28 Juni 2007/ June 28, 2007	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	29 Juni 2007/ June 29, 2007	1,000,000,000	Issued in 2007
Penerbitan 2006	16 Oktober 2006/ October 16, 2006	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	17 Oktober 2006/ October 17, 2006	1,000,000,000	Issued in 2006
<b>Jumlah</b>				<b>4,000,000,000</b>	<b>Total</b>

\*) Dalam jumlah penuh/ In full amount

**c. Susunan Pengurus dan Informasi Lain**  
Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

**c. Management and Other Information**  
As of December 31, 2017 and 2016, the Company's management consists of the following:

	2017	2016	
<b>Dewan Komisaris</b>			<b>Board of Commissioners</b>
PLT Komisaris utama Komisaris	Hasan Bisri Harry Susetyo Nugroho Hasan Bisri Budiman Aloysius Kiik Ro Rionald Silaban Andy Noorsaman Sommeng Ilya Avianti	Hasan Bisri Harry Susetyo Nugroho Jarman Hasan Bisri Budiman Aloysius Kiik Ro -	Task Executor President Commissioner Commissioners
Komisaris Independen	Oegroseno Darmono	Oegroseno Darmono	Independent Commissioners
Direktur Utama/ President Director	Sofyan Basir	Sofyan Basir	<b>Tugas dan wewenang/ Duties and authority</b> Direktur Utama/ President Director
Direktur/Director	Sarwono Sudarto	Sarwono Sudarto	Keuangan /Finance
Direktur/Director	Amir Rosidin	Nasri Sebayang	Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah/ Regional Business of Central Side of Java
Direktur/Director	Haryanto W.S	Murtaqi Syamsuddin	Bisnis Regional Jawa Bagian Barat/ Regional Business of West Part of Java
Direktur/Director	Sofyan Basir	Supangkat Iwan Santoso	Pelaksana Tugas Pengadaan Strategis 1/ Acting Director of Strategic Procurement 1
Direktur/Director	Supangkat Iwan Santoso	-	Pengadaan Strategis 2/ Strategic Procurement 2
Direktur/Director	Wiluyo Kusdiharto	Amir Rosidin	Bisnis Regional Sumatera/ Regional Business of Sumatera
Direktur/Director	Syofvi Felienty Roekman	Nicke Widawati	Perencanaan Korporat/ Corporate Planning
Direktur/Director	Djoko Rahardjo Abu Manan	Amin Subekti	Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, Nusa Tenggara/ Regional Business of East Side of Java, Bali and South East Nusa
Direktur/Director	Muhammad Ali	Muhammad Ali	Human Capital Manajemen/ Human Capital Management

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

*For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	
			<b>Tugas dan wewenang/ Duties and authority</b>
Direktur/Director	Machnizon	Djoko Rahardjo Abu Manan	Bisnis Regional Kalimantan/ Regional Business of Kalimantan
Direktur/Director	Syamsul Huda	Machnizon	Bisnis Regional Sulawesi/ Regional Business of Sulawesi
Direktur/Director	Ahmad Rofiq	Haryanto W.S.	Bisnis Regional Maluku dan Papua/ Regional Business of Maluku and Papua
			<b><u>Audit Committee</u></b>
<b><u>Komite Audit</u></b>			
Ketua	Darmono	Darmono	Chairman
Anggota	Hasan Bisri Achmad Wahyudi Gunawan Sidauruk Ronald Silaban Ilya Avianti	Hasan Bisri Sugeng Rochadi Achmad Wahyudi -- --	Members
			<b><u>Corporate Secretary</u></b>
<b><u>Sekretaris Perusahaan</u></b>			
Sekretaris Perusahaan	Bambang Dwiyanto	--	Corporate Secretary
Pelaksana Tugas Sekretaris Perusahaan	--	Bambang Dwiyanto	Task Executor Corporate Secretary

Berdasarkan Surat Keputusan ("SK") Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-211/MBU/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014, Oegroseno dan Darmono diangkat sebagai Komisaris Independen.

*Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. SK-211/MBU/10/2014 dated October 16, 2014, Oegroseno and Darmono were appointed as Independent Commissioners.*

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-272/MBU/12/2014 tanggal 23 Desember 2014, Sofyan Basir diangkat sebagai Direktur Utama Perusahaan dan Sarwono Sudarto, Nasri Sebayang, Supangkat Iwan Santoso, Amir Rosidin, Nicke Widyawati dan Amin Subekti diangkat sebagai Direktur Perusahaan.

*Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. SK-272/MBU/12/2014 dated December 23, 2014, Sofyan Basir was appointed as the Company's President Director and Sarwono Sudarto, Nasri Sebayang, Supangkat Iwan Santoso, Amir Rosidin, Nicke Widyawati and Amin Subekti were appointed as the Company's Directors.*

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. KEP-273/MBU/12/2014 tanggal 23 Desember 2014 Hasan Bisri diangkat sebagai Komisaris.

*Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. KEP-273/MBU/12/2014 dated December 23, 2014, Hasan Bisri was appointed as Commissioner.*

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-183/MBU/09/2015 tanggal 25 September 2015, Aloysius Kiik Ro diangkat sebagai Komisaris.

*Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. SK-183/MBU/09/2015 dated September 25, 2015, Aloysius Kiik Ro was appointed as Commissioner.*

Berdasarkan SK Komisaris Perusahaan No. 198/SK/DK-PLN/2015 tanggal 16 Oktober 2015, pengangkatan Komite Audit Perusahaan yang terdiri dari Darmono sebagai Ketua Komite Audit, beserta Anggota Komite Audit yang terdiri dari Hasan Bisri, Sugeng Rochadi, Andin

*Based on Decision Letter of the Company's Board of Commissioners No. 198/SK/DK-PLN/2015 dated October 16, 2015, the appointment of the Company's Audit Committee consist of Darmono as the Chairman, and members of the Audit Committee consist of Hasan Bisri, Sugeng*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

*For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

Hadiyanto dan Aidil Yuzar. Di tahun 2016, Andin Hadiyanto telah habis masa jabatannya, sedangkan Aidil Yuzar digantikan oleh Achmad Wahyudi berdasarkan SK Komisaris Perusahaan No. 19/SK/DK-PLN/2016 tanggal 28 Juli 2016. Berdasarkan SK Komisaris Perusahaan No. 29/SK/DK-PLN/2015 tanggal 27 Agustus 2015, Joseph Suardi Sabda diangkat sebagai anggota Komite Audit Non Komisaris dengan status paruh waktu dan masa jabatannya habis pada tanggal 1 September 2016.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-211/MBU/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015, Muhamad Ali, Djoko Rahardjo Abu Manan, Machnizon dan Haryanto W.S diangkat sebagai Direktur Perusahaan.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-223/MBU/11/2015 tanggal 10 November 2015, Kuntoro Mangkusubroto diangkat sebagai Komisaris Utama dan Jarman diangkat sebagai Komisaris.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-106/MBU/05/2016 tanggal 24 Mei 2016, Hasan Bisri diangkat sebagai Pelaksana Tugas ("PLT") Komisaris Utama menggantikan Kuntoro Mangkusubroto.

Pada tanggal 28 Februari 2017, Rionald Silaban diangkat sebagai Komisaris berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-41/MBU/02/2017 kemudian pada tanggal 7 Maret 2017, Rionald Silaban diangkat sebagai Komite Audit berdasarkan SK Komisaris Perusahaan No. 01/SK/DK-PLN/2017.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-128/MBU/07/2017 tanggal 12 Juli 2017, Andy Noorsaman Sommeng diangkat sebagai Komisaris dan memberhentikan dengan hormat Jarman sebagai Komisaris.

*Rochadi, Andin Hadiyanto and Aidil Yuzar. In 2016, Andin Hadiyanto ended his term, while Aidil Yuzar was replaced by Achmad Wahyudi based on the Company's Board of Commissioners SK No. 19/SK/DK-PLN/2016 dated July 28, 2016. Based on Decision Letter of the Company's Board of Commissioners No. 29/SK/DP-PLN/2015 dated August 27, 2015, Joseph Suardi Sabda was appointed as part time Audit Committee Non Commissioner and his term ended on September 1, 2016.*

*Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. SK-211/MBU/10/2015 dated October 30, 2015, Muhamad Ali, Djoko Rahardjo Abu Manan, Machnizon and Haryanto W.S were appointed as the Company's Directors.*

*Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. SK-223/MBU/11/2015 dated November 10, 2015, Kuntoro Mangkusubroto was appointed as President Commissioner and Jarman was appointed as Commissioner.*

*Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. SK-106/MBU/05/2016 dated May 24, 2016, Hasan Bisri was appointed as Task Executor ("TE") of President Commissioner to replace Kuntoro Mangkusubroto.*

*On February 28, 2017, Rionald Silaban was appointed as Commissioner based on Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. SK-41/MBU/02/2017 later on March 7, 2017, Rionald Silaban was appointed as Audit Committee based on Decision Letter of Commissioner No. 01/SK/DK-PLN/2017.*

*Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. SK-128/MBU/07/2017 dated July 12, 2017, Andy Noorsaman Sommeng was appointed as Commissioner and Jarman was discharged as Commissioner.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

*For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

Direktur Perusahaan dan Syofvi Felienty Roekman, Syamsul Huda, Ahmad Rofiq dan Wiluyo Kusdwiarto diangkat sebagai Direktur Perusahaan serta perubahan penugasan anggota-anggota direksi Perusahaan.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-145/MBU/07/2017 tanggal 28 Juli 2017, Ilya Avianti diangkat sebagai Komisaris kemudian pada tanggal 8 Agustus 2017, Ilya Avianti diangkat sebagai Komite Audit berdasarkan SK Komisaris Perusahaan No. 8/SK/DK-PLN/2017.

Pada tanggal 8 Agustus 2017, Gunawan Sidauruk diangkat sebagai Komite Audit menggantikan Sugeng Rochadi berdasarkan SK Komisaris Perusahaan No. 9/SK/DK-PLN/2017.

Pada tanggal 27 November 2017, Nicke Widyawati diberhentikan sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1 berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-257/MBU/11/2017, dimana sebelumnya berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-138/MBU/07/2017 tanggal 24 Juli 2017 saudari Nicke Widyawati dialih tugaskan yang semula Direktur Perencanaan Korporat menjadi Direktur Pengadaan Strategis 1.

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 108/DIR/2017, Sofyan Basir ditunjuk sebagai pelaksana tugas direktur pengadaan strategis 1.

*discharged as the Company's Director and Syofvi Felienty Roekman, Syamsul Huda, Ahmad Rofiq and Wiluyo Kusdwiarto were appointed as the Company's Director, and changes of the nomenclature the Company's Directors.*

*Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. SK-145/MBU/07/2017 dated July 28, 2017, Ilya Avianti was appointed as Commissioner later on August 8, 2017, Ilya Avianti was appointed as Audit Committee based on Decisison Letter of Commissioner No. 8/SK/DK-PLN/2017.*

*On August 8, 2017, Gunawan Sidauruk was appointed as Audit Committee based on Decisison Letter of Commissioner No. 9/SK/DK-PLN/2017 to replace Sugeng Rochadi.*

*On November 27, 2017, Nicke Widyawati was discharged as Director of Strategic Procurement 1 based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. SK-257/MBU/11/2017, where based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. SK-138/MBU/07/2017 dated July 24, 2017 Nicke Widyawati was appointed as Director of Strategic Procurement 1 to replace her role as Corporate Planning Director.*

*Based on Directors Decision No. 108/DIR/2017, Sofyan Basir appointed as acting director of strategic procurement 1.*

**2. Penerapan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia ("PABU")**

**a. Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.04/2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("POJK No.6")**

Perusahaan dan entitas anak mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik, yakni Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("PPA") dan Kontrak Penjualan Energi ("ESC"), dengan penyedia dan Pengembang Tenaga Listrik Swasta ("IPP"). IPP tersebut merupakan pemegang Izin Usaha

**2. Implementation of Indonesian Generally Accepted Accounting Principles ("GAAP")**

**a. Implementation of Financial Services Authority Regulation No.6/POJK.04/2017 regarding Accounting Treatment for Transactions Based on Power Purchase Agreements ("POJK No.6")**

*The Company and its subsidiaries entered into power purchase agreements namely Power Purchase Agreements ("PPA") and Energy Sales Contracts ("ESC"), with Independent Power Producers ("IPPs"). Those IPPs are holders of Electricity Business License for public use, which may*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, yang dapat diserahkan kepada entitas usaha lain dengan tanggung jawab untuk menghasilkan tenaga listrik guna kepentingan umum.

Sebelum 1 Januari 2016, Perusahaan dan entitas anak menerapkan ISAK 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa ("ISAK 8") dalam mengevaluasi apakah PPA dan ESC dengan IPP mengandung unsur sewa (Catatan 3.1).

Pada tanggal 1 Maret 2017, Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") menerbitkan POJK No.6 yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik. Berdasarkan POJK No.6, transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik diperlakukan sebagai transaksi jual beli, meskipun perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut mengandung substansi selain jual beli. POJK No.6 berlaku secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai sejak 1 Januari 2017 dan mengizinkan perlakuan lebih awal sejak 1 Januari 2016. POJK No.6 berlaku sampai akhir periode tahun buku berakhirnya penugasan untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berdasarkan Peraturan Presiden.

Perusahaan memutuskan untuk menerapkan lebih awal POJK No.6 secara prospektif sejak 1 Januari 2016. Oleh karena itu transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik yang mengandung sewa (Catatan 3.1), mulai 1 Januari 2016 disajikan sebagai pembelian tenaga listrik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pada tanggal 1 Januari 2016 Perusahaan dan entitas anak telah melakukan penyesuaian atas aset dan liabilitas terkait.

Entitas anak yang memiliki transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik, yaitu PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("PLN Batam") dan PT Indonesia Power ("IP"), bukan merupakan emiten atau perusahaan publik sehingga POJK No.6 tidak diterapkan oleh entitas anak tersebut.

*be granted to other business entities with responsibility to generate electricity for public use.*

*Before January 1, 2016, the Company and its subsidiaries applied ISFAS 8: Determining Whether an Arrangement Contain a Lease ("ISFAS 8") in evaluating whether PPAs and ESCs with IPPs contain a lease (Note 3.1).*

*On March 1, 2017, Financial Services Authority ("FSA") issued POJK No.6 which is applicable for listed and public companies. Based on POJK No.6, transactions based on a power purchase agreement are treated as sale and purchase transactions, even though the power purchase agreements contain substances other than of a sale and purchase. POJK No.6 applies prospectively for the year beginning on January 1, 2017 and early implementation is allowed for the year beginning on January 1, 2016. POJK No.6 is valid until the end of the assignment on acceleration of electricity infrastructures development in accordance with Presidential Regulation.*

*The Company decided to early implement POJK No.6 prospectively beginning on January 1, 2016. Therefore, the electricity sale and purchase transactions based on power purchase agreement which contains a lease (Note 3.1), since January 1, 2016 are presented as purchased electricity in the statement of profit or loss and other comprehensive income when incurred. On January 1, 2016, the Company and its subsidiaries have adjusted the related assets and liabilities.*

*The subsidiaries that have transactions based on power purchase agreement, namely PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("PLN Batam") and PT Indonesia Power ("IP"), who are not listed or public companies, therefore POJK No.6 is not applied for those subsidiaries.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Untuk tujuan konsolidasi, laporan keuangan PLN Batam dan IP disesuaikan agar kebijakan akuntansi untuk transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik sesuai dengan POJK No.6.

*For consolidation purposes, adjustments are made on the financial statements of PLN Batam and IP to bring their accounting policy for transactions based on power purchase agreement in accordance with POJK No.6.*

**b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017**

Pengesahan amandemen dan penyesuaian atas PSAK dan ISAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”), berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017, adalah sebagai berikut:

- PSAK 1 (Amandemen): Penyajian Laporan Keuangan, tentang petunjuk untuk materialitas dan penggabungan, penyajian sub total, struktur dari laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi.
- PSAK 3 (Amandemen): Laporan Keuangan Interim, tentang klarifikasi apa yang dimaksud dengan acuan dalam standar terhadap informasi yang diungkapkan di tempat lain di laporan keuangan interim.
- PSAK 24 (Amandemen): Imbalan Kerja, tentang klarifikasi penentuan tingkat diskon untuk imbalan pascakerja, bahwa mata uang yang mendenominasi kewajiban tersebut yang menentukan, bukan negara dimana kewajiban tersebut timbul.
- PSAK 58 (Amandemen): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan, tentang klarifikasi bahwa ketika sebuah aset (atau kelompok lepasan) direklasifikasi dari dimiliki untuk dijual ke dimiliki untuk didistribusikan, atau sebaliknya, tidak merupakan perubahan rencana untuk menjual atau mendistribusikan, dan tidak perlu dicatat seperti tersebut.
- PSAK 60 (Amandemen): Instrumen Keuangan: Pengungkapan, tentang apa yang dimaksud dengan keterlibatan berkelanjutan dalam konteks ini.

**b. New and Revised Statements of Financial Accounting Standard (“SFAS”) and Interpretations of Financial Accounting Standard (“ISFAS”) effective for the year beginning on or after January 1, 2017**

*Ratification of amendments and improvements of SFAS and ISFAS issued by the Financial Accounting Standard Board of the Indonesian Institute of Accounting (“DSAK-IAI”), effective for the year beginning on or after January 1, 2017, are as follows:*

- SFAS 1 (Amendment): Presentation of Financial Statements regarding the guidance on materiality and aggregation, the presentation of subtotals, the structure of financial statements and the disclosure of accounting policies.
- SFAS 3 (Amendment): Interim Financial Statements, regarding clarification on the reference in the standard to information disclosed elsewhere in the interim financial report.
- SFAS 24 (Amendment): Employee Benefits, regarding clarification on when determining the discount rate for post-employment benefit obligations, it is the currency that the liabilities are denominated in that is important, and not the country where they arise.
- SFAS 58 (Amendment): Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations, regarding clarification on when an asset (or disposal group) is reclassified from ‘held-for-sale’ to ‘held-for-distribution’, or vice versa, this does not constitute a change to a plan of sale or distribution, and it does not have to be accounted for as such.
- SFAS 60 (Amendment): Financial Instruments: Disclosure, regarding guidance on what is meant by continuing involvement in this context.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13 Properti Investasi.
- ISAK 32: Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

**c. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 dan setelahnya**

Amandemen standar dan interpretasi berikut ini efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:

- PSAK 2 (Amandemen): Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan, yang mensyaratkan entitas untuk menjelaskan perubahan pada kewajibannya untuk arus kas yang telah, atau yang akan di klasifikasi sebagai aktivitas pembiayaan pada laporan arus kas.
- PSAK 13 (Amandemen): Properti Investasi tentang pengalihan properti investasi.
- PSAK 15 (Penyesuaian): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, tentang kepentingan jangka panjang pada entitas asosiasi dan ventura bersama.
- PSAK 16 (Amandemen): Aset Tetap-Agrikultur: Tanaman Produktif, tentang klarifikasi atas aset biologis yang memenuhi definisi dari tanaman produksi dicatat sebagai aset tetap.
- PSAK 46 (Amandemen): Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi, tentang klarifikasi persyaratan untuk mengakui aset pajak tangguhan atas rugi yang belum terealisasi.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- ISFAS 31: Interpretation of PSAK No. 13 Investment Property.
- ISFAS 32: Definition and Hierarchy of Financial Accounting Standards.

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial years.

**c. New and Revised Statements of Financial Accounting Standard ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standard ("ISFAS") effective for the year beginning on or after January 1, 2018 and onwards**

The following amendments and interpretations of standard will be effective for the year beginning on or after January 1, 2018, for which early adoption is permitted, namely:

- SFAS 2 (Amendment): Statement of Cash Flows about Disclosure Initiative, which requires entity to explain changes in their liabilities for which cash flows have been, or will be classified as financing activities in the statement of cash flows.
- SFAS 13 (Amendment): Investment Property, regarding transfer of investment property.
- SFAS 15 (Improvement): Investments in Associates and Joint Ventures, regarding long term interest in associates and joint ventures.
- SFAS 16 (Amendment): Property, Plant and Equipment-Agriculture: Bearer Plants, regarding clarification on biological assets that meet the definition of bearer plants are accounted for as fixed assets.
- SFAS 46 (Amendment): Income Tax: Recognition on Deferred Tax Assets for Unrealized Losses, regarding clarification on the requirements for recognizing deferred tax assets on unrealized losses.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- PSAK 53 (Amandemen): Pembayaran Berbasis Saham, tentang klasifikasi dan pengukuran transaksi pembayaran berbasis saham.
- PSAK 67 (Amandemen): Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain, tentang kepentingan di entitas yang dikategorikan sebagai dimiliki untuk dijual kecuali untuk ringkasan informasi keuangan.
- PSAK 69: Agrikultur
- PSAK 111: Akuntansi Wa'd

Interpretasi standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- ISAK 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (Amandemen): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 62 (Amandemen): Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi
- PSAK 71: Instrumen Keuangan
- PSAK 71 (Amandemen): Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73: Sewa

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anak masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen standar, dan interpretasi atas standar serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

*For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

- *SFAS 53 (Amendment): Share-based Payment, regarding classification and measurement of share-based payment transactions.*
- *SFAS 67 (Amendment): Disclosures of Interest in Other Entities, regarding interests in entities classified as held-for-sale except for summarised financial information.*
- *SFAS 69: Agriculture*
- *SFAS 111: Wa'd Accounting*

*Interpretation to standard effective for periods beginning on or after January 1, 2019, with early application is permitted:*

- *ISAK 33, Foreign Currency Transactions and Advance Consideration*

*Standards and amendments to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early application is permitted are:*

- *PSAK 15 (Amendment): Investments in Associates and Joint Ventures: Long Term Interest in Associate and Joint Ventures*
- *PSAK 62 (Amendment): Insurance Contract - Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contracts*
- *PSAK 71: Financial Instruments*
- *PSAK 71 (Amendment): Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation*
- *PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers*
- *PSAK 73: Leases*

*As of the authorization date of these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are still evaluating the potential impact of these new standards, amendments, and interpretations of standards to the Company and its subsidiaries' consolidated financial statements.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. Kebijakan Akuntansi Penting**

**a. Pernyataan Kepatuhan**

Sejak 1 Januari 2016, laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia ("PABU"), yang mencakup:

- (a) Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI"), yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK").
- (b) Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah - Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAS-IAI").
- (c) Ketentuan akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh OJK, terdiri dari Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") No. KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan OJK No.6 POJK.04/2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

Sebelum 1 Januari 2016, laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Standar akuntansi keuangan tersebut mencakup:

- (a) Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh DSAK-IAI, yang meliputi PSAK dan ISAK.
- (b) Ketentuan akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh OJK, termasuk Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

**3. Significant Accounting Policies**

**a. Statement of Compliance**

Since January 1, 2016, the consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Generally Accepted Accounting Principles ("GAAP"), which cover:

- (a) Financial Accounting Standards issued by the Financial Accounting Standard Board - Indonesian Institute of Accountant ("DSAK-IAI"), which covers Indonesian Statements Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISFAS").
- (b) Financial Accounting Standards issued by the Indonesian Sharia Accounting Standard Board - Indonesian Institute of Accountant ("DSAS-IAI").
- (c) Applicable Capital Market Regulations as stated by FSA including Regulation No. VIII.G.7 regarding Guidance for the Presentation of Financial Statements, Decree of Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("CM-FISB") No. KEP-347/BL/2012 regarding Presentation and Disclosure of Financial Statements of Listed or Public Company, and FSA Regulation No.6 POJK.04/2017 regarding Accounting Treatment for Transactions Based on Power Purchase Agreements.

Prior to January 1, 2016, the consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Those financial accounting standards cover:

- (a) Financial Accounting Standards issued by DSAK-IAI, which covers SFAS and ISFAS.
- (b) Applicable Capital Market Regulations as stated by FSA including Regulation No. VIII.G.7 regarding Guidance for the Presentation of Financial Statements, Decree of Chairman of CM-FISB No. KEP-347/BL/2012 regarding Presentation and Disclosure of Financial Statements of Listed or Public Company.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**b. Dasar Penyusunan**

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah ("Rp"), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

**c. Dasar Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak (termasuk entitas bertujuan khusus) yang dikendalikan oleh Perusahaan atau entitas anak. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Hasil entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama periode berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal efektif akuisisi dan sampai dengan tanggal efektif penjualan.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perusahaan.

Seluruh transaksi antar perusahaan, saldo, penghasilan dan beban dieliminasi pada saat konsolidasi.

**b. Basis of Preparation**

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared on the accrual basis of accounting. The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah ("Rp"), which is also the functional currency of the Company and its subsidiaries. The measurement basis is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

**c. Basis of Consolidation**

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and its subsidiaries (including special purpose entities) controlled by the Company or its subsidiaries. Control is achieved when the Company is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

The results of subsidiaries acquired or disposed of during the period are included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income from the effective date of acquisition or up to the effective date of disposal, as appropriate.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of the subsidiaries to bring the accounting policies used in line with those used by the Company.

All intra-group transactions, balances, income and expenses are eliminated on consolidation.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan dan entitas anak pada entitas anak masing-masing yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan Perusahaan dan entitas anak dan kepentingan non-pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah kepentingan non-pengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik Perusahaan.

Jika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Perusahaan:

- (a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- (b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non-pengendali);
- (c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima, jika ada, dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- (d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- (e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
- (f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

*Changes in the Company's and its subsidiaries' interests in the respective subsidiaries that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The carrying amount of the Company and its subsidiaries' interest and the non-controlling interests are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the Company.*

*If the Company loses control over the subsidiary, the Company:*

- (a) Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control ceases;*
- (b) Derecognizes the carrying amounts of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control ceases (including any components of other comprehensive income attributable to them);*
- (c) Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstance that resulted in the cessation of control;*
- (d) Recognizes any investment retained in the former subsidiary at its fair value at the date when control ceases;*
- (e) Reclassifies to profit or loss, or directly transfer to retained earnings if required by other Financial Accounting Standards, the amounts recognized in other comprehensive income in relation to the former subsidiary;*
- (f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the owners of the parent.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**d. Kombinasi Bisnis**

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Perusahaan dan entitas anak, liabilitas yang diakui oleh Perusahaan dan entitas anak kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Kepentingan non-pengendali yang menyajikan bagian kepemilikan dan memberikan mereka hak atas bagian proporsional dari aset neto entitas dalam hal terjadi likuidasi pada awalnya diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional kepemilikan kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dilakukan atas dasar transaksi. Kepentingan non-pengendali jenis lain diukur pada nilai wajar atau, jika berlaku, pada dasar pengukuran lain yang ditentukan oleh standar akuntansi lain.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Perusahaan dan entitas anak dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontinjen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis. Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang

**d. Business Combinations**

*Business combination is a transaction or other events in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Business combination is accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Company and its subsidiaries, liabilities incurred by the Company and its subsidiaries to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Company and its subsidiaries in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.*

*At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.*

*Non-controlling interests that are present ownership interests and entitles their holders to a proportionate share of the entity's net assets in the event of liquidation may be initially measured either at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement basis is made on a transaction-by-transaction basis. Other types of non-controlling interests are measured at fair value or, when applicable, on the basis specified in another accounting standard.*

*When the consideration transferred by the Company and its subsidiaries in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination. Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

Perubahan selanjutnya dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjen tersebut diklasifikasikan. Imbalan kontinjen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada tanggal sesudah tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya dicatat dalam ekuitas. Imbalan kontinjen yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas diukur kembali setelah tanggal pelaporan sesuai dengan standar akuntansi yang relevan, dengan diakui keuntungan atau kerugian terkait dalam laba rugi atau dalam pendapatan komprehensif lain.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Perusahaan dan entitas anak atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui di dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut akan sesuai ketika kepemilikannya dilepas/dijual.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Perusahaan dan entitas anak melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang

*adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.*

*The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. A contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. A contingent consideration that is classified as an asset or liability is remeasured subsequent to the reporting dates in accordance with the relevant accounting standards, as appropriate, with the corresponding gain or loss being recognized in profit or loss or in other comprehensive income.*

*When a business combination is achieved in stages, the Company and its subsidiaries' previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate when those interests were disposed of.*

*If the initial accounting for a business combination is incompleting by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Company and its subsidiaries report provisional amounts for the items for which the accounting is incompleting. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

**e. Transaksi dan Penjabaran Mata Uang Asing**

Pembukuan Perusahaan dan entitas anak, kecuali Majapahit Holding B.V. ("MH") dan Majapahit Finance B.V. ("MF") diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsionalnya). Transaksi-transaksi selama periode berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali selisih kurs mata uang asing yang dikapitalisasi sebagai biaya pinjaman.

Kegiatan usaha MH dan MF merupakan bagian integral dari kegiatan usaha Perusahaan, dengan demikian pembukuan MH dan MF yang diselenggarakan dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dengan Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, kurs konversi yang digunakan Perusahaan dan entitas anak sebagai berikut:

	2017	2016	
	Kurs tengah/ Middle rate Rp *)	Kurs tengah/ Middle rate Rp *)	Currency
Mata uang			
JPY	120	115	JPY
US\$	13,548	13,436	US\$
EUR	16,174	14,162	EUR
AUD	10,557	9,724	AUD
CHF	13,842	13,178	CHF
GBP	18,218	16,508	GBP
NZD	9,613	9,360	NZD

\*) dalam jumlah penuh/ in full amount

*that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.*

**e. Foreign Currency Transactions and Translation**

*The accounts of the Company and its subsidiaries, except for Majapahit Holding B.V. ("MH") and Majapahit Finance B.V. ("MF"), are maintained in Indonesian Rupiah, the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). Transactions during the period involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the rates of exchange prevailing at that date. The resulting gains or losses are credited or charged to profit or loss, except those foreign exchange differences which are capitalized as borrowing costs.*

*The operating activities of MH and MF are an integral part of the Company's activities; hence the accounts of MH and MF, which are maintained in foreign currency, are translated into Rupiah using the same accounting policy adopted by the Company.*

*The conversion rates used by the Company and its subsidiaries on December 31, 2017 and 2016 are as follows:*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**f. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi**

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan dan entitas anak (entitas pelapor):

- (a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  - ii. memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas pelapor; atau
  - iii. merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
  
- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain).
  - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
  - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
  - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

**f. Transactions with Related Parties**

A related party is a person or entity that is related to the Company and its subsidiaries (the reporting entity):

- (a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
  - i. has control or joint control over the reporting entity;
  - ii. has significant influence over the reporting entity; or
  - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
  
- (b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions apply:
  - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
  - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
  - iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
  - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
  - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a), atau
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada Pemerintah, instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

**g. Aset Keuangan  
Pengakuan dan Pengukuran Awal**

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

- vi. *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a), or*
- vii. *A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).*
- viii. *The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.*

*A government related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.*

*Government related entity can be an entity which is controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Government being the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the Ministry of BUMN as shareholder's representative.*

*All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.*

**g. Financial Assets  
Initial Recognition and Measurement**

*All financial assets are recognized and derecognized on the trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the time frame established by the market concerned and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as a fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan**

Aset keuangan Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, dan yang tersedia untuk dijual.

**i. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")**

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

**ii. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang**

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif, kecuali:

- (a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- (b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau

**Subsequent Measurement of Financial Assets**

The Company and its subsidiaries' financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, and available-for-sale.

**i. Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")**

Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

**ii. Loans and Receivables**

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- (a) those that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;
- (b) those that upon initial recognition designated as available for sale; or

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

*For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

(c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

iii. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual ("AFS")

AFS aset keuangan adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan baik sebagai AFS atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan pada FVTPL.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam pengasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen ekuitas yang tidak tercatat di pasar aktif dengan menggunakan teknik penilaian berdasarkan asumsi yang wajar. Dalam keadaan tertentu dimana kisaran estimasi nilai wajar yang realistis cukup signifikan dan probabilitas berbagai estimasi tidak dapat dinilai secara wajar, maka Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen AFS tersebut pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Perusahaan dan entitas anak untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

(c) *those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.*

*After initial recognition, loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method.*

iii. Available-for-Sale Financial Assets ("AFS")

*AFS financial assets are non-derivative financial assets that are either designated as AFS or are not classified as loans and receivables, held to maturity investments or financial assets at FVTPL.*

*On subsequent measurement, the AFS are carried at fair value, with gains or losses recognized in other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gain and losses, until they are derecognized. At that time, the cumulative gain or losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as reclassification adjustment.*

*The Company measures the fair value of non-listed equity instruments by applying valuation techniques based on reasonable assumptions. In the limited case where the range of reasonable fair value measurements is significantly wide and the probabilities of the various estimates cannot be reasonably assessed, the Company records such AFS instruments at cost less impairment.*

*Dividends on AFS equity instruments, if any, are recognized in profit or loss when the Company and its subsidiaries' rights to receive the dividends are established.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**Metode Suku Bunga Efektif**

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan.

**Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif penurunan nilai.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

**Effective Interest Method**

*The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and other forms paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.*

*Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments.*

**Impairment of Financial Assets**

*Financial assets are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting date. Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset and the estimated future cash flows of the investment have been affected.*

*For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.*

*For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:*

- *significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or*
- *breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments; or*
- *it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organization.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

*For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

- terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual tetapi penurunan secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan dan entitas anak atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan *default* atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Perubahan nilai tercatat akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang diakui dalam laba rugi.

- *observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.*

*For certain categories of financial asset, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Company and its subsidiaries' past experiences of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.*

*For financial assets carried at amortized cost, the amount of the impairment is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.*

*The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas dicatat ke laba rugi.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara objektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain.

**Penghentian Pengakuan Aset Keuangan**

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan dan entitas anak mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan dan entitas anak tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan dan entitas anak mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan dan entitas anak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan dan entitas anak masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

*When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative gains previously recognized in equity are recognized in profit or loss.*

*With the exception of AFS equity instruments, if in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized.*

*In respect of AFS equity, impairment losses previously recognized in profit or loss are not reversed through profit or loss. Any increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognized directly in other comprehensive income.*

**Derecognition of Financial Assets**

*The Company and its subsidiaries derecognize a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when they transfer the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company and its subsidiaries neither transfer nor retain substantially all the risks and rewards of ownership and continue to control the transferred asset, the Company and its subsidiaries recognize their retained interest in the asset and an associated liability for amounts they may have to pay. If the Company and its subsidiaries retain substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company and its subsidiaries continue to recognize the financial asset and also recognize a collateralized borrowing for the proceeds received.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Perusahaan dan entitas anak masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan dan entitas anak mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

**Reklasifikasi**

Perusahaan dan entitas anak tidak mereklasifikasi instrumen derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Perusahaan dan entitas anak sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Perusahaan dan entitas anak dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset

*On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the assets carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.*

*On derecognition of a financial asset other than in its entirety (e.g., when the Company and its subsidiaries retain an option to repurchase part of a transferred asset), the Company and its subsidiaries allocate the previous carrying amount of the financial asset between the part they continue to recognize under continuing involvement and the part they no longer recognize on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.*

**Reclassification**

*The Company and its subsidiaries shall not reclassify a derivative instrument out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Company and its subsidiaries as at fair value through profit or loss. The Company and its subsidiaries may reclassify the financial asset out of the fair value through profit or loss category if it is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Company and its*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

keuangan tersebut dalam waktu dekat. Perusahaan dan entitas anak tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Perusahaan dan entitas anak, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

**Pengukuran Nilai Wajar**

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengukuran dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);

*subsidiaries shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.*

*If, as a result of a change in the Company and its subsidiaries' intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held-to-maturity investments, it shall be reclassified to available-for-sale investments and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than insignificant amount of held-to-maturity investments, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sale or reclassification that are so close to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.*

**Fair Value Measurement**

*Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.*

*The fair value of financial assets and financial liabilities is estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.*

*Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:*

- (i) *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
- (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan dan entitas anak sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Perusahaan dan entitas anak menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Perusahaan dan entitas anak pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

**Lindung nilai**

Dalam bisnis normal, Perusahaan dan entitas anak terekspos risiko nilai tukar dan tingkat bunga. Untuk melindungi dari risiko-risiko ini sesuai dengan kebijakan treasury tertulis dari manajemen, Perusahaan dan entitas anak menggunakan derivatif dan instrumen lindung nilai lainnya. PSAK 55 memperbolehkan tiga jenis hubungan lindung nilai:

- Lindung nilai atas nilai wajar;
- Lindung nilai atas arus kas;
- Lindung nilai atas investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri.

Perusahaan dan entitas anak menggunakan akuntansi lindung nilai hanya jika seluruh kondisi berikut ini terpenuhi pada saat dimulainya lindung nilai:

- Instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai diidentifikasi dengan jelas;
- Terdapat penetapan dan pendokumentasian formal atas hubungan lindung nilai. Dokumentasi

- (ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);

- (iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).

*When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company and its subsidiaries use market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Company and its subsidiaries use valuation techniques that are appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.*

*Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Company and its subsidiaries at the end of the reporting period during which the change occurred.*

**Hedging**

*In the normal course of business, the Company and its subsidiaries are expose to currency and interest rate risks. In order to hedge these risks in accordance with the management's written treasury policies, the Company and its subsidiaries use derivatives and other hedging instruments. PSAK 55 allows three types of hedging relationships:*

- Fair value hedge;
- Cash flow hedge;
- Hedge of a net investment in a foreign operation.

*The Company and its subsidiaries use hedge accounting only when the following conditions at the inception of the hedge are satisfied:*

- The hedging instrument and the hedged item are clearly identified;
- Formal designation and documentation of the hedging relationship is in place. Such hedge documentation includes

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

lindung nilai mencakup strategi lindung nilai dan metode yang digunakan untuk menilai efektivitas lindung nilai; dan

- Efektivitas hubungan lindung nilai diperkirakan sangat tinggi di sepanjang masa dari lindung nilai.

Dokumentasi di atas selanjutnya dimutakhirkan pada setiap periode pelaporan untuk menilai apakah lindung nilai tetap diperkirakan akan sangat efektif di sepanjang sisa masa lindung nilai.

**Lindung nilai atas arus kas**

Bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif diakui (setelah pajak) dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan lindung nilai, dan bagian yang tidak efektif atas keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai tersebut diakui dalam laba rugi.

Tidak dilakukan penyesuaian atas item yang dilindung nilai.

Jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi yang kemudian menimbulkan pengakuan suatu aset keuangan atau liabilitas keuangan, maka keuntungan atau kerugian terkait yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada periode yang sama pada saat lindung nilai atas prakiraan arus kas mempengaruhi laba rugi.

Jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi yang kemudian menimbulkan pengakuan aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan, atau jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi atas aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan menjadi komitmen pasti dimana akuntansi lindung nilai atas nilai wajar diterapkan, maka Perusahaan mereklasifikasi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

*the hedge strategy and the method used to assess the hedge's effectiveness; and*

- *The hedge relationship is expected to be highly effective throughout the life of the hedge.*

*The above documentation is subsequently updated at each reporting date in order to assess whether the hedge is still expected to be highly effective over its remaining life.*

**Cash flow hedge**

*The portion of the gain or loss on the hedging instrument that is determined to be an effective hedge is recognized (net of tax) in other comprehensive income and accumulated under hedging reserve, and the ineffective portion of the gain or loss on the hedging instrument is recognized in profit or loss.*

*No adjustment is made to the hedged item.*

*If a hedge of a forecast transaction subsequently results in the recognition of a financial asset or a financial liability, the associated gains or losses that were recognized in other comprehensive income are reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment in the same period or periods during which the hedged forecast cash flows affects profit or loss.*

*If a hedge of a forecast transaction subsequently results in the recognition of a non-financial asset or a non-financial liability, or a forecast transaction for a non-financial asset or non-financial liability becomes a firm commitment for which fair value hedge accounting is applied, then the Company reclassifies the associated gains and losses that were previously recognized in other comprehensive income to profit or loss as a reclassification adjustment.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**h. Liabilitas Keuangan dan Instrumen  
Ekuitas**

Klasifikasi Sebagai Liabilitas atau Ekuitas  
Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan dan entitas anak setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas Keuangan

Penerusan pinjaman, utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non-bank, utang bank dan surat utang jangka menengah, utang obligasi (tidak termasuk sukuk ijarah), utang listrik swasta dan pinjaman lainnya pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan pinjaman diakui selama jangka waktu pinjaman menggunakan metode suku bunga efektif.

Sukuk ijarah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk ijarah. Sukuk ijarah diakui sebesar nilai nominal disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi terkait dengan penerbitannya.

Setelah pengakuan awal, jika jumlah tercatat berbeda dengan nilai nominal disebabkan penyesuaian premium atau diskonto, maka perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah.

**h. Financial Liabilities and Equity  
Instruments**

Classification as Liabilities or Equity

Financial liabilities and equity instruments issued by the Company and its subsidiaries are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company and its subsidiaries after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded as the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial Liabilities

Two-step loans, Government and non-bank Government Financial Institution loans, bank loans and medium term notes, bonds payable (excluding sukuk ijarah), electricity purchase payable and other borrowings are initially measured at fair value, net of transaction costs and are subsequently measured at amortized cost, using the effective interest rate method, with interest expense recognized on an effective yield basis.

Any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the settlement or redemption of borrowings is recognized over the term of the borrowings using the effective interest rate method.

Sukuk ijarah are recognized when the entity becomes a parts bound by the provisions of the issuance of sukuk ijarah. Sukuk ijarah are recognized at the nominal value adjusted with premium or discount and transaction cost related to the issuance.

After initial recognition, if the carrying amount is different from the nominal value caused by the premium or discount, then the difference is amortized on straight-line basis over the period of the sukuk ijarah.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**Penghentian Pengakuan Liabilitas  
Keuangan**

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan dan entitas anak telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

**i. Saling Hapus Antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**j. Aset Tetap - Pemilikan Langsung**

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan dan entitas anak melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas kelas-kelas aset berikut ini dari model biaya menjadi model revaluasi:

- Tanah
- Bangunan umum, waduk dan prasarana
- Instalasi dan mesin pembangkit
- Perlengkapan transmisi
- Perlengkapan distribusi
- Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik
- Material cadangan utama

Perubahan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan secara prospektif sesuai dengan PSAK 25 (Revisi 2015).

Kelas aset di atas, disajikan sebesar nilai wajar dikurangi penyusutan dan penurunan nilai. Tanah tidak disusutkan. Penilaian terhadap aset-aset tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar

**Derecognition of Financial Liabilities**

The Company and its subsidiaries derecognize financial liabilities, when and only when the Company and its subsidiaries' obligations are discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the considerations paid and payable is recognized in profit or loss.

**i. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities**

The Company and its subsidiaries only offset financial assets and liabilities and present the net amount in the statement of financial position where they:

- currently have a legal enforceable right to set off the recognized amount; and
- intend either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

**j. Property, Plant and Equipment - Direct Acquisition**

On December 31, 2015, the Company and its subsidiaries changed their accounting policy for the following classes of assets from the cost model to the revaluation model:

- Land
- Buildings, reservoir and infrastructure
- Installations and power plant
- Transmission equipment
- Distribution equipment
- Telecommunication and data processing equipment used for electricity supply
- Major spare parts

That change in accounting policy is applied prospectively in accordance with SFAS 25 (Revised 2015).

The classes of asset above, are shown at fair value less subsequent depreciation and impairment losses. Land is not depreciated. Valuation of those assets is performed by external independent

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

*For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

di OJK. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasi aset tetap.

Aset tetap lainnya disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi aset tetap yang menggunakan model revaluasi dikreditkan pada "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain; penurunan lainnya dibebankan pada laba rugi.

Biaya awal untuk mendapatkan hak atas tanah diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah dan biaya-biaya tersebut tidak disusutkan. Aset, kecuali tanah, disusutkan hingga mencapai estimasi nilai sisa dengan menggunakan metode garis lurus hingga mencapai estimasi nilai sisa selama masa manfaatnya sebagai berikut:

	<b>2017 dan/ and 2016 (Tahun/ Years)</b>	
Bangunan umum, waduk, dan prasarana	10-50	<i>Buildings, reservoir, and infrastructure</i>
Instalasi dan mesin pembangkit	12-40	<i>Installations and power plant</i>
Perlengkapan transmisi	40	<i>Transmission equipment</i>
Perlengkapan distribusi	40	<i>Distribution equipment</i>
Perlengkapan umum	5	<i>General equipment</i>
Kendaraan bermotor	5	<i>Motor vehicle</i>
Material cadangan utama	10-50	<i>Major spare parts</i>
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	10	<i>Telecommunications and data processing equipment used for electricity supply</i>
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	10	<i>Other telecommunication and data processing equipment</i>
Kapal dan perlengkapan	10-47	<i>Vessel and equipment</i>

*valuers which are registered with the FSA. Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount. Any accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net amount is restated to the revalued amount of the property, plant and equipment.*

*All other property, plant and equipment are stated at historical cost less depreciation and impairment losses. Historical cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.*

*Increases in the carrying amount arising on revaluation of property, plant and equipment that use revaluation model are credited to "asset revaluation surplus" as part of other comprehensive income. Decreases that offset previous increases of the same asset are debited against "asset revaluation surplus" as part of other comprehensive income; all other decreases are charged to profit or loss.*

*Initial costs incurred to obtain land are recognized as part of the acquisition cost of the land and these costs are not depreciated. Assets, except land, are depreciated to their residual value using the straight-line method to their residual values over their expected useful life as follows:*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau jika lebih pendek, disusutkan selama periode masa sewa ketika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Perusahaan dan entitas anak akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

Masa manfaat ekonomis, nilai sisa dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap diakui sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

Aset yang untuk sementara waktu tidak digunakan dalam operasi dicatat sebagai bagian dari aset tetap. Aset yang sementara waktu tidak digunakan dalam operasi disusutkan dengan metode dan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

**k. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan**

Aset yang diamortisasi atau disusutkan dikaji untuk penurunan nilai jika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat kemungkinan tidak dapat dipulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui sebesar kelebihan jumlah tercatat aset atas jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk

*Assets held under finance leases are depreciated over their expected useful lives on the same basis as owned assets or where shorter, the term of the relevant leases where there is no reasonable certainty that the Company and its subsidiaries will obtain ownership at the end of the lease term.*

*The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.*

*The costs of maintenance and repairs are charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognized as assets if and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.*

*When property, plant and equipment are retired or otherwise disposed of, their carrying values are removed from the accounts. Any resulting gain or loss is reflected in profit or loss.*

*Assets that are temporarily not used in operations are recorded as part of property, plant and equipment. Assets not used in operations are depreciated using the same method and based on the economic useful lives of the property, plant and equipment.*

**k. Impairment of Non-Financial Assets**

*Assets that are subject to amortization or depreciation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less cost to sell and*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

menjual dan nilai pakainya. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah (unit penghasil kas). Aset non-keuangan yang mengalami penurunan nilai, ditelaah untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pembalikan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan.

Pembalikan rugi penurunan nilai, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan didepresiasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan.

**I. Sewa**

Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa

**Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2016**

ISAK 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa ("ISAK 8") memberikan panduan untuk menentukan apakah suatu perjanjian merupakan sewa atau mengandung sewa sehingga harus diperlakukan sesuai dengan PSAK 30 (Revisi 2011): Sewa ("PSAK 30").

Penyelenggaraan usaha tenaga listrik di Indonesia dikendalikan oleh Pemerintah dan dilaksanakan oleh Perusahaan sebagai BUMN selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan setiap pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum harus memastikan ketersediaan tenaga listrik di setiap wilayah operasinya.

*its value-in-use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there are separately identifiable cash flows (cash generating units). Non-financial assets that have suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.*

*Reversal on impairment loss for assets would be recognized if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognized in profit or loss. The reversal will not result in the carrying amount of an asset that exceeds what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognized at the date at which the impairment was reversed.*

**I. Leases**

Determining Whether an Arrangement Contains a Lease

**Accounting treatment before January 1, 2016**

ISFAS 8: *Determining Whether an Arrangement Contains a Lease* ("ISFAS 8") provides guidance in determining whether an arrangement is in substance a lease that should be accounted for in accordance with SFAS 30 (Revised 2011): Leases ("SFAS 30").

*The electric power business in Indonesia is controlled by the Government and carried out by the Company as a BUMN, which serves as the holder of an Electricity Business Proxy. The holder of an Electricity Business Proxy and each holder of an Electricity Business License for public use must ensure the adequacy of electric power supply in each of their operating areas.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Perusahaan dan entitas anak mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik, yakni PPA dan ESC, dengan IPP. IPP tersebut merupakan pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, yang dapat diserahkan kepada entitas usaha lain dengan tanggung jawab untuk menghasilkan tenaga listrik guna kepentingan umum.

Berdasarkan surat Ketua Bapepam-LK yang kemudian bergabung menjadi bagian dari OJK, No. S-2366/BL/2009 tertanggal 30 Maret 2009, perjanjian penyediaan tenaga listrik oleh IPP kepada Perusahaan dan entitas anak yang termasuk dalam kategori perjanjian pelaksanaan jasa publik ke swasta, dikecualikan dari penerapan ISAK 8 sampai DSAK-IAI menerbitkan interpretasi standar akuntansi yang spesifik mengatur transaksi tersebut.

Manajemen mengevaluasi dampak dari ISAK 16: Perjanjian Konsesi Jasa ("ISAK 16") (efektif berlaku tanggal 1 Januari 2012) terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Perusahaan dan entitas anak dengan IPP dan menetapkan bahwa transaksi tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup Interpretasi, yang berisi perlakuan akuntansi untuk operator atas perjanjian konsesi jasa publik ke swasta. Selanjutnya, sesuai dengan surat manajemen tanggal 22 Desember 2011 kepada Ketua Bapepam-LK, manajemen memutuskan untuk menerapkan ketentuan ISAK 8, sesuai dengan PSAK 30, terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik mulai tanggal 1 Januari 2012.

**Perlakuan akuntansi sejak  
1 Januari 2016**

Pada tanggal 1 Maret 2017 OJK menerbitkan POJK No.6/POJK.04/2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("POJK No.6") yang diterapkan secara prospektif. Penerapan POJK tersebut mengakibatkan seluruh transaksi berdasarkan PPA dan ESC dengan IPP diperlakukan sebagai transaksi jual beli, meskipun dalam transaksi tersebut mengandung substansi selain jual

*The Company and its subsidiaries entered into power purchase agreements namely PPA and ESC, with IPPs. Those IPPs are holders of Electricity Business License for public use, which may be granted to other business entities with responsibility to generate electricity for public use.*

*Based on letter No. S-2366/BL/2009 dated March 30, 2009 from the Chairman of CM-FISB, which has subsequently been merged into the FSA, power supply arrangements by IPPs to the Company and its subsidiaries that are categorized as public-to-private concession arrangements, are exempted from the application of ISFAS 8, until DSAK-IAI has issued an accounting interpretation that can specifically address such transactions.*

*Management assessed the impact of ISFAS 16: Service Concession Arrangements ("ISFAS 16") (effective January 1, 2012) on the Company's and its subsidiaries' Power Supply Contracts with IPPs and determined that such transactions do not qualify under the scope of the Interpretation, which addresses the accounting of the operators of public-to-private concession arrangements. Subsequently, on its letter dated December 22, 2011 to the Chairman of CM-FISB, management decided to apply the provisions of ISFAS 8, in accordance with SFAS 30, on its Power Supply Contracts since January 1, 2012.*

**Accounting treatment since  
January 1, 2016**

*On March 1, 2017, FSA issued POJK No.6/POJK.04/2017 regarding Accounting Treatment on Transactions based on Power Purchase Agreement ("POJK No.6") which is applied prospectively. The application of the POJK resulted in all transactions based on PPAs and ESCs with IPPs are treated as sale and purchase transactions, regardless those transactions contain substances other than sale and purchase, therefore*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

beli, sehingga evaluasi apakah PPA dan IPP mengandung sewa tidak dilakukan (Catatan 2.a).

Klasifikasi Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada lessee. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga konstan atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Pembayaran sewa operasi (dikurangi dengan insentif yang diterima dari lessor) diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontinjen diakui dalam sewa operasi sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Di tahun 2015 Perusahaan dan entitas anak menetapkan bahwa beberapa perjanjian pembelian tenaga listrik dan perjanjian pembelian energi dengan Penghasil Listrik Independen IPP memenuhi persyaratan sebagai sewa dengan dasar bahwa Perusahaan dan entitas anak dan IPP memiliki perjanjian *take or pay*, dimana Perusahaan dan entitas anak mengambil hampir seluruh listrik dan energi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik. Jenis perjanjian ini ditetapkan sebagai sewa pembiayaan dimana porsi signifikan dari risiko dan manfaat atas sejumlah pembangkit listrik telah dialihkan ke Perusahaan dan entitas anak dengan dasar bahwa masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset dan terdapat opsi beli pada akhir masa sewa.

*evaluation on whether PPAs and ESCs with IPPs contain a lease is not performed (Note 2.a).*

Lease Classification

*Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards related to ownership of an asset to the lessee. All other leases are classified as operating leases.*

*Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rents are recognized as expenses in the periods in which they are incurred.*

*Operating lease payments (net of any incentives received from the lessor) are recognized as expenses on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rents arising under operating leases are recognized as expenses in the period in which they are incurred.*

*In 2015, the Company and its subsidiaries determined that certain power purchase agreements and energy sales contracts with IPPs qualify as leases on the basis that the Company and its subsidiaries and the IPPs have take or pay arrangements where the Company and its subsidiaries are taking substantially all electricity and energy output from the power plants. This type of arrangement is determined to be a finance lease where a significant portion of the risks and rewards of ownership of certain power plants have been transferred to the Company and its subsidiaries on the basis that the lease term is for the major part of the economic life of the assets and there is a bargain purchase option at the end of the lease term.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**m. Pekerjaan Dalam Pelaksanaan**

Pekerjaan dalam pelaksanaan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. Pekerjaan dalam pelaksanaan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dari pinjaman yang digunakan untuk pembangunan, beban penyusutan aset tetap yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan dan biaya pengujian ketika aset dapat berfungsi setelah dikurangi penjualan listrik ketika masa uji coba. Pekerjaan dalam pelaksanaan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

**n. Biaya Pinjaman**

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, merupakan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat selesainya aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

Biaya pinjaman dikapitalisasi yang berasal dari rugi selisih kurs dibatasi sedemikian rupa sehingga jumlah dikapitalisasi tidak melebihi jumlah biaya pinjaman yang mungkin terjadi jika pinjaman tersebut dilakukan dengan menggunakan mata uang fungsional pada periode tersebut.

**m. Construction in Progress**

*Construction in progress represents costs directly related to the construction of property, plant and equipment. Construction in progress is stated at cost, which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction, depreciation of property, plant and equipment that were used in the construction and cost of testing whether the asset is functioning properly after deducting sales of electricity during commissioning period. Construction in progress is transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use.*

**n. Borrowing Costs**

*Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, to be added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.*

*For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined by applying a capitalization rate to the amount expensed on the qualifying assets. The capitalization rate is the weighted average of the total borrowings cost applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset.*

*Borrowing costs are capitalized from foreign exchange losses to an extent by which the capitalized amount does not exceed the amount of borrowing costs which may have been incurred had the loan been denominated in the functional currency.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman yang secara spesifik belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasian dikurangi dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

**o. Properti Investasi**

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Perusahaan dan entitas anak memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

Penentuan nilai wajar investasi didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang mempunyai kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan serta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai.

*Investment income is earned from the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization.*

*All other borrowing costs are recognized in profit or loss in the period in which they are incurred.*

**o. Investment Properties**

*Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.*

*Investment property is recognized as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.*

*An investment property shall be measured initially at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.*

*After initial recognition, the Company and its subsidiaries choose to use fair value model and measure all of its investment property at fair value. Any gain or loss arising from a change in the fair value of investment property is recognized in profit or loss for the period in which it arises.*

*The fair value of investment property is based on a valuation by an independent valuer who holds a recognized and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan dimulainya sewa operasi kepada pihak lain.

Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik dan dimulainya pengembangan untuk dijual.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

**p. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama**

Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Perusahaan dan entitas anak memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi. Di dalam investasi Perusahaan dan entitas anak atas entitas asosiasi termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi.

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai PSAK 58 (Revisi 2009), Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Dalam menerapkan metode

*Transfer to investment property made when, and only when, there is a change in use, evidenced by end of owner-occupation and commencement of an operating lease to another party.*

*Transfer from investment property made when, and only when, there is a change in use, evidenced by commencement of owner-occupation and commencement of development with a view to sale.*

*An investment property is derecognized on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.*

**p. Investments in Associates and Joint Ventures**

Investments in Associates

*Associates are all entities over which the Company and its subsidiaries have significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method of accounting. Under the equity method, the investment is initially recognized at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognize the investor's share of the profit or the loss of the investee after the date of acquisition. The Company and its subsidiaries investment in associates includes goodwill identified on acquisition.*

*The results of operations and assets and liabilities of associates are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting, except when investment is classified as held for sale, in which case, it is accounted for in accordance with SFAS 58 (Revised 2009), Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

*For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

ekuitas, bagian Perusahaan dan entitas anak atas laba rugi atas entitas asosiasi setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian perusahaan atas penghasilan komprehensif lainnya setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya. Perubahan dan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi. Bagian Perusahaan dan entitas anak atas kerugian entitas asosiasi yang melebihi nilai tercatat dari investasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, secara substansi, merupakan bagian dari Perusahaan dan nilai investasi bersih entitas anak dalam entitas asosiasi) diakui hanya sebatas bahwa Perusahaan dan entitas anak telah mempunyai kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atau melakukan pembayaran atas kewajiban entitas asosiasi.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Perusahaan dan entitas anak dengan entitas asosiasi dieliminasi sebesar bagian Perusahaan dan entitas anak dalam entitas asosiasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak.

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan dan entitas anak menentukan apakah ada bukti objektif bahwa terdapat indikasi penurunan nilai untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi Perusahaan dan entitas anak. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk *goodwill*) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 (Revisi 2014), Penurunan Nilai Aset, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai yang diakui pada

*Operations. In applying the equity method of accounting, the Company and its subsidiaries' share of its associate's post-acquisition profits or losses is recognized in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognized in other comprehensive income. These post-acquisition movements and distributions received from an associate are adjusted against the carrying amounts of the investment. Losses of the associates in excess of the Company and its subsidiaries' interests in those associates (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Company and its subsidiaries' net investment in the associate) are recognized only to the extent that the Company and its subsidiaries have incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.*

*Unrealized gains on transactions between the Company and its subsidiaries and associates are eliminated to the extent of the Company and its subsidiaries interests in the associate. Unrealized losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of impairment of the assets transferred. The accounting policies of the associates have been changed when necessary to ensure consistency with the accounting policy adopted by the Company and its subsidiaries.*

*The Company and its subsidiaries determine at each reporting date whether there is any objective evidence that impairment indicators exist to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Company and its subsidiaries' investment in an associate. If impairment indicators exist, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with SFAS 48 (Revised 2014), Impairment of Assets, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

keadaan tersebut tidak dialokasikan pada setiap aset yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

Perusahaan dan entitas anak menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

- (a) jika investasi menjadi entitas anak.
- (b) jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Perusahaan dan entitas anak mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.
- (c) ketika Perusahaan dan entitas anak menghentikan penggunaan metode ekuitas, Perusahaan dan entitas anak mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

Ketika Perusahaan dan entitas anak melakukan transaksi dengan entitas asosiasi, keuntungan dan kerugian dieliminasi sebesar kepentingan mereka dalam entitas asosiasi.

Bagian partisipasi dalam ventura bersama  
Menurut PSAK 66 (Revisi 2015), pengaturan bersama diklasifikasikan sebagai operasi bersama atau ventura bersama bergantung pada hak dan kewajiban kontraktual para investor. Perusahaan dan entitas anak telah menilai sifat dari pengaturan bersama dan menentukan pengaturan tersebut sebagai ventura bersama.

*amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with SFAS 48 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.*

*The Company and its subsidiaries discontinue the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:*

- (a) *if the investment becomes a subsidiary.*
- (b) *if the retained interest in the former associate is a financial asset, the Company and its subsidiaries measure the retained interest at fair value.*
- (c) *when the Company and its subsidiaries discontinue the use of the equity method, the Company and its subsidiaries account for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.*

*When the Company and its subsidiaries transact with an associate, profits and losses are eliminated to the extent of their interest in the relevant associate.*

Interest in joint ventures

*Under SFAS 66 (Revised 2015), investments in joint arrangements are classified as either joint operations or joint ventures depending on the contractual rights and obligations of each investor. The Company and its subsidiaries have assessed the nature of its joint arrangements and determined them to be joint ventures.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

*For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

Hasil operasi, aset dan liabilitas dari ventura bersama disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian menggunakan metode ekuitas. Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Perusahaan dan entitas anak atas laba rugi atas ventura bersama setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian Perusahaan atas penghasilan komprehensif lain setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Perubahan dan penerimaan distribusi dari ventura bersama setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

Jika bagian Perusahaan dan entitas anak atas rugi ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada ventura bersama, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka perusahaan menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali Perusahaan dan entitas anak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama ventura bersama.

Penyesuaian dibentuk terhadap laporan keuangan konsolidasian untuk mengeliminasi bagian Perusahaan dan entitas anak atas keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas transaksi antara Perusahaan dan entitas anak dan ventura bersama. Ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sampai dengan tanggal dimana Perusahaan dan entitas anak kehilangan pengaturan bersama atas entitas yang diatur bersama.

Kebijakan akuntansi ventura bersama telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakan yang diterapkan oleh Perusahaan dan entitas anak.

Perusahaan dan entitas anak mengukur dan mengakui sisa investasi pada nilai wajar setelah hilangnya pengendalian dan ventura bersama tidak menjadi entitas anak atau entitas asosiasi. Selisih antara nilai tercatat atas hilangnya ventura bersama

*The result of operations and assets and liabilities of a joint venture are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method. In applying the equity method of accounting, the Company and its subsidiaries' share of its joint venture's post-acquisition profits or losses is recognized in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognized in other comprehensive income. These post-acquisition movements and distributions received from a joint venture are adjusted against the carrying amounts of the investment.*

*When the Company and its subsidiaries' share of the losses of a joint venture equals or exceeds its interest in the joint venture, including any other unsecured non-current receivables, the Company does not recognize further losses, unless it has obligations to make or has made payments on behalf of the joint venture.*

*Adjustments are made in the consolidated financial statements to eliminate the Company and its subsidiaries' share of unrealized gains and losses on transactions between the Company and its subsidiaries and the joint ventures. The joint ventures are carried at equity method until the date on which the Company and its subsidiaries cease to have joint arrangements over the joint ventures.*

*Accounting policies of the joint ventures have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Company and its subsidiaries.*

*The Company and its subsidiaries measure and recognize the remaining investment at fair value upon loss of control, provided the joint ventures do not become subsidiaries or associates. Any difference between the carrying amount of*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

dengan agregat nilai wajar sisa investasi dan hasil pelepasan diakui pada laba rugi. Ketika sisa investasi mempunyai pengaruh yang signifikan, investasi tersebut dicatat sebagai investasi pada entitas asosiasi.

*the joint ventures upon loss of control and the aggregate of the fair value of the remaining investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss. When the remaining investment constitutes significant influence, it is accounted for as investment in an associate.*

**q. Aset Takberwujud**

**i. Biaya Pengembangan Piranti Lunak**

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak diakui sebagai aset takberwujud. Biaya pengembangan piranti lunak komputer diakui sebagai aset yang diamortisasi dengan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaatnya.

**q. Intangible Assets**

**i. Software Development Cost**

*Costs associated with maintaining computer software programs are recognized as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Company and its subsidiaries are recognized as intangible assets. Computer software development costs recognized as assets are amortized using the straight-line method over their estimated useful life.*

**ii. Biaya Legal Terkait Pembaruan Hak Atas Tanah**

Biaya legal terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak.

**ii. Legal Costs to Renew Land Rights**

*Legal costs related to renewal of land rights are recognized as intangible assets and amortized over the period of the land rights.*

Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

*After initial recognition, intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss. The useful life of intangible asset is assessed to be either finite or indefinite.*

**Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas**

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus (atau metode lainnya sepanjang mencerminkan pola manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dikonsumsi oleh entitas).

**Intangible asset with finite useful life**

*Intangible asset with finite life is amortized over the economic useful life by using a straight-line method (or other method as it reflects the pattern in which the asset's future economic benefits are expected to be consumed by the entity).*

Biaya Pengembangan Piranti Lunak diamortisasi dengan tingkat amortisasi sebesar 20% dengan metode garis lurus.

*Software Development Cost is amortized with amortization rate of 20% using straight-line method.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Biaya legal terkait pembaruan hak atas tanah diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara masa berlaku hukum hak atau umur ekonomi tanah.

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku.

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi. Umur manfaat aset takberwujud yang tidak diamortisasi ditelaah setiap tahun untuk menentukan apakah peristiwa dan keadaan dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak, perubahan umur manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif.

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan kapanpun terdapat suatu indikasi bahwa aset takberwujud mungkin mengalami penurunan nilai.

**r. Biaya Dibayar Dimuka**

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

**s. Kas dan Setara Kas**

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Untuk kebijakan akuntansi pinjaman yang diberikan dan piutang, lihat Catatan 3.g.

**t. Persediaan**

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak.

Legal costs to renew land rights are amortized over the validity period of the legal rights or the economic life of the land, whichever the shorter.

The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at each financial year end.

Intangible asset with indefinite useful life

Intangible asset with indefinite useful life is not amortized. The useful life of an intangible asset that is not being amortized is reviewed annually to determine whether events and circumstances continue to support an indefinite useful life assessment for that asset. If they do not, the change in the useful life assessment from indefinite to finite is accounted for on a prospective basis.

Intangible asset with indefinite useful life is tested for impairment annually and whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired.

**r. Prepaid Expenses**

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

**s. Cash and Cash Equivalents**

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash in hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

Restricted cash in banks and time deposits are classified as loans and receivables. Refer to Note 3.g for the accounting policy on loans and receivables.

**t. Inventories**

Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the moving average method.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Di dalam penentuan nilai realisasi bersih, Perusahaan dan entitas anak tidak menurunkan nilai persediaan yang digunakan untuk produksi tenaga listrik apabila Perusahaan dan entitas anak mampu memperoleh pendapatan penjualan tenaga listrik di atas biaya perolehan persediaan tersebut.

*In determining the net realizable values, the Company and its subsidiaries do not write down inventories held in use for production of electricity below their costs when the Company and its subsidiaries are able to sell electricity above the costs of inventories.*

**u. Pinjaman dan Utang Obligasi  
(Termasuk Sukuk Ijarah)**

Pinjaman dan utang obligasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan. Kebijakan akuntansi untuk liabilitas keuangan dijelaskan dalam Catatan 3.h.

**u. Borrowings and Bonds Payable  
(Including Sukuk Ijara)**

*Borrowings and bonds payable are classified as financial liabilities. Refer to Note 3.h for the accounting policy on financial liabilities.*

**v. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Penjualan Tenaga Listrik

Pendapatan penjualan listrik diakui berdasarkan pemakaian energi listrik (kWh). Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

**v. Revenue and Expense Recognition**

Sale of Electricity

*Revenue from the sale of electricity is recognized based on electricity usage (kWh). Expenses are recognized when incurred (accrual basis).*

Subsidi Listrik Pemerintah

Subsidi listrik Pemerintah yang diberikan melalui Perusahaan diakui sebagai pendapatan atas dasar akrual yang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 44/PMK.02/2017 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 162/PMK.02/2017 dan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ("ESDM") No 28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) yang terakhir diperbaharui dengan Peraturan Menteri ESDM No. 41 Tahun 2017.

The Government's Electricity Subsidy

*The Government's electricity subsidy is recognized as revenue on an accrual basis which is computed in accordance with the provisions stipulated in the prevailing Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 44/PMK.02/2017 which has been amended by Regulation of The Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 162/PMK.02/2017 and Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources ("ESDM") No. 28 Year 2016 regarding electricity tariff provided by PT PLN (Persero) with the latest amendment by Regulation of the Minister of ESDM No. 41 Year 2017.*

Biaya Penyambungan Pelanggan

Perusahaan mencatat biaya penyambungan yang diterima dari pelanggan untuk memperoleh atau membangun aset tetap yang digunakan untuk menghubungkan pelanggan ke jaringan listrik Perusahaan sebagai pendapatan pada saat Perusahaan menyelesaikan kewajiban atas jasa koneksi tersebut.

Customers Connection Fees

*The Company recognizes connection fees received from customers that are used to construct or acquire property, plant and equipment to connect the customers to its network as revenues when the Company completes the connection service.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan usaha lainnya merupakan pendapatan yang berasal dari pelayanan jaringan dan jasa telekomunikasi, sewa trafo dan jasa-jasa administratif lainnya. Pendapatan lainnya diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi tersebut pada tanggal pelaporan.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual, dengan acuan jumlah pokok terutang dan tingkat bunga yang berlaku.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

**w. Pembelian Tenaga Listrik**

Dalam PPA dan ESC dengan IPP, Perusahaan dan entitas anak membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh IPP sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup komponen biaya berbeda yaitu komponen kapasitas dan energi untuk PPA, komponen sumber daya dan pembangkitan untuk ESC, komponen operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam perjanjian.

Sebelum 1 Januari 2016, Perusahaan dan entitas anak menerapkan ISAK 8 dan mengevaluasi apakah PPA dan ESC dengan IPP mengandung unsur sewa. Apabila terdapat unsur sewa, maka Perusahaan dan entitas anak melakukan kajian untuk menentukan apakah sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi (Catatan 3.1). Jika PPA dan ESC dengan IPP tidak mengandung sewa, maka biaya pembelian tenaga listrik dari IPP diakui pada saat terjadinya dan disajikan sebagai beban pembelian tenaga listrik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Other Revenues

Other revenues consist of telecommunication network and services, transformer rental and other administrative services. Other revenue is recognized with reference to the stage of completion of the transaction at the reporting date.

Interest Income

Interest income is recognized as incurred on an accrual basis, by reference to the principal outstanding and at the applicable interest rate.

Expenses

Expenses are recognized as incurred on an accrual basis.

**w. Purchase of Electricity**

Under PPAs and ESCs with IPPs, the Company and its subsidiaries pay the IPP for the supply of energy at an amount determined in accordance with the payment formula in which payment for different cost components, such as capacity and energy components for the PPA, resource and generation components for the ESC, as well as operations and maintenance components, depends on the level of energy supplied and other variables stipulated in the agreement.

Before January 1, 2016, the Company and its subsidiaries implemented ISFAS 8 and evaluated whether PPAs with IPPs contain a lease. When a lease is identified, the Company and its subsidiaries perform assessment on whether such lease is classified as finance lease or operating lease (Note 3.1). If PPA and ESC with IPP does not contain a lease, the cost of electricity purchases from IPPs are recognized when incurred as purchased electricity expense and presented in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**Perlakuan akuntansi sejak  
1 Januari 2016**

Penerapan POJK No.6 secara prospektif sejak 1 Januari 2016, mengakibatkan seluruh transaksi berdasarkan PPA dan ESC dengan IPP diperlakukan sebagai transaksi jual beli, meskipun dalam transaksi tersebut mengandung substansi selain jual beli. Biaya pembelian tenaga listrik dari IPP diakui pada saat terjadinya dan disajikan sebagai beban pembelian tenaga listrik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (Catatan 2.a).

**Accounting treatment since  
January 1, 2016**

The prospective implementation of POJK No.6 since January 1, 2016 resulted in all transactions based on PPAs and ESCs with IPPs are treated as sale and purchase transactions, regardless those transactions contain substances other than sale and purchase. The cost of electricity purchases from IPPs are recognized when incurred as purchased electricity expense and presented in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income (Note 2.a).

**x. Imbalan Kerja**

Imbalan Pascakerja

Perusahaan dan entitas anak menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Perusahaan dan entitas anak juga memberikan imbalan pascakerja lain tanpa pendanaan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan entitas anak.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

**x. Employee Benefits**

Post-employment Benefits

The Company and its subsidiaries have established a defined benefit pension plan covering all of their eligible permanent employees. The Company and its subsidiaries also provide other unfunded defined post-employment benefit plans for their qualifying employees based on the Company and its subsidiaries' policies.

The liability recognized in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the *Projected Unit Credit Method*. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of *Government Bonds* (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi.

Imbalan Kerja Jangka Panjang

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan *Projected Unit Credit*. Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Perusahaan dan entitas anak mengakui keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi. Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain periode terjadinya.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti.

**y. Provisi**

Provisi diakui ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan dan entitas anak diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pertimbangan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

*Past-service costs are recognized immediately in profit or loss.*

Long-term Benefits

*Long-term benefits are determined using the Projected Unit Credit Method. Past service costs are recognized immediately in profit or loss. The Company and its subsidiaries recognized gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan when the curtailment or settlement occurs. The gain or loss on a curtailment or settlement of a defined benefit plan is recognized in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.*

*Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged to other comprehensive income in the periode in which they occur.*

*The long-term employee benefits liabilities recognized in the consolidated statement of financial position represents the present value of the defined benefit obligation.*

**y. Provisions**

*Provisions are recognized when the Company and its subsidiaries have a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event and it is probable that the Company and its subsidiaries will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.*

*The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

**z. Pajak Penghasilan**

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laporan laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal atau kombinasi bisnis. Dalam kasus kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Untuk pendapatan yang menjadi subjek pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui dan disajikan dalam sebagai bagian dari akun beban operasional pada tahun berjalan dikarenakan pajak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang

*When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.*

**z. Income Tax**

*Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.*

*Current and deferred taxes are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.*

*For income which is subject to final tax, tax expenses are recognized proportionally with the accounting revenue recognized and presented as part of the operating expenses account in the current year as such tax does not satisfy the criteria of income tax.*

*Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amounts already paid in respect of current and prior periods exceed the amounts due for those periods, the excess shall be recognized as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

*For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a) pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

*substantively enacted by the end of the reporting period.*

*Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carry forward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.*

*A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:*

- a) the initial recognition of goodwill; or*
- b) the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

*Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the consolidated financial statement carrying amounts of assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.*

*Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan dan entitas anak ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus, jika dan hanya jika, ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan ketika liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Perusahaan dan entitas anak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

**aa. Aset Donasi dari Pemerintah**

Aset donasi dari Pemerintah, dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham Perusahaan, diakui sebagai transaksi ekuitas dengan pemegang saham. Aset yang didonasikan tersebut dicatat sesuai dengan nilai transaksi yang telah disepakati dengan Pemerintah. Perusahaan mencatat aset donasi dari Pemerintah sebagai penambahan aset tetap dan peningkatan tambahan modal disetor oleh pemegang saham.

*The measurement of deferred tax assets and deferred tax liabilities reflects the consequences that would follow from the manner in which the Company and its subsidiaries expect, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.*

*The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.*

*Deferred tax assets and liabilities are offset, if and only if, when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority and the Company and its subsidiaries intend to settle their current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.*

**aa. Government Contributed Assets**

*Assets contributed by the Government, in their capacity as a shareholder of the Company, are accounted for as an equity transaction with the shareholder. The assets are recorded at the transaction costs agreed with the Government. The Company records the Government contributed asset as an addition to property, plant and equipment with a corresponding increase to additional payment in capital by the shareholder.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**bb. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak**

Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui pada saat Surat Keterangan Pengampunan Pajak ("SKPP") diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan tidak diakui secara neto (saling hapus). Selisih antara Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui sebagai Tambahan Modal Disetor.

Aset Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai yang disetujui dalam SKPP.

Liabilitas Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai kas dan setara kas yang masih harus dibayarkan oleh Perusahaan sesuai kewajiban kontraktual atas perolehan Aset Pengampunan Pajak.

Uang tebusan yang dibayarkan oleh Perusahaan untuk memperoleh pengampunan pajak diakui sebagai beban pada periode dimana SKPP diterima oleh Perusahaan.

Setelah pengakuan awal, Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak diukur sesuai dengan SAK yang relevan sesuai dengan klasifikasi masing-masing Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak.

Sehubungan dengan Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak yang diakui, Perusahaan dan entitas anak telah mengungkapkan dalam laporan keuangannya:

- a. Tanggal SKPP;
- b. Jumlah yang diakui sebagai Aset Pengampunan Pajak sesuai SKPP; dan
- c. Jumlah yang diakui sebagai Liabilitas Pengampunan Pajak.

**cc. Laba per Saham**

Labanya per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

**bb. Tax Amnesty Assets and Liabilities**

*Tax Amnesty Assets and Liabilities are recognized upon the issuance of Tax Amnesty Approval Letter ("TAAL") by the Minister of Finance of Republic of Indonesia, and they are not recognized as net amount (offset). The difference between Tax Amnesty Assets and Tax Amnesty Liabilities are recognized as Additional Paid-in Capital.*

*Tax Amnesty Assets are initially recognized at the value stated in TAAL.*

*Tax Amnesty Liabilities are initially measured at the amount of cash or cash equivalents to be settled by the Company according to the contractual obligation with respect to the acquisition of respective Tax Amnesty Assets.*

*The compensation paid by the Company to obtain the tax amnesty is recognized as expense in the period in which the Company receives TAAL.*

*After initial recognition, Tax Amnesty Assets and Liabilities are measured in accordance with respective relevant FAS according to the classification of each Tax Amnesty Assets and Liabilities.*

*With respect to Tax Amnesty Assets and Liabilities recognized, the Company and its subsidiaries have disclosed the following in its financial statements:*

- a. The date of TAAL;
- b. Amount recognized as Tax Amnesty Assets in accordance with TAAL; and
- c. Amount recognized as Tax Amnesty Liabilities.

**cc. Earnings per Share**

*Basic earnings per share are computed by dividing income for the year attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Laba per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang dimiliki perusahaan. Perusahaan tidak memiliki efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

*Diluted earnings per share are calculated by adjusting the weighted average number of ordinary shares outstanding to assume conversion of all dilutive potential ordinary shares owned by the Company. The Company does not have any dilutive potential ordinary shares.*

**dd. Informasi Segmen**

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan dan entitas anak yang secara regular direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

**dd. Segment Information**

*Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Company and its subsidiaries and are regularly reviewed by the "chief operating decision maker" in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.*

Segmen yang dilaporkan adalah segmen operasi individual atau suatu grup segmen operasi yang informasi segmennya harus dilaporkan secara terpisah. Penggabungan satu atau lebih segmen operasi diperbolehkan ketika memenuhi kriteria tertentu, kriteria utama yang harus dipenuhi adalah segmen operasi harus memiliki karakteristik ekonomis yang sejenis (contoh margin keuntungan, persebaran, tingkat pertumbuhan penjualan, dll). Pertimbangan signifikan diperlukan ketika menentukan penggabungan segmen operasi.

*Reportable segments are individual operating segments or a group of operating segments for which segment information must be separately reported. Aggregation of one or more operating segments into a single reportable segment is permitted (but not required) where certain conditions are met, the principal condition being that the operating segments should have similar economic characteristics (for example, profit margin, spreads, sales growth rates, etc). Whether multiple operating segments can be aggregated into a single reportable segment is a matter of significant judgement.*

Wilayah Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Tengah dan Jawa Bagian Timur digabungkan sebagai satu segmen operasi dikarenakan memiliki karakteristik konsumen yang sejenis.

*West Part of Java Area, Central Part of Java Area and East Part of Java Area is aggregated as a single reportable segment due to similarity the consumer's characteristic.*

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka dikategorikan berdasarkan lokasi geografis di mana penjualan tenaga listrik dilakukan.

*Information reported to the chief operating decision maker for the purposes of resource allocation and assessment of their performance is grouped based on the geographical location of where electricity sales are made.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. Pertimbangan Kritis Akuntansi dan Estimasi  
Akuntansi yang Signifikan**

Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diharuskan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang nilai aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari direviu secara berkelanjutan. Revisi terhadap estimasi akuntansi akan diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi, jika revisi tersebut hanya berpengaruh terhadap periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode berikutnya jika revisi tersebut mempengaruhi periode tersebut.

**Pertimbangan Kritis dalam Penerapan  
Kebijakan Akuntansi**

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, Perusahaan dan entitas anak telah menentukan hal-hal berikut yang memerlukan pertimbangan signifikan:

Nilai Wajar Pembangkit Listrik Di Dalam Sewa  
Pembiayaan

Sejumlah aset tetap dicatat berdasarkan sewa pembiayaan menurut PSAK 30. Pada saat dimulainya sewa, Perusahaan mengakui aset dan liabilitas sewa pembiayaan sebesar nilai wajar pembangkit listrik yang disewa atau, jika lebih rendah, nilai kini dari pembayaran sewa minimum, yang ditentukan pada awal masa sewa.

Perusahaan menetapkan nilai wajar dari pembangkit listrik yang disewa dengan menerapkan teknik penilaian yang sesuai dan asumsi-asumsi yang memadai, termasuk estimasi biaya yang perlu dikeluarkan untuk membangun pembangkit listrik terkait, suku bunga implisit dalam sewa dan nilai sisa aset pada masa akhir kontrak. Perubahan-perubahan selanjutnya atas asumsi yang

**4. Critical Accounting Judgments and  
Significant Accounting Estimates**

*In the application of the Company and its subsidiaries' accounting policies, which are described in Note 3, the management is required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.*

*The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.*

**Critical Judgments in Applying Accounting  
Policies**

*In the process of applying the accounting policies described in Note 3, the Company and its subsidiaries have identified the following matters under which significant judgments are made:*

Fair Value of Power Plants Held Under Finance  
Leases

*A number of property, plant and equipment are recorded based on finance lease arrangement, in accordance with SFAS 30. At the commencement of the lease, the Company recognizes the finance leased asset and liability at an amount equal to the fair value of the power plant or, if lower, the present value of the minimum lease payments, determined at the inception of the lease.*

*The Company determined the fair value of the finance leased power plant by applying the appropriate valuation techniques and assumptions, including the expected cost to build the power plant, the implicit interest rate of the lease and the residual value of the asset at the end of the contract. Any subsequent changes to the assumptions used to measure fair value at inception do not affect the*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

digunakan untuk menentukan nilai wajar pada awal masa sewa tidak akan merubah nilai aset pembiayaan di masa mendatang.

Biaya Penyambungan Pelanggan

Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan semua fakta dan kondisi yang relevan untuk menentukan pengakuan pendapatan terkait biaya penyambungan pelanggan. Untuk itu, Perusahaan perlu menentukan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerimaan biaya penyambungan dari pelanggan.

Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan fakta bahwa kewajiban untuk menyediakan tenaga listrik secara berkelanjutan diatur dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan tahun 2009 dan semua pelanggan dikenakan tarif listrik yang telah ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk penggunaan tenaga listrik (terlepas dari jumlah biaya penyambungan yang dibayarkan). Oleh karena itu, penerimaan biaya penyambungan tidak menimbulkan kewajiban terpisah bagi Perusahaan dan entitas anak untuk menyediakan akses listrik secara berkelanjutan kepada pelanggan.

Perusahaan dan entitas anak menyimpulkan bahwa menghubungkan pelanggan ke jaringan listrik Perusahaan merupakan jasa yang diberikan untuk mendapatkan biaya penyambungan dari pelanggan. Jasa koneksi diserahkan kepada pelanggan dan merepresentasikan nilai yang berdiri sendiri (*stand-alone value*) untuk pelanggan tersebut. Sebagai hasilnya, Perusahaan dan entitas anak mencatat biaya penyambungan yang diterima dari pelanggan untuk memperoleh atau membangun aset tetap yang digunakan untuk menghubungkan pelanggan ke jaringan listrik Perusahaan sebagai pendapatan pada saat Perusahaan menyelesaikan kewajiban atas jasa koneksi terkait.

Kepentingan dalam Pengaturan Bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki pengendalian bersama, yang membutuhkan penilaian mengenai aktivitas yang relevan dan ketika keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Perusahaan dan entitas

*subsequent measurement amount of the leased asset.*

Revenues from Customers' Connection Fees

*The Company and its subsidiaries have considered all relevant facts and circumstances to determine the exact timing of revenue recognition pertaining to connection fees paid by customers. To do so, the Company needs to determine what performance obligations it has as a result of receiving connection fees.*

*The Company and its subsidiaries considered the facts that the obligation to provide ongoing supply of electricity is regulated by the 2009 Electricity Law and that the Company charges all customers the same regulated tariff for electricity usage prescribed by the Government of Republic of Indonesia (regardless of the amount of connection fees paid by the customers). Therefore, the receipt of connection fees does not create a separate performance obligation for the Company and its subsidiaries to provide ongoing electricity supply to its customers.*

*The Company and its subsidiaries conclude that connecting the customers to its network is the only service to be delivered in exchange for the connection fees. A service connection is delivered to the customer and represents stand-alone value for that customer. Consequently, the Company and its subsidiaries recognize connection fees received from customers that are used to construct or acquire property, plant and equipment to connect the customers to its network as revenues when the Company completes the connection services.*

Interest in Joint Arrangements

*Judgement is required to determine when the Company and its subsidiaries have joint control, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent. The Company and its subsidiaries have determined that the relevant activities for*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

*For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

anak menentukan bahwa aktivitas yang relevan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berkaitan dengan operasi dan pengambilan keputusan dalam pengaturan tersebut.

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai pengendalian bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian pengaturan tersebut mengharuskan Perusahaan dan entitas anak untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut. Secara khusus, Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan:

- Struktur dari pengaturan bersama - apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah
- Ketika pengaturan tersebut terstruktur melalui kendaraan terpisah, Perusahaan dan entitas anak juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:
  - Bentuk legal dari kendaraan terpisah;
  - Persyaratan dari perjanjian kontraktual; dan
  - Fakta dan kondisi lain (ketika relevan).

Penilaian ini sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan dan kesimpulan yang berbeda mengenai pengendalian bersama dan apakah pengaturan tersebut merupakan operasi bersama atau ventura bersama, dapat memiliki dampak material terhadap akuntansi.

Perusahaan dan entitas anak memiliki pengaturan bersama yang terstruktur melalui ventura bersama, yaitu PT Rajamandala Electric Power, PT Perta Daya Gas, PT Bajradaya Sentranusa, PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali, PT Bukit Pembangkit Innovative, PT Rekind Daya Mamuju, PT Unelec Indonesia, PT Crompton Prima Switchgear Indonesia, PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali, PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali, PT GCL Indotenaga, PT North Sumatera Hydro Energy dan PT Indo Raya Tenaga. Struktur dan persyaratan dari perjanjian kontraktual mengindikasikan bahwa Perusahaan dan entitas anak memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama tersebut. Perusahaan dan entitas anak menilai fakta dan kondisi lain yang berkaitan dengan

*its joint arrangements are those relating to the operating and capital decisions of the arrangement.*

*Judgement is also required to classify a joint arrangement as either a joint operation or a joint venture. Classifying the arrangement requires the Company and its subsidiaries to assess its rights and obligations arising from the arrangement. Specifically, it considers:*

- *The structure of the joint arrangement - whether it is structured through a separate vehicle*
- *When the arrangement is structured through a separate vehicle, the Company and its subsidiaries also considers the rights and obligations arising from:*
  - *The legal form of the separate vehicle;*
  - *The terms of the contractual arrangement; and*
  - *Other facts and circumstances (when relevant).*

*This assessment often requires significant judgement and a different conclusion on joint control and also whether the arrangement is a joint operation or a joint venture, may materially impact the accounting.*

*The Company and its subsidiaries have joint arrangements which are structured through joint ventures, namely PT Rajamandala Electric Power, PT Perta Daya Gas, PT Bajradaya Sentranusa, PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali, PT Bukit Pembangkit Innovative, PT Rekind Daya Mamuju, PT Unelec Indonesia, PT Crompton Prima Switchgear Indonesia, PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali, PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali, PT GCL Indotenaga, PT North Sumatera Hydro Energy and PT Indo Raya Tenaga. These structure and the terms of the contractual arrangement indicate that the Company and its subsidiaries have rights to the net assets of the arrangements. The Company and its subsidiaries also assessed the other facts and circumstances relating to these*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

pengaturan ini dan kesimpulan final dari penilaian yang dilakukan adalah pengaturan tersebut merupakan ventura bersama (Catatan 8).

**Sumber Ketidakpastian Estimasi**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Rugi Penurunan Nilai Pinjaman Diberikan dan Piutang

Perusahaan dan entitas anak menilai penurunan nilai pinjaman diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direviu secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya. Nilai tercatat pinjaman diberikan dan piutang diungkapkan dalam Catatan 14 dan 16.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap dan Properti Investasi

Nilai tercatat aset tetap dan properti investasi diungkapkan dalam Catatan 6 dan 7.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tetap.

Nilai Wajar Aset Tetap dan Properti Investasi yang Menggunakan Model Revaluasi

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan dan entitas anak melakukan perubahan kebijakan akuntansi dari model biaya menjadi model revaluasi untuk kelas aset tertentu. Pelaksanaan revaluasi aset tetap tersebut dilakukan oleh penilai publik independen.

*arrangements and the final conclusions were that the arrangement was joint ventures (Note 8).*

**Sources of Estimation Uncertainty**

*The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting period, which have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are discussed below:*

Impairment Loss on Loans and Receivables

*The Company and its subsidiaries assess their loans and receivables for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes a judgement as to whether there is an objective evidence that the loss event has occurred. Management also makes judgement as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss. The carrying amount of loans and receivables are disclosed in Notes 14 and 16.*

Estimated Useful Lives of Property, Plant and Equipment and Investment Properties

*The carrying amounts of property, plant and equipment and investment properties are disclosed in Notes 6 and 7, respectively.*

*A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would affect the recorded depreciation expense and the carrying values of property, plant and equipment.*

Fair Value of Property, Plant and Equipment and Investment Properties That Use Revaluation Model

*On December 31, 2015, the Company and its subsidiaries changed their accounting policy from cost model to revaluation model for certain class of assets. The property, plant and equipment revaluation was performed by an independent public valuer.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

*For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

Dalam proses penilaian, manajemen, dengan bantuan penilai publik independen, menentukan data dan asumsi, menelaah metode penilaian serta berdiskusi dengan penilai. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam melakukan revaluasi tergantung pada kelas aset. Walaupun data dan asumsi Perusahaan dan entitas anak dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada data input atau asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap nilai aset yang menggunakan model revaluasi.

Rincian dari pendekatan dan data input signifikan yang digunakan dalam melakukan revaluasi aset tetap dan properti investasi diungkapkan masing-masing dalam Catatan 6 dan 7.

Imbalan Pascakerja

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Perusahaan dan entitas anak diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Perusahaan dan entitas anak dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pascakerja Perusahaan dan entitas anak.

Asumsi yang digunakan untuk perhitungan liabilitas imbalan pascakerja diungkapkan dalam Catatan 49.

Pajak Penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Perusahaan dan entitas anak memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasian. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP"). Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak.

*Management, with the assistance of independent public valuer, determines the data inputs and assumption, assesses valuation method and hold discussions with the valuers as part of the valuation process. The approaches and methods used in the revaluation depend on the assets class. While it is believed that the Company and its subsidiaries' data and assumptions are reasonable and appropriate, significant changes in data inputs or significant changes in assumptions may materially affect the value of assets that use revaluation model.*

*Detail of valuation approach and significant data input used in the revaluation property, plant and equipment and investment properties are disclosed in Notes 6 and 7, respectively.*

Post-employment Benefits

*The determination of the post-employment benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Company and its subsidiaries' assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and liabilities recorded in such future periods. While it is believed that the Company and its subsidiaries' assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the Company and its subsidiaries' post-employment benefit.*

*Assumptions used in the calculation of post-employment benefit are disclosed in Note 49.*

Income Taxes

*The calculations of income tax expense for the Company and its subsidiaries require judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgement and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxation ("DGT"). As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Perusahaan dan entitas anak, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal dan perbedaan temporer, diakui apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat penjualan dan biaya-biaya terkait yang terdapat risiko ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi tersebut akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

*resolution of tax positions taken by the Company and its subsidiaries, through negotiations with the relevant tax authorities can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.*

*Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward and temporary differences, are recognized only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. The assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by management's estimates of the expected sales level and the associated costs which are subject to risk and uncertainty and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.*

**5. Entitas Anak**

Perusahaan memiliki saham entitas anak baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

**5. Subsidiaries**

*The Company has ownership interests, directly or indirectly, in the following subsidiaries:*

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase pemilikan/ Percentage of ownership		Tahun operasi komersial/ Year of commercial operation	Jumlah aset sebelum eliminasi **)/ Total assets before elimination **)	
			2017 %	2016 %		2017 Rp	2016 Rp
PT Indonesia Power (IP) dan entitas anak/ and subsidiaries	Jakarta	Pembangkitan tenaga listrik/ Power generation	99.99	99.99	1995	218,339	220,755
PT Cogindo DayaBersama (CDB) *	Jakarta	Cogeneration, pemasok energi, jasa pelayanan dan manajemen/ Cogeneration, energy distribution, energy service and management	99.99	99.99	1999	1,043	915
PT Artha Daya Coalindo (ADC) *	Jakarta	Perdagangan batu bara/ Coal trading	80.00	80.00	1998	378	182
PT Indo Ridlatama Power (IRP) *	Kutai	Pembangkitan tenaga listrik/ Power generation	90.00	93.96	***)	1,187	607
PT Indo Tenaga Hijau (ITH) *	Jakarta	Pengembangan energi baru dan terbarukan/ Development of new and renewable energy	95.21	95.21	***)	82	84
PT Putra Indotena (PIT) *	Jakarta	Ketenagalistrikan dan energi/ Electricity and energy	99.99	99.99	2016	711	417

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase pemilikan/ Percentage of ownership		Tahun operasi komersial/ Year of commercial operation	Jumlah aset sebelum eliminasi **)/ Total assets before elimination **)	
			2017 %	2016 %		2017 Rp	2016 Rp
PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) dan entitas anak/ and subsidiaries	Surabaya	Pembangkitan tenaga listrik/ Power generation	99.99	99.99	1995	193,321	191,738
PT PJB Services (PJBS) *) dan entitas anak/ and subsidiaries	Surabaya	Jasa/ Service	98.00	98.00	2001	998	985
PT Mitra Karya Prima (MKP) *)	Surabaya	Jasa/ Service	92.00	92.00	2013	89	69
PT Sertifikasi Kompetensi Pembangkitan Tenaga Listrik *)	Jakarta	Jasa/ Service	95.00	95.00	2015	4	2
PT Rekadaya Elekrika (RE) *) dan entitas anak/ and subsidiary	Jakarta	Jasa listrik dan enjiniring/ Electricity and engineering	98.90	98.90	2004	1,130	981
PT Rekadaya Elektrika Consult (REC) *)	Jakarta	Supervisi dan konsultasi/ Supervision and consultation	99.80	99.80	2011	147	87
PT Navigat Innovative Indonesia (NII) *)	Palembang	Perdagangan, konstruksi, pertambangan dan pertanian/ Trading, construction, mining and agriculture	72.97	72.97	***)	287	220
PT PJB Investasi (PJI) *)	Jakarta	Ketenagalistrikan/ Electricity	99.99	99.99	2016	3,036	327
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam) dan entitas anak/ and subsidiary	Batam	Penyedia tenaga listrik/ Electricity supplier	99.99	99.99	2000	19,027	16,138
PT Pelayanan Energi Batam (PEB)	Batam	Pembangunan pipa gas dan energi lainnya/ Construction of gas pipeline and other energy sector	99.99	99.90	2016	845	821
PT Indonesia Comnets Plus (ICON)	Jakarta	Jasa penyedia jaringan telekomunikasi/ Telecommunication provider	99.99	99.99	2000	2,606	2,296
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLNE) dan entitas anak/ and subsidiary	Jakarta	Jasa enjiniring, pengadaan dan konstruksi/ Engineering, procurement and construction	99.90	99.90	2003	1,030	878
PT Prima Power Nusantara (PPN)	Jakarta	Jasa enjiniring, pengadaan dan konstruksi/ Engineering, procurement and construction	99.99	99.99	2017	117	45
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PLN Tarakan) dan entitas anak/ and subsidiary	Tarakan	Jasa pemeliharaan dan operasi/ Maintenance and operation	99.97	99.97	2004	304	350
PT Paguntaka Cahaya Nusantara (PCN) *)	Balikpapan	Jasa pemeliharaan dan operasi/ Maintenance and operation	99.96	--	***)	2	--
Majapahit Holding B.V. (MH) dan entitas anak/ and its subsidiary	Belanda/ The Netherlands	Lembaga keuangan/ Finance	100.00	100.00	2006	35,524	41,896
Majapahit Finance B.V. (MF) *)	Belanda/ The Netherlands	Lembaga keuangan/ Finance	100.00	100.00	2006	34,109	33,827
PT PLN Batubara (PLN Batubara) dan entitas anak/ and subsidiary	Jakarta	Perdagangan batu bara/ Coal trading	99.99	99.99	2009	4,424	1,265
PT Jambi Prima Coal (JPC)	Jambi	Pertambangan batu bara/ Coal mining	60.00	--	2010	869	--
PT Pengembang Listrik Nasional Gas Dan Geothermal (PLN Gas & Geothermal)	Jakarta	Pembangkitan tenaga listrik/ Power generation	99.99	99.99	2010	17	21
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAG)	Jakarta	Pelayaran/ Shipping	100.00	100.00	2011	1,472	1,257

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Tahun operasi komersial/ Year of commercial operation	Jumlah aset sebelum eliminasi **)/ Total assets before elimination **)	
			2017 %	2016 %		2017 Rp	2016 Rp
PT PBM Adhiguna Putera (PBM AP) ****)	Jakarta	Pelayaran/ Shipping	24.95	99.95	1987	--	147
PT Haleyora Power (HP) dan entitas anak/ and subsidiary	Jakarta	Jasa pemeliharaan dan operasi/ Maintenance and operation	99.99	99.99	2013	739	586
PT Haleyora Powerindo (HPI) *)	Jakarta	Jasa/ Service	90.00	90.00	2013	312	311
PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLN SC) *)	Jakarta	Perdagangan barang dan jasa enjiring supply chain dan konsultasi dibidang ketenagalistrikan/ Operation and services trading, engineering supply chain and consultation in the electricity sector	100.00	--	***)	151	--

\*) Kepemilikan tidak langsung/ Indirect ownership

\*\*\*) Dalam miliaran Rupiah/ Stated in billions of Rupiah

\*\*\*\*) Dalam tahap pengembangan/ Under development stage

\*\*\*\*\*) Berubah status menjadi asosiasi/ Status changed into associate

Pada tahun 2017, berdasarkan akta No. 73 tanggal 31 Juli 2017 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta, PT Pengembang Listrik Nasional Geothermal (PLN Geothermal) berganti nama menjadi PT Pengembang Listrik Nasional Gas dan Geothermal (PLN Gas & Geothermal) serta menambah lingkup usahanya di bidang usaha pengelolaan gas beserta infrastrukturnya khususnya yang berkaitan dengan *midstream gas*.

*In 2017, by notarial deed No. 73 dated July 31, 2017 of Muhammad Hanafi, S.H., notary in Jakarta, PT Pengembang Listrik Nasional Geothermal (PLN Geothermal) changed its name to PT Pengembang Listrik Nasional Gas dan Geothermal (PLN Gas & Geothermal) and expand the scope of its business in gas management along with its infrastructure especially related to midstream gas.*

Pada tanggal 16 Juni 2017, PJB dan IP, entitas anak, mendirikan PLN SC dengan penyertaan saham masing-masing sebesar Rp76.500 dan Rp73.500 yang merupakan 51% dan 49% kepemilikan saham di PLN SC.

*In June 16, 2017, PJB and IP, subsidiaries, established PLN SC with share ownership amounted to Rp76,500 and Rp73,500, respectively which are 51% and 49% share ownership in PLN SC.*

Pada tahun 2017, PLN Batubara, entitas anak, melakukan akuisisi 60% saham JPC dengan biaya perolehan sebesar Rp521.471.

*In 2017, PLN Batubara, a subsidiary, acquired 60% equity ownership of JPC at acquisition cost of Rp521,471.*

Pada tahun 2017, jenis usaha PLN Tarakan, entitas anak, berubah menjadi perusahaan jasa pemeliharaan dan operasi.

*In 2017, business nature of PLN Tarakan, a subsidiary, has changed to become a maintenance and operation company.*

Pada tahun 2017, PLN Tarakan, entitas anak, melakukan penyertaan saham di PCN sebesar Rp2.499 atau setara 99,96% saham PCN.

*In 2017, PLN Tarakan, a subsidiary, made a share investment to PCN amounted to Rp2,499 equivalent of 99.96% shares in PCN.*

Pada tahun 2016, IP, entitas anak, melakukan penambahan penyertaan saham di IRP sebesar Rp135.000 yang meningkatkan modal disetor IP di IRP menjadi Rp337.035 atau setara 93,96% saham IRP.

*In 2016, IP, a subsidiary, increased their additional shares to IRP amounted Rp135,000 which increases the IP's paid up capital in IRP to become Rp337,035 equivalent of 93.96% shares in IRP.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**(Continued)**

*For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

Pada tahun 2017, IP, entitas anak, dan PT Ridlatama Bangun Mandiri, pihak non-pengendali, melakukan penambahan penyertaan saham di IRP masing-masing sebesar Rp22.965 dan Rp18.333. Penambahan penyertaan saham ini mengubah kepemilikan IP di IRP menjadi 90%.

Pada tahun 2016, IP, entitas anak, melakukan penambahan penyertaan saham di ADC sebesar Rp15.000 yang meningkatkan modal disetor IP di ADC menjadi Rp24.000 atau setara 80% saham ADC.

Pada tahun 2017, berdasarkan akta No. 33 tanggal 7 November 2017 dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. notaris di Jakarta, PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (TPGP), entitas anak IP, berganti nama menjadi PT Indo Tenaga Hijau (ITH) serta menambah lingkup usahanya di bidang perusahaan energi baru dan/ atau terbarukan.

Pada tahun 2017, IP, entitas anak, menambah penyertaan saham di PIT sebesar Rp278.957 tanpa mengubah kepemilikan.

Pada tahun 2016, PLNE, entitas anak, melakukan penyertaan saham di PPN sebesar Rp15.000 atau setara 99,99% saham PPN.

Pada tanggal 2 Mei 2017, BAG, entitas anak, kehilangan pengendalian atas PBM AP disebabkan penjualan 75% saham BAG di PBM AP kepada Dana Pensiun PLN ("DP PLN") dengan nilai pelepasan sebesar Rp54.250 sehingga PBM AP berubah status menjadi asosiasi.

*In 2017, IP, a subsidiary, and PT Ridlatama Bangun Mandiri, non-controlling party, increased their share ownership in IRP amounted to Rp22,965 and Rp18,333, respectively. Increased in shares of ownership changed IP's percentage of ownership to 90%.*

*In 2016, IP, a subsidiary, increased their additional shares to ADC amounted Rp15,000 which increases the IP's paid up capital in ADC to become Rp24,000 equivalent of 80% shares in ADC.*

*In 2017, by notarial deed No. 33 dated November 7, 2017 of Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. notary in Jakarta, PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (TPGP), subsidiary of IP, changed its name to PT Indo Tenaga Hijau (ITH) and expand the scope of its business in new and/or renewable energy.*

*In 2017, IP, a subsidiary, increased additional shares to PIT amounted to Rp278,957 without changes ownership.*

*In 2016, PLNE, a subsidiary, made a share investment to PPN amounted to Rp15,000 equivalent of 99.99% shares in PPN.*

*On May 2, 2017, BAG, a subsidiary, lost its control over PBM AP due to sale of 75% of BAG's shares in PBM AP to Dana Pensiun PLN ("DP PLN") with proceed amounted to Rp54,250 which changed PBM AP status to associate.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**6. Aset Tetap**

**6. Property, Plant and Equipment**

	2017				Saldo akhir/ Ending balance Rp	
	Saldo awal/ Beginning balance Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deductions Rp	Reklasifikasi/ Reclassifications Rp		
<b>Biaya perolehan</b>						<b>At cost</b>
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct acquisitions</u>
Tanah	122,946,829	296,727	--	(4,248,087)	118,995,469	Land
Bangunan umum, waduk dan prasarana	53,221,708	573,948	--	8,063,534	61,859,190	Buildings, reservoir and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	601,857,994	1,404,228	--	4,021,685	607,283,907	Installation and power plant
Perlengkapan transmisi	94,212,569	217,711	--	7,205,652	101,635,932	Transmission equipment
Perlengkapan distribusi	156,955,477	917,265	--	17,266,559	175,139,301	Distribution equipment
Perlengkapan umum	10,734,882	316,985	--	1,192,318	12,244,185	General equipment
Kendaraan bermotor	1,195,896	82,865	--	241,021	1,519,782	Motor vehicles
Material cadangan utama	1,017,197	49,161	--	173,732	1,240,090	Major spare parts
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	3,248,184	79,566	--	1,022,287	4,350,037	Telecommunication and data processing equipment used for electricity supply
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	1,886,524	275	--	205,100	2,091,899	Others telecommunication and data processing equipment
Kapal dan perlengkapan	1,146,053	20,865	--	--	1,166,918	Vessels and equipment
Subjumlah	<u>1,048,423,313</u>	<u>3,959,596</u>	<u>--</u>	<u>35,143,801</u>	<u>1,087,526,710</u>	Subtotal
<u>Aset sewaan</u>						<u>Leased assets</u>
Tanah	47,400	228,955	--	--	276,355	Land
Instalasi dan mesin pembangkit	37,921,931	3,403,799	--	--	41,325,730	Installation and power plant
Subjumlah	<u>37,969,331</u>	<u>3,632,754</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>41,602,085</u>	Subtotal
Pekerjaan dalam pelaksanaan Aset tidak digunakan dalam operasi	102,994,657	89,059,011	--	(46,757,174)	145,296,494	Construction in progress Assets not used in operation
	<u>8,559,805</u>	<u>--</u>	<u>(872,792)</u>	<u>8,624,872</u>	<u>16,311,885</u>	
Jumlah	<u>1,197,947,106</u>	<u>96,651,361</u>	<u>(872,792)</u>	<u>(2,988,501)</u>	<u>1,290,737,174</u>	Total
<b>Akumulasi penyusutan/ akumulasi penurunan nilai</b>						<b>Accumulated depreciation/ accumulated impairment</b>
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct acquisitions</u>
Bangunan umum, waduk dan prasarana	2,291,307	1,640,227	--	(234,921)	3,696,613	Buildings, reservoir and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	15,317,088	16,519,913	--	134,793	31,971,794	Installation and power plant
Perlengkapan transmisi	2,341,006	2,475,531	--	5,158	4,821,695	Transmission equipment
Perlengkapan distribusi	4,311,364	4,865,522	--	(33,467)	9,143,419	Distribution equipment
Perlengkapan umum	8,326,941	1,076,274	--	57,427	9,460,642	General equipment
Kendaraan bermotor	953,985	119,008	--	(12,100)	1,060,893	Motor vehicles
Material cadangan utama	155,689	40,634	--	(29,482)	166,841	Major spare parts
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	543,804	443,054	--	18,206	1,005,064	Telecommunication and data processing equipment used for electricity supply
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	1,259,180	194,094	--	1,536	1,454,810	Others telecommunication and data processing equipment
Kapal dan perlengkapan	291,820	77,838	--	--	369,658	Vessels and equipment
Subjumlah	<u>35,792,184</u>	<u>27,452,095</u>	<u>--</u>	<u>(92,850)</u>	<u>63,151,429</u>	Subtotal
<u>Aset sewaan</u>						<u>Leased assets</u>
Instalasi dan mesin pembangkit	10,106,163	1,725,102	--	--	11,831,265	Installation and power plant
Aset tidak digunakan dalam operasi	6,519,232	964,343	(871,177)	4,573,653	11,186,051	Assets not used in operation
Jumlah	<u>52,417,579</u>	<u>30,141,540</u>	<u>(871,177)</u>	<u>4,480,803</u>	<u>86,168,745</u>	Total
<b>Jumlah Tercatat</b>	<u><b>1,145,529,527</b></u>				<u><b>1,204,568,429</b></u>	<b>Net Carrying Value</b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2016							
	Saldo awal/ Beginning balance	Penyesuaian penerapan/ Application adjustment POJK No.6	Saldo awal d disesuaikan/ Adjusted beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
<b>Biaya perolehan/ revaluasi:</b>								<b>Acquisition cost/ revaluation:</b>
<b>Pemilikan langsung</b>								<b>Direct acquisitions</b>
Tanah	119,569,383	--	119,569,383	890,624	--	2,486,822	122,946,829	Land
Bangunan umum, w aduk dan prasarana	49,456,429	--	49,456,429	115,018	--	3,650,261	53,221,708	Buildings, reservoir and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	572,134,451	--	572,134,451	1,923,345	--	27,800,198	601,857,994	Installation and power plant
Perlengkapan transmisi	86,701,829	--	86,701,829	120,233	--	7,390,507	94,212,569	Transmission equipment
Perlengkapan distribusi	141,446,484	--	141,446,484	2,845,940	--	12,663,053	156,955,477	Distribution equipment
Perlengkapan umum	9,848,947	--	9,848,947	269,422	--	616,513	10,734,882	General equipment
Kendaraan bermotor	841,123	--	841,123	44,662	--	310,111	1,195,896	Motor vehicles
Material cadangan utama	667,054	--	667,054	274,874	--	75,269	1,017,197	Major spare parts
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	2,603,090	--	2,603,090	26,345	--	618,749	3,248,184	Telecommunication and data processing equipment used for electricity supply
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	1,646,470	--	1,646,470	915	--	239,139	1,886,524	Other telecommunication and data processing equipment
Kapal dan perlengkapan	1,413,716	--	1,413,716	11,342	--	(279,005)	1,146,053	Vessels and equipment
Subjumlah	986,328,976	--	986,328,976	6,522,720	--	55,571,617	1,048,423,313	Subtotal
<b>Aset sewaan</b>								<b>Leased assets</b>
Tanah	48,388	--	48,388	--	--	(988)	47,400	Land
Instalasi dan mesin pembangkit	144,432,130	(103,659,494)	40,772,636	--	--	(2,850,705)	37,921,931	Installation and power plant
Subjumlah	144,480,518	(103,659,494)	40,821,024	--	--	(2,851,693)	37,969,331	Subtotal
Pekerjaan dalam pelaksanaan Aset tidak digunakan dalam operasi	104,984,687	--	104,984,687	51,324,191	--	(53,314,221)	102,994,657	Construction in progress Assets not used in operation
Jumlah	1,243,849,421	(103,659,494)	1,140,189,927	57,846,911	(467,359)	377,627	1,197,947,106	Total
<b>Akumulasi penyusutan</b>								<b>Accumulated depreciation</b>
<b>Pemilikan langsung</b>								<b>Direct acquisitions</b>
Bangunan umum, w aduk dan prasarana	--	--	--	2,029,031	--	262,276	2,291,307	Buildings, reservoir and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	--	--	--	15,511,262	--	(194,174)	15,317,088	Installation and power plant
Perlengkapan transmisi	--	--	--	2,314,178	--	26,828	2,341,006	Transmission equipment
Perlengkapan distribusi	--	--	--	4,313,743	--	(2,379)	4,311,364	Distribution equipment
Perlengkapan umum	7,433,553	--	7,433,553	975,895	--	(82,507)	8,326,941	General equipment
Kendaraan bermotor	759,513	--	759,513	107,290	--	87,182	953,985	Motor vehicles
Material cadangan utama	--	--	--	77,316	--	78,373	155,689	Major spare parts
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	--	--	--	519,696	--	24,108	543,804	Telecommunication and data processing equipment used for electricity supply
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	1,043,768	--	1,043,768	185,555	--	29,857	1,259,180	Other telecommunication and data processing equipment
Kapal dan perlengkapan	287,944	--	287,944	90,269	--	(86,393)	291,820	Vessels and equipment
Subjumlah	9,524,778	--	9,524,778	26,124,235	--	143,171	35,792,184	Subtotal
<b>Aset sewaan</b>								<b>Leased assets</b>
Instalasi dan mesin pembangkit	39,529,187	(31,431,894)	8,097,293	1,404,427	--	604,443	10,106,163	Installation and power plant
Aset tidak digunakan dalam operasi	6,915,866	--	6,915,866	234,698	(338,501)	(292,831)	6,519,232	Assets not used in operation
Jumlah	55,969,831	(31,431,894)	24,537,937	27,763,360	(338,501)	454,783	52,417,579	Total
<b>Jumlah Tercatat</b>	<b>1,187,879,590</b>	<b>(72,227,600)</b>	<b>1,115,651,990</b>				<b>1,145,529,527</b>	<b>Net Carrying Value</b>

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	2017 Rp	2016 Rp	
Beban usaha	29,160,597	27,512,150	Operating expenses
Pekerjaan dalam pelaksanaan	16,600	16,512	Construction in progress
Beban lain-lain	964,343	234,698	Others
<b>Jumlah</b>	<b>30,141,540</b>	<b>27,763,360</b>	<b>Total</b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Perusahaan dan entitas anak memiliki beberapa bidang tanah dengan hak legal berupa Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan ("HGB"). Hak Pakai tidak mempunyai jangka waktu sedangkan HGB Perusahaan jatuh tempo antara tahun 2018 sampai dengan 2051, tetapi dapat diperpanjang. Perusahaan dan entitas anak juga mempunyai beberapa bidang tanah yang sedang dalam proses perpanjangan HGB dan pengurusan balik nama menjadi atas nama Perusahaan dan entitas anak.

Bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi, perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya serta kapal diasuransikan kepada beberapa perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia, pihak berelasi, sebagai penanggung utama, PT Asuransi Dayin Mitra Tbk dan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, terhadap risiko kebakaran dan kemungkinan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar US\$22.908.432.485 (setara dengan Rp310.363.443) dan Rp1.475.447 pada tanggal 31 Desember 2017. Aset sewaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap ("PLTU") Tanjung Jati B 4x660 MW diasuransikan kepada PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar JPY452.897.476.244 (setara dengan Rp54.446.610) dan US\$4.320.000 (setara dengan Rp58.527) pada tanggal 31 Desember 2017.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Perusahaan dan entitas anak tidak mengasuransikan aset tetap selain bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi, perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya serta kapal dan perlengkapan.

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah tercatat bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan sebesar Rp7.505.609.

*The Company and its subsidiaries own several pieces of land with Rights to Use and Building Use Rights ("HGB"). Rights to Use have no expiration date while HGB will expire from 2018 to 2051, but they are renewable by the Company. The Company and its subsidiaries also have several pieces of land rights, which are still in an extension process and in the process of transfer of certificate to the name of the Company and its subsidiaries.*

*Building, installation and power plant, transmission equipment, other telecommunication and data processing equipments and vessels were insured to several insurance companies, with PT Asuransi Jasa Indonesia, a related party, acting as the lead insurer, PT Asuransi Dayin Mitra Tbk and PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, against fire and other possible risks with insurance coverage of US\$22,908,432,485 (equivalent to Rp310,363,443) and Rp1,475,447 as of December 31, 2017. Leased assets of Tanjung Jati B Steam Power Plant ("PLTU") 4x660 MW were insured to PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia against fire and other possible risks with insurance coverage of JPY452,897,476,244 (equivalent to Rp54,446,610) and US\$4,320,000 (equivalent to Rp58,527) respectively, as of December 31, 2017.*

*Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured. The Company and its subsidiaries do not insure property, plant and equipment other than building, installation and power plant, transmission equipment, other telecommunication and data processing equipments and vessels and its equipment.*

*As of December 31, 2017, the gross carrying amount of property, plant and equipment that have been fully depreciated and still in use amounted to Rp7,505,609.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tahun 2017, manajemen mengkategorikan beberapa aset tetap menjadi aset tidak digunakan dalam operasi berdasarkan pertimbangan tingkat efisiensi dan keekonomisan aset tersebut. Nilai aset tersebut telah disesuaikan ke nilai terpulihkan. Penyesuaian tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan mengurangi jumlah akumulasi surplus revaluasi dalam ekuitas.

Manajemen Perusahaan dan entitas anak berpendapat bahwa nilai wajar aset tetap tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya sehingga tidak melakukan revaluasi aset tetap.

**Pekerjaan Dalam Pelaksanaan**

Akun ini merupakan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembangunan dan renovasi/ perbaikan sarana kelistrikan, sebagai berikut:

	2017 Rp	2016 Rp	
Proyek penugasan - program percepatan:			<i>Mandatory project - fast track program:</i>
Pembangkitan	9,116,037	13,473,959	Power plants
Transmisi	6,509,844	6,983,868	Transmission
Subjumlah	<u>15,625,881</u>	<u>20,457,827</u>	Subtotal
Konstruksi rutin:			<i>Regular constructions:</i>
Pembangkitan	44,849,557	29,123,314	Power plants
Transmisi	69,885,866	46,854,170	Transmission
Distribusi	13,136,053	5,675,889	Distribution
Perlengkapan	1,799,137	883,457	Equipment
Subjumlah	<u>129,670,613</u>	<u>82,536,830</u>	Subtotal
<b>Jumlah</b>	<b><u>145,296,494</u></b>	<b><u>102,994,657</u></b>	<b>Total</b>

**(i) Program percepatan**

Program percepatan (*fast track program*) merupakan proyek yang ditugaskan Pemerintah kepada Perusahaan. Pekerjaan dalam pelaksanaan program percepatan termasuk pembayaran uang muka kepada kontraktor, biaya pinjaman serta pengeluaran lain yang dikapitalisasi.

Pembangkitan

Program percepatan pekerjaan dalam pelaksanaan pembangkitan terutama merupakan PLTU 1 Kalimantan Barat - Parit Baru 2x50 MW dan PLTU 2 Kalimantan Barat - Bengkayang 2x27,5 MW.

**(i) Fast track program**

The fast track program represents projects which are mandated by the Government to the Company. Construction in progress under the fast track program includes advance payments made to the contractors, borrowing costs and other capitalized expenditures.

Power plants

The fast track program of power plants under construction consists mainly of PLTU 1 Kalimantan Barat - Parit Baru 2x50 MW and PLTU 2 Kalimantan Barat - Bengkayang 2x27.5 MW.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Transmisi

Program percepatan pekerjaan dalam pelaksanaan transmisi terutama terdiri dari proyek Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV New Rawalo (Kesugihan), *Underground Cable* ("UGC") 150 kV Gunung Sahari - Kemayoran - Paket 1 dan Gardu Induk 150 kV Bekasi Utara.

**(ii) Konstruksi rutin**

Pembangkitan

Pekerjaan dalam pelaksanaan pembangkitan terutama merupakan PLTGU Grati Peaker 1x450 MW, PLTU Lontar Extension 1x315 MW, PLTA Peusangan 2x88 MW dan PLTGU Jawa 1x800 MW.

Transmisi

Pekerjaan dalam pelaksanaan transmisi terutama merupakan proyek jaringan transmisi T/L 500 kV Jawa - Bali, T/L 150 kV untuk luar Jawa - Bali, proyek gardu induk 150 kV serta proyek interkoneksi jaringan.

Distribusi

Pekerjaan dalam pelaksanaan distribusi terutama merupakan proyek jaringan distribusi tegangan menengah dan rendah 20 kV serta proyek gardu distribusi.

Perlengkapan

Perlengkapan pekerjaan dalam pelaksanaan termasuk materi dan perlengkapan khusus yang digunakan untuk menunjang fungsi pembangkitan dan distribusi listrik.

Pekerjaan dalam pelaksanaan ini diperkirakan selesai antara tahun 2018 dan 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2017, estimasi persentase jumlah tercatat pekerjaan dalam pelaksanaan Perusahaan terhadap nilai kontrak adalah sebagai berikut:

Transmission

The fast track program of transmission under construction mainly consists of project Extra High Voltage Substations 500 kV New Rawalo (Kesugihan), *Underground Cable* ("UGC") 150 kV Gunung Sahari - Kemayoran - package 1 and Substations 150 kV Bekasi Utara.

**(ii) Regular constructions**

Power plants

Power plants under construction consist mainly of PLTGU Grati Peaker 1x450 MW, PLTU Lontar Extension 1x315 MW, PLTA Peusangan 2x88 MW and PLTGU Jawa 1x800 MW.

Transmission

Transmission under construction consists mainly of projects of transmission lines of T/L 500 kV in Java - Bali, T/L 150 kV outside Java - Bali, substations 150 kV and interconnection of transmission projects.

Distribution

Distribution under construction consists mainly of projects of mid and low voltage distribution lines of 20 kV and distribution substation projects.

Equipment

Equipment under construction consists of specialised materials and equipment used to support the generation and distribution of electricity.

Constructions in progress are expected to be completed between 2018 and 2021.

As of December 31, 2017, the estimated percentage of completion of the Company's construction in progress projects are as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Nama proyek/ <i>Project name</i>	Nilai pekerjaan dalam pelaksanaan/ <i>Value of construction in progress</i> Rp	Presentase penyelesaian/ <i>Percentage of completion</i> %
PLTGU Grati Peaker 1x450 MW	3,771,957	93%
PLTU Lontar Extension 1x315 MW	3,333,331	33%
PLTA Peusangan 2x88 MW	2,926,853	70%
PLTGU Jawa 1x800 MW	2,713,674	64%
PLTU Pangkalan Susu Unit 3 dan/ and 4 2x200 MW	2,418,034	69%
PLTU 3 Kalimantan Barat <i>Site</i> Bengkayang 2x50 MW	2,290,845	94%
PLTU 1 Kalimantan Barat - Parit Baru 2x50 MW	1,785,466	86%
PLTU Talakar 2x100 MW	1,388,703	93%
PLTA Jatigede 2x55 MW	1,377,883	26%
PLTU 2 Kalimantan Barat - Bengkayang 2x27.5 MW	780,583	81%
Transmisi lainnya/ <i>Various transmission line</i>	76,395,709	2%-98%
Pembangkitan lainnya/ <i>Other power plants</i>	31,178,264	2%-98%
Lainnya/ <i>Others</i>	14,935,192	2%-98%
<b>Jumlah/ <i>Total</i></b>	<b>145,296,494</b>	

Pada tanggal 31 Desember 2016, estimasi persentase jumlah tercatat pekerjaan dalam pelaksanaan konstruksi Perusahaan terhadap nilai kontrak adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2016, the estimated percentages of completion of the Company's construction in progress projects were as follows:

Nama Proyek/ <i>Project name</i>	Nilai pekerjaan dalam pelaksanaan/ <i>Value of construction in progress</i> Rp	Persentase penyelesaian/ <i>Percentage of completion</i> %
PLTU Kalimantan Timur - Teluk Balikpapan 2x100 MW	3,205,292	97%
PLTA Peusangan 2x88 MW	2,409,116	66%
PLTU 3 Kalimantan Barat - <i>Site</i> Bengkayang 2x50 MW	1,870,414	78%
PLTU 1 Kalimantan Barat - Parit Baru 2x50 MW	1,743,571	86%
PLTGU Grati Peaker 1x450 MW	1,565,751	28%
PLTU Pangkalan Susu Unit 3 dan/ and 4 2x200 MW	1,457,456	45%
PLTU Takalar 2x100 MW	1,226,060	49%
PLTU Gorontalo - Anggrek 2x25 MW	1,143,687	51%
PLTU 2 Kalimantan Barat - Bengkayang 2x27.5 MW	759,499	81%
PLTU Sampit 2x25 MW	527,677	34%
Transmisi lainnya/ <i>Various transmission line</i>	53,838,038	2%-98%
Pembangkitan lainnya/ <i>Other power plants</i>	26,688,750	2%-98%
Lainnya/ <i>Others</i>	6,559,346	2%-98%
<b>Jumlah/ <i>Total</i></b>	<b>102,994,657</b>	

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Informasi mengenai persentase penyelesaian yang disajikan dalam tabel diatas menggambarkan estimasi kemajuan tahap *engineering, procurement and construction*. Selanjutnya, masih perlu dilakukan sejumlah pengujian-pengujian sebelum proyek pekerjaan dalam pelaksanaan menerima sertifikat laik operasi.

The information about the percentages of completion disclosed in the table above indicate the estimated progress during the *engineering, procurement and construction* phases. There are still number of tests that need to be performed during the *commissioning* phase before the projects are certified for operations.

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke pekerjaan dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut:

Borrowing costs which were capitalized to construction in progress are as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	
Program percepatan			<i>Fast track program</i>
Bunga pinjaman termasuk amortisasi biaya emisi obligasi	375,043	1,251,994	<i>Interest expense including amortization of bonds issuance</i>
Kerugian kurs mata uang asing	8,109	407	<i>Loss on foreign exchange</i>
Jumlah	<u>383,152</u>	<u>1,252,401</u>	<i>Total</i>
Konstruksi rutin			<i>Regular constructions</i>
Bunga pinjaman	4,329,063	1,549,207	<i>Interest expense</i>
Kerugian kurs mata uang asing	309,619	242,528	<i>Loss on foreign exchange</i>
Jumlah	<u>4,638,682</u>	<u>1,791,735</u>	<i>Total</i>
<b>Jumlah</b>	<b><u>5,021,834</u></b>	<b><u>3,044,136</u></b>	<b><i>Total</i></b>

Biaya pinjaman dikapitalisasi pada tingkat bunga rata-rata tertimbang dari pinjaman umum yaitu masing-masing sebesar 7,10% dan 6,62% pada tahun 2017 dan 2016.

Borrowing costs were capitalized at the weighted average rate of general borrowings of 7.10% and 6.62% in 2017 and 2016, respectively.

Dalam beberapa kesempatan masih ada sedikit kendala terkait perizinan dan pembebasan lahan. Namun demikian dengan terbitnya Perpres No.4/2016 dan perubahannya yaitu Perpres No.14/2017, manajemen berkeyakinan bahwa hambatan dalam penyelesaian proyek tersebut dapat diatasi.

In some occasions there are constraints related to permit and land acquisition. However, with the issuance of the Perpres No. 4/2016 and its amendment No. 14/2017, the management believes that such constraints in completing the projects can be overcome.

**Aset Tidak Digunakan Dalam Operasi**

Aset tidak digunakan dalam operasi meliputi aset tetap akan direlokasi, sementara belum digunakan dalam operasi serta aset tetap akan diperbaiki.

**Assets Not Used In Operations**

Assets not used in operations comprised of those to be relocated, those temporarily not in use in operations, and those to be repaired.

Kerugian dari penghapusan aset yang tidak digunakan dalam operasi sebesar Rp327.986 tahun 2017 dan Rp167.941 tahun 2016 dicatat sebagai beban usaha lain-lain (Catatan 46).

Loss on written off assets not used in operations amounting to Rp327,986 in 2017 and Rp167,941 in 2016, respectively are recorded as other operating expenses (Note 46).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

*For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

Aset tertentu yang tidak digunakan dalam operasi dijual seharga Rp45.983 tahun 2017 dan Rp27.705 tahun 2016. Nilai buku aset yang dijual tersebut telah nihil, sehingga hasil penjualan aset seluruhnya merupakan keuntungan penjualan aset tertentu yang tidak digunakan dalam operasi (Catatan 46).

*Certain assets not used in operations were sold with a selling price of Rp45,983 in 2017 and Rp27,705 in 2016. The carrying value of such assets was nil, hence all the proceeds from the sale of certain assets represented a gain on the sale of assets not used in operations (Note 46).*

Manajemen berpendapat bahwa percepatan penyusutan atas aset yang tidak digunakan dalam operasi memadai untuk menutup risiko kerugian penurunan nilai yang mungkin timbul dari aset tersebut.

*Management believes that accelerated depreciation on assets not used in operations is adequate to cover possible loss on impairment on the value of such assets.*

**7. Properti Investasi**

**7. Investment Properties**

Akun ini merupakan tanah milik Perusahaan dan entitas anak, yaitu IP, PJB dan PLN Batam yang terletak di Pademangan – Jakarta Utara, Paiton - Jawa Timur, Bekasi - Jawa Barat, Pluit - Jakarta Utara, Asahan - Sumatera Utara dan Kramatwatu – Serang dengan hak legal berupa HGB berjangka waktu dari 7 sampai 40 tahun, jatuh tempo pada 2032, yang disewakan kepada PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas, PT Bajradaya Sentranusa, PT Karya Semesta Gemilang, PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali dan beberapa aset tanah yang disewakan ke pihak ketiga.

*This account pertains to pieces of land owned by the Company and its subsidiaries namely IP, PJB and PLN Batam, located in Pademangan – North Jakarta, Paiton - East Java, Bekasi - West Java, Pluit - North Jakarta, Asahan - North Sumatera and Kramatwatu – Serang with HGB for periods between 7 to 40 years until 2032, which are leased to PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas, PT Bajradaya Sentranusa, PT Karya Semesta Gemilang, PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali and several lands are leased to third parties.*

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan dan entitas anak melakukan penilaian kembali atas nilai wajar properti investasi, yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR"), penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dan OJK.

*As of December 31, 2017 and 2016, the Company and its subsidiaries performs revaluation of the fair value of its investment properties which is performed by Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR"), an independent valuer registered in the Ministry of Finance and OJK.*

Nilai wajar properti investasi diklasifikasikan sebagai level 2 dalam hirarki nilai wajar.

*The fair values of investment properties are within level 2 of the fair value hierarchy.*

Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp4.723.070 dan Rp1.325.297.

*The fair value of the investment properties as of December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp4,723,070 and Rp1,325,297 respectively.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**8. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama**

Rincian investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

**8. Investments in Associates and Joint Ventures**

Details of investments in associates and joint ventures are as follows:

Entitas/ Entity	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Tahun operasi komersial/ Commercial operations	Persentase penyertaan/ Percentage of ownership	
				2017 %	2016 %
<u>Entitas asosiasi/ Associates</u>					
PT Geo Dipa Energi ("GDE")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2002	6.67	6.67
PT Mitra Energi Batam ("MEB")	Batam	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2004	30.00	30.00
PT Indo Pusaka Berau ("IPB")	Berau	Perdagangan batu bara/ Coal trading	2005	46.53	46.53
PT Sumber Segara Primadaya ("S2P")	Cilacap	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2006	49.00	49.00
PT Dalle Energy Batam ("DEB")	Batam	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2006	20.00	20.00
PT Tanjung Kasam Power ("TJK")	Batam	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2012	10.00	10.00
PT Energi Pelabuhan Indonesia ("EPI")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2013	45.00	45.00
PT PBM Adhiguna Putera ("PBM AP")	Jakarta	Pelayaran/ Shipping	1987	25.00	--
<u>Ventura bersama/ Joint ventures</u>					
PT Unelec Indonesia ("Unindo")	Jakarta	Penunjang penyedia tenaga listrik/ Electricity supports	1988	32.35	32.35
PT Bajradaya Sentranusa ("BDSN")	Asahan	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2010	36.61	36.61
PT Komipo Pembangkitan Jawa a Bali ("Komipo PJB")	Jepara	Operasi dan pemeliharaan/ Operational and maintenance	2010	49.00	49.00
PT Crompton Prima Sw itchgear Indonesia ("CPSI")	Jakarta	Peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik/ Electricity controller and distribution	2014	49.00	49.00
PT Bukit Pembangkit Innovative ("BPI")	Palembang	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2015	37.25	37.25
PT Perta Daya Gas ("PDG")	Jakarta	Transportasi dan penyimpanan LNG/ Transportation and storage of LNG	2015	35.00	35.00
PT Rajamandala Electric Power ("REP")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	*)	51.00	51.00
PT Rekind Daya Mamuju ("RDM")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	*)	10.00	10.00
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa a Bali ("SGPJB")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	*)	30.00	30.00
PT GCL Indotenaga ("GCL")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	*)	35.00	35.00
PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa a Bali ("GTPJB")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	*)	30.00	30.00
PT North Sumatra Hydro Energy ("NSHE")	Sumatera Utara	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	*)	25.00	--
PT Indo Raya Tenaga ("IRT")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	*)	51.00	--

\*) Tahap pengembangan/ Development stage

Seluruh entitas asosiasi dan ventura bersama dicatat oleh Perusahaan dan entitas anak dengan menggunakan metode ekuitas. Seluruh entitas adalah entitas tertutup dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk sahamnya.

Per 31 Desember 2017 dan 2016, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat pembatasan dan risiko signifikan yang terkait dengan investasi pada asosiasi dan ventura bersama.

All the associates and joint ventures are recorded by the Company and its subsidiaries using the equity method. They are private entities and there is no quoted market price available for its share.

As of December 31, 2017 and 2016, management believes that there is no significant restriction and risk regarding the investments in associates and joint ventures.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Mutasi investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

Changes in investments in associates and joint ventures are as follows:

	Jumlah tercatat 1 Januari 2017/ Carrying amount January 1, 2017	Penambahan/ Additions	Dividen/ Dividend	Bagian atas laba (rugi) bersih/ Share of profit (loss)	Bagian atas pendapatan komprehensif lainnya/ Share of other comprehensive income	Jumlah tercatat 31 Desember 2017/ Carrying amount December 31, 2017	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
<b>Entitas asosiasi</b>							
PT Geo Dipa Energi	83,824	--	--	9,154	(317)	92,661	PT Geo Dipa Energi
PT Mitra Energi Batam	97,905	--	(3,450)	18,821	--	113,276	PT Mitra Energi Batam
PT Sumber Segara Primadaya	1,506,386	--	(111,992)	487,277	--	1,881,671	PT Sumber Segara Primadaya
PT Dalle Energy Batam	83,802	--	--	6,688	--	90,490	PT Dalle Energy Batam
PT Indo Pusaka Berau	111,599	--	(1,163)	1,220	--	111,656	PT Indo Pusaka Berau
PT Energi Pelabuhan Indonesia	37,576	--	--	4,946	--	42,522	PT Energi Pelabuhan Indonesia
PT Tanjung Kasam Power	59,026	--	--	14,184	2,579	75,789	PT Tanjung Kasam Power
PT PBM Adhiguna Putera	--	2,855	--	22,207	(297)	24,765	PT PBM Adhiguna Putera
Subjumlah	1,980,118	2,855	(116,605)	564,497	1,965	2,432,830	Subtotal
<b>Ventura bersama</b>							
PT Unelec Indonesia	34,703	--	--	20,315	--	55,018	PT Unelec Indonesia
PT Bajradaya Sentranusa	402,571	--	(87,897)	87,578	285,604	687,856	PT Bajradaya Sentranusa
PT Bukit Pembangkit Innovative	823,514	--	--	117,707	154,314	1,095,535	PT Bukit Pembangkit Innovative
PT Kompo	--	--	--	--	--	--	PT Kompo
Pembangkitan Jawa Bali	51,940	--	(37,003)	26,376	--	41,313	Pembangkitan Jawa Bali
PT Rekind Daya Mamuju	24,404	21,046	--	9,154	--	54,604	PT Rekind Daya Mamuju
PT Indo Raya Tenaga	--	510	--	(190)	--	320	PT Indo Raya Tenaga
PT Perta Daya Gas	--	--	--	3,016	113	3,129	PT Pertadaya Gas
PT Rajamandala Electric Power	114,808	--	--	(21,126)	14,892	108,574	PT Rajamandala Electric Power
PT Crompton Prima Switchgear	35,318	--	--	(7,779)	4,501	32,040	PT Crompton Prima Switchgear
PT Shenhua Guohua	--	--	--	--	--	--	PT Shenhua Guohua
Pembangkitan Jawa Bali	319,944	959,808	--	11,690	508	1,291,950	Pembangkitan Jawa Bali
PT GCL Indotenaga	40,642	286,626	--	(47)	--	327,221	PT GCL Indotenaga
PT Guohua Taidian	--	--	--	--	--	--	PT Guohua Taidian
Pembangkitan Jawa Bali	2,020	--	--	--	4	2,024	Pembangkitan Jawa Bali
PT North Sumatera Hydro Energy	--	746,084	--	--	--	746,084	PT North Sumatera Hydro Energy
Subjumlah	1,849,864	2,014,074	(124,900)	246,694	459,936	4,445,668	Subtotal
<b>Jumlah</b>	<b>3,829,982</b>	<b>2,016,929</b>	<b>(241,505)</b>	<b>811,191</b>	<b>461,901</b>	<b>6,878,498</b>	<b>Total</b>
<b>Entitas asosiasi</b>							
PT Geo Dipa Energi	--	--	--	83,824	--	83,824	PT Geo Dipa Energi
PT Mitra Energi Batam	101,933	--	(1,500)	(2,528)	--	97,905	PT Mitra Energi Batam
PT Sumber Segara Primadaya	1,288,685	--	(52,816)	270,517	--	1,506,386	PT Sumber Segara Primadaya
PT Dalle Energy Batam	76,060	--	--	7,742	--	83,802	PT Dalle Energy Batam
PT Indo Pusaka Berau	101,350	--	--	10,249	--	111,599	PT Indo Pusaka Berau
PT Energi Pelabuhan Indonesia	33,146	--	--	4,430	--	37,576	PT Energi Pelabuhan Indonesia
PT Tanjung Kasam Power	44,239	--	(2,231)	17,018	--	59,026	PT Tanjung Kasam Power
Subjumlah	1,645,413	--	(56,547)	391,252	--	1,980,118	Subtotal
<b>Ventura bersama</b>							
PT Unelec Indonesia	112,033	--	--	(77,330)	--	34,703	PT Unelec Indonesia
PT Bajradaya Sentranusa	418,423	--	(115,787)	104,176	(4,241)	402,571	PT Bajradaya Sentranusa
PT Bukit Pembangkit Innovative	777,217	--	--	51,369	(5,072)	823,514	PT Bukit Pembangkit Innovative
PT Kompo	--	--	--	--	--	--	PT Kompo
Pembangkitan Jawa Bali	61,601	--	(35,541)	25,880	--	51,940	Pembangkitan Jawa Bali
PT Rekind Daya Mamuju	20,403	4,001	--	--	--	24,404	PT Rekind Daya Mamuju
PT Perta Daya Gas	--	--	--	--	--	--	PT Perta Daya Gas
PT Rajamandala Electric Power	102,347	13,447	--	(986)	--	114,808	PT Rajamandala Electric Power
PT Crompton Prima	--	--	--	--	--	--	PT Crompton Prima
Switchgear Indonesia	37,261	--	--	(1,943)	--	35,318	Switchgear Indonesia
PT Shenhua Guohua	--	--	--	--	--	--	PT Shenhua Guohua
Pembangkitan Jawa Bali	--	319,944	--	--	--	319,944	Pembangkitan Jawa Bali
PT GCL Indotenaga	--	42,355	--	(1,713)	--	40,642	PT GCL Indotenaga
PT Guohua Taidian	--	--	--	--	--	--	PT Guohua Taidian
Pembangkitan Jawa Bali	--	2,020	--	--	--	2,020	Pembangkitan Jawa Bali
Subjumlah	1,529,285	381,767	(151,328)	99,453	(9,313)	1,849,864	Subtotal
<b>Jumlah</b>	<b>3,174,698</b>	<b>381,767</b>	<b>(207,875)</b>	<b>490,705</b>	<b>(9,313)</b>	<b>3,829,982</b>	<b>Total</b>

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi dan ventura bersama pada 31 Desember 2017 dan 2016 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

The following table contains the summarized financial information for associates and joint ventures as of December 31, 2017 and 2016, which are accounted using the equity method.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2016					
	PT Mitra Energi Batam Rp	PT Sumber Segara Primadaya Rp	PT Tanjung Kasam Power Rp	Lainnya/ Others Rp	Jumlah/ Total Rp	
Bagian atas aset bersih						Share of the net assets
asosiasi	97,904	1,188,211	59,026	381,049	1,726,190	of associates
Penyesuaian metode ekuitas	1	318,175	--	(64,248)	253,928	Adjustment of equity method
Jumlah tercatat	97,905	1,506,386	59,026	316,801	1,980,118	Total carrying value
Pendapatan	130,419	5,094,718	407,943	1,330,497	6,963,577	Revenue
Beban pokok penjualan	(23,781)	(3,466,817)	(83,389)	(883,456)	(4,457,443)	Cost of good sold
Depresiasi dan amortisasi	(2,244)	(648,583)	--	(27,372)	(678,199)	Depreciation and amortization
Pendapatan keuangan	--	1,975	--	4,961	6,936	Interest income
Beban keuangan	(33,179)	(388,258)	(98,942)	(43,437)	(563,816)	Interest expense
Beban operasi	(77,239)	(15,398)	(7,725)	(167,436)	(267,798)	Operating expense
Pendapatan (beban) lain-lain, bersih	(186)	122,332	--	1,157,768	1,279,914	Other income (charges) - net
Beban pajak penghasilan	(2,217)	(147,893)	(47,701)	(46,669)	(244,480)	Income tax expense
Laba (rugi) tahun berjalan	(8,427)	552,076	170,186	1,324,856	2,038,691	Profit (loss) for the year
<b>% kepemilikan efektif</b>	<b>30%</b>	<b>49%</b>	<b>10%</b>	<b>20% - 46.80%</b>	<b>6.67% - 46.80%</b>	<b>% of effective ownership</b>
Bagian laba (rugi)						Share of the profit (loss)
asosiasi tahun berjalan	(2,528)	270,517	17,018	106,245	391,252	for the year of associates
Laba (rugi) komprehensif lain	--	--	--	--	--	Other comprehensive income (loss)
Bagian laba (rugi)						Share of other comprehensive
komprehensif asosiasi	--	--	--	--	--	income (loss) of associates
Dividen yang diterima dari perusahaan asosiasi	1,500	52,816	2,231	--	56,547	Dividend received from associates

**Ventura bersama/ Joint ventures**

	2017					
	PT Unelec Indonesia Rp	PT Bajradaya Sentranusa Rp	PT Bukit Pembangkit Innovative Rp	Lainnya/ Others Rp	Jumlah/ Total Rp	
<b>Lancar</b>						<b>Current</b>
Kas dan setara kas	4,312	298,673	418,954	1,283,778	2,005,717	Cash and cash equivalents
Aset lancar lainnya						Other current assets
(tidak termasuk kas)	762,443	232,188	103,087	2,290,260	3,387,978	(excluding cash)
Jumlah aset lancar	766,755	530,861	522,041	3,574,038	5,393,695	Total of current assets
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Utang usaha	336,393	205,067	360,731	573,930	1,476,121	Trade payables
Liabilitas lancar lainnya	671,599	174,718	331,888	186,365	1,364,570	Other current liabilities
Jumlah liabilitas lancar	1,007,992	379,785	692,619	760,295	2,840,691	Total current liabilities
<b>Tidak lancar</b>						<b>Non-current</b>
Aset	371,325	5,483,604	5,525,950	14,332,155	25,713,034	Assets
Liabilitas						Liabilities
Liabilitas keuangan	--	2,637,109	2,135,612	7,916,630	12,689,351	Financial liabilities
Liabilitas lainnya	41,705	808,114	--	101,977	951,796	Other liabilities
Jumlah liabilitas tidak lancar	41,705	3,445,223	2,135,612	8,018,607	13,641,147	Total of non-current assets
Aset bersih	88,383	2,189,457	3,219,760	9,127,291	14,624,891	Net assets
<b>% kepemilikan efektif</b>	<b>32.35%</b>	<b>36.61%</b>	<b>37.25%</b>	<b>10% - 51%</b>	<b>--</b>	<b>% of effective ownership</b>
Bagian atas aset bersih						Share of the net assets
ventura bersama	28,592	801,560	1,199,361	2,611,060	4,640,573	of joint ventures
Penyesuaian ISAK 16	--	--	--	--	--	Adjustments of ISFAS 16
Penyesuaian metode ekuitas	26,426	(113,704)	(103,825)	(3,802)	(194,905)	Adjustments of equity method
Jumlah tercatat	55,018	687,856	1,095,536	2,607,258	4,445,668	Total carrying value
Pendapatan	972,228	603,700	893,348	7,114,905	9,584,181	Revenue
Beban pokok penjualan	(817,449)	(17,701)	(242,520)	(6,386,436)	(7,464,106)	Cost of good sold
Depresiasi dan amortisasi	--	(310)	--	(55,060)	(55,370)	Depreciation and amortization
Pendapatan keuangan	--	--	632	13,009	13,641	Interest income
Beban keuangan	(41,529)	(241,181)	(96,250)	(274,276)	(653,236)	Interest expense
Beban operasi	(29,604)	(33,522)	(161,918)	(119,158)	(344,202)	Operating expense
Pendapatan (beban) lain-lain, bersih	(15,936)	19,109	25,322	(71,253)	(42,758)	Other income (charges) - net
Beban pajak penghasilan	(4,912)	(90,877)	(102,622)	(54,464)	(252,875)	Income tax expense
Laba periode berjalan	62,798	239,218	315,992	167,267	785,275	Profit for the period
<b>% kepemilikan efektif</b>	<b>32.35%</b>	<b>36.61%</b>	<b>37.25%</b>	<b>10% - 51%</b>	<b>--</b>	<b>% of effective ownership</b>
Bagian atas laba tahun berjalan						Share of the profit
ventura bersama	20,315	87,578	117,707	21,094	246,694	for the year of joint ventures
Laba komprehensif lain	--	780,126	414,266	40,415	1,234,807	Other comprehensive income
Bagian atas laba						Share of other comprehensive
komprehensif ventura bersama	--	285,604	154,314	20,018	459,936	income of joint ventures
Dividen yang diterima dari perusahaan ventura bersama	--	87,897	--	37,003	124,900	Dividend received from joint ventures

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2016					
	PT Unelec Indonesia Rp	PT Bajradaya Sentranusa Rp	PT Bukit Pembangkit Innovative Rp	Lainnya/ Others Rp	Jumlah/ Total Rp	
<b>Lancar</b>						<i>Current</i>
Kas dan setara kas	14,714	380,139	160,539	417,238	972,630	Cash and cash equivalents
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	680,162	214,200	28,998	178,601	1,101,961	Other current assets (excluding cash)
Jumlah aset lancar	694,876	594,339	189,537	595,839	2,074,591	Total current assets
<b>Liabilitas keuangan</b>						<i>Financial liabilities</i>
Utang usaha	166,396	130,046	250,735	233,759	780,936	Trade payables
Liabilitas lancar lainnya	765,026	245,967	287,592	150,876	1,449,461	
Jumlah liabilitas lancar	931,422	376,013	538,327	384,635	2,230,397	
<b>Tidak lancar</b>						<i>Non-current</i>
Aset	387,801	5,503,025	5,432,027	1,658,333	12,981,186	Assets
<b>Liabilitas</b>						<i>Liabilities</i>
Liabilitas keuangan	--	2,786,202	2,055,971	1,030,917	5,873,090	Financial liabilities
Liabilitas lainnya	43,896	760,082	488,686	43,778	1,336,442	Other liabilities
Jumlah liabilitas tidak lancar	43,896	3,546,284	2,544,657	1,074,695	7,209,532	Total non-current liabilities
Aset bersih	107,359	2,175,067	2,538,580	794,842	5,615,848	Net assets
<b>% kepemilikan efektif</b>	32.35%	36.61%	37.25%	10% - 51%	10% - 51%	<i>% of effective ownership</i>
<b>Bagian atas aset bersih ventura bersama</b>	34,731	796,292	945,621	277,421	2,054,065	Share of the net assets of joint ventures
Penyesuaian metode ekuitas	(28)	(393,721)	(122,107)	311,655	(204,201)	Adjustments of equity methods
Jumlah tercatat	34,703	402,571	823,514	589,076	1,849,864	Total carrying value
<b>Pendapatan</b>	715,054	611,731	734,398	976,749	3,037,932	Revenue
Beban pokok penjualan	(686,296)	--	(173,517)	(825,038)	(1,684,851)	Cost of good sold
Depresiasi dan amortisasi	--	(259)	--	(8,397)	(8,656)	Depreciation and amortization
Pendapatan keuangan	--	26,792	4,739	13,077	44,608	Interest income
Beban keuangan	(33,661)	(254,229)	(121,159)	(6,191)	(415,240)	Interest expense
Beban operasi	(80,653)	(24,032)	(297,005)	(99,800)	(501,490)	Operating expense
Pendapatan (beban) lain-lain, bersih	(162,213)	5,792	(9,552)	2,546	(163,427)	Other income (charges) - net
Beban pajak penghasilan	8,727	(81,239)	--	(30,579)	(103,091)	Income tax expense
Laba (rugi) tahun berjalan	(239,042)	284,556	137,904	22,367	205,785	Profit (loss) for the year
<b>% kepemilikan efektif</b>	32.35%	36.61%	37.25%	10% - 51%	10% - 51%	<i>% of effective ownership</i>
<b>Bagian atas laba (rugi) tahun berjalan ventura bersama</b>	(77,330)	104,176	51,369	21,238	99,453	Share of the profit (loss) for the year of joint ventures
Laba (rugi) komprehensif lain	--	(11,583)	(13,617)	--	(25,200)	Other comprehensive income (loss)
Bagian atas laba (rugi) komprehensif ventura bersama	--	(4,241)	(5,072)	--	(9,313)	Share of other comprehensive income (loss) of joint ventures
Dividen yang diterima dari ventura bersama	--	115,787	--	35,541	151,328	Dividend received from joint ventures

Investasi pada entitas di atas diperoleh terutama untuk tujuan potensi pertumbuhan jangka panjang, karena seluruh entitas tersebut bergerak dalam industri ketenagalistrikan yang sama dengan industri Perusahaan dan entitas anak.

**GDE**

GDE didirikan untuk melanjutkan pembangunan pembangkit tenaga listrik Dieng dan Patuha yang sebelumnya dimiliki Himpurna California Energy Limited dan Patuha Power Limited.

Walaupun Perusahaan hanya memiliki 6,67% kepemilikan GDE, Perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan atas GDE. Pengaruh yang signifikan dinilai

*The investments in the above entities are held primarily for long-term growth potential, since these entities are engaged in the same electricity industry as the Company and its subsidiaries.*

**GDE**

*GDE was established to continue the development of the Dieng and Patuha power plant projects previously owned by Himpurna California Energy Limited and Patuha Power Limited.*

*Although the Company only has 6.67% ownership in GDE, the Company has significant influence over GDE. The significant influence was indicated by the*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

berdasarkan kemampuan Perusahaan untuk mengarahkan operasional GDE dengan menetapkan *Key Performance Indicator* (KPI).

*Company's ability to drive GDE operation by imposing Key Performance Indicator (KPI).*

MEB

Pada tahun 2017 dan 2016, PLN Batam, entitas anak, memperoleh dividen dari MEB masing-masing sebesar Rp3.450 dan Rp1.500.

MEB

*In 2017 and 2016, PLN Batam, a subsidiary, received dividends from MEB amounting to Rp3,450 and Rp1,500, respectively.*

S2P

Pada tahun 2017 dan 2016, PJB, entitas anak, memperoleh dividen dari S2P masing-masing sebesar US\$8.266.312 (ekuivalen Rp111.992) dan US\$3.920.000 (ekuivalen Rp52.816).

S2P

*In 2017 and 2016, PJB, a subsidiary, received dividends from S2P amounting to US\$8,266,312 (equivalent to Rp111,992) and US\$3,920,000 (equivalent to Rp52,816) respectively.*

IPB

Pada tahun 2017, IP, entitas anak, memperoleh dividen sebesar Rp1.163.

IPB

*In 2017, IP, a subsidiary, received cash dividends amounting to Rp1,163.*

TJK

PLN Batam, entitas anak, mempunyai pengaruh signifikan di TJK dengan mempertimbangkan adanya keterwakilan PLN Batam pada susunan Direksi TJK. Pada tahun 2016, PLN Batam memperoleh dividen sebesar Rp2.231 dari TJK.

TJK

*PLN Batam, a subsidiary, has significant influence over TJK by considering its representation in TJK's Directors. In 2016, PLN Batam received cash dividends from TJK amounting to Rp2,231.*

IRT

Pada tahun 2017, PIT, entitas anak IP dan PT Barito Wahana Lestari mendirikan IRT dengan penyertaan saham masing-masing sebesar Rp510 dan Rp490 yang merupakan 51% dan 49% kepemilikan saham di IRT. PIT mempunyai pengendalian bersama atas IRT berdasarkan adanya keharusan kesepakatan bersama atas pengambilan keputusan penting.

IRT

*In 2017, PIT, subsidiary of IP and PT Barito Wahana Lestari established IRT with share ownership amounted to Rp510 and Rp490, respectively which are 51% and 49% share ownership in IRT. PIT has joint control in IRT as there must be a unanimous consent on important decisions.*

BDSN

Pada tahun 2017 dan 2016, PJB, entitas anak, memperoleh dividen dari BDSN masing-masing sebesar US\$6.487.821 (ekuivalen Rp87.897) dan US\$8.786.400 (ekuivalen Rp115.787).

BDSN

*In 2017 and 2016, PJB, a subsidiary, received dividend from BDSN amounting to US\$6,487,821 (equivalent to Rp87,897) and US\$8,786,400 (equivalent to Rp115,787) respectively.*

Komipo PJB

Pada tahun 2017 dan 2016, PJB, entitas anak, memperoleh dividen dari Komipo PJB masing-masing sebesar Rp37.003 dan Rp35.541.

Komipo PJB

*In 2017 and 2016, PJB, a subsidiary, received dividends from Komipo PJB amounting to Rp37,003 and Rp35,541, respectively.*

RDM

RE, entitas anak PJB, mempunyai pengendalian bersama atas RDM berdasarkan adanya keharusan kesepakatan bersama atas

RDM

*RE, a subsidiary of PJB, has joint control over in RDM as there must be a unanimous consent on important decisions. During 2017 and 2016,*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

pengambilan keputusan penting. Selama tahun 2017 dan 2016, RE melakukan tambahan investasi masing-masing sebesar Rp21.046 dan Rp4.001 tanpa mengubah persentase kepemilikan.

**SGPJB**

Pada tanggal 13 Januari 2016, PJBI, entitas anak PJB, melakukan investasi pada SGPJB dengan melakukan penyertaan saham sebesar US\$24.000.000 (ekuivalen Rp319.944), setara dengan kepemilikan saham sebesar 30%. Pada tanggal 16 Maret 2017 dan 27 September 2017, Perusahaan melakukan penambahan penyertaan saham masing-masing sebesar US\$39.000.000 dan US\$33.000.000 (ekuivalen Rp519.324 dan Rp440.484) tanpa mengubah persentase kepemilikan.

**PT GCL Indotenaga**

Pada tanggal 25 Februari 2016, PIT, entitas anak IP, dan Taicang Harbour Golden Concord Electric - Power Generation mendirikan PT GCL Indotenaga untuk menjalankan proyek pembangkit listrik tenaga uap. PIT melakukan pembayaran investasi awal sebesar US\$3.150.000 (setara dengan Rp42.355), setara dengan kepemilikan saham sebesar 35%.

Selama tahun 2017, PIT melakukan tambahan investasi sebesar US\$21.000.000 (ekuivalen Rp286.626) tanpa mengubah persentase kepemilikan.

**GTPJB**

Pada tanggal 23 September 2016, PJBI, entitas anak PJB, dan Guangdong Guohua Yuedian Taishan Power Generation Company Limited mendirikan GTPJB dengan investasi awal sebesar US\$150.000 (ekuivalen Rp2.020), setara dengan kepemilikan saham sebesar 30%.

**NSHE**

Pada tanggal 29 Agustus 2017, PJBI, entitas anak PJB, melakukan investasi pada NSHE dengan melakukan penyertaan saham sebesar US\$30.497.203 (ekuivalen Rp407.076), setara dengan kepemilikan saham sebesar 25%. Pada tanggal 28 Desember 2017, Perusahaan melakukan penambahan penyertaan saham sebesar US\$25.000.611 (ekuivalen Rp339.008).

*RE made additional investments amounting to Rp21,046 and Rp4,001, respectively, without changes in percentage of ownership.*

**SGPJB**

*On January 13, 2016, PJBI, a subsidiary of PJB, made investment to SGPJB with initial investment amounted to US\$24,000,000 (equivalent to Rp319,944), equivalent to 30% ownership share. On March 16, 2017 and September 27, 2017, the Company made additional investment amounting to US\$39,000,000 and US\$33,000,000, respectively, (equivalent to Rp519,324 and Rp440,484) without percentage changes in ownership.*

**PT GCL Indotenaga**

*On February 25, 2016, PIT, a subsidiary of IP, and Taicang Harbour Golden Concord Electric - Power Generation established PT GCL Indotenaga to implement the project coal fired power plant. PIT made initial investments amounting to US\$3,150,000 (equivalent to Rp42,355), equivalent to 35% share ownership.*

*During 2017, PIT made additional investments amounting to US\$21,000,000 (equivalent to Rp286,626) without changes in percentage of ownership.*

**GTPJB**

*On September 23, 2016, PJBI, a subsidiary of PJB, and Guangdong Guohua Yuedian Taishan Power Generation Company Limited established GTPJB with initial investment amounting to US\$150,000 (equivalent to Rp2,020), equivalent to 30% share ownership.*

**NSHE**

*On August 29, 2017, PJBI, a subsidiary of PJB, made investment to NSHE through purchase of shares amounting to US\$30,497,203 (equivalent to Rp407,076), equivalent to 25% total percentage of ownership. On December 28, 2017, the Company made additional investment amounting to US\$25,000,611, (equivalent to Rp339,008).*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

PBM AP

Pada tanggal 2 Mei 2017, BAG, entitas anak, kehilangan pengendalian atas PBM AP disebabkan penjualan 75% saham BAG di PBM AP kepada Dana Pensiun PLN ("DP PLN") dengan nilai pelepasan sebesar Rp54.250 sehingga PBM AP berubah status menjadi asosiasi.

PBM AP

On May 2, 2017, BAG lost its control over PBM AP due to sale of 75% of BAG's shares in PBM AP to Dana Pensiun ("DP PLN") with proceed amounted to Rp54,250 which changed PBM AP status to associate.

**9. Piutang Pihak Berelasi**

**9. Receivables from Related Parties**

	2017 Rp	2016 Rp	
PT Perta Daya Gas	224,742	260,085	PT Perta Daya Gas
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	11,447	16,747	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali
PT Dalle Energy Batam	5,603	9,632	PT Dalle Energy Batam
PT Mitra Energi Batam	683	683	PT Mitra Energi Batam
PT Tanjung Kasam Power	--	12,465	PT Tanjung Kasam Power
Jumlah	242,475	299,612	Total
Dikurangi bagian jangka pendek	5,294	36,548	Less current portion
Bagian jangka panjang	<u>237,181</u>	<u>263,064</u>	Long-term portion

PDG

Pada tanggal 12 Juni 2013, IP, entitas anak, memberikan pinjaman jangka panjang sebesar US\$18.837.112 kepada PDG untuk membiayai proyek *Compressed Natural Gas* ("CNG") di PLTU Tambak Lorok, Semarang. Pada tanggal 30 November 2015, IP melakukan amandemen atas pinjaman jangka panjang yang diberikan kepada PDG sehingga jumlah pinjaman berubah menjadi US\$18.191.529 sesuai dengan jumlah seluruh pencairan hingga tanggal terakhir yakni 9 Januari 2014 dan jangka waktu pinjaman berubah menjadi delapan tahun yang akan jatuh tempo pada 1 Desember 2023. Pemberian pinjaman ini dikenakan bunga 6,5% per tahun. Jumlah bunga atas pokok pinjaman terutang selama masa pembangunan proyek (*Interest During Construction*) dihitung sejak tanggal pencairan dana sampai tanggal 30 Mei 2014 dan dibayarkan secara penuh pada tanggal 1 Juni 2016. Pokok pinjaman akan ditagihkan setiap 6 bulan dari tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 1 Desember 2023. Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo piutang yang terdiri dari pokok dan bunga sebesar US\$16.197.815 atau setara dengan Rp219.448 (2016: US\$18.897.451 atau setara dengan Rp253.906). Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 piutang lainnya sebesar Rp5.294 dan Rp6.179 merupakan piutang yang antara lain, piutang bunga dan biaya relokasi pegawai.

PDG

On June 12, 2013, IP, a subsidiary, granted a long-term loan amounting to US\$18,837,112 to PDG for financing the *Compressed Natural Gas* ("CNG") project in PLTU Tambak Lorok, Semarang. On November 30, 2015, IP made an amendment to the long term loan given to PDG which resulted in the revision of the total loan granted to become US\$18,191,529 in accordance with the fund transferred up to January 9, 2014 and the tenor of the loan was revised to eight years and due on December 1, 2023. This loan bears interest of 6.5% per annum. The total interest on the principal during the construction of the project (*Interest During Construction*) is effective from the date of cash withdrawal until May 30, 2014 and paid-in full on June 1, 2016. The principal shall be collected every 6 months from date June 1, 2016 until December 1, 2023. As of December 31, 2017, the outstanding principal and accrued interest of the receivables amounted to US\$16,197,815, equivalent to Rp219,448 (2016: US\$18,897,451, equivalent to Rp253,906). As of December 31, 2017 and 2016, other receivables amounting to Rp5,294 dan Rp6,179 represent interest receivables and costs of relocation of employees.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Komipo PJB

Pada tanggal 29 Desember 2010, PJB, entitas anak, menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Komipo PJB dalam bentuk *shareholder loan* dengan suku bunga 14% per tahun. Pinjaman ini bertujuan untuk memberikan Komipo PJB dana cadangan untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Pengembangan Operasi dan Pemeliharaan dengan PJB, dimana Komipo PJB berkewajiban untuk memiliki dana cadangan selama berlakunya perjanjian untuk enam bulan operasi dan pemeliharaan pembangkit. Pada tanggal 29 Desember 2014, PJB melakukan amandemen atas pinjaman yang diberikan kepada Komipo PJB sehingga jangka waktu pinjaman akan jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2019. Pelunasan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 29 Desember dan cicilan pertama pokok piutang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2012.

TJK, MEB dan DEB

Piutang ini merupakan piutang atas denda kontrak penyediaan tenaga listrik.

Manajemen Perusahaan dan entitas anak berpendapat bahwa piutang pihak berelasi dapat tertagih.

Komipo PJB

On December 29, 2010, PJB, a subsidiary, agreed to provide loans to Komipo PJB, in the form of a *shareholder loan* with annual interest of 14% per annum. The purpose of this loan is to provide cash reserves for Komipo PJB in order to comply with the contractual obligations stipulated in the *Expansion Operation and Maintenance Agreement* with PJB, which requires Komipo PJB to, at any time of the contract term, maintain the cash reserves for six-months operation and maintenance of power plant. On December 29, 2014, PJB made an amendment on loan agreement to Komipo PJB to extend the due date to December 29, 2019. The interest will be due every December 29 and the first installment of principal payment was on December 29, 2012.

TJK, MEB and DEB

These receivables represent receivables on penalty of power purchase contracts.

Managements of the Company and its subsidiaries consider these receivables from related parties to be collectible.

**10. Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya**

**10. Restricted Cash in Banks and Time Deposits**

	2017 Rp	2016 Rp	
<b>Angsuran sewa pembiayaan dan jaminan operasi</b>			<b>Lease installments and operation guarantee</b>
Rekening bank			Cash in bank
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura			Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore
JPY	6,587,157	6,797,365	JPY
US\$	623,962	603,573	US\$
Bank Bukopin - Rupiah	49,339	49,855	Bank Bukopin - Rupiah
<b>Jaminan bank garansi</b>			<b>Bank guarantee</b>
Rekening bank - Rupiah			Cash in banks - Rupiah
Pihak berelasi:			Related parties:
Bank Mandiri	22,909	12,159	Bank Mandiri
Bank Negara Indonesia	1,313	1,269	Bank Negara Indonesia
Pihak ketiga:			Third parties:
Bank CIMB Niaga	22,829	--	Bank CIMB Niaga
Bank Woori Saudara	--	39	Bank Woori Saudara

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2017 Rp	2016 Rp	
Deposito berjangka - Rupiah			<i>Time deposit</i>
Pihak berelasi:			<i>Related parties:</i>
Bank Rakyat Indonesia	75,200	--	<i>Bank Rakyat Indonesia</i>
Bank Negara Indonesia	70,000	--	<i>Bank Negara Indonesia</i>
Bank Mandiri	35,000	--	<i>Bank Mandiri</i>
<b>Jumlah</b>	<b>7,487,709</b>	<b>7,464,260</b>	<b>Total</b>
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			<i>Interest rate per annum on time deposits</i>
Rupiah	4.5% - 6%	8.25%	<i>Rupiah</i>
US\$	1.25% - 1.37%	1.03% - 1.13%	<i>US\$</i>
JPY	--	0.0001% - 0.065%	<i>JPY</i>
Jangka waktu			<i>Maturity</i>
Rupiah	4 - 6 bulan/ <i>months</i>	1 tahun/ <i>year</i>	<i>Rupiah</i>
US\$	1 tahun/ <i>year</i>	1 tahun/ <i>year</i>	<i>US\$</i>
JPY	--	1 tahun/ <i>year</i>	<i>JPY</i>

Perusahaan menempatkan dana cadangan pada Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura sebesar JPY54.793.251.283 dan US\$46.055.654 pada tanggal 31 Desember 2017 dan sebesar JPY58.900.167.541 dan US\$44.922.075 pada tanggal 31 Desember 2016 untuk memenuhi persyaratan *Financial Lease Agreement* ("FLA").

The Company established a reserve account with Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore amounting to JPY54,793,251,283 and US\$46,055,654 as of December 31, 2017 and amounting to JPY58,900,167,541 and US\$44,922,075 as of December 31, 2016 to fulfill the requirement of the *Financial Lease Agreement* ("FLA").

Rincian rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

*Details of restricted cash in bank and time deposits in foreign currencies are as follows:*

	2017		2016		
	Dalam mata uang asing/ <i>In foreign currencies *)</i>	Ekuivalen/ <i>Equivalent Rp</i>	Dalam mata uang asing/ <i>In foreign currencies *)</i>	Ekuivalen/ <i>Equivalent Rp</i>	
JPY	54,793,251,283	6,587,157	58,900,167,541	6,797,365	<i>JPY</i>
US\$	46,055,654	623,962	44,922,075	603,573	<i>US\$</i>
<b>Jumlah</b>		<b>7,211,119</b>		<b>7,400,938</b>	<b>Total</b>

\*) Dalam jumlah penuh/ *In full amount*

**11. Aset Tidak Lancar Lain**

**11. Other Non-Current Assets**

	2017 Rp	2016 Rp	
Biaya ditangguhkan	187,941	--	<i>Deferred charges</i>
Biaya dibayar dimuka			<i>Prepaid expenses</i>
Pembelian gas	1,189,825	862,060	<i>Gas purchased</i>
Lain-lain	93,737	505,222	<i>Others</i>
Subjumlah	1,471,503	1,367,282	<i>Subtotal</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2017 Rp	2016 Rp	
Uang muka			Advances
Pengembangan proyek	3,032,454	2,152,425	Project development
Pembelian batubara	942,922	818,232	Purchased of coal
Subjumlah	<u>3,975,376</u>	<u>2,970,657</u>	Subtotal
Aset takberwujud			Intangible assets
Piranti lunak	605,360	567,522	Software
Biaya legal terkait perpanjangan hak atas tanah	132,441	57,872	Legal costs for renewal landrights
Subjumlah	<u>737,801</u>	<u>625,394</u>	Subtotal
Properti pertambangan	875,453	--	Mining properties
Investasi saham tidak terdaftar di bursa	3,964	967	Investment in non-listed shares
<b>Jumlah</b>	<b><u>7,064,097</u></b>	<b><u>4,964,300</u></b>	<b>Total</b>

Amortisasi aset takberwujud

Beban amortisasi aset takberwujud tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp285.676 dan Rp275.918.

Amortization of intangible assets

Amortization of intangible assets in 2017 and 2016 were amounted to Rp285,676 and Rp275,918, respectively.

**12. Kas dan Setara Kas**

**12. Cash and Cash Equivalents**

	2017 Rp	2016 Rp	
Kas	8,578	16,529	Cash on hand
Bank			Cash in banks
Pihak berelasi			Related parties
Bank Rakyat Indonesia			Bank Rakyat Indonesia
Rupiah	8,025,347	11,982,982	Rupiah
US\$	4,131,047	1,312,360	US\$
EUR	57,016	47,647	EUR
JPY	6,003	732	JPY
Bank Mandiri			Bank Mandiri
Rupiah	8,028,389	9,880,319	Rupiah
US\$	399,383	545,650	US\$
EUR	11,001	11,635	EUR
JPY	5,275	1,942	JPY
Bank Negara Indonesia			Bank Negara Indonesia
Rupiah	8,391,017	9,626,030	Rupiah
US\$	664,703	318,455	US\$
JPY	25,119	25,234	JPY
EUR	20,809	39,686	EUR
CHF	--	6,150	CHF
Bank Tabungan Negara			Bank Tabungan Negara
Rupiah	1,505,072	1,003,076	Rupiah
Bank DKI			Bank DKI
Rupiah	737,233	721,440	Rupiah
US\$	98,686	39,169	US\$
JPY	914	878	JPY
Jumlah pihak berelasi	<u>32,107,014</u>	<u>35,563,385</u>	Total related parties

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2017 Rp	2016 Rp	
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
Bank Bukopin			<i>Bank Bukopin</i>
US\$	2,614,659	152,947	<i>US\$</i>
Rupiah	1,497,183	2,459,059	<i>Rupiah</i>
JPY	81,621	55,100	<i>JPY</i>
EUR	40,772	--	<i>EUR</i>
Bank Internasional Indonesia			<i>Bank Internasional Indonesia</i>
Rupiah	1,467	1,451	<i>Rupiah</i>
US\$	5	510	<i>US\$</i>
Bank Danamon			<i>Bank Danamon</i>
Rupiah	174,829	122,318	<i>Rupiah</i>
Bank Central Asia			<i>Bank Central Asia</i>
Rupiah	435,310	391,801	<i>Rupiah</i>
US\$	23,838	23,641	<i>US\$</i>
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah)			<i>Others (each below 5% of total)</i>
Rupiah	1,422,147	422,864	<i>Rupiah</i>
US\$	365,489	5,649	<i>US\$</i>
EUR	4,991	4,398	<i>EUR</i>
Jumlah pihak ketiga	<u>6,662,311</u>	<u>3,639,738</u>	<i>Total third parties</i>
<b>Jumlah kas dan bank</b>	<b><u>38,777,903</u></b>	<b><u>39,219,652</u></b>	<b><i>Total cash on hand and in banks</i></b>
Setara kas - deposito berjangka			<i>Cash equivalents - time deposits</i>
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
Bank Rakyat Indonesia			<i>Bank Rakyat Indonesia</i>
Rupiah	1,823,842	520,298	<i>Rupiah</i>
Bank Negara Indonesia			<i>Bank Negara Indonesia</i>
Rupiah	970,160	654,432	<i>Rupiah</i>
Bank Mandiri			<i>Bank Mandiri</i>
Rupiah	<u>72,442</u>	<u>452,886</u>	<i>Rupiah</i>
Jumlah pihak berelasi	<u>2,866,444</u>	<u>1,627,616</u>	<i>Total Related parties</i>
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
Bank Bukopin			<i>Bank Bukopin</i>
Rupiah	460,000	914,607	<i>Rupiah</i>
JPY	--	57,235	<i>JPY</i>
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah)			<i>Others (each below 5% of total)</i>
Rupiah	<u>187,612</u>	<u>90,113</u>	<i>Rupiah</i>
Jumlah pihak ketiga	<u>647,612</u>	<u>1,061,955</u>	<i>Total third parties</i>
<b>Jumlah deposito berjangka</b>	<b><u>3,514,056</u></b>	<b><u>2,689,571</u></b>	<b><i>Total time deposits</i></b>
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>	<b><u>42,291,959</u></b>	<b><u>41,909,223</u></b>	<b><i>Total Cash and Cash Equivalents</i></b>
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			<i>Interest rate per annum on time deposits</i>
Rupiah	6% - 7%	7.16% - 7.81%	<i>Rupiah</i>
US\$	--	0.5% - 1.49%	<i>US\$</i>
JPY	--	0.15%	<i>JPY</i>
Jangka waktu	1 - 3 Bulan/ <i>Months</i>	1 Bulan/ <i>Month</i>	<i>Maturity</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Rincian kas dan setara kas dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of cash and cash equivalents in foreign currencies are as follows:

	2017		2016		
	Dalam mata uang asing/ <i>In foreign currencies *)</i>	Ekuivalen/ <i>Equivalent</i> Rp	Dalam mata uang asing/ <i>In foreign currencies *)</i>	Ekuivalen/ <i>Equivalent</i> Rp	
US\$	612,474,922	8,297,810	178,504,121	2,398,381	US\$
EUR	8,321,241	134,588	7,299,106	103,367	EUR
JPY	989,283,918	118,932	1,222,842,324	141,122	JPY
Lain-lain **)	--	--	457,750	6,150	Others **)
<b>Jumlah</b>		<b>8,551,330</b>		<b>2,649,020</b>	<b>Total</b>

\*) Dalam jumlah penuh

\*\*) Kas dan setara kas dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara US\$, menggunakan kurs tanggal pelaporan

\*) In full amount

\*\*) Cash and cash equivalent in other currencies are presented in US\$, equivalents using prevailing at reporting date the exchange rate

**13. Investasi Jangka Pendek**

**13. Short-Term Investments**

	2017 Rp	2016 Rp	
Deposito berjangka			Time deposits
Pihak berelasi			Related parties
Bank Rakyat Indonesia			Bank Rakyat Indonesia
Rupiah	260,000	367,200	Rupiah
Bank Mandiri			Bank Mandiri
Rupiah	20,000	--	Rupiah
Jumlah pihak berelasi	280,000	367,200	Total related parties
Investasi lain-lain			Other investments
Rupiah	6,697	7,571	Rupiah
<b>Jumlah investasi jangka pendek</b>	<b>286,697</b>	<b>374,771</b>	<b>Total short-term investments</b>
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			Interest rate per annum on time deposits
Rupiah	6% - 6.75%	5.50% - 7.25%	Rupiah
Jangka waktu	6 Bulan/ Months	6 Bulan/ Months	Maturity

Risiko kredit pada aset keuangan tersebut dianggap dapat diabaikan, sebab pihak lawan merupakan bank terkemuka dengan peringkat kredit eksternal berkualitas tinggi.

The credit risk on these financial assets is considered negligible, since the counterparties are reputable banks with high quality external credit ratings.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**14. Piutang Usaha**

**14. Trade Receivables**

**a. Berdasarkan langganan**

	2017 Rp	2016 Rp
Pihak berelasi		
Badan Usaha Milik Negara	583,539	568,123
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2,546)	(2,665)
Jumlah pihak berelasi - bersih	580,993	565,458
Pihak ketiga		
Umum	21,330,953	20,444,950
TNI dan Polri	634,603	603,286
Institusi lainnya	1,095,398	1,120,444
Subjumlah	23,060,954	22,168,680
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,175,104)	(1,023,177)
Jumlah pihak ketiga - bersih	21,885,850	21,145,503
<b>Bersih</b>	<b>22,466,843</b>	<b>21,710,961</b>

**b. Berdasarkan umur piutang usaha yang belum diturunkan nilainya**

	2017 Rp	2016 Rp
Belum jatuh tempo	20,607,638	19,806,412
Lewat jatuh tempo		
1 s/d 90 hari	1,125,249	1,120,873
91 s/d 360 hari	631,327	735,436
Lebih dari 360 hari	1,280,279	1,074,082
<b>Jumlah</b>	<b>23,644,493</b>	<b>22,736,803</b>
Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai		
Saldo awal tahun	(1,025,842)	(862,624)
Penambahan	(231,295)	(243,244)
Penghapusan	79,487	80,026
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>(1,177,650)</b>	<b>(1,025,842)</b>

Piutang usaha Perusahaan dan PLN Batam dijamin dengan uang jaminan langganan jika terjadi kegagalan pembayaran (Catatan 34).

Provisi kerugian penurunan nilai dibentuk secara kolektif untuk seluruh piutang yang telah lewat jatuh tempo.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang adalah cukup. Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah piutang Perusahaan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai adalah sebesar Rp20.607.638. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada risiko kredit kualitas yang

**a. By debtor**

<i>Related parties</i>
<i>State-Owned Enterprises</i>
<i>Allowance for impairment losses</i>
<i>Total of related parties - net</i>
<i>Third parties</i>
<i>Public</i>
<i>Indonesian Armed Forces</i>
<i>Other institutions</i>
<i>Subtotal</i>
<i>Allowance for impairment losses</i>
<i>Total of third parties - net</i>
<b>Net</b>

**b. By age category of receivables that are not impaired**

<i>Not yet due</i>
<i>Past due</i>
<i>1 to 90 days</i>
<i>91 to 360 days</i>
<i>More than 360 days</i>
<b>Total</b>

<i>Changes in the allowance for impairment losses</i>
<i>Balance at beginning of year</i>
<i>Additions</i>
<i>Write-off</i>
<b>Balance at end of year</b>

The Company and PLN Batam trade receivables are secured by the customers' security deposits in case of default (Note 34).

Provision for impairment losses were made collectively for all trade receivables which are past due.

Management believes that the allowances made for impairment losses are adequate. As of December 31, 2017, the Company's receivables balance that is neither past due nor impaired amounted to Rp20,607,638. Management believes there is no heightened risk of poor credit quality of accounts receivable because it has a broad

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

buruk karena Perusahaan memiliki jumlah pelanggan yang besar, tersebar mencakupi segmen pasar dan area geografis yang luas di seluruh Indonesia. Kesimpulan ini didukung juga oleh data historis kolektibilitas Perusahaan atas piutang usaha yang baik selama beberapa tahun.

*customer base, dispersed across varying market segments and geographic locations throughout Indonesia. This assessment is also supported by the Company's good historical collection rate of trade receivable across the years.*

**15. Piutang Subsidi Listrik**

**15. Receivables on Electricity Subsidy**

	2017 Rp	2016 Rp	
Tahun anggaran			<i>Budget years</i>
2015	--	5,220,148	<i>2015</i>
2016	7,225,962	7,225,962	<i>2016</i>
2017	363,015	--	<i>2017</i>
<b>Jumlah</b>	<b>7,588,977</b>	<b>12,446,110</b>	<b>Total</b>

Selama tahun 2017, Perusahaan telah menerima piutang subsidi listrik tahun anggaran 2015 sebesar Rp5.220.148.

*In 2017, the Company collected receivables on electricity subsidy for budget year 2015 amounting to Rp5,220,148.*

Tidak ada kerugian penurunan nilai yang dicatat sehubungan dengan piutang di atas. Tidak ada jumlah yang diklasifikasikan sebagai lewat jatuh tempo sehubungan dengan piutang tersebut. Risiko kredit pada piutang subsidi listrik dianggap dapat diabaikan, sebab pihak lawan merupakan Pemerintah Indonesia.

*No impairment loss has been recorded in relation to the receivables mentioned above. No amounts in relation to these receivables are classified as past due. The credit risk on receivables on electricity subsidy is considered negligible, since the counterparty is the Government of Indonesia.*

**16. Piutang Lain-Lain**

**16. Other Receivables**

	2017 Rp	2016 Rp	
Karyawan	419,355	373,652	<i>Employees</i>
Lain-lain	1,887,831	2,388,197	<i>Others</i>
Jumlah	2,307,186	2,761,849	<i>Total</i>
Dikurangi bagian jangka pendek	1,672,237	2,411,384	<i>Less current portion</i>
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>634,949</b>	<b>350,465</b>	<b>Long-term portion</b>

**Karyawan**

Piutang karyawan merupakan pinjaman kepemilikan rumah. Pelunasan piutang dilakukan melalui pemotongan gaji.

**Employees**

*Account receivables from employees represent housing loans, which are paid monthly through salary deduction.*

Tidak ada kerugian penurunan nilai yang dicatat sehubungan dengan piutang di atas. Tidak ada jumlah yang diklasifikasikan sebagai lewat jatuh tempo sehubungan dengan piutang tersebut. Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa piutang tersebut dapat tertagih.

*No impairment loss has been recorded in relation to the receivables mentioned above. No amounts in relation to these receivables are classified as past due. The Company's management considers these receivables to be collectible.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**17. Persediaan**

**17. Inventories**

	2017 Rp	2016 Rp	
Batubara, bahan bakar dan pelumas	6,834,510	6,066,737	Coal, fuel and lubricants
Persediaan umum	2,841,745	2,827,297	General supplies
Switchgear dan jaringan	1,941,795	1,701,724	Switchgear and network
Alat ukur, pembatas dan kontrol	966,924	745,438	Meter recording device and control equipment
Transformator	243,968	250,364	Transformers
Kabel	120,214	93,361	Wire
Jumlah	12,949,156	11,684,921	Total
Penyisihan penurunan nilai	(121,038)	(115,325)	Allowance for decline in value
<b>Bersih</b>	<b>12,828,118</b>	<b>11,569,596</b>	<b>Net</b>
Mutasi penyisihan penurunan nilai			Changes in allowance for decline in value
Saldo awal tahun	(115,325)	(115,553)	Balance at beginning of year
Pemulihan (penambahan)	(5,713)	228	Recovery (addition)
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>(121,038)</b>	<b>(115,325)</b>	<b>Balance at end of year</b>

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan yang ditetapkan memadai untuk menutup risiko penurunan nilai persediaan.

Management believes that the allowance is adequate to cover possible losses on the decline in value of inventories.

Perusahaan dan entitas anak tidak mengasuransikan persediaan untuk menutup risiko atas kemungkinan kerugian yang timbul pada persediaan.

The Company and its subsidiaries do not have any insurance coverage to cover the possible losses in inventories.

**18. Pajak Dibayar Dimuka**

**18. Prepaid Taxes**

	2017 Rp	2016 Rp	
Pajak penghasilan badan lebih bayar Perusahaan			Overpayment of corporate income tax The Company
2017	91,988	--	2017
2016	--	105,548	2016
2015	--	2,323,797	2015
2014	--	147,993	2014
Entitas anak			Subsidiaries
2017	521,690	--	2017
2016	716,827	716,827	2016
2015	--	126,990	2015
Bea materai	37,343	23,977	Stamp duty
Pajak pertambahan nilai	1,198,810	821,211	Value added tax
Pembayaran dimuka atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	2,430,735	2,940,187	Prepayment of Tax Assessment Letter for Underpayment
<b>Jumlah</b>	<b>4,997,393</b>	<b>7,206,530</b>	<b>Total</b>

Lihat catatan 47 untuk informasi mengenai beban pajak penghasilan dan surat ketetapan pajak.

Refer to Note 47 for income tax expense information and tax assessment letters.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**19. Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka**

**19. Prepaid Expenses and Advances**

	2017 Rp	2016 Rp	
Biaya dibayar dimuka			<i>Prepaid expenses</i>
Premi asuransi	75,706	79,261	<i>Insurance</i>
Sewa	58,450	119,351	<i>Rent</i>
Subjumlah	134,156	198,612	<i>Subtotal</i>
Uang muka			<i>Advances</i>
Pembelian barang	864,840	199,749	<i>Purchases</i>
Lain-lain	630,613	499,678	<i>Others</i>
Subjumlah	1,495,453	699,427	<i>Subtotal</i>
<b>Jumlah</b>	<b>1,629,609</b>	<b>898,039</b>	<b>Total</b>

**20. Modal Saham dan Saldo Laba**

**20. Capital Stock and Retained Earnings**

Modal saham

Seluruh saham Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan mempunyai modal dasar sebesar Rp439.000.000 yang terbagi atas 439.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1 per saham.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa tanggal 18 Juli 2001, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 43 tanggal 26 Oktober 2001 dari Haryanto, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui antara lain:

- Melakukan konversi utang Perusahaan kepada Pemerintah sebesar Rp28.781.355, yang berasal dari tunggakan bunga dan denda penerusan pinjaman menjadi tambahan penyertaan modal Pemerintah. Konversi utang menjadi penyertaan modal telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai surat No. S-352/MK.06/2001 tanggal 20 Juni 2001.
- Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp28.781.354, sehingga modal ditempatkan dan disetor Perusahaan menjadi sebesar Rp46.107.154, terbagi atas 46.107.154 saham dengan nilai nominal Rp1 per saham.

Capital stock

The Company's shares of stock are wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia.

As of December 31, 2017, the Company has authorized capital amounting to Rp439,000,000 consisting of 439,000,000 shares, with par value of Rp1 per share.

Based on the Extraordinary Stockholders' General Meeting ("RUPS") dated July 18, 2001, as stated in Deed No. 43 dated October 26, 2001 of Haryanto, S.H., notary in Jakarta, the stockholders approved among other items as follows:

- Convert the Company's liability to the Government amounted Rp28,781,355, arising from overdue interest and penalty on two-step loans into Government Equity Participation. The conversion was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its decision letter No. S-352/MK.06/2001 dated June 20, 2001.
- Increase the subscribed and paid-up capital by Rp28,781,354, resulting in the Company's total subscribed and paid-up capital amounting to Rp46,107,154 consisting of 46,107,154 shares with par value of Rp1 per share.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

*For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

Pada tanggal 1 Agustus 2001, tambahan penyertaan modal Pemerintah tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.61 tahun 2001.

*On August 1, 2001, the additional equity participation from Government has been stated in Government Regulation No.61 year 2001.*

Pada tanggal 4 Maret 2011, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2011 sehubungan dengan tambahan penyertaan modal Pemerintah pada Perusahaan sebanyak 90.226 saham atau sebesar Rp90.226. Tambahan penyertaan modal Pemerintah tersebut dilakukan dengan cara mengalihkan seluruh saham milik Pemerintah pada PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.

*On March 4, 2011, the Government of the Republic of Indonesia issued Government Regulation No. 20 year 2011 relating to the increase in the Government's equity participation in the Company, consisting of 90,226 shares or an equivalent of Rp90,226. The increase in the Government's equity participation in the Company is through the transfer of the Government's share in PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.*

Berdasarkan keputusan pemegang saham Perusahaan di luar Rapat Umum Pemegang Saham No. KEP-118/MBU/2011 tanggal 27 Mei 2011, sebagaimana tercantum dalam akta notaris No. 4 tanggal 5 Agustus 2011 dari Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui pengeluaran saham baru Perusahaan untuk diambil bagian oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp90.226 atau sebanyak 90.226 saham. Penambahan penerbitan saham kepada Pemerintah Republik Indonesia berasal dari pengalihan 21.674 saham milik Pemerintah Republik Indonesia pada PT Pelayaran Bahtera Adhiguna kepada Perusahaan. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan akta pengalihan saham PT Pelayaran Bahtera Adhiguna dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Perusahaan di tahun 2011.

*Based on the decision of the Company's shareholders at the General Shareholders Meeting No. KEP-118/MBU/2011, dated May 27, 2011, as stated in Deed No. 4, dated August 5, 2011 of Lenny Janis Ishak, S.H., notary in Jakarta, the stockholders approved the new issuance of the Company's shares as stocks to the Government of Republic of Indonesia in the amount of Rp90,226, equivalent to 90,226 shares. The additional issuance of shares to the Government of the Republic of Indonesia came from the transfer of 21,674 shares of the Government of the Republic of Indonesia in PT Pelayaran Bahtera Adhiguna to the Company. The Decision has been effective since the date the Company received the Deed of Transfer of PT Pelayaran Bahtera Adhiguna shares of the Government of the Republic of Indonesia to the Company in 2011.*

Berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-82/MBU/01/2016 tanggal 25 Januari 2016, sebagaimana tercantum dalam akte notaris No. 12 tanggal 22 Februari 2016, pernyataan Keputusan Menteri BUMN sebagai RUPS menyetujui hal-hal sebagai berikut:

*Based on letter of Minister of BUMN No. S-82/MBU/01/2016 dated January 25, 2016, as stated in notarial deed No. 12 dated February 22, 2016, the decision of Minister of BUMN as RUPS approved items as following:*

- Peningkatan modal dasar menjadi sebesar Rp204.000.000.
- Penambahan penyertaan modal Negara sebesar 9.468.627 lembar saham dengan nilai Rp9.468.627 sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp55.666.007.

- *Increase of authorized capital stock to Rp204,000,000.*
- *Additional Government's equity participation of 9,468,627 shares amounted to Rp9,468,627, increase in subscribed and paid-up capital to Rp55,666,007.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-271/MBU/05/2017 tanggal 4 Mei 2017, pernyataan Keputusan Menteri BUMN sebagai RUPS menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Peningkatan modal dasar menjadi sebesar Rp439.000.000.
- Penambahan penyertaan modal negara sebesar 54.160.519 lembar saham dengan nilai Rp54.160.519 sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp109.826.526, dengan rincian sebagai berikut:
  - Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 dan No. 17 tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016, sebesar masing-masing Rp8.860.208 dan Rp11.159.688.
  - Sebesar Rp10.580.623 berasal dari Penambahan Modal Negara Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2016 tanggal 8 Agustus 2016.
  - Sebesar Rp23.560.000 berasal dari Penambahan Modal Negara Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016.

Atas persetujuan Penyertaan Modal Negara tersebut, maka pada tahun berjalan penyertaan modal Negara dalam proses penerbitan saham direklasifikasi ke modal ditempatkan dan disetor.

Saldo laba

Saldo laba terdiri dari:

- i. Saldo laba yang ditentukan penggunaannya  
Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Berdasarkan RUPS tahun 2015 No. SKU-146/MBU/06/2016 pada tanggal 30 Juni 2016, terdapat saldo laba tahun 2015 yang ditetapkan sebagai cadangan umum sebesar Rp13.431.547.

Based on letter of Minister of BUMN No. S-271/MBU/05/2017 dated May 4, 2017, the decision of Minister of BUMN as RUPS approved items as following:

- Increase of authorized capital stock to Rp439,000,000.
- Additional Government's equity participation of 54,160,519 shares amounted to Rp54,160,519, increase in subscribed and paid-up capital to Rp109,826,526, with details as follows:
  - Based on Government Regulation No. 16 and No. 17 year 2016 dated May 25, 2016, amounting to Rp8,860,208 and Rp11,159,688, respectively.
  - Amounting to Rp10,580,623 were from Government's Equity Participation, based on Government Regulation No. 33 year 2016 dated August 8, 2016.
  - Amounting to Rp23,560,000 were from Government's Equity Participation, based on Government Regulation No. 91 year 2016 dated December 30, 2016.

Following the approval for the Government Participation, therefore in current year the stock subscription from Government in issuance process has been reclassified to subscribed and paid-up capital.

Retained earnings

Retained earnings consist of:

- i. Appropriated retained earnings

Under Indonesian Limited Company Law, the Company is required to establish a statutory reserve amounting to at least 20% of the Company's subscribed and paid-up capital.

Based on RUPS for the year 2015 No. SKU-146/MBU/06/2016 dated June 30, 2016, there is an allocation of appropriated from the 2015 retained earnings amounting to Rp13,431,547.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Berdasarkan RUPS tahun 2016 No. RIS-08/D2.MBU/05/2017 pada tanggal 26 Mei 2017, terdapat saldo laba tahun 2016 yang ditetapkan sebagai cadangan umum sebesar Rp8.361.075.

Saldo laba yang dicadangkan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp48.665.115 dan Rp40.304.040 atau 44% dan 72% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

- ii. Saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya  
Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya masing-masing sebesar Rp71.093.240 dan Rp77.194.942.

Dividen per lembar saham

Pada tahun 2017 dan 2016, Perusahaan membagikan total dividen kas untuk tahun 2016 dan 2015 masing-masing sejumlah Rp2.150.837 atau Rp 19.584 (nilai penuh) per lembar saham dan Rp2.137.752 atau Rp38.403 (nilai penuh) per lembar saham.

Based on RUPS for the year 2016 No. RIS-08/D2.MBU/05/2017 dated May 26, 2017, there is an allocation of appropriated from the 2016 retained earnings amounting to Rp8,361,075.

The balance of the appropriated retained earnings as of December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp48,665,115 and Rp40,304,040 or 44% and 72%, respectively of the Company's subscribed and paid-up capital.

- ii. Unappropriated retained earnings

On December 31, 2017 and 2016 the balance of the unappropriated retained earnings amounted to Rp71,093,240 and Rp77,194,942, respectively.

Dividends per share

As of 2017 and 2016, the Company paid a total of cash dividend for 2016 and 2015 amounting to Rp2,150,837 or Rp19,584 (full amount) per share and Rp2,137,752 or Rp38,403 (full amount) per share, respectively.

**21. Tambahan Modal Disetor dan Penyertaan Modal Negara dalam Proses Penerbitan Saham**

**a. Tambahan modal disetor**

Tambahan modal disetor terdiri dari tambahan penyertaan modal Pemerintah yang diterima Perusahaan yang statusnya belum ditetapkan dan sebagai akibat keikutsertaan Perusahaan dalam pengampunan pajak, dengan rincian sebagai berikut:

	2017 Rp	2016 Rp
Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya :		
Bantuan proyek	2,117,922	2,117,922
Daftar isian pelaksanaan anggaran	18,611,979	18,303,679
Bantuan Pemerintah daerah dan lainnya	--	1,281,038
Subjumlah	<u>20,729,901</u>	<u>21,702,639</u>
Pengampunan pajak :		
Aset pengampunan pajak	141,364	94,377
<b>Jumlah</b>	<b><u>20,871,265</u></b>	<b><u>21,797,016</u></b>

**21. Additional Paid-In Capital and Stock Subscription from Government in Issuance Process**

**a. Additional paid-in capital**

Additional paid-in capital consists of the Government's additional equity participation received by the Company of which the status has not been determined and as a result of the Company's participation in Tax amnesty program with the following details:

Government's participation which status has not been determined :  
Project aid  
List of project fund  
Local Government participation and others  
Subtotal  
Tax amnesty :  
Tax amnesty assets  
**Total**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Bantuan proyek merupakan bantuan luar negeri untuk bidang kelistrikan yang diteruskan Pemerintah Republik Indonesia kepada Perusahaan.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ("DIPA") merupakan penerimaan dari Pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk proyek kelistrikan melalui Kementerian ESDM.

Bantuan Pemerintah daerah antara lain berupa tanah dan jaringan listrik yang disumbangkan kepada Perusahaan.

Jumlah aset yang didonasikan oleh Pemerintah Republik Indonesia telah dicatat sebagai penambahan aset.

Di tahun 2017 dan 2016, Tambahan modal disetor berasal dari partisipasi Perusahaan dan Entitas Anak dalam Pengampunan Pajak adalah masing-masing sebesar Rp141.364 dan Rp94.693 (Catatan 47).

**b. Penyertaan Modal Negara dalam proses penerbitan saham**

Pada tanggal 28 Desember 2015, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2015 dan No. 125 tahun 2015 sehubungan dengan penambahan modal saham (Penyertaan Modal Pemerintah) sejumlah masing-masing Rp4.468.627 dan Rp5.000.000. Sejumlah Rp5.000.000 merupakan setoran tunai, sedangkan Rp4.468.627 merupakan reklasifikasi dari tambahan modal disetor.

Per tanggal 31 Desember 2016, sesuai dengan akta notaris dari Lenny Janis Ishak, S.H., No. 12 tanggal 22 Februari 2016, akun ini telah direklasifikasi ke modal ditempatkan dan disetor.

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2016 dan No. 17 tahun 2016 serta No. 33 tahun 2016 sehubungan dengan penambahan modal saham (Penyertaan Modal Negara) sebesar masing-masing Rp8.860.208 dan Rp11.159.688 serta Rp10.580.623 yang merupakan reklasifikasi dari tambahan modal disetor.

*Project aid represents overseas aid for electricity projects, which was channelled by the Government of the Republic of Indonesia to the Company.*

*The List of Project Fund ("LFP") represents electricity projects received from the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of ESDM.*

*Local Government participation represents land and electricity equipment donated by the Local Government to the Company.*

*The total amount of assets contributed by the Government of the Republic of Indonesia that have been recognized as addition of assets.*

*In year 2017 and 2016, Additional paid-in capital arising from the Company's and Subsidiaries' participation in Tax Amnesty were amounted to Rp141,364 and Rp94,693, respectively (Note 47).*

**b. Stock subscription from Government in issuance process**

*On December 28, 2015, the Government of Republic of Indonesia issued Regulation No. 42 year 2015 and No. 125 year 2015 regarding additional capital stock (Government's equity participation) amounting to Rp4,468,627 and Rp5,000,000, respectively. An amount of Rp5,000,000 was in cash, whereas Rp4,468,627 was reclassified from additional paid-in capital.*

*As of December 31, 2016, based on notarial deed of Lenny Janis Ishak, S.H., No. 12 dated February 22, 2016, this account has been reclassified to subscribed and paid-up capital.*

*The Government of Republic of Indonesia issued Government Regulation No. 16 year 2016 and No. 17 Year 2016 and No. 33 year 2016 regarding additional capital stock (Government's Equity Participation) amounting to Rp8,860,208, Rp11,159,688 and Rp10,580,623, respectively, which was reclassified from additional paid-in-capital.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

*For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

Pada tanggal 30 Desember 2016, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2016 sehubungan dengan penambahan modal saham (Penyertaan Modal Negara) sebesar Rp23.560.000.

Berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-271/MBU/05/2017 tanggal 4 Mei 2017, dilakukan reklasifikasi dari pernyataan modal negara dalam proses penerbitan saham ke modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp54.160.519.

*On the December 30, 2016, the Government of Republic of Indonesia issued Government Regulation No. 91 year 2016 regarding additional capital stock (Government's Equity Participation) amounting to Rp23,560,000.*

*Based on the Minister of BUMN's letter No. S-271/MBU/05/2017 dated May 4, 2017, the Company reclassified from stock subscription from Government in issuance process to subscribed and paid-up capital stock amounting to Rp54,160,519.*

**22. Pendapatan Ditangguhkan**

Akun ini merupakan penerimaan dari pelanggan yang mana jasa penyambungan terkait belum diselesaikan oleh Perusahaan. Rincian pendapatan ditangguhkan adalah sebagai berikut:

	2017 Rp	2016 Rp
Saldo awal tahun	1,147,227	1,533,703
Penerimaan tahun berjalan	7,184,627	6,665,660
Diakui sebagai pendapatan tahun berjalan	(7,113,454)	(7,052,136)
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>1,218,400</b>	<b>1,147,227</b>

**22. Deferred Revenue**

*This account represents connection fees received from customers for which the connection services have not been completed by the Company. Details of the deferred revenue are as follows:*

*Balance at beginning of year  
Addition during the year  
Recognized as revenue during the year  
Balance at end of year*

**23. Penerusan Pinjaman**

Akun ini merupakan pinjaman luar negeri Pemerintah Republik Indonesia yang tidak diikat jaminan dan diteruskan kepada Perusahaan untuk membiayai proyek-proyek Perusahaan. Rincian penerusan pinjaman adalah sebagai berikut:

**23. Two-Step Loans**

*This account represents overseas, collateral-free loans of the Government of the Republic of Indonesia which are passed on to the Company to finance its projects. The details of the two-step loans are as follows:*

	2017				Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Periode/ Period **)
	Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *)	Ekuivalen/ Equivalent Rp	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun/ Current maturities Rp	Bagian jangka panjang/ Long-term portion Rp		
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) US\$						
IBRD - 4712 dan/and 7758 IND - 1165	48,280,898	654,110	126,999	527,111	LIBOR Total Spread + 0.35% p.a	2004 - 2023
IBRD - 7905 IND - 1235	18,679,717	253,317	--	253,317	LIBOR + variable spread + 0.45% p.a	2010 - 2034
IBRD - 7940 IND - 1238	129,504,864	1,754,532	--	1,754,532	LIBOR + variable spread + 0.45% p.a	2011 - 2034
IBRD - 8057 IND - 1244	32,093,145	434,798	--	434,798	IBRD + variable spread + 0.45% p.a	2012 - 2035
IBRD 8280 ID - 1256	38,820,116	525,935	--	525,935	LIBOR + variable spread + 0.45% p.a	2014 - 2034

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2017					Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Periode/ Period *)
	Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *)	Ekuivalen/ Equivalent Rp	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun/ Current maturities Rp	Bagian jangka panjang/ Long-term portion Rp			
<b>Asian Development Bank (ADB)</b>							
US\$							
ADB - 1982 INO - 1170	117,148,496	1,587,128	98,567	1,488,561	LIBOR + 0.35% p.a	2004 - 2027	
ADB - 1983 INO - 1171	79,569,625	1,078,009	66,949	1,011,060	LIBOR + 0.35% p.a	2004 - 2027	
ADB - 2619 INO - 1236	37,336,925	505,841	11,481	494,360	LIBOR + 0.6% - 0.4% + 0.45% p.a	2010 - 2035	
ADB 3015 INO - 1255	30,079,899	407,523	20,117	387,406	LIBOR + 0.60% + 0.45% p.a	2014 - 2033	
ADB 3083 INO - 1257	13,623,577	184,572	--	184,572	LIBOR + 0.60% + 0.45% p.a	2014 - 2033	
ADB 8276 INO - 1258	1,507,721	20,427	--	20,427	LIBOR + 1.40% + 0.45% p.a	2014 - 2033	
<b>Kreditanstalt Fur Wiederaufbau, Jerman (KfW)</b>							
EUR							
KfW - 95.65.136 - 934a	3,245,830	52,497	17,499	34,998	0.75% + 2% dan/ and 2% + 0.35% dan/ and KfW + 0.35% p.a	1996 - 2020	
KfW - 10599 IND - 1179	1,177,695	19,048	19,048	--	4.86% + 0.35% p.a	2003 - 2018	
<b>Japan Bank for International Cooperation (d/h The Export-Import Bank of Japan)</b>							
JPY							
JBIC IP 512 - 1163	42,263,808,000	5,080,887	317,555	4,763,332	1.8% + 0.35% p.a	2004 - 2033	
JBIC IP 513 - 1164	12,898,784,000	1,550,671	96,917	1,453,754	1.8% + 0.35% p.a	2004 - 2033	
JBIC IP 515 - 1177	45,553,398,000	5,476,356	331,900	5,144,456	1.3% + 0.35% p.a	2004 - 2034	
JBIC IP 516 - 1196	485,109,000	58,319	2,201	56,118	0.75% + 0.35% p.a	2004 - 2044	
JBIC IP 517 - 1178	4,200,303,000	504,954	19,055	485,899	0.75% + 0.35% p.a	2004 - 2044	
JBIC 1187	375,430,598	45,134	30,089	15,045	2.01% + 1.99% + 0.35% p.a	2004 - 2019	
JBIC IP 525 - 1197	14,488,100,000	1,741,736	63,336	1,678,400	0.75% + 0.35% p.a	2005 - 2045	
JBIC IP 526 - 1198	610,769,778	73,426	2,670	70,756	0.75% + 0.35% p.a	2005 - 2045	
JBIC IP 527 - 1211	9,677,262,639	1,163,385	56,750	1,106,635	1.75% p.a	2007 - 2037	
JBIC IP 532 - 1214	1,130,824,901	135,946	108,957	26,989	1.2% p.a	2006 - 2048	
JBIC IP 537 - 1220	64,805,810	7,791	7,791	--	1.95% p.a	2009 - 2037	
JBIC IP 538 - 1221	15,282,898,960	1,837,286	102,544	1,734,742	1.2% p.a	2009 - 2047	
JBIC IP 539 - 1222	9,556,794,000	1,148,902	58,918	1,089,984	1.95% p.a	2009 - 2037	
JICA IP 555 - 1231	1,572,911,089	189,093	--	189,093	0.012% p.a	2013 - 2039	
JICA IP 556 - 1249	1,706,628,617	205,168	--	205,168	1.4% + 0.45% p.a	2013 - 2040	
JICA - IP 560- 1253	1,012,008,401	121,662	--	121,662	0.3% + 0.45% dan/ and 0.01% + 0.45% p.a	2013 - 2053	
JBIC - 1243	1,739,865,998	209,164	46,485	162,679	1.82% + 1.04% + 0.45% p.a	2012 - 2022	
JBIC - 1188	124,351,289	14,949	14,949	--	4.02% + 0.35% p.a	2005 - 2018	
JBIC - 1192	926,209,575	111,347	111,347	--	4.47% + 0.35% p.a	2005 - 2018	
JBIC LA No 1 - 1216	2,419,585,524	290,879	128,882	163,997	4.41% p.a	2008 - 2020	
JBIC LA No 2 - 1219	432,417,104	51,984	51,984	--	3.9% p.a	2008 - 2018	
JBIC LA No 3 - 1233	328,535,547	39,496	19,590	19,906	3.91% p.a	2010 - 2020	
JBIC LA No 4 - 1234	998,957,100	120,093	63,204	56,889	3.74% p.a	2010 - 2020	
JBIC LA No 5 - 1218	2,154,874,318	259,055	87,724	171,331	3.98% p.a	2008 - 2020	
JBIC - LA 043190-004 -1250	346,875,802	41,701	2,494	39,207	1.58% + 0.62% + 0.45% p.a	2013 - 2025	
JICA - IP 561 - 1252	297,898,894	35,813	--	35,813	0.01% + 0.45% p.a	2013 - 2053	
JICA - IP 572 - 1256	46,145,060	5,547	--	5,547	0.01% + 0.01% p.a	2016 - 2055	
<b>Midland Bank Public Limited Company</b>							
Rupiah							
Midland Bank - 798	--	44,809	14,936	29,873	SUN benchmark related to the year with tenor 20 years	1995 - 2020	
Midland Bank - 818	--	3,430	1,372	2,058	SUN benchmark related to the year with tenor 20 years	1995 - 2020	
<b>Banque Paribas</b>							
Banque Paribas 1063- GBP							
EUR	5,060,582	92,194	18,439	73,755	3.343% + 0.35% p.a	1998 - 2022	
Banque Paribas - 1158							
EUR	5,436,267	87,924	30,084	57,840	Lender interest rate to Government + 0.35% p.a	2002 - 2018	
Banque Paribas - 1176							
EUR	867,807	14,036	14,036	--	4.76% + 0.35% p.a	2004 - 2018	
<b>Calyon and BNP Paribas</b>							
EUR							
Calyon BNP Paribas - 1175	671,010	10,853	10,853	--	5.32% + 0.35% p.a	2004 - 2018	
BNP Paribas dan/and Calyon 1206	12,857,094	207,945	83,178	124,767	4.81% p.a	2006 - 2020	
<b>Kingdom of Belgium/ Kerajaan Belgia - EUR</b>							
Kerajaan Belgia - 1185							
Efic Australia - AUD 1071	1,807,342	29,231	1,827	27,404	0.35% p.a	2005 - 2033	
China Exim Bank 1181 - US\$	6,491,456	68,531	15,229	53,302	3% + 0.35% p.a	1997 - 2022	
China Exim Bank 1248 - US\$	18,574,939	251,653	251,653	--	3% + 0.35% p.a	2003 - 2018	
China Exim Bank 1260 - US\$	90,368,570	1,224,313	104,130	1,120,183	3% + 0.35% p.a	2013 - 2027	
China Exim Bank 1261 - US\$	154,388,984	2,091,662	--	2,091,662	3% + 0.35% p.a	2015 - 2029	
China Exim Bank 1180 - US\$	108,237,447	1,466,401	--	1,466,401	3% + 0.35% p.a	2015 - 2029	
MKB Hungaria 1180 - US\$	313,552	4,248	4,248	--	4.81% + 0.35% p.a	2005 - 2018	
A G Francaise 101901F - 1237 - US\$	19,121,875	259,063	67,740	191,323	AFD + 0.47% + 0.45% p.a	2010 - 2035	
AFD - 1254 - US\$	26,071,951	353,222	33,531	319,691	LIBOR + 0.89% + 0.45% p.a	2013 - 2028	
AFD CID 1039 01H - 1259 - US\$	994,346	13,472	734	12,738	LIBOR + 2.05% + 0.35% p.a	2014 - 2026	
<b>Total</b>	<b>34,221,468</b>	<b>2,735,992</b>	<b>31,485,476</b>				

\*) Dalam jumlah penuh/ In full amount

\*\*) Termasuk masa tenggang pembayaran/ Include grace periods in terms of payments

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2016					
	Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *)	Ekuivalen/ Equivalent Rp	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun/ Current maturities Rp	Bagian jangka panjang/ Long-term portion Rp	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Periode/ Period **)
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)						
US\$						
IBRD - 4712 dan/ and 7758 IND - 1165	57,492,186	772,465	123,763	648,702	LIBOR Base Rate + LIBOR Total Spread + 0,35%	2004 - 2023
IBRD - 7905 IND - 1235	18,698,765	251,237	--	251,237	LIBOR + variable spread + 0,45%	2010 - 2034
IBRD - 7940 IND - 1238	107,620,142	1,445,984	--	1,445,984	LIBOR + variable spread + 0,45%	2011 - 2034
IBRD - 8057 IND - 1244	30,963,783	416,029	--	416,029	IBRD + variable spread + 0,45%	2012 - 2035
IBRD 8280 ID - 1256	20,376,581	273,780	--	273,780	LIBOR + variable spread + 0,45%	2014 - 2034
Asian Development Bank (ADB)						
US\$						
ADB - 1982 IND - 1170	123,730,235	1,662,439	88,432	1,574,007	LIBOR + 0,35%	2004 - 2027
ADB - 1983 IND - 1171	84,040,075	1,129,162	60,065	1,069,097	LIBOR + 0,35%	2004 - 2027
ADB - 2619 IND - 1236	38,105,575	511,987	10,328	501,659	LIBOR + 0,6% - 0,4% + 0,45%	2010 - 2035
ADB 3015 IND - 1255	28,081,613	377,305	15,100	362,205	LIBOR + 0,60% + 0,45%	2014 - 2033
ADB 3083 IND - 1257	1,916,913	25,756	--	25,756	LIBOR + 0,60% + 0,45%	2014 - 2033
ADB 8276 IND - 1258	212,900	2,861	--	2,861	LIBOR + 1,40% + 0,45%	2014 - 2033
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau, Jerman (KfW)						
EUR						
KfW - 95.65.136 - 934a	4,327,774	61,288	15,322	45,966	0,75% + 2% dan/ and 2% + 0,35% dan/ and KfW + 0,35%	1996 - 2020
KfW - 10599 IND - 1179	3,533,086	50,034	33,356	16,678	4,86% + 0,35%	2003 - 2018
US\$						
KfW - 10598 IND - 1183	1,099,231	14,769	14,769	--	4,75% + 0,35%	2004 - 2017
Japan Bank for International Cooperation/ Japan International Cooperation Agency (d/h The Export-Import Bank of Japan)						
JPY						
JBIC IP 512 - 1163	44,905,296,000	5,182,291	304,841	4,877,450	1,8% + 0,35%	2004 - 2033
JBIC IP 513 - 1164	13,704,958,000	1,581,619	93,036	1,488,583	1,8% + 0,35%	2004 - 2033
JBIC IP 515 - 1177	48,314,210,000	5,575,696	318,611	5,257,085	1,3% + 0,35%	2004 - 2034
JBIC IP 516 - 1196	503,415,000	58,097	2,113	55,984	0,75% + 0,35%	2004 - 2044
JBIC IP 517 - 1178	4,358,805,000	503,027	18,292	484,735	0,75% + 0,35%	2004 - 2044
JBIC - 1187	625,717,662	72,211	28,884	43,327	2,01% + 1,99% + 0,35%	2004 - 2019
JBIC IP 525 - 1197	15,014,940,000	1,732,798	60,800	1,671,998	0,75% + 0,35%	2005 - 2045
JBIC IP 526 - 1198	632,979,588	73,049	2,563	70,486	0,75% + 0,35%	2005 - 2045
JBIC IP 527 - 1211	9,677,262,639	1,116,803	27,239	1,089,564	1,75%	2007 - 2037
JBIC IP 532 - 1214	1,071,392,269	123,644	--	123,644	1,20%	2006 - 2048
JBIC IP 537 - 1220	284,232,810	32,802	25,323	7,479	1,95%	2009 - 2037
JBIC IP 538 - 1221	13,107,907,123	1,512,717	98,444	1,414,273	1,20%	2009 - 2047
JBIC IP 539 - 1222	9,782,320,654	1,128,928	90,744	1,038,184	1,95%	2009 - 2037
JICA IP 555 - 1231	1,412,791,775	163,043	--	163,043	0,012%	2013 - 2039
JICA IP 556 - 1249	1,706,628,617	196,953	--	196,953	1,4% + 0,45%	2013 - 2040
JICA - IP 560- 1253	146,127,599	16,864	--	16,864	0,3% + 0,45% dan/ and 0,01% + 0,45%	2013 - 2053
JBIC - 1243	2,126,533,998	245,412	44,623	200,789	1,82% + 1,04% + 0,45%	2012 - 2022
JBIC - 1188	248,702,574	28,701	14,350	14,351	4,02% + 0,35%	2005 - 2018
JBIC - 1192	2,778,628,705	320,667	213,778	106,889	4,47% + 0,35%	2005 - 2018
JBIC LA No 1 - 1216	3,475,011,524	401,033	121,801	279,232	4,41%	2008 - 2020
JBIC LA No 2 - 1219	906,041,104	104,562	54,659	49,903	3,90%	2008 - 2018
JBIC LA No 3 - 1233	491,491,547	56,721	18,806	37,915	3,91%	2010 - 2020
JBIC LA No 4 - 1234	1,524,699,100	175,958	60,673	115,285	3,74%	2010 - 2020
JBIC LA No 5 - 1218	2,884,580,318	332,895	84,212	248,683	3,98%	2008 - 2020
JBIC - LA 043190-004 -1250	83,451,648	9,631	--	9,631	1,58% + 0,62% + 0,45%	2013 - 2025
JICA - IP 561- 1252	126,748,996	14,627	--	14,627	0,01% + 0,45%	2012 - 2053
Midland Bank Public Limited Company						
Rupiah						
Midland Bank - 798	--	59,745	14,936	44,809	SUN benchmark related to the year with tenor 20 years	1995 - 2020
Midland Bank - 818	--	4,802	1,372	3,430	SUN benchmark related to the year with tenor 20 years	1995 - 2020
Banque Paribas						
Banque Paribas 1063- GBP						
EUR	6,072,698	100,245	16,708	83,537	3,343% + 0,35%	1998 - 2022
Banque Paribas - 1158						
EUR	7,869,441	111,443	34,457	76,986	Lender interest rate to Government + 0,35%	2002 - 2020
Banque Paribas - 1176						
EUR	2,603,421	36,868	24,579	12,289	4,76% + 0,35%	2004 - 2018
Calyon and BNP Paribas						
EUR						
Calyon BNP Paribas - 1175	1,342,021	19,004	9,502	9,502	5,32% + 0,35%	2004 - 2018
BNP Paribas dan/ and Calyon 1206	17,999,931	254,906	72,830	182,076	4,81%	2006 - 2020

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2016			Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Periode/ Period *)
	Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *)	Ekuivalen/ Equivalent Rp	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun/ Current maturities Rp		
Kerajaan Belgia/ Kingdom of Belgium - EUR					
Kerajaan Belgia - 1185	1,920,300	27,194	1,600	0,35%	2005 - 2033
Fortis Bank Belgia - 1186 EUR	156,317	2,214	2,214	4,82% + 0,35%	2005 - 2017
Efic Australia - AUD 1071	7,934,002	77,153	14,028	3% + 0,35%	1997 - 2022
China Exim Bank 1181 - US\$	37,149,879	499,146	249,573	3% + 0,35%	2003 - 2018
China Exim Bank 1248 - US\$	65,931,229	885,852	--	3% + 0,35%	2013 - 2029
China Exim Bank 1260 - US\$	67,508,912	907,050	--	3% + 0,35%	2015 - 2030
China Exim Bank 1261 - US\$	18,926,646	254,298	--	3% + 0,35%	2015 - 2030
MKB Hungaria 1180 - US\$	940,656	12,639	8,426	4,81% + 0,35%	2005 - 2018
AG Francaise 101901F - 1237 - US\$	24,121,875	324,102	67,180	AFD + 0,47%+0,45%	2010 - 2025
AFD - 1254 - US\$	26,071,951	350,303	--	LIBOR + 0,7% + 0,45%	2013 - 2028
AFD CID 1039 01H - 1259 - US\$	988,288	13,279	--	LIBOR + 2,05%+0,35%	2014 - 2026
<b>Total</b>		<b>31,696,088</b>	<b>2,562,332</b>		<b>29,133,756</b>

\*) Dalam jumlah penuh/ In full amount

\*\*) Termasuk masa tenggang pembayaran/ Include grace periods in terms of payments

Perusahaan melakukan pembayaran pokok dan bunga penerusan pinjaman sesuai dengan jadwal pembayaran dan memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian penerusan pinjaman.

The Company made payments of principal and interest on the two-step loans in accordance with the schedule of payment and complied with the restrictions specified within the agreements of the two-step loans.

Rincian penerusan pinjaman dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of the two-step loans in foreign currencies are as follows:

	2017		2016		
	Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *)	Ekuivalen/ Equivalent Rp	Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *)	Ekuivalen/ Equivalent Rp	
US\$	964,734,649	13,070,226	753,977,435	10,130,441	US\$
JPY	170,695,553,004	20,520,744	179,894,874,250	20,760,750	JPY
EUR	26,063,045	421,534	39,752,290	562,954	EUR
Lain-lain **)	11,863,438	160,725	13,203,171	177,396	Others **)
<b>Jumlah</b>		<b>34,173,229</b>		<b>31,631,541</b>	<b>Total</b>

\*) Dalam jumlah penuh

\*\*) Penerusan pinjaman dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara US\$, menggunakan kurs tanggal pelaporan

\*) In full amount

\*\*) Two-step loans denominated in other foreign currencies are presented as US\$ equivalents using the exchange rates prevailing at the reporting date

**24. Utang Kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah Non-bank**

**24. Government and Non-Bank Government Financial Institution Loans**

	2017 Rp	2016 Rp	
Rekening Dana Investasi No. RDI-393/DP3/2001	817,580	1,061,727	Investment Fund Account No. RDI-393/DP3/2001
PT Sarana Multi Infrastruktur	6,535,386	7,239,876	PT Sarana Multi Infrastruktur
<b>Jumlah</b>	<b>7,352,966</b>	<b>8,301,603</b>	<b>Total</b>
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	1,043,793	1,043,793	Less current maturities
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>6,309,173</b>	<b>7,257,810</b>	<b>Long-term portion</b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Rekening Dana Investasi 393/DP3/2001	No. RDI-	2017	2016	Investment Fund Account No. RDI- 393/DP3/2001
		Rp	Rp	
Pokok pinjaman		881,378	1,175,171	<i>Principal</i>
Perbedaan nilai wajar		(63,798)	(113,444)	<i>Fair value difference</i>
<b>Jumlah</b>		<b>817,580</b>	<b>1,061,727</b>	<b>Total</b>

Sesuai Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-352/MK.06/2001, pada tanggal 20 Juni 2001 Perusahaan dan Pemerintah Republik Indonesia menyetujui restrukturisasi tunggakan angsuran pokok penerusan pinjaman sebesar Rp5.288.268 menjadi pinjaman berjangka waktu 20 tahun sampai dengan 30 Juli 2021. Pinjaman ini dikenakan bunga 4% per tahun, tanpa jaminan, dan dibayar secara angsuran setiap semester sebesar Rp146.896.

As stated on the letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. S-352/MK.06/2001, on June 20, 2001 the Company and the Government of the Republic of Indonesia agreed to restructure the overdue principal of the two-step loans amounting to Rp5,288,268 to become 20 years period matured on July 30, 2021. The loan bears interest at 4% per annum, unsecured, and paid-in semi-annual installments of Rp146,896.

**PT Sarana Multi Infrastruktur**

	2017	2016	
	Rp	Rp	
Pokok pinjaman	6,750,000	7,500,000	<i>Principal</i>
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(20,461)	(24,854)	<i>Unamortized transaction cost</i>
Perbedaan nilai wajar	(194,153)	(235,270)	<i>Fair value difference</i>
<b>Jumlah</b>	<b>6,535,386</b>	<b>7,239,876</b>	<b>Total</b>

**PT Sarana Multi Infrastruktur**

Pada tanggal 13 Desember 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman lunak dari Pusat Investasi Pemerintah ("PIP") Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp7.500.000, dengan tingkat bunga 5,25% per tahun berjangka waktu 15 tahun.

On December 13, 2011, the Company obtained soft loan facility from the Government Investment Center ("PIP") under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia amounting to Rp7,500,000, with an annual interest rate of 5.25% with 15 years term.

Pinjaman ini digunakan untuk membiayai pengadaan dan penggantian trafo, instalasi perlengkapan transmisi dan distribusi serta investasi lainnya.

This loan was used to finance the procurement and replacement of transformers, the equipment installation of transmission and distribution and also other capital expenditures.

Pada tanggal 23 Desember 2015, telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian pengalihan antara PIP dan PT Sarana Multi Infrastruktur ("SMI") yang mengalihkan seluruh hak dan kewajiban PIP kepada SMI pada saat ini maupun pada masa yang akan datang yang meliputi kepentingan dan tanggungjawab dalam perjanjian investasi Perusahaan.

On December 23, 2015, PIP and PT Sarana Multi Infrastruktur ("SMI") has signed a novation agreement which transfers all current and future rights and obligations of PIP to SMI, including interest and responsibility in the Company's investment agreement.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga tidak kurang dari 1,5 : 1. Perusahaan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

*In relation to this loan facility, the Company is required to maintain a ratio of EBITDA with interest expense at a minimum of 1.5 : 1. The Company has complied with the covenants in the borrowing agreement.*

Utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non-bank berdasarkan jadwal pembayaran pokok, adalah sebagai berikut:

*Government and non-bank Government Financial Institution Loans by installment schedules at nominal amount, are as follows:*

	2017 Rp	2016 Rp	
Dibayarkan:			<i>Payable to:</i>
Dalam satu tahun	1,043,792	1,043,793	<i>Within one year</i>
Pada tahun kedua	1,043,793	1,043,793	<i>In the second year</i>
Pada tahun ketiga	1,043,793	1,043,793	<i>In the third year</i>
Pada tahun keempat	750,000	1,043,793	<i>In the fourth year</i>
Setelah lima tahun	3,750,000	4,499,999	<i>After five years</i>
<b>Jumlah</b>	<b>7,631,378</b>	<b>8,675,171</b>	<b>Total</b>

**25. Utang Sewa Pembiayaan**

Akun ini terdiri dari utang Perusahaan kepada PT Central Java Power ("CJP") dalam rangka Perjanjian Sewa Pembiayaan atas pengadaan pembangkitan tenaga listrik 4x660MW Tanjung Jati B Unit A, B, C, D, dan beberapa kontrak sewa sehubungan dengan pembangunan kompresor gas dan pipa gas di berbagai daerah dengan mekanisme Bangun, Operasi dan Serah (*Build, Operate and Transfer*) yang diakui sebagai utang sewa pembiayaan oleh PLN Batam, entitas anak. Akun ini juga terdiri dari beberapa kontrak sewa mesin pembangkit pada PLTG Payo Selincah, PLTG Talang Duku dan PLTG Merah Mata.

Sehubungan dengan Perjanjian Sewa Pembiayaan CJP, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura bertindak sebagai *Escrow Agent* dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo bertindak sebagai *Security Agent*. Untuk memenuhi persyaratan *Financial Lease Agreement* ("FLA"), Perusahaan telah membentuk dana cadangan pada *Escrow Agent* untuk jaminan pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan pengadaan bahan bakar serta untuk angsuran sewa pembiayaan (Catatan 10).

**25. Lease Liabilities**

*This account represents the Company's liabilities to PT Central Java Power ("CJP") in relation to the Financial Lease Agreement 4x660MW on the acquisition of Tanjung Jati B Unit A, B, C, D, and several lease contracts in relation to the construction of gas compressors and gas pipes with the Build, Operate and Transfer mechanism at the various locations that was recorded as finance lease liabilities by PLN Batam, a subsidiary. It also consist of several contracts in relation to lease power plant machinery in PLTG Payo Selincah, PLTG Talang Duku and PLTG Merah Mata.*

*In relation to the CJP Finance Lease Agreement, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore acts as the Escrow Agent and Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo acts as the Security Agent. In order to fulfill the requirements of Financial Lease Agreement ("FLA"), the Company established a reserve account to an Escrow Agent for guarantee of operations, maintenance and fuel procurement and for lease payments (Note 10).*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Nilai tunai pembayaran minimum atas utang sewa pembiayaan tersebut pada tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

The present value of minimum lease payments for such lease liabilities in 2017 and 2016 are as follows:

**Berdasarkan jatuh tempo**

**By due date**

	2017 Rp	2016 Rp	
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:			<i>Minimum lease payments due:</i>
Tidak lebih dari satu tahun	6,940,785	5,888,441	<i>Not later than one year</i>
Antara lebih dari satu tahun sampai lima tahun	19,173,149	19,487,113	<i>Later than one year and not later than five years</i>
Lebih dari lima tahun	2,693,858	5,432,835	<i>Later than five years</i>
Jumlah pembayaran minimum sewa pembiayaan	28,807,792	30,808,389	<i>Total minimum lease payments</i>
Dikurangi bunga	8,222,615	9,085,997	<i>Less interest</i>
Nilai tunai pembayaran minimum sewa pembiayaan masa datang	20,585,177	21,722,392	<i>Present value of future minimum lease payments</i>
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	4,871,908	3,789,317	<i>Less current maturity</i>
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>15,713,269</b>	<b>17,933,075</b>	<i>Long-term portion</i>

**Berdasarkan pemberi sewa**

**By lessor**

	2017 Rp	2016 Rp	
PT Central Java Power - JPY	18,898,480	21,722,392	<i>PT Central Java Power - JPY</i>
PT Batam Trans Gasindo - US\$	781,206	--	<i>PT Batam Trans Gasindo - US\$</i>
PT Eramas Persada Energy - US\$	360,189	--	<i>PT Eramas Persada Energy - US\$</i>
PT Wijaya Karya Industri Energi - Rupiah	239,805	--	<i>PT Wijaya Karya Industri Energi - Rupiah</i>
PT Muba Daya Pratama - Rupiah	202,451	--	<i>PT Muba Daya Pratama - Rupiah</i>
PT Enviromate Technology International - Rupiah	103,046	--	<i>PT Enviromate Technology International - Rupiah</i>
Jumlah	20,585,177	21,722,392	<i>Total</i>
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	4,871,908	3,789,317	<i>Less current maturity</i>
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>15,713,269</b>	<b>17,933,075</b>	<i>Long-term portion</i>
Tingkat suku bunga per tahun:			<i>Interest rate per annum:</i>
Rupiah	8.18% - 22.43%	--	<i>Rupiah</i>
US\$	14.01% - 18.75%	--	<i>US\$</i>
JPY	7.60% - 11.00%	7.60% - 11.00%	<i>JPY</i>

Rincian utang sewa pembiayaan dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of the lease liabilities in foreign currencies are as follows:

	2017		2016		
	Dalam mata uang asing/ <i>In foreign currencies *)</i>	Ekuivalen/ <i>Equivalent</i> Rp	Dalam mata uang asing/ <i>In foreign currencies *)</i>	Ekuivalen/ <i>Equivalent</i> Rp	
JPY	157,201,225,947	18,898,480	188,227,714,907	21,722,392	<i>JPY</i>
US\$	84,248,160	1,141,394	--	--	<i>US\$</i>
<b>Jumlah</b>		<b>20,039,874</b>		<b>21,722,392</b>	<i>Total</i>

\*) Dalam jumlah penuh

\*) In full amount

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Beban bunga dan keuangan terkait sewa pembiayaan pada tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp3.874.639 dan Rp4.273.840 (Catatan 45).

Interest expense and financial charges related to finance leases in 2017 and 2016 amounted to Rp3,874,639 and Rp4,273,840, respectively, (Note 45).

**26. Utang Bank**

**26. Bank Loans**

	2017 Rp	2016 Rp	
<b><u>Pinjaman terkait program percepatan</u></b>			<b><u>Loans related to fast track program</u></b>
<b>Pihak berelasi</b>			<b>Related parties</b>
Bank Negara Indonesia	3,372,337	4,128,291	Bank Negara Indonesia
Bank DKI	2,401,684	3,006,321	Bank DKI
Bank Rakyat Indonesia	1,541,166	2,395,588	Bank Rakyat Indonesia
Bank Mandiri	814,842	1,461,198	Bank Mandiri
<b>Jumlah pihak berelasi</b>	<b>8,130,029</b>	<b>10,991,398</b>	<b>Total related parties</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
The Export-Import Bank of China	12,185,469	13,833,659	The Export-Import Bank of China
Bank of China Limited	7,628,981	9,357,193	Bank of China Limited
Barclays Bank Plc and China Development Bank	7,552,115	8,770,729	Barclays Bank Plc and China Development Bank
Bank Mega	672,187	1,448,325	Bank Mega
Bank Bukopin	1,226,776	1,536,029	Bank Bukopin
Bank Central Asia	368,613	666,234	Bank Central Asia
<b>Jumlah pihak ketiga</b>	<b>29,634,141</b>	<b>35,612,169</b>	<b>Total third parties</b>
<b>Subjumlah</b>	<b>37,764,170</b>	<b>46,603,567</b>	<b>Subtotal</b>
<b><u>Pinjaman tidak terkait program percepatan</u></b>			<b><u>Loans not related to fast track program</u></b>
<b>Pihak berelasi</b>			<b>Related parties</b>
Bank Mandiri	15,500,000	10,773,072	Bank Mandiri
Bank Rakyat Indonesia	33,028,751	34,785,714	Bank Rakyat Indonesia
Bank Negara Indonesia	18,500,000	18,500,000	Bank Negara Indonesia
<b>Jumlah pihak berelasi</b>	<b>67,028,751</b>	<b>64,058,786</b>	<b>Total related parties</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
Bank Central Asia	18,000,000	7,000,000	Bank Central Asia
Asian Development Bank	6,069,504	2,821,560	Asian Development Bank
Export Development Canada	5,842,575	5,314,121	Export Development Canada
Bank Maybank Indonesia	4,300,000	--	Bank Maybank Indonesia
Standard Chartered Bank	2,097,072	2,019,798	Standard Chartered Bank
International Bank for Reconstruction and Development	1,458,442	--	International Bank for Reconstruction and Development
Japan Bank for International Cooperation	967,128	63,828	Japan Bank for International Cooperation
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	139,868	--	Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Agence Francaise De Development	64,713	--	Agence Francaise De Development
Kreditanstalt fur Wiederaufbau	10,531	--	Kreditanstalt fur Wiederaufbau
<b>Jumlah pihak ketiga</b>	<b>38,949,833</b>	<b>17,219,307</b>	<b>Total third parties</b>
<b>Subjumlah</b>	<b>105,978,584</b>	<b>81,278,093</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Jumlah</b>	<b>143,742,754</b>	<b>127,881,660</b>	<b>Total</b>
Biaya transaksi belum diamortisasi	(1,176,643)	(1,124,382)	Unamortized transaction cost
<b>Jumlah bersih</b>	<b>142,566,111</b>	<b>126,757,278</b>	<b>Total net</b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2017 Rp	2016 Rp	
<b>Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun</b>			<b>Less current maturities</b>
<b><u>Pinjaman terkait program percepatan</u></b>			<b><u>Loans related to fast track program</u></b>
<b>Pihak berelasi</b>			<b>Related parties</b>
Bank Negara Indonesia	677,686	996,810	Bank Negara Indonesia
Bank DKI	531,477	676,000	Bank DKI
Bank Rakyat Indonesia	854,422	15,568,708	Bank Rakyat Indonesia
Bank Mandiri	441,555	1,521,356	Bank Mandiri
<b>Jumlah pihak berelasi</b>	<b>2,505,140</b>	<b>18,762,874</b>	<b>Total related parties</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
The Export-Import Bank of China	1,763,504	1,748,925	The Export-Import Bank of China
Bank of China Limited	1,806,212	1,791,280	Bank of China Limited
Barclays Bank Plc and China Development Bank	1,291,725	1,281,046	Barclays Bank Plc and China Development Bank
Bank Mega	672,187	776,138	Bank Mega
Bank Bukopin	309,253	309,253	Bank Bukopin
Bank Central Asia	222,078	1,297,621	Bank Central Asia
<b>Jumlah pihak ketiga</b>	<b>6,064,959</b>	<b>7,204,263</b>	<b>Total third parties</b>
<b>Subjumlah</b>	<b>8,570,099</b>	<b>25,967,137</b>	<b>Subtotal</b>
<b><u>Pinjaman tidak terkait program percepatan</u></b>			<b><u>Loans not related to fast track program</u></b>
<b>Pihak berelasi</b>			<b>Related parties</b>
Bank Rakyat Indonesia	14,457,320	--	Bank Rakyat Indonesia
Bank Negara Indonesia	928,571	--	Bank Negara Indonesia
Bank Mandiri	875,000	--	Bank Mandiri
<b>Jumlah pihak berelasi</b>	<b>16,260,891</b>	<b>--</b>	<b>Total related parties</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
Bank Central Asia	1,000,000	--	Bank Central Asia
Standar Chartered Bank	209,707	183,618	Standart Chartered Bank
Export Development Canada	508,050	244,025	Export Development Canada
<b>Jumlah pihak ketiga</b>	<b>1,717,757</b>	<b>427,643</b>	<b>Total third parties</b>
<b>Subjumlah</b>	<b>17,978,648</b>	<b>427,643</b>	<b>Subtotal</b>
Jumlah bagian jatuh tempo dalam satu tahun	26,548,747	26,394,780	Total current maturities
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>116,017,364</b>	<b>100,362,498</b>	<b>Long-term portion</b>

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, rincian utang bank dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2017 and 2016, details of bank loans in foreign currency are as follows:

	2017		2016		
	Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *)	Ekuivalen/ Equivalent Rp	Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *)	Ekuivalen/ Equivalent Rp	
US\$	3,035,228,648	41,121,278	2,989,065,968	40,161,092	US\$
EUR	134,312,461	2,172,318	142,625,503	2,019,798	EUR
JPY	6,012,420,140	722,804	--	--	JPY
<b>Jumlah</b>		<b>44,016,400</b>		<b>42,180,890</b>	<b>Total</b>

\*) Dalam jumlah penuh

\*) In full amount

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**Pinjaman terkait program percepatan**

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari beberapa bank untuk membiayai 85% dari nilai kontrak *Engineering Procurement and Construction* ("EPC") untuk program percepatan. Pinjaman ini sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Perpres No. 91 Tahun 2007, pengganti dari Perpres No. 86 Tahun 2006, tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara. Sehubungan dengan pinjaman ini, Perusahaan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan umum sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2017, rincian fasilitas pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

**Loans related to fast track program**

The Company obtained loan facilities from several banks to finance 85% of the value of *Engineering Procurement and Construction* ("EPC") contracts for its fast track program. These loans are fully guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia in accordance with Perpres No. 91 Year 2007, which superseded Perpres No. 86 Year 2006, regarding the Grant of Government Guarantee for Construction of a Coal-Fired Power Plant. In connection with these loans, the Company is restricted by general rules as described in the loan agreements.

As of December 31, 2017, details of such loan facilities are as follows:

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ <i>Creditor and project funded</i>	Fasilitas maksimum/ <i>Maximum facility</i>		Pembayaran kembali/ <i>Repayment</i>		Tingkat bunga per tahun/ <i>Interest rate per annum</i>	Premi asuransi/ <i>Insurance premium</i>	Tanggal jatuh tempo/ <i>Date of maturity</i>
		US\$ *)	Rp *)	2017 Rp*)	2016 Rp*)			
1	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ <i>Syndicated loan coordinated by</i> Bank of China Limited/ PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat/ <i>West Java</i>	592	--	733,042	728,811	0.785% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months	55	27 Mei 2021/ <i>May 27, 2021</i>
2	The Export-Import Bank of China/ PLTU 2 Paiton, Jawa Timur/ <i>East Java</i>	331	--	321,691	325,886	0.84% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months	32	30 Januari 2023/ <i>January 30, 2023</i>
3	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ <i>Syndicated loan coordinated by</i> Bank Negara Indonesia/ PLTU 2 Labuan, Banten	--	2,741,298	391,614	391,614	0.825% + JIBOR 3 bulanan/ 3 months	--	23 Juli 2018/ <i>July 23, 2018</i>
4	The Export-Import Bank of China/ PLTU 1 Suralaya, Banten	284	--	313,875	317,969	0.84% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months	27	30 Januari 2023/ <i>January 30, 2023</i>
5	Barclays Capital, The Investment Banking Division of Barclays Bank PLC and China Development Bank/ PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah/ <i>Central Java</i>	262	--	347,762	345,511	3.25% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months	--	3 Desember 2021/ <i>December 3, 2021</i>
6	Bank DKI/ PLTU Naganraya PLTU 2 Nusa Tenggara Timur PLTU 1 Nusa Tenggara Barat PLTU Sumatera Barat PLTU 2 Kalimantan Barat PLTU 4 Bangka Belitung PLTU Maluku Utara PLTU Sulawesi Tengah PLTU 1 Nusa Tenggara Timur PLTU 2 Sulawesi Utara PLTU Gorontalo PLTU 2 Nusa Tenggara Timur PLTU 1 Nusa Tenggara Barat PLTU 4 Bangka Belitung PLTU 2 Nusa Tenggara Barat PLTU 1 Kalimantan Tengah PLTU Maluku Utara	--	4,732,000	676,000	676,000	1% + JIBOR 3 bulanan/ 3 months	--	24 April 2019/ <i>April 24, 2019</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ Creditor and project funded	Fasilitas maksimum/ Maximum facility		Pembayaran kembali/ Repayment		Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Premi asuransi/ Insurance premium US\$ *)	Tanggal jatuh tempo/ Date of maturity
		US\$ *)	Rp *)	2017 Rp*)	2016 Rp*)			
7	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by Bank Rakyat Indonesia PLTU Sulawesi Selatan/ South Sulawesi PLTU 3 Bangka Belitung PLTU 2 Papua PLTU Kalimantan Selatan/ South Kalimantan	--	2,074,739	193,903	193,903	1% + JIBOR 3 bulanan/ 3 months	--	30 Januari 2019/ January 30, 2019
8	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by Bank Mandiri/ PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah/ Central Java	--	1,911,480	273,069	273,069	1.11% + JIBOR 3 bulanan/ 3 months	--	18 April 2018/ April 18, 2018
9	Bank Mega/ PLTU 2 Pelabuhan Ratu, Jawa Barat/ West Java	--	1,874,315	257,663	257,663	1.10% + JIBOR 6 bulanan/ 6 months	--	29 Juli 2018/ July 29, 2018
10	Bank Bukopin/ PLTU 3 Teluk Naga, Banten	--	1,606,612	178,512	178,512	0.71% + JIBOR 6 bulanan/ 6 months	--	29 Juli 2021/ July 29, 2021
11	Bank Mega/ PLTU 2 Nusa Tenggara Barat PLTU Gorontalo PLTU 2 Sulawesi Utara, Manado PLTU Kep Riau, Tanjung Balai Karimun PLTU 1 Nusa Tenggara Timur, Ende PLTU Sulawesi Tenggara 2 PLTU 1 Kalimantan Tengah	--	1,498,513	195,418	195,418	1.10% + JIBOR 6 bulanan/ 6 months	--	29 Juli 2018/ July 29, 2018
12	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by Bank Negara Indonesia/ PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat/ West Java	--	1,272,913	164,422	164,422	1.10% + JIBOR 3 bulanan/ 3 months	--	23 Februari 2018/ February 23, 2018
13	Bank Mega/ PLTU Lampung, Lampung PLTU 2 Sumatera Utara, Medan	--	1,240,661	115,154	115,154	1.10% + JIBOR 6 bulanan/ 6 months	--	29 Juli 2018/ July 29, 2018
14	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by Bank Central Asia/ PLTU 2 Labuan, Banten	--	1,077,578	151,086	151,086	1.12% + JIBOR 3 bulanan/ 3 months	--	18 April 2018/ April 18, 2018
15	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by Bank Rakyat Indonesia/ PLTU Sulawesi Selatan/ South Sulawesi PLTU 3 Bangka Belitung PLTU 2 Papua PLTU Kalimantan Selatan/ South Kalimantan	--	1,151,005	164,429	164,429	1% + JIBOR 3 bulanan/ 3 months	--	30 Januari 2019/ January 30, 2019
16	Bank Bukopin/ PLTU 1 Pacitan, Jawa Timur/ East Java	--	1,045,924	130,741	130,741	0.71% + JIBOR 6 bulanan/ 6 months	--	29 Juli 2021/ July 29, 2021
17	Bank Mega/ PLTU 1 Suralaya Baru, Banten	--	735,387	122,303	122,303	1.10% + JIBOR 6 bulanan/ 6 months	--	18 April 2018/ April 18, 2018
	Bank Mega/ PLTU 2 Paiton, Jawa Timur/ East Java	--	600,636	85,600	85,600	1.10% + JIBOR 6 bulanan/ 6 months	--	18 April 2018/ April 18, 2018
19	The Export-Import Bank of China/ PLTU Pelabuhan Ratu	482	--	622,208	630,323	2.8% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months	44	12 Februari 2025/ February 12, 2025
	PLTU NAD	124	--	143,346	145,215	2.8% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months	12	14 Januari 2025/ January 14, 2025
20	Bank of China Limited/ PLTU Teluk Naga	455	--	580,756	567,013	2.30% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months	46	4 Mei 2022/ May 4, 2022
21	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by Bank Negara Indonesia/ PLTU Tanjung Aw ar-aw ar	--	1,155,352	165,050	165,050	1% + JIBOR 3 bulanan/ 3 months	--	30 Januari 2019/ January 30, 2019

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ <i>Creditor and project funded</i>	Fasilitas maksimum/ <i>Maximum facility</i>		Pembayaran kembali/ <i>Repayment</i>		Tingkat bunga per tahun/ <i>Interest rate per annum</i>	Premi asuransi/ <i>Insurance premium</i>	Tanggal jatuh tempo/ <i>Date of maturity</i>
		US\$ *)	Rp *)	2017 Rp*)	2016 Rp*)			
22	The Export-Import Bank of China/ PLTU Pacitan	293	--	335,634	340,011	2.8% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months	30	2 Juli 2025/ July 2, 2025
23	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ <i>Syndicated loan coordinated by</i> Bank Rakyat Indonesia/ PLTU Lampung PLTU Sumatera Utara/ <i>North Sumatera</i>	--	3,941,772	346,543	346,543	1.5% + JIBOR 3 bulanan/ 3 months	34	14 Oktober 2019/ October 14, 2019
24	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ <i>Syndicated loan coordinated by</i> Bank Mandiri/ Transmisi/ <i>Transmission</i>	--	2,613,012	373,287	373,287	1.5% + JIBOR 3 bulanan/ 3 months	--	14 Desember 2019/ December 14, 2019
25	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ <i>Syndicated loan coordinated by</i> Bank Central Asia/ Transmisi/ <i>Transmission</i>	--	327,195	46,742	46,742	1.5% + JIBOR 3 bulanan/ 3 months	--	14 Desember 2019/ December 14, 2019
26	China Development Bank/ PLTU Adipala, Cilacap	625	--	765,129	747,024	3.85% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months	--	14 Oktober 2022/ October 14, 2022
27	China Development Bank/ PLTU Sumbang	138	--	164,157	164,450	3.85% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months	--	14 Oktober 2022/ October 14, 2022
28	Bank of China/ PLTU Tanjung Awar-Awar	372	--	476,689	476,333	2.30% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months	--	14 Desember 2022/ December 14, 2022
29	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ <i>Syndicated loan coordinated by</i> Bank Negara Indonesia/ Transmisi/ <i>Transmission</i>	--	1,930,063	275,723	275,723	1.50% + JIBOR 3 bulanan/ 3 months	--	14 Desember 2019/ December 14, 2019
30	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ <i>Syndicated loan coordinated by</i> Bank Central Asia/ PLTU Riau dan/ and PLTU Kalbar	--	1,080,598	99,793	99,793	1.50% + JIBOR 3 bulanan/ 3 months	--	14 Desember 2019/ December 14, 2019
31	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ <i>Syndicated loan coordinated by</i> Bank Rakyat Indonesia/ Transmisi/ <i>Transmission</i>	--	1,067,684	149,547	149,547	1.05% + JIBOR 3 bulanan/ 3 months	--	27 Desember 2020/ December 27, 2020
32	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ <i>Syndicated loan coordinated by</i> Bank DKI/ PLTU Riau Tenayan	--	2,225,000	--	--	1.50% + JIBOR 3 bulanan/ 3 months	--	12 November 2025/ November 12, 2025
33	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ <i>Syndicated loan coordinated by</i> Bank Negara Indonesia/ PLTU Kalimantan Timur/ <i>East Kalimantan</i>	--	2,449,963	--	--	1.20% + JIBOR 3 bulanan/ 3 months	--	17 Desember 2025/ December 17, 2025
<b>Jumlah/Total</b>		<b>3,958</b>	<b>40,353,700</b>	<b>9,360,888</b>	<b>9,345,145</b>		<b>280</b>	

\*) Dalam jutaan/In million

**Pinjaman tidak terkait program percepatan**

**Bank Mandiri**

**Pinjaman Perusahaan 2011**

Pada tanggal 27 Desember 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh Bank Mandiri sebesar Rp7.000.000, dengan tingkat bunga per tahun sebesar rata-rata tertimbang suku bunga deposito berjangka dalam mata uang

**Loans not related to fast track program**

**Bank Mandiri**

**Corporate Loan 2011**

On December 27, 2011, the Company obtained a syndicated investment credit facility coordinated by Bank Mandiri amounting to Rp7,000,000, with annual interest based on weighted average of the three months Rupiah time deposit of syndicated creditors +3.42%

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

*For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

Rupiah tiga bulan dari kreditur sindikasi +3,42% dan jatuh tempo tanggal 23 Oktober 2021. Jumlah terhutang atas pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp3.500.000 dan Rp4.375.000. Jumlah pembayaran pokok pinjaman untuk tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp875.000.

*and maturity date on October 23, 2021. As of December 31, 2017 and 2016, the balance outstanding amounted to Rp3,500,000 and Rp4,375,000, respectively. The principal loan repayment in 2017 and 2016 amounting to Rp875,000, respectively.*

Pinjaman Perusahaan 2016

Pada tanggal 19 Desember 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi sebesar Rp12.000.000 yang dikoordinasikan oleh Bank Mandiri, dengan tingkat suku bunga JIBOR tiga bulanan +1,92% per tahun. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 19 Desember 2026. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp12.000.000 dan Rp6.398.072. Tidak ada pembayaran kembali pokok pinjaman selama tahun 2017 dan 2016.

Corporate Loan 2016

*On December 19, 2016, the Company obtained a syndicated investment credit facility amounting to Rp12,000,000 coordinated by Bank Mandiri, with annual interest rate based on three months JIBOR +1.92% per annum. This credit facility will mature on December 19, 2026. As of December 31, 2017 and 2016, the outstanding balance of this facility amounted to Rp12,000,000 and Rp6,398,072, respectively. There is no loan repayment during 2017 and 2016.*

Bank Rakyat Indonesia ("BRI")

Kredit Modal Kerja 2011

Pada bulan Juni 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja sindikasi yang dikoordinasikan oleh BRI sebesar Rp15.000.000, dengan tingkat suku bunga berdasarkan JIBOR tiga bulanan +1,65% dan jatuh tempo pada 21 Juni 2012. Pinjaman ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada tanggal 8 Juli 2015, fasilitas kredit ini diubah menjadi Rp9.000.000 dengan tingkat suku bunga pinjaman berdasarkan rata-rata deposito berjangka dalam mata uang Rupiah tiga bulanan dari kreditur sindikasi +2,02% dan jatuh tempo diperpanjang sampai 21 Juni 2016. Perubahan di tahun 2016 terjadi pada tanggal 21 Juni 2016 yaitu perubahan jumlah fasilitas kredit menjadi Rp15.000.000 dengan tingkat suku bunga berdasarkan rata-rata deposito berjangka dalam mata uang Rupiah tiga bulanan dari kreditur sindikasi +2,45% dan jatuh tempo diperpanjang sampai 21 Juni 2017. Perubahan berikutnya terjadi pada tanggal 9 September 2016, yaitu perubahan fasilitas kredit menjadi Rp20.000.000. Perubahan terakhir di tahun 2016 pada tanggal 17 November 2016 yaitu perubahan fasilitas kredit menjadi Rp28.000.000. Pada 7 Juli 2017 fasilitas ini diperpanjang jatuh temponya menjadi

Bank Rakyat Indonesia ("BRI")

Working Capital Loan 2011

*In June 2011, the Company obtained a syndicated working capital loan facility coordinated by BRI amounting to Rp15,000,000, with annual interest based on three months JIBOR +1.65% and maturity date on June 21, 2012. This loan facility has been amended several times. On July 8, 2015, the credit facility was changed to Rp9,000,000 with annual interest based on average of the three months Rupiah time deposit of syndicated creditors +2.02% and maturity date was extended to June 21, 2016. Amendment during 2016 was first occurred on June 21, 2016 with changes on the amount of credit facility to become Rp15,000,000 with annual interest based on average of the three months Rupiah time deposit of syndicated creditors +2.45% and maturity date was extended until June 21, 2017. Further amendment was occurred on September 9, 2016 where the credit facility was amended to Rp20,000,000. The latest amendment was on November 17, 2016 where the credit facility was amended to Rp28,000,000. On July 7, 2017 the credit facility maturity date was extended to June 21, 2018. The principal loan repayment in 2017 and 2016 amounted to Rp37,800,000 and Rp21,000,000 respectively. As of December*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21 Juni 2018. Jumlah pembayaran kembali pokok pinjaman tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp37.800.000 dan Rp21.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp12.957.323 dan Rp13.500.000

Arus kas penarikan dan pembayaran utang Bank Rakyat Indonesia tahun 2017 dan 2016 sebagai berikut:

	2017 Rp	2016 Rp	
Penarikan	37,257,322	34,500,000	Withdrawal
Pembayaran	(37,800,000)	(21,000,000)	Payment
<b>Bersih</b>	<b>(542,678)</b>	<b>13,500,000</b>	<b>Net</b>

31, 2017 and 2016, the outstanding balance of this facility amounted to Rp12,957,323 dan Rp13,500,000, respectively.

Cash flows of withdrawal and payment of the Bank Rakyat Indonesia loan in 2017 and 2016 are as follows:

Pinjaman Perusahaan 2012

Pada tanggal 21 Desember 2012, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi dikoordinasikan oleh BRI sebesar Rp8.500.000 dengan tingkat bunga per tahun sebesar rata-rata suku bunga deposito berjangka tiga bulanan +3,2% yang terutang setiap tiga bulan. Tanggal jatuh tempo pokok pinjaman adalah 23 November 2022. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah terutang atas pinjaman ini sebesar Rp6.071.428 dan Rp7.285.714. Jumlah pembayaran pokok pinjaman tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.214.286.

Corporate Loan 2012

On December 21, 2012, the Company obtained a syndicated investment credit facility coordinated by BRI amounting to Rp8,500,000 with annual interest rate of average three months time deposit +3.2%, which is due every three months. The maturity date of the principal is on November 23, 2022. As of December 31, 2017 and 2016, the outstanding balance of this facility amounted to Rp6,071,428 and Rp7,285,174, respectively. The principal loan repayment in 2017 and 2016 were amounting to Rp1,214,286, respectively.

Pinjaman Perusahaan 2014

Pada tanggal 17 Desember 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari BRI sebesar Rp2.000.000 dengan tingkat bunga per tahun menggunakan rata-rata suku bunga deposito berjangka tiga bulanan BRI +2,75% dan jatuh tempo pokok pinjaman pada tanggal 17 Desember 2024. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah terutang atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp2.000.000. Tidak ada pembayaran kembali pokok pinjaman selama tahun 2017 dan 2016.

Corporate Loan 2014

On December 17, 2014, the Company obtained an investment credit facility from BRI amounting to Rp2,000,000, with annual interest rate based on BRI's average three months time deposit +2.75% and will mature on December 17, 2024. As of December 31, 2017 and 2016 the outstanding balance of this facility amounted to Rp2,000,000, respectively. There is no principal loan repayment during 2017 and 2016.

Pinjaman Perusahaan 2015

Pada tanggal 17 Desember 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh BRI sebesar Rp12.000.000 dengan tingkat suku bunga per tahun menggunakan suku bunga Bank Indonesia +2,3% pada tanggal tiga hari

Corporate Loan 2015

On December 17, 2015, the Company obtained a syndicated investment credit facility coordinated by BRI amounting to Rp12,000,000, with the annual interest rate based on Bank Indonesia's rate +2.3% on three days before interest period. The maturity date

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

sebelum jangka waktu bunga. Tanggal jatuh tempo pokok pinjaman adalah 17 Desember 2025. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah terutang atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp12.000.000. Tidak ada pembayaran kembali pokok pinjaman tahun selama tahun 2017 dan 2016.

*of the principal is on December 17, 2025. As of December 31, 2017 and 2016 the outstanding balance of this facility amounted to Rp12,000,000, respectively. There is no principal loan repayment during 2017 and 2016.*

**Bank Negara Indonesia (“BNI”)**

**Pinjaman Perusahaan 2014**

Pada tanggal 18 Desember 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi sebesar Rp6.500.000 yang dikoordinasikan oleh BNI, dengan tingkat suku bunga menggunakan rata-rata tertimbang suku bunga deposito berjangka tiga bulanan +3% per tahun. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 18 Desember 2024. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah terutang atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp6.500.000. Tidak ada pembayaran kembali pokok pinjaman selama tahun 2017 dan 2016.

**Bank Negara Indonesia (“BNI”)**

**Corporate Loan 2014**

*On December 18, 2014, the Company obtained a syndicated investment credit facility amounting to Rp6,500,000 coordinated by BNI, with annual interest rate based on weighted average of three months time deposit +3% per annum. This credit facility will mature on December 18, 2024. As of December 31, 2017 and 2016, the outstanding balance of this facility amounted to Rp6,500,000, respectively. There is no principal loan repayment during 2017 and 2016.*

**Pinjaman Perusahaan 2016**

Pada tanggal 9 September 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi sebesar Rp12.000.000 yang dikoordinasikan oleh BNI, dengan tingkat suku bunga menggunakan rata-rata tertimbang suku bunga deposito berjangka tiga bulanan +2,6% per tahun. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 9 September 2026. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah terutang atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp12.000.000. Tidak ada pembayaran kembali pokok pinjaman selama tahun 2017 dan 2016.

**Corporate Loan 2016**

*On September 9, 2016, the Company obtained a syndicated investment credit facility amounting to Rp12,000,000 coordinated by BNI, with annual interest rate based on weighted average of three months time deposit +2.6% per annum. This credit facility will mature on September 9, 2026. As of December 31, 2017 and 2016 the outstanding balance of this facility amounted to Rp12,000,000, respectively. There is no principal loan repayment during 2017 and 2016.*

**Bank Central Asia (“BCA”)**

Pada tanggal 23 Desember 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh BCA sebesar Rp7.000.000, dengan tingkat suku bunga berdasarkan JIBOR tiga bulanan +2,4% yang jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2023. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah terutang atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp6.000.000 dan Rp7.000.000. Jumlah pembayaran pokok pinjaman tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.000.000 dan nihil.

**Bank Central Asia (“BCA”)**

*On December 23, 2013, the Company obtained a syndicated investment credit facility coordinated by BCA amounting to Rp7,000,000, with annual interest rate based on three months JIBOR +2.4% and maturity date on December 23, 2023. As of December 31, 2017 and 2016, the outstanding balance of this facility amounted to Rp6,000,000 and Rp7,000,000, respectively. The principal loan repayment in 2017 and 2016 amounted to Rp1,000,000 and nil, respectively.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 2 November 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh BCA sebesar Rp12.000.000, dengan tingkat suku bunga berdasarkan JIBOR enam bulanan +2,6% yang jatuh tempo pada tanggal 2 November 2027. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 jumlah terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp12.000.000 dan nihil.

**Bank Maybank Indonesia**

Pada tanggal 2 November 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh Bank Maybank Indonesia sebesar Rp4.300.000, dengan tingkat suku bunga berdasarkan JIBOR enam bulanan +2,6% yang jatuh tempo pada tanggal 2 November 2027. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 jumlah terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp4.300.000 dan nihil.

**Standard Chartered Bank ("SCB")**

**Fasilitas Arun**

Pada tanggal 11 Desember 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit ekspor untuk membiayai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas ("PLTMG") Arun sebesar EUR90.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 2,1% per tahun. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 30 September 2027. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR70.618.532 (setara Rp1.142.156) dan EUR77.680.385 (setara Rp1.100.071). Jumlah pembayaran pokok pinjaman tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp106.618 dan Rp 107.830.

**Fasilitas Bangkanai**

Pada tanggal 23 Desember 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit ekspor untuk membiayai pembangunan PLTMG Bangkanai sebesar EUR70.850.000 dengan tingkat suku bunga yang digunakan untuk pinjaman tersebut sebesar 2,1% per tahun. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 30 September 2027. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR59.041.666,67 (setara Rp954.916) dan EUR64.945.833 (setara Rp919.727). Jumlah pembayaran pokok pinjaman tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp89.140 dan Rp87.292.

On November 2, 2017, the Company obtained a syndicated investment credit facility coordinated by BCA amounting to Rp12,000,000, with annual interest rate based on six months JIBOR +2.6% and maturity date on November 2, 2027. As of December 31, 2017 and 2016, the outstanding balance of this facility amounted to Rp12,000,000 and nil, respectively.

**Bank Maybank Indonesia**

On November 2, 2017, the Company obtained a syndicated investment credit facility coordinated by Bank Maybank Indonesia amounting to Rp4,300,000, with annual interest rate based on six months JIBOR +2.6% and maturity date on November 2, 2027. As of December 31, 2017 and 2016, the outstanding balance of this facility amounted to Rp4,300,000 and nil, respectively.

**Standard Chartered Bank ("SCB")**

**Arun Facility**

On December 11, 2013, the Company obtained an export credit facility to finance the construction of Arun Solar and Steam Power Plant ("PLTMG") amounting to EUR90,000,000 with interest rate of 2.1% per annum. This credit facility will mature on September 30, 2027. As of December 31, 2017 and 2016, the outstanding balance of this facility amounted to EUR70,618,532 (equivalent to Rp1,142,156) and EUR77,680,385 (equivalent to Rp1,100,071), respectively. The principal loan repayment in 2017 and 2016 amounted to Rp106,618 and Rp107,830, respectively.

**Bangkanai Facility**

On December 23, 2013, the Company obtained an export credit facility to finance the construction of Bangkanai PLTMG amounting to EUR70,850,000 with interest rate of 2.1% per annum. This credit facility will mature on September 30, 2027. As of December 31, 2017 and 2016 the outstanding balance of this facility amounted to EUR59,041,666.67 (equivalent to Rp954,916) and EUR64,945,833 (equivalent to Rp919,727), respectively. The principal loan repayment in 2017 and 2016 amounted to Rp89,140 and Rp87,292, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**Agence Francaise De Development (“AFD”)**

Pada tanggal 7 Mei 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari AFD untuk Trans GIS sebesar EUR100.000.000 dengan jatuh tempo pinjaman sampai dengan 7 Mei 2030 dan tingkat bunga masing-masing sebesar *Floating/Fix* maksimal 5,89% yang dibayar setiap enam bulan. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR4.001.121 (setara Rp64.713) dan nihil.

**Kreditanstalt fur Wiederaufbau (“KfW”)**

Pada tanggal 8 Mei 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari KfW untuk Kamojang PP sebesar EUR60.000.000 dengan jatuh tempo pinjaman sampai dengan 8 Mei 2030 dan tingkat bunga sebesar 1,70% yang dibayar setiap enam bulan. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR651.141 (setara Rp10.531) dan nihil.

**Asian Development Bank (“ADB”)**

Pada tanggal 4 Desember 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari ADB untuk penguatan gardu induk regional Sumatera sebesar US\$575.000.000 dan US\$25.000.000 dengan jatuh tempo pinjaman sampai dengan 15 September 2035 dan tingkat bunga masing-masing sebesar LIBOR +0,6% -0,1% dan LIBOR +1,4% yang dibayar setiap enam bulan. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar US\$88.000.000 (setara Rp1.192.224) dan US\$210.000.000 (setara Rp2.821.560).

Pada tanggal 10 Oktober 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari ADB untuk akses energi berkelanjutan di kawasan Indonesia timur sebesar US\$600.000.000 dengan jatuh tempo pinjaman sampai dengan 10 Oktober 2037 dan tingkat bunga sebesar LIBOR +0,6% -0,1% yang dibayar setiap enam bulan. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah terutang atas fasilitas sebesar US\$150.000.000 (setara Rp2.032.200) dan nihil.

**Export Development Canada (“EDC”) dan  
Hungarian Export Import Bank Private  
Limited Company (“HEXIM”)**

Pada tanggal 2 Desember 2016 dan 1 Mei 2017 Perusahaan memperoleh pendanaan untuk Batam *mobile power plant* sebesar US\$435.888.247 dan US\$14.111.753 dengan

**Agence Francaise De Development (“AFD”)**

On May 7, 2015, the Company obtained credit facilities from AFD for Trans GIS amounting to EUR100,000,000 with maturity date until May 7, 2030 and interest rate of *Floating/Fix* maximum 5.89%, payable semiannually. As of December 31, 2017 and 2016, the outstanding balance of this facility amounted to EUR4,001,121 (equivalent to Rp64,713) and nil, respectively.

**Kreditanstalt fur Wiederaufbau (“KfW”)**

On May 8, 2015, the Company obtained credit facilities from KfW for Kamojang PP amounting to EUR60,000,000 with maturity date until May 8, 2030 and interest rate of 1.70%, payable semiannually. As of December 31, 2017 and 2016, the outstanding balance of this facility amounted to EUR651,141 (equivalent to Rp10,531) and nil, respectively.

**Asian Development Bank (“ADB”)**

On December 4, 2015, the Company obtained credit facilities from ADB for grid strengthening of Sumatera amounting to US\$575,000,000 and US\$25,000,000 with maturity date until September 15, 2035 and interest rate of LIBOR +0.6% -0.1% and LIBOR +1.4%, respectively, payable semiannually. As of December 31, 2017 and 2016, the outstanding balance of this facility amounted to US\$88,000,000 (equivalent to Rp1,192,224) and US\$210,000,000 (equivalent to Rp2,821,560), respectively.

On October 10, 2017, the Company obtained credit facilities from ADB for sustainable energy access in eastern Indonesia amounting to US\$600,000,000 with maturity date until October 10, 2037 and interest rate of LIBOR +0.6% -0.1%, payable semiannually. As of December 31, 2017 and 2016, the outstanding balance of this facility amounted to US\$150,000,000 (equivalent to Rp2,032,200) and nil, respectively.

**Export Development Canada (“EDC”) and  
Hungarian Export Import Bank Private  
Limited Company (“HEXIM”)**

On December, 2 2016 and May 1, 2017, the Company obtained credit facility for Batam *mobile power plant* amounting to US\$435,888,247 and US\$14,111,753,

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

masing-masing tingkat bunga 2,56% dan 3,30% yang akan dibayar setiap enam bulan dengan jatuh tempo masing-masing 27 Januari 2029 dan 27 Januari 2029. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar US\$431.250.000 (setara Rp5.842.575) dan US\$395.513.638 (setara Rp5.314.121). Jumlah pembayaran pokok pinjaman tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp251.006 dan nihil.

**Japan Bank for International Cooperation  
("JBIC")**

Pada tanggal 14 Maret 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai pembangunan PLTU Lontar sebesar US\$107.595.235, US\$71.730.158, dan JPY16.429.527.239 dengan tingkat suku bunga sebesar 2,85%+1,06%, LIBOR enam bulanan +1,1% per tahun, dan 1,03%+0,55%. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 1 Oktober 2031. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar US\$5.742.619,56 (setara Rp77.801), JPY1.210.686.890 (setara Rp145.547) dan US\$4.750.638 (setara Rp63.828).

Pada tanggal 20 Oktober 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai pembangunan PLTU Jawa 2 Priok sebesar US\$27.224.192, US\$18.149.462, dan JPY31.762.594.907 dengan tingkat suku bunga sebesar 3,52%, LIBOR enam bulanan +0,7% per tahun, dan 1,58%. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 30 April 2031. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar US\$7.540.697 (setara Rp102.161), JPY4.801.733.250 (setara Rp577.264) dan nihil.

**International Bank for Reconstruction and  
Development ("IBRD")**

Pada tanggal 20 Mei 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai Power Distribution Development Program sebesar US\$500.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar *Referencer rate + Var spread*. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 15 Maret 2036. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah terutang atas fasilitas ini sebesar US\$107.650.000 (setara Rp1.458.442) dan nihil.

respectively, with interest rate of 2.56% and 3.30% payable semiannually with maturity date on January 27, 2029 and January 27, 2029 respectively. As of December 31, 2017 and 2016 the outstanding balance of this facility amounted to US\$431,250,000 (equivalent to Rp5,842,575) and US\$395,513,638 (equivalent to Rp5,314,121), respectively. The principal loan repayment in 2017 and 2016 amounted to Rp251,006 and nil, respectively.

**Japan Bank for International Cooperation  
("JBIC")**

On March 14, 2016, the Company obtained a credit facility to finance the construction of Lontar Steam Electricity Power Plant amounting to US\$107,595,235, US\$71,730,158, and JPY16,429,527,239 with interest rate of 2.85%+1.06%, six months LIBOR +1.1% per annum, and 1.03%+0.55%. This credit facility will mature on October 1, 2031. As of December 31, 2017 and 2016, the outstanding balance of this facility amounted to US\$5,742,619.56 (equivalent to Rp77,801), JPY1,210,686,890 (equivalent to Rp145,547) and US\$4,750,638 (equivalent to Rp63,828), respectively.

On October 20, 2016, the Company obtained a credit facility to finance the construction of Jawa 2 Priok PLTU amounting to US\$27,224,192, US\$18,149,462 and JPY31,762,594,907 with interest rate of 3.52%, six months LIBOR +0.7% per annum, and 1.58%. This credit facility will mature on April 30, 2031. As of December 31, 2017 and 2016, the outstanding balance of this facility amounted to US\$7,540,697 (equivalent to Rp102,161), JPY4,801,733,250 (equivalent to Rp577,264) and nil, respectively.

**International Bank for Reconstruction and  
Development ("IBRD")**

On May 20, 2016, the Company obtained a credit facility to finance Power Distribution Development Program amounting to US\$500,000,000 with interest rate of *Referencer rate + Var spread*. This credit facility will mature on March 15, 2036. As of December 31, 2017 and 2016, the outstanding balance of this facility amounted to US\$107,650,000 (equivalent to Rp1,458,442) and nil, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**Sumitomo Mitsui Banking Corporation  
(SMBC)**

Pada tanggal 30 Maret 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai PLTA Jatigede sebesar US\$73.324.250 dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR -6bulanan +1,43%. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 30 Maret 2031. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar US\$10.323.880 (setara Rp139.868) dan nihil.

Beberapa perjanjian utang bank dengan ADB, SCB, EDC, HEXIM, KFW, EGAP, SAC, Mizuho, dan KEXIM mensyaratkan bahwa Perusahaan wajib memenuhi beberapa pembatasan tertentu, antara lain jumlah minimal *self financing, debt service coverage ratio*, rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas serta *consolidated interest coverage ratio*.

Perusahaan melakukan pembayaran pokok dan bunga bank sesuai dengan jadwal pembayaran dan memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian pinjaman bank.

**Sumitomo Mitsui Banking Corporation  
(SMBC)**

On March 30, 2017, the Company obtained a credit facility to finance PLTA Jatigede amounting to US\$73,324,250 with interest rate of LIBOR -6month +1.43%. This credit facility will mature on March 30, 2031. As of December 31, 2017 and 2016, the outstanding balance of this facility amounted to US\$10,323,880 (equivalent to Rp139,868) and nil, respectively.

Several loan agreements with ADB, SCB, EDC, HEXIM, KFW, EGAP, SAC, Mizuho, and KEXIM governed that the Company should comply to certain covenants, among others, the minimum amount of self financing, debt services coverage ratio, debt to equity ratio and consolidated interest coverage ratio.

The Company made payments of principle and interest of the bank loans in accordance with the schedule of payment and complied with the restrictions specified within the agreements of the bank loans.

**27. Utang Obligasi, Sukuk Ijarah dan KIK-EBA**

**27. Bonds Payable, Sukuk Ijara and KIK-EBA loans**

**a. Obligasi dan sukuk ijarah**

**a. Bonds and sukuk ijara**

	2017 Rp		2016 Rp	
Obligasi dan Sukuk Ijarah Rupiah				<i>Rupiah Bonds and Sukuk Ijara</i>
Obligasi Berkelanjutan II				<i>Sustainable Bonds II</i>
PLN Tahap II Tahun 2017	2,545,500	--		<i>PLN II Year 2017</i>
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II				<i>Sustainable Sukuk Ijara II</i>
PLN Tahap II Tahun 2017	694,500	--		<i>PLN II Year 2017</i>
Obligasi Berkelanjutan II				<i>Sustainable Bonds II</i>
PLN Tahap I Tahun 2017	1,600,000	--		<i>PLN I Year 2017</i>
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II				<i>Sustainable Sukuk Ijara II</i>
PLN Tahap I Tahun 2017	400,000	--		<i>PLN I Year 2017</i>
Obligasi Berkelanjutan I				<i>Sustainable Bonds I</i>
PLN Tahap II Tahun 2013	1,244,000	1,244,000		<i>PLN II Year 2013</i>
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I				<i>Sustainable Sukuk Ijara I</i>
PLN Tahap II Tahun 2013	429,000	429,000		<i>PLN II Year 2013</i>
Obligasi Berkelanjutan I				<i>Sustainable Bonds I</i>
PLN Tahap I Tahun 2013	879,000	879,000		<i>PLN I Year 2013</i>
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I				<i>Sustainable Sukuk Ijara I</i>
PLN Tahap I Tahun 2013	121,000	121,000		<i>PLN I Year 2013</i>
Obligasi PLN XII Tahun 2010	1,855,000	1,855,000		<i>PLN XII Bonds Year 2010</i>
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010	340,000	340,000		<i>Sukuk Ijara PLN V Year 2010</i>
Obligasi PLN XI Tahun 2010	1,783,000	2,703,000		<i>PLN XI Bonds Year 2010</i>
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010	167,000	297,000		<i>Sukuk Ijara PLN IV Year 2010</i>
Obligasi PLN IX Tahun 2007	1,200,000	2,700,000		<i>PLN IX Bonds Year 2007</i>
Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007	--	300,000		<i>Sukuk Ijara PLN II Year 2007</i>
Obligasi PLN VIII Tahun 2006	865,000	865,000		<i>PLN VIII Bonds Year 2006</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2017 Rp	2016 Rp	
Surat Utang Jangka Menengah Global - US\$			Global Medium Term Notes - US\$
Penerbitan tahun 2017	27,096,000	--	Issued in 2017
Penerbitan tahun 2012	13,548,000	13,436,000	Issued in 2012
Penerbitan tahun 2011	13,548,000	13,436,000	Issued in 2011
Obligasi Terjamin - US\$			Guaranteed Notes - US\$
Penerbitan tahun 2009	27,096,000	26,872,000	Issued in 2009
Penerbitan tahun 2007	6,774,000	13,436,000	Issued in 2007
<b>Subjumlah</b>	<b>102,185,000</b>	<b>78,913,000</b>	<b>Subtotal</b>
Biaya emisi belum diamortisasi	(830,640)	(520,317)	Unamortized debt issuance cost
<b>Jumlah</b>	<b>101,354,360</b>	<b>78,392,683</b>	<b>Total</b>
Disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai:			Presented in consolidated statements of financial position:
Liabilitas jangka pendek	914,000	9,568,000	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	100,440,360	68,824,683	Non-current liabilities
<b>Jumlah</b>	<b>101,354,360</b>	<b>78,392,683</b>	<b>Total</b>

Obligasi ini diterbitkan sebesar harga nominal dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

The bonds were issued at nominal value and are denominated in Rupiah, with the following details:

	Pokok/ Principal Rp	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat kupon/ imbalan ijarah per tahun/ Coupon rate/ ijara fee per annum *)	
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017				Sustainable Bonds II PLN II Year 2017
Seri A	451,500	3 November 2022/ November 3, 2022	7.20%	Series A
Seri B	201,000	3 November 2024/ November 3, 2024	7.50%	Series B
Seri C	800,000	3 November 2027/ November 3, 2027	8.20%	Series C
Seri D	1,093,000	3 November 2032/ November 3, 2032	8.70%	Series D
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017				Sustainable Sukuk Ijara II PLN II Year 2017
Seri A	83,500	3 November 2022/ November 3, 2022	Rp6,012	Series A
Seri B	121,000	3 November 2027/ November 3, 2027	Rp9,922	Series B
Seri C	490,000	3 November 2032/ November 3, 2032	Rp42,630	Series C
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017				Sustainable Bonds II PLN I Year 2017
Seri A	214,000	11 Juli 2022/ July 11, 2022	7.70%	Series A
Seri B	169,000	11 Juli 2024/ July 11, 2024	8.10%	Series B
Seri C	1,217,000	11 Juli 2027/ July 11, 2027	8.50%	Series C

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<b>Pokok/ Principal Rp</b>	<b>Tanggal jatuh tempo/ Maturity date</b>	<b>Tingkat kupon/ imbalan ijarah per tahun/ Coupon rate/ ijara fee per annum *)</b>	
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017				<i>Sustainable Sukuk Ijara II PLN I Year 2017</i>
Seri A	186,000	11 Juli 2022/ <i>July 11, 2022</i>	Rp14,322	<i>Series A</i>
Seri B	214,000	11 Juli 2027/ <i>July 11, 2027</i>	Rp18,190	<i>Series B</i>
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013				<i>Sustainable Bonds I PLN II Year 2013</i>
Seri A	593,000	10 Desember 2018/ <i>December 10, 2018</i>	9.00%	<i>Series A</i>
Seri B	651,000	10 Desember 2023/ <i>December 10, 2023</i>	9.60%	<i>Series B</i>
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013				<i>Sustainable Sukuk Ijara I PLN II Year 2013</i>
Seri A	321,000	10 Desember 2018/ <i>December 10, 2018</i>	Rp28,890	<i>Series A</i>
Seri B	108,000	10 Desember 2023/ <i>December 10, 2023</i>	Rp10,368	<i>Series B</i>
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013				<i>Sustainable Bonds I PLN I Year 2013</i>
Seri A	182,000	5 Juli 2020/ <i>July 5, 2020</i>	8.00%	<i>Series A</i>
Seri B	697,000	5 Juli 2023/ <i>July 5, 2023</i>	8.25%	<i>Series B</i>
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013				<i>Sustainable Sukuk Ijara I PLN I Year 2013</i>
Seri A	121,000	5 Juli 2020/ <i>July 5, 2020</i>	Rp9,680	<i>Series A</i>
Obligasi PLN XII Tahun 2010				<i>PLN XII Bonds Year 2010</i>
Seri B	1,855,000	8 Juli 2022/ <i>July 8, 2022</i>	10.40%	<i>Series B</i>
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010				<i>Sukuk Ijara PLN V Year 2010</i>
Seri B	340,000	8 Juli 2022/ <i>July 8, 2022</i>	Rp35,360	<i>Series B</i>
Obligasi PLN XI Tahun 2010				<i>PLN XI Bonds Year 2010</i>
Seri B	1,783,000	12 Januari 2020/ <i>January 12, 2020</i>	12.55%	<i>Series B</i>
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010				<i>Sukuk Ijara PLN IV Year 2010</i>
Seri B	167,000	12 Januari 2020/ <i>January 12, 2020</i>	Rp20,958	<i>Series B</i>
Obligasi PLN IX Tahun 2007				<i>PLN IX Bonds Year 2007</i>
Seri B	1,200,000	10 Juli 2022/ <i>July 10, 2022</i>	10.90%	<i>Series B</i>
Obligasi PLN VIII Tahun 2006				<i>PLN VIII Bonds Year 2006</i>
Seri B	865,000	21 Juni 2021/ <i>June 21, 2021</i>	13.75%	<i>Series B</i>
<b>Jumlah</b>	<b>14,123,000</b>			<b>Total</b>

\*) Imbalan ijarah per tahun disajikan dalam Rupiah penuh

**Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017**

Pada tanggal 6 November 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PLN tahap II Tahun 2017 dengan jumlah nilai nominal sebesar

\*) *Ijara fee per annum are presented in Rupiah full amount*

**Sustainable Bonds II PLN II Year 2017**

On November 6, 2017, the Company issued Sustainable Bonds II PLN II Year 2017 with a total nominal value amounting to Rp2,545,500 consisting of Series A,

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Rp2.545.500, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C dan Obligasi Seri D dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 dengan nilai nominal sebesar Rp694.500, terdiri dari Seri A, Seri B dan Seri C dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp6.012 per tahun untuk Seri A, Rp9.922 per tahun untuk Seri B, dan Rp42.630 per tahun untuk Seri C dibayarkan setiap tiga bulan sejak 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk ijarah.

Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017

Pada tanggal 12 Juli 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.600.000, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, dan Obligasi Seri C dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 dengan nilai nominal sebesar Rp400.000, terdiri dari Seri A dan Seri B dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp14.322 per tahun untuk Seri A dan Rp18.190 per tahun untuk Seri B dibayarkan setiap tiga bulan sejak 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk ijarah.

*Series B, Series C, and Series D Bonds, with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from February 3, 2018 until the maturity date of the bonds.*

Sustainable Sukuk Ijara II PLN II Year 2017

*Concurrent with the issuance of Sustainable Bonds II PLN II Year 2017, the Company also issued Sustainable Sukuk Ijarah II PLN II Year 2017, with a nominal value amounting to Rp694,500 consisting of Series A, Series B and Series C with PT Bank Tabungan Negara (Persero) acting as the Trustee. The total ijarah fee per annum amounting to Rp6,012 for Series A, Rp9,922 for Series B and Rp42,630 for Series C is payable on a quarterly basis, starting from February 3, 2018 until the maturity date of the sukuk ijarah.*

Sustainable Bonds II PLN I Year 2017

*On July 12, 2017, the Company issued Sustainable Bonds II PLN I Year 2017 with a total nominal value amounting to Rp1,600,000 consisting of Series A, Series B, and Series C Bonds, with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from October 11, 2017 until the maturity date of the bonds.*

Sustainable Sukuk Ijara II PLN I Year 2017

*Concurrent with the issuance of Sustainable Bonds II PLN I Year 2017, the Company also issued Sustainable Sukuk Ijarah II PLN I Year 2017, with a nominal value amounting to Rp400,000, consisting of Series A and Series B with PT Bank Tabungan Negara (Persero) acting as the Trustee. The total ijarah fee per annum amounting to Rp14,322 for Series A Bonds and Rp18,190 for Series B Bonds is payable on a quarterly basis, starting from October 11, 2017 until the maturity date of the sukuk ijarah.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II  
Tahun 2013

Pada tanggal 10 Desember 2013, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.244.000, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II  
Tahun 2013

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 dengan nilai nominal sebesar Rp429.000, terdiri dari Seri A dan Seri B dengan PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp28.890 per tahun untuk Obligasi Seri A dan Rp10.368 per tahun untuk Seri B dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk ijarah.

Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I  
Tahun 2013

Pada tanggal 5 Juli 2013, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp879.000, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 5 Oktober 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I  
Tahun 2013

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN tahap I Tahun 2013 dengan nilai nominal sebesar Rp121.000 dengan PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp9.680 per tahun dan dibayarkan setiap tiga bulan sejak 5 Oktober 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk ijarah.

Sustainable Bonds I PLN II Year 2013

On December 10, 2013, the Company issued Sustainable Bonds I PLN II Year 2013 with a total nominal value amounting to Rp1,244,000 consisting of Series A and Series B Bonds, with PT Bank Permata Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from March 10, 2014 until the maturity date of the bonds.

Sustainable Sukuk Ijarah I PLN II Year 2013

Concurrent with the issuance of Sustainable Bonds I PLN II Year 2013, the Company also issued Sustainable Sukuk Ijarah I PLN II Year 2013, with a nominal value amounting to Rp429,000 consisting of Series A and Series B with PT Bank Permata Tbk acting as the Trustee. The total ijarah fee per annum amounting to Rp28,890 for Series A Bonds and Rp10,368 for Series B Bonds is payable on a quarterly basis, starting from March 10, 2014 until the maturity date of the sukuk ijarah.

Sustainable Bonds I PLN I Year 2013

On July 5, 2013, the Company issued Sustainable Bonds I PLN I Year 2013 with a total nominal value amounting to Rp879,000 consisting of Series A and Series B Bonds with PT Bank Permata Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from October 5, 2013 until the maturity date of the bonds.

Sustainable Sukuk Ijarah I PLN I Year 2013

Concurrent with the issuance of Sustainable Bonds I PLN I Year 2013, the Company also issued Sustainable Sukuk Ijarah I PLN I Year 2013 with a nominal value amounting to Rp121,000 with PT Bank Permata Tbk acting as the Trustee. The total ijarah fee per annum amounting to Rp9,680 is payable on a quarterly basis, starting from October 5, 2013 until the maturity date of the sukuk ijarah.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Obligasi PLN XII tahun 2010

Pada tanggal 8 Juli 2010, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN XII Tahun 2010 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.500.000, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi. Obligasi Seri A senilai Rp645.000 telah dibayar lunas di tahun 2015.

Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN XII Tahun 2010, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp500.000, terdiri dari Seri A dan Seri B dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp15.520 per tahun untuk Seri A dan Rp35.360 per tahun untuk Seri B dan dibayarkan setiap tiga bulan sejak 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk ijarah. Sukuk Ijarah Seri A senilai Rp160.000 telah dibayar lunas di tahun 2015.

Obligasi PLN XI Tahun 2010

Pada tanggal 12 Januari 2010, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN XI Tahun 2010 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.703.000, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B, dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 12 April 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi. Obligasi Seri A senilai Rp920.000 telah dibayar keseluruhannya di tahun 2017.

Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN XI Tahun 2010, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp297.000, terdiri dari Seri A dan Seri B dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp15.535 per tahun untuk Seri A dan Rp20.958 per tahun untuk Seri B dibayarkan setiap tiga bulan sejak 12 April 2010 sampai dengan tanggal jatuh

PLN XII Bonds Year 2010

On July 8, 2010, the Company issued PLN XII Bonds Year 2010 with a total nominal value amounting to Rp2,500,000 consisting of Series A and Series B Bonds with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from October 8, 2010 until the maturity date of the bonds. Series A bonds amounting to Rp645,000 has been fully repaid in 2015.

Sukuk Ijarah PLN V Year 2010

Concurrent with the issuance of PLN XII Bonds Year 2010, the Company also issued Sukuk Ijarah PLN V Year 2010 with a nominal value amounting to Rp500,000, consisting of Series A and Series B with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The total ijarah fee per annum amounting to Rp15,520 for Series A and Rp35,360 for Series B is payable on a quarterly basis, starting from October 8, 2010 until the maturity date of the sukuk ijarah. Series A Sukuk Ijarah amounting to Rp160,000 has been fully repaid in 2015.

PLN XI Bonds Year 2010

On January 12, 2010, the Company issued PLN XI Bonds Year 2010 with a total nominal value amounting to Rp2,703,000, consisting of Series A and Series B bonds, with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from April 12, 2010 until the maturity date of the bonds. Series A Bonds amounting to Rp920,000 has been fully repaid in 2017.

Sukuk Ijarah PLN IV Year 2010

Concurrent with the issuance of PLN XI Bonds Year 2010, the Company also issued Sukuk Ijarah PLN IV Year 2010 with a nominal value amounting to Rp297,000 consisting of Series A and Series B with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The total ijarah fee per annum amounting to Rp15,535 for Series A and Rp20,958 for Series B is payable on a quarterly basis, starting from April 12, 2010 until the maturity date of the sukuk ijarah.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

*For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

tempo sukuk ijarah. Sukuk Ijarah Seri A senilai Rp130.000 telah dibayar keseluruhannya di tahun 2017.

Obligasi PLN IX Tahun 2007

Pada tanggal 10 Juli 2007, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN IX Tahun 2007 dengan jumlah nilai nominal Rp2.700.000, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B, dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Oktober 2007 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi. Obligasi Seri A senilai Rp1.500.000 telah dibayar keseluruhannya di tahun 2017.

Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007

Sukuk ijarah dengan nilai nominal Rp300.000 telah dibayar keseluruhannya di tahun 2017.

Obligasi PLN VIII Tahun 2006

Pada tanggal 21 Juni 2006, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN VIII Tahun 2006 dengan jumlah nilai nominal Rp2.200.100, dengan PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 21 September 2006 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi. Obligasi Seri A senilai Rp1.335.100 telah dibayar keseluruhannya di tahun 2016.

Sejak tanggal 18 Maret 2008, Wali Amanat berganti menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi PLN VIII Tahun 2006 yang tertuang dalam Akta No. 34 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta.

Sehubungan dengan penerbitan seluruh obligasi dan sukuk ijarah Rupiah di atas, masing-masing perjanjian perwaliamanatan menetapkan antara lain bahwa:

- Satu tahun sejak tanggal emisi, Perusahaan dapat membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi ini sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi.

*Series A Sukuk Ijara amounting to Rp130,000 has been fully repaid in 2017.*

PLN IX Bonds Year 2007

*On July 10, 2007, the Company issued PLN IX Bonds Year 2007 with a total nominal value amounting to Rp2,700,000 consisting of Series A and Series B Bonds, with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from October 10, 2007 until the maturity date of the bonds. Series A Bonds amounting Rp1,500,000 has been fully repaid in 2017.*

Sukuk Ijarah PLN II Year 2007

*Sukuk ijarah with the total amount of Rp300,000 has been fully repaid in 2017.*

PLN VIII Bonds Year 2006

*On June 21, 2006, the Company issued PLN VIII Bonds Year 2006 with a total nominal value amounting to Rp2,200,100 with PT Bank Mega Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from September 21, 2006 until the maturity date of the bonds. Series A Bonds amounting to Rp1,335,100 has been fully repaid in 2016.*

*On March 18, 2008, the acting Trustee was changed to PT Bank Tabungan Negara (Persero) in accordance with the Minutes of Meeting of the Bondholders of PLN VIII Bonds Year 2006, as documented in notarial deed No. 34 of Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta.*

*In relation to the issuance of all Rupiah bonds and sukuk ijarah bonds above, each trustee agreement stipulates, among others that:*

- *After one year from the issuance date, the Company is allowed to buy-back either a portion or the entire bonds before the maturity date.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Seluruh obligasi ini tidak dijamin secara khusus, namun dijamin dengan seluruh aset Perusahaan, serta hak pemegang obligasi adalah pari passu tanpa hak khusus dengan hak-hak kreditur lain.
- Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan antara lain: (a) menjaminkan harta kekayaan Perusahaan; (b) memberikan penjaminan; (c) memberikan pinjaman kepada pihak lain; (d) mengadakan penggabungan, konsolidasi dan akuisisi yang menyebabkan Perusahaan bubar; (e) mengalihkan aset tetap; memberikan izin kepada entitas anak untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain atau melakukan investasi; (f) menerbitkan obligasi dengan kedudukan lebih tinggi; dan (g) mengubah bidang usaha; mengurangi modal dasar; modal ditempatkan dan disetor.

Selain itu Perusahaan juga diwajibkan memenuhi: (a) rasio jumlah liabilitas keuangan terhadap jumlah aset tidak lebih dari 80%; (b) kecuali untuk Obligasi PLN XII Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah V Tahun 2010, Obligasi PLN XI Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah IV Tahun 2010, rasio antara laba sebelum beban bunga, pajak dan penyusutan dan amortisasi (EBITDA) dengan beban bunga minimum 2 : 1, untuk Obligasi PLN XII Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah V Tahun 2010, Obligasi PLN XI Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah IV Tahun 2010 minimum rasio adalah 1,5 : 1; (c) rasio aset pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi terhadap liabilitas berbunga yang tidak dijamin dengan jaminan khusus (tidak termasuk penerusan pinjaman dan utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non-bank) minimum 150% untuk Obligasi PLN VIII tahun 2006 dan rasio aset pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi terhadap liabilitas berbunga yang tidak

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- *The bonds are not secured by specific collateral but secured by all of the Company's assets and the bondholders' rights are pari passu without preference to the other creditors.*
- *The Company is restricted by certain covenants, which require written approval from the Trustee to: (a) use the Company's assets as collateral; (b) act as a guarantor; (c) grant a loan to another party; (d) perform any merger, consolidation or acquisition that would cause the Company to be dissolved; (e) transfer the Company's property, plant and equipment, or allow subsidiaries to grant a loan to another party or to make an investment; (f) issue higher ranking bonds; and (g) change the business activities and decrease the Company's authorized, subscribed and paid-up capital.*

*The Company is also required to maintain the following: (a) a ratio of total financial liabilities to total assets not exceeding 80%; (b) except for PLN XII Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah V Year 2010, PLN XI Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah IV Year 2010, the ratio of earnings before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA) to interest expense at a minimum of 2 : 1, for PLN XII Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah V Year 2010, PLN XI Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah IV Year 2010, the minimum ratio is 1.5 : 1; (c) a ratio of power plant, transmission and distribution facilities to interest-bearing liabilities which are not secured by specific collaterals (excluding two-step loans and Government and non-bank Government Financial Institution Loans) at a minimum of 150% for PLN VIII Bonds Year 2006 and a ratio of power plant, transmission and distribution facilities to interest bearing liabilities which are not secured by specific collaterals (excluding two-step*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

*For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

dijamin dengan jaminan khusus (tidak termasuk penerusan pinjaman, pinjaman langsung, obligasi internasional dan utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non-bank) minimum 125% untuk Obligasi PLN XII Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah V Tahun 2010, Obligasi PLN XI Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010, dan Obligasi PLN IX Tahun 2007 dan Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007.

- Perusahaan tidak disyaratkan untuk membentuk penyisihan dana pelunasan obligasi.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 digunakan untuk mendanai proyek pembangkit, transmisi dan distribusi. Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013, Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013, Obligasi PLN XII Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010, Obligasi PLN XI Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 digunakan untuk mendanai proyek transmisi dan distribusi.

Obligasi PLN IX, Obligasi PLN VIII dan Sukuk Ijarah PLN II digunakan sebagai modal kerja.

Perusahaan telah memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian Wali Amanat masing-masing obligasi dan sukuk ijarah.

*loans, direct loans, global bonds and Government and non-bank Government Financial Institution Loans) at a minimum of 125% for the PLN XII Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah V Year 2010, PLN XI Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah PLN IV Year 2010 and PLN IX Bonds Year 2007 and Sukuk Ijarah PLN II Year 2007.*

- *The Company was not required to provide sinking fund for such bonds.*

*The proceeds from the issuance of Sustainable Bonds II PLN II Year 2017 and Sustainable Sukuk Ijarah II PLN II Year 2017 were used to finance the power plant, transmission and distribution construction projects. Sustainable Bonds II PLN I Year 2017 and Sustainable Sukuk Ijarah II PLN I Year 2017, Sustainable Bonds I PLN II Year 2013 and Sustainable Sukuk Ijarah I PLN II Year 2013, Sustainable Bonds I PLN I Year 2013 and Sustainable Sukuk Ijarah I PLN I Year 2013, PLN XII Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah V Year 2010, PLN XI Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah IV Year 2010 were used to finance the transmission and distribution construction projects.*

*Bonds PLN IX, Bonds PLN VIII, and Sukuk Ijarah PLN II were used as working capital.*

*The Company has complied with the restrictions specified within the agreements with the acting Trustee of the corresponding bonds and sukuk ijarah.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2017	
	Peringkat/ Rating	Lembaga pemeringkat/ Rating agency
<b>Obligasi/ Bonds</b>		
PLN VIII Tahun/ Year 2006	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
PLN IX Tahun/ Year 2007	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
PLN XI Tahun/ Year 2010	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
PLN XII Tahun/ Year 2010	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013/ Sustainable Bonds I PLN Phase I Year 2013	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013/ Sustainable Bonds I PLN Phase II Year 2013	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017/ Sustainable Bonds II PLN Phase I Year 2017	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017/ Sustainable Bonds II PLN Phase II Year 2017	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
<b>Sukuk Ijarah/ Sukuk Ijara</b>		
PLN IV Tahun/ Year 2010	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
PLN V Tahun/ Year 2010	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013/ Sustainable Sukuk Ijara I PLN Phase I Year 2013	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013/ Sustainable Sukuk Ijara I PLN Phase II Year 2013	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2013/ Sustainable Sukuk Ijara II PLN Phase I Year 2013	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2013/ Sustainable Sukuk Ijara II PLN Phase II Year 2013	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia

**Surat Utang Jangka Menengah Global  
dan Obligasi Terjamin – US\$**

Rincian Surat Utang Jangka Menengah  
Global dan Obligasi Terjamin adalah  
sebagai berikut:

**Global Medium Term Notes and  
Guaranteed Notes – US\$**

The details of Global Medium Term Notes  
and Guaranteed Notes are as follows:

	Pokok/ Principal *) US\$	Harga penerbitan/ Issuing price %	Jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga/ Interest rate %	
<b>Surat utang jangka menengah</b>					<b>Global medium term notes</b>
<u>Penerbitan tahun 2017</u>					<u>Issued in 2017</u>
Jatuh tempo 2027	1,500,000,000	98.99%	15 Mei 2027/ May 15, 2027	4.13%	Due in 2027
Jatuh tempo 2047	500,000,000	98.51%	15 Mei 2047/ May 15, 2047	5.25%	Due in 2047
Subjumlah	2,000,000,000				Sub total
<u>Penerbitan tahun 2012</u>					<u>Issued in 2012</u>
Jatuh tempo 2042	1,000,000,000	98.51%	24 Oktober 2042/ October 24, 2042	5.25%	Due in 2042
<u>Penerbitan tahun 2011</u>					<u>Issued in 2011</u>
Jatuh tempo 2021	1,000,000,000	99.05%	22 November 2021/ November 22, 2021	5.50%	Due in 2021

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Pokok/ Principal *) US\$	Harga penerbitan/ Issuing price %	Jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga/ Interest rate %	
<b>Obligasi terjamin</b>					<b>Guaranteed notes</b>
<u>Penerbitan tahun 2009</u>					<u>Issued in 2009</u>
Jatuh tempo 2020	1,250,000,000	99.15%	20 Januari 2020/ January 20, 2020	7.75%	Due in 2020
Jatuh tempo 2019	750,000,000	99.15%	7 Agustus 2019/ August 7, 2019	8.00%	Due in 2019
Subjumlah	2,000,000,000				Subtotal
<u>Penerbitan tahun 2007</u>					<u>Issued in 2007</u>
Jatuh tempo 2037	500,000,000	98.59%	29 Juni 2037/ June 29, 2037	7.87%	Due in 2037
<b>Jumlah</b>	<b>6,500,000,000</b>				<b>Total</b>

\*) dalam jumlah penuh/ in full amount

**Surat Utang Jangka Menengah Global**

Pada tanggal 15 Mei 2017, Perusahaan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah sejumlah US\$2.000.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 15 November 2017 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

Pada tanggal 24 Oktober 2012, Perusahaan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah sejumlah US\$1.000.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 24 April 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

Pada tanggal 22 November 2011, Perusahaan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah sejumlah US\$1.000.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

**Global Medium Term Notes**

On May 15, 2017, the Company issued Global Medium Term Notes amounting to US\$2,000,000,000, under the Global Medium Term Notes program with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from November 15, 2017 until the maturity date of the Global Medium Term Notes.

On October 24, 2012, the Company issued Global Medium Term Notes amounting to US\$1,000,000,000, under the Global Medium Term Notes program with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from April 24, 2013 until the maturity date of the Global Medium Term Notes.

On November 22, 2011, the Company issued Global Medium Term Notes amounting to US\$1,000,000,000, under the Global Medium Term Notes program with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from May 22, 2012 until the maturity date of the Global Medium Term Notes.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**Obligasi Terjamin**

**Penerbitan tahun 2009**

Pada tanggal 6 November 2009, MH, entitas anak, yang berdomisili di Belanda menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US\$1.250.000.000 dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 20 Januari 2010 sampai dengan jatuh tempo Obligasi Terjamin.

Pada tanggal 7 Agustus 2009, MH menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US\$750.000.000 dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 8 Februari 2010 sampai dengan jatuh tempo Obligasi Terjamin.

**Penerbitan tahun 2007**

Pada tanggal 28 Juni 2007, MH menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US\$1.000.000.000 dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 28 Desember 2007 sampai 28 Juni 2017. Pada Juni 2017, Obligasi Terjamin *tranche* A telah dibayar keseluruhannya di tahun 2017.

Perjanjian perwalianamanatan menetapkan bahwa:

- Tidak lebih dari 30 hari sejak dua kejadian dimana Pemerintah Indonesia kehilangan kepemilikan lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung, hak suara pada Perusahaan atau, jika dan ketika diterbitkan saham Dwiwarna Seri A dan kejadian yang menurunkan peringkat (*Change of Control Triggering Event*), MH dapat diminta untuk melakukan penawaran untuk membeli kembali Obligasi Terjamin dengan harga 101% dari nilai nominal ditambah bunga terutang sampai tanggal pembelian kembali. MH mempunyai opsi dalam waktu tertentu untuk menebus kembali seluruh Obligasi Terjamin ini dengan harga 100% dari nilai nominal, bersama dengan utang bunga dalam hal terjadinya perubahan tertentu terhadap perpajakan di Belanda atau Indonesia.

**Guaranteed Notes**

**Issued in 2009**

On November 6, 2009, MH, a subsidiary, domicile in Netherlands issued Guaranteed Notes amounting to US\$1,250,000,000, with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from January 20, 2010 until the maturity date of the Guaranteed Notes.

On August 7, 2009, MH issued Guaranteed Notes amounting to US\$750,000,000, with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from February 8, 2010 until the maturity date of the Guaranteed Notes.

**Issued in 2007**

On June 28, 2007, MH issued Guaranteed Notes amounting to US\$1,000,000,000, with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from December 28, 2007 until June 28, 2017. On June 2017, Guaranteed Notes *tranche* A has been fully paid in 2017.

The Indenture stipulates that:

- No later than 30 days following the occurrence of two separate events in which the Government of the Republic of Indonesia ceases to own, directly or indirectly, more than 50% of the voting securities of the Company or, if and when issued, the Class A Dwiwarna Share and an event in which a rating declines (*Change of Control Triggering Event*), MH may be required to make an offer to repurchase all Guaranteed Notes outstanding at a purchase price equal to 101% of their principal amount plus accrued and unpaid interest, if any, to the date of repurchase. The Guaranteed Notes are subject to redemption in whole, at 100% of their principal amount, together with any accrued interest, at the option of MH at a certain time in the event of certain changes affecting the taxes of the Netherlands or Indonesia.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- Pembatasan tertentu termasuk antara lain: penambahan pinjaman sesuai dengan "Rasio Pengecualian", yang setelah memperhitungkan pengaruhnya terhadap pinjaman diperkenankan minimum 2 : 1; pemberian jaminan; pembayaran dividen; penggabungan usaha, akuisisi dan penjualan aset.

Perusahaan dan entitas anak memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian Wali Amanat.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Surat Utang Jangka Menengah Global dan Obligasi Terjamin ini digunakan untuk mendanai kebutuhan investasi program percepatan pembangunan fasilitas tenaga listrik, konstruksi rutin dan untuk tujuan umum korporasi.

- *Certain covenants, including, among others: the incurrence of additional indebtedness along with the "Ratio Exception", that after giving effect to the permitted indebtedness is at least 2 : 1; the incurrence of liens; the payment of dividends; mergers, acquisitions and disposals.*

*The Company and its subsidiaries complied with the restrictions specified within the agreements with the acting Trustee.*

*The proceeds from the Global Medium Term Notes and Guaranteed Notes issued were used to fund the capital expenditure requirements in connection with the fast track program, regular construction and for general corporate purposes.*

**Lembaga pemeringkat/ Rating agency**

	<b>Moody's Investor Service, Inc.,</b>	<b>Standard and Poor's</b>	<b>Fitch</b>
<b>Surat utang jangka menengah global/ Global medium term notes</b>			
Penerbitan tahun 2017/ Issued in 2017	Baa3	-	BBB
Penerbitan tahun 2012/ Issued in 2012	Baa3	BB	BBB
Penerbitan tahun 2011/ Issued in 2011	Baa3	BB	BBB
<b>Obligasi terjamin/ Guaranteed notes</b>			
Penerbitan tahun 2009/ Issued in 2009	Baa3	BB	-
Penerbitan tahun 2007/ Issued in 2007	Baa3	BB	-

**b. Kredit Investasi Kolektif - Efek Beragun Aset ("KIK-EBA")**

	<b>2017 Rp</b>	<b>2016 Rp</b>
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:		
Tidak lebih dari satu tahun	909,480	--
Lebih dari satu tahun	3,410,552	--
Jumlah pembayaran minimum	4,320,032	--
Biaya keuangan belum diamortisasi	(781,446)	--
<b>Jumlah</b>	<b>3,538,586</b>	<b>--</b>
Disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian:		
Liabilitas jangka pendek	630,600	--
Liabilitas jangka panjang	2,907,986	--
<b>Jumlah</b>	<b>3,538,586</b>	<b>--</b>

**b. Collective Investment Contract – Asset Backed Securities ("KIK-EBA")**

*Minimum lease payments due:  
Not later than one year  
More than one year  
Total minimum payments  
Unamortized finance cost  
Total  
Presented in consolidated  
statements of financial position:  
Current liabilities  
Non-current liabilities  
Total*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

*For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

Pada tanggal 25 April 2017, PT Danareksa Investment Management ("DIM") dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") menandatangani akta perjanjian Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa Indonesia Power PLN I – Piutang Usaha ("KIK-DIPP1"). Perjanjian tersebut mengalami beberapa kali amandemen, terakhir pada tanggal 14 September 2017. Pada perjanjian tersebut DIM akan bertindak sebagai Manajer Investasi dan BRI akan bertindak sebagai Bank Kustodian.

Pada tanggal 11 September 2017 berdasarkan surat pernyataan persetujuan pengalihan piutang komponen A dalam perjanjian jual beli tenaga listrik ("PJBTL"), Perusahaan menyetujui IP, entitas anak, untuk mengalihkan piutang yang timbul atas kewajiban pembayaran tunai Komponen A Suralaya ("SLA") unit 1,2,3 dan 4 atas PJBTL SLA unit 1,2,3,4,5,6 dan 7 yang telah diamandemen pada tanggal 22 Agustus 2017 dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017. Piutang tersebut dialihkan kepada pihak ketiga dalam rangka KIK-DIPP1, maksimal sebesar Rp5.000.000.

Pada tanggal 14 September 2017, IP menandatangani perjanjian pengikatan transaksi sekuritisasi piutang usaha Indonesia Power – PLN I No. 206.PJ/061/IP/2017 dengan DIM dan BRI. Di dalam perjanjian tersebut, IP setuju dan mengikat diri untuk menjual piutang usaha sebesar Rp4.932.107 dengan harga Rp4.000.000.

Sejak penandatanganan akta perjanjian ("Cessie") tersebut semua pembayaran atas piutang usaha yang dialihkan tetap dilakukan oleh Perusahaan kepada IP yang dalam hal ini akan menerima Dana hasil koleksi pelunasan Piutang Usaha, namun tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi sebagai kapasitas yang bertindak untuk dan atas nama KIK-DIPP1.

Pada tanggal 15 September 2017, DIM bersama dengan BRI melakukan penawaran umum KIK-DIPP1 sebesar Rp4.000.000 dengan tingkat pengembalian

*On April 25, 2017, PT Danareksa Investment Management ("DIM") and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") signed a deed of Collective Investment Contract Asset Backed Securities Danareksa of Indonesia Power PLN I - Accounts Receivable ("KIK-DIPP1"). The agreement has been amended several times, the latest on September 14, 2017. Based on the agreement, DIM will act as Investment Manager and BRI will act as Custodian Bank.*

*On September 11, 2017 based on the statement of approval for the transfer of receivables of component A under the power purchase agreement ("PJBTL"), the Company approved IP, a subsidiary, to transfer the receivables arising from the cash payment obligations of Component A Suralaya steam power plant ("SLA") unit 1,2,3 and 4 of PJBTL SLA unit 1,2,3,4,5,6 and 7 which have been amended on August 22, 2017 and applied retroactively since January 1, 2017. The receivables were transferred to third party for KIK-DIPP1, maximum amount of Rp5,000,000.*

*On September 14, 2017, IP entered into an agreement for trade receivables securitization transaction of Indonesia Power - PLN I No. 206.PJ/061/IP/2017 with DIM and BRI. Under the agreement, IP agreed and binded to sell their accounts receivable amounting to Rp4,932,107 at a value price of Rp4,000,000.*

*Since the signing of the deed ("Cessie") agreement, all payments made to the transferred trade receivables from the Company are still manage by the IP who will collect the Receivables settlement, however those will not for itself, but act for and on behalf of KIK-DIPP1.*

*On September 15, 2017, DIM together with BRI initiate a public offering of KIK-DIPP1 amounting to Rp4,000,000 with a principal rate of return and investment proceeds*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

*For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

pokok dan hasil Investasi dilakukan dengan *fixed installment* ("anuitas") berdasarkan dari nilai investasi dan *yield* 8,25%. Tanggal akhir pelunasan investasi adalah 19 September 2022. KIK-DIPP1 merupakan investasi dengan peringkat idAAA berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia.

Pada laporan keuangan konsolidasian, penerimaan kas dari transaksi sekuritisasi tersebut dicatat sebagai utang Kredit Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

Berdasarkan KIK-DIPP1, EBA diterbitkan oleh Bank Kustodian dalam 2 (dua) kelas yaitu:

1. EBA Kelas A dengan total nilai nominal sebesar Rp3.688.000 mewakili 92,20% dari keseluruhan aset keuangan. Pemegang EBA Kelas A memiliki hak untuk menerima arus kas tetap setiap 3 (tiga) bulan sekali yang terdiri dari pelunasan bertahap pokok investasi dan pembagian hasil investasi EBA Kelas A.
2. EBA Kelas B dengan total nominal sebesar maksimum 7,80% dari keseluruhan aset keuangan. Pemegang EBA kelas B memiliki hak untuk menerima arus kas tidak tetap pada setiap tanggal pelunasan bertahap dan tanggal pembagian hasil investasi EBA Kelas B.

Semua pembayaran atas EBA semata-mata bersumber dari Perusahaan atas piutang usaha milik IP yang disekuritisasi. Pemegang EBA kelas A mempunyai hak untuk dibayar mendahului pemegang EBA kelas B. Pemegang EBA kelas B akan menerima pembayaran pelunasan bertahap dan hasil investasi EBA kelas B setelah dilakukan pembayaran penuh atas semua EBA kelas A menurut tata urutan pembayaran (*payment waterfall*).

*settled with fixed installment ("annuity") based on investment value and 8.25% yield. The final date of settlement of the investment is September 19, 2022. The KIK-DIPP1 is an investment with idAAA rating based on the rating from PT Pemeringkat Efek Indonesia.*

*In the consolidated financial statements, cash receipts from securitization transactions were recorded as Collective Investment Credit - Asset Backed Securities ("KIK-EBA") loans.*

*Based on KIK-DIPP1, EBA is issued by Custodian Bank in 2 (two) classes, namely:*

1. *Class A EBA with a total nominal value of Rp3,688,000 represents 92.20% of total financial assets. Class A EBA holders have the right to receive a fixed cash flow on every 3 (three) months consist of principal gradual settlement and investment return of Class A EBA.*
2. *Class B EBA with a nominal maximum of 7.80% of total financial assets. Class B EBA holders have the right to receive variable non-fixed cash flow on each date of principal gradual settlement and investment return of EBA Class B.*

*All EBA payments are solely derived from the Company on securitized IP's trade receivable. Class A EBA holders have the privilege to be paid before Class B EBA holders. Class B EBA holders will receive the principal gradual settlement and investment returns after full payment of all Class A EBA according to the payment waterfall.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**28. Utang Listrik Swasta**

Akun ini merupakan utang listrik swasta yang direstrukturisasi melalui renegotiasi dengan IPP.

Rincian berdasarkan pemasok dan jadwal pembayaran pokok adalah sebagai berikut:

**a. Berdasarkan pemasok**

	2017 Rp	2016 Rp
PT Paiton Energy (US\$490,296,755 per 2017 dan US\$514,079,190 per 2016)	6,642,540	6,907,168
PT Jawa Power (US\$54,167,514 per 2017 dan US\$54,847,946 per 2016)	733,862	736,937
<b>Jumlah</b>	<b>7,376,402</b>	<b>7,644,105</b>
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(349,968)	(328,683)
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>7,026,434</b>	<b>7,315,422</b>

**b. Berdasarkan jadwal pembayaran pokok,  
pada nilai nominal**

	2017 Rp	2016 Rp
Dibayarkan:		
Dalam satu tahun	349,968	328,683
Pada tahun kedua	368,992	347,075
Pada tahun ketiga	389,315	365,941
Pada tahun keempat	411,073	386,096
Setelah lima tahun	5,857,054	6,216,310
<b>Jumlah pembayaran</b>	<b>7,376,402</b>	<b>7,644,105</b>

Utang kepada PT Paiton Energy dan PT Jawa Power dikenakan bunga per tahun masing-masing sebesar 4,81% dan 18,45% dibayar dalam 360 kali angsuran bulanan sejak 1 Januari 2002 sampai dengan 1 Desember 2031.

**28. Electricity Purchase Payable**

*This account represents electricity purchase payable, which was restructured through renegotiation with IPP.*

*Details according to creditors and payment schedules are as follows:*

**a. By creditor**

	2017 Rp	2016 Rp
PT Paiton Energy (US\$490,296,755 as of 2017 and US\$514,079,190 as of 2016)	6,642,540	6,907,168
PT Jawa Power (US\$54,167,514 as of 2017 and US\$54,847,946 as of 2016)	733,862	736,937
<b>Total</b>	<b>7,376,402</b>	<b>7,644,105</b>
Less current maturities	(349,968)	(328,683)
<b>Long-term portion</b>	<b>7,026,434</b>	<b>7,315,422</b>

**b. By installment schedule, at nominal amount**

	2017 Rp	2016 Rp
Payable in:		
Within one year	349,968	328,683
In the second year	368,992	347,075
In the third year	389,315	365,941
In the fourth year	411,073	386,096
After five years	5,857,054	6,216,310
<b>Total payments</b>	<b>7,376,402</b>	<b>7,644,105</b>

*Payables to PT Paiton Energy and PT Jawa Power bear annual interest of 4.81% and 18.45%, respectively, and are payable in 360 monthly installments from January 1, 2002 until December 1, 2031.*

**29. Utang Pihak Berelasi**

Utang kepada DEB pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing – masing sebesar Rp794 dan Rp2.301 merupakan utang kepada PLN Batam, entitas anak, untuk pembelian *switchyard*.

**29. Payable to Related Parties**

*Payable to DEB on December 31, 2017 and 2016 amounting to Rp794 and Rp2,301, respectively, is payable to PLN Batam, a subsidiary, for purchases of switchyard.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**30. Utang Usaha**

Akun ini merupakan liabilitas sehubungan dengan pembelian tenaga listrik, bahan bakar, barang dan jasa.

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

	2017 Rp	2016 Rp
<b>Pihak berelasi</b>		
Pembelian bahan bakar, barang dan jasa	9,078,731	6,984,764
Pembelian tenaga listrik	2,136,508	787,929
Subjumlah	<u>11,215,239</u>	<u>7,772,693</u>
<b>Pihak ketiga</b>		
Pembelian bahan bakar, barang dan jasa	20,982,828	17,119,615
Pembelian tenaga listrik	11,513,358	5,299,776
Subjumlah	<u>32,496,186</u>	<u>22,419,391</u>
<b>Jumlah</b>	<u><b>43,711,425</b></u>	<u><b>30,192,084</b></u>

Rincian utang usaha dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

	2017	
	Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *)	Ekuivalen/ Equivalent Rp
US\$	543,839,978	7,367,944
JPY	--	--
EUR	648,299	10,485
Lain **)	759,254	10,286
<b>Jumlah</b>		<u><b>7,388,715</b></u>

\*) Dalam jumlah penuh

\*\*) Utang usaha dalam mata uang lainnya disajikan dalam jumlah setara US\$, menggunakan kurs tanggal pelaporan

**30. Trade Payables**

This account represents payables arising from purchases of electricity, fuel, goods and services.

Details of trade payables are as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	
			<b>Related parties</b>
			Purchase of fuel goods and service
			Purchase of electricity
			Subtotal
			<b>Third parties</b>
			Purchase of fuel goods and service
			Purchase of electricity
			Subtotal
			<b>Total</b>

Details of trade payables in foreign currencies are as follows:

	2017		2016		
	Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *)	Ekuivalen/ Equivalent Rp	Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *)	Ekuivalen/ Equivalent Rp	
US\$	543,839,978	7,367,944	416,862,980	5,600,971	US\$
JPY	--	--	31,991,723	3,692	JPY
EUR	648,299	10,485	10,972,386	155,386	EUR
Lain **)	759,254	10,286	5,081,646	68,277	Others **)
<b>Jumlah</b>		<u><b>7,388,715</b></u>		<u><b>5,828,326</b></u>	<b>Total</b>

\*) In full amount

\*\*) Trade payables in other currencies are presented in US\$ equivalents using the exchange rate prevailing at reporting date

**31. Utang Lain-Lain**

Perolehan aset tetap dan pekerjaan dalam pelaksanaan

	2017 Rp	2016 Rp
Rupiah	12,948,415	8,760,185
US\$	4,890,162	5,628,507
EUR	256,386	671,898
CHF	99,914	110,033

Acquisition of property, plant and equipment and construction in progress

Rupiah

US\$

EUR

CHF

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2017 Rp	2016 Rp	
Karyawan	86,547	41,485	Employees
Lain-lain	998,498	660,119	Others
Pemerintah daerah	1,973,537	1,692,528	Local government
Uang muka penjualan tenaga listrik	941,967	663,880	Advances received on sale of electricity
<b>Jumlah</b>	<b>22,195,426</b>	<b>18,228,635</b>	<b>Total</b>
Dikurangi bagian jangka panjang	940,154	155,781	Less long-term portion
<b>Bagian jangka pendek</b>	<b>21,255,272</b>	<b>18,072,854</b>	<b>Current portion</b>

**Pemerintah Daerah**

Utang kepada Pemerintah Daerah merupakan jumlah yang ditagih Perusahaan dari pelanggan untuk pajak penerangan jalan umum. Selanjutnya jumlah yang dipungut akan diteruskan kepada Pemerintah Daerah.

**Local Government**

The payable to Local Government represents the amount collected by the Company from the customer for streetlight taxes. This is subsequently remitted to the respective Local Government.

**Uang muka penjualan tenaga listrik**

Akun ini merupakan kas yang diterima atas penjualan listrik prabayar.

**Advances received on sale of electricity**

This account represents cash received from the sale of prepaid electricity.

**Karyawan**

Utang kepada karyawan terutama merupakan penerimaan dimuka atas cicilan penjualan rumah dinas.

**Employees**

Payable to employees mainly represents receipt of advance installment payment from employees related to house installment.

**32. Utang Pajak**

**32. Taxes Payable**

	2017 Rp	2016 Rp	
Perusahaan			The Company
Pajak kini			Current tax
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 21	269,754	50,416	Article 21
Pasal 22	115,596	65,721	Article 22
Pasal 23	60,699	60,912	Article 23
Pasal 15, 25 dan 26	512,847	481,069	Article 15, 25 and 26
Pajak pertambahan nilai	761,410	594,298	Value added tax
Bea materai	24,405	13,523	Stamp duty
Subjumlah	1,744,711	1,265,939	Subtotal
Entitas anak			Subsidiaries
Pajak kini	104,265	126,858	Current tax
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 21	172,665	60,981	Article 21
Pasal 22	26,165	16,723	Article 22
Pasal 23	31,331	32,897	Article 23
Pasal 15, 25 dan 26	59,854	84,383	Article 15, 25 and 26
Pajak pertambahan nilai	248,873	363,147	Value added tax
Pajak bumi dan bangunan	--	18	Land and building taxes
Subjumlah	643,153	685,007	Subtotal
<b>Jumlah</b>	<b>2,387,864</b>	<b>1,950,946</b>	<b>Total</b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**33. Biaya Masih Harus Dibayar**

**33. Accrued Expenses**

	2017 Rp	2016 Rp	
Bunga dan beban keuangan			<i>Interest and financing charges</i>
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
Utang bank	465,511	447,596	<i>Bank loans</i>
Utang penerusan pinjaman	275,160	235,460	<i>Two-step loans</i>
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non bank	15,081	119,640	<i>Government and non bank Government financial institution loans</i>
Utang usaha atas pembelian BBM	--	19,713	<i>Trade payables on purchases of fuel</i>
Jumlah pihak berelasi	<u>755,752</u>	<u>822,409</u>	<i>Total related parties</i>
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
Utang obligasi dan sukuk ijarah	1,500,296	1,338,615	<i>Bonds payable and sukuk ijarah</i>
Utang bank	495,279	394,765	<i>Bank loans</i>
Utang sewa pembiayaan	411,282	341,403	<i>Lease liabilities</i>
Utang listrik swasta	48,713	39,027	<i>Electricity purchase payable</i>
Jumlah pihak ketiga	<u>2,455,570</u>	<u>2,113,810</u>	<i>Total third parties</i>
Subjumlah	<u>3,211,322</u>	<u>2,936,219</u>	<i>Subtotal</i>
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek			<i>Employee benefit liabilities short-term</i>
Bonus dan insentif prestasi kerja	5,907,215	6,159,817	<i>Bonus and performance incentives</i>
Biaya operasional	<u>2,358,900</u>	<u>1,548,523</u>	<i>Operational charges</i>
<b>Jumlah</b>	<b><u>11,477,437</u></b>	<b><u>10,644,559</u></b>	<b>Total</b>

Rincian biaya masih harus dibayar dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

*Details of accrued expenses in foreign currencies are as follows:*

	2017		2016		
	Dalam mata uang asing/ <i>In foreign currencies *)</i>	Ekuivalen/ <i>equivalent Rp</i>	Dalam mata uang asing/ <i>In foreign currencies *)</i>	Ekuivalen/ <i>equivalent Rp</i>	
US\$	134,199,763	1,818,138	113,279,119	1,522,018	US\$
JPY	4,561,471,496	548,373	4,198,343,675	484,509	JPY
EUR	1,058,278	17,116	1,136,639	16,097	EUR
Lain-lain **)	123,095	1,668	138,506	1,861	Others **)
<b>Jumlah</b>		<b><u>2,385,295</u></b>		<b><u>2,024,485</u></b>	<b>Total</b>

\*) Dalam jumlah penuh

\*\*) Biaya masih harus dibayar dalam mata uang asing lainnya disajikan setara US\$ dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan.

\*) *In full amount*

\*\*) *Accrued expenses denominated in other foreign currencies are presented as US\$ equivalents using the exchange rates prevailing at reporting date.*

**34. Uang Jaminan Langgan**

**34. Customers' Security Deposits**

Akun ini merupakan uang jaminan langganan yang ditentukan berdasarkan besar daya dan golongan tarif. Uang jaminan langganan akan dikembalikan apabila pelanggan berhenti menjadi pelanggan, dengan memperhitungkan rekening listrik belum dibayar.

*This account represents security deposits from customers determined based on power supply and electricity tariff. Customer security deposits will be refunded, net of unpaid electricity bills, upon discontinuation of customers' subscriptions.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**35. Utang Biaya Proyek**

Akun ini merupakan utang kepada kontraktor atas biaya konstruksi dan pengadaan material. Akun ini akan direklasifikasi ke akun penerusan pinjaman pada saat penerbitan *Withdrawal Authorization* (WA) atau dokumen lain yang sejenis.

**35. Project Cost Payable**

*This account represents payable to contractors arising from construction expense and purchases of materials. This account will be reclassified into the two-step loans account at the issuance of the Authorization (WA) or other similar documents.*

**36. Penjualan Tenaga Listrik**

Penjualan tenaga listrik menurut pelanggan adalah sebagai berikut:

**36. Sale of Electricity**

*Sale of electricity by customers is as follows:*

	2017 Rp	2016 Rp	
<b>Pihak berelasi</b>			<b>Related parties</b>
Badan Usaha Milik Negara	5,487,610	5,125,587	State-Owned Enterprises
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
Umum	229,444,319	199,054,085	Public
Lembaga dan kementerian	10,677,460	10,077,117	Institutions and ministries
TNI dan Polri	1,222,172	1,118,787	Indonesian Armed Forces
Jumlah pihak ketiga	241,343,951	210,249,989	Total of third parties
<b>Jumlah</b>	<b>246,831,561</b>	<b>215,375,576</b>	<b>Total</b>
<b>Masa uji coba</b>	(244,705)	(1,235,742)	<b>Commissioning test</b>
<b>Jumlah penjualan bersih</b>	<b>246,586,856</b>	<b>214,139,834</b>	<b>Total sales - net</b>

*Testing dan masa uji coba (commissioning test)* merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik yang telah selesai dikerjakan dan hendak dioperasikan. Beban dan pendapatan atas penjualan tenaga listrik yang terjadi pada masa uji coba dikapitalisasi ke Pekerjaan Dalam Pelaksanaan konstruksi dikarenakan instalasi listrik belum beroperasi.

*Testing and commissioning (commissioning test) are series of inspection and testing activities for electrical installations that have been completed and are going to be operated. The costs and revenues from the sale of electricity that occurred during the commissioning test are capitalized into Construction in Progress because the electrical installation has not been commercially operated.*

Penjualan tenaga listrik tahun 2017 dan 2016 didasarkan pada Tarif Dasar Listrik, yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

- Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014, tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) yang diperbarui dengan Peraturan Menteri ESDM No. 9 Tahun 2015, Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2016 dan terakhir diperbarui dengan Peraturan Menteri ESDM No. 41 Tahun 2017.

*Sale of electricity for the years 2017 and 2016 are based on the Basic Electricity Tariff determined by the Government and Local Government as follows:*

- Regulation of the Minister of ESDM of the Republic of Indonesia No. 31 Year 2014, regarding the Tariff of Electricity provided by PT PLN (Persero), which has been amended by Regulation of the Minister of ESDM No. 9 Year 2015, Regulation of the Minister of ESDM No. 28 Year 2016 and with the latest amended by Regulation of the Minister of ESDM No. 41 Year 2017.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 38 Tahun 2015 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PLN Batam yang berlaku untuk penjualan tenaga listrik tahun 2016.
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 21 Tahun 2017 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PLN Batam yang berlaku untuk penjualan tenaga listrik tahun 2017.

Tidak terdapat penjualan kepada pelanggan dengan jumlah melebihi 10% dari penjualan tenaga listrik.

- *Regulation of the Governor of Riau Islands No. 38 Year 2015, regarding the tariff of electricity provided by PLN Batam is applicable for sale of electricity for the year 2016.*
- *Regulation of the Governor of Riau Islands No. 21 Year 2017, regarding the tariff of electricity provided by PLN Batam is applicable for sale of electricity for the year 2017.*

*The Company has no single customer from which it generates revenue of more than 10% of total sale of electricity.*

**37. Subsidi Listrik Pemerintah**

Pendapatan subsidi merupakan pendapatan dari Pemerintah Indonesia atas selisih antara biaya yang diperbolehkan ditambah margin 7% dengan harga jual aktual per masing-masing golongan tarif kecuali untuk golongan tarif yang telah mendapatkan penyesuaian tarif otomatis menurut Peraturan Menteri ESDM No. 09 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 31 Tahun 2014 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero).

Pemerintah Republik Indonesia memberikan subsidi listrik kepada pelanggan melalui Perusahaan. Tata cara penghitungan dan pembayaran subsidi listrik periode Anggaran 31 Desember 2017 menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.02/2017 yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.02/2017 tanggal 15 November 2017. Subsidi listrik dihitung dari selisih negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif dikurangi Biaya Pokok Penyediaan ("BPP") tenaga listrik (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing golongan tarif dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap golongan tarif. BPP tenaga listrik dihitung berdasarkan formula, termasuk tingkat susut jaringan transmisi dan distribusi, yang ditetapkan oleh ESDM c.q Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

**37. Government's Electricity Subsidy**

*Subsidy revenue represent the revenue from the Government of Indonesia for difference between allowable cost plus 7% margin with actual sales price for each tariff group except for tariff group which received automatic tariff adjustment based on the Minister of ESDM Regulation No. 09 Year 2015 regarding changes on the Minister of ESDM Regulation No. 31 Year 2014 regarding electricity tariff provided by PT PLN (Persero).*

*The Government of the Republic of Indonesia has provided electricity subsidy to customers through the Company. The procedure for calculation and payment of electricity subsidy for Budget period December 31, 2017 are using the Minister of Finance Regulation No. 44/PMK.02/2017 as amended by Minister of Finance Regulation No 162/PMK.02/2017 dated November 15, 2017. The electricity subsidy is calculated from the negative difference between the average sales prices (Rp/kWh) of each tariff group less the cost of electricity supplies (Rp/kWh) on the voltage at each tariff group multiplied by the electricity sales volume (kWh) for each tariff group. The cost of electricity supplies is computed based on the formula, including the rate of transmission and distribution losses which is determined by the Directorate General of Electricity under the Ministry of ESDM.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ("DIPA") revisi tanggal 30 Desember 2016 No.SP.DIPA-999.07.1.979321/2016, pagu tertinggi subsidi listrik tahun anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp44.983.700, termasuk 7% margin di atas BPP tenaga listrik.

Besarnya subsidi listrik dalam satu tahun anggaran secara final ditetapkan berdasarkan hasil audit atas ketaatan penggunaan subsidi listrik yang dilakukan oleh auditor yang ditunjuk Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran.

Tanggal 19 Maret 2018 BPK RI menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu subsidi listrik tahun anggaran 2017 No.01/BA/03/2018 yang menetapkan bahwa hasil audit perhitungan subsidi listrik tahun 2017 adalah sebesar Rp45.738.215.

Pendapatan subsidi listrik dirinci sebagai berikut:

	2017 Rp	2016 Rp	
Realisasi penerimaan subsidi tahun anggaran berjalan			<i>Realization of subsidy from current year budget</i>
Penerimaan tunai	45,375,200	37,287,383	<i>Cash received</i>
saling hapus dengan pajak revaluasi	--	13,529,920	<i>Offset with revaluation tax</i>
Piutang subsidi listrik berjalan	363,015	7,225,962	<i>Subsidy receivable budget</i>
<b>Jumlah</b>	<b>45,738,215</b>	<b>58,043,265</b>	<b>Total</b>

Based on the Approval Letter of Budget Performance List ("DIPA") revised dated December 30, 2016 No.SP.DIPA-999.07.1.979321/2016, the electricity subsidy plafond for budget year 2017 amounted to Rp44,983,700, which includes 7% margin above the costs of electricity supplies.

The amount of the electricity subsidy within a budget year is finalized based on the result of the compliance audit of the usage of the electricity subsidy performed by an auditor assigned by the Directorate General of Budget under the Ministry of Finance.

On March 19, 2018 BPK RI has issued an Audit Report on the specific purpose of electricity subsidy for fiscal year 2017 No.01/BA/03/2018 which determined that the audit result of electricity subsidy calculation in 2017 was amounted to Rp45,738,215.

The details of revenue from electricity subsidy are as follows:

**38. Pendapatan Usaha Lain-Lain**

**38. Other Revenues**

	2017 Rp	2016 Rp	
Jaringan dan jasa telekomunikasi	942,049	816,278	<i>Telecommunication network and service</i>
Sewa transformator	378,850	312,725	<i>Transformer rental</i>
Perubahan daya tersambung dan administrasi	13,225	25,284	<i>Upgrading of electricity power and administration fees</i>
Jasa-jasa dan lainnya	260,809	475,699	<i>Services and others</i>
<b>Jumlah</b>	<b>1,594,933</b>	<b>1,629,986</b>	<b>Total</b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**39. Beban Bahan Bakar dan Pelumas**

**39. Fuel and Lubricants Expense**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	
Bahan bakar minyak			<i>Fuel</i>
<i>Solar high speed diesel</i>	18,264,985	19,191,437	<i>Solar high speed diesel</i>
Residu	3,838,411	3,570,435	<i>Residue</i>
<i>Solar industrial diesel</i>	3,270	4,315	<i>Solar industrial diesel</i>
Lainnya	1,209,498	1,291,002	<i>Others</i>
Subjumlah	<u>23,316,164</u>	<u>24,057,189</u>	<i>Subtotal</i>
Bahan Bakar - Non Minyak			<i>Nonfuel</i>
Gas alam	47,604,339	51,079,829	<i>Natural gas</i>
Batubara	42,415,815	30,901,389	<i>Coal</i>
Panas bumi	3,022,044	2,834,209	<i>Geothermal</i>
Air	325,228	322,631	<i>Water</i>
Subjumlah	<u>93,367,426</u>	<u>85,138,058</u>	<i>Subtotal</i>
Minyak pelumas	264,234	297,136	<i>Lubricants</i>
<b>Jumlah</b>	<b><u>116,947,824</u></b>	<b><u>109,492,383</u></b>	<b><i>Total</i></b>

Jumlah pembelian Perusahaan dari pemasok yang melebihi 10% dari total pendapatan Perusahaan adalah masing-masing sebesar Rp19.129.336 dan Rp22.581.839 tahun 2017 dan 2016 dari PT Pertamina (Persero) (pihak berelasi) (Catatan 51).

*Purchases from a single supplier exceeding 10% of the Company's total revenues were transacted with PT Pertamina (Persero) (a related party) amounting to Rp19,129,336 and Rp22,581,839, in 2017 and 2016, respectively (Note 51).*

**40. Beban Pembelian Tenaga Listrik**

**40. Purchased Electricity Expenses**

Akun ini termasuk pembelian tenaga listrik dari IPP terkait PPA dan ESC, pembelian tenaga listrik selama masa uji coba dan pembelian tenaga listrik dari kelebihan produksi dari IPP tertentu. Rinciannya adalah sebagai berikut:

*This account includes purchase of electricity from certain IPPs in relation to PPAs and ESCs, purchase of electricity during the commissioning stage and purchase of excess electricity generated by certain IPPs. The details are as follows:*

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
PT Sumber Segara Primadaya	6,547,601	3,281,618	<i>PT Sumber Segara Primadaya</i>
PT Pertamina Geothermal Energy	2,076,654	916,737	<i>PT Pertamina Geothermal Energy</i>
PT Bajradaya Sentranusa	781,022	775,713	<i>PT Bajradaya Sentranusa</i>
PT Geo Dipa Energi	742,444	589,986	<i>PT Geo Dipa Energi</i>
PT Bukit Pembangkit Innovative	671,673	444,259	<i>PT Bukit Pembangkit Innovative</i>
PT Dalle Energy Batam	529,834	545,847	<i>PT Dalle Energy Batam</i>
Subjumlah	<u>11,349,228</u>	<u>6,554,160</u>	<i>Subtotal</i>
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
PT Paiton Energy	13,121,901	11,912,764	<i>PT Paiton Energy</i>
PT Jawa Power	8,082,414	6,925,687	<i>PT Jawa Power</i>
PT Cirebon Energi Power	3,892,763	3,555,402	<i>PT Cirebon Energi Power</i>
Subjumlah	<u>25,097,078</u>	<u>22,393,853</u>	<i>Subtotal</i>
Lain-lain (masing - masing dibawah 5% dari jumlah)	35,980,335	30,781,377	<i>Others (each under 5% of total)</i>
<b>Jumlah</b>	<b><u>72,426,641</u></b>	<b><u>59,729,390</u></b>	<b><i>Total</i></b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**41. Beban Sewa**

Akun ini sebagian besar merupakan biaya penyewaan mesin diesel dan genset yang ditentukan sebagai sewa operasi.

**41. Lease Expenses**

*This account mostly represents the rental of diesel engines and gensets determined as operating leases.*

**42. Beban Pemeliharaan**

Akun ini merupakan beban yang timbul dari pemakaian material dan jasa borongan untuk keperluan pemeliharaan. Rinciannya adalah sebagai berikut:

**42. Maintenance Expenses**

*This account represents spare parts used and contractor fees for maintenance purposes. The details are as follows:*

	2017 Rp	2016 Rp	
Jasa borongan	13,392,384	14,439,884	<i>Contractor fees</i>
Pemakaian material	6,123,222	6,786,852	<i>Spare parts used</i>
<b>Jumlah</b>	<b>19,515,606</b>	<b>21,226,736</b>	<b>Total</b>

**43. Beban Kepegawaian**

	2017 Rp	2016 Rp	
Jasa produksi dan insentif prestasi kerja	6,502,303	7,001,682	<i>Bonus and performance incentives</i>
Imbalan kerja (Catatan 49)	5,242,042	4,968,131	<i>Employee benefits (Note 49)</i>
Gaji	4,463,052	4,262,154	<i>Salaries</i>
Tunjangan	2,811,243	2,708,988	<i>Allowances</i>
Lain-lain	4,105,871	3,719,010	<i>Others</i>
<b>Jumlah</b>	<b>23,124,511</b>	<b>22,659,965</b>	<b>Total</b>

**44. Beban Usaha Lain-Lain**

	2017 Rp	2016 Rp	
Baca meter	1,132,563	1,084,739	<i>Meter reading</i>
Pengelolaan pelanggan	810,243	666,112	<i>Customer maintenance</i>
Perjalanan dinas	781,490	725,198	<i>Travel</i>
Penagihan rekening dan penertiban pemakaian tenaga listrik	766,563	686,023	<i>Billing collection and orderliness of electricity used</i>
Honorarium	765,285	751,655	<i>Honorarium</i>
Teknologi informasi	641,408	536,176	<i>Technological information</i>
Lain-lain (masing-masing di bawah 5% dari jumlah)	2,809,202	2,834,161	<i>Others (each below 5% of total)</i>
<b>Jumlah</b>	<b>7,706,754</b>	<b>7,284,064</b>	<b>Total</b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**45. Beban Keuangan**

**45. Financial Cost**

	2017 Rp	2016 Rp	
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
Utang bank	5,545,937	3,774,489	<i>Bank loans</i>
Penerusan pinjaman	547,187	633,599	<i>Two-step loans</i>
Utang kepada Pemerintah	514,091	558,962	<i>Government loans</i>
Instrumen derivatif	62,552	105,215	<i>Derivative instruments</i>
Jumlah pihak berelasi	<u>6,669,767</u>	<u>5,072,265</u>	<i>Total related parties</i>
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
Utang sewa pembiayaan	3,874,639	4,273,840	<i>Lease liabilities</i>
Utang obligasi	4,504,284	6,487,714	<i>Bonds payable</i>
Utang bank	2,929,784	2,289,708	<i>Bank loans</i>
Utang listrik swasta	457,281	471,406	<i>Electricity purchase payable</i>
Lain-lain	121,176	108,343	<i>Others</i>
Jumlah pihak ketiga	<u>11,887,164</u>	<u>13,631,011</u>	<i>Total third parties</i>
<b>Jumlah</b>	<b><u>18,556,931</u></b>	<b><u>18,703,276</u></b>	<b>Total</b>

**46. Penghasilan Lain-Lain – Bersih**

**46. Other Income – Net**

	2017 Rp	2016 Rp	
Penghasilan denda administrasi	2,038,007	1,848,808	<i>Administrative penalty income</i>
Kenaikan nilai wajar properti investasi	1,051,363	878,619	<i>Increase in the fair value of investment property</i>
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	811,191	490,705	<i>Equity in net income of associates and joint ventures</i>
Penghasilan jasa dan klaim	47,755	44,988	<i>Claim and service income</i>
Keuntungan penjualan aset tidak digunakan dalam operasi	45,983	27,705	<i>Gain on sale of assets not used in operations</i>
Beban penelitian	(33,707)	(27,417)	<i>Research expenses</i>
Program pemberdayaan lingkungan	(204,338)	(81,079)	<i>Community development programs</i>
Kerugian penurunan nilai aset tetap tidak digunakan dalam operasi	(327,986)	(167,941)	<i>Loss on impairment of asset not used in operations</i>
Lain-lain	(18,327)	(1,922,022)	<i>Others</i>
<b>Jumlah</b>	<b><u>3,409,941</u></b>	<b><u>1,092,366</u></b>	<b>Total</b>

**47. Pajak Penghasilan**

**47. Income Tax**

Beban pajak Perusahaan dan entitas anak terdiri dari:

*Tax Expense of the Company and its subsidiaries consists of the following:*

	2017 Rp	2016 Rp	
Beban pajak kini	(385,032)	(263,510)	<i>Current tax</i>
Beban pajak tangguhan	(3,730,923)	(5,164,333)	<i>Deferred tax expenses</i>
<b>Jumlah beban pajak</b>	<b><u>(4,115,955)</u></b>	<b><u>(5,427,843)</u></b>	<b>Total tax expenses</b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**a. Pajak Kini**

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laba kena pajak (rugi fiskal) Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2017 Rp	2016 Rp	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	8,544,072	13,578,226	<i>Income before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
Laba (rugi) sebelum pajak entitas anak	(11,397,167)	(9,698,078)	<i>Income (loss) before tax attributable to subsidiaries</i>
Laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan	(2,853,095)	3,880,148	<i>Income (loss) before tax - the Company</i>
Perbedaan temporer:			<i>Temporary differences:</i>
Sewa pembiayaan	(1,953,523)	(1,875,414)	<i>Lease expenses</i>
Penyambungan pelanggan	63,448	(331,315)	<i>Customer connection fees</i>
Penyusutan aset tetap	(19,541,433)	(49,697,132)	<i>Depreciation of property, plant and equipment</i>
Imbalan kerja	1,682,116	1,337,285	<i>Employee benefits</i>
Biaya (pendapatan) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal			<i>Nondeductible expenses (nontaxable income)</i>
Penyisihan piutang ragu-ragu dan penurunan nilai persediaan	208,581	210,544	<i>Allowance for doubtful accounts and decline in value of inventories</i>
Kesejahteraan karyawan	925,900	809,141	<i>Employee welfare</i>
Penyusutan rumah dinas	5,267	5,267	<i>Depreciation of guest house</i>
Penghasilan bunga telah dikenakan pajak final	(780,608)	(307,309)	<i>Interest income subjected to final tax</i>
Revaluasi aset	(3,445,081)	--	<i>Assets revaluation</i>
Beban lain tidak dapat dikurangkan	12,250,998	2,883,839	<i>Other nondeductible expenses</i>
Laba kena pajak (rugi fiskal) Perusahaan tahun berjalan	(13,437,430)	(43,084,946)	<i>The Company's taxable income (fiscal loss) for the year</i>
Rugi fiskal tahun: 2016	(40,686,691)	--	<i>Fiscal losses year: 2016</i>
<b>Akumulasi rugi fiskal Perusahaan</b>	<b>(54,124,121)</b>	<b>(43,084,946)</b>	<b><i>Accumulated fiscal losses the Company</i></b>

Pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak. Nilai tersebut mungkin disesuaikan pada saat Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Rugi fiskal dapat dikompensasikan dengan laba fiskal pada masa lima tahun mendatang sejak kerugian fiskal terjadi. Manajemen memperkirakan bahwa akumulasi kerugian fiskal dapat dikompensasikan dengan laba fiskal di masa mendatang. Sehingga per 31 Desember 2017, Perusahaan dan entitas anak mengakui aset pajak tangguhan dari akumulasi rugi fiskal sebesar Rp19.966.029.

**a. Current Tax**

A reconciliation between income (loss) before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income (fiscal losses) of the Company is as follows:

*Current income tax is computed based on estimated taxable income. The amount may be adjusted when the Annual Tax returns are filed with the Tax Office.*

*The fiscal loss can be compensated against the taxable income for a period of five years subsequent to the year the fiscal loss was incurred. Management believes that it is probable future taxable profits will be available to be utilized accumulated fiscal losses. Therefore as of December 31, 2017, the Company and its subsidiaries' recognized deferred tax assets from accumulated fiscal losses amounted to Rp19,966,029.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

*For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

Perhitungan beban dan utang pajak kini  
(pajak penghasilan lebih bayar) adalah  
sebagai berikut:

*Current tax expense and payable (income  
tax overpayment) are as follows:*

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	
Beban pajak kini			<i>Current tax expense</i>
Perusahaan	--	--	<i>The Company</i>
Entitas anak	385,032	263,510	<i>Subsidiaries</i>
<b>Jumlah</b>	<b>385,032</b>	<b>263,510</b>	<i>Total</i>
Pembayaran pajak dimuka			<i>Prepayment of taxes</i>
Perusahaan			<i>The Company</i>
Pajak penghasilan			<i>Income tax</i>
Pasal 22	78,632	82,817	<i>Article 22</i>
Pasal 23	13,356	22,731	<i>Article 23</i>
Pasal 25	--	--	<i>Article 25</i>
<b>Jumlah</b>	<b>91,988</b>	<b>105,548</b>	<i>Total</i>
Entitas anak	802,458	853,478	<i>Subsidiaries</i>
<b>Jumlah</b>	<b>894,446</b>	<b>959,026</b>	<i>Total</i>
Lebih bayar pajak kini - bersih	<u>(509,414)</u>	<u>(695,516)</u>	<i>Current tax prepayment - net</i>
Terdiri dari			<i>Consist of</i>
Utang pajak kini			<i>Current tax payable</i>
Perusahaan	--	--	<i>The Company</i>
Entitas anak	104,265	126,858	<i>Subsidiaries</i>
<b>Jumlah hutang pajak kini</b>	<b>104,265</b>	<b>126,858</b>	<i>Total current tax payable</i>
Pajak penghasilan lebih bayar			<i>Income tax overpayment</i>
Perusahaan	(91,988)	(105,548)	<i>The Company</i>
Entitas anak	(521,690)	(716,827)	<i>Subsidiaries</i>
<b>Jumlah pajak penghasilan lebih bayar</b>	<b>(613,678)</b>	<b>(822,375)</b>	<i>Total income tax overpayment</i>

**b. Pajak Tangguhan**

Rincian dari aset dan liabilitas pajak  
tangguhan Perusahaan dan entitas anak  
adalah sebagai berikut:

**b. Deferred Tax**

*The details of the Company and its  
subsidiaries deferred tax assets and  
liabilities are as follows:*

	<b>1 Januari/ January 1, 2017</b>	<b>Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited (charged) to income</b>	<b>Dikreditkan ke pendapatan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income</b>	<b>Reklasifikasi/ Reclassification</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2017</b>	
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	
<b>Aset Pajak tangguhan</b>						<i>Deferred tax assets</i>
Akumulasi rugi fiskal	16,007,239	3,958,790	--	(6,434,999)	13,531,030	<i>Accumulated fiscal losses</i>
Liabilitas imbalan kerja	11,139,625	459,614	1,394,191	(1,374,730)	11,618,700	<i>Employee benefit liabilities</i>
Pendapatan ditangguhkan	287,264	15,862	--	--	303,126	<i>Deferred revenue</i>
Sewa pembiayaan	(1,535,196)	(748,384)	--	--	(2,283,580)	<i>Leases</i>
Aset tetap	(16,451,314)	(7,008,930)	--	9,848,339	(13,611,905)	<i>Property, plant and equipment</i>
Perbedaan temporer karena revisi surat DJP	242,298	(242,298)	--	--	--	<i>Temporary differences due to revision of DGT letter</i>
Bonus	203,458	(36,198)	--	(167,260)	--	<i>Bonus</i>
Penyisihan persediaan	8,543	(206)	--	(8,190)	147	<i>Provision inventories</i>
Penyisihan piutang usaha	4,159	4,796	--	--	8,955	<i>Provision account receivable</i>
Laba dari entitas asosiasi	(23,592)	10,006	3,377	10,209	--	<i>Income form associates</i>
Biaya ditangguhkan	(481)	481	--	--	--	<i>Deferred charges</i>
<b>Aset pajak tangguhan akhir tahun</b>	<b>9,882,003</b>	<b>(3,586,467)</b>	<b>1,397,568</b>	<b>1,873,369</b>	<b>9,566,473</b>	<i>Deferred tax assets at the end of the year</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	1 Januari/ January 1, 2017 Rp	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited (charged) to income Rp	Dikreditkan ke pendapatan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	31 Desember/ December 31, 2017 Rp	
<b>Liabilitas pajak tangguhan</b>						<b>Deferred tax liabilities</b>
Akumulasi rugi fiskal	20,009	(20,009)	--	6,434,999	6,434,999	Accumulated fiscal losses
Liabilitas imbalan kerja	11,525	(5,298)	11,177	1,374,730	1,392,134	Employee benefit liabilities
Pendapatan ditangguhkan	10,689	1,931	--	--	12,620	Deferred revenue
Sewa pembiayaan	(2,070)	(1,320)	--	--	(3,390)	Leases
Bonus	--	--	--	167,260	167,260	Bonus
Aset tetap	(85,766)	(106,233)	--	(9,848,339)	(10,040,338)	Property, plant and equipment
Penyisihan persediaan	--	23	--	8,190	8,213	Provision inventories
Penyisihan piutang usaha	6,932	(3,777)	--	--	3,155	Provision account receivable
Laba dari entitas asosiasi	(20,753)	(9,771)	9	(10,209)	(40,724)	Income from associates
Lainnya	(291)	(1)	--	--	(292)	Others
<b>Liabilitas pajak tangguhan akhir tahun</b>	<b>(59,725)</b>	<b>(144,455)</b>	<b>11,186</b>	<b>(1,873,369)</b>	<b>(2,066,363)</b>	<b>Deferred tax liabilities at the end of the year</b>
		<b>(3,730,922)</b>	<b>1,408,754</b>			

	1 Januari/ January 1, 2016 Rp	Penyesuaian penerapan/ Application adjustment POJK No.6 Rp	1 Januari/ January 1, 2016 setelah penyesuaian/ after adjustment Rp	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to income for the period Rp	Dikreditkan ke pendapatan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income Rp	31 Desember/ December 31, 2016 Rp	
<b>Aset Pajak tangguhan</b>							<b>Deferred tax assets</b>
Akumulasi rugi fiskal	--	--	--	16,007,239	--	16,007,239	Accumulated fiscal losses
Liabilitas imbalan kerja	10,032,919	--	10,032,919	416,974	689,733	11,139,626	Employment benefits liabilities
Pendapatan ditangguhkan	382,635	--	382,635	(95,371)	--	287,264	Deferred revenue
Sewa pembiayaan	13,721,427	(14,787,770)	(1,066,343)	(488,854)	--	(1,535,197)	Leases
Aset tetap	4,815,402	--	4,815,402	(21,266,717)	--	(16,451,315)	Property, plant and equipment
Perbedaan sementara karena surat revisi DUP	--	--	--	242,298	--	242,298	Temporary difference due to revision of DGT
Bonus	130,298	--	130,298	73,160	--	203,458	Bonus
Penyisihan persediaan	1,560	--	1,560	6,983	--	8,543	Provision inventories
Penyisihan piutang usaha	10,684	--	10,684	(6,525)	--	4,159	Provision account receivable
Laba dari entitas asosiasi	(8,836)	--	(8,836)	(14,755)	--	(23,591)	Income from associates
Biaya ditangguhkan	2,182	--	2,182	(2,663)	--	(481)	Deferred charges
<b>Aset pajak tangguhan akhir tahun</b>	<b>29,088,271</b>	<b>(14,787,770)</b>	<b>14,300,501</b>	<b>(5,108,231)</b>	<b>689,733</b>	<b>9,882,003</b>	<b>Deferred tax assets at the end of the year</b>
<b>Liabilitas pajak tangguhan</b>							<b>Deferred tax liabilities</b>
Akumulasi rugi fiskal	703	--	703	19,306	--	20,009	Accumulated fiscal losses
Liabilitas imbalan kerja	791	--	791	8,882	1,852	11,525	Employment benefits liabilities
Pendapatan ditangguhkan	--	--	--	10,689	--	10,689	Deferred revenue
Sewa pembiayaan	--	--	--	(2,070)	--	(2,070)	Leases
Aset tetap	(6,670)	--	(6,670)	(79,096)	--	(85,766)	Property, plant and equipment
Penyisihan piutang usaha	--	--	--	6,932	--	6,932	Provision account receivable
Laba dari entitas asosiasi	--	--	--	(20,753)	--	(20,753)	Income from associates
Amortisasi biaya emisi obligasi	(299)	--	(299)	8	--	(291)	Amortization of bonds issuance cost
<b>Liabilitas pajak tangguhan akhir tahun</b>	<b>(5,475)</b>	<b>--</b>	<b>(5,475)</b>	<b>(56,102)</b>	<b>1,852</b>	<b>(59,725)</b>	<b>Deferred tax liabilities at the end of the year</b>
				<b>(5,164,333)</b>	<b>691,565</b>		

Analisis aset dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The analysis of deferred tax assets and deferred tax liabilities is as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	
<b>Aset pajak tangguhan</b>			<b>Deferred tax assets</b>
Aset pajak tangguhan yang akan dipulihkan setelah 12 bulan	11,081,862	13,216,944	Deferred tax assets to be recovered after 12 months
Aset pajak tangguhan yang akan dipulihkan dalam 12 bulan	(1,515,389)	(3,334,941)	Deferred tax assets to be recovered within 12 months
<b>Liabilitas pajak tangguhan</b>			<b>Deferred tax liabilities</b>
Liabilitas pajak tangguhan yang akan dipulihkan setelah 12 bulan	--	--	Deferred tax liabilities to be recovered after 12 months
Liabilitas pajak tangguhan yang akan dipulihkan dalam 12 bulan	(2,066,363)	(59,725)	Deferred tax liabilities to be recovered within 12 months

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Rekonsiliasi antara jumlah (manfaat) beban pajak dan hasil perkaitan laba (rugi) sebelum pajak dengan tarif pajak efektif adalah sebagai berikut:

*A reconciliation between the total tax (benefit) expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to the profit (loss) before tax is as follows:*

	2017 Rp	2016 Rp	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	8,544,072	13,578,226	<i>Profit before tax per consolidated statements of comprehensive income</i>
Beban pajak sesuai tarif yang berlaku	2,136,018	3,394,557	<i>Tax expenses at prevailing rate</i>
Pengaruh pajak atas:			<i>Tax effect on:</i>
Biaya (pendapatan) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal			<i>Nondeductible expenses (nontaxable income)</i>
Kesejahteraan karyawan	316,303	309,115	<i>Employee welfare</i>
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	52,636	(191,555)	<i>Share in net income of associates and joint venture</i>
Penyusutan rumah dinas	1,317	--	<i>Depreciation of guest house</i>
Penghasilan bunga dikenakan pajak final	(229,254)	(179,275)	<i>Interest income subjected to final tax</i>
Beban lain tidak dapat dikurangkan	1,838,935	2,095,002	<i>Other nondeductible expenses</i>
<b>Jumlah</b>	<b>4,115,955</b>	<b>5,427,843</b>	<b>Total</b>

**c. Surat Ketetapan Pajak  
Perusahaan**

Selama periode 2010-2016, Perusahaan menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak ("SKP") dan Surat Tagihan Pajak ("STP") atas berbagai Pajak Penghasilan ("PPH") dan PPN, untuk tahun pajak 2008-2013, atas SKP/STP tersebut Perusahaan telah mengajukan surat keberatan ke DJP.

Sehubungan dengan keikutsertaan Perusahaan dalam program pengampunan pajak, seluruh SKP/STP tersebut telah dihapuskan dan perusahaan telah melakukan pembayaran atas utang pokok pajak atas SKP/STP tersebut sebesar Rp3.692.224 dan di catat di penghasilan (beban) lain-lain bersih.

Pada bulan Februari 2017, Perusahaan telah menerima keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai sengketa PPh 26 tahun 2007, 2008, dan 2009 yang menyatakan bahwa peninjauan kembali yang diajukan Perusahaan dikabulkan sepenuhnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Perusahaan mengajukan permohonan restitusi kepada DJP dan telah menerima sebagian restitusi sebesar Rp643.379 dan sisanya sebesar

**c. Tax Assessment Letters  
The Company**

*During 2010-2016, the Company has received various Tax Assessment Letter ("SKP") and Tax Collection Letter ("STP") on various income and PPN for the fiscal year 2008-2013, the Company filed an objection letter to DGT.*

*In relation to Company's participation in tax amnesty program, all of the SKP/STP had been written off and the Company has paid the principal amount on SKP/STP amounting to Rp3,692,224 and recorded in others income (expense) - net.*

*On February 2017, the Company received the decision of Supreme Court of Republic of Indonesia regarding to dispute on Tax income article 26 year 2007, 2008, and 2009 stated that juridical review filed by the Company have been granted. Furthermore, the Company also submitted restitution of these tax to DGT and received some of the restitution amounting to Rp643,379 and for the remaining amount of Rp925,743, is compensated for payment of tax*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Rp925.743 dikompensasikan untuk pembayaran Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") 2016 dan dicatat dalam pajak dibayar dimuka (catatan 18).

*assessment letters for underpayment ("SKPKB") 2016 and recorded as prepaid taxes (notes 18).*

Pada bulan Desember 2017, Perusahaan telah menerima SKPKB atas PPh Badan tahun 2016 dan STP PPN tahun 2016 dengan jumlah total Rp11.242.786. Perusahaan telah melakukan pembayaran sebesar Rp1.504.992, dicatat sebagai pajak dibayar dimuka. Perusahaan telah mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut dan sedang menunggu keputusan keberatan (catatan 18).

*On December 2017, the Company received SKPKB of Corporate Income Tax for fiscal year 2016 and STP PPN 2016 amounting to Rp11,242,786. The Company has paid Rp1,504,992, recorded as prepaid tax. The Company submitted an objection letter for SKPKB and still awaiting the objection decision letter (notes 18).*

**d. Pengampunan Pajak**

Perusahaan dan entitas anak Perusahaan berpartisipasi dalam pengampunan pajak sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan No.118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2016 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-18/PJ/2016 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

**d. Tax Amnesty**

*The Company and its subsidiaries participated in Tax Amnesty in connection with the implementation of Regulation of the Minister of Finance No.118/PMK.03/2016 on the Implementation of Law No.11 of 2016 regarding Tax Amnesty, as amended by the Minister of Finance Regulation No.141/PMK.03/2016 and the Directorate General of Tax Regulation No.PER-18/PJ/2016 regarding the refund of excess payment on compensation for Tax Amnesty.*

Rincian Surat Ketetapan Pengampunan Pajak ("SKPP") yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah:

*Details of Tax Amnesty Approval Letter ("TAAL") issued by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia are as follows:*

Perusahaan/ Companies	No SKPP	Tanggal/ Date	Jumlah Aset pengampunan pajak/ Total tax amnesty assets*) Rp
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)	KET-295/PP/WPJ.19/2017	5 April/ April 5, 2017	46,987
PT Haleiyora Powerindo (HPI)	KET-2931/PP/WPJ.09/2016	4 Desember/ December 4, 2016	316
PT Indonesia Power (IP)	KEP-778/PP/WPJ/19/2016	4 Oktober/ October 4, 2016	9,609
PT Artha Daya Coalindo (ADC)	KEP-1327/PP/WPJ.19/2016	8 Desember/ December 8, 2016	635
PT Pembangunan Jawa-Bali (PJB)	KEP-777/PP/WPJ/19/2016	4 Oktober/ October 4, 2016	44,080
PT PLN Batam	KEP-1040/PP/WPJ.19/2016	17 Oktober/ October 17, 2016	40,053
			<b>141,680</b>

\*) Tidak terdapat liabilitas pengampunan pajak yang dilaporkan/ There is no tax amnesty liabilities declared

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**48. Laba Per Saham Dasar dan Dilusian**

Laba bersih

Laba bersih untuk tujuan perhitungan laba per saham dasar tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp4.410.210 dan Rp8.113.656.

Jumlah saham

Rata-rata tertimbang saham untuk tujuan perhitungan laba per saham dasar untuk tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing 87.259.643 saham dan 54.087.903 saham.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi dilusi saham, sehingga laba per saham dasar sama dengan laba per saham dilusian.

**48. Basic and Diluted Earnings Per Share**

Net income

Net income for the computation of basic earnings per share in 2017 and 2016 amounted to Rp4,410,210 and Rp8,113,656, respectively.

Number of shares

The weighted average number of shares for the computation of basic earnings per share for 2017 and 2016 were 87,259,643 shares and 54,087,903 shares, respectively.

The Company did not have potential dilutive ordinary shares, thus basic earnings per share are the same as the dilutive earnings per share.

**49. Liabilitas Imbalan Kerja**

**49. Employee Benefits Liabilities**

	2017 Rp	2016 Rp	
Liabilitas diakui di laporan posisi keuangan:			<i>Liabilities recognized on statements of financial position:</i>
Imbalan pascakerja			<i>Post-employment benefits</i>
Program pensiun	463,745	118,035	<i>Pension plan</i>
Imbalan pascakerja lainnya	13,334,566	13,371,371	<i>Other post-employment benefits</i>
Imbalan pemeliharaan kesehatan	37,415,582	30,152,741	<i>Health care benefits</i>
Imbalan jangka panjang lainnya	908,056	962,452	<i>Other long-term benefits</i>
<b>Jumlah</b>	<b>52,121,949</b>	<b>44,604,599</b>	<b>Total</b>
Disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai:			<i>Presented in consolidated statements of financial position:</i>
Liabilitas jangka pendek	8,562,927	3,494,487	<i>Current liabilities</i>
Liabilitas jangka panjang	43,559,022	41,110,112	<i>Non-current liabilities</i>
<b>Jumlah</b>	<b>52,121,949</b>	<b>44,604,599</b>	<b>Total</b>
Beban diakui di laba rugi: (Catatan 43)			<i>Expense recognize in profit or loss: (Note 43)</i>
Imbalan pascakerja			<i>Post-employment benefits</i>
Program pensiun	136,032	19,940	<i>Pension plan</i>
Imbalan pascakerja lainnya	1,883,208	1,896,211	<i>Other post-employment benefits</i>
Imbalan pemeliharaan kesehatan	2,850,567	2,708,183	<i>Health care benefits</i>
Imbalan jangka panjang lainnya	372,235	343,797	<i>Other long-term benefits</i>
<b>Jumlah</b>	<b>5,242,042</b>	<b>4,968,131</b>	<b>Total</b>
Pengukuran kembali program imbalan pasti diakui di penghasilan komprehensif lain:			<i>Remeasurement on defined benefit plan recognized in other comprehensive income:</i>
Program pensiun	599,757	506,991	<i>Pension plan</i>
Imbalan pascakerja lainnya	(296,195)	(56,053)	<i>Other post-employment benefits</i>
Imbalan pemeliharaan kesehatan	5,331,453	2,315,404	<i>Health care benefits</i>
<b>Jumlah</b>	<b>5,635,015</b>	<b>2,768,342</b>	<b>Total</b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Program pensiun imbalan pasti

Perusahaan dan entitas anak menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Program pensiun ini memberikan imbalan berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PLN ("DP-PLN"), pihak berelasi, yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. KEP-284/KM.17/1997 tanggal 15 Mei 1997.

DP-PLN telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam surat keputusan No. KEP-8/NB.1/2016 tanggal 11 Februari 2016 atas peningkatan imbalan pasti pensiun yang disediakan Perusahaan dan entitas anak dalam program dana pensiun.

Pendanaan DP-PLN terutama berasal dari iuran karyawan dan pemberi kerja masing-masing sebesar 6,00% dan 13,41% dari Penghasilan Dasar Pensiun.

Imbalan pemeliharaan kesehatan

Selain program pensiun yang dikelola oleh DP-PLN, Perusahaan dan entitas anak menyediakan imbalan program pemeliharaan kesehatan tanpa pendanaan bagi pensiunan dan tanggungannya yang memenuhi persyaratan.

Imbalan pascakerja lainnya

Selain dari program dana pensiun dan imbalan pemeliharaan kesehatan, Perusahaan dan entitas anak menyediakan imbalan pesangon dan penghargaan purna jabatan tanpa pendanaan bagi pegawai yang memenuhi syarat.

Imbalan jangka panjang lainnya

Perusahaan dan entitas anak juga memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti uang cuti besar, tunjangan kecelakaan dinas dan penghargaan kesetiaan kerja.

Defined benefit pension plan

The Company and its subsidiaries established a defined benefit pension plan covering all of its eligible permanent employees. This pension plan provides benefits based on basic pension income and the period of employment.

This pension plan is managed by Dana Pensiun PLN ("DP-PLN"), a related party, whose deed of establishment was approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-284/KM.17/1997 dated May 15, 1997.

DP-PLN has obtained an approval from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-8/NB.1/2016 dated on February 11, 2016 in relation to the increase in pension benefits provided by the Company and its subsidiaries' pension plan.

DP-PLN is mainly funded by contributions from both the employees and the employer which are 6.00% and 13.41% from basic pension income, respectively.

Health care benefits

In addition to the pension plan managed by DP-PLN, the Company and its subsidiaries also provide unfunded health care benefit plans for their pensioners and their eligible dependents.

Other post-employment benefits

In addition to the pension plan and health care benefits, the Company and its subsidiaries also provide unfunded severance benefits and completion of employment award for eligible employees.

Other long-term benefits

The Company and its subsidiaries also provide other long-term employee benefits such as long leave allowance, disability benefit and loyalty benefit.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Asumsi yang digunakan dalam perhitungan  
liabilitas imbalan kerja

Assumption used in the calculations of  
employment benefits liabilities

**2017 dan/ and 2016**

Tabel mortalita	CSO-58	Mortality table
Tingkat pengunduran diri		Resignation rate
Usia 18 s.d. 49 tahun	0.27%	Age 18 up to 49 years old
Usia 50 s.d. 55 tahun	0.01%	Age 50 up to 55 years old
Usia pensiun normal	56 tahun/ Years old	Normal retirement age

Asumsi yang berhubungan dengan pengalaman mortalitas masa depan ditentukan berdasarkan saran aktuaris menurut statistik yang telah diterbitkan dan pengalaman Perusahaan dan entitas anak. Asumsi mortalitas yang digunakan adalah tabel mortalita CSO-58 yang diterapkan dalam penghitungan liabilitas kerja jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

*Assumptions regarding future mortality experience are set based on actuarial advice in accordance with published statistic and experiences by the Company and its subsidiaries. The mortality assumptions used are based on the CSO-58 mortality table which applied in calculating the long term benefits liability recognized within the consolidated statement of financial position.*

Penilaian aktuarial atas program pensiun, imbalan pascakerja lainnya, imbalan pemeliharaan kesehatan dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuarial terdaftar, PT Binaputera Jaga Hikmah.

*The actuarial calculations of pension plan, other post-employment benefits, health care benefits and other long term benefits for the years ended December 31, 2017 and 2016 were prepared by a registered actuarial consulting firm, PT Binaputera Jaga Hikmah.*

Pada tahun 2015, Perusahaan dan entitas anak melakukan studi untuk melihat tabel mortalitas mana yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Perusahaan dan entitas anak. Dalam melakukan studi, Perusahaan dan entitas anak telah mempertimbangkan CSO-58, CSO-58 modifikasi, TMI 1 1993, TMI 2 1999, TMI 3 2011, dan Tabel Mortalita Taspen 2012. Dari studi tersebut, Perusahaan dan entitas anak menemukan bahwa tabel mortalitas yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Perusahaan dan entitas anak adalah CSO-58. Perusahaan dan entitas anak menerapkan CSO-58 secara retrospektif.

*In 2015, the Company and its subsidiaries conducted a study to determine which mortality tables that best suits with the Company and its subsidiaries' employee and pensioners' mortality profile. In the study, the Company and its subsidiaries have considered CSO-58, CSO-58 modified, TMI 1 1993, TMI 2 1999, TMI 3 2011, and Taspen mortality table 2012. Based on the study, the Company and its subsidiaries found that mortality table that suits most with mortality profile of the Company and its subsidiaries' employees and pensioners is CSO-58. The Company and its subsidiaries apply CSO-58 retrospectively.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**(i) Program Pensiun**

Jumlah yang diakui pada laporan posisi  
keuangan konsolidasian ditentukan  
sebagai berikut:

	2017 Rp	2016 Rp	
Nilai kini kewajiban yang didanai	8,633,567	7,842,473	<i>Present value of funded obligations</i>
Nilai wajar aset program	(8,169,822)	(7,724,438)	<i>Fair value of plan assets</i>
Defisit program yang didanai	463,745	118,035	<i>Deficit of funded plans</i>
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	--	--	<i>Present value of unfunded obligations</i>
<b>Liabilitas pada laporan Posisi keuangan</b>	<b>463,745</b>	<b>118,035</b>	<b><i>Liability in the statement of financial position</i></b>

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti  
selama tahun berjalan adalah sebagai  
berikut:

	2017 Rp	2016 Rp	
Pada awal tahun	7,842,473	6,346,704	<i>At beginning of the year</i>
Dibebankan ke laba rugi:			<i>Charged to profit or loss:</i>
Biaya jasa kini	142,568	146,379	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	636,079	552,168	<i>Interest expense</i>
	778,647	698,547	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain: (Keuntungan) kerugian aktuarial dari:			<i>Charged to other comprehensive income: Actuarial (gain) loss from change in:</i>
Perubahan asumsi demografik	--	194,593	<i>Demographic assumptions</i>
Perubahan asumsi keuangan	190,654	(381,867)	<i>Financial assumptions</i>
Kombinasi perubahan asumsi	--	(70,367)	<i>Combination of change in assumptions</i>
Penyesuaian atas pengalaman	509,544	1,697,607	<i>Experience adjustment</i>
	9,321,318	8,485,217	
Pembayaran manfaat	(687,751)	(642,744)	<i>Benefit payment</i>
<b>Pada akhir tahun</b>	<b>8,633,567</b>	<b>7,842,473</b>	<b><i>At end of the year</i></b>

Mutasi nilai wajar aset program selama  
tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2017 Rp	2016 Rp	
Pada awal tahun	7,724,438	7,030,467	<i>At beginning of the year</i>
Imbal hasil atas aset program	642,615	607,871	<i>Return on plan assets</i>
Iuran pemberi kerja	333,468	408,895	<i>Employer's contributions</i>
Iuran pekerja	56,611	70,737	<i>Employee's contributions</i>
Pembayaran manfaat	(687,751)	(642,744)	<i>Benefit payment</i>
Kerugian aktuarial pada aset program	100,441	249,212	<i>Actuarial loss on plan assets</i>
<b>Pada akhir tahun</b>	<b>8,169,822</b>	<b>7,724,438</b>	<b><i>At the end of the year</i></b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Aset program terdiri dari:

Plan assets comprise the following:

	2017				2016				
	Memiliki kuotasi harga/ Quoted price Rp	Tidak memiliki kuotasi harga/ Unquoted price Rp	Jumlah/ Total Rp	%	Memiliki kuotasi harga/ Quoted price Rp	Tidak memiliki kuotasi harga/ Unquoted price Rp	Jumlah/ Total Rp	%	
Surat Berharga Negara	1,288,072	--	1,288,072	15.77%	1,283,965	--	1,283,965	16.62%	Government bonds
Tabungan	--	75,935	75,935	0.93%	--	10,550	10,550	0.14%	Saving accounts
Deposito on call	--	23,635	23,635	0.29%	--	12,185	12,185	0.16%	Deposits on call
Deposito berjangka	--	388,155	388,155	4.75%	--	611,225	611,225	7.91%	Time deposits
Saham	979,347	--	979,347	11.99%	789,298	--	789,298	10.22%	Shares
Obligasi	2,750,032	--	2,750,032	33.66%	2,653,659	--	2,653,659	34.35%	Bonds
Sukuk	9,984	--	9,984	0.12%	9,986	--	9,986	0.13%	Sukuk
Unit penyertaan reksa dana	1,059,385	--	1,059,385	12.97%	1,041,514	--	1,041,514	13.48%	Mutual fund units
Efek beragunan aset	48,369	--	48,369	0.59%	--	--	--	--	Asset backed securities
Penempatan langsung	--	617,725	617,725	7.56%	--	401,001	401,001	5.19%	Direct investments
Tanah	--	78,274	78,274	0.96%	--	78,274	78,274	1.01%	Land
Bangunan	--	418,488	418,488	5.12%	--	418,488	418,488	5.42%	Buildings
Tanah dan bangunan	--	369,344	369,344	4.52%	--	356,940	356,940	4.62%	Land and buildings
Lain-lain	--	63,077	63,077	0.77%	--	57,353	57,353	0.75%	Other
<b>Total</b>	<b>6,135,189</b>	<b>2,034,633</b>	<b>8,169,822</b>	<b>100%</b>	<b>5,778,422</b>	<b>1,946,016</b>	<b>7,724,438</b>	<b>100%</b>	<b>Total</b>

Asumsi aktuarial utama yang digunakan  
adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used  
were as follows:

	2017 %	2016 %	
Tingkat diskonto	7.26%	8.50%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5.00%	5.00%	Salary increase rate per annum

Kontribusi yang diharapkan untuk program  
imbalan pascakerja untuk tahun yang  
berakhir pada 31 Desember 2018 adalah  
Rp124.419.

Expected contributions to post-employment  
benefit plans for the year ended December  
31, 2018 amounted to Rp124,419.

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti  
terhadap perubahan asumsi aktuarial  
utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit  
obligation to changes in the weighted  
principal assumptions is as follows:

	Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation			
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ Decrease by 1.81%	Kenaikan sebesar/ Increase by 2.06%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	kenaikan sebesar/ Increase by 2.06%	Penurunan sebesar/ Decrease by 1.83%	Salary rate
Tingkat mortalitas	1%	Penurunan sebesar/ Decrease by 0.02%	Kenaikan sebesar/ Increase by 0.02%	Mortality rate

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Imbalan perhitungan sensitivitas liabilitas kerja jangka panjang atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini liabilitas imbalan kerja jangka panjang dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The sensitivity analysis are based on a change in a single assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the long term benefits liabilities to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the long term benefits liabilities calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the long term benefits liabilities recognized in the consolidated statement of financial position.

**(ii) Imbalan Pascakerja Lainnya**

Mutasi kewajiban imbalan pascakerja lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

**(ii) Other Post-Employment Benefits**

Movement of post-employment benefits obligation during the year is as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	
Pada awal tahun	13,371,371	13,256,657	At the beginning of the year
Dibebankan ke laba rugi			Charged to profit or loss
Biaya jasa kini	822,522	770,969	Current service cost
Biaya bunga	1,063,478	1,125,242	Interest expense
Harapan dari hasil investasi	(2,792)	--	Expectations on investment returns
	1,883,208	1,896,211	
Dibebankan ke			Charged to
penghasilan komprehensif lain:			other comprehensive income:
(Keuntungan) kerugian aktuarial dari:			Actuarial (gain) loss from change in:
Perubahan asumsi demografik	--	81,563	Demographic assumptions
Perubahan asumsi keuangan	303,549	579,633	Financial assumptions
Kombinasi perubahan asumsi	(200,788)	5,110	Combination of change in assumptions
Penyesuaian atas pengalaman	(398,955)	(722,359)	Experience adjustment
	14,958,385	15,096,815	
Pembayaran manfaat	(1,623,819)	(1,725,444)	Benefit payment
<b>Pada akhir tahun</b>	<b>13,334,566</b>	<b>13,371,371</b>	<b>At end of the year</b>

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2017 %	2016 %	
Tingkat diskonto	7.24%	8.45%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	8.30%	7.87%	Salary increase rate per annum

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

*The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions is as follows:*

	<b>Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation</b>			
	<b>Perubahan asumsi/ Change in assumption</b>	<b>Kenaikan asumsi/ Increase in assumption</b>	<b>Penurunan asumsi/ Decrease in assumption</b>	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ Decrease by 6.94%	Kenaikan sebesar/ Increase by 8.22%	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan biaya kesehatan di masa depan	1%	Kenaikan sebesar/ Increase by 8.05%	Penurunan sebesar/ Decrease by 6.92%	<i>Medical inflation rate</i>
Tingkat mortalitas	1%	Penurunan sebesar/ Decrease by 0.01%	Penurunan sebesar/ Decrease by 0.01%	<i>Mortality rate</i>

**(iii) Imbalan Pemeliharaan Kesehatan**

Perusahaan dan entitas anak memiliki beberapa skema imbalan pemeliharaan kesehatan pascakerja. Metode akuntansi, asumsi dan frekuensi penilaian adalah sama dengan yang digunakan dalam skema pensiun imbalan pasti.

**(iii) Health Care Benefits**

*The Company and its subsidiaries operate a number of post-employment health care benefit schemes. The accounting method, assumptions and the frequency of valuations are similar to those used for defined pension schemes.*

Mutasi kewajiban imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

*Movement of defined benefit obligation over the year is as follows:*

	<b>2017 Rp</b>	<b>2016 Rp</b>	
Pada awal tahun	30,152,741	25,969,297	<i>At beginning of the year</i>
Dibebankan ke laba rugi:			<i>Charged to profit or loss:</i>
Biaya jasa kini	411,499	367,427	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	2,439,068	2,340,756	<i>Interest expense</i>
	2,850,567	2,708,183	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain: (Keuntungan) kerugian aktuarial dari:			<i>Charged to other comprehensive income:</i>
Perubahan asumsi demografik	--	543,568	<i>Actuarial (gain) loss from change in:</i>
Perubahan asumsi keuangan	5,473,627	2,290,814	<i>Demographic assumptions</i>
Kombinasi perubahan asumsi	--	69,696	<i>Financial assumptions</i>
Penyesuaian atas pengalaman	(142,174)	(588,674)	<i>Combination of change in assumptions</i>
	38,334,761	30,992,884	<i>Experience adjustment</i>
Pembayaran manfaat	(919,179)	(840,143)	<i>Benefit payment</i>
<b>Pada akhir tahun</b>	<b>37,415,582</b>	<b>30,152,741</b>	<b>At end of the year</b>

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

*The principal actuarial assumptions used were as follows:*

	<b>2017 %</b>	<b>2016 %</b>	
Tingkat diskonto	7.26%	8.50%	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji per tahun	6.00%	7.50%	<i>Salary increase per annum</i>
Tingkat kenaikan biaya kesehatan jangka panjang	6.00%	6.00%	<i>Long-term increase rate in health costs</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation			
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto		Penurunan sebesar/ Decrease by 12.09%	Kenaikan sebesar/ Increase by 15.01%	Discount rate
Tingkat kenaikan biaya kesehatan di masa depan	1%	Kenaikan sebesar/ Increase by 11.86%	Penurunan sebesar/ Decrease by 9.79%	Health costs increase rate
Tingkat mortalitas		Penurunan sebesar/ Decrease by 0.63%	Kenaikan sebesar/ Increase by 0.64%	Mortality rate

**(iv) Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya**  
Mutasi kewajiban imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

**(iv) Other Long-term Employee Benefits**  
Movement of defined benefit obligation during the year is as follows:

	2017 Rp	2016 Rp	
Pada awal tahun	962,452	1,001,182	At beginning of the year
Dibebankan ke laba rugi			Charged to profit or loss
Biaya jasa kini	308,911	299,056	Current service cost
Biaya bunga	63,324	74,581	Interest expense
	372,235	373,637	
Pengukuran kembali program imbalan pasti dibebankan ke laba rugi:			Remeasurement on defined benefit plan charged to profit or loss:
(Keuntungan) kerugian aktuarial dari:			Actuarial (gain) loss from change in:
Perubahan asumsi demografik	--	67	Demographic assumptions
Perubahan asumsi keuangan	28,347	14,237	Financial assumptions
Kombinasi perubahan asumsi	(19)	(1)	Combination of change in assumptions
Penyesuaian atas pengalaman	(29,695)	(58,245)	Experience adjustment
	1,333,320	1,330,877	
Pembayaran manfaat	(425,264)	(368,425)	Benefit payment
<b>Pada akhir tahun</b>	<b>908,056</b>	<b>962,452</b>	<b>At end of the year</b>

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2017 %	2016 %	
Tingkat diskonto	7.24%	8.44%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7.20%	7.66%	Salary increase rate per annum

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation			
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ Decrease by 2.71%	Kenaikan sebesar/ Increase by 2.89%	Discount rate
Tingkat kenaikan biaya kesehatan di masa depan	1%	Kenaikan sebesar/ Increase by 2.75%	Penurunan sebesar/ Decrease by 2.61%	Medical inflation rate
Tingkat mortalitas	1%	Penurunan sebesar/ Decrease by 0%	Penurunan sebesar/ Decrease by 0%	Mortality rate

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Perusahaan dan entitas anak terekspos dengan beberapa risiko melalui program imbalan pasti dan program kesehatan pascakerja. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

Volatilitas aset

Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil surat utang negara. Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Harapan umur hidup

Sebagian besar dari liabilitas program menyediakan manfaat seumur hidup, sehingga kenaikan harapan umur hidup akan mengakibatkan kenaikan liabilitas program.

Investasi didiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset. Proporsi terbesar aset investasi ditempatkan pada instrumen utang, meskipun Perusahaan dan entitas anak juga berinvestasi pada properti, obligasi, reksadana dan kas. Perusahaan dan entitas anak meyakini bahwa instrumen ekuitas memberikan imbal hasil yang paling baik dalam jangka panjang pada tingkatan risiko yang dapat diterima.

Rata-rata ekspektasi sisa masa kerja adalah 20,83 tahun.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less than 1 year</i> Rp	2 sampai 5 tahun/ <i>Between 2 to 5 years</i> Rp	Lebih dari 5 tahun/ <i>Over 5 years</i> Rp	Jumlah/ <i>Total</i> Rp
Imbalan pascakerja				
Program pensiun	701,131	1,612,539	8,798,383	11,112,053
Imbalan pemeliharaan kesehatan	1,047,664	2,730,210	69,868,643	73,646,517
Imbalan pascakerja lainnya	2,132,634	5,819,671	125,213,791	133,166,096
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	280,114	1,229,037	1,484,507	2,993,658
<b>Jumlah</b>	<b>4,161,543</b>	<b>11,391,457</b>	<b>205,365,324</b>	<b>220,918,324</b>

*Post-employment benefits  
Pension plan  
Health care benefits  
Other post-employment benefit  
Other long-term employee benefit  
Total*

*The Company and its subsidiaries are exposed to a number of risks through its defined benefit pension plans and post-employment medical plans. The most significant risks are as follows:*

*Asset volatility*

*The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to government bond yields. If the yield of plan assets is lower, it will generate a deficit program.*

*Life expectancy*

*The majority of the plans' obligations are to provide lifetime benefit, so that the increase in life expectancy will result in an increase in the plans' liabilities.*

*Investments are well-diversified, such that the failure of any single investment would not have a material impact for the entire class of assets. The largest proportion of assets is invested in debt instruments, although the Company and its subsidiaries also invest in property, bonds, mutual funds and cash. The Company and its subsidiaries believe that equities offer the best returns over the long term with an acceptable level of risk.*

*Average expected remaining service year is 20.83 year.*

*Expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefit and other long-term benefit is as follows:*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**50. Transaksi Non-Kas**

**50. Non-Cash Transactions**

	2017 Rp	2016 Rp	
Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas:			<i>Noncash investing and financing activities:</i>
Perolehan aset sewaan melalui utang sewa pembiayaan	3,632,755	--	<i>Additions leased property through lease liabilities</i>
Perolehan pekerjaan dalam pelaksanaan melalui: Penarikan pinjaman dan utang biaya proyek	3,933,998	1,855,825	<i>Additions to construction in progress through: Drawdown of loans and project cost payable</i>
Bantuan Pemerintah	308,300	2,596,132	<i>Government equity participation</i>
Kapitalisasi biaya pinjaman	317,728	242,936	<i>Capitalization of borrowing costs</i>
Kapitalisasi beban penyusutan	--	16,512	<i>Capitalization of depreciation expense</i>
Utang lain-lain	2,954,335	(1,281,216)	<i>Other payables</i>
Piutang lain-lain	1,671	--	<i>Other receivables</i>
Perolehan aset tetap melalui pengampunan pajak	46,987	94,504	<i>Addition of property plant and equipment through tax amnesty</i>
Aset tidak lancar lainnya	--	217,363	<i>Other non current asset</i>
Pembayaran pajak revaluasi aset melalui subsidi listrik pemerintah	--	13,529,921	<i>Tax payment on asset revaluation through Government's electricity subsidy</i>
Penambahan nilai aset melalui hasil revaluasi dan kenaikan nilai wajar properti investasi	1,051,363	104,196	<i>Addition of value of assets through revaluation and increase in fair value of investment properties</i>
Kerugian penurunan nilai aset tetap	327,986	--	<i>Impairment on property, plant and equipment</i>
Penambahan properti investasi yang berasal dari reklasifikasi aset tetap	2,331,781	--	<i>Addition of investment property from property, plant and equipment reclassification</i>
Pengakuan tanah hibah	--	820,906	<i>Recognition of land grants</i>

**51. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi**

**51. Nature of Relationships and Transactions with Related Parties**

**Sifat Hubungan Berelasi**

- a. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham Perusahaan dan BUMN.
- b. Perusahaan mempunyai hubungan berelasi dengan BUMN lainnya yang dimiliki bersama oleh Kementerian Keuangan.
- c. Perusahaan dan entitas anak mempunyai pengaruh signifikan atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama (Catatan 8).
- d. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan dan entitas anak.

**Nature of Related Parties**

- a. The Government is the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, the shareholder of the Company and BUMN.
- b. The Company is related to other BUMN owned by the Ministry of Finance.
- c. The Company and its subsidiaries have significant influence on investments in associates or joint ventures (Note 8).
- d. The Board of Commissioners and Directors is a member of the key management of the Company and its subsidiaries.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan:

Below is the list of related parties with which the Company has transactions:

<b>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</b>	<b>Sifat hubungan/ Nature of relationship</b>	<b>Sifat transaksi/ Nature of transaction</b>
Pemerintah Republik Indonesia/ Government of Republic of Indonesia ("Pemerintah")	Pemegang saham akhir/ Ultimate Shareholder	Penerimaan subsidi listrik, penerimaan penerusan pinjaman, dan utang kepada pemerintah/ Receipt of electricity subsidy, two step loan and government loan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Rakyat Indonesia")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas, rekening bank dan deposito yang dibatasi penggunaannya, investasi jangka pendek, dan penerimaan utang bank/ Placement of cash and cash equivalents, restricted cash in bank and time deposits, short-term investment, and receipt of bank loans
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, dan penerimaan utang bank/ Placement of restricted cash in bank and time deposit, cash and cash equivalents, short-term investment, and receipt of bank loans
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Negara Indonesia")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, kas dan setara kas, dan penerimaan utang bank/ Placement of restricted cash in bank and time deposit, cash and cash equivalents, and receipt of bank loans
PT Bank DKI ("Bank DKI")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas dan penerimaan utang bank/ Placement of cash and cash equivalents and receipt of bank loans
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank Tabungan Negara")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas Placement of cash and cash equivalents
PT Pertamina Geothermal Energy	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian tenaga listrik/ Purchase of electricity
PT Pertamina (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas/ Purchase of fuels and lubricants
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar/ Purchase of fuels
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar/ Purchase of fuels
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi jasa konstruksi/ Construction services transaction
PT Nusantara Regas	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar/ Purchase of fuels
PT Surveyor Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pelayanan teknik, survei dan pengukuran batubara/ Engineering services, survey and coal measurement

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pihak-pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Sifat hubungan/ <i>Nature of relationship</i>	Sifat transaksi/ <i>Nature of transaction</i>
PT Sucofindo (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Transaksi pelayanan teknik, survei dan pengukuran batubara/ <i>Engineering services, survey and coal measurement</i>
PT Djakarta Lloyd (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Transaksi jasa transportasi bahan bakar dan batubara/ <i>Fuels and coals transportation services transaction</i>
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Asuransi bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi serta kapal milik Perusahaan/ <i>Insurance services for Company's buildings, installation and power plant, transmission equipment and vessels</i>
Perum Jasa Tirta	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Transaksi pembelian tenaga listrik/ <i>Purchase of electricity</i>
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Penerimaan utang dari lembaga keuangan pemerintah nonbank/ <i>Receipt of non-bank government financial institution</i>
PT Geo Dipa Energi (Persero)	Entitas asosiasi/ <i>Associate</i>	Transaksi pembelian tenaga listrik/ <i>Purchase of electricity</i>
PT Tanjung Kasam Power	Entitas asosiasi/ <i>Associate</i>	Transaksi pembelian tenaga listrik/ <i>Purchase of electricity</i>
PT Dalle Energy Batam	Entitas asosiasi/ <i>Associate</i>	Transaksi pembelian tenaga listrik/ <i>Purchase of electricity</i>
PT Mitra Energi Batam	Entitas asosiasi/ <i>Associate</i>	Transaksi pembelian tenaga listrik/ <i>Purchase of electricity</i>
PT Sumber Segara Primadaya	Entitas asosiasi/ <i>Associate</i>	Transaksi pembelian tenaga listrik/ <i>Purchase of electricity</i>
PT Bajradaya Sentranusa	Ventura bersama/ <i>Joint venture</i>	Transaksi pembelian tenaga listrik/ <i>Purchase of electricity</i>
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	Ventura bersama/ <i>Joint venture</i>	Transaksi pembelian tenaga listrik dan pemberian pinjaman jangka panjang/ <i>Purchase of electricity and issuance of long-term loan</i>
PT Bukit Pembangkit Innovative	Ventura bersama/ <i>Joint venture</i>	Transaksi pembelian tenaga listrik/ <i>Purchase of electricity</i>
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali	Ventura bersama/ <i>Joint venture</i>	Transaksi pembelian tenaga listrik/ <i>Purchase of electricity</i>
PT Perta Daya Gas	Ventura bersama/ <i>Joint venture</i>	Pemberian pinjaman jangka panjang/ <i>Issuance of long-term loan</i>
Dana pensiun PLN	Program imbalan pascakerja/ <i>Post-employment benefit plan</i>	Pembayaran kontribusi program manfaat pasti/ <i>Payment of contribution for defined benefit plan</i>
PT Transportasi Gas Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control Through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Transaksi jasa penyaluran gas/ <i>Gas distribution services</i>
PT Wijaya Karya Industri Energi	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control Through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Transaksi sewa mesin pembangkit/ <i>Lease power plant machinery</i>
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control Through the Government of the Republic of Indonesia</i>	Transaksi jasa konstruksi/ <i>Construction services</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi:

Balances and transactions with related parties:

	Catatan/ Notes	2017		2016		
		Rp	% *)	Rp	% *)	
Piutang pihak berelasi	9					Receivables from related parties
PT Perta Daya Gas		224,742	0.02%	260,085	0.02%	PT Perta Daya Gas
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali		11,447	0.00%	16,747	0.00%	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali
PT Dalle Energy Batam		5,603	0.00%	9,632	0.00%	PT Dalle Energy Batam
PT Mitra Energi Batam		683	0.00%	683	0.00%	PT Mitra Energi Batam
PT Tanjung Kasam Power		--	0.00%	12,465	0.00%	PT Tanjung Kasam Power
Subjumlah		242,475	0.02%	299,612	0.02%	Subtotal
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	10					Restricted cash in banks and time deposits
Bank Rakyat Indonesia		75,200	0.01%	--	0.00%	Bank Rakyat Indonesia
Bank Negara Indonesia		71,313	0.01%	1,269	0.00%	Bank Negara Indonesia
Bank Mandiri		57,909	0.00%	12,159	0.00%	Bank Mandiri
Subjumlah		204,422	0.02%	13,428	0.00%	Subtotal
Kas dan setara kas	12					Cash and cash equivalents
Bank Rakyat Indonesia		14,043,255	1.05%	13,864,019	1.09%	Bank Rakyat Indonesia
Bank Negara Indonesia		10,071,808	0.75%	10,669,987	0.84%	Bank Negara Indonesia
Bank Mandiri		8,516,490	0.64%	10,892,432	0.85%	Bank Mandiri
Bank Tabungan Negara		1,505,072	0.11%	1,003,076	0.08%	Bank Tabungan Negara
Bank DKI		836,833	0.06%	761,487	0.06%	Bank DKI
Subjumlah		34,973,458	2.61%	37,191,001	2.92%	Subtotal
Investasi jangka pendek	13					Short-term investment
Bank Rakyat Indonesia		260,000	0.02%	367,200	0.03%	Bank Rakyat Indonesia
Bank Mandiri		20,000	0.00%	--	0.00%	Bank Mandiri
Subjumlah		280,000	0.02%	367,200	0.03%	Subtotal
Piutang usaha	14					Trade accounts receivable
Badan Usaha Milik Negara		583,539	0.04%	568,123	0.04%	State-Owned Enterprises
Piutang subsidi listrik	15	7,588,977	0.57%	12,446,110	0.98%	Receivables on electricity subsidy
Jumlah		43,872,871	3.28%	50,885,474	3.99%	Total
Penerusan pinjaman	23	34,221,468	7.35%	31,696,088	8.05%	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-Bank	24	7,352,966	1.58%	8,301,603	2.11%	Government and non-bank Government financial institution loans
Utang sewa pembiayaan	25					Lease liabilities
PT Wijaya Karya Industri Energi		239,805	0.05%	--	0.00%	PT Wijaya Karya Industri Energi
Utang bank	26					Bank loans
Bank Rakyat Indonesia		34,569,917	7.43%	37,181,302	9.44%	Bank Rakyat Indonesia
Bank Negara Indonesia		21,872,337	4.70%	22,628,291	5.75%	Bank Negara Indonesia
Bank Mandiri		16,314,842	3.50%	12,234,270	3.11%	Bank Mandiri
Bank DKI		2,401,684	0.52%	3,006,321	0.76%	Bank DKI
Subjumlah		75,158,780	16.15%	75,050,184	19.06%	Subtotal
Utang pihak berelasi	29					Payable to related parties
PT Dalle Energy Batam		794	0.00%	2,301	0.00%	PT Dalle Energy Batam
Utang usaha	30					Trade accounts payable
PT Pertamina (Persero)		4,590,958	0.99%	4,109,919	1.04%	PT Pertamina (Persero)
PT Waskita Karya (Persero) Tbk		1,512,870	0.32%	--	0.00%	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Sumber Segara Primadaya		1,134,634	0.24%	624,837	0.16%	PT Sumber Segara Primadaya
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk		1,041,368	0.22%	651,321	0.17%	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk		690,978	0.15%	451,037	0.11%	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PT Nusantara Regas		505,071	0.11%	678,945	0.17%	PT Nusantara Regas
PT Pertamina Geothermal Energy		286,137	0.06%	31,002	0.01%	PT Pertamina Geothermal Energy
PT Geo Dipa Energi		133,939	0.03%	58,165	0.01%	PT Geo Dipa Energi
PT Bajradaya Sentranusa		120,694	0.03%	61,743	0.02%	PT Bajradaya Sentranusa
PT Jakarta Lloyd (Persero)		11,836	0.00%	3,646	0.00%	PT Jakarta Lloyd (Persero)
PT Transportasi Gas Indonesia		11,732	0.00%	--	0.00%	PT Transportasi Gas Indonesia
Perum Jasa Tirta		11,638	0.00%	202,558	0.05%	Perum Jasa Tirta
PT Sucofindo (Persero)		11,515	0.00%	5,832	0.00%	PT Sucofindo (Persero)
PT Surveyor Indonesia (Persero)		2,755	0.00%	2,130	0.00%	PT Surveyor Indonesia (Persero)
PT Tanjung Kasam Power		--	0.00%	72,484	0.02%	PT Tanjung Kasam Power
PT Dalle Energy Batam		--	0.00%	49,830	0.01%	PT Dalle Energy Batam
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali		--	0.00%	19,712	0.01%	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali
PT Mitra Energi Batam		--	0.00%	16,641	0.00%	PT Mitra Energi Batam
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk		--	0.00%	11,393	0.00%	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah utang usaha)		1,149,114	0.25%	721,498	0.18%	Others (each below 5% of total trade accounts payable)
Subjumlah		11,215,239	2.40%	7,772,693	1.96%	Subtotal

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2017		2016		
		Rp	% *)	Rp	% *)	
Biaya masih harus dibayar	33					Accrued expenses
Penerusan pinjaman		275,160	0.06%	235,460	0.06%	Two-step loans
Utang bank						Bank loans
Bank Mandiri		170,595	0.04%	109,126	0.03%	Bank Mandiri
Bank Rakyat Indonesia		158,100	0.03%	193,422	0.05%	Bank Rakyat Indonesia
Bank Negara Indonesia		134,069	0.03%	140,797	0.04%	Bank Negara Indonesia
Bank DKI		2,747	0.00%	4,251	0.00%	Bank DKI
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank		15,081	0.00%	119,640	0.03%	Government and non-bank Government financial institution loans
Utang usaha pembelian BBM		--	0.00%	19,713	0.01%	Trade accounts payable on purchase of fuel
Subjumlah		755,752	0.16%	822,409	0.22%	Subtotal
Jumlah		128,944,804	27.69%	123,645,278	31.40%	Total
Penjualan tenaga listrik	36					Sale of electricity
Badan Usaha Milik Negara		5,487,610	2.23%	5,125,587	2.39%	State-Owned Enterprises
Subsidi listrik Pemerintah	37	45,738,215	100.00%	58,043,265	100.00%	Government's electricity subsidy
Beban bahan bakar dan pelumas	39					Fuel and lubricants expense
PT Pertamina (Persero)		19,129,336	16.36%	22,581,839	20.62%	PT Pertamina (Persero)
PT Nusantara Regas		8,151,615	6.97%	8,299,203	7.58%	PT Nusantara Regas
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk		6,976,710	5.97%	7,347,673	6.71%	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk		5,044,782	4.31%	4,373,538	3.99%	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk
Jumlah		39,302,443	33.61%	42,602,253	38.90%	Total
Beban pembelian tenaga listrik	40					Purchased electricity expenses
PT Sumber Segara Primadaya		6,547,601	9.04%	3,281,618	5.49%	PT Sumber Segara Primadaya
PT Pertamina Geothermal Energy		2,076,654	2.87%	916,737	1.53%	PT Pertamina Geothermal Energy
PT Bajradaya Sentranusa		781,022	1.08%	775,713	1.30%	PT Bajradaya Sentranusa
PT Geo Dipa Energi		742,444	1.03%	589,986	0.99%	PT Geo Dipa Energi
PT Bukit Pembangkit Innovative		671,673	0.93%	444,259	0.74%	PT Bukit Pembangkit Innovative
PT Dalle Energy Batam		529,834	0.73%	545,847	0.91%	PT Dalle Energy Batam
Jumlah		11,349,228	15.68%	6,554,160	10.96%	Total
Beban pemeliharaan	42					Maintenance expenses
PT Korpri Pembangkitan Jawa Bali		235,028	1.20%	216,560	1.02%	PT Korpri Pembangkitan Jawa Bali
Beban usaha lain-lain	44					Other operating expenses
Asuransi						Insurance
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)		327,456	4.25%	270,828	3.72%	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
Lain - lain						Others
PT Sucofindo (Persero)		19,943	0.26%	37,587	0.52%	PT Sucofindo (Persero)
PT Surveyor Indonesia (Persero)		12,131	0.16%	6,195	0.09%	PT Surveyor Indonesia (Persero)
Jumlah		359,530	4.67%	314,610	4.33%	Total
Beban keuangan	45					Financial cost
Utang bank		5,545,937	29.89%	3,774,489	20.18%	Bank loans
Penerusan pinjaman		547,187	2.95%	633,599	3.39%	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank		514,091	2.77%	558,962	2.99%	Government and non-bank Government financial institution loans
Instrumen derivatif		62,552	0.34%	105,215	0.56%	Derivative instruments
Jumlah		6,669,767	35.95%	5,072,265	27.12%	Total

\*) Persentase terhadap jumlah aset/ liabilitas/ pendapatan/ beban yang bersangkutan

\*) Percentage to related total assets/ liabilities/ revenues/ expenses

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp72.125 dan Rp48.654.

Total compensation of the Company's Board of Commissioners in 2017 and 2016 amounted to Rp72,125 and Rp48,654, respectively.

Jumlah kompensasi Direksi Perusahaan untuk tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp217.026 dan Rp116.170.

Total compensation of the Company's Directors in 2017 and 2016 amounted to Rp217,026 and Rp116,170, respectively.

Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan imbalan kerja jangka pendek.

All the compensation to the Company's Board of Commissioners and Directors represent short-term employee benefits.

Informasi mengenai kontribusi yang dilakukan Perusahaan dan entitas anak ke DP-PLN diungkapkan di Catatan 49.

Information about the contributions made by the Company and its subsidiaries to DP-PLN is disclosed in Note 49.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**52. Aset dan Liabilitas Moneter Dalam Mata  
Uang Asing**

**52. Monetary Assets and Liabilities  
Denominated In Foreign Currencies**

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016,  
Perusahaan dan entitas anak mempunyai aset  
dan liabilitas moneter dalam mata uang asing  
sebagai berikut:

As of December 31, 2017 and 2016, the  
Company and its subsidiaries had monetary  
assets and liabilities in foreign currencies as  
follows:

	2017				
	JPY *)	US\$ *)	EUR *)	Lain-lain/ Others **)	
<b>Aset moneter</b>					<b>Monetary assets</b>
Piutang pihak berelasi	--	16,197,815	--	--	Receivables from related parties
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	54,793,251,283	46,055,654	--	--	Restricted cash in banks and time deposits
Kas dan setara kas	989,283,918	612,474,922	8,321,241	--	Cash and cash equivalents
Jumlah aset moneter	<u>55,782,535,201</u>	<u>674,728,391</u>	<u>8,321,241</u>	<u>--</u>	Total monetary assets
<b>Liabilitas moneter</b>					<b>Monetary liabilities</b>
Penerusan pinjaman	170,695,553,004	964,734,649	26,063,045	11,863,438	Two-step loans
Utang sewa pembiayaan	157,201,225,947	84,248,160	--	--	Lease liabilities
Utang bank	6,012,420,140	3,035,228,648	134,312,461	--	Bank loans
Utang obligasi dan sukuk ijarah	--	6,500,000,000	--	--	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang listrik swasta	--	544,464,269	--	--	Electricity purchase payable
Utang lain-lain	--	360,950,854	15,852,132	7,374,791	Other payables
Utang biaya proyek	49,795,559	32,935,748	2,135,535	--	Project cost payable
Utang usaha	--	543,839,978	648,299	759,254	Trade payables
Biaya masih harus dibayar	4,561,471,496	134,199,763	1,058,278	123,095	Accrued expenses
Jumlah liabilitas moneter	<u>338,520,466,146</u>	<u>12,200,602,069</u>	<u>180,069,750</u>	<u>20,120,578</u>	Total monetary liabilities
Liabilitas moneter bersih	<u>(282,737,930,945)</u>	<u>(11,525,873,678)</u>	<u>(171,748,509)</u>	<u>(20,120,578)</u>	Net monetary liabilities
Ekuivalen Rupiah (dalam jutaan)	<u>(33,990,302)</u>	<u>(156,152,537)</u>	<u>(2,777,794)</u>	<u>(272,594)</u>	Rupiah equivalent (in millions)
<b>Jumlah dalam Rupiah - bersih (dalam jutaan)</b>	<b><u>(193,193,227)</u></b>				<b>Total in Rupiah - net (in millions)</b>
	2016				
	JPY *)	US\$ *)	EUR *)	Lain-lain/ Others **)	
<b>Aset moneter</b>					<b>Monetary assets</b>
Piutang pihak berelasi	--	18,897,451	--	--	Receivables from related parties
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	58,900,167,541	44,922,075	--	--	Restricted cash in banks and time deposits
Kas dan setara kas	1,222,842,324	178,504,121	7,299,106	457,750	Cash and cash equivalents
Jumlah aset moneter	<u>60,123,009,865</u>	<u>242,323,647</u>	<u>7,299,106</u>	<u>457,750</u>	Total monetary assets
<b>Liabilitas moneter</b>					<b>Monetary liabilities</b>
Penerusan pinjaman	179,894,874,250	753,977,435	39,752,290	13,203,171	Two-step loans
Utang sewa pembiayaan	188,227,714,907	--	--	--	Lease liabilities
Utang bank	--	2,989,065,968	142,625,503	--	Bank loans
Utang obligasi dan sukuk ijarah	--	5,000,000,000	--	--	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang listrik swasta	--	568,927,136	--	--	Electricity purchase payable
Utang lain-lain	--	418,912,416	47,445,212	8,189,434	Other payables
Utang biaya proyek	59,509,492	19,387,543	3,362,440	--	Project cost payable
Utang usaha	31,991,723	416,862,980	10,972,386	5,081,646	Trade payables
Biaya masih harus dibayar	4,198,343,675	113,279,119	1,136,639	138,506	Accrued expenses
Jumlah liabilitas moneter	<u>372,412,434,047</u>	<u>10,280,412,597</u>	<u>245,294,470</u>	<u>26,612,757</u>	Total monetary liabilities
Liabilitas moneter bersih	<u>(312,289,424,182)</u>	<u>(10,038,088,950)</u>	<u>(237,995,364)</u>	<u>(26,155,007)</u>	Net monetary liabilities
Ekuivalen Rupiah (dalam jutaan)	<u>(36,039,714)</u>	<u>(134,871,763)</u>	<u>(3,370,383)</u>	<u>(351,419)</u>	Rupiah equivalent (in millions)
<b>Jumlah dalam Rupiah - bersih (dalam jutaan)</b>	<b><u>(174,633,279)</u></b>				<b>Total in Rupiah - net (in millions)</b>

\*) Dalam jumlah penuh

\*\*) Aset dan liabilitas dalam mata uang asing lainnya disajikan setara US\$ dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan

\*) In full amount

\*\*) Assets and liabilities denominated in other foreign currencies are presented as US\$ equivalent using the exchange rate prevailing at the reporting date

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Sehubungan dengan fluktuasi kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, Perusahaan dan entitas anak mencatat rugi kurs mata uang asing bersih sebesar Rp2.935.144 untuk tahun 2017 dan laba kurs sebesar Rp4.195.210 untuk tahun 2016.

Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2017 dijabarkan dengan menggunakan kurs penutupan mata uang asing pada tanggal 28 Maret 2018, maka liabilitas bersih dalam mata uang asing Perusahaan dan entitas anak akan mengalami peningkatan sebesar Rp5.250.008.

*In relation to the fluctuation of the Rupiah against foreign currencies, the Company and its subsidiaries recorded net loss on foreign exchange amounting to Rp2,935,144 for 2017 and net gain amounting to Rp4,195,210 for 2016.*

*If assets and liabilities in foreign currencies as of December 31, 2017 had been translated using the closing rates at issuance of March 28, 2018, the total net foreign currency liabilities of the Company and its subsidiaries would have been increased by Rp5,250,008.*

**53. Segmen Operasi**

**Informasi Wilayah Geografis**

Segmen operasi disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Untuk tujuan pelaporan manajemen, pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan dan entitas anak dibagi dalam operasi geografis Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara, dan Maluku Papua. Operasi geografis tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Perusahaan dan entitas anak, rinciannya adalah sebagai berikut:

**53. Operating Segment**

**Geographical Information**

*The operating segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the consolidated financial statements.*

*For management reporting purposes, as of December 31, 2017 and 2016, the Company and its subsidiaries were divided into Sumatera, Java-Bali, Kalimantan, Sulawesi and Nusa Tenggara and Maluku Papua. These geographical operations are the basis on which the Company and its subsidiaries report segment information, with the following details:*

	2017					Jumlah/ Total Rp	
	SUMATERA Rp	JAWA BALI Rp	KALIMANTAN Rp	SULNUSTRA Rp	MALUKU & PAPUA Rp		
<b>Pendapatan usaha</b>							<b>Revenue</b>
Pendapatan external	27,604,617	218,159,043	4,216,594	4,191,350	1,123,639	255,295,243	External revenue
<b>Hasil segmen</b>	(7,870,096)	(3,353,886)	(3,136,306)	(2,899,086)	(2,021,163)	(19,280,537)	<b>Segment results</b>
Pendapatan tidak dapat dialokasikan, bersih						(898,314)	Unallocated income, net
Rugi usaha sebelum subsidi						(20,178,851)	Operating loss before subsidy
Penghasilan lain-lain tidak dapat dialokasikan						28,722,923	Unallocated other income
Manfaat pajak						(4,115,955)	Tax benefit
Laba tahun berjalan						<b>4,428,117</b>	Income for the year
<b>Aset segmen</b>	214,732,514	812,660,377	58,642,941	49,255,838	14,885,512	1,150,177,182	<b>Segment assets</b>
Aset tidak dapat dialokasikan						184,780,475	Unallocated assets
Jumlah aset konsolidasi						<b>1,334,957,657</b>	Total consolidated assets
<b>Liabilitas segmen</b>	203,390,278	104,331,499	57,936,833	48,561,391	16,076,395	430,296,396	<b>Segment liabilities</b>
Liabilitas tidak dapat dialokasikan						35,244,657	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas konsolidasi						<b>465,541,053</b>	Total consolidated liabilities

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2016					Jumlah/ Total/ Rp	
	SUMATERA Rp	JAWA BALI Rp	KALIMANTAN Rp	SULNUSTRA Rp	MALUKU & PAPUA Rp		
<b>Pendapatan usaha</b>							<b>Revenue</b>
Pendapatan eksternal	24,506,500	189,870,983	3,342,408	4,193,676	908,389	222,821,956	External revenue
<b>Hasil segmen</b>	(13,034,063)	(6,544,656)	(5,222,943)	(7,453,136)	(2,537,240)	(34,792,038)	<b>Segment results</b>
Pendapatan tidak dapat dialokasikan, bersih						3,164,192	Unallocated income, net
Rugi usaha sebelum subsidi						(31,627,846)	Operating loss before subsidy
Penghasilan lain-lain tidak dapat dialokasikan						45,206,072	Unallocated other income
Manfaat pajak						(5,427,843)	Tax benefit
Laba tahun berjalan						<u>8,150,383</u>	Income for the year
<b>Aset segmen</b>	189,480,713	759,353,266	54,801,915	55,405,116	11,578,530	1,070,365,052	<b>Segment assets</b>
Aset tidak dapat dialokasikan						201,812,923	Unallocated assets
Jumlah aset konsolidasi						<u>1,272,177,975</u>	Total consolidated assets
<b>Liabilitas segmen</b>	17,077,350	325,469,206	4,467,088	3,860,302	1,282,227	352,156,173	<b>Segment liabilities</b>
Liabilitas tidak dapat dialokasikan						41,622,345	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas konsolidasi						<u>393,778,518</u>	Total consolidated liabilities

**54. Ikatan dan Kontinjensi**

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan dan entitas anak memiliki perikatan penting dan kontinjensi sebagai berikut:

**a. Perjanjian pengadaan bahan bakar**

**i. Gas**

Sektor/ Sector	Pemasok/ Supplier	Periode/ Period	Satuan/ Unit	Kuantitas/ Quantity <sup>e)</sup>
Cilegon	a)	2006-2018	bbtu	356,300
Cilegon	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2009-2019	bbtu	101,400
Muara Karang - Priok	b)	2017-2022	bbtu	514,372
Muara Tawar	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2017	bbtu	1,046
Muara Tawar, Payo Selincah, Rengat, Duri Keramasan, Inderalaya, Borang	c)	2011-2019	bbtu	182,585
	Medco E&P Lematang	2017-2027	bbtu	50,933
Gresik	Kangean Energy Indonesia Ltd <sup>f)</sup>	2012-2028	bbtu	368,700
Gresik	PT Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore	2002-2018	bbtu	478,990
Gresik	PGN SAKA eks Hess Ltd	2006-2026	mmscf	440,000
Pekanbaru	EMP Bentu Ltd <sup>g)</sup>	2007-2021	bbtu	128,619
Keramasan	PT Pertamina EP	2010-2020	bbtu	27,375
Payo Selincah	PT Energasindo Heksa Karya	2009-2018	bbtu	104,002
Tanjung Batu	PT Pertamina (Persero), Semco (TAC)	2005-2017	bbtu	247,967
Tarakan	PT Pertamina EP	2012-2017	bbtu	3,359
Bontang	Total E and P Indonesia, INPEX Co	2009-2017	bbtu	681
Batam	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2004-2019	bbtu	72,270
Tanjung Priok	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2012-2017	bbtu	21,870
Grati	d) Lapangan Oyong	2009-2017	bbtu	116,070
Talang Duku	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2009-2019	bbtu	21,000
Sungai Gelam	PT Pertamina EP	2011-2012	mmscf	8,434
Bangkanai	Ophir Indonesia (Bangkanai) Ltd <sup>h)</sup>	2013-2032	bbtu	130,000
Sengkang	Energy Equity Epic (Sengkang) Pty Ltd	2012-2022	bbtu	51,945
Muara Tawar	PT Pertamina EP	2010-2017	bbtu	61,281
Tambak Lorok	PT Sumber Petrindo Perkasa	2011-2022	bbtu	219,000
Grati	d) Lapangan Wortel	2012-2018	bbtu	55,827
Batam	Premier Oil Natuna Sea B.V.; Natuna 1 B.V.; Natuna 2 B.V.; Kufpec Indonesia (Natuna) B.V.	2011-2022	bbtu	280,100

**54. Commitments and Contingencies**

As of December 31, 2017, the Company and its subsidiaries have significant commitments and contingencies, as follows:

**a. Fuel supply agreements**

**i. Gas**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Sektor/ Sector	Pemasok/ Supplier	Periode/ Period	Satuan/ Unit	Kuantitas/ Quantity <sup>e)</sup>
Grati	PT Sampang Mandiri Perkasa	2012-2019	bbtu	31,793
Grati	PT Pasuruan Migas	2012-2019	bbtu	5,911
Jakabaring (CNG)	PDPDE Prov Sumatera Selatan	2013-2020	bbtu	8,340
Tambak Lorok	PC Muriah Ltd	2014-2026	bbtu	354,780
Melibur	Kondur Petroleum SA	2012-2020	bbtu	831
Nunukan	Pertamina EP	2012-2018	mmscf	4,200
Sungai Gelam	Pertamina EP	2012-2017	mmscf	3,500
Sanga Sanga (CBM)	Virginia Indonesia Co. CBMLimited	2012-2019	mmscf	366
Muara Karang - Priok (LNG)	PT Nusantara Regas	2012-2022	Juta Ton	11
Tanjung Selor	Perusda Nusa Serambi Persada	2013-2024	bbtu	11,550
Bunyu Kaltim	Pertamina EP	2012-2017	mmscf	609
Gresik	Santos (Madura Offshore) Pty Ltd.; PC Madura Ltd dan PT Petrogas Pantai Madura	2013-2017	bbtu	33,362
Gresik	PT Surya Cipta Internusa	2015-2016	bbtu	3,580
Sumatera	PDPDE Prov Sumatera Selatan	2013-2019	bbtu	9,250
Tarakan	But. Manhattan Kalimantan Investment Pte.Ltd	2012-2018	bbtu	10,500
Batam	Inti Daya Latu Prima	2012-2019	bbtu	11,685
Gresik	Petrogas Jatim Utama	2013-2017	mmscf	39,898
Belawan, Muara Karang, Priok (LNG)	Tanggung PSC Contract Parties	2016-2034	kargo	688
Rawa Minyak Riau	Petroselat Ltd.	2015-2020	bbtu	7,802
Tana Tidung	PT Pertamina Hulu Energi Simenggaris dan PT Medco E&P Simenggaris	2015-2020	mmscf	805
New Tarahan	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2015-2017	bbtu	3,030
Bali	PT Pertamina (Persero); Total E and P Indonesia; INPEX.CO	2016-2017	kargo	± 7
Sutami	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2016-2018	bbtu	2,825
Sumatera	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	2016-2017	bbtu	14,600
a)	CNOOC SES Ltd.; PT Pertamina Hulu Energi OSES; KNOC Sumatra Ltd.; Salamander Energy Sumatra B.V.; Fortuna Resources (Sunda) Ltd.; Talisman Uk (Southeast Sumatra) Ltd.; Talisman Resources (Bahamas) Ltd.			
b)	PT Pertamina Hulu Energi ONWJ; Itochu Oil Exploration Co.Ltd.; Orchard Energy Java BV; Inpex Jawa Ltd.; CNOOC ONWJ Ltd. dan Talisman Resources (North West Java) Ltd.			
c)	Pt Pertamina Hulu Energi Jambi Merang; Talisman (Jambi Merang) Ltd. Dan Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Ltd.			
d)	Santos (Sampang) Pty Ltd., Singapore Petroleum Sampang Ltd. (formerly Coastal Indonesia Sampang Ltd.) and Cue Sampang Pty Ltd.			
e)	Dalam jumlah penuh/ <i>In full amount</i>			
f)	Berganti nama dari/ <i>Change name from</i> PT EMP Kangean Ltd.			
g)	Berganti nama dari/ <i>Change name from</i> Kalila Bentu Ltd.			
h)	Berganti nama dari/ <i>Change name from</i> Salamander Energy (Bangkanai) Ltd.			

Sehubungan dengan perjanjian diatas,  
Perusahaan mempunyai fasilitas *stand-  
by letter of credit* dengan rincian  
sebagai berikut:

*In relation with the above agreement,  
the Company has facilities stand-by  
letter of credit with the following details:*

Bank Penerbit/ Issuing Bank	Penerima Manfaat/ Beneficiary	Mata Uang/ Currency	Jumlah *) Total
BRI	PT Perusahaan Gas Negara (Persero)	IDR	61,864,782,723
	Santos (Sampang) Pty. Ltd	US\$	21,999,600
	Kangean Energy Ind	US\$	37,809,153
	Petrochina Int. Jabung	US\$	15,628,478
	Petrochina Int. Jabung	US\$	953,120
		US\$	4,270,000

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

<b>Bank Penerbit/ Issuing Bank</b>	<b>Penerima Manfaat/ Beneficiary</b>	<b>Mata Uang/ Currency</b>	<b>Jumlah *) Total</b>
Mandiri	PT Inpex Corporation	US\$	286,389
	Total E and P Indonesia	US\$	286,389
	BP Berau LTD. (On Behalf Of Tangguh)	US\$	33,112,770
	PT Pertamina Hulu Energi Jambi	US\$	4,210,000
	PT Pacific Oil and Gas (Jambi Merang) Limited	US\$	1,052,500
	Talisaman (Jambi Merang) Limited	US\$	1,052,500
	Nippon Oil Exploration (Berau) Limited	US\$	33,112,770
	PT Pertamina	US\$	10,218,460
	PT.Sumber Petrindo Perkasa	US\$	22,981,120
	PT Perusahaan Gas Negara (Persero)	IDR	1,558,617,226
		US\$	2,963,664
	PT Pelindo Energi Logistik	IDR	237,804,622,235
BNI	SESCO	US\$	44,461,534
	Conoco Philips	US\$	10,800,000
Bukopin	PT. Inti Daya Latu Prima	US\$	2,706,000

\*) Dalam jumlah penuh/ *In full amount*

Harga pembelian gas pipa pada titik penyerahan berkisar antara US\$3,18 sampai dengan US\$10,53 per *Million British Thermal Units* ("MMBTU") dan *Liquid Natural Gas* ("LNG") antara US\$4,86 sampai dengan US\$6,81 per MMBTU.

*Gas pipe purchase price at point of delivery ranges from US\$3.18 to US\$10.53 per Million British Thermal Units ("MMBTU") and the price of Liquid Natural Gas ("LNG") ranges from US\$4.86 to US\$6.81 per MMBTU.*

ii. Batubara

ii. Coal

<b>Pemasok/ Suppliers</b>	<b>Kuantitas metrik ton per tahun/ Quantity per year in metric ton *)</b>	<b>Periode/ Period</b>
<i>Rutin/ Regular</i>		
PT Bukit Asam (Persero), Tbk	5,300,000	2013-2022
PT Adaro Indonesia	1,500,000	2014-2023
PT Kaltim Prima Coal	5,000,000	2007-2017
PT Kideco Jaya Agung	1,500,000	2009-2018
PT Berau Coal	2,500,000	2009-2018
PT Indominco Mandiri	2,100,000	2008-2018
PT Natuna Energi Indonesia	480,000	2006-2017
PT Oktasan Baruna Persada	660,000	2006-2017
PT Eksploitasi Energi Indonesia <sup>1)</sup>	480,000	2006-2018
PT Artha Daya Coalindo	600,000	2016-2017
PT Bara Energi Lestari	500,000	2017-2018
PT Allied Indo Coal	36,000	2017-2020
<i>Kerjasama konsorsium/ Consortium</i>		
PT Kasih Industri Indonesia dan PT Senamas Energindo Mulia	783,000	2009-2028
PT Arutmin Indonesia dan PT Darma Henwa	2,005,000	2008-2028

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

<b>Pemasok/ Suppliers</b>	<b>Kuantitas metrik ton per tahun/ Quantity per year in metric ton *)</b>	<b>Periode/ Period</b>
PT Oktasan Baruna Persada and PT Insani Perkasa	540,000	2012-2017
PT Prima Multi Mineral and PT.Baratama	384,000	2012-2017
<b>Program Percepatan/ Fast Track Program</b>		
PT Bukit Asam (Persero), Tbk	6,600,000	2010-2030
PT Adaro Indonesia	4,500,000	2016-2020
PT Titan Infra Energy <sup>2)</sup>	2,920,000	2011-2031
PT Hanson Energy	2,128,000	2009-2031
PT Lanna Harita Indonesia	300,000	2015-2020
PT Dwi Guna Laksana	1,890,000	2010-2032
PT Tunas Inti Abadi	600,000	2015-2020
PT Dizamatra Powerindo	500,000	2016-2020
PT Samantaka Batubara	500,000	2016-2021
<b>Kerjasama konsorsium/ Consortium</b>		
PT Arutmin Indonesia dan PT Darna Henwa	6,253,000	2009-2029
PT Multi Bara Persada dan PT Eksploitasi Energi Indonesia	1,179,104	2011-2020
PT Kasih Industri Indonesia dan PT Senamas Energindo Mulia	2,860,000	2010-2031
PT Golden Great Borneo, PT Oktasan Baruna Persada dan PT Buana Eltra	576,000	2011-2022
PT Risna Karya Whardana Mandiri dan Rizki Anugrah Pratama	974,000	2010-2018
PT Risna Karya Whardana Mandiri dan Rizki Anugrah Pratama	1,185,328	2011-2023
PT Oktasan Baruna Persada dan PT Buana Risky Armia	1,241,000	2010-2031
PT Energi Batubara Lestari dan PT Batara Batari Sinergy Nusantara	220,500	2013-2032

\*) Dalam jumlah penuh/ *In full amount*

1) Berganti nama dari/ *Changes name from PT Sentra Korporindo Internasional, Tbk*

2) Berganti nama/ *Changes name from PT Titan Mining Energy*

Harga pembelian batubara berkisar antara Rp418.671 dan Rp1.209.739 per ton yang disesuaikan terhadap nilai kalori, kadar abu, sulfur, air, *Ash Fusion Temperature* ("AFT") dan *Hardgrove Grindability Index* ("HGI").

*The price of coal purchases ranges from Rp418,671 to Rp1,209,739 per ton, which is adjusted against calorific value, ash content, sulphur, water, Ash Fusion Temperature ("AFT") and Hardgrove Grindability Index ("HGI").*

PLN Batubara mengadakan Perjanjian Kerjasama Operasi Penambangan Batubara dengan beberapa pemasok sebagai berikut:

*PLN Batubara entered into Coal Mining Operation Cooperation Agreement with suppliers as follows:*

<b>Pemasok/ Suppliers</b>	<b>Lokasi/ Locations</b>	<b>Kuantitas metrik ton/ Quantity in metric ton *)</b>
PT Tansri Madjid Energi	Muara Enim, Sumatera Selatan/ <i>South Sumatera</i>	43,396,322
PT Megapura Prima Industri	Sorong, Papua Barat/ <i>West Papua</i>	14,800,000
PT Bima Putra Abadi Citranusa	Lahat, Sumatera Selatan/ <i>South Sumatera</i>	1,000,000
PT Awang Sejahtera	Parenggean, Kalimantan Tengah/ <i>Central Kalimantan</i>	693,680

\*) Dalam jumlah penuh/ *In full amount*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

iii. Bahan Bakar Minyak

Perusahaan dan PT Pertamina (Persero) ("Pertamina") mengadakan Perjanjian Induk Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 071.PJ/060/DIR/2001 tanggal 8 Oktober 2001. Perjanjian ini telah di adendum tanggal 16 Mei 2007 dimana Perusahaan dan Pertamina menyepakati antara lain: (i) penggunaan harga bahan bakar bulanan ditetapkan oleh Pertamina untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2007 dan harga bahan bakar 109,5% dari *Mean Oil Platts Singapore* ("MOPS") ditambah Pajak Pertambahan Nilai untuk periode 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Desember 2007; (ii) harga bahan bakar setelah tanggal 31 Desember 2007 akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setiap tahun; (iii) jangka waktu pembayaran berikut pengenaan denda keterlambatan pembayaran sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia bulanan ditambah 1,3%; (iv) efektif mulai 1 Mei 2007, saldo utang yang belum dibayar atas pembelian bahan bakar sampai dengan 30 April 2007 dikenakan bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun ditambah 1,3%, sampai diselesaikan dengan menerbitkan obligasi PLN selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2007; (v) utang kepada Pertamina, termasuk obligasi yang akan diterbitkan maksimum sebesar Rp18 triliun; dan (vi) perjanjian ini berlaku untuk lima tahun sejak 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2011.

Berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 16 Mei 2007, PT Sucofindo (Persero) ditunjuk sebagai *independent surveyor*.

Berdasarkan Addendum III Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak tanggal 7 November 2011, Perusahaan dan Pertamina menyepakati dalam tahun 2011 sebagai berikut:

iii. Fuel

The Company and PT Pertamina (Persero) ("Pertamina") entered into a Fuel Sale and Purchase Agreement No. 071.PJ/060/DIR/2001 dated October 8, 2001. This agreement was amended on May 16, 2007, whereby, the Company and Pertamina agreed among other things: (i) the monthly fuel price to be used for the period January 1 until April 30, 2007 is determined by Pertamina and the fuel price of 109.5% from *Mean Oil Platts Singapore* ("MOPS") plus Value Added Tax for the period May 1, 2007 until December 31, 2007; (ii) that the fuel price subsequent to December 31, 2007 will be determined by both parties every year; (iii) the terms of payment and penalty charges on late payment is using a monthly rate of Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%; (iv) effective on May 1, 2007, the unpaid balance of payable for the purchases of fuel until April 30, 2007 will bear interest with a rate per annum of Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%, until settled by issuance of PLN bonds, which is no later than August 31, 2007; (v) the maximum payable to Pertamina, includes bonds which will be issued amounting to Rp18 trillion; and (vi) this agreement is valid for five years from January 1, 2007 until December 31, 2011.

Based on the Joint Deal Letter dated May 16, 2007, PT Sucofindo (Persero) is assigned as an *independent surveyor*.

Based on Amendment III of the Fuel Sale and Purchase Agreement dated November 7, 2011, the Company and Pertamina agreed in 2011 on the following:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. *High Speed Diesel* ("HSD")
  - Harga pembelian HSD sampai dengan 2.537.161 kiloliter (kl) di 18 titik penyerahan Pertamina adalah 105% dari MOPS.
  - Harga pembelian HSD sampai dengan 480.487 kl di titik penyerahan Pertamina Terminal Transit Manggis adalah 108% dari MOPS.
  - Harga pembelian HSD sampai dengan 2.978.360 kl di titik penyerahan di Instalasi Tanjung Priok dan Instalasi Surabaya Group adalah 108,5% dari MOPS.
  - Harga pembelian HSD diatas 5.996.008 kl atau yang diserahkan diluar 21 titik penyerahan yang ditetapkan Pertamina adalah 109,5% dari MOPS.
2. Harga pembelian *Industrial Diesel Oil* ("IDO") sampai dengan 3.933 kl di titik penyerahan di Kilang Plaju adalah 105% dari MOPS dan pembelian diatas 3.933 kl atau yang diserahkan diluar titik penyerahan Kilang Plaju adalah 109,5% dari MOPS.
3. Harga pembelian *Marine Fuel Oil* ("MFO") sampai dengan 1.193.166 kl di titik penyerahan di Kilang Cilacap adalah 105% dari MOPS dan pembelian diatas 1.193.166 kl atau yang diserahkan diluar titik penyerahan di Kilang Cilacap adalah 109,5% dari MOPS.

Tahun 2013, Perusahaan dan Pertamina sepakat untuk menggunakan harga tahun 2011, karena amandemen Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak belum diselesaikan.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-74/MK.02/2015 kepada Menteri ESDM mengenai rekomendasi

1. *High Speed Diesel* ("HSD")
  - The price of HSD for the purchase of up to 2,537,161 kiloliters (kl) from 18 supply points of Pertamina is 105% from MOPS.
  - The price of HSD for the purchase of up to 480,487 kl from the point of delivery Pertamina Terminal Transit Manggis is 108% from MOPS.
  - The price of HSD for the purchase of up to 2,978,360 kl from the point of delivery at Instalasi Tanjung Priok and Instalasi Surabaya Group is 108.5% from MOPS.
  - The price of HSD in excess of 5,996,008 kl or supplied from the point of delivery other than the 21 delivery points specified by Pertamina is 109.5% from MOPS.
2. The price of *Industrial Diesel Oil* ("IDO") for purchases of up to 3,933 kl from the point of delivery at Kilang Plaju is 105% from MOPS and for purchases in excess of 3,933 kl or supplied from point of delivery other than the supply point Kilang Plaju is 109.5% from MOPS.
3. The price of *Marine Fuel Oil* ("MFO") for purchases of up to 1,193,166 kl from the point of delivery at Kilang Cilacap is 105% from MOPS and for purchases in excess of 1,193,166 kl or supplied from the point of delivery other than the supply point Kilang Cilacap is 109.5% from MOPS.

In 2013, the Company and Pertamina agreed to use the price of the year 2011, since the Fuel Sale Purchase Agreement amendment has not been completed yet.

Based on the Minister of Finance of the Republic of Indonesia's letter No. S 74/MK.02/2015 to Minister of ESDM regarding its recommendation

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

*For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

penetapan harga jual beli HSD dan MFO antara Perusahaan dan Pertamina tahun 2014 tanggal 30 Januari 2015, pokok-pokok kesepakatan antara Pertamina dan Perusahaan antara lain:

- a. Harga jual tahun 2014 menggunakan harga berdasarkan evaluasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sebesar HSD: MOPS + 9,19% dan MFO: MOPS + 11,94%;
- b. Dalam rangka efisiensi biaya pembelian di tahun 2015, Perusahaan diperkenankan untuk mencari sumber Bahan Bakar Minyak ("BBM") selain Pertamina, dengan tetap menjaga keamanan pasokan BBM.

Perusahaan telah mencatat pembelian HSD dan MFO tahun 2014 berdasarkan harga tersebut.

Dalam rangka penyelesaian harga jual Bahan Bakar Minyak (HSD dan MFO) Pertamina kepada Perusahaan, telah dilakukan pembahasan harga jual beli bahan bakar minyak (HSD dan MFO) antara Pertamina dan Perusahaan tahun 2015 di Kantor Kementerian BUMN, difasilitasi oleh Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, untuk menentukan harga transaksi BBM di tahun 2015.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Harga Jual Beli Bahan Bakar Minyak (HSD dan MFO) antara Pertamina dan Perusahaan tanggal 9 Februari 2016 dengan hasil sebagai berikut:

- a. Harga transaksi HSD tahun 2015:
  - Januari sampai dengan September 2015 adalah 107% dari MOPS
  - Oktober sampai dengan Desember 2015 adalah 105% dari MOPS
- b. Harga transaksi MFO tahun 2015 adalah 109,5% dari MOPS.

Perusahaan telah mencatat pembelian HSD dan MFO tahun 2015 berdasarkan harga tersebut.

*on the sale and purchase price of HSD and MFO between the Company and Pertamina for 2014 dated January 30, 2015, the terms of the agreement between Pertamina and the Company are:*

- a. *The sales price for 2014 uses the price based on the review of the Board of Finance and Development Supervision as follows: for HSD: MOPS + 9.19% and for MFO: MOPS + 11.94%;*
- b. *For the efficiency of purchase cost in 2015, the Company is allowed to acquire from other sources of fuel than Pertamina, whilst maintaining security of fuel supply.*

*The Company has recorded purchases of HSD and MFO for the year 2014 based on those prices.*

*In settlement of the fuel sales price of Pertamina's fuel (HSD and MFO) to the Company, discussions on selling price of fuel (HSD and MFO) has been conducted between Pertamina and the Company in 2015 in the Ministry of BUMN office, facilitated by a deputy in energy business logistics and tourism, to determine the selling price of fuel in 2015.*

*Based on the Sales and Purchase Price Agreement for Fuel (HSD and MFO) between Pertamina and the Company dated on February 9, 2016 the results are:*

- a. *HSD transaction price for 2015:*
  - *January until September 2015 is 107% from MOPS*
  - *October until December 2015 is 105% from MOPS*
- b. *MFO transaction price for 2015 is 109.5% from MOPS.*

*The Company has recorded purchases of HSD and MFO for the year 2015 based on those prices.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Berdasarkan Addendum IV Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak tanggal 16 Mei 2017, Pertamina dan Perusahaan menyepakati perpanjangan jangka waktu pasokan hingga tahun 2020.

Berdasarkan Addendum V, kesepakatan harga jual beli bahan bakar minyak (HSD dan MFO) antara Pertamina dan Perusahaan tanggal 17 Oktober 2017, adalah sebagai berikut:

- a. Harga transaksi HSD tahun 2017:
  - Januari sampai dengan Juni 2017 adalah 107% dari MOPS.
  - Juli sampai dengan Desember 2017 adalah 104,58% dari MOPS.
- b. Harga transaksi MFO tahun 2017:
  - Januari sampai dengan Juni 2017 adalah 109,5% dari MOPS.
  - Juli sampai dengan Desember 2017 adalah 109,1% dari MOPS.

Perusahaan telah mencatat pembelian HSD dan MFO tahun 2017 berdasarkan harga tersebut.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian, manajemen sedang melakukan proses perpanjangan kontrak dan akan dituangkan pada Addendum VI PJB-BBM yang mencantumkan harga pembelian BBM tahun 2018 sampai dengan 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, estimasi liabilitas bunga dan denda atas utang pembelian bahan bakar kepada Pertamina masing-masing Rp19.713 dan Rp19.713 yang dicatat sebagai biaya masih harus dibayar (Catatan 33).

Pada tanggal 3 September 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD dengan PT Kutilang Paksi Mas untuk Pembangkit Belawan sebanyak 750.000 kl selama tiga tahun atau pemenuhan total volume, yang mana terlebih dahulu.

*Based on Amendment IV of the Fuel Sale and Purchase Agreement dated May 16, 2017, Pertamina and the Company agreed to extend the period of supply until 2020.*

*Based on Amendment V, sales and purchase price agreement for fuel (HSD and MFO) between Pertamina and the Company dated on October 17, 2017, the result are:*

- a. *HSD transaction price for 2017:*
  - *January until June 2017 is 107% from MOPS.*
  - *July until December 2017 is 104.58% from MOPS.*
- b. *MFO transaction price for 2017:*
  - *January until June 2017 is 109.5% from MOPS.*
  - *July until December 2017 is 109.1% from MOPS.*

*The Company has recorded purchase of HSD and MFO for the year 2017 based on those prices.*

*As of the consolidated financial statements date, the management is still in the process of the extension of the contract and will be written in Addendum VI PJB-BBM that stated the purchase price of fuel from 2018 to 2020.*

*As of December 31, 2017 and 2016, estimated liabilities on interest and penalties for payable on purchases of fuel from Pertamina amounted to Rp19,713 and Rp19,713, respectively, which are recorded as accrued expenses (Note 33).*

*On September 3, 2014, the Company entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD with PT Kutilang Paksi Mas for Belawan Power Plant for 750,000 kl for three years or fulfillment of total volume, whichever is the first.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

*For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

Pada tanggal 23 Februari 2016, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD dengan PT AKR Corporindo, Tbk untuk Lokasi Pembangkit Listrik Sei Raya, Siantan, Sanggau (Menyurai dan Semboja), dan Ketapang (Sukaharja) sebanyak 450.000 kl selama tiga tahun atau pemenuhan total volume, yang mana terlebih dahulu.

*On February 23, 2016, the Company entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD with PT AKR Corporindo, Tbk Power Plant Location in Sei Raya, Siantan, Sanggau (Menyurai and Semboja) and Ketapang (Sukaharja) for 450,000 kl for three years or fulfillment of total volume, whichever is the first.*

Pada tanggal 14 Juli 2016, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD dengan PT Kutilang Paksi Mas untuk Pembangkit Belawan sebanyak 750.000 kl selama tiga tahun atau pemenuhan total volume, yang mana terlebih dahulu.

*On July 14, 2016, the Company entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD with PT Kutilang Paksi Mas for Belawan Power Plant for 750,000 kl for three years or fulfillment of total volume, whichever is the first.*

Pada tanggal 26 Mei 2017, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD dengan PT Kutilang Paksi Mas untuk Pembangkit Tanjung Batu sebanyak 450.000 kl selama tiga tahun atau pemenuhan total volume, yang mana terlebih dahulu.

*On May 26, 2017, the Company entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD with PT Kutilang Paksi Mas for Tanjung Batu Power Plant for 450,000 kl for three years or fulfillment of total volume, whichever is the first.*

Pada tanggal 18 Agustus 2017, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD dengan PT Kutilang Paksi Mas untuk Pembangkit di Bangka Belitung sebanyak 120.000 kl selama tiga tahun atau pemenuhan total volume, yang mana terlebih dahulu.

*On August 18, 2017, the Company entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD with PT Kutilang Paksi Mas for Power Plant in Bangka Belitung Power Plant for 120,000 kl for three years or fulfillment of total volume, whichever is the first.*

iv. Uap Panas Bumi

Pada tahun 2017, Perusahaan memiliki perjanjian dengan beberapa pemasok untuk pengadaan uap panas bumi sebagai berikut:

iv. Geothermal Steam

*In 2017, the Company entered geothermal steam agreement with several suppliers, as follows:*

<b>Sektor/ Sector</b>	<b>Pemasok/ Supplier</b>	<b>Periode/ Period</b>
Kamojang Unit 1, 2 & 3	PT Pertamina Geothermal Energy	2012-2040
Lahendong Unit 1	PT Pertamina Geothermal Energy	2002-2032
Lahendong Unit 2 & 3	PT Pertamina Geothermal Energy	2007-2039
Lahendong Unit 4	PT Pertamina Geothermal Energy	2011-2041
Ulubelu Unit 1 & 2	PT Pertamina Geothermal Energy	2012-2042
Hululais Unit 1 & 2	PT. Pertamina Geothermal Energy	30 tahun <sup>*)</sup>
Sungai Penuh Unit 1 & 2	PT Pertamina Geothermal Energy	30 tahun <sup>*)</sup>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Sektor/ Sector	Pemasok/ Supplier	Periode/ Period
Kotamobagu Unit 1,2,3 & 4 Darajat Unit 1	PT Pertamina Geothermal Energy PT Pertamina, Star Energy Geothermal Darajat I Ltd. Texaco Darajat Ltd. PT Star Energy Geothermal Darajat II Ltd.	30 tahun *) 1994-2030
Gunung Salak Unit 1,2 & 3	PT Pertamina, Unocal Geothermal of Indonesia Ltd. Star Energy Geothermal Salak Pratama Ltd.	1993-2040

\*) Sejak/ Since Commercial of Date

**b. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan  
Kontrak Penjualan Energi**

Sebelum tahun 1997, Perusahaan mengadakan PPA dan ESC dengan IPP skala besar. Pada tahun 1999, Perusahaan telah melaksanakan renegotiasi terhadap PPA dan ESC melalui Kelompok Kerja Renegosiasi Kontrak Khusus PT PLN (Persero) dibawah arahan Pemerintah. Renegosiasi tersebut meliputi antara lain keseimbangan kondisi kontrak, kewajaran harga dan disparitas harga jual listrik IPP dan harga jual Perusahaan.

Dalam perjanjian dengan IPP tertentu, disepakati bahwa setiap saat selama perjanjian berlaku, Perusahaan dapat melaksanakan opsi untuk membeli hak penjual, milik, dan kepentingan atas proyek yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2017, perjanjian signifikan antara Perusahaan dan entitas anak dengan IPP adalah sebagai berikut:

**i. Sudah Beroperasi**

No.	Perusahaan/ Company	Proyek/ Project	Bahan bakar/ Fuel	Kapasitas/ Capacity (MW)	AF <sup>2b</sup> (%)	Periode/ Period <sup>3a</sup>	Tanggal operasi komersial/ Commercial operation date
1	PT Energi Sengkang	Sengkang, Sulawesi Selatan/ South Sulawesi	Gas	315	85	1998-2027	12 September 1998/ September, 12 1998
2	PT Cikarang Listrindo	Cikarang, Jawa Barat/ West Java	Gas	300	72	1996-2031	1 Desember 1998/ December, 1 1998
3	Pertamina, Cevron Drajat Ltd	Drajat, Jawa Barat/ West Java	Panas bumi/ Geothermal	117	95	2000-2030	1 Februari 2000/ February, 1 2000 1 Agustus 2007/ August, 1 2007
4	Star Energy Geothermal Ltd	Wayang Windu, Jawa Barat/ West Java	Panas bumi/ Geothermal	227	90	2000-2042	1 Juni 2000/ June, 1 2000
5	PT Paiton Energy	Paiton I, Jawa Timur/ East Java	Batubara/ Coal	1230	85	2001-2040	1 Juli 2000/ July, 1 2000
6	PT Jawa Power	Paiton II, Jawa Timur/ East Java	Batubara/ Coal	1220	83	2000-2030	1 November 2000/ November, 1 2000
7	Dayabumi Salak Pratama Ltd.	Salak, Jawa Barat/ West Java	Panas bumi/ Geothermal	165	90	2000-2030	1 Desember 2000/ December, 1 2000

**b. Power Purchase Agreements and  
Energy Sales Contract**

Prior to 1997, the Company entered into PPA and ESC with large-scale IPPs. In 1999, the Company entered into renegotiation of the PPA and ESC through a Working Group on PT PLN (Persero) Special Contract Renegotiation under the direction of the Government. Such renegotiation includes, among other subjects, equalization in contract conditions, reasonableness of price and disparity of selling price between the IPP and the Company.

Based on the agreements with certain IPPs, the Company may exercise its option to purchase all of the IPP's rights, title and interest in the projects at any time during the contract period.

As of December 31, 2017 the significant agreements between the Company and its subsidiaries with IPPs are as follows:

**i. In Operations**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

No.	Perusahaan/ Company	Proyek/ Project	Bahan bakar/ Fuel	Kapasitas/ Capacity (MW)	AF <sup>9)</sup> (%)	Periode/ Period <sup>8)</sup>	Tanggal operasi komersial/ Commercial operation date
8	PT Geo Dipa Energy	Dieng, Jawa Tengah/ Central Java	Panas bumi/ Geothermal	55	85	2002-2044	1 Oktober 2002/ October, 1 2002
9	PT Asrigita Prasarana	Palembang Timur, Sumatera Selatan/ South Sumatera	Gas	150	85	2004-2024	1 September 2004/ September, 1 2004
10	Perum Jasa Tirta	Purwakarta, Jawa Barat/ West Java	Tenaga Air/ Hydro	180	-	2012-2017	1 Agustus 2006/ August, 1 2006
11	PT Sumber Segara Primadaya	Ciacap, Jawa Tengah/ Central Java	Batubara/ Coal	562	80	2007-2037	1 Februari 2007/ February, 1, 2007
12	PT Opta Daya Nusantara	Mobuya, Sulawesi Utara/ North Sulawesi	Tenaga Air/ Hydro	3	80	2007-2027	31 Juli 2007/ July, 31 2007
13	PT Pusaka Jaya Palu Power	Palu, Sulawesi Tengah/ Central Sulawesi	Batubara/ Coal	27	80	2007-2032	1 November 2007/ November, 1, 2007
14	PT Meppo Gen	Gunung Megang, Sumatera Selatan/ South Sumatera	Gas	110	80	2007-2027	10 November 2007/ November, 10 2007
15	PT Pertamina Geothermal Energy	Kamojang Unit 4, Jawa Barat/ West Java	Panas bumi/ Geothermal	60	90	2008-2038	26 Januari 2008/ January, 26 2008
16	PT Dizamtra Powerindo	Sebayak, Sumatera Utara/ North Sumatera	Panas bumi/ Geothermal	12	80	2008-2038	1 Agustus 2008/ August, 1 2008
17	PT Cahaya Fajar Kaltim	Embalut 1 & 2, Kalimantan Timur/ East Borneo	Batubara/ Coal	45	83	2008-2040	20 Desember 2008/ December, 20 2008
18	PT Fajar Futura Energi Luwu	Ranteballa, Luwu, Sulawesi Selatan/ South Sulawesi	Tenaga Air/ Hydro	2.4	-	2010-2035	1 Mei 2010/ May, 1 2010
19	PT Bajrayaya Sentranusa	Asahan, Sumatera Utara/ North Sumatera	Tenaga Air/ Hydro	180	1.175 GWh/Th	2011-2040	18 Januari 2011/ January, 18 2011
20	PT Sulawesi Mini Hydro Power	Tangka, Sijai, Sulawesi Selatan/ South Sulawesi	Tenaga Air/ Hydro	10	-	2011-2036	1 Februari 2011/ February, 1 2011
21	PT Eksploitasi Energi Indonesia	Pangkalan Bun, Kalimantan Selatan/ South Borneo	Batubara/ Coal	11	80	2011-2036	14 Oktober 2011/ October, 14 2011
22	PT Paton Energy	Paiton III, Jawa Timur/ East Java	Batubara/ Coal	815	85	2012-2042	18 Maret 2012/ March, 18 2012
23	PT Cirebon Electric Power	Cirebon, Jawa Barat/ West Java	Batubara/ Coal	660	80	2012-2042	27 Juli 2012/ July, 27 2012
24	PT Bosowa Energi	Jeneponto, Sulawesi Selatan/ South Sulawesi	Batubara/ Coal	200	80	2012-2042	1 Agustus 2012/ August, 1 2012
25	PT Poso Energy	Poso, Sulawesi Tengah/ Central Sulawesi	Tenaga Air/ Hydro	195	845,52 GWh/Th	2012-2042	30 Desember 2012/ December, 30 2012
26	PT Bekasi Power	Bekasi, Jawa Barat/ West Java	Gas	118.8	80	2013-2033	5 Januari 2013/ January, 5 2013
27	PT GH EMM Indonesia	Simpang Belimbing Muara Enim, Sumatera Selatan/ South Sumatera	Batubara/ Coal	227	80	2011-2041	27 Februari 2013/ February, 27 2013
28	PT Sepoethi Daya Prima	Lampung Tengah, Sumatera	Batubara/ Coal	12	80	2014-2024	2 Mei 2014/ May, 2 2014
29	PT Cahaya Fajar Kaltim	Embalut Unit 3, Kalimantan Timur/ East Borneo	Batubara/ Coal	50	87	2014-2039	5 September 2014/ September, 5 2014
30	PT Tenaga Listrik Gorontalo	Molotabu, Gorontalo	Batubara/ Coal	21	80	2014-2039	13 September 2014/ September, 13 2014
31	PT Geo Dipa Energi	Patuha, Jawa Barat/ West Java	Panas bumi/ Geothermal	55	75	2014-2044	22 September 2014/ September, 22 2014
32	PT Kerta Negara Energi Perkasa	Senipah, Kalimantan Timur/ East Borneo	Gas	92	85	2015-2040	16 Maret 2015/ March, 16 2015
33	PT Bukit Pembangkit Innovative	Banjar Sari, Lahat, Sumatera Selatan/ South Sumatera	Batubara/ Coal	220	80	2015-2045	30 Juni 2015/ June, 30 2015
34	PT General Energy Bali	Celukan Bawang, Bali	Batubara/ Coal	380	85	2015-2045	18 Juni 2015/ June, 18 2015 27 Juni 2015/ June, 27 2015 31 Juli 2015/ July, 31 2015
35	PT Pertamina Geothermal Energy	Kamojang Unit 5, Jawa Barat/ West Java	Panas bumi/ Geothermal	30	90	2015-2045	29 Juni 2015/ June, 29 2015
36	PT Harmoni Energi Indonesia	Buton, Sulawesi Tenggara/ Southeast Sulawesi	Batubara/ Coal	14	80	2015-2040	29 Oktober 2015/ October, 29 2015
37	PT Priamanaya Energi	Keban Agung, Lahat, Sumatera Selatan/ South Sumatera	Batubara/ Coal	240	80	2016-2046	1 Mei 2016/ May, 1 2016
38	PT Wampu Electric Power	Wampu, Sumatera Utara/ North Sumatera	Tenaga Air/ Hydro	45	315,36 GWh/Th	2016-2046	1 Mei 2016/ May, 1 2016
39	PT Sumber Segara Primadaya	Ciacap Ekspansi, Jawa Tengah/ Central Java	Batubara/ Coal	614	80	2016-2046	9 Juni 2016/ June, 9 2016
40	PT Pertamina Geothermal Energy	Ulubeli Unit 3, Sumatera	Panas bumi/ Geothermal	55	90	2016-2046	26 Juli 2016/ July, 26 2016
41	PT Pusaka Jaya Palu Power	Tawaeli Ekspansi (Unit 4 & 5), Palu	Batubara/ Coal	30	80	2016-2041	7 September 2016/ September, 7 2016
42	PT Pertamina Geothermal Energy	Lahendong Unit 5, Sulawesi Utara/ North Sulawesi	Panas bumi/ Geothermal	20	90	2016-2046	15 September 2016/ September, 15 2016
43	PT Pertamina Geothermal Energy	Lahendong Unit 6, Sulawesi Utara/ North Sulawesi	Panas bumi/ Geothermal	20	90	2016-2046	9 Desember 2016/ December, 9 2016
44	PT DSSP Power Sumsel	Sumsel 5, Banyuwangi, Sumatera Selatan/ South Sumatera	Batubara/ Coal	300	80	2016-2041	20 Desember 2016/ December, 20 2016

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

No.	Perusahaan/ Company	Proyek/ Project	Bahan bakar/ Fuel	Kapasitas/ Capacity (MW)	AF <sup>5)</sup> (%)	Periode/ Period <sup>6)</sup>	Tanggal operasi komersial/ Commercial operation date
45	Sarulita Operation Ltd	Sibual Buall, Sumatera Utara/ North Sumatera	Panas bumi/ Geothermal	110	90	2017-2047	18 Maret 2017/ March, 18 2017
46	PT Pertamina Geothermal Energy	Ulubelu Unit 4, Sumatera	Panas bumi/ Geothermal	55	90	2016-2046	25 Maret 2017/ March, 25 2017
47	PT Lestari Banten Energi	Banten, Jawa Barat/ West Java	Batubara/ Coal	625	80	2017-2042	28 Maret 2017/ March, 28 2017
48	PT Lombok Energy Dinamics	Sambelia, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat/ West Nusa Tenggara	Batubara/ Coal	50	80	2017-2042	10 April 2017/ April, 10, 2017
49	Sarulita Operation Ltd	Sibual Buall Unit 2, Sumatera Utara/ North Sumatera	Panas bumi/ Geothermal	110	90	2017-2047	2 Oktober 2017/ October 2, 2017
50	PT Indo Matra Power	Kawasan Industri Kabil, Pulau Batam/ Batam Island	Gas	17.4	80	2005-2017	11 September 2005/ September, 11 2005 1 April 2006/ April, 1 2006
51	PT Dale Energy Batam	Panaran, Pulau Batam/ Batam Island	Gas	85.5	90	2005-2025	1 Desember 2005/ December, 1 2005
52	PT Mitra Energi Batam	Panaran, Pulau Batam/ Batam Island	Gas	55.5	84	2005-2034	29 Oktober 2004/ October, 29 2004
53	PT Mitra Energi Batam	Panaran, Pulau Batam/ Batam Island	Gas	26.6	-	2014-2034	1 September 2014/ September, 1 2014
54	Tanjung Kasam Power	Tanjung Kasam, Pulau Batam/ Batam Island	Batubara/ Coal	110	85	2012-2042	25 Oktober 2012/ October, 25 2012 1 November 2012/ November, 1 2012
55	PT Energi Listrik Batam	Tanjung Ungang, Pulau Batam/ Batam Island	Gas	70	85	2016-2038	1 Mei 2016/ May, 1 2016
56	PT Humbahas Bumi Energi	Hutaja, Sumatera Utara/ North Sumatera	Tenaga air/ Hydro	5	65	2012-2037	10 Mei 2012/ May, 10 2012
57	PT Bakti Nugroho Yuda Energy	Baturaja, Sumatera Selatan/ South Sumatera	Batubara/ Coal	20	80	2014-2039	18 Januari 2014/ January, 18 2014
58	Joint Operation PT Wijaya Karya (Persero) Tbk PT Mirlindo Padu Kencana (Persero) Tbk	Pesanggaran, Bali	Diesel	50	85	2009-2017	1 Maret 2011/ March, 1 2011
59	Konsorsium PT Wijaya Karya PT Navigat Energy	Borang, Sumatera Selatan/ South Sumatera	Gas	60	80	2012-2019	29 Juni 2012/ June, 29 2012
60	Konsorsium PT Modaco Enrgy PT Elektrindo Perkasia Utama Pratt & Whitney Ps. INC Renew able Energy Power International	Payo Selincih, Jambi	Gas	94	60	2012-2019	8 Juni 2012/ June, 8 2012
61	Konsorsium PT PP PT Bangun Energy Resources PT Navigat Energy PT SNC Lavalin TPS General Electric	Talang Duku, Jambi	Gas	57	60	2013-2019	11 Januari 2007/ January, 11 2007
<b>Jumlah/ Total</b>				<b>10,996</b>			

Selain dari perjanjian jual beli tenaga listrik di atas, Perusahaan dan entitas anak juga memiliki beberapa perjanjian sewa yang termasuk dalam kategori sewa operasi.

**ii. Belum Beroperasi (Dalam Tahap Pengembangan)**

*In addition to the above power purchase agreements, the Company and its subsidiaries also entered into rental agreements that falls into the category of operating leases.*

**ii. Not Yet in Operation (Development Stage)**

No.	Perusahaan/ Company	Proyek/ Project	Bahan bakar/ Fuel	Kapasitas/ Capacity (MW)	AF <sup>5)</sup> (%)	Periode/ Period <sup>6)</sup>	Status
1	PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali	Serang, Banten	Batubara/ Coal	2,000	86	2021-2046	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
2	PT Bhumi Jati Power	Jejara, Jawa Tengah/ Central Java	Batubara/ Coal	2,000	86	2019-2044	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
3	PT Indo Raya Tenaga	Suralaya, Banten	Batubara/ Coal	2,000	80	2022-2047	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
4	PT Bimasena Power Indonesia	Batang, Jawa Tengah/ Central Java	Batubara/ Coal	1,900	86	2020-2050	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
5	PT Jawa Satu Power	Karawang, Jawa Barat / West Java	Gas	1,760	60	2022-2047	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
6	PT Tanjung Jati Power Company	Orebon, Jawa Barat/ West Java	Batubara/ Coal	1,320	80	2019-2049	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
7	PT Haudan Bukit Asam Power	Sumatera Selatan/ South Sumatera	Batubara/ Coal	1,200	80	2019-2044	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
8	PT Sumber Segara Primadaya	Clacap, Jawa Tengah/ Central Java	Batubara/ Coal	1,000	86	2018-2048	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
9	PT Orebon Energi Prasarana	Orebon, Jawa Barat/ West Java	Batubara/ Coal	1,000	86	2019-2044	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
10	PT Shenhua Guohua Lion Power Indonesia	Sumatera Selatan/ South Sumatera	Batubara/ Coal	600	80	2020-2050	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
11	Kons PT Gama Energi Negeri – PT PJB Investasi	Sumatera Utara/ North Sumatera	Batubara/ Coal	600	Th 1-20 (85%), selanjutnya take and pay	2022-2047	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
12	Konsorsium PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi – China Huadian Engineering Co.Ltd - Blackgold Natural Resources Ltd	Riau	Batubara/ Coal	600	80	2023-2048	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
13	Kons. PT Putra Indotenaga – PLN Batubara	Jambi	Batubara/ Coal	600	80	2022-2047	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
14	PT Poso Energy	RLTA Poso	Tenaga Air/ Hydro	515	-	-	PPA

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

No.	Perusahaan/ Company	Proyek/ Project	Bahan bakar/ Fuel	Kapasitas/ Capacity (MW)	AF <sup>5)</sup> (%)	Periode/ Period <sup>6)</sup>	Status
15	PT North Sumatra Hydro Energy	FLTA Batang Toru	Tenaga Air/ Hydro	510	-	2016 - 2046	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
16	PT Meulaboh Pow er Generation	Aceh	Batubara/ Coal	400	80	2021-2041	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
17	Konsorsium PT Pembangkitan Jawa a Bali Investasi – PLN Batubara	Sumatera Selatan/ South Sumatera	Batubara/ Coal	300	80	2021-2046	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
18	PT Bosowa Energi	Jeneponto, Sulawesi Selatan/ South Sulawesi	Batubara/ Coal	250	80	2018-2048	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
19	PT Banyuasin Pow er Energi	Sumatera Selatan/ South Sumatera	Batubara/ Coal	250	80	2020-2050	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
20	PT Medco Ratch Pow er Riau	Pekanbaru, Riau	Gas	250	60	2021-2041	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
21	PT Sorik Marapi Geothermal Pow er	FLTP Sorik Marapi, Sumatera Utara/ North Sumatera	Panas Bumi/ Geothermal	240	90	2020-2050	PPA
22	PT Pertamina Geothermal Energy	FLTP Lumut Batai, Sumatera Selatan/ South Sumatera	Panas Bumi/ Geothermal	220	90	2017-2047	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
23	PT Supreme Energy Rajabasa	FLTP Rajabasa, Lampung	Panas Bumi/ Geothermal	220	90	2023-2053	Eksplorasi/ Exploration
24	PT Supreme Energy Muaralaboh	FLTP Muaralaboh, Sumatera Barat/ West Sumatera	Panas Bumi/ Geothermal	220	90	2017-2047	Eksplorasi/ Exploration
25	PT Supreme Energy Rantau Dedap	FLTP Rantau Dadap, Sumatera Selatan/ South Sumatera	Panas Bumi/ Geothermal	220	90	2019-2049	Eksplorasi/ Exploration
26	Star Energy Geothermal (Wayang Windu)	Wayang Windu #3,4, Jawa a Barat/ West Java	Panas Bumi/ Geothermal	220	85	2020-2050	Eksplorasi/ Exploration
27	PT Sejahtera Alam Energi	FLTP Baturaden, Jawa a Tengah/ Central Java	Panas Bumi/ Geothermal	220	90	2024-2054	PPA
28	PT SKS Listrik Kalimantan	Gunung Mas, Kalimantan Tengah/ Central Borneo	Batubara/ Coal	200	80	2019-2044	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
29	PT Tanjung Pow er Indonesia	Kalimantan Selatan/ South Borneo	Batubara/ Coal	200	80	2019-2044	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
30	PT Graha Pow er Kaltim	Kalimantan Timur/ East Borneo	Batubara/ Coal	200	80	2019-2044	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
31	PT Indonesia Energi Dinamika (INDOEKA)	Kalimantan Timur/ East Borneo	Batubara/ Coal	200	80	2020-2045	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
32	PT Tenaga Listrik Bengkulu	Bengkulu	Batubara/ Coal	200	80	2019-2044	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
33	PT GCL Indo Tenaga	Kalimantan Barat/ West Borneo	Batubara/ Coal	200	80	2019-2044	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
34	Konsorsium PT Putra Indotenaga – PLN Batubara	Kalimantan Timur/ East Borneo	Batubara/ Coal	200	80	2022-2047	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
35	Konsorsium PT Putra Indotenaga – PLN Batubara	Kalimantan Timur/ East Borneo	Batubara/ Coal	200	80	2022-2047	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
36	Konsorsium PT Putra Indotenaga – PLN Batubara	Kalimantan Timur/ East Borneo	Batubara/ Coal	200	80	2022-2047	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
37	Konsorsium PT Putra Indotenaga – PLN Batubara	Kalimantan Barat/ West Borneo	Batubara/ Coal	200	80	2021-2046	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
38	Konsorsium PT Pembangkitan Jawa a Bali Investasi – PT PLN Batubara	Kalimantan Selatan dan Tengah/ South and Central Borneo	Batubara/ Coal	200	80	2022-2047	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
39	Konsorsium PT Pembangkitan Jawa a Bali Investasi – PT PLN Batubara	Kalimantan Selatan dan Tengah/ South and Central Borneo	Batubara/ Coal	200	80	2022-2047	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
40	Konsorsium PT Pembangkitan Jawa a Bali Investasi – PT PLN Batubara	Kalimantan Selatan dan Tengah/ South and Central Borneo	Batubara/ Coal	200	80	2022-2047	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
41	PT Bakrie Darmakarya Energi	FLTP Telaga Ngebel, Jawa a Timur/ East Java	Panas Bumi/ Geothermal	165	90	2023-2053	PPA
42	PT Geo Dipa Energi	Deng #2,3 Jawa a Tengah/ Central Java	Panas Bumi/ Geothermal	115	85	2021-2051	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
43	PT Medco Cahaya Geothermal	FLTP Ijen, Jawa a Timur/ East Java	Panas Bumi/ Geothermal	110	85	2021-2051	Eksplorasi/ Exploration
44	PT Sintesa Banten Geothermal	FLTP Raw a Dano, Banten	Panas Bumi/ Geothermal	110	90	2022-2052	PPA
45	PT Pertamina Geothermal Energy	FLTP Hujulais	Panas Bumi/ Geothermal	110	85	-	Eksplorasi/ Exploration
46	PT Pertamina Geothermal Energy	FLTP Sungai Penuh	Panas Bumi/ Geothermal	110	85	-	Eksplorasi/ Exploration
47	PT DSS Pow er Kendari	Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara/ Southeast Sulawesi	Batubara/ Coal	100	80	2019-2044	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
48	PT Gorontalo Listrik Perdana	Gorontalo	Batubara/ Coal	100	80	2020-2045	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
49	PT Muntok Listrik Utama	Bangka Belitung	Gas	100	85% (Y:1) 60% (Y:2-end)	2019-2039	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
50	PT Mnahasa Cahaya Lestari	Sulawesi Utara/ North Sulawesi	Batubara/ Coal	100	80	2021-2046	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
51	PT Pembangkitan Jawa a Bali	Aceh	Gas	100	80	2019-2039	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
52	PT Malea Energy	FLTA Malea	Tenaga Air/ Hydro	90	60	30	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
53	PT Pertamina Geothermal Energy	FLTP Kotamobagu	Panas Bumi/ Geothermal	80	90	-	Eksplorasi/ Exploration
54	PT UFC Sidrap Bayu Energi	FLTBayu Sidrap, Sulawesi Selatan/ South Sulawesi	Angin/ Wind	70	-	2019-2049	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
55	PT Energy Bayu Jeneponto	FLTBayu Tolo, Jeneponto, Sulawesi Selatan/ South Sulawesi	Angin/ Wind	60	-	20	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
56	PT Pembangkitan Jawa a Bali	Sulawesi Tengah/ Central Sulawesi	Gas	60	80	2018-2038	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
57	PT Tanggamus Electric Pow er	FLTA Semangka	Tenaga Air/ Hydro	56	57	2019-2049	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
58	PT Spring Energy Sentosa	FLTP Guci, Jawa a Tengah/ Central Java	Panas Bumi/ Geothermal	55	90	2024-2054	PPA
59	PT Indo Rildatama Pow er	Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur/ East Borneo	Batubara/ Coal	55	80	2017-2047	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
60	PT Jabar Rekind Geothermal	FLTP Cisilok Cusukarame, Jawa a Barat/ West Java	Panas Bumi/ Geothermal	45	90	2025-2055	PPA
61	PT Rekind Daya Mamuju	Mamuju, Sulawesi Barat/ West Sulawesi	Batubara/ Coal	50	80	2017-2042	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
62	PT Pembangkitan Jawa a Bali Lainnya/ Others <sup>7)</sup>	Aceh	Gas	50	80	2018-2038	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
	Jumlah/ Total			1,150			
				<b>26,261</b>			

- a) Perjanjian berlaku sejak ditandatangani, dan jual beli tenaga listrik berlaku antara 20 sampai dengan 30 tahun sejak tanggal operasi komersial.
- b) AF= Faktor pemasokan tenaga yang harus diserap Perusahaan.
- c) Meliputi kontrak dengan 152 IPP, terdiri dari 37 IPP dalam tahap pembangunan dan 43 IPP dalam tahap pembiayaan, dan 72 Power Purchase Agreement berlokasi di berbagai daerah di Indonesia, menggunakan bahan bakar batu bara, panas bumi dan mini hydro dengan kapasitas masing-masing pembangkit kurang dari 50 MW.

- a) The agreements are effective from the date of signing and buying and selling of electricity is valid between 20 to 30 years starting from the commercial operation date.
- b) AF= Power supply factor which should be absorbed by the Company.
- c) Represents contracts with 152 IPPs, consisting of 37 IPPs under construction, 43 IPPs in the financing stage, and 72 Power Purchase Agreement which are located in several areas of Indonesia and are generated by coal, geothermal and mini hydro with each power plant's capacity of less than 50 MW.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Harga tenaga listrik per kWh untuk pembangkitan bahan bakar gas, MFO dan batubara ditetapkan berdasarkan formula tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian yang antara lain mengatur pemulihan biaya modal, pembayaran biaya tetap operasi dan pemeliharaan, biaya bahan bakar dan pembayaran biaya variabel operasi, dan biaya pemeliharaan. Untuk pembangkitan yang menggunakan panas bumi, harga tenaga listrik ditetapkan berdasarkan formula tertentu sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian antara lain *Energy Charge* dan *Capacity Charge*.

*The electricity power price per kWh for gas, MFO and coal power plants are determined by certain formulas as stated in the agreement which regulates, among other subjects, capital cost recovery, fixed operation and maintenance cost payment, fuel expense and variable operation and maintenance cost payment. For geothermal heat power plants, the electricity power price is determined by a certain formula as stated in the agreement, involving, among other things, Energy Charge and Capacity Charge.*

**c. Perolehan barang modal**

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah ikatan perolehan barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan pembangkitan, jaringan transmisi dan distribusi adalah sebagai berikut:

**c. Capital expenditures**

*As of December 31, 2017, total commitments on capital expenditures based on contracts, which are related to procurement of power plants, transmissions and distributions are as follows:*

	<b>Mata uang/ Currencies</b>	<b>Jumlah dalam mata uang asing/ Amount in foreign currencies *)</b>	<b>Setara/ equivalent Rp</b>	
Program percepatan				<i>Fast track program</i>
Kontrak pembangkitan	US\$	194.219.081	2.631.280	<i>Power plant contracts</i>
	Rupiah		1.041.430	
			<u>3.672.710</u>	
Kontrak transmisi	Rupiah		<u>30.148</u>	<i>Transmission contracts</i>
Kontrak konstruksi rutin	US\$	198.532.652	2.689.720	<i>Regular construction contracts</i>
	EUR	225.607.098	3.648.882	
	JPY	30.336.912.086	3.647.055	
	KRW	106.613.124.170	1.353.987	
	Rupiah		<u>37.612.096</u>	
			<u>48.951.740</u>	

\*) Dalam jumlah penuh/ *In full amount*

Jumlah diatas adalah diluar dari nilai tersisa pembayaran dimuka yang sudah dibayarkan oleh Perusahaan dan entitas anak sesuai dengan masing-masing kontrak, yang nantinya akan mengurangi pembayaran di masa depan yang dilakukan oleh Perusahaan dan entitas anak.

*The above amount excludes the remaining advance payments that has been paid by the Company and its subsidiaries in accordance with the respective contracts, which then will reduce future payments to be made by the Company and its subsidiaries.*

**Program Percepatan**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 yang kemudian diubah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 tanggal 23 Desember 2009,

**Fast Track Program**

*Based on the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 71 Year 2006 dated July 5, 2006 which was amended by the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 59 dated December 23,*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

*For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

Pemerintah menugaskan Perusahaan untuk membangun PLTU berbahan bakar batubara di 42 lokasi di Indonesia, meliputi 10 pembangkit dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 32 pembangkit dengan jumlah kapasitas 2.769 MW di luar Jawa - Bali.

Kontrak Pembangkitan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan telah menandatangani 37 kontrak EPC meliputi 10 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 27 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 2.489 MW di luar Jawa - Bali. Berdasarkan kontrak EPC tersebut, Perusahaan diharuskan membayar uang muka sekitar 15% dari nilai kontrak dan 85% akan didanai melalui fasilitas kredit perbankan.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan telah membayar uang muka sebesar US\$876.217.780 dan Rp4.790.016 untuk 35 kontrak EPC yang dicatat sebagai pekerjaan dalam pelaksanaan (Catatan 6). Uang muka tersebut didanai dari hasil penerbitan Obligasi Terjamin dan penarikan fasilitas kredit program percepatan.

Kontrak Transmisi

Kontrak transmisi merupakan kontrak untuk peningkatan dan pembangunan transmisi baru dan gardu induk di Jawa dan luar Jawa. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan penarikan fasilitas kredit perbankan.

**Kontrak Konstruksi Rutin**

Ikatan pengadaan barang modal untuk konstruksi rutin merupakan kontrak yang telah ditandatangani untuk tambahan pembangkit listrik dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan pihak luar melalui pinjaman luar negeri, bantuan dan proyek investasi sebagai bagian dari anggaran belanja negara.

*2009, the Government mandates the Company to build coal-fired PLTU at 42 locations in Indonesia, which include 10 power plants with aggregate capacity of 7,490 MW in Java - Bali and 32 power plants with aggregate capacity of 2,769 MW outside Java - Bali.*

Power Plant Contracts

*Until December 31, 2017, the Company signed 37 EPC contracts which consist of 10 electricity power plants with aggregate capacity of 7,490 MW in Java - Bali and 27 electricity power plants with aggregate capacity of 2,489 MW outside Java - Bali. Under the terms of such contracts, the Company is required to pay the contractor a down payment, which is approximately 15% of the contract price and the remaining 85% will be funded through credit facilities from banks.*

*Until December 31, 2017, the Company made a total down payment of US\$876,217,780 and Rp4,790,016 for 35 EPC contracts which is recorded as construction in progress (Note 6). Such down payments are funded by the proceeds of the issued Guaranteed Notes and withdrawal of credit facilities for the fast track program.*

Transmission Contracts

*Transmission contracts are contracts for upgrading and constructing new transmission and sub-stations in Java and outside Java. These projects are financed by the Company's own funds and withdrawal of credit facilities from banks.*

**Regular Construction Contracts**

*Capital expenditure commitments for regular construction represent project contracts signed for additional electricity generating plants and development of the transmission and distribution network. These projects are financed by the Company's own funds and other external funding through offshore loans, grants and investment projects from the State budget.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**d. Fasilitas pinjaman belum digunakan  
Penerusan pinjaman**

Mata uang/ Currencies	Dalam mata uang asing/ In foreign currencies *)	Setara/ Equivalent Rp
US\$	1.918.323.877	25.989.452
EUR	50.914.891	823.478
JPY	99.418.578.000	11.951.942
<b>Jumlah/ Total</b>		<b>38.764.872</b>

\*) Dalam jumlah penuh/ In full amounts

Pada tanggal 31 Desember 2017, fasilitas pinjaman belum digunakan setara Rp17.379.387 dikenakan provisi sebesar 0,10% - 0,40% per tahun, sedangkan fasilitas sebesar Rp21.385.485 tidak dikenakan provisi. Fasilitas ini berakhir antara tahun 2016 sampai dengan 2055.

Perjanjian pinjaman program percepatan

Tujuan fasilitas pinjaman ini adalah untuk membiayai 85% dari nilai kontrak EPC untuk program percepatan. Jangka waktu pinjaman termasuk periode penyediaan kredit selama 36 bulan, dan sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Perpres No. 91 Tahun 2007 pengganti dari Perpres No. 86 Tahun 2006, tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara. Sehubungan dengan pinjaman ini, Perusahaan diwajibkan memenuhi batasan-batasan umum.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, rincian fasilitas pinjaman untuk membiayai program percepatan adalah sebagai berikut:

**d. Unused loan facilities  
Two-step loans**

As of December 31, 2017 the unused facilities equivalent to Rp17,379,387 bear a provision charge of 0.10% - 0.40% per annum, while the remaining facilities of Rp21,385,485 do not bear any provision charge. These facilities will be due between 2016 and 2055.

Loan agreements for fast track program

The purpose of these loan facilities is to finance 85% of the contract price of EPC for the fast track program. The term of the loan includes preparation of credit for 36 months and is fully guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia in accordance with Perpres No. 91 Year 2007, superseding Perpres No. 86 Year 2006, regarding Grant of Government Guarantee for Construction of Coal-Fired Power Plant. In connection with these loans, the Company is obliged to comply with general restrictions.

As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, details of loan facilities to finance the fast track program are as follows:

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ Creditor and project funded	Fasilitas maksimum/ Maximum facility *)	Fasilitas pinjaman belum digunakan/ Unused loan facilities *)	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Periode/ Period **) Tahun/ Year
1	Fasilitas pinjaman dalam Rupiah/ Rupiah loan facilities PT. Bank DKI PLTU Naganraya PLTU 2 Nusa Tenggara Timur/ East Nusa Tenggara PLTU 1 Nusa Tenggara Barat/ West Nusa Tenggara PLTU Sumatera Barat/ West Sumatera PLTU 2 Kalimantan Barat/ West Kalimantan	4,732,000	551,916	1% + JIBOR 3 bulanan/ 3 months	24 April 2009/ April 24, 2009	10

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ Creditor and project funded	Fasilitas maksimum/ Maximum facility *)	Fasilitas pinjaman belum digunakan/ Unused loan facilities *)	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Periode/ Period **)
	PLTU 4 Bangka Belitung PLTU Maluku Utara/ North Maluku PLTU Sulawesi Tengah/ Central Sulawesi PLTU 1 Nusa Tenggara Timur/ East Nusa Tenggara PLTU 2 Sulawesi Utara/ North Sulawesi PLTU Gorontalo PLTU 2 Nusa Tenggara Timur/ East Nusa Tenggara PLTU 1 Nusa Tenggara Barat/ West Nusa Tenggara PLTU 4 Bangka Belitung PLTU 2 Nusa Tenggara Barat/ West Nusa Tenggara PLTU 1 Kalimantan Tengah/ Central Kalimantan					
2	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by Bank DKI/ PLTU Riau Tenayan	2,225,000	116,400	1.50% + JIBOR 3 bulanan/ 3 months	12 November 2015/ November 12, 2015	10
3	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by Bank Negara Indonesia/ PLTU Kalimantan Timur/ East Kalimantan	2,449,963	72,298	1.20% + JIBOR 3 bulanan/ 3 months	17 Desember 2015/ December 17, 2015	10
		<b>9,406,963</b>	<b>740,614</b>			

\*) Dalam jutaan/ In million

\*\*) Termasuk masa tenggang/ Include grace period

Perjanjian pinjaman tidak terkait program  
percepatan

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan  
keuangan konsolidasian, rincian fasilitas  
pinjaman tidak terkait program percepatan  
adalah sebagai berikut:

Loan agreements for non fast track  
program

As of the date of the issuance of the  
consolidated financial statements, details of  
loan facilities non-related to the fast track  
program are as follows:

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ Creditor and project funded	Fasilitas maksimum/ Maximum facility *)	Fasilitas pinjaman belum digunakan/ Unused loan facilities *)	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Premi Asuransi/ Insurance premium *)	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Periode/ Period **)
	<u>Fasilitas pinjaman dalam US\$/ US\$ loan facilities</u>						
1	Asian Development Bank Gardu induk/ Grid	575	289	0.6% - 0.1% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months	--	4 Desember 2015/ December 4, 2015	20
2	Asian Development Bank Gardu induk/ Grid	25	13	1.4% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months	--	4 Desember 2015/ December 4, 2015	20
3	Japan Bank for International Cooperation PLTU Lontar Extension Facility Tr.A	107	101	2.85% + 1.06%	--	14 Maret 2016/ March 14, 2016	15.5
4	Japan Bank for International Cooperation PLTU Lontar Extension Facility Tr.B	72	68	1.1% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months	4.8	14 Maret 2016/ March 14, 2016	15.5
5	International Bank for Reconstruction and Development/ Power distribution development program	500	392	Reference Rate for Loan Curr + Var. Spread	--	20 Mei 2016/ May 20, 2016	20
6	The Export-Import Bank of Korea dan/ and ING Bank a Branch of ING-DiBa AG PLTGU Grati	36	36	2.35% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months	--	24 Juni 2016/ June 24, 2016	14.5
7	The Export-Import Bank of Korea dan/ and ING Bank a Branch of ING-DiBa AG PLTGU Grati	35	35	0.98% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months	2.3	24 Juni 2016/ June 24, 2016	14.5
8	ING Bank, a Branch of ING-DiBa AG PLTGU Grati	17	17	0.98% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months	1.1	24 Juni 2016/ June 24, 2016	14.5
9	Japan Bank for International Cooperation PLTU jaw a 2 Priok Facility Tr.A	27	23	3.52%	0.2	20 Oktober 2016/ October, 20 2016	15
10	Japan Bank for International Cooperation PLTU jaw a 2 Priok Facility Tr.B	18	15	0.7% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months	0.1	20 Oktober 2016/ October, 20 2016	15
11	Islamic Development Bank Power Grid Enhancement Project	330	330	1.30% + SWAP RATE LIBOR 6 bulanan/ 6 months	--	10 Januari 2017/ January 10, 2017	15
12	Japan Bank for International Cooperation Muara Karang	22	22	4.41%	--	10 Maret 2017/ March 10, 2017	15

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ Creditor and project funded	Fasilitas maksimum/ Maximum facility *)	Fasilitas pinjaman belum digunakan/ Unused loan facilities *)	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Premi Asuransi/ Insurance premium *)	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Periode/ Period **)
13	Japan Bank for International Cooperation Muara Karang	15	15	0.70% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months	--	10 Maret 2017/ March 10, 2017	15
14	Sumitomo Mitsui Banking Corporation PLTA Jatigede	73	63	1.43% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months	--	30 Maret 2017/ March 30, 2017	14
15	Japan Bank for International Cooperation PLTU Kalselteng 2 Facility Tr. A	53	53	4.28%	--	20 Juni 2017/ June 20, 2017	15
16	Japan Bank for International Cooperation PLTU Kalselteng 2 Facility Tr. B	36	36	0.8% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months	--	20 Juni 2017/ June 20, 2017	15
17	Asian Development Bank Gardu Induk/ Grid	600	450	0.6% - 0.1% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months	--	10 Oktober 2017/ October 10, 2017	20
18	Credit Agricole CIB Paris PLTGU Muara Taw ar	280	280	0.98% + LIBOR 6 bulanan/ 6 months	6.2	8 November 2017/ November 8, 2017	15
<b>Jumlah dalam US\$/ Total in US\$</b>		<b>2,821</b>	<b>2,238</b>		<b>14.7</b>		
<u>Fasilitas pinjaman dalam EUR/ EUR loan facilities</u>							
1	Agence Francaise De Development Trans GIS	100	96	Floating/ Fix max 5.89%	--	7 Mei 2015/ May 7, 2015	15
2	Agence Francaise De Development Trans Grid	1	1	0%	--	7 Mei 2015/ May 7, 2015	5
3	Kreditanstalt fur Wiederaufbau Suralaya rehabilitation	175	175	2.20%	--	8 Mei 2015/ May 8, 2015	12
4	Kreditanstalt fur Wiederaufbau Kamojang rehabilitation	65	65	2.20%	--	8 Mei 2015/ May 8, 2015	15
5	Kreditanstalt fur Wiederaufbau Kamojang rehabilitation	60	59	1.70%	--	8 Mei 2015/ May 8, 2015	15
6	Kreditanstalt fur Wiederaufbau Transmisi/ Transmission	45	45	1.65%	--	23 Mei 2016/ May 23, 2016	13
7	ING Bank, a Branch of ING-DiBa dan/ and Societe Generale PLTGU Grati	40	40	1.09% + biaya tambahan/ Mandatory cost	3.0	24 Juni 2016/ June 24, 2016	14.5
8	Mizuho Lombok Peaker	74	74	0.84%	--	24 Mei 2017/ May 24, 2017	12
9	Kreditanstalt fur Wiederaufbau Bangkai Peaker	83	83	0.97% or EURIBOR + Margin	5.6	15 September 2017/ September 15, 2017	11.25
10	Kreditanstalt Fur Wiederaufbau Power Plant Kumbih	85	85	1.55%	--	15 Desember 2017/ December 15, 2017	15
<b>Jumlah dalam EUR/ Total in EUR</b>		<b>728</b>	<b>723</b>		<b>8.6</b>		
<u>Fasilitas pinjaman dalam JPY/ JPY loan facilities</u>							
1	Japan Bank for International Cooperation PLTU Lontar	16,430	15,219	1.03% + 0.55%	441	24 Juni 2016/ June 24, 2016	15.5
2	Japan Bank for International Cooperation PLTU Jawa 2	31,763	26,961	1.58%	416	20 Oktober 2016/ October 20, 2016	15
3	Sumitomo Mitsui Banking Corporation Muara Karang	15,449	15,449	1.74%	--	10 Maret 2017/ March 10, 2017	15
4	Japan Bank for International Cooperation PLTU Kalselteng 2	16,939	16,939	1.73%	--	20 Juni 2017/ June 20, 2017	15
<b>Jumlah dalam JPY/ Total in JPY</b>		<b>80,581</b>	<b>74,568</b>		<b>857</b>		
<u>Fasilitas pinjaman dalam Rupiah/ Rupiah loan facilities</u>							
1	PT Bank Rakyat Indonesia	28,000,000	15,042,678	2.45% + Rata-rata deposito berjangka 3 bulanan/ Average time deposit 3 months	--	17 November 2016/ November 17, 2016	1
<b>Jumlah dalam Rupiah/ Total in Rupiah</b>		<b>28,000,000</b>	<b>15,042,678</b>		<b>--</b>		

\*) Dalam jutaan/ In million

\*\*) Termasuk masa tenggang/ Include grace period

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**e. Program operasi dan pemeliharaan**

Untuk meningkatkan dan memulihkan daya guna unit pembangkit sampai pada tingkat tertentu, Perusahaan menandatangani *Operation and Maintenance Agreement* dengan beberapa kontraktor. Nilai kontrak terdiri dari porsi tetap dan tidak tetap. Kontraktor diharuskan memenuhi target tertentu dan akan dikenakan denda jika target tersebut tidak tercapai. Komitmen dengan kontraktor untuk porsi tetap adalah sebagai berikut:

<b>Pembangkitan/ Power plant</b>	<b>Kontraktor/ Contractors</b>	<b>Nilai kontrak Setara/ Contract amount equivalent Rp</b>	<b>Periode/ Period</b>
PLTU Tanjung Jati B	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	2,393,372	2010-2032
PLTU Tanjung Jati B	Konsorsium/ consortium of Fortum Service OY & PT Medco Energy	847,090	2005-2030
<b>Jumlah/ Total</b>		<b>3,240,462</b>	

**e. Operation and maintenance programs**

*In order to improve and restore the performance of generator units up to a certain level, the Company has entered into Operation and Maintenance Agreements with contractors. The contract payment comprises fixed and variable portions. The contractors have to meet certain targets and will be charged a penalty if these targets are not met. The commitments with the contractors for the fixed portion are as follows:*

**f. Litigasi**

(i) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Pangemanan Nelwan dan kawan-kawan sebagai ahli waris dari Hendrik Meinder Nelwan pada tahun 2001 terhadap tanah yang telah dipergunakan Perusahaan sebagai PLTA Tonselama sebesar Rp54.000 di Pengadilan Negeri Manado. Dalam proses berperkara, mulai dari Tingkat Pertama sampai dengan Tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI Perusahaan kalah.

Pada saat akan dilakukan Eksekusi oleh PN Manado, Perusahaan melakukan Gugatan Perlawanan atas Eksekusi (Derden Verzet) terhadap tanah tersebut mengingat Perusahaan merupakan bezitter yang baik dengan menguasai tanah serta mengoperasikan PLTA Tonselama selama lebih dari 50 tahun. Saat ini perkara Derden Verzet tersebut di tingkat Peninjauan Kembali telah diputus bahwa Perusahaan kalah.

**f. Litigation**

(i) *In 2001, Pangemanan Nelwan and co-claimants as heirs of Hendrik Meinder Nelwan filed claims for compensation over the land rights that has been utilized by the Company as hydroelectric power plant PLTA Tonselama, amounting to Rp54,000 in the District Court of Manado. In the process of court trial from District Court to Review in the Supreme Court, the Company lost.*

*In the preparation of Execution by District Court of Manado, the Company filed a Third Resistance of the Execution (Derden Verzet) of the land rights considering the Company is a good bezitter that has been effectively controlling and operating PLTA Tonselama for more than 50 years. The Derden Verzet is still in the process of Review in the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the Company loss.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Perusahaan melaporkan perbuatan tindak pidana pemalsuan dokumen terhadap Hendrik Meinder Nelwan (Penggugat) atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Saat ini laporan pidana tersebut telah diputus pada tingkat Kasasi dengan amar putusan Hendrik Meinder Nelwan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan dokumen palsu dalam perkara perdata PLTA Tonsealama.

Atas putusan pidana tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Manado mengeluarkan Penetapan yang menyampaikan eksekusi PLTA Tonsealama dapat dilaksanakan apabila putusan Kasasi pengadilan Pidana berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya berdasarkan putusan kasasi pidana pemalsuan dokumen perkara PLTA Tonsealama, Perseroan sedang mempersiapkan upaya hukum Peninjauan Kembali yang kedua di Mahkamah Agung.

- (ii) Pada tanggal 21 Agustus 2014, Perusahaan menghadapi gugatan yang diajukan oleh Ny. Nesah binti Sadih sehubungan dengan sengketa tanah PLTGU Muara Tawar. Nilai gugatan sebesar Rp59.264. Perusahaan memenangkan perkara ini di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian penggugat mengajukan banding. Saat ini perkara masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung dan Perusahaan telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 06 Juni 2017.
- (iii) Pada tanggal 11 Januari 2016, Perusahaan menghadapi gugatan dari Netti Pardosi dan Pandapotan Kasmin Simanjuntak terkait pembebasan lahan yang dilakukan Perusahaan atas tanah seluas 6,2 Ha untuk pembangunan PLTA Asahan III. Penggugat menuntut agar pembebasan lahan tersebut dibatalkan. Nilai gugatan ini sebesar Rp54.548. Pengadilan Negeri Balige menerima gugatan Penggugat dengan

*The Company has filed claims for criminal action regarding document forgery in the name of Hendrik Meinder Nelwan that were used as evidence materials against the Company for civil action. The Supreme Court of the Republic of Indonesia has ruled that Hendrik Meinder Nelwan is proven and reassured of doing a criminal action by using false documents in the civil case of PLTA Tonsealama.*

*Based on the criminal verdict, the Chief of the District Court of Manado has released a verdict stating that the execution of PLTA Tonsealama has to wait for the verdict from the Criminal Court. Furthermore, based on the final verdict of the Criminal Cassation of PLTA Tonsealama, the Company is preparing for a second Review in the Supreme Court.*

- (ii) *On August 21, 2014, the Company faced an unlawful act from Ny. Nesah binti Sadih relating to disputes regarding PLTGU Muara Tawar land rights. The amount of the claim was Rp59,264. The Company won the case in the District Court of South Jakarta, Subsequently, the plaintiff submitted an appeal. Currently, the case is still in process in the Supreme Court and the Company has filed a Contra Cassation on June 6, 2017.*
- (iii) *On January 11, 2016, the Company faced a lawsuit from Netti Pardosi and Pandapotan Kasmin Simanjuntak regarding land rights acquisition by the Company on an area of 6.2 Ha that is used for construction of PLTA Asahan III. Plaintiffs demanded that the land rights acquisition to be cancelled. The lawsuit amounted to Rp54,458. District Court of Balige accepted the Plaintiffs' suit on September 6, 2016 and PLN*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

*For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

putusan tanggal 6 September 2016 dan PLN menyatakan banding pada tanggal 15 September 2016. Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dengan putusan tertanggal 7 Februari 2017. Atas Putusan Banding tersebut PLN menyatakan mengajukan kasasi pada tanggal 17 April 2017 dan saat ini masih dalam pemeriksaan Mahkamah Agung.

- (iv) Pada tanggal 20 September 2017 Perusahaan menghadapi gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Putera Daya Perkasa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap aset PLN berupa Gardu Induk 150 KV yang terletak di Kawasan Industri Pasar Kemis. Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp86.194. Saat ini perkara masih dalam tahap proses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- (v) Perusahaan dan entitas anak juga menghadapi gugatan ganti rugi dalam jumlah yang tidak material di beberapa lokasi bangunan jaringan transmisi/ distribusi, perselisihan dengan karyawan, perkara dengan pelanggan dan pemasok. Manajemen berpendapat klaim-klaim tersebut tidak material dan tidak mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan.

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, hasil litigasi-litigasi di atas belum dapat dipastikan dan estimasi andal tidak dapat ditentukan pada saat ini, atau Perusahaan memiliki dasar yang kuat dalam kasus ini karena keputusan pengadilan terakhir menguntungkan Perusahaan dan entitas anak, sehingga tidak ada provisi kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian ini.

*filed an appeal on September 15, 2016. The High Court of North Sumatera denied the Company's appeal and strengthen the District Court verdict on February 7, 2017. On the appeal related to the decision, the Company submitted a Cassation on April 17, 2017 to the Supreme Court and still currently for supreme court examination.*

- (iv) On September 20, 2017, the Company faced a lawsuit filled by PT Putera Daya Perkasa in the District Court of South Jakarta against PLN assets in the form of Substations 150 KV which is located in Kemis Market. The plaintiff demanded compensation amounting to Rp86,194. The case is currently still on process in the District Court of South Jakarta.*
- (v) The Company and its subsidiaries also face claims for compensation of losses, which are immaterial in amount, in several areas of the Company's transmission/ distribution facilities, disputes with the Company's employees and cases with customers and suppliers. Management believes that such claims are not material and will not significantly affect the Company's operations.*

*As of the completion date of these consolidated financial statements, the results of the above litigations are either still uncertain and there are no reliable estimate that can be made at this point, or the Company has strong grounds supporting the case as the recent court decisions were in favor of the Company and subsidiaries, therefore no provision has been recorded in these consolidated financial statements.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**55. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko  
Keuangan dan Risiko Modal**

**55. Financial Instruments, Financial Risk and  
Capital Risk Management**

**a. Kategori dan klasifikasi instrumen  
keuangan**

Tabel berikut ini mengungkapkan rincian instrumen keuangan Perusahaan dan entitas anak berdasarkan klasifikasi aset keuangan:

**a. Categories and classes of financial  
instruments**

The following table discloses the details of the Company and its subsidiaries' financial asset classifications:

		2017				
		Klasifikasi instrumen keuangan/ Financial instrument classification				
		Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables Rp	Tersedia untuk dijual/ Available- for-sale Rp	Jumlah aset dan liabilitas keuangan/ Total of financial assets and liabilities Rp		
<b>Aset keuangan</b>					<b>Financial assets</b>	
<b>Aset tidak lancar</b>					<b>Non-current assets</b>	
	Piutang pihak berelasi	237,181	--	237,181	Receivables from related parties	
	Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	7,487,709	--	7,487,709	Restricted cash in banks and time deposits	
	Piutang lain-lain	634,949	--	634,949	Other receivables	
	Aset tidak lancar lain	--	3,964	3,964	Other non-current assets	
	<b>Jumlah aset tidak lancar</b>	<b>8,359,839</b>	<b>3,964</b>	<b>8,363,803</b>	<b>Total non-current assets</b>	
<b>Aset lancar</b>					<b>Current assets</b>	
	Kas dan setara kas	42,291,959	--	42,291,959	Cash and cash equivalents	
	Investasi jangka pendek	286,697	--	286,697	Short-term investments	
	Piutang usaha	22,466,843	--	22,466,843	Trade receivables	
	Piutang subsidi listrik	7,588,977	--	7,588,977	Receivables on electricity subsidy	
	Piutang lain-lain	1,672,237	--	1,672,237	Other receivables	
	Piutang pihak berelasi	5,294	--	5,294	Receivables from related parties	
	<b>Jumlah aset lancar</b>	<b>74,312,007</b>	<b>--</b>	<b>74,312,007</b>	<b>Total current assets</b>	
	<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>82,671,846</b>	<b>3,964</b>	<b>82,675,810</b>	<b>Total financial assets</b>	
		2016				
		Klasifikasi instrumen keuangan/ Financial instruments classification				
		Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables Rp	Tersedia untuk dijual/ Available- for-sale Rp	Jumlah aset dan liabilitas keuangan/ Total of financial assets and liabilities Rp		
<b>Aset keuangan</b>					<b>Financial assets</b>	
<b>Aset tidak lancar</b>					<b>Non-current assets</b>	
	Piutang pihak berelasi	263,064	--	263,064	Receivables from related parties	
	Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	7,464,260	--	7,464,260	Restricted cash in banks and time deposits	
	Piutang lain-lain	350,465	--	350,465	Other receivables	
	Aset tidak lancar lain	--	967	967	Other non-current assets	
	<b>Jumlah aset tidak lancar</b>	<b>8,077,789</b>	<b>967</b>	<b>8,078,756</b>	<b>Total non-current assets</b>	
<b>Aset lancar</b>					<b>Current assets</b>	
	Kas dan setara kas	41,909,223	--	41,909,223	Cash and cash equivalents	
	Investasi jangka pendek	374,771	--	374,771	Short-term investments	
	Piutang usaha	21,710,961	--	21,710,961	Trade receivables	
	Piutang subsidi listrik	12,446,110	--	12,446,110	Receivables on electricity subsidy	
	Piutang lain-lain	356,155	--	356,155	Other receivables	
	Piutang pihak berelasi	36,548	--	36,548	Receivables from related parties	
	Aset lancar lainnya	5,915	--	5,915	Other current assets	
	<b>Jumlah aset lancar</b>	<b>76,839,683</b>	<b>--</b>	<b>76,839,683</b>	<b>Total current assets</b>	
	<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>84,917,472</b>	<b>967</b>	<b>84,918,439</b>	<b>Total financial assets</b>	

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Seluruh liabilitas keuangan milik Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan rincian sebagai berikut:

*All of the Company and its subsidiaries' financial liabilities are classified as financial liabilities measure at amortized cost, details are as follows:*

	<u>2017</u> Rp	<u>2016</u> Rp	
<b><u>Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan amortisasi</u></b>			<b><u>Amortised cost measured at financial liabilities</u></b>
<b><u>Liabilitas jangka panjang</u></b>			<b><u>Non-current liabilities</u></b>
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun			<i>Long-term liabilities - net of current maturities</i>
Penerusan pinjaman	31,485,476	29,133,756	<i>Two-step loans</i>
Utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah Non-bank	6,309,173	7,257,810	<i>Government and non-bank Government Financial Institution loan</i>
Utang sewa pembiayaan	15,713,269	17,933,075	<i>Lease liabilities</i>
Utang bank	116,017,364	100,362,498	<i>Bank loan</i>
Utang obligasi dan sukuk ijarah	100,440,360	68,824,683	<i>Bonds payable and sukuk ijara</i>
Utang listrik swasta	7,026,434	7,315,422	<i>Electricity purchase payable</i>
Utang KIK - EBA	2,907,986	--	<i>KIK - EBA loans</i>
Utang pihak berelasi	794	2,301	<i>Payable to related parties</i>
Utang lain-lain	940,154	155,781	<i>Other payables</i>
Jumlah liabilitas jangka panjang	<u>280,841,010</u>	<u>230,985,326</u>	<i>Total non-current liabilities</i>
<b><u>Liabilitas jangka pendek</u></b>			<b><u>Current liabilities</u></b>
Utang usaha	43,711,425	30,192,084	<i>Trade payables</i>
Uang jaminan langganan	12,642,333	12,049,554	<i>Customers' security deposits</i>
Utang biaya proyek	723,992	384,739	<i>Project cost payable</i>
Biaya yang masih harus dibayar	5,570,222	4,484,742	<i>Accrued expenses</i>
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun			<i>Current maturities of long-term liabilities</i>
Penerusan pinjaman	2,735,992	2,562,332	<i>Two-step loans</i>
Utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah Non-bank	1,043,793	1,043,793	<i>Government and non-bank Government Financial Institution loan</i>
Utang sewa pembiayaan	4,871,908	3,789,317	<i>Lease liabilities</i>
Utang bank	26,548,747	26,394,780	<i>Bank loan</i>
Utang obligasi dan sukuk ijarah	914,000	9,568,000	<i>Bonds payable and sukuk ijara</i>
Utang listrik swasta	349,968	328,683	<i>Electricity purchase payable</i>
Utang KIK - EBA	630,600	--	<i>KIK - EBA loans</i>
Utang lain-lain	18,339,768	15,716,446	<i>Other payables</i>
Jumlah liabilitas jangka pendek	<u>118,082,748</u>	<u>106,514,470</u>	<i>Total financial liabilities</i>
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b><u>398,923,758</u></b>	<b><u>337,499,796</u></b>	<b><i>Total financial liabilities</i></b>

**b. Manajemen risiko modal**

Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Perusahaan dan entitas anak terdiri dari pinjaman (Catatan 23, 24, 25, 26, 27 dan 28) dan ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal yang ditempatkan, saldo laba (Catatan 20), dan tambahan modal disetor (Catatan 21).

**b. Capital risk management**

*The Company and its subsidiaries manage capital risk to ensure that they will be able to continue as a going concern and to ensure compliance with the covenants of the capital adequacy ratio. The Company and its subsidiaries' capital structure consists of debt (Notes 23, 24, 25, 26, 27 and 28) and equity shareholders of the holding that consists of capital stock, retained earnings (Note 20) and additional paid-in capital (Note 21).*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Dewan Direksi Perusahaan dan entitas anak secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan Perusahaan dan entitas anak. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Batasan pinjaman Perusahaan mensyaratkan antara lain pemenuhan rasio pinjaman terhadap ekuitas dan rasio kecukupan modal. Manajemen secara berkala memonitor persyaratan tersebut untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran dalam batasan pinjaman Perusahaan.

Perusahaan dan entitas anak berusaha untuk meminimalkan biaya pinjaman sehingga dapat memaksimalkan nilai Perusahaan dan entitas anak. Oleh karena itu, kebijakan Perusahaan dan entitas anak dalam mencari pendanaan melalui utang selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

**c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan**

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan dan entitas anak adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan dan entitas anak beroperasi dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

Dalam pengelolaan risiko, Perusahaan membentuk Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan ("DIVMRK") yang bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan, kerangka kerja, pedoman penerapan manajemen risiko dan infrastruktur pengelolaan risiko, serta memastikan implementasi manajemen risiko tersebut di lingkungan Perusahaan. Divisi ini juga bertugas untuk memfasilitasi penyusunan profil risiko yang bersifat strategis sebagai himbuan awal kepada manajemen Perusahaan dan entitas anak. DIVMRK bertanggung jawab kepada Direktur Perencanaan Korporat ("DIRREN").

*The Board of Directors of the Company and its subsidiaries periodically review the Company and its subsidiaries' capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks.*

*The Company's loan covenants require among other things, the fulfillment of a certain debt to equity ratio and capital adequacy ratio. Management regularly monitors such requirements to ensure that there are no defaults on the loans of the Company.*

*The Company and its subsidiaries aim to minimize the cost of debt in order to maximize their value. Therefore, in their financing policies, the Company and its subsidiaries always take into account the financial risk that may arise in the future.*

**c. Financial risk management objectives and policies**

*The objectives and policies of the Company and its subsidiaries' financial risk management are to ensure that adequate financial resources are available for the operation and development of their business, while managing their exposure to market risks (including foreign currency risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Company and its subsidiaries operate within defined policies approved by the Board of Directors.*

*In managing those risks, the Company established a Risk Management and Compliance Division ("DIVMRK") which is responsible for the preparation of the policies, the relevant frameworks, implementation guideline and the necessary risk management infrastructure to ensure the implementation of risk management in the Company's environment. The division is also established to facilitate a strategic risk profile as an early warning to the Company and its subsidiaries' management. DIVMRK is responsible to the Corporate Planning Director ("DIRREN").*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Perusahaan telah menetapkan taksonomi risiko dengan membagi risiko menjadi lima kelompok yaitu risiko strategis, risiko keuangan, risiko operasional, risiko proyek, dan risiko kepatuhan. Risiko keuangan diantaranya adalah risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Dalam mengelola risiko, Perusahaan mempertimbangkan skala prioritas yang didasarkan pada tingkat risikonya. Tingkat risiko ditentukan berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya dan skala dampak yang ditimbulkan.

Terkait dengan risiko keuangan, Perusahaan telah menetapkan kebijakan manajemen untuk melakukan transaksi lindung nilai. Sebagai salah satu BUMN, kebijakan manajemen yang telah disetujui menjadi sangat penting agar tidak timbul masalah pada waktu pelaksanaan akuntansi lindung nilai tersebut. Seluruh instrumen derivatif dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar dengan menggunakan kurs Bloomberg pada tanggal laporan. Aset dan liabilitas derivatif disajikan sebesar keuntungan maupun kerugian yang belum direalisasi dari kontrak derivatif. Kontrak derivatif Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sebagai Aset Keuangan yang diukur pada FVTPL. Transaksi ini semata-mata dimaksudkan untuk memitigasi risiko nilai tukar, tidak untuk diperdagangkan, dan memastikan ketersediaan likuiditas valas untuk pembayaran sebagian kewajiban valas yang jatuh tempo dalam jangka waktu 1-3 bulan pada periode pelaporan Perusahaan dan entitas anak. Lihat Catatan 3 untuk kebijakan akuntansi untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan dan Catatan 55 untuk klasifikasi instrumen keuangan. Perusahaan dan entitas anak tidak menerapkan akuntansi lindung nilai atas transaksi-transaksi tersebut.

*The Company has established risk taxonomy by dividing risk into five categories: strategic risk, financial risk, operational risk, project risk and compliance risk. Financial risk includes market risk (including foreign currency risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. In managing those risks, the Company considers prioritization based on risk level. Risk level is determined by the level of possibility and scale of potential impact.*

*Related to financial risks, the Company has established management's policy related to hedging transactions. As a BUMN, the approved management policy is very important in order to avoid any issues that may arise during the implementation of such hedging programs. All derivative instruments are recognized in the consolidated statement of financial position at their fair values. Fair value is determined based on market value using the Bloomberg rate at the reporting date. Derivative assets or liabilities are presented at the amount of unrealized gain or loss from derivative contracts. The Company and its subsidiaries derivative contracts are classified as Financial Assets measured in FVTPL. These transactions are solely intended for mitigating foreign exchange risk, not for trading and ensuring the availability of foreign currency liquidity for principal and interest payment due in the 1-3 months of the Company and its subsidiaries reporting period. Refer to Note 3 for the accounting policy of financial assets and liabilities, as well as Note 55 for the financial instruments classification. The Company and its subsidiaries does not apply hedge accounting on those transactions.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**i. Manajemen risiko mata uang asing**

Perusahaan dan entitas anak memiliki banyak transaksi dan sumber pendanaan dalam mata uang asing. Sebagai akibatnya timbul eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Perusahaan dan entitas anak telah melakukan diskusi dengan Bank Indonesia ("BI") untuk mendapatkan pemahaman komprehensif atas keadaan pasar. Perusahaan dan entitas anak kemudian akan mempertimbangkan keadaan pasar ke dalam proyeksi keuangan internal mereka dan mengembangkan strategi yang telah disetujui bersama untuk memitigasi eksposur risiko mata uang asing dengan membeli instrumen mata uang asing yang dibutuhkan disaat yang tepat.

Jumlah eksposur mata uang asing bersih Perusahaan dan entitas anak pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 52.

**Sensitivitas mata uang asing**

Tabel di bawah ini memaparkan rincian sensitivitas Perusahaan dan entitas anak untuk setiap 10% kenaikan dan penurunan Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan. Kenaikan dan penurunan 10% menggambarkan penilaian manajemen terhadap perubahan yang rasional pada nilai tukar dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Analisis sensitivitas ini mencakup saldo item moneter setelah pajak dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasi pada akhir tahun untuk 10% perubahan dalam nilai tukar mata uang asing.

Analisa sensitivitas ini tidak memperhitungkan dampak dan perubahan kurs mata uang asing yang dapat dikapitalisasi sebagai aset pekerjaan dalam penyelesaian sesuai dengan PSAK 26: Biaya Pinjaman.

**i. Foreign currency risk management**

*The Company and its subsidiaries undertake many transactions and funding sources denominated in foreign currencies. Consequently, there is exposures to exchange rate fluctuations.*

*The Company and its subsidiaries held regular discussions with Bank Indonesia ("BI") to get a comprehensive understanding of the market outlook. The Company and its subsidiaries then incorporated this outlook into its internal financial forecast and developed a concerted strategy to mitigate its foreign currency exposure by purchasing the required foreign currency denominated instruments at the right time.*

*The Company and its subsidiaries' foreign currency exposure as of the reporting date is disclosed in Note 52.*

**Foreign currency sensitivity**

*The following table explains the details of the Company's and its subsidiaries' sensitivity to a 10% increase and decrease in Rupiah against the relevant foreign currencies. This 10% increase or decrease represents management's assessment of the reasonably possible changes in foreign currency rates considering the current economic conditions. The sensitivity analysis includes after tax outstanding foreign denominated monetary items and adjusts their translation at the end of the year for a 10% change in foreign currency rates.*

*This sensitivity analysis does not consider the potential changes to the amount of foreign exchange differences that can be capitalized as construction in progress assets in accordance with SFAS 26: Borrowing Costs.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

		Dampak terhadap laba setelah pajak/ Effect to profit after tax *)					
		2017					
		USD		JPY			
		10%	-10%	10%	-10%		
<b>Aset keuangan</b>							<b>Financial assets</b>
Piutang pihak berelasi	(16,716,323)		16,716,323	--	--		Receivables from related parties
Rekening dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	(46,410,310)		46,410,310	(474,255,536)	474,255,536		Restricted cash in banks and time deposits
Kas dan setara kas	(548,581,755)		548,581,755	(8,562,612)	8,562,612		Cash and cash equivalents
Jumlah aset keuangan	(611,708,388)		611,708,388	(482,818,148)	482,818,148		Total financial assets
<b>Liabilitas keuangan</b>							<b>Financial liabilities</b>
Penerusan pinjaman	975,383,820		(975,383,820)	1,477,432,120	(1,477,432,120)		Two-step loans
Utang sewa pembiayaan	84,948,291		(84,948,291)	1,360,633,793	(1,360,633,793)		Lease liabilities
Utang bank dan surat hutang jangka menengah	3,076,033,894		(3,076,033,894)	(52,039,683)	52,039,683		Bank loans and medium term notes
Utang obligasi	6,550,050,000		(6,550,050,000)	--	--		Bonds payable
Utang listrik sw asta	548,656,650		(548,656,650)	--	--		Electricity purchase payable
Utang lain-lain	363,730,176		(363,730,176)	137,211	(137,211)		Other payables
Utang biaya proyek	33,189,353		(33,189,353)	430,999	(430,999)		Project cost payable
Utang usaha	548,027,544		(548,027,544)	--	--		Trade payables
Biaya masih harus dibayar	135,233,100		(135,233,100)	39,481,195	(39,481,195)		Accrued expenses
Jumlah liabilitas keuangan	12,315,252,828		(12,315,252,828)	2,826,075,635	(2,826,075,635)		Total financial liabilities
<b>Jumlah - bersih</b>	<b>11,703,544,440</b>		<b>(11,703,544,440)</b>	<b>2,343,257,487</b>	<b>(2,343,257,487)</b>		<b>Total - net</b>
		Dampak terhadap laba setelah pajak/ Effect to profit after tax *)					
		2017					
		EUR		Lain-lain/Others *)			
		10%	-10%	10%	-10%		
<b>Aset keuangan</b>							<b>Financial assets</b>
Kas dan setara kas	(8,838,125)		8,838,125	--	--		Cash and cash equivalents
Jumlah aset keuangan	(8,838,125)		8,838,125	--	--		Total financial assets
<b>Liabilitas keuangan</b>							<b>Financial liabilities</b>
Penerusan pinjaman	(27,681,984)		27,681,984	(11,954,791)	11,954,791		Two-step loans
Utang bank dan surat hutang jangka menengah	(142,655,274)		142,655,274	--	--		Bank loans and medium term notes
Utang lain-lain	(7,666,518)		7,666,518	--	--		Other payables
Utang biaya proyek	(2,268,186)		2,268,186	--	--		Project cost payable
Utang usaha	(688,569)		688,569	(765,072)	765,072		Trade payables
Biaya masih harus dibayar	(1,124,014)		1,124,014	(124,043)	124,043		Accrued expenses
Jumlah liabilitas keuangan	(182,084,545)		182,084,545	(12,843,906)	12,843,906		Total financial liabilities
<b>Jumlah - bersih</b>	<b>(190,922,670)</b>		<b>190,922,670</b>	<b>(12,843,906)</b>	<b>12,843,906</b>		<b>Total - net</b>
		Dampak terhadap laba setelah pajak/ Effect to profit after tax *)					
		2016					
		USD		JPY			
		10%	-10%	10%	-10%		
<b>Aset Keuangan</b>							<b>Financial assets</b>
Piutang pihak berelasi	19,043		(19,043)	--	--		Receivables from related parties
Rekening dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	45,268		(45,268)	509,802	(509,802)		Restricted cash in banks and time deposits
Kas dan setara kas	179,879		(179,879)	10,584	(10,584)		Cash and cash equivalents
Jumlah aset keuangan	244,190		(244,190)	520,386	(520,386)		Total financial assets
<b>Liabilitas Keuangan</b>							<b>Financial liabilities</b>
Penerusan pinjaman	(759,783)		759,783	(1,557,056)	1,557,056		Two-step loans
Utang sewa pembiayaan	--		--	(1,629,179)	1,629,179		Lease liabilities
Utang bank	(3,012,082)		3,012,082	--	--		Bank loans
Utang obligasi dan sukuk ijarah	(5,038,500)		5,038,500	--	--		Bonds payable and sukuk ijarah
Utang listrik sw asta	(573,308)		573,308	--	--		Electricity purchase payable
Utang lain-lain	(422,138)		422,138	--	--		Other payables
Utang biaya proyek	(19,537)		19,537	(515)	515		Project cost payable
Utang usaha	(420,073)		420,073	(277)	277		Trade payables
Biaya masih harus dibayar	(114,151)		114,151	(36,338)	36,338		Accrued expenses
Jumlah liabilitas keuangan	(10,359,572)		10,359,572	(3,223,365)	3,223,365		Total financial liabilities
<b>Jumlah - bersih</b>	<b>(10,115,382)</b>		<b>10,115,382</b>	<b>(2,702,979)</b>	<b>2,702,979</b>		<b>Total - net</b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ Effect to profit after tax *)				
	2016				
	EUR		Lain-lain/Others **)		
	10%	-10%	10%	-10%	
<b>Aset Keuangan</b>					<b>Financial assets</b>
Kas dan setara kas	7,752	(7,752)	461	(461)	Cash and cash equivalents
Jumlah aset keuangan	7,752	(7,752)	461	(461)	Total financial assets
<b>Liabilitas Keuangan</b>					<b>Financial liabilities</b>
Penerusan pinjaman	(42,222)	42,222	(13,305)	13,305	Two-step loans
Utang bank	(151,485)	151,485	--	--	Bank loans
Utang lain-lain	(50,392)	50,392	(8,252)	8,252	Other payables
Utang biaya proyek	(3,571)	3,571	--	--	Project cost payable
Utang usaha	(11,654)	11,654	(5,121)	5,121	Trade payables
Biaya masih harus dibayar	(1,207)	1,207	(140)	140	Accrued expenses
Jumlah liabilitas keuangan	(260,531)	260,531	(26,818)	26,818	Total financial liabilities
<b>Jumlah - bersih</b>	<b>(252,779)</b>	<b>252,779</b>	<b>(26,357)</b>	<b>26,357</b>	<b>Total - net</b>

\*) Tidak memperhitungkan efek atas kapitalisasi biaya pinjaman

\*\*) Mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara US\$ menggunakan kurs tanggal pelaporan

\*) Not considering the effect of borrowing cost capitalization

\*\*) Other foreign currencies are presented as US\$ equivalent using the exchange rates prevailing at reporting date

**ii. Manajemen risiko tingkat suku bunga**

Perusahaan dan entitas anak memiliki transaksi pada tingkat suku bunga tetap dan tingkat suku bunga mengambang. Transaksi dengan tingkat suku bunga mengambang terekspos terhadap risiko suku bunga arus kas. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Perusahaan dan entitas anak dengan risiko suku bunga nilai wajar. Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko dengan menyeimbangkan porsi pinjaman dengan bunga tetap dan bunga mengambang.

**Sensitivitas tingkat suku bunga**

Analisis sensitivitas berikut telah ditentukan berdasarkan eksposur Perusahaan dan entitas anak terhadap tingkat suku bunga untuk saldo instrumen keuangan terutang setelah pajak pada tanggal pelaporan. Analisis ini disusun dengan mengasumsikan jumlah saldo aset dan liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan, terutang sepanjang tahun. Analisis sensitivitas ini menggunakan asumsi kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin ("bp") pada tingkat bunga yang relevan dengan variabel lain dianggap konstan. Kenaikan dan penurunan sebesar 50 bp merupakan penilaian

**ii. Interest rate risk management**

The Company and its subsidiaries have transactions at fixed and floating interest rates. Transactions at floating interest rates are exposed to cash flow interest rate risk. Borrowing issued at fixed rates exposes the Company and its subsidiaries to fair value interest risk. The Company and its subsidiaries manage the risk by maintaining an appropriate mix of fixed and floating rate borrowings.

**Interest rate sensitivity**

The sensitivity analysis below has been determined based on the Company and its subsidiaries' exposure to interest rates for financial instruments after tax outstanding at the reporting date. The analysis is prepared assuming the amount of assets and liabilities outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year. The sensitivity analysis uses an assumption of a 50 basis point ("bp") increase and decrease in the relevant interest rates with all other variables held constant. A 50 bp increase or decrease represents management's assessment of the



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

apakah nantinya akan bisa membayar atau tidak. Dalam meminimalkan risiko tidak tertagihnya piutang, Perusahaan dan entitas anak menerapkan uang jaminan pelanggan dan melakukan pemutusan sambungan listrik ke pelanggan ditentukan jika pelanggan tidak membayar lewat dari tiga bulan untuk meminimalkan risiko kredit. Untuk kas dan setara kas, Perusahaan dan entitas anak mengelola rekening pada beberapa Bank untuk menghindari konsentrasi kas yang signifikan dengan satu institusi.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Perusahaan dan entitas anak terhadap risiko kredit. Lihat Catatan 55.a untuk rinciannya.

Kualitas kredit piutang usaha

Perusahaan dan entitas anak berkeyakinan bahwa tidak ada risiko kredit kualitas yang buruk karena piutang usaha Perusahaan dan entitas anak tersebar merata atas jumlah pelanggan yang besar yang meliputi berbagai industri dan wilayah geografis. Perusahaan dan entitas anak juga melakukan evaluasi kredit berkelanjutan atas kondisi keuangan piutang secara berkala. Lihat Catatan 14 untuk rincian umur piutang dan analisa cadangan penurunan nilai.

Kualitas kredit piutang subsidi listrik

Perusahaan dan entitas anak berkeyakinan bahwa piutang subsidi listrik dapat diterima sepenuhnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dari Pemerintah Republik Indonesia. Perusahaan dan entitas anak berkeyakinan bahwa tidak ada risiko gagal bayar oleh Pemerintah.

*ability to pay. In minimizing the risk of uncollected receivables, the Company and its subsidiaries collect customers security deposits and will terminate the electricity connection to the customer if a customer does not make payment on time after three months to minimize the Company's credit risk. For cash and cash equivalents, the Company and its subsidiaries maintain accounts with several banks to avoid significant concentration of cash with one institution.*

*The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for losses represents the Company's and its subsidiaries exposure to credit risk. See Note 55.a for details.*

Credit quality of trade accounts receivable

*The Company and its subsidiaries believe that there is no heightened risk of poor credit quality because its trade receivables are spread over a large number of customers across diverse industries and geographic areas. The Company and its subsidiaries also performs ongoing credit evaluation on the financial condition of its accounts receivable. See Note 14 for detailed information of the aging of receivables and impairment assessment of trade receivables.*

Credit quality of electricity subsidy

*The Company and its subsidiaries believes that receivables on electricity subsidy can be fully recovered in time because it is to be collected from the Government of the Republic of Indonesia. The Company and its subsidiaries believes there is no risk of default by the Government.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Kualitas kredit kas, deposito berjangka dan kas yang dibatasi penggunaannya

Perusahaan dan entitas anak menempatkan kas dan setara kas, deposito berjangka dan rekening deposito yang dibatasi penggunaannya pada bank yang memiliki kualitas kredit yang baik. Oleh karena itu, Perusahaan dan entitas anak berkeyakinan bahwa risiko kredit atas aset keuangan ini adalah minimal. Pihak ketiga yang dimaksud termasuk institusi keuangan utama dan BUMN lainnya.

Kualitas kredit piutang lainnya

Piutang lainnya ditagihkan kepada pihak berelasi dan karyawan Perusahaan dan entitas anak. Oleh karena itu, Perusahaan dan entitas anak dapat memonitor kolektibilitas piutang-piutang ini dengan seksama. Perusahaan dan entitas anak memiliki tingkat kolektibilitas yang baik atas piutang-piutang terkait.

Tabel berikut menunjukkan kualitas aset keuangan Perusahaan dan entitas anak sebelum cadangan kerugian penurunan nilai:

Credit qualities of cash, time deposits and restricted cash

The Company and its subsidiaries placed cash and cash equivalents, time deposits and restricted cash with reputable counterparties that have good credit rating or bank standing. Consequently, the Company and its subsidiaries believe that the credit risk of such financial assets is minimal. These counterparties include large financial institutions and other BUMN.

Credit quality of other receivables

Other receivables are to be collected from the Company and its subsidiaries related parties and employees. Thus, the Company and its subsidiaries can closely monitor the collectability of these receivables. The Company and its subsidiaries have a good historical collection rate of these financial assets.

The following table shows the quality of financial assets of the Company and its subsidiaries before allowance for impairment losses:

	2017				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i> Rp	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i> Rp	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i> Rp	Jumlah/ <i>Total</i> Rp	
<b>Aset keuangan</b>					<b>Financial assets</b>
<b>Aset tidak lancar</b>					<b>Non-current assets</b>
Piutang pihak berelasi	237,181	--	--	237,181	<i>Receivables from related parties</i>
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	7,487,709	--	--	7,487,709	<i>Restricted cash in banks and time deposits</i>
Piutang lain-lain	634,949	--	--	634,949	<i>Other receivables</i>
Aset tidak lancar lainnya	3,964	--	--	3,964	<i>Other non-current assets</i>
Jumlah aset tidak lancar	<u>8,363,803</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>8,363,803</u>	<i>Total non-current assets</i>
<b>Aset lancar</b>					<b>Current assets</b>
Kas dan setara kas	42,291,959	--	--	42,291,959	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi jangka pendek	286,697	--	--	286,697	<i>Short-term investments</i>
Piutang usaha	18,252,338	3,036,855	1,177,650	22,466,843	<i>Trade receivables</i>
Piutang subsidi listrik	7,588,977	--	--	7,588,977	<i>Receivables on electricity subsidy</i>
Piutang lain-lain	1,672,237	--	--	1,672,237	<i>Other receivables</i>
Piutang pihak berelasi	5,294	--	--	5,294	<i>Receivables from related parties</i>
Aset lancar lainnya	30,124	--	--	30,124	<i>Other current assets</i>
Jumlah aset lancar	<u>70,127,626</u>	<u>3,036,855</u>	<u>1,177,650</u>	<u>74,342,131</u>	<i>Total current assets</i>
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<u><b>78,491,429</b></u>	<u><b>3,036,855</b></u>	<u><b>1,177,650</b></u>	<u><b>82,705,934</b></u>	<b><i>Total financial assets</i></b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2016			Jumlah/ Total Rp	
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i> Rp	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i> Rp	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i> Rp		
<b>Aset keuangan</b>					<b>Financial assets</b>
<b>Aset tidak lancar</b>					<b>Non-current assets</b>
Piutang pihak berelasi	263,064	--	--	263,064	<i>Receivables from related parties</i>
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	7,464,260	--	--	7,464,260	<i>Restricted cash in banks and time deposits</i>
Piutang lain-lain	350,465	--	--	350,465	<i>Other receivables</i>
Aset tidak lancar lainnya	967	--	--	967	<i>Other non-current assets</i>
Jumlah aset tidak lancar	<u>8,078,756</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>8,078,756</u>	<i>Total non-current assets</i>
<b>Aset lancar</b>					<b>Current assets</b>
Kas dan setara kas	41,909,223	--	--	41,909,223	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi jangka pendek	374,771	--	--	374,771	<i>Short-term investments</i>
Piutang usaha	19,806,412	2,930,391	1,025,842	23,762,645	<i>Trade receivables</i>
Piutang subsidi listrik	12,446,110	--	--	12,446,110	<i>Receivables on electricity subsidy</i>
Piutang lain-lain	2,411,384	--	--	2,411,384	<i>Other receivables</i>
Piutang pihak berelasi	36,548	--	--	36,548	<i>Receivables from related parties</i>
Aset lancar lainnya	5,915	--	--	5,915	<i>Other current assets</i>
Jumlah aset lancar	<u>76,990,363</u>	<u>2,930,391</u>	<u>1,025,842</u>	<u>80,946,596</u>	<i>Total current assets</i>
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<u><b>85,069,119</b></u>	<u><b>2,930,391</b></u>	<u><b>1,025,842</b></u>	<u><b>89,025,352</b></u>	<b><i>Total financial assets</i></b>

**iv. Manajemen risiko likuiditas**

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Perusahaan dan entitas anak akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Perusahaan dan entitas anak. Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan kas, simpanan, fasilitas bank dan cadangan fasilitas pinjaman dengan terus menerus memonitor perkiraan dan realisasi arus kas dan mencocokkan profil jatuh tempo liabilitas keuangan.

Selanjutnya Perusahaan dan entitas anak juga memelihara kecukupan dana dengan cara mempertahankan kecukupan jumlah kas dan setara kas dan investasi jangka pendek yang mudah dikonversi menjadi uang tunai ketika mengalami gangguan yang tak terduga dari penagihan kas.

**iv. Liquidity risk management**

*Liquidity risk is defined as the risk that the Company and its subsidiaries will encounter difficulty in meeting its obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the Board of Directors, which has built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Company and its subsidiaries, short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Company and its subsidiaries manage liquidity risk by maintaining adequate cash, reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial liabilities.*

*In addition, the Company and its subsidiaries maintain an adequate amount of cash and cash equivalents and short-time investments, which may be readily converted to cash upon any unforeseen interruption of their cash collections.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

*For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

Tabel berikut ini memberikan rincian tanggal jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati pada periode 31 Desember 2017. Tabel tersebut telah disusun berdasarkan arus kas liabilitas keuangan yang tidak didiskontokan berdasarkan tanggal paling awal dimana Perusahaan dan entitas anak diwajibkan untuk membayar. Untuk arus bunga dengan tingkat bunga mengambang, nilai arus kas yang tidak terdiskonto diperoleh dari kurva suku bunga pada akhir periode. Untuk liabilitas keuangan yang didenominasi dengan mata uang asing, jumlah yang tidak didiskontokan ditranslasi dengan kurva nilai tukar *forward* yang relevan pada akhir periode pelaporan.

*The following table details the remaining contractual maturity for its financial liabilities with an agreed repayment period as of December 31, 2017. The table has been drawn up based on the undiscounted cash flow of financial liabilities based on the earliest date on which the Company and its subsidiaries are required to pay. To the extent that interest flows are floating rate, the undiscounted cash flow is derived from interest rate curves at the end of the reporting period. For foreign currency denominated financial liabilities, the undiscounted amortization is translated using the relevant forward exchange curve at the end of the reporting period.*

	2017					
	Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ <i>Over one year but not longer than three years</i>	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ <i>Over three years but not longer than five years</i>	Lebih dari lima tahun/ <i>Over five years</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
<b>Liabilitas keuangan</b>						<b>Financial liabilities</b>
Penerusan pinjaman	2,735,992	4,367,399	4,297,084	22,820,993	34,221,468	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan						Government and non-bank Government financial institution loans
Pemerintah non-bank	1,043,793	2,087,585	1,500,000	2,721,588	7,352,966	
Utang sewa pembiayaan	4,871,908	7,560,028	6,219,869	1,933,372	20,585,177	Lease liabilities
Utang bank	26,548,747	30,627,494	34,436,611	50,953,259	142,566,111	Bank loans
Utang obligasi dan sukuk ijarah	914,000	29,349,000	18,743,000	52,348,360	101,354,360	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang listrik sw asta	349,968	761,221	848,708	5,416,506	7,376,403	Electricity purchase payable
Utang KIK - EBA	630,600	1,556,257	1,351,729	--	3,538,586	KIK-EBA loans
Utang pihak berelasi	--	794	--	--	794	Related parties payables
Utang usaha	43,711,425	--	--	--	43,711,425	Trade payables
Uang jaminan langganan	12,642,333	--	--	--	12,642,333	Customer's security deposits
Utang biaya proyek	723,992	--	--	--	723,992	Project cost payable
Biaya masih harus dibayar	11,477,437	--	--	--	11,477,437	Accrued expenses
Utang lain-lain	21,255,272	940,154	--	--	22,195,426	Other payables
<b>Jumlah</b>	<b>126,905,467</b>	<b>77,249,932</b>	<b>67,397,001</b>	<b>136,194,078</b>	<b>407,746,478</b>	<b>Total</b>
	2016					
	Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ <i>Over one year but not longer than three years</i>	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ <i>Over three years but not longer than five years</i>	Lebih dari lima tahun/ <i>Over five years</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
<b>Liabilitas keuangan</b>						<b>Financial Liabilities</b>
Penerusan pinjaman	3,225,020	5,647,585	4,788,322	23,224,184	36,885,111	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan						Government and non-bank Government financial institution loans
Pemerintah non-bank	1,477,709	2,792,908	2,294,957	3,917,838	10,483,412	
Utang sewa pembiayaan	6,015,204	13,055,210	7,174,345	6,143,690	32,388,449	Lease liabilities
Utang bank	37,685,205	42,043,558	39,585,080	51,306,781	170,620,604	Bank loans
Utang obligasi dan sukuk ijarah	16,506,604	23,893,851	39,747,215	48,967,000	129,114,670	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang listrik sw asta	787,756	1,579,268	1,578,912	7,931,753	11,877,689	Electricity purchase payable
Utang pihak berelasi	--	2,301	--	--	2,301	Related parties payables
Utang usaha	30,192,084	--	--	--	30,192,084	Trade payables
Utang jaminan langganan	12,049,554	--	--	--	12,049,554	Customer's security deposits
Utang biaya proyek	384,739	--	--	--	384,739	Project cost payable
Biaya masih harus di bayar	10,644,559	--	--	--	10,644,559	Accrued expenses
Utang lain-lain	18,081,035	155,781	--	--	18,236,816	Other payables
<b>Jumlah</b>	<b>137,049,469</b>	<b>89,170,462</b>	<b>95,168,811</b>	<b>141,491,246</b>	<b>462,879,988</b>	<b>Total</b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**d. Nilai wajar instrumen keuangan**

Kecuali dijabarkan pada tabel berikut ini, manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek, instrumen tersebut dijamin penuh atau mempunyai tingkat suku bunga pasar:

	2017		2016		
	Nilai tercatat/ Carrying amount Rp	Nilai wajar/ Fair value Rp	Nilai tercatat/ Carrying amount Rp	Nilai wajar/ Fair value Rp	
<b>Pinjaman diberikan dan piutang</b>					<b>Loans and receivables</b>
Piutang pihak berelasi	242,475	242,475	299,612	299,191	Receivables from related parties
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	7,487,709	7,487,709	7,464,260	7,867,441	Restricted cash in banks and time deposits
<b>Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi</b>					<b>Liabilities at a amortised cost</b>
Penerusan pinjaman	34,221,468	34,221,468	31,696,088	34,287,857	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan					Government and non-bank Government financial institution loans
Pemerintah non-bank	7,352,966	7,352,966	8,301,603	6,862,736	Lease liabilities
Utang sewa pembiayaan	20,585,177	20,892,122	21,722,392	22,164,687	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang obligasi dan sukuk ijarah	101,354,360	108,501,996	78,392,683	82,902,380	Electricity purchase payable
Utang listrik sw asta	7,376,402	8,295,015	7,644,105	8,683,601	Payable to related parties
Utang pihak berelasi	1,794	1,794	2,301	2,301	Bank loans
Utang bank	142,566,111	143,512,677	126,757,278	126,834,204	

Nilai wajar instrumen keuangan diatas, kecuali untuk utang obligasi, ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan menggunakan suku bunga pasar dengan penyesuaian kredit pada tanggal pelaporan. Nilai wajar instrumen keuangan diatas diklasifikasikan sebagai tingkat dua dalam hirarki nilai wajar.

Nilai wajar dari utang obligasi, ditentukan dengan mengacu pada harga pasar yang dikuotasikan pada tanggal pelaporan. Nilai wajar utang obligasi diatas diklasifikasikan sebagai tingkat satu dalam hirarki nilai wajar.

**e. Aset Derivatif**

Perusahaan melaksanakan *hedging* terbatas untuk memitigasi risiko selisih kurs atas transaksi-transaksi tertentu. Jenis transaksi *hedging* yang dilaksanakan adalah kontrak-kontrak *currency swap* dengan jumlah rincian per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

**d. Fair value of financial instruments**

Except as detailed in the following table, the management considers that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost in the consolidated financial statements approximate their fair values either because of their short-term maturities, because the instruments are fully collateralized or because they carry a market interest rate:

The fair value for the above financial instruments, except for bonds payable, was determined by discounting estimated future cash flows with credit adjusted market interest rates at the reporting date. The fair values of the above financial instruments are within level two of the fair value hierarchy.

The fair value of bonds payable is determined by quoted the closing ask price at the reporting date. The fair values of the above financial instruments are within level one of the fair value hierarchy.

**e. Derivative Asset**

The Company has implemented limited hedge on certain transactions to mitigate its foreign currency exposure. The type of hedge transaction is currency swap contract with details as of December 31, 2017 as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

<u>Pihak lawan/ Counterparties</u>	<u>Jangka waktu hedging/ Hedging periods</u>	<u>Jumlah Notional/ Notional amount Rp</u>	<u>Aset (Liabilitas) Derivatif/ Derivative Assets (Liabilities) Rp</u>
BNI	4 bulan/ months	678,550	11,566
BRI	4 bulan/ months	678,725	11,932
Mandiri	4 bulan/ months	339,675	5,787
BNI	< 1 Bulan/ Months	1,018,300	(423)
BRI	< 1 Bulan/ Months	2,714,525	85
Mandiri	< 1 Bulan/ Months	2,374,825	4
<b>Jumlah/ Total</b>		<b>7,804,600</b>	<b>28,951</b>

**56. Informasi Tambahan terkait Penerapan POJK No. 6**

Sejak 1 Januari 2016, Perusahaan menerapkan secara prospektif POJK No.6 untuk transaksi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan IPP. Dampak penerapan POJK No.6 telah disesuaikan ke saldo laba 1 Januari 2016 (Catatan 2.a).

Sesuai POJK No.6 maka setiap transaksi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, diperlakukan sebagai transaksi jual beli, meskipun sebenarnya mengandung substansi selain jual beli (Catatan 3.l dan 3.w). Tabel berikut ini disajikan sebagai informasi tambahan, jika perjanjian jual beli listrik dianggap mengandung sewa.

**56. Additional Information Related to Implementation of POJK No.6**

Since January 1, 2016, the Company has implemented POJK No.6 prospectively for transactions based on Power Purchase Agreement with IPPs. The effect of POJK No.6 implementation has been accounted for by adjustment to retained earnings as of January 1, 2016 (Note 2.a).

In accordance with POJK No.6, all transaction based on Power Purchase Agreement is treated as a sales and purchase transaction, although it contains substance other than sales and purchase (Notes 3.l and 3.w). The following tables are presented as an additional information if a certain power purchase agreement is deemed to contain a lease.

	<u>Dengan/ Under ISAK 8</u>		
	<u>31 Desember/ December 31, 2017 Rp</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2016 Rp</u>	
<u>Laporan posisi keuangan konsolidasian</u>			<u>Consolidated statements of financial position</u>
Aset tidak lancar			Non-current assets
Aset tetap	1,308,373,397	1,239,554,567	Property, plant and equipment
Aset pajak tangguhan	24,590,272	24,116,230	Deferred tax assets
Ekuitas			Equity
Saldo laba - tidak ditentukan penggunaannya	26,924,938	35,393,221	Retained earnings - unappropriated
Liabilitas jangka panjang			Non-current liabilities
Utang sewa pembiayaan	175,276,384	165,361,010	Lease liabilities
Utang listrik swasta	6,304,485	6,587,627	Electricity purchase payable
Liabilitas jangka pendek			Current liabilities
Utang usaha			Trade payables
Pihak berelasi	10,950,823	7,209,473	Related parties
Pihak ketiga	31,185,078	20,911,486	Third parties
Biaya masih harus dibayar	13,029,534	12,566,549	Accrued expenses
Utang listrik swasta	338,056	318,846	Electricity purchase payable
Utang sewa pembiayaan	9,063,151	7,323,327	Lease liabilities
Utang lain-lain	21,255,272	18,058,664	Other payables

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<b>Dengan/ Under ISAK 8</b>		
	<b>31 Desember/ December 31 , 2017 Rp</b>	<b>31 Desember/ December 31 , 2016 Rp</b>	
<u>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian</u>			<u>Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income</u>
Beban usaha:			Operating expenses:
Bahan bakar dan pelumas	142,102,203	127,408,734	Fuel and lubricants
Pembelian tenaga listrik	4,099,806	4,524,394	Purchased electricity
Sewa	9,589,066	8,082,353	Lease
Pemeliharaan	25,052,507	26,087,691	Maintenance
Penyusutan	33,905,138	31,484,447	Depreciation
Laba usaha setelah subsidi	55,453,473	53,333,573	Operating income after subsidy
Pendapatan (beban) lain-lain			Other income (expense)
Beban keuangan	(49,833,656)	(46,385,695)	Financial cost
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	(4,365,296)	7,133,260	Gain (loss) on foreign exchange - net
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih	3,369,553	(40,945)	Others income (expense) - net
Laba sebelum pajak	5,690,916	15,758,501	Income before tax
Beban pajak	(3,492,016)	(5,981,386)	Tax expenses
Laba tahun berjalan	2,198,900	9,777,115	Income for the year
Laba per saham dasar/ (Dalam Rupiah penuh)	24,994	180,084	Basic/ earning per share (In Rupiah full amount)
<u>Laporan arus kas konsolidasian</u>			<u>Consolidated statements of cash flows</u>
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pembayaran kas kepada pemasok	(171,596,023)	(164,210,241)	Cash paid to suppliers
Kas diperoleh dari aktivitas operasi	64,533,828	36,388,636	Cash provided by operating activities
Pembayaran bunga	(49,170,854)	(45,968,259)	Interest expense paid
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	61,529,254	38,637,580	Net cash provided by operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Pembayaran utang listrik swasta	(318,250)	(312,695)	Payments of electricity purchase payable
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(9,124,879)	(12,764,446)	Payments of lease liabilities
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	25,924,090	34,545,533	Net cash provided by financing activities
Nilai tunai pembayaran minimum atas utang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 jika perusahaan menerapkan ISAK 8 adalah sebagai berikut:			<i>The present value of minimum lease payments on lease liabilities as of December 31, 2017 and 2016 if the Company applied ISFAS 8 were as follows:</i>
	<b>2017 Rp</b>	<b>2016 Rp</b>	
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:			Minimum lease payments due:
Tidak lebih dari satu tahun	38,591,929	35,584,552	Not later than one year
Antara lebih dari satu tahun sampai lima tahun	141,399,663	133,734,824	Later than one year and not later than five years
Lebih dari lima tahun	417,988,237	407,203,529	Later than five years
Jumlah pembayaran minimum sewa pembiayaan	597,979,829	576,522,905	Total minimum lease payments
Dikurangi bunga	413,640,294	403,838,568	Less interest
Nilai tunai pembayaran minimum sewa pembiayaan masa datang	184,339,535	172,684,337	Present value of future minimum lease payments
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	9,063,151	7,323,327	Less current maturity
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>175,276,384</b>	<b>165,361,010</b>	<b>Long-term portion</b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**57. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

- i. Pada tanggal 23 Februari 2018, Perusahaan telah menerima putusan Direktur Jendral Pajak atas keberatan Perusahaan terhadap SKPKB PPh Badan tahun 2016. Hasil putusan tersebut mengabulkan sebagian keberatan perusahaan sehingga nilai kurang bayar dalam SKPKB Perusahaan yang semula sebesar Rp5.605.040 menjadi Rp564.041.
- ii. Pada tanggal 23 Februari 2018, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PLN tahap III Tahun 2018 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.535.000, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, dan Obligasi Seri E dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.
- iii. Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II PLN tahap III tahun 2018, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN tahap III tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp698.500, terdiri dari seri A, Seri B, Seri C, dan Seri D dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp6.760 per tahun untuk seri A, Rp6.380 per tahun untuk seri B, Rp4.715 per tahun untuk seri C, dan Rp39.827 per tahun untuk Seri D dibayarkan setiap tiga bulan sejak 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah.

**58. Tanggung Jawab Manajemen dan Persetujuan atas Laporan Keuangan Konsolidasian**

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2018.

**57. Events After Reporting Period**

- i. On February 23, 2018, the Company received the decision from the Director General of Taxes regarding the Company's appeal over the SKPKB of 2016 fiscal year Corporate Income Tax. The decision has partly granted the Company's appeal on the underpayment in the Company's SKPKB which was previously stated as Rp5,605,040 to become Rp564,041.
- ii. On February 23, 2018, the Company issued Sustainable Bonds II PLN phase III Year 2018 with a total nominal value amounting to Rp2,535,500 consisting of Series A, Series B, Series C, Series D, and Series E bonds, with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk as Trustee. The payment of interest is based on quarterly basis, starting from May 22, 2018 until the maturity date of the bonds.
- iii. Concurrent with the issuance of Sustainable Bonds II PLN phase III Year 2018, the Company also issued Sustainable Sukuk Ijara II PLN phase III Year 2018, with a nominal value amounting to Rp698,500, consisting of Series A, Series B, Series C, and Series D with PT Bank Tabungan Negara (Persero) as Trustee. The total ijarah fee amounted to Rp6,760 per annum for Series A, Rp6,380 per annum for Series B, Rp4,715 per annum for Series C, and Rp39,827 per annum for Series D which is paid based on a quarterly basis starting from May 22, 2018 until the maturity date of the Sukuk Ijarah.

**58. Management's Responsibility and Approval of the Consolidated Financial Statements**

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements were the responsibilities of the management and were approved by the Directors for issuance on March 28, 2018.

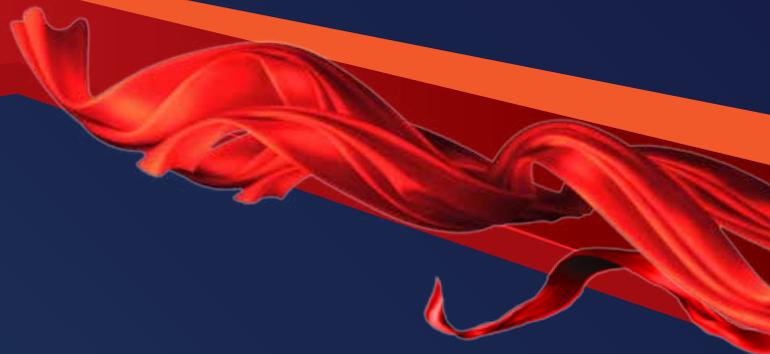




**SURAT PERNYATAAN  
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN TAHUNAN 2017  
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
(PERSERO)**

---

Board of Commissioners and Board of Directors Statement  
of Accountability for 2017 Annual Report of PT Perusahaan  
Listrik Negara (Persero)



# Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2017 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Board of Commissioners and Board of Directors Statement of Accountability for  
2017 Annual Report of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

## Dewan Komisaris Board of Commissioners

---



**Hasan Bisri**  
Pt. Komisaris Utama  
Acting President Commissioner



**Darmono.**  
Komisaris Independen  
Independent Commissioner



**Oedroseno**  
Komisaris Independen  
Independent Commissioner



**Hasan Bisri**  
Komisaris  
Commissioner



**Budiman**  
Komisaris  
Commissioner



**Harry Susetyo Nugroho**  
Komisaris  
Commissioner



**Aloysius K. Ro**  
Komisaris  
Commissioner



**Ronald Silaban**  
Komisaris  
Commissioner



**Andy Noorsaman Sommeng**  
Komisaris  
Commissioner



**Ilya Avianti**  
Komisaris  
Commissioner

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tahun 2017 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 2018

We, the signatories, hereby stated that all information contained in the 2017 Annual Report of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) has been comprehensively presented and that we are fully accountable for the accuracy of the content of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Annual Report.

This Statement is made truthfully.

Jakarta, 2018

## Direksi Board of Directors



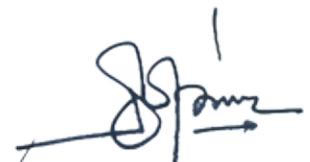
**Sofyan Basir**  
Direktur Utama  
President Director



**Sarwono Sudarto**  
Direktur Keuangan  
Director of Finance



**Syofvi Felienty Roekman**  
Direktur Perencanaan Korporat  
Director of Corporate Planning



**Sofyan Basir**  
Plt. Direktur Pengadaan Strategis 1  
Acting Director of Strategic Procurement 1



**Supangkat Iwan Santoso**  
Direktur Pengadaan Strategis 2  
Director of Strategic Procurement 2



**Muhammad Ali**  
Direktur Human Capital Management  
Director of Human Capital Management



**Wiluyo Kusdwiarto**  
Direktur Bisnis Regional Sumatera  
Regional Business Director of Sumatra



**Haryanto W.S.**  
Direktur Bisnis Regional  
Jawa Bagian Barat  
Regional Business Director of  
West Java



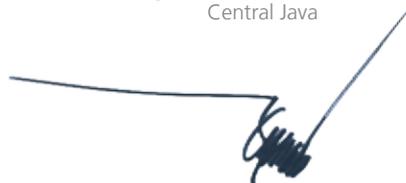
**Amir Rosidin**  
Direktur Bisnis Regional  
Jawa Bagian Tengah  
Regional Business Director of  
Central Java



**Djoko Rahardjo Abumanan**  
Direktur Bisnis Regional  
Jawa Bagian Timur, Bali dan  
Nusa Tenggara  
Regional Business Director of  
East Java, Bali and Nusa Tenggara



**Machnizon**  
Direktur Bisnis Regional Kalimantan  
Regional Business Director of Kalimantan



**Syamsul Huda**  
Direktur Bisnis Regional Sulawesi  
Regional Business Director of Sulawesi



**Ahmad Rofik**  
Direktur Bisnis Regional  
Maluku dan Papua  
Regional Business Director of  
Maluku and Papua

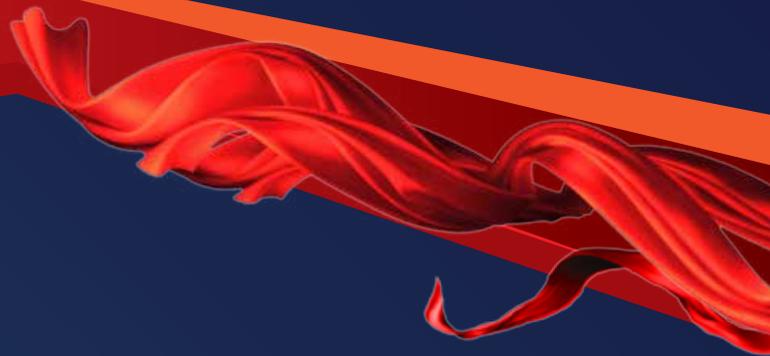




# **CHECKLIST ISI LAPORAN TAHUNAN BERDASARKAN SURAT EDARAN OJK NO. 30 TAHUN 2016 ("SEOJK 30/2016")**

---

Checklist of the Annual Report Contents  
Pursuant to the Circular Letter of OJK  
No. 30/2016 ("SEOJK 30/2016")



# Checklist Isi Laporan Tahunan Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 30 Tahun 2016 (“SEOJK 30/2016”)

Checklist of the Annual Report Contents Pursuant to the Circular Letter of OJK No. 30/2016 (“SEOJK 30/2016”)

Muatan Laporan Report Contents	Sub Muatan Sub Contents	Ketentuan Stipulations	Hal Page
<b>Ketentuan Umum</b> General Stipulation		a. Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai :	
		1) Ikhtisar data keuangan penting;	30
		2) Informasi saham (jika ada);	
		3) Laporan Direksi;	58
		4) Laporan Dewan Komisaris;	41
		5) Profil Emiten atau Perusahaan Publik;	88
		6) Analisis dan pembahasan manajemen	216
		7) Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	318
		8) Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;	544
		9) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	600
10) Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan;	808		
		b. Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/ atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami;	√
		a. The Annual Report shall at least includes the following information:	
		1) highlights of key financial data;	30
		2) shares information (if any);	
		3) Board of Directors’ report;	58
		4) Board of Commissioners’ report;	41
		5) profile of Issuers or Public Companies;	88
		6) management discussion and analysis	216
		7) corporate governance of Issuers or Public Companies;	318
		8) environmental and social responsibility of Issuers or Public Companies;	544
		9) audited annual financial statements; and	600
		10) letter of statements of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding the responsibility on the Annual Report;	808
		b. The Annual Report shall present information such as pictures, graphs, tables and/ or diagrams completed with titles and/or clear description, for easy reading and understanding;	√

Checklist Isi Laporan Tahunan Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 30 Tahun 2016 ("SEOJK 30/2016")  
 Checklist of the Annual Report Contents Pursuant to the Circular Letter of OJK No. 30/2016 ("SEOJK 30/2016")

Muatan Laporan Report Contents	Sub Muatan Sub Contents	Ketentuan Stipulations	Hal Page
<b>Ikhtisar Data Keuangan Penting</b>	Key Financial Data Highlights	<p>Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pendapatan/penjualan;</li> <li>2) laba bruto;</li> <li>3) laba (rugi);</li> <li>4) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;</li> <li>5) total laba (rugi) komprehensif;</li> <li>6) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;</li> <li>7) laba (rugi) per saham;</li> <li>8) jumlah aset;</li> <li>9) jumlah liabilitas;</li> <li>10) jumlah ekuitas;</li> <li>11) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;</li> <li>12) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;</li> <li>13) rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan;</li> <li>14) rasio lancar;</li> <li>15) rasio liabilitas terhadap ekuitas;</li> <li>16) rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan</li> <li>17) informasi dan rasio keuangan</li> </ol>	30
		<p>Key Financial Data Highlights containing the financial information in comparison for 3 (three) financial years or since the commencement of business if the Issuers or Public Companies has been running its business activities for less than 3 (three) years, at least shall includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) revenue/sales;</li> <li>2) gross profit;</li> <li>3) profit (loss);</li> <li>4) total profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and attributable to non controlling interest;</li> <li>5) total comprehensive profit (loss);</li> <li>6) total comprehensive profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and attributable to non controlling interest;</li> <li>7) profit (loss) per share;</li> <li>8) total assets;</li> <li>9) total liabilities;</li> <li>10) total equity;</li> <li>11) return on assets (ROA);</li> <li>12) return on equity (ROE);</li> <li>13) return on revenue/sales ratio;</li> <li>14) current ratio;</li> <li>15) debt to equity;</li> <li>16) debt to total assets; and</li> <li>17) financial information and ratio</li> </ol>	30

## Checklist Isi Laporan Tahunan Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 30 Tahun 2016 ("SEOJK 30/2016")

Checklist of the Annual Report Contents Pursuant to the Circular Letter of OJK No. 30/2016 ("SEOJK 30/2016")

Muatan Laporan Report Contents	Sub Muatan Sub Contents	Ketentuan Stipulations	Hal Page
<b>Informasi saham</b> Shares Information		<p>Informasi saham (jika ada) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan (jika ada) yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) jumlah saham yang beredar;</li> <li>b) kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;</li> <li>c) harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan</li> <li>d) volume perdagangan pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;</li> </ol> </li> <li>Jumlah saham beredar diungkapkan Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek; sementara kapitalisasi pasar dan harga saham tertinggi hanya diungkapkan jika Emiten merupakan Perusahaan Terbuka dan sahamnya tercatat di Bursa Efek;</li> <li>2) dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, informasi saham ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) tanggal pelaksanaan aksi korporasi;</li> <li>b) rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham;</li> <li>c) jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; dan</li> <li>d) harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;</li> </ol> </li> <li>3) Jika terjadi suspension dan/atau (delisting) dalam tahun buku, Perusahaan Publik menjelaskan alasannya; dan</li> <li>4) dalam hal suspension dan/atau delisting masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, Perusahaan Publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan suspension atau delisting tersebut;</li> </ol>	32
		<p>Shares information (if any) at least includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) outstanding shared for every quarter (if any) in comparison for 2 (two) financial years, at least covering:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) total outstanding shares;</li> <li>b) market capitalization based on the prices where the shares are listed at the Stock Exchange;</li> <li>c) the highest, lowest, and closing share prices based on the prices where the shares are listed at the Stock Exchange; and</li> <li>d) trading volume where the shares are listed at the Stock Exchange;</li> </ol> </li> <li>The Public Companies shall disclose the total outstanding shares that are listed or not listed at the Stock Exchange; while market capitalization and highest share prices are only disclosed if the Issuers are Public Companies and its shares are listed at the Stock Exchange;</li> <li>2) in the event of corporate actions, such as stock split, reverse stock, share dividend, share bonus, and changes of share nominal value, the share information shall add at least on:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) date of corporate actions;</li> <li>b) ratio of stock split, reverse stock, share dividend, share bonus, and changes of share nominal value;</li> <li>c) total outstanding shares before and after the corporate actions; and</li> <li>d) share prices before and and after the corporate actions;</li> </ol> </li> <li>3) In the event of suspension and/or (delisting) within the financial year, the Public Companies shall disclose the background; and</li> <li>4) in the event of continued suspension and/or delisting up to the end of Annual Report period, the Public Companies shall explain the follow up actions in settling the said suspension or delisting;</li> </ol>	32

Checklist Isi Laporan Tahunan Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 30 Tahun 2016 ("SEOJK 30/2016")  
 Checklist of the Annual Report Contents Pursuant to the Circular Letter of OJK No. 30/2016 ("SEOJK 30/2016")

Muatan Laporan Report Contents	Sub Muatan Sub Contents	Ketentuan Stipulations	Hal Page
<b>Laporan Direksi</b> Board of Directors' Report		Laporan Direksi paling sedikit memuat: 1) uraian singkat mengenai kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit meliputi: a) strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; b) perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan c) kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; 2) gambaran tentang prospek usaha; 3) penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; dan 4) perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada);	56
		The Board of Directors' Report at least includes: 1) brief analysis on the Issuers or Public Companies performance, at least including: a) strategy and strategic policy of Issuers or Public Companies; b) comparison on results achievement and targets; c) challenges faced by the Issuers or Public Companies; 2) business prospects; 3) corporate governance of Issuers or Public Companies; 4) changes of the composition of members of the Board of Directors and the reasons of the changes (if any);	56
<b>Laporan Dewan Komisaris</b> Board of Commissioners' Report		Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat: 1) penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik; 2) pengawasan terhadap implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; 3) pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; 4) pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; 5) perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada); 6) frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi;	38
		The Board of Commissioners' Report at least includes: 1) performance assessment of the Board of Directors on the management of Issuers or Public Companies; 2) supervisory on the strategy implementation of Issuers or Public Companies; 3) view on business prospects of Issuers or Public Companies developed by the Board of Directors; 4) view on the corporate governance implementation of Issuers or Public Companies; 5) changes of the composition of members of the Board of Commissioners and the reasons of the changes (if any); 6) frequency and advisory to members of the Board of Directors;	38

## Checklist Isi Laporan Tahunan Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 30 Tahun 2016 ("SEOJK 30/2016")

Checklist of the Annual Report Contents Pursuant to the Circular Letter of OJK No. 30/2016 ("SEOJK 30/2016")

Muatan Laporan Report Contents	Sub Muatan Sub Contents	Ketentuan Stipulations	Hal Page
<b>Profil Emiten atau Perusahaan Publik</b> Profile of Issuers or Public Companies	<b>Profil Umum</b> General Profile	Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat:	88
		1) nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	
		2) akses terhadap Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	88
		a) alamat;	
		b) nomor telepon;	
		c) nomor faksimile;	
		d) alamat surat elektronik; dan	
		e) alamat Situs Web;	
		3) riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	92
		4) visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik;	100
		5) kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;	94
		6) struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan;	98
The profile of Issuers or Public Companies at least covering:	88		
1) name of Issuers or Public Companies including if there are changes of name, reason of changes, and effective date of the changes on financial year;			
2) access to Public Companies including branch offices or representative offices that allows public to obtain information on Issuers or Public Companies, includes:	88		
a) address;			
b) telephone number;			
c) faximile number;			
d) email address; and			
e) Website address			
3) brief history of Issuers or Public Companies;	92		
4) vision and mission of Issuers or Public Companies;	100		
5) business activity based on the latest articles of association, business activity carried out during financial year, as well as type of products and/or services;	94		
6) organization structure of Issuers or Public Companies in diagram, at least up to the structure of 1 (one) under the Board of Directors, including names and positions;	98		

Checklist Isi Laporan Tahunan Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 30 Tahun 2016 ("SEOJK 30/2016")  
 Checklist of the Annual Report Contents Pursuant to the Circular Letter of OJK No. 30/2016 ("SEOJK 30/2016")

Muatan Laporan Report Contents	Sub Muatan Sub Contents	Ketentuan Stipulations	Hal Page
	<b>Profil Direksi</b> Board of Directors' Profile	7) Profil Direksi, paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab</li> <li>b) foto terbaru</li> <li>c) usia</li> <li>d) kewarganegaraan</li> <li>e) riwayat pendidikan</li> <li>f) riwayat jabatan, meliputi informasi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;</li> <li>(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan</li> <li>(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;</li> </ol> </li> <li>g) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Direksi dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada); dan</li> <li>h) hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi;</li> </ol>	117
		7) Board of Directors' Profile, at least includes: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) name and position according to duties and responsibilities</li> <li>b) latest photography</li> <li>c) age</li> <li>d) citizenship</li> <li>e) educational background</li> <li>f) professional background, including information on:               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) legal appointment basis as member of the Board of Directors in the said Issuers or Public Companies;</li> <li>(2) concurrent post, both as member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or member of committee as well as other positions (if any); and</li> <li>(3) work experience with the terms inside or outside Issuers or Public Companies;</li> </ol> </li> <li>g) education and/or trainings participated by members of the Board of Directors for competency improvement during financial year (if any); and</li> <li>h) affiliates with other members of the Board of Directors; members of the Board of Commissioners, and ultimate shareholders (if any), including the names of affiliates;</li> </ol>	117

## Checklist Isi Laporan Tahunan Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 30 Tahun 2016 ("SEOJK 30/2016")

Checklist of the Annual Report Contents Pursuant to the Circular Letter of OJK No. 30/2016 ("SEOJK 30/2016")

Muatan Laporan Report Contents	Sub Muatan Sub Contents	Ketentuan Stipulations	Hal Page
	<b>Profil Dewan Komisaris</b> Board of Commissioners' Profile	8) Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nama;</li> <li>b) foto terbaru;</li> <li>c) usia;</li> <li>d) kewarganegaraan;</li> <li>e) riwayat pendidikan;</li> <li>f) riwayat jabatan, meliputi informasi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;</li> <li>(2) dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;</li> <li>(3) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan</li> <li>(4) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;</li> </ul> </li> <li>g) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Dewan Komisaris dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada);</li> <li>h) hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi; dan</li> <li>i) pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode (jika ada);</li> </ul>	108
		8) Board of Directors' Profile, at least includes: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) name;</li> <li>b) latest photography;</li> <li>c) age;</li> <li>d) citizenship;</li> <li>e) educational background;</li> <li>f) professional background, including information on:               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) legal appointment basis as member of the Board of Commissioners that are not Independent Commissioner in the said Issuers or Public Companies;</li> <li>(2) legal reference of the first appointment as member of the Board of Commissioners that are as Independent Commissioner in the said Issuers or Public Companies;</li> <li>(3) concurrent post, both as member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of committee as well as other positions (if any); and</li> <li>(4) work experience with the terms inside or outside Issuers or Public Companies;</li> </ul> </li> <li>g) education and/or trainings participated by members of the Board of Commissioners for competency improvement during financial year (if any); and</li> <li>h) affiliates with other members of the Board of Commissioners, and ultimate shareholders (if any), including the names of affiliates;</li> <li>i) independence statement of the Independent Commissioner in the event that the Independent Commissioner has already been serving for more than 2 (two) periods (if any);</li> </ul>	108



## Checklist Isi Laporan Tahunan Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 30 Tahun 2016 ("SEOJK 30/2016")

Checklist of the Annual Report Contents Pursuant to the Circular Letter of OJK No. 30/2016 ("SEOJK 30/2016")

Muatan Laporan Report Contents	Sub Muatan Sub Contents	Ketentuan Stipulations	Hal Page
<b>Kepemilikan Saham dan Anak Perusahaan</b> Stakes in Subsidiaries	12)	total shareholders and ownership percentage as of the ending of financial year based on classification: a) local institutional ownership; b) foreign institutional ownership; c) local individual ownership; and d) foreign individual ownership;	156
	13)	information on ultimate and controlling shareholders of the Issuers or Public Companies, both directly or indirectly, up to the individual ownerships, presented in diagram or bagan;	159
	14)	name of subsidiaries, associates, joint ventures where the Issuers or Public Companies has joint control entity, including ownership percentage, business line, total assets, and operating status of the Issuers or Public Companies (if any); For Subsidiaries, to add the address information;	177
	15)	share listing chronology, total shares, nominal value, and offering price from the beginning of listing to the ending of financial year including the name of stock exchange where the shares of the Issuers or Public Companies are listed (if any);	156
	16)	other Securities listing chronology other than Securities stated on point 15), which at least includes the Securities name, year of issuance, maturity date, offering values, and Securities rating (if any);	156
	17)	name and address of capital market institution and/or supporting professions;	188
	18)	if the capital market supporting professions are available with periodical fees to the Issuers or Public Companies, please state the information on services, fees, and assignment period; and	188
	<b>Penghargaan Awards</b>	19)	penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima Emiten atau Perusahaan Publik baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir (jika ada), yang memuat: a) nama penghargaan dan/atau sertifikasi; b) badan atau lembaga yang memberikan; dan c) masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikasi (jika ada);"
19)		awards and/or certifications received by the Issuers or Public Companies of national and international scales in the ending of fiscal year (if any), which covers: a) name of awards and/or certifications; b) agency or institution that grants the awards; and c) validity for the awards and/or certificates (if any);	194
20)		penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima Emiten atau Perusahaan Publik baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir (jika ada), yang memuat: a) nama penghargaan dan/atau sertifikasi; b) badan atau lembaga yang memberikan; dan c) masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikasi (jika ada);"	194
		Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat: Management discussion and analysis covers the analysis and discussion on financial statements and other key information with emphasize on material changes in fiscal year, which covers at least:	216

## Checklist Isi Laporan Tahunan Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 30 Tahun 2016 ("SEOJK 30/2016")

Checklist of the Annual Report Contents Pursuant to the Circular Letter of OJK No. 30/2016 ("SEOJK 30/2016")

Muatan Laporan Report Contents	Sub Muatan Sub Contents	Ketentuan Stipulations	Hal Page
	<b>Tinjauan operasi per segmen operasi</b> Operational Review per business segment	1) tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;</li> <li>pendapatan/penjualan; dan</li> <li>profitabilitas;</li> </ol> 1) operational review per business segment according to the industrial types of the Issuers or Public Companies, at least regarding: <ol style="list-style-type: none"> <li>production, which covers the process, capacity, and development;</li> <li>revenues/sales; and</li> <li>profitability;</li> </ol>	244
	<b>Kinerja keuangan komprehensif</b> Comprehensive financial performance	2) kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;</li> <li>liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;</li> <li>ekuitas;</li> <li>pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan</li> <li>arus kas;</li> </ol> 2) comprehensive financial performance that covers financial performance in comparison of 2 (two) ended fiscal years, explanation on the changes and its impact, at least regarding: <ol style="list-style-type: none"> <li>current assets, non current assets, and total assets;</li> <li>current liabilities, non current liabilities, and total liabilities;</li> <li>equity;</li> <li>revenues/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss); and</li> <li>cash flows;</li> </ol>	234
	<b>Solvensi dan Kolektibilitas</b> Solvency and Collectability	3) kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; 4) tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; 3) solvency by presenting the relevant ratio calculation; 4) collectability receivables level of the Issuers or Public Companies by presenting the relevant ratio calculation;	281 281 281 281
	<b>Struktur modal</b> Capital structure	5) struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud; 5) capital structure and management policy on capital structure including determination of policy;	286-288 286-288

## Checklist Isi Laporan Tahunan Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 30 Tahun 2016 ("SEOJK 30/2016")

Checklist of the Annual Report Contents Pursuant to the Circular Letter of OJK No. 30/2016 ("SEOJK 30/2016")

Muatan Laporan Report Contents	Sub Muatan Sub Contents	Ketentuan Stipulations	Hal Page	
Barang modal Capital goods	6)	bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi: a) tujuan dari ikatan tersebut; b) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; c) mata uang yang menjadi denominasi; dan d) langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;	288-289	
		7) bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi: a) jenis investasi barang modal; a) tujuan investasi barang modal; dan b) nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	288-289	
	8)	informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);	292	
	6)	discussion on material commitments for capital investment with at least the following explanation: a) objectives of the commitments; b) sources of fund expected to meet the commitment; c) currencies of denomination; and d) steps planned by the Issuers or Public Companies to protect foreign currency risk;	288-289	
		7) discussion on capital investment realized at the end of fiscal year, at least covering: a) capital investment types; b) capital investment objectives; and c) capital investment value spent;	288-289	
		8) material information and subsequent events (if any);		
	Lain-Lain Others	9)	prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;	292-296
		10)	perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: a) pendapatan/penjualan; b) laba (rugi); c) struktur modal (capital structure); atau d) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	292-296
11)		target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: a) pendapatan/penjualan; b) laba (rugi); c) struktur modal (capital structure); d) kebijakan dividen; atau e) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	292-296	
12)		aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	292-296	
13)		uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit: a) kebijakan dividen; b) tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; c) jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan d) jumlah dividen per tahun yang dibayar;	292-296	

Checklist Isi Laporan Tahunan Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 30 Tahun 2016 ("SEOJK 30/2016")  
 Checklist of the Annual Report Contents Pursuant to the Circular Letter of OJK No. 30/2016 ("SEOJK 30/2016")

Muatan Laporan Report Contents	Sub Muatan Sub Contents	Ketentuan Stipulations	Hal Page
	<b>Lain-Lain</b> Others	14) realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan: a) dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan a) dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;	292-296
		15) informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi Afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat: a) tanggal, nilai, dan objek transaksi; b) nama pihak yang melakukan transaksi; c) sifat hubungan Afiliasi (jika ada); d) penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan e) pemenuhan ketentuan terkait;	292-296
		16) perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	292-296
		17) perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada);	292-296
		9) business prospects of the Issuers or Public Companies related with the industry condition, general economy and international market including quantitative supporting data from the trusted resources;	292-296
		10) comparison between target/projection of beginning of fiscal year with realization, regarding: a) revenue/sales; b) profit (loss); c) capital structure; or d) other issues considered important by the Issuers or Public Companies;	292-296
		11) target/projection to be achieved by the Issuers or Public Companies for the next 1 (one) year, regarding: a) revenue/sales; b) profit/loss; c) capital structure; d) dividend policy; or e) other issues considered important by the Issuers of Public Companies;	292-296
		12) marketing aspects on goods and/or services of the Issuers or Public Companies, at least on marketing strategy and market share;	292-296
		13) dividend information for 2 (two) ended fiscal years, at least on: a) dividend policy; b) date of cash dividend payout and/or date of non cash dividend payout; c) total dividend per share (cash and/or non cash); and d) total dividend payout per year;	292-296
		14) realization of the use of Public Offering proceeds, with the stipulation: a) if during fiscal year, the Issuers has the obligation to submit the realization of proceeds, then the realization in cumulative shall be disclosed up to the end of fiscal year; and b) if there are changes in the use of the proceeds as regulated in the Financial Services Authority on the Realization of Public Offering Proceeds Usage Report, the Issuers are required to explain the changes;	292-296
		15) material information (if any), among others on investment, expansion, divestment, merger, acquisition, debt/capital restructuring, affiliates transaction, and transaction with conflict of interest, implemented during fiscal year, among others covering: a) transaction date, value, and object; b) name of the party conducted the transaction; c) affiliates nature (if any); d) explanation on transaction fairness; and e) fulfillment of related rules;	292-296
		16) changes on the laws and regulations that significantly impacted the Issuers or Public Companies and its impact to the financial statements (if any); and	292-296
		17) changes of accounting policy, background and its impact to the financial statements (if any);	292-296

## Checklist Isi Laporan Tahunan Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 30 Tahun 2016 ("SEOJK 30/2016")

Checklist of the Annual Report Contents Pursuant to the Circular Letter of OJK No. 30/2016 ("SEOJK 30/2016")

Muatan Laporan Report Contents	Sub Muatan Sub Contents	Ketentuan Stipulations	Hal Page
<b>Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik</b> Corporate Governance of Issuers or Public Companies	<b>Direksi</b> Board of Directors	1) Direksi, mencakup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;</li> <li>pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi;</li> <li>prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;</li> <li>kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut;</li> <li>informasi mengenai keputusan RUPS 1 (satu) tahun sebelumnya, meliputi: (1) keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan (2) alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan;</li> <li>informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku, meliputi: (1) keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan (2) alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan; dan</li> <li>penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi;</li> </ol>	442
		1) Board of Directors, covering among others: <ol style="list-style-type: none"> <li>duties and responsibilities of each member of the Board of Directors;</li> <li>statement of the establishment of Board of Directors Charter;</li> <li>procedures, stipulation basis, structure, and amount of remuneration of each member of the Board of Directors, as well as relations between remuneration and the performance of Issuers or Public Companies;</li> <li>policy and implementation of the Board of Directors' meeting frequency, including joint meetings with the Board of Commissioners, and attendance level of members of the Board of Directors;</li> <li>information on the GMS resolutions of the previous 1 (one) year, covering: (1) GMS resolutions that has been realized during fiscal year; and (2) background reasons of the unrealized resolutions;</li> <li>information on the GMS resolutions of the fiscal year, covering: (1) GMS resolutions that has been realized during fiscal year; and (2) background reasons of the unrealized resolutions;</li> <li>performance assessment of the committee that supporting the Board of Directors' duties;</li> </ol>	442

## Checklist Isi Laporan Tahunan Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 30 Tahun 2016 ("SEOJK 30/2016")

Checklist of the Annual Report Contents Pursuant to the Circular Letter of OJK No. 30/2016 ("SEOJK 30/2016")

Muatan Laporan Report Contents	Sub Muatan Sub Contents	Ketentuan Stipulations	Hal Page
<b>Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik</b> Corporate Governance of Issuers or Public Companies	<b>Dewan Komisaris</b> Board of Commissioners	2) Dewan Komisaris, mencakup antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;</li> <li>b) pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris;</li> <li>c) prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris;</li> <li>d) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut;</li> <li>e) kebijakan Emiten atau Perusahaan Publik tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya, paling sedikit meliputi: (1) prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; (2) kriteria yang digunakan; dan (3) pihak yang melakukan penilaian;</li> <li>f) penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; dan (notes : masuk dalam laporan Dewan Komisaris)</li> <li>g) dalam hal Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, dimuat informasi paling sedikit mengenai: (1) alasan tidak dibentuknya komite; dan (2) prosedur nominasi dan remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku;</li> </ul>	366
		2) Board of Commissioners, covering among others: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) duties and responsibilities of the Board of Commissioners;</li> <li>b) statement of the establishment of Board of Commissioners Charter;</li> <li>c) procedures, stipulation basis, structure, and amount of remuneration of each member of the Board of Commissioners;</li> <li>d) policy and implementation of the Board of Commissioners 'meeting frequency, including joint meetings with the Board of Directors, and attendance level of members of the Board of Directors;</li> <li>e) the Issuers or Public Companies policy on performance assessment of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners and its implementation, at least covering: (1) performance assessment procedures; (2) criteria; and (3) the assessors;</li> <li>f) performance assessment of committee that supporting the Board of Commissioners' duties; and (notes: included in the Board of Commissioners' report)</li> <li>g) if the Board of Commissioners does not established the Nomination and Remuneration Committee, the following at least to be informed: (1) background reason to not establish the committee; and (2) nomination and remuneration procedures carried out during fiscal year;</li> </ul>	366

## Checklist Isi Laporan Tahunan Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 30 Tahun 2016 ("SEOJK 30/2016")

Checklist of the Annual Report Contents Pursuant to the Circular Letter of OJK No. 30/2016 ("SEOJK 30/2016")

Muatan Laporan Report Contents	Sub Muatan Sub Contents	Ketentuan Stipulations	Hal Page
Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik Corporate Governance of Issuers or Public Companies	Komite Audit Audit Committee	4) Komite Audit, mencakup antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;</li> <li>b) usia;</li> <li>c) kewarganegaraan;</li> <li>d) riwayat pendidikan;</li> <li>e) riwayat jabatan, meliputi informasi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;</li> <li>(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan</li> <li>(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;</li> </ul> </li> <li>f) periode dan masa jabatan anggota Komite Audit;</li> <li>g) pernyataan independensi Komite Audit;</li> <li>h) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut;</li> <li>i) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan</li> <li>j) pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) Komite Audit;</li> </ul>	411
		4) Audit Committee, covering at least: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) name and position in the committee membership;</li> <li>b) age;</li> <li>c) citizenship;</li> <li>d) educational background;</li> <li>e) professional background, covering information on:               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) legal reference of the appointment as committee's member;</li> <li>(2) concurrent post, as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or members of the committee as well as other position (if any); and</li> <li>(3) work experience and period inside or outside the Issuers or Public Companies;</li> </ul> </li> <li>f) period and term of office of member of Audit Committee;</li> <li>g) independence statement of Audit Committee;</li> <li>h) policy and implementation of Audit Committee's meeting frequency and level of attendance of member of Audit Committee;</li> <li>i) education and/or training participated in fiscal year (if any); and</li> <li>j) implementation of Audit Committee's activity during fiscal year in accordance with the Audit Committee Charter;</li> </ul>	411

Checklist Isi Laporan Tahunan Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 30 Tahun 2016 ("SEOJK 30/2016")  
 Checklist of the Annual Report Contents Pursuant to the Circular Letter of OJK No. 30/2016 ("SEOJK 30/2016")

Muatan Laporan Report Contents	Sub Muatan Sub Contents	Ketentuan Stipulations	Hal Page
Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik Corporate Governance of Issuers or Public Companies	Komite lain yang dimiliki Emiten Other Committees	5) Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, seperti Komite Nominasi dan Remunerasi, mencakup antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;</li> <li>b) usia;</li> <li>c) kewarganegaraan;</li> <li>d) riwayat pendidikan;</li> <li>e) riwayat jabatan, meliputi informasi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;</li> <li>(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan</li> <li>(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;</li> </ul> </li> <li>f) periode dan masa jabatan anggota komite;</li> <li>g) uraian tugas dan tanggung jawab;</li> <li>h) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite;</li> <li>i) pernyataan independensi komite;</li> <li>j) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;</li> <li>k) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan</li> <li>l) uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;</li> </ul>	407-432
		5) Other committees established by the Issuers or Public Companies in order to support the function and duties of the Board of Directors and/or Board of Commissioners, such as Nomination and Remuneration Committee: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) name and its position in the committee membership;</li> <li>b) age;</li> <li>c) citizenship;</li> <li>d) educational background;</li> <li>e) professional background, including information on:               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) legal reference of appointment as committee's member;</li> <li>(2) concurrent post, both as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or members of the committee as well as other position (if any); and</li> <li>(3) work experience and its period both inside and outside of Issuers or Public Companies;</li> </ul> </li> <li>f) period and terms of office of committee's members;</li> <li>g) duties and responsibilities;</li> <li>h) statement of the establishment of committee charter;</li> <li>i) committee independence statements;</li> <li>j) policy and implementation of committee's meeting frequency and level of attendance of committee's members;</li> <li>k) education and/or trainings participated in the fiscal year (if any); and</li> <li>l) brief implementation of committee's activities during fiscal year;</li> </ul>	407-432

## Checklist Isi Laporan Tahunan Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 30 Tahun 2016 ("SEOJK 30/2016")

Checklist of the Annual Report Contents Pursuant to the Circular Letter of OJK No. 30/2016 ("SEOJK 30/2016")

Muatan Laporan Report Contents	Sub Muatan Sub Contents	Ketentuan Stipulations	Hal Page
<b>Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik</b> Corporate Governance of Issuers or Public Companies	<b>Sekretaris Perusahaan</b> Corporate Secretary	6) Sekretaris Perusahaan, mencakup antara lain: a) nama; b) domisili; c) riwayat jabatan, meliputi informasi: (1) dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan; dan (2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; d) riwayat pendidikan; e) pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; dan f) uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku;	469-432
		6) Corporate Secretary, covering among others: a) name; b) domicile; c) professional background, covering information on: (1) legal reference of appointment as corporate secretary; and (2) work experience and its period both inside and outside of Issuers or Public Companies; d) educational background; e) education and/or trainings participated in the fiscal year; and f) brief implementation of Corporate Secretary duties during fiscal year;	469-432
	<b>Unit Audit Internal</b> Internal Audit Unit	7) Unit Audit Internal, mencakup antara lain: a) nama kepala Unit Audit Internal; b) riwayat jabatan, meliputi informasi: (1) dasar hukum penunjukan sebagai kepala Unit Audit Internal; dan (2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; c) kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); d) pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; e) struktur dan kedudukan Unit Audit Internal; f) uraian tugas dan tanggung jawab; g) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Unit Audit Internal; dan h) uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku;	474-489
		7) Internal Audit Unit, covering among others: a) name of Head of Internal Audit Unit; b) professional background, covering information on: (1) legal reference of appointment as head of Internal Audit Unit; and (2) work experience and its period both inside and outside of Issuers or Public Companies; c) qualifications or certifications as internal audit profession (if any); d) education and/or trainings participated in the fiscal year; e) structure and composition of Internal Audit Unit; f) duties and responsibilities; g) statement of the establishment of IAU charter; and h) brief implementation of Internal Audit Unit duties during fiscal year;	474-489

## Checklist Isi Laporan Tahunan Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 30 Tahun 2016 ("SEOJK 30/2016")

Checklist of the Annual Report Contents Pursuant to the Circular Letter of OJK No. 30/2016 ("SEOJK 30/2016")

Muatan Laporan Report Contents	Sub Muatan Sub Contents	Ketentuan Stipulations	Hal Page
<b>Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik</b> Corporate Governance of Issuers or Public Companies	<b>Sanksi Administratif</b> Administrative Sanctions	11) Informasi tentang sanksi administratif kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya selama tahun fiskal (jika ada); 11) Information on administrative sanctions to the Issuers or Public Companies, members of the Board of Commissioners and Board of Directors, by the Capital Market authority and other authorities during fiscal year (if any);	530-531
	<b>Kode Etik</b> Code of Conduct	12) Perkara penting yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), antara lain meliputi: a) pokok perkara/gugatan; b) status penyelesaian perkara/gugatan; dan c) pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik 12) information on code of conduct of the Issuers or Public Companies covering: a) principals of code of conduct; b) dissemination of code of conduct and enforcement measures; and c) statement of the application of code of conduct for members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Issuers or Public Companies;	532-534
	<b>Budaya Perusahaan</b> Corporate Culture	13) informasi mengenai budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan (jika ada); 13) information on corporate culture or corporate values (if any);	
	<b>Program ESOP</b> ESOP Program	14) uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain mengenai: a) jumlah saham dan/atau opsi; b) jangka waktu pelaksanaan; c) persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan d) harga pelaksanaan; 14) shares ownership program for employees and/or management implemented by the Issuers or Public Company (if any), among others on: a) total shares and/or option; b) implementation period; c) requirements for the employees and/or management that have the rights; and d) execution price;	PLN bukan Perusahaan Publik  PLN is not a Public Company



## Checklist Isi Laporan Tahunan Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 30 Tahun 2016 ("SEOJK 30/2016")

Checklist of the Annual Report Contents Pursuant to the Circular Letter of OJK No. 30/2016 ("SEOJK 30/2016")

Muatan Laporan Report Contents	Sub Muatan Sub Contents	Ketentuan Stipulations	Hal Page
	<b>CSR (Tanggung Jawab Sosial)</b> Social Responsibility (CSR)	17) Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) lingkungan hidup, antara lain:               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) sistem pengolahan limbah Emiten atau Perusahaan Publik;</li> <li>(2) mekanisme pengaduan masalah lingkungan; dan</li> <li>(3) sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki;</li> </ol> </li> <li>b) praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, antara lain:               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) kesetaraan gender dan kesempatan kerja;</li> <li>(2) sarana dan keselamatan kerja;</li> <li>(3) tingkat perpindahan (turnover) karyawan;</li> <li>(4) tingkat kecelakaan kerja;</li> <li>(5) pendidikan dan/atau pelatihan;</li> <li>(6) remunerasi; dan</li> <li>(7) mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan;</li> </ol> </li> <li>c) pengembangan sosial dan masyarakat, antara lain:               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) penggunaan tenaga kerja lokal;</li> <li>(2) pemberdayaan masyarakat sekitar Emiten atau Perusahaan Publik antara lain melalui penggunaan bahan baku yang dihasilkan oleh masyarakat atau pemberian edukasi;</li> <li>(3) perbaikan sarana dan prasarana sosial;</li> <li>(4) bentuk donasi lainnya; dan</li> <li>(5) komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di Emiten atau Perusahaan Publik, serta pelatihan mengenai anti korupsi (jika ada);</li> </ol> </li> <li>d) tanggung jawab barang dan/atau jasa, antara lain:               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) kesehatan dan keselamatan konsumen;</li> <li>(2) informasi barang dan/atau jasa; dan</li> <li>(3) sarana, jumlah, dan penanggulangan atas pengaduan konsumen.</li> </ol> </li> </ol> <p>Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyajikan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) pada laporan tersendiri seperti laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau laporan keberlanjutan (sustainability report), Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Laporan Tahunan; dan</p> <p>Laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan;</p>	550-565
		17) Information on social and environmental responsibility of the Issuers or Public Companies covering the policy, programs, and allocated costs, among others related to the following aspects: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) environmental, among others are:               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) waste management system of the Issuers or Public Companies;</li> <li>(2) complaint mechanism on environment; and</li> <li>(3) environmental certifications;</li> </ol> </li> <li>b) employment, occupational health &amp; safety, among others:               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) gender equality and work opportunities;</li> <li>(2) work facility and safety;</li> <li>(3) employees turnover;</li> <li>(4) work accident level;</li> <li>(5) education and/or trainings;</li> <li>(6) remuneration; and</li> <li>(7) complaint mechanism on employment;</li> </ol> </li> </ol>	550-565

## Checklist Isi Laporan Tahunan Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 30 Tahun 2016 ("SEOJK 30/2016")

Checklist of the Annual Report Contents Pursuant to the Circular Letter of OJK No. 30/2016 ("SEOJK 30/2016")

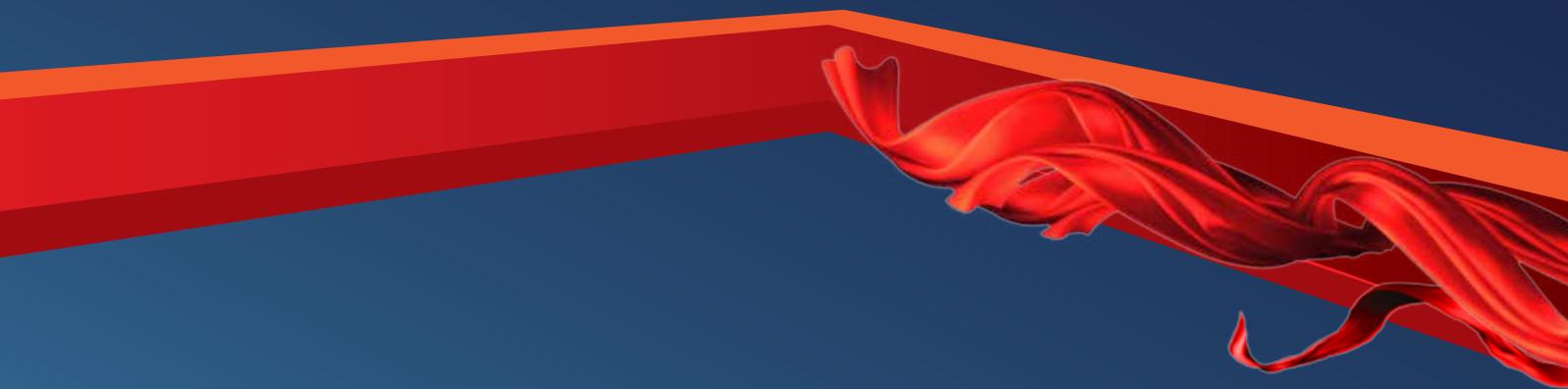
Muatan Laporan Report Contents	Sub Muatan Sub Contents	Ketentuan Stipulations	Hal Page
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c) social and community development, among others:               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) local manpower usage;</li> <li>(2) community empowerment around the Issuers or Public Companies among others through the utilization of raw material produced by the communities or education provision;</li> <li>(3) improvement of social facility and infrastructure;</li> <li>(4) other forms of donation; and</li> <li>(5) communication on policy and procedures of anti corruption at the Issuers or Public Companies, as well as training on anti corruption (if any);</li> </ul> </li> <li>d) responsibility on goods and/or services, among others:               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) health and safety of consumers;</li> <li>(2) information on goods and/or services; and</li> <li>(3) facility, total, and resolving of consumers complaint.</li> </ul> </li> </ul> <p>In the event of the Issures or Public Companies presented the above point 1 in a separate report such as social and environmental report of sustainability report, the Issuers or Public Companies are exempted to disclose the social and environmental information in the Annual Report; and</p> <p>The report is submitted to the Financial Services Aurhotrity along with the submission of the Annual Report;</p>	
	<b>Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit</b> Audited Financial Statements	18) Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan berkala Perusahaan Efek dalam hal Emiten merupakan Perusahaan Efek;	600
		18) The Annual financial statemnens stated in the Annual Report is developed with due observance to the Fncial Accounting Standard in Indonesia and has been audited by the Accountant. The financial statements cover the accountability of financial statements as regulated in the Capital Market laws and regulations that regulated the responsibilities of the Board of Directors on the financial statements or Capital Market laws and regulations that regulates the periodical report of Securities Companies in the event of Issuers as the Securities Companies;	600
	<b>Surat Pernyataan BoD dan BoC</b> BoD and BoC Statement Letter	19) Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini	808
		19) Statement letter of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners on the responsibility of the Annual Report developed in accordance with the format of Statement Letter of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners on the Responsibility on the Annual Report as stated in the Enclosure that serves as one part of the Circular Letter of the Financial Services Authority.	808



# KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD 2016

---

Annual Report 2016 Criteria



# Kriteria Annual Report Award 2016

## Annual Report 2016 Criteria

I.	Umum General	Halaman Page
1	Laporan Tahunan disajikan dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam Bahasa Inggris. The Annual Report is presented in prudent Bahasa Indonesia with recommendation to also be presented in English.	√
2	Laporan Tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf mudah dibaca. The Annual Report is printed on brightly colored paper for readability and clarity.	√
3	Laporan Tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas The Annual Report clearly publishes the company's identity.	√
4	Laporan Tahunan ditampilkan di website Perusahaan Annual Report is displayed on the Company's website	√
II.	Ikhtisar Data Keuangan Penting Financial Highlights	Halaman Page
1	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun Information on Company's results of operations in the form of three (3) years comparison or from the start of business, if the Company has conducted business activities for less than 3 (three) years.	30
2	Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun Information on Company's financial position in the form of three (3) years comparison or from the start of business, if the Company has conducted business activities for less than 3 (three) years.	31
3	Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun Financial ratio in the form of three (3) years comparison or from the start of business, if the Company has conducted business activities for less than 3 (three) years.	31

## Kriteria Annual Report Award 2016

Annual Report 2016 Criteria

II.	<b>Ikhtisar Data Keuangan Penting</b> Financial Highlights	Halaman Page
4	Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik. Stock price information in tables and charts.	31
5	Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir Information on outstanding bonds, sukuk or convertible bonds in the last two (2) financial years	32
III.	<b>Laporan Dewan Komisaris dan Direksi</b> Report from the Board of Commissioners and Board of Directors	Halaman Page
1	Laporan Dewan Komisaris Report of the Board of Commissioners	41
		50
		47
		51



Kriteria Annual Report Award 2016  
Annual Report 2016 Criteria

IV.	Profil Perusahaan Company Profile	Halaman Page	
4	Struktur Organisasi Organizational structure	Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah direksi. With chart, including the name and position of at least up to one level below the Board of Directors	98
5	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Company's vision, mission, and corporate culture	Mencakup: Includes: 1. Visi perusahaan; The Company's vision; 2. Misi perusahaan; The Company's mission; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan A statement declaring that the vision and mission has been approved by the Board of Directors/Board of Commissioners, and 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan.	100 100 101 105
6	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris Brief background information of the Board of Commissioners	Informasi memuat antara lain: Information includes, among others: 1. Nama; Name 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); Positions (including position(s) in other companies or institutions) 3. Umur; Age 4. Domisili; Domicile; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); Education 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan Working experience 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk. Date of first appointment as a member of the Board of Commissioners	√ √ √ √ √ √ √
7	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi Brief background information of the Board of Directors	Informasi memuat antara lain: Information includes, among others: 1. Nama; Name 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); Positions (including position(s) in other companies or institutions) 3. Umur; Age 4. Domisili; Domicile; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); Education 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan Working experience 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk. Date of first appointment as a member of the Board of Directors	√ √ √ √ √ √ √

## Kriteria Annual Report Award 2016

## Annual Report 2016 Criteria

IV.	Profil Perusahaan Company Profile	Halaman Page	
8	Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi Number of Employees (2 years comparison) and a description of competence development (eg. Employees' education and training)	Informasi memuat antara lain: Information includes, among others: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; The number of employees for each level of the organization 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; The number of employees for each level of education 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; The number of employees based on employment status; 4. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan Employee trainings that have been conducted to reflect equal opportunities to all employees 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku. Incurred costs	139 139 139 144
9	Komposisi Pemegang Saham Composition of Shareholders	Mencakup antara lain: Includes, among others: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; Names of Top 20 shareholders and its ownership percentage 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: Details of shareholders and ownership percentage comprising: a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan Shareholders' name with 5% shares ownership b. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. Group of public shareholders with less than 5% ownership 3. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. Commissioners and Directors' name with ownership, and Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.	156 159 160
10	Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Sosial List of Subsidiaries and/or Associates	Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain: Information includes, among others: 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; Name of Subsidiaries and/or Associates 2. Persentase kepemilikan saham; Percentage of share ownership 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan Description of the Subsidiaries and/or Associates' business 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi). Information on Subsidiaries and/or Associates operational status (has yet operated or not)	177
11	Struktur grup perusahaan Company's group structure	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV). Company's group structure which describes the structure of subsidiaries, associates, joint ventures and special purpose vehicle (SPV), or a statement of no ownership of group.	182

## Kriteria Annual Report Award 2016

Annual Report 2016 Criteria

IV.	Profil Perusahaan Company Profile	Halaman Page
12	Kronologi penerbitan saham (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku Share Listing Chronology	157
13	Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku Listing chronology of other securities	158-176
14	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang Name and address of capital market institutions and/or professionals	180
		181
		181
15	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional Awards and/or certification received, both national and international	186-187
16	Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada) Name and address of subsidiaries and/or branches or representative (if any)	177
		178
17	Informasi pada Website Perusahaan	

## Kriteria Annual Report Award 2016

## Annual Report 2016 Criteria

IV.	Profil Perusahaan Company Profile	Halaman Page	
18	Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal	Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti): 1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; 2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; 3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; 4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; 5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; 6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan 7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal. yang diikuti pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan	378
V.	Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan Management Discussion and Analysis	Halaman Page	
1	Tinjauan operasi per segmen usaha Review of operations per operational segment	Memuat uraian mengenai: Contains a description of: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. Production/operations; 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: The increase/decrease in production capacity; a. Produksi; Sales / revenue; b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; Profitability; of each business segments, exposed in the form of financial statement (if any) c. Penjualan/pendapatan usaha; dan d. Profitabilitas.	224 234 238 338
2	Uraian atas kinerja keuangan perusahaan Description of the Company's financial performance	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: Financial performance analysis that includes a comparison between the financial performance of the relevant year and with previous years (both in narrative and tables), which covers the following: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; Current assets, non-current assets, and total assets; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; Short-term liabilities, long term liabilities and total liabilities 3. Ekuitas; Equity 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; dan Sales/revenues, expenses, and net income (loss), other comprehensive income, and total Comprehensive Income (loss) 5. Arus kas. Cash Flow	268-271 274-277 279 291 280
3	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan Discussion and analysis of the Company's solvability and receivable collectability level, by presenting the calculation of relevant ratios.	Penjelasan tentang : With details on: 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang Short and long term solvability 2. Tingkat kolektibilitas piutang Receivable Collectability Level	281
4	Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy) Discussion on capital structure and capital structure policy	Penjelasan atas: With details on: 1. Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan Capital structure, 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies); dan Capital structure policies 3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal.	285 285 286

## Kriteria Annual Report Award 2016

Annual Report 2016 Criteria

V.	Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan Management Discussion and Analysis	Halaman Page
5	<p>Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir</p> <p>Discussion on capital goods investment material commitment</p>	<p>Penjelasan tentang: Explanation on:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama pihak yang melakukan ikatan; The purpose of the commitment</li> <li>2. Tujuan dari ikatan tersebut;</li> <li>3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; Expected source of fund to fulfil the respective commitments</li> <li>4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan Currency of denomination</li> <li>5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Steps taken by the company to protect the risk against related foreign currency position.</li> </ol> <p>Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan. Note: Should be disclosed if the company has no material ties in investments in capital goods</p>
6	<p>Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir</p> <p>Discussion of capital investments that were realized in the last financial year</p>	<p>Penjelasan tentang: Explanation on:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis investasi barang modal; Types of capital investments;</li> <li>2. Tujuan investasi barang modal; dan The objectives of capital investments; and</li> <li>3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. The value of capital investments incurred in the last financial year.</li> </ol> <p>Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan. Note: please disclose if there is no realization on capital goods investments.</p>
7	<p>Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan</p> <p>Comparative information between target at the beginning of fiscal year with realization, and target or projection for next one year regarding revenue, income, capital structure, or other aspects considered significant for the Company</p>	<p>Informasi memuat antara lain: Information discloses, as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan Comparison between target at the beginning of fiscal year with the realization</li> <li>2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang. Implemented target or projection in the next one year</li> </ol>
8	<p>Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan</p> <p>Material Information and facts subsequent to the accountant's reporting date</p>	<p>Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Description regarding significant events subsequent the accountant's reporting date, including their impact on future business performance and risks.</p> <p>Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan. Note: Should be disclosed if there is no significant subsequent event after accountant's reporting date.</p>
9	<p>Uraian tentang prospek usaha perusahaan</p> <p>Description on Company's business prospect</p>	<p>Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya. Description on Company's business prospect related with industry and economy in general, supported with supporting quantitative data from accountable data sources.</p>
10	<p>Uraian tentang aspek pemasaran</p> <p>Marketing aspect description</p>	<p>Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar. Information regarding the marketing aspect of the company's products and services, namely marketing and market share strategy</p>

## Kriteria Annual Report Award 2016

## Annual Report 2016 Criteria

V.	Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan Management Discussion and Analysis	Halaman Page	
11	<p>Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir</p> <p>Description regarding the dividend policy as well as date and amount of cash dividend per share and amount of dividend per year as announced or paid during the past two (2) years</p>	<p>Memuat uraian mengenai: Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan pembagian dividen; Policy of dividend payout</li> <li>2. Total dividen yang dibagikan; Amount of dividend</li> <li>3. Jumlah dividen kas per saham Amount of cash dividend per share</li> <li>4. <i>Payout ratio</i>; dan Payout ratio; and</li> <li>5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas untuk masing-masing tahun Date of announcement and cash dividend payout</li> </ol> <p>Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen agar diungkapkan alasannya. Note: if there is no dividend payment, the reasons should be disclosed</p>	296-297
12	<p>Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku</p> <p>Share Ownership by Employees Program, and/or management conducted by the company (ESOP/MSOP)</p>	<p>Memuat uraian mengenai: Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; Amount of ESOP/MSOP shares and its realization;</li> <li>2. Jangka waktu; Time frame;</li> <li>3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan Requirement for the rights of employee and/or management; and</li> <li>4. Harga exercise. Exercise value</li> </ol> <p>Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.</p>	PLN bukan Perusahaan Publik PLN is not a Public Company
13	<p>Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)</p> <p>Public Offering Proceeds realization (regarding the Company is obligated to disclose Public Offering proceeds realization report)</p>	<p>Memuat uraian mengenai: Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Total perolehan dana; Total funds acquired.</li> <li>2. Rencana penggunaan dana; Public Offering Proceeds plan.</li> <li>3. Rincian penggunaan dana; Details of Public Offering Proceeds</li> <li>4. Saldo dana; dan Outstanding Proceeds.</li> <li>5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). Date of GMS Approval on Public Offering Proceeds amendment (if any)</li> </ol> <p>Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.</p>	PLN bukan Perusahaan Publik PLN is not a Public Company
14	<p>Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi</p> <p>Information on material transactions with conflict of interest and/or transactions with related parties.</p>	<p>Memuat uraian mengenai: Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; Name of person performing the transaction and nature of affiliated transaction;</li> <li>2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; Transaction fairness statement</li> <li>3. Alasan dilakukannya transaksi; Reason of the transaction</li> <li>4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; Transaction realization in current period</li> <li>5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan Company's policy related with transaction review mechanism;</li> <li>6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Compliance with regulation and related provision</li> </ol> <p>Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan. Note: if there is no respective transaction, should be disclosed</p>	301-305

## Kriteria Annual Report Award 2016

Annual Report 2016 Criteria

V.	<b>Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan</b> Management Discussion and Analysis	<b>Halaman</b> Page
15	<p>Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir Explanation regarding changes in regulation that holds significant impact to the company</p> <p>Uraian memuat antara lain: 1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan Description should contain, among others: any changes in regulation and its impact on the Company 2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. Note: If there is no change in regulation which have a significant effect, should be disclosed</p>	306-307
16	<p>Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir Explanation regarding changes in accounting policy applied by the Company on the last fiscal year</p> <p>Uraian memuat antara lain: 1. Perubahan kebijakan akuntansi; 2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan 3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. Description should contain among others: changes in accounting policy as well as its reason and impact to the financial statement Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. Note: if there is no change in accounting policy, should be disclosed</p>	308-312
17	<p>Informasi kelangsungan usaha</p> <p>Pengungkapan informasi mengenai: 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment. Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.</p>	312-314
VI.	<b>Good Corporate Governance</b> Good Corporate Governance	<b>Halaman</b> Page
1	<p>Uraian Dewan Komisaris Board of Commissioners description</p> <p>Uraian memuat antara lain: Description includes, as follows: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; Description of the Board of Directors' duties 2. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris atau program orientasi bagi Komisaris baru; dan Training program to enhance Board of Commissioners' competency; and 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris). Disclosure of the Board Charter (Board of Commissioners Manual) disclosure</p>	366 378 365
2	<p>Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris) Information on Independent Commissioners</p> <p>Meliputi antara lain: Includes the following: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan Criteria for the assignment of an independent commissioner; and 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen. Statement of independence of each Independent Commissioner.</p>	374-376



Kriteria Annual Report Award 2016  
Annual Report 2016 Criteria

VI.	Good Corporate Governance Good Corporate Governance	Halaman Page	
8	<p>Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali Disclosure of affiliated relationship between members Board of Directors, members of Board of Commissioners and/or Majority/Controlling Shareholders</p>	<p>Mencakup antara lain: Includes the following: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; Affiliated relationship between Board of Directors and Board of Commissioners members 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Affiliated relationship between Board of Directors members with Majority and/or Controlling Shareholders 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali; Affiliated relationship between Board of Commissioners members 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan Affiliated relationship between Board of Commissioners members with Majority/Controlling Shareholders 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. Affiliated relations between members of the Board of Commissioners with the Major Shareholders and/or Controlling Shareholders Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan. Note: should be disclosed if there is no respective affiliated relationship</p>	467-468
9	Komite Audit Audit Committee	<p>Mencakup antara lain: Includes the following: 1. Nama dan jabatan anggota komite audit; Name and position of Audit Committee members 2. Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota komite audit; Educational qualification and employment history of Audit Committee members 3. Independensi anggota komite audit; Audit committee members independency 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; Duties and responsibilities description 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit; dan Audit committee meeting frequency and attendance level 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit. Meeting frequency and attendance of audit committee</p>	<p>411 411-413 413 415 417</p>
10	Komite Fungsi Nominasi dan Remunerasi Remuneration and Nomination Committee	<p>Mencakup antara lain: Includes the following: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; Name, position, and brief profile of Nomination and/or Remuneration Committee members 2. Independensi komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; Nomination and/or remuneration committee members' independency 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; Description of duties and responsibilities 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; Nomination and/or remuneration committee duties implementation report 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; Nomination and/or remuneration committee meeting frequency and attendance level 6. Pernyataan adanya pedoman komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi Direksi. The Board of Directors' succession policy</p>	<p>428 430 431 431 431 430 432</p>



## Kriteria Annual Report Award 2016

Annual Report 2016 Criteria

VI.	Good Corporate Governance Good Corporate Governance	Halaman Page	
15	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan Description regarding the Company's Risk Management	Mencakup antara lain: Includes the following: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang ditetapkan perusahaan Explanation on Risk Management System 2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko Explanation on Evaluation of Risk Management Processes 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan Explanation of the risks faced by the company 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut Efforts to manage those risks	490-508 491 492-495 508
16	Uraian mengenai sistem pengendalian intern Explanation on Internal Controlling System	Mencakup antara lain: Includes the following: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional Brief explanation regarding internal audit system, including operational and financial audit 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional/ COSO (Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring Activities) Explanation of internal audit system conformity with international recognized framework/COSO (control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring activities) 3. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem pengendalian intern. Explanation regarding evaluation on internal audit system effectiveness	485-487 486 487
17	Uraian mengenai Corporate Social Responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup Description regarding Corporate Social Responsibility on environment.	Mencakup antara lain informasi tentang: Information should include: 1. kebijakan yang ditetapkan manajemen; Policy determined by the management 2. kegiatan yang dilakukan; terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengelolaan limbah perusahaan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah dan lain-lain. Activities performed related to the environmental program that related with Company's operational, such as environmentally friendly and recyclable materials, energy utilization, Company's waste management system and so forth. 3. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki. Certification on environmental sector (if any)	550-561
18	Uraian mengenai Corporate Social Responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja Description regarding corporate social responsibility on workforce and occupational health and safety.	Mencakup antara lain informasi tentang: Information should include: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; Policy determined by the management; 2. Kegiatan yang berlaku; Activities performed terkait praktek ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, dan lain-lain. related to employment practice, occupational health and safety such as gender equality and job opportunity, occupational infrastructure and safety, employee turnover rate, occupational accident rate and so forth.	562 564

## Kriteria Annual Report Award 2016

## Annual Report 2016 Criteria

VI.	Good Corporate Governance Good Corporate Governance	Halaman Page	
19	Uraian mengenai Corporate Social Responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan masyarakat Description regarding corporate social responsibility on social and community.	Mencakup antara lain informasi tentang ; Information should include: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; Policy determined by the management 2. Kegiatan yang dilakukan; dan 3. Biaya yang dikeluarkan terkait pengembangan sosial dan masyarakat, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain. related to product responsibility, customer's health and safety, product information, facility, numbers of and response to customer's complaints, and so forth	573-584 574 574-583
20	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen Description regarding corporate social responsibility on responsibility to customers	Mencakup antara lain: 1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2016 ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.	585
21	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, Entitas anak Direksi dan anggota dewan Komisaris yang menjabat pada periode laporan tahunan Litigation or legal cases faced by the Company, subsidiaries, members of Board of Directors and/or Board of Commissioners serving on the Annual Report period	Mencakup antara lain: Information should include: 1. Pokok perkara/gugatan Description of case/litigation 2. Status penyelesaian perkara/gugatan Case/litigation settlement status 3. Pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan Impacts on the Company's financial condition 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada entitas, anggota Direksi dan Dewan Komisaris, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi) Administration sanctions that have been applied to the entity, Board of Commissioners, Board of Directors, by relevant authorities (capital market, banking, or others) on the last fiscal year (or a statement of no administration sanction applied) Catatan: dalam hal tidak berperkara, agar diungkapkan Notes: Should be disclosed if there's no litigations occurred	529-531
22	Akses informasi dan data perusahaan Information access and corporate data	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin pertemuan dengan analis dan sebagainya Description on access to corporate information and data to the public, for example through website, mass media, mailing list, bulletin etc	205-207
23	Bahasan mengenai kode etik perusahaan Discussion on the Company's Code of Conduct	Memuat uraian antara lain: Containing descriptions, as follows: 1. Isi kode etik; Code of Conduct content 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; Disclosure that the Code of Conduct's is applicable for all organizational level 3. Penyebarluasan kode etik; Dissemination of Code of Conduct 4. Jenis sanksi untuk setiap pelanggaran kode etik; dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan	533-535 532 534 534 534

## Kriteria Annual Report Award 2016

Annual Report 2016 Criteria

VI.	Good Corporate Governance Good Corporate Governance	Halaman Page	
24	Pengungkapan mengenai whistleblowing system Disclosures of the whistleblowing system	Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain: Includes the whistleblowing system mechanism of: 1. Penyampaian laporan pelanggaran; Violation reporting 2. Perlindungan bagi whistleblower; Protection for the whistleblower 3. Penanganan pengaduan; Report handling 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan Report management 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan Result of report handling and report being processed at the last fiscal year and its follow-up pengaduan yang masuk pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan 6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	536-540
25	Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Composicion diversity of the Board of Commissioners and the Board of Directors	Uraian kebijakan perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin Description of the company policy on the composition diveristy of the Board of Commissioners and the Board of Directors in education (field study), working experience, age, and gender Catatan : apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya Note: if there is no policy as stated above, please disclose the reasons and considerations	465-468
VII.	Informasi Keuangan Financial Information	Halaman Page	
1	Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Board of Directors' statement regarding responsibility on the financial statement	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang tanggung jawab atas laporan keuangan Financial Statement compliance with related regulation	604
2	Opini Auditor Independen atas laporan keuangan Independent auditor's opinion on the financial statement.		605-607
3	Deskripsi Auditor Independen di Opini Independent auditor's opinion on the financial statement.	Deskripsi memuat tentang: The description should contain: 1. Nama & tanda tangan Name and signature 2. Tanggal Laporan Audit Audit Report Date 3. No. ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik Public Accountant Office and Individual Public Accountant license number	607
4	Laporan keuangan yang lengkap Comprehensive financial statements	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: Covering a comprehensive financial report materials: 1. Laporan posisi keuangan (neraca) Financial position (balance sheet) report 2. Laporan laba rugi komprehensif Comprehensive income statement 3. Laporan perubahan ekuitas Changes in Equity Report 4. Laporan arus kas Cash Flow Report 5. Catatan atas laporan keuangan Notes on Financial Statements 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas merelklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	608-611 612 613 614 615-805
5	Perbandingan tingkat profitabilitas Profitability ratio comparison	Perbandingan laba/rugi usaha tahun berjalan dengan tahun sebelumnya Comparison of current year's profit/loss with previous year	31, 284, 316

## Kriteria Annual Report Award 2016

## Annual Report 2016 Criteria

VII.	Informasi Keuangan Financial Information	Halaman Page	
6	Laporan Arus Kas Cash flow report	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: Should comply with the following provisions: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan Categorization of three activities: operating, investing, and financing activities 2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi Using direct method to present cash flow from operating activity 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan/atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan Separating the presentation between cash acquisition and or cash expenses on operating, investing and financing activities in current year 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan Non-cash activity disclosure has to be presented in financial statement notes	280-281 614 627 657 647
7	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Accounting policy highlights	Meliputi sekurang-kurangnya: Should include at least: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap PSAK Compliance with FAS 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan Financial statement measurement and preparation foundation 3. Pengakuan pendapatan dan beban Income and expense recognition 4. Imbalan kerja Fixed Asset 5. Instrumen keuangan Financial Instrument	308-312,667 629 658 310 312
8	Pengungkapan transaksi pihak berelasi Affiliated Party transaction disclosure	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: Several aspects disclosed, as follows: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; Name of the affiliated parties, as well as the nature and relationship with the affiliated parties 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan Value of the transaction and the percentage on total related income or expenses 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas. Total balance and the percentage towards total asset or liabilities	632 691-696 267,271,274
9	Pengungkapan yang berhubungan dengan Perpajakan Disclosure on any aspects related with Taxes	Hal-hal yang harus diungkapkan: Several aspects that shall be disclosed, as follows: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; Fiscal reconciliation and calculation of current tax 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; Statement on the relation between Tax expense (income) and accounting income 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPH Badan; Taxable Profit as calculated through reconciliation is in accordance with the Tax Return statement 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan Details of deferred tax assets and liabilities presented in the balance sheet in each period of presentation, and amount of deferred tax expense (income) recognized in the profit loss statement if the said amount is not evident in the asset or liability of deferred tax recognized in the financial position report 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak. Tax dispute disclosure or lack thereof	611 751 748 268-269,608- 609,663-664

## Kriteria Annual Report Award 2016

### Annual Report 2016 Criteria

VII.	Informasi Keuangan Financial Information		Halaman Page
10	Pengungkapan yang berhubungan dengan Aset Tetap Disclosure related to fixed assets	Hal-hal yang harus diungkapkan: Must include disclosures on: 1. Metode penyusutan yang digunakan; Depreciation method used 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; Description of the accounting policies selected between the model and the cost model revaluation 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan Methods and significant assumptions used in estimating the fair value of fixed assets (revaluation model) or disclosure of the fair value of fixed assets (for the cost model) 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi. A reconciliation of the gross carrying amount and accumulated depreciation of fixed assets at the beginning and end of the period that featuring: addition, subtraction and reclassification	646 670,644 670,679 676,677,639
11	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi Disclosure related to segments of operations	Hal-hal yang harus diungkapkan: Must include disclosures on: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; General information which includes the factors used to identify the reported segments 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; Information on profit and loss, assets, and the liabilities of the reported segments 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan Reconciliation of the segments' total revenues, reported segments' profit and loss, assets, liabilities, and other materials towards relevant amount within the entity 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama. Disclosure in entity level, which covers information on product and/or services, geographical location, and major customers	678 678-679 678-679 678-679
12	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan Disclosure regarding the Financial Instruments	Hal-hal yang harus diungkapkan: Should disclose the following: 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya Details of financial instrument classification 2. Nilai wajar tiap kelompok instrumen keuangan Fair value for every financial instrument group 3. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko instrumen keuangan; Objective and Risk Management Policy of Financial Instrument 4. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; dan Explanation of financial instrument inherent risk: market risk, credit risk and liquidity risk 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. Quantitative analysis on every risk related to financial instrument	790 802 790 790 790,802
13	Penerbitan laporan keuangan Issuance of Financial Statements	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: Several aspects shall be disclosed, as follows: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan Date of financial statements issuance 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. Responsible parties in authorizing financial statements	604

# Inspiring Journey of **TRANSFORMATION**

## **PT PLN (Persero)**

Jl. Trunojoyo Blok M-I No. 135  
Kebayoran Baru, Jakarta 12160,  
Indonesia  
Tel. 021 7251234, 7261122  
Fax. 021 7221330